PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH
ꦥꦼꦩꦫꦶꦠꦃꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038
Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 26 Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, maka perangkat daerah perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah;
b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan tahunan perangkat daerah, rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2026, dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(2) Dalam hal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. rancangan rencana program;
   b. kegiatan;
   c. sub kegiatan dan indikator kinerja;
   d. pendanaan indikatif;
   e. lokasi kegiatan; dan
   f. kelompok sasaran.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:
   BAB I : PENDAHULUAN
   BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
   BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
   BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
   BAB V : PENUTUP
(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 26 Tahun 2025
Tanggal 1 Agustus 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SRI RAHAYU PRIHATININGSIH, SH. MPA.
Pembina Tk. I, IV/B
NIP. 19720321 199803 2 010

Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai pendataan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul, tahun 2026 merupakan tahun terakhir dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Berkaitan dengan hal itu, penyusunan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 didasarkan pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan dan sasaran daerah yang telah tercantum dalam kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026. Renja tahun 2026 disempurnakan dengan berpedoman pada rancangan RKPD tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
14. Surat Edaran Bupati Nomor 13 tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 adalah :

1. Untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergi program-program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH
- 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah

Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja sasarannya. Pada tahun 2024, Sekretariat Daerah telah melaksanakan 5 program yang diimplementasikan ke dalam 22 kegiatan dan 59 Sub Kegiatan. Sampai dengan akhir tahun 2024, Sekretariat Daerah telah melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan dengan menyerap anggaran sebesar Rp24.176.392.210,00 atau sebesar 93,74 % dari total anggaran sebesar Rp25.790.123.885,00 Adapun klasifikasi program kegiatan berdasarkan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Realisasi sub kegiatan tahun 2024 dengan deviasi lebih dari 50% terdapat pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dikarenakan hibah untuk Palang Merah Indonesia Kabupaten Gunungkidul belum dapat direalisasikan karena Pengurus PMI yang baru belum terbentuk, PMI Kapanewon Se-kabupaten Gunungkidul untuk masa bhakti 2024-2029 baru dilantik pada Sabtu, 28 September 2024 oleh Ketua PMI Gunungkidul.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. Kondisi tidak dapat diprediksi, semisal kunjungan kerja, jumlah rapat, jumlah tamu, jumlah proposal yang masuk ataupun adanya aturan baru yang berimbas pada proses pelaksanaan kegiatan.
   b. Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, tergantung dari ada tidaknya undangan serta kebutuhan yang perlu dipenuhi.
   c. Kegiatan bantuan hukum tergantung pada jumlah kasus yang perlu ditangani
   d. Hibah belum dapat terealisasi sepenuhnya karena menunggu surat persetujuan Bupati
   e. Kegiatan dengan dana keistimewaan belum sepenuhnya berjalan optimal karena sejalan dengan adanya redesain anggaran dari Paniradya Pemerintah Daerah DIY
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
   a. Lebih mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan dinas terkait
   b. Melalui mekanisme perubahan rincian obyek dan perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan sudah berjalan cukup baik, namun masih ada permasalahan antara lain:

1. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi dalam hal perencanaan dan keuangan serta kurangnya personil di lapangan

Program dan kegiatan di Sekretariat Daerah pada dasarnya telah berjalan dengan baik dan selalu diusahakan untuk dapat mencapai target sasaran. Walaupun program kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah tidak secara langsung mendukung visi dan misi Kabupaten Gunungkidul, namun sesuai tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah dapat membantu pencapaian visi dan misi melalui berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, misalnya kebijakan dalam bidang kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan, bidang pariwisata, sumber daya alam dan lain sebagainya yang terkandung dalam kegiatan perumusan kebijakan umum strategis daerah. Banyaknya kerjasama yang telah dijalin dengan berbagai pihak juga turut serta mendukung pencapaian visi dan misi. Jumlah kunjungan kerja juga dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi, karena daerah lain yang melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sebagian besar juga turut berkontribusi dalam hal capaian jumlah wisatawan.

Adapun capaian program kegiatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan
Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100|Persen	0	100|Persen	100|Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32|Dokumen	0	32|Dokumen	32|Dokumen	100	32 Dokumen	32 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0	2|Dokumen	2|Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	4|Dokumen	4|Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0	2|Dokumen	2|Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0	16|Laporan	16|Laporan	100	17 Laporan	17 Laporan	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	6|Laporan	6|Laporan	100	6 Laporan	6 Laporan	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	38|dokumen	0	38|dokumen	38|dokumen	100	38 Dokumen	38 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0	13|Laporan	13|Laporan	100	13 Laporan	13 Laporan	100
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0	1849|Orang/bulan	1849|Orang/bulan	100	1848 Orang/bulan	1848 Orang/bulan	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	2|Laporan	2|Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian	3|jenis	0	3|jenis	3|jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	10|Paket	10|Paket	100	10 Paket	10 Paket	100
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0	12|Dokumen	12|Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0	186|Orang	186|Orang	100	10 Orang	10 Orang	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terfasilitasi Layanan Administrasi Umum	12|Bulan	0	12|Bulan	12|Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	12|Paket	12|Paket	100	12 Paket	12 Paket	100
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	100|Laporan	100|Laporan	100	200 Laporan	200 Laporan	100
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		0	12|Laporan	12|Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	12|Dokumen	12|Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Terfasilitasi Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12|Bulan	0	12|Bulan	12|Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			0			100			100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3|Unit	0	3|Unit	3|Unit	100			100
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0	200|unit	200|unit	100	100 Unit	100 Unit	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	3|Unit	3|Unit	100	3 Unit	3 Unit	100
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Pemenuhan Keuangan dan Operasional KDH WKDH	14|Bulan	0	14|Bulan	14|Bulan	100	14 Bulan	14 Bulan	100
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0	2|Orang/Bulan	2|Orang/Bulan	100	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		0	1|Paket	1|Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Bulan Layanan Kebutuhan Kerumahtanggaan Setda	12|Bulan	0	12|Bulan	12|Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		0	12|Paket	12|Paket	100	12 Paket	12 Paket	100
X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		0	12|Paket	12|Paket	100	12 Paket	12 Paket	100
X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		0	12|Paket	12|Paket	100	12 Paket	12 Paket	100
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Jenis Dokumen Penataan Organisasi	14|Jenis	0	14|Jenis	14|Jenis	100	14 Jenis	14 Jenis	100
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		0	3|Dokumen	3|Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		0	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		0	7|Dokumen	7|Dokumen	100	7 Dokumen	7 Dokumen	100
X.XX.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		0	3|Dokumen	3|Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Jenis Layanan Kepala Daerah yang Terfasilitasi dengan Baik	2|Jenis	0	2|Jenis	2|Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		0	12|Laporan	12|Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		0	12|Laporan	12|Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		0	12|Laporan	12|Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	8|persen	0	8|persen	8|persen	100	8 persen	8 persen	100
2.10.11.2.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah batas desa yang ditegaskan (Desa)	14|desa	0	14|desa	14|desa	100	14 desa	14 desa	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.10.11.2.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat		0	1|Dokumen	1|Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	100|persen	0	100|persen	100|persen	100	100 Persen	100 Persen	100
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah jenis dokumen administrasi tata pemerintahan	8|jenis	0	8|jenis	8|jenis	100	8 jenis	8 jenis	100
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		0	3|Dokumen	3|Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		0	1|Dokumen	1|Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		0	6|Dokumen	6|Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Jenis Dokumen Kesra yang diterapkan	3|jenis	0	3|jenis	3|jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		0	30|Dokumen	30|Dokumen	100	30 Dokumen	30 Dokumen	100
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan		0	8|Dokumen	8|Dokumen	100	8 Dokumen	8 Dokumen	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		0	10|Dokumen	10|Dokumen	100	10 Dokumen	10 Dokumen	100
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Jenis Dokumen Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	3|jenis	0	3|jenis	3|jenis	100	4 Jenis	4 Jenis	100
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		0	45|Dokumen	45|Dokumen	100	45 Dokumen	45 Dokumen	100
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		0	2|Kasus	2|Kasus	100	2 Kasus	2 Kasus	100
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		0	45|Dokumen	45|Dokumen	100	45 Dokumen	45 Dokumen	100
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Kerjasama	3|jenis	0	3|jenis	3|jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	100
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		0	36|Dokumen	36|Dokumen	100	36 Dokumen	36 Dokumen	100
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang	100|persen	0	100|persen	100|persen	100	100 Persen	100 Persen	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan								
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Jenis Dokumen Rumusan kebijakan Pemda Bidang Perekonomian	3|jenis	0	3|jenis	3|jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	100
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		0	3|Dokumen	3|Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		0	12|Laporan	12|Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		0	2|Dokumen	2|Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Jenis Dokumen Bidang Perekonomian	2|jenis	0	2|jenis	2|jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		0	2|Dokumen	2|Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		0	24|Laporan	24|Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		0	12|Laporan	12|Laporan	100	16 Laporan	16 Laporan	100
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2|jenis	0	2|jenis	2|jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		0	12|Dokumen	12|Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		0	1|Dokumen	1|Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		0	3|Orang	3|Orang	100	500 Orang	500 Orang	100
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Jenis Dokumen Rumusan Kebijakan Pemda Bidang SDA	2|jenis	0	2|jenis	2|jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		0	1|Dokumen	1|Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		0	1|Dokumen	1|Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100|persen	0	100|persen	100|persen	100	100 Persen	100 Persen	100
4.01.04.2.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Jumlah dokumen Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	1|dokumen	0	1|dokumen	1|dokumen	100	1 Jenis	1 Jenis	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.04.2.09.02	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan		0	47|Lembaga	47|Lembaga	100	32 Lembaga	32 Lembaga	100
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Jenis Dokumen Penataan Kelembagaan Keistimewaan	4|jenis	0	4|jenis	4|jenis	100	5 jenis	5 jenis	100
4.01.04.5.01.03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota		0	18|Lembaga	18|Lembaga	100	10 Lembaga	10 Lembaga	100
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		0	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.01.04.5.01.08	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan		0	4|Dokumen	4|Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Kelompok Budaya Pemerintahan yang Direview	47|kelompok	0	47|kelompok	47|kelompok	100	47 KBP	47 KBP	100
4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		0	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat daerah terdiri dari 4 (empat) indikator. Indikator ini telah disesuaikan dengan dokumen rencana Strategis serta susunan organisasi perangkat daerah yang baru. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah telah disahkan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 349/KPTS/2021.

Adapun rincian indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah deviden yang diterima oleh pemerintah daerah per tahun	Rupiah	20.959.401.847	21.569.401.847	22.179.401.847	22.339.618.383	16.354.125.672	18.349.045.772	22.179.401.847	22.339.618.383	
2	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti pada perencanaan tahun n+1	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai AKIP	Skor	82	82,75	83	83,5	82,66	82,80	83	83,5	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Perumusan isu penting terkait penyelenggaran tugas dan fungsi PD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.

Analisis lingkungan strategis dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah menggunakan pendekatan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan menggunakan teknik analisis yang mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu organisasi, yang selanjutnya dikelompokkan menjadi faktor *internal* dan faktor *eksternal.*

1. Lingkungan internal meliputi :

a. kekuatan (*Strengths*), yaitu faktor-faktor yang ada pada organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan. Kekuatan yang dimaksud antara lain:
   - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
   - Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah
   - Kualitas Sumber Daya Aparatur
   - Tingginya Motivasi dan Semangat Kerja.

b. kelemahan (*Weaknesses*), yaitu segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi dan melemahkan posisi suatu organisasi. Kelemahan antara lain:
   - Belum optimalnya koordinasi internal
   - Belum optimalnya pola hubungan kerja dan koordinasi perumusan kebijakan daerah
   - Keterbatasan data dan informasi
   - Belum optimalnya sosialisasi produk-produk perundang-undangan daerah
   - Kurangnya sarana dan prasarana

2. Lingkungan eksternal meliputi :

a. peluang (*Opportunities*), yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang memberikan kemungkinan organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar. Salah satu peluang yang ada adalah adanya kerjasama antar daerah dan dengan lembaga lain, sehingga meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam pengelolaan pemerintahan

b. ancaman (*Threats*), yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang membahayakan atau mengancam eksistensi suatu organisasi. Yang dimaksud dengan ancaman antara lain: keterlambatana penyempaian data dan laporan dari dinas/instansi, permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang semakin kompleks serta belum optimalnya keterpaduan program dan kegiatan antar dinas/instansi.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat

diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional. Adapun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Memperluas penyebaran data dan informasi tentang kebijakan daerah dan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat
3. Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Mendorong peningkatan pelayanan di bidang Hukum dan HAM dan tersedianya jaringan informasi hukum
5. Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peningkatan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah terkait bidang ekonomi dan sumber daya alam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Untuk menyempurnakan Rencana Kerja yang telah disusun, telah dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat kalurahan sampai dengan kapanewon, selanjutnya untuk mengakomodir masukan-masukan dari proses yang ada, dilaksanakanlah Forum Lintas Perangkat Daerah untuk membahas usulan-usulan tersebut. Di samping adanya masukan dan usulan dari masyarakat, juga terdapat kebijakan terkait penggunaan anggaran sehingga perlu adanya penyesuaian dalam dokumen Rencana Kerja.

Untuk tahun 2026, Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sebesar Rp25.000.204.222,00 yang terdiri dari Rp23.440.204.222,00 bersumber dari APBD dan Rp 1.560.000.000,00 dari dana BKK. Dengan adanya Surat Edaran Bupati Nomor 13 tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026, pagu anggaran Sekretariat Daerah berkurang menjadi Rp7.000.000.000,00 untuk pendanaan kegiatan non gaji, Rp8.677.798.871 untuk gaji ASN yang bersumber dari APBD dan Rp981.995.000,00 yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Pagu ini belum termasuk untuk gaji KDH/WKDH.

Selanjutnya, dengan perhitungan yang lebih mendalam, maka kebutuhan dana indikatif pada Sekretariat Daerah juga mengalami perubahan dengan besaran total anggaran Rp19.929.082.855,00 sudah termasuk belanja gaji dan dana keistimewaan yang digunakan untuk program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan namun belum termasuk program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan

Adapun penyesuaian yang dilakukan pada rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN PERTANAHAN	Kabupaten Gunungkidul	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	100 Persen	550.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Kabupaten Gunungkidul	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	23,24 persen	520.730.000,00
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kabupaten Gunungkidul	persentase batas desa yang ditegaskan	8 Persen	530.000.000,00	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kabupaten Gunungkidul	jumlah batas desa yang ditegaskan	14 desa	520.730.000,00
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	530.000.000,00	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	4 Dokumen	520.730.000,00
	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kabupaten Gunungkidul	Persentase sarana dan prasarana keistimewaan urusan pertanahan yang tersedia	100 Persen	20.000.000,00					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	2 Unit	20.000.000,00					
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Gunungkidul	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	18.917.505.317,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Gunungkidul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,5 Nilai	17.533.175.555,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	54.813.908,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun		44.980.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	29.867.640,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	36.980.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.539.770,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.866.728,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.866.728,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.866.728,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	1.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.806.314,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 Persen	11.252.943.784,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Layanan administrasi keuangan perangkat daerah		9.478.017.135,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1848 Orang/bulan	11.160.760.387,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1848 Orang/bulan	9.420.762.135,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.828.375,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	89.355.022,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	54.255.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	247.161.831,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Layanan ASN yang tertangani		59.945.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	196 Paket	107.336.831,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	4.946.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	40.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	34.999.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	99.825.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Persentase administrasi umum terlayani	100 Persen	1.720.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Layanan administrasi umum perangkat daerah		854.793.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	170.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	120.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	750.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	395.760.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	700.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	307.034.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	100.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	12 Dokumen	31.999.000,00

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Dinamis pada SKPD		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	100 Persen	201.312.750,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		217.864.458,00
	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	24.157.650,00	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	10.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	177.155.100,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	207.864.458,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Persentase pemenuhan keuangan dan operasional KDH WKDH	100 Persen	909.699.170,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Fasilitasi pemenuhan keuangan KDh/WKDH		885.040.720,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	875.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	834.920.720,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	34.699.170,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	50.120.000,00
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Persentase kebutuhan kerumahtanggaan setda yang terpenuhi		3.571.170.859,00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Fasilitasi pemenuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		4.369.718.242,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	415.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	374.400.000,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	310.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	280.800.000,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	2.846.170.859,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	3.714.518.242,00
	Penataan Organisasi	Kabupaten Gunungkidul	Nilai IKM Kabupaten	84,55 Indeks	285.552.740,00	Penataan Organisasi	Kabupaten Gunungkidul	Dokumen Penataan Organisasi		82.124.000,00
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	65.618.000,00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	5.000.000,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	21.495.000,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	5.000.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Dokumen	106.233.765,00	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Dokumen	37.125.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	92.205.975,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	34.999.000,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Gunungkidul	Persentase ketugasan kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik	100 Persen	674.850.275,00	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Gunungkidul	Laporan Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan		1.540.693.000,00
	Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	410.680.000,00	Fasilitasi Keprotokolan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	403.586.000,00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	214.956.500,00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.135.107.000,00

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	49.213.775,00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	2.000.000,00
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kabupaten Gunungkidul	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	100 Persen	3.045.391.883,00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kabupaten Gunungkidul	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	1.566.762.300,00
	Administrasi Tata Pemerintahan	Kabupaten Gunungkidul	Nilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	3 nilai	549.440.128,00	Administrasi Tata Pemerintahan	Kabupaten Gunungkidul	Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan		402.871.000,00
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	194.761.903,00	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	149.997.500,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	83.154.225,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	5.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	271.524.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	247.873.500,00
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Gunungkidul	Persentase kebijakan kesra yang diterapkan	100 Persen	2.135.104.350,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kabupaten Gunungkidul	Dokumen hasil fasilitasi dan kebijakan kesejahteraan rakyat		917.516.500,00
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30 Dokumen	1.262.786.250,00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30 Dokumen	897.516.500,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	8 Dokumen	169.550.101,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	8 Dokumen	10.000.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	10 Dokumen	702.767.999,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	10 Dokumen	10.000.000,00
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Gunungkidul	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100 Persen	270.000.000,00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kabupaten Gunungkidul	Dokumen Produk Hukum Daerah		236.374.900,00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	62 Dokumen	120.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	45 Dokumen	19.999.900,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	100.000.000,00	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	196.375.000,00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	62 Dokumen	50.000.000,00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	45 Dokumen	20.000.000,00
	Fasilitasi Kerja Sama	Kabupaten	Persentase kerjasama yang	100 Persen	90.847.405,00	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Dokumen Hasil Fasilitasi		9.999.900,00

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Daerah	Gunungkidul	ditindaklanjuti					dan Evaluasi Kerjasama		
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	36 Dokumen	90.847.405,00	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	36 Dokumen	5.000.000,00
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	4.999.900,00
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Gunungkidul	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	100 Persen	1.477.307.022,00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Gunungkidul	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan pembanguan	100 Persen	380.355.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kabupaten Gunungkidul	Dokumen rumusan kebijakan pemda bidang perekonomian	14 Dokumen	651.670.538,00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kabupaten Gunungkidul	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		15.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	316.112.500,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	5.000.000,00
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	150.000.000,00	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	5.000.000,00
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	185.558.038,00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	5.000.000,00
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kabupaten Gunungkidul	Serapan anggaran program dan kegiatan perangkat daerah	95 Persen	314.967.840,00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kabupaten Gunungkidul	Dokumen Administrasi Pembangunan		110.355.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	179.205.840,00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	40.355.000,00
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24 Laporan	67.881.000,00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	10.000.000,00
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	67.881.000,00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	60.000.000,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Gunungkidul	Persentase pelaku pengadaan yang terfasilitasi	100 Persen	450.000.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Gunungkidul	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa		250.000.000,00
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	150.000.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	150.000.000,00
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	150.000.000,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	50.000.000,00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang	150.000.000,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	500 Orang	50.000.000,00
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah rumusan kebijakan pemda dibidang SDA	10 Dokumen	60.668.644,00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kabupaten Gunungkidul	Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam		5.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,	1 Dokumen	24.889.700,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,	2 Dokumen	2.500.000,00

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja					Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	35.778.944,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	2.500.000,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kabupaten Gunungkidul	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 Persen	1.010.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kabupaten Gunungkidul	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100 Persen	448.790.000,00
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kabupaten Gunungkidul	Persentase pemenuhan penataan kelembagaan keistimewaan	100 Persen	690.000.000,00	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kabupaten Gunungkidul	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		187.498.000,00
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	18 Lembaga	180.000.000,00	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	10 Lembaga	92.426.000,00
	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	3 Dokumen	110.000.000,00					
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen	100.000.000,00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	1 Dokumen	21.280.000,00
	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	1 Dokumen	300.000.000,00	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	4 Dokumen	73.792.000,00
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kabupaten Gunungkidul	persentase peningkatan budaya pemerintahan	100 Persen	300.000.000,00	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kabupaten Gunungkidul	Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan		77.465.000,00
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	77.465.000,00
						Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Kabupaten Gunungkidul	Laporan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan		48.069.000,00
						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	8 Laporan	48.069.000,00
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Kabupaten Gunungkidul	Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan		135.758.000,00
						Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	47 Lembaga	135.758.000,00

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,00)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kabupaten Gunungkidul	Persentase sarana dan prasarana keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksaan yang tersedia	100 Persen	20.000.000,00					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00					
	Jumlah				25.000.204.222,00					20.449.812.855,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD. Ke-10 prioritas nasional tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, serta pembangunan wilayah dan politik, hukum serta pertahanan keamanan. Setda selaku Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah mempunyai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas tersebut. Adapun prioritas pembangunan yang dilaksanakan adalah ekonomi dan pariwisata, social budaya dan penanggulangan kemiskinan, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk sasaran PD dirumuskan dengan berdasar pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD. Sekretariat Daerah mendukung 1 (satu) prioritas daerah serta 1 (satu) indikator sasaran daerah, yang kemudian dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra PD. Adapun tujuan PD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan Sekretariat Daerah

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2030
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi General (Indeks)	79,80

Tabel 3.2

Sasaran Sekretariat Daerah

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran tahun 2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) (Skor)	3.0922
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	95.76
		Persentase Capaian Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah (%)	98.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (Indeks)	82.38

Selanjutnya, terdapat indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah sesuai tabel berikut:

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2026

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi General (Indeks)	78,50
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) (Skor)	3.0922
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	95.76
		Persentase Capaian Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah (%)	98.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten (Indeks)	82.38

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan program dan kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Rencana kerja tahunan ini berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Visi Kepala Daerah tahun 2025-2029 :

““Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban.”

Misi Kepala Daerah tahun 2025-2029 :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan kerkeadaban.
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada visi Kabupaten

Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah: “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Program Bocah Pinter;
2. Program Warga Sehat;
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya;
4. Program Gunungkidul Berdikari;
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi;
6. Program Warga Gayeng dan Guyub;
7. Program Alam Lestari.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Sekretariat daerah, yang mana Sekretariat Daerah memiliki fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan. Selain itu, karena adanya perubahan pada susunan perangkat daerah, maka Sekretariat Daerah memiliki kegiatan yang tidak dimiliki oleh Perangkat Daerah lain. Penyelarasan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.

Prioritas, sasaran daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah

Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4.01	SEKRETARIAT DAERAH	19.929.082.855,00	
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya system penyelenggaraan pemerintah efektif, efisien dan akuntabel	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	82,38	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.533.175.555,00	Sekretariat Daerah
					4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.980.000,00	
					4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.980.000,00	
					4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	
					4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	
					4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	
					4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00	
					4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	
					4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	
					4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.478.017.135,00	
					4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.420.762.135,00	
					4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	
					4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54.255.000,00	
					4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.945.000,00	
					4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.946.000,00	
					4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.999.000,00	
					4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	
					4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	854.793.000,00	
					4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan	120.000.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Perlengkapan Kantor		
					4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	395.760.000,00	
					4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.034.000,00	
					4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	31.999.000,00	
					4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.864.458,00	
					4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	
					4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	207.864.458,00	
					4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	885.040.720,00	
					4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	834.920.720,00	
					4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.120.000,00	
					4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.369.718.242,00	
					4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	374.400.000,00	
					4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	280.800.000,00	
					4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.714.518.242,00	
					4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	82.124.000,00	
					4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5.000.000,00	
					4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5.000.000,00	
					4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	37.125.000,00	
					4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	34.999.000,00	
					4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.540.693.000,00	
					4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	403.586.000,00	
					4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.135.107.000,00	
					4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2.000.000,00	
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,0922	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.566.762.300,00	Sekretariat Daerah
					4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	402.871.000,00	
					4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	149.997.500,00	
					4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi	5.000.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Kewilayahan		
					4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	247.873.500,00	
					4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	917.516.500,00	
					4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	897.516.500,00	
					4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.000.000,00	
					4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	10.000.000,00	
					4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	236.374.900,00	
					4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	19.999.900,00	
					4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	196.375.000,00	
					4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	20.000.000,00	
					4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	9.999.900,00	
					4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5.000.000,00	
					4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4.999.900,00	
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	95,76	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	380.355.000,00	Sekretariat Daerah
			Persentase Capaian Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Daerah	98	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	15.000.000,00	
					4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5.000.000,00	
					4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5.000.000,00	
					4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5.000.000,00	
					4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	110.355.000,00	
					4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	40.355.000,00	
					4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10.000.000,00	
					4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60.000.000,00	
					4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000,00	
					4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150.000.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50.000.000,00	
					4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000,00	
					4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	5.000.000,00	
					4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2.500.000,00	
					4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2.500.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	82,38	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	448.790.000,00	Sekretariat Daerah
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	187.498.000,00	
					4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	92.426.000,00	
					4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	21.280.000,00	
					4.01.04.5.01.0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	73.792.000,00	
					4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	77.465.000,00	
					4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	77.465.000,00	
					4.01.04.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	48.069.000,00	
					4.01.04.5.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	48.069.000,00	
					4.01.04.5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	135.758.000,00	
					4.01.04.5.09.0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	135.758.000,00	
							19.929.082.855,00	

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Sekretariat Daerah merencanakan melaksanakan 4 Program, 21 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan pada tahun 2026.
2. Lokasi pelaksanaan program berada di seluruh Kabupaten Gunungkidul dan luar daerah. Kegiatan yang menyasar di seluruh kawasan Gunungkidul antara lain penyuluhan hukum, pemetaan wilayah,pemasangan patok batas daerah, dan survey kepuasan masyarakat. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan di luar Gunungkidul antara lain kegiatan kerjasama, konsultasi ke kementerian, studi banding dan lain sebagainya.
3. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif sebesar Rp19.929.082.855,00 yang bersumber dari APBD dan dari Dana keistimewaan.

Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2026

dan Prakiraan Maju tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEKRETARIAT DAERAH				20.449.812.855,00				27.141.892.409,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				19.929.082.855,00				26.645.403.909,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				19.929.082.855,00				26.645.403.909,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		83,5 Nilai	17.533.175.555,00			83,5 Nilai	22.489.117.909,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun			44.980.000,00				99.648.800,00
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	36.980.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	73.780.300,00
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	1.550.000,00
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	1.550.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	2.450.000,00
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	3.018.500,00
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17 Laporan	10.500.000,00
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	6.800.000,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan administrasi keuangan perangkat daerah			9.478.017.135,00				9.450.601.449,00
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1848 Orang/bulan	9.420.762.135,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1848 Orang/bulan	9.351.031.449,00
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	5.250.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	54.255.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Laporan	94.320.000,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Layanan ASN yang tertangani			59.945.000,00				278.207.760,00
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	4.946.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Paket	12.960.000,00
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	34.999.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	105.247.760,00
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	20.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Orang	160.000.000,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan administrasi umum perangkat daerah			854.793.000,00				2.162.895.000,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	120.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	121.565.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	395.760.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.000.000.000,00
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Laporan	307.034.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200 Laporan	1.000.000.000,00
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	31.999.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	41.330.000,00
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			217.864.458,00				708.371.700,00
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit	10.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Unit	25.000.000,00
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	207.864.458,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	683.371.700,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Fasilitasi pemenuhan keuangan KDh/WKDH			885.040.720,00				736.371.700,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang/Bulan	834.920.720,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Orang/Bulan	683.371.700,00
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	50.120.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	53.000.000,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi pemenuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			4.369.718.242,00				6.271.520.500,00
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	374.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	374.400.000,00
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	280.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	280.800.000,00
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	3.714.518.242,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	5.616.320.500,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Penataan Organisasi			82.124.000,00				202.358.000,00
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	10.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	15.000.000,00
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	37.125.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Dokumen	48.630.000,00
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	34.999.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	128.728.000,00
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan			1.540.693.000,00				2.579.143.000,00
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	403.586.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	756.345.000,00
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.135.107.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.802.298.000,00
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	20.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100 Persen	1.566.762.300,00			100 Persen	2.554.494.000,00
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan			402.871.000,00				627.994.000,00
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	149.997.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	299.900.000,00
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	47.650.000,00
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	247.873.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	280.444.000,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen hasil fasilitasi dan kebijakan kesejahteraan rakyat			917.516.500,00				1.413.500.000,00
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	897.516.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Dokumen	1.263.050.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	10.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Dokumen	76.550.000,00
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Dokumen	73.900.000,00
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Dokumen Produk Hukum Daerah			236.374.900,00				374.750.000,00
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Dokumen	19.999.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45 Dokumen	40.000.000,00
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kasus	196.375.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Kasus	300.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Dokumen	20.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45 Dokumen	34.750.000,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Dokumen Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama			9.999.900,00				138.250.000,00
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Dokumen	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Dokumen	123.150.000,00
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.999.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	15.100.000,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan pembanguan		100 Persen	380.355.000,00			100 Persen	1.203.815.000,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			15.000.000,00				175.125.000,00
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	48.000.000,00
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	81.800.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	45.325.000,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen Administrasi Pembangunan			110.355.000,00				254.340.000,00
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	40.355.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	141.220.000,00
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	52.400.000,00
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Laporan	60.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 Laporan	60.720.000,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa			250.000.000,00				709.850.000,00
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	150.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	454.170.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	56.700.000,00
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500 Orang	198.980.000,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam			5.000.000,00				64.500.000,00
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	32.250.000,00
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	32.250.000,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100 Persen	448.790.000,00			100 Persen	397.977.000,00
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			187.498.000,00				189.185.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.04.5.01.0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Lembaga	92.426.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		10 Lembaga	121.762.000,00
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	21.280.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		1 Dokumen	29.155.000,00
4.01.04.5.01.0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	73.792.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		4 Dokumen	38.268.000,00
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan			77.465.000,00				124.835.000,00
4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	77.465.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		2 Dokumen	124.835.000,00
4.01.04.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Laporan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan			48.069.000,00				43.833.000,00
4.01.04.5.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	48.069.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		8 Laporan	43.833.000,00
4.01.04.5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan			135.758.000,00				40.124.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.04.5.09.0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Lembaga	135.758.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		47 Lembaga	40.124.000,00
					19.929.082.855,00				26.645.403.909,00

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian

yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

SEKRETARIAT DAERAH,

ttd

SRI SUHARTANTA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RANCANGAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kepala Daerah membuat Surat Edaran 42 Tahun 2024 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Hal ini mengamanatkan adanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pada setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) PD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyusun rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun

2021 - 2026, Menurut Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan ditindaklanjuti Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

a. Pengertian Rencana Kerja PD

Rencana Kerja PD adalah salah satu dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang secara substansial memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul, bahwa untuk mewujudkan visi, misi kepala daerah masing-masing Perangkat Daerah (PD) wajib merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang telah terlaksana dalam satu tahun dan sejauh mana capaian kinerja terhadap target-target yang telah tertuang pada RPJMD.

b. Proses Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Penyusunan rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dalam melaksanakan dan mencapai target program dan kegiatan dalam tahun 2026, Tahapan-tahapan proses penyusunan rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan Rancangan Penyusunan Rencana Kerja PD.

Sebelum Rancangan RKPD diterima, Sekretariat DPRD menyusun rancangan Renja yang mencakup usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2026. Tahap persiapan melakukan identifikasi para pemangku kepentingan, pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD, pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan mempersiapkan bahan Forum Koordinasi Perangkat Daerah, serta pengisian formulir Daftar Usulan Rencana Program dan Kegiatan (DURPK), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja PD, serta melakukan analisa dan hubungan antar dokumen meliputi RKP Nasional dan RKPD

Kabupaten, RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, terhadap RPJMD dan Renstra PD, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD.

b. Tahap Penyusunan Rancangan Renja PD.

Penyusunan rancangan renja ini dilakukan sebagai langkah penyusunan Rencana Kerja PD yang berdasarkan Renstra PD sebelum ada masukan dari berbagai pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan musrenbang dan forum Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

c. Tahap Pelaksanaan Forum PD.

Forum PD dilaksanakan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan terhadap Rancangan Renja PD.

d. Tahap Penetapan Renja PD.

Rancangan Renja yang sudah diverifikasi dan diajukan kepada Kepala Daerah oleh Bappeda, akan mendapat pengesahan, selanjutnya rancangan Renja akan ditetapkan oleh Kepala PD.

c. Keterkaitan Renja PD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dalam Proses Penyusunan RAPBD dapat digambarkan sebagai berikut :

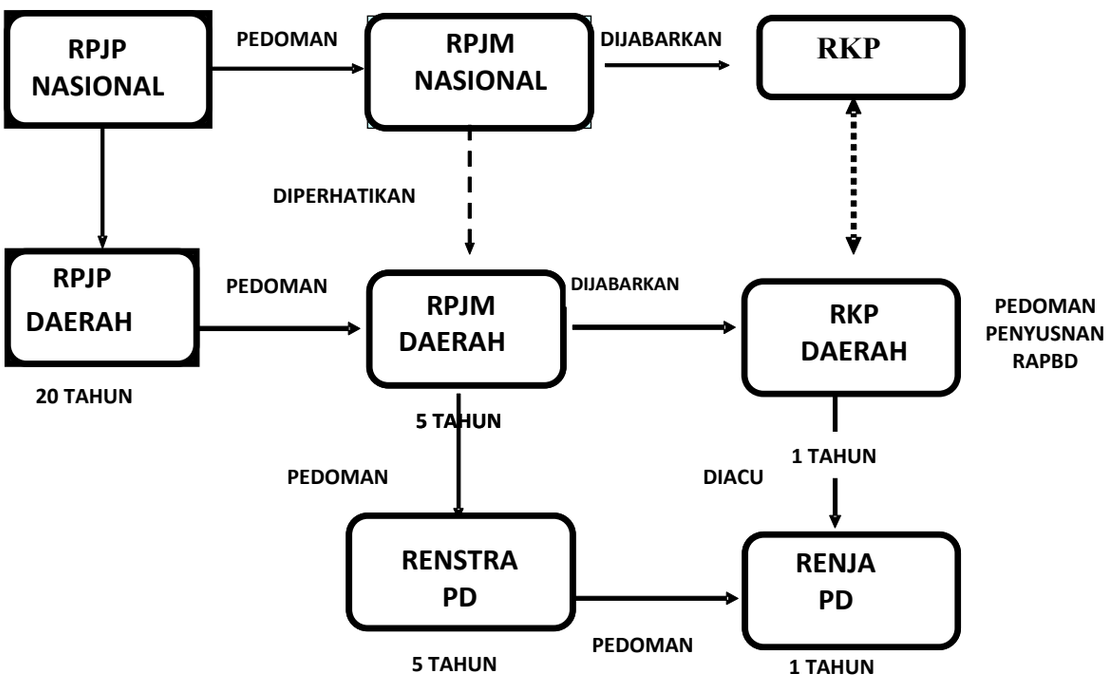

Bagan 1.1

Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lain

1.2 LANDASAN HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
17 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
18 Surat Edaran Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempuraan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan Sekretariat DPRD.

Adapun **tujuan** penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah:

1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul;
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan;
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi bagian-bagian dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD;
4. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sesuai acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- 4.2 Uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul yang diusulkan pada tahun 2026 sejumlah 2 (dua) program yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan, dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan. Evaluasi dan analisis capaian Renja tahun 2024 yang dijabarkan dalam 2 (dua) program terdapat satu program yang merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD yaitu Kualitas layanan bidang administrasi dan keuangan bagi anggota DPRD meningkat, dengan jenis program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Sementara peningkatan kualitas pelayanan bidang administrasi dan keuangan merupakan bagian utama dalam pelayanan untuk peningkatan *human capital,* mengingat peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fasilitator dan pelayan administrasi dan keuangan DPRD. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 telah terlaksana dengan beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Tersebut Rincian evaluasi pelaksananaan Renja Tahun 2024 sampai dengan triwulan IV dan Rincian evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan :

Berdasarkan indikator pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 triwulan IV ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target karena kegiatan masih berjalan. Adapun uraian realisasi program kegiatan yang tidak mencapai target kinerja anggaran tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adapun evaluasi masing-masing sub kegiatan adalah sebagai berikut :
   1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan dimana realisasi capaian, adalah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

         Pelaksanaan sub kegiatan gaji dan tunjangan ASN pada tahun 2024 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 95%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran 97%.

2. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Pada kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD terdapat 3 sub kegiatan dengan capaian kinerja yang dapat memenuhi target, yaitu :

a. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Pada sub kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD pada tahun 2024 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 36%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 29%.

3. Layanan Administrasi DPRD

Untuk kegiatan layanan administrasi DPRD terdiri dari 2 sub kegiatan dengan capaian kinerja masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Pada sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 75% demikian juga dengan realisasi anggaran juga dapat terealisasi sebesar 75%.

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD adapun evaluasi masing-masing sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas DPRD

Untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri dari 5 sub kegiatan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

a. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pada pelaksanaan sub kegiatan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 74%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 75%.

b. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pada pelaksanaan sub kegiatan penyediaan tenaga ahli fraksi pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 92%. demikian juga dengan realisasi anggaran juga dapat terealisasi sebesar 92%.

c. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Pada pelaksanaan sub kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 75%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 83%.

2. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Untuk kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD terdiri dari 2 sub kegiatan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

a. Pengawasan Kode Etik DPRD

Pada pelaksanaan sub kegiatan pengawasan kode etik DPRD pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja terlaksana 0%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 0%.

2.1.2 Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 Triwulan IV sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan dapat memenuhi target kinerja keluaran, adapun rincian program kegiatan tersebut antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adapun evaluasi masing-masing sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan antara lain :

   a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

   Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 apabila dilihat dari realisasi kinerja dapat terlaksana 100%, tetapi dari realisasi anggaran tidak dapat terserap maksimal yaitu sebesar 97%.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

   Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 apabila dilihat dari realisasi kinerja dapat terlaksana 100%, tetapi dari realisasi anggaran tidak dapat terserap maksimal yaitu sebesar 99%.

   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

   Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2024 apabila dilihat dari realisasi kinerja dapat terlaksana 100%, tetapi dari realisasi anggaran tidak dapat terserap maksimal yaitu sebesar 100%.

   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

   Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD pada tahun 2024 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, demikian juga dengan realisasi anggaran juga dapat terealisasi sebesar 100%, sehingga dari segi capaian keuangan maupun kinerja dapat terealisasi sebesar 100%.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

   Pelaksaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD pada tahun 2024 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, tetapi dari realisasi anggaran tidak dapat terserap maksimal yaitu sebesar 97%.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada tahun 2024 dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran 100%.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Pelaksaaan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah pada tahun 2024 dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

      Pelaksaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun pada tahun 2024 dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran 100%.

   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

      Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD pada tahun 2024 dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan untuk serapan anggaran sebesar 97%.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

      Pelaksaan sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan serapan anggaran sebesar 82%.

   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

      Pelaksanaan sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan serapan anggaran sebesar 62%.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

       Pelaksanaan sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan serapan anggaran sebesar 99%.
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

       Pelaksanaan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 83%.
    c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

       Pelaksanaan sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 87%.
    d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

       Pelaksanaan sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 96%.
    e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

       Pelaksanaan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 85%.
    f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

       Pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 96%.
    g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

       Pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 73%.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdapat 1 sub kegiatan dengan capaian kinerja yang dapat memenuhi target, yaitu:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

   Pelaksaaan sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 83%.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdapat 3 sub kegiatan dengan capaian kinerja yang dapat memenuhi target, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

      Pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 97%.

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

      Pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 39%.

   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

      Pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 96%.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdapat 4 sub kegiatan dengan capaian kinerja yang dapat memenuhi target, yaitu:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

      Pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 87%.

   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 98%.

c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 96%.

d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pelaksanaan sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya pada tahun 2024 capaian kinerja dapat terlaksana 100%, dengan serapan anggaran sebesar 15%.

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Pada kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD terdapat 2 sub kegiatan dengan capaian kinerja yang dapat memenuhi target, yaitu :

a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Pada sub kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD pada tahun 2024 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 99%.

b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Pada sub kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD pada tahun 2024 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 91%.

9. Layanan Administrasi DPRD

a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada sub kegiatan fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada tahun 2024 dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 67%.

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD adapun evaluasi masing-masing sub kegiatan yang dapat memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Untuk kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD terdiri dari 4 sub kegiatan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pada sub kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 66%.

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pada sub kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 68%.

c. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik

Pada sub kegiatan fasilitasi penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100% sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 95%.

d. Penyusunan Tata Tertib DPRD

Pada sub kegiatan penyusunan tata tertib DPRD tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 63%.

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Untuk kegiatan pembahasan kebijakan anggaran terdiri dari 5 sub kegiatan dengan capaian kinerja dan aggaran sebagai berikut :

a. Pembahasan KUA dan PPAS

Pada pelaksanaan sub kegiatan pembahasan KUA dan PPAS pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 85%.

b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Pada pelaksanaan sub kegiatan pembahasan perubahan KUA dan PPAS pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 61%.

c. Pembahasan APBD

Pada pelaksanaan sub kegiatan pemabahasan APBD pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 70%.

d. Pembahasan APBD Perubahan

Pada pelaksanaan sub kegiatan pembahasan APBD perubahan pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 81%.

e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Pada pelaksanaan sub kegiatan pembahasan pertanggungjawaban APBD pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 84%.

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Untuk kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari 4 sub kegiatan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Pada pelaksanaan sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi 84%.

b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Insfratruktur

Pada pelaksanaan sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi 80%.

c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pada pelaksanaan sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi 78%.

d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Pada pelaksanaan sub kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%, sedangkan berdasarkan realisasi 85%

3. Peningkatan Kapasitas DPRD

Untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD terdiri dari 3 sub kegiatan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

a. Pendalaman Tugas DPRD

Pada pelaksanaan sub kegiatan pendalaman tugas DPRD pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 70%.

b. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Pada pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 93%.

c. Penyusunan Program Kerja DPRD

Pada pelaksanaan sub kegiatan penyusunan program kerja DPRD pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 31%.

4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Untuk kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat terdiri dari 2 sub kegiatan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :

a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pada pelaksanaan sub kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 37%.

b. Pelaksanaan Reses

Pada pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan reses pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 98%.

5. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Untuk kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD terdiri dari 1 sub kegiatan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

a. Penyusunan Kode Etik DPRD

Pada pelaksanaan sub kegiatan penyusunan kode etik DPRD pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 49%.

6. Fasilitasi Tugas DPRD

Untuk kegiatan fasilitasi tugas DPRD terdiri dari 2 sub kegiatan dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksaan Tugas DPRD

Pada pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat

terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 87%.

b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Pada pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 88%.

c. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Pada pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi tugas pimpinan DPRD pada tahun 2024, dilihat dari capaian kinerja dapat terlaksana 100%. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran sebesar 62%

2.1.3 Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Untuk tahun 2024 sampai dengan triwulan IV tidak terdapat sub kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2024:

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Sekretariat DPRD pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Adanya kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja yang tergantung pada agenda pimpinan dan undangan dari pihak lain;
- Terdapat kegiatan yang menyesuaikan dengan permintaan masyarakat, sehingga jika tidak ada permintaan dari masyarakat maka capaian tidak tercapai 100%;
- Adanya sisa anggaran perjalanan dinas karena perubahan aturan mekanisme pembayaran perjalanan dinas DPRD dari *lumpsum* menjadi *at cost* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2.1.5 Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Terdapat beberapa faktor yang akan berpengaruh pada upaya pencapaian target :

1. Perumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan target indikator yang dapat terlaksana.

2. Upaya/strategi dan perbaikan indikator dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
3. Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Adanya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, program dan kegiatan. Sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Diperlukan pencermatan perencanaan anggaran kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) kegiatan serta diperlukan sistim monitoring dan evaluasi kegiatan secara intens.

Selanjutnya rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Gunungkidul

Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					SEKRETARIAT DPRD										
					URUSAN PEMERINTAHAN										
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik**	**98**		**100**	**98**	**98,24**	**100,25**	**98**	**296,24**	60,46
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana	100		100	98	100	102,04	100	300,00	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	3	2	4	4,00	100,00	3	9,00	75,00
						Jumlah Dokumen Renja	5	1	1					1,00	20,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Renja Perubahan	5	1	1					1,00	20,00
						Pelaksanaan Forum PD	5	1	1					1,00	20,00
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1	1	1	1	100,00	1	3,00	75,00
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5	1	1					1,00	20,00
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4		1	1	1	100,00	1	3,00	75,00
						Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5	1	1					1,00	20,00
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8		2	2	2	100,00	2	6,00	75,00
						Jumlah Dokumen DPA	5	1	1					1,00	20,00
						Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	5	1	1					1,00	20,00
						Jumlah Dokumen ROPK	5	1	1					1,00	20,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Perjanjian Kinerja	5	1	1					1,00	20,00
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8		2	2	2	100,00	2	6,00	75,00
						Jumlah Dokumen DPPA			1					1,00	
						Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja			1					1,00	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinas iPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	68		17	17	17	100,00	17	51,00	75,00
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16		4	4	4	100,00	4	12,00	75,00
						Jumlah Dokumen e-MONEV (Evaluasi RKPD)	20	4	4					4,00	20,00
						Jumlah Dokumen Laporan TEPPRA	60	12	12					12,00	20,00
						Jumlah Dokumen LKJIP	5	1	1					1,00	20,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu	100	100	97,32	100	92,51	92,51	100	289,83	57,97
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2240		546	560	517	92,32	560	1623,00	72,46
						Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan			14					14,00	
						Jumlah ASN yang mendapatkan TPP			14					14,00	
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4		1	1	1	100,00	1	3,00	75,00
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK	5	1	1					1,00	20,00
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan LaporanKeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52		13	13	13	100,00	13	39,00	75,00
						Jasa laporan keuangan tersedia	60	12	12					12,00	20,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	60	12	12					12,00	20,00
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	5	1	1					1,00	20,00
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100	100,00	100	300,00	60,00
4	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan danPengolahan AdministrasiKepegawaian	24		6	6	6	100,00	6	18,00	75,00
						Jumlah ASN yang tertangani	210	42	40					40,00	19,05
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bedasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	23		68	2	2	100,00	2	72,00	313,04
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terlaksana	100	100	99,97	100	100	100,00	100	299,97	59,99
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket KomponenInstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48		12	1	1	100,00	3	16,00	33,33
						Jumlah komponen listrik yang tersedia	60	12	12					12,00	20,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48		12	12	12	100,00	12	36,00	75,00
						Jumlah ATK terpenuhi	60	12	10					10,00	16,67
						Jumlah Laptop terbeli	15	3	3					3,00	20,00
						Jumlah printer terbeli	15	3	2					2,00	13,33
						Jumlah scanner terbeli	5	1	1					1,00	20,00
						Jumlah Voice Recorder Terbeli			5					5,00	
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11		3	3	3	100,00	3	9,00	81,82
						Jumlah peralatan rumah tangga tersedia	15	3	8					8,00	53,33
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20		5	6	6	100,00	5	16,00	80,00
						Jumlah belanja bendera yang terbeli	40	8	16					16,00	40,00
						Jumlah cinderamata/ plakat yang terbeli	1250	250	215					215,00	17,20
						Jumlah dekorasi yang terbeli	50	10						0,00	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah figura								0,00	
						Jumlah karangan bunga yang terbeli	50	10	18					18,00	36,00
						Jumlah spanduk yang terbeli	50	10	14					14,00	28,00
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48		12	5	5	100,00	4	21,00	43,75
						Jumlah barang cetak, SPPD, BKP, Disposisi, box arsip dll	7.325	1.465	1.239					1239,48	16,92
						Jumlah Fotocopy/ penggandaan	100000	20000	18600					18600,00	18,60
						Jumlah jilid dokumen	100	20	20					20,00	20,00
						Jumlah cetak buku kerja			60					60,00	
						Jumlah Cetak buku tata tertib DPRD			100					100,00	
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	5936		1480	0	0	0,00	0	1480,00	24,93

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah buku bacaan peraturan perundang undangan yang terbeli	50	10	-						0,00
						Jumlah surat kabar/ majalah yang terbayar (5jenis)	60	12	12					12,00	20,00
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48		12	12	12	100,00	12	36,00	75,00
						Jumlah makan dan minum tamu DPRD	22.500	4500	6284					6284,00	27,93
						Jumlah minum snak tamu DPRD	22.500	4500	6284					6284,00	27,93
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96		12	12	12	100,00	12	36,00	37,50
						Jumlah koordinasi /konsultasi dinas luar daerah Jawa Barat/ Jawa Timur/ Dejabotabek	200	20	28					28,00	14,00
						Jumlah makan dan minum petugas keamanan rumah dinas dan kantor	12810	2562	2562					2562,00	20,00
						jumlah makan minum rapat koordinasi yang tersedia	2250	450	447					447,00	19,87
						jumlah minum dan snack rapat koordinasi yang tersedia	2250	450	434					434,00	19,29

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah perjalanan dinas dalam daerah wilayah Gunungkidul (TU, PK, Risalah, Protokol)	1000	200	184					184,00	18,40
						Jumlah perjalanan dinas (TU, PK, Risalah, Protokol) dalam daerah wilayah DIY	840	168	128					128,00	15,24
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100		100	100	100	100,00	100	300,00	60,00
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							26	26,00	
						Jumlah alamari terbeli	5	1	1					1,00	20,00
						jumlah rak arsip terbeli	25	5	5					5,00	20,00
4	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan	2		100	0	0		0	100,00	5000,00
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40		100	95	95	100,00	6	201,00	502,50
						Jumlah sewa gedung kantor	60	12	-						0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah sewa gudang	60	12	12					12,00	20,00
						Jumlah sewa kendaraan angkut barang	60	12	25					25,00	41,67
						Jumlah alat pendingin/AC portabel			2					2,00	
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100,00	100	300,00	60,00
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48		12	12	12	100,00	12	36,00	75,00
						Jasa surat menyurat tersedia	60	12	12					12,00	20,00
						Jumlah surat yang dikirim	7500	150	1500					1500,00	20,00
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	864		216	180	180	100,00	216	612,00	70,83
						Jumlah tagihan air (2 rekening)	60	12	12					12,00	20,00
						Jumlah tagihan listrik (5 rekening)	60	12	12					12,00	20,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah tagihan telepon (6 rekening)	60	12	12					12,00	20,00
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48		12	12	12	100,00	12	36,00	75,00
						Jasa kebersihan kantor dibayar	60	12	12					12,00	20,00
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	102,03	100	100	100,00	100	302,03	60,41
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajak danPerizinannya	1300		306	338	338	100,00	338	982,00	75,54
						Jumlah kendaraan R2 dan R4 yang terbayar pajaknya (R2 15 unit, R4 11 unit)	130	26	25					25,00	19,23
						Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas R2 dan R4 terfasilitasi (R2 15 unit, R4 11 unit)	130	26	25					25,00	19,23
4	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4		116	0	0	0,00	100	216,00	5400,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah mebelair yang terpelihara	5	1	1					1,00	20,00
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	340		66	29	29	100,00	32	127,00	37,35
						Jumlah elektronik dan mekanik terfasilitasi pemeliharaannya	100	20						0,00	0,00
						Jumlah Genset yang terpelihara	10	2	2					2,00	20,00
						Jumlah laptop/komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	50	25	35					35,00	70,00
						Jumlah LCD ruang rapat yang terfasilitasi pemeliharaanya	35	7	2					2,00	5,71
						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terfasilitasi pemeliharaannya	25	5	-						
						Jumlah printer yang terpelihara	105	21	35					35,00	33,33
						Jumlah scanner yang terpelihara	10	2	2					2,00	20,00
						Jumlah mesin tik yang terpelihara			2					2,00	
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16		1	1	1	100,00	1	3,00	18,75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jasa pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya tersedia			12					12,00	
						Jumlah gedung kantor terpelihara	15	3	4					4,00	26,67
						Jumlah rumah dinas terpelihara	5	1	1					1,00	20,00
						Jumlah taman terpelihara	1250	250	-						
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	400		75	15	15	100,00	10	100,00	25,00
						Jumlah AC dan alat pendingin yang dipelihara	95	19	25					25,00	26,32
						Jumlah alat studio, sound sistem yang dipelihara	15	3	3					3,00	20,00
						Jumlah pemeliharaan jaringan internet	5	1	1					1,00	20,00
						jumlah pemeliharaan jaringan listrik	5	1	1					1,00	20,00
4	2	1	2.13		Penataan Organisasi	Nilai IKM PD	80	80	80					80,00	100,00
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen IKM	10	2	2					2,00	20,00
						Jumlah Dokumen Profil PD	1000	200	200					200,00	20,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						jumlah dokumen reviu SOP	5	1	1					1,00	20,00
						Jumlah dokumen RTP	5	1	1					1,00	20,00
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	100	99,74	100	100	100,00	100	299,74	59,95
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRDyang Menerima HakKeuangan DPRD	2520		625	630	630	100,00	630	1885,00	74,80
						Jumlah anggota DPRD yang mendapat Gaji dan Tunjangan	70	14	14						
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3968		203	225	225	100,00	180	608,00	15,32
						Jumlah pakaian adat yang tersedia	230	46	46					46,00	20,00
						Jumlah pakaian batik tradisional yang tersedia								0,00	
						Jumlah pakaian dinas harian yang tersedia	225	45	45					45,00	20,00
						Jumlah pakaian sipil harian yang tersedia	320	64	64					64,00	20,00
						Jumlah pakaian sipil lengkap yang tersedia	230	46	46					46,00	20,00
						Jumlah pakaian sipil resmi yang tersedia	230	46	46					46,00	20,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical CheckUp DPRD	180		23	45	16	35,56	45	84,00	46,67
						Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check Up	225	45	26					26,00	11,56
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase pemenuhan layanan Fasilitasi Administrasi DPRD	500	100	100	100	91,67	91,67	100	291,67	58,33
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	180		12	24	24	100,00	19	55,00	30,56
						Jumlah rapat rapat DPRD	155	31	25					25,00	16,13
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	48		12	12	9	75,00	12	33,00	68,75
						Jumlah tunjangan rumah tangga ketua DPRD	60	12	12					12,00	20,00
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**90**	**80**	**95,4**	**89**	**89,92**	**101,03**	**89**	**274,32**	**61,92**
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	100	100	89	100	112,36	100	300,00	60,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan danPembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8		2	2	2	100,00	2	6,00	75,00
						Jumlah Dokumen Propemperda yang disahkan	10	2	2					2,00	20,00
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	72		9	12	12	100,00	12	33,00	45,83
						Jasa permbahasan peraturan daerah tersedia								0,00	
						Jumlah Dokumen Kontrak Jasa pembuatan Naskah Akademik	15	3	3					3,00	20,00
						Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang tersusun	15	3	3					3,00	20,00
						Jumlah Raperda yang dibahas	60	12	9					9,00	15,00
						Jumlah Risalah Rapat-Rapat	125	25	25					25,00	20,00
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	32			0	0		0	0,00	0,00
						Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan yang dibahas	40	8	8					8,00	20,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12		3	1	1	100,00	1	5,00	41,67
4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata tertib DPRD yang disusun				1	1		1	2,00	
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	100	100	100	100,00	100	300,00	60,00
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	8		2	2	2	100,00	2	6,00	75,00
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disahkan	5	1	1					1,00	20,00
						Jumlah Dokumen PIWK yang disyahkan	5	1	1					1,00	20,00
						Jumlah rapat kerja Komisi dengan OPD								0,00	
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4		1	1	1	100,00	1	3,00	75,00
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS perubahan yang disahkan	5	1	1					1,00	20,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah rapat-rapat								0,00	
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4		1	1	1	100,00	1	3,00	75,00
						Jumlah Dokumen APBD yang disahkan	5	1	1					1,00	20,00
						Jumlah rapat-rapat pembahasan								0,00	
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4		1	1	1	100,00	1	3,00	75,00
						Jumlah dokumen apbd perubahan yang disahkan	5	1	1					1,00	20,00
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	8		2	2	2	100,00	2	6,00	75,00
						Jumlah Dokumen pertanggungjawaban APBD	5	1	1					1,00	20,00
						Jumlah dokumen LHP yang dibahas			1					1,00	
						Jumlah dokumen rekomendasi SKPD			1					1,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	85	85	100	100	100	100,00	83	283,00	68,36
4	2	2	2.03	1	Pengawasan UrusanPemerintahan BidangPemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	16		4	4	4	100,00	4	12,00	75,00
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	16		4	4	4	100,00	4	12,00	75,00
4	2	2	2.03	3	Pengawasan UrusanPemerintahan BidangKesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	16		4	4	4	100,00	4	12,00	75,00
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	16		4	4	4	100,00	4	12,00	75,00
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen rekomendasi penggunaan anggaran	20	4	4				1	5,00	25,00
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah							1	1,00	#DIV/0!

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase layanan peningkatan kapasitas DPRD	85	85	100	89	79,41	89,23	83	262,41	63,38
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek Adkasi	15	3	3					3,00	20,00
						Jumlah Bimtek Asdeksi	20	4	24					24,00	120,00
						Jumlah Bimtek Lemhanas	5	1	-						
						Jumlah Bimtek Umum	30	6	6					6,00	20,00
						Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	79		13	5	5	100,00	6	24,00	30,38
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	72		216	216	160	74,07	216	592,00	822,22
						Pakar dan tim ahli yang terbayar (18 orang x 12 bulan)	60	12	12					12,00	20,00
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	28		84	84	77	91,67	84	245,00	875,00
						Tenaga ahli fraksi yang terbayar (7 orang x 12 bulan)	60	12	12					12,00	20,00
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelengaraan hubungan masyarakat	48		12	12	12	100,00	12	36,00	75,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jasa penyelenggaraan hubungan masyarakat tersedia	60	12	12					12,00	20,00
						Jumlah Hearing/ dialog/ koordinasi dengan pejabat, tokoh masyarakat dan agama	420	84						0,00	0,00
						Jumlah dialog warga ketua			48					48,00	
						Jumlah dialog warga wakil ketua 1			40					40,00	
						Jumlah dialog warga wakil ketua 2 & 3			72					72,00	
						Jumlah kegiatan Audensi	120	24	5					5,00	4,17
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen recana kerja DPRD	4		2	1	1	100,00	1	4,00	100,00
						Jumlah Dokumen hasil rapat Banmus	180	36	24					24,00	13,33
						Jumlah Dokumen program kerja DPRD	5	1	1					1,00	20,00
4	2	2	2.04	8	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	96		12	56	42	75,00	88	142,00	147,92

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah belanja publikasi/dokumentasi	15.000	3.000	-	3000		0,00			
						Jumlah pers release kegiatan anggota DPRD	120	24	24					24,00	20,00
						Jumlah publikasi DPRD			1					1,00	
						Jumlah publikasi luar ruang			1					1,00	
						jumlah publikasi parlementaria			1					1,00	
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100	100	92,5	89	100	112,36	100	292,50	58,50
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	4		0,85	1	1	100,00	1	2,85	71,25
						Jumlah Dokumen Pokok-pokok pikiran yang disahkan	5	1	1					1,00	20,00
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	12		3	2	2	100,00	3	8,00	66,67
						Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3	3	3					3,00	100,00
4	2	2	2.05	4	Sosialisasi Rancanga Peraturan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi rancangan peraturan daerah							240	240,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan kode etik DPRD	85	80	100	89	50	56,18	83	233,00	56,28
4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD				1	1	100,00	1	2,00	
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8		1	1	0	0,00	2	3,00	37,50
						Jumlah laporan pengawasan implementasi kode etik	20	4	2					2,00	10,00
4	2	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Presentase pembahasan kerjasama daerah	85		-	0	0	0,00	0	80,00	19,80
4	2	2	2.07	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	4			1	0	0,00	0	0,00	0,00
						Jumlah nota kesepakatan kerja sama	5	1	-						
4	2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah publikasi kerjasama daerah yang terlaksana	5	1	-		-		-		
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD	85	4	100	89	100	112,36	83	283,00	68,36

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	48		12	9	9	100,00	4	25,00	52,08
						Jumlah konsultasi/ koordinasi/ studi banding/kunjungan kerja DPRD dalam daerah/DIY	180	36	4					4,00	2,22
						Jumlah Koordinasi/ konsultasi/ studi banding/ kunjungan kerja DPRD luar DIY dan Luar Pulau	40	8	8					8,00	20,00
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	96		12	14	14	100,00	12	38,00	39,58
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	48		12	12	12	100,00	12	36,00	75,00
						Jumlah konsultasi/ koordinasi/ kunjungan kerja/ menghadiri undangan dalam daerah	180	36	36					36,00	20,00
						Jumlah Koordinasi/konsultasi/studi banding/kunjungan kerja DPRD luar DIY dan Luar Daerah	110	22	14					14,00	12,73

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Perubahan dan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul berkaitan erat dengan reposisi dan refungsionalisasi DPRD sebagai badan legislatif daerah yang menjadi salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagai PD pendukung kinerja DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya menjadi instrumen kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD agar dapat melaksanakan semua tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Seiring dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih jauh diarahkan sebagai pendukung pelayanan substantif dan sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran *public relation*-nya, dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan hubungan antar lembaga sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A											
1	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan	Indeks	82	83	84	85	82	83	84	85	
2	Nilai AKIP PD	Nilai	83	84	85	86	83	84	85	86	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD

- Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026 Sekretariat DPRD telah menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Selain dari pada itu Sekretariat DPRD juga mendukung Tema pembangunan daerah : *"Penguatan Ekonomi Daerah, Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur, dan Peningkatan SDM yang Unggul".*
- Program Prioritas Tahun 2026 ada 1 (satu) yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdapat 7 (tujuh) kegiatan/ 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Sedangkan program untuk menunjang program prioritas terdapat 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ada 9 (sembilan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan

1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD**

   Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD, bahwa Sekretariat DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai permasalahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD yang telah dirumuskan.

2. **Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah :**
   a) Belum optimalnya koordinasi antara anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
   b) Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan tugas pada bagian-bagian, karena juga harus melayani tugas kegiatan anggota DPRD yang merupakan kegiatan rutin;
   c) Adanya perubahan peraturan yang sering terjadi sehingga perlu penelaahan dan tindak lanjut yang sesuai;
   d) Tidak meratanya beban pekerjaan yang menyebabkan terjadinya *overlap* pekerjaan pada beberapa karyawan, serta tidak adanya *back up* jika terjadi sesuatu pada orang yang diberi tugas serta tanggungjawab;
   e) Dalam fasilitasi pelayanan kegiatan DPRD perlu adanya peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan

hasil rapat/sidang, sehingga dokumen yang dihasilkan berkualitas dan sesuai tata kala;

f) Dalam pelaksanaan kegiatan perlu evaluasi secara berkala untuk mengawal target-target kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

Analisis lingkungan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD menggunakan pendekatan **SWOT** *(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*, yaitu dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu organisasi, yang selanjutnya dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Lingkup internal meliputi :

a) Kekuatan *(Strengths)*, yaitu faktor-faktor yang ada pada organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan;
b) Kelemahan *(Weaknesses)* yaitu segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi dan melemahkan posisi suatu organisasi

Lingkup eksternal meliputi :

Peluang *(Opportunities)* yaitu faktor-faktor diluar organisasi yang memberikan kemungkinan organisasi untuk dapat eksis, tumbuh dan berkembang serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar.

a) Ancaman *(Threats)*, yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang membahayakan atau mengancam eksistensi suatu organisasi.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD agar dapat ditetapkan secara cermat dan tepat perlu didukung akurasi hasil analisis lingkungan dan asumsi yang terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Faktor Internal

Menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang berada di dalam Perangkat Daerah.

a. Kekuatan

   Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan mencapai tujuan.

   Adapun faktor internal (kekuatan) yang ditemui adalah :

1. tersedianya sarana kerja;
2. tersedianya anggaran/dana; dan
3. adanya struktur organisasi kelembagaan yang jelas

b. Kelemahan

Merupakan ketidakmampuan internal dari organisasi sehingga gagal mencapai sasaran.

Adapun faktor internal (kelemahan) yang ada adalah :

1. Masih adanya karyawan yang belum memahami tugas dan fungsi;
2. Adanya penempatan sumber daya manusia yang belum sesuai kebutuhan serta tingkat kedisiplinan masih kurang; dan
3. Walaupun struktur organisasi sudah ada tetapi adanya ketugasan dan fungsi Bagian atau Sub Bagian yang tumpang tindih antar bagian.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal menggambarkan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, baik ditinjau dari segi ekonomi, teknologi, sosial budaya, ekologi dan keamanan.

a. Peluang

Merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu organisasi dalam mencapai sasaran.

Adapun peluang yang ada yang dimungkinkan dapat mendukung dalam mencapai sasaran adalah :

1. Adanya upaya pembinaan karyawan untuk meningkatkan disiplin;
2. Adanya peningkatan kapasitas pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan ketugasan masing-masing;
3. Adanya hubungan koordinasi dengan instansi terkait;
4. Adanya hubungan kerja yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD; dan
5. Penyesuaian regulasi turunannya.

b. Ancaman

Merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif dan menyebabkan organisasi gagal dalam pencapaian sasaran.

Adapun ancaman yang dihadapi dalam mencapai sasaran yang diharapkan adalah :

1. Adanya kepentingan – kepentingan pribadi atau eksternal yang mempengaruhi kelembagaan DPRD;
2. Adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan diluar jam kerja;
3. Adanya kebebasan informasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan etika pejabat negara;
4. Adanya ketidaksesuaian dalam penempatan dan pembebanan tugas;
5. Adanya kebijakan pelimpahan tugas yang tidak sesuai dengan SOTK maupun Tugas Pokok Fungsi.

Dengan adanya faktor internal dan eksternal sebagaimana tersebut di atas, sebagai input untuk ditetapkan sebagai faktor kunci serta landasan kritis dalam penyusunan rencana strategis instansi, sehingga dokumen ini mampu menjadi dasar pijakan penyusunan kinerja tahunan.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review Rancangan RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisa kebutuhan PD. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil review, terdapat perbedaan antara rancangan RKPD Sekretariat DPRD dengan hasil analisis kebutuhan yaitu berdasarkan analisis kebutuhan diperlukan efisiensi anggaran tersebut untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan standar operasional pelayanan Sekretariat DPRD yang baru untuk menggantikan standar operasional pelayanan yang lama dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pemerintah daerah, disamping itu review terhadap rancangan RKPD juga menunjukkan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis dengan kebutuhan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku serta analisis standar harga. Perbedaan setelah dilakukan analisis kebutuhan terhadap rancangan RKPD disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan SHBJ, perubahan kebijakan, dan Penyesuaian dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Nomenklatur yang harus disesuaikan dan kebijakan yang lain-lain.

Perubahan – perubahan yang terjadi untuk rancangan RKPD tahun 2026 setelah dilakukan review terhadap kebutuhan disebabkan oleh :

1. Adanya penambahan sarana dan prasarana, perlengkapan dan peralatan pada tahun – tahun yang lalu, sedangkan biaya pemeliharaannya tidak bertambah;
2. Adanya sarana dan prasarana, perlengkapan dan peralatan yang sudah rusak;
3. Adanya perubahan/penyesuaian SHBJ;
4. Adanya kebijakan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah, dan paket biaya perjalanan dinas luar daerah yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini;
5. Adanya kenaikan harga, dan lain-lain.

Selanjutnya Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah disajikan dalam tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SEKRETARIAT DPRD				**65.683.059.721**	**SEKRETARIAT DPRD**				**52.769.143.753**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik**	**98 persen**	**32.546.667.275**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagian Perencanaan dan Keuangan 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagian Umum 3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan**	**83,25 Nilai**	**27.109.263.353**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	30 Dokumen	96.900.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		103.757.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	25.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	77.197.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.760.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.800.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.950.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	12.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	8.700.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	40.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.125.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	5 layanan	4.171.491.250	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Fasilitasi pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		2.849.417.253	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan	4.089.491.250	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan	2.765.377.253	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	78.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	81.040.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan ASN yang tertangani	1 layanan	43.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Fasilitasi pelayanan terhadap ASN		65.636.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	13.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	3.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	62.636.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 layanan	1.032.230.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Fasilitasi pelayanan administrasi umum perangkat daerah		634.237.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	98.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	149.210.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	165.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	97.971.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	91.230.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.988.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1484 Dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	275.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.000.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	207.068.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Layanan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 layanan	98.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Fasillitasi Pelayanan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		64.258.000	
	Pengadaan Mebel	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	24.000.000	Pengadaan Mebel	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	16.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	74.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	48.258.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6 layanan	478.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Fasilitasi pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1.495.358.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	63.160.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	306.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan	498.130.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	122.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	934.068.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	18 layanan	1.182.750.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Fasilitasi pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		534.100.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	325 Unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	325 Unit	320.200.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	13.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	5.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wareng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	79.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wareng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	13.100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	345.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	46.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	245.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	149.000.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	7 layanan	24.662.796.025	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Fasiltiasi pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		20.641.930.600	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 Orang/Bulan	24.100.751.025	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 Orang/ Bulan	20.281.045.600	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	992 Paket	485.405.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	284.085.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	76.640.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	76.800.000	
	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah layanan administrasi DPRD	2 layanan	781.000.000	Layanan Administrasi DPRD		Fasilitasi pelayanan administrasi DPRD		720.569.500	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	45 Laporan	390.500.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	18 Laporan	346.169.500	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	390.500.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	374.400.000	
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**89 persen**	**33.136.392.446**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**1) Persentase penetapan rancangan peraturan daerah tahun N** **2) Persentase penetapan rancangan peraturan daerah tahun N** **3) Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah** **4) Persentase fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi terlaksana**	**100 persen**	**25.659.880.400**	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	42 Dokumen	6.223.396.250	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD		5.150.838.000	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	35.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	220.658.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	5.243.536.250	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	4.691.712.500	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8 Dokumen	654.860.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-	0	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	239.010.000	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	0	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah dokumen kegiatan pembahasan kebijakan anggaran	6 Dokumen	4.964.426.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Dokumen kegiatan pembahasan kebijakan anggaran		2.358.760.500	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	800.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	56.100.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	38.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	34.625.000	
	Pembahasan APBD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	3.524.756.000	Pembahasan APBD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	984.130.500	
	Pembahasan APBD Perubahan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	40.490.000	Pembahasan APBD Perubahan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	700.806.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	561.180.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	583.099.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	4 Dokumen	5.290.437.168	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		6.024.959.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	1.322.609.292	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	1.399.491.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1.322.609.292	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1.301.802.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	1.322.609.292	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	1.300.003.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	1.322.609.292	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	1.410.735.000	
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	612.928.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah layanan peningkatan kapasitas DPRD	13 layanan	6.244.187.778	Peningkatan Kapasitas DPRD		Fasilitasi pelayanan peningkatan kapasitas DPRD		5.034.272.000	
	Pendalaman Tugas DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	20 Dokumen	3.778.770.278	Pendalaman Tugas DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	10 Dokumen	2.663.030.000	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18 Orang	1.098.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	216 Orang	1.085.100.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	336.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84 Orang	294.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	970.817.500	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	636.415.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	60.600.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	52.100.000	
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	24 Dokumen	331.400.000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	303.627.000	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	4 Dokumen	3.772.227.500	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		4.162.172.400	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	12.227.500	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	12.227.400	
	Pelaksanaan Reses	Kab Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.760.000.000	Pelaksanaan Reses	Kab Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	4.149.945.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah dokumen pelaksanaan dan pengawasan kode etik	6 Dokumen	46.435.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Dokumen pelaksanaan dan pengawasan kode etik		94.003.500	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	19.187.500	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	6.435.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	74.816.000	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Jumlah layanan pembahasan kerja sama daerah	2 layanan	22.000.000	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Fasilitasi pelayanan pembahasan kerja sama daerah		0	
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	-	0	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-	0	
	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah layanan fasilitasi tugas DPRD	4 layanan	6.573.282.750	Fasilitasi Tugas DPRD		Fasiltasi pelayanan fasilitasi tugas DPRD		2.834.875.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	4.573.282.750	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	821.165.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 Dokumen	60.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 Dokumen	294.762.000	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	1.940.000.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	1.718.948.000	
					65.683.059.721					**52.769.143.753**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas sebagai fasilitator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berarti Sekretariat DPRD tidak berhubungan langsung dengan masyarakat dan tidak mengakomodasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, sehingga di dalam dokumen perencanaannya Sekretariat DPRD tidak mencantumkan usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD untuk melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, maka DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi dan anggaran tersebut diatas maka produk hukum atau peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan, yang implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, bahwa Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sehingga untuk memberikan arah, tujuan yang akan memandu tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul ke masa depan dalam menghadapi tantangan adanya perubahan paradigma kegiatan pemerintahan yang mengarah pada tercapainya pemerintahan yang baik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Dewan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tahunan, maupun jangka waktu lima tahunan sesuai Sasaran Perangkat Daerah yang termaktub dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 yakni Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Adapun tujuan yang ditetapkan disajikan dalam **tabel 3.1 .**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu tahun, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dicapai dalam periode I (satu) pada masa sekarang dan tahun selanjutnya selama 5 (lima) tahun sesuai rencana strategis.

Adapun sasaran yang akan dicapai :

1. Kualitas dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD adalah :

1. Membuat rencana program dan kegiatan tahunan Sekretariat DPRD penjabaran dari Rencana Strategis 2025 – 2029 untuk mendukung visi misi daerah.
2. Sebagai acuan dalam pengusulan Rencana Kerja Anggaran Sekretariat DPRD
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan capaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD (Outcome)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pamong Nglayan dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara efektif, efisien dan akuntabel	Maturitas SPIP	Kualitas dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya dukungan tugas dan fungsi DPRD

Selanjutnya kami sajikan hubungan antara tujuan Perangkat daerah dengan sasaran Perangkat Daerah pada tabel 3.2 dan 3.3

Tabel. 3.2

Tujuan
Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Capaian Kinerja Tujuan PD Tahun 2024	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026 pada Renstra	Proyeksi Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	86,54	86,6	86,60

Proyeksi target kinerja PD tahun 2026 berbeda dengan target pada Renstra karena capaian kinerja tujuan PD tahun 2024 sudah melampaui target kinerja tujuan tahun 2026 dan diharapkan proyeksi target kinerja tujuan PD dapat tercapai seperti pada tabel 3.2.

Tabel. 3.3

Sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Capaian Sasaran Tahun 2024	Target Sasaran PD Tahun 2026 Pada Renstra	Proyeksi Target Sasaran PD Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kualitas dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya dukungan tugas dan fungsi DPRD	100	100	100

Terdapat perubahan sasaran PD, mulai tahun 2026 terdapatnya 1 sasaran Sekretariat DPRD. Proyeksi target sasaran PD tahun 2026 sama dengan target sasaran PD Tahun 2026 pada Renstra yaitu 100%. Untuk sasaran yang kedua diharapkan target sasaran dapat tercapai berdasarkan target Renstra, seperti yang tercantum dalam tabel 3.3.

Tabel. 3.4
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Kabupaten Gunungkidul

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Capaian Kinerja IKU 2024	Target Kinerja IKU PD Tahun 2026 pada Renstra	Proyeksi Target IKU PD Tahun 2026
1	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	86,54	86,6	86,60
2	Kualitas dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya dukungan tugas dan fungsi DPRD	100	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan program dan kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Rencana kerja tahunan ini berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Visi Kepala Daerah tahun 2025-2029 :

""Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Kerkeadaban."

Misi Kepala Daerah tahun 2025-2029 :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya local.
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan kerkeadaban.

6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah: “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Program Bocah Pinter;
2. Program Warga Sehat;
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya;
4. Program Gunungkidul Berdikari;
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi;
6. Program Warga Gayeng dan Guyub;
7. Program Alam Lestari.

b. Uraian garis besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaiamana diuraikan dalam kebijakan.

Kegiatan instansi merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberika dukungan pada pencapaian visi dan misi daerah.

Dengan melaksanakan program dan kegiatan diharap akan dapat mewujudkan pelayanan secara profesional terhadap tugas dan kegiatan DPRD Kabupaten Gunungkidul dan mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Berikut kami sajikan rekapitulasi program dan kegiatan yang menjabarkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1

Prioritas, sasaran daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6					7	8	9
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya system penyelenggaraan pemerintah efektif, efisien dan akuntabel	Kualitas dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya dukungan tugas dan fungsi DPRD	100	4	2	2	2.01		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**25.659.880.400**	SEKRETARIAT DPRD
					4	2	2	2.01		***Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD***	**5.150.838.000**	
					4	2	2	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	220.658.000	
					4	2	2	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.691.712.500	
					4	2	2	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	0	
					4	2	2	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	239.010.000	
					4	2	2	2.02	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	0	
					4	2	2	2.02		***Pembahasan Kebijakan Anggaran***	***2.358.760.500***	
					4	2	2	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	56.100.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6					7	8	9
					4	2	2	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	34.625.000	
					4	2	2	2.02	0003	Pembahasan APBD	984.130.500	
					4	2	2	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	700.806.000	
					4	2	2	2.03	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	583.099.000	
					4	2	2	2.03		***Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan***	***6.024.959.000***	
					4	2	2	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.399.491.000	
					4	2	2	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.301.802.000	
					4	2	2	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.300.003.000	
					4	2	2	2.04	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.410.735.000	
					4	2	2	2.04	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	612.928.000	
					4	2	2	2.04		***Peningkatan Kapasitas DPRD***	***5.034.272.000***	
					4	2	2	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.663.030.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6					7	8	9
					4	2	2	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.085.100.000	
					4	2	2	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000	
					4	2	2	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	636.415.000	
					4	2	2	2.05	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	52.100.000	
					4	2	2	2.05	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	303.627.000	
					4	2	2	2.05		***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	***4.162.172.400***	
					4	2	2	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	12.227.500	
					4	2	2	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	4.149.945.000	
					4	2	2	2.06		***Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD***	***94.003.500***	
					4	2	2	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	19.187.500	
					4	2	2	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	74.816.000	
					4	2	2	2.07		***Pembahasan Kerja Sama Daerah***	-	
					4	2	2	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	-	
					4	2	2	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	-	
					4	2	2	2.08		***Fasilitasi Tugas DPRD***	***2.834.875.000***	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6					7	8	9
					4	2	2	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	821.165.000	
					4	2	2	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	294.762.000	
					4	2	2	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.718.948.000	

c. Uraian garis besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.

Kegiatan instansi merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi daerah.

Dengan melaksanakan program dan kegiatan diharapkan dapat mewujudkan pelayanan secara profesional terhadap tugas dan kegiatan DPRD Kabupaten Gunungkidul dan mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Berdasarkan daftar program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD seperti yang tersebut di atas maka jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah 2 Program 16 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan. Dari sejumlah program kegiatan dan sub kegiatan sudah mengacu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.

Berikut kami sajikan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada table 4.2 :

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sekretariat DPRD				**52.769.143.753**				**65.980.459.721**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**52.769.143.753**				**65.980.459.721**
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**				**52.769.143.753**				**65.980.459.721**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagian Perencanaan dan Keuangan** **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagian Umum** **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bagian Persidangan dan Perudang-Undangan**		**83,25 Nilai**	**27.109.263.353**				**32.534.667.275**
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tesusun			103.757.000				96.900.000
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari,	2 Dokumen	77.197.000	Dana Transfer Umum-		3 Dokumen	25.200.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Wonosari			Dana Alokasi Umum			
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	3.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.800.000
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	2.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.800.000
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 Dokumen	4.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	6.800.000
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	4.500.000
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	17 Laporan	8.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Laporan	12.800.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4 Laporan	3.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	40.000.000
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah			2.849.417.253				4.171.491.250
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	560 Orang/bulan	2.765.377.253	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		560 Orang/bulan	4.089.491.250
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Laporan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	4.000.000
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	13 Laporan	81.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	78.000.000
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Fasilitasi pelayanan terhadap ASN			65.636.000				43.500.000
4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	6 Dokumen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	13.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	3 Orang	62.636.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	30.000.000
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi pelayanan administrasi umum perangkat daerah			634.237.000				1.020.230.000
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	3 Paket	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	21.000.000
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	6 Paket	149.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	98.000.000
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	3 Paket	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	70.000.000
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Paket	97.971.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	165.000.000
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Paket	8.988.000	Dana Transfer Umum-Dana		12 Paket	91.230.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Alokasi Umum			
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	275.000.000
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Laporan	207.068.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Laporan	300.000.000
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Fasilitasi Pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			64.258.000				98.000.000
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4 Unit	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Unit	24.000.000
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 Unit	48.258.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Unit	74.000.000
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			1.495.358.000				478.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Laporan	63.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	50.000.000
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	120 Laporan	498.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		216 Laporan	306.000.000
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Laporan	934.068.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	122.000.000
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			534.100.000				1.182.750.000
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	325 Unit	320.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		325 Unit	500.000.000
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	100 Unit	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	13.500.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wareng	32 Unit	13.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 Unit	79.250.000
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Unit	46.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	345.000.000
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	3 Unit	149.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Unit	245.000.000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Fasilitasi pelayanan keuangan dan kesejahteraaan DPRD			20.641.930.600				24.662.796.025
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	630 Orang/Bulan	20.281.045.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		630 Orang/Bulan	24.100.751.025
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	5 Paket	284.085.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		992 Paket	485.405.000
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	45 Orang	76.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		45 Orang	76.640.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Umum			
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Pelayanan Administrasi DPRD			720.569.500				781.000.000
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	18 Laporan	346.169.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Laporan	390.500.000
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Paket	374.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	390.500.000
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase penetapan rancangan peraturan daerah tahun N**		**100 persen**	**25.659.880.400**				**33.445.792.446**
						Persentase penetapan rancangan peraturan daerah tahun N							
						Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan							
						Persentase fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi terlaksana							
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD			5.150.838.000				6.223.396.250

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 Dokumen	220.658.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	35.000.000
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Dokumen	4.691.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Dokumen	5.243.536.250
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	0 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	654.860.000
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	3 Dokumen	239.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	250.000.000
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	-	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	40.000.000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen kegiatan pembahasan kebijakan anggaran			2.358.760.500				4.964.426.000
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 Dokumen	56.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		2 Dokumen	800.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Umum			
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	34.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	38.000.000
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	984.130.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.524.756.000
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	700.806.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	40.490.000
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	583.099.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	561.180.000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			6.024.959.000				5.290.437.168
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4 Laporan	1.399.491.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	1.322.609.292

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4 Laporan	1.301.802.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	1.322.609.292
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4 Laporan	1.300.003.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	1.322.609.292
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4 Laporan	1.410.735.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	1.322.609.292
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	612.928.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	-
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Fasilitasi pelayanan peningkatan kapasitas DPRD			5.034.272.000				6.575.587.778
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	10 Dokumen	2.663.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	3.778.770.278
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	216 Orang	1.085.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		18 Orang	1.098.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Umum			
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	84 Orang	294.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Orang	336.000.000
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Dokumen	636.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	970.817.500
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	52.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	60.600.000
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	60 Dokumen	303.627.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	331.400.000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat			4.162.172.400				3.772.227.500
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 Dokumen	12.227.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	12.227.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	4.149.945.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	3.760.000.000
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen pelaksanaan dan pengawasan kode etik			94.003.500				46.435.000
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	19.187.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	40.000.000
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 Laporan	74.816.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	6.435.000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi pelayanan tugas DPRD			2.834.875.000				6.573.282.750
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Dokumen	821.165.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	4.573.282.750
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	24 Dokumen	294.762.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	60.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Dokumen	1.718.948.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	1.940.000.000
TOTAL									**52.769.143.753**				**65.980.459.721**

BAB V
PENUTUP

Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, serta RKPD Tahun 2026 yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Forum PD serta Musrenbang tingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program

kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rancangan Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pelaksanaan Program/kegiatan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2026.

Wonosari, 2025
SEKRETARIAT DPRD

ttd

PURWONO SULISTYOHADI

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2026 merupakan tahun kelima dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja Tahun 2025 disempurnakan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan dan arahan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musrenbang.

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cata Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan melibatkan semua pemangku kepentingan *(Stake holder)* yang ada, baik secara formal maupun non formal.

Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :

1) Tahap Persiapan

Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen

Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap Rancangan RPJM Daerah dan Rancangan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan RKPD secara resmi dari Bappeda.

3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen Renja

Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD melaksanakan forum PD dan mengacu pada dokumen RKPD.

1.1.3 Keterkaitan Renja dengan Renstra.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 berpedoman kepada Rancangan Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan teknis dan rencana program sesuai bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

1.1.4 Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Inspektorat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

1.2.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

1.2.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

1.2.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
1.2.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
1.2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
1.2.7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
1.2.8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
1.2.9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
1.2.10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
1.2.11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2045;
1.2.12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
1.2.13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; dan
1.2.14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mengoptimalisasi pencapaian sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah, maka tujuan dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1.3.1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju;
1.3.2. Dasar penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; dan
1.3.3. Menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP
- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah dan Capaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah.

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA/A.6/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapat alokasi dana sejumlah Rp11.530.862.254,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Program = 3 program
- Jumlah Kegiatan = 11 kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan = 34 sub kegiatan

  dengan rincian anggaran berikut :
  - Belanja Operasi = Rp 11.415.362.254,00
  - Belanja Modal = Rp 115.500.000,00

Tingkat penyerapan keuangan Inspektorat Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp11.346.967.537,00 atau 98,41% sedangkan untuk persentase indikator kinerjanya sebesar 100%. Kegiatan pengawasan yang salah satunya sangat mempengaruhi persentase adalah Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) karena sebagian besar dilaksanakan berdasarkan perintah Bupati, permintaan Aparat Penegak Hukum, tindak lanjut dari berita media massa, dan atau pengaduan Masyarakat dan tidak dapat diprediksi.

Namun dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Adapun kebijakan atau tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain :

1. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal;
2. Meningkatkan peran APIP sebagai Q*uality Assurance, Consulting and Early Warning;*
3. Kerjasama dan tanggungjawab ASN dalam mewujudkan sasaran strategis;
4. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi; dan
5. Komitmen pimpinan dalam memberikan respon atau tanggapan yang baik.

Adapun gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra tertuang dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

KODE	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan orogram/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realissi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Tahun 2023 dan Renja Perubahan 2023	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen Renstra PD Tahun 2021 - 2026	2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Profil PD	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Pelaksanaan Forum PD	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	4	4	4	100	4	12	100
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	2	1	1	100	1	4	100
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	2	1	1	100	1	4	100
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen ROPK	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	3	3	4	100	3	9	75
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	2	2	2	100	2	6	75
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	17	17	13	76,47	17	47	69
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan e-Monev	20	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan TEPRA	60	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	5	5	5	100	5	15	75
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	130	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2800	700	700	588	84	700	1988	71
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	1	1	100	1	3	75
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	60	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	52	13	13	11	84,62	13	37	71
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian ASN	30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	6	6	6	100	6	18	75
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	175	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Peningkatan kualitas aparat pengawasan (kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri/PKS)	20	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	120	30	30	30	100	30	90	75
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum terlayani	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	18	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	16	4	4	3	75	4	11	69
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4. F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll)	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4. F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll)	50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	16	4	4	3	75	4	11	69
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah penggandaan yang tersedia	25	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	16	4	4	3	75	4	11	69
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	60	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1040	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	750	500	100	90	90	100	690	92
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16	4	4	3	75	4	11	69
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	300	240	65	65	100	70	290	97
		Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah	270	90	80	80	100	90	260	96
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176	44	44	44	100	44	132	75
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	48	12	12	10	83,33	12	34	71
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12)	12	12	12	12	100	12	6	50
		Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12)	12	12	12	12	100	12	6	50
		Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	12	12	12	12	100	12	6	50
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	144	36	36	30	83,33	36	102	71
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis bahan dan peralatan kebersihan tersedia	60	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas roda 2 terpelihara	35	7	8	8	100	8	35	100
		Jumlah dan jenis kendaraan dinas roda 4 terpelihara	35	7	6	6	100	7	35	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	35	7	8	8	100	8	35	100
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	35	7	7	6	86	7	35	100
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan terbayar pajak serta perizinannya	832	208	208	152	73	208	568	68
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	150	120	10	9	90	45	125	83
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	50	40	2	2	100	2	40	80
		Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	20	16	1	1	100	2	15	75
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	168	42	42	39	92,86	42	123	73
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	75	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	15	15	100	15	15	45	75
6.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai IKM PD	79,5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP SPIP	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen SOP	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan internal ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan; RKA murni dan perubahan; dan Review BTT)	96	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	384	96	96	94	97,92	96	286	74
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja	420	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Evaluasi tindak lanjut	240	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	352	88	88	73	82,95	88	249	71
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen hasil review Renstra 2021-2024	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	20	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	20	5	5	5	100	5	15	75
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen hasil Evaluasi pelaksanaan stock opname persedian OPD Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat Jumlah Dokumen tindaklanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI sesuai rekomendasi Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	85	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	120	30	30	24	80	30	84	70
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus Jumlah Dokumen hasil monev laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN, LHKPN) Jumlah dokumen hasil Review lainnya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten Jumlah Dokumen hasil survei penilaian integritas Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli	147	45	49	49	100	49	143	97
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	212	40	53	27	50,94	43	110	52
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen PKPT, Peta Pengawasan, Kenali Mutu Audit (KMA)	15	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12	3	3	0	0	3	6	50
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen penyusunan alternatif penyelesaian masalah/langkah strategis untuk percepatan pencapaian kinerja pemerintah daerah : Nota dinas, action plan.	10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen telaahan staf	20	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	24	6	6	5	83,33	6	17	71
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen hasil asistensi/ pendampingan	480	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	764	191	191	191	100	191	573	75
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen laporan monev Korsupgah KPK	12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan evaluasi benturan kepentingan	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen hasil evaluasi ZI, WBK, WBBM	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System	5	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen monev gratifikasi	20	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen monev PMPRB	6	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	21	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	764	191	191	191	100	191	573	75

Faktor penyebab/penghambat :

- Faktor penghambat disebabkan karena kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan lintas Perangkat Daerah, seperti pada kegiatan Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah dan kegiatan Penyelenggaraan Saber Pungli.
- Keterbatasan pegawai yang ada di Inspektorat termasuk dalam Jabatan Fungsional Auditor yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tugas yang diampu. Demikian pula pada unsur yang bernaung di bawah kesekretariatan.
- Masih terdapat Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang tidak segera menindaklanjuti hasil rekomendasi terkait dengan hasil laporan pemeriksaan.

Faktor pendukung :

- Faktor pendukung yaitu adanya koordinasi sistem informasi dan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengendalian program kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Termasuk pembuatan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta kode etik Inspektorat.

Kebijakan/tindakan yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor penghambat antara lain :

- Melakukan optimalisasi pembagian Auditor dan unsur penunjang Administrasi Pengawasan dengan memperhatikan beban kerja yang merata. Selain itu diupayakan untuk penambahan pegawai Jabatan Fungsional Auditor lewat jalur mutasi dari pegawai Jabatan Fungsional Umum dan atau Jabatan Struktural.
- Mengusulkan penambahan pegawai untuk meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance Consulting* dan *Early Warning.*
- Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal.
- Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan.
- Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan dalam rangka kegiatan penyusunan laporan keuangan terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Di samping itu juga melaksanakan asistensi terhadap 144 kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul terkait pertanggungjawaban APBKal dan penyusunan Rencana APBKal tahun berikutnya.
- Membuka layanan klinik konsultasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada dasarnya diambil dari indikator *outcome* dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan sebenarnya merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan semua kegiatan.

Program dan kebijakan yang ada pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah. Tahun 2026 ini merupakan masa transisi dan merupakan tahun pertama dalam periode RPJMD Tahun 2025-2029 sehingga mengacu pada Visi dan Misi Bupati terpilih. Inspektorat Daerah sebagai salah satu organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan tupoksi sebagai institusi pengawasan, mempunyai peran yang strategis dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, ekonomis, akutabel dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Seperti yang diuraikan dalam teori manajemen, peran pengawasan yang dimiliki Inspektorat Daerah berfungsi mendorong kelancaran dan kecepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran keuangan Negara/Daerah.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Inspektorat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)										
	Nilai Maturitas SPIP	Indeks	3,2	3,86	3,88	3,89	3,85	3,85	3,87	3,88	Interval skor *Matirity Level SPIP*. Menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,00	81,00	81,50	82,00	81,77	81,77	81,50	82,00	Hasil dari Reviu Irda terkait evaluasi LKjIP Perangkat Daerah
2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)										
	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam Renja dibagi jumlah program dalam RKPD dan jumlah program dalam Renstra dibagi jumlah program dalam RPJMD
	Nilai IKM Inspektorat	Nilai	81	81	81,5	81,5	79,32	80,06	81,5	81,5	Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang terisi dikali nilai penimbang
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan administrasi perkantoran dibagi jumlah administrasi perkantoran yang dibutuhkan x 100%
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sarana prasarana aparatur	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana dibagi jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan x 100%
	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang dibagi jumlah PNS x 100%
	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah laporan keuangan disusun tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan disusun x 100%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

   Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal, Inspektorat Daerah menghadapi beberapa permasalahan, sebagaimana tersebut di bawah ini:

   Kondisi :

   a. Kurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan internal (82%);
   b. Sumber Daya Manusia (jabatan fungsional maupun pelaksana) yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Gunungkidul masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitasnya;
   c. Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pengawasan.

   Permasalahan :

   a. kurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan internal (82%) serta Belum optimalnya pengelolaan risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
   b. Jumlah dan kompetensi Teknis APIP belum optimal sehingga kegiatan pengawasan belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra;
   c. Belum memadai sarana pendukung pengawasan serta Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;
   d. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) belum optimal digunakan dalam kegiatan pengawasan.

2. Dampak terhadap Pencapaian

   Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan bebas KKN. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat.

   Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

   a. Belum semua aparatur pengawasan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;
   b. Belum terpenuhinya sumber daya manusia baik untuk Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD maupun fungsional umum;
   c. Sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan yang belum memadai;
   d. Jumlah anggaran untuk APIP belum bisa memenuhi ketentuan Permendagri;
   e. Perubahan paradigma pengawasan dari *watchdog* menjadi *assurance* memerlukan kesiapan dan komitmen seluruh komponen APIP.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan PD

   Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dibagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasikan faktor ekstern terutama merumuskan ancaman.

Lingkungan internal terdiri dari kekuatan *(Strengths)* dan kelemahan *(Weaknesses).* Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

Kekuatan

Pada dasarnya, Inspektorat Daerah mempunyai beberapa hal yang dapat menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan organisasi yaitu :

a. Kode Etik dan Standar Kerja yang jelas
   Beberapa standar kerja Inspektorat antara lain Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kabupaten Gunungkidul. Standar Kerja disusun untuk menjaga agar kualitas hasil pengawasan tidak mengalami penurunan.
b. Pembagian kerja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
d. Piagam Audit (*Audit Charter*).
e. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul dan Surat Perintah Tugas sebagai aplikasi program kerja Inspektorat Daerah yang merupakan rangkaian ketentuan mengenai pembagian kerja.

Kelemahan

Hal-hal yang masih menjadi kelemahan Inspektorat Daerah yaitu :

a. Kompetensi auditor dan P2UPD belum dapat memenuhi ketentuan dan belum merata.
   Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang maka setiap auditor dan P2UPD harus mengikuti diklat minimal 120 jam pertahun.
   Berdasarkan peta kompetensi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, kondisi pemenuhan kompetensi SDM di Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Kebutuhan	Bezzeting	Kekurangan
1.	Pejabat struktural	9	8	1
2.	Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	64	31	33
3.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)	16	7	9
4.	JF Lainnya	7	2	5
5.	Pelaksana	27	5	22
Jumlah		123	53	70

b. Prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.
   Selain belum mencukupinya sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana kerja juga tidak sebanding dengan beban kerja, dan secara umum belum mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, seperti kendaraan operasional untuk mendukung

sistem kerja tim, ruang dokumen/arsip yang masih terbatas, dan alat penguji/pendukung pemeriksaan.

c. Belum optimalnya system/aplikasi E-audit yang komprehensif untuk mendukung kecepatan, ketepatan, dan optimalisasi layanan pemeriksaan.
   Kebutuhan akan E-audit saat ini sudah sangat urgen mengingat jumlah SDM auditor maupun SDM pada obyek pemeriksaan yang semakin terbatas. Selain itu dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, perlu diimbangi dengan *tools* atau alat kerja yang memadai, termasuk dalam kegiatan pengawasan dan audit. Saat ini Inspektorat sudah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMTLHP) sebagai inovasi untuk mendukung optimalisasi kinerja yang memuat beberapa modul yang dibutuhkan untuk melakukan *e-audit*. Aplikasi ini dinamakan "WASGITEL" yaitu Pengawasan Gunungkidul Terintegrasi Elektronik.

Peluang *(Opportunities)*
Faktor-faktor dari luar Inspektorat Daerah yang memberikan kemungkinan organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar yaitu :

1. Regulasi yang mengatur Sistem Pengawasan Internal.
   Semua teori manajemen menyebutkan pengawasan atau pengendalian *(controlling)* sebagai salah satu fungsi manajemen. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mutlak memerlukan Inspektorat Daerah untuk menjamin dilaksanakannya kebijakan demi tertibnya organisasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum.
   Berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat menginginkan suatu pemerintahan yang lebih baik. Isu KKN ditanggapi oleh Pemerintah dengan mengeluarkan seperangkat kebijakan pemberantasan KKN. Beberapa kebijakan yang dapat dikemukakan antara lain :
   a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
   b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
   d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
   e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
3. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat
   Teknologi informasi menjadi peluang besar untuk mendukung ketugasan dan kinerja Inspektorat Daerah, karena melalui TI akan dapat mempermudah, mempercepat, serta mendorong akuntabilitas dalam penugasan.
4. Perkembangan media massa yang semakin pesat
   Media massa menjadi peluang dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga melalui kontrol media massa, aparatur pemerintah baik di Pemda

maupun kalurahan diharapkan kinerjanya akan lebih baik, transparan dan akuntabel.

5. Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan.

   Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan adalah Lembaga/PD dan Kalurahan dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai UPT dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dan UPT Puskesmas sebagai bagian dari Dinas Kesehatan, sehingga semua potensi yang ada dapat dilaksanakan secara optimal. Setiap tahunnya Inspektorat telah berusaha melaksanakan pendampingan terhadap 5 (aspek) pemeriksaan seperti Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Penatausahaan Keuangan Aset, Persediaan, Pengelolaan Piutang Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial, selain itu juga melakukan asistensi dengan sasaran penyusunan pertanggungjawaban APBKal serta penyusunan Rencana APBKal terhadap 144 kalurahan.

Ancaman (Threats)

Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang berpotensi mengancam eksistensi organisasi yaitu :

1. Kurangnya optimalnya dukungan atau komitmen beberapa stakeholder terhadap pengawasan.
2. Kurangnya kepedulian obyek pemeriksaan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan.

   Kepedulian obyek pemeriksaan dalam tindaklanjut hasil pemeriksaan diukur dari kecepatan penyelesaian pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan.

   Semakin lambat tindaklanjut diselesaikan, semakin rendah tingkat kepedulian obyek pemeriksaan terhadap eksistensi Inspektorat Daerah dan perbaikan kinerja instansi itu sendiri.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 adalah :

1. Ketersediaan data dan kelengkapan pemeriksaan.
2. Penambahan PNS baik Jabatan Fungsional Auditor, PPUPD untuk memenuhi kekurangan personel pemeriksa, serta penambahan SDM Fungsional Umum untuk membantu tugas-tugas di kesekretariatan.

2.4 REVIU TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil reviu, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini berimbas ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dibutuhkan.

Penjabaran program kegiatan berdasarkan reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100 Persen	1.193.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100 Persen	638.884.400	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4 Layanan	601.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4 Layanan	401.052.500	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	96 Laporan	165.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	99 Laporan	125.190.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 Laporan	165.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	18 Laporan	14.260.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	115.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	144 Laporan	76.787.500	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	156.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	125 Laporan	39.895.000	
						Pengawasan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	18 Laporan	48.190.000	Penyesuaian Nomenklatur 1350
						Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	2 kesepakatan	21.230.000	Penyesuaian Nomenklatur 1351
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokuemn	75.500.000	Penyesuaian Nomenklatur 1352
	Kegiatan :					Kegiatan :					
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamata	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	120 Dokumen	592.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamata	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	120 Dokumen	237.831.900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		n, Semua Kel/Desa					n, Semua Kel/Desa				
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	11 Laporan	56.821.400	Penyesuaian Nomenklatur 1350
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	53 Laporan	592.000.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	181.010.500	
II.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100 Persen	324.652.100	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100 Persen	1.006.028.900	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	9 Dokumen	6.992.450	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	9 Dokumen	17.150.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	3.488.200	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	10.450.000	
					3.504.250					6.700.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi		
	Kegiatan :					Kegiatan :					
2.	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	3 Layanan	317.659.650	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	3 Layanan	988.878.900	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	191 perangkat daerah	307.500.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	191 perangkat daerah	160.425.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	191 perangkat daerah	10.159.650	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	191 perangkat daerah	96.295.000	
						Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	610.262.500	Penyesuaian Nomenklatur 1350
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamata	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47 Perangkat Daerah	121.896.400	Penyesuaian Nomenklatur 1350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							n, Semua Kel/Desa				
III.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	9.669.235.284	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	6.031.976.649	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 layanan	75.718.015	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 layanan	37.535.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	66.633.180	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	34.929.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	607.225	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	397.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	609.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	397.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1.848.960	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	689.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.134.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	587.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	2.102.550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	736.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.782.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.704.500	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29 Dokumen	8.695.322.884	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29 Dokumen	4.441.302.119	
	Sub Kegiatan :										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/ bulan	8.686.559.584	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/ bulan	4.437.609.119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	845.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	693.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	7.918.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	3.000.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49 orang	89.008.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49 orang	372.196.800	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	7.008.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	14.006.800	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Gunungkidul,	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	30 Orang	82.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Gunungkidul,	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	52 Orang	358.190.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
	Kegiatan :					Kegiatan :					
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5 layanan	364.075.883	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5 layanan	736.349.400	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.022.350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.630.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	57.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	111.149.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	131.470.270	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	194.770.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21.031.813	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	24.877.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	1.674.550	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	1.080.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	13.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	133.126.900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	381.343.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48 Unit	125.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48 Unit	298.139.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Gunungkidul, Semua	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	75.000.000	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	54 Unit	309.829.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan, Semua Kel/Desa					Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang DisediakanJumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.000.000						
	Kegiatan :					Kegiatan :					
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3 Layanan	166.402.502	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3 Layanan	150.143.500	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.402.502	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.320.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	165.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	143.823.500	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Gunungkidul, Semua	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	4 Layanan	153.707.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Gunungkidul, Semua	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	4 Layanan	626.275.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Semua Kel/Desa				Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	208 Unit	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	208 Unit	274.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	17.575.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	36.000.000	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.835.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.132.500	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	18.640.000	
				JUMLAH	11.186.887.384				JUMLAH	8.431.961.119	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah tidak ada usulan program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, karena sesuai dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan.

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan	Anggaran	C
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri seperti halnya Perangkat Daerah (PD) yang lain di Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut disebabkan karena BPKP merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini memunculkan beberapa permasalahan karena adanya perbedaan standar pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah mengutamakan tandar dari BPKP di samping standar yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan menyesuaikan kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya pengawasan hasil diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang setara secara nasional.

Peran Inspektorat sebagai institusi pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mentaati hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul.Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance,* Inspektorat Daerah harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah juga harus bisa memberikan arahan dari permasalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi-kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih berkualitas.

5.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan yang dijadikan pedoman Inspektorat Daerah adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja serta mengacu pada tema dan prioritas pembangunan dan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun yang menjadi tujuan Inspektorat Daerah, dituangkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Inspektorat Daerah

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD akhir Tahun 2030
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3,350

Tabel 3.2
Sasaran Inspektorat Daerah

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2026
1.	Terwujudnya pengawasan *(assurance dan consulting)* sesuai standar dan praktik profesional yang berkualitas serta mendukung perbaikan tata kelola bagi Perangkat Daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,16

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomer : PE.09.03/LHP-219/PW12/2024 Tanggal 9 Agustus 2024, pada angka 3 disarankan agar Inspektur melaporkan kepada Sekretaris Daerah secara tertulis untuk merubah Indikator Kinerja Utama (IKU) Level Kapabilitas APIP sebagai IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan mengalihkan IKU Indeks Maturitas SPIP sebagai IKU Pemda sesuai kewenangannya.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Inspektorat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	3,27
2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terwujudnya pengawasan (assurance dan consulting) sesuai standar dan praktik profesional yang berkualitas serta mendukung perbaikan tata kelola bagi Perangkat Daerah	3,16

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah dengan mempertimbangkan tugasnya dalam Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan serta Pengawasan Penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Daerah, maka Inspektorat Daerah mendukung Misi Kelima Bupati yaitu“ Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.” dengan berpedoman pada program strategisnya yaitu “Pamong Nglayani dan Ngayomi”

Adapun sasaran, program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada tahun 2026, tidak ada perubahan sebagaimana yang tertuang dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah Tahun 2026

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
1.	Terwujudnya pengawasan *(assurance dan consulting)* sesuai standar dan praktik profesional yang berkualitas serta mendukung perbaikan tata kelola bagi Perangkat Daerah	Program : Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah.

Tahun 2026 merupakan tahun transisi/peralihan dari RPJMD /Renstra yang lama kepada RPJMD/Renstra yang baru, sehingga terdapat penyesuaian IKU Inspektorat Daerah untuk rencana 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini berdasarkan rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Pagu anggaran yang direncanakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat tahun 2026 sejumlah Rp7.676.889.949,00 (tujuh milyard enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah)

Adapun uraian Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2026 tertuang dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2026

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya pengawasan *(assurance dan consulting)* sesuai standar dan praktik profesional yang berkualitas serta mendukung perbaikan tata kelola bagi Perangkat Daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,16	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	638.884.400	IRDA
					6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	401.052.500	IRDA
					6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	125.190.000	IRDA
					6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	14.260.000	IRDA
					6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	76.787.500	IRDA
					6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	39.895.000	IRDA
					6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	48.190.000	IRDA
					6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	21.230.000	IRDA
					6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	75.500.000	IRDA
					6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	237.831.900	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	56.821.400	IRDA
					6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	181.010.500	IRDA
					6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.006.028.900	IRDA
					6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	17.150.000	IRDA
					6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10.450.000	IRDA
					6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	6.700.000	IRDA
					6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	988.878.900	IRDA
					6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	160.425.000	IRDA
					6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	96.295.000	IRDA
					6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	610.262.500	IRDA
					6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi, Penegakan Integritas	121.896.400	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.787.047.819	IRDA
					6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.442.000	IRDA
					6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.929.000	IRDA
					6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	397.500	RDA
					6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	397.500	IRDA
					6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	689.500	IRDA
					6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	587.500	IRDA
					6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	736.500	IRDA
					6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.704.500	IRDA
					6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.441.302.119	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.437.609.119	IRDA
					6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	693.000	IRDA
					6.01.01.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	IRDA
					6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	372.196.800	IRDA
					6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.006.800	IRDA
					6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	358.190.000	IRDA
					6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	736.349.400	IRDA
					6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.630.000	IRDA
					6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.149.000	IRDA
					6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	194.770.000	IRDA
					6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.877.400	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	IRDA
					6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000	IRDA
					6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381.343.000	IRDA
					6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.829.000	IRDA
					6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	309.829.000	IRDA
					6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.143.500	IRDA
					6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.320.000	IRDA
					6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.823.500	IRDA
					6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.785.000	IRDA
					6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.800.000	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000	IRDA
					6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	408.835.000	IRDA
					6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.640.000	IRDA

Tabel 4.3
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2026

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Maju (Rp)	PD
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	638.884.400	590.928.200	IRDA
	Kegiatan :			
1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	401.052.500	316.650.000	IRDA
1.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	237.831.900	274.278.200	IRDA
2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.006.028.900	1.069.008.900	IRDA
	Kegiatan :			
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	17.150.000	15.400.0000	IRDA
1.2	Pendampingan dan Asistensi	988.878.900	1.053.608.900	IRDA
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.787.047.819	6.009.902.849	IRDA
	Kegiatan :			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.442.000	34.600.500	IRDA
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.441.302.119	3.873.532.949	IRDA
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	372.196.800	367.007.000	IRDA
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	736.349.400	1.003.393.000	IRDA
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	309.829.000	80.000.000	IRDA
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.143.500	130.330.000	IRDA
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.785.000	521.039.400	IRDA
	JUMLAH	8.431.961.119	7.669.839.949	

Tabel 4.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		Kabupaten Gunungkidul		8.431.961.119	DAU			7.669.839.949
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	83,14 Persen	6.787.047.819	DAU			6.009.902.849
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	-	39.442.000	DAU			34.600.500
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	4 Dokumen	34.929.000	DAU		4 Dokumen	30.255.000
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	1 Dokumen	397.500	DAU		1 Dokumen	360.000
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	1 Dokumen	397.500	DAU		1 Dokumen	360.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	2 Dokumen	689.500	DAU		2 Dokumen	642.000
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul	2 Dokumen	587.500	DAU		2 Dokumen	555.000
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gunungkidul	17 Laporan	736.500	DAU		17 Laporan	736.500
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	5 Laporan	1.704.500	DAU		5 Laporan	1.692.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul	-	4.441.302.119	DAU			3.873.532.949
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Gunungkidul	728 Orang/ bulan	4.437.609.119	DAU		728 Orang/ bulan	3.869.839.949
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Gunungkidul	1 Laporan	693.000	DAU		1 Laporan	693.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Gunungkidul	13 Laporan	3.000.000	DAU		13 Laporan	3.000.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Gunungkidul	-	372.196.800	DAU			367.007.000
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Gunungkidul	6 Dokumen	14.006.800	DAU		6 Dokumen	14.007.000
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Gunungkidul	52 Orang	358.190.000	DAU		41 Orang	353.000.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum	Kabupaten Gunungkidul	-	736.349.400	DAU			1.003.393.000
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul	4 Paket	9.630.000	DAU		4 Paket	9.630.000
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul	4 Paket	111.149.000	DAU		4 Paket	390.084.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul	4 Paket	194.770.000	DAU		4 Paket	196.871.000
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul	4 Paket	24.877.400	DAU		4 Paket	32.650.000
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul	260 Dokumen	1.080.000	DAU		260 Dokumen	1.080.000
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Gunungkidul	4 Laporan	13.500.000	DAU		4 Laporan	13.500.000
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Gunungkidul	52 Laporan	381.343.000	DAU		44 Laporan	359.578.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Gunungkidul	-	309.829.000	DAU			80.000.000
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul	54 Unit	309.829.000	DAU		6 Unit	80.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Gunungkidul	-	150.143.500	DAU			130.330.000
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Gunungkidul	12 Laporan	6.320.000	DAU		12 Laporan	6.300.000
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul	36 Laporan	143.823.500	DAU		36 Laporan	124.030.000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Gunungkidul	-	737.785.000	DAU			521.039.400
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Gunungkidul	208 Unit	274.800.000	DAU		208 Unit	274.800.000
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Gunungkidul	70 Unit	36.000.000	DAU		42 Unit	16.800.000
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Gunungkidul	1 Unit	408.345.000	DAU		0 Unit	178.710.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Gunungkidul	71 Unit	18.640.000	DAU		15 Unit	50.729.400
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Kabupaten Gunungkidul	100 Persen	638.884.400	DAU			590.928.200
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Pengawasan Internal	Kabupaten Gunungkidul	-	401.052.500	DAU			316.650.000
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Gunungkidul	99 Laporan	125.190.000	DAU		96 Laporan	26.340.000
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Gunungkidul	18 Laporan	14.260.000	DAU		56 Laporan	50.045.000
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Gunungkidul	144 Laporan	76.787.500	DAU		5 Laporan	25.025.000
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Gunungkidul	125 Laporan	39.895.000	DAU		30 Laporan	24.660.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten Gunungkidul	18 Laporan	48.190.000	DAU		28 Laporan	45.800.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kabupaten Gunungkidul	2 kesepakatan	21.230.000	DAU		2 kesepakatan	18.530.000
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Gunungkidul	6 Dokuemn	75.500.000	DAU		6 Dokuemn	126.250.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Kabupaten Gunungkidul	-	237.831.900	DAU			274.278.200
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kabupaten Gunungkidul	11 Laporan	56.821.400	DAU		11 Laporan	55.696.400
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Gunungkidul	10 Laporan	181.010.500	DAU		53 Laporan	218.581.800
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Gunungkidul	3,02 Skor	1.006.028.900	DAU			1.069.008.900
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan tersusun	Kabupaten Gunungkidul	-	17.150.000	DAU			15.400.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kabupaten Gunungkidul	3 Rekomendasi	10.450.000	DAU		3 Rekomendasi	8.950.000
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kabupaten Gunungkidul	6 Rekomendasi	6.700.000	DAU		6 Rekomendasi	6.450.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Gunungkidul	-	988.878.900	DAU			1.053.608.900
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Gunungkidul	191 perangkat daerah	160.425.000	DAU		191 perangkat daerah	255.720.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Gunungkidul	191 perangkat daerah	96.295.000	DAU		191 perangkat daerah	93.010.000
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifi kasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Gunungkidul	5 Kegiatan	610.262.500	DAU		8 Kegiatan	587.432.500
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifi kasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifi kasi Penegakan Integritas	Kabupaten Gunungkidul	47 Perangkat Daerah	121.896.400	DAU		47 Perangkat Daerah	117.446.400

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Inspektorat sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi paparan risiko PD dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajenen risiko. Manajenen risiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing PD yang memiliki risiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang diusulkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka pemantauan perkembangan penyelesaian temuan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan survey penilaian integritas oleh KPK.
3. Melaksanakan asistensi/pendampingan terhadap 144 kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban APBKal dan rencana penyusunan APBKal tahun berikutnya.
4. Melaksanakan mandatori pengawasan dari pusat antara lain reviu Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah sebagaimana amanat KPK terkait *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MSCP)* yang memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka tindaklanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi tingkat nasional
5. Meningkatkan Kapasitas SDM, Sarana dan Prasarana.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
INSPEKTORAT DAERAH

ttd

SAPTOYO

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diterapkannya otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah membawa banyak perubahan sistem dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan di Kabupaten. Desentralisasi merubah sistem yang semula sentralistik, sehingga dengan desentralisasi diharapkan akan membawa perubahan peran pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan.

Program-program pembangunan yang disusun secara keseluruhan dirangkum dalam satu bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu jangka pendek (1 tahun). Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2026 pada prinsipnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2030 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2025-2030.

Selain itu Rencana Kerja Dinas Kesehatan untuk menselaraskan dari arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan tahun 2025- 2029 dan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan secara terintegrasi dalam fokus dan lokus kegiatan. Rencana kerja Dinas Kesehatan memperhatikan juga visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Renstra Propinsi DIY. Dengan demikian, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul tidak lepas dari program yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan dan Provinsi DIY

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2026 ini didasarkan pada peraturan dan perundang–undangan yang ada agar mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi bisa sinkron dengan peraturan di tingkat Pusat maupun daerah. Adapun landasan hukum untuk menyusun Rencana kerja Tahun 2026 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang telah tertuang dalan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gunungkidul, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 adalah untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai referensi dan pedoman dalam menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2026 dan proses awal penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN
- 4.1 Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
- 4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP
- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan pada Tahun 2026 tetap mengacu pada pencapaian indikator program kesehatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030 maupun dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2030.

Berdasarkan APBD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tahun 2025 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2025, Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi belanja Operasi sebesar Rp. 329.978.253.673,00 dan belanja modal sebesar Rp 44.524.374.591,00 untuk melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 24 kegiatan. Dari anggaran tersebut, sampai dengan Bulan Mei 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp 115.970.075.063,00 (31%).

Tahun 2026 merupakan tahun ketiga periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Oleh karena itu evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026 dapat dikaitkan dengan dokumen perencanaan jangka menengah atau dengan Renstra masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Menurut Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2030, pada tahun 2026 terdapat 5 program yang dijabarkan kedalam 23 kegiatan dan 81 sub kegiatan dengan pagu pendanaan indikatif sebesar Rp 327.358.054.548,51.

Faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2026 antara lain:

1. Meningkatnya koordinasi antar bidang dan mutu data/informasi pembangunan serta hasil monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,
2. Komitmen PD mitra dan para pemangku kepentingan yang cukup baik untuk mewujudkan keselarasan antar lembaga dan antar waktu dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,
3. Perbaikan dalam mutu layanan PD baik secara kuantitas maupun kualitas untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Apabila dilihat dari pencapaian target program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2024 yang merupakan tahun kedua periode Renstra, tingkat capaian dari masing-masing output kegiatan sangat bervariatif. Karena ada beberapa output kegiatan yang selesai pada tahun 2024 ini sehingga tingkat capaiannya 100%, ada pula yang ditargetkan setiap tahun sehingga target pada akhir periode Renstra merupakan akumulasi dari lima tahun periode Renstra. Realisasi tingkat Capaian Kinerja program dan kegiatan dalam Renstra sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 76%. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi capaian tahun 2026 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitukasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s.d tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
DINAS KESEHATAN															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100|Persen	1.206.423.387.056	10|Persen	475.657.602.430	100|Persen	274.503.760.973	100 Persen	254.985.625.116	60.2	61	100	92.89	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu	100|Persen	91.397.000	25|Persen	201.017.500	100|Persen|Persen	66.885.970	25|Persen	61.779.914	57.8	59	100	92.37	
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-		0	2|Dokumen	600	2|Dokumen	600	0	0	100	100	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-		0	3|Dokumen	28.518.470	3|Dokumen	28.434.914	0	0	100	99.71	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-		0	1|Dokumen	27.117.500	1|Dokumen	22.095.000	0	0	100	81.48	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-		0	1|Dokumen	600	1|Dokumen	600	0	0	100	100	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-		0	2|Dokumen	600	2|Dokumen	600	0	0	100	100	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-		0	21|Laporan	9.450.000	12|Laporan	9.450.000	0	0	57.14	100	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel	100|Persen	91.761.643.493	25|Persen	165.132.823.623	100|Persen|Persen	95.720.209.499	25|Persen	91.733.499.331	60	56	100	95.84	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		-		0	13230|Orang/bulan	95.615.716.999	14198|Orang/bulan	91.633.014.501	0	0	107.32	95.83	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-		0	1|Laporan	4.280.000	1|Laporan	4.220.000	0	0	100	98.6	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-		0	13|Laporan	100.212.500	9|Laporan	96.264.830	0	0	69.23	96.06	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah terpenuhi	100|Persen	49.006.000	25|Persen	48.810.000	100|Persen|Persen	37.831.900	25|Persen	34.448.252	60	34	100	91.06	
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-		0	0|Dokumen	37.831.900	0|Dokumen	34.448.252	0	0	0	91.06	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase administrasi umum perangkat daerah terpenuhi	100|Persen	4.072.120.000	25|Persen	448.628.833	100|Persen|Persen	161.311.000	25|Persen	109.309.307	59.6	3	100	67.76	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-		0	45|Paket	73.520.000	40|Paket	72.460.032	0	0	88.89	98.56	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-		0	5|Laporan	87.791.000	5|Laporan	36.849.275	0	0	100	41.97	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	0|Persen	-		0	0|Persen|Persen	-		-	87.5	45	0	0	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100|Persen	384.773.000	25|Persen	656.326.337	100|Persen|Persen	335.666.860	25|Persen	336.330.635	59.8	51	100	100.2	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan Daerah	terpenuhi													
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-		0	212|Laporan	335.666.860	209|Laporan	336.330.635	0	0	98.58	100.2	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	100|Persen	432.960.000	25|Persen	1.175.326.078	100|Persen|Persen	641.962.500	25|Persen	608.706.275	60	83	100	94.82	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-		0	15|Unit	327.000.000	15|Unit	321.778.775	0	0	100	98.4	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-		0	20|Unit	17.250.000	20|Unit	17.250.000	0	0	100	100	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-		0	1|Unit	287.212.500	1|Unit	259.177.500	0	0	100	90.24	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-		0	37|Unit	10.500.000	37|Unit	10.500.000	0	0	100	100	
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	IKM Penyelenggaraan BLUD	78.9|Indeks	145.927.188.978	0|Indeks	307.977.450.059	78.9|Indeks|Indeks	177.539.893.244	78.90|Indeks	162.101.551.402	60.84	65	100	91.3	
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	IKM PD	80.3|Indeks	12.480.000		0	80.3|Indeks|Indeks	-	80.3|Indeks	-	60.35	13	100	0	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase faskes pemerintah yang ter akreditasi dengan jenjang paripurna	15.15|Pers e n	1.244.150.639.652	6.6|P erse n	217.582.521.502	9.9|Persen	96.117.963.323	0 Persen	92.239.667.254	63.56	25	0	95.97	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentasae pemenuhan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP	100|Persen	38.140.482.022	25|Per sen	80.844.036.222	100|Persen|P ers en	35.320.990.956	25|Persen	33.497.406.270	60	67	100	94.84	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		-		0	2|Paket	11.614.761.090	2|Paket	11.302.242.804	0	0	100	97.31	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		-		0	360|Paket	225.536.876	360|Paket	217.785.263	0	0	100	96.56	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		-		0	1|Unit	1.292.237.600	1|Unit	1.143.473.100	0	0	100	88.49	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai		-		0	1|Unit	680.125.000	1|Unit	605.154.240	0	0	100	88.98	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Standar													
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		-		0	1|Unit	286.467.240	1|Unit	264.646.200	0	0	100	92.38	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		-		0	10|Unit	2.561.172.000	10|Unit	2.297.277.603	0	0	100	89.7	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		-		0	540|Unit	8.338.969.950	540|Unit	7.747.612.050	0	0	100	92.91	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		-		0	252|Unit	67.580.000	244|Unit	60.520.000	0	0	96.83	89.55	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PersentasePemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100|Persen	210.006.444.193	25|Persen	136.467.985.442	100|Persen|Persen	60.614.143.767	25|Persen	58.563.566.554	55	18	100	96.62	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	1200|Orang	1.070.000	805|Orang	1.070.000	0	0	67.08	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	1|Dokumen	108.578.000	0|Dokumen	87.387.392	0	0	0	80.48	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	6314|Orang	83.620.000	5725|Orang	83.519.420	0	0	90.67	99.88	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	5517|Orang	3.140.000	5796|Orang	3.139.850	0	0	105.06	100	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	5500|Orang	6.520.000	5169|Orang	6.469.710	0	0	93.98	99.23	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	36534|Orang	171.830.000	28723|Orang	171.829.790	0	0	78.62	100	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	8724|Orang	67.912.000	8724|Orang	67.032.870	0	0	100	98.71	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	516023|Orang	563.075.000	266812.516|Orang	560.503.000	0	0	51.71	99.54	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan		-		0	83204|Orang	134.860.000	72032|Orang	134.859.680	0	0	86.57	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Lanjut	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	35260|Orang	12.950.000	11333|Orang	12.681.000	0	0	32.14	97.92	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	8546|Orang	7.180.000	3593|Orang	7.180.000	0	0	42.04	100	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		-		0	1612|Orang	51.240.000	1491|Orang	51.218.000	0	0	92.49	99.96	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	4397|Orang	386.386.000	4305|Orang	386.385.562	0	0	97.91	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	10108|Orang	60.797.500	7006|Orang	55.879.505	0	0	69.31	91.91	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		-		0	15|Dokumen	816.147.517	15|Dokumen	816.147.513	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	4|Dokumen	626.439.600	2|Dokumen	625.505.381	0	0	50	99.85	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	7|Dokumen	61.167.250	7|Dokumen	60.244.414	0	0	100	98.49	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		-		0	6|Dokumen	335.190.000	6|Dokumen	316.666.577	0	0	100	94.47	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		-		0	1|Dokumen	12.910.000	1|Dokumen	12.908.690	0	0	100	99.99	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	12|Dokumen	344.920.000	12|Dokumen	304.377.049	0	0	100	88.25	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		-		0	1632|Orang	131.298.000	516|Orang	131.297.999	0	0	31.62	100	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		-		0	1632|Orang	25.940.000	0|Orang	25.940.000	0	0	0	100	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		-		0	4|Dokumen	5.400.000	2|Dokumen	5.399.710	0	0	50	99.99	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	7|Dokumen	870.439.700	7|Dokumen	811.591.356	0	0	100	93.24	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		-		0	1|Dokumen	37.243.540.400	1|Dokumen	37.227.012.471	0	0	100	99.96	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		-		0	1|Dokumen	6.000.000	1|Dokumen	5.999.820	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		-		0	30|Unit	13.700.000	0|Unit	13.699.073	0	0	0	99.99	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		-		0	1|Unit	321.599.000	0|Unit	260.721.198	0	0	0	81.07	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	1020|Orang	715	355|Orang	715	0	0	34.8	100	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		-		0	1|Orang	300	0|Orang	-	0	0	0	0	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Integrasi Sistem Informasi Kesehatan	100|Persen	12.013.000		0	100|Persen|Persen	140.173.600	25|Persen	136.040.000	55	222	100	97.05	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	66.000.000	0	65.000.000	0	0	0	98.48	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas	100|Persen	2.342.792.000	25|Persen	270.499.838	100|Persen|Persen	42.655.000	25|Persen	42.654.430	76.2	2	100	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan lainnya memiliki izin operasional													
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		-		0	8|Unit	6.955.000	27|Unit	6.955.000	0	0	337.5	100	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		-		0	30|Unit	35.700.000	0|Unit	35.699.430	0	0	0	100	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar	100|Persen	2.086.431.000	100|Perse n	2.091.130.250	100|Persen	1.439.709.000	100 Persen	1.427.096.988	55.6	169	100	99.12	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan Praktik Profesi memiliki Surat Izin Praktik	100|Persen	11.025.000	0|Persen	10.600.000	100|Persen|Pers en	4.820.000	25|Persen	4.820.000	49.2	28	100	100	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		-		0	780|Dokumen	4.820.000	644|Dokumen	4.820.000	0	0	82.56	100	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia	Persentase Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100|Persen	33.075.000	0|Persen	1.884.198.250	100|Persen|Pers en	123.696.000	25|Persen	123.694.063	53	1.211	100	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
	Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul terpenuhi													
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		-		0	1|Dokumen	4.880.000	1|Dokumen	4.880.000	0	0	100	100	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		-		0	1|Dokumen	118.816.000	1|Dokumen	118.814.063	0	0	100	100	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	100|Persen	385.875.000	0|Persen	196.332.000	100|Persen|Persen	1.311.193.000	25|Persen	1.298.582.925	49.6	80	100	99.04	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		-		0	45|Orang	1.311.193.000	0|Orang	1.298.582.925	0	0	0	99.04	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin	100|Persen	1.755.078.000	100|Persen	575.318.570	100|Persen	397.987.790	100 Persen	381.868.100	56.6	55	100	95.95	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase perijinan sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman terbit tepat waktu	100|Persen	18.325.000		0	100|Persen|Persen	63.730.000	25|Persen	61.170.000	45	107	100	95.98	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		-		0	4|Dokumen	63.730.000	4|Dokumen	61.170.000	0	0	100	95.98	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga terpenuhi	100|Persen	143.064.000	0|Persen	293.428.870	100|Persen|Persen	140.780.000	25|Persen	132.115.000	56.6	56	100	93.85	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		-		0	4|Dokumen	140.780.000	4|Dokumen	132.115.000	0	0	100	93.85	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga terpenuhi	100|Persen	191.536.000	0|Persen	245.379.700	100|Persen|Persen	193.477.790	25|Persen	188.583.100	50	48	100	97.47	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		-		0	43|Unit	193.477.790	43|Unit	188.583.100	0	0	100	97.47	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Kalurahan Sehat	24,31|Persen	3.588.466.000	86.11|Persen	587.018.680	17,36|Persen	3.549.187.500	0 Persen	3.417.303.496	126.49	112	0	96.28	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta KIE keamanan pangan	100|Persen	127.185.000		0	100|Persen|Pers en	33.000.000	25|Persen	33.000.000	30	7	100	100	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		-		0	1|Dokumen	33.000.000	0|Dokumen	33.000.000	0	0	0	100	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	30|Persen	370.440.000	0|Persen	261.832.096	30|Persen|Perse n	37.147.500	30|Persen	36.314.586	58	19	100	97.76	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		-		0	4|Dokumen	37.147.500	4|Dokumen	36.314.586	0	0	100	97.76	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu aktif	40|Persen	329.366.000	0|Persen	151.674.584	40|Persen|Perse n	3.479.040.000	40|Persen	3.347.988.910	67.5	242	100	96.23	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
			4		5		6		7		8		9	10	
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	3|Dokumen	105.290.000	3|Dokumen	105.288.139	0	0	100	100	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase fasilitas kesehatan yang mengembangkan kearifan lokal dan potensi budaya	100|Persen	17.000.000	0|Persen	422.170.000	100|Persen	-	0 Persen	-	25	2.483	0	0	
2.22.08.2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase Puskesmas yang mengembangkan upaya kesehatan dasar dan tradisional	100|persen	3.000.000		0	100|persen|persen	-	25|persen	-	40	0	100	0	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			-		0		715.678.000	0	712.940.170	0	0	0	99.62	
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan			-		0		715.678.000	0	712.940.170	0	0	0	99.62	
4.01.04.5.02.01	Implementasi Budaya PemerintahanKabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		-		0	1|Dokumen	715.678.000	0	712.940.170	0	0	0	99.62	
UPT Puskesmas Nglipar I															
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	1.186.488.297	1|Unit Kerja	1.168.004.519	0	0	100	98.44	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BLUD														
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	119|Orang	2.400.000	14|Orang	2.400.000	0	0	11.76	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	3|Dokumen	8.400.000	3|Dokumen	8.400.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	13|Dokumen	46.030.000	19|Dokumen	44.880.000	0	0	146.15	97.5	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	144|Orang	25.020.000	26|Orang	24.880.000	0	0	18.06	99.44	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	144|Orang	10.140.000	26|Orang	8.100.000	0	0	18.06	79.88	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	1275|Orang	18.200.000	626|Orang	18.200.000	0	0	49.1	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	68|Orang	1.900.000	93|Orang	1.900.000	0	0	136.76	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	111|Orang	400	72|Orang	-	0	0	64.86	0	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	4|Dokumen	132.954.000	8|Dokumen	129.954.000	0	0	200	97.74	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	2|Dokumen	6.600.000	2|Dokumen	6.600.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	6|Dokumen	76.930.000	9|Dokumen	74.920.000	0	0	150	97.39	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	10|Dokumen	48.800.000	20|Dokumen	46.600.000	0	0	200	95.49	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	16|Dokumen	154.670.000	16|Dokumen	128.286.351	0	0	100	82.94	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1|Laporan	2.400.000	2|Laporan	2.400.000	0	0	200	100	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	50|Orang	1.500.000	9|Orang	1.500.000	0	0	18	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.061.000	1|Dokumen	2.950.000	0	0	100	96.37	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	20 | Dokumen	152.400.000	22 | Dokumen	152.060.000	0	0	110	99.78	
	UPT Puskesmas Nglipar II														
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1 | Unit Kerja	1.363.894.297	0 | Unit Kerja	1.328.574.724	0	0	0	97.41	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	5 | Orang	400	4 | Orang	-	0	0	80	0	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	2 | Dokumen	4.500.000	2 | Dokumen	4.500.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	6 | Dokumen	47.970.000	6 | Dokumen	46.170.000	0	0	100	96.25	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	189 | Orang	11.460.000	76 | Orang	11.460.000	0	0	40.21	100	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	189 | Orang	13.600.000	82 | Orang	12.400.000	0	0	43.39	91.18	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	189 | Orang	-	84 | Orang	-	0	0	44.44	0	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	2600|Orang	25.500.000	1351|Orang	25.500.000	0	0	51.96	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	104|Orang	3.000.000	103|Orang	3.000.000	0	0	99.04	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	182|Orang	2.000.000	118|Orang	2.000.000	0	0	64.84	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	8|Dokumen	184.075.000	8|Dokumen	167.195.000	0	0	100	90.83	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	3|Dokumen	7.100.000	3|Dokumen	7.100.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	3|Dokumen	53.640.000	3|Dokumen	45.425.000	0	0	100	84.68	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	11|Dokumen	36.450.000	11|Dokumen	34.900.000	0	0	100	95.75	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	16|Dokumen	137.010.000	15|Dokumen	131.968.514	0	0	93.75	96.32	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	11|Laporan	1.100.000	8|Laporan	1.100.000	0	0	72.73	100	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	26|Orang	3.000.000	19|Orang	3.000.000	0	0	73.08	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.025.000	0|Dokumen	2.950.000	0	0	0	97.52	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	4|Dokumen	126.515.000	4|Dokumen	126.515.000	0	0	100	100	
	UPT Puskesmas Gedangsari I														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	1.680.299.763	1|Unit Kerja	1.407.414.908	0	0	100	83.76	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	4|Dokumen	16.100.000	4|Dokumen	16.099.553	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	5|Dokumen	40.035.000	5|Dokumen	36.834.931	0	0	100	92.01	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan		-		0	221|Orang	18.765.000	165|Orang	11.609.842	0	0	74.66	61.87	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
		Kesehatan Sesuai Standar													
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	200|Orang	36.550.000	165|Orang	33.749.480	0	0	82.5	92.34	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	2117|Orang	12.700.000	2124|Orang	10.850.000	0	0	100.33	85.43	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	108|Orang	650	263|Orang	650	0	0	243.52	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	7|Dokumen	175.393.000	7|Dokumen	150.192.421	0	0	100	85.63	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	4|Dokumen	9.100.000	5|Dokumen	8.100.000	0	0	125	89.01	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	3|Dokumen	56.700.000	3|Dokumen	52.044.243	0	0	100	91.79	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	9|Dokumen	62.012.400	14|Dokumen	57.811.600	0	0	155.56	93.23	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	18|Dokumen	136.100.000	18|Dokumen	125.321.210	0	0	100	92.08	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1 | Laporan	200	0 | Laporan	-	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	15 | Orang	2.500.000	9 | Orang	2.500.000	0	0	60	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1 | Dokumen	3.042.000	1 | Dokumen	2.950.000	0	0	100	96.98	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	52 | Dokumen	104.380.000	50 | Dokumen	102.827.790	0	0	96.15	98.51	
	UPT Puskesmas Gedangsari II														
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1 | Ujnit Kerja	1.481.287.896	3 | Ujnit Kerja	1.267.585.630	0	0	300	85.57	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	72 | Orang	1.600.000	5 | Orang	100	0	0	6.94	6.25	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	36 | Orang	47.700.000	27 | Orang	46.223.401	0	0	75	96.9	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya		-		0	13 | Dokumen	45.200.000	34 | Dokumen	24.650.000	0	0	261.54	54.54	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
		kesehatan ibu dan anak													
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	235|Orang	19.370.000	208|Orang	17.434.597	0	0	88.51	90.01	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	187|Orang	11.300.000	210|Orang	-	0	0	112.3	0	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	2284|Orang	13.500.000	2198|Orang	1.850.000	0	0	96.23	13.7	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	58|Orang	13.200.000	63|Orang	3.630.000	0	0	108.62	27.5	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	17|Dokumen	207.200.000	36|Dokumen	140.771.050	0	0	211.76	67.94	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	28|Dokumen	6.320.000	29|Dokumen	5.770.000	0	0	103.57	91.3	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	9|Dokumen	20.930.000	15|Dokumen	13.949.749	0	0	166.67	66.65	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	10|Dokumen	46.705.000	16|Dokumen	45.611.916	0	0	160	97.66	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan		-		0	16|Dokumen	136.878.000	11|Dokumen	112.057.859	0	0	68.75	81.87	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
		Puskesmas													
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	10|Laporan	1.400.000	1|Laporan	150	0	0	10	10.71	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	23|Orang	4.500.000	19|Orang	4.350.000	0	0	82.61	96.67	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.162.000	2|Dokumen	2.950.000	0	0	200	93.3	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	11|Dokumen	113.705.000	14|Dokumen	100.833.310	0	0	127.27	88.68	
	UPT Puskesmas PATUK I														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	1.506.808.529	1|Unit Kerja	1.425.713.324	0	0	100	94.62	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	5|Orang	100	0|Orang	-	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	1|Dokumen	3.600.000	0|Dokumen	3.600.000	0	0	0	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	3|Dokumen	85.850.000	2|Dokumen	79.997.794	0	0	66.67	93.18	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	169|Orang	6.450.000	72|Orang	6.449.547	0	0	42.6	99.99	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	169|Orang	23.575.000	74|Orang	22.499.096	0	0	43.79	95.44	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	2303|Orang	9.600.000	2176|Orang	9.600.000	0	0	94.49	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	96|Orang	3.475.000	43|Orang	3.475.000	0	0	44.79	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	210|Orang	1.000.000	113|Orang	-	0	0	53.81	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	6|Dokumen	224.940.000	6|Dokumen	212.967.391	0	0	100	94.68	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	2|Dokumen	4.545.000	2|Dokumen	4.445.000	0	0	100	97.8	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	5|Dokumen	37.334.500	5|Dokumen	35.684.123	0	0	100	95.58	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	10 | Dokumen	73.580.000	10 | Dokumen	64.379.920	0	0	100	87.5	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	6 | Dokumen	147.643.000	6 | Dokumen	130.644.721	0	0	100	88.49	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1 | Laporan	200	0 | Laporan	-	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	8 | Orang	3.000.000	0 | Orang	3.000.000	0	0	0	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1 | Dokumen	3.010.000	1 | Dokumen	3.000.000	0	0	100	99.67	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	14 | Dokumen	102.175.000	14 | Dokumen	99.248.353	0	0	100	97.14	
	UPT Puskesmas PATUK II														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1 | Unit Kerja	1.078.076.407	1 | Unit Kerja	1.010.317.354	0	0	100	93.71	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BLUD														
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	131|Orang	4.000.000	43|Orang	4.000.000	0	0	32.82	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	2|Dokumen	3.170.000	2|Dokumen	3.169.892	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	12|Dokumen	87.550.000	11|Dokumen	79.073.961	0	0	91.67	90.32	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	121|Orang	21.250.000	101|Orang	21.099.349	0	0	83.47	99.29	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	38|Orang	13.730.000	107|Orang	13.479.780	0	0	281.58	98.18	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	2126|Orang	26.700.000	2208|Orang	26.650.000	0	0	103.86	99.81	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	92|Orang	5.000.000	137|Orang	5.000.000	0	0	148.91	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	131|Orang	4.000.000	119|Orang	4.000.000	0	0	90.84	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	16|Dokumen	208.920.000	16|Dokumen	184.401.473	0	0	100	88.26	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	2|Dokumen	7.100.000	2|Dokumen	7.100.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	9|Dokumen	35.380.000	9|Dokumen	31.201.438	0	0	100	88.19	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	18|Dokumen	61.980.000	18|Dokumen	54.390.000	0	0	100	87.75	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	12|Dokumen	160.551.000	12|Dokumen	155.628.060	0	0	100	96.93	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	10|Laporan	1.500.000	5|Laporan	750	0	0	50	50	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	38|Orang	4.000.000	57|Orang	4.000.000	0	0	150	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.140.000	1|Dokumen	2.950.000	0	0	100	93.95	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	12|Dokumen	124.215.000	12|Dokumen	123.533.094	0	0	100	99.45	
	UPT Puskesmas RONGKOP														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	2.382.880.593	1|Unit Kerja	2.018.990.846	0	0	100	84.73	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	1|Orang	400	1|Orang	400	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	12|Dokumen	17.080.000	12|Dokumen	17.075.968	0	0	100	99.98	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	12|Dokumen	68.600.000	12|Dokumen	68.600.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	1209|Orang	2.080.000	1209|Orang	2.079.568	0	0	100	99.98	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	266|Orang	9.260.000	266|Orang	8.918.992	0	0	100	96.32	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan		-		0	2165|Orang	9.150.000	2165|Orang	9.180.000	0	0	100	100.33	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kesehatan Sesuai Standar													
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	20|Orang	5.200.000	44|Orang	2.500.000	0	0	220	48.08	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	244|Orang	300	244|Orang	300	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	12|Dokumen	226.553.000	12|Dokumen	225.826.821	0	0	100	99.68	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	1|Dokumen	4.500.000	1|Dokumen	4.500.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	12|Dokumen	85.060.000	12|Dokumen	85.050.856	0	0	100	99.99	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	12|Dokumen	72.699.800	12|Dokumen	70.099.800	0	0	100	96.42	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	12|Dokumen	158.518.200	12|Dokumen	152.200.961	0	0	100	96.01	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	12|Laporan	200	12|Laporan	200	0	0	100	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	12|Dokumen	131.700.000	12|Dokumen	131.200.429	0	0	100	99.62	
	UPT Puskesmas GIRISUBO														
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	1.833.051.011	1|Unit Kerja	1.606.595.930	0	0	100	87.65	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	1|Orang	100	1|Orang	-	0	0	100	0	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	4|Dokumen	5.900.000	4|Dokumen	5.899.972	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	4|Dokumen	26.175.000	4|Dokumen	25.374.734	0	0	100	96.94	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	277|Orang	25.625.000	183|Orang	22.518.617	0	0	66.06	87.88	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	277|Orang	63.750.000	197|Orang	63.749.154	0	0	71.12	100	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan		-		0	1985|Orang	13.500.000	1943|Orang	13.500.000	0	0	97.88	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kesehatan Sesuai Standar													
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	113|Orang	500	68|Orang	500	0	0	60.18	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	277|Orang	2.500.000	99|Orang	2.500.000	0	0	35.74	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	6|Dokumen	245.750.000	6|Dokumen	234.139.929	0	0	100	95.28	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	20|Dokumen	6.100.000	20|Dokumen	6.100.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	2|Dokumen	9.675.000	2|Dokumen	9.474.759	0	0	100	97.93	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	5|Dokumen	52.850.000	5|Dokumen	52.650.000	0	0	100	99.62	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	2|Dokumen	164.005.000	2|Dokumen	141.629.633	0	0	100	86.36	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	2|Laporan	4.000.000	2|Laporan	4.000.000	0	0	100	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	16|Orang	900	16|Orang	900	0	0	100	100	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	4|Dokumen	150.875.000	4|Dokumen	150.875.000	0	0	100	100	
	UPT Puskesmas PONJONG I														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	2.634.301.744	0|Unit Kerja	2.574.601.999	0	0	0	97.73	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	17|Orang	300	12|Orang	300	0	0	70.59	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	384|Dokumen	4.500.000	0|Dokumen	4.499.460	0	0	0	99.99	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	442|Dokumen	118.360.000	270|Dokumen	118.349.052	0	0	61.09	99.99	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	333|Orang	18.630.000	248|Orang	18.627.732	0	0	74.47	99.99	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	35|Orang	31.970.000	27|Orang	31.438.272	0	0	77.14	98.34	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	3247|Orang	27.300.000	2331|Orang	27.300.000	0	0	71.79	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	117|Orang	3.300.000	84|Orang	3.300.000	0	0	71.79	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	12|Dokumen	249.000.000	9|Dokumen	248.747.750	0	0	75	99.9	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	12|Dokumen	3.200.000	9|Dokumen	3.200.000	0	0	75	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	12|Dokumen	55.111.000	9|Dokumen	54.709.884	0	0	75	99.27	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	12|Dokumen	73.508.000	0|Dokumen	73.112.580	0	0	0	99.46	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	12|Dokumen	174.194.000	9|Dokumen	165.761.950	0	0	75	95.16	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	12|Laporan	400	0|Laporan	-	0	0	0	0	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	53|Orang	3.600.000	40|Orang	3.600.000	0	0	75.47	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	12|Dokumen	3.100.000	6|Dokumen	2.950.000	0	0	50	95.16	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	12|Dokumen	176.170.000	9|Dokumen	176.150.897	0	0	75	99.99	
	UPT Puskesmas PONJONG II														
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	1.163.017.382	1|Unit Kerja	1.124.661.817	0	0	100	96.7	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	3|Orang	500	4|Orang	500	0	0	133.33	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	2|Dokumen	2.050.000	2|Dokumen	2.049.967	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	5|Dokumen	30.500.000	5|Dokumen	30.499.883	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan		-		0	150|Orang	7.300.000	105|Orang	7.299.766	0	0	70	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kesehatan Sesuai Standar													
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	120|Orang	51.255.000	116|Orang	48.959.327	0	0	96.67	95.52	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	1724|orang	5.100.000	1409|orang	5.100.000	0	0	81.73	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	79|Orang	4.500.000	79|Orang	4.500.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	3|Orang	1.800.000	3|Orang	800	0	0	100	44.44	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	18|Dokumen	171.131.000	18|Dokumen	134.042.627	0	0	100	78.33	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	15|Dokumen	4.800.000	15|Dokumen	4.800.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	10|Dokumen	32.620.000	8|Dokumen	27.249.306	0	0	80	83.54	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	16|Dokumen	55.900.000	16|Dokumen	55.100.000	0	0	100	98.57	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan	Jumlah Dokumen		-		0	2|Dokumen	127.636.000	2|Dokumen	79.954.578	0	0	100	62.64	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
	Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas													
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1|Laporan	900	1|Laporan	400	0	0	100	44.44	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	25|Orang	4.500.000	25|Orang	4.500.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.394.000	1|Dokumen	2.950.000	0	0	100	86.92	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	1|Dokumen	90.350.000	1|Dokumen	90.348.391	0	0	100	100	
	UPT Puskesmas WONOSARI I														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	2.121.226.286	2|Unit Kerja	2.028.306.111	0	0	200	95.62	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	13|Orang	4.800.000	177|Orang	4.800.000	0	0	1361.54	100	
1.02.02.2.	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan		-		0	1|Dokumen	3.660.000	1|Dokumen	3.659.874	0	0	100	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.0044	Kesehatan Reproduksi	kesehatan reproduksi													
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	0 | Dokumen	59.350.000	3 | Dokumen	57.698.980	0	0	0	97.22	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	300 | Orang	8.400.000	224 | Orang	8.399.318	0	0	74.67	99.99	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	300 | Orang	19.075.000	224 | Orang	19.074.140	0	0	74.67	100	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	2892 | Orang	28.000.000	2892 | Orang	27.750.000	0	0	100	99.11	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	192 | Orang	7.200.000	203 | Orang	7.100.000	0	0	105.73	98.61	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	101 | Orang	-	265 | Orang	-	0	0	262.38	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	7 | Dokumen	129.095.000	7 | Dokumen	128.489.932	0	0	100	99.53	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	7 | Dokumen	12.600.000	7 | Dokumen	12.600.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	3 | Dokumen	23.060.000	4 | Dokumen	21.759.744	0	0	133.33	94.36	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	7 | Dokumen	47.850.000	7 | Dokumen	41.900.000	0	0	100	87.57	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	4 | Dokumen	128.349.000	4 | Dokumen	108.954.348	0	0	100	84.89	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	2 | Laporan	1.200.000	2 | Laporan	1.200.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	48 | Orang	4.800.000	14 | Orang	4.800.000	0	0	29.17	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1 | Dokumen	3.066.000	1 | Dokumen	2.950.000	0	0	100	96.22	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	4 | Dokumen	73.500.000	4 | Dokumen	73.482.792	0	0	100	99.98	
	UPT Puskesmas WONOSARI II														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1 | Unit Kerja	2.784.832.050	1 | Unit Kerja	2.627.716.512	0	0	100	94.36	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
	BLUD														
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	4|Orang	200	4|Orang	200	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	2|Dokumen	1.910.000	2|Dokumen	1.809.940	0	0	100	94.76	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	2|Dokumen	44.500.000	2|Dokumen	44.500.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	367|Orang	44.800.000	273|Orang	44.798.544	0	0	74.39	100	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	529|Orang	6.380.000	338|Orang	6.124.868	0	0	63.89	96	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	10017|Orang	32.600.000	15688|Orang	30.150.000	0	0	156.61	92.48	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	61|Orang	1.750.000	91|Orang	1.550.000	0	0	149.18	88.57	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	713|Orang	800	640|Orang	-	0	0	89.76	0	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	6|Dokumen	192.897.000	6|Dokumen	191.803.743	0	0	100	99.43	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	3|Dokumen	9.421.000	3|Dokumen	9.071.000	0	0	100	96.28	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	2|Dokumen	41.330.000	2|Dokumen	40.382.708	0	0	100	97.71	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	12|Dokumen	58.917.500	9|Dokumen	58.767.500	0	0	75	99.75	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	3|Dokumen	137.654.000	3|Dokumen	121.843.865	0	0	100	88.51	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	4|Laporan	500	2|Laporan	250	0	0	50	50	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	24|Orang	1.500.000	16|Orang	2.250.000	0	0	66.67	150	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.003.000	1|Dokumen	2.950.000	0	0	100	98.24	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	6|Dokumen	95.150.000	5|Dokumen	77.748.075	0	0	83.33	81.71	
	UPT Puskesmas KARANGMOJO I														
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	2.635.362.257	1|Unit Kerja	2.114.704.802	0	0	100	80.24	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	7|Orang	600	12|Orang	600	0	0	171.43	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	2|Dokumen	13.300.000	2|Dokumen	13.177.500	0	0	100	99.08	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	2|Dokumen	66.600.000	2|Dokumen	66.600.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	359|Orang	25.020.000	174|Orang	24.866.968	0	0	48.47	99.39	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	1200|Orang	12.400.000	208|Orang	12.116.227	0	0	17.33	97.71	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan		-		0	6826|Orang	11.200.000	2327|Orang	11.200.000	0	0	34.09	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kesehatan Sesuai Standar													
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	64|Orang	1.200.000	146|Orang	1.200.000	0	0	228.13	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	355|Orang	1.400.000	221|Orang	1.200.000	0	0	62.25	85.71	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	12|Dokumen	235.463.000	12|Dokumen	232.062.953	0	0	100	98.56	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	1|Dokumen	3.000.000	1|Dokumen	3.000.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	3|Dokumen	42.410.000	3|Dokumen	40.931.139	0	0	100	96.51	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	7|Dokumen	74.600.000	7|Dokumen	70.200.000	0	0	100	94.1	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	12|Dokumen	153.905.000	12|Dokumen	139.527.367	0	0	100	90.66	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	20|Laporan	1.200.000	8|Laporan	900	0	0	40	75	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	10|Orang	1.200.000	12|Orang	1.200.000	0	0	120	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.012.000	1|Dokumen	2.950.000	0	0	100	97.94	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	2|Dokumen	119.830.000	1|Dokumen	119.341.664	0	0	50	99.59	
	1. UPT Puskesmas KARANGMOJO II														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	1.760.989.498	1|Unit Kerja	1.724.074.556	0	0	100	97.9	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	1|Orang	350	159|Orang	350	0	0	15900	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	12|Dokumen	27.670.000	12|Dokumen	27.669.245	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	12|Dokumen	55.235.000	12|Dokumen	54.084.049	0	0	100	97.92	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	196|Orang	19.800.000	158|Orang	19.799.428	0	0	80.61	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	196|Orang	25.870.000	164|Orang	25.019.728	0	0	83.67	96.71	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	2150|Orang	14.550.000	2048|Orang	14.400.000	0	0	95.26	98.97	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	38|Orang	2.000.000	230|Orang	1.500.000	0	0	605.26	75	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	12|Dokumen	215.101.000	12|Dokumen	155.515.449	0	0	100	72.3	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	12|Dokumen	10.650.000	12|Dokumen	9.000.000	0	0	100	84.51	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	12|Dokumen	34.080.000	12|Dokumen	31.079.533	0	0	100	91.2	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	12|Dokumen	46.200.000	12|Dokumen	27.500.000	0	0	100	59.52	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	12|Dokumen	152.337.000	12|Dokumen	127.065.157	0	0	100	83.41	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian		-		0	12|Laporan	400	12|Laporan	-	0	0	100	0	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	20|Orang	9.900.000	20|Orang	9.450.000	0	0	100	95.45	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.134.000	1|Dokumen	3.000.000	0	0	100	95.72	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	2|Dokumen	133.400.000	2|Dokumen	119.598.089	0	0	100	89.65	
	UPT Puskesmas PANGGANG I														
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	984.512.480	1|Unit Kerja	830.810.026	0	0	100	84.39	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	128|Orang	2.000.000	5|Orang	1.500.000	0	0	3.91	75	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	1|Dokumen	3.800.000	1|Dokumen	-	0	0	100	0	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya		-		0	4|Dokumen	34.250.000	4|Dokumen	32.599.540	0	0	100	95.18	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
		kesehatan ibu dan anak													
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	122|Orang	5.625.000	114|Orang	5.625.000	0	0	93.44	100	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	122|Orang	80.420.000	117|Orang	80.349.273	0	0	95.9	99.91	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	967|Orang	12.000.000	1934|Orang	6.700.000	0	0	200	55.83	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	33|Orang	5.000.000	42|Orang	1.500.000	0	0	127.27	30	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	128|Orang	4.000.000	95|Orang	-	0	0	74.22	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	12|Dokumen	182.007.000	12|Dokumen	164.979.366	0	0	100	90.64	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	12|Dokumen	1.500.000	12|Dokumen	1.500.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	12|Dokumen	41.700.000	12|Dokumen	31.699.451	0	0	100	76.02	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan		-		0	12|Dokumen	66.980.000	12|Dokumen	44.500.000	0	0	100	66.44	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tidak Menular	Penyakit Menular dan Tidak Menular													
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	12|Dokumen	154.150.000	12|Dokumen	143.118.282	0	0	100	92.84	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	4|Laporan	1.000.000	4|Laporan	2.000.000	0	0	100	200	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	11|Orang	2.000.000	9|Orang	2.000.000	0	0	81.82	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.088.000	2|Dokumen	2.950.000	0	0	200	95.53	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	12|Dokumen	127.750.000	12|Dokumen	120.382.370	0	0	100	94.23	
	UPT Puskesmas PANGGANG II														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	1.571.402.248	1|Unit Kerja	1.413.424.550	0	0	100	89.95	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan		-		0	3|Orang	300	3|Orang	300	0	0	100	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
	HIV (ODHIV)	pelayanan kesehatan sesuai standar													
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	1|Dokumen	3.940.000	1|Dokumen	3.940.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	1|Dokumen	86.100.000	1|Dokumen	86.100.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	189|Orang	11.280.000	189|Orang	11.280.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	189|Orang	4.840.000	189|Orang	4.355.000	0	0	100	89.98	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	1601|Orang	9.200.000	1601|Orang	8.750.000	0	0	100	95.11	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	150|Orang	2.950.000	33|Orang	2.950.000	0	0	22	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	223|Orang	1.000.000	223|Orang	1.000.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	10|Dokumen	132.598.000	10|Dokumen	131.280.400	0	0	100	99.01	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	1|Dokumen	8.300.000	1|Dokumen	8.300.000	0	0	100	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	4 | Dokumen	56.690.000	4 | Dokumen	55.790.000	0	0	100	98.41	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	13 | Dokumen	65.680.000	13 | Dokumen	63.180.000	0	0	100	96.19	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	16 | Dokumen	140.470.000	16 | Dokumen	128.273.367	0	0	100	91.32	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1 | Laporan	900	1 | Laporan	900	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	10 | Orang	1.000.000	10 | Orang	1.000.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1 | Dokumen	3.002.000	1 | Dokumen	3.000.000	0	0	100	99.93	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	1 | Dokumen	102.000.000	1 | Dokumen	97.000.000	0	0	100	95.1	
	UPT Puskesmas PURWOSARI														

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	1.598.100.387	1|Unit Kerja	1.506.213.987	0	0	100	94.25	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	2|Orang	200	0|Orang	-	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	2|Dokumen	6.600.000	1|Dokumen	3.300.000	0	0	50	50	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	2|Dokumen	35.250.000	2|Dokumen	30.600.000	0	0	100	86.81	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	160|Orang	10.425.000	140|Orang	10.424.990	0	0	87.5	100	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	170|Orang	94.075.000	126|Orang	73.449.996	0	0	74.12	78.08	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	1793|Orang	6.000.000	1737|Orang	6.000.000	0	0	96.88	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	47|Orang	6.900.000	35|Orang	6.000.000	0	0	74.47	86.96	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	2|Orang	700	0|Orang	-	0	0	0	0	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	39|Dokumen	235.959.000	31|Dokumen	217.824.500	0	0	79.49	92.31	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	2|Dokumen	6.790.000	2|Dokumen	6.100.000	0	0	100	89.84	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	13|Dokumen	51.664.000	13|Dokumen	40.246.000	0	0	100	77.9	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	8|Dokumen	42.710.000	7|Dokumen	31.100.000	0	0	87.5	72.82	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	16|Dokumen	174.596.000	16|Dokumen	153.529.996	0	0	100	87.93	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1|Laporan	1.500.000	1|Laporan	1.500.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	8|Orang	3.600.000	6|Orang	2.250.000	0	0	75	62.5	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.081.000	1|Dokumen	2.950.000	0	0	100	95.75	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan		-		0	90|Dokumen	211.850.000	75|Dokumen	176.169.964	0	0	83.33	83.16	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
	UPT Puskesmas TEPUS I														
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1 | Unit Kerja	1.071.346.867	1 | Unit Kerja	1.002.541.515	0	0	100	93.58	
1.02.02.2. 02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	101 | Orang	500	2 | Orang	-	0	0	1.98	0	
1.02.02.2. 02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	3 | Dokumen	2.680.000	3 | Dokumen	2.679.910	0	0	100	100	
1.02.02.2. 02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	3 | Dokumen	16.450.000	3 | Dokumen	16.400.000	0	0	100	99.7	
1.02.02.2. 02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	75 | Orang	6.255.000	64 | Orang	6.254.799	0	0	85.33	100	
1.02.02.2. 02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	90 | Orang	17.790.000	64 | Orang	15.719.748	0	0	71.11	88.36	
1.02.02.2. 02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	97 | Orang	30.000.000	1239 | Orang	23.500.000	0	0	1277.32	78.33	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	72|Orang	1.800.000	56|Orang	1.800.000	0	0	77.78	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	6|Orang	1.200.000	86|Orang	1.200.000	0	0	1433.33	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	150|Dokumen	137.564.000	150|Dokumen	114.236.336	0	0	100	83.04	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	21|Dokumen	6.000.000	21|Dokumen	6.000.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	5|Dokumen	63.035.000	5|Dokumen	59.514.009	0	0	100	94.41	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	13|Dokumen	51.650.000	12|Dokumen	46.200.000	0	0	92.31	89.45	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	1|Dokumen	127.308.000	1|Dokumen	109.755.188	0	0	100	86.21	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	9|Laporan	1.500.000	9|Laporan	1.500.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang		-		0	4|Orang	1.500.000	4|Orang	1.500.000	0	0	100	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
	Tuberkulosis	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar													
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.126.000	1|Dokumen	2.950.000	0	0	100	94.37	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	2|Dokumen	93.600.000	2|Dokumen	91.098.399	0	0	100	97.33	
	UPT Puskesmas TEPUS II														
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	1.639.841.590	1|Unit Kerja	1.458.935.186	0	0	100	88.97	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	0|Orang	500	0|Orang	-	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	2|Dokumen	7.860.000	2|Dokumen	7.859.859	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	2|Dokumen	45.900.000	2|Dokumen	45.900.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	160|Orang	18.765.000	92|Orang	18.764.589	0	0	57.5	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	150|Orang	19.150.000	111|Orang	18.899.844	0	0	74	98.69	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	1558|Orang	10.000.000	1433|Orang	10.000.000	0	0	91.98	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	116|orang	5.300.000	160|orang	5.300.000	0	0	137.93	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	184|Orang	250	225|Orang	250	0	0	122.28	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat		-		0	70|Orang	153.892.000	83|Orang	144.306.245	0	0	118.57	93.77	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	2|Dokumen	6.100.000	2|Dokumen	6.100.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	5|Dokumen	56.540.000	5|Dokumen	56.389.331	0	0	100	99.73	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	8|Dokumen	59.895.900	8|Dokumen	59.495.900	0	0	100	99.33	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	6|Dokumen	139.825.000	6|Dokumen	121.889.061	0	0	100	87.17	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	4 | Laporan	400	4 | Laporan	400	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	2 | Orang	3.000.000	10 | Orang	3.000.000	0	0	500	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1 | Dokumen	3.062.100	1 | Dokumen	2.950.000	0	0	100	96.34	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	4 | Dokumen	105.675.000	4 | Dokumen	105.672.900	0	0	100	100	
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1 | Unit Kerja	2.074.951.214	1 | Unit Kerja	1.915.721.413	0	0	100	92.33	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	27 | Orang	1.050.000	24 | Orang	1.050.000	0	0	88.89	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	7 | Dokumen	11.080.000	6 | Dokumen	11.079.924	0	0	85.71	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	3|Dokumen	51.100.000	3|Dokumen	51.100.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	240|Orang	13.050.000	146|Orang	13.049.861	0	0	60.83	100	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	240|Orang	21.670.000	172|Orang	21.014.975	0	0	71.67	96.98	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	2495|Orang	8.500.000	1663|Orang	8.500.000	0	0	66.65	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	576|Orang	1.050.000	196|Orang	900	0	0	34.03	85.71	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	337|Orang	2.750.000	190|Orang	2.750.000	0	0	56.38	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	13|Dokumen	196.235.000	10|Dokumen	155.089.500	0	0	76.92	79.03	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	13|Dokumen	7.754.000	11|Dokumen	7.700.000	0	0	84.62	99.3	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	9|Dokumen	96.682.000	7|Dokumen	96.114.379	0	0	77.78	99.41	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	7 | Dokumen	35.114.000	7 | Dokumen	34.054.993	0	0	100	96.98	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	3 | Dokumen	153.715.000	3 | Dokumen	139.686.917	0	0	100	90.87	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1 | Laporan	100	0 | Laporan	100	0	0	0	100	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	22 | Orang	750	14 | Orang	750	0	0	63.64	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1 | Dokumen	3.040.000	0 | Dokumen	2.950.000	0	0	0	97.04	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	4 | Dokumen	135.290.000	3 | Dokumen	135.282.464	0	0	75	99.99	
	UPT Puskesmas PALIYAN														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1 | Unit Kerja	2.251.665.928	1 | Unit Kerja	2.007.883.747	0	0	100	89.17	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	15|Orang	200	12|Orang	200	0	0	80	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	12|Dokumen	12.000.000	9|Dokumen	11.948.309	0	0	75	99.57	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	12|Dokumen	46.700.000	9|Dokumen	46.699.623	0	0	75	100	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	331|Orang	21.525.000	255|Orang	21.524.317	0	0	77.04	100	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	335|Orang	28.380.000	264|Orang	28.124.471	0	0	78.81	99.1	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	3458|Orang	25.200.000	3458|Orang	25.200.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	84|Orang	2.000.000	68|Orang	2.000.000	0	0	80.95	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	15|Orang	400	12|Orang	400	0	0	80	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	12|Dokumen	216.419.000	9|Dokumen	216.418.861	0	0	75	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	12|Dokumen	6.100.000	9|Dokumen	6.100.000	0	0	75	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	12|Dokumen	55.800.000	9|Dokumen	55.599.611	0	0	75	99.64	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	12|Dokumen	67.257.500	9|Dokumen	67.257.500	0	0	75	100	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	12|Dokumen	155.350.000	9|Dokumen	133.510.756	0	0	75	85.94	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	12|Laporan	500	9|Laporan	500	0	0	75	100	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	55|Orang	2.000.000	40|Orang	2.000.000	0	0	72.73	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.112.500	0|Dokumen	2.995.000	0	0	0	96.22	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	12|Dokumen	132.650.000	9|Dokumen	132.649.059	0	0	75	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	(UKBM)														
	UPT Puskesmas SAPTOSARI														
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	3.055.026.795	1|Unit Kerja	2.650.958.172	0	0	100	86.77	
1.02.02.2. 02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	381|Orang	2.000.000	198|Orang	2.000.000	0	0	51.97	100	
1.02.02.2. 02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	2|Dokumen	11.500.000	2|Dokumen	11.500.000	0	0	100	100	
1.02.02.2. 02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	6|Dokumen	36.400.000	6|Dokumen	34.200.000	0	0	100	93.96	
1.02.02.2. 02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	321|Orang	29.190.000	298|Orang	29.189.801	0	0	92.83	100	
1.02.02.2. 02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	337|Orang	3.050.000	305|Orang	2.624.956	0	0	90.5	86.06	
1.02.02.2. 02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	3865|Orang	15.200.000	4280|Orang	15.000.000	0	0	110.74	98.68	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	216|Orang	1.500.000	175|Orang	1.500.000	0	0	81.02	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	381|Orang	1.250.000	341|Orang	1.250.000	0	0	89.5	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	7|Dokumen	201.752.000	7|Dokumen	200.447.000	0	0	100	99.35	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	2|Dokumen	8.100.000	3|Dokumen	8.100.000	0	0	150	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	5|Dokumen	71.700.000	5|Dokumen	64.159.835	0	0	100	89.48	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	9|Dokumen	53.150.000	8|Dokumen	39.200.000	0	0	88.89	73.75	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	16|Dokumen	141.733.000	18|Dokumen	136.517.937	0	0	112.5	96.32	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1|Laporan	900	0|Laporan	-	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang		-		0	94|Orang	3.000.000	22|Orang	2.300.000	0	0	23.4	76.67	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tuberkulosis	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar													
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	11|Dokumen	106.425.000	11|Dokumen	106.424.748	0	0	100	100	
	UPT Puskesmas NGAWEN I														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	1.336.146.379	1|Unit Kerja	1.286.331.227	0	0	100	96.27	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	189|Orang	500	189|Orang	500	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	1|Dokumen	8.700.000	0|Dokumen	8.599.844	0	0	0	98.85	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	1|Dokumen	59.750.000	1|Dokumen	58.940.000	0	0	100	98.64	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	184|Orang	69.680.000	148|Orang	64.999.493	0	0	80.43	93.28	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	149|Orang	4.640.000	143|Orang	4.600.000	0	0	95.97	99.14	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	236|Orang	13.600.000	2616|Orang	13.600.000	0	0	1108.47	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	477|Orang	8.000.000	224|Orang	8.000.000	0	0	46.96	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	219|Orang	750	192|Orang	-	0	0	87.67	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	12|Dokumen	220.884.000	12|Dokumen	145.098.000	0	0	100	65.69	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	12|Dokumen	4.100.000	12|Dokumen	3.800.000	0	0	100	92.68	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	51|Dokumen	34.050.000	12|Dokumen	33.149.713	0	0	23.53	97.36	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	12|Dokumen	80.950.000	12|Dokumen	76.400.000	0	0	100	94.38	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	16|Dokumen	128.660.000	16|Dokumen	125.999.498	0	0	100	97.93	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian		-		0	1|Laporan	500	0|Laporan	-	0	0	0	0	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	28|Orang	5.500.000	10|Orang	5.500.000	0	0	35.71	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	12|Dokumen	3.021.000	1|Dokumen	2.950.000	0	0	8.33	97.65	
	UPT Puskesmas NGAWEN II														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	1.032.726.654	0|Unit Kerja	912.172.994	0	0	0	88.33	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	2|Orang	3.000.000	8|Orang	3.000.000	0	0	400	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	1|Dokumen	53.680.000	1|Dokumen	53.678.776	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	2|Dokumen	41.060.000	2|Dokumen	27.859.847	0	0	100	67.85	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	155|Orang	6.480.000	127|Orang	6.479.796	0	0	81.94	100	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan		-		0	155|Orang	23.020.000	131|Orang	16.519.932	0	0	84.52	71.76	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
		Kesehatan Sesuai Standar													
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	1640|Orang	7.000.000	1623|Orang	7.000.000	0	0	98.96	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	60|Orang	9.300.000	58|Orang	1.600.000	0	0	96.67	17.2	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	88|Orang	800	140|Orang	800	0	0	159.09	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	1|Dokumen	162.218.000	1|Dokumen	105.458.000	0	0	100	65.01	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	1|Dokumen	9.000.000	1|Dokumen	6.800.000	0	0	100	75.56	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	1|Dokumen	14.060.000	1|Dokumen	8.799.922	0	0	100	62.59	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	1|Dokumen	56.540.000	1|Dokumen	47.090.000	0	0	100	83.29	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	2|Dokumen	155.693.000	2|Dokumen	119.280.606	0	0	100	76.61	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1 | Laporan	800	1 | Laporan	-	0	0	100	0	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	2 | Orang	3.000.000	1 | Orang	3.000.000	0	0	50	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1 | Dokumen	3.167.000	1 | Dokumen	2.950.000	0	0	100	93.15	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	4 | Dokumen	129.035.000	4 | Dokumen	125.068.592	0	0	100	96.93	
	UPT Puskesmas SEMANU I														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1 | Unit kerja	2.664.827.701	1 | Unit kerja	2.278.817.809	0	0	100	85.51	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	28 | Orang	1.000.000	70 | Orang	1.000.000	0	0	250	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	1 | Dokumen	3.310.000	1 | Dokumen	3.279.852	0	0	100	99.09	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	1|Dokumen	47.700.000	5|Dokumen	36.800.000	0	0	500	77.15	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	325|Orang	16.680.000	134|Orang	15.442.061	0	0	41.23	92.58	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	277|Orang	11.910.000	148|Orang	11.112.324	0	0	53.43	93.3	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	3753|Orang	10.000.000	3456|Orang	9.800.000	0	0	92.09	98	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	344|Orang	4.500.000	32|Orang	2.700.000	0	0	9.3	60	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	444|Orang	1.000.000	185|Orang	-	0	0	41.67	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	7|Dokumen	191.995.000	3|Dokumen	166.050.881	0	0	42.86	86.49	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	3|Dokumen	4.100.000	6|Dokumen	4.100.000	0	0	200	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	1|Dokumen	86.820.000	4|Dokumen	71.954.925	0	0	400	82.88	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan		-		0	5|Dokumen	63.550.000	7|Dokumen	63.550.000	0	0	140	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tidak Menular	Penyakit Menular dan Tidak Menular													
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	16 | Dokumen	155.510.000	10 | Dokumen	128.775.980	0	0	62.5	82.81	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1 | Laporan	500	0 | Laporan	-	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	10 | Orang	1.500.000	8 | Orang	1.200.000	0	0	80	80	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	1 | Dokumen	136.595.000	3 | Dokumen	136.506.864	0	0	300	99.94	
	UPT Puskesmas SEMANU II														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1 | Unit Kerja	1.834.395.875	1 | Unit Kerja	1.721.269.508	0	0	100	93.83	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	0 | Orang	5.700.000	0 | Orang	5.700.000	0	0	0	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah dokumen hasil		-		0	4 | Dokoumen	16.005.000	4 | Dokoumen	16.004.525	0	0	100	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kesehatan Reproduksi	pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi													
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	4 | Dokumen	50.825.000	4 | Dokumen	50.573.523	0	0	100	99.51	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	189 | Orang	9.550.000	184 | Orang	9.529.820	0	0	97.35	99.79	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	189 | Orang	16.150.000	163 | Orang	15.299.766	0	0	86.24	94.74	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	2365 | Orang	14.000.000	2366 | Orang	14.000.000	0	0	100.04	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	140 | Orang	2.000.000	96 | Orang	2.000.000	0	0	68.57	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	0 | Orang	1.500.000	106 | Orang	1.500.000	0	0	0	100	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	3 | Dokumen	199.703.000	3 | Dokumen	163.238.967	0	0	100	81.74	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	7 | Dokumen	8.800.000	7 | Dokumen	8.800.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	3 | Dokumen	78.520.000	3 | Dokumen	77.998.925	0	0	100	99.34	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	8 | Dokumen	40.800.000	3 | Dokumen	40.500.000	0	0	37.5	99.26	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	16 | Dokumen	157.050.000	16 | Dokumen	115.974.190	0	0	100	73.85	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1 | Laporan	300	0 | Laporan	-	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	4 | Orang	2.000.000	4 | Orang	2.000.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1 | Dokumen	3.097.000	2 | Dokumen	2.950.000	0	0	200	95.25	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	4 | Dokumen	146.285.000	4 | Dokumen	144.646.634	0	0	100	98.88	
	UPT Puskesmas SEMIN I														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1 | Unit kerja	2.281.326.543	1 | Unit kerja	2.202.664.737	0	0	100	96.55	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BLUD														
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	293|Orang	2.000.000	88|Orang	2.000.000	0	0	30.03	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	1|Dokumen	6.100.000	9|Dokumen	6.100.000	0	0	900	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	12|Dokumen	75.055.000	14|Dokumen	75.054.993	0	0	116.67	100	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	325|Orang	107.450.000	740|Orang	107.049.902	0	0	227.69	99.63	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	295|Orang	19.250.000	741|Orang	19.199.688	0	0	251.19	99.74	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	4071|orang	12.000.000	2035|orang	12.000.000	0	0	49.99	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	90|Orang	6.000.000	40|Orang	6.000.000	0	0	44.44	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	293|Orang	1.000.000	122|Orang	-	0	0	41.64	0	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	4 | Dokumen	208.258.000	9 | Dokumen	204.493.906	0	0	225	98.19	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	3 | Dokumen	14.100.000	11 | Dokumen	14.100.000	0	0	366.67	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	3 | Dokumen	52.370.000	11 | Dokumen	51.769.622	0	0	366.67	98.85	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	2 | Dokumen	50.550.000	10 | Dokumen	44.350.000	0	0	500	87.73	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	3 | Dokumen	138.601.000	11 | Dokumen	138.587.064	0	0	366.67	99.99	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1 | Laporan	200	16 | Laporan	200	0	0	1600	100	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	20 | Orang	3.000.000	16 | Orang	3.000.000	0	0	80	100	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1 | Dokumen	3.137.000	4 | Dokumen	2.950.000	0	0	400	94.04	
	UPT Puskesmas SEMIN II														

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	1.742.135.828	1|Unit Kerja	1.693.765.085	0	0	100	97.22	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	15|Orang	300	206|Orang	300	0	0	1373.33	100	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	2|Dokumen	2.960.000	2|Dokumen	2.959.900	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	240|Dokumen	71.440.000	104|Dokumen	57.839.264	0	0	43.33	80.96	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	183|orang	26.820.000	213|orang	26.189.196	0	0	116.39	97.65	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	225|Orang	20.640.000	214|Orang	20.299.660	0	0	95.11	98.35	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	1747|Orang	9.450.000	1796|Orang	9.450.000	0	0	102.8	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	58|Orang	1.000.000	10|Orang	1.000.000	0	0	17.24	100	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	3|Orang	250	3|Orang	-	0	0	100	0	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	13|Dokumen	206.235.000	13|Dokumen	127.605.897	0	0	100	61.87	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	87|Dokumen	4.500.000	41|Dokumen	2.050.000	0	0	47.13	45.56	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	15|Dokumen	28.800.000	15|Dokumen	27.899.518	0	0	100	96.87	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	7|Dokumen	87.150.000	7|Dokumen	70.200.000	0	0	100	80.55	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	30|Dokumen	157.726.000	26|Dokumen	117.917.684	0	0	86.67	74.76	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	3|Laporan	300	0|Laporan	-	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	58|Orang	1.000.000	127|Orang	1.000.000	0	0	218.97	100	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		0	16|Dokumen	113.460.000	16|Dokumen	113.458.212	0	0	100	100	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	UPT Puskesmas PLAYEN I														
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	2.245.189.120	0|Unit Kerja	2.102.113.875	0	0	0	93.63	
1.02.02.2. 02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	20|orang	1.000.000	20|orang	1.000.000	0	0	100	100	
1.02.02.2. 02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	4|Dokumen	1.300.000	4|Dokumen	800	0	0	100	61.53	
1.02.02.2. 02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	10|Dokumen	39.000.000	10|Dokumen	36.850.000	0	0	100	94.49	
1.02.02.2. 02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	362|Orang	79.355.000	323|Orang	69.979.318	0	0	89.23	88.19	
1.02.02.2. 02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	112|orang	10.220.000	108|orang	9.199.844	0	0	96.43	90.02	
1.02.02.2. 02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	918|orang	45.900.000	910|orang	45.800.000	0	0	99.13	99.78	
1.02.02.2. 02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	70|Orang	4.950.000	54|Orang	4.450.000	0	0	77.14	89.9	
1.02.02.2. 02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang		-		0	60|orang	3.000.000	48|orang	1.750.000	0	0	80	58.33	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Risiko Terinfeksi HIV	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar													
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		0	4 | Dokumen	200.508.000	4 | Dokumen	200.257.507	0	0	100	99.88	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	8 | Dokumen	8.150.000	8 | Dokumen	7.700.000	0	0	100	94.48	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	4 | Dokumen	29.650.000	3 | Dokumen	20.399.155	0	0	75	68.8	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	4 | Dokumen	66.950.000	4 | Dokumen	62.000.000	0	0	100	92.61	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	3 | Dokumen	131.297.000	3 | Dokumen	127.432.493	0	0	100	97.06	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	3 | Laporan	250	3 | Laporan	-	0	0	100	0	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	60 | Orang	3.000.000	55 | Orang	3.000.000	0	0	91.67	100	
	UPT Puskesmas PLAYEN II														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan		-		0	1 | Unit Kerja	2.034.233.065	1 | Unit Kerja	1.861.090.762	0	0	100	91.49	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
	BLUD	Penunjang Pelayanan													
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	6 | Orang	400	6 | Orang	-	0	0	100	0	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		0	1 | Dokumen	32.175.000	1 | Dokumen	32.173.953	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		0	3 | Dokumen	92.600.000	3 | Dokumen	86.038.320	0	0	100	92.91	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	316 | Orang	15.660.000	268 | Orang	10.439.652	0	0	84.81	66.66	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	300 | Orang	20.920.000	249 | Orang	20.819.670	0	0	83	99.52	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		0	2611 | Orang	7.500.000	2536 | Orang	7.500.000	0	0	97.13	100	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	275 | Orang	1.200.000	96 | Orang	600	0	0	34.91	50	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		0	318 | Orang	150	190 | Orang	-	0	0	59.75	0	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan		-		0	6 | Dokumen	190.624.000	3 | Dokumen	124.972.000	0	0	50	65.56	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	10
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	
	Masyarakat	Kesehatan Gizi Masyarakat													
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		0	2|Dokumen	6.600.000	2|Dokumen	6.600.000	0	0	100	100	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		0	5|Dokumen	18.090.000	4|Dokumen	16.989.676	0	0	80	93.92	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		0	7|Dokumen	27.550.000	5|Dokumen	24.150.000	0	0	71.43	87.66	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		0	5|Dokumen	139.120.000	3|Dokumen	124.859.408	0	0	60	89.75	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		0	1|Laporan	400	0|Laporan	-	0	0	0	0	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		0	15|Orang	2.000.000	4|Orang	900	0	0	26.67	45	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		0	1|Dokumen	3.091.000	1|Dokumen	2.995.000	0	0	100	96.89	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat		-		0	4|Dokumen	138.770.000	3|Dokumen	114.577.681	0	0	75	82.57	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daya Masyarakat (UKBM)	(UKBM)													
	UPT Laboratorium Kesehatan														
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			-		0		-	0	-	0	0	0	0	
1.02.02.2. 01.05	Pengembangan Rumah Sakit			-		0		-	0	-	0	0	0	0	
1.02.02.2. 01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-		0		-	0	-	0	0	0	0	
1.02.02.2. 02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		-		0	11|Dokumen	215.180.000	8|Dokumen	210.364.688	0	0	72.73	97.76	
	RSUD SAPTOSARI														
X.XX.01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	18.683.773.034	2|Unit Kerja	15.942.834.226	0	0	200	85.33	
1.02.02.2. 01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		-		0	1|Unit	630.000.000	1|Unit	627.500.000	0	0	100	99.6	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		-		0	11|Unit	5.155.609.050	11|Unit	5.083.739.873	0	0	100	98.61	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		-		0	1|Dokumen	95.000.000	1|Dokumen	94.867.517	0	0	100	99.86	
	RSUD Wonosari														
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		-		0	1|Unit Kerja	103.825.775.526	0|Unit Kerja	95.886.739.551	0	0	0	92.35	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		-		0	6|Unit	2.498.916.150	6|Unit	2.406.942.837	0	0	100	96.32	
1.02.02.2.01.22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas		-		0	1|Unit	1.969.616.000	1|Unit	1.740.512.300	0	0	100	88.37	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	Ket.
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Program/ kegiatan(Renja PD) Tahun 2025				
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	
			K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	Rl	K	K	
		pelayanan rumah sakit													
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		-		0	11|Dokumen	-0		-	0	0	0	0	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada dasarnya diambil dari indikator outcome dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan sebenarnya merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan semua kegiatan.

Capaian kinerja pelayanan kesehatan berdasar indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta indikator RPJP Kabupaten Gunungkidul dapat digambarkan seperti pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(IKU, SPM, IKK)	(IKU, SPM, IKK)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
A.	IKU (Indikator Kinerja Utama)											
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	66,81	66,81	67,49	67,49	54,55	82,64	90	67,49	54,55	Kesmas
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	8,2	7,9	7,6	7,3	7	12,89	12,2	7,3	7	Kesmas
3	Prevalesi Stunting	Persen	15,5	15,2	14,9	14,6	14,3	22,2	17,02	14,6	14,3	Kesmas
	Indikator SPM											
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	93	97	97	98,5	99	95,24	81,55	98,5	99	Kesmas
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	100	100	100	100	99,89	100	100	100	Kesmas
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	90	95	95	99	100	86,44	89,27	99	100	Kesmas
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	87,5	88	88	89	89,5	90,80	91,02	89	89,5	Kesmas
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	90	92	95	94	95	100	100	94	95	Kesmas

No	Indikator	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(IKU, SPM, IKK)	(IKU, SPM, IKK)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persen	40	55	55	85	100	98,92	61,69	85	100	P2P
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persen	30	40	40	60	70	91,26	81,97	60	70	P2P
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	30	45	45	75	90	100	48,63	75	90	P2P
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	30	45	45	90	90	100	57,65	90	90	P2P
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen	60	70	70	100	100	100	80,92	100	100	P2P
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	35	40	40	90	90	88,06	79,12	90	90	P2P
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Persen	90	92	92	100	100	91,98	93,94	100	100	P2P
	IKK (Indikator Kinerja Kunci)											
1	Persentasae pemenuhan fasilitas kesehatan utk UKM	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK

No	Indikator	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(IKU, SPM, IKK)	(IKU, SPM, IKK)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	dan UKP											
2	Persentase Faskes (Dinkes dan Puskesmas) tersedia Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
3	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya memiliki izin operasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK
4	Persentase Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan Praktik Profesi memiliki Surat Izin Praktik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK
5	Persentase Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Gunungkidul terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK
6	Persentase Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pengembangan Mutu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK

No	Indikator	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(IKU, SPM, IKK)	(IKU, SPM, IKK)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	dan Peningkatan Kompetensi Teknis											
7	Persentase perijinan sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman terbit tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK
8	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK
9	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK
10	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Persen	28	29	29	32	80,03	29.3	31	31	80,03	Kesmas

No	Indikator	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(IKU, SPM, IKK)	(IKU, SPM, IKK)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
11	Persentase Posyandu aktif	Persen	30	35	35	50	80,5	100	100	100	80,5	Kesmas
12	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
13	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
14	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
15	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
16	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
17	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	SDK

No	Indikator	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(IKU, SPM, IKK)	(IKU, SPM, IKK)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
18	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat
19	IKM penyelenggara BLUD	Indeks	83,31	83,40	83,455	83,50	83,70	84,91	85,74	83,50	83,70	RSUD Wonosari
20	IKM penyelenggara BLUD	Indeks	78,13	78,52	78,9	79,63	80,03	79,98	81,72	79,63	80,03	RSUD Saptosari
21	IKM penyelenggara BLUD	Indeks	78,13	78,52	78,9	79,63	80,03	79,63	80,03	79,63	80,03	Puskesmas
22	IKM PD	Indeks	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5	81,77	81,81	80,4	80,5	SDK

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan kesehatan sesuai RPJMD sebagai berikut:

a. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar dan tenaga medis belum memadai untuk penyelenggaraan layanan yang bermutu;
b. Jumlah dan distribusi pelayanan kesehatan rujukan terbatas dan belum merata;
c. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
d. Perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan yang lebih baik masih perlu ditingkatkan;
e. Profesionalisme tenaga kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi masih perlu ditingkatkan;

2.3.2. Permasalahan Kesehatan Berdasar Tugas dan Fungsi

Derajat Kesehatan Masyarakat (DKM) bisa diukur berdasar indikator pokok kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Prevalensi Stunting. Masalah kesehatan yang muncul di Kabupaten Gunungkidul masih berkisar pada pencapaian indikator utama derajat kesehatan masyarakat. Secara nasional, hasil di Kabupaten Gunungkidul memang lebih baik, tetapi bila dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY sebagian masih lebih rendah.

Secara umum, permasalahan kesehatan berdasar hasil analisis data dari Puskesmas maupun RSUD Wonosari dan RSUD Saptosari (data base) adalah sebagai berikut:

a. Masih perlunya penanganan wasting dan Stunting pada balita;
b. Masih rendahnya cakupan penemuan penderita penyakit TBC dengan BTA (+);
c. Tingginya angka kesakitan penyakit degeneratif (hipertensi, stroke, diabetes mellitus);
d. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
e. Masih rendahnya cakupan rumah sehat;
f. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
g. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga;
h. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
i. Belum terpenuhinya beban biaya kesehatan bagi masyarakat tidak/ kurang mampu;
j. Masih lemahnya pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
k. Masih terbatasnya pengelolaan manajemen dan sistem informasi kesehatan yang up to date, cepat dan tepat;
l. Permasalahan yang ada di RSUD Wonosari sebagai berikut:
    1) RSUD Wonosari belum menjadi pilihan utama masyarakat;
    2) Kekurangan SDM pada RSUD Wonosari dalam lima tahun ke depan;
    3) Persaingan pelayanan yang semakin tinggi antar Rumah Sakit
m. Permasalahan yang ada di RSUD Saptosari adalah sebagai berikut:
    1) Jumlah jenis ketenagaan/ keahlian tertentu (spesialis) masih belum optimal.
    2) Gedung rawat inap kurang representative, masih menyatunya instalasi rawat jalan dan rawat inap dengan perkantoran.
    3) Pengembangan layanan masih terkendala kecukupan sarana prasarana (Pelayanan HD)
    4) Kesulitas dalam mengelompokkan pasien rawat inap sesuai dengan

kebutuhannya karena setting ruangan tidak sesuai.

5) Biaya operasional rumah sakit yang relative tinggi.
6) Penggunaan pencahayaan dan sirkulasi udara yang mengandalkan energi listrik serta pemenuhan kebutuhaan air yang masih mengandalkan sumber PDAM.

2.3.3. Isu-isu Sektor Kesehatan

Isu strategis berdasar data dari media (media review) dan telaah dari lintas sektor terkait, maka isu strategis sektor kesehatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

a. Alokasi dan komposisi pembiayaan kesehatan

Biaya kesehatan di Kabupaten Gunungkidul berasal dari sumber dana APBN, APBD, dan sumber dana lain yang tidak mengikat. Sumber dana APBD kabupaten, beberapa tahun terakhir masih didominasi untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji pegawai) sementara anggaran kesehatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung masih sangat terbatas. Dengan adanya DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS (APBN), PIWK, dan APBKal, maka kegiatan yang mendukung kesehatan dari aspek preventif dan promotif mulai dianggarkan, walaupun masih jauh dari biaya yang dikeluarkan untuk aspek kuratif dan rehabilitatif.

Kurangnya integrasi PBPU dan kepatuhan iur masyarakat non gakin dalam JKN, membuat pengeluaraan biaya kesehatan masih banyak ditanggung oleh masyarakat sehingga out of pocket payment masih tinggi.

b. Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita masih belum tertuntaskan, sedangkan Gizi lebih mulai meningkat

Kasus Gizi buruk di Kabupaten Gunungkidul masih ditemukan walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kondisi terakhir menunjukkan angka 0,35%. Ketersediaan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi ekonomi akan berpengaruh dalam pencapaian status gizi masyarakat di tahun-tahun berikutnya. Penyakit penyerta juga banyak ditemukan pada kasus-kasus anak dengan gizi buruk. Sementara itu, kasus gizi kurang dengan angka 4,06% perlu diwaspadai dan juga menjadi perhatian agar tidak semakin jatuh dalam kondisi gizi buruk. Kurang Energi Kronis masih menjadi masalah, namun di lain pihak kasus obesitas terutama obesitas sentral menjadi beban ganda masalah gizi di Kabupaten Gunungkidul.

c. Peningkatan HIV-AIDS dan NAPZA

Penyebaran penggunaan NAPZA ternyata tidak hanya ditemukan di daerah perkotaan, melainkan sudah meluas aksesnya sampai pelosok desa. Peningkatan penyalahgunaan NAPZA dapat memicu sex bebas dan penggunaan jarum suntik bergantian. Hal tersebut dapat meningkatkan penderita HIV-AIDS. Generasi muda adalah golongan umur yang menjadi sasaran NAPZA, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam penanganan NAPZA dan penularan HIV-AIDS.

d. Kesehatan Ibu dan Anak

Kematian ibu beberapa tahun terakhir tidak banyak mengalami penurunan, bahkan untuk beberapa tahun menunjukkan jumlah angka yang tetap. Eklampsi dan perdarahan masih merupakan penyebab kematian ibu melahirkan di Kabupaten Gunungkidul. Antenatal care yang kurang berkualitas ditunjukkan dengan capaian K4 yang belum memenuhi target akan semakin mengancam keberhasilan penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Gunungkidul. Cakupan pertolongan persalinan oleh

dukun bayi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal inilah yang memberikan harapan kesehatan ibu semakin membaik karena pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tentu akan semakin naik.

Ada beberapa hal yang kurang tersentuh berkaitan dengan kesehatan anak diantaranya deteksi tumbuh kembang. Anak merupakan usia yang rentan terhadap masalah kesehatan, sehingga cakupan imunisasi untuk anak juga perlu mendapat perhatian.

e. PHBS belum optimal

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diterapkan pada beberapa tatanan (tatanan rumah tangga, tatanan institusi). Pada tatanan rumah tangga, angka perokok yang tinggi (Riskesdas 2018: 23,9% penduduk) menjadi penyebab yang menjadikan cakupan rumah tangga ber-PHBS masih rendah.

f. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan input yang akan membantu kelangsungan pelayanan kesehatan. Bangunan fisik di Puskesmas dan jaringannya khususnya rumah dinas dijumpai sebagian penggunaannya kurang optimal karena tidak mesti ditempati oleh tenaga Puskesmas yang bersangkutan. Keterbatasan sumberdana untuk pemeliharaan baik untuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas membuat beberapa bangunan yang rusak masih belum diperbaiki.

g. Sebagai daerah endemis penyakit DBD

DBD merupakan penyakit yang selama 5 Tahun terakhir ini mengalami kenaikan lebih dari 100%. Pemberantasan sarang nyamuk penyebab DBD melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) yang dilakukan masyarakat sangat efektiv dalam rangka pencegahan dan penanggulangan DBD, terbukti dari tahun ke tahun kasus DBD mengalami penurunan disamping ditunjang dengan siklus epidemiologi penyakit DBD yang mengalami naik turun secara tiga tahunan dan lima tahunan. Dukungan masyarakat dan pemangku kebijakan sangat diperlukan, agar masalah DBD dapat dituntaskan di wilayah Gunungkidul.

h. Pola penyakit degeneratif semakin meningkat

Trend baru pola penyakit menular semakin digeser posisinya oleh penyakit-penyakit tidak menular atau dengan kata lain penyakit infeksi menjadi non infeksi. Usia harapan hidup yang semakin meningkat rupanya juga membawa konsekuensi logis terhadap munculnya kasus-kasus penyakit degeneratif, yang didukung dengan perilaku hidup yang tidak sehat. Berdasarkan laporan sepuluh besar penyakit pada tahun 2024, penyakit degenerative mendominasi, diantaranya sebagai berikut: (1) Penyakit esofagus, lambung dan duodenum lainnya; (2) gangguan endokrin, nutrisi dan metabolik lainnya; (3) bronkitis, emfisema dan penyakit paru obstruktif kronik lainnya; (4) Diabetes melitus tidak bergantung insulin; (5) Infeksi saluran nafas bagian atas akut lainnya, (6) Infeksi saluran nafas bagian atas akut lainnya; (7) Penunjang sarana kesehatan untuk alasan lainnya; (8) Artrisis; (9) Gangguan jaringan ikat lainnya; (10) Penyakit hipertensi lainnya.

Bergeser jauh dari laporan sepuluh besar penyakit pada tahun 2018, yaitu : Nasofaringitis akut [common cold], Hipertensi esensial (primer), Sakit kepala (pusing), Mialgia, Dispepsia, Supervision of other normal pregnancy, Artritis, tidak terspesifikasi, Dermatitis kontak alergi, penyebab tidak terspesifikasi, Diabetes mellitus tak

tergantung insulin tanpa komplikasi, Gastritis, tidak terspesifikasi .

Data lain berdasar hasil Riskesdas di Kabupaten Gunungkidul (2018) penyakit katarak juga merupakan masalah yang banyak ditemui di kalangan Usila, tindakan operasi baru sebagian kecil yang dilaksanakan.

i. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum memadai

Kesehatan lingkungan erat kaitannya dengan ketersediaan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL), jamban keluarga dan yang pokok adalah ketersediaan air bersih. Sementara ini, ketiga hal tersebut masih menjadi masalah yang belum tertuntaskan di Kabupaten Gunungkidul. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka pelaku- pelaku pembangunan sarana kesehatan lingkungan lebih banyak akan melibatkan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat.

j. Banyaknya kasus kesehatan jiwa

Kasus bunuh diri juga menjadi fenomena tersendiri di Kabupaten Gunungkidul, dan hal ini tidak lepas dari masalah kesehatan jiwa. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti penyakit menahun, adanya kepercayaan masyarakat “pulung gantung” dan juga faktor- faktor lainnya tetapi pada dasarnya penyebab kasus bunuh diri semata-mata bukan disebabkan oleh faktor ekonomi.

k. Kalurahan sehat aktif masih perlu ditingkatkan

Sebagai wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, kalurahan sehat bisa dijadikan wadah di tingkat kalurahan. Kalurahan sehat yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar masih bersifat pembentukan tim dan perintisan namun sebagian besar kegiatan nyata belum berjalan dengan baik. Banyak hal yang harus dibenahi untuk keberlangsungan kalurahan sehat aktif.

l. Pengembangan RSUD Wonosari, RSUD Saptosari, Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan yang ada di kabupaten Gunungkidul dalam hal pengembangan gedung, sarana dan prasarana, pelayanan, status dan pengembangan lainnya sesuai situasi dan kondisi agar tetap menjadi tujuan layanan masyarakat kabupaten Gunungkidul.

m. Keterbatasan jumlah SDM pelaksana baik kuantitas maupun kualitas sesuai kompetensi di Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas maupun di UPT Laboratorium Kesehatan.

n. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan masih terbatas.

2.3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu sector kesehatan di atas, maka isu strategis Dinas Kesehatan adalah :

a. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dikarenakan masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan, sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal;
b. Belum tertuntaskannya kasus Stunting dan Wasting pada balita;
c. Masih belum maksimalnya penanganan penyakit menular (masih rendahnya cakupan penemuan penderita TBC dengan BTA (+), peningkatan kasus HIV-AIDS, dll);
d. Tingginya angka kesakitan penyakit degeneratif dan tidak menular (hipertensi, stroke, diabetes mellitus, skizoprenia);
e. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kesehatan;
f. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tatanan;

g. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, termasuk UKBM dan kalurahan sehat;
h. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum memadai;
i. Pengembangan sarana, prasarana, dan pelayanan penunjang di RSUD Wonosari, RSUD Saptosari, Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul agar tetap menjadi tujuan layanan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil reviu, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini berimbas ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dibutuhkan.

Penjabaran program kegiatan berdasarkan reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3.
Reviu Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan perangkat daerah		94.407.831.737,23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan perangkat daerah		94.407.831.737,23	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu	28 Dokumen	47.467.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu	28 Dokumen	47.467.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	19.627.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	19.627.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.480.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.480.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	2.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	2.100.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dokumen DPA-SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	15.060.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	15.060.000,00	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Gunungkidul, Semua Kecamatan	Jumlah Data Statistik Sektoral	12 Data	64.200.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Gunungkidul, Semua Kecamatan,	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah	12 Data	64.200.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		, Semua Kel/Desa	Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			Daerah	Semua Kel/Desa	yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel	2 Dokumen	92.989.549.627,23	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel	2 Dokumen	92.989.549.627,23	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13230 Orang/bulan	92.946.225.027,23	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13230 Orang/bulan	92.946.225.027,23	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.214.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.214.600,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	33.110.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	33.110.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah terpenuhi	1 Dokumen	45.109.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah terpenuhi	1 Dokumen	45.109.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	45.109.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	45.109.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah terpenuhi	1 Dokumen	191.710.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum perangkat daerah terpenuhi	1 Dokumen	191.710.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	137.182.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	137.182.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	54.528.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	54.528.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Dokumen	417.616.110,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Dokumen	417.616.110,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			terpenuhi					terpenuhi			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan	417.616.110,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan	417.616.110,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	6 Dokumen	716.380.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	6 Dokumen	716.380.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	468.100.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	468.100.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	27.600.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	27.600.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir	1 Unit	208.680.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire	1 Unit	208.680.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kel/Desa	ehabilitasi				Kel/Desa	habilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	12.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	12.000.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pelayanan ibu hamil, Pelayanan ibu bersalin, Pelayanan bayi baru lahir, Pelayanan balita (12 - 23 bulan), Pelayanan kesehatan anak usia SD, Pelayanan kesehatan orang usia produktif, Pelayanan kesehatan usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, Pelayanan kesehatan ODGJ berat,	98 indeks	46.156.905.680,69	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pelayanan ibu hamil, Pelayanan ibu bersalin, Pelayanan bayi baru lahir, Pelayanan balita (12 - 23 bulan), Pelayanan kesehatan anak usia SD, Pelayanan kesehatan orang usia produktif, Pelayanan kesehatan usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, Pelayanan kesehatan ODGJ berat, Pelayanan kesehatan orang	98 indeks	46.156.905.680,69	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pelayanan kesehatan orang teduga tuberkulosis, Pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV					teduga tuberkulosis, Pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Puskesmas yang memenuhi mutu minimal layanan dasar SPM	30 Unit	5.943.036.236,69	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Puskesmas yang memenuhi mutu minimal layanan dasar SPM	30 Unit	5.943.036.236,69	
	Pengembangan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	144.785.000,00	Pengembangan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	144.785.000,00	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	100 Paket	5.641.332.636,69	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	100 Paket	5.641.332.636,69	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi	0 Keluarga	9.590.100,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah	0 Keluarga	9.590.100,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	180 Paket	147.328.500,00	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	180 Paket	147.328.500,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Puskesmas yang memberikan Layanan SPM	30 Unit	40.034.031.444,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Puskesmas yang memberikan Layanan SPM	30 Unit	40.034.031.444,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5790 Orang	231.491.652,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5790 Orang	231.491.652,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5517 Orang	75.840.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5517 Orang	75.840.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5500 Orang	17.995.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5500 Orang	17.995.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34182 Orang	51.452.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34182 Orang	51.452.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8000 Orang	49.557.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8000 Orang	49.557.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	473279 Orang	464.656.700,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	473279 Orang	464.656.700,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81633 Orang	183.155.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81633 Orang	183.155.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34971 Orang	17.870.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34971 Orang	17.870.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan	9210 Orang	16.995.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan	9210 Orang	16.995.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kel/Desa	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Kel/Desa	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1652 Orang	16.515.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1652 Orang	16.515.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5905 Orang	119.849.800,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5905 Orang	119.849.800,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10108 Orang	17.145.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10108 Orang	17.145.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	17.500.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	17.500.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	4 Dokumen	163.035.400,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	4 Dokumen	163.035.400,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		, Semua Kel/Desa	Kesehatan Gizi Masyarakat				Semua Kel/Desa	Kesehatan Gizi Masyarakat			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	32.526.842,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	32.526.842,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	28.470.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7 Dokumen	28.470.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	168.695.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	168.695.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	79.197.050,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	79.197.050,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	248.960.000,00	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	248.960.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Kab. Gunungkid	Jumlah Orang dengan	2718 Orang	37.225.000,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkid	Jumlah Orang dengan Masalah	2718 Orang	37.225.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	ul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	ul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	4 Dokumen	11.180.000,00	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	4 Dokumen	11.180.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	77.279.800,00	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	77.279.800,00	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	37.022.297.200,00	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	37.022.297.200,00	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	7.750.000,00	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	7.750.000,00	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	132.771.000,00	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	132.771.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	30 Unit	13.590.000,00	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	30 Unit	13.590.000,00	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	207.502.900,00	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	207.502.900,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1020 Orang	9.995.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1020 Orang	9.995.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200 Orang	1.070.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200 Orang	1.070.000,00	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Gunungkidul, Semua	Jumlah orang yang mendapatkan	1056 Orang	2.750.000,00	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Gunungkidul, Semua	Jumlah orang yang mendapatkan	1056 Orang	2.750.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	pelayanan kesehatan malaria				Kecamatan, Semua Kel/Desa	pelayanan kesehatan malaria			
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	0 Tatanan	0,00	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	0 Tatanan	0,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	466.189.100,00	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	466.189.100,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	16.112.500,00	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	16.112.500,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen	14.840.000,00	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Dokumen	14.840.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	0 Dokumen	12.572.500,00	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	0 Dokumen	12.572.500,00	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	1 Unit	64.200.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Jumlah Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	1 Unit	64.200.000,00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	64.200.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	64.200.000,00	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya memiliki izin operasional	2 Unit	115.638.000,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya memiliki izin operasional	2 Unit	115.638.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	8 Unit	9.250.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan	8 Unit	9.250.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			Kesehatan Lainnya		Ditindaklanjuti Perizinannya			
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	30 Unit	106.388.000,00	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	30 Unit	106.388.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar	100 Persen	917.440.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar	100 Persen	917.440.000,00	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan Praktik Profesi memiliki Izin Praktik	110 Orang	8.020.000,00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan Praktik Profesi memiliki Izin Praktik	110 Orang	8.020.000,00	
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	200 Dokumen	8.020.000,00	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	200 Dokumen	8.020.000,00	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah		Jumlah Keterisian Rencana Kebutuhan Sumber Daya	34 Orang	111.481.000,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Keterisian Rencana Kebutuhan Sumber Daya	34 Orang	111.481.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota		Manusia (dalam aplikasi)			untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Manusia (dalam aplikasi)			
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	7.030.000,00	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	7.030.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 Dokumen	104.451.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 Dokumen	104.451.000,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pemenuhan tenaga kesehatan teladan 9 rumpun	9 Orang	797.939.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pemenuhan tenaga kesehatan teladan 9 rumpun	9 Orang	797.939.000,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 Orang	797.939.000,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 Orang	797.939.000,00	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Cakupan SEDIAAN FARMASI, ALAT	71,58 Persen	594.627.000,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Cakupan SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN	71,58 Persen	594.627.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					DAN MAKANAN MINUMAN			
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan sesuai standar	65 Sarana	59.425.000,00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan sesuai standar	65 Sarana	59.425.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Dokumen	59.425.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Dokumen	59.425.000,00	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan sesuai standar	18 IRT	268.451.000,00	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh		Jumlah Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan sesuai standar	18 IRT	268.451.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Industri Rumah Tangga					
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	160 Dokumen	268.451.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	160 Dokumen	268.451.000,00	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Sesuai Standar	155 Unit	16.860.000,00	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Sesuai Standar	155 Unit	16.860.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			16.860.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			16.860.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Memenuhi Syarat Sesuai Standar	526 Unit	10.590.000,00	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Memenuhi Syarat Sesuai Standar	526 Unit	10.590.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			10.590.000,00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			10.590.000,00	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah Sarana Produksi Industri Rumah Tangga sesuai Standar	15 sarana	239.301.000,00	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah Sarana Produksi Industri Rumah Tangga sesuai Standar	15 sarana	239.301.000,00	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan	160 Unit	239.301.000,00	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan	160 Unit	239.301.000,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan					Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 Persen	214.913.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	19 Persen	214.913.500,00	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kalurahan sehat mandiri	11 Kalurahan	5.567.500,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kalurahan sehat mandiri	11 Kalurahan	5.567.500,00	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	5.567.500,00	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	5.567.500,00	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kalurahan Melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	82 Kalurahan	12.042.500,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kalurahan Melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	82 Kalurahan	12.042.500,00	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	12.042.500,00	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	12.042.500,00	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Posyandu aktif	650 Posyandu	197.303.500,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Posyandu aktif	650 Posyandu	197.303.500,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	197.303.500,00	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	197.303.500,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya					Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya					
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	3 Unit	650.000.000,00	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	3 Unit	650.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan masyarakat melalui mekanisme usulan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dan Pagu Indikatif Sektoran (PIS) serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan data lapangan.

Proses penyampaian usulan kegiatan dan program tersebut dilaksanakan dengan maksud bisa dilakukan perencanaan dengan sistem bottom up dari masyarakat langsung, sehingga perencanaan tidak dilakukan sentralistik di kabupaten.

Hasil usulan kemudiaan ditentukan skala prioritasnya berdasarkan ketersediaan pagu anggaran dan juga pada kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang akan dicapai tanpa meninggalkan pencapaian indikator yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Renstra Dinas Kesehatan.

Setelah melalui pembahasan yang intensif dan rasionalisasi program untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang optimal, maka rancangan awal rencana kerja Dinas Kesehatan berdasarkan usulan program dan kegiatan pembangunan tahun 2026 dari para pemangku kepentingan kabupaten Gunungkidul berdasarkan prioritas dari sumber dana Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) sebesar Rp. 610.458.768,00 (Enam ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), dan sumber dana Pagu Indikatif Sektoral (PIS) dengan pagu indikatif sejumlah Rp. 1.216.007.285,00 (Satu milyar dua ratus enal belas juta tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). Selengkapnya ditampilkan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Pagu Usulan Verifikasi OPD	Catatan
PAGU INDIKATIF SEKTORAL (PIS)							
1	Fasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Posyandu secara Digital dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer	Nglindur Girisubo Gunungkidul - Kuwon Lor Pacarejo Semanu Gunungkidul	Jumlah Posyandu yang terfasilitasi paket data untuk proses pencatatan dan pelaporan pelaksanaan 5 meja	2	600.000	1.200.000	
2	Orientasi dalam Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita Bagi Kader di Posyandu (Pelatihan SDIDTK)	Nglindur Girisubo Gunungkidul	Jumlah angkatan Orientasi dalam Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita Bagi Kader di Posyandu	1	9.050.000	9.050.000	
3	Orientasi Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT) Bagi Kader	Nglindur Girisubo Gunungkidul - Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop Gunungkidul	Jumlah angkatan kegiatan Orientasi Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT) bagi kader	2	4.200.000	8.400.000	
4	Pelaksanaan Musyawarah Masyarakat Kalurahan Bidang Kesehatan	Pakel, Pringombo, Rongkop, Gunungkidul - Jl.Ki Ageng Giring No 1 Kepek Wonosari	Jumlah Kalurahan melaksanakan Musyawarah Masyarakat Kalurahan untuk permasalahan kesehatan.	2	3.250.000	6.500.000	
5	Pelatihan Kader dalam pelayanan lansia luar gedung	Kalurahan Hargomulyo - Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari. Kabupaten Gunungkidul - Kampung, Ngawèn, Gunungkidul, Gunung Kidul Regency, Special Region of Yogyakarta, Indonesia	Jumlah angkatan pelatihan Perawatan Jangka Panjang Lansia Bagi Kader	3	7.390.000	22.170.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Pagu Usulan Verifikasi OPD	Catatan
6	Pelatihan Kader dalam perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	Nglindur Girisubo Gunungkidul - balai kalurahan mulusan - Panjatan - Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop Gunungkidul - Kuwon Lor, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul	Jumlah angkatan pelatihan Perawatan Jangka Panjang Lansia Bagi Kader	5	16.065.000	80.325.000	
7	Pelatihan kader kesehatan jiwa	Kalurahan Hargomulyo - Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Gunungkidul - Kalurahan Grogol - Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop	Jumlah angkatan pelatihan kesehatan jiwa	4	4.900.000	19.600.000	
8	Pelatihan Kader Kesehatan tentang STBM 5 Pilar	Watusigar - Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop Gunungkidul	Jumlah Pelatihan Kader kesehatan tentang indikator setiap Pilar STBM	2	5.725.000	11.450.000	
9	Pelatihan Kader Tuberkulosis	Kepuh Karangawen Girisubo Gunungkidul - bolodukuh lor - Balai Kalurahan Purwodadi,rt.03 rw.15,cepogo,purwodadi,tepus ,gunungkidul	Jumlah angkatan pelatihan kader tuberkulosis	3	2.900.000	8.700.000	
10	Pelatihan Kader Zoonosis (penyakit yang ditularkan oleh hewan) dan tular vektor lainnya	Kalurahan Hargomulyo - Desa Karangmojo - Kalurahan Giring - Grogol, Paliyan Gunungkidul - BALAI KALURAHAN KARANGASEM - Balai Kalurahan Karangduwet kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul - Kalurahan Mulusan - Kalurahan Pampang, Paliyan - Sodo	Jumlah angkatan Pelatihan Kader Zoonosis (penyakit yang ditularkan oleh hewan)	9	3.750.000	33.750.000	
11	Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) bagi Kader Pangan	Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari - Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	Jumlah Angkatan yang diberikan pelatihan Keamanan Pangan (Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut	2	10.766.600	21.533.200	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Pagu Usulan Verifikasi OPD	Catatan
			Pengawasan)				
12	Pelatihan Keterampilan Dasar Kader	Pakel, Pringombo, Rongkop, Gunungkidul	Jumlah kader dilatih keterampilan dasar.	1	6.850.000	6.850.000	
13	Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi kader	Kalurahan Hargomulyo - Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari - Balai Desa Sambirejo, Ngawen,Gunungkidul, DIY - Kalurahan Katongan, Nglipar - Kalurahan Giring - Kalurahan melikan, Kapanewon Rongkop		6	22.484.000	134.904.000	
14	Pelatihan pemulasaraan jenazah dengan infeksi penyakit menular	Kalurahahan Karangtengah		1	3.500.000	3.500.000	
15	Pengadaan Posyandu Remaja Kit	Giriasih Purwosari Gunungkidul - Sumberejo, Semin, Gunungkidul	Jumlah posyandu remaja yang terfasilitasi posyandu remaja kit	2	1.384.442	2.768.884	
16	Pengadaan antropometri kit	Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul		1	5.500.000	5.500.000	
17	Pengadaan Paket Posbindu	Padukuhan Karangwetan 2, Gedangrejo, Karangmojo - Dusun Ngringin Kalurahan Karangmojo - Dusun Ngrombo 1, Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo - Sudimoro, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul - Padukuhan Kendalrejo - Kampung Kidul RT 01/RW 02, Kampung, Ngawen, Gunungkidul - Padukuhan Kedungdowo Kulon, Pampang, Paliyan, GK - Sodo	Jumlah Posbindu yang terfasilitasi posbindu kit dan pelatihan penggunaan posbindu kit	8	10.441.200	83.529.600	
18	Pengadaan Paket SDIDTK KIT untuk posyandu	Karanggede B, Jerukwudel, Girisubo, Gunungkidul	Jumlah Posyandu yang terfasilitasi SDIDTK KIT	1	428.000	428.000	
19	Pengadaan Pangan Kebutuhan Medis Khusus (PKMK)	Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk	Jumlah anak Baduta (Bawah Dua Tahun) dengan spesifik usia 12 sd 23 bulan dengan status Gizi Pendek dan Sangat Pendek yang mendapatkan PKMK selama 3 bulan	1	1.800.000	1.800.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Pagu Usulan Verifikasi OPD	Catatan
			berturut				
20	Pengadaan Sarana Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Kit	Puskesmas semin II rejiosari semin	Jumlah Pos UKK yang terfasilitasi UKK kit dan pelatihan penggunaan UKK kit	1	5.976.842	5.976.842	
21	Pengadaan Skrining Anemia (Pemeriksaan HB) Remaja Putri	Jurangjero, ngawen, gunugkidul - Doga, RT 09, RW 05, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul - Kalurahan Siraman, Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta	Jumlah Posyandu remaja yang memiliki Skrining Anemia Kit Remaja Putri	3	1.597.500	4.792.500	
22	Pengembangan Posyandu remaja	Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari - Kalurahan Bendungan (pOSNYANDU Remaja Padukuhan watudalang) - Padukuhan Tenggaran, Gedangrejo, Karangmojo - Kalurahan Jatiayu - Dusun Gentungan, Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo - Kalurahan Kelor, Karangmojo, Gunungkidul - Posyandu Remaja Padukuhan Jetis, ngipak, karangmojo - Kalurahan Wiladeg - Kampung, Ngawèn, Gunungkidul, Gunung Kidul Regency, Special Region of Yogyakarta, Indonesia - Balai Desa Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul, DIY - Trasih 001/002 Giriasih Purwosari Gunungkidul - Kendal, Melikan, rongkop - Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop - MONGGOL - Balai Kalurahan Sumberwungu Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul (Pakwungu Sumberwungu Tepus) - Kalurahan Tepus - Kalurahan Siraman, Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta	Jumlah angkatan pelatihan kader remaja terlatih di posyandu	17	5.290.000	89.930.000	
23	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam penggunaan obat	Kalurahan Hargomulyo - Trasih 001/002 Giriasih Purwosari Gunungkidul - Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop	Jumlah angkatan yang tersosialisasi penggunaan obat	3	3.625.000	10.875.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Pagu Usulan Verifikasi OPD	Catatan
	swamedikasi/ Pengobatan Mandiri secara Rasional (POR).	Gunungkidul	swamedikasi/Pengobatan Mandiri secara Rasional / Penggunaan Obat Rasional (POR)				
24	Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Bahan-Bahan Berbahaya dalam Makanan, Obat Tradisional dan Kosmetik	Kalurahan Hargomulyo - Kampung Kidul RT 01/RW 02, Kampung, Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. - Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop Gunungkidul - Balai Kalurahan Purwodadi,Rt.03 Rw 15,Cepogo,Purwodadi,Tepus,Gunungkidul	Jumlah angkatan yang tersosialisasi Bahan-Bahan Berbahaya dalam Makanan, Obat Tradisional dan Kosmetik	4	5.050.000	20.200.000	
25	Penyelenggaraan Kampanye Germas	bandung songbanyu girisubo gunungkidul	Jumlah Kalurahan menyelenggarakan Kampanye Germas	1	9.850.000	9.850.000	
26	Penyuluhan Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC	DOGA, RT 09, RW 02, NGLANGGERAN PATUK GUNUNGKIDUL - Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan penyuluhan	2	2.570.000	5.140.000	
27	Workshop dan pendampingan ibu hamil dan nifas dengan risiko tinggi	Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari - Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari. Kabupaten Gunungkidul - Munggur, 002/002, Ngipak, Karangmojo - Kalurahan watusigar, Kapanewon Ngawen, kabupaten gunungkidul - kalurahan karangduwet kapanewon paliyan kabupaten gunungkidul - Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk - Balai kalurahan Gombang, Kebowan kidul rt 02 rw 07 Gombang Ponjong - Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul - Kalurahan Melikan, kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul - Pakel, Pringombo, Rongkop, Gunungkidul - Kalurahan Giripanggung, Tepus, Gunungkidul - Kalurahan Tepus - Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul Daerah		14	19.010.000	266.140.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Pagu Usulan Verifikasi OPD	Catatan
		Istimewa Yogyakarta - Kal. Wonosari -					
28	Workshop Pemanfaatan Buku KIA oleh kader Posyandu	Kalurahan Monggol Saptosari - Balai Kalurahan Planjan	Jumlah angkatan kegiatan workshop Pemanfaatan Buku KIA oleh kader Posyandu	2	6.900.000	13.800.000	
PAGU INDIKATIF WILAYAH KAPANEWON							
29	Bantuan Pemulihan Gizi Bagi Pasien TBC	Kalurahan Giring - Grogol, Paliyan Gunungkidul - BALAI KALURAHAN KARANGASEM PALIYAN - Balai Kalurahan Karangduwet Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul - kalurahan Mulusan - Kalurahan Pampang, Paliyan - Sodo	Jumlah pasien yang diberikan paket Pemulihan Gizi	18	460.000	8.280.000	
30	Fasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Posyandu secara Digital dalam Mendukung Transformasi Pel32ayanan Kesehatan Primer	Kalurahan Ngawu Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul - Jl.Ki Ageng Giring No 1 Kepek Wonosari - Selang, Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Posyandu yang terfasilitasi paket data untuk proses pencatatan dan pelaporan pelaksanaan 5 meja	24	600.000	14.400.000	
31	Orientasi dalam Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita Bagi Kader di Posyandu (Pelatihan SDIDTK)	Ngunut, Playen, gunungkidul - Playen I, Playen, Playen, Gunungkidul	Jumlah angkatan Orientasi dalam Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita Bagi Kader di Posyandu	3	9.050.000	27.150.000	
32	Pelatihan Kader dalam perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia	Kader Lansia Kalurahan KedungkerisNgunut, Playen, GunungkidulKalurahan SidoharjoJl.Ki Ageng Giring No 1 Kepek Wonosari	Jumlah angkatan pelatihan Perawatan Jangka Panjang Lansia Bagi Kader	4	16.065.000	64.260.000	
33	Pelatihan kader kesehatan jiwa	Kalurahan Pampang - Sendang 2, Sawahan, Ponjong	Jumlah angkatan pelatihan kesehatan jiwa	2	4.900.000	9.800.000	
34	Pelatihan Kader Kesehatan tentang STBM 5 Pilar	Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul	Jumlah Pelatihan Kader kesehatan tentang indikator setiap Pilar STBM	1	5.725.000	5.725.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Pagu Usulan Verifikasi OPD	Catatan
35	Pelatihan Keterampilan Dasar Kader	Kalurahan Giring - Jati, Karangasem, Ponjong, gunungkidul - Jl. Wediombo Km7, Candirejo, Semanu - Kalurahan Semanu	Jumlah kader dilatih keterampilan dasar.	5	6.850.000	34.250.000	
36	Pengadaan Posyandu Remaja Kit	Kalurahan Ngawu Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul	Jumlah posyandu remaja yang terfasilitasi posyandu remaja kit	4	1.384.442	5.537.768	
37	Pengadaan Paket Posbindu	Kalurahan Sambirejo Ngawen Gunungkidul DIY - Nglegi, Patuk, Gunungkidul - Posyandu di Kalurahan Ngawu, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul - Kaluraham Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	Jumlah Posbindu yang terfasilitasi posbindu kit dan pelatihan penggunaan posbindu kit	37	10.441.200	386.324.400	
38	Pengadaan Paket SDIDTK KIT untuk posyandu	Ngunut, Playen, gunungkidul	Jumlah Posyandu yang terfasilitasi SDIDTK KIT	3	428.000	1.284.000	
39	Pengadaan Skrining Anemia (Pemeriksaan HB) Remaja Putri	Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan	Jumlah Posyandu remaja yang memiliki Skrining Anemia Kit Remaja Putri	6	1.597.500	9.585.000	
40	Pengembangan Posyandu remaja	Bedoyo Kidul RT 001 RW 006, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul 55892 - Jati, Karangasem, Ponjong, Gunungkidul - Kalurahan Tepus, Tepus, Gunungkidul - Kalurahan Tepus	Jumlah angkatan pelatihan kader remaja terlatih di posyandu	5	5.290.000	26.450.000	
41	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam penggunaan obat swamedikasi/ Pengobatan Mandiri secara Rasional (POR).	Wiloso, Kalurahan Girikarto - Balai Kalurahan Girimulyo - girisuko panggang gunungkidul	Jumlah angkatan yang tersosialisasi penggunaan obat swamedikasi/Pengobatan Mandiri secara Rasional / Penggunaan Obat Rasional (POR)	3	3.625.000	10.875.000	
42	Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Keterampilan Akupresure	kalurahan karangduwet kapanewon paliyan kabupaten gunungkidul - balai kalurahan mulusan - Kader kesehatan kalurahan monggol - Balai Kalurahan Sumberwungu Tepus Gunungkidul (Pakwungu Sumberwungu Tepus)	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Keterampilan	4	8.900.000	35.600.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Pagu Usulan Verifikasi OPD	Catatan
			Akupresure				
43	Workshop Pemanfaatan Buku KIA oleh kader Posyandu	Kalurahan Ngawu Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul	Jumlah angkatan kegiatan workshop Pemanfaatan Buku KIA oleh kader Posyandu	1	6.900.000	6.900.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menjadi salah satu acuan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di daerah.

Perencanaan yang disusun oleh pemerintah disusun berdasarkan peran dan fungsi serta kewenangan masing-masing bersama stake holders terkait dengan mempertimbangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Perencanaan pembangunan tersebut disusun dengan memperhatikan unsur integrasi dan sinergi sehingga ada keterkaitan antar dokumen perencanaan.

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2025-2045, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 telah menetapkan Visi Presiden 2025-2029: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJM nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan kesehatan yang diuraikan dalam rencana program bidang kesehatan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 tidak ada visi dan misi namun mengikuti visi dan misi Presiden Indonesia yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Kementerian Kesehatan meliputi 8 (delapan) sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
2) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan;
3) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5) Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6) Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7) Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8) Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Adapun prioritas pembangunan kesehatan pada tahun 2025-2029 difokuskan pada enam fokus prioritas yaitu:

1) Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak;
2) Meningkatnya status gizi masyarakat;
3) Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular;
4) Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
5) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul disusun dengan tetap mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan juga menjadi rujukan dalam penyusunan jenis program kegiatan dan sub kegiatan serta indikator yang akan dicapai terutama untuk Indikator program yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tidak terlepas dari tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 yaitu “Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2025”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehata

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul tahun 2005 – 2025 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1) Tujuan jangka menengah yang akan dicapai adalah meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
2) Sasaran Pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang dijabarkan dalam indikator yang terukur. Sasaran strategis Dinas Kesehatan yang akan dicapai adalah ” Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat”.

Berdasarkan rancangan akhir RPJMD kabupaten gunungkidul telah ditetapkan tujuan dan target kinerja tujuan untuk tahun 2026, IKU Perangkat Daerah, Indikator dan Target IKU Perangkat Daerah. Melihat capaian target-target tersebut di tahun 2026 maka dilakukan proyeksi

terhadap target tujuan kinerja, dan target IKU Perangkat Daerah tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Kesehatan

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks SPM	100

Melihat capaian target tersebut di tahun 2026 maka dilakukan proyeksi terhadap target Sasaran PD tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran PD Tahun 2026
1	*2*	*3*	*6*
1.	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	Prevalensi Stunting	18.77-14.49 %
		Jumlah Kematian Ibu	5 per 100.000 KH
		Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	62%

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2026

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Indeks SPM	Indeks SPM	96 Indeks
2.	Prevalensi stunting	Prevalensi stunting	18.77-14.49 Persen
3.	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kematian Ibu	5 per 100.000 KH
4.	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	62%
5.	Nilai AKIP PD	Nilai AKIP PD	82,26

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Sesuai Dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka Dinas KesehatanbKabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan program dan kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Din Kabupaten Gunungkidul.

Rancangan Rencana Kerja Dinas KesehatanKabupaten Gunungkidul Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Rencana kerja tahunan ini berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

Visi Kepala Daerah tahun 2025-2029 :

""Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Kerkeadaban."

Misi Kepala Daerah tahun 2025-2029 :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya local.
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan kerkeadaban.
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah: "Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Program Bocah Pinter;
2. Program Warga Sehat;
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya;
4. Program Gunungkidul Berdikari;
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi;
6. Program Warga Gayeng dan Guyub;
7. Program Alam Lestari.

b. Uraian garis besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki

tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaiamana diuraikan dalam kebijakan.
Kegiatan instansi merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberika dukungan pada pencapaian visi dan misi daerah.
Dengan melaksanakan program dan kegiatan diharap akan dapat mewujudkan pelayanan secara profesional terhadap tugas dan kegiatan DPRD Kabupaten Gunungkidul dan mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik.
Berikut kami sajikan rekapitulasi program dan kegiatan yang menjabarkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1

Prioritas, sasaran daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Warga Sehat	Terwujudnya peningkatan sistem dan layanan kesehatan secara menyeluruh	Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat	1. Angka Kematian Ibu	74,96-75,16	1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.038.512.946,00	DINAS KESEHATAN
			2. Angka penemuan kasus tuberkulosis		1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.071.310.502,00	
					1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	144.785.000,00	
					1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	33.757.000,00	
					1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.725.022.902,00	
					1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	9.590.100,00	
					1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	158.155.500,00	
					1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.851.564.444,00	
					1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.519.051.652,00	
					1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75.840.000,00	
					1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	17.995.000,00	
					1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	51.452.000,00	
					1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	687.757.000,00	
					1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	464.656.700,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	183.155.000,00	
					1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	17.870.000,00	
					1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.995.000,00	
					1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	313.815.000,00	
					1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	263.499.800,00	
					1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	49.450.000,00	
					1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	17.500.000,00	
					1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.289.028.500,00	
					1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	202.950.000,00	
					1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	354.320.000,00	
					1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	168.695.000,00	
					1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	79.197.050,00	
					1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.166.414.000,00	
					1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	144.275.000,00	
					1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
					1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	17.156.842,00	
					1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.445.405.500,00	
					1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	37.022.297.200,00	
					1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7.750.000,00	
					1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	
					1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	177.582.000,00	
					1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.014.459.400,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	589.350.000,00	
					1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	13.590.000,00	
					1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	28.750.000,00	
					1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	330.692.900,00	
					1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.995.000,00	
					1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.070.000,00	
					1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	8.450.000,00	
					1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	-	
					1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.849.875.500,00	
					1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	498.798.400,00	
					1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	299.600.000,00	
					1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	425.412.500,00	
					1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	14.840.000,00	
					1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	12.572.500,00	
					1.02.02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.638.000,00	
					1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9.250.000,00	
					1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	106.388.000,00	
					1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	917.440.000,00	
					1.02.03.2.01.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	8.020.000,00	
					1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	8.020.000,00	
					1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	111.481.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.030.000,00	
					1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	104.451.000,00	
					1.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	797.939.000,00	
					1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	797.939.000,00	
					1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	594.627.000,00	
					1.02.04.2.01.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	59.425.000,00	
					1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	59.425.000,00	
					1.02.04.2.03.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	268.451.000,00	
					1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	268.451.000,00	
					1.02.04.2.04.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	16.860.000,00	
					1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	16.860.000,00	
					1.02.04.2.05.	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10.590.000,00	
					1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10.590.000,00	
					1.02.04.2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan	239.301.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		
					1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	239.301.000,00	
					1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	759.284.500,00	
					1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.567.500,00	
					1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.567.500,00	
					1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.042.500,00	
					1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12.042.500,00	
					1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	741.674.500,00	
					1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	741.674.500,00	
					2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	650.000.000,00	
					2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	650.000.000,00	
					2.22.08.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	650.000.000,00	
					2.22.08.5.06.	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	650.000.000,00	
					2.22.08.5.06.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	650.000.000,00	
					4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	100.000.000,00	
					4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	100.000.000,00	
					4.01.04.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	100.000.000,00	
					4.01.04.5.02.	Peningkatan Budaya Pemerintahan	100.000.000,00	
					4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	

4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan dukungan Perangkat Daerah lainnya serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur. Hasil rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 dengan dana sebesar Rp 327.358.054.548,51 disajikan dalam tabel- tabel berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Kesehatan				152.164.863.148,51				8.313.456.040,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				151.514.863.148,51				8.313.456.040,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				151.514.863.148,51				8.313.456.040,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan perangkat daerah		82.26 Skor	103.343.399.702,51			-	0,00
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			111.671.000,00			-	0,00
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	19.631.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.480.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	15.060.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Data	64.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			101.580.772.592,51			-	0,00
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13230 Orang/bulan	101.503.192.992,51	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.214.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	67.365.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian			79.364.000,00			-	0,00
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	79.364.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			286.177.000,00			-	0,00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	231.649.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	54.528.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			417.616.110,00			-	0,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132 Laporan	417.616.110,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah			867.799.000,00			-	0,00
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Unit	498.455.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46 Unit	27.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	329.744.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	12.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar Persentase Kalurahan dengan Sanitasi Total berbasis Masyarakat 5 pilar Persentase puskesmas terakreditasi		100 Persen 60 Persen 80 Persen 92.7 Persen	46.444.485.946,00			-	8.276.886.040,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					MASYARAKAT	paripurna Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar Bidang Kesehatan Masyarakat		95 Persen 98 Persen					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			6.071.310.502,00			-	5.939.196.172,00
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas								
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	144.785.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			144.829.310,00
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	33.757.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Paket	5.725.022.902,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			5.697.038.362,00
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga								
						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-	50 Keluarga	9.590.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								
						Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180 Paket	158.155.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			97.328.500,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan undefined			40.257.537.444,00			-	2.288.839.868,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5790 Orang	231.491.652,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			135.397.768,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5517 Orang	75.840.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			75.840.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5500 Orang	17.995.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			18.020.000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34182 Orang	51.452.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			51.274.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8000 Orang	49.557.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	473279 Orang	464.656.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			378.132.000,00
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81633 Orang	183.155.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			19.860.000,00
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34971 Orang	17.870.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			17.870.000,00
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9210 Orang	16.995.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			16.995.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1652 Orang	16.515.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			16.515.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5905 Orang	119.849.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			134.874.800,00
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10108 Orang	49.450.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			17.145.000,00
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	17.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	196.792.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	26.550.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			0,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	28.470.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			17.870.000,00
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	168.695.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			0,00
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	2 Dokumen	79.197.050,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Semua Kel/Desa						
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	248.960.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			0,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2718 Orang	37.225.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	17.156.842,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	111.534.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			53.470.000,00
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	37.022.297.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)			1.022.297.200,00
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			9.000.000,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	132.770.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			132.771.000,00
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	13.590.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			17.190.000,00
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	330.692.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			139.133.100,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1020 Orang	9.995.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.615.000,00
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1200 Orang	1.070.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.070.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1056 Orang	2.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.750.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	466.189.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			2.750.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16.112.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk balik								
						Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	14.840.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji								
						Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.572.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase puskesmas terakreditasi paripurna			115.638.000,00			-	48.850.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	9.250.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			9.250.000,00
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	106.388.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			39.600.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang		100 Persen	917.440.000,00			-	23.070.000,00
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terbitnya Izin Praktik Tenaga Kesehatan			8.020.000,00			-	8.020.000,00
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Dokumen	8.020.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.020.000,00
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM			111.481.000,00			-	7.030.000,00
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.030.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.030.000,00
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	104.451.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			0,00
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan			797.939.000,00			-	8.020.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Orang	797.939.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA		8.020.000,00
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman		70,38 Persen	594.627.000,00			-	0,00
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			59.425.000,00			-	0,00
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	59.425.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		0,00
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			268.451.000,00			-	0,00
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Dokumen	268.451.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS- BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN			0,00
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			16.860.000,00			-	0,00
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								
						0	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 0	16.860.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			10.590.000,00			-	0,00
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								
						0	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 0	10.590.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			239.301.000,00			-	0,00
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Unit	239.301.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				DINAS- BOK PENGAWASAN OBAT DAN			
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	214.910.500,00			-	13.500.000,00
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			5.567.500,00			-	0,00
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	5.567.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			0,00
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			12.042.500,00			-	13.500.000,00
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	12.042.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			13.500.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			197.300.500,00			-	0,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	197.300.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA			0,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN				650.000.000,00				0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PELAYANAN DASAR								
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				650.000.000,00				0,00
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga		100 persen	650.000.000,00			-	0,00
2	22	08	5.06		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pelayanan kesehatan tradisional terlaksana			650.000.000,00			-	0,00
2	22	08	5.06	0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional								
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	3 Unit	650.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			0,00
					UPT Puskesmas Nglipar I				1.991.185.000,00				1.984.142.500,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.991.185.000,00				1.984.142.500,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.991.185.000,00				1.984.142.500,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	1.158.727.000,00			-	1.158.727.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.156.052.000,00			-	1.156.052.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan	Kab. Gunungkidul,	1 Unit Kerja	1.156.052.000,00	PENDAPATAN DARI			1.156.052.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan Penunjang Pelayanan	Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol			BLUD			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 Persen	825.891.000,00			-	819.873.500,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			825.891.000,00			-	819.873.500,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	111 Orang	49.680.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			41.760.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	1296 Orang	12.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.250.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	56 Orang	12.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	170 Orang	5.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.100.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	6 Dokumen	296.572.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			296.572.500,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	1 Dokumen	5.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	2 Dokumen	8.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.300.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh	3 Dokumen	16.093.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			16.093.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	1 Orang	1.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.200.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar,	4 Dokumen	159.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			113.640.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengkol						
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	7 Dokumen	143.651.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			138.114.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	1 Orang	400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			400.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	1 Dokumen	73.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			134.200.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	1 Dokumen	2.444.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.444.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	1 Dokumen	28.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			28.800.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar,	1 Dokumen	11.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengkol						
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	6.567.000,00			-	5.542.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi KesehatTerlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)an dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			6.567.000,00			-	5.542.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol	2 Dokumen	6.567.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.542.000,00
					UPT Puskesmas Nglipar II				1.985.207.000,00				1.982.532.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.985.207.000,00				1.982.532.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.985.207.000,00				1.982.532.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82,26 Skor	1.312.275.000,00			-	1.309.600.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen administrasi umum			2.675.000,00			-	0,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.309.600.000,00			-	1.309.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh	1 Unit Kerja	1.309.600.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.309.600.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 Persen	661.861.000,00			-	663.098.500,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			661.861.000,00			-	663.098.500,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh	152 Orang	29.670.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			25.800.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo	2224 Orang	17.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			17.500.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab.	38 Orang	2.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo						
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh	213 Orang	3.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.600.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo	12 Dokumen	292.680.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			292.410.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo	4 Dokumen	7.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.500.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh	6 Dokumen	12.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.700.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar,	4 Dokumen	15.853.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.853.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo						
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo	42 Orang	2.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo	12 Dokumen	68.990.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			65.030.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo	16 Dokumen	135.498.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			153.715.500,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo	2 Orang	100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			100.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo	12 Dokumen	54.020.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			45.140.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh	2 Dokumen	1.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo	2 Dokumen	6.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.000.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo	4 Dokumen	12.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.750.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	11.071.000,00			-	9.833.500,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			11.071.000,00			-	9.833.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Nglipar, Katongan Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh	12 Dokumen	11.071.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.833.500,00
					UPT Puskesmas Gedangsari I				2.315.455.500,00				2.315.455.500,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.315.455.500,00				2.315.455.500,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.315.455.500,00				2.315.455.500,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 skor	1.469.075.000,00			-	1.469.075.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.466.400.000,00			-	1.466.400.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang	1 Unit Kerja	1.466.400.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.466.400.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 persen	830.690.200,00			-	830.690.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					MASYARAKAT								
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			830.690.200,00			-	830.690.200,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang	197 Orang	12.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.800.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu	2138 Orang	9.450.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.450.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu	44 Orang	5.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.600.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang	227 Orang	6.550.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.550.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu	15 Dokumen	227.542.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			227.542.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang						
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang	2 Dokumen	5.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.750.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu	5 Dokumen	8.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.200.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu	6 Dokumen	14.302.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.302.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang	112 Orang	2.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.400.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang	21 Dokumen	209.229.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			209.229.500,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang	6 Dokumen	222.403.700,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			222.403.700,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang	18 Dokumen	93.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			93.500.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang	1 Dokumen	1.362.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.362.500,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang	1 Dokumen	3.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.800.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang	2 Dokumen	7.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.800.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 %	15.690.300,00			-	15.690.300,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			15.690.300,00			-	15.690.300,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Mertelu Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang	3 Dokumen	15.690.300,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.690.300,00
					UPT Puskesmas Gedangsari II				2.154.976.400,00				2.154.976.400,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.154.976.400,00				2.154.976.400,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.154.976.400,00				2.154.976.400,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	1.313.747.000,00			-	1.313.747.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.311.072.000,00			-	1.311.072.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul,	1 Unit Kerja	1.311.072.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.311.072.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo						
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 Persen	827.126.400,00			-	827.126.400,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			827.126.400,00			-	827.126.400,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	226 Orang	29.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			29.400.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	2223 Orang	18.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			18.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	50 Orang	18.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			18.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita	Kab. Gunungkidul,	232 Orang	4.500.000,00	DAK NON FISIK-			4.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo			DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	4 Dokumen	325.369.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			325.369.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	1 Dokumen	6.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.250.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	7 Dokumen	8.900.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.900.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	6 Dokumen	15.224.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.224.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	50 Orang	1.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.600.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	4 Dokumen	76.533.400,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			76.533.400,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	4 Dokumen	139.330.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			139.330.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	4 Dokumen	165.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			165.600.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul,	4 Dokumen	820.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			820.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gedangsari, Tegalrejo						
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	4 Dokumen	12.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.000.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	4 Dokumen	5.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.600.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	14.103.000,00			-	14.103.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			14.103.000,00			-	14.103.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Sampang Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Watugajah Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo	2 Dokumen	14.103.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.103.000,00
					UPT Puskesmas Patuk I				2.464.599.000,00				2.464.599.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.464.599.000,00				2.464.599.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.464.599.000,00				2.464.599.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82,26 skor	1.604.707.000,00			-	1.604.707.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.602.032.000,00			-	1.602.032.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	1 Unit Kerja	1.602.032.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.602.032.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 persen	857.492.000,00			-	857.492.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					MASYARAKAT								
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			857.492.000,00			-	857.492.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	176 Orang	85.860.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			85.860.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	2158 Orang	12.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	47 Orang	5.100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.100.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	211 Orang	4.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.600.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	6 Dokumen	213.631.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			213.631.500,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	6 Dokumen	5.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab.	2 Dokumen	5.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.700.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk						
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	5 Dokumen	14.036.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.036.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	47 Orang	6.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.800.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab.	10 Dokumen	142.081.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			142.081.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk						
1	02		02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok	6 Dokumen	154.782.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			154.782.500,00
1	02		02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	4 Orang	100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			100.000,00
1	02		02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	1 Dokumen	179.920.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			179.920.000,00
1	02		02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya	Kab. Gunungkidul,	3 Dokumen	2.081.000,00	DAK NON FISIK-			2.081.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kesehatan ibu dan anak	Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji			DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	6 Dokumen	21.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			21.300.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji	6 Dokumen	4.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.500.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 persen	2.400.000,00			-	2.400.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya			2.400.000,00			-	2.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat (UKBM)							
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Patuk, Semoyo Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	14 Dokumen	2.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.400.000,00
					UPT Puskesmas Patuk II				2.024.671.500,00				2.029.671.500,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.024.671.500,00				2.029.671.500,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.024.671.500,00				2.029.671.500,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82,26 Skor	1.085.475.000,00			-	1.085.475.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.082.800.000,00			-	1.082.800.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk,	1 Unit Kerja	1.082.800.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.082.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro						
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 persen	923.486.500,00			-	923.456.500,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			923.486.500,00			-	923.456.500,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	105 Orang	76.860.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			76.860.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	2255 Orang	20.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			20.300.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab.	63 Orang	12.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro						
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	190 Orang	14.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	13 Dokumen	279.872.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			279.872.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	50 Dokumen	10.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk,	2 Dokumen	13.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro						
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	12 Dokumen	22.756.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			22.756.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	63 Orang	13.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.600.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	12 Dokumen	85.011.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			85.011.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk,	12 Dokumen	158.812.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			158.812.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro						
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	6 Orang	100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			100.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	12 Dokumen	189.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			189.800.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	12 Dokumen	1.075.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.045.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab.	2 Dokumen	6.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro						
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	2 Dokumen	19.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			19.500.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perikalu Hidup Bersih Sehat		19 Persen	15.710.000,00			-	20.740.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			15.710.000,00			-	20.740.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Patuk, Terbah Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglegi Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	12 Dokumen	15.710.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			20.740.000,00
					UPT Puskesmas Rongkop				3.078.716.000,00				3.078.716.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.078.716.000,00				3.078.716.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.078.716.000,00				3.078.716.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	2.127.470.000,00			-	2.127.470.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			2.124.795.000,00			-	2.124.795.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	2.124.795.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			2.124.795.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 Persen	948.546.000,00			-	948.546.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			948.546.000,00			-	948.546.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184 Orang	46.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			46.800.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	2303 Orang	17.150.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			17.150.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	96 Orang	3.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua	336 Orang	1.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			1.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sesuai Standar	Kel/Desa			PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	460.072.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			460.072.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.500.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	8.900.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.900.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	45.263.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			45.263.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	59.541.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			59.541.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	168.077.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			168.077.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	113.460.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			113.460.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	533.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			533.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	8.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.400.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua	12 Dokumen	13.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			13.250.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kel/Desa			PUSKESMAS			
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	2.700.000,00			-	2.700.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			2.700.000,00			-	2.700.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.700.000,00
					UPT Puskesmas Girisubo				2.691.197.000,00				2.695.022.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.691.197.000,00				2.695.022.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.691.197.000,00				2.695.022.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	1.712.375.000,00			-	1.712.375.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.709.700.000,00			-	1.709.700.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	1.709.700.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.709.700.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 PERSEN	964.309.500,00			-	970.122.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					MASYARAKAT								
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			964.309.500,00			-	970.122.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	173 Orang	28.050.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			28.050.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1943 Orang	8.100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.100.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	52 Orang	3.100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	293 Orang	2.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.500.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	385.342.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			432.685.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.250.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	4.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	31.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			31.500.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua	5 Dokumen	125.720.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			121.510.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Menular	Kel/Desa			PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	161.177.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			156.837.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	200.020.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			167.140.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	50.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			50.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	11.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.500.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	14.512.500,00			-	12.525.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			14.512.500,00			-	12.525.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	14.512.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.525.000,00
					UPT Puskesmas Ponjong I				3.459.971.500,00				869.084.800,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.459.971.500,00				869.084.800,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.459.971.500,00				869.084.800,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP PD		82,26 SKOR	2.593.570.500,00			-	2.675.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					KABUPATEN/KOTA								
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			2.590.895.500,00			-	0,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	2.590.895.500,00	PENDAPATAN DARI BLUD			0,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 %	863.122.400,00			-	863.131.200,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			863.122.400,00			-	863.131.200,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	298 Orang	91.100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			91.100.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	4750 Orang	29.550.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			29.550.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	18 Orang	9.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	239 Orang	3.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.400.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	249.256.200,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			249.265.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	5.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	9.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.200.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	66.124.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			66.124.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	18 Orang	2.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.700.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	96.651.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			96.651.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	247.962.200,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			247.962.200,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	29.190.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			29.190.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.039.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.039.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	7.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.200.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	15.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.750.000,00
1	02	05			PROGRAM	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku		19 Persen	3.278.600,00			-	3.278.600,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Hidup Sehat							
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)			3.278.600,00			-	3.278.600,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.278.600,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.278.600,00
					UPT Puskesmas Ponjong II				2.040.857.600,00				2.040.857.600,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.040.857.600,00				2.040.857.600,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.040.857.600,00				2.040.857.600,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 skor	1.182.819.000,00			-	1.182.819.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.180.144.000,00			-	1.180.144.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab.	1 Unit Kerja	1.180.144.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.180.144.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo						
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 PERSEN	833.038.600,00			-	833.038.600,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			833.038.600,00			-	833.038.600,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	191 Orang	31.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			31.200.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	1509 Orang	25.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			25.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong,	37 Orang	8.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo						
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	60 Orang	10.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	18 Dokumen	238.940.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			238.940.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	10 Dokumen	15.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab.	10 Dokumen	9.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			9.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo			PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	10 Dokumen	15.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.000.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	37 Orang	5.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	12 Dokumen	65.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			65.500.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	12 Dokumen	199.898.600,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			199.898.600,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	3 Dokumen	177.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			177.600.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	5 Dokumen	5.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	5 Dokumen	15.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	14 Dokumen	12.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.400.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 PERSEN	25.000.000,00			-	25.000.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			25.000.000,00			-	25.000.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Ponjong, Gombang Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo	10 Dokumen	25.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			25.000.000,00
					UPT Puskesmas Wonosari I				2.951.915.400,00				2.951.915.400,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.951.915.400,00				2.951.915.400,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.951.915.400,00				2.951.915.400,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82,26 Skor	2.050.303.000,00			-	2.050.303.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			2.047.628.000,00			-	2.047.628.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	2.047.628.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			2.047.628.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 persen	860.962.400,00			-	896.312.400,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			860.962.400,00			-	896.312.400,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	225 Orang	107.970.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			110.250.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2784 Orang	6.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			19.950.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	80 Orang	9.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	297 Orang	1.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	176.165.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			319.190.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	48 Dokumen	12.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	3.850.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.700.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	122.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.700.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	320 Orang	1.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.200.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	19 Dokumen	150.747.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			123.412.500,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	214.835.900,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			170.735.900,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	20.440.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			80.520.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.254.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.254.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	8.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.400.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	25.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			18.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 persen	40.650.000,00			-	5.300.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			40.650.000,00			-	5.300.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	40.650.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.300.000,00
					UPT Puskesmas Wonosari II				3.348.631.000,00				3.348.631.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.348.631.000,00				3.348.631.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.348.631.000,00				3.348.631.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	2.675.969.000,00			-	2.675.969.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			2.673.294.000,00			-	2.673.294.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Unit Kerja	2.673.294.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			2.673.294.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 Persen	669.806.500,00			-	669.806.500,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			669.806.500,00			-	669.806.500,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	340 Orang	80.640.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			80.640.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari,	10331 Orang	41.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			41.300.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo						
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	60 Orang	3.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.300.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	651 Orang	750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			750.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab.	4 Dokumen	149.492.400,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			149.492.400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo						
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	2 Dokumen	4.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.800.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	3 Dokumen	13.450.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.450.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari,	2 Dokumen	28.208.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			28.208.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo						
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	4 Orang	1.050.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.050.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	12 Dokumen	87.258.700,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			87.258.700,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari,	14 Dokumen	168.733.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			168.733.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo						
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	4 Dokumen	66.687.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			66.687.500,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	2 Dokumen	686.400,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			686.400,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari,	2 Dokumen	4.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo						
1	02		02.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	4 Dokumen	19.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			19.250.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	2.855.500,00			-	2.855.500,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			2.855.500,00			-	2.855.500,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah	2 Dokumen	2.855.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.855.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo						
					UPT Puskesmas Karangmojo I				2.865.742.800,00				3.001.773.800,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.865.742.800,00				3.001.773.800,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.865.742.800,00				3.001.773.800,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82,26 skor	2.129.851.000,00			-	2.129.851.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen administrasi umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			2.127.176.000,00			-	2.127.176.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	2.127.176.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			2.127.176.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar Indeks SPM		96 persen 98 persen	729.315.800,00			-	866.126.800,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			729.315.800,00			-	866.126.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	228 Orang	61.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			52.500.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	4153 Orang	26.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			37.450.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	74 Orang	9.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo	349 Orang	2.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu						
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	12 Dokumen	283.482.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			478.595.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	12 Dokumen	3.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.250.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	11.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.800.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo	12 Dokumen	19.690.900,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			19.690.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu						
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	160 Orang	2.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.600.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	12 Dokumen	66.431.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			63.551.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	12 Dokumen	163.745.400,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			158.551.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan	Kab. Gunungkidul,	1 Orang	50.000,00	DAK NON FISIK-			50.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kesehatan malaria	Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu			DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	12 Dokumen	55.480.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	12 Dokumen	536.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			88.900,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul,	12 Dokumen	6.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu						
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	12 Dokumen	18.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			18.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 persen	6.576.000,00			-	5.796.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			6.576.000,00			-	5.796.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Karangmojo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Gedangrejo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngawis Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu	12 Dokumen	6.576.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.796.000,00
					UPT Puskesmas Karangmojo II				2.735.128.900,00				2.735.128.900,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.735.128.900,00				2.735.128.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.735.128.900,00				2.735.128.900,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82,26 Skor	1.856.205.900,00			-	1.856.205.900,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.853.530.900,00			-	1.853.530.900,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	1 Unit Kerja	1.853.530.900,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.853.530.900,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 Persen	872.698.000,00			-	872.698.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			872.698.000,00			-	872.698.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul,	196 Orang	37.820.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			37.820.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor						
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	2048 Orang	25.900.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			25.900.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	87 Orang	41.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			41.400.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	297 Orang	8.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.200.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan	12 Dokumen	251.658.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			251.658.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor						
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	12 Dokumen	3.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.250.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	12 Dokumen	13.900.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.900.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	12 Dokumen	33.721.200,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			33.721.200,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul,	87 Orang	7.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Karangmojo, Kelor						
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	12 Dokumen	108.160.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			108.160.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	16 Dokumen	195.333.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			195.333.800,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	1 Orang	200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			200.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	12 Dokumen	118.260.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			118.260.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	12 Dokumen	1.045.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.045.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	12 Dokumen	19.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			19.200.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor	12 Dokumen	7.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.250.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 %	6.225.000,00			-	6.225.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.225.000,00			-	6.225.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo	12 Dokumen	6.225.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			6.225.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor			PUSKESMAS			
					UPT Puskesmas Panggang I				1.773.579.000,00				1.770.904.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.773.579.000,00				1.770.904.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.773.579.000,00				1.770.904.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	916.675.000,00			-	914.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	0,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (BLUD)			914.000.000,00			-	914.000.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	1 Unit Kerja	914.000.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			914.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 persen	850.304.000,00			-	850.304.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			850.304.000,00			-	850.304.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	110 Orang	29.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			29.400.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	1465 Orang	17.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			17.500.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	14 Orang	9.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.600.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	139 Orang	2.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	4 Dokumen	271.520.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			271.520.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo	4 Dokumen	10.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu						
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	4 Dokumen	8.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.200.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	4 Dokumen	18.280.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			18.280.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	32 Orang	4.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	4 Dokumen	103.860.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			103.860.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	12 Dokumen	149.872.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			149.872.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul,	1 Orang	2.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu						
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	12 Dokumen	212.963.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			212.963.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	1 Dokumen	109.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			109.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	2 Dokumen	3.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.800.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	12 Dokumen	7.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.200.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 persen	6.600.000,00			-	6.600.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.600.000,00			-	6.600.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisuko Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriharjo Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu	2 Dokumen	6.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.600.000,00
					UPT Puskesmas Panggang II				2.564.661.700,00				2.564.661.700,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.564.661.700,00				2.564.661.700,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.564.661.700,00				2.564.661.700,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 skor	1.682.675.000,00			-	1.682.675.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.680.000.000,00			-	1.680.000.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	1 Unit Kerja	1.680.000.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.680.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 Persen	845.594.000,00			-	845.594.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			845.594.000,00			-	845.594.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	151 Orang	43.125.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			43.125.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	1453 Orang	21.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			21.200.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	39 Orang	3.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	203 Orang	4.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.700.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	12 Dokumen	348.876.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			348.876.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab.	12 Dokumen	6.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Panggang, Girikarto						
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	3 Dokumen	5.100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.100.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	12 Dokumen	14.108.700,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.108.700,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	39 Orang	1.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.600.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	12 Dokumen	124.162.300,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			124.162.300,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	16 Dokumen	137.389.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			137.389.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul,	3 Orang	300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			300.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto						
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	12 Dokumen	109.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			109.800.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	1 Dokumen	5.383.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.383.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	12 Dokumen	9.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.600.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto	2 Dokumen	11.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.250.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	36.392.700,00			-	36.392.700,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			36.392.700,00			-	36.392.700,00
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis	Kab. Gunungkidul,	4 Dokumen	36.392.700,00	DAK NON FISIK-			36.392.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Panggang, Girimulyo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto			DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
					UPT Puskesmas Purwosari				2.608.587.700,00				2.608.587.700,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.608.587.700,00				2.608.587.700,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.608.587.700,00				2.608.587.700,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82,26 Skor	1.500.754.000,00			-	1.500.754.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.498.079.000,00			-	1.498.079.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	1.498.079.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.498.079.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 Persen	894.803.400,00			-	894.803.400,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			894.803.400,00			-	894.803.400,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab.	133 Orang	26.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			26.250.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo						
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	1793 Orang	20.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			20.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	17 Orang	12.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	242 Orang	9.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.700.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari,	39 Dokumen	409.824.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			409.824.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo						
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	12 Dokumen	7.350.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.350.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati	2 Dokumen	10.900.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.900.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	13 Dokumen	11.939.900,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.939.900,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul,	17 Orang	6.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo						
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati	8 Dokumen	111.367.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			111.367.500,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	16 Dokumen	157.236.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			157.236.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	1 Orang	100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			100.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo	2 Dokumen	90.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			90.300.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo			PUSKESMAS			
1	02		02.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	2 Dokumen	536.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			536.000,00
1	02		02.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	12 Dokumen	7.900.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.900.000,00
1	02		02.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati	4 Dokumen	13.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	213.030.300,00			-	213.030.300,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			213.030.300,00			-	213.030.300,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih Kab. Gunungkidul, Purwosari, Girijati	19 Dokumen	213.030.300,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			213.030.300,00
					UPT Puskesmas Tepus I				1.688.052.000,00				1.688.052.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.688.052.000,00				1.688.052.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.688.052.000,00				1.688.052.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82,26 Skor	1.009.737.000,00			-	1.009.737.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.007.062.000,00			-	1.007.062.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab.	1 Unit Kerja	1.007.062.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.007.062.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu						
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 persen	669.876.000,00			-	669.876.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			669.876.000,00			-	669.876.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	73 Orang	16.420.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			16.420.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	1157 Orang	15.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	30 Orang	6.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	88 Orang	3.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	12 Dokumen	218.342.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			218.342.500,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	2 Dokumen	6.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	12 Dokumen	12.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.300.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	12 Dokumen	25.138.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			25.138.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	40 Orang	3.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	115 Dokumen	108.540.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			108.540.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	12 Dokumen	139.632.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			139.632.500,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	1 Orang	100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			100.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	4 Dokumen	108.040.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			108.040.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	12 Dokumen	563.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			563.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	Kab. Gunungkidul,	12 Dokumen	2.400.000,00	DAK NON FISIK-			2.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pelayanan kelanjutusiaan	Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu			DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	12 Dokumen	5.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.400.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapan Perilaku Hidup Sehat		19 persen	8.439.000,00			-	8.439.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			8.439.000,00			-	8.439.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Tepus, Sumberwungu	13 Dokumen	8.439.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.439.000,00
					UPT Puskesmas Tepus II				2.343.599.500,00				2.343.599.500,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.343.599.500,00				2.343.599.500,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.343.599.500,00				2.343.599.500,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	1.455.235.000,00			-	1.455.235.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.452.560.000,00			-	1.452.560.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi	1 Unit Kerja	1.452.560.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.452.560.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 Persen	880.577.700,00			-	880.577.700,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			880.577.700,00			-	880.577.700,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi	149 Orang	21.960.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			21.960.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus	1684 Orang	22.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			22.200.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus	66 Orang	12.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung	266 Orang	6.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			6.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus			PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus	6 Dokumen	238.715.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			238.715.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus	1 Dokumen	2.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	11.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.600.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi	3 Dokumen	22.710.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			22.710.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus	750 Orang	3.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.200.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab.	4 Dokumen	217.778.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			217.778.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Tepus, Purwodadi						
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi	7 Dokumen	196.292.700,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			196.292.700,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus	1 Laporan	10.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.750.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus	5 Orang	200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			200.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi	1 Dokumen	110.960.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			110.960.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi	1 Dokumen	612.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			612.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul,	1 Dokumen	3.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Tepus, Purwodadi Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus						
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	7.786.800,00			-	7.786.800,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			7.786.800,00			-	7.786.800,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Tepus, Giripanggung Kab. Gunungkidul, Tepus, Purwodadi	2 Dokumen	7.786.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.786.800,00
					UPT Puskesmas Tanjungsari				2.928.116.800,00				3.078.116.800,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.928.116.800,00				3.078.116.800,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.928.116.800,00				3.078.116.800,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	2.015.235.000,00			-	2.015.235.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			2.012.560.000,00			-	2.012.560.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua	1 Unit Kerja	2.012.560.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			2.012.560.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kel/Desa						
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Indeks SPM		96 persen 98 persen	873.800.000,00			-	1.023.800.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tersedia			873.800.000,00			-	1.023.800.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	208 Orang	20.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			20.000.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	1794 Orang	20.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			20.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	164 Orang	5.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.800.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	450.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			450.000.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	5.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.000.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	15.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.000.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	55.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			55.000.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan	Kab. Gunungkidul,	92 Orang	2.000.000,00	DAK NON FISIK-			2.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Tanjungsari, Semua Kel/Desa			DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	100.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			150.000.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	100.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			200.000.000,00
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	12 Laporan	18.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			18.000.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	1 Orang	1.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.000.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	75.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			75.000.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.000.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	6.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persantase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 persen	39.081.800,00			-	39.081.800,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			39.081.800,00			-	39.081.800,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	39.081.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			39.081.800,00
					UPT Puskesmas Paliyan				2.814.222.000,00				2.814.222.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.814.222.000,00				2.814.222.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.814.222.000,00				2.814.222.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82,26 Skor	2.065.468.000,00			-	2.065.468.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			2.062.793.000,00			-	2.062.793.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	2.062.793.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			2.062.793.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 persen	740.574.000,00			-	740.574.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			740.574.000,00			-	740.574.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	332 Orang	31.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			31.500.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	1356 Orang	25.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			25.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Standar				PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	26 Orang	4.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.200.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	56 Orang	2.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.400.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	308.330.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			308.330.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	5.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.250.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	9.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			9.400.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	47.810.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			47.810.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	36 Orang	2.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.400.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	63.989.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			63.989.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	146.470.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			146.470.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	Kab. Gunungkidul,	12 Dokumen	68.310.000,00	DAK NON FISIK-			68.310.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pelayanan kesehatan reproduksi	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	515.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			515.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.500.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	21.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			21.300.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 persen	8.180.000,00			-	8.180.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			8.180.000,00			-	8.180.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	8.180.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.180.000,00
					UPT Puskesmas Saptosari				3.522.145.900,00				2.668.252.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.522.145.900,00				2.668.252.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.522.145.900,00				2.668.252.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82,26 Skor	2.624.467.000,00			-	2.624.467.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			2.621.792.000,00			-	2.621.792.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	2.621.792.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			2.621.792.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 Persen	884.478.900,00			-	43.785.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			884.478.900,00			-	43.785.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	372 Orang	43.785.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			43.785.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	3938 Orang	17.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	52 Orang	16.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	458 Orang	5.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	398.310.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	4.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
										PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	13.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	19.510.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	52 Orang	2.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	43 Dokumen	98.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	183.047.900,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	2 Orang	200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	57.340.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	836.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	8.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan	Kab. Gunungkidul,	5 Dokumen	15.200.000,00	DAK NON FISIK-			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Imunisasi	Saptosari, Semua Kel/Desa			DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 %	13.200.000,00			-	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			13.200.000,00			-	0,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	13.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
					UPT Puskesmas Ngawen I				1.932.801.100,00				1.932.801.100,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.932.801.100,00				1.932.801.100,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.932.801.100,00				1.932.801.100,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	1.182.275.000,00			-	1.182.275.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.179.600.000,00			-	1.179.600.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan	Kab. Gunungkidul,	1 Unit Kerja	1.179.600.000,00	PENDAPATAN DARI			1.179.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan Penunjang Pelayanan	Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji			BLUD			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 persen	746.120.300,00			-	746.120.100,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			746.120.300,00			-	746.120.100,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar	142 Orang	6.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.400.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung	2616 Orang	39.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			39.500.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung	29 Orang	35.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			35.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung	224 Orang	5.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.500.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji	12 Dokumen	377.425.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			377.429.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung	12 Dokumen	3.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.500.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung	12 Dokumen	7.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.400.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji	12 Dokumen	24.106.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			24.106.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar	12 Dokumen	50.395.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			50.395.100,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung	16 Dokumen	132.217.300,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			131.913.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung	12 Dokumen	10.100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.400.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung	1 Dokumen	327.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			327.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen,	12 Dokumen	40.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			40.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Watusigar						
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji	12 Dokumen	14.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.250.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 persen	4.405.800,00			-	4.406.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4.405.800,00			-	4.406.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Jurangjero Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung	1 Dokumen	4.405.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.406.000,00
					UPT Puskesmas Ngawen II				1.654.250.000,00				1.654.250.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.654.250.000,00				1.654.250.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.654.250.000,00				1.654.250.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		82,26 Skor	970.461.000,00			-	970.461.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			967.786.000,00			-	967.786.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	1 Unit Kerja	967.786.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			967.786.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 persen	676.564.000,00			-	677.389.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			676.564.000,00			-	677.389.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	142 Orang	29.280.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			24.150.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	1658 Orang	14.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			14.000.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	16 Orang	12.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	158 Orang	3.550.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			750.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep Kab.	6 Dokumen	266.942.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			305.205.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo			PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	1 Dokumen	2.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.500.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	2 Dokumen	8.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.900.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo	3 Dokumen	18.960.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.910.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo	16 Orang	1.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.600.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	4 Dokumen	96.377.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			91.350.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo	7 Dokumen	125.839.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			122.139.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	1 Dokumen	83.220.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			69.540.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	1 Dokumen	545.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			545.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	1 Dokumen	4.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.800.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	1 Dokumen	8.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			8.000.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	7.225.000,00			-	6.400.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			7.225.000,00			-	6.400.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	2 Dokumen	7.225.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.400.000,00
					UPT Puskesmas Semanu I				3.157.056.900,00				2.856.386.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.057.056.900,00				2.856.386.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.057.056.900,00				2.856.386.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	2.109.607.000,00			-	2.106.932.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	0,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan	Dokumen indesk kepuasan masyarakat BLUD			2.106.932.000,00			-	2.106.932.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BLUD								
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu	1 Unit Kerja	2.106.932.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			2.106.932.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 persen	941.286.400,00			-	747.784.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			941.286.400,00			-	747.784.000,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu	325 Orang	21.960.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.300.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari	3753 Orang	20.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			17.150.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu	42 Orang	6.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu,	344 Orang	3.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu						
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari	7 Dokumen	328.987.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			414.185.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari	1 Dokumen	3.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.500.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu	3 Dokumen	19.100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			11.100.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari	1 Dokumen	49.777.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			18.510.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu	42 Orang	700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			700.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu	5 Dokumen	180.740.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			59.160.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari	16 Dokumen	210.911.900,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			125.759.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu	1 Dokumen	45.260.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			68.320.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu	1 Dokumen	500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			500.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu	1 Dokumen	3.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.600.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu	2 Dokumen	46.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.000.000,00
1	02	05			PROGRAM	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku		19 persen	6.163.500,00			-	1.670.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Hidup Sehat							
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.163.500,00			-	1.670.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari	1 Dokumen	6.163.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.670.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				100.000.000,00				0,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				100.000.000,00				0,00
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan		100 persen	100.000.000,00			-	0,00
4	01	04	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Presentase penyelenggaraan keistimewaan kelembagaan dan ketatalaksanaan			100.000.000,00			-	0,00
4	01	04	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semanu, Dadapayu	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			0,00
					UPT Puskesmas Semanu II				2.401.149.200,00				2.462.084.900,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.401.149.200,00				2.462.084.900,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.401.149.200,00				2.462.084.900,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82,26 Skor	1.569.406.000,00			-	1.569.406.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.566.731.000,00			-	1.566.731.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	1 Unit Kerja	1.566.731.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.566.731.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks SPM		98 persen	825.293.200,00			-	886.394.900,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR			825.293.200,00			-	886.394.900,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	152 Orang	44.100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			44.100.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	2241 Orang	32.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			32.200.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	47 Orang	12.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			12.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu,	286 Orang	2.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pacarejo						
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	6 Dokumen	379.265.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			434.240.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	1 Dokumen	6.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.250.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	2 Dokumen	14.100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.900.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	4 Dokumen	16.515.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			17.235.900,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	64 Orang	2.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	1 Dokumen	70.575.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			70.829.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	21 Dokumen	162.052.200,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			152.924.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	1 Orang	50.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			50.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	1 Dokumen	60.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			71.980.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	1 Dokumen	536.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			536.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	1 Dokumen	2.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.400.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	1 Dokumen	20.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			20.750.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat undefined		19 persen undefined undefined	6.450.000,00			-	6.284.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.450.000,00			-	6.284.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo	1 Dokumen	6.450.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.284.000,00
					UPT Puskesmas Semin I				3.280.905.200,00				3.280.905.200,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.280.905.200,00				3.280.905.200,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.280.905.200,00				3.280.905.200,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	2.418.901.000,00			-	2.418.901.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			2.416.226.000,00			-	2.416.226.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk	1 Unit Kerja	2.416.226.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			2.416.226.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 persen	859.629.200,00			-	859.629.200,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			859.629.200,00			-	859.629.200,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing	295 Orang	71.370.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			71.370.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk	3385 Orang	22.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			22.200.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk	69 Orang	5.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab.	370 Orang	6.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk						
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk	4 Dokumen	238.525.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			238.525.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk	4 Dokumen	5.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.500.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab.	4 Dokumen	21.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			21.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk						
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk	4 Dokumen	32.850.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			32.850.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk	80 Orang	10.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			10.000.000,00
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin,	4 Dokumen	189.211.200,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			189.211.200,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kalitekuk						
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk	12 Dokumen	183.443.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			183.443.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk	4 Dokumen	40.880.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			40.880.000,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk	4 Dokumen	250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			250.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan	Kab. Gunungkidul,	4 Dokumen	16.000.000,00	DAK NON FISIK-			16.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pelayanan kelanjutusiaan	Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk			DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk	4 Dokumen	16.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			16.500.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 persen	2.375.000,00			-	2.375.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			2.375.000,00			-	2.375.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin Kab. Gunungkidul, Semin, Pundungsari Kab. Gunungkidul, Semin, Bendung Kab. Gunungkidul, Semin,	4 Dokumen	2.375.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			2.375.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Bulurejo Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk						
					UPT Puskesmas Semin II				2.558.212.700,00				2.558.212.700,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.558.212.700,00				2.558.212.700,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.558.212.700,00				2.558.212.700,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	1.699.375.000,00			-	1.699.375.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.696.700.000,00			-	1.696.700.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	1 Unit Kerja	1.696.700.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.696.700.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 Persen	854.053.300,00			-	854.053.300,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			854.053.300,00			-	854.053.300,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	214 Orang	31.720.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			31.720.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	1796 Orang	19.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			19.500.000,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	61 Orang	7.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.800.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin,	34 Orang	3.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			3.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo						
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	2718 Dokumen	355.175.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			355.175.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	31 Dokumen	7.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.750.000,00
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	68 Dokumen	13.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.300.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	99 Dokumen	19.828.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			19.828.500,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab.	120 Orang	12.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			12.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kesehatan	Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo			PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	221 Dokumen	110.671.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			110.671.000,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	86 Dokumen	157.922.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			157.922.800,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	3 Orang	300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			300.000,00
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	50 Dokumen	73.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			73.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	12 Dokumen	636.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			636.000,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	208 Dokumen	20.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			20.800.000,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo	81 Dokumen	20.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			20.250.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	4.784.400,00			-	4.784.400,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4.784.400,00			-	4.784.400,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab.	16 Dokumen	4.784.400,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.784.400,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Semin, Candirejo Kab. Gunungkidul, Semin, Sumberejo						
					UPT Puskesmas Playen I				3.050.411.600,00				2.081.000.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.050.411.600,00				2.081.000.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.050.411.600,00				2.081.000.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Skor	2.083.675.000,00			-	2.081.000.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			2.675.000,00			-	0,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			2.081.000.000,00			-	2.081.000.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	1 Unit Kerja	2.081.000.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			2.081.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 PERSEN	960.094.800,00			-	0,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM			960.094.800,00			-	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan UKP Rujukan							
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	266 Orang	33.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	2375 Orang	49.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen,	57 Orang	9.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng						
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	202 Orang	7.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	4 Dokumen	304.070.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen,	2 Dokumen	9.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng						
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	1 Dokumen	10.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	4 Dokumen	49.231.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab.	112 Orang	7.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng						
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	4 Dokumen	144.883.600,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	3 Dokumen	209.599.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab.	4 Orang	400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng			PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	4 Dokumen	101.525.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	2 Dokumen	535.400,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutuslaan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	4 Dokumen	13.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	4 Dokumen	10.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			0,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 PERSEN	6.641.800,00			-	0,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM0			6.641.800,00			-	0,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab.	2 Dokumen	6.641.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Daya Masyarakat (UKBM)	Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng			PUSKESMAS			
					UPT Puskesmas Playen II				2.673.023.500,00				2.673.053.500,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.673.023.500,00				2.673.053.500,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.673.023.500,00				2.673.053.500,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82,26 Skor	1.878.275.000,00			-	1.878.275.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen administrasi umum			2.675.000,00			-	2.675.000,00
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	1 Laporan	2.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.675.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			1.875.600.000,00			-	1.875.600.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab.	1 Unit Kerja	1.875.600.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			1.875.600.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok						
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penerima Layanan Dasar		96 Persen	788.469.500,00			-	789.324.500,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			788.469.500,00			-	789.324.500,00
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	249 Orang	48.190.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			57.225.000,00
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen,	2524 Orang	13.650.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.650.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Dengok						
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	56 Orang	6.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			6.000.000,00
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	315 Orang	4.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			4.000.000,00
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	5 Dokumen	367.852.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			367.635.000,00
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Kab. Gunungkidul,	1 Dokumen	3.500.000,00	DAK NON FISIK-			3.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok			DANA BOK-BOK PUSKESMAS			
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	2 Dokumen	13.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			13.500.000,00
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	3 Dokumen	31.318.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			24.412.000,00
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab.	56 Orang	1.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			1.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok						
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	4 Dokumen	61.416.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			59.016.500,00
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	7 Dokumen	148.292.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			139.696.000,00
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab.	1 Orang	100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			100.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok						
1	02		02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	1 Dokumen	65.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			75.640.000,00
1	02		02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak							
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	1 Dokumen	800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			800.000,00
1	02		02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	1 Dokumen	7.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			7.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi								
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	1 Dokumen	15.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			15.750.000,00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat		19 Persen	6.279.000,00			-	5.454.000,00
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6.279.000,00			-	5.454.000,00
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Plembutan Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Dengok	1 Dokumen	6.279.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS			5.454.000,00
					RSUD Wonosari				83.500.000.000,00				83.500.000.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				83.500.000.000,00				83.500.000.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				83.500.000.000,00				83.500.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 Score	83.500.000.000,00			-	83.500.000.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			83.500.000.000,00			-	83.500.000.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	83.500.000.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			83.500.000.000,00
					RSUD Saptosari				14.177.582.000,00				14.177.582.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.177.582.000,00				14.177.582.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				14.177.582.000,00				14.177.582.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		82.26 skor	14.000.000.000,00			-	14.000.000.000,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD			14.000.000.000,00			-	14.000.000.000,00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	14.000.000.000,00	PENDAPATAN DARI BLUD			14.000.000.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks SPM		98 persen	177.582.000,00			-	177.582.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			177.582.000,00			-	177.582.000,00
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	177.582.000,00	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)			177.582.000,00
					UPT Laboratorium Kesehatan				456.580.000,00				247.325.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN				456.580.000,00				247.325.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				456.580.000,00				247.325.000,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase spesimen yang diperiksa tepat waktu		82 Persen	456.580.000,00			-	247.325.000,00
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan			456.580.000,00			-	247.325.000,00
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	456.580.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			247.325.000,00

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Rencana Kerja Dinkes merupakan kebijakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

5.1 Catatan Penting

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinkes telah melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang maupun pelaksanaan forum gabungan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinkes Tahun 2026 dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan urusan kesehatan, sebagai langkah untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul dimana Pembangunan Derajat Kesehatan manusia merupakan syarat untuk berhasilnya pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
DINAS KESEHATAN

ttd

ISMONO

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* dan akuntabel sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan adanya penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan yang baik oleh masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen perencanaan harus memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta mempertahankan dan meningkatkan prestasi pembangunan yang telah dicapai di daerah. Karena itu, perencanaan tersebut harus disusun berpedoman pada RPJMD dan rencana strategis Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan, sehingga dapat dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja ini disusun berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2025-2029 serta arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029. Rancangan renja ini juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi *stakeholder* dan dinamika perkembangan politik dan pemerintahan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan RKPD 2026 yang bersifat indikatif. Selain itu Renja ini disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 serta mengacu kepada RKPD Tahun 2026, yang memuat kebijakan, program dari Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Penyusunan Renja juga mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri dan Satuan Polisi Pamong Praja DIY dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Realisasi dari perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2026 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sehingga Renja PD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor I23 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
17) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
18) Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.2.6/170 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
19) Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 adalah untuk memberikan gambaran tentang prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu satu tahun ke depan, baik yang bersumber dari biaya APBN, APBD Propinsi DIY maupun APBD Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat yang dinamis.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026, adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah;
2. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA PD, RAPBD serta APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam waktu satu tahun;

4. Memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, koordinasi, monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan semua personil dalam melaksanakan tugas;
5. Menjadi alat koordinasi dan kerangka acuan dalam rangka rencana pengembangan dan peningkatan kinerja dan profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
8. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
9. Memberikan informasi kepada Dinas/ Instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATPOL PP
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP
- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN CAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2024 alokasi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.302.647.458,00.

Anggaran ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja,sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
1) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
2) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
4) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
1) Pembinaan Jagawarga

Evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2024 berdasarkan kinerja Renja PD Tahun 2024 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan e-Monev Tahun 2024 sampai Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
1) Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah;
a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
      1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
         a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
         b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
         c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
         d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
         e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
         f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
         g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      2) Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah
         a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
         b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
         c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
      3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
         a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
         b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
         a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
         b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
         c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
         d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
         e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
         f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
         g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
         a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
         b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
         a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
         b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
         c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

   b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
      1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindunan Masyarkat Tingkat Kabupaten/Kota
b) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
c) Kerjasama antara Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
b) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
c) Penganganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota

c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
1) Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
a) Pembinaan Jagawarga

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1) Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program dan kegiatan yaitu :
1) Jumlah personil dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan.
2) Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja keluaran program dan kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia.

4. Faktor-faktor penghambat yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
a. Banyaknya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memasuki masa purna tugas sehingga mengurang personil Satuan Polisi Pamong Praja dan belum adanya pengadaan personil baik PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL).

5. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
a. Lebih cermat dalam melakukan perencanaan kinerja;
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan ikut serta pada kegiatan diklat dan bimtek.

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja s/d Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100							
1.05.1.05.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	100							
1.05.1.05.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3	2 Dokumen;	2 Dokumen;	100%	3 Dokumen	8 Dokumen	80%
1.05.1.05.01.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4 Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
1.05.1.05.01.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4 Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	8 Dokumen	2	2 Dokumen;	2 Dokumen;	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	75%
1.05.1.05.01.01.2.01.05	Perubahan Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	8 Dokumen	2	2 Dokumen;	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	75%
1.05.1.05.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	72 Dokumen	18	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	18 Dokumen	54 Dokumen	75%

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
1.05.1.05.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	75%
1.05.1.05.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan terfasilitas	100							
1.05.1.05.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.960 Orang	490	490 Orang	490 Orang	100%	490 Orang	1960 Orang	75%
1.05.1.05.01.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keungan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	75%
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laproan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52 Laporan	13	13 Dokumen;	13 Dokumen;	100%	13 Laporan	39 Laporan	75%
1.05.1.05.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan data dan informasi ASN terfasilitasi	100							
1.05.1.05.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	408 stel	102	102 stel	102 stel	100%	102 stel	306 stel	75%
1.05.1.05.01.01.2.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dokumen	4	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	75%
1.05.1.05.01.01.2.05.09	Pendidikan danPelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	2	2 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	2 Orang	25%
1.05.1.05.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum terfasilitasi	100							
1.05.1.05.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	75%
1.05.1.05.01.01.2.06.02	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 paket	6	5 paket	5 paket	100%	5 paket	16 paket	59%
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	1	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%

1.05.1.05.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26 paket	5	5 paket	5 paket	100%	11 paket	21 paket	81%
1.05.1.05.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.920 dokumen	730	730 dokumen	550 dokumen	75%	730 dokumen	730 dokumen	68%
1.05.1.05.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 laporan	12	12 Laporan	9 Laporan	75%	12 Laporan	12 Laporan	69%
1.05.1.05.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 laporan	22	22 Laporan	22 Laporan	100%	22 Laporan	22 Laporan	75%
1.05.1.05.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100							
1.05.1.05.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	97 Unit	97	N/a	0 Unit	100%	N/a	N/a	100%
1.05.1.05.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	41	N/a	0 Unit	100%	N/a	N/a	100%
1.05.1.05.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1	0 Unit	0 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	100%
1.05.1.05.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang terlaksana	100							
1.05.1.05.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan	4	4 Laporan	3 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	36	36 Laporan	27 Laporan	75%	36 Laporan	99 Laporan	69%
1.05.1.05.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terfasilitasi	100							
1.05.1.05.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.086 Unit	271	271 Unit	193 Unit	71%	271 Unit	735 Unit	68%
1.05.1.05.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	210 Unit	42	42 Unit	42 Unit	100%	42 Unit	126 Unit	60%

1.05.1.05.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatah dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit	23	23 Unit	26 Unit	100%	23 Unit	72 Unit	63%
1.05.1.05.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	2	2 Unit	5 Unit	100%	2 Unit	9 Unit	90%
1.05.1.05.01.02	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase ketentraman dan ketertiban Umum terlaksana	98							
1.05.1.05.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota terfasilitasi	98							
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	90 Dokumen	20	20 Dokumen	0 Dokumen	0%	20 Dokumen	40 Dokumen	44%
1.05.1.05.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	10 Dokumen	2	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	4 Dokumen	40%
1.05.1.05.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9.257 Orang	2.298	2.298 Orang	1.472 Orang	64%	2.298 Orang	6.068 Orang	66%
1.05.1.05.01.02.2.01.07	Kerjasama Antar Lembaga dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	7.273 Dokumen	1.602	1.602 Dokumen	1.602 Dokumen	100%	1.602 Dokumen	4.806 Dokumen	66%
1.05.1.05.01.02.2.01.08	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	522 Stel	102	102 Stel	0 Stel	0%	102 Stel	306 Stel	59%
1.05.1.05.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kanupaten/Koata Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota Terfasilitasi	98							

1.05.1.05.01.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupaati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	N/a	N/a	N/a	9 Laporan	100%	N/a	N/a	100%
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.1.05.01.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	894 Laporan	178	188 Laporan	125 Laporan	66%	193 Laporan	496 Laporan	55%
1.05.1.05.01.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangai Sesuai SOP	639 Laporan	127	133 Laporan	59 Laporan	44%	145 Laporan	331 Laporan	52%
2.22.1.05.1.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Prosentase kelompok jagawarga yang terbina	84							
2.22.1.05.1.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kelompok jaga warga yang terbentuk	84							
2.22.1.05.1.08.2.09.17	Pembinaan Jaga Warga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	6.026 Orang	1.494	1.494 Orang	3.250 Orang	100%	1.494 Orang	6.238 Orang	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis PD, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja PD dan Rencana Strategis PD Satuan Polisi Pamong Praja.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan pelayanan di SKPD yang dapat berdampak positif bagi masyarakat.

Pelayanan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu :

I. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan ini dilaksanakan berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, yang bertujuan untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, tidak akan pernah lepas dari persoalan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang, dimana potensi permasalahan yang akan timbul adalah penyalahgunaan ruang publik, seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain. Ketenteraman merupakan kondisi aman dan nyaman masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan keindahan merupakan sinergi antara ketertiban dan ketenteraman, dimana wilayah Gunungkidul bisa menjadi daerah yang tertata dan terkelola dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 juga membahas tentang mutu pelayanan dasar sub urusan Tramtibum, kriteria penerima jenis pelayanan dasar sub urusan Tramtibum dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Tramtibum. Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda, harus bisa memberikan pelayanan dengan indikator TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten Gunungkidul.

Indikator ini dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol}} \times 100\%$$

Sesuai dengan indikator diatas, maka kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan SPM dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, secara umum dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari total 655 kasus pelanggaran baik yang

dilaporkan masyarakat maupun yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat terselesaikan 655 kasus, sehingga capaian kinerjanya adalah :

$$\frac{655}{655} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 1 Januari sampai dengan akhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemantauan gangguan trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang publik lainnya;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai;
3. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran K3;
4. Optimalisasi ketugasan PPNS melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan sebelum pelaksanaan tugas dilapangan;
5. Patroli / monitoring wilayah baik internal Satuan Polisi Pamong Praja maupun patroli terpadu dengan dinas/instansi terkait dan kecamatan, untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran perda yang terjadi; dan
6. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkesinambungan.

II. Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026, maka indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu tujuan dan sasaran utama RPJMD, adalah sebagai berikut :

1. Persentase penyelesaian pelangaran K3
2. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan
3. Nilai AKIP PD

Untuk lebih jelasnya, Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU , SPM, IKK)	Angka/ Nilai target/ standard (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	97,5 %	95,5 %	96 %	96,5 %	97 %	97,5 %	95,5 %	96 %	96,5 %	97 %	
2.	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	97,5 %	95,5 %	96 %	96,5 %	97 %	97,5 %	95,5 %	96 %	96,5 %	97 %	
3.	Nilai AKIP PD	84,56	80,56	81,56	82,56	83,56	84,56	80,56	81,56	82,56	83,56	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tingkat kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja masuk kategori sangat baik, hal ini dibuktikan dengan realisasi pencapaian kinerja persasaran yang menunjukkan hasil positif. Persentase pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan dan persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan di daerah telah mencapai target yang ditetapkan.

Hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD antara lain :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan sesuai dengan tupoksinya;
2. Masih banyaknya tanah SG yang dipakai untuk mendirikan bangunan oleh masyarakat;
3. Wilayah bibir pantai yang masih digunakan oleh masyarakat untuk mendirikan gazebo;
4. Kurang maksimalnya penanganan laka laut karena kurangnya sarana dan prasarana;
5. Masih adanya PNS dan pelajar yang berkeliaraan pada jam kerja dan jam sekolah; dan
6. Masih beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa.

Isu-isu penting yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, yaitu :

A. Faktor Penghambat
   1) Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan ketugasan, baik sarana pokok maupun sarana penunjang masih belum memadai;
   2) Banyak peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu segera disesuaikan;
   3) Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran peraturan daerah;
   4) Meningkatnya kriminalitas, penyakit masyarakat dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
   5) Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan daerah masih perlu ditingkatkan;
   6) Masih banyak peraturan daerah yang belum ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati; dan
   7) Minimnya informasi masyarakat terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Faktor Pendorong
   1) Adanya personil / aparat yang siap melaksanakan tugas;
   2) Adanya anggaran dalam APBD untuk melaksanakan tugas dan fungsi;
   3) Adanya regulasi dan payung hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
   4) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah;
   5) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
   6) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor;

7) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional;
8) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi; dan
9) Dukungan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait.

C. Tantangan
1) Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor;
2) Terjadinya persaingan regional yang semakin ketat;
3) Terjadinya perubahan geo politik;
4) Kesiapan aparat penegakan hukum untuk melakukan reformasi;
5) Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat;
6) Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat;
7) Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan dan masyarakat;
8) Semakin maraknya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
9) Menurunnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

D. Peluang
1) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah;
2) Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif;
3) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
4) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
5) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional;
6) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi; dan
7) Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

E. Dampak
1) Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga keamanan dan kenyamanan wisatawan dapat terwujud;
2) Menurunnya kasus pelanggaran perda; dan
3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Berdasarkan isu-isu penting di atas, maka dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum serta penegakan peraturan daerah di Kabupaten Gunungkidul, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk :

1. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban wilayah, melalui: penyelenggaraan operasi penertiban, pengawasan, dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum; serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan;
2. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan produk-produk hukum lainnya, sehingga terwujud masyarakat yang sadar hukum dan menurunnya pelanggaran. Hal ini dilakukan antara lain melalui :
   a. tahap *Preemtif* (sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat dan instansi yang terkait agar peraturan daerah dipatuhi);
   b. tahap *Preventif* (pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan daerah melalui teguran lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan daerah agar mematuhi peraturan daerah dan tidak melanggar lagi); dan

c. tahap *Represif* (penegakan dalam hal pelanggaran peraturan daerah sudah tidak bisa ditoleransi, misalnya sudah ditegur secara lisan maupun tertulis tetap ada pelanggaran peraturan daerah maka dilakukan tindakan penertiban baik secara yustisial maupun non yustisial, dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan aparat penegak hukum).

3. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan aktifitas pemerintahan, dengan melaksanakan pengawalan terhadap para Pejabat/tamu penting (VIP), penjagaan tempat-tempat vital/penting dan aset-aset daerah (rumah dinas pejabat dan gedung-gedung perkantoran) serta melaksanakan patroli (mengelilingi suatu wilayah tertentu yang bersifat rutin);
4. Memelihara, mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ketugasan;
5. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, wawasan, keterampilan dan profesionalisme dari sumber daya manusia yang ada.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil reviu, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini berimbas ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap rancangan awal Rencana Kerja untuk usulan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan dan perbedaan. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 secara lengkap tersaji dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	84,56 Persen	4.186.313.948	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	84,56 Persen	4.186.313.948	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		56.090.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		56.090.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	14.455.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	14.455.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.285.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.285.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.285.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.285.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	6.360.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	6.360.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	6.360.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	6.360.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 laporan	8.170.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Gunungkidul , Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 laporan	8.170.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	6 laporan	12.175.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul , Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	6 laporan	12.175.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.336.260.352	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.336.260.352	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	462 orang	3.135.988.104	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gunungkidul , Wonosari, Wonosari	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	462 orang	3.135.988.104	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	4.785.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Gunungkidul , Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	4.785.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan keuangan bulanan/ trwiualanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	13 laporan	80.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Gunungkidul , Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan keuangan bulanan/ trwiualanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	13 laporan	80.150.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawaian		25.034.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawaian		25.034.800	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	6 dokumen	5.034.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	6 dokumen	5.034.800	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum		306.008.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum		306.008.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.880.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.880.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	30.876.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	30.876.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	3.348.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	3.348.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	29 paket	16.422.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	29 paket	16.422.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	730 dokumen	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	730 dokumen	2.400.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan dan tamu	13 laporan	24.970.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan dan tamu	13 laporan	24.970.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	38 laporan	223.112.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	38 laporan	223.112.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		36.585.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		36.585.000	
	Pengadaan Mebel	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	10.680.000	Pengadaan Mebel	Kab.Gunungkidul , Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	10.680.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	25.905.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gunungkidul , Wonosari, Wonosari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	25.905.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		262.723.044	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		262.723.044	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	13 laporan	151.775.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Gunungkidul , Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	13 laporan	151.775.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	29.431.044	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gunungkidul , Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	29.431.044	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	81.517.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Gunungkidul , Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	81.517.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		278.950.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		278.950.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	257 unit	264.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	257 unit	264.700.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 unit	10.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 unit	10.950.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	11 unit	3.300.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	11 unit	3.300.000	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)	97,1 Persen 97,3 Persen	3.755.892.900	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)	97,1 Persen 97,3 Persen	3.755.892.900	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi		3.280.492.700	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi		3.280.492.700	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	65 dokumen	1.458.170.200	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	65 dokumen	1.458.170.200	PIS PIWK
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang	1378 orang	1.565.357.500	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	1378 orang	1.565.357.500	PIS

	dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Ditingkatkan Kapasitasnya			dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Kapasitasnya			
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar Lembaga dan Kemintraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	13 dokumen	253.365.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar Lembaga dan Kemintraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	13 dokumen	253.365.000	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	2 laporan	3.600.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	2 laporan	3.600.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Waikota terfasilitasi		475.400.200	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Waikota terfasilitasi		475.400.200	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18 Laporan	118.396.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18 Laporan	118.396.000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	82 laporan	231.301.200	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	82 laporan	231.301.200	

	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	26 laporan	125.703.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Gunungkidul , Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	26 laporan	125.703.000	PIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase kelompok jagawarga yang terbina	84 persen	125.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase kelompok jagawarga yang terbina	84 persen	125.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase kelompok jagawarga yang terbentuk		125.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase kelompok jagawarga yang terbentuk		125.000.000	
	Pembinaan Jagawarga	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang mengikuti pembinaan jagawarga yang dibina	960 orang	125.000.000	Pembinaan Jagawarga	Kab.Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang mengikuti pembinaan jagawarga yang dibina	960 orang	125.000.000	
TOTAL					8.067.206.848					8.067.206.848	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan masyrakat mendapatkan usulan dari kelurahan melalui kamus usulan yang dibuat untuk Tahun 2026. Melalui Musrenbang kapanewon dan Forum Gabungan PD, usulan dari masyarakat ditelaah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain bersifat urgensi atau tidaknya, dana yang tersedia dan kemanfaatannya. Namun demikian tidak seluruh aspirasi masyarakat yang ada dapat terserap dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.4
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIS) Pembinaan anggota Satlinmas	SAMPANG	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	8.000.000	8.000.000	Pagu Belum Input
2	(PIS) Pembinaan anggota Satlinmas	WILADEG	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	8.000.000	8.000.000	Pagu Belum Input
3	(PIS) Pembinaan anggota Satlinmas	SELANG	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	8.000.000	8.000.000	Pagu Belum Input
4	(PIS) Pembinaan anggota Satlinmas	SERUT	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	8.000.000	8.000.000	Pagu Belum Input
5	(PIS) Pembinaan anggota Satlinmas	SUMBERWUNGU	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	8.000.000	8.000.000	Pagu Belum Input
6	(PIS) Pembinaan anggota Satlinmas	NGLANGGERAN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	8.000.000	8.000.000	Pagu Belum Input

7	(PIS) Pembinaan anggota Satlinmas	PATUK	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	8.000.000	8.000.000	Pagu Belum Input
8	(PIS) Pembinaan anggota Satlinmas	TEPUS	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	8.000.000	8.000.000	Pagu Belum Input
9	(PIS) Pembinaan anggota Satlinmas	NGALANG	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	8.000.000	8.000.000	Pagu Belum Input
10	(PIS) Pembinaan anggota Satlinmas	HARGOMULYO	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	8.000.000	8.000.000	Pagu Belum Input
11	(PIS) Pembinaan anggota Satlinmas	KEDUNGPOH	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
12	(PIS) Pembinaan anggota Satlinmas	SAMBIREJO	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	8.000.000	8.000.000	Pagu Belum Input
13	(PIS) Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	BENDUNGAN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
14	(PIS) Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	TANCEP	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input

15	(PIS) Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	PETIR	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
16	(PIS) Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	PURWODADI	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
17	(PIS) Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	HARGOSARI	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
18	(PIS) Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	GROGOL	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
19	(PIS) Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	KEMADANG	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
20	(PIS) Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	KEMIRI	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
21	(PIS) Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	BOTODAYAAN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
22	(PIS) Pembinaan dan penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	KARANGAWEN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input

23	(PIS) Penyuluhan dampak miras	KARANGDUWET	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
24	(PIS) Penyuluhan dampak miras	GIRIASIH	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
25	(PIS) Penyuluhan dampak miras	KEDUNGKERIS	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
26	(PIS) Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	KARANGDUWET	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
27	(PIS) Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	NGLANGGERAN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Pagu Belum Input
28	(PIS) Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	WATUSIGAR	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	4 angkatan	7.400.000	29.600.000	Pagu Belum Input
29	(PIS) Penyuluhan Kenakalan Remaja	KEMADANG	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	4 angkatan	9.310.000	37.240.000	Pagu Belum Input
30	(PIS) Penyuluhan Kenakalan Remaja	PETIR	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.310.000	9.310.000	Pagu Belum Input

31	(PIS) Penyuluhan Kenakalan Remaja	NGLANGGERAN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.310.000	9.310.000	Pagu Belum Input
32	(PIS) Penyuluhan Kenakalan Remaja	GIRIASIH	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.310.000	9.310.000	Pagu Belum Input
33	(PIS) Penyuluhan Kenakalan Remaja	WATUSIGAR	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.310.000	9.310.000	Pagu Belum Input
34	(PIS) Penyuluhan Kenakalan Remaja	GIRICAHYO	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.310.000	9.310.000	Pagu Belum Input
35	(PIWK) Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	BLEBERAN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Sudah Input
36	(PIWK) Penyuluhan dampak premanisme dan vandalisme	NGESTIREJO	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	7.400.000	7.400.000	Sudah Input
37	(PIWK) Penyuluhan Kenakalan Remaja	MULUSAN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.310.000	9.310.000	Sudah Input
38	(PIWK) Penyuluhan Kenakalan Remaja	SUMBERWUNGU	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	1 angkatan	9.310.000	9.310.000	
Total						353.210.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dengan berpedoman pada Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2026 dan Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2026 serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi pembagunan daerah, Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan tahun 2026: *"Membangun Masyrakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".*

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2025-2029 menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 mengacu pada Asta Cita, yaitu:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.;
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2022-2027, tema pembangunan tahun 2026 belum ditetapkan. Sebagaimana arahan dalam RPJPN 2005-2025 sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN Tahun 2020-2024 disusun dengan berlandaskan pada RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden yang kemudian diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan PublikPeningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;

Selaras dengan penjelasan tersebut diatas, maka dirumuskan tema pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 *"Membangun Masyarakat Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban".*

Tema dan prioritas pembangunan daerah ini menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk merumuskan program dan kegiatan Tahun 2026. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga tetap memperhatikan target dalam RPJMD Tahun 2025-2029, Kebijakan Umum Bupati, dan target Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-20269 dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Prioritas daerah, sasaran daerah dan sasaran PD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dapat kita lihat dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Indeks: 1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 2. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan
					Nilai AKIP PD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan hasil penjabaran visi Kabupaten Gunungkidul, maka *tujuan yang ingin dicapai* oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum.
2. Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian integral dari perencanaan strategis instansi pemerintah yang terfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya dalam kegiatan operasional. Kriteria dalam penentuan sasaran antara lain: spesifik, menantang namun dapat dicapai, realistis sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki dan dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka *sasaran* Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, ditetapkan sebagai berikut :

1. Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat;
2. Pengembangan ragam budaya berbasis pemerintah masyarakat meningkat.

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layaranan ketentraman, ketertiban serta penegakan Perda dan Perkada;
2. Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD;
3. Meningkatkan kualitas dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan ragam budaya.
4. Pemberdayaan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran secara optimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat;

Tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya, dapat kita lihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1.	Terwujudnya peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hokum	Persentase peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hokum	97,3%

Tabel 3.3
Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2025
1.	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	97,3%

		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	97,3%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	NILAI Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84,56%

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong kabupaten Gunungkidul dirumuskan berdasarkan sasaran-sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja

No	I K U	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Penyelesaian Pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada Meningkat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	97,3%
		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada terselesaikan	97,3%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026 Visi Kepala Daerah adalah "*Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"*. Sementara dalam Bab III telah diuraikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Ketentraman ddana Ketertiban Umum, mendukung Misi kelima Bupati terpilih, yaitu "*Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban*". Penyusunan Renja Tahun 2026 merupakan masa transisi RPJMD/Renstra tahun 2021 – 2026 dengan RPJMD/Renstra tahun 2025 – 2029. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai dua Sasaran PD dan mendukung Prioritas dan Sasaran Daerah kelima untuk perencanaan tahun 2026, yaitu Program Pamong Nglayani dan Ngayomi. Pengaliran Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja ke dalam 2 program yang dijabarkan dalam 9 kegiatan dan 34 sub kegiatan pada tahun 2026 selengkapnya Rumusan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 disajikan dalam tabel 4.1.dan 4.2.

Hasil perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 kami sajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program / Kegiatan

No	Sasaran PD	Nama Program / Kegiatan
1	Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Program: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan: 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota terfasilitasi Sub Kegiatan: a. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota. b. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarkat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia. c. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. d. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota Sub kegiatan: a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah b. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota c. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan: 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub kegiatan: a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD e. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD

a.	Satuan Polisi Pamong Praja	Garis Besar	f. Evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi Keuangan Daerah Sub kegiatan: a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub kegiatan: a. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan: a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor c. Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan f. Fasilitasi kunjungan tamu g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Pengadaan Mebel b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub kegiatan: a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub kegiatan a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya c. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dari tabel 4.1 tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan 2 (dua) program yang terjabarkan dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 (satu) program dengan 6 (enam) kegiatan difokuskan untuk penguatan kapasitas internal Perangkat Daerah dan 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dilakukan untuk mendukung visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026.

Untuk lebih jelasnya kami paparkan rekapitulasi program dan kegiatan utama Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2026 sebagaimana tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan 2 (dua) Prioritas Pembangunan Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program / Kegiatan	Pagu indikatif (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan : 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	3.280.492.700 475.400.200	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.090.000 3.220.923.104 25.034.800 306.008.000 36.585.000 262.723.044 278.950.000	

b. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026

Upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan diwujudkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan prioritas juga disusun untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, seperti dapat kita lihat dalam tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat meningkat	1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban masyarakat	1. Penyelesaian pelanggaran K3 serta penegakan Perda dan Perkada meningkat	1. 1. Persentse penyelesaian pelanggaran K3	97,3 Persen	1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten/ Kota	1.458.170.200	244.050.000	SAT POL PP
								Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.565.357.500	1.389.352.500	SAT POL PP
								Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	253.365.000	272.250.000	
								Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	3.600.000	7.200.000	SAT POL PP
				2. Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	97,3 Persen		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	118.396.000	118.396.000	SAT POL PP
								Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	231.301.200	24.700.000	SAT POL PP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	125.703.000	147.000.000	SATPOL PP
Total									3.755.892.900	2.202.948.500	

Secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2026 melaksanakan program yang terbagi menjadi kegiatan dan sub kegiatan. Terdapat 1 (satu) program utama, 1 (satu) program penyelenggaraan keistimewaan dan 1 (satu) program yang merupakan program pendukung kinerja yang dilaksanakan di sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja. Program dan kegiatan ini sebagian besar telah sesuai dengan dengan rancangan awal RKPD. Sedangkan rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijabarkan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				8.067.206.848,00				5.653.359.709,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.942.206.848,00				5.528.359.709,00
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.942.206.848,00				5.528.359.709,00
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		84,56 Persen	4.186.313.948,00			85,06 Persen	3.325.411.209,00
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			56.090.000,00		-		43.550.000,00
1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SATPOL PP	3 Dokumen	14.455.000,00	DAU	-	3 Dokumen	16.300.000,00
1 05 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SATPOL PP	1 Dokumen	4.285.000,00	DAU	-	1 Dokumen	1.500.000,00
1 05 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SATPOL PP	1 Dokumen	4.285.000,00	DAU	-	1 Dokumen	1.500.000,00
1 05 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	SATPOL PP	2 Dokumen	6.360.000,00	DAU	-	2 Dokumen	4.500.000,00
1 05 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	SATPOL PP	2 Dokumen	6.360.000,00	DAU	-	2 Dokumen	3.000.000,00

1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SATPOL PP	18 Laporan	8.170.000,00	DAU	-	18 Laporan	7.700.000,00
1 05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SATPOL PP	6 Laporan	12.175.000,00	DAU	-	6 Laporan	9.050.000,00
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.220.923.104,00		-		2.505.734.212,00
1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SATPOL PP	462 Orang/bulan	3.135.988.104,00	DAU	-	462 Orang/bulan	2.482.174.212,00
1 05 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SATPOL PP	1 Laporan	4.785.000,00	DAU	-	1 Laporan	7.000.000,00
1 05 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SATPOL PP	13 Laporan	80.150.000,00	DAU	-	13 Laporan	16.560.000,00
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian			25.034.800,00		-		50.655.000,00
1 05 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SATPOL PP	6 Dokumen	5.034.800,00	DAU	-	6 Dokumen	12.155.000,00
1 05 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	SATPOL PP	3 Orang	20.000.000,00	DAU	-	3 Orang	38.500.000,00
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			306.008.000,00		-		262.554.997,00
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SATPOL PP	1 Paket	4.880.000,00	DAU	-	1 Paket	6.000.000,00

1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SATPOL PP	6 Paket	30.876.000,00	DAU	-	6 Paket	26.625.000,00
1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	SATPOL PP	2 Paket	3.348.000,00	DAU	-	2 Paket	3.650.000,00
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SATPOL PP	29 Paket	16.422.000,00	DAU	-	29 Paket	25.977.997,00
1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	SATPOL PP	730 Dokumen	2.400.000,00	DAU	-	730 Dokumen	3.650.000,00
1 05 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SATPOLPP	13 Laporan	24.970.000,00	DAU	-	13 Laporan	23.152.000,00
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SATPOL PP	38 Laporan	223.112.000,00	DAU	-	38 Laporan	173.500.000,00
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah			36.585.000,00		-		-
1 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	SATPOL PP	7 Unit	10.680.000,00	DAU	-	7 Unit	0,00
1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	SATPOL PP	10 Unit	25.905.000,00	DAU	-	10 Unit	0,00
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			262.723.044		-		187.782.000
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SATPOL PP	13 Laporan	151.775.000,00	DAU	-	13 Laporan	91.150.000,00
1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SATPOL PP	36 Laporan	29.431.044,00	DAU	-	36 Laporan	15.115.000,00
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SATPOL PP	24 Laporan	81.517.000,00	DAU	-	24 Laporan	81.517.000,00

1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah			278.950.000,00		-		275.135.000,00
1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SATPOL PP	257 Unit	264.700.000,00	DAU	-	257 Unit	220.935.000,00
1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SATPOL PP	27 Unit	10.950.000,00	DAU	-	27 Unit	17.700.000,00
1 05 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SATPOL PP	11 Unit	3.300.000,00	DAU	-	11 Unit	36.500.000,00
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)		97,1 Persen 97,3 Persen	3.755.892.900,00			97,5 persen 97,3 persen	2.202.948.500,00
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten tertangani			3.280.492.700,00		-		1.912.852.500,00
1 05 02 2.01 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	SATPOL PP	65 Dokumen	1.458.170.200,00	DAU	-	65 Dokumen	244.050.000,00
1 05 02 2.01 0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	SATPOL PP	13 Dokumen	253.365.000,00	DAU	-	13 Dokumen	272.250.000,00
1 05 02 2.01 0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	SATPOL PP	1378 Orang	1.565.357.500,00	DAU	-	1378 Orang	1.389.352.500,00

1 05 02 2.01 0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	SATPOL PP	2 Laporan	3.600.000,00	DAU	-	2 Laporan	7.200.000,00
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan			475.400.200,00				290.096.000,00
1 05 02 2.02 0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	SATPOL PP	18 Laporan	118.396.000,00	DBHCHT		18 Laporan	118.396.000,00
1 05 02 2.02 0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	SATPOL PP	82 Laporan	231.301.200,00	DAU, DBHCHT		82 Laporan	24.700.000,00
1 05 02 2.02 0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	SATPOL PP	26 Laporan	125.703.000,00	DAU		26 Laporan	147.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				125.000.000,00				125.000.000,00
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				125.000.000,00				125.000.000,00
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kelompok jagawarga yang terbina		84 Persen	125.000.000,00			84,5 Persen	125.000.000,00
2 22 08 5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Pembinaan Jagawarga yang dibina			125.000.000,00				125.000.000,00
2 22 08 5.07 0012	Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	SATPOL PP	960 Orang	125.000.000,00	DAIS			125.000.000,00
				J U M L A H	**8.067.206.848,00**				**5.653.359.709**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan pembuatan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

5.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

Wonosari,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

ttd

EDY BASUKI

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam periode rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, sehingga Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD serta Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026 disempurnakan dengan berpedoman pada Rancangan RKPD Tahun 2026, memastikan terakomodirnya belanja wajib mengikat, kebijakan belanja prioritas, dan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musrenbang. RKPD DIY, Renja Dinsos DIY serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Program dan Kegiatan yang ada di dalam Renja harus tercantum dalam RKPD sedangkan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan harus mengacu pada Renstra yang selanjutnya menjadi dasar pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag pada Sekretariat, masing-masing Seksi pada Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta memperhatikan Rencana Kerja Dinas Sosial DIY dan disesuaikan kebutuhan riil yang ada, kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gunungkidul. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran selanjutnya menjadi Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul. Di dalam melaksanakan tugas pokok khususnya dalam menangani masalah sosial, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta perlindungan anak maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan serta pendidikan, menangani Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan pendekatan humanistik yang bersifat bantuan, jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

Program kegiatan di Bidang Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Gender merupakan hal yang cukup rawan karena secara langsung berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan yang berkembang serta mempunyai korelasi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul telah melakukan berbagai upaya yang terencana dan terpadu untuk mendorong peran serta yang seluas-luasnya kepada Pilar-Pilar Sosial selaku Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) maupun Lembaga Masyarakat, Mitra Sosial, Dunia Usaha selaku *CSR (Corporate Social Responsibility)* serta masyarakat melalui program dan kegiatan yang memberikan motivasi dan fasilitasi serta peningkatan ketrampilan dan pemberdayaan, juga beberapa program kegiatan dari Dinas Sosial DIY Tahun 2026. sehingga dapat mendayagunakan semua sumber dana, sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Oleh karena itu semua kebijakan, strategi dan program kegiatan serta sumber daya manusia telah ditinjau dan disesuaikan serta dipertajam dan diatur ulang agar lebih mampu menjadi pedoman pelaksanaan dalam mengatasi permasalahan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan tata kerja yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sehingga sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Terealisasinya target dalam indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, pencapaian indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisa

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul
- 2.2. Analis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul
- 2.3. Isu-isu penting Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul
- 2.4. Riviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. GUNUNGKIDUL
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gunungkidul

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
- 4.1. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
- 4.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan
- 4.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Evaluasi dan Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan;

Penyusunan Ranwal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok-pokok materi sebagai berikut :

1. Realisasi program tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   1.1. (Program Rehabilitasi Sosial) Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya (74,33%)
   1.2. (Program Perlindungan Perempuan) Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan (-18,75%)
   1.3. (Program Pemenuhan Hak Anak) Persentase Desa Layak Anak yang terbentuk (67,24%).
2. Realisasi program tahun 2024 yang memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan :
   2.1. (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik (100%);
   2.2. (Program Penanganan Bencana) Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (100%);
   2.3. (Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan) Persentase TMP dan Monumen yang Terpelihara (100%);
   2.4. (Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan) Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas (100%);
   2.5. (Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak) Persentase jenis data gender dan anak yang terkelola (100%);
3. Realisasi program tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan :
   3.1. (Program Pemberdayaan Sosial) Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina (141,64%);
   3.2. (Program Perlindungan dan Jaminan Sosial) Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (104%);
   3.3. (Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan) persentase lembaga PUG yang aktif (125%);
   3.4. (Program Peningkatan Kualitas Keluarga) Persentase Kelembagaan KLA yang aktif (137,49%);

3.5. (Program Perlindungan Khusus Anak) Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak (1626%).

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program tahun 2024:
   4.1. Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya (74,33%), karena jumlah anggaran tidak sebanding dengan jumlah populasi PDT, AT, LUT dan Gepeng yang ada;
   4.2. Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan (-18,75%) karena meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan di tahun 2024;
   4.3. Persentase Desa Layak Anak yang terbentuk (67,24%) karena belum semua desa layak anak terbentuk;
   4.4. Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik (100%) didorong oleh perencanaan yang matang, koordinasi dan komunikasi yang efektif, serta pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan;
   4.5. Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (100%), karena respons cepat tanggap darurat, ketersediaan logistik yang memadai, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, relawan, dan instansi terkait dalam penyaluran bantuan;
   4.6. Persentase TMP dan Monumen yang Terpelihara (100%), karena pelaksanaan kegiatan pemeliharaan secara rutin dan terjadwal, serta adanya komitmen dan kepedulian pemerintah daerah terhadap pelestarian nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
   4.7. Persentase jenis data gender dan anak yang terkelola (100%), karena tersedianya sistem pengelolaan data yang terintegrasi, komitmen lintas sektor dalam pengumpulan dan pembaruan data;
   4.8. Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina (141,64%), karena optimalisasi sinergi dengan mitra kerja dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif;
   4.9. Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (104%), karena peningkatan akurasi pendataan, perluasan cakupan program bantuan sosial, respons cepat terhadap kondisi darurat sosial, serta sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pusat, dan mitra pelaksana dalam penyaluran bantuan;
   4.10. persentase lembaga PUG yang aktif (125%), karena meningkatnya komitmen kelembagaan, dukungan kebijakan daerah, serta penguatan kapasitas dan jejaring koordinasi antar lembaga;
   4.11. Persentase Kelembagaan KLA yang aktif (137,49%), karena meningkatnya dukungan pemerintah daerah, penguatan komitmen lintas sektor, serta optimalisasi peran forum anak dan lembaga masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Kota Layak Anak;
   4.12. Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak (1626%), karena meningkatnya efektivitas layanan perlindungan anak, intensifikasi sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan, penguatan pelaporan dan respon cepat, serta kolaborasi aktif antar lembaga dan masyarakat dalam penanganan kasus.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

5.1. Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya (74,33%) berpotensi menghambat pencapaian tujuan perlindungan sosial secara menyeluruh, serta mencerminkan perlunya penyesuaian strategi dan peningkatan alokasi sumber dana untuk menjangkau populasi sasaran secara lebih luas.
5.2. Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan (-18,75%) berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan intervensi;
5.3. Persentase Desa Layak Anak yang terbentuk (67,24%) terhambatnya terwujudnya sistem perlindungan anak berbasis masyarakat secara menyeluruh;
5.4. Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik (100%) terciptanya dukungan administratif dan operasional yang optimal terhadap pelaksanaan program-program prioritas, serta memperkuat efektivitas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah;
5.5. Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (100%), tercapainya standar pelayanan minimal dalam penanganan bencana, yang mencerminkan kesiapsiagaan, respons cepat, dan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyintas bencana;
5.6. Persentase TMP dan Monumen yang Terpelihara (100%), terjaganya kelestarian situs-situs bersejarah sebagai simbol penghormatan terhadap jasa pahlawan, serta mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan karakter di masyarakat;
5.7. Persentase jenis data gender dan anak yang terkelola (100%), tersedianya data yang lengkap, akurat, dan terpilah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang responsif gender dan ramah anak, sehingga mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran;
5.8. Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina (141,64%), meningkatnya kapasitas dan partisipasi lembaga/tenaga sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial, yang dapat memperluas jangkauan layanan dan memperkuat sinergi pelaksanaan program secara berkelanjutan;
5.9. Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (104%), meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;
5.10. persentase lembaga PUG yang aktif (125%), meningkatnya efektivitas pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender di berbagai sektor, yang berkontribusi pada pencapaian kesetaraan gender serta penguatan kelembagaan responsif gender di tingkat daerah;
5.11. Persentase Kelembagaan KLA yang aktif (137,49%), menguatnya peran kelembagaan dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak, yang mencerminkan meningkatnya komitmen dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan berpihak pada kepentingan terbaik ana;
5.12. Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak (1626%), menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, yang

mencerminkan keberhasilan intervensi lintas sektor, penguatan layanan pengaduan, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melindungi anak.

6. Kabijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
   6.1. Perlu dilakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran berbasis data serta optimalisasi kolaborasi lintas sektor dan sumber pendanaan alternatif untuk menjawab ketimpangan antara anggaran dan jumlah populasi PDT, AT, LUT, dan Gepeng;
   6.2. Penguatan strategi perlindungan dan edukasi masyarakat serta peningkatan akses layanan pengaduan karena meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024;
   6.3. Percepatan pembentukan Desa Layak Anak melalui peningkatan komitmen pemerintah desa, sosialisasi yang masif, dan dukungan lintas sektor karena belum semua desa Layak Anak terbentuk;

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Tahun 2024 dapat diuraikan pada table 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana dengan Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
01.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
01.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	12	
01.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	
01.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6	
01.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6	
01.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100	16 Laporan	48	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12	
01.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
01.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/Bulan	420 Orang/Bulan	448 Orang/Bulan	448 Orang/Bulan	100	420 Orang/Bulan	1288	
01.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen	1	
01.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	
01.06.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se m SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100	13 Laporan	39	
01.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PNS Yang Terlayani Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
01.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	4 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	1 Dokumen	16	
01.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum PD terlayani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
01.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	1 Paket	1 Paket	100	6 Paket	13	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (ATK 6 Paket; Belanja Modal 1 Paket)	7 Paket	7 Paket	4 Paket	4 Paket	100	7 Paket	18	
01.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	6	
01.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	360 Dokumen	365 Dokumen	365 Dokumen	100	360 Dokumen	1085	
01.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100	12 Laporan	33	
01.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahdaerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	NA	100 Persen	100 Persen	100	100 persen	100	100
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	NA	32 Unit	32 Unit	100	30 unit	62	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	NA	NA	NA	NA	1 Unit	1	
01.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
01.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	0 Laporan	24	
01.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 Laporan	216 Laporan	204 Laporan	204 Laporan	100	192 Laporan	612	
01.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 Laporan	16 Laporan	0 Laporan	0 Laporan		0 Laporan	16	
01.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
01.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (4 Kendaraan Bensin,3 Kendaraan Solar, 1 Roda Tiga dan 9 Sepeda Motor)	432 Unit	11 Unit	28 Unit	28 Unit	100	27 Unit	66	
01.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	20 Unit	0 Unit	0 Unit	0	6 Unit	26	
01.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	24 Unit	21 Unit	21 Unit	100	3 Unit	48	
01.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	16 Unit	16 Unit	100	8 Unit	32	
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina	71 Persen	100 Persen	70,6 Persen	100 Persen	141,64	100 Persen	100	100
01.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Terfasilitasi	71 Persen	100 Persen	70,6 Persen	100 Persen	141,64	100 Persen	100	100
01.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	9 Orang	414 Orang	414 Orang	100	411 Orang	834	
01.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	216 Orang	216 Orang	216 Orang	100	216 Orang	648	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	48 Keluarga	941 Keluarga	941 Keluarga	100	941 Keluarga	1930	
01.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (WKSBM)	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	3	
01.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0	0 Lembaga	1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya; Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya	92 Persen	100 Persen	91 Persen	50,08 Persen	55,03	91,5 Persen	100	100
01.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan ketrampilan	91 Persen	90,4 Persen	90,6 Persen	90,6 Persen	100	90,8 Persen	100	100
01.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	2374 Orang	2374 Orang	100	2226 Orang	4700	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	108 Orang	108 Orang	88 Orang	88 Orang	100	61 Orang	257	
01.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	90 Orang	235 Orang	235 Orang	100	251 Orang	576	
01.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	30 Orang	0 Orang	0 Orang	0	100 Orang	130	
01.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	36 Orang	36 Orang	100	20 Orang	66	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	4 Orang	4 Orang	100	6 Orang	16	
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91 Persen	99,11 Persen	90,6 Persen	94,16 Persen	104	90,8 Persen	100	100
01.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fakir miskin yang masuk dalam basis data terpadu mendapatkan bantuan sosial	91 Persen	99,11 Persen	90,6 Persen	94,16 Persen	104	90,8 Persen	100	100
01.06.04.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	583972 Orang	583411 Orang	583972 Orang	583972 Orang	100	583972 Orang	1751355	
01.06.04.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	213231 Keluarga	213231 Keluarga	213787 Keluarga	213787 Keluarga	100	213231 Keluarga	640249	
01.06.04.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	279 Keluarga	994 Keluarga	896 Keluarga	896 Keluarga	100	785 Keluarga	2675	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kewenangan Kabupaten/Kota								
01.06.04.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3270 Orang	3270 Orang	2110 Orang	2110 Orang	100	280 Orang	5660	
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
01.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial korban bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
01.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	300 Orang	300 Orang	100	300 Orang	750	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100	100 Orang	100	
01.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	30 Orang	30 Orang	100	80 Orang	190	
01.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	lembaga terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Kampung	9 Kampung	13 Kampung	13 Kampung	100	13 Kampung	35	
01.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2952 Orang	2436 Orang	2073 Orang	2073 Orang	100	2952 Orang	7461	
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
01.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	pemeliharaan TMP dan monumen yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
01.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	31 Makam	31 Makam	31 Makam	31 Makam	100	31 Makam	93	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga PUG yang aktif	90 Persen	87,23 Persen	80 Persen	100 Persen	125	85 Persen	100	100
02.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
02.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	8	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	100	47 Perangkat Daerah	141	
02.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	100	47 Perangkat Daerah	141	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
02.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	3	
02.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	1 Organisasi	0 Organisasi	0 Organisasi		1 Organisasi	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	43,75 Persen	35,42 Persen	38,19 Persen	38,19 Persen	100	40,97 Persen	100	100
02.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	75 Orang	60 Orang	225 Orang	225 Orang	100	75 Orang	360	
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan pada Perempuan	7,14 Persen	0 Persen	6,25 Persen	-18,75 Persen	100	6,67 Persen	-12,08	-169

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	100 Persen	100 Persen	95 Persen	95 Persen	100	100 Persen	100	100
02.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	6 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	8	
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kelembagaan KLA yang Aktif	74,81 Persen	63,19 Persen	72,73 Persen	100 Persen	137,49	73,81 Persen	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang terlatih Konvensi Hak Asasi (KHA)	90 Persen	100 Persen	80 Persen	100 Persen	100	95 Persen	100	100
02.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah	100	47 Perangkat Daerah	101	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan KLA yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
02.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Dokumen	29 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	34	
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Jenis Data Gender dan Anak yang Terkelola	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis data gender dan anak yang tersedia	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
02.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6	
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Layak Anak yang Terbentuk	87,5 Persen	59,51 Persen	80,56 Persen	54,17 Persen	67,24	84,03 Persen	100	100
02.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	3 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100	1 Organisasi	5	
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak	3,33 Persen	-19,85 Persen	3,13 Persen	50,92 Persen	1626,84	3,23 Persen	34,3	10,30
02.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang terakomodir dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pengembangan Jejaring dengan Lembaga Masyarakat Dalam Pencegahan KTPA/TPPO (DAK NonFisik PPPA)	360 Orang	360 Orang	NA	NA	NA	NA		
2.08.07.2.01.03	Penguatan kerja sama lintasperangkat daerah untukmewujudkan kabupaten/kotalayak Anak, kecamatan layakAnak, desa/kelurahan layakAnak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	3 kegiatan	NA	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan		
02.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	NA	NA	NA	NA		
2.08.07.2.02.05	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang Mendapatkan layanan pengaduan	100 Orang	NA	100 Orang	100 Orang	100	100 Orang		
02.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	NA	NA	NA	NA		
2.08.07.2.03.06	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat daerah/kabupaten	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapat sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	90 Orang	NA	90 Orang	90 Orang	100	90 Orang		
02.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	100
2.22.08.5.07.0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	NA	NA	288 Orang	288 Orang	100	NA		
02.22.08.5.07.18	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membawahi Sekretariat, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan sasaran dan target kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKU maupun IKK melalui langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat terlaksana sesuai rencana.

Dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja maka kemampuan teknis dalam perencanaan perlu lebih ditingkatkan sehingga program pembangunan di bidang sosial yang mewadahi pilar-pilar masyarakat selaku Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga masyarakat serta penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur melalui Pembinaan, Pendidikan dan Bimbingan Pelatihan akan sejalan dengan profesionalitas pelayanan publik sehingga *good govermance* dapat berjalan sesuai amanat reformasi birokrasi.

Meski demikian Penanganan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Tidak Potensial/Terlantar melalui Jaminan Sosial serta Bantuan Sosial belum memenuhi target SPM 100% karena terbatasnya anggaran APBD. Jumlah sarana sosial seperti panti sosial/panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih belum memenuhi jumlah yang dibutuhkan untuk penanganan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial.

Demikian juga untuk memenuhi target capaian PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang tercantum dalam sasaran dan indikator sasaran di RKPD Tahun 2025 sudah diupayakan melalui Program Bantuan Permakanan Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar sejumlah 2206 orang selama 30 hari, Bantuan permakanan sembako sebanyak 30 orang, pemberian alat bantu disabilitas 61 unit melalui dana APBD Tahun 2025.

Dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak juga telah menetapkan sasaran strategi yang sejalan dengan prioritas nasional dan daerah melalui Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan melalui pelatihan desa prima, peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan melalui sosialisasi kaukus perempuan parlemen, pencegahan kekerasan perempuan dan anak melalui sosialisasi dan edukasi, pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak, dan penguatan sistem perlindungan anak termasuk monitoring hak-hak anak dan advokasi kebijakan ramah anak, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gunungkidul sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan terhadap Renstra PD Tahun 2025-2029 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat di uraikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
A.	IKU (Indikator Kinerja Utama)										
1	Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial	Persen	81	82	83	84	99,11	82,37	83	84	
2	Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) yang dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	Persen	50	55	60	65	50	55	60	65	
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks	85,5	85,6	85,7	85,75	86,95	85,69	85,7	85,75	
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,56	77,4	80,5	81,5	77,3	79,41	80,5	81,5	
5	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
B.	SPM (Bidang Sosial)										
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	27,75	100	100	Perbedaan dasar perhitungan capaian di tahun 2024

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	58,23	100	100	Perbedaan dasar perhitungan capaian di tahun 2024
3	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	66,43	100	100	Perbedaan dasar perhitungan capaian di tahun 2024
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase(%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
C.	IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)										
1	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
3	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya	Persen	90,5	91	90,6	55	100	50,08	90,6	55	Perbedaan dasar perhitungan capaian di tahun 2024
4	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	90,4	90,6	90,8	83	99,11	82,37	90,8	83	Perbedaan dasar perhitungan capaian di tahun 2024
5	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	persentase lembaga PUG yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	persentase penyediaan layanan perlindungan perempuan sesuai standar tingkat kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase keluarga yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	persentase jenis data gender dan anak yang terkelola	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	persentase hak anak dalam klaster KLA yang dipenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
12	persentase pemenuhan perlindungan khusus anak	Persen	N/A	77,3	N/A	77,55	N/A	77,3	N/A	77,55	
13	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

   Program-program penanganan kemiskinan memerlukan data yang akurat dan valid, perencanaan yang matang, sumber daya manusia yang mumpuni serta adanya Kerjasama, dukungan dan sinergi dari semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga, masyarakat maupun dunia usaha (*CSR*). Sementara penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum ditangani secara intensif dan terpadu, hal tersebut berkaitan dengan kurangnya tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pelaksana tugas dan fungsi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya didukung adanya komitmen dari mitra kerja dan Lembaga sosial yang peduli terhadap masalah sosial sehingga dapat berjalan dengan kondusif;
2. Permsalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, PPPA

   Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masil belum optimal karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi jumlah dan kemampuan/kompetensi, terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran serta belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan (SP) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan PPKS, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta terbatasnya anggaran;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/international, seperti SPM dan SDGs *(Sustainable Development Goals)*.
   - Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

     Program-program sosial yang fokus pada pengurangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini mengurangi efektivitas dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
   - Dampak terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

     capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak belum optimal. Layanan terhadap kelompok rentan seperti anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang disabilitas, serta korban bencana masih terbatas, mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai standar yang ditetapkan.
   - Dampak terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

     Keterbatasan dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan anak, serta akses terhadap layanan dasar menghalangi pencapaian target-target SDGs, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, melindungi hak anak, dan memberdayakan perempuan secara lebih luas;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
   Adapun tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi : tingginya angka kemiskinan, belum optimalnya pemberdayaan PPKS, belum maksimalnya peran PSKS, serta masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum berfungsinya kesetaraan gender.
   Namun ada beberapa peluang yang dapat dipergunakan untuk menghadapi tantangan yang ada antara lain: adanya Undang-Undang dan Peraturan, tersedianya dana dari berbagai sumber, adanya koordinasi lintas sektor/Dinas terkait, adanya jaringan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan Lembaga (LSM/Organisasi Sosial), Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan, adanya semangat keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat.
5. Rekomendasi dan cacatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan.
   Perumusan program dan kegiatan yang harus ditekankan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kewenangan Kabupaten, DIY dan Pusat, penanganan PPKS melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.4. Riviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, maka perlu dilakukan reviu terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan dengen efektif dan efisien. Hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Riviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				9.062.344.569,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				9.062.344.569,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.646.500.069,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.646.500.069,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.646.500.069,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.646.500.069,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82,32 Nilai	3.755.233.369,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82,32 Nilai	3.755.233.369,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		107.404.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		107.404.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	18.355.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	18.355.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	70.362.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	70.362.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.125.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.125.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.210.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.210.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.357.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.357.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	7.995.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	7.995.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.630.638.569,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.630.638.569,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	2.613.201.669,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang /bulan	2.613.201.669,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.085.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.085.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.261.900,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.261.900,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	13 Laporan	14.090.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	14.090.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.500.900,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.500.900,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	500.900,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	500.900,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	53 Orang	10.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	53 Orang	10.000.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		302.815.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		302.815.400,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.779.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.779.500,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	173.272.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	173.272.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.002.900,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.002.900,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	247 Dokumen	1.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	247 Dokumen	1.200.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.561.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.561.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		55.001.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		55.001.000,00	
Pengadaan Mebel	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Unit	55.001.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Gunung kidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Unit	55.001.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		103.906.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		103.906.500,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	102.106.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	102.106.500,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunung kidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		544.967.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		544.967.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	322.210.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	322.210.000,00	
Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunung kidul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	1.250.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunung kidul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	1.250.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	13.200.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	13.200.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	108.307.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	108.307.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Aktif	100 Persen	485.721.400,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Aktif	100 Persen	485.721.400,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		PSKS yang terfasilitasi dengan baik		485.721.400,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		PSKS yang terfasilitasi dengan baik		485.721.400,00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Keluarga	25.020.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Keluarga	25.020.000,00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	88.223.400,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	88.223.400,00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	88 Orang	362.178.000,00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	88 Orang	362.178.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	50 orang	10.300.000,00	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	50 orang	10.300.000,00	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya	100 Persen	1.779.882.900,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya	100 Persen	1.779.882.900,00	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		PDT, AT, LUT dan Gepeng yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan keterampilan		1.779.882.900,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		PDT, AT, LUT dan Gepeng yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan keterampilan		1.779.882.900,00	
Penyediaan Permakanan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1273 Orang	1.389.074.000,00	Penyediaan Permakanan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1273 Orang	1.389.074.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Sandang	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Orang	10.000.000,00	Penyediaan Sandang	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Orang	10.000.000,00	
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Orang	55.339.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Orang	55.339.000,00	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	10.000.000,00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	10.000.000,00	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gunung kidul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	175 Orang	77.257.000,00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Gunung kidul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	175 Orang	77.257.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Gunung kidul	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	32.176.000,00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Gunung kidul	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	32.176.000,00	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	6.500.000,00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	6.500.000,00	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	6.000.000,00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	6.000.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	170.536.900,00	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	170.536.900,00	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	7.000.000,00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	7.000.000,00	
Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	10.000.000,00	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	10.000.000,00	
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	6.000.000,00	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	6.000.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	84 Persen	1.202.193.400,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	84 Persen	1.202.193.400,00	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Data PPKS yang valid		1.202.193.400,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Data PPKS yang valid		1.202.193.400,00	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	551.947 Orang	184.338.500,00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	551.947 Orang	184.338.500,00	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	6.270.000,00	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	6.270.000,00	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gunung kidul	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1118 Orang	887.976.900,00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gunung kidul	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1118 Orang	887.976.900,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	500 Usulan	123.608.000,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	500 Usulan	123.608.000,00	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 Persen	348.548.000,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 Persen	348.548.000,00	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		139.470.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		139.470.000,00	
Penyediaan Makanan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	120.000.000,00	Penyediaan Makanan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	120.000.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Sandang	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	10.000.000,00	Penyediaan Sandang	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	10.000.000,00	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	9.470.000,00	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	9.470.000,00	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Lembaga yang terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana		209.078.000,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Lembaga yang terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana		209.078.000,00	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Gunung kidul	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kampung	20.395.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Gunung kidul	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kampung	20.395.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2244 Orang	188.683.000,00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2244 Orang	188.683.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP dan Monumen yang terkelola dengan baik	100 Persen	74.921.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP dan Monumen yang terkelola dengan baik	100 Persen	74.921.000,00	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		TMP dan Monumen yang terpelihara		74.921.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		TMP dan Monumen yang terpelihara		74.921.000,00	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	31 Makam	74.921.000,00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	31 Makam	74.921.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.415.844.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.415.844.500,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.165.844.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.165.844.500,00	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Lembaga PUG yang Aktif	100 Persen	371.142.000,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Lembaga PUG yang Aktif	100 Persen	371.142.000,00	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Lembaga PUG yang terfasilitasi		74.582.000,00	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Lembaga PUG yang terfasilitasi		74.582.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	3 Laporan	49.157.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	3 Laporan	49.157.000,00	
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga	25.425.000,00	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga	25.425.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Organisasi perempuan yang terfasilitasi pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi		38.085.000,00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Organisasi perempuan yang terfasilitasi pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi		38.085.000,00	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Gunung kidul	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Lembaga	2.875.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Gunung kidul	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Lembaga	2.875.000,00	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	130 orang	35.210.000,00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	130 orang	35.210.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Kelompok perempuan yang mendapat pelatihan keterampilan ekonomi produktif untuk menuju desa prima		258.475.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Kelompok perempuan yang mendapat pelatihan keterampilan ekonomi produktif untuk menuju desa prima		258.475.000,00	
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Gunung kidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	485 orang	258.475.000,00	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Gunung kidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	485 orang	258.475.000,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase penurunan kasus kekerasan perempuan	1,75 Persen	74.406.000,00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase penurunan kasus kekerasan perempuan	1,75 Persen	74.406.000,00	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan		74.406.000,00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan		74.406.000,00	
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	6.000.000,00	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	6.000.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50 orang	68.406.000,00	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50 orang	68.406.000,00	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase keluarga yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga	100 Persen	216.925.500,00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase keluarga yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga	100 Persen	216.925.500,00	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga		119.577.500,00	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga		119.577.500,00	
Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	5 Lembaga	119.577.500,00	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	5 Lembaga	119.577.500,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terfasilitasi		97.348.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terfasilitasi		97.348.000,00	
penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	72.433.000,00	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	72.433.000,00	
Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	24.915.000,00	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	24.915.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase jenis data gender dan anak yang terkelola	100 Persen	12.610.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase jenis data gender dan anak yang terkelola	100 Persen	12.610.000,00	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Dokumen Data Gender dan Anak		12.610.000,00	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Dokumen Data Gender dan Anak		12.610.000,00	
Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	12.610.000,00	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	12.610.000,00	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase hak anak dalam klaster Kabupaten Layak Anak yang dipenuhi	100 Persen	90.101.000,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase hak anak dalam klaster Kabupaten Layak Anak yang dipenuhi	100 Persen	90.101.000,00	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang memfasiliasi pemenuhan hak anak		90.101.000,00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang memfasiliasi pemenuhan hak anak		90.101.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Lembaga	90.101.000,00	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Lembaga	90.101.000,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Hasil evaluasi kabupaten layak anak klaster 5	168 Nilai	400.660.000,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Hasil evaluasi kabupaten layak anak klaster 5	168 Nilai	400.660.000,00	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Lembaga lingkup daerah kabupaten/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak		101.500.000,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Lembaga lingkup daerah kabupaten/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak		101.500.000,00	
koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Gunung kidul	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	3 Dokumen	101.500.000,00	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Gunung kidul	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	3 Dokumen	101.500.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan pengaduan		230.140.000,00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan pengaduan		230.140.000,00	
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	100 Orang	230.140.000,00	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	100 Orang	136.937.500,00	
					layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	8 Orang	28.950.000,00	
					layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	6 Orang	11.212.500,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	4 Orang	46.915.000,00	
					Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	8 Orang	2.125.000,00	
					layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10 Orang	4.000.000,00	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	SDM lembaga penyedia layanan bagi AMPK yang terlatih		69.020.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	SDM lembaga penyedia layanan bagi AMPK yang terlatih		69.020.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Kab. Gunung kidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	92 Orang	69.020.000,00	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Kab. Gunung kidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	92 Orang	69.020.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				250.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				250.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Gunung kidul	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 Persen	250.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Gunung kidul	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 Persen	250.000.000,00	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Gunung kidul	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan		250.000.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Gunung kidul	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan		250.000.000,00	
Pengembangan Ekonomi Perempuan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	104 Orang	100.000.000,00	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Kab. Gunung kidul	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	104 Orang	100.000.000,00	
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	6 Dokumen	150.000.000,00	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Kab. Gunung kidul	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	6 Dokumen	150.000.000,00	
Jumlah				9.062.344.569	Jumlah				9.062.344.569	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian dipadukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, serta Musrenbang Kabupaten. Dengan mempertimbangkan faktor skala prioritas, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi masyarakat tersebut dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tercermin dalam program/kegiatan yang dibiayai dengan alokasi anggaran PIWK dan PIS, yang selengkapnya tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	PIWK - Bantuan sosial alat bantu dengar	Kalurahan Banjarejo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	799.000	1.598.000	
2	PIWK - Bantuan sosial alat bantu dengar	Kalurahan Tepus	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	9	799.000	7.191.000	
3	PIWK - Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Kalurahan Karangtengah	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	1.800.000	9.000.000	
4	PIWK - Inisiasi Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Wonolagi	Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5.850.000	5.850.000	
5	PIWK - Pelatihan dan Bimbingan Usaha bagi Disabilitas	Dengok, Playen, Giunugkidul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5	8.000.000	40.000.000	
6	PIWK - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	Kalurahan Tepus, Tepus, Gunungkidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
7	PIWK - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	Selang, Wonosari, Gunungkidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	
8	PIWK - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	Kalurahan Wonosari	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	
9	PIWK - Sosialisasi dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jl.Ki Ageng Giring No.1 Kepek Wonosari Gunungkidul 55813	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	9.815.000	9.815.000	
10	PIWK - Sosialisasi Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	karangduwet, paliyan kabupaten gunungkidul	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5.500.000	5.500.000	
11	PIWK - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Jurangjero, ngawen, gunungkidul	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
12	PIWK - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Krambilsawit	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
13	PIWK - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Balai Kalurahan Purwodadi,Rt.03 Rw.15 ,Cepogo,Purwodadi,	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
		Tepus, Gunungkidul					
14	PIWK - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul DIY	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
15	PIWK - Sosialisasi WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)	karangduwet, paliyan kabupaten gunungkidul	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5.500.000	5.500.000	
16	PIS - Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak	Kalurahan Hargomulyo	jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	1	9.815.000	9.815.000	
17	PIS - Sosialisasi dan Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kalurahan Hargomulyo	jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan kabupaten/kota	1	9.815.000	9.815.000	
18	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Kalurahan Hargomulyo	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
19	PIS - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	Kalurahan Hargosari Kapanewon Tanjungsari	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
		Kabupaten Gunungkidul					
20	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Kalurahan Hargosari Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
21	PIS - Bantuan sosial alat bantu dengar	Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	799.000	1.598.000	
22	PIS - Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Ngalang, Gedangsari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	1.800.000	7.200.000	
23	PIS - Bantuan Sosial Alat Bantu Walker/ Tongkat kaki tiga	Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	552.000	2.208.000	
24	PIS - Bantuan sosial alat bantu dengar	Serut, Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	799.000	6.392.000	
25	PIS - Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Serut, Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	1.800.000	7.200.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
26	PIS - Sosialisasi WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)	jepitu, girisubo, gunungkidul, diy	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5.500.000	5.500.000	
27	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Karanggede B, Jerukwudel, Girisubo, Gunungkiduk	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
28	PIS - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	Kepuh Karangawen Girisubo Gunungkidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	
29	PIS - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	Nglindur Girisubo Gunungkidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	
30	PIS - Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak	Nglindur Girisubo Gunungkidul	jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	1	9.815.000	9.815.000	
31	PIS - Sosialisasi dan Pembentukan Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA)	Nglindur Girisubo Gunungkidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	9.815.000	9.815.000	
32	PIS - Bantuan Sosial Alat Bantu Kursi Roda	Kalurahan Gedangrejo, Karangmojo, gunungkidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	1.800.000	7.200.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
33	PIS - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	Kebonjero RT 001/ RW 006	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	
34	PIS - Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak	Kalurahan Pilangrejo, Nglipar	jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	1	9.815.000	9.815.000	
35	PIS - Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak	Grogol, Paliyan, Gunungkidul	jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	1	9.815.000	9.815.000	
36	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Grogol, Paliyan, Gunungkidul	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
37	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Balai Kalurahan Karangasem Kapanewon Paliyan	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
38	PIS - Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak	kalurahan karangduwet kapanewon paliyan kabupaten gunungkidul	jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	1	9.815.000	9.815.000	
39	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Kalurahan Pampang	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
40	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Doga, RT 09, RW 05, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
41	PIS - Sosialisasi dan Pembentukan Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA)	Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	9.815.000	9.815.000	
42	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
43	PIS - Sosialisasi dan Pembentukan Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA)	Pakel, Pringombo, Rongkop, Gunungkidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	9.815.000	9.815.000	
44	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Pakel, Pringombo, Rongkop, Gunungkidul	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
45	PIS - Inisiasi Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Balai Kalurahan Kanigoro	Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5.850.000	5.850.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
46	PIS - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	Kalurahan Kepek Saptosari	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	
47	PIS - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	Balai Kalurahan Planjan	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	
48	PIS - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	Rejosari, Semin, Gunungkidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	
49	PIS - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	kalurahan kemadang	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	
50	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
51	PIS - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
52	PIS - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	Kalurahan Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	
53	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Balai Kalurahan Sumberwungu Tepus Gunungkidul (Pakwungu Sumberwungu Tepus)	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
54	PIS - Pelatihan Ketrampilan Masyarakat Perempuan Menuju Desa Prima	dunggubah II	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1	15.110.000	15.110.000	
55	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Dunggubah II	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	
56	PIS - Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Kalurahahan Karangtengah h	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	1	6.285.000	6.285.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Melindungi PPKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial;
b. Terwujudnya aksesibilitas PPKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
c. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
d. Terjaminnya PPKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;
e. Terjaminnya penghargaan bagi penjuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
f. Terjaminnya penyandang disabilitas, lanjut usia non potensial, eks penderita kronis dan penyandang psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar layak anak;
g. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
h. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di semua provinsi, kabupaten/kota.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan melalui penyediaan akses pendidikan, pelatihan, dan peluang ekonomi, sosial, serta politik yang inklusif;
b. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk ancaman, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi melalui penguatan kebijakan, pengawasan, serta sistem perlindungan yang terintegrasi;
c. Memperkuat kesetaraan gender dengan mengatasi hambatan struktural dan budaya yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional;
d. Meningkatkan peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam membangun lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak melalui kampanye edukatif, peningkatan kesadaran, serta kegiatan advokasi;
e. Mengoptimalkan kebijakan dan program berdasarkan data yang valid guna menjamin keberlanjutan serta efektivitas inisiatif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
f. Meningkatkan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional, untuk mempercepat pencapaian target pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dirumuskan dengan berdasar pada visi dan misi Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut :

a. Visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029
   “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”

b. Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif;
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban;
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dari visi misi kepala daerah kemudian dijadikan landasan penentuan strategi pembangunan dan arah kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 ditetapkan dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan lima tahun pertama sebagaimana digariskan dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul (RPJMD). Dimana RPJMD periode 2025-2029 diarahkan untuk pencapaian misi jangka panjang yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan perlindungan sosial yang inklusif. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mendukung dalam pencapaian urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan sasaran cakupan PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, kemandirian PPKS meningkat, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak meningkat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul

Dalam rangka melaksanakan fungsi Dinas Sosial, PPPA sebagai Perumus kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelaksanaan pelayanan dan kegiatan di Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pelaksanaan urusan kesekretariatan, maka diperlukan suatu perencanaan kerja yang baik dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya :

1. Masalah yang bersifat internal
   a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya;
   b. Belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan kantor yang berdampak kepada

kecepatan penyelesaian tugas;
   c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal karena dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas.
2. Masalah yang bersifat eksternal
   a. Tingginya angka kemiskinan;
   b. Belum optimalnya pemberdayaan PPKS;
   c. Belum optimalnya peran PSKS;
   d. Masih terdapat masyarakat yang memiliki mental miskin.
3. Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:
   a. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   b. Belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   c. Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
   d. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan tema pembangunan Tahun 2026, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian prioritas dan sasaran daerah kedua, keenam dan ketujuh, yaitu: Program Warga Sehat, Program Warga Gayeng dan Guyub dan Program Alam Lestari. Pengaliran prioritas daerah sampai kedalam indikator sasaran perangkat daerah yang menjadi sasaran utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030
1	Terwujudnya kesejahteraan sosial	Cakupan PPKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	88%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,07%

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Sasaran PD	Indukator sasaran PD	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan PPKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial	84
2	Terwujudnya kemandirian PPKS	Cakupan PPKS yang dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	65
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	85,75
3	Capaian pemberdayaan gender meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,5
4	Pemenuhan Hak Anak meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100

Indikator kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA PD, mengenai Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Terwujudnya kesejahteraan sosial	Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan, Jaminan Sosial, Dapat Hidup Mandiri Dan Berfungsi Sosial	84
2		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,47
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan	Cakupan PPKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial	84

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
	Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
4	Terwujudnya kemandirian PPKS	Cakupan PPKS yang dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	65
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	85,75
6	Capaian pemberdayaan gender meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,5
7	Pemenuhan Hak Anak meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada pencapaian Visi dan Misi Bupati Tahun 2025-2029, Kebijakan Umum Bupati, Prioritas Pembangunan, pencapaian SDGs, penanganan kemiskinan, Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Pengembangan wilayah miskin.

Rencana kerja dan pendanaan tersebut diatas mengacu pada Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat secara ekonomi dan sosial, serta kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sementara itu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah”. Oleh sebab itu Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2026 serta sumber dana kegiatan. Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah 13 program, 25 kegiatan dan 75 sub kegiatan;
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan difokuskan pada sasaran PPKS, Perempuan dan Anak;
3. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif sektoral (PIS), DBH CHT, Danais dan DAK-Non Fisik total anggaran Rp. 9.062.344.569,-;
4. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik serta Dana Keistimewaan DIY.

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioriras	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program warga sehat	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan PPKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial	84%	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	485.721.400	Dinsosp3a
					1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	485.721.400	Dinsosp3a
					1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25.020.000	Dinsosp3a
					1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	88.223.400	Dinsosp3a

Prioriras	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	362.178.000	Dinsosp3a
					1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	10.300.000	Dinsosp3a
					1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.779.882.900	Dinsosp3a
					1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.779.882.900	Dinsosp3a
					1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.389.074.000	Dinsosp3a
					1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	10.000.000	Dinsosp3a
					1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	55.339.000	Dinsosp3a
					1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10.000.000	Dinsosp3a
					1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	77.257.000	Dinsosp3a
					1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	32.176.000	Dinsosp3a

Prioriras	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		
					1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.500.000	Dinsosp3a
					1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6.000.000	Dinsosp3a
					1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	170.536.900	Dinsosp3a
					1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7.000.000	Dinsosp3a
					1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	Dinsosp3a
					1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000.000	Dinsosp3a
Program warga sehat	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera	Terwujudnya kemandirian PPKS	Cakupan PPKS yang dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	65%	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.202.193.400	Dinsosp3a

Prioriras	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.202.193.400	Dinsosp3a
					1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	184.338.500	Dinsosp3a
					1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	6.270.000	Dinsosp3a
					1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	887.976.900	Dinsosp3a
					1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	123.608.000	Dinsosp3a
Alam Lestari	Terwujudnya ketahanan sosial budaya, dan ekologi yang lestari	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan PPKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial	84%	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	348.548.000	Dinsosp3a
					1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	139.470.000	Dinsosp3a
					1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	120.000.000	Dinsosp3a
					1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	10.000.000	Dinsosp3a

Prioriras	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.470.000	Dinsosp3a
					1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	209.078.000	Dinsosp3a
					1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	20.395.000	Dinsosp3a
					1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	188.683.000	Dinsosp3a
Program warga sehat	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan PPKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial	84%	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	74.921.000	Dinsosp3a
					1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	74.921.000	Dinsosp3a
					1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	74.921.000	Dinsosp3a
					2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	250.000.000	Dinsosp3a
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	250.000.000	Dinsosp3a

Prioriras	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.22.08.5.07.0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan	100.000.000	Dinsosp3a
					2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	150.000.000	Dinsosp3a
Warga gayeng dan guyub	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang	Capaian pemberdayaan gender meningkat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,50%	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	371.142.000	Dinsosp3a
					2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	74.582.000	Dinsosp3a
					2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	49.157.000	Dinsosp3a
					2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	25.425.000	Dinsosp3a
					2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.085.000	Dinsosp3a
					2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan	2.875.000	Dinsosp3a

Prioriras	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		
					2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.210.000	Dinsosp3a
					2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	258.475.000	Dinsosp3a
					2.08.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	258.475.000	Dinsosp3a
					2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	12.610.000	Dinsosp3a
					2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.610.000	Dinsosp3a
					2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	12.610.000	Dinsosp3a

Prioriras	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemenuhan Hak Anak meningkat	Persentase Pemenuhan Hak Anak	100	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	74.406.000	Dinsosp3a
					2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	74.406.000	Dinsosp3a
					2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	6.000.000	Dinsosp3a
					2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	68.406.000	Dinsosp3a
					2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	216.925.500	Dinsosp3a
					2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.577.500	Dinsosp3a

Prioriras	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	119.577.500	Dinsosp3a
					2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.348.000	Dinsosp3a
					2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	72.433.000	Dinsosp3a
					2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24.915.000	Dinsosp3a
					2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	90.101.000	Dinsosp3a

Prioriras	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	90.101.000	Dinsosp3a
					2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	90.101.000	Dinsosp3a
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	400.660.000	Dinsosp3a
					2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.500.000	Dinsosp3a
					2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	101.500.000	Dinsosp3a
					2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.140.000	Dinsosp3a

Prioriras	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	136.937.500	Dinsosp3a
					2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	28.950.000	Dinsosp3a
					2.08.07.2.02.0011	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	11.212.500	Dinsosp3a
					2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	46.915.000	Dinsosp3a
					2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.125.000	Dinsosp3a
					2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	4.000.000	Dinsosp3a
					2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.020.000	Dinsosp3a

Prioriras	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	69.020.000	Dinsosp3a

Selaian program prioritas, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial PPPA juga melaksanakan program kegiatan yang secara tidak langsung mendukung pencapaian kinerja. Program kegiatan dilaksanakan di sekretariat sebagai unsur pendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan administrasi perkantoran. Program dan Kegiatan Pendukung tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi PD
Dinas Sosial PPPA Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju 2026	SKPD
1	2	3	4	5
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.755.233.369,00	3.978.495.708,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.404.000,00	112.775.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.355.000,00	19.273.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	70.362.000,00	73.880.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.125.000,00	2.231.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.210.000,00	4.421.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.357.000,00	2.475.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.995.000,00	8.395.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.100.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.630.638.569,00	2.746.808.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.613.201.669,00	2.727.627.000,00	Dinsosp3a

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju 2026	SKPD
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.085.000,00	2.294.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.261.900,00	1.388.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.090.000,00	15.499.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.900,00	11.551.858,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.900,00	551.858,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	11.000.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.815.400,00	333.098.450,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.779.500,00	10.758.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.272.000,00	190.599.550,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.002.900,00	8.803.100,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.320.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	11.000.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.561.000,00	110.617.800,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.001.000,00	60.501.400,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	55.001.000,00	60.501.400,00	Dinsosp3a

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju 2026	SKPD
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.906.500,00	114.297.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.106.500,00	112.317.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000,00	1.980.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.967.000,00	599.464.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	322.210.000,00	354.431.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.250.000,00	1.375.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.200.000,00	14.520.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	110.000.000,00	Dinsosp3a
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.307.000,00	119.138.000,00	Dinsosp3a

Hasil perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan prakiraan Maju Tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.646.500.069,00				8.067.215.843,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.646.500.069,00				8.067.215.843,00
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		82,32 Nilai	3.755.233.369,00			82,32 Nilai	3.978.495.708,00
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			107.404.000,00				112.775.000,00
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	4 Dokumen	18.355.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Dokumen	19.273.000,00
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	70.362.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	73.880.000,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunung kidul	1 Dokumen	2.125.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	2.231.000,00
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunung kidul	2 Dokumen	4.210.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	4.421.000,00
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunung kidul	2 Dokumen	2.357.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	2.475.000,00
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunung kidul	18 Laporan	7.995.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		18 Laporan	8.395.000,00
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunung kidul	4 Laporan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4 Laporan	2.100.000,00
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.630.638.569,00				2.746.808.000,00
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunung kidul	39 Orang/bulan	2.613.201.669,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		39 Orang/bulan	2.727.627.000,00
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunung kidul	1 Laporan	2.085.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	2.294.000,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Gunung kidul	1 Dokumen	1.261.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	1.388.000,00
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunung kidul	13 Laporan	14.090.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		13 Laporan	15.499.000,00
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.500.900,00				11.551.858,00
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunung kidul	1 Dokumen	500.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Dokumen	551.858,00
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunung kidul	53 Orang	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		53 Orang	11.000.000,00
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah			302.815.400,00				333.098.450,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunung kidul	1 Paket	9.779.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Paket	10.758.000,00
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunung kidul	5 Paket	173.272.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Paket	190.599.550,00
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunung kidul	2 Paket	8.002.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Paket	8.803.100,00
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunung kidul	247 Dokumen	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		247 Dokumen	1.320.000,00
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunung kidul	12 Laporan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	11.000.000,00
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunung kidul	12 Laporan	100.561.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	110.617.800,00
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah			55.001.000,00				60.501.400,00
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunung kidul	36 Unit	55.001.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		36 Unit	60.501.400,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			103.906.500,00				114.297.000,00
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunung kidul	12 Laporan	102.106.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	112.317.000,00
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunung kidul	12 Laporan	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	1.980.000,00
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah			544.967.000,00				599.464.000,00
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunung kidul	28 Unit	322.210.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		28 Unit	354.431.000,00
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Gunung kidul	25 Unit	1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		25 Unit	1.375.000,00
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunung kidul	32 Unit	13.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		32 Unit	14.520.000,00
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunung kidul	1 Unit	100.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	110.000.000,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunung kidul	2 Unit	108.307.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Unit	119.138.000,00
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Aktif		100 Persen	485.721.400,00			100 Persen	507.767.000,00
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	PSKS yang terfasilitasi dengan baik			485.721.400,00				507.767.000,00
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	900 Keluarga	25.020.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		900 Keluarga	27.522.000,00
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	5 Lembaga	88.223.400,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Lembaga	90.519.000,00
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Gunung kidul	88 Orang	362.178.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		88 Orang	378.396.000,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Kab. Gunung kidul	50 orang	10.300.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 orang	11.330.000,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya		100 Persen	1.779.882.900,00			100 Persen	1.877.772.000,00
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	PDT, AT, LUT dan Gepeng yang memperoleh bantuan sosial, pelayanan dan bimbingan keterampilan			1.779.882.900,00				1.877.772.000,00
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	1273 Orang	1.389.074.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1273 Orang	1.432.481.000,00
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	44 Orang	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		44 Orang	11.000.000,00
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	38 Orang	55.339.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		38 Orang	60.873.000,00
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	17 Orang	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		17 Orang	11.000.000,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	175 Orang	77.257.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		175 Orang	84.983.000,00
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	180 Orang	32.176.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		180 Orang	35.394.000,00
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	50 Orang	6.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 Orang	7.150.000,00
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	50 Orang	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 Orang	22.000.000,00
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	52 Orang	170.536.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		52 Orang	187.591.000,00
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	15 Orang	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		15 Orang	7.700.000,00
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	8 Orang	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		8 Orang	11.000.000,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	50 Orang	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 Orang	6.600.000,00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		84 Persen	1.202.193.400,00			84 Persen	1.257.363.600,00
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data PPKS yang valid			1.202.193.400,00				1.257.363.600,00
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Gunung kidul	551.947 Orang	184.338.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		551.947 Orang	202.722.600,00
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	100 Orang	6.270.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		100 Orang	6.897.000,00
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	1118 Orang	887.976.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1118 Orang	911.775.000,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Kab. Gunung kidul	500 Usulan	123.608.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		500 Usulan	135.969.000,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		100 Persen	348.548.000,00			100 Persen	363.404.000,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			139.470.000,00				148.417.000,00
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	300 Orang	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		300 Orang	127.000.000,00
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	100 Orang	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		100 Orang	11.000.000,00
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	85 Orang	9.470.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		85 Orang	10.417.000,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Lembaga yang terfasilitasi dalam kesiapsiagaan bencana			209.078.000,00				214.987.000,00
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	15 Kampung	20.395.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		15 Kampung	22.435.000,00
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	2244 Orang	188.683.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2244 Orang	192.552.000,00
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dan Monumen yang terkelola dengan baik		100 Persen	74.921.000,00			100 Persen	82.413.535,00
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMP dan Monumen yang terpelihara			74.921.000,00				82.413.535,00
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	31 Makam	74.921.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		31 Makam	82.413.535,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.415.844.500,00				1.614.216.750,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.165.844.500,00				1.164.216.750,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga PUG yang Aktif		100 Persen	371.142.000,00			100 Persen	375.256.500,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga PUG yang terfasilitasi			74.582.000,00				81.040.000,00
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Kab. Gunung kidul	3 Laporan	49.157.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Laporan	54.073.000,00
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kab. Gunung kidul	2 Lembaga	25.425.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Lembaga	26.967.000,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi perempuan yang terfasilitasi pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi			38.085.000,00				31.894.000,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Gunung kidul	1 Lembaga	2.875.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Lembaga	3.163.000,00
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Kab. Gunung kidul	130 orang	35.210.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		130 orang	28.731.000,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelompok perempuan yang mendapat pelatihan keterampilan ekonomi produktif untuk menuju desa prima			258.475.000,00				262.322.500,00
2.08.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Kab. Gunung kidul	485 orang	258.475.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		485 orang	262.322.500,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan kasus kekerasan perempuan		1,75 Persen	74.406.000,00			1,75 Persen	81.847.100,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan			74.406.000,00				81.847.100,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	50 orang	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 orang	6.600.000,00
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	50 orang	68.406.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		50 orang	75.247.100,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga		100 Persen	216.925.500,00			100 Persen	231.618.050,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga			119.577.500,00				131.535.250,00
2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	5 Lembaga	119.577.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		5 Lembaga	131.535.250,00
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terfasilitasi			97.348.000,00				100.082.800,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	1 Lembaga	72.433.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Lembaga	74.676.300,00
2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	1 Lembaga	24.915.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Lembaga	25.406.500,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase jenis data gender dan anak yang terkelola		100 Persen	12.610.000,00			100 Persen	13.371.000,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Data Gender dan Anak			12.610.000,00				13.371.000,00
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Gunung kidul	2 Dokumen	12.610.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2 Dokumen	13.371.000,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase hak anak dalam klaster Kabupaten Layak Anak yang dipenuhi		100 Persen	90.101.000,00			100 Persen	93.611.100,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang memfasiliasi pemenuhan hak anak			90.101.000,00				93.611.100,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	47 Lembaga	90.101.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		47 Lembaga	93.611.100,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Hasil evaluasi kabupaten layak anak klaster 5		168 Nilai	400.660.000,00			168 Nilai	368.513.000,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga lingkup daerah kabupaten/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak			101.500.000,00				81.150.000,00
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Gunung kidul	3 Dokumen	101.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak		3 Dokumen	81.150.000,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan pengaduan			230.140.000,00				231.941.000,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	100 Orang	136.937.500,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak		100 Orang	137.437.000,00
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	8 Orang	28.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak		8 Orang	29.450.000,00
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	6 Orang	11.212.500,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak		6 Orang	11.334.000,00
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	4 Orang	46.915.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak		4 Orang	47.115.000,00
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	8 Orang	2.125.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak		8 Orang	2.325.000,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunung kidul	10 Orang	4.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak		10 Orang	4.280.000,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SDM lembaga penyedia layanan bagi AMPK yang terlatih			69.020.000,00				55.422.000,00
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Kab. Gunung kidul	92 Orang	69.020.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak		92 Orang	55.422.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				250.000.000,00				450.000.000,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100 Persen	250.000.000,00			100 Persen	450.000.000,00
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan			250.000.000,00				450.000.000,00
2.22.08.5.07.0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	Kab. Gunung kidul	104 Orang	100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		104 Orang	150.000.000,00

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.08.5.07.0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Kab. Gunungkidul	6 Dokumen	150.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		6 Dokumen	300.000.000,00
Jumlah					9.062.344.569,00				9.681.432.593,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 diharapkan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

5.3.1. Melaksanakan program Peningkatan Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan Pendampingan Fakir Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Pelayanan Perlindungan dan jaminan Sosial;

5.3.2. Melaksanakan Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial melalui kegiatan Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Panti Sosial serta Pernyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dan Pengarusutamaan Disabilitas.

5.3.3. Melaksanakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

5.3.4. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat serta Mitra kerja sosial baik LSM, Orsos maupun Dunia Usaha terkait program serta anggaran;

5.3.5. Melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan IKU, SPM dan IKK yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing pihak dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ttd

MARKUS TRI MUNARJA

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu fungsi pemerintahan yang sangat *vital dan critical*, dengan pendekatan *bottom up voluntary* dalam mengatur kependudukan di Indonesia. Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikelola dengan pendekatan sistem sentralistik, tetapi dengan model kelembagaan semi vertikal, sebagai perwujudan urusan konkuren dalam prinsip otonomi daerah.

Demikianlah halnya dalam memberikan pelayanan kepada publik, aparat pemerintah harus mengetahui tentang administrasi kependudukan khususnya bagi pegawai yang bekerja di Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia). Upaya penguatan sumber daya penyelenggara layanan dukcapil harus selalu dilakukan terus menerus termasuk sumber daya manusia. Penguasaan terhadap regulasi aparat penyelenggara layanan dukcapil terhadap regulasi baru hanya bisa dilakukan apabila paradigma berpikir telah berubah mengikuti perkembangan yang telah terjadi.

Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan data kependudukan paling penting yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Swasta, karena bergerak dinamis dengan status yang berubah, oleh karena itu perlu terus dimutakhirkan dan dijaga keamanan datanya

Rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun berdasarkan Renstra 2021-2026, isu-isu strategis yang berkembang dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, serta aturan-aturan di bawahnya yang harus diterapkan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.

Selanjutnya agar semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dapat berhasil dengan baik maka perlu disusun perencanaan yang baik dan konsisten dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksi situasi dan kondisi yang akan terjadi dengan berbagai dukungan dan potensi yang dimiliki serta hambatan –hambatan yang mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di D.I Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
3. mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
4. mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
5. sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring, dan juga sabagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik pada bidang kependudukan dan pencatatan Sipil.

1.4. Sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan
- 4.2. Uraian garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP
- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 diperlukan hasil evaluasi tahun 2024 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp5.655.799.105,00 dengan penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp5.498.367.280, atau 97.22%. Berikut adalah tabel realisasi pelaksanaan renja dengan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024:

Tabel 2.1.
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024

No	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi anggaran		Saldo anggaran	
		(Rp)	Persen	(Rp)	Persen
1.	5.655.799.105	5.498.367.280	97,22	157.431.825	2,78

Adapun rincian penyerapan anggaran per program dan kegiatan disampaikan pada tebel berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 per Kegiatan

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Saldo anggaran	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2.12.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.340.931.605	4.217.644.835	97,16	123.286.770	
2.12.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.080.000	6.009.000	98,83	71.000	
2.12.1.2.01.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.230.000	3.221.000,00	99,72	9.000	
2.12.1.2.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000	99.000,00	99,00	1.000	
2.12.1.2.01.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000	99.000,00	99,00	1.000	
2.12.1.2.01.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	335.000	335.000,00	100,00	0	
2.12.1.2.01.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	390.000	360.000,00	92,31	30.000	
2.12.1.2.01.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	425.000	425.000,00	100,00	0	
2.12.1.2.01.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.470.000,00	98,00	30.000	
2.12.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.408.333.586	3.344.722.207	98,13	63.611.379	
2.12.1.2.02.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.405.544.586	3.341.959.407	98,13	63.585.179	
2.12.1.2.02.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	744.000	736.800	99,03	7.200	

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Saldo anggaran	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.1.2.02.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.045.000	2.026.000	99,07	19.000	
2.12.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.496.900	14.848.108	84,86	2.648.792	
2.12.1.2.05.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.496.900	14.848.108	84,86	2.648.792	
2.12.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	389.996.000	352.290.486	90,33	37.705.514	
2.12.1.2.06.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	795.000	771.500	97,04	23.500	
2.12.1.2.06.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267.156.000	251.104.698	93,99	16.051.302	Saldo pengadaan
2.12.1.2.06.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.446.000	12.165.160	97,74	280.840	
2.12.1.2.06.5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.743.000	23.643.000	99,58	100.000	
2.12.1.2.06.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	1.080.000	100,00	0	
2.12.1.2.06.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.750.000	5.749.500	99,99	500	
2.12.1.2.06.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.026.000	56.786.628	72,78	21.239.372	
2.12.1.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000	990.000	99,00	10.000	
2.12.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.176.850	257.933.376	98,01	5.243.474	
2.12.1.2.08.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.377.500	34.186.060	96,63	1.191.440	
2.12.1.2.08.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.801.750	152.347.316	97,78	3.454.434	
2.12.1.2.08.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.997.600	71.400.000	99,17	597.600	

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Saldo anggaran	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.848.269	241.841.658	94,53	14.006.611	
2.12.1.2.09.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.100.000	159.540.944	92,17	13.559.056	
2.12.1.2.09.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.300.000	9.082.500	97,66	217.500	
2.12.1.2.09.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.448.269	67.218.214	99,66	230.055	
2.12.1.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000	100,00	0	
2.12.2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.053.890.000	1.027.397.000	97,49	26.493.000	
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.053.890.000	1.027.397.000	97,49	26.493.000	
2.12.2.2.01.2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.025.900.000	999.416.000	97,42	26.484.000	Saldo pengadaan
2.12.2.2.01.5.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	27.990.000	27.981.000	99,97	9.000	
2.12.3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	125.772.500	123.217.000	97,97	2.555.500	
2.12.3.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	125.772.500	123.217.000	97,97	2.555.500	
2.12.3.2.01.1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	73.347.500	71.259.500	97,15	2.088.000	
2.12.3.2.01.2.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	52.425.000	51.957.500	99,11	467.500	
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	128.305.000	123.213.395	96,03	5.091.605	
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	89.695.000	84.934.000	94,69	4.761.000	

KODE	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Saldo anggaran	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.4.2.01.1.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	54.512.500	53.384.000	97,93	1.128.500	
2.12.4.2.01.2.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	35.182.500	31.550.000	89,68	3.632.500	
2.12.4.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	38.610.000	38.279.395	99,14	330.605	
2.12.4.2.03.3.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.860.000	37.535.395	99,14	324.605	
2.12.4.2.03.4.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	750.000	744.000	99,20	6.000	
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	6.900.000	6.895.050	99,93	4.950	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	6.900.000	6.895.050	99,93	4.950	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	6.900.000	6.895.050	99,93	4.950	
	JUMLAH	5.655.799.105	5.498.367.280	97,22	157.431.825	

Pelaksanaan program-program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tahun 2024, sebagai berikut:

2.1.1. PENDAFTARAN PENDUDUK

Program Pendaftaran Penduduk melaksanakan 3(tiga) indikator, yaitu cakupan kepemilikan KK, cakupan kepemilikan KTP dan cakupan kepemilikan KIA, dan program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.053.890.000,00 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.027.397.000,00 atau sebesar 97,49 persen dan capaian kinerja program sebesar 146,35 persen.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu: 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.053.890.000,00 dengan realisasi 2024 sebesar Rp1.027.397.000,00 atau sebesar 97,49 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp1.025.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp999.416.000,00 atau terserap 97,42 persen;
b. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Kependudukan, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp27.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.981.000,00 atau terserap 99.97 persen.

2.1.2. PENCATATAN SIPIL

Program Pencatatan Sipil melaksanakan 1(satu) indikator, yaitu cakupan kepemilikan akta kelahiran, dan program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
Anggaran untuk program ini sebesar Rp125.772.500,00 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp123.217.000,00 atau sebesar 97,97 persen dan capaian kinerja program sebesar 120,35 persen.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dengan 2 (dua) sub kegiatan. Anggaran pada kegiatan ini Rp125.772.500,00 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp123.217.000,00 atau sebesar 97,97 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Peristiwa Penting, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp73.347.500,00 dengan realisasi 2024 sebesar Rp71.259.500,00 atau terserap 97.15 persen;
b. Peningkatan Pencatatan Sipil, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp52.425.000,00 dengan realisasi 2024 sebesar Rp51.957.500,00 atau terserap 99,11 persen.

2.1.3. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melaksanakan 1(satu) indikator, yaitu Presentase PD yang memanfatatan data kependudukan, program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pengelolaan Data dan Inovasi Pelayanan.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp128.305.000,00 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp123.213.395,00 atau sebesar 82,69 persen dan capaian kinerja program sebesar 119,76 persen.

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Kegiatan 1) dengan 2 (dua) sub kegiatan. Anggaran pada kegiatan ini Rp89.695.000,00 dengan realisasi sampai tahun 2024 sebesar Rp84.934.000,00 atau sebesar 94,69 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp54.512.500,00 dengan realisasi 2024 sebesar Rp53.384.000,00 atau terserap 97,93 persen,
b. Kerja Sama Data Kependudukan, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp35.182.500,00 dengan realisasi 2024 sebesar Rp31.550.000,00 atau terserap 89,68 persen

Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Kegiatan 2), dengan 2 (dua) sub kegiatan. Anggaran pada kegiatan ini Rp38.610.000,00 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp38.279.395,00 atau sebesar 99,14 persen, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi AdministrasiPengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp37.860.000,00 dengan realisasi 2024 sebesar Rp37.535.395,00 atau terserap 99,14 persen,
b. Penyelanggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp750.000,00 dengan realisasi 2024 sebesar Rp744.000,00 atau terserap 99,20 persen

2.1.4. PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Program Pengelolaan Profil Kependudukan melaksanakan 1(satu) indikator, yaitu Presentase PD dan Kalurhan yang memanfatkaan data agregat, program ini dilaksanakan oleh bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Data dan Inovasi Pelayanan.

Anggaran untuk program ini sebesar Rp6.900.000,00 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.895.050,00 atau sebesar 99.93 persen dengan capaian kinerja program sebesar 100 persen.

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Profil Kependudukan dan 1 (satu) sub kegiaatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini Rp6.900.000 dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.895.050,00 atau sebesar 99.93 persen.

Untuk selanjutnya disampaikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 terhadap pencapaian target dapat dilihat tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	100				100		100
2.12.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perrencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	100	100			100	100	100
2.12.1.2.01.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Draft Renstra PD	1 dokumen	-	-	-	0	1	1	100
		Jumlah dokumen Renstra PD	1 dokumen	1	0	0	0	1	1	100
		Jumlah dokumen Renja	5 dokumen	2	1	1	100	1	4	80

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah dokumen Renja perubahan	5 dokumen	2	1	1	100	1	4	80
		Penyelenggaraan Forum PD	5 kali	1	1	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	2	2	2	100	2	6	75
2.12.1.2.01.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5 dokumen	2	1	1	100	1	4	80
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	1	1	1	100	1	3	75
2.12.1.2.01.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	5 dokumen	2	1	1	100	1	4	80
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	1	1	1	100	1	3	75
2.12.1.2.01.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	5 dokumen	2	1	1	100	1	4	80
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	5 dokumen	2	1	1	100	1	4	80
		Jumlah Dokumen ROPK	5 dokumen	2	1	1	100	1	4	80

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	3	3	3	100	1	5	62.5
2.12.1.2.01.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	5 dokumen	2	1	1	1	1	4	80
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	5 dokumen	2	1	1	1	1	4	80
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	2	2	2	100	1	4	75
2.12.1.2.01.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 dokumen	14	20	20	100	20	60	60
2.12.1.2.01.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	3	5	5	100	5	11	44
2.12.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	100	100					

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.1.2.02.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN terfasilitasi	70 bulan	23	14	11	78.57	14	48	68.57
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,800 orang	549	700	515	74	700	1249	45
2.12.1.2.02.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	2	1	1	100	1	3	60
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1	1	1	100	1	3	75
2.12.1.2.02.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Bulanan/SPJ	60 dokumen	21	12	9	75	12	60	100
		Jumlah laporan Semesteran	5 dokumen	2	1	1	100	1	5	100
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52 Laporan	-	13	13	100	13	16	30.76

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100					
2.12.1.2.05.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	350 ASN	134	0	0	0	0	269	76.85
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	-	6	6	100	6	6	100
2.12.1.2.05.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat / kursus	350 aparatur	88	0	0	0	0	221	63.14
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	266 orang	-	-	-	-	68	68	25
2.12.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum terlayani	100	100	100					
2.12.1.2.06.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang dibeli	20 jenis	20	0	0	0	0	20	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1	1	1	100	1	1	100
2.12.1.2.06.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	150 paket	57	4	3	75	4	114	78

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Laptop dibeli dibeli	6 unit	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Komputer PC dibeli	20 unit	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Printer dibeli	35 unit	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah PrinterKTP dibeli	20 unit	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Komputer Desain Editing	1 unit	-	-	-	-	1	1	100
		Jumlah ADM yang dibeli	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Alat Rekam yang dibeli	7 unit	1	1	1	100	1	2	28.57
		Jumlah Scanner dibeli	15 unit	0	-	-	-	5	5	33.33
		Jumlah UPSyang dibeli	32 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah AC yang dibeli	12 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah TV Display pelayanan yang dibeli	3 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah LCD Proyektor yang dibeli	2 unit	0	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Server yang dibeli	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah HDD server yang dibeli	4 unit	-	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 paket	4	4	4	100	4	4	100
2.12.1.2.06.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah macam peralatan kebersihan tersedia	20 jenis	28					46	230
		Jumlah bahan dan peralatan rumah tangga yang terbeli	16 paket	0	1	1	100	2	2	25
2.12.1.2.06.5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan tersedia	35 macam	14	0	0	0		55	157
		jumlah penggandaaan tersedia	462,000 lembar	17891	23,000	10,151	44.13	83,000	93,151	20.13
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	32 paket	0	1	1	100	2	2	25
2.12.1.2.06.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	60 bulan	21	12	9	75	12	42	70
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,460 dokumen	0	365	365	100	365	1095	75
2.12.1.2.06.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	21	12	12	100	12	48	100
2.12.1.2.06.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah minum dan snack rapat yang tersedia	4,559 OH	1024	959	959	100	959	1,918	42.07

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	1,880	0	0	0	0	30	30	1.6
		Jumlah konsultasi dan koordinasi (luar daerah) terfasilitasi	346 OH	30	32	19	59.38	62	81	23.41
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212 Laporan	0	12	12	12	74	12	34.90
2.12.1.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah rakor Go Digital dan inovasi pelayanan terfasilitasi	18 kali	3	3	3	100	3	6	33.33
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	3	2	2	100	2	7	59
2.12.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana								
2.12.1.2.07.1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Roling pack yang dibeli	21 Buah	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kursi Putar yang dibeli	20	-	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Papan Informasi yang dibeli	1	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Almari yang dibeli	1	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Almari arsip besi yang dibeli	2	-	-	-	-	2	2	100
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 paket	-	n/a	n/a	n/a	0	0	0
2.12.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7							
2.12.1.2.08.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	5,470 bulan	1226	1,075	906	84.28	1,075	1,981	36.22
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	12	12	12	100	12	36	75
2.12.1.2.08.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar	60 bulan	12	12	9	75	12	21	35
		Jumlah rekening listrik yang dibayar	60 bulan	12	12	9	75	12	21	35
		Jumlah rekening telepon yang dibayar	60 bulan	12	12	9	75	12	21	35
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	36	36	36	100	36	108	75

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.1.2.08.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan dibayar	10 termin	2	2	1	50	2	2	20
		Jumlah jasa retribusi sampah yang terbayar	60 bulan	12	12	9	75	12	21	35
		Jumlah jasa Front Ofiifce	4,940 orang	918	988	568	57.49	988	1,556	31.5
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	56 Laporan	14	14	14	100	14	42	75
2.12.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11							
2.12.1.2.09.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	27 unit	27	27	5	18.52	27	32	118.52
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	5 unit	5	5	2	40	6	7	140
		Jumlah roda 2 yang terpelihara	27 unit	27	27	26	96.3	27	53	196.3
		Jumlah roda 4 yang terpelihara	5 unit	5	6	6	100	6	10	200

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	276 unit	34	34	34	100	69	209	75.7
2.12.1.2.09.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang dipelihara	24 unit	7	5	2	-	5	7	29.17
		Jumlah LCD yang dipelihara	10 unit	1	2	-	-	2	2	20
		Jumlah mesin ketik yang dipelihara	5 unit	1	1	1	-	1	2	40
		Jumlah Notebook yang dipelihara	16 unit	3	3	2	-	3	5	31.25
		Jumlah Printer KTP yang dipelihara	1 LS	0	-	-	-	1	1	100
		Jumlah printer yang dipelihara	24 unit	8	5	5	-	5	10	41.67
		Jumlah UPS yang dipelihara	17 unit	-	4	-	-	4	4	23.53
		Jumlah Mesin Fax yang dipelihara	5 unit	-	1	-	-	1	1	20
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 unit	20	20	20	100	20	60	75
2.12.1.2.09.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kamar mandi yang terpelihara	60 unit	10	12	5	41.67	12	17	28.33

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah pemeliharaan/pengecatan Pagar	876	292	292	20	6.85	292	312	35.62
		Jumlah Pemeliharaan lantai	200	40	40	40	100	40	40	20
		Jumlah Pemeliharaan Ruang Pelayanan	180	60	60	60	100	60	60	33.33
		Jumlah Pemeliharaan pintu	20	3	4	2	50	4	6	30
		Jumlah pemeliharaan/pengecatan dinding	1,800	0			-	-	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	2	1	1	100	1	3	75
2.12.1.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	159 unit	21	21	8	38.1	21	29	18.24
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	80 unit	20	20	20	100	20	60	75

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan KTP;Cakupan Kepemilikan KK;Cakupan Kepemilikan KIA	99;99; 90 persen	99,56; 99,97; 80,88	99;99; 80	99,07; 99,77; 85,26		99;99; 85		
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk	5 jenis	5	5	5	100	5	5	100
2.12.2.2.01.2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan	200,000 Dokumen	29,048	40,000	40,373	100.93	40,000	80,373	40.19
		Jumlah KTP yang diterbitkan	225,000 Keping	54,085	45,000	38,488	85.53	45,000	83,488	37.11
		Jumlah KIA yang diterbitkan	100,000 Keping	54,983	20,000	11,413	57.07	20,000	31,413	31.41
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	420,000 dokumen	138.116	105.000	121.481	110.81	116.000	375.597	89.4
2.12.2.2.01.5.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pendataan penduduk rentan	8 kali	1	-	-	-	-	-	-
		Jumlah penduduk pindah datang	30,000 orang	4,261	6,000	6,074	101.23	6,000	12,074	40.25
		Jumlah penduduk pindah pergi	28,000 orang	6,754	5,600	6,486	115.82	5,600	12,086	43.16
		Jumlah perekaman data KTP bagi manula dan difabel	2,500 orang	223	500	122	24.4	500	622	24.88

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah perekaman data KTP bagi pemula	6,000 orang	1,015	1,200	54	4.5	1,200	1,254	20.9
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	46,400 dokumen	12.253	11.600	18.474	181,90	12,700	43.427	93,5
2.12.3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Catatan Sipil	54 persen	52.46	51	53.93	105	52.5	53,95	102
2.12.3.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Dokumen Catatan Sipil Yang terlayani	5 jenis	5	5	5	5	5	5	100
2.12.3.2.01.1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang di terbitkan	55,000 akta	12,309	11,000	8,695	79.05	11,000	19,695	35.81
		Jumlah akta kematian yang di terbitkan	40,000 akta	10,776	8,000	7,055	88.19	9,000	16,055	40.14
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	76,000 dokumen	23.085	19.000	23.277	122	19,000	65.362	86
2.12.3.2.01.2.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pencatatan perkawinan yang dilaksanakan	750 akta	172	150	118	78.67	150	268	35.73
		Jumlah pencatatan perceraian yang dilaksanakan	150 akta	36	30	27	90	30	57	38

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah pencatatan status anak dan pewarganegaraan	75 akta	32	15	23	153.33	15	38	50.67
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	12 Layanan	3	3	3	100,00	3	9	75
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi Adminduk	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.4.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pelayanan data dan kerjasama pemenfaatan data yang terlayani	100 100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.4.2.01.1.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen yang diproses secara digital	225,000 berkas	30,000	11,000	22,421	203.83	45,000	67,421	29.96
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	44,000 dokumen	11.000	9000	13.416	125	11,000	35.416	80.49
2.12.4.2.01.2.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dalam hal pemanfaatan Data aadminduk oleh PD/lembaga	46 PKS	-	5	2	40	5	7	15.22
		Jumlah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan	85 Kerjasama	46	17	49	288.24	17	66	77.65
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	92 Layanan	7	1	1	100	1	8	8.6

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.4.2.01.3.	Inventarisasi Data untukKepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk terlaksana	5 Inovasi	-	1	1	100	1	2	40
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	4 Laporan	-	n/a	n/a	n/a	0	0	0
2.12.4.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
2.12.4.2.03.3.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jaringan SIAK yang dipelihara	95 Lokasi	19	19	13	68.42	19	32	33.68
		Jumlah peserta pelatihan SIAK yang terfasilitasi	150 orang	-	30	35	116.67	30	65	43.33
		Jumlah kalurahan yang dievaluasi tertib adminduk	90 kalurahan	-	-	-	-	18	18	20
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	140 Laporan	35	35	25	100	12	95	67,85
2.12.4.2.03.4.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah layanan data yang terselenggara	30 layanan	30	30	25	83.33	30	55	183.33
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	120 dokumen	30	30	39	130	30	99	82.5

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.12.4.2.03.7.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Adminduk yang dilaksanakan	60 kali	-	11	11	100	18	29	48.33
		Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	150 Lokasi	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	72 dokumen	18	-	-	-	15	33	45
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data Agregat	100	100	100	100	100	100	100	
2.12.5.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyediaan data agregat	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.4.2.01.1.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor penyusunan data agregat terfasilitasi	20 kali	-	4	2	50	4	6	30
		Jumlah buku agregat yang dicetak	1,800 buku	334	360	180	50	360	540	30
		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	8 dokumen	2	2	2	2	2	4	50
2.12.4.2.01.2.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah rakor penyusunan profil kependudukan terfasilitasi	15 kali	-	n/a	n/a	n/a	3	6	40

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(*Outcome*)/ Kegiatan(*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah buku profil kependudukan yang dicetak	900 buku	180	n/a	n/a	n/a	180	360	40
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	4 dokumen	-	n/a	n/a	n/a	0	0	0

Dari data sebagaimana Tabel 2.3 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 5 (lima) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 11 (sebelas) kegiatan, 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 2 indikator yang melampaui target; yaitu program pendaftaran penduduk sebesar 146,35%, pencatatan sipil 120,25% dan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan 119,76%;
   c. Capaian indikator 100% sesuai dengan target padprogram pengelolaan informasi administrasi kependudukan, program pengelolaan profil kependudukan dan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
   d. Dari 35 indikator kinerja sub kegiatan ada 4 sub kegiatan yang melampaui capaian 100%, yaitu sub kegiatan
      - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk sebesar 110,81%;
      - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan sebesar 181,90%;
      - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting sebesar 122% dan
      - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebesar 203,83%.
   e. Dari 35 indikator kinerja sub kegiatan, tidak terdapat indikator yang belum memenuhi target.

2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) urusan, 5 (lima) program dengan 5 (lima) indikator kinerja program dan 11 kegiatan, 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja sub kegiatan;
   b. Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 2 indikator yang melampaui target, yaitu: program pendaftaran penduduk sebesar 106% dan pencatatan sipil 102%;
   c. Capaian indikator 100% sesuai dengan target pada program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, program pengelolaan profil kependudukan dan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
   d. Dari 35 indikator kinerja sub kegiatan, tidak ada indikator belum memenuhi target.

3. Faktor pendorong keberhasilan dan faktor penghambat keberhasilan program/kegiatan adalah:
   Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah:
   a. adanya komitmen serta kolaborasi Pimpinan dan staf berkolaborasi dalam pelayanan prima yang membahagiakan masyarakat;

b. adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket (KK, KTP, KIA dan akta kelahiran/kematian/kematian/perceraian/perubahan nama/pengakuan dan pengesahan anak)
c. koordinasi lintas sektor;
d. adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dukcapil, terutama layanan keliling jemput bola akta catatan sipil.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah

a. pelaksanaan program/kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
b. sarana dan prasarana perlu diupgrade untuk percepatan layanan;
c. kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK)
d. pelaksanaan kegiatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan bergantung pada kebutuhan OPD dan mitra kerja dalam pemanfaatan data kependudukan;
e. pelaksanaan PKS terkendala pada regulasi ISO 27001 tentang keamanan data;
f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan data agregat dan profil kependudukan berdasarkan rilis data kependudukan yang dihasilkan oleh sistem SIAK dirilis oleh Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap semester.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD, realisasi capaian program terhadap target renstra PD dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan tujuan PD yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan, sehingga dapat menjadi dasar proyeksi capaian pada tahun berikutnya.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penghambat keberhasilan program/kegiatan, yaitu:
   a. merencanakan penganggaran sosialisasi dan pelayanan jemput bola dengan menyusun kamus usulan kegiatan PIS dan PIWK;
   b. merencanakan penganggaran pemeliharaan sarana dan prasarana SIAK, terutama peralatan rekam KTP dan cadangan hardisk server;
   c. merencanakan penganggaran kerja sama pemanfaatan data kependudukan.

Sedangkan indikator kinerja telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahun 2026 dan sudah disesuaikan dengan Perubahan Renstra PD 2021-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, yang meliputi:

1. Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Kegiatan pelayanan pencatatan sipil;
3. Kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
4. kegiatan pengelolaan data dan inovasi pelayanan, serta
5. kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah.

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dengan tujuan membahagiakan masyarakat menggunakan beberapa inovasi Pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

1. SIPANJANG (Sistem Pelayanan Sampai ke Ranjang) Pelayanan yang diperuntukkan bagi Warga Jompo dan Difabel yang tidak bisa datang perekaman di Kapanewon, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendatangi rumah penduduk;
2. SIBADU (Sistem Isbat Terpadu) Pelayanan ini merupakan Pelayanan Terpadu antara Pengadilan Agama, KUA (Kantor Urusan Agama), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dari Penetapan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah sehingga bisa diterbitkan Akta Nikah oleh KUA dan diterbitkannya Akta Kelahiran bagi anak dari pasangan suami-istri tersebut;
3. PAKET LATIKA (Pelayanan Kelurahan Cepat Lahir Mati, KK, KIA) Dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran, akta kematian, penerbitan KK, dan Pembuatan KIA dapat dilakukan di Kelurahan tanpa harus ke Dinas untuk peristiwa tidak lebih dari 5 hari;
4. PEKA LATIKA PRIMA Pelayanan Kapanewon untuk penerbitan akta kelahiran, akta kematian, KK dan KIA menuju Pelayanan PRIMA;
5. PUNTADEWA merupakan inovasi pelayanan berupa Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan WA. Inovasi ini muncul sebagai solusi pelayanan yang lebih aman sesuai protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 karena meminimalisir pelayanan tatap muka).
6. SMART atau Sistem Manajemen Registrasi Terintegrasi adalah pengembangan dari Aplikasi SIMPEL Dukcapil yang terintegrasi dengan Inovasi Peka Latika Prima, Paket Latika di Kalurahan dan Rumah Sakit serta Pengarsipan Digital. Dalam pengembangannya aplikasi ini bertujuan:
   a. Mendekatkan Pelayanan
      Aplikasi SMART dapat memfasilitasi Layanan Pendaftaran adminduk dari level Kalurahan/Desa, faskes PKS, Kapanewon, MPP dan pelayanan di dinas sendiri.
   b. Pembagian Tugas
      Aplikasi SMART dapat membantu distribusi pekerjaan hingga level Operator Kecamatan, sehingga beban kerja Operator Dinas dapat terbagi secara merata.
   c. Kontrol dan Pengawasan
      Pimpinan dapat melihat beban kerja setiap Operator Dukcapil dan mengetahui progres pengerjaan produk Dukcapil.

d. Digitasilsasi Arsip
   Setiap permohonan yang diinput pada Aplikasi SMART akan terarsipkan secara digital. Berkas Permohonan tersimpan pada aplikasi ini dalam bentuk PDF.

7. TANDUK RUSA (Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru Pasca Nikah)
   Inovasi ini merupakan sinergitas Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Kantor Kemenag. Kabupaten Gunungkidul dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk yang melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama di kapanewon se Kabupaten Gunungkidul.
8. PELIPUR HATI (Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru Habis Terbit Akta Cerai)
   Inovasi ini merupakan kerja sama Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pasca peristiwa perceraian penduduk.
9. BULAN SABIT (Ibu melahirkan Semua Dokumen Kependudukan Terbit)
   Inovasi penerbitan dokumen kependudukan (KK dan KIA) dan pencatatan sipil (akta kelahiran) kerja sama dengan rumah sakit dan lembaga kesehatanlainnya;
10. Etan Silir (eBook Persyaratan dan Petunjuk Pengisian Formulir Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul);
11. GPS (Gerakan Pambela Sungkawa)
    Layanan penerbitan Akta Kematian beserta KK dan KTP keluarga dan ucapan bela sungkawa dari Kabupaten Gunungkidul atas nama Bupati Gunungkidul diberikan pada saat upacara pemberangkatan jenazah;
12. SIAKMADU (Sidang Akta Kematian Terpadu)
    Merupakan inovasi kerja sama antara Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengadilan Negeri Wonosari untuk penerbitan akta kematian yang tidak memiliki data pendukung, dengan fasilitas sidang terpadu di luar gedung pengadilan, dan setelah mendapatkan penetapan PN akan langsung diterbitkan akta kematian.

Inovasi pelayanan tersebut di atas telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 52/KPTS/2024, tentang : Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, sehingga pelayanan adminduk semakin berkualitas dan dapat membahagiakan masyarakat.

Beberapa dokumentasi kegiatan pelayanan adminduk serta implementasi inovasi pelayanan dapat sampaikan sebagai berikut :

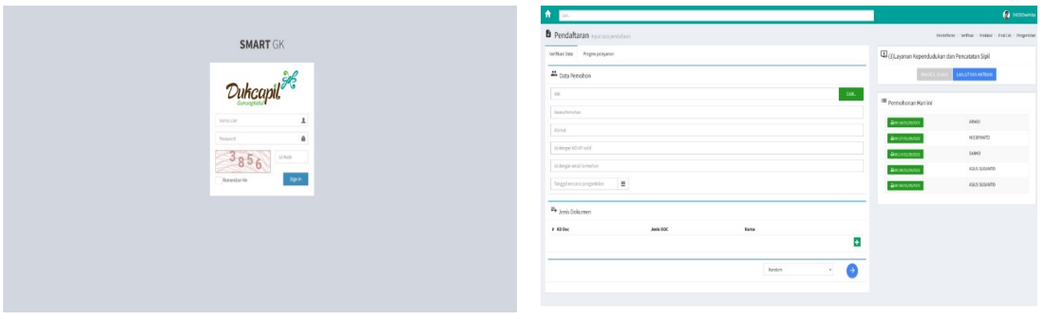

Gambar 2.1 Aplikasi SMART Inovasi Pelayanan Admiduk

Gambar 2.2 Pelayanan pencatatan perkawinan di luar kantor

Gambar 2.3 Pelayanan di Mall Pelayanan Publik pada Terminal Dhaksinarga

Gambar 2.4 Pelayanan Sidang Isbat

Gambar 2.5 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Kalurahan dan Mitra

Gambar 2.6 Pelayanan jemput bola akta catatan sipil

Gambar 2.7 Perekaman KTP dan KIA Jemput Bola Pemula , Manula dan Difabel

Gambar 2.8 Gerakan Pambela Sungkawa

Gambar 2.9 Distribusi KTP ke sekolah menjelang Pemilu 2024

Gambar 2.10 Inovasi Tanduk Rusa

Gambar 2.11 Perekaman KTP Paskibraka se Kabupaten Gunungkidul

Gambar 2.14. Zona Integritas

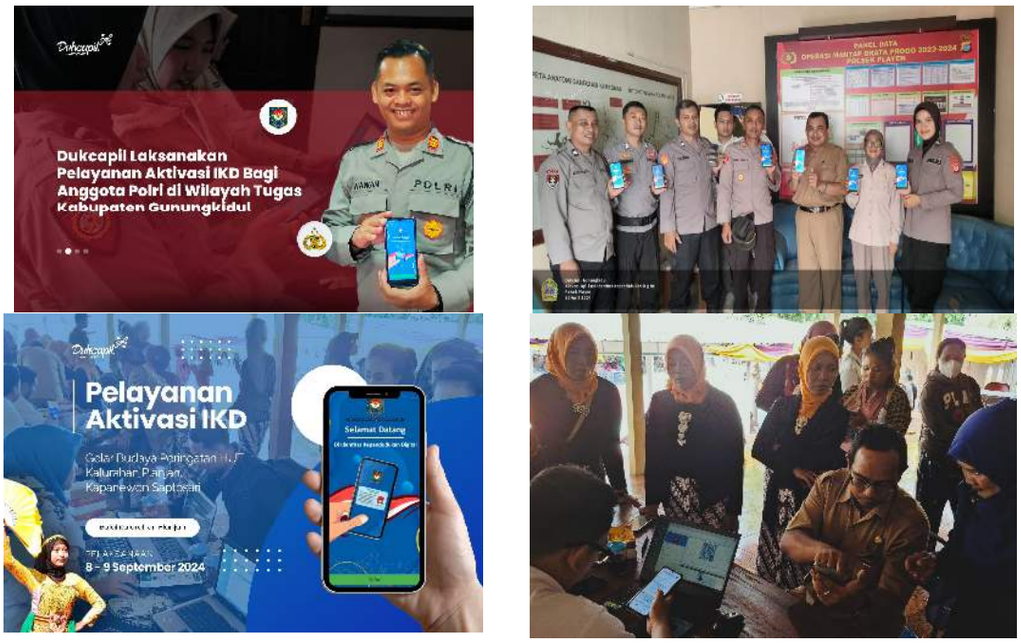

Gambar 2.12 Aktivasi IKD

Gambar 2.13 Pengumuman Layanan Dukcapil di hari Libur Nasional

Sedangkan kegiatan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi Dinas itu sendiri yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Kesekretariatan, terdiri dari 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (delapan) kegiatan yaitu:
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
        3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
        4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
        5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
        6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
        7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
    3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
    2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
    5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
    8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
    4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Kegiatan Teknis
   Kegiatan teknis berada di bidang terdiri dari 4 program prioritas, yaitu:
   a. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
      Pelayanan Pendaftaran Penduduk
      1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk;
      2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;

b. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
   Pelayanan Pencatatan Sipil
   1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting;
   2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

c. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
   Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
   1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
   2) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;

   Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
   2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
   3) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

d. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
   Penyusunan Profil Kependudukan
   1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota;

Untuk mengukur kinerja yang akan dicapai diperlukan indikator target yang akan dicapai. Pencapaian target tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja. Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul maka Bupati menetapkan Indikator Kinerja Utama yang kemudian ditindaklanjuti dengan Indikator Kinerja Program oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai gambaran target dan proyeksi pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama oleh Bupati dan Indikator Kinerja Program Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dapat disampaikan sebagaimana dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3.
Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terhadap Renstra PD Tahun 2021-2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian Target Renstra PD		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	INDIKATOR KINERJA UTAMA										
1	Indeks tertib administrasi kependudukan tahun 2026	Persen	75,4 %	77,2%	78,6%	80%	88,37%	89,22%	89,25%	89,27%	Pertumbuhan ini sangat dipengaruhi indikator nomor 4 yang realisasi capaiannya masih sangat rendah karena merupakan capaian rata-rata
	Persentase penerbitan KTP	Persen	99%	99%	99%	99%	99,56%	99,04%	99.05%	99,06%	Untuk mencapai angka 100% sangatlah sulit karena sangat dipengaruhi pindah penduduk serta jumlah penduduk wajib KTP
	Persentase penerbitan KK	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Untuk indikator capaian ini sebenarnya kepemilikan sudah 100% karena KK yang terdaftar pada hasil registrasi pelayanan SIAK dan pasti sudah diterbitkan KKnya.
	Persentase penerbitan KIA	Persen	70%	80%	85%	90%	80,88%	85,26%	85,30%	91%	Target ini sudah di atas rata-rata nasional

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian Target Renstra PD		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase penerbitan akta kelahiran	Persen	48%	49,5%	51%	52,5%	52,45%	53,85%	53,90%	53,95%	Capaian akta kelahiran untuk semua umur masih sangat rendah
B.	IKK										
	Kepemilikan KTP	Persen	99%	99%	99%	99%	99,56%	99,04%	99.05%	99,06%	Untuk mencapai angka 100% sangatlah sulit karena sangat dipengaruhi pindah penduduk serta jumlah penduduk wajib KTP
	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (usia 0-18 tahun)	per 1000 orang	590	600	610	620	592	991	1011	1031	Capaian akta kelahiran untuk semua umur masih sangat rendah
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
	Nilai AKIP PD	Persen	81,2	81,04	81,06	81,08	82,40	83,34	83,40	83,50	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.1 Penguatan Dukcapil untuk Pelayanan Publik.

Peningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui layanan integrasi dan/atau jemput bola serta pemutakhirkan data keluarga untuk mendukung peningkatakan SPM Kabupaten Gunungkidul terkait elemen data tingkat pendidikan penduduk, diharapkan masyarakat dapat dengan lebih mudah dan efisien mengurus dokumen kependudukan yang mereka butuhkan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang akan mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam mengelola data kependudukan secara lebih baik serta terlaksananya penerapan Zona Integritas (ZI) predikat WBBM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Secara umum masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, atau tidak ada hambatan dan kendala, akan tetapi secara teknis ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapai diantaranya :

a. Pengadaan blangko KTP-el terpusat di Kemendagri harus mengambil ke Pusat dan atau ke provinsi;
b. Kualitas dan kuantitas perangkat pelayanan Adminduk tidak memadai, sarana dan prasarana perekaman biometrik KTP elektronik di semua kapanewon dan dinas sejak tahun 2011 belum semua dilakukan peremajaan baru 12 (duabelas) set pengadaan dengan rincian tahun 2019 sejumlah 2 (dua) set, tahun 2020 sejumlah 8 (delapan) set, tahun 2022 sebanyak 1 (satu) set, tahun 2024 sejumlah 1 (satu) set;
c. Belum tersedianya sarana prasarana yang update sesuai perkembangan dinamika kebutuhan pelayanan;
d. Kesadaran mencari akta kelahiran belum optimal di kalangan penduduk yang berusia tua hal ini terbukti angka kepemilikan Akta baru 53,26% dan total penduduk yang didominasi anak usia 0-17 tahun dengan tingkat kepemilikan 99.02%;
e. Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah;
f. Terbatasnya SDM baik pada bidang pelayanan maupun administrasi, terutama sekali pada bidang pelayanan masyarakat sehingga pada saat adanya pelayanan di luar kantor dinas seperti layanan jemput bola harus mengurangi SDM yang juga melakukan pelayanan, serta kurangnya operator SIAK untuk ditempatkan di kapanewon. Keadaan seperti ini tentunya akan mengurangi kinerja untuk mencapai target pelayanan yang harus dicapai. Belum lagi apabila ada yang sakit dan cuti, serta adanya mutasi dan pensiun ASN;
g. Ruang penyimpanan arsip sudah penuh, dan usulan gedung arsip belum terealisasi, serta jabatan arsiparis Dukcapil baru 1 pegawai;
h. Sejak tahun 2022 tidak ada dukungan APBN untuk pelayanan Adminduk di daerah dan kurangnya dukungan APBD;

i. Belum sepenuhnya dapat melaksanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan belum optimalnya kesadaran jajaran Dukcapil dalam memahami keamanan data kependudukan;
j. Sistem insentif kepada petugas registrasi dan operator adminduk kalurahan.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan pembangunan berkelanjutan

Beberapa hambatan tersebut tentunya akan berpengaruh dengan kinerja pelayanan dinas terkait dengan pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama yang tetapkan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan :
   1) Jumlah SDM aparatur belum memenuhi standarisasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dan kesekretariatan ;
   2) Keterbatasan sarana prasarana (jumlah dan spesifikasi) seperti komputer, scanner, printer KTP-el untuk pelayanan; ruang pelayanan dan sarana kearsipan (gedung dan arsiparis), sarana parkir yang memadai (LHE Irda); serta sarana mobilitas untuk mendukung pelayanan;
   3) Belum semua PD terkoneksi dengan DISDUKCAPIL dalam pemanfaatan data kependudukan dan memenuhi standar ISO 27001;
   4) Keamanan sistem informasi data belum memadai;
   5) Pagu anggaran terbatas.

b. Peluang :
   1) Perkembangan IT;
   2) Forum Lintas Sektor dalam sosialisasi kebijakan dan layanan adminduk;
   3) Kebijakan SATU DATA Indonesia;
   4) Kebutuhan masyarakat untuk layanan secara online yang mudah diakses oleh masyarakat;
   5) Kebutuhan masyarakat untuk layanan secara jemput bola one day service;
   6) Kebutuhan data kependudukan oleh pemangku kepentingan.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting yang berupa rekomendasi dan catatan strategis

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

a. Penguatan SDM aparatur adminduk, diperlukan penguatan SDM aparatur penyelenggara adminduk yang memiliki kompetensi/talenta digital, budaya digital, dan literasi digital. Kondisi SDM sampai dengan 28 Februari 2025 ada 49 orang ASN, dengan distribusi 18 orang di Kapanewon dan 2 orang di

Mall Pelayanan Publik dan juga ada kekosongan 1 pejabat Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Latar belakang pendidikan aparatur penyelenggara Adminduk umumnya masih minim berkaitan dengan teknologi informatika, untuk itu perlu dilakukan *capacity building* yang berstandar nasional sesuai dengan kebutuhan kompetensi, hal ini memerlukan perencanaan recruitment ASN pengelola Adminduk yang memiliki kompetensi IT serta permasalahan jabatan fungsional ADB Kependudukan dan Operator SIAK yang belum implementatif.

b. Pelaporan peristiwa kematian belum dilaksanakan secara optimal.
   Sudah menjadi kebiasaan warga yang meninggal banyak yang belum dilaporkan hal tersebut mengakibatkan jumlah penduduk tidak berkurang karena tidak diterbitkan akta kematiannya juga mengakibatkan tagihan jaminan kesehatan kepada daerah oleh BPJS terus dilakukan.

c. Penyelenggaraan Adminduk berkembang progresif dari pelayanan SIAK terdistribusi menjadi SIAK Terpusat dengan bertransformasi ke layanan online yang terstandar secara nasional ditandai dengan Dukcapil Go-Digital, Digital-Signature (D-Sigh), layanan cetak berbasis kertas putih, layanan cetak mandiri, Anjungan Dukcapil Mandiri serta aktivasi IKD saat ini.

d. Identitas Kependudukan Digital (IKD) dipersiapkan menjadi identitas digital untuk perorangan sebagai Single Sign On untuk implementasi 9 (sembilan) aplikasi SPBE Prioritas yaitu layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian.
   Saat ini juga digencarkan aktivasi IKD yang pada saatnya nanti menjadi salah satu instrumen pelayanan publik bagi masyarakat.
   Pada aplikasi IKD terdapat dokumen kependudukan penduduk, yaitu Kartu Keluarga dan KTP, sehingga penduduk apabila memerlukan dokumen tersebut tinggal membuka IKD tanpa harus menunjukan fisik dokumen kependudukan.
   Pelayanan adminduk dapat dilakukan dengan IKD dengan berbagai fitur layanan, sehingga msyarakat yang sudah aktivasi IKD setap saat dapat mengakses layanan adminduk dengan IKD tanpa harus datang ke tempat layanan di dinas maupun kapanewon. Layanan adminduk melalui IKD antara lain permohonan perubahan biodata (golongan darah dan pendididkan), cetak Kartu Keluarga dan biodata WNI, pisah/pecah KK, pindah penduduk, akta kelahiran (anak belum memiliki NIK) dan kelahiran WNI (biodata telah memiliki NIK), serta akta kematian.

e. Belum semua penduduk wajib KTP (manula, sakit dan disabilitas) mempunyai KTP.

Wajib KTP usia tua dan disabilitas memang sangat terbatas kemampuannya dalam mengakses layanan, untuk itu guna mengatasi hal tersebut dilakukan pelayanan secara jemput bola, meskipun belum dapat tertangani semua karena jumlah personil terbatas juga lokasi yang menyebar semua wilayah Kapanewon.

f. Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk semua umur serta masih adanya keterlambatan mengurus akta kelahiran kelompok usia 0-18 tahun padahal untuk kelompok ini sangat penting untuk kelengkapan administrasi.
Kelompok usia lanjut banyak yang beranggapan kurangnya manfaat akta kelahiran hal ini terbukti masih dijumpai di kalangan ASN saja ada yang mengurus akta kelahiran menjelang usia pensiun apalagi masyarakat umum, demikian juga masih adanya keterlambatan mengurus akta kelahiran usia anak dan terbukti denda administrasi keterlambatan yang masuk masih cukup besar pada Tahun 2020, namun sekarang sudah gratis untuk semua jenis pelayanan dengan diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan atau mendorong masyarakat lebih bersemangat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

g. Penerbitan KIA belum optimal
Dokumen identitas anak berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai dicanangkan mulai Tahun 2016, dalam pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan karena belum dimanfaatkan sebagai persyaratan dalam administrasi suatu institusi misal persyaratan masuk sekolah, sehingga masih banyak warga menganggap kurang penting. Sampai saat ini capaian kinerja penerbitan KIA baru 85.26% dari seluruh jumlah anak dan untuk meningkatkan capaian kinerja kedepan KIA menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama dinas.

h. Ditjen Dukcapil mewajibkan lembaga pengguna data kependudukan menerapkan standar keamanan dan memiliki sertifikat standar keamanan dengan prioritas Standar Nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber.

2.4 Review terhadap Rancangan Kerja Pemerintah Daerah

Dari hasil review analisis rancangan Renja PD terhadap RKPD pada tabel 2.4 disajikan Review Rancangan Awal Rencana Kerja PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10.051.878.711,00 sesuai dengan pagu anggaran pada Renstra PD dan analisis kebutuhan pagu sebesar Rp6.143.759.327,10 berbeda dengan rancangan awal RKPD. Perbedaan dengan rancangan awal RKPD dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penghapusan sub kegiatan;
   - Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah;
   - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain;
   - Pengadaan Mebel.

b. Besaran pagu anggaran program dan kegiatan disesuaikan kebutuhan rencana anggaran dan pagu indikatif PD tahun 2026.

Tahun Anggaran 2026 pada kegiatan dan sub kegiatan sudah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Table 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					9,573,217,820					5.212.928.447	
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Cakupan kepemilikan KTP;Cakupan kepemilikan KK; Cakupan kepemilikan KIA	99; 99; 90 persen	444.130.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	20 persen	650.819.000	
								Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	85,26 persen		
1.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Jenis Dokumen Kependudukan yang terlayani	5 Jenis	444.130.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk		650.819.000	
1.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	120000 Dokumen	355.065.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	120000 Dokumen	468.108.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	11600 Dokumen	89.065.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	11600 Dokumen	164.711.000	
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Cakupan kepemilikan akta catatan sipil	54 persen	126.742.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	99,6 persen	104.636.000	
								Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	100 persen		
								Persentase Penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	85 persen		
								Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	85 persen		
2.1.	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah jenis Dokumen Catatan Sipil yang terlayani	5 Jenis	126.742.000	Pelayanan Pencatatan Sipil		Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil		104.636.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	19000 Dokumen	35.785.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	19000 Dokumen	74.636.000	
2.1.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Gk	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	90.957.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Gk	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	30.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk	100 persen	511.941.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	100 persen	224.574.500	
3.1.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah Pelayanan Data dan Kerja sama pemanfaatatn data yang terlayani	1 PKS	243.005.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		91.203.000	
3.1.1.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	11000 Dokumen	155.432.00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	11000 Dokumen	54.450.000	
3.1.2.	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	81.273.000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	36.753.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.3.	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Gk	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	6,300,000						
3.2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terlaksana	3 Kegiatan	268.936.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		133.731.500	
3.2.1.	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Gk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	86.441.000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Gk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	44.940.000	
3.2.2.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	71.537.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	800.000	
3.2.3.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Laporan	110.968.000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	87.631.500	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data Agregat	100 persen	174.760,000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100 persen	25.050.000	
4.1.	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah Dokumen data agregat yang tersusun	2 dokumen	174.760,000	Penyusunan Profil Kependudukan		Dokumen Penyusunan Profil Kependudukan		25.050.000	
4.1.1.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Gk	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	89.375.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Gk	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	25.050.000	
4.1.2.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	85.385,000						
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	8.794.305.711	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84,08	4.444.103.947	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,1,	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	43.950.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.987.500	
5.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.162.500	
5.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	125.000	
5.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	900.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	125.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gk	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gk	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	325.000	
5.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	950.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	325.000	
5.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	1.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	275.000	
5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	30.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.650.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	4 Laporan	5.847.212.711	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.466.533.647	
5.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ bulan	5.837.237.711	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ bulan	3.463.783.647	
5.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.875.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.450.000	
5.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	7.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	1.300.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	57 ASN	55.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		11.534.000	
5.3.1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	17.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	6.534.000	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gk/Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	5.000.000	
5.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum terlayani	8 Kegiatan	1.199.775.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		410.123.200	
5.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.785.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gk	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.237.200	
5.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gk	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	891.170.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gk	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	267.610.000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gk	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.725.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gk	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.412.000	
5.4.4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	48.765.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.750.000	
5.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	2.255.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	1.080.000	
5.4.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.250.000	
5.4.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	219.475.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	88.534.000	
5.4.8.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	5.600.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gk	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	1,250,000	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	797.943.000	-	-	-	-	-	
5.5.1	Pengadaan Mebel	Kab. Gk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	797.943.000		Kab. Gk				
5.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	503.630.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		261.025.600	
5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	57.370.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	400.000	
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	285.825.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	188.628.000	
5.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	160.435.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	71.997.600	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani	4 Kegiatan	346.795.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		287.900.000	
5.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	152.415.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	213.500.000	
5.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	72.430.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	12.000.000	
5.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	81.450.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	56.400.000	
5.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gk	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	40.500000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gk	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 Unit	6.000.000	
Jumlah					10.051.878.711					6.143.759.327,10	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat / kalurahan / kapanewon dengan tahapan musrenbang RKPD 2026 terkait pelayanan kepada masyarakat ditawarkan dengan kamus usulan program/kegiatan PD telah diakomodir melalui PIS (Pagu Indikatif sektoral) dan PIWK (Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon).

Kamus usulan yang ditawarkan meliputi:

a. Kegiatan *One Day Service* Akta Pencatatan Sipil, yaitu pelayanan akta-akta catatan sipil dengan metode mendekatkan pelayanan kepada pemohon yang berada di wilayah pinggiran dan dokumen diserahkan langsung kepada pemohon sehari jadi (*One Day Service*);
b. Kegiatan One Day Service KK, KTP, KIA, yaitu Pelayanan KK, KTP dan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah pelayanan Penerbitan KK, penerbitan dan perekaman KTP dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan secara jemput bola dan *one day service* di kalurahan;
c. Kegiatan Sosialisasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yaitu Penyebarluasan informasi administrasi kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital kepada masyarakat melalui tatap muka beserta aktivasi IKD langsung kepada wajib KTP yang sudah melaksanakan perekaman KTP elektronik.

Kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran PD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dengan kualitas pelayanan adminduk yang maksimal sehingga dapat membahagiakan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Rekapitulasi usulan RKPD tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefiien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIS) - One Day Service Akta Pencatatan Sipil	Kalurahan Songbanyu, Kapanewon Girisubo	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2	2,900,000	5,800,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
2	(PIS) - One Day Service KK, KTP, KIA	Kalurahan Songbanyu, Kapanewon Girisubo	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2	2,900,000	5,800,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
3	(PIS) - One Day Service Akta Pencatatan Sipil	Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	3	2,900,000	8,700,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
4	(PIS) - One Day Service Akta Pencatatan Sipil	Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4	2,900,000	11,600,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
5	(PIS) - One Day Service KK, KTP, KIA	Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4	2,900,000	11,600,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
6	(PIS) - One Day Service KK, KTP, KIA	Kalurahan Pucanganom, Kapanewon Rongkop	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10	2,900,000	29,000,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
7	(PIS) - One Day Service KK, KTP, KIA	Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	50	2,900,000	145,000,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefiien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
8	(PIS) - One Day Service KK, KTP, KIA	Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3	2,900,000	8,700,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
9	(PIS) - Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	9,615,000	9,615,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
10	(PIS) - Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	9,615,000	9,615,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
11	(PIS) - Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Kalurahan Tancep, Kapanewon Ngawen	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	9,615,000	9,615,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
12	(PIS) - Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Kalurahan Watusigar, Kapanewon Ngawen	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	9,615,000	9,615,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
13	(PIS) - Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	9,615,000	9,615,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
14	(PIS) - Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	7,403,000	7,403,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefiien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
15	(PIWK) - One Day Service Akta Pencatatan Sipil	Kalurahan Plebutan, Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5	2,900,000	14,500,000	Pengurangan volume
16	(PIWK) - One Day Service Akta Pencatatan Sipil	Kalurahan Sumbergiri, Kapanewon Ponjong	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2	2,900,000	5,800,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
17	(PIWK) - Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Kalurahan Karangduwet, Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	9,615,000	9,615,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
18	(PIWK) - Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	9,615,000	9,615,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
19	(PIWK) - Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	9,615,000	9,615,000	Lengkap, sesuai dengan BA Musrenbang
Jumlah						330,823,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 merupakan kelanjutan kegiatan tahun sebelumnya.

Isu strategis nasional memperkuat reformasi politik, hukum dan tata kelola serta penguatan reformasi birokrasi dan isu strategis Daerah Istimewa Yogyakarta penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik serta isu strategis Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan administrasi kependudukan adalah terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel menjadi fokus kegiatan rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tahun 2026, dengan harapan dapat terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien, dengan pelaksanaan kebijakan kegiatan:

1. Layanan Percepatan IKD;
2. Persiapan Regulasi Pendelegasian wewenang Adminduk kepada Kalurahan (peningkatan PKS)
3. Penguatan Integrasi SMART dan SID;
4. Penguatan Persyaratan SMKI (kapasitas server perekaman KTP);
5. Penguatan Update data kependudukan;
6. Penguatan regulasi layanan jemput bola *one day service*;
7. Penguatan regulasi layanan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul setiap hari telah melaksanakan pemutakhiran data kependudukan berkelanjutan dan aktivasi Identitas kependudukan Digital (IKD) melalui pelayanan di dinas maupun jemput bola serta event-event daerah/kapanewon/kalurahan.

Tahun 2026 akan fokus pada persiapan dan pelaksanaan regulasi pendelegasian wewenang administrasi kependudukan kepada kalurahan, sehingga pelayanan adminduk diharapkan cukup sampai di kalurahan saja sebagai bentuk peningkatan PKS kalurahan.

Untuk kepemilikan akta kelahiran bagi anak juga masih terus berjalan, dengan layanan terintegrasi akte kelahiran bagi bayi baru lahir, serta usia 0-4 tahun, sosialisasi dan pelayanan keliling jemput bola bagi penduduk yang belum memiliki akta kelahiran.

Pelaksanaan SMKI juga akan ditingkatkan. Peningkatan regulasi kerjasama/kemitraan layanan dan pemanfaatan data kependudukan dengan mitra Dukcapil dan pemangku kepentingan dengan penerapan SMKI.

Mewujudkan akselerasi tranformasi digital pelayanan dengan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dan cepat juga dikembangkan dengan berbagai inovasi serta akses informasi melalui *www: dukcapil.kab.gunungkidul.go.id., email:*

dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Facebook: @dukcapilgk, twiter: @dukcapilgk

1.2. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana dimuat dalam draft Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan penjabaran dari sasaran daerah telah dirumuskan berdasarkan pada draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dengan sasaran yang akan dicapai. Dengan mengacu pada visi pembangunan tahun 2025-2029 adalah : "*Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadapan".* dan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 "*Gunungkidul Raya*" dapat dijabarkan dalam indikasi program prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Program Bocah Pinter;
2. Program Warga Sehat;
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya;
4. Program Gunungkidul Berdikari;
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi;
6. Program Warga Gayeng dan Guyup;
7. Program Alam Lestari.

Maka terkait dengan prioritas pembangunan daerah tersebut di atas, sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dirumuskan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Prioritas dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcomes)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcomes)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pamong Nglayani dan Ngayomi	Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik,	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib administrasi kependudukan {diukur dari 50 persen cakupan dokumen kependudukan (KTP, KIA) di tambah 50 persen cakupan kepemilikan akta catatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)}

Guna tercapainya target sasaran Daerah tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menetapkan tujuan dan

sasaran Perangkat Daerah sebagaimana disajikan tabel 3.2. dan Tabel 3.3. di bawah ini :

Tabel 3.2.
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026	Proyeksi Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	90,43%	90, 45%

Tabel 3.3.
Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran Tahun 2026	Proyeksi Target Sasaran Tahun 2026
1.	2.	3.	4.	
1.	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib administrasi kependudukan {diukur dari 50 persen cakupan dokumen kependudukan (KTP dan KIA) di tambah 50 persen cakupan kepemilikan akta catatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)}	87,10%	87,12%

Dan untuk lebih memberikan perhatian dalam pencapaian target tujuan dan sasaran di atas, ditetapkannya indikator kinerja dinas yang dipandang telah merepresentasikan kinerja dinas berupa indikator kinerja utama dengan indikator yaitu Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien berupa angka Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (diukur dari rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) semester I dan Semester II) yang dapat kami sajikan pada tabel 3.5. di bawah ini :

Tabel 3.5.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	2.	3.	4.
1.	Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	90,43%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

4.1.1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Gunungkidul "*Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadapan"* dengan misi sebagai berikut :

1. meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
2. memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
3. mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif;
4. membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
5. setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban;
6. memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Guna mendukung pencapaian misi kelima "Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban" dengan sasaran daerah sebagaimana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu "*Program Pamong Nglayani dan Ngayomi*", atas pertimbangan hal tersebut di atas dapat dipakai sebagai acuan dalam penjabaran program dan kegiatan dalam proses penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

Jaminan kualitas pelayanan Dukcapil dilaksanakan melalui motto Patilo Gunkid, tagline Urus Dhewe Gampang Ora Mbayar dan Cedak Kepenak Semanak, serta arah kebijakan pelayanan kedepan AN^2 (Aman Normal dan Normatif).

4.1.2. Prioritas Pembangunan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2026 akan melaksanakan/memprioritaskan pembangunan yang belum dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya antara lain :

1. Percepatan layanan Aktivasi IKD;
2. Pemutakhiran data kependudukan dengan update data penduduk dan pembaharuan Kartu Keluarga;
3. Penyelesaian perekaman data KTP-el reguler melalui petugas pelayanan di Kapanewon-Kapanewon setempat;

4. Perekaman data KTP-el wajib KTP pemula ke sekolah-sekolah, jemput bola bagi manula dan penyandang disabilitas serta layanan di kalurahan;
5. Perekaman data KIA dan penerbitan KIA;
6. Penyelesaian target akta kelahiran bagi anak 0-4 Tahun;
7. Peningkatan Perjanjian Kerjasama dengan OPD maupun Lembaga;
8. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Data (SMKI);
9. Persiapan regulasi pendelegasian wewenang administrasi kependudukan kepada kalurahan;
10. Layanan terintegrasi dan kolaborasi.

4.1.3. Pengurangan Kemiskinan

Bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya program pengentasan kemiskinan akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan penduduk, terkait dengan hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan pendataan penduduk rentan dan pelayanan perekaman biometrik KTP bagi penduduk jompo dan penyandang disabilitas, serta penerbitan KIA. Pencatatan Sipil dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian serta Pemanfaatan data kependudukan dalam rangka penanganan kemiskinan untuk kebutuhan data pembangunan lintas sektor seperti Bappeda, Dinas Sosial Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Transmigrasi, BPJS dan lain-lain.

4.1.4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang dijelaskan pada huruf b. dengan melaksanakan program dan kegiatan yang terkait untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Percepatan pelayanan aktivasi IKD;
2. Pemutakhiran data kependudukan melalui pembaharuan KK;
3. Penyelesaian perekaman data KTP-el dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui petugas pelayanan di dinas dan 18 Kapanewon;
4. Perekaman data KTP-el jemput bola bagi wajib KTP pemula ke sekolah-sekolah, dan bagi manula/sakit dan penyandang disabilitas dan pelayanan di kalurahan;
5. Pelayanan terintegrasi di dinas, kapanewon, Mal Pelayanan Publik dan kegiatan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta layanan dengan mitra/lembaga;
6. Kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan PD dan atau instansi lain;
7. Sosialisasi-sosialisasi;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
9. Penambahan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
10. Pelayanan Adminduk di kalurahan dan Gerakan Pambela Sungkawa (GPS).

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan :

1. Jumlah program pada Tahun Anggaran 2026 sejumlah 5 program yang terdiri dari 11 kegiatan dan 37 sub kegiatan;
2. Sifat penyebaran program dan kegiatan, program dan kegiatan yang sifatnya kegiatan rutin berlokasi di Dinas Dukcapil dan Mall Pelayanan Publik, sedangkan kegiatan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada Kapanewon dan Kalurahan, sedangkan kegiatan yang sifatnya koordinasi sampai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat;
3. Jumlah kebutuhan dana yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp6.040.348.325,98 untuk pembiayaan belanja operasi dan dan modal.
4. Dari 5 program yang terdiri 11 kegiatan dan 37 sub kegiatan tersebut untuk lebih mempertajam tujuan dan sasaran daerah Program Pamong Nglayani dan Ngayomi.

Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan dukungan tercapainya sasaran yang ke 5 (lima) yaitu Program Pamong Nglayani dan Ngayomi. Selanjutnya total anggaran dalam penyempurnaan RKPD awal sebesar Rp6.040.348.325,98 yang telah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan guna terlaksananya tujuan dan sasaran dinas yang telah ditetapkan. Sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut ditetapkan program dan kegiatan yang terdiri dari 4 program prioritas dengan 5 kegiatan yang terdiri 10 sub kegiatan yang didukung 1 program pendukung dengan 6 kegiatan dengan 26 sub kegiatan. Program prioritas dan program penunjang dimaksud dapat kami sajikan pada tabel 4.1. dan tabel 4.2 sebagaimana berikut :

Tabel 4.1.
Proritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pamong Nglayani dan Ngayomi	Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan.	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib administrasi kependudukan (diukur dari 50 persen cakupan kepemilikan KTP dan KIA di tambah 50 persen cakupan kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian)	87,10%	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	720.884.000	
					2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	720.884.000	
					2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	525.818.000	Dukcapil
					2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	195.066.000	Dukcapil
					2.12.03	Program Pencatatan Sipil	134.991.000	
					2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	134.991.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	104.991.000	Dukcapil PIWK
					2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	30.000.000	Dukcapil
					2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	256.879.5000 0	
					2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaata	123.508.000	
					2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	86.755.000	Dukcapil
					2.12.04.2.01.0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	36.753.000	Dukcapil
					2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	133.371.500	
					2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.940.000	Dukcapil
					2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	800.000	Dukcapil

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	87.631.500	Dukcapil PIWK, PIS
					2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	25.050.000	
					2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	25.050.000	
					2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	25.050.000	Dukcapil
					X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.902.543.825 ,98	
					X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.342.500	
					X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.517.500	Dukcapil
					X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	125.000	Dukcapil

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	125.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	325.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	325.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	275.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.650.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.865.766.525,98	
					X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.832.661.525,98	Dukcapil
					X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.450.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.655.000	Dukcapil

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.534.000	
					X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.299.800	Dukcapil
					X.XX.01.2.05.0005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.975.200	
					X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.097.200	Dukcapil
					X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295.564.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.450.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.750.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.250.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.534.000	Dukcapil

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.250.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.025.600	
					X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.628.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.997.600	Dukcapil
					X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.900.000	
					X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.500.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	Dukcapil
					X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.400.000	Dukcapil

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	Dukcapil

4.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				6.040.348.325,98				6.987.192.033,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.040.348.325,98				6.987.192.033,00
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.040.348.325,98				6.987.192.033,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai AKIP PD		84.08 Persen	4.902.543.825,98			84,45 persen	5.541.176.033,00
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.342.500,00			-	9.350.000,00
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	31.517.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	2.500.000,00
2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	125.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	125.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	200.000,00
2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	325.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	450.000,00
2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	325.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	450.000,00
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	275.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17 Laporan	550.000,00
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua	5 Laporan	4.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Laporan	5.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kel/Desa						
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.865.766.525,98			-	3.553.966.033,00
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57 Orang/bulan	3.832.661.525,98	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Orang/bulan	3.550.378.033,00
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.450.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	1.488.000,00
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	31.655.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Laporan	2.100.000,00
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.534.000,00			-	73.900.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6.534.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	17.500.000,00
2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		65 Orang	56.400.000,00
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah			438.975.200,00			-	1.046.700.000,00
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.097.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	3.785.000,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	295.564.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Paket	891.170.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	2.450.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	3.725.000,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	35.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	48.765.000,00
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365 Dokumen	1.080.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		365 Dokumen	2.255.000,00
2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.250.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	15.000.000,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gk	12 Laporan	88.534.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	79.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.250.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Dokumen	2.500.000,00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			261.025.600,00			-	447.760.000,00
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	1.500.000,00
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	188.628.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Laporan	285.825.000,00
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	71.997.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Laporan	160.435.000,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			287.900.000,00			-	409.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Unit	213.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		34 Unit	186.500.000,00
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	12.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Unit	53.000.000,00
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	56.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	150.000.000,00
2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Unit	20.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan IKD Persentase kepemilikan KIA		20 Persen 85,30 Persen	720.884.000,00			23 Persen 86,76 Persen	919.060.000,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk			720.884.000,00			-	919.060.000,00
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk								
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120000 Dokumen	525.818.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		120000 Dokumen	884.060.000,00
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan								
						Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11600 Dokumen	195.066.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11600 Dokumen	35.000.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah; Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai Persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran		100 Persen 85 Persen 85 Persen 99,6 Persen	134.991.000,00			100 Persen 85,5 Persen 85,5 Persen 99,7 Persen	99.215.000,00
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil			134.991.000,00			-	99.215.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting								
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19000 Dokumen	104.991.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		19000 Dokumen	52.215.000,00
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil								
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Layanan	30.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Layanan	47.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan Persentase kerjasama pemanfaatan data serta dokumen kependudukan		100 Persen 100 Persen	256.879.500,00			100 Persen 100 Persen	382.741.000,00
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			123.508.000,00			-	163.800.000,00
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan								
						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11000 Dokumen	86.755.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11000 Dokumen	108.800.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan								
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	36.753.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Dokumen	55.000.000,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			133.371.500,00			-	218.941.000,00
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	44.940.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	86.441.000,00
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan								
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Dokumen	2.500.000,00
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Laporan	87.631.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Laporan	130.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan		100 Persen	25.050.000,00			100 Persen	45.000.000,00
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Dokumen profil kependudukan			25.050.000,00			-	45.000.000,00
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	25.050.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	45.000.000,00
J U M L A H									6.040.348.325,98				6.987.192.033,00

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun untuk nantinya disempurnakan menjadi Rencana Kerja Tahun 2026. Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 dan berkesinambungan dari Rencana Kerja tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, serta kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan, serta mengacu pada prioritas dan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

a. Catatan Penting

Proses penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Peran serta *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kapanewon, Forum PD hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.

b. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja ini berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi ke depan yang hasil akhirnnya dapat diukur dengan jelas dan pasti . Didalam penyusuna Rencana Kerja (Renja) diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Renja yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul).

c. Rencana Tindak lanjut

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul berupaya melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga dapat bermanfaat dan membahagiakan masyarakat serta *stakeholder* yang membutuhkan data kependudukan. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Demikian Rancangan awal Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Gunungkidul,
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

ttd

MARKUS TRI MUNARJA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dituangkan dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026. Renja disusun dengan berpedoman pada visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2025-2029 serta arah kebijakan pembangunan tahun pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan Renja tahun 2026 juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Renja Dinas Perhubungan disusun dengan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga terkait dalam hal ini Renja Kementerian Perhubungan, Renja Dinas Perhubungan DIY, serta RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sehingga diharapkan ada keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan PD dengan perencanaan daerah dan provinsi dan kementerian terkait. Rumusan program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan data dan asumsi-asumsi yang tepat dan akurat, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja PD dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang pada Tahun 2025 secara berjenjang mulai dari tingkat kalurahan, kapanewon, kabupaten, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum PD), dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang ada serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2025 sebagai bahan evaluasi kinerja.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2026 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1350 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di tuangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2026;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja tahun 2026;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

I. BAB I PENDAHULUAN
   - 1.1. Latar Belakang
   - 1.2. Landasan Hukum
   - 1.3. Maksud dan Tujuan
   - 1.4. Sistematika Penulisan

II. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
   - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
   - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
   - 2.3 Isu- isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
   - 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
   - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
   - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
   - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Penyusunan Renja Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2025, mengacu pada APBD tahun Tahun 2025 kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya

Pada tahun 2024, berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA/A.6/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul melaksanakan sebanyak 3 program dan 17 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2024 sejumlah Rp26.999.825.409,00 dengan penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 26.825.166.989,00 atau 99,35%.

Realisasi anggaran dan kinerja tahun lalu/Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian tahun berjalan/Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan
Tahun 2024

Pagu anggaran (Rp)	Realisasi anggaran		Saldo anggaran	
	(Rp)	Persen	(Rp)	Persen
26.999.825.409	26.825.166.989	99,35	174.658.420	0,65

Adapun rincian penyerapan anggaran per program dan kegiatan disampaikan pada tebel berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran per Kegiatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa	Keterangan
			Rp	%		
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang					
1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	2.229.568.000	2.229.129.000	99,98	439.000	
Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa	Keterangan
			Rp	%		
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	2.229.568.000	2.229.129.000	99,98	439.000	
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
2.15.01	Program Penunjang	4.847.491.309	4.751.771.623	98,03	95.719.686	

	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.942.500	58.740.000	99,66	202.500	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.146.458.109	3.074.397.927	97,71	72.060.182	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	420.000	420.000	100,00	0	
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.353.000	1.353.000	100,00	0	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah	45.961.900	44.781.195	97,43	1.180.705	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Dearah	219.096.000	210.804.036	96,22	8.291.964	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.000.000	224.568.000	99,37	1.432.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.355.000	205.167.145	94,39	12.187.855	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	931.904.800	931.540.320	99,96	364.480	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.922.766.100	19.844.266.366	99,61	78.499.734	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	17.325.584.600	17.251.816.826	99,57	73.767.774	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	284.513.000	284.137.000	99,87	376.000	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.025.310.000	1.024.086.135	99,88	1.223.865	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	330.981.000	329.328.373	99,50	1.652.627	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	760.790.000	759.915.882	99,89	874.118	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.890.000	113.540.000	99,69	350.000	

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa	Keterangan
			Rp	%		
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam rayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	81.697.500	81.442.150	99,69	255.350	
		26.999.825.409	26.825.166.989	99,35	174.658.420	

Untuk selanjutnya disampaikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 terhadap pencapaian target dapat dilihat tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capai an Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUN JANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan peme rintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD disusun tepat waktu	152 dokumen	28 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	100%	29 dokumen	86 dokumen	74%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perenca naan perangkat daerah	28 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	22 dokumen	79%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubah an RKA-SKPD dan Lapor- an Hasil Koordinasi Penyu sunan Dokumen Perubah- an RKA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubah an DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reali sasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89 dokumen	17 Laporan	18 laporan	18 laporan	100%	18 dokumen	71 dokumen	90%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 dokumen	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	12 dokumen	80%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	140 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	100%	28 dokumen	112 dokumen	80%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2296 orang	644 Orang/bulan	658 orang/bulan	658 orang/bulan	100%	658 orang/bulan	1960 orang/bulan	85%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyu- sunan Laporan Keuang- an Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keu angan Akhir Tahun SKPD	5 dokumen	1 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan an/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor an Koordinasi Penyusunan Laporan Keuang an Bulanan/ Triwulan- an/Semesteran SKPD	65 dokumen	13 Laporan	13 dokumen	13 dokumen	100%	13 dokumen	52 dokumen	80%
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD tersusun tepat waktu	75 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	15 dokumen	60 dokumen	80%
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencana an Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah PD tersusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	80%
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsi- liasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	8 dokumen	80%
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 dokumen	12 Laporan	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	48 dokumen	80%
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapat- an DaerahKewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan pendapatan disusun tepat waktu	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	48 dokumen	80%
X.XX.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengel laan Retribusi Daerah	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	48 dokumen	80%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	84 dokumen	28 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100%	20 dokumen	68 dokumen	81%
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	190 paket	93 paket	0 paket	0 paket	0%	94 paket	187 paket	98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2. 05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	58 dokumen	10 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100%	16 dokumen	42 dokumen	62%
X.XX.01.2. 05.05	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian KinerjaPegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	75%
X.XX.01.2. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	22 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	22 Orang	44 Orang	100%
X.XX.01.2. 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang MengikutiSosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	186 orang	93 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	93 orang	50%
X.XX.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	219 dokumen	53 dokumen	57 dokumen	57 dokumen	100%	57 dokumen	167 dokumen	76%
X.XX.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Listrik/ Penerangan Disediakan	20 paket	4 paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 paket	16 paket	80%
X.XX.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 paket	13 Paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	21 paket	190%
X.XX.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	4 paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 paket	16 paket	80%
X.XX.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 paket	4 paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 paket	16 paket	80%
X.XX.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 dokumen	48 dokumen	80%
X.XX.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	24 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	48 laporan	80%
X.XX.01.2. 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 dokumen	8 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	16 dokumen	80%
X.XX.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	325 laporan	132 laporan	71 laporan	71 laporan	100%	66 laporan	269 laporan	82%
X.XX.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	24 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	48 laporan	80%
X.XX.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	185 laporan	74 laporan	37 Laporan	37 Laporan	100%	37 laporan	148 laporan	80%
X.XX.01.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	5 laporan	25 laporan	125%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 laporan	24 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	48 laporan	80%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	777 unit	218 unit	75 unit	75 unit	100%	134 unit	427 unit	55%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya)	140 unit	54 unit	15 unit	15 unit	100%	14 unit	83 unit	60%
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	240 unit	60 unit	0 unit	0 unit	0%	60 unit	120 unit	50%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 unit	64 unit	43 unit	43 unit	100%	1 unit	108 unit	45%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	14 unit	15 unit	15 unit	100%	12 unit	41 unit	455%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	99 unit	24 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	24 unit	24%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	41 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	6 unit	5%
1.03.13	**PROGRAM PENYELENGGARA-AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Persentase penyelengga raan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik**	100%	40%	20%	20%	100%	20%	80%	80%
1.03.13.2.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	93 dokumen	5 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	23 dokumen	25%
1.03.13.2.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 dokumen	22 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	40 dokumen	400%
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARA-AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase capaian penyelenggara an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas**	**11,80 persen**	**4,50 persen**	**9,50 persen**	**11,65 persen**	**122,63%**	**10,50 persen**	**10,50 persen**	**89%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase capaian penyelenggara an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal	**66,58 persen**	**66,43 persen**	**66,55 persen**	**65,50 persen**	**98,42%**	**66,57 persen**	**66,57 persen**	**99%**
		Persentase capaian penyelenggara an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan perparkiran	**75,44 persen**	**68,49 persen**	**72,51 persen**	**73,92 persen**	**101,96%**	**74,85 persen**	**74,85 persen**	**99%**
		Persentase capaian penyelenggara an lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT Pengujian kendaraan bermotor	**99,00 persen**	**98,88 persen**	**98,50 persen**	**95,00 persen**	**96,47%**	**98,75 persen**	**98,75 persen**	**99%**
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlahpenyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	2.128 unit	76 unit	413 unit	413 unit	100%	116 unit	429 unit	20 %
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2083 unit	72 unit	230 unit	230 unit	100%	112 unit	418 unit	20 %
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 unit	4 unit	183 unit	183 unit	100%	4 unit	11 unit	90%
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pembangunan, pengembangan dan rehabili tasi Terminal Tipe C Semin	42 unit	11 unit	3 unit	3 unit	100%	17 unit	31 unit	74 %
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	12 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	5 unit	8 unit	66 %
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan Dipelihara	29 paket	9 paket	2 paket	2 paket	100%	12 paket	23 paket	80 %
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen penerbit an ijin penyelang- garaan parkir dan pembangunan fasiltas parkir	78 dokumen	15 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	22 dokumen	51 dokumen	65 %
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasi litas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Peri- zinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyeleng- garaan dan terbangunnya Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terin tegrasi Secara Elektronik	78 dokumen	15 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	22 dokumen	51 dokumen	65 %
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	31374 unit	4013 unit	4163 unit	4163 unit	100%	4261 unit	12437 unit	43 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	31322 unit	4000 unit	4142 unit	4142 unit	100%	4250 unit	12.392 unit	43 %
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	2 dokumen	10 dokumen	83 %
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasa rana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	40 unit	9 unit	17 unit	17 unit	100%	9 unit	35 unit	88%
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	89 dokumen	21 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	23 dokumen	596 dokumen	66 %
2.15.02.2.06.03	Uji Coba danSosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	82 dokumen	4 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	28 dokumen	20 %
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan PengendalianEfektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untukJalan Kabupaten /Kota	56 laporan	14 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	8 laporan	23 Laporan	27 %
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9 kali	3 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	3 laporam	8 laporam	56 %
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan angkutan bus sekolah	12 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	9 unit	75 %
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	9 unit	75 %
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah laporan layanan Penerbitan Izin Penyeleng gara an Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	14 laporan	18 aporan	62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Peri zinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuh an Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewe- nangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizin an Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	6 aporan	29%
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkroni sasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	8 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	6 laporan	75 %

Dari tabel 2.3 di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan, telah ditetapkan 2 indikator kinerja Sasaran, 6 (enam) indikator kinerja program dan 17 (tujuh belas) indikator kegiatan dan 45 (empat puluh lima) indikator kinerja sub kegiatan. Dari 2 (dua) sasaran Dinas Perhubungan, sasaran utama *Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat* baru mencapai 99,62% atau belum mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan sasaran *Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD* tercapai 100,62% atau telah melampaui target yang ditetapkan.

Sedangkan dari 6 (enam) indikator kinerja program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan, 4 (empat) indikator program telah mencapai target yaitu:

1. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas tercapai 122,11%;
2. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang Angkutan dan Terminal tercapai 98,42%;
3. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang PJU dan Perparkiran tercapai 101,96%;
4. Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor tercapai 96,45%;
5. Persentase penyelenggara an keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik tercapai 100,00%, dan
6. Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik tercapai 100,00%

Tahun 2024 semua target kinerja sub kegiatan terlaksana dengan sangat baik (100%) dengan serapan anggaran rata-rata 99,35%. Dari 45 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, sub kegiatan yang capaian keuangan kegiatannya kurang dari 75% sebanyak 1 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dan kegiatan lainnya sebanyak 44 sub kegiatan realisasi keuangan berada di 75%-100%.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 tersebut, guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja Tahun 2025, maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut, di antaranya :

- Penetapan indikator keluaran kegiatan pada tahab perencanaan agar lebih cermat lagi, sehingga bisa benar-benar mewakili output dari kegiatan dan bisa tercapai dengan baik;
- Renja perubahan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan beberapa kondisi atau kebijakan yang perlu ditindaklanjuti, sehingga kinerja kegiatan bisa mencapai 100%;
- Penetapan kinerja kegiatan agar memperhatikan hasil capaian kinerja tahun lalu sehingga pencapaian yang terlalu tinggi (melebihi 100%) dan terlalu rendah (dibawah 90%) dapat dihindari.
- Peran serta semua penanggungjawab sub kegiatan untuk mengoptimalkan capaian kinerja masing-masing.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, terdapat 3 (tiga) tolok ukur kinerja pelayanan, baik yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator

Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 368/KPTS/2021 yaitu ***Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan***.

Realisasi pencapaian kinerja Dinas Perhubungan selama periode Renstra baik IKU (indikator kinerja utama), SPM (standar pelayanan minimal), MDGs (*millennium development goals*) dan IKK (indikator kinerja kunci) Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**IKU (Indikator Kinerja Utama)**										
1	Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	persen	59,16	61,68	63,53	65,05	56,18	61,44	61,53	62,17	
B	**Indikator Kinerja Program**										
1	Persentase SRS Kasultanan dan Kadipaten yang memiliki dokumen rencana tata ruang	persen	40	60	80	100	40	60	80	80	
2	Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	persen	60.17	61.76	62.67	63.21	58,19	61,52	62,67	62,70	
3	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
C	**IKK (Indikator Kinerja Kunci) Penyelenggaraan Pemerintah daerah**										
	Indikator Outcome										
1	Rasio konektifitas kabupaten	persen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,16	0,59	0,59	0,59	Rasio konektifitas didapatkan dari (jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek)/jumlah kebutuhan
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	persen	0,05	0,05	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,06	V/C Ratio didapatkan lewat survey di jalan kabupaten
	Indikator output										
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang tipe C	persen	78,38	81,08	81,69	89,19	89,00	92,00	92,00	95,00	Dihitung dengan jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C tersedia/jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C
2	Terlaksananya pelayanan pelayanan uji berkala	persen	47,00	48,00	49,00	50,00	32,00	32,00	32,00	32,00	Dihitung dengan jumlah kendaraan yang diuji per tahun/jumlah kendaraan wajib uji
3	Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan perdesaan kelas ekonomi	persen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Tidak ada data
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dan kota	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dihitung dengan jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota : jumlah target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten/kota

Capaian indikator IKU (indikator kinerja utama) Dinas Perhubungan, Tahun 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 61,68% baru tercapai 61,44% atau 99,62% dari target. Hal ini terjadi karena pada tahun 2024 dampak paska pandemi COVID-19 masih berpengaruh pada semua sektor termasuk perhubungan. Beberapa kegiatan dan program yang direncanakan untuk mendukung pencapaian IKU mengalami *refocusing* anggaran sehingga peningkatan sarana dan parasarana perhubungan yang menjadi faktor utama tercapainya IKU Dinas Perhubungan tidak tercapai.

Sedangkan IKK (indikator kinerja kunci) urusan Perhubungan, pada tahun 2024 capaiannya seperti terlihat pada kolom 9 tabel 2.4. Dari 6 (enam) indikator yang terbagi dalam 2 (dua) IKK outcome dan 4 (empat) IKK output, 4 (empat) indikator realisasinya mencapat target, sedangkan 1 (satu) indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 (satu) indikator tidak dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul. Indikator kinerja khusus (IKK) yang tidak memenuhi target adalah IKK output Terlaksananya pelayanan pelayanan uji berkala yang dihitung dengan rumus Jumlah kendaraan yang diuji setahun/Jumlah kendaraan wajib uji X 100, dimana tahun 2024 hanya terealisasi 32%. Dari jumlah kendaraan wajib uji sebanyak 13.027 kendaraan, hanya 4.142 kendaraan yang diujikan. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan keselamatan lalu lintas dan angkutan masih rendah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan diukur melalui tingkat kinerja pelayanan PD yang dapat dilihat dari capaian target indikator program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dari tabel 2.2 di atas dapat kita ketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan belum maksimal, terlihat dari beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target. Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan, namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan dan hambatan baik yang bersumber dari intern maupun dari luar dinas yang menjadi tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD.

Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berisi uraian sebagai berikut:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, diantaranya adalah :
    a. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik dengan belum tersedianya dokumen Tatralok di Kabupaten Gunungkidul;
    b. Terjadi kepadatan dan kemacetan pada ruas-ruas jalan utama menuju obyek wisata terutama di hari-hari libur;
    c. Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi teknis di bidang perhubungan, yang berakibat kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
    d. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan kasus kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya fasilitas/kelengkapan jalan juga akibat rendahnya kesadaran pengendara baik pribadi maupun angkutan umum;

e. Berkurangnya jumlah armada angkutan umum akibat *load factor* yang rendah karena menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dan semakin maraknya angkutan *online*;
f. Pelayanan infrastruktur penghubung antarobyek wisata belum ada;
g. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal.

2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah ”Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029.

Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:

1) Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2) Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3) Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4) Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5) Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa.

Permasalahan tersebut jika tidak segera ditindaklanjuti tentu akan sangat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan permasalahan dan dampak terkait penyelenggaran tugas dan fungsi PD berdasarkan Renstra PD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan, Dampak, Solusi dan Hambatan dalam Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	DAMPAK	SOLUSI	HAMBATAN
1	Ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan di bebrapa ruas jalan kabupaten, provinsi, nasional, JJLS (Rambu LL, Warning Light, RPPJ, Guardrail, dll) belum terpenuhi selain itu kerusakan pada perlengkapan jalan yang berada di jalan propinsi dan nasional	Gangguan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalulintas	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan dari sumber dana selain APBD (Paniradya, BPTD Kelas II DIY dan Kementerian Hubdat sesuai kelas jalannya)	Kendala dalam koordinasi dan ketersedian anggaran DIY dan BPTD kelas II DIY
2	Belum semua simpang ber APILL dilengkapi ATCS	Kondisi simpang tidak bisa terpantau setiap saat	Membuat proposal ke BPTD Kelas II DIY dan Kementerian	Sangat tergantung pada ketersedian anggaran DIY dan BPTD kelas II DIY
3	Belum adanya Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Gunungkidul	Tidak ada acuan perencanaan program pengembangan transportasi yang terintegrasi secara terpadu	Menganggarkan penyusunan Dokumen Tatralok	Keterbatasan anggaran sehingga perencanaan penyusunan belum terlaksana
4	Kemacetan ruas jalan Jogja-Wonosari pada hari Weekend karena pola mix traffic (angkutan barang, bus wisata, pribadi), msh menjadi jalur utama	Terjadi antrian yang panjang, Rawan Fatalitas Kecelakaan	Pengaturan Jam Operasional Angkutan Barang, pembangunan Terminal/Rest Area sebagai tempat penghentian angkutan barang saat pembatasan operasional Angkutan Barang	Ruas Jalan merupakan Jalan Nasional, Kewenangan ada di Kementrian Perhubungan
5	Belum adanya Data base perlengkapan jalan	Belum bisa menyajikan data perlengkapan secara up to date	Melaksanakan survey inventarisasi perlengkapan jalan (dalam proses)	Belum tersedianya anggaran untuk survey secara menyeluruh se Kabupaten Gunungkidul
6	Masih minimnya sarana komunikasi berupa Radio Komunikasi/HT Repeater yang dapat menjangkau wilayah Gunungkidul wilayah blank Spot	Kendala dalam mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, pengelolaan aset dan pemeliharaan infrastruktur, serta pengolahan dan analisis data	Penambahan pemasangan Ripeater pada wilayah tidak terjangkau frekwensi/di titik Blank Spot serta memanfaatkan jaringan mesh nerikabel guna mencegah gangguan cuaca	Keterbatasan anggaran pengadaan repeater dan sarana komunikasi HT
7	Kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan operasi yustisi Pola terpadu khususnya Timbangan Portable.	Belum terkendalinya pelanggaran ODOL yang berakibat kerusakan sarana prasarana lalulintas.	Pengusulan Alat Timbangan Portable baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan	Keterbatasan anggaran pengadaan timbangan portabel
8	Banyak Pelanggaran Pemanfaatan Jalan dan gangguan Lalulintas di wilayah Perbatasan atau rawan kecelakaan	Meningkatnya gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	Koordinasi Antar Kabupaten, Pembinaan dan koordinasi Lintas Kabupaten dan Lintas Instansi, untuk menentukan kebijakan penanganan gangguan (Penyediaan Area Publik, Penyediaan Sarpras, Pelaksanaan kegiatan penertiban terpadu)	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap keamanan aset fasilitas jalan
9	Layanan Angkutan Umum (Angkudes) mati suri	Mobilitas masyarakat terganggu Pengusaha angkutan kurang profit	Subsidi angkutan umum, Pelayanan trans jogja sampai dengan Wonosari	Keterbatasan anggaran
10	Layanan Bus sekolah masih terbatas	Beberapa kapanewon belum terlayani	Penambahan Armada & SDM	Keterbatasan anggaran
11	Fasilitas standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal belum terpenuhi	Pelayanan kurang optimal	Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan terminal tipe C sesuai SPM	Keterbatasan anggaran
12	Belum adanya pengaturan angkutan yang mendukung pariwisata di lokasi wisata	Kendaraan wisata bus besar tidak bisa masuk ke lokasi wisata	Perlunya rest area atau parkir terpadu dengan kendaraan shuttle/pengumpan	Belum ada dokumen kajian sebagai dasar pembangunan

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	DAMPAK	SOLUSI	HAMBATAN
13	Parkir kendaraan wisata di jalan semin karena munculnya outlet oleh-oleh di sekitar SPBU Blutak Bulurejo tanpa fasilitas parkir	Menimbulkan hambatan lalu lintas	Penambahan pemanfaatan terminal semin untuk parkir kendaraan wisata dan pusat oleh-oleh	Keterbatasan anggaran
14	Sarana dan Prasarana Perparkiran yang perlu pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan Penurunan potensi parkir di kawasan wisata	PAD Parkir tidak sesuai potensi	Pengalokasian anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perparkiran. Memperkuat proses penagihan dan melakukan pemeriksaan secara berkala di lokasi parkir Melakukan pendataan bersama BKAD untuk mengoptimalkan Pajak Parkir milik swasta.	Keterbatasan anggaran
15	Beban Tagihan APJ Abonemen yang tinggi	Kenaikan beban tagihan listrik setiap tahun yang cukup tinggi	Dilaksanakan updating data APJ Abonemen bersama dengan PT. PLN (Persero) ULP Wonosari	Terjadi hambatan komunikasi dengan PT. PLN (Persero) dan biaya yang dibutuhkan cukup tinggi dan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan permasalahan Abonemen tersebut
16	Belum meratanya Alat Penerangan Jalan di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul terutama di jalur rawan kecelakaan maupun kejahatan	Tingginya kecelakaan dan kasus kejahatan	Dilaksanakan pemetaan pada ruas jalan kabupaten/ sesuai dengan kewenangan di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dan KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha dalam pemasangan Alat Penerangan Jalan	Kebutuhan pada Jalan Kabupaten kurang lebih 22.903 Unit APJ sesuai dengan panjang jalan kabupaten
17	Pemeliharaan Aset APJ Kabupaten Gunungkidul yang belum maksimal dengan masih banyaknya aduan tentang kerusakan APJ/Perlengkapan Jalan di wilayah Kabupaten Gunungkidul terutama yang bukan asset Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Citra buruk terhadap Pemerintah Kabupaten Gunungkidul jika permasalahan tidak segera ditangani sedangkan kewenangan penanganan pemeliharaan sesuai dengan kewenangan jalan.	Untuk Ruas Jalan Kabupaten dapat langsung ditangani namun untuk Ruas Jalan Provinsi dan Nasional dikomunikasikan dengan pemilik aset	Anggaran yang diberikan setiap tahunnya tidak sebanding dengan aset yang dimiliki Respon yang lambat dari pemilik aset di Ruas Jalan Nasional dan Provinsi
18	Kendaraan operasional pemeliharaan APJ yang sudah cukup lama digunakan	Kurang optimalnya kendaraan operasional yang digunakan	Perlu dilaksanakan perawatan skala besar dan menyeluruhagar kendaraan kembali optimal	Belum tersediannya anggaran untuk pemeliharaan skala besar kendaraan tersebut yang melayani seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul
19	Belum adanya dasar hukum pengelolaan APJ di Kabupaten Gunungkidul	Belum adanya aturan mendetail sebagai salah satu upaya penyelesaian abonemen	Pembuatan Perda/Perbup tentang penyelenggaraan/pengelolaan APJ	Direncanakan ditahun 2025 namun ditunda sampai 2026
20	Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor sehingga kendaraan bermotor wajib uji terlambat uji dan atau tidak uji berkala (KBWU 2024 : 13.355 kendaraan)	Banyak kendaraan bermotor umum yang beroperasi tidak memenuhi syarat kelaikan	Memberi kemudahan pelaksanaan pengujian dengan menggunakan sistem aplikasi pengujian Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengujian kendaraan dengan melakukan kampanye, edukasi, sosialisasi (melalui Lembaga/paguyuban, media sosial, LPP dll) Operasi Yustisi penegakan UU / Perda secara terukur	Diperlukan kebijakan antara Dishub kab/kota dengan DPKA DIY (Samsat) untuk kewajiban perpanjang kendaraan bagi KBWU sudah melakukan uji berkala.
21	Belum terpenuhinya formasi kompetensi teknis Penguji	Belum terurainya tugas / masih ada perangkapan tugas	Formasi jabatan penguji masih ada yang masih kosong. Adanya lulusan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan (STTD, PKTJ)	Melakukan pelatihan / bimtek dan sertifikasi teknis untuk meningkatkan kompetensi Melakukan rekruitmen tenaga penguji sesuai kualifikasi yang kurang

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah;
   Permasalahan tersebut tentu saja menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Perhubungan untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan melalui program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
   Adapun isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Isu KLHS yang relevan dengan PD:
      - Belum optimalnya kinerja pelayanan lalu lintas dan angkutan umum karena belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lalu lintas;
      - Rendahnya tingkat disiplin berlalulintas;
      - Masih terbatasnya kompetensi sumber daya manusia; Memperkuat Daya Saing SDM;
      - Terjadinya kemacetan lalu lintas (terutama pada ruasjalan menuru akses wisata);
      - terbatasnya pelayanan angkutan umum;
      - belum optimalnya penyediaan layanan uji kendaraan.
   b. Isu Global:
      - Perubahan iklim,
      - mobilitas perkotaan berkelanjutan,
      - dan keamanan lalu lintas jalanIsu strategis daerah
   c. Isu Nasional:
      - Infrastruktur,
      - Keselamatan dan keamanan,
      - Teknologi,
      - Logistik,
      - Pengendalian transportasi,
      - Peningkatan konektifitas, dan
      - Berkelanjutan
   d. Isu Regional:
      - Potensi Kunjungan Wisata Ke Wilayah DIY
      - Angkutan Umum Perkotaan Belum Menjadi Pilihan Utama Mobilitas Masyarakat
      - Kendaraan tidak bermotor belum menjadi prioritas
      - Kurangnya fasilitas perlengkapan Jalan
      - Pemanfataan teknologi informasi dalam penyelesaian masalah transportasi

   Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat serta untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang diperlukan langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan sehingga tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dapat dilaksanakan. Langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan antara lain:
   a. Peningkatan dan perluasan akses sarana transportasi. Hal ini sangat penting mengingat Gunungkidul menjadi tujuan wisata yang terkemuka dan belum terdapat angkutan khusus menuju obyek wisata.
   b. Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional. Pendidikan dan pelatihan ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.
   c. Peningkatan pengadaan infrastruktur fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardraill, APILL dll) dan fasilitas pendukung

keselamatan lalu lintas berupa penerangan jalan umum untuk menciptakan dan mewujudkan standar keselamatan jalan.

d. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana transportasi (bus sekolah) untuk mendukung ketersediaan angkutan umum untuk masyarakat dan menekan tingkat kecelakaan di jalan.
e. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan disiplin berlalu lintas dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas.
f. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagai upaya mewujudkan kesepakatan bersama maupun dalam hal kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan transportasi guna mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penjabaran program kegiatan berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026 serta hasil analisa kebutuhan Dinas Perhubungan tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Perhubungan				2.000.000.000	Dinas Perhubungan				5.084.039.124	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.000.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.084.039.124	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				2.000.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				5.084.039.124	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		-	-	1.307.068.050	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		-	-	4.367.107.174	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD disusun tepat waktu	8 Dokumen	34.247.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD disusun tepat waktu	8 Dokumen	34.247.800	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	24.950.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	24.950.800	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	880.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	880.000	

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	565.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	565.000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	560.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	560.000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	800.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	800.000	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	3.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	3.400.000	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.092.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.092.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	46 Dokumen	12.330.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	46 Dokumen	3.072.369.124	

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	3.060.039.124	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.530.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.530.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes-teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	10.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes-teran SKPD dan Laporan Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	10.800.000	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi BMD tersusun tepat waktu	15 Dokumen	799.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi BMD tersusun tepat waktu	15 Dokumen	799.000	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	149.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	149.000	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	200.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	200.000	
1.3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	450.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	450.000	

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan pendapatan disusun tepat waktu	12 Laporan	2.040.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan pendapatan disusun tepat waktu	12 Laporan	2.040.000	
1.4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	2.040.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	2.040.000	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	11 Dokumen	51.278.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawai an perangkat daerah	11 Dokumen	51.278.800	
1.5.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdminis trasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.072.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Adminis trasi Kepegawaian	2 Dokumen	2.072.800	
1.5.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen	1.296.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen	1.296.000	
1.5.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2.740.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2.740.000	
1.5.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi PeraturanPerundang -Undangan	89 Orang	45.170.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi PeraturanPerundang -Undangan	89 Orang	45.170.000	
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	32 Dokumen	224.043.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	32 Dokumen	224.043.000	
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.500	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.500	
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	83.708.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	83.708.000	

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.180.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.180.500	
1.6.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	
1.6.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000	
1.6.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.804.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.804.000	
1.6.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1.150.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1.150.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerin- tahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 Laporan	306.855.450	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerin-tahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahandaerah	24 Laporan	306.855.450	
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	204.030.450	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	204.030.450	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	102.825.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	102.825.000	

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipeliha	130 Unit	675.474.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipeliha	130 Unit	675.474.000	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	468.724.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	468.724.000	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	34.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	34.050.000	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipeli-hara/Direhabilitasi	1 Unit	164.900.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Gedung KantordanBangunan Lainnya yang Dipeli-hara/Direhabilitasi	1 Unit	164.900.000	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	26 Unit	7.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	26 Unit	7.800.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		-	-	692.931.950	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		-	-	716.931.950	
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah penyediaan perlengkapan jalan dijalan kabupaten/ kota	4 Unit	290.427.100	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah penyediaan perlengkapan jalan dijalan kabupaten/ kota	4 Unit	314.427.100	
2.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Perlengkap-an Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	49.847.100	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Perlengkap-an Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	73.847.100	
2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	3.750.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	3.750.000	

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	236.830.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	236.830.000	
2.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi Terminal Tipe C Semin	2 Unit	10.614.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi Terminal Tipe C Semin	2 Unit	10.614.000	
2.2.1	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	5.400.000	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	5.400.000	
2.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	5.214.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	5.214.000	
2.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah dokumen penerbitan ijin penyelanggaraan parkir dan pembangunan fasiltas parkir	22 Dokumen	150.397.500	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah dokumen penerbitan ijin penyelanggaraan parkir dan pembangunan fasiltas parkir	22 Dokumen	150.397.500	
2.3.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22 Dokumen	150.397.500	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22 Dokumen	150.397.500	

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 Unit	148.595.350	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 Unit	148.595.350	
2.4.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	498.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	498.000	
2.4.2	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	4250 Unit	3.550.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	4250 Unit	3.550.000	
2.4.3	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Dokumen	86.250.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Dokumen	86.250.000	
2.4.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	15 Unit	58.297.350	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	15 Unit	58.297.350	
2.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	23 Dokumen	88.208.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	23 Dokumen	88.208.000	
2.5.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksa naan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	61.480.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksa naan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	61.480.000	

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5.2	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksa naan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	23.080.000	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksa naan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untukJaringan Jalan Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	23.080.000	
2.5.3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	3.648.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	3.648.000	
2.6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyediaan angkutan bus sekolah	7 Unit	530.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyediaan angkutan bus sekolah	7 Unit	530.000	
2.6.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit	530.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit	530.000	
2.7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Laporan	4.160.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Laporan	4.160.000	

1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penga wasan Pelaksan aan Izin Penyeleng garaan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenang an Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkro nisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	3.900.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penga wasan Pelaksana an Izin Penyeleng garaan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenang an Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkro nisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	3.900.000	
2.7.2	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizin an Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Unit	260.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizin an Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Unit	260.000	

Dalam perkembangannya rancangan awal RKPD mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Perubahan terhadap rancangan awal tersebut dilakukan untuk mengakomodir berbagai masukan dan inspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) yang dihasilkan dari perjalanan proses penyusunan musyawarah mulai dari musyawarah tingkat kalurahan, kapanewon maupun kabupaten (Musrenbang).

Berdasarkan SE Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, pagu anggaran Dinas Perhubungan pada rancangan awal sebesar Rp2.000.000.00,00 yang terdiri dari anggaran DAU. Setelah disinkronkan dengan kebutuhan dan usulan masyarakat hasil musrenbang Kapanewon, pagu anggaran Dinas Perhubungan menjadi Rp21.241.533.709,00 yang terdiri dari anggaran DAU sebesar Rp20.025.243.709,00, anggaran PIWK Rp24.000.000,00, PIS Rp446.000.000,00 dan Anggaran bersumber Dana Keistimewaan sebesar Rp746.290.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan diawali dengan pengumpulan program dan kegiatan dari bidang-bidang dan UPT yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul. Langkah selanjutnya, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah serta program dan kegiatan mampu memenuhi kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat, diadakan musrenbang di semua kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam proses musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat kapanewon/kalurahan yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, diberi kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dapat benar-benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan dalam usulan program kegiatan PIWK dan PIS. Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan dibahas lagi pada Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kapanewon sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang, ditanggapi oleh peserta dan kemudian disepakati bersama hasil forum perangkat daerah tersebut. Rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan (Rp)	Anggaran	Catatan
1	Cermin tikung (PIWK)	Dunggubah I, Duwet, Wonosari	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 unit	6.000.000	6.000.000,00	Diterima dan dianggarkan
2	Cermin tikung (PIWK)	Karangtengah, Karangtengah, Wonosari	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 unit	6.000.000	6.000.000,00	Diterima dan dianggarkan
3	Cermin tikung (PIWK)	Selang, Selang, Wonosari	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	6.000.000	12.000.000,00	Diterima dan dianggarkan
4	Cermin Tikung	Gangsalan kidul RT 19 dan Wuni RT 26, NGLINDUR, GIRISUBO	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	6.000.000,00	12.000.000,00	Secara teknis memenuhi syarat
5	Cermin Tikung	Parangrejo RT 13/ RW 03 Girijati, Girijati, Purwosari	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	6.000.000,00	12.000.000,00	Secara teknis memenuhi syarat
6	Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Parangrejo RT 13/ RW 03 Girijati, Girijati, Purwosari	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	20 meter	1.800.000,00	36.000.000,00	Secara teknis memenuhi syarat
7	Rambu standar	Parangrejo, Girijati, Purwosari, Gunungkidul	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 unit	1.700.000,00	8.500.000,00	Secara teknis memenuhi syarat
8	Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Padukuhan Tileng, Jalan KAbupaten 1501 (Trowono-Kepek), Kepek, Saptosari	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	50 meter	1.800.000,00	90.000.000,00	Secara teknis memenuhi syarat
9	Pengadaan dan pemasangan warning light	Padukuhan Jragum, kalurahan Ngeposari, Semanu	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 unit	70.000.000,00	70.000.000,00	Secara teknis memenuhi syarat
10	Pengadaan dan pemasangan warning light	Pulegundes I, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	70.000.000,00	140.000.000,00	Secara teknis memenuhi syarat
11	Pengadaan dan pemasangan warning light	JOGOLOYO, Duwet, Wonosari	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 unit	70.000.000,00	70.000.000,00	Secara teknis memenuhi syarat
12	Cermin Tikung	Kalurahan Karangtengah , Karangtengah, Wonosari	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 unit	6.000.000,00	6.000.000,00	Secara teknis memenuhi syarat
13	Pengadaan dan pemasangan warning light	Kalurahahan Karangtengah, Karangtengah, Wonosari	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 unit	70.000.000,00	8.500.000,00	Secara teknis memenuhi syarat
14	Rambu standar	jln Kolonel Sugiyono, Wonosari, Wonosari	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 unit	1.700.000,00	5.100.000,00	Secara teknis memenuhi syarat
JUMLAH ANGGARAN PIS						446.000.000,00	

Sesuai hasil Musrenbang Kapanewon, terdapat 14 (empat belas) usulan yang masuk di program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari 3 (tiga) usulan PIWK dan 11 (sebelas) usulan PIS. Sedangkan dari Pokok Pikiran (POKIR) Dewan Dinas Perhubungan Tahun 2026 tidak menerima usulan.

Dari 14 (empat belas) usulan tersebut, setelah melalui verifikasi PD, semua usulan secara teknis memenuhi syarat. Namun demikian dari semua usulan PIS sebesar Rp519.600.000,00 karena keterbatasan pagu anggaran yang ada sebesar Rp446.000.000,00, maka 2 (dua) usulan PIS yang memenuhi syarat secara teknis, diakomodir tidak sesuai usulan namun disesuaikan dengan pagu anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2026. Daftar usulan dari pemangku kepentingan yang dapat terakomodir oleh Dinas Perhubungan Tahun 2026 sebagaimana tabel 2.8 dan 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.8
Usulan Kegiatan PIWK Terakomodir Tahun 2026
Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

No	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Perleng- kapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	(PIWK) - Cermin Tikung	Dunggubah I, Duwet, Wonosari	1 unit	6.000.000
		(PIWK) - Cermin Tikung	Karangtengah, Karangtengah, Wonosari	1 unit	6.000.000
		(PIWK) - Cermin Tikung	Selang, Selang, Wonosari	2 unit	12.000.000
JUMLAH					24.000.000

Tabel 2.9
Usulan Kegiatan PIS Terakomodir Tahun 2026
Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul

No	Program/Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Perleng- kapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cermin Tikung	Gangsalan kidul RT 19 dan Wuni RT 26, NGLINDUR, GIRISUBO	2 unit	12.000.000,00
		Cermin Tikung	Parangrejo RT 13/ RW 03 Girijati, Girijati, Purwosari	2 unit	12.000.000,00
		Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Parangrejo RT 13/ RW 03 Girijati, Girijati, Purwosari	20 meter	36.000.000,00
		Rambu standar	Parangrejo, Girijati, Purwosari, Gunungkidul	5 unit	8.500.000,00
		Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)	Padukuhan Tileng, Jalan KAbupaten 1501 (Trowono-Kepek), Kepek, Saptosari	48 meter	86.400.000,00
		Pengadaan dan pemasangan warning light	Padukuhan Jragum, kalurahan Ngeposari, Semanu	1 unit	70.000.000,00
		Pengadaan dan pemasangan warning light	Pulegundes I, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	1 unit	70.000.000,00
		Pengadaan dan pemasangan warning light	JOGOLOYO, Duwet, Wonosari	1 unit	70.000.000,00
		Cermin Tikung	Kalurahan Karangtengah , Karangtengah, Wonosari	1 unit	6.000.000,00
		Pengadaan dan pemasangan warning light	Kalurahahan Karangtengah, Karangtengah, Wonosari	1 unit	8.500.000,00
		Rambu standar	jln Kolonel Sugiyono, Wonosari, Wonosari	3 unit	5.100.000,00
JUMLAH					446.000.000,00

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis yang relevan dengan urusan perhubungan. Arah kebijakan nasional perhubungan tahun 2026, secara umum, akan mengarah pada peningkatan kualitas layanan transportasi, peningkatan keselamatan lalu lintas, dan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.

- Peningkatan Layanan Transportasi:
  Fokus pada pengembangan transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan. Ini mencakup pengembangan bus rapid transit (BRT), kereta api jarak jauh, serta pengembangan transportasi berbasis aplikasi (ride-hailing) yang lebih baik.
- Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas:
  Penekanan pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang keselamatan lalu lintas, serta penegakan aturan yang lebih ketat terhadap pelanggaran lalu lintas.
- Pembangunan Infrastruktur Transportasi:
  Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan terminal yang lebih baik, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi berbasis teknologi seperti sistem transportasi cerdas.
- Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan:
  Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor perhubungan, termasuk pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta peningkatan layanan publik.
- Peningkatan Keamanan Siber Transportasi:
  Peningkatan keamanan siber dalam sistem transportasi, terutama dalam sistem transportasi publik dan sistem transportasi berbasis teknologi.
- Pengembangan Transportasi yang Berkelanjutan:
  Peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam transportasi, serta pengembangan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda, sepeda motor listrik, dan bus listrik.
- Integrasi Moda Transportasi:
  Peningkatan integrasi antara berbagai moda transportasi (darat, laut, udara) untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan terpadu.

Sedangkan arah kebijakan perhubungan di DIY tahun 2026 berfokus

pada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan Dinas Perhubungan DIY untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, dengan sasaran utama meningkatkan keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas.

- Peningkatan Keselamatan:
  Mencakup berbagai upaya seperti peningkatan standar keamanan kendaraan, penegakan aturan lalu lintas, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keselamatan jalan.
- Peningkatan Kelancaran:
  Upaya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, pengembangan sistem transportasi publik yang efisien, dan peningkatan infrastruktur jalan.
- Peningkatan Ketertiban:
  Penegakan hukum lalu lintas secara konsisten, peningkatan kapasitas petugas lalu lintas, dan sosialisasi aturan lalu lintas kepada masyarakat.
- Peningkatan Kenyamanan:
  Pengembangan transportasi publik yang nyaman, penyediaan fasilitas penunjang seperti halte dan tempat parkir, serta peningkatan kualitas jalan.
- Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkelanjutan:
  Ini mencakup upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan dalam transportasi, dan pengembangan transportasi ramah lingkungan.
- Kolaborasi dan Inovasi:
  Kolaborasi antar stakeholder, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam mengembangkan solusi transportasi yang inovatif dan efektif.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah:

"Penguatan Fondasi Pembangunan melalui Peningkatan Derajat Pendidikan, Kesehatan, Kemandirian Ekonomi berdasarkan Potensi Daerah yang Lestari Menuju Keseahteraan Masyarakat"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

Dalam prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema pembangunan tahun 2026, secara langsung Dinas Perhubungan mendukung pencapaian prioritas daerah Program Alam Lestari. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PD TAHUN 2030
1	Terwujudnya layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	Rasio konektifitas kabupaten/Kota	0,63

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Perhubungan

NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET SASARAN PD TAHUN 2026
1	Peningkatan layanan transportasi	Indeks layanan transportasi	62,17

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor ..../KPTS/.... tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
Tahun 2026

NO	IKU	TARGET KINERJA IKU PD TAHUN 2026
1	Rasio konektifitas kabupaten/Kota	0,59
2	Indeks layanan transportasi	62,17

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Hasil proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari tingkat kalurahan sampai dengan kabupaten, secara implementatif tertuang dalam rumusan rencana program dan kegiatan prioritas. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2026 ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, namum tetap diprioritaskan untuk menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2026 serta didorong untuk pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian sasaran dan prioritas daerah, pencapaian IKU (indikator kinerja utama), pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan wilayah miskin serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul termasuk salah satu perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah berupa retribusi perparkiran. Pada tahun 2026 nilai retribusi ditargetkan sebesar Rp2.276.750.000,00 dengan uraian seperti tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Asli daerah Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Target Tahun 2026
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.220.000.000,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.040.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	1.002.085.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	13.080.000,00
JUMLAH		2.240.205.000,00

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 dijabarkan dalam 3 program dan 16 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp21.241.533.709,00, yang bersumber APBD Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp20.495.243.709,00, sedangkan yang bersumber dari Dana Keistimewaan sebesar Rp 746.290.000,00 yang dijabarkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Alam Lestari	Terciptanya kondisi lingkungan hidup yang berkualitas dan Berkelanjutan	Peningkatan layanan transportasi	Indeks layanan transportasi	62,17 persen	1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	746.290.000	
					1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	746.290.000	
					1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	746.290.000	
					1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	746.290.000	
					1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	746.290.000	Bidang LL dan Bidang PJU Perparkiran
					2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	15.379.211.700	
					2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	15.379.211.700	
					2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	15.379.211.700	
					2.15.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.156.302.100	
					2.15.02.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.763.947.100	Bidang LL dan Bidang PJU Perparkiran
					2.15.02.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3.750.000	Bidang Angkutan dan Terminal
					2.15.02.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	388.605.000	Bidang LL dan Bidang PJU Perparkiran
					2.15.02.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	10.614.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.15.02.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	5.400.000	Bidang Angkutan dan Terminal
					2.15.02.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	5.214.000	Bidang Angkutan dan Terminal
					2.15.02.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	984.487.250	
					2.15.02.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	984.487.250	Bidang PJU dan Perparkiran
					2.15.02.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	334.625.350	
					2.15.02.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	498.000	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
					2.15.02.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	159.225.000	Bidang Angkutan dan Terminal
					2.15.02.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	116.605.000	Bidang Angkutan dan Terminal
					2.15.02.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	58.297.350	Bidang Angkutan dan Terminal
					2.15.02.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	767.073.000	
					2.15.02.06.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		Bidang Lalu Lintas
					2.15.02.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	740.345.000	Bidang Lalu Lintas

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.15.02.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	23.080.000	Bidang Lalu Lintas
					2.15.02.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.648.000	Bidang Lalu Lintas
					2.15.02.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	121.950.000	
					2.15.02.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	121.950.000	Bidang Angkutan dan Terminal
					2.15.02.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.160.000	
					2.15.02.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3.900.000	Bidang Angkutan dan Terminal
					2.15.02.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	260.000	Bidang Angkutan dan Terminal

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Perhubungan				21.241.533.709				27.765.615.936
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				746.290.000				0
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				746.290.000				0
1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik		20 Persen	746.290.000				0
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			746.290.000				0
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	746.290.000	Dana Keistimewaan DIY			0
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				20.495.243.709				27.765.615.936
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				20.495.243.709				27.765.615.936
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		82,90 Nilai	5.116.032.009		-	100%	4.673.111.086

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			98.857.800		-	32 dokumen	34.247.800
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	6 dokumen	89.560.800	Dana Alokasi Umum	-	6 dokumen	24.950.800
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 dokumen	880.000	Dana Alokasi Umum	-	1 dokumen	880.000
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 dokumen	565.000	Dana Alokasi Umum	-	1 dokumen	565.000
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 dokumen	560.000	Dana Alokasi Umum	-	1 dokumen	560.000
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	1 dokumen	800.000	Dana Alokasi Umum	-	1 dokumen	800.000
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	18 laporan	3.400.000	Dana Alokasi Umum	-	18 dokumen	3.400.000
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	5 laporan	3.092.000	Dana Alokasi Umum	-	5 dokumen	3.092.000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah			3.348.718.957		-	46 dokumen	3.378.373.036
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	574 orang/ bulan	3.336.318.957	Dana Alokasi Umum	-	574 dokumen	3.366.043.036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	1 laporan	1.600.000	Dana Alokasi Umum	-	1 dokumen	1.530.000
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	13 laporan	10.800.000	Dana Alokasi Umum	-	13 dokumen	10.800.000
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen administrasi barang milik daerah			799.000		-	15 dokumen	799.000
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	1 dokumen	149.000	Dana Alokasi Umum	-	1 dokumen	149.000
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	12 laporan	200.000	Dana Alokasi Umum	-	12 laporan	200.000
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	2 laporan	450.000	Dana Alokasi Umum	-	2 laporan	450.000
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi pendapatan daerah			2.040.000	Dana Alokasi Umum	-	12 laporan	2.040.000
2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	12 dokumen	2.040.000	Dana Alokasi Umum	-	12 dokumen	2.040.000
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi kepegawaian			52.139.802		-	11 dokumen	51.278.800
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	2 dokumen	20.853.802	Dana Alokasi Umum	-	2 dokumen	2.072.800
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	8 dokumen	1.296.000	Dana Alokasi Umum	-	8 dokumen	1.296.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	5 orang	2.740.000	Dana Alokasi Umum	-	5 orang	2.740.000
2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Gunungkidul, DIY,Jawa Tengah	89 orang	27.250.000	Dana Alokasi Umum	-	89 orang	45.170.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			231.067.000		-	32 dokumen	224.043.000
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	4 paket	10.000.000	Dana Alokasi Umum	-	4 paket	10.000.500
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	12 paket	83.708.000	Dana Alokasi Umum	-	12 paket	83.708.000
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	4 paket	15.180.500	Dana Alokasi Umum	-	4 paket	15.180.500
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baca an dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	12 dokumen	1.200.000	Dana Alokasi Umum	-	12 dokumen	1.200.000
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	12 laporan	12.000.000	Dana Alokasi Umum	-	12 laporan	12.000.000
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng-garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	12 laporan	107.828.500	Dana Alokasi Umum	-	12 laporan	100.804.000
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa-haan Arsip Dinamis padaSKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	4 dokumen	1.150.000	Dana Alokasi Umum	-	4 dokumen	1.150.000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			337.210.450		-	24 laporan	306.855.450
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	12 laporan	204.030.450	Dana Alokasi Umum	-	12 laporan	204.030.450

2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	12 laporan	133.180.000	Dana Alokasi Umum	-	12 laporan	102.825.000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen pemeliharaan barang milik daerah			1.045.199.000		-	13 unit	675.474.000
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliha-raan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendara an Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	40 unit	715.079.000	Dana Alokasi Umum	-	40 unit	468.724.000
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	63 unit	34.050.000	Dana Alokasi Umum	-	63 unit	34.050.000
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	1 unit	288.270.000	Dana Alokasi Umum	-	1 unit	164.900.000
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	26 unit	7.800.000	Dana Alokasi Umum	-	26 unit	7.800.000
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ))	Persentase pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang berhasil ditindak		14,25 persen	15.379.211.700			62,10 persen	23.092.504.850
		Persentase ketersediaan fasilitas terminal tipe C dan bus sekolah		66,94 persen					
		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan dan perparkiran		50,00 persen					
		Persentase kendaraan yang lulus uji		95,20 persen					
2.15.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota			13.156.302.100			4 unit	22.690.000.000
2.15.02.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		50 Unit	12.290.658.500	Dana Alokasi Umum		213 unit	15.350.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	23 unit	473.288.600	Dana Alokasi Umum	-	1142 unit	2.765.000.000
2.15.02.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 unit	236.135.000	Dana Alokasi Umum	-	281 unit	1.625.000.000
2.15.02.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	5 unit	156.220.000	Dana Alokasi Umum	-	250 unit	2.950.000.000
2.15.02.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan dan pengembangan terminal tipe c Semin			10.614.000		-	2 unit	10.614.000
2.15.02.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin	1 unit	5.400.000	Dana Alokasi Umum	-	1 unit	5.400.000
2.15.02.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Kab. Gunungkidul, Semin, Semin	1 unit	5.214.000	Dana Alokasi Umum	-	1 unit	5.214.000
2.15.02.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Ijin penyelenggaraan dan fasilitasi parkir			984.487.250		-	22 dokumen	150.397.500
2.15.02.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyarat an Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terinte-grasi Secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosar	22 dokumen	984.487.250	Dana Alokasi Umum	-	22 dokumen	150.397.500
2.15.02.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kendaraan wajib uji			334.625.350		-	1 unit	148.595.350
2.15.02.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 unit	498.000	Dana Alokasi Umum	-	1 unit	498.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4250 unit	159.225.000	Dana Alokasi Umum	-	4250 unit	3.550.000
2.15.02.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 dokumen	116.605.000	Dana Alokasi Umum	-	2 dokumen	86.250.000
2.15.02.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	15 unit	58.297.350	Dana Alokasi Umum	-	15 unit	58.297.350
2.15.02.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan kabupaten/kota			767.073.000		-	23 dokumen	88.208.000
2.15.02.06.0004	Pengawasan dan Pengenda- lian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	740.345.000	Dana Alokasi Umum	-	12 laporan	61.480.000
2.15.02.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 dokumen	23.080.000	Dana Alokasi Umum	-	8 dokumen	23.080.000
2.15.02.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman	3 laporan	3.648.000	Dana Alokasi Umum	-	3 laporan	3.648.000
2.15.02.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Layanan angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			121.950.000		-	7 unit	530.000
2.15.02.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	7 unit	121.950.000	Dana Alokasi Umum	-	7 unit	530.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.160.000		-	-	4.160.000
2.15.02.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosar	12 laporan	3.900.000	Dana Alokasi Umum	-	12 laporan	3.900.000
2.15.02.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosar	1 unit	260.000	Dana Alokasi Umum	-	12 laporan	260.000
					21.241.533.709				**27.765.615.936,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2026 merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS), serta Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan OPD yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 berisi rancangan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2026.

a. Catatan Penting

   Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kalurahan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon dan selanjutnya di proses dalam Forum OPD tingkat Kabupaten hingga Pusat.
   Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026. Prioritas program/kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi daerah juga diarahkan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap program/kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders).* tetap harus di kedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan. mendasar pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian. dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya prefentif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Perhubungan mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran perangkat daerah tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman, dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
DINAS PERHUBUNGAN,

ttd

IRAWAN JATMIKO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu (satu) tahun yang telah disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan

rencana pembangunan tahunan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu, Kepala Daerah terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, maka Bupati terpilih harus menyusun RPJPD tahun 2025-2029. Sejalan terhadap penyusunan RPJMD maka Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) tahun 2025-2029.
Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, dan menjadi dasar penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2025 sebagai bahan evaluasi kinerja.

Dokumen Renja Perangkat Daerah ini, selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan dalam pelayanan masyarakat tahun 2026, serta menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026. Realisasi dari perencanaan yang

dituangkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah tahun anggaran 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 123 Tahun 1924 tentang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pedoman Desk Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Pra RKA Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
16. Surat Edaran Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Renja 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di jabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2026;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;

3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja tahun 2026;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah serta Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

I. BAB I PENDAHULUAN
   1.1. Latar Belakang
   1.2. Landasan Hukum
   1.3. Maksud dan Tujuan
   1.4. Sistematika Penulisan
II. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD
   2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
   2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
   2.3 Isu- isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
   2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
   2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
   3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
   3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024, pada tahun 2024 dari APBD Kabupaten Gunungkidul, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran belanja operasi sebesar Rp 18.431.792.773,00 (Delapan Belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 644.000.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) yang dijabarkan dalam 6 program 13 kegiatan dan 40 sub kegiatan.

Tahun 2026 melanjutkan menggunakan nomenklatur program kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, trakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Kominfo mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 19.010.912.697,00 untuk melaksanakan 3 urusan, 6 program, 11 kegiatan dan 41 sub kegiatan.

Realisasi anggaran dan kinerja tahun lalu/Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian tahun berjalan/Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output dan Outcomes) Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran dan Sub Kegiatan sd th 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisai Capaian (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
2.16.01	URUSAN WAJIB									
2.16.01	PROGRAM PENUNJANNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	100 %		100%	3.258.401.237	90.49	100%	100%	100
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	27 Dokumen	7.740.000	27 Dokumen	11.925.700	96.15	100	27 Dokumen	100
		Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.740.000	100	11.925.700	96.15	100%	27 Dokumen	100
2.16.01.2.0.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.050.000	3 Dokumen	9.302.400	95.12	100%	3 Dokumen	100
2.16.01.2.0.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	489.000	1 Dokumen	246.900	100	100%	1 Dokumen	100
2.16.01.2.0.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	248.000	1 Dokumen	190.000	100	100%	1 Dokumen	100
2.16.01.2.0.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	489.000	1 Dokumen	246.900	100	100%	1 Dokumen	100
2.16.01.2.0.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	248.000	1 Dokumen	190.000	100	100%	1 Dokumen	100

2.16.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	999.500	99.99		5 Dokumen	100
2.16.01.2.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	1.998.000	17 Dokumen	750.000	100		17 Dokumen	100
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.884.996.386	100 persen	1.922.145.057	91.14		100 persen	100
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu	28 laporan	1.925.890.288	28 laporan	1.914.945.057	91.11		28 laporan	100
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	1.925.890.288	14 bulan	1.914.945.057	91.11		14 bulan	100
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.200.000	1 laporan	1.200.000	100		1 laporan	100
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	6.000.000	13 Laporan	6.000.000	100		13 Laporan	100
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Layanan	12.600.000	1 Layanan	32.026.904	86.31		1 Layanan	100
		Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	12.600.000	100	32.026.904	86.31		1 Layanan	100
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	37.106.900	6 dokumen	32.026.904	86.31		6 dokumen	100
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 layanan	496.610.200	9 Layanan	375.099.123	75,59		9 layanan	100
		Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	496.610.200	100 persen	375.099.123	75,59		100 persen	100
2.16.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket		12 paket	1.045.000	100		12 paket	100
2.16.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket		3 paket	29.105.000	100		3 paket	100

2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket		12 paket	17.528..000	100		12 paket	100
2.16.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 paket		12 paket	5.880.000	79,67		12 paket	100
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	7.000.000	12 laporan	8.450.000	96,57		12 laporan	100
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	432.802.000	12 laporan	313.090.323	72,34%		12 laporan	100
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18 unit	42.000.000	18 unit	41.768.200	99,42%		18 unit	100
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 unit	42.000.000	18 unit	41.768.200	99,42%		18 unit	100
2.16.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	425.056.648	12 laporan	401.883.575	94,55		12 laporan	100
2.16.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	119.909.300	12 laporan	110.607.738	98,91		12 laporan	100
2.16.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana	17 layanan	329.730.600	17 layanan	354.954.940	98,90		17 layanan	100
2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharran, biaya pemeliharaan, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau laporan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 unit	173.600.000	11 unit	173.588.050	99,99		11 unit	100
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17 unit	17.310.000	17 unit	17.299.000	97.66		17 unit	100
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	14 unit	119.909.300	14 unit	164.067.890	97.66		14 unit	100

2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan penyebaran informasi publik	62,21%	.045.000	98,90 %	3.381.559.903	96,88			100
2.16.02.01	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komuniksi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komuniksi publik	16 Dokumen	185.175.000	16 Dokumen	588.184.495	94,84		16 Dokumen	100
2.16.02.05	Pengeloaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengeloaan Media Komunikasi Publik	2 dokumen		2 dokumen	1.749.660.515	99,27		2 dokumen	
2.16.02.01.06	Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan informasi publik		153.070.000		99.825.000	67,65			100
2.16.02.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		222.260.500		943.889.700	98,32			100
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Capaian Aplikasi informatika	87%	9.531.210.000	87%	10.597.822.200	97,96		100%	
2.16.03.2.01.02	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	6 layanan	8.926.210.500	6 layanan	8.892.622.800	98,75		6 layanan	100
	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	55.500	55,50		1 Dokumen	100
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah system jaringan intra pemerintah daerah		8.925.960.000		8.892.567.300	98,75			
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	6 jenis	605.100.000	92,82 %	1.705.194.400	94,06		6 jenis	100
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah	2 Unit	450.000.000	2 unit	1.177.297.100	92,02		2 unit	100
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan system komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah Penyelenggaraan system komunikasi intra pemerintah daerah	12 Dokumen	58.000.000	12 Dokumen	52.000..000	100		12 Dokumen	100

2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smarcity	12 Dokumen	47.100.000	12 Dokumen	158.537.000	98,33		12 Dokumen	100
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	317.365.000	99,11		1 Dokumen	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral	95 %	70.339.400	20%	93.509.500	98,61			
2.20.02	Penyelenggaraan statistic sectoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan Penyelenggaraan statistic sectoral di lingkup daerah kabupaten/kota	7 layanan	70.339.400	7 layanan	93.509.500	98,61		7 layanan	100
'2,20,02,2,01,01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 dokumen	38.509.400	1 dokumen	78.677.500	98,34		1 dokumen	100
'2,20,02,2,01,02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meingkat kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	70 orang	31.509.460	70 orang	14.830.000	100		70 orang	100
'2,21,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	75 %	287.895.000	100 %	298.557.947	97,48			100
'2,21,02,2,01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	8 layanan	367.470.000	8 layanan	293.842.447	97,63		8 layanan	100
'2,21,02,2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan	25.870.000	1 laporan	52.110.000	96,20		1 laporan	100
'2,21,02,2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan	22.350.000	1 laporan	42.747.000	97,93		1 laporan	100
'2,21,02,2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	49 Perangkat daerah	232.375.000	49 Perangkat daerah	198.985.947	97%		49 Perangkat daerah	100
'2,21,02,2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 jenis	7.300.000	1 jenis	4.715.000	88,71 %		1 jenis	100
'2,21,02,2.02	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang dalam jaring komunikasi sandi	1 Perangkat Daerah	7.300.000	1 Perangkat Daerah	4.715.000	88,71 %		1 Perangkat Daerah	100

2.22.08.5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terlaksana dengan baik		700.000.000		700.000.000	100			
2.22.08.5.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1 layanan	700.000.000	1 layanan	700.000.000	100		1 layanan	100
2.22.08.5.04.02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY yang dibangun	100 obyek	700.000.000	100 obyek	700.000.000	100		71 titik	100
JUMLAH				19.010.912.697		18.329.848.589	96,42			

Dari tabel 2.1 di atas terlihat capaian tingkat kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 mencapai 97,22 %. Sebagian besar target kinerja kegiatan tahun 2024 sudah terlaksana dengan baik. Capaian kinerja kegiatan pada tahun 2024 yang realisasi target kinerjanya sesuai target 100 % ada 2 kegiatan, 11 kegiatan yang belum/ tidak memenuhi target, karena jadwal kegiatan berubah dan tidak ada kegiatan yang melebihi target.

Kegiatan yang telah tercapai/sesuai targetnya, yaitu sampai 100 % adalah :

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan

Kegiatan yang realisasinya mencapai target 100% atau memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan keuangan maupun fisik yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan secara berkala sehingga bisa diantisipasi hal-hal yang menghambat pencapaian kinerja.

Kegiatan yang belum memenuhi targetnya :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

10. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan yang telah melebihi target.

Di Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pencapaian realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja dari target kinerja tidak ada.

Faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/kegiatan dari target yang direncanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan pada umumnya karena keterbatasan anggaran untuk melakukan inovasi terhadap pelayanan publik;
2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena pada tahun berjalan program/kegiatan sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Tahun 2026 untuk indikator kinerja dengan menggunakan nomenklatur program kegiatan yang baru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, trakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2026.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar dinas.

Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat serta untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang diperlukan langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan sehingga misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dapat dilaksanakan.

Langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan untuk pencapaian target kinerja Tahun 2026 antara lain adalah :

1. Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan memaksimalkan keluaran dan hasil (output dan outcome) dengan masukan (input) yang tersedia. Program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk memecahkan isu dan masalah strategis yang dihadapi;
2. Optimalisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Teknik Informatika, pembinaan jaringan komunikasi data dan informatika serta pembinaan dan penyelenggaraan TIK;
3. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan terus meningkatkan kualitas baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarananya;
4. Memaksimalkan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi agar semua program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 sebagian besar merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun 2023, sebagian lagi merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Gunungkidul sekaligus sebagai wujud pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika diberi tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya, sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan PD disampaikan IKU (indikator kinerja utama), SPM (Standar Pelayanan Minimal), MDGs (*millennium development goals*) dan IKK (indikator kinerja kunci) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)										
1	Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika	Persen	55,28	69,26	83,24	93,89	100	100	100	100	
B	SPM (Standart Pelayanan Minimal)										Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Komunikasi dan Informatika tidak lagi masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam Renstra 2021-2026 tidak ditetapkan target pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika
C	IKK (Indikator Kinerja Kunci)										
	IKK Outcome : Persentase organisasi Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yangdisediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
	IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
	IKK Outcome : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,	Persen	N/A	N/A	68,50	70	68,36	72,48	100	100	

	MengetahuiKebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
	IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalammenyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
	IKK Outcome : Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
	IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
	IKK Outcome : Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
	IKK Outcome : Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

Dari tabel 2.2 di atas terlihat bahwa target Renstra untuk indikator kinerja pelayanan khususnya SPM (standar pelayanan minimal) kosong (kolom 4-8), karena dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 tidak ditetapkan targetnya. Hal ini dikarenakan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12, terdapat perubahan tentang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana disebutkan bahwa urusan wajib yang terkait dengan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial, sedangkan komunikasi dan informatika masuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026-2029 tidak ditetapkan targetnya. Namun demikian, karena petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut sampai saat ini belum terbit, sesuai kesepakatan dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah DIY, penyusunan evaluasi pelaksanaan SPM masih mengacu pada undang-undang lama dengan tetap melaporkan 15 bidang urusan SPM termasuk didalamnya bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga capaiannya tetap dievaluasi dan dilaporkan sampai tahun 2018.

Untuk indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) telah berhasil dilaksanakan dengan capaian sampai 2024 seperti terlihat kolom (9) tabel 2.2 di atas. Tahun 2024 capain IKU sebesar 100% dari target 69,24. Capaian tersebut didukung oleh semua unsur indicator dalam perumusan dan penghitungan IKU Perangkat Daerah. Tahun 2023 capaian IKU sebesar 91,80 dari target 87,78 atau sebesar 121,44%. Pecapaian tersebut didukung oleh realisasi persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif (230,04%). Dari target 9 OPD terealisasi 47 OPD yang aktif, hal ini disebabkan adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja yang mencantumkan jumlah *posting* (unggahan) berita dalam *website* Perangkat Daerah termasuk salah satu unsur untuk penilaian

capaian kinerja. serta penyediaan sarana dan parasarana untuk layanan komunikasi dan informatika telah tersedia dengan baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berimplikasi pada perubahan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kemudian menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini kemudian diikuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Secara umum, Dinas Kominfo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Dalam mengemban tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul mempunyai peluang dan tantangan yang terkait faktor eksternal.

Peluang yang ada antara lain: 1. tersedianya media informasi dan komunikasi, 2. Kebutuhan pengembangan e-Government, 3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi. Di samping itu dengan semakin terkenalnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata nasional, membuka peluang untuk terus meningkatkan sarana prasarana akses menuju obyek wisata dengan penyediaan jaringan komunikasi, meningkatkan pengelolaan maupun pemeliharaan, menambah kekuatan daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan komunikasi dan informatika.

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah :

Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Belum optimalnya tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2) Kurangnya Literasi Digital dapat terlihat dari kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi digital secara aman, bijak dan produktif yang masih rendah;

3) Belum Optimalnya Transformasi Digital karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah;
4) Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK yang mendukung transformasi digital;
5) Belum optimalnya pemanfaatan TIK sebagai media Pemasaran dan Pengiriman di sektor ekonomi dan bisnis.
6) Belum optimalnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang disebabkan antara lain PPID Pembantu belum bersertifikat serta belum adanya sistem elektronik yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik dan menilai kinerja penyelenggara layanan informasi publik;
7) Belum optimalnya publikasi dan informasi untuk mengekpos program prioritas pemerintah dan potensi daerah;
8) Pemanfaatan media luar ruang masih kurang;
9) Masih terbatasnya sumberdaya komunikasi dan informatika; dan

Urusan Statistik

1) Belum adanya SDM yang kompeten (sarjana statistik) di Perangkat Daerah;
2) Standar data dan metadata belum sepenuhnya dipahami oleh SDM di semua Perangkat Daerah;
3) Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral;
4) Belum optimalnya pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Urusan Persandian

1) Standar keamanan informasi belum diterapkan di semua Perangkat Daerah;
2) Sarana dan prasarana persandian masih terbatas;
3) Kepedulian terhadap keamanan informasi di semua Perangkat Daerah masih kurang karena kurangnya kesadaran pentingnya keamanan data;
4) Keterbatasan jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan; dan
5) Belum tersedianya sistem pengamanan jaringan.

Dengan melihat ketersediaan sumber daya yang ada, serta berdasarkan pencapaian selama ini, maka peluang dan tantangan yang mungkin dapat

dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika kedepan adalah:

1. Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Peningkatan Akses Teknologi Digital dengan meningkatkan akses internet dan perangkat digital di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.
3. Peningkatan Literasi Digital dengan meningkatkan pemahaman dan ketrampilan digital Masyarakat.
4. Mengembangkan Sistem Informasi dalam menghadapi globalisasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
5. Meningkatkan pemberdayaan potensi informasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi informasi
6. Peningkatan jaminan keamanan informasi guna meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi, maka dilaksanakan pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
7. Penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh masyarakat umum, Pemerintah Daerah, dan Instansi Vertikal.

Berdasarkan visi Kepala Daerah yang dirumuskan kedalam visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2030 yaitu: "*Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban*"

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025-2030, yaitu :

1. **Masyarakat Adil Makmur**: Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang

mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. **Masyarakat Lestari**: Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.
3. **Masyarakat Berkeadaban**: Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Dari rumusan visi tersebut, kemudian dirumuskan misi pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: Misi 5 : Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak hak rakyat, serta menjalankan tata Pemerintah Daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban, misi ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam

Penguatan Penggunaan Iptek, Penerapan Inovasi dan Peningkatan Produktivitas Ekonomi sebagai Upaya Menurunkan Ketimpangan melalui Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan Meningkatkan Peran Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Inklusif dan Berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah tidak lagi menetapkan Visi dan Misi organisasi. Kedudukan Perangkat Daerah adalah dalam rangka menyukseskan pencapaian Visi dan Misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah.

Misi kelima menegaskan komitmen terhadap Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, dan berkeadaban. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan integrasi perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kepastian hukum bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah dijalankan berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, didukung oleh pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk mendorong kebijakan berbasis bukti. Program pembangunan daerah dilaksanakan secara adil dengan menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga, tanpa memandang agama, etnis, suku, maupun kondisi difabel, dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Transformasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi terus dipercepat guna mewujudkan pemerintahan cerdas (smart government), sejalan dengan penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif serta pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi.

Di bidang demokrasi dan ketertiban sosial, pemerintah daerah berperan aktif dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, memperkuat nasionalisme, serta menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan tertib. Reformasi birokrasi diperluas hingga tingkat pemerintahan kalurahan melalui kolaborasi lintas sektor. Hak-hak politik rakyat dijamin agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan penyusunan regulasi (*participatory legal drafting*), sekaligus mempersempit ruang pengaruh kelompok superkaya

(oligarki) yang merugikan kepentingan publik. Selanjutnya, penegakan hukum yang adil, tegas, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat terus dipercepat, didukung oleh kerja sama lintas pemerintahan, wilayah, dan aktor masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, akses terhadap perlindungan sosial diperluas dengan pendekatan yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif guna memastikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan menggunakan nomenklatur program kegiatan yang baru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, trakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika merencanakan untuk melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 58 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 18.582.504.930,00 (Delapan belas milyar Lima ratus Delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disesuaikan dengan tahun keeenam periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026. Namun demikian berdasarkan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja PD tahun 2024 dan hasil evaluasi Renja PD tahun 2025 menyebabkan indikator output beberapa kegiatan pada Rancangan Awal Renja Tahun 2026 mengalami perubahan. Usulan tersebut selanjutnya akan diselaraskan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) dari tingkat desa hingga Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Usulan ini kemudian diselaraskan pula dengan usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang lain dalam Forum PD. Selama proses yang berlangsung serta berdasarkan analisis kebutuhan terhadap isu-isu strategis dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dimungkinkan akan terjadi perubahan terhadap rancangan awal rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam perubahan tersebut terjadi penambahan alokasi anggaran ataupun output pada kegiatan yang sudah ada. Penambahan, pengurangan, ataupun penyesuaian anggaran dan target kinerja kegiatan sebagai hasil proses yang dialami dalam penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika hingga selesainya kegiatan Musrenbang Kabupaten.

Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan prioritas pembangunan tahun 2026, beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan antara lain: 1. Penyusunan program kegiatan beserta indikator kinerjanya mengedepankan pada prinsip "*money follow program*" untuk mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan target-target RPJMD, kebijakan umum Bupati maupun Renstra PD; 2. Program kegiatan diarahkan pada pencapaian target RPJMD/IKU Daerah dan target Renstra PD/IKU PD pada tahun 2026.

Pada tahun 2026 semua program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Akhir RKPD.

Penjabaran program kegiatan berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2026 serta hasil analisa kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	100 persen	3.380.721.397	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	100 persen		
1)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo			6.7490.500	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo				
(1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33 dokumen	1.520.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33 dokumen		
(2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	490.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		
(3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen		
(4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1dokumen	490.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
(5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen		
(6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 dokumen	1.450.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 dokumen	3.000.000	
(7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	810.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	1.000.000	
2)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo			2.143.921.397	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo				
(8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 orang	2.136.719.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 orang		
(9)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	5		12
(10)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan		
3)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kominfo			41.952.405	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kominfo				
(11)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	32.286.173	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen		
(12)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	9.666.232	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kominfo	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang		
4)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kominfo		12 layanan	365.224.495	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kominfo		12 layanan		
(13)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	12.467.495	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		
(14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	32.717.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket		
(15)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 dokumen	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kominfo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	5		12
(16)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	5.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen		
(17)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan		
(18)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen	302.050.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen		
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo		1 layanan	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo		1 layanan		
(19)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit		
6)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo		3 layanan	401.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo		3 layanan		
(20)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	334.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		
(21)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	67.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan		
7)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo		17 layanan	321.873.600	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo		17 layanan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
(24)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Dinas Kominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	174.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Dinas Kominfo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit		
(25)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	20.000..000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit		
(27)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	67.875.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit		
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Persentase Capaian Informasi dan Komunikasi Publik	70 persen	230.000.000	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Persentase Capaian Informasi dan Komunikasi Publik	70 persen		
9)	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kominfo	Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	18 Layanan	230.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kominfo	Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	18 Layanan		
	Relasi Media	Dinas Kominfo	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 laporan	60.000.000	Relasi Media	Dinas Kominfo	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 laporan	104.125.000	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dinas Kominfo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	144 komunitas	10.000.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dinas Kominfo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	144 komunitas		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	9 permohonan	50.000.000	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	9 permohonan		
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 media	50.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 media	220.160.000	
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2 dokumen	50.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2 dokumen		
	Penyusunan Konten	Dinas Kominfo	Jumlah Konten Informasi Publik	12 konten	10.000.000	Penyusunan Konten	Dinas Kominfo	Jumlah Konten Informasi Publik	12 konten	20.000.000	
3.	Program Aplikasi Informatika	Kabupaten Gunungkidul ,semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Persentase Capaian Aplikasi Informatika	100 persen	350.000.000.000	Program Aplikasi Informatika	Kabupaten Gunungkidul,semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Persentase Capaian Aplikasi Informatika	100 persen		
11)	Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ KotaKepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul ,semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah layanan Pengelolaan e Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9 layanan	350.000.000	Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ KotaKepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul,semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah layanan Pengelolaan e Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9 layanan		
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Gunungkidul ,semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	47 perangkat Daerah	11.040.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Gunungkidul,semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	47 perangkat Daerah	20.958.860.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum	Kabupaten Gunungkidul ,semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 aplikasi	200.000.000	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum	Kabupaten Gunungkidul,semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 aplikasi		
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kabupaten Gunungkidul ,semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 laporan	24.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kabupaten Gunungkidul,semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 laporan		
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kabupaten Gunungkidul ,semua Kapanewon,	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	6 dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kabupaten Gunungkidul,semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	6 dokumen		
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Kominfo	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral		20.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Kominfo	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
12)	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	2 laporan	20.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	2 laporan		
	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Dinas Kominfo	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100 persen	10.000.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	2 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah			
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Kominfo	Persentase Capaian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	80 persen	166.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN NFORMASI					
13)	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kominfo	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	8 layanan	156.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Kominfo	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 laporan	10.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2 laporan	5.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Dinas Kominfo	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	47 perangkat daerah	141.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian			
14)	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota				10.000.000	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
(39)	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Gunungkidul , semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	3 kegiatan	10.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Gunungkidul, semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Gunungkidul , semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Persentase Capaian Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terlaksana dengan baik								
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kabupaten Gunungkidul , semua Kapanewon, Semua Kalurahan Kabupaten Gunungkidul , semua Kapanewon, Semua Kalurahan	Jumlah layanan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang terbangun	1 layanan 100 obyek	**750.000.000** **4.886.721.397**						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah. Selain itu program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahap selanjutnya diadakan musyawarah perencanaan pembangunan/musrenbang di semua kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam proses musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat Kapanewon/Kalurahan yang terkait langsung dengan pelayanan PD, diberi kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan PD. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan dalam usulan program kegiatan PIWK, sektoral/PIS dan Pokir DPRD. Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan usulan dibahas lagi pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kapanewon sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang kapanewon, ditanggapi oleh peserta dan kemudian disepakati bersama hasil forum PD tersebut. Pada Tahun 2024 ini tidak ada usulan kegiatan PIWK, demikian pula dengan usulan kegiatan PIS maupun Pokir DPRD untuk Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 sebagaimana tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5

Usulan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indicator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
	--	--	--	--	--	--	--

No
(1)
-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk kembali bangkit dengan memaksimalkan segenap kekuatan sumber daya bangsa untuk tumbuh menjadi negara besar, khususnya melalui digitalisasi nasional. Untuk itu, Kemenkominfo melalui Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), farming dan refarming frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, dan menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional. Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan startup digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan

publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai regulator, Kemenkominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan presiden, ataupun peraturan menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kemenkominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya validasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjaga.

Untuk menunjang kelancaran dalam penerapan teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, mulai tahun 2017 telah dilaksanakan pemasangan Jaringan Fiber Optik untuk melayani komunikasi berbasis internet maupun intranet di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam penyebaran informasi di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tantangan tersendiri. Belum semua Kalurahan terjangkau sarana informasi yang memadai. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke Kalurahan-Kalurahan dilakukan dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial yang diantaranya melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan group seni Pertunjukan Rakyat (Pertunra). Keberadaan KIM dan kelompok seni Pertunra adalah sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang berperan sebagai penyebar *(disseminator*) informasi kepada masyarakat. Dikarenakan melalui kedua media ini, masyarakat akan lebih mudah menerima dan menyerap informasi.

Terkait dengan penyebaran informasi, maka Dinas Kominfo juga telah mempunyai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Swara Dhaksinarga FM pada frekuensi 89,90 MHz dengan Izin Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 826 Tahun 2017 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Harian LPPL Radio Swara Dhaksinarga.

Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Mengacu visi Gubernur DIY periode 2022-2027 “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Pancamulia sebagai Visi RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Pasal 5 yang memberikan amanah Pengaturan Keistimewaan DIY.

Ada tiga hal utama yang saling mengkait dan menjadi prioritas perhatian dari Visi dan Misi Gubernur DIY 2022-2027. Ketiga hal tersebut adalah : Kawasan Selatan, Reformasi Kalurahan dan Teknologi Informasi.

Jika dijabarkan ke dalam proposisi lengkap, maka visi Calon Gubernur DIY 2022-2027 adalah **“Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan,**

serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi." Perinciannya sebagai berikut:

1. Kawasan Selatan

Kawasan Selatan mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara. Kawasan Selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial.

2. Reformasi Kalurahan

Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfataan Teknologi

Teknologi digunakan sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (Reformasi Kalurahan). Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa, sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga.

Sedangkan Misi Gubernur DIY 2022-2027 adalah :

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni :

1) Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan.

2) Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan: dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat.
3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi.
4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Sasaran pembangunan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan DIY adalah "Meningkatnya penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Meningkatnya keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan". Sedangkan arah kebijakan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut adalah 1) Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 2) Meningkatnya indicator layanan pemerintahan daerah yang berbasis elektronik 3) Pengembangan Integrasi Sistem Informasi; 4) Ketersediaan Big Data Pemda DIY; 5) Pengembangan suprastruktur dan infrasruktur Pemerintah Daerah; dan 6) Penerapan Sistem manajemen keamanan informasi; 7) Pemberdayaan PPID di setiap Badan Publik; 8) Menggiatkan forum Komunikasi PPID DIY; dan 9) Pemberdayaan Komunitas masyarakat penggiat Teknologi Informasi.
Untuk mendukung kebijakan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul menetapkan arah kebijakan yaitu mewujudkan pemerataan infrastruktur, sistem elektronik, pemberdayaan informatika dengan keamanan informasi yang optimal berbasis data dan transparansi, untuk mendukung pemantapan smart city melalui pengembangan smart village bagi seluruh kalurahan di Kabupaten gunungkidul untuk pelayanan publik yang inklusif dan mempercepat transformasi digital. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan pemanfaatan sistem elektronik untuk menjaring SDM berbakat digital sebagai embrio ekosistem digital untuk mempercepat transformasi digital yang bermanfaat dalam pembangunan Literasi

Digital, SPBE dan Smart City. Pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data dengan mengedepankan manajemen keamanan informasi serta publikasinya dalam menunjang optimalnya system.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Sasaran PD dirumuskan berdasar pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2025. Tema Pembangunan Tahun 2025 adalah Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2025. Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025 telah disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD DIY Tahun 2025. Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Komunikasi dan Komunikasi

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan Akhir Tahun 2030
1	Terwujudnya transformasi digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase tingkat kepuasan layanan digital	72

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Komunikasi dan Komunikasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran PD Tahun 2026
	Terwujudnya Pemerintahan digital	Persentase tingkat kepuasan masyaraakat terhadap akses dan	83

	yang inkulsif aman dan sehat.	kualitas informasi publik Pemerintah Daerah	
	Terwujudnya prinsip satu Data Indonesia	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Dalam Modul E Walidata SIPD	62
	Terwujudnya mitigasi ancaman keamanan siber	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber Dan Sandi Pemerintah Daerah	61

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Komunikasi Tahun 2026

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja
	Terwujudnya transformasi digital untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase tingkat kepuasan layanan digital	72
	Terwujudnya Pemerintahan Digital yang inklusif, aman dan sehat	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Pubilk Pemerintah Daerah	83
	Terwujudnya prinsip satu Data Indonesia	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Dalam Modul E Walidata SIPD	62
	Terwujudnya mitigasi ancaman keamanan siber	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber Dan Sandi Pemerintah Daerah	61

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan rencana program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 guna mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan menggunakan nomenklatur program kegiatan yang baru sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi dam Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi dam Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diubah lagi dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi dam Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika merencanakan untuk melaksanakan 3 urusan dan 6 program yang dijabarkan dalam 11 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 16.304.771.460,00 (Enam belas milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain terhadap :

1) pencapaian visi dan misi kepala daerah;

2) pencapaian prioritas dan sasaran daerah;
3) pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama);
4) pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan
5) sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kaitannya dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung misi 2 RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah dan mendukung prioritas daerah tahun 2026 yaitu Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dan Reformasi dan Birokrasi

Dari prioritas daerah tersebut, rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung sasaran daerah yaitu Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan. Pengaliran dari prioritas daerah, sasaran daerah sampai dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 Pada tahun 2026 berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika merencanakan akan melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Dalam Bab III telah diuraikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah mempunyai satu sasaran. Berdasarkan satu sasaran PD tersebut kemudian dialirkan kedalam program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026. Pengaliran sasaran PD kedalam 6 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
	Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Terwujudnya Pemerintahan Digital yang inklusif, aman dan sehat	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah	69		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.797.605.930,00	
						PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.295.907.300,00	DISKOMINFO
						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.295.907.300,00	DISKOMINFO
						Relasi Media	575.625.000,00	DISKOMINFO
						Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	88.200.000,00	DISKOMINFO
						Pelayanan Informasi Publik	42.122.300,00	DISKOMINFO
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	491.610.000,00	DISKOMINFO
						Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	95.350.000,00	DISKOMINFO
						Penyusunan Konten	3.000.000,00	DISKOMINFO
	Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Penegelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,36				
						PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	11.653.895.000,00	DISKOMINFO
						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.653.895.000,00	DISKOMINFO
						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.323.445.000,00	DISKOMINFO
						Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	153.500.000,00	DISKOMINFO
						Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	24.000.000,00	DISKOMINFO
						Penyediaan Akses Internet	9.048.000.000.00	
						Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	104.950.000,00	DISKOMINFO

						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	80.523.000,00	
	Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Terwujudnya prinsip Satu Data Indonesia	Persentase publikasi data statistik sektoral daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	78,57 %		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	80.523.000,00	DISKOMINFO
						Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	80.523.000,00	DISKOMINFO
						Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	36.870.000,00	DISKOMINFO
						Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	43.653.000,00	DISKOMINFO
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN UNTUK KEMANAN INFORMASI	402.530.000,00	
	Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Terwujudnya Pemerintahan Digital Yang Inklusif, Aman Dan Sehat	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	68 %		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	402.530.000,00	DISKOMINFO
						Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	390.505.000,00	DISKOMINFO
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	17.937.500,00	DISKOMINFO
						Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	38.817.500,00	DISKOMINFO
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	333.750.000,00	DISKOMINFO
						Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	12.025.000,00	DISKOMINFO
						Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.025.000,00	DISKOMINFO
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
	Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Terwujudnya Mitigasi Ancaman Keamanan Siber	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber Dan Sandi Pemerintah Daerah	68 %		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	750.000.000,00	DISKOMINFO
						Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	750.000.000,00	DISKOMINFO
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	750.000.000,00	DISKOMINFO

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju (2026)	SKPD
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	3.847.803.630	3.951.140.200	DISKOMINFO
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.260.000	6.747.700	DISKOMINFO
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.520.000	2.998.000	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	490.000	499.900	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000	250.000	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	490.000	499.900	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	250.000	250.000	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.450.000	1.500.000	DISKOMINFO
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	810.000	749.900	DISKOMINFO
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.517.314.880	2.507.200.000	DISKOMINFO
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.510.114.880	2.500.000.000	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	1.200.000	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000	6.000.000	DISKOMINFO
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.352.070	41.952.405	DISKOMINFO
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32.352.070	32.286.173	DISKOMINFO
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.000.000	9.666.232	DISKOMINFO
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.234.200	478.366.495	DISKOMINFO
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.231.000	32.717.000	DISKOMINFO

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Maju (2026)	SKPD
1	2	3	4	5
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.231.000	32.717.000	DISKOMINFO
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.032.200	25.000.000	DISKOMINFO
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	7.500.000	DISKOMINFO
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.250.000	8.750.000	DISKOMINFO
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.697.000	391.932.000	DISKOMINFO
(5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.650.000	100.000.000	DISKOMINFO
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.650.000	100.000.000	DISKOMINFO
(6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.574.480	434.000.000	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.279.480	334.000.000	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.295.000	100.000.000	DISKOMINFO
(7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.190.000	382.873.600	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.700.000	205.000.000	DISKOMINFO
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.140..000	50.000..000	DISKOMINFO
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.350.000	127.873.600	DISKOMINFO

Tabel 4.3

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		81,26 Persen	**3.847.803.630**			100 Persen	**3.951.140.200,00**
2.16.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33 dokumen	**5,260,000**				**6.747.700,00**
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	1,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	**2.998.000,00**
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 dokumen	490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	**499.900,00**
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	**250.000,00**
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	**499.900,00**
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 dokumen	250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	**250.000,00**
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	5 Laporan	1,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	**1.500.000,00**
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29 Laporan	810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29 Laporan	**749.900,00**
2.16.01.2.,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	14 dokumen	2.517.314.880				2.507.200.000
2.16.01.2.,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	406 orang/bulan	2.510.114.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		406 orang	2.500.000.000,00
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.200.000,00
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	6.000.000,00
2.16.01.2.,05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	6 Dokumen	88.352.070				41.952.405

2.16.01.2.,05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	32.352.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	32.286.173
2.16.01.2.,05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 orang	56.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 orang	9.666.232
2.16.01.2.,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Umum	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan		323.462.200			12 layanan	478.366.495
2.16.01.2.,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 paket	11.452.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	12.467.495
2.16.01.2.,06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 paket	35.231.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 paket	32.717.000
2.16.01.2.,06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 paket	29.032.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	25.000.000
2.16.01.2.,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	48 dokumen	4.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 dokumen	7.500.000
2.16.01.2.,06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua kecamatan, semua Kelurahan	12 laporan	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	8.750.000
2.16.01.2.,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 laporan	237.697.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	391.932.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan		38.650.000				100.000.000
2.16.01.2.07.009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	1 unit	38.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 layanan	100.000.000
2.16.01.2.08	**Keagiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan		506.574.480			3 layanan	434.000.000
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	12 laporan	408.279.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	334.000.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	2 laporan	98.295.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	100.000.000
2.16.01.2.,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan		368.190.000				**382.873.600**
2.16.01.2.,09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	20 unit	208.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	205.000.000
2.16.01.2.,09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	17 unit	51.140..000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Unit	50.000.000
2.16.01.2.,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	13 Unit	108.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Unit	127.873.600

2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	68	1.295.907.300			70	3.355.820.000
2.16.02.2.01.	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Layanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan		1.295.907.300			100 Persen	3.355.820.000
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 laporan	575.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 laporan	605.820.000
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	144 komunitas	88.200.000			144 komunitas	100.000.000
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 permohonan	42.122.300			9 permohonan	100.000.000
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 media	491.610.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 media	2.200.000.000
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen	95.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	300.000.000
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 konten	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 konten	50.000.000
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		0 indeks 3.97 indeks	11.653.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	13.500.000.000
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ KotaKepegawaian Perangkat Daerah	Layanan Pengelolaan e Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.653.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 layanan	13.500.000.000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 perangkat Daerah	2.323.445.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		47 perangkat Daerah	5.000.000.000
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 aplikasi	153.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 aplikasi	**1.300.000.000**
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	50.000.000
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Perangkat Daerah	9.048.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		47 Perangkat Daerah	7.000.000.000
2.16.03.2.02.03	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 dokumen	104.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 dokumen	150.000.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 persen	80.523.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 persen	20.000.000

2.20.02.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80.523.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	20.000.000
2.20.02.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesai	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	36.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	10.000.000
2.20.02.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Satu Data Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	43.653.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 laporan	10.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				402.530.000				211.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Capaian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.33 persen	402.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 persen	211.000.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		390.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	201.000.000
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 laporan	17.937.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	10.000.000
2.21.02.2.01.03	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**2 laporan**	38.817.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	**40.000.000**
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 perangkat daerah	333.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		47 Perangkat Daerah	151.000.000
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.025.000			3 kegiatan	10.000.000
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kegiatan	12.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	10.000.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1.03.13.2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terlaksana dengan baik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**100 persen**	750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100**	750.000.000
1.03.13.2.04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 objek	750.000.000
1.03.13.2.04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 objek	750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 objek	750.000.000
					18.030.658.930				21.787.960.200

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) serta Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Renja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 berisi rancangan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2026.

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Kalurahan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon dan selanjutnya di proses dalam Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten serta Musrenbang DIY.

Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026. Prioritas program/kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap program/kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus di kedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya prefentif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi dan Informatika mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran Perangkat Daerah tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ttd

SETIYO HARTATO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN *(KUNDHA KABUDAYAN)*
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD)

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan tentang perlunya suatu perencanaan yang strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Perangkat Daerah juga menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi Program dan Kegiatan yang disertai pendanaan untuk mencapai sasaran.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, penyebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diubah menjadi Perangkat Daerah (PD) sehingga Rencana Kerja SKPD selanjutnya akan disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renja PD merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, merupakan perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang

bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Rencana kerja merupakan instrumen penting bagi PD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Rencana kerja PD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing PD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyempurnaan rancangan awal Renja PD dilakukan setelah mendapatkan masukan dari masyarakat melalui musrenbang desa dan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Langkah yang dilakukan dalam penyempurnaan rancangan Renja PD adalah menyajikan hasil penggabungan daftar kegiatan prioritas dari semua kecamatan, berdasarkan pada program dan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab PD yang bersangkutan. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

b. Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Gunungkidul.

Dalam penyusunan Renja PD memperhatikan dan mengacu pada RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta hasil evaluasi pelaksananan program dan kegiatan periode sebelumnya yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan dokumen operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan dan rencana program kegiatan prioritas daerah.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan landasan serta pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dalam RKA Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Angaran 2026.

Tahun 2026 merupakan tahun kelima dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan dan mencapai target dalam tahun 2026. Garis besar proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan
   Kegiatan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Gunungkidul dilakukan setelah diterimanya Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebelum rancangan Awal RKPD diterima, atau sebelum RAPBD tahun 2025 disahkan menjadi APBD.
   Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup melakukan identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun renja Perangkat Daerah (PD), penyiapan kelembagaan forum Perangkat Daerah (PD), pengisisan formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan renja Perangkat Daerah (PD).
2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen
   Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra Perangkat Daerah (PD), kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD), meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda
3) Tahap Kegiatan penyusunan Rancangan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Gunungkidul
   Kegiatan dilaksanakan simultan dengan penyusunan RKPD yang dilaksanakan oleh Bappeda.

c. Keterkaitan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 serta RKPD 2026. Penyusunan renja juga mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayan dan Dinas Kebudayaan DIY dengan maksud mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Realisasi perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2026 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2026.

Dalam tahun 2026 ini Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul telah merencanakan 3 (tiga) program yang dijabarkan dalam 14 (empat belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan rencana alokasi dana APBD dan Dana Keistinewaan sebesar 30.660.046.167,00 (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh juta empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026;
17. Surat Edaran Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 adalah :

1. Sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di tuangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2026;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja tahun 2026;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN *(KUNDHA KABUDAYAN)*
- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*
- 2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN *(KUNDHA KABUDAYAN)*
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*

BAB 1V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN *(KUNDHA KABUDAYAN)*

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN *(KUNDHA KABUDAYAN)*

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN *(KUNDHA KABUDAYAN)* DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, Dinas Kebudayaan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan kebudayaan. Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan program kegiatan dari Dinas Kebudayaan. Pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada pasal 3 huruf d nomor 7 Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* tahun 2025 ini memuat kajian *(review)* terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-2/Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Dalam penyusunannya mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang disampaikan melalui aplikasi E-Monev Bappeda terkait Evaluasi Pencapaian Target-target RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

Berdasarkan APBD Tahun 2024 yang ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPA/A.I/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Tahun Anggaran 2024, Dinas Kebudayaan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp28.372.966.993,00 dengan perincian belanja operasi sebesar Rp27.897.966.993,00 dan belanja modal sebesar Rp 371.825.100,00. Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024 yang ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPPA/A.8/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) Tahun Anggaran 2024, Dinas Kebudayaan mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp28.820.779.150,00 dengan perincian belanja operasi sebesar Rp28.760.779.150,00 dan belanja modal sebesar Rp 60.000.000,00 serta Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah sebesar Rp120.000.000,00

Antara jumlah program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2024 dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sudah sesuai.

Hasil evaluasi Renja Dinas Kebudayaan sampai dengan Triwulan ke empat tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian program 100 % dengan penyerapan keuangan sebesar 98,08 % atau realisasi keuangan sebesar Rp 28.266.379.718,,00 dari target anggaran belanja yang direncanakan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp28.820.779.150,00.

Adapun tingkat capaian program Dinas Kebudayaan Tahun 2024 (s.d Desember) adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 95.89%.
2. Program Pengembangan Kebudayaan, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 99.97%.
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan tingkat capaian rata-rata kinerja sebesar 100% dan tingkat penyerapan keuangan sebesar 98,28%;

Evaluasi pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024 berdasarkan kinerja Renja dinas Kebudayaan Tahun 2024 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan e-Monev Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah nihil karena semua memenuhi target kinerja keluaran.
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
   A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      9) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
      11) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      12) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      13) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      14) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      15) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      16) Fasilitasi Kunjungan Tamu
      17) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      18) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      19) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      20) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
      21) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      22) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      23) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   B. Program Pengembangan Kebudayaan
      1) Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

C. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   1) Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
   2) Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
   3) Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
   4) Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
   5) Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota
   6) Pengadaaan Sarana dan Prasarana Budaya
   7) Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya
   8) Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
   9) Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
   10) Penghargaan Seniman dan Budayawan
   11) Festival Kebudayaan Yogyakarta
   12) Gelar Budaya Jogja
   13) Publikasi Seni dan Budaya Daerah
   14) Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
   15) Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
   16) Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
   17) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

3. Realisasi kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah nihil karena semua memenuhi target kinerja keluaran.
4. Faktor penyebab terpenuhinya realisasi program dan kegiatan target kinerja program dan kegiatan tahun 2024 yaitu adanya kesiapan pelaksanaan kegiatan dan kerjasama yang baik dari semua pihak.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 adalah terbatasnya sumber daya manusia yang ada untuk mengelola Dinas Kebudayaan dan Taman Budaya Gunungkidul serta adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasai faktor tersebut adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Realisasi capaian kinerja dan keuangan tahun anggaran 2025 diperkirikan bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Realisasi anggaran dan kinerja tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025) dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output dan outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	140	56	28	28	100	28	112	80
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum PD	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Dokumen Profil PD	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah dokumen Renja	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah dokumen Renja perubahan	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	4	4	4	100	4	12	75
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Dokumen ROPK	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3	60
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	1	0	0	0	0	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output dan outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	1	1	1	100	1	3	75
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	2	2	2	100	2	6	75
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	2	2	2	100	2	6	75
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	17	17	17	100	17	51	75
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan e-Monev	4	4	0	0	0	0	4	100
		Jumlah Dokumen Laporan TEPRA	12	12	0	0	0	0	12	100
		Jumlah Dokumen LKjIP	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	4	4	4	100	4	12	75
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	70	28	14	14	100	14	56	80
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	0	0	0	0	14	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1680	420	420	420	100	420	1260	75
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	1	1	100	1	3	75
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	12	12	0	0	0	0	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output dan outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52	13	13	13	100	13	39	75
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	110	44	22	22	100	22	88	80
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengelolaan data ASN	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16	4	4	4	100	4	12	75
2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	1	1	1	100	1	3	75
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum terlayani	35	14	7	7	100	7	28	80
		Persentase Administrasi Umum terlayani	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang dibeli	30	30	0	0	0	0	30	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	200	200	0	0	0	0	200	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan rumah tangga yang dibeli	120	120	0	0	0	0	120	100
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	4	4	4	100	4	12	75
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4	4	0	0	0	0	4	100
		Jumlah penggandaan yang tersedia	12	12	0	0	0	0	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output dan outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar dibayar	349	349	0	0	0	0	349	100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1372	343	343	343	100	343	1029	75
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan tamu yang tersedia	20	20	0	0	0	0	20	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	12	12	12	100	12	36	75
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan koordinasi	24	24	0	0	0	0	24	100
		Jumlah minum dan makan rapat yang tersedia	20	20	0	0	0	0	20	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208	52	52	52	100	52	156	75
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	10	4	2	2	100	2	8	80
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	700	700	0	0	0	0	700	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	12	12	12	100	12	36	75
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air dibayar	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah tagihan listrik dibayar	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah tagihan telepon dibayar	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	2	2	2	100	2	6	75
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	100	12	36	75
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30	12	6	6	100	6	24	80
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	12	12	0	0	0	0	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output dan outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	15	3	0	0	0	0	3	20
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	792	198	198	198	100	198	594	75
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10	10	0	0	0	0	10	100
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	10	10	10	100	10	30	75
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	4	0	0	0	0	4	100
		Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	3	3	0	0	0	0	3	100
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	5	5	0	0	0	0	5	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	12	12	12	100	12	36	75
2.22.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Gamelan dipelihara	5	2	1	1	100	1	4	80
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	1	100
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara	2	2	0	0	0	0	2	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	2	2	2	100	2	6	75
2.22.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	4	4	0	0	0	0	4	100
		Nilai IKM Perangkat Daerah	80,25	80	0	0	0	0	80	100
2.22.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pengukuran IKM	2	2	0	0	0	0	2	100
		Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan (SP)	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah dokumen SPIP	1	1	0	0	0	0	1	100
2.22.08.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase ragam budaya yang dikembangkan	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output dan outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.08.2.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dalam bahasa jawa	43	25	6	6	100	6	37	86
		Persentase dokumen sejarah, legenda, mitos dan cerita rakyat Gunungkidul dalam bahasa jawa	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.08.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Cerdas Cermat Sejarah	1	1	0	0	0	0	1	100
		Kajian Sejarah Lokal	25	25	0	0	0	0	25	100
		Lawatan Sejarah	8	8	0	0	0	0	8	100
		Peringatan Peristiwa Bersejarah	4	4	0	0	0	0	4	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	12	3	3	3	100	3	9	75
2.22.08.2.01.02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kompetisi Bahasa dan Sastra	8	8	0	0	0	0	8	100
		Pergelaran Macapat	30	30	0	0	0	0	30	100
		Publikasi Bahasa dan Sastra	4	4	0	0	0	0	4	100
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	24	6	6	6	100	6	18	75
2.22.08.2.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dan Permuseuman	1	1	0	0	0	0	1	100
		Lawatan Museum	6	6	0	0	0	0	6	100
		Publikasi Literasi Museum	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	1200	300	300	300	100	300	900	75
2.22.08.2.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya	100	40	20	20	100	20	80	80
		Persentase obyek warisan budaya yang direkomendasikan menjadi cagar budaya	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.08.2.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kajian TACB yang direkomendasikan	20	20	0	0	0	0	20	100
		Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya	2	2	0	0	0	0	2	100
		Studi Kelayakan	1	1	0	0	0	0	1	100
		Studi Teknis	1	1	0	0	0	0	1	100
		Wajib Kunjung Situs	2	2	0	0	0	0	2	100
		Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	16	4	4	4	100	4	12	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output dan outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.08.2.05	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah even seni yang diselenggarakan di Taman Budaya Gunungkidul	95	38	19	19	100	19	76	80
		Persentase even seni yang diselenggarakan di Taman Budaya Gunungkidul	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.08.2.05.02	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan pengelolaan TBG	12	12	0	0	0	0	12	100
		Gelar seni kolosal	1	1	0	0	0	0	1	100
		Pentas seni di TBG	12	12	0	0	0	0	12	100
		Pentas seni untuk anak	6	6	0	0	0	0	6	100
		Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	4	1	1	1	100	1	3	75
2.22.08.2.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana budaya	5	2	1	1	100	1	4	80
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana budaya	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.08.2.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Pengadaan sarana dan prasarana budaya	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	4	1	1	1	100	1	3	75
2.22.08.2.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian keistimewaan yang disusun	35	14	7	7	100	7	28	80
		Persentase dokumen perencanaan dan pengendalian keistimewaan yang disusun	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.08.2.07.01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan kebudayaan Gunungkidul	3	3	0	0	0	0	3	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	12	3	3	3	100	3	9	75
2.22.08.2.07.02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Dokumen laporan pelaksanaan keistimewaan kebudayaan Gunungkidul	4	4	0	0	0	0	4	100
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	16	4	4	4	100	4	12	75
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah nilai adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	50	20	10	10	100	10	40	80
		Persentase nilai adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100	100	100
2.22.08.2.09.02	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya	24	24	0	0	0	0	24	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output dan outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	12	3	3	3	100	3	9	75
2.22.08.2.09.03	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Pembinaan Seni Perfilman di Gunungkidul	1	1	0	0	0	0	1	100
		Seleksi Lomba Lukis DIY-Kyoto	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	8	2	2	2	100	2	6	75
2.22.08.2.09.04	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Promosi Budaya Ke luar DIY	3	3	0	0	0	0	3	100
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	12	3	3	3	100	3	9	75
2.22.08.2.09.05	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan untuk pelestari seni dan budaya (Seniman dan Budayawan) Kategori Dewasa dan Anak	10	10	0	0	0	0	10	100
		Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	40	10	10	10	100	10	30	75
2.22.08.2.09.06	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Dukungan untuk FKY DIY	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	4	1	1	1	100	1	3	75
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Pengiriman tim festival langen carita tingkat DIY	1	1	0	0	0	0	1	100
		Pengiriman tim festival kethoprak tingkat DIY	1	1	0	0	0	0	1	100
		Pengiriman tim festival sendratari tingkat DIY	1	1	0	0	0	0	1	100
		Pengiriman tim festival teater tradisi tingkat DIY	1	1	0	0	0	0	1	100
		Pengiriman tim festival reog dan jathilan tingkat DIY	1	1	0	0	0	0	1	100
		Festival langen carita tingkat Gunungkidul	1	1	0	0	0	0	1	100
		Festival kethoprak tingkat Gunungkidul	1	1	0	0	0	0	1	100
		Festival sendratari tingkat Gunungkidul	1	1	0	0	0	0	1	100
		Festival teater tradisi tingkat Gunungkidul	1	1	0	0	0	0	1	100
		Festival reog dan jathilan tingkat Gunungkidul	1	1	0	0	0	0	1	100
		Mangayubagya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	48	12	12	12	100	12	36	75
2.22.08.2.09.08	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi seni dan budaya melalui website dan media sejenisnya	12	12	0	0	0	0	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output dan outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	48	12	12	12	100	12	36	75
2.22.08.2.09.09	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Fasilitasi Kegiatan MLKI	3	3	0	0	0	0	3	100
		Sarasehan dan Jamasan Tosan Aji	20	20	0	0	0	0	20	100
		Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	360	90	90	90	100	90	270	75
2.22.08.2.09.10	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Kajian WBTB	1	1	0	0	0	0	1	100
		Bimtek Tata Nilai Budaya	12	12	0	0	0	0	12	100
		Festival Permainan Tradisional	1	1	0	0	0	0	1	100
		Pembinaan Pedalangan	4	4	0	0	0	0	4	100
		Pentas ketoprak	4	4	0	0	0	0	4	100
		Penguatan Dewan Kebudayaan	1	1	0	0	0	0	1	100
		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	44	11	11	11	100	11	33	75
2.22.08.2.09.12	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Gelar Seni Budaya Hari Jadi Gunungkidul	1	1	0	0	0	0	1	100
		Gelar Seni Tradisi	25	25	0	0	0	0	25	100
		Jogedan Mataram	10	10	0	0	0	0	10	100
		Karawitan Jumat Legi	10	10	0	0	0	0	10	100
		Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	12	3	3	3	100	3	9	75
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Fasilitasi Upacara Adat	25	25	0	0	0	0	25	100
		Sarasehan Kebudayaan	2	2	0	0	0	0	2	100
		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	16	4	4	4	100	4	12	75

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN *(KUNDHA KABUDAYAN)*

Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 sebagian besar merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun 2023, sebagian lagi merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul sekaligus sebagai wujud pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* diberi tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan serta penugasan urusan keistimewaan kebudayaan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* mempunyai beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu adanya SDM yang secara kualitatif dan kuantitatif belum memenuhi standar, anggaran yang tersedia belum mencukupi terutama di sekretariat, dan sarana prasarana belum memadai.

Selanjutnya, sebagai alat ukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 253/KPTS/2017 yang memuat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu jumlah ragam budaya yang dikembangkan atau difasilitasi, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2. Adapun pencapaian kinerja terhadap Renstra PD Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target Standard (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Dinas Kebudayaan					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)											
	Jumlah ragam budaya yang dikembangkan/ difasilitasi		3	3	3	3	3	10	3	3	3	
B	SPM (Standart Pelayanan Minimal)											Mulai Tahun 2019 sudah tidak mengampu SPM
1	Cakupan Kajian Seni (50%)	100	173	173	173	173	173	173	173	173	-	
2	Cakupan Fasilitasi Seni (30%)	100	286	286	286	286	286	286	286	286	-	
3	Cakupan Gelar Seni (75%)	100	133	133	133	133	133	133	133	133	-	
4	Misi Kesenian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	
6	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	100	200	200	200	200	200	200	200	200	-	
7	Cakupan Tempat (100%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	
8	Cakupan Organisasi	100	196,08	196,08	196,08	196,08	196,08	196,08	196,08	196,08	-	

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul
Terhadap Renstra PD Tahun 2022-2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM,IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14
A	**IKU (Indikator Kinerja Utama)**										
	Indeks Pelestarian Budaya Tahun 2026	indeks	84.49	84.86	85.23	85.61	88.48	91.21	85.61	85.61	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN *(KUNDHA KABUDAYAN)*

Peran dan posisi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan kebudayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan Perangkat Daerah dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan motivator bagi masyarakat. Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak terkendala. Kebijakan ini diharapkan mampu mengakselerasi upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* diantaranya adalah Peninggalan warisan budaya belum semua ditangani secara optimal, Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat tradisi lokal, ragam seni budaya dan warisan budaya belum optimal, Aktualisasi dan revitalisasi nilai nilai budaya masih relatif rendah, Kapasitas dan pengetahuan pemilik/pengelola atas pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang dimiliki masih rendah, Keterbatasan jumlah SDM pelaksana sesuai kompetensi yang dibutuhkan, Kebudayaan lokal belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan peran masyarakat terhadap budaya dan sejarah lokal, Sinergi pengembangan sektor budaya dengan lintas sektor lainnya belum dikelola secara optimal, Perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik benda maupun tak benda belum optimal, Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengumpulkan, merawat dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya, Penggalian, reaktualiasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal, Mewujudkan ketahanan budaya melalui percepatan penambahan desa budaya yang jumlahnya masih sangat terbatas, perlunya penulisan sejarah lisan dan cerita rakyat sebagai bukti adanya keaneka ragaman budaya, dan perlu adanya peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan disemua aspek budaya termasuk penggunaan bahasa serta kebudayaan belum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mngoptimlakan potensi pendapatan.

Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan misi tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat pencapaiannya. Beberapa hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kesadaran masyarakat dalam pelestarian budaya masih rendah
2) Pengembangan potensi budaya masih terbatas
3) Penggalian, reaktualiasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal
4) Sinergi pengembangan sektor budaya dengan lintas sektor lainnya belum dikelola secara optimal;

5) Kurangnya event tingkat nasional/internasional dan kontinuitas penganggarannya;

Permasalahan dan hambatan tersebut diatas maka akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah diantaranya peningkatan tat kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, serta dapat berdampak pada capaian program nasional/internasional khususnya tentang penyelenggaraan *event* budaya di tingkat nasional maupu internasional.

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah (PD). Analisis strategi dalam rangka menentukan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah (PD) perlu diperhatikan, karena akan menentukan tindak lanjut pembangunan pada tahun yang akan datang. Lingkungan eksternal terdiri dari peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*). Peluang yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang memberikan kemungkinan organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar.

Peluang:

1) Kebudayaan suatu daerah mencerminkan citra suatu daerah
2) Lestari dan berkembangnya seni budaya;
3) Meningkatnya aktivitas seni budaya;
4) Meningkatnya semangat volunteer dan pelaku seni dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya
5) Terbukanya potensi budaya lokal untuk bersaing di kancah internasional.

Ancaman:

Faktor-faktor di luar Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Gunungkidul yang membahayakan atau mengancam eksistensi organisasi yaitu:

Meningkatnya pengaruh budaya asing, modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli.

Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 antara lain:

1. Peninggalan warisan budaya belum semua dikelola secara optimal.
2. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat tradisi lokal, ragam seni budaya dan warisan budaya belum optimal.
3. Kapasitas dan pengetahuan pemilik/pengelola atas pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang dimiliki masih rendah.
4. Keterbatasan jumlah SDM pelaksana sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
5. Kebudayaan lokal belum menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga perlu peningkatan peran masyarakat terhadap budaya dan sejarah lokal.
6. Sinergi pengembangan sektor budaya dengan lintas sektor lainnya belum dikelola secara optimal.
7. Perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik benda maupun tak benda belum optimal.
8. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengumpulkan, merawat dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya.

9. Penggalian, reaktualiasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal.
10. Kebudayaan belum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengoptimlakan potensi pendapatan

2.4 REVIU TERHADAP RKPD

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Reviu terhadap RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan. Berdasarkan rancangan awal RKPD pada Tahun 2024 semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada dalam RKPD.

RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap organisasi Perangkat Daerah. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan serta adanya penyederhanaan beberapa program dan kegiatan. Mulai Tahun 2019 rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul juga dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ini akan berlanjut setiap tahun. Pada tahun 2024 dan 2025 rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul serta dari dana Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Dana Keistimewaan jugs mendapat anggaran dari Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Museum dan Taman Budaya dari Kementrian Kebudayaan.

RKPD dibuat melalui perencanaan dari bawah dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain SDM, dana, kebutuhan masyarakat, dan faktor lain yang terkait. Oleh sebab itu perencanaan dibuat berdasarkan skala prioritas, sehingga apa yang direncanakan tidak akan berbeda jauh dengan hasil analisis kebutuhan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* direncanakan sebesar 30.660.046.167,00 (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh juta empat puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri 3 (tiga) program yang dijabarkan dalam 14 (empat belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 7 (tujuh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan yaitu:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan :
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan :
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
   1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7 (tujuh) sub kegiatan :
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
   1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (tiga) sub kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

2. Program Pengembangan Kebudayaan meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta meliputi 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yaitu:
   A. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman, dengan 3 (tiga) sub kegiatan :
      1) Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
      2) Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
      3) Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
   B. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
      1) Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
   C. Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
      1) Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota
   D. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
      1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya
   E. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan, dengan 1 (satu) sub kegiatan :
      1) Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
   F. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, dengan 11 (sebelas) sub kegiatan :
      1) Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya;
      2) Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
      3) Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya
      4) Penghargaan Seniman dan Budayawan
      5) Festival Kebudayaan Yogyakarta
      6) Gelar Budaya Jogja
      7) Publikasi Seni dan Budaya Daerah
      8) Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
      9) Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat
      10) Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
      11) Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 serta hasil analisis kebutuhan secara rinci terlihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30.660.046.167	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.764.452.876	
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				30.660.046.167	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				31.764.452.876	
1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	2.839.982.167	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,2 nilai	3.944.388.876	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gunungkidul	-	-	22.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gunungkidul	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- -	22.000.000	
1.1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dokume	12.000.000		Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dokume	12.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah	n				Daerah	n		
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
		Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000		Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
		Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000		Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
		Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000		Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
		Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000		Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	5.000.000		Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	5.000.000	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.2.1			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.000.000			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gunungkidul	-	-	2.260.982.167	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gunungkidul	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- -	2.654.323.876	
1.2.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	2.239.982.167		Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/ bulan	2.633.323.876	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000		Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
1.3.1			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	20.000.000			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	20.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Gunungkidul	-	-	2.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Gunungkidul	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- -	2.000.000	
1.3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
		Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.000.000		Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.000.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	148.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	- -	156.050.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000		Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000		Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.000.000		Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.000.000	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000		Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	343 Dokumen	1.500.000		Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	343 Dokumen	1.500.000	
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000		Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	87.500.000		Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	95.550.000	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	170.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	- -	170.000.000	
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Gunungkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	170.000.000		Gunungkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	170.000.000	
1.5.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	102.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- -	805.015.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gunungkidul				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gunungkidul				
1.5.3			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gunungkidul				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gunungkidul				
1.6			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.000.000		Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	704.015.000	
1.6.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	135.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	- -	135.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Gunungkidul				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Gunungkidul				
1.6.3			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	198 Unit	105.000.000			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	198 Unit	105.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gunungkidul				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gunungkidul				
1.6.4			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Gunungkidul				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Gunungkidul				
1.6.5			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Gunungkidul	-	-	1.500.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Gunungkidul	Persentase ragam budaya yang dikembangkan di Taman Budaya	100 %	1.500.000.000	
1.6.6	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	1.500.000.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Laporan pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- -	1.500.000.000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Gunungkidul				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Gunungkidul				
2			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1.500.000.000			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1.500.000.000	
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		-	-	26.320.064.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 %	26.320.064.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		-	-	2.775.642.000	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		Laporan pengelolaan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	- -	2.775.642.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Gunungkidul				Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Gunungkidul				
3			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	3 Dokumen	500.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	3 Dokumen	500.000.000	
3.1	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra					Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra					
3.1.1			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	7 Laporan	1.775.642.000			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	7 Laporan	1.775.642.000	
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Gunungkidul				Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Gunungkidul				
3.1.2			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	1 Unit	500.000.000			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	1 Unit	500.000.000	
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Gunungkidul	-	-	2.561.245.000	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Gunungkidul	Dokumen Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	- -	2.561.245.000	
3.1.3	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya					Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya					
		Gunungkidul	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	10 Objek	2.561.245.000		Gunungkidul	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	10 Objek	2.561.245.000	
3.2	Pengelolaan Taman Budaya		-	-	4.184.427.000	Pengelolaan Taman Budaya		Event seni yang diselenggarakan di Taman Budaya Gunungkidul	- -	4.184.427.000	
3.2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota					Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota					

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gunungkidul	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek	4.184.427.000		Gunungkidul	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek	4.184.427.000	
3.3	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		-	-	648.750.000	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		Dokumen pengadaan Sarana dan prasarana budaya dan lembaga budaya	- -	648.750.000	
3.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya					
		Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	4 Unit	648.750.000		Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	4 Unit	648.750.000	
3.4	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan		-	-	150.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan		Dokumen perencanaan, pengendalian, dan kemitraan urusan kebudayaan	- -	150.000.000	
3.4.1	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya					Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya					
		Gunungkidul	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	5 Dokumen	150.000.000		Gunungkidul	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	5 Dokumen	150.000.000	
3.5	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		-	-	16.000.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Laporan fasilitasi adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya	- -	16.000.000.000	
3.5.1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya					Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya					
		Gunungkidul	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	4 Laporan	2.000.000.000		Gunungkidul	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	4 Laporan	2.000.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5.2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni					Pembinaan Lembaga Penggiat Seni					
		Gunungkidul	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	2 Lembaga	850.000.000		Gunungkidul	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	2 Lembaga	850.000.000	
3.6	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya					Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya					
3.6.1			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	4 Laporan	600.000.000			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	4 Laporan	600.000.000	
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Gunungkidul				Penghargaan Seniman dan Budayawan	Gunungkidul				
3.6.2			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	10 Orang	300.000.000			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	10 Orang	300.000.000	
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Gunungkidul				Festival Kebudayaan Yogyakarta	Gunungkidul				
3.6.3			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	4 Laporan	500.000.000			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	4 Laporan	500.000.000	
	Gelar Budaya Jogja	Gunungkidul				Gelar Budaya Jogja	Gunungkidul				
3.6.4			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	15 Laporan	5.500.000.000			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	15 Laporan	5.500.000.000	
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Gunungkidul				Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Gunungkidul				
3.6.5			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	3 Dokumen	200.000.000			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	3 Dokumen	200.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Gunungkidul				Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Gunungkidul				
3.6.6			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	240 Orang	750.000.000			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	240 Orang	750.000.000	
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Gunungkidul				Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Gunungkidul				
3.6.7			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	3.000.000.000			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	3.000.000.000	
	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Gunungkidul				Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Gunungkidul				
3.6.8			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	3 Laporan	800.000.000			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	3 Laporan	800.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Gunungkidul				Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Gunungkidul				
3.6.9			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	5 Laporan	1.500.000.000			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	5 Laporan	1.500.000.000	
					30.660.046.167					**31.764.452.876**	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Proses perencanaan diawali dengan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah serta program dan kegiatan mampu memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya diadakan musrenbang di semua kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam proses musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat kecamatan/desa yang terkait langsung dengan pelayanan PD, diberi kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan PD. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan dalam usulan program kegiatan PIWK dan sektoral. Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan dibahas lagi pada Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kecamatan sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang, ditanggapi oleh peserta dan kemudian disepakati bersama hasil forum PD tersebut. Pada Tahun 2026 ini tidak ada usulan kegiatan PIWK, dan usulan melalui Pagu Indikatif Sektoral untuk Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* dari masyarakat di Urusan Kebudayaan akan dibiayai dari dana keistimewaan Pemerintah DIY melalui Bantuan Keuangan Khusus juga dari Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Museum dan Taman Budaya dari Kementrian Kebudayaan.

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	PIS/PI WK	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Tolok Ukur Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/ Kelurahan)	Volume Desa	Pagu Desa (Rp.)	Volume Kecamatan	Pagu Kecamatan (Rp.)	Urutan Prioritas Desa	Urutan Prioritas Kec	Status Verifikasi Kec	Catatan Verofokasi Kec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah										0		0				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Urusan kebudayaan tertuang dalam astacita kedelapan yaitu : memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi dari kementrian Kebudayaan adalah "Kementerian Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan nasional untuk memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan daya saing nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat". Yang dijabarkan melaui Misi Kementerian Kebudayaan ada 5 (lima) yaitu:

1. Melindungi dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia
2. Mengembangkan kebudayaan dalam berbagai bidang yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi;
3. Memajukan budaya yang mendukung keberagaman untuk memperkuat persatuan bangsa;
4. Mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional;
5. Mengukuhkan dan memanfaatkan budaya sebagai soft power Indonesia

Kementrian Kebudayaan mempunyai tujuan :

1. Peningkatan pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan
2. Penguatan tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan visi Dinas Kebudayaan DIY adalah Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja yang dilakukan dengan misi Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban.

Dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi tersebut sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* masuk dalam prioritas 6 yaitu Warga Gayeng Guyub dengan melestarikan budaya luhur melaui peningkatan kesejahteraan pelaku seni budaya serta pagelaran (festival) budaya yang mensejahterakan warga.. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dengan memperhatikan rumusan Rancangan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta berpedoman pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2026 sebagaimana telah disajikan dalam rancangan RKPD tahun 2026.

Tujuan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* tujuan yaitu Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat;

Sasaran PD yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* tahun 2026 adalah sebagaimana telah terumuskan dalam perencanaan pembangunan adalah : Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Gunungkidul

Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* masuk dalam prioritas prioritas 6 yaitu Warga Gayeng Guyub dengan melestarikan budaya luhur melaui peningkatan kesejahteraan pelaku seni budaya serta pagelaran (festival) budaya yang mensejahterakan warga. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dengan memperhatikan rumusan Rancangan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta berpedoman pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2026 sebagaimana telah disajikan dalam rancangan RKPD tahun 2026.
Selanjutnya rumusan rumusan tujuan dan sasaran tersebut telah disempurnakan dan disajikan dalam Rencana Kerja berikut.

Tujuan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* dirumuskan dalam satu tujuan yaitu pengembangan ragam budaya berbasis masyarakat.

Sasaran PD yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* tahun 2026 adalah sebagaimana telah terumuskan dalam perencanaan pembangunan yaitu : Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga.

Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	Warga Gayeng Guyub dengan melestarikan budaya luhur melaui peningkatan kesejahteraan pelaku seni budaya serta pagelaran (festival) budaya yang mensejahterakan warga	Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Infrastuktur Daerah	Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga	Indeks Pelestarian Budaya

Selanjutnya hubungan antara tujuan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* dengan sasaran Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* sebagaimana dalam tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*

No	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target Kinerja Tujuan OPD Akhir Tahun 2029
1	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pelestraian Budaya	91.59

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2026
1	Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga	Indeks Pelestarian Budaya	91.03
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	AKIP	81,20

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dan dalam rangka mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Gunungkidul, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* dengan Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pelestarian Budaya	91.03

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sejumlah 3 (tiga) program yang dijabarkan dalam 14 (tiga belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan baik dalam fungsi kesekretariatan maupun fungsi urusan kebudayaan. Mengingat bahwa Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* memiliki fungsi utama dalam penyelenggaran urusan kebudayaan maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan lebih banyak kepada fungsi penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan kesekretariatan yang bersifat fasilitasi dan administrasi berlokasi pada Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Gunungkidul atau instansi terkait seperti Paniradya Kaistimewan Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan dilingkungan Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Kebudayaan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang mendukung fungsi penyelenggaran urusan kebudayaan adalah dilaksanakan di semua kapanewon di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dan wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta kegiatan penyelenggaran misi kesenian (kebudayaan) yang direncanakan di wilayah pulau Jawa dan di luar pulau Jawa.

Program/kegiatan dalam Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dibiayai dengan anggaran sebesar 31.764.452.876,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dana Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga dari Dana Alokasi Khusus Biaya Operasional Museum dan Taman Budaya dari Kementrian Kebudayaan

Berikut adalah hasil perumusan program dan kegiatan prioritas disajikan dalam tabel 4.1, rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 disajikan dalam tabel 4.2. Tabel sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
Peningkatan Ekonomi	**Pengelolaan Sumber Daya Alam dn Perekonomian Masyarakat Meningkat**	**Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat**	**Indeks Pelestarian Budaya**	**91,03**	2.22.02..	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.500.000.000	
					2.22.02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
					2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.500.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08..	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.775.642.000	
					2.22.08.5.01.	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		
					2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	500.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa	1.775.642.000	KUNDHA KABUDAYAN

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
						dan Sastra		
					2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	500.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.02.	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		
					2.22.08.5.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.561.245.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.03.	Pengelolaan Taman Budaya		
					2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	4.184.427.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.04.	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan		
					2.22.08.5.04.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	648.750.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.05.	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan		
					2.22.08.5.05.0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	150.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.07.	Adat, Seni, Tradisi dan		KUNDHA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
						Lembaga Budaya		KABUDAYAN
					2.22.08.5.07.0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	2.000.000.000	
					2.22.08.5.07.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	850.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.07.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	600.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.07.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	300.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.07.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	5.500.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.07.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	200.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.07.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	750.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.07.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	3.000.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.08.5.07.0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	800.000.000	KUNDHA KABUDAYAN

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.22.08.5.07.0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.500.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
Reformasi Birokrasi	**Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat**	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD**	**Nilai AKIP PD**	**81,20**	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.000.000	
					2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000	KUNDHA KABUDAYAN

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
					2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.239.982.167	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
					2.22.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		KUNDHA KABUDAYAN

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
					2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.500.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.000.000	
					2.22.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		KUNDHA KABUDAYAN

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
						Pemerintahan Daerah		
					2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000	
					2.22.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	KUNDHA KABUDAYAN
					2.22.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	KUNDHA KABUDAYAN

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Kundha Kabudayan			31.764.452.876,00							5.395.659.490,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			31.764.452.876,00							5.395.659.490,00	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			31.764.452.876,00							5.395.659.490,00	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,2 nilai	3.944.388.876,00						-	3.895.659.490,00	
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan	-	32.942.500,00	
2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		25.542.500,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		1.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		300.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		1.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	2 2	0 1	2. 01	0 0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		300.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	2 2	0 1	2. 01	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	5.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		3.800.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	2 2	0 1	2. 01	0 0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				07												
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		1.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.654.323.876,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan	-	2.877.242.990,00	
2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/bulan	2.633.323.876,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		2.829.857.990,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		700.000,00	KUNDHA KABUDAYAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Tahun SKPD										
2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	20.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		46.685.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan	-	1.000.000,00	
2	22	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		1.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		156.050.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan	-	82.106.500,00	
2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		3.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		10.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.06	00	Penyediaan Peralatan Rumah											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				03	Tangga											
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		6.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		5.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	343 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		1.200.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		10.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	95.550.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		46.906.500,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah		170.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan	-	0,00	
2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	170.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		0,00	KUNDHA KABUDAYAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2 2	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		805.015.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan	-	772.367.500,00	
2	2 2	0 1	2. 08	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		21.042.500,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	2 2	0 1	2. 08	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		100.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	2 2	0 1	2. 08	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	704.015.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	-	Dinas Kebudayaan		651.325.000,00	KUNDHA KABUDAYAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									sa		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
2	2 2	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		135.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan	-	130.000.000,00	
2	2 2	0 1	2. 09	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	198 Unit	105.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		80.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	2 2	0 1	2. 09	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		30.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	22	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya											
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Kebudayaan		20.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase ragam budaya yang dikembangkan di Taman Budaya	100 %	1.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.500.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	1.500.000.000,00	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan											
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1.500.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		1.500.000.000,00	KUNDHA KABUDAYAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 %	26.320.064.000,00						-	0,00	
2	22	08	5.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Laporan pengelolaan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		2.775.642.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	0,00	
2	22	08	5.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan											
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	3 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.01	0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra											
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	7 Laporan	1.775.642.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.01	00	Pembinaan dan Pengelolaan											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				03	Permuseuman											
						Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	1 Unit	500.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.02		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Dokumen Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		2.561.245.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	0,00	
2	22	08	5.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya											
						Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	10 Objek	2.561.245.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.03		Pengelolaan Taman Budaya	Event seni yang diselenggarakan di Taman Budaya Gunungkidul		4.184.427.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	0,00	
2	22	08	5.03	00	Pengelolaan dan Pengembangan											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				01	Taman Budaya Kabupaten/Kota											
						Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 Objek	4.184.427.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.04		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen pengadaan Sarana dan prasarana budaya dan lembaga budaya		648.750.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	0,00	
2	22	08	5.04	0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	4 Unit	648.750.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.05		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Dokumen perencanaan, pengendalian, dan kemitraan urusan kebudayaan		150.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	0,00	
2	22	08	5.05	00	Membangun Kemitraan dengan											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				03	Lembaga Pelestari Budaya											
						Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	5 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan fasilitasi adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya		16.000.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat	-	0,00	
2	22	08	5.07	0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya											
						Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	4 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.07	0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni											
						Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	2 Lembaga	850.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Semua Kel/Desa		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
2	22	08	5.07	0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	4 Laporan	600.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.07	0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan											
						Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	10 Orang	300.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.07	0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta											
						Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	4 Laporan	500.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Semua Kel/Desa		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja											
						Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	15 Laporan	5.500.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.07	0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah											
						Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	3 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.07	0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi											
						Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	240 Orang	750.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Semua Kel/Desa		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
2	22	08	5.07	0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat											
						Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	14 Laporan	3.000.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN
2	22	08	5.07	0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni											
						Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	3 Laporan	800.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	22	08	5.07	0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi											
						Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	5 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-	Masyarakat		0,00	KUNDHA KABUDAYAN

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dengan menyesuaikan RPJMD serta Rencana Strategis PD.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* akan selalu melibatkan peran *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Keterlibatan *stakeholders* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat PD Gabungan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang, dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat. Sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

DINAS KEBUDAYAAN

ttd

CHAIRUL AGUS MANTARA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 86 Tahun 2017, setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat (RENJA) PD harus segera ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan segera melakukan penyusunan RENJA sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Gunungkidul untuk diverifikasi dan diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkan melalui keputusan kepala PD.

A. Pengertian

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul adalah dokumen perencaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Renja DPK Kabupaten Gunungkidul merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) DPK yang mengacu pada RKPD. Renja DPK Kabupaten Gunungkidul memberikan gambaran tentang program dan Kegiatan yang akan dikerjakan oleh DPK Kabupaten Gunungkidul dalam satu tahun anggaran.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DPK Kabupaten Gunungkidul, evaluasi pelaksanaan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi pelaksanaan Renstra DPK Kabupaten Gunungkidul.

B. Tahap penyusunan Renja PD

Tahap penyusunan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul meliputi :

1. Persiapan penyusunan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul.
2. Penyusunan Rancangan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul, yang terdiri:
   a. Perumusan Rancangan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul
   b. Penyajian Rancangan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
4. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

5. Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja Kementrian/Lembaga (K/L) dan Renja PD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) adalah :

1. RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD;
2. Renstra PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta, prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra PD;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan atau baru untuk tercapianya sasaran Renstra PD berdasarkan Renja PD tahun-tahun sebelumnya;
4. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD; dan
5. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

6. Keterkaitan dokumen perencanaan

1. Renja PD dengan RKPD
   RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disesuaikan dengan program prioritas Perangkat Daerah
2. Renja PD dengan Renstra PD
   Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja Kementrian/Lembaga dan PD Provinsi
   Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD Provinsi

1.2. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul (DPK GK) adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul untuk periode satu tahun yaitu tahun 2026 Disamping hal tesebut penyusunan Renja DPK tahun 2026 juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi DPK dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyesuaikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah;
2. Penajaman Indikator dan Target Kinerja program dan kegiataan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka sinergitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul; dan
4. Penyesuaian pendanaan program prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyajian Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab yang meliputi :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja DPK Kabupaten Gunungkidul, proses penyusunan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul, keterkaitan antara Renja DPK Kabupaten Gunungkidul dengan dokumen Rencana Strategis , Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah, provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPK dan Capaian Renstra DPK
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPK
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPK
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyaraka

BAB III. TUJUAN, SASARAN, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPK

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap capaian kinerja Tahun 2024 (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun 2025.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 Nomor DPA/A.1/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan 5 Program, 13 Kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan dengan total Anggaran tahun 2024 sebesar Rp 3.619.312.858,00. Pada DPPA/A.6/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024 pagu anggaran ada perubahan penambahan sebesar Rp. 103.562.405,00 sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 3.722.875.263,00 dengan rincian Anggaran Belanja sebagai berikut :

Belanja Operasional : Rp. 3.692.955.163,00
Belanja Modal : Rp. 29.920.100,00

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapain target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Sehingga pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

2.1.1. Realisasi Program dan kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

   Kegiatan :

   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 35.189.900,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp.33.929.875,00 atau 96,42% . Adapun Sub Kegiatan yang belum bisa tercapai 100 % adalah :
      b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pagu anggaran sebesar Rp.6.320.000 terealisasi sebesar Rp. 5.800.000,00 atau 91,77%.
      c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
         Pagu Anggaran sebesar Rp. 24.339.900,00 terealisasi sebesar Rp.23.599.900,00 atau 96,96%.
      d. Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
         Pagu Anggaran sebesar Rp.1.650.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.649.975,00 atau 99,998%.
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.2.218.130.841 terealisasi sebesar Rp. 2.168.447.379 atau 97,76%
      Sub Kegiatan :
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
         Pagu anggaran sebesar Rp.2.177.047.641,00 terealisasi sebesar Rp.2.128.328.379,00 atau 97,76%.
      b. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
         Pagu Anggaran sebesar Rp.1.210.700,00 terealisasi Rp.1.199.000,00 atau 99,03%.
      c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Pagu Anggaran sebesar Rp.39.872.500,00 terealisasi sebesar Rp.38.920.000,00 atau 97,61%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 34.288.400,00 sampai dengan bulan Desember terealisasi sebesar Rp. 30.447.817,00 atau 88,80 %. Sub kegiatan yang belum bisa terealisasi 100% adalah :
   a. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
      Pagu Anggaran sebesar Rp.24.288.400,00 terealisasi sebesar Rp. 21.894.817,00 atau 90,15%.
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pagu Anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.553.000,00 atau 85,53%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 62.250.100,00 terealisasi sebesar Rp. 55.000.904,00 atau 88,35%. Adapun Sub kegiatan yang belum bisa terealisasi 100% adalah :
   Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   Pagu Anggaran sebesar Rp.39.199.000,00 terealisasi sebesar Rp.31.949.804 atau 81,51%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 491.254.662,00 terealisasai sebesar Rp. 476.460.629,00 atau 96,99%.
   Sub Kegiatan yang realisasi belum 100% adalah
   a. Penyediaan Jasa Surat menyurat
      Pagu Anggaran sebesar Rp.47.295.000,00 terealisasi sebesar Rp. 45.815.000,00 atau 96,87%
   b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
      Pagu Anggaran sebesar Rp.190.965.062,00 terealisasi sebesar Rp. 177.875.129,00 atau 93,15%.
   c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
      Pagu Anggaran sebesar Rp.252.994.600,00 terealisasi sebesar Rp. 252.770.500,00 atau 99,91%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.188.158.850,00 terealisasi sebesar Rp.187.871.189,00 atau 99,85%.
   Sub Kegiatan yang belum bisa terealisasi 100% adalah :
   a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
      Pagu Anggaran sebesar Rp.81.300.000,00 terealisasi sebesar Rp. 81.288.300,00 atau 99,99%.
   b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya
      Pagu Anggaran sebesar Rp.25.470.000,00 terealisasi sebesar Rp. 25.267.500,00 atau 99.20%.
   c. Pemeliharaan/Reabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya
      Pagu Anggaran sebesar Rp.71.788.850,00 terealisasi.Rp. 71.773.140,00 atau 99,98%.
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      Pagu Anggaran sebesar Rp.9.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.542.249,00 atau 99,40%.

Realisasi dari Program ini tahun 2024 sebesar 97,45% dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp.3.209.272.753,00 terealisasi sebesar Rp.2.952.157.793,00

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN.
   Program Pembinaan Perpustakaan terdiri dari 2 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan sebagai berikut:
   1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      Sub Kegiatan :
      a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
         Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.310.000,00 sampai dengan terealisasi Rp. 6.307.499,00 atau 99,96%.
      b. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
         Pagu Anggaran sebesar Rp. 24.882.500,00 terealisasi sebesar Rp. 24.102.500,00 atau 96,87%.
      c. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
         Pagu Anggaran sebesar Rp. 104.470.000,00 terealisasi sebesar Rp. 84.672.900 ,00 atau 81,05%.
      d. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
         Pagu Anggaran sebesar Rp. 67.765.000,00 terealisasi sebesar Rp. 66.205.000,00 atau 97,70%.
      e. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan , Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
         Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.350.000,00 terealisasi Rp. 7.805.393,00 atau 83,48%.
   2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      Sub Kegiatan :
      a. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
         Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.988.397,00 atau 99,61%.
      b. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
         Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 11.990.018,00 atau 99,92 %.
      c. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
         Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 7.499.370,00 atau 99,99 %.

   Realisasi dari Program ini tahun 2024 sebesar 90,17% dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp.377.501.050,00 terealisasi sebesar Rp. 241.277.500,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 23.706.423,00 atau 9,83%

3. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
   Program ini terdiri dari :
   a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
      Sub Kegiatan :
      Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
      Pagu Anggaran sebesar Rp. 35,477,500,00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 34.737.120,00 atau 97,91%

b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Pagu Anggaran Rp. 57.230.000,00 terealisasi sebesar Rp. 55.710.000,00 atau 97,39%.

c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
Pagu Anggaran sebesar Rp. 89.617.500 ,00 terealisasi sebesar Rp. 87.277.287,00 atau 97,39%.

Realisasi dari Program tahun 2024 sebesar 97,48% dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp.182,325.000,00 terealisasi sebesar Rp.177,724,407,00 terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.600.593,00 atau 2,52%

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Kegiatan :
Peningkatan Budaya Pemerintahan
Sub Kegiatan :
Implementari Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran sebesar Rp. 270.000.000, terealisasi sebesar Rp.269.091.356,00 atau 99,66% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.908.644,00, atau 0,4%.
Secara umum program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik . Dari total anggaran sebesar Rp. 3.722.875.253,00 terealisasi sebesar Rp 3.616.544.633,00 atau 97,14 %

2.1.2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

1. ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
b. Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Pagu Anggaran sebesar Rp.600.000,00 terealisasi 100%.
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Pagu anggaran sebesar Rp.690.000,00 terelasisasi 100%.
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Pagu Anggaran sebesar Rp.690.000,00 terelisasi 100%
d. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pagu Anggaran Rp.900.000,00 terealisasi 100%
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Anggaran sebesar Rp.4.670.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.670.000,00 atau 100%.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu Anggaran sebesar Rp.6.531.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.531.000 atau sebesar 100 %.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pagu Anggaran sebesar Rp.3.400.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.400.000,00 atau 100%.

d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pagu Anggaran sebesar Rp.6.300.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.300.000,00 atau 100%.

e. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
Pagu Anggaran sebesar Rp.2.150.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.150.000,00 atau 100%.

2.1.3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan .

Untuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan realisasi program dan kegiatan belum ada program dan kegiatan yang melebihi target kinerja, namun secara umum kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat berjalan dengan baik.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan tahun 2024 .

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan target kinerja keluaran seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun capainya tidak tepat seperti yang telah direncanakan. Akan tetapi secara umum semua program dan kegiatan tersebut dapat telaksana dengan baik. Namun dari keberhasilan program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas masih terdapat kegiatan belum maksimal pencapaian target yang dibawah 90% antara lain:

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian 85,53% karena ada sisa pembayaran biaya diklat.
2. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian 81,5% ada sisa belanja tiket.
3. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian 81,05% sisa belanja SPPD kurang dari 7 Km yang tidak bisa direalisasikan.
4. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 83,48% sisa belanja SPPD kurang dari 7 Km yang tidak bisa direalisasikan.

Faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya kurangnya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja belum dapat dicapai sesuai harapan.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan

teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai.

2.1.6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan pengganggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

Untuk mengetahui Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)*100
2	**23**	**1**			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80,75	83,03	80,05	80,70	100,24	80,07		
2	**23**	**001**	**2**		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang teersusun								
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	9 Dokumen	100
2	23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4) *100
2	23	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100
2	23	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	9 Dokumen	100
2	23	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlha Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	100
	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100	18 Laporan	68 Laporan	100
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	16 Laporan	100

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4) *100
2	**23**	**001**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun								
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunhangan ASN	378 Orang/Bulan	378 Orang/Bulan	378 Orang/Bulan	378 Orang/Bulan	100	378 Orang/Bulan	1134 Orang/Bulan	100
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2	23	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100	13 Laporan	52 Laporan	100
2	**23**	**001**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dokumen Administrasi Kepegawaian Kerangkat daerah yang tersusun								
2	23	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	28 Dokumen	100

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4) *100
					Administrasi Kepegawaian	Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
2	23	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	4 Orang	1 Orang	1 Orang	100	2 orang	4 orang	50
2	**23**	**001**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang tersedia								
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 Paket	6 paket	100	6 paket	28 paket	100
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	7 Paket	6 Paket	86	18 Paket	31 Paket	100

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4) *100
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandanaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100
2	23	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	8 Laporan	88	1 Laporan	17 Laporan	100
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	13 Laporan	10 Laporan	9 Laporan	90	13 Laporan	35 Laporan	100
2	23	1	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang tertangani	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	100	300 Dokumen	900 Dokumen	100
2	**23**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah yang tersusun.**								
2	23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	75	12 Laporan	33 Laporan	100
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	54 Laporan	75	72 Laporan	198 Laporan	100

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4) *100
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12 Laporan	100
2	23	001	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**								
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	82 Unit	82 Unit	60 Unit	60 Unit	100	82 Unit	282. Unit	100
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	35 Unit	35 Unit	100	35 Unit	105 Unit	100
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	100
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	34 Unit	34 Unit	34 Unit	26 Unit	100	34 Unit	94 Unit	100

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)*100
					Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Indeks pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	57,03	73,39	23,1050	56,03	242,55	23,6308		
2	**23**	**002**	**2**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana**								
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	3 Layanan	100
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	100	10 Perpustakaan	30 Perpustakaan	100

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)*100
						Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya								
2	23	2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	40 Eksemplar	40 Eksemplar	40 Eksemplar	40 Eksemplar	100	40 Eksemplar	120 Eksemplar	100
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	100	2 Layanan	6 Layanan	
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.522 Eksemplar	2.522 Eksemplar	2.522 Eksemplar	2.522 Eksemplar	100	2.505 Eksemplar	7.549 Eksemplar	99,32
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan	100 Dokumen	100 Dokumen	105 Dokumen	53 Dokumen	100	83 Dokumen	241 Dokumen	83

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)*100
					Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	**23**	**002**	**2**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana								
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	16 Lokus	16 Lokus	16 Lokus	16 Lokus	100	16 Lokus	48 Lokus	100
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	360 Orang	360 Orang	360 Orang	360 Orang	100	360 Orang	360 Orang	100

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4) *100
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	68 Perpustakaan	68 Perpustakaan	68 Perpustakaan	68 Perpustakaan	100	68 Perpustakaan	204 Perpustakaan	100
2	23	2	2.02	05	Pemilihan duta baca tingkat Daerah	Jumlah nominasi dutabaca terbaik	5 Orang	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0	0	0
2	**23**	**3**			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/dialih media /terdaftar Jumlah naskah kuno yang dialih media dan dialih aksara								
2	**23**	**003**	**2**		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan di dayagunakan	3 exempalr	3 exempalr	3 exempalr	3 exempalr	100	3 exempalr	9 exemplar	100
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan difayagunakan	3 Naskah	3 Naskah	3 Naskah	3 Naskah	100	3 Naskah	9 Naskah	100

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)*100
					Dilestarikan dan Didayagunakan									
2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**	**59.5**							
2	**24**	**002**	**2**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan pengelolaan arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2 Layanan							
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	2000 Berkas	2000 Berkas	2000 Berkas	2000 Berkas	100	2000 Berkas	6.000 Berkas	100
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12 Laporan	100
2	24	002	2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)*100
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	20 Arsip	2000 Berkas	20 Arsip	20 Arsip	100	20 Arsip	60 Arsip	100
2	**24**	**002**	**2**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota**								
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	200 Pengguna	200 Pengguna	200 Pengguna	200 Pengguna	100	174 Pengguna	574 Pengguna	100
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	2 Laporan	8 Laporan	100
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksana	100 Persen	-	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	RealisasiTarget kinerja hasil program keluaran, kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian program , kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)*100
					KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN									
4	01	04	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Dokumen Peningkatan Budaya Pemerintahan								
4	01	04	5.02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Dana Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Gunungkidul merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPK Kabupaten Gunungkidul dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan DPK Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya berusaha seoptimal mungkin dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun indikator pencapaian kinerja pelayanan DPK Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan Literasi Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan target yang ditetapkan . Pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 22,1138 tahun 2023 sebesar 22.6038 Tahun 2024 sebesar 23,1050% dan tahun 2025 sebesar 23,6038 dan 2026 sebesar 24,1678%
2. Terwujudnya Kearsipan yang berkualitas dengan Indikator Kinerja Utamanya persentase pengelolaan arsip secara baku. Pada Tahun 2022 sebesar target 78,26%, tahun 2023 sebesar 80,43%, Tahun 2024 sebesar 82,61%, Tahun 2025 sebesar 84,78% dan di tahun 2026 sebesar 86,95% .
3. Realisasi keuangan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul mencapai 97,14 %. Sedangkan untuk pencapaian kinerja Utama Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 baik untuk bidang perpustakaan maupun bidang kearsipan capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu pada Bidang Perpustakaan dari target 23,1050 dengan capaian kinerja 56,03 sedangkan untuk bidang Kearsipan dari target 82,61% tercapai 82,97%.
4. Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 realisasi keuangan diperkirakan bisa mencapai 100%, sedangkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan melihat capaian tahun 2024 untuk bidang perpustakaan yang ditargetkan 23,6308 akan tercapai 23.6308 sedangkan untuk bidang kearsipan yang ditargetkan 84,78% akan tercapai 84,78%.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU ,SPM, IKK)	Satuan (IKU,SPM,IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INDIKATOR KINERJA UTAMA										
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	22,1138	22,6038	23,1050	23,6308	55,02	73,39	56,03	23,6308	Bidang Perpustakaan
	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	78,26	80,43	82,61	84,78	78,72	80,85	82,97	84,78	Bidang Kearsipan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul adalah kondisi lingkungan eksternal yaitu era globalisasi yang sangat cepat, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat dan murah, sehingga sangat diperlukan pendekatan pengembangan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan maupun perkembangan kondisi lingkungan eksternal. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 120 tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, kedudukan dan susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, terdiri atas :

1). Kepala Dinas;
2). Sekretariat terdiri atas
   a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
   b) Subbagian Umum.
3). Bidang Perpustakaan terdiri atas :
   a) Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengembangan
   b) Kelompok Substansi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian bahan Perpustakaan
   c) Kelompok Substansi layanan dan informasi Perpustakaan.
4). Bidang Kearsipan terdiri dari :
   a) Kelompok Substansi Arsip Dinamis;
   b) Kelompok Substansi Arsip Statis;
   c) Kelompok Substansi Layanan dan Informasi Kearsipan.
5). UPT dan
6). Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan susunan organisasi yang sudah ditetapkan tersebut, DPK Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh pejabat Kepala Dinas (level eseleon II) Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan dengan melibatkan peran aktif para pejabat fungsional terutama pejabat fungsional pustakawan, pejabat fungsional arsiparis secara efektif. Permasalahan umum yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi DPK Gunungkidul saat ini adalah keterbatasan jumlah para pejabat fungsional yang difungsikan pada masing-masing bidang yang dipimpin oleh pejabat struktural, kondisinya sangat terbatas.Akibat dari kondisi tersebut, tingkat pengendalian kinerja yang menjadi tanggungjawab para pejabat struktural menjadi kurang mencukupi dalam memacu akselerasi pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Permasalahan pelaksanaan Program Pengembangan Kearsipan adalah :

1. Belum tertibnya implementasi penyusutan arsip oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah belum optimal;

2. Keberadaan records centre sebagai tempat yang menjadi pusat penyimpanan arsip inaktif pada masing-masing perangkat daerah belum optimal sehingga masih sering terjadi arsip bertumpuk tidak tertib pada berbagai unit kerja;
3. Apresiasi terhadap penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai kesejarahan masih rendah;
4. Perangkat daerah sebagai pencipta arsip belum mengadakan sarana dan prasarana kearsipan secara efektif;
5. Pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kearsipan masih rendah.

Sedangkan permasalahan Program Pembinaan Perpustakaan adalah :

1. Masih minimnya kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan Perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan di daerah;
2. Kurangnya dukungan teknis berupa Penganggaran serta Sarana dan prasarana dari pengambil kebijakan untuk pengembangan perpustakaan termasuk pengembangan jabatan fungsional pustakawan;
3. Kesadaran masyarakat akan minat dan budaya baca masih kurang.

2.3.2. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 120 Tahun 2021 Tetang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan Renstra melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang pencapaiannya akan diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program. Dalam Kedudukannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Gunungkidul serta adanya Renstra tersebut, telah membuka peluang untuk melakukan perannya berkaitan dengan isu strategis bidang perpustakaan yaitu pemberdayaan perpustakaan dalam mencerdaskan masyarakat, dan bidang kearsipan yaitu arsip sebagai pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Menurut tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang harus dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul terkait visi Bupati Periode 2025-2029 *" Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"* program pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 program prioritas yang dilaksanakan DPK di bidang perpustakaan adalah mengimplementasikan :

Misi kesatu RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-

2029
Yaitu " Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri". melalui strategi Program *Bocah Pinter: Meningkatkan derajat pendidikaan warga melalui penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan merata melalui penguatan pendidikan budi pekerti, bantuan biaya pendidikan, perbaikan sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru* melalui prioritas PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN dengan indikator kinerja program *Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO* dengan indikator kinerja *Jumlah Peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialih media /terdaftar*
Dibidang kearsipan, program prioritas DPK dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 yakni **misi kelima** RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 yaitu *Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945,*
menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban., dengan program strategis Pamong Nglayani & Ngayomi: Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan. dengan sasaran PD : *Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku* melalui prioritas PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP serta indikator kinerja program*: Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku*

Program di bidang Kearsipan tersebut dilaksanakan melalui tiga kegiatan utama, yakni 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dan 3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota. Tiga kegiatan utama tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam sub-sub kegiatan, diantaranya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis dan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN dan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

Program prioritas bidang perpustakaan adalah Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuni , dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 yakni Misi esatu RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 *Yaitu Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.* dengan sasaran daerah adalah Terwujudnya derajat taraf pendidikan masyarakat secara inklusif dan merata meningkat melalui strategi Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat dan arah kebijakan daerah

Meningkatkan minat baca masyarakat dengan yang dilaksanakan kegiatan utama, yakni 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan Kegiatan Pelestarian Naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota .

Program pembinaan perpustakaan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota , Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat, Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca , Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan serta Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan Kegiatan Pelestarian Naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota dijabarkan dalam sub kegiatan Pengembangan,Pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk di lestarikan dan didayagunakan dan Implementasi Budaya Pemerintahan

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.

Tantangan dan Peluang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan Visi dan Misinya adalah :

a. Peluang di Bidang Perpustakaan sangat berkaitan secara langsung dengan bidang pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang mesti mendapatkan pelayanan secara optimal. Bidang pendidikan tentu akan berkembang maju apabila didukung oleh perpustakaan yang modern, dan dapat diandalkan. Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya tingkat pendidikan yang berkualitas dengan unsur pendukungnya yaitu perpustakaan. Oleh karena itu penyelenggaraan perpustakaan dapat terus berkembang seiring dengan dinamika pengembangan pendidikan;
b. Peluang di Bidang Kearsipan sebagai bahan utama yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Informasi yang berupa arsip tentu tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan data untuk perencanaan, pengawasan, dan pelaporan.Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dapat terjadi apabila didukung oleh penyelenggaraan kearsipan yang tertib oleh masing masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip.
c. Tantangan bidang perpustakaan dan kearsipan untuk masa depan adalah kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat mestinya dapat

dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan pelayanan perpustakaan.

d. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 , bahwa Visi-nya adalah "*Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban*" Visi tersebut disertai dengan penetapan Misi-nya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
2. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

Berkaitan dengan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan tersebut, untuk mencapai pembangunann daerah telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran pembangunan menurut Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RENCANA KERJA Pembangunan Daerah (RKPD), dan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan termasuk urusan wajib yang semestinya mampu memberikan kontribusi atau dampak terhadap Visi dan Misi tersebut.

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

a. Bidang Perpustakaan mengimplementasikan MISI K RPJMD Gunungkidul, *Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri* dengan
   1. Meningkatkan minat baca masyarakat.
   2. Mengembangkan perpustakaan sesuai standar nasional.
   3. Mengembangkan perpustakaan berbasis IT
   4. Mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

   Kebijakan /tindaklanjut dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu;
      a. Mengadakan kegiatan terkait minat baca : bedah buku, pembentukan klub baca, dan lomba-lomba terkait literasi.
      b. Pemdampingan perpustakaan sekolah/madrasah dan desa
      c. Pemasyarakatan E-pusda dan perpustakaan dengan berbasis IT
      d. Mengembangkan program transformasi perpustakaan daerah
      a. dan desa/kelurahan

b. Bidang Kearsipan mengimplementasikan MISI KELIMA yakni: Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban denga ;
   1. Peningkatkan pengelolaan arsip Perangkat Daerah
   2. Peningkatan tertib arsip dan administrasi
   3. Peningkatan khasanah arsip LKD
   4. Peningkatan sumber daya kearsipan.

Kebijakan /tindaklanjut dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu:

a. Melaksanakan pengawasan kearsipan bagi Perangkat daerah
b. Melaksanakan pendampingan penataan arsip pada Perangkat Daerah
c. Melaksankan penelusuran dan akuisisi arsip
d. Menyelenggarakan pelatihan dan forum kearsipan.

2.4. REVIU TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Perbandingan antara RKPD 2026 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Perpustakaan dan kearsipan sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik**	**100**	**4.284.753.079,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**80,75**	**3.758.687.875,00**	
2.23.1.201.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5,143**	**4.375.102.857,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**3 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 17 Dokume**	66.028.000,00	
2.23.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	49.917.025,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.618.200,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP	1 Dokumen	12.155.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35.705.000,00	
2.23.1.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	23.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.650.000,00	
2.23.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	850.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1.650.000,00	
2.23.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	850.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.650.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.1.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	850.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	6.140.000,00	
2.23.1.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.862.025,00	Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.614.800,00	
2.23.1.202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**130,667**	3,066.837.347,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan 13 Laporan 378 Orang	**22.609.153.895,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.1.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang/bulan	3.030.837.374,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang/bulan	2.529.055.895,00	
2.23.1.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.800.000,00	
2.23.1.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	33.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	13 Laporan	77.298.000,00	
2.23.1.205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	14.000.000,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	***Jumlah* Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	6 Dokumen,	3.251.200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.1.205,03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4Dokumen	4,500,000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	3.251.200,00	
2.23.1.205,09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	9.500.0000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	48 Orang		
2.23.1.205	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**65,2**	**210.500.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD** **Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu** **Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** **Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan** **Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan** **Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka**	300 Dokumen 8 Laporan 6 Laporan 4 Paket 6 Paket 6 Paket	223.264.900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.1.205.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	13,000,000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	9.959.000,00	
2.23.1.205.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	6 Paket	99.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	80.327.000,00	
2.23.1.205.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.894.900,00	
2.23.1.205.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	9.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	12.025.000,00	
2.23.1.205.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	72.150.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	109.609.000,00	
2.23.1.2.05.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300 Dokumen	4,500,000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300 Dokumen	5.450.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Terlaksana**	**24 Unit**	**85.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	***Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan***	**3 Unit 5 Unit**	49.896.000,00	
2.23.1.2.07.5	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	45.000.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	27.679.000,00	
2.23.1.2.07.11	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka	4 Unit	93.000.000,00	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	22.217.000,00	
2.23.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**88 Laporan**	**506.103.315,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	72 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	530.966.600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.1.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24,700,000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.299.000,00	
2.23.1.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	196.403.315,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	283.869.600,00	
2.23.1.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	285.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	216.798.000,00	
2.23.1.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah barang milik daerah yang terfasilitasi pemeliharaanya.**	37 Unit	389.745.170,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.**	82 Unit 30 Unit 31 Unit	276.127.280,00	
2.23.1.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	82 Unit	127.800.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	82 Unit	228.600.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.1.209.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	3.000.000,00	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	0	
2.23.1.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	159.945.170,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	12.600.000,00	
2.23.1.209.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya		Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	0 Unit	0,00	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	1 Unit	22.853.280,00	
2.23.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	99.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	12.074.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				**172,777,500.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**					
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**Nilai Tingkat Kegemarann Membaca**	**10,60 Nilai**	**425.646.731,00**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**Persentase meningkatnya perpustakaan sesuai Standar Perpustakaan Nasional.**	71	**1.457.789.900,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.02.201	**Pengeloaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Indeks Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**461,55**	**324.873.756,00**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya**	2522 Exemplar 150 Exemplar 1 Perpustaka an	647.077.200,00	
2.23.02.201.11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan	50.715.000,00	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	10 Perpustakaan	82.849.900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.02.20 1.12	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2 Layana n	137.812.50 0,00	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Perpus takaan	132.019.000,0 0	
						Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustak aan	17.160.000,00	
						Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat		Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyaraka	2004 Eksempl ar	2.400.000,00	
						Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	33.326.500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.02.20 1.18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.522 Eksemplar	115.431.750,00	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2500 Eksemplar	114.255.000,00	
2.23.02.20 1.19	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	40 Exemplar	5.788.000,00	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	150 Exemplar	247.076.800,00	
2.23.02.20 1.20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	7.000.000,00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 dokumen	17.990.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.02.202	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Indeks Pembudayaan Gemar Membaca Terlaksana**	**110,5**	**100.772.975,00**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota**	**5 orang 84 Lokus 5 Orang**	**810.712.700,00**	
2.23.02.202.006	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	9.329.000,00	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Dipilih dan		Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	9.700.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.02.20 2.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8 Perpustakaan	49.500.000 ,00	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	8 Perpustakaan	63.649.900,00	
						Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustaka an	35.590.000,00	
2.23.02.20 2.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	360 Orang	12.123.975 ,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	509.334.000,0 0	
2.23.02.20 2.0010	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	16 Lokus	29.820.000 ,00	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	84 Lokus	192.438.800,0 0 Kab. G	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialih media dan terdaftar**	**3 Naskah**	**12.155.000,00**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pengelolaan naskah kuno yang terdata /dialih media /dialih aksara/ dialih bahasa/diakuisisi.**	60%	**131.673.300,00**	
2.23.03.201	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah exemplar pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota**	**3 Naskah**	**12.155.000,00**	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Meningkatnya jumlah Naskah Kuno Kabupaten yang dikelola**			
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	820 Orang	116.673.300,00	
2.23.03.201.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan difayagunakan	3 Naskah	12.155.000,00	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Jumlah naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat yang dikembangkan untuk dilestarikan dan difayagunakan	3 Eksemplar	15.000.000,00	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku**	**86,95 Persen**	**285.577.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)**	59.5	**271.498.700,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,24,02.201	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Indeks Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	1 Laporan	63.541.080,00	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan *Kabupaten/Kota Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan***	4 Laporan 200 Berkas	153.255.000,00	
2,24,02.2011.02	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2000	12.659.920,00	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan*	1 Berkas	6.655.000,00	
2,24,02.2011.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.881.080,00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	146.600.000,00	
2,24,02.202	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik**		**120.718.000,00**	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Hasil pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan lembaga kerasipan daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN**	1 Laporan 100 Pengguna	58.243.800,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,24,02.2002.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	2 Arsip	120.718.000,00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	2 Arsip	58.243.800,00	
2.24.02.203	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN**	**200 Arsip**	**98.398.000,00**		**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JI**	100 Pengguna 3 Laporan	59.999.900,00	
2.24.02.203.02	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	18.000.000,00	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	22.849.900,0	
2.24.02.203.03	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	83.318.000,000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	37.150.000,00 Kab. G	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.							**103.369.000,00**	
4.01.04.05.2	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil peningkatan Budaya Pemerintah Kabupaten/Kota			Peningkatan Budaya Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil peningkatan Budaya Pemerintah Kabupaten/Kota		**103.369.000,00**	
4.01.04.05.2.001	Implementasi Budaya Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		Implementasi Budaya Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	**103.369.000,00**	
			TOTAL		**5.098.481.588,00**					**5.723.018.775,00**	

V’

Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil Analisis kebutuhan program dan kegiatan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan tingkat kinerja yang dicapai dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD.

Pada rancangan awal RKPD (pada kolom 2 s/d kolom 6), program dan kegiatan sesuai dengan Renstra tahun 2026. Materi tersebut dipergunakan dalam pertemuan forum PD, sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan PD berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kapanewon untuk mengisi Renja PD Tahun 2026.

Selanjutnya, pada hasil analisis kebutuhan (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah Pagu Indikatif RKPD merupakan analisis kebutuhan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026. Dengan adanya pagu indikatif RKPD dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2026

Dari pagu indikatif yang telah ditetapkan, ada rancangan renja 2026 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada yang kurang dan ada yang masih melebihi pagu indikatif, namun secara nilai total tetap sesuai dengan pagu yang diberikan. Hal ini dikarenakan analisis kebutuhan yang memang dirasakan penting untuk dilaksanakan pada tahun 2026.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Sesuai Tupoksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan usulan Program dan Kegiatan Prioritas

1. Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan : Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
   Usulan :
   - Pendampingan pengelolaan arsip kalurahan
2. Kegiatan :Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan : Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
   Usulan :
   - Replikasi Program TPBIS bagi Perpustakaan Kalurahan
   - Fasilitasi Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Perpustakaan Kalurahan

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari para pemangku kepentingan ada 20 usulan PIS) . Usulan yang terakomodir ada 2 Usulan Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Perpustakaan Kalurahan , 8 Usulan Pendampingan Pengelolaan arsip kalurahan. 10 Usulan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat termuat dalam tabel dibawah :

Tabel 2.4

Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien /Volume	Harga Satuan (Rp)	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fasilitasi Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Perpustakaan Kalurahan	Katongan, Nglipar	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan.	1	21,850,000.00	21,850,000.00	Ditolak, belum masuk program TPBIS
2	Fasilitasi Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Perpustakaan Kalurahan	Pengkol, Nglipar	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan.	1	21,850,000.00	21,850,000.00	Diterima, masuk program TPBIS tahun 2018
3	Fasilitasi Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Perpustakaan Kalurahan	Giripurwo, Purwosari	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan.	1	21,850,000.00	21,850,000.00	Diterima, masuk program TPBIS tahun 2022
4	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Perpustakaan Desa	Pringombo, Rongkop	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan.	1	14,300,000.00	14,300,000.00	Ditolak , karena tidak ada dalam kamus usulan 2026 (sudah di kamus usulan 2025)
5	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Perpustakaan Desa	Selang Wonosari	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan.	1	14,300,000.00	14,300,000.00	Ditolak , karena tidak ada dalam kamus usulan 2026 (sudah di kamus usulan 2025)

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kegiatan Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Desa berbasis inklusi sosial	Planjan, Saptosari	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan.	1	20,360,000.00	20,360,000.00	Ditolak , karena tidak ada dalam kamus usulan 2026 (sudah di kamus usulan 2025)
7	Pendampingan pengelolaan arsip kalurahan	Tileng , Girisubo	Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	1	6,000,000.00	6,000,000.00	Diterima
8	Pendampingan pengelolaan arsip kalurahan	Bendungan, Karangmojo	Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	1	6,000,000.00	6,000,000.00	Diterima
9	Pendampingan pengelolaan arsip kalurahan	Wiladeg, Karangmojo	Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	1	6,000,000.00	6,000,000.00	Diterima
10	Pendampingan pengelolaan arsip kalurahan	Botodayaan, Rongkop	Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	1	6,000,000.00	6,000,000.00	Ditolak, sudah didampingi di 2025
11	Pendampingan pengelolaan arsip kalurahan	Pringombo, Rongko	Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	1	20,360,000.00	20,360,000.00	Ditolak , karena tidak ada dalam kamus usulan 2026 (sudah di kamus usulan 2025)
12	Pendampingan pengelolaan arsip kalurahan	Pacarejo, Semanu	Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	1	6,000,000.00	6,000,000.00	Diterima

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Pendampingan pengelolaan arsip kalurahan	Banjarejo, Tanjungsari	Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	1	6,000,000.00	6,000,000.00	Diterima
14	Pendampingan pengelolaan arsip kalurahan	Karangrejek, Wonosari	Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	1	6,000,000.00	6,000,000.00	Diterima
15	Pendampingan pengelolaan arsip kalurahan	Piyaman, Wonosari	Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	1	6,000,000.00	6,000,000.00	Diterima
16	Pendampingan pengelolaan arsip kalurahan	Selang, Wonosari	Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	1	6,000,000.00	6,000,000.00	Ditolak, sudah didampingi di 2023
17	Replikasi Program TPBIS bagi Perpustakaan Kalurahan	Kedungkeris, Nglipar	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan.	1	29,275,000.00	29,275,000.00	Ditolak, Jenis Usulan PIWK dan sudah masuk program TPBIS Tahun 2022
18	Replikasi Program TPBIS bagi Perpustakaan Kalurahan	Girikarto, Panggang	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan.	1	29,275,000.00	29,275,000.00	Ditolak, Jenis usulan PIWK
19	Replikasi Program TPBIS bagi Perpustakaan Kalurahan	Girimulyo, Panggang	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan.	1	29,275,000.00	29,275,000.00	Ditolak, Jenis Usulan PIWK dan sudah masuk program TPBIS Tahun 2022
20	Replikasi Program TPBIS bagi Perpustakaan Kalurahan	Girisuko, Panggang	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan.	1	29,275,000.00	29,275,000.00	Ditolak, Jenis Usulan PIWK dan sudah masuk program TPBIS Tahun 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Dalam menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan harus sesuai dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down atau bottom-up. Dalam menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan harus sesuai dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Untuk itu perlu sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dengan dokumen perencanaan di daerah supaya program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 arah dan kebijakan di bidang Perpustakaan menyebutkan bahwa peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi menjadi salah satu strategi dalam pembangunan kebudayaan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Hal tersebut berarti bahwa penguatan masyarakat pembelajar yang literat, kreatif, dan inovatif tersebut menjadi salah satu fokus pada RPJMN 2025-2029 sebagai tahap peletakkan pondasi dalam upaya pencapaian Indonesia Emas 2045.

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional di bidang perpustakaan tersebut, Penyusunan rancangan awal Renstra Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025-2029 mengambil arah dan kebijakan yang mengarah pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu 1) Penguatan budaya baca dan literasi; 2) Pengarusutamaan naskah kuno nusantara; dan 3) Standardisasi dan Pembinaan Perpustakaan.

Renstra 2025-2029 Perpusnas khususnya dalam kerangka regulasi juga mempertimbangan perubahan kebijakan terkait revisi

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Visi Perpusnas mulai Tahun 2025 juga telah berubah menjadi "Perpustakaan Hadir Demi Martabat Bangsa" sebagai visi baru sekaligus tagline baru Perpusnas. Dengan perubahan visi tersebut, diharapkan Perpustakaan ke depan keberadaannya dapat lebih berfokus pada upaya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat untuk tetap kreatif dan meningkatkan kualitas hidup. Maju dan sejahteranya masyarakat sebuah bangsa diukur dari pengetahuannya. Sehingga perpustakaan harus hadir untuk merawat dan meningkatkan martabat bangsa.

Sejalan dengan arah kebijakan RPJM Nasional dan Perpusnas RI, maka arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DIY dalam mengatasi isu-isu strategis yang telah diidentifikasi di bidang perpustakaan adalah sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan Pembinaan perpustakaan baik itu pembinaan institusi maupun pembinaan Sumber daya manusia (SDM). Kedua, meningkatkan Gerakan budaya baca masyarakat. Ketiga, Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan, dengan upaya peningkatan mutu layanan, peningkatan layanan berbasis TIK, peningkatan dan pengembangan layanan perpustakaan menetap, peningkatan dan pengembangan layanan perpustakaan yang ramah terhadap kelompok rentan seperti layanan braille, Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), dan kegiatan wisata pustaka untuk kelompok rentan. Arah kebijakan yang terakhir atau keempat adalah penyediaan dan pembenahan sarana dan prasarana perpustakaan.

Berdasarkan arah kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah Provinsi DIY, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2026 (RKP 2026) dapat mengarah pada kebijakan nasional dan provinsi di atas. Apalagi RKP Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 ini merupakan RKP Tahun pertama pada RPJMD 2025-2029.

Tema prioritas pembangunan Tahun 2026 dirumuskan dengan berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah juga memperhatikan arah kebijakan dalam isu strategis Propinsi DIY dan Daerah sebagai berikut :

a. Isu strategis provinsi

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
2. Pengembangan Wilayah Selatan DIY
3. Perkembangan Teknologi Informasi
4. Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif
5. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
7. Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta-Prambanan
8. Penguatan Ketahanan Pangan
9. Pelestarian dan Pengelolaan Budaya
10. Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan
11. Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
12. Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital

b. Isu strategis daerah

1. Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
2. Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
3. Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
4. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
5. Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
6. Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2030 adalah *" Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"*

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Demi tercapainya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul selaras dengan Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterjemahkan ke dalam Sasaran Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul diantaranya kapasitas sumber daya manusia meningkat sesuai dan sejalan dengan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsinya turut serta mendukung prioritas pembangunan yaitu :

1. Program Bocah Pinter
2. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi

Program prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul dijabarkan kembali dalam program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul didasari atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPK yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA DPK. Untuk sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dirumuskan dengan berdasar pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2026 sebagaimana telah dijabarkan pula dalam Rancangan RKPD Tahun 2026 Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan disempurnakan dalam proses verifikasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 serta Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 yang disajikan dalam tabel dibawah dibawah ini

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2030	Proyeksi Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2030
1.	Terwujudnya peningkatan Literasi masyaraka dan peningkatan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	59,03	59,03

	Kearsipan yang berkualitas			
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	72	72

Tabel 3.2
Indikator Kinerja IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2026

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Indeks pembangunan literasi masyarakat.	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan, UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan $\text{IPLM Kab/kota} = \frac{\sum_{i=1}^{7}(\text{UPLM})_i}{7} \times 100$ Keterangan: IPLM Kab/Kota : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota UPLMi : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat	57,03
2.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	Indeks nilai pengawasan kearsipan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan arsip dan penyelenggaraan kearsipan dengan bobot tertentu pada masing masing aspek Formula nilai = Jumlah nilai pengawasan arsip seluruh PD dibagi jumlah PD	64

3.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca Masyarakat Perhitungan Tingkat Kegemaran Membaca : TGM=0.3TFM+0.3TDM+0.3TJB+0.05FAI+0.05DAI Catatan : • Frekuensi membaca (TFM) = Jumlah Aktivitas membaca per minggu • Durasi membaca (TDM) = lama waktu aktivitas membaca per hari • Jumlah buku dibaca (TJB) = jumlah buku yang telah diselesaikan per 3 bulan • Frekuensi akses internet (FAI) = Tingkat freferensi penggunaan internet secara umum. • Durasi akses internet (DAI) = lama waktu aktivitas akses internet per hari	84,04
4	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	∑PD yang menerapkan pengelolaan arsip scr baku ——————————— X 100 ∑ Total PD	82,99%

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang memuat sasaran PD, Indikator beserta targetnya . Melihat capaian target tersebut di tahun 2024 baik untuk bidang perpustakaan maupun bidang kearsipan capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target untuk bidang perpustakaan dari target 23.1050 berdasarkan hasil survei dari Perpusnas dengan capaian kinerja 56,05, sedangkan untuk bidang Kearsipan dari target 82,61% tercapai 82,97%.maka ditahun 2026 ada perubahan pada proyeksi terhadap target Sasaran PD tersebut sebagai berikut ;

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Sasaran PD	Indikator sasaran PD	Target Sasaran PD Dalam RPJMD Tahun 2030	Proyeksi Target Sasaran PD Tahun 2026
1.	Terwujudnya peningkatan kegemaran membaca di masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	84,24	57,03
2.	Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku	Persentase penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	83.03	82.99

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan.

Menurut tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang harus dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul terkait visi, misi dan program pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026, program prioritas yang akan dilaksanakan DPK untuk lima tahun mendatang di bidang perpustakaan adalah mengimplementasikan misi kesatu dan kelima RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 yaitu :

Misi kesatu RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 *Yaitu Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.* dengan sasaran PD *Terwujudnya pembangunan literasi Masyarakat* melalui prioritas PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN dengan indikator kinerja program *Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO* dengan indikator kinerja *Jumlah Peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialih media /terdaftar*

dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

- Misi kelima RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 yaitu ” *Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.* dan arah kebijakan daerah: *Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan.*dengan sasaran PD : *Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku* PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP serta indikator kinerja program***:*** *Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku* dengan 3 kegiatan:

2) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota;
3) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
4) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai tugas pokok dan fungsi DPK di bidang perpustakaan dan kearsipan adalah sebagai berikut.

a. Pengetahuan yang pesat berkembang dan informasi yang ditulis dan arsip yang diciptakan semakin banyak sehingga menuntut pengembangan perpustakaan dan kearsipan
b. Peluang memanfaatkan pelimpahan urusan yang cukup luas di bidang perpustakaan dan kearsipan
c. Dukungan program kegiatan yang sinkron dari Perpusnas, ANRI dan BPAD DIY
d. Dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan lembaga untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan
e. Adanya animo masyarakat untuk menambah dan manfaatkan layanan perpustakaan di luar jam kerja
f. Adanya dukungan tambahan SDM Pustakawan dan Arsiparis
g. Peluang kerjasama mengikuti diklat dan bimtek di Pusat dan Provinsi
h. Berkembangnya peluang kerjasama dengan banyak pihak untuk pengembangan perpustakaan dan kearsipan

4.2 Anggaran Belanja

Sesuai dengan RKPD kabupaten Gunugkidul Tahun Anggaran 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD. Pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 5.723.018.775,00 termasuk didalamnya Belanja Pegawai / Belanja gaji sebesar Rp. 2.529.055.895,00

Tahun Anggaran 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung `dengan belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan 4 Program,13 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan .

Program dan kegiatan di kelompokkan dalam dua jenis yaitu Program dan Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan dan Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Indikator Kinerja Utamanya adalah Indeks pembangunan literasi masyarakat.Total kebutuhan dana sebesar Rp1.457.789.900,00 yang terdiri dari 2 (Kegiatan) kegiatan yaitu:

a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 647.077.200,00

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
2. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
4. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
5. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Ko
6. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat
7. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dengan pagu anggaran Rp. 810.712.700,00

Sub Kegiatan :

1. Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
4. Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
   Indikator kinerja program tersebut adalah Jumlah Peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialih media /terdaftar, dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 131.673.500,00 dan target kinerja program sebesar 100 %. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terdiri dari satu Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu
   - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
   - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

3. Program Pengelolaan Arsip
   Program Pengelolaan Arsip mempunyai indikator program Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku dengan total pagu anggaran di Tahun 2026 sebesar Rp. 271.498.700,00 terdiri dari tiga (3) kegiatan, yaitu :
   a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan : Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.
   b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan : Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
   c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan : Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIK dan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
   Program ini mempunyai indikator Persentase Penyelenggaraan keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan pagu anggaran Rp. 103.369.000,00 dengan kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan. Kegiatan :
   Peningkatan Budaya Pemerintahan Kabupatgen/Kota.
   Sub Kegiatan : Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan prioritas disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2026

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Bocah Pintar	Terwujudnya derajat taraf pendidikan masyarakat secara inklusif dan merata meningkat	Terwujudnya pembangunan literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat .	57,03	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.457.789.900,00**	**DPK**
					2.23.02.02.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	647.077.200,00	
					2.23.02.02.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.849.900,00	
					2.23.02.02.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	132.019.000,00	
					2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	17.160.000,00	
					2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	2.400.000,00	
					2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan *Jumlah Data dan inf*	33.326.500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.23.02.02.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	114.255.000,00	
					2.23.02.02.01.0019	Pengembangan kehasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	247.076.800,00	
					2.23.02.02.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	17.990.000,00	**DPK**
					2.23.02.02.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**810.712.700,00**	**DPK**
					2.23.02.02.02.006	Pemilihan Duta Baca /Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daeerah Kabupaten/Kota	9.700.000,00	**DPK**
					2.23.02.02.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	63.649.900,00	**DPK**
					2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.590.000,00	**DPK**
					2.23.02.02.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar membaca	509.334.200,00	**DPK**
					2.23.02.02.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dasar dan Menengah	192.438.800,00	DPK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**131.673.500,00**	
					2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**131.673.300,00**	
					2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	116.673.300,00 K	DPK
					2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pelestraian dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunkan	15.000.000,00	DPK
					4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	103.369.000,00	
					4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	103.369.000,00	DPK
					4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	103.369.000,00	DPK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pamong Nglayani & Ngayomi	**Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel**	**Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku**	**Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku**	**82.99**	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**271.498.700,00**	**DPK**
					2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**153.255.000,00**	
					2,24,02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	6.655.000,00	
					2,24,02.2.01.0003	Pengawasan arsip dinamis keweangan Kabupaten/Kota	146.600.000,00	
					2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**58.243.800,00**	
					2.24.02.202.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	58.243.800,00	
					2.24.02.2,03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**59.999.900,00**	
					2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi dan Akses Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melaui JIKN	59.999.900,00	

5. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Pada Dinas Perpustakan dan Kearsipan ada satu program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota yaitu penunjang Bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik . Program Penunjang pada Urusan Bidang Perpustakaan tersebut terdiri dari 7 kegiatan dengan pagu indikatif Rp 3.758.687.875,00 . Kegiatan tersebut meliputi:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rancangan Awal Rencana Kera (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul TA. 2026 berdasarkan rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**		**80,75 Nilai**	**3.758.687.875,00**			**100**	**3.303.865.358,00**
2.23.1.201.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun			**66.028.000,00**			**5,143**	**35.376.500,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	16.618.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	17.800.000,00
2.23.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	35.705.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	1.700.000,00
2.23.1.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	2.000.000,00
2.23.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	2.000.000,00
2.23.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.1.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Laporan	6.140.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	7.000.000,00
2.23.1.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	2.614.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	2.876.500,00
2.23.1.202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		**2.609.153.895,00**				**2.250.631.258,00**
2.23.1.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	378 Orang/bulan	2.529.055.895,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	2.234.631.258,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.1.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	2.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	3.000.000,00
2.23.1.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	77.298.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	13.000.000,00
2.23.1.205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**			**3.251.200,00**				**11.076.500,00**
2.23.1.205,03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	3.251.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	3.576.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.1.205	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**			223.264.900,00				205.001.600,00
2.23.1.205.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	9.959.000,00 K	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	10.956.000,00
2.23.1.205.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	80.327.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	55.523.600,00
2.23.1.205.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	5.894.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	6.484.500,00
2.23.1.205.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	12.025.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	13.227.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.1.205.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Laporan	109.609.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	112.815.000,00
2.23.1.2.05.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Dokumen	5.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	5.995.000,00
2.23.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia			**49.896.000,00**				**12.760.000,00**
2.23.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	27.679.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	12.760.000,00
2.23.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	22.217.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	12.760.000,00
2.23.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			530.966.600,00				**456.650.000,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.1.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	30.299.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	300.000,00
2.23.1.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72 Laporan	283.869.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	283.870.000,00
2.23.1.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	216.798.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	172.480.000,00
2.23.1.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia			276.127.280,00				332.369.500,00
2.23.1.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 Unit	228.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	288.227.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.1.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Unit	12.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	14.520.000,00
2.23.1.209.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	2 Unit	22.853.280,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	17.000.000,00
2.23.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Unit	12.074.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	12.622.500,00
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**		**57,03**	**1.457.789.900,00**				**358.623.500,00**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana			647.077.200,00			**461,55**	254.283.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaandi WilayahKabupaten/Kota SesuaiKewenangannya	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Perpustakaan	82.849.900,0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			34.650.000,00
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Layanan	132.019.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			71.707.000,00
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Perpustakaan	17.160.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17.160.000,00
2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2004 Eksemplar	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.400.000,00 Kab. G
.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	33.326.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			33.326.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman kolekai Perpustakaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2500 Eksemplar	114.255.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85.000.000,00
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Eksemplar	247.076.800,00	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25.000.000,00
2.23.02.2.01.00120	Pengembangan dan Pemeliharaan layanan perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangka n dengan manajemen layanan TIK	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Perpustakaan	17.990.000,00	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18.010.000,00
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana**			810.712.700,00				104.340.000,00
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca /Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Orang	9.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10.670.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Perpustakaan	63.649.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24.145.000,00
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Perpustakaan	35.590.000,0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35.590.000,00
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	509.334.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			19.646.000,00
2.23.02.202.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dasar dan Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Lokus	192.438.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14.289.000,00
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase pengelolaan naskah kuno yang terdata/ dialih media/ dialih aksara/ dialih bahasa/ diakuisisi**		60 Persen	**131.673.300,00**		**70%**		**148.340.850,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.03.201	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya jumlah Naskah Kuno Kabupaten yang dikelola**			131.673.300,00				148.340.850,00
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	820 Orang	**116.673.300,00**				128.340.850,00
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Eksemplar	15.000.000,00	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.000.000,00
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional)		59.5 Persen	271.498.700,00				232.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,24,02.201	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pengelolaan arsip dinamis			153.255.000,00				153.255.000,00
2,24,02.201.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Berkas	6.655.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.800.000,00
2,24,02.201.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	146.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			146.600.000,00
2,24,02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Arsip statis yang dilakukan akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis			58.243.800,00				58.243.800,00
2,24,02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Arsip	58.243.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			58.243.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24.02.203	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota yang terlaksana			59.999.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18,000,000.00
2.24.02.203.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Pengguna	22.849.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.500.000,00
2.24.02.203.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan lembaga kerasipan daerah Kabupaten/Kota		3 Laporan	37.150.000,00				23.500.000,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik		100%	103.369.000,00				113.709.900,00
4.01.04.05.2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			103.369.000,00				113.709.900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	**103.369.000,00**				113.709.900,00
		JUMLAH			**5.723.018.775,00**				**4.157.339.608,00**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rancangan Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang dan RKPD

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan,

ttd

KISWORO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2026

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PANGAN
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Mulai tahun 2026, berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan penggabungan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan menjadi satu perangkat daerah, yaitu Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Kabupaten Gunungkidul. Penggabungan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terpadu, memperkuat koordinasi antar bidang terkait dalam sistem pangan, serta mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan program yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dan peternak.

Langkah integrasi kelembagaan ini juga mencerminkan pendekatan pembangunan agribisnis yang lebih menyeluruh, dengan memperkuat rantai nilai dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari produksi pertanian dan peternakan, pengolahan hasil, hingga distribusi dan konsumsi pangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah dan prioritas nasional dalam mendukung ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan daya saing daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 juga mempertimbangkan sinkronisasi dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2026. Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY menekankan pada penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian, peningkatan kualitas sumber daya petani, serta pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Renja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dirancang untuk mendukung kebijakan provinsi, khususnya dalam hal peningkatan produksi dan produktivitas pertanian; penguatan kelembagaan petani dan penyuluhan; pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; peningkatan keamanan pangan.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan yang terarah, terukur, dan responsif terhadap tantangan dan peluang pembangunan di sektor pertanian, pangan, dan peternakan secara terpadu.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, maka Bupati terpilih harus menyusun RPJMD tahun 2025-2029. Sejalan terhadap penyusunan RPJMD maka perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029. Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memuat visi dan misi Bupati terpilih, dan menjadi dasar penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2026, juga mensinergikan pembangunan tahun 2026 dengan mengikuti Renja Kementrian Pertanian Republik Indonesia dan Renja Badan Pangan Nasional tahun 2026.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 yang digunakan sebagai acuan di dalam pelaksanaan kegiatan di urusan pertanian, pangan, dan kebudayaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
15. Surat Edaran Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik provinsi maupun pusat.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Tahun 2026 :

1. Memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana daerah wajib menyusun RKPD yang didasari pada penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam hal ini Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan urusan pertanian dan pangan.
3. Menggambarkan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang menyangkut urusan pertanian, peternakan dan pangan dari berbagai sumber pendanaan.
4. Sebagai bahan dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan.
5. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan pertanian, peternakan dan pangan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.

6. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
7. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1. Rencana Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun sebelumnya menjadi landasan penting dalam penyusunan Renja Tahun 2026. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berhasil mencapai target kinerja, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tahun mendatang.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi yang berlaku mulai tahun 2026, yaitu penggabungan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memandang perlu adanya penataan kembali perencanaan program secara lebih terintegrasi. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, yang diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas subsektor, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta mendorong pelayanan publik yang lebih terpadu dan responsif terhadap kebutuhan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan.

Dengan terbentuknya kelembagaan baru yang lebih komprehensif, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan, guna mewujudkan sektor pertanian, peternakan, dan pangan yang tangguh, berdaya saing, serta mampu berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Untuk kinerja perangkat daerah dievaluasi dengan parameter indikator yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026. Dengan mengevaluasi capaian indikator tersebut diharapkan dapat memberi gambaran tentang tingkat keberhasilan dan potensi pengembangan kedepannya.

Penilaian kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi sasaran.

Untuk hasil Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul sampai dengan Tahun 2024 dengan rincian seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11+(10/4)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	99,74 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
3.27.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun*	13 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	100	13 jenis	13 jenis	100
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan keuangan tersusun*	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah ASN yang terfasilitasi*	225 ASN	225 ASN	225 ASN	225 ASN	100	225 ASN	225 ASN	100
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia*	10 layanan	10 layanan	10 layanan	10 layanan	100	10 layanan	10 layanan	100
		Persentase Administrasi Umum terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah pengadaan barang milik daetah yang terlaksana*	5 jenis	5 jenis	5 jenis	0 jenis	100	0 jenis	0 jenis	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia*	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	100	3 layanan	3 layanan	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia*	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100	4 layanan	4 layanan	100
		Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
2,09										
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan yang terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0	100	0	0	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.02.2.01	*Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terlaksana*	3 jenis	3 jenis	3 jenis	0	100	0	0	0
		Persentase layanan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	0	100	0	0	0
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penurunan konsumsi beras/kapita/tahun	72 Kg	80 Kg	80 Kg	76 Kg	100	76 Kg	76 Kg	100
2.09.03.2.01	*Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*	*Angka ketersediaan kalori penduduk perkapita*	3025 kkal/kap/hari	3012 kkal/kap/hari	3012 kkal/kap/hari	3018 kkal/kap/hari	100	3018 kkal/kap/hari	3018 kkal/kap/hari	100
		Jumlah Ketersediaan Pangan (Beras)	125424 ton	124177 ton	124177 ton	124177 ton	100	124177 ton	124177 ton	100
2.09.03.2.04	*Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*	*Angka konsumsi kalori penduduk perkapita*	2000 kkal/kapita/hari	1788 kkal/kapita/hari	1788 kkal/kapita/hari	1.894 kkal/kapita/hari	100	1.894 kkal/kapita/hari	1.894 kkal/kapita/hari	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase layanan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
2.09.04.2.02	*Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota*	*jumlah dokumen analisis kerawanan pangan yang tersusun*	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	1 jenis	100
		persentase desa rawan pangan yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman	93 Persen	80 Persen	80 Persen	90 Persen	100	90 Persen	90 Persen	100
2.09.05.2.01	*Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*	*jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana*	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100
		Persentase Pengawasan keamanan pangan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
2.09.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaran keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
2.22.08.	*Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*	*Jumlah kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya yang terlaksana*	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	1 jenis	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan	1679379,12 Ton	1553666,25 Ton	1553666,25 Ton	1615281,46 Ton	100	1615281,46 Ton	1615281,46 Ton	100
3.27.02.2.01	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	*Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang terlaksana*	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
		Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian yang terlaksana	100 pesen	100 pesen	100 pesen	100 pesen	100	100 pesen	100 pesen	100
3.27.02.2.02	*Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah produksi benih padi tersertifikasi*	12000 kg	11000 kg	11000 kg	11000 kg	100	11000 kg	11000 kg	100
		Persentase pemenuhan produksi benih padi tersertifikasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	100 Persen	99,79 Persen	100 Persen	100 Persen	99,79	100 Persen	100 Persen	100
3.27.03.2.01	*Pengembangan Prasarana Pertanian*	*Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana*	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	100
		Persentase pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.03.2.02	*Pembangunan Prasarana Pertanian*	*Jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang terlaksana*	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100	10 jenis	10 jenis	100
		Persentase layanan Pembangunan Prasarana Pertanian yang terlaksana	100 pesen	100 pesen	100 pesen	100 pesen	100	100 pesen	100 pesen	100
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	pensentase bencana pertanian yang tertangani	100 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	98	100 Persen	100 Persen	100
3.27.05.2.01	*Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*	*Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana*	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	7 jenis	100
		Persentase luas puso/ gagal panen yang tertanggulangi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis	126 kelompok	118 kelompok	118 kelompok	122 kelompok	100	122 kelompok	122 kelompok	100
3.27.07.2.01	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*	*Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang terlaksana*	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
		Persentase layanan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang terfasilitasi	100 persen	100,28 persen	100 persen	100 persen	100,28	100 persen	100 persen	100
DPKH										
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Produksi komoditas Peternakan _ Ton*	16.974,27	15.231,56	15.231,56	16.971,87	111,43	16.971,87	49.175,30	289,7

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang terlaksana _ jenis*	1							
		Persentase peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang terlaksana _ persen	100							
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil _ laporan*	7	15	16	16	100	16	47	671,43
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak yang terlaksana _ jenis*	3							
		persentase layanan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten yang terlaksana _ persen	100							
3.27.02.2.05.0006	PengawasanProduksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan	*JumlahPengawasan Produksi Benih/Bibit*	1	4	1	1	100	1	6	600

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan_ laporan								
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak yang beredar _ekor*	39.778.700	39.778.700					39.778.700	100
		Jumlah benih/bibit ternak yang beredar _laporan	9		8	8	100	9	17	188,88
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia _ ton*	30,92	21,66					21,66	70,05
		Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia _ laporan	5		4	4	100	6	10	200
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Persentase prasarana peternakan yang digunakan _ Persen*	100	100	-	-	-	-	100	100
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang terlaksana _ jenis*	1							
		Persentase layanan Pembangunan Prasarana Pertanian yang terlaksana _ persen	100							
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun,direhabilitasi dan dipelihara – unit*	1	2	-	-	-	-	2	200
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Jumlah populasi ternak _ ekor*	1575203	1416247	1561433	1541805	98,74	1568318	1508790	95,78
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah	*Jumlah peta penyakit hewan menular strategis _ dokumen*	1							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota									
		Persentase penanganan penyakit hewan menular strategis _ persen	100							
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau Kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota_ laporan*	7	6	8	8	100	6	20	285,71
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitas kesehatan hewan yang terfasilitasi _ unit*	12							
		Persentase fasilitas kesehatan hewan yang terfasilitasi _ persen	100							
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	*Jumlah pelayanan jasa laboratorium _ laporan*	7	44	20	20	100	7	71	1.014,28
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah pelayanan jasa medik veteriner _ laporan*	74	55	77	77	100	77	228	308,11
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terlaksana _ jenis*	4							
		Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan	100							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		masyarakat veteriner yang terlaksana _ persen								
3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada unit usaha produk hewan	*Jumlah unit usaha produk hewanyang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi _ unit usaha*	6	3	11	11	100	3	17	283,33
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	*Jumlah kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan yang terlaksana _ jenis*	3							
		Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan yang terlaksana _ persen	100							
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	*Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan _ unit*	5	5	5	5	100	2	12	240
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	*Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan Usaha Pertanian/Peternakan sesuai SOP _ persen*	100	100	100	100	100	100	300	300
3.27.06.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah usaha peternakan yang terdaftar izin usahanya _ unit*	10							
		Persentase usaha peternakan yang terdaftar izin usahanya _ persen	100							
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	*Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi _ laporan*	1	3	1	1	100	1	5	500

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik _ Persen*	100	100	100	100	100	100	300	300
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu _ persen	100							
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah _ dokumen*	2	2	2	2	100	3	7	350
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	*Jumlah dokumen RKA-SKPD dan la;oran hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD _ dokumen*	1	1	1	1	100	1	3	300
3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD _ dokumen*	1	1	1	1	100	1	3	300
3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD – dokumen*	2	2	2	2	100	2	6	300
3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen*	2	2	2	2	100	2	6	300

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perubahan DPA- SKPD _ dokumen								
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD _ laporan*	29	17	29	29	100	29	75	258,62
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah _ laporan*	18	18	18	18	100	18	54	300
3.27.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan tersusun _ jenis*	3							
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu _ persen	100							
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN _ orang/bulan*	982	787	922	922	100	1008	2717	276,68
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD – laporan*	1	1	1	1	100	1	3	300
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah laporan keuangan bulanan*	13	13	13	13	100	13	39	300
		/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD _ laporan								
3.27.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang terfasilitasi _ ASN*	80							
		Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian _ persen	100							
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian_dokumen*	5	5	5	5	100	5	15	300
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan _ orang*	1	1	1	1	100	1	3	300
3.27.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia _ layanan*	6							
		Persentase Administrasi Umum terlayani _ persen	100							
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan _ paket*	1	1	1	1	100	1	3	300
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan _ paket*	3	14	3	3	100	3	9	300

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan _ paket*	1	1	1	1	100	1	3	300
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan _ paket*	2	2	2	2	100	2	6	300
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah laporan fasilitasi kunjingan tamu _ laporan*	1	12	1	1	100	1	14	1.400
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD _ laporan*	12	12	12	12	100	12	36	300
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana _ jenis*	2							
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana _ persen	100							
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan _ unit*	3	2	2	2	100	10	14	466,66
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia _ layanan*	2							
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana _ persen	100							

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan _ laporan*	37	50	37	37	100	37	111	300
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan _ laporan*	12	12	12	12	100	12	36	300
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia _ layanan*	4							
		Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana _ persen	100							
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya _ unit*	15	30	13	13	100	11	39	260
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara _ unit*	15	4	4	4	100	12	20	133,33
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi _ unit*	1	1	1	1	100	1	3	300
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi _ unit*	36	28	28	28	100	36	100	277,77

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran target kinerja pelayanan perangkat daerah ditetapkan berdasar sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja ditetapkan dengan melihat bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah agraris, dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian dan peternakan. Kinerja pelayanan Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebelum penggabungan menunjukkan adanya kemajuan dalam sejumlah aspek, namun belum sepenuhnya optimal dalam menjawab tantangan sektor pangan dan pertanian secara menyeluruh. Pelayanan publik yang diselenggarakan kedua perangkat daerah masih bersifat sektoral, yang dalam praktiknya menyebabkan beberapa kendala koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta duplikasi fungsi pada tataran operasional.

Secara umum, kinerja pelayanan pada bidang pertanian menunjukkan capaian positif pada peningkatan luas tanam dan produktivitas komoditas utama seperti padi, jagung, dan kedelai. Program pendampingan kelompok tani, distribusi bantuan sarana produksi, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman berhasil dilaksanakan sesuai target. Namun demikian, respon terhadap dinamika iklim, mitigasi bencana pertanian, dan dukungan terhadap regenerasi petani masih perlu diperkuat.

Sementara itu, pada sektor peternakan dan kesehatan hewan, pelayanan vaksinasi, pengawasan kesehatan hewan, serta pembinaan usaha peternakan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan populasi dan produktivitas ternak. Namun, masih terdapat tantangan dalam penguatan biosekuriti, pengendalian penyakit hewan menular strategis, serta pengembangan agribisnis peternakan berbasis kawasan.

Analisis menunjukkan bahwa selama periode sebelum penggabungan, kinerja pelayanan publik cenderung terfragmentasi, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya. Terbatasnya integrasi lintas sektor menyebabkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya petani dan peternak, belum berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, penyebaran tenaga teknis dan penyuluh yang belum merata juga menjadi faktor penghambat dalam pemerataan akses layanan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat hasil pencapaian kinerja perangkat daerah dari Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Produksi tanaman Pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan meningkat										
	Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.519.823,91	1.550.220,39	1.581.224,78	1.612.849,29	1516969,88	1.184.277,54	1.612.849,29	1.645.106,28	
	Produksi Perkebunan dan Hortikultura	Ton	33.842,34	33.949,10	34.056,68	37.400,00	40314,73	37.303,13	37.400,00	39.742.32	
6	Ketahanan Pangan meningkat										
	Capaian Skor PPH Konsumsi	indeks	89,8	89,9	90	91,8	93,01	91,4	90,8	92	
7	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD										
	Nilai AKIP PD	Kategori/ nilai	A (80,10)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	80,90	81,33	A (80,40)	A (80,50)	
1	Produksi Daging	Ton	3.596,17	3.598,15	3.600,15	3.602,15	3.596,17	3.598,15	3.600,15	3.602,15	
	Produksi Telur	Ton	3.584,55	3.587,14	3.589,76	3.590,00	3.584,55	3.587,14	3.589,76	3.590,00	
2	Jumlah ternak yang dilayani di fasilitas Kesehatan hewan	Ekor	3.286	3.486	3.500	3.600	3.286	3.486	3.500	3.600	
3	Nilai AKIP DPKH	Kategori/ Nilai	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	A (80,20)	A (80,30)	A (80,40)	A (80,50)	

Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah agraris, dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian. Berdasar indikator kinerja program yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, beberapa hasil komoditas pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura telah di evaluasi untuk mengetahui capaian kinerja dari Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan.

Capaian realisasi untuk produksi tanaman pangan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target Kabupaten Gunungkidul dan target Pemda DI Yogyakarta, pada komoditas padi, realisasi sebesar 269.841 ton yang berarti dibawah target Kabupaten Gunungkidul (297.276,62 ton) tetapi masih di atas target Pemda DI Yogyakarta (219.743,70 ton). Untuk komoditas jagung dengan realisasi 287879,86 ton, berarti bahwa sudah memenuhi target baik target Kabupaten Gunungkidul (255.636,46 ton) dan target Pemda DI Yogyakarta (273.430,35 ton). Pada komoditas kedelai realisasi sebesar 891,12 ton capaian dibawah target Kabupaten Gunungkidul (6.001,20 ton) dan target Pemda DI Yogyakarta (5.507,4 ton). Sedangkan untuk komoditas ubi kayu, dengan realisasi 625.665,12 ton menunjukkan bahwa realisasi belum mencapai target Kabupaten Gunungkidul di angka 948.108,79 ton begitu juga untuk target Pemda DI Yogyakarta (848.647 ton) belum tercapai.

Capaian realisasi untuk produksi tanaman perkebunan pada komoditas kelapa dengan realisasi sebesar 5.360,39 ton yang berarti capaian dibawah target Kabupaten Gunungkidul (5.696 ton) dan target Pemda DI Yogyakarta (7.455,42 ton). Untuk komoditas kakao dengan realisasi 377,76 ton, berarti juga masih dibawah target baik target Kabupaten Gunungkidul (418 ton) dan target Pemda DI Yogyakarta (420,61 ton). Mete realisasi sebesar 352,37 ton yang masih dibawah target Kabupaten Gunungkidul 662 ton. Begitu juga untuk komoditas tembakau dengan target sebesar 306 ton terealisasi 24,72 ton jauh dibawah target.

Capaian realisasi untuk produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target Kabupaten Gunungkidul dan target Pemda DI Yogyakarta, pada komoditas bawang merah, realisasi sebesar 5.047,29 ton yang berarti bahwa sudah berada di atas target Kabupaten Gunungkidul (7.140 kw) dan target Pemda DI Yogyakarta (468,2 kw). Untuk komoditas cabe dengan realisasi 84.674 kw, berarti bahwa sudah memenuhi target baik target Kabupaten Gunungkidul (6.120 kw) dan target Pemda DI Yogyakarta (200,31 kw). Pada komoditas pisang realisasi sebesar 215.698,41 kw berada di bawah target Kabupaten Gunungkidul (254.890 kw) tetapi diatas target Pemda DI Yogyakarta (75.468,6 kw). Untuk komoditas alpukat dengan realisasi 7.585,54 kw berada di atas target Kabupaten Gunungkidul (849,10 kw) dan target Pemda DI Yogyakarta (2747,3 kw). Sedangkan untuk komoditas durian, dengan realisasi 2.171,73 kw menunjukkan bahwa realisasi belum mencapai target Pemda DI yogyakarta di angka 4814,4 kw tetapi untuk target Kabupaten Gunungkidul (747,7 kw) sudah melampaui.

Realisasi kinerja tanaman pangan 1.184.277,54 ton pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2023 (1.516.969,88 ton). Sedangkan pada tamanan perkebunan dan hortikultura realisasi di tahun 2024 (37.303,13 ton) juga mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2023 (40.314,73 ton).

Prasarana dan sarana memiliki peranan yang penting sebagai penggerak dan pengembangan pertanian. Komponen prasarana dan sarana yang meliputi lahan, air/irigasi, benih/bibit, pupuk, pestisida,

alsintan dan pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi. Penggunaan alsintan oleh petani telah mempercepat waktu olah tanam, tanam, panen dan pasca panen, meningkatkan efisiensi biaya serta mengurangi kehilangan hasil (*losses*). Kegiatan peningkatan produksi pertanian juga didukung dengan pengawalan yang intensif sampai tingkat lapang dan tidak terlepas dari peran luas tanam dan luas panen yang bertambah.

Rekomendasi sebagai rencana aksi tindak lanjut perbaikan kinerja peningkatan produksi pertanian yang ditawarkan tahun yang akan datang antara lain : mengalokasikan bantuan saprodi budidaya (benih berkualitas), peningkatan perlindungan dari serangan OPT, peningkatan fasilitasi sarana pasca panen pertanian, jaminan harga dan kepastian pasar, pemberdayaan petani, pemeliharaan kebun induk, dan penanganan pascapanen, serta penguatan agroekosistem oleh para penyuluh dan diharapkan petani melakukan monitoring dan evaluasi pertanaman sejak dini guna mengantisipasi gangguan dan kerusakan akibat hama dan penyakit.

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian baik tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi ditujukan untuk peningkatan produksi pertanian dan pengalokasian yang cukup sesuai kebutuhan telah di tetapkan dengan SK Bupati Gunungkidul Nomor 132/KPTS/2024 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Urea 21.179 ton; NPK 17.251 ton; dan NPK Formula Khusus 62 ton. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi F6 Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 53,38% atau 11.306,798 ton urea dari alokasi 21.179 ton, NPK sebanyak 56,92% atau 9.819,006 ton dari alokasi 17.251 ton dan sebanyak 14,11% atau 8,75 ton dari alokasi 62 ton.

Untuk sektor peternakan, laporan produksi peternakan dilaksanakan pada komoditas daging sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan daging puyuh dan untuk telur diperoleh dari komoditas ayam buras, ayam buras petelur, telur itik dan telur puyuh. Capaian tahun 2024 untuk indikator kinerja Produksi daging sebesar 238,47%, dan indikator kinerja Produksi Telur sebesar 233,21%.

Perhitungan produksi daging diperoleh dari penjumlahan hasil pemotongan beberapa komoditas ternak seperti sapi, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan puyuh. Jumlah pemotongan dari semua komoditas ternak ini baik yang merupakan pemotongan ternak tercatat atau tidak tercatat memberikan kontribusi terhadap realisasi capaian produksi daging. Tahun 2024 penurunan produksi daging lebih di dominasi oleh penurunan pemotongan dari unggas pedaging. Di mata tahun 2023 untuk pemotongan ayam pedaging sebesar 5.016.343 ekor dan tahun 2024 menurun menjadi sebesar 4.541.771 ekor.

Produksi telur mengalami kenaikan dari capaian 2023 sebesar 6.085,89 Ton naik 2.305,49 Ton menjadi 8.391,38 Ton ditahun 2024. Kenaikan terjadi didominasi oleh populasi ayam buras. Populasi ayam buras mengalami kenaikan sebesar 2.192 ekor dibandingkan tahun 2023. Populasi unggas sangat berpengaruh terhadap produksi telur karena dengan semakin besarnya populasi maka angka betina produktif sebagai penghasil telur juga akan semakin besar. Sebagai parameter perhitungan produksi telur digunakan angka persentase betina produktif untuk ayam buras sebesar 35% dari keseluruhan populasi

ayam buras, ras petelur sebesar 60%, itik sebesar 60% dan puyuh memiliki parameter betina produktif sebesar 60%.

Data pemotongan sapi potong tahun 2024 untuk pemotongan tercatat yang diperoleh adalah sebesar 6.019 ekor. Sedangkan untuk data pemotongan ternak kambing ada sekitar 25.481 ekor. Data pemotongan unggas meliputi pemotongan ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Untuk tahun 2024 ada 5 komoditas unggas yang di unggulkan.

Hasil pemotongan unggas selama tahun 2024 diperoleh data pemotongan ayam buras sebesar 722.965 ekor, ayam ras petelur sebesar 8.213 ekor, ayam ras pedaging sebesar 5.845.258 ekor, dan itik sebesar 11.262 ekor, dan puyuh sebesar 372.205 ekor. Untuk data pemotongan hewan qurban pada tahun 2024 tercatat sapi sebesar 4.263 ekor, kambing 12.524 ekor, dan domba 1.866 ekor.

Kinerja Pelayanan Kesehatan Hewan pada indikator Kinerja Jumlah Ternak yang dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan hewan sebesar 13.879 ekor atau naik sebesar 5.173 ekor dari tahun 2024. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan juga melaksanakan pengelolaan PAD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Tahun 2024 target pendapatan sebesar Rp 30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 35.293.500,00 atau sekitar 117,64%.

Selain UPT Laboratorium Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memiliki 11 Pusat Kesehatan Hewan, yang terdiri dari 6 UPT Puskeswan yang telah definitif dan 5 Puskeswan. Peran petugas di tingkat kecamatan melalui UPT Puskeswan juga sangat besar. Mulai dari kegiatan pemeriksaan kesehatan ternak, pelayanan IB, kegiatan sosialisasi hingga praktek pembuatan pakan dan pupuk. 6 UPT Puskeswan di Kabupaten Gunungkidul yaitu UPT Puskeswan Nglipar, UPT Puskewan Karangmojo, UPT Puskeswan Semanu, UPT Puskeswan Wonosari, UPT Puskeswan Playen, dan UPT Puskeswan Panggang. UPT Puskeswan ini dengan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat mempunyai target PAD yang pada tahun 2024 ini sebesar Rp 370.864.900,00.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana, Dinas Pertanian, Peternakan dan Pangan dapat berupaya untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Menurunnya ketidakcukupan pangan
2. Meningkatnya produksi pertanian
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Penguatan koordinasi lintas sektor
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal
3. Peningkatan kapasitas petani dan peternak
4. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung
5. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sektor pertanian-peternakan
6. Penguatan pengawasan dan jaminan mutu pertanian-peternakan
7. Penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi risiko
8. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program secara terintegrasi

Sedangkan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor pencapaian tahun 2026 dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi pemangku kepentingan, program kerja yang ditetapkan, prioritas yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mengklarifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai
2. Mengklarifikasi isu-isu strategis dan menentukan prioritas yang akan diselesaikan
3. Merumuskan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai respon dari masalah atau isu-isu strategis
4. Menyusun arah kebijakan berdasarkan pengelompokkan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran
5. Mengidentifikasi akar penyebab konflik, menganalisis perekat dan pemecah serta penggunaan SWOT untuk membuat pilihan strategi identifikasi, penentuan kekuatan, memecahkan kelemahan, memanfaatkan peluang dan menghindarkan ancaman

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu–isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan–tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang sangat tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika biokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di setiap bidang dibedakan berdasarkan sub sektor yang ditangani, yaitu Bidang Tanaman Pangan yang menangani sub sektor tanaman pangan; Bidang Perkebunan dan Hortikultura menangani sub sektor perkebunan dan sub sektor hortikultura; Bidang Ketahananan Pangan menangani urusan ketahanan pangan; Bidang Penyuluhan menangani penyuluhan; Bidang Peternakan menangani sub sektor peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan menangani sub sektor kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet), dan pelayanan medik veteriner. Bentuk organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi dapat lebih efektif.

Tinjauan dan identifikasi permasalahan bertujuan untuk memahami kondisi perangkat daerah dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya.

Permasalahan pembangunan di Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan dengan 2 kewenangan yang dimiliki meliputi permasalahan ketahanan pangan dan pertanian.

Ketahanan Pangan

a. Belum optimalnya stabilisasi harga dan pasokan pangan;
   Ketersediaan pangan sudah mencukupi secara agregat, namun masih kurang beragam dan mayoritas tersedia hanya saat musim panen.
   Ketersediaan pangan dapat dilihat dari data Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan angka produksi, impor dan ekspor pangan. Berdasarkan standar ketersediaan energi mencapai 3.056 kkal/kap/hari dari standart sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sebesar 83,37 gram/kap/hari dari standart sebesar 63 gram/kap/hari.
b. Keterjangkauan pangan dan belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di tingkat daerah;
   Distribusi pangan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat merupakan permasalahan sebagian besar daerah. Khususnya terhadap komoditas pangan yang dibatasi oleh musim panen seperti padi/beras. Mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang strategis bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah harus turut memastikan pasokannya selalu mencukupi setiap saat. Penguatan system distribusi dilakukan dengan menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gappoktan) sebagai pelakunya melalui penumbuhan kegiatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) serta Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Untuk optimalisasi cadangan pangan masyarakat dilaksanakan kembali gerakan menyimpan hasil panen melalui kelompok lumbung pangan.
   Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan berperan dalam meningkatkan daya beli pangan dengan melaksanakan Gerakan Pangan Murah, Pekan Tani dan Pasar Tani.
c. Konsumsi pangan dan belum optimalnya penerapan pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di masyarakat;
   Konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ditunjukkan dengan skor PPH konsumsi mendekati 100. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi masyarakat Gunungkidul adalah protein hewani serta sayur dan buah. Untuk itu ditumbuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita agar membudidayakan sayur, buah, umbi-umbian dan ternak di pekarangannya sebagai sumber pangan keluarga dan sebagai sumber pendapatan keluarga.
d. Masih terdapatnya produk pangan yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Sosialisasi dari *stakeholders* terkait perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Apalagi Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Keamanan Pangan, dalam rangka menjamin pangan yang beredar di Kabupaten Gunungkidul memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis pangan.
   Pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH), pengawasan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) juga dilaksanakan dengan sasaran para pelaku usaha yang mengedarkan (menjual) pangan segar asal tumbuhan dan hewan yang ada di pasar tradisional di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan toko swalayan, minimarket yang menjual pangan segar asal tumbuhan/hewan yang dikemas dan masa simpannya lebih dari 7 (tujuh) hari.
e. Kerawanan pangan adalah kondisi masyarakat, daerah atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak

cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat bersifat kronis (*cronical*) dan mendadak/ sementara (*transien*). Kerawanan pangan kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi secara terus-menerus, yang disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan kemiskinan. Sedangkan, kerawanan *transien* adalah kondisi kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya.

f. Ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras masih sekitar 87,80 kg/kapita/tahun. Diversifikasi pangan perlu ditekankan sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas sumber karbohidrat. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, gembili, suweg, ganyong dan garut, karena capaian diversifikasi pangan adalah menurunnya konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras.

Pertanian

a. Alih Fungsi Lahan. Secara umum, produksi komoditas pertanian khususnya dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sangat bergantung pada kondisi iklim/cuaca karena mayoritas lahan pertanian merupakan lahan kering yang tidak beririgasi. Selain itu, laju alih fungsi lahan pertanian juga cukup berperan terhadap capaian produksi pertanian. Berdasarkan data BPS selama periode 2009-2019 (10 tahun), terdapat pengurangan jumlah lahan sawah sebanyak 2 hektar dan lahan tegalan/ kebun sebanyak 2.663 hektar. Berdasar Surat Keputusan Bupati Gunungkidul nomor 388/KPTS/2021 tentang Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan tanggal 6 Desember 2021 ditetapkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tahun 2021 dengan luasan 22.234,17 (dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat koma tujuh belas) Ha terdiri dari : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 21.576,24 (dua puluh satu ribu lima ratus tujuh piluh enam koma dua puluh empat) Hektar, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 657,92 (Enam ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh dua) Hektar.
   Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini membutuhkan upaya keras untuk mempertahankannya, mengingat mayoritas berada di lahan kering serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan sektor lainnya. Tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menjaga agar KP2B tersebut tidak beralih fungsi dan dapat berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani
b. Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kabupaten

Gunungkidul, jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut kelompok umur kepala rumah tangga menunjukkan bahwa RTUP di Kabupaten Gunungkidul dengan kategori rentang umur ≥65 tahun sebanyak 44.517 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) atau 30,93%; umur 55–64 tahun sebanyak 40.867 RTUP (28,39%), umur 45-54 tahun sebanyak 35.784 RTUP (22,86%); umur 35-44 tahun sebanyak 18.102 RTUP (12,58%); disusul kelompok umur 25-34 tahun sebanyak 4.495 RTUP (3,12%) dan terakhir kelompok umur 15-24 tahun sebanyak 178 RTUP (0,12%). Artinya 30,93% RTUP di Kabupaten Gunungkidul memiliki kepala rumah tangga dengan umur ≥ 65 tahun ke atas (usia tua). Dari total petani 143.943 orang di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023, sebanyak 60.266 petani merupakan petani milenial.

Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan belum sepenuhnya untuk menekuni, sehingga diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (vocational training), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru

c. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu kunci dari perubahan sektor pertanian di era digitalisasi adalah penggunaan internet oleh petani. Penggunaan teknologi digital mencakup penggunaan internet/ telepon pintar/ teknologi informasi, penggunaan drone, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk kegiatan usaha pertanian. Jumlah petani milenial yang menggunakan Internet menurut data Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 di Kabupaten Gunungkidul tahap I berdasar data BPS, dari 60.266 petani milenial sekitar 53.970 menggunakan teknologi. Sedangkan jumlah petani milenial berumur 19-39 tahun yang tidak menggunakan teknologi sebanyak 6.296 orang.

   Dari data terlihat bahwa aplikasi tekhnologi tepat guna telah banyak dimanfaatan oleh petani di sektor pertanian oleh sekitar 90% yang memanfaatkannya. Secara umum, sinyal internet telah merata pada sebagian besar perdesaan dan telah terjangkau sinyal 4G. Berdasarkan data tersebut, era industri 4.0 yang salah satunya menggunakan keterhubungan semua perangkat dengan internet dapat dijadikan modal awal transformasi digital di pertanian.
d. Kelembagaan dan sumber daya manusia. Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 memiliki penyuluh PNS 53 orang, Penyuluh P3K sebanyak 47 orang dan penyuluh swadaya sebanyak 144 orang. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan agribisnis petani, peran BPP (Balai penyuluh Pertanian) berkembang tidak hanya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, tetapi diupayakan sebagai tempat untuk mengenalkan model-model usahatani dan kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui fasilitas informasi, serta melaksanakan forum-forum penyuluhan (rembug tani, koordinasi musyawarah, dll) dan pelaksanaan programa penyuluhan. Oleh sebab itu, guna menghasilkan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan dapat mencapai target pembangunan pertanian, penyelenggara penyuluhan di lapangan juga harus didukung dengan sarana dan prasarana terstandarisasi dan tepat guna.
e. Nilai tambah komoditas pertanian dan peternakan belum maksimal. Dimana Komoditas hasil pertanian dan peternakan belum diolah lebih

lanjut atau belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan daya jual, kualitas, dan kontribusi ekonominya, seperti masih dijual dalam bentuk mentah/primer; minim pengolahan, belum ada *branding* produk lokal.

f. Infrastruktur irigasi tersier dan ketersediaan air belum merata dan dimanfaatkan secara maksimal. Distribusi jaringan irigasi tingkat tersier (yang mengalirkan air langsung ke lahan pertanian) belum mencakup seluruh wilayah pertanian yang membutuhkan, terutama di daerah yang jauh dari sumber air atau wilayah dataran tinggi/terpencil. Akses terhadap sumber air (sungai, embung, sumur, irigasi teknis) masih terbatas di beberapa wilayah, terutama saat musim kemarau dan ketergantungan pada sumber air hujan masih tinggi karena minimnya alternatif penyimpanan air (tandon, embung, sumur resapan). Selain itu Infrastruktur yang sudah tersedia belum dimanfaatkan secara optimal, misalnya karena: kurangnya pemeliharaan atau kerusakan saluran atau kurangnya koordinasi antar petani dalam penggunaan air (tidak ada jadwal giliran).
g. Ketersediaan pakan berkualitas masih terbatas, terutama saat musim kemarau, sehingga berdampak pada performa dan produktivitas ternak. Di sisi lainnya pengembangan bank pakan baik dari sisi kelembagaan, infrastruktur, maupun manajemen penyimpanan dan distribusi pakan ternak belum optimal dikarenakan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bahan baku pakan masih belum maksimal, disebabkan oleh kurangnya inovasi teknologi pengolahan pakan alternatif dan rendahnya kapasitas peternak dalam meramu pakan secara mandiri.
h. Tingginya risiko penyebaran penyakit hewan menular, baik yang bersifat endemik maupun potensial wabah (seperti PMK, LSD, dan antraks), memerlukan penguatan sistem surveilans, vaksinasi, dan respons cepat. Permasalahan juga terdapat pada Keterbatasan tenaga medis veteriner dan paramedis kesehatan hewan, serta sarana prasarana laboratorium dan alat diagnostik penyakit yang belum memadai, dan Masih rendahnya kesadaran peternak terhadap pentingnya biosekuriti, vaksinasi rutin, dan pelaporan kasus penyakit secara cepat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan di Kabupaten Gunungkidul dapat diidentifikasi beberapa hal tantangan dan peluang sebagai berikut:

a. Petani/peternak di Kabupaten Gunungkidul sangat apresiatif terhadap pelayanan Dinas, sehingga proses pemandirian menjadi lebih mudah dilaksanakan;
b. Petani/peternak mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu memaksimalkan manfaat fasilitasi dari Dinas;
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses langsung data dan informasi dari Dinas;
d. Terjalinnya kerjasama dengan Dinas Komunikasi, dan Informatika dalam hal pengembangan sistem informasi (siaran radio, WEB);
e. Adanya kerjasama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja, termasuk dengan akademisi dan aparatur penelitian dan pengembangan (BRIN dan Perguruan Tinggi);
f. Tersedia peluang promosi produk pertanian melalui pameran dan berbagai ekspo;
g. Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan DAK dan Tugas Pembantuan APBN;

Dari faktor pelayanan Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan baik secara internal dan eksternal, diperoleh bahwa isu strategis yang akan ditangani Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan tahun antara lain:

a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik guna peningkatan kualitas pelayanan publik.
   Reformasi birokrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dan terus ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan, yaitu jumlahnya yang berkurang karena usia pensiun yang tidak diimbangi pengadaan karena adanya kebijakan moratorium PNS dari Pemerintah Pusat, dan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) daerah serta belum terlaksananya Standar Pelayanan dengan baik. Di sisi lain pelayanan masyarakat terus dituntut untuk semakin cepat, transparan dan efisien.
   Reformasi birokrasi ditingkatkan dengan cara meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan secara umum, baik pengelolaan sumber daya manusia, manajemen keuangan daerah, maupun pelayanan publik. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan keterbatasan sumberdaya aparatur dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat dan efisien.
b. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
   Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat dalam aspek pendidikan serta kesehatan. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran perlu segera disusun strategi dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang terpadu lintas bidang. Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan melalui kegiatan peningkatan produksi pertanian, peningkatan kualitas petani, peningkatan hasil olahan serta pemasaran dilaksanakan sebagai rencana strategis dan rencana aksi untuk ikut serta menanggulangi kemiskinan.
c. Belum optimalnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
   Kondisi kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup memerlukan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Inti dari permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah, ditandai dengan penurunan kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas udara. Penurunan kualitas air, terutama air permukaan, disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak melalui pengolahan serta sistem sanitasi yang buruk. Selain itu, kurangnya pengendalian pemanfaatan alih fungsi lahan juga memacu kerusakan lingkungan disamping belum mencukupinya kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai acuan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, rendahnya kualitas pengelolaan sampah, rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), masih adanya lahan kritis merupakan permasalahan yang lain di bidang lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan air limbah, cakupan layanan persampahan, meminimalkan alih fungsi lahan dan penanganan lahan kritis dan sumber daya alam.

2.4. Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan tahapan penting untuk memastikan keselarasan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan aktual di lapangan serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Kabupaten Gunungkidul. Proses reviu ini dilakukan dengan pendekatan terintegrasi, mengingat adanya penggabungan Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan mulai tahun 2026. Reviu ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan program dan kegiatan yang telah dirancang, menyesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, serta memastikan sinergi dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Uraian Reviu Internal Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

1. Proses Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Analisa Kebutuhan

   Proses perbandingan rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan analisa kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan relevan dengan tantangan dan kebutuhan riil di sektor pertanian, peternakan, dan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Proses ini melibatkan analisis terhadap:

   - Kebutuhan Sektor Pertanian dan Pangan: Berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, Dinas Pertanian dan Pangan mengidentifikasi kebutuhan utama, seperti peningkatan produksi padi melalui penyediaan benih bersertifikat, pengembangan irigasi untuk mengatasi kekeringan, dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian. Rancangan awal RKPD mencakup program penyediaan sarana dan prasarana pertanian, namun analisa kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan alokasi untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di wilayah rawan hama.
   - Kebutuhan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengidentifikasi kebutuhan untuk penguatan mutu bibit ternak, pengawasan pakan ternak, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan hewan. Rancangan awal RKPD telah memasukkan kegiatan pengawasan mutu bibit ternak, namun analisa kebutuhan menunjukkan bahwa alokasi untuk pengembangan prasarana peternakan, seperti kandang komunal, masih terbatas dan perlu ditingkatkan untuk mendukung produktivitas ternak.
   - Integrasi Kebutuhan Pasca-Penggabungan: Dengan penggabungan kedua dinas, analisa kebutuhan menekankan pentingnya program terpadu yang mengintegrasikan rantai nilai pertanian dan peternakan, seperti pengembangan agroindustri berbasis pangan lokal dan penguatan pasar untuk produk peternakan. Rancangan awal RKPD belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan terpadu

ini, sehingga diperlukan penyesuaian untuk memasukkan kegiatan yang mendukung kolaborasi lintas subsektor.

2. Penjelasan Proses Analisa

   Proses analisa dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

   - Pengumpulan Data dan Informasi: Data kinerja tahun 2024 dari kedua dinas dikumpulkan, termasuk laporan realisasi program, indikator kinerja, dan evaluasi kendala pelaksanaan. Data ini dibandingkan dengan target Renstra 2021-2026 untuk mengidentifikasi capaian dan kesenjangan.
   - Konsultasi dan koordinasi: Rapat koordinasi internal di masing-masing dinas dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan riil berdasarkan masukan dari petugas lapangan, penyuluh pertanian, dan petugas kesehatan hewan. Selain itu, konsultasi dengan kelompok tani, peternak, dan pelaku usaha pangan dilakukan untuk memahami kebutuhan masyarakat.
   - Analisis SWOT: Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) digunakan untuk mengevaluasi rancangan awal RKPD. Misalnya, kekuatan seperti ketersediaan lahan pertanian di Gunungkidul diimbangi dengan kelemahan seperti keterbatasan infrastruktur irigasi. Peluang seperti permintaan pasar terhadap produk organik diimbangi dengan ancaman seperti perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas.
   - Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi: Rancangan awal RKPD disandingkan dengan Renja Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, serta Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2026. Misalnya, prioritas nasional untuk ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan lokal menjadi acuan untuk menyesuaikan program di Gunungkidul.

3. Penjelasan atas Temuan dalam Proses

   Beberapa temuan penting dari proses reviu meliputi:

   - Kesenjangan Anggaran: Rancangan awal RKPD cenderung mengalokasikan anggaran besar untuk infrastruktur fisik, seperti pembangunan irigasi dan kandang ternak, namun alokasi untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), seperti pelatihan penyuluh dan petani/peternak, masih terbatas. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas implementasi program di lapangan.
   - Kurangnya Integrasi Program: Sebelum penggabungan dinas, program pertanian dan peternakan cenderung berjalan secara terpisah, sehingga kurang mendukung pendekatan rantai nilai yang terintegrasi. Misalnya, program pengembangan pakan ternak belum terkait erat dengan program pengolahan limbah pertanian untuk pakan.
   - Tantangan Geografis dan Iklim: Wilayah Gunungkidul yang rawan kekeringan memerlukan alokasi lebih besar untuk pengembangan sistem irigasi dan teknologi pertanian tahan kekeringan. Namun, rancangan awal RKPD belum sepenuhnya mencerminkan prioritas ini.
   - Partisipasi Pemangku Kepentingan: Usulan masyarakat melalui Musrenbang belum sepenuhnya terakomodasi dalam rancangan awal RKPD, terutama terkait kebutuhan teknologi pertanian modern dan akses pasar bagi petani dan peternak skala kecil.

4. Catatan Penting

   Berdasarkan temuan di atas, beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renja Tahun 2026 meliputi:

- Peningkatan Alokasi untuk SDM: Perlu adanya peningkatan anggaran untuk pelatihan dan pendampingan petani/peternak serta penyuluh untuk mendukung adopsi teknologi dan praktik agribisnis yang berkelanjutan.
- Pendekatan Terpadu: Program dan kegiatan harus dirancang dengan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan pangan, misalnya melalui pengembangan agroindustri berbasis pangan lokal dan pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan ternak.
- Fokus pada Ketahanan Iklim: Mengingat tantangan kekeringan di Gunungkidul, program pengembangan irigasi dan teknologi tahan iklim harus menjadi prioritas utama, dengan alokasi anggaran yang memadai.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Proses Musrenbang perlu diperkuat untuk memastikan usulan masyarakat, khususnya petani dan peternak skala kecil, terakomodasi dalam perencanaan program.
- Sinkronisasi dengan Kebijakan Provinsi dan Nasional: Renja 2026 harus memastikan keselarasan dengan prioritas provinsi, seperti penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan lokal, dan prioritas nasional, seperti peningkatan produktivitas komoditas strategis.

Hasil reviu ini menjadi dasar untuk menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2026, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efisien dalam pemanfaatan sumber daya, dan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selain review internal terhadap program dan kegiatan tahun 2026, Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan juga melakukan review dan rekapitulasi terhadap usulan melalui mekanisme Musrenbang yang disajikan melalui tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Reviu Terhadap RKPD Perangkat Daerah Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat daerah : Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2.106.136.447	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
1,1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				1.000.000.000						
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				1.000.000.000						
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab.Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia (unit)	4	1.000.000.000						

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1,2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Penurunan Konsumsi Beras/ Kapita/ Tahun (Kg)	76	1.070.526.147	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Penurunan Konsumsi Beras/Kapita/Tahun (Kg)	74 kg	2.025.830.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Angka ketersediaan kalori penduduk perkapita	3018kkal /kap/ hari	17.604.804	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Angka ketersediaan kalori penduduk perkapita	3022 kkal/kap/hari	372.930.000,00	
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab.Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (unit)	6	10.648.000	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2 Unit	364.000.000	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab.Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (laporan)	13	6.956.804	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	4.280.000	
						Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	4.650.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				60.000.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) – Beras	88 Ton	61.830.000	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (ton)	6	60.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Ton	61.830.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Angka konsumsi kalori penduduk perkapita (kkal/ kapita/ hari)	1894	992.921.343	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Angka konsumsi kalori penduduk perkapita	1947 kkal/kapita/hari	1.591.070.000	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (dokumen)	1	2.662.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	5.420.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (laporan)	10	990.259.343	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	1.585.650.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
1.3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan (%)	100	5.324.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase Penanganan Kerawanan Pangan (%)	100 Persen	28.580.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah dokumen analisis kerawanan pangan yang tersusun (jenis)	1	5.324.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen analisis kerawanan pangan yang tersusun	1 Jenis	28.580.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (laporan)	8	5.324.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	28.580.000	
1.4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pangan Segar Aman (persen)	90	30.286.300	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase pangan segar aman	92 Persen	62.260.000	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana (jenis)	2	30.286.300	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Terlaksana (	2 Jenis	62.260.000	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	3	9.958.300	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	33.430.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	3	20.328.000	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	28.830.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				452.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				301.621.000	
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase penyelenggaran keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik (persen)	100	452.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100 persen	301.621.000	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Jumlah kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya yang terlaksana (jenis)	1	452.000.000	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			2 jenis	301.621.000	
	Pengembangan Lumbung Mataraman	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman (DAIS) (Laporan)	10	452.000.000	Pengembangan Lumbung Mataraman			3 Laporan	150.000.000	
						Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional			1 Dokumen	151.621.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.035.659.017	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				28.118.730.558	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				10.035.659.017	
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (persen)	100	24.584.584.259	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	100 Persen	11.984.219.649 ,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun (jenis)	13	52.320.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	13 jenis	28.936.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	3	28.011.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.981.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	665.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	665.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.498.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1	665.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.249.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	2	665.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	748.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	17	9.680.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	7.900.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	11.966.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.560.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan tersusun (jenis)	3	22.722.730.052	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan tersusun	3 jenis	9.135.738.199,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	2184	22.663.440.052	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1932 Orang/bulan	8.716.999.369	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	3.630.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.599.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	13	55.660.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	12 Laporan	19.110.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi (ASN)	147	20.708.030	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang terfasilitasi	225 ASN	68.437.800	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	6	4.896.480	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	68.437.800	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11	15.811.550	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	32.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia (layanan)	10	206.834.980	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	10 layanan	82.901.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	7.744.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	2	93.046.580	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.637.852	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	7.744.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	33.033.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.060.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	296	2.178.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	299 Dokumen	1.200.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	2.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	3.900.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	19	60.389.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	72.801.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daetah yang terlaksana (jenis)	3	41.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan barang milik daetah yang terlaksana	4 jenis	285.236.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pengadaan Mebel	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	30	13.000.000	Pengadaan Mebel	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80 Unit	78.436.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	206.800.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	4	18.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	226.193.603,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia (layanan)	3	1.340.130.797	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 layanan	240.864.848	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4.235.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.700.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	924	1.335.295.797	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	238.564.848	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia (layanan)	4	200.860.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	4 layanan	573.190.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	396	176.660.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	227 Unit	238.300.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	15	6.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	5.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	4	12.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	323.390.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	4	6.050.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	6.000.000	
3.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Dan Tanaman Perkebunan (Ton)	1615281	1.622.163.937	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Dan Tanaman Perkebunan	1647014,55 Ton	609.757.500	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang terlaksana (jenis)	3	1.427.038.248	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang terlaksana	3 Jenis	148.740.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	4	29.662.500	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	36.300.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	21	1.397.375.748	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	112.440.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah produksi benih padi tersertifikasi (kg)	12.000	195.125.689	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah produksi benih padi tersertifikasi	12000 Kg	461.017.500	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	2	195.125.689	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 Varietas Unggul Baru (VUB)	461.017.500	
3.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Prasarana Pertanian Yang Digunakan (persen)	100	1.286.483.212	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Prasarana Pertanian Yang Digunakan	100 Persen	689.669.600	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana (jenis)	2	574.212.000	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana	2 Jenis	579.669.600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	549.770.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	542.679.600	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen)	35	24.442.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	36.990.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3	549.770.000	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah kegiatan pembangunan prasarana pertanian yang terlaksana	10 Jenis	855.224.000,00	
	Pembangunan Prasarana Pertanian				712.271.212	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (unit)	4	512.271.212	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara (unit)	1	200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	110.000.000	
3.4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Pensentase Bencana Pertanian Yang Tertangani (persen)	100	49.119.950	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Pensentase Bencana Pertanian Yang Tertangani	100 Persen	70.200.000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana (jenis)	7	49.119.950	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	7 jenis	70.200.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	9	49.119.950	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Horti, dan Bun yang Dikendalikan	10 Ha	70.200.000	
3.5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Kelompok Tani Yang Melakukan Pola Usaha Agribisnis (Kelompok)	122	576.379.200	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis	124 Kelompok	4.547.405.000	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang terlaksana (jenis)	3	576.379.200	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang terlaksana	3 jenis	4.547.405.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	35	295.240.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Unit	1.885.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	31	61.613.200	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	1.902.605.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab.Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	43	219.526.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab.Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	18 Unit	759.800.000	
										18.462.794.969	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				400.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				400.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				400.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				400.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				400.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				400.000.000	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				400.000.000	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				400.000.000	
	Pengembangan Lumbung Mataraman	Gunungkidul	Jumlah Laporan Pengembangan Lumbung Mataraman	1 Laporan	400.000.000	Pengembangan Lumbung Mataraman	Gunungkidul	Jumlah Laporan Pengembangan Lumbung Mataraman	1 Laporan	400.000.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.480.758.730	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.480.758.730	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				7.480.758.730	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				7.480.758.730	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.154.867.870	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.154.867.870	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				28.170.600	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				28.170.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.788.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.788.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.490.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.490.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.490.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.490.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.400.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.400.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29 Laporan	5.909.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29 Laporan	5.909.300	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	3.692.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	3.692.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.792.685.830	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.792.685.830	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gunungkidul	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	952 Orang/Bulan	4.774.900.930	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gunungkidul	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	952 Orang/Bulan	4.774.900.930	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.284.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.284.500	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	14.500.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	14.500.400	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.950.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.950.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	1.950.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	1.950.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarka Tugas dan Fungi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarka Tugas dan Fungi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				72.467.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah				72.467.800	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Gunungkidul	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	1 Paket	3.137.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Gunungkidul	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	5 Paket	3.137.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	16.817.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	16 Paket	16.817.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Gunungkidul	Jumlah Paket Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	2.753.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Gunungkidul	Jumlah Paket Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	2.753.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket	20.537.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket	20.537.100	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.200.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27.023.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	27.023.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.870.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19.870.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	19.870.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit	19.870.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				109.803.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				109.803.840	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disedikan	37 Laporan	108.303.840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disedikan	37 Laporan	108.303.840	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.920.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				124.920.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	92.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	92.700.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.000.000	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.720.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.720.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	10.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	10.500.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				688.282.800	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				688.282.800	
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				558.750.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				558.750.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Gunungkidul	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	9 Laporan	558.750.000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Gunungkidul	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	9 Laporan	558.750.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				129.532.800	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				129.532.800	
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Gunungkidul	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan	11.500.000	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Gunungkidul	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan	11.500.000	
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Gunungkidul	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	9 Laporan	50.175.000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Gunungkidul	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	9 Laporan	50.175.000	
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Gunungkidul	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	4 Laporan	67.857.800	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Gunungkidul	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	4 Laporan	67.857.800	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				90,000,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				90,000,000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian				90,000,000	Pembangunan Prasarana Pertanian				90,000,000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Gunungkidul	Jumlah Prasarana Pertanian Lainya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	90,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Gunungkidul	Jumlah Prasarana Pertanian Lainya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	90,000,000	
	Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya										
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.539.438.060	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.539.438.060	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				36.640.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				36.640.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gunungkidul	Jumlah Wilayah atau kawasan yang menalami penurunan kasus Penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Laporan	36.640.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gunungkidul	Jumlah Wilayah atau kawasan yang menalami penurunan kasus Penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Laporan	36.640.000	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.464.012.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.464.012.000	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Gunungkidul	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	7 Laporan	74.300.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Gunungkidul	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	7 Laporan	74.300.000	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Gunungkidul	JumlahPelayanan Jasa Medik Veteriner	74 Laporan	1.389.712.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Gunungkidul	JumlahPelayanan Jasa Medik Veteriner	74 Laporan	1.389.712.000	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				11.085.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				11.085.000	
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan	Gunungkidul	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	6 Unit Usaha	11.085.000	Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan	Gunungkidul	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	6 Unit Usaha	11.085.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan penting
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				27.701.060	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				27.701.060	
	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Gunungkidul	Jumlah Unit Usaha yang dibina terhadap Penerapan Kesejahteraan Hewan	27.701.060	27.701.060	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Gunungkidul	Jumlah Unit Usaha yang dibina terhadap Penerapan Kesejahteraan Hewan	5 Unit	27.701.060	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				8.170.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				8.170.000	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				8.170.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				8.170.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Gunungkidul	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	8.170.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Gunungkidul	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	8.170.000	
					7.880.758.730					7.880.758.730	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan selain bersifat top down juga harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Pada Tahun 2025 Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan juga mengakomodir usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan untuk usulan 2026. Gambaran selama ini menunjukkan bahwa implementasi program pembangunan pertanian relatif menjadi ranahnya para pemangku kepentingan utama yang secara signifikan berpengaruh atau memiliki posisi penting atas keberlangsungan kegiatannya.

Dalam konteks sektor pertanian, secara organisasi pemangku kepentingan dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas, yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan komunitas. Secara perorangan atau kelompok, pemangku kepentingan mencakup aparat pemerintah (lingkup nasional hingga lokal), peneliti, penyuluh, petani/peternak (kontak tani, pemilik, penggarap, buruh tani), pedagang (sarana produksi dan hasil pertanian), penyedia jasa (alsintan dan transportasi), dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Kebijakan pengembangan pangan lokal dan pelaksanaannya merupakan sinergi dari para pemangku kepentingan, yakni petani dan penentu kebijakan. Penentu kebijakan yang dimaksud adalah Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku lembaga legislatif. Secara umum para pemangku kepentingan menunjukkan adanya kerjasama.

Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan dalam mengkaji dan menyeleksi program dan kegiatan usulan masyarakat tersebut berdasarkan pada sasaran daerah dengan memperhatikan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, difokuskan pada strategi peningkatan ketersediaan, akses, konsumsi dan keamanan pangan bagi masyarakat dengan indikator kegiatan:
   a. Jumlah dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga PanganJumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) – Beras
   b. Jumlah dokumen pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang terlaksana
   c. Jumlah Dokumen Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   d. Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

e. Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2. Meningkatnya produksi pertanian, difokuskan pada strategi Penguatan kelembagaan petani dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dengan indikator kegiatan:
   a. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
   b. Jumlah laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
   c. Jumlah laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
   d. Jumlah laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
   e. Tersedianya benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih hasil perbanyakan
   f. Jumlah laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
   g. Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
   h. Jumlah laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
   i. Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
   j. Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan
   k. Luasan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan
   l. Luasan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura dan Perkebunan
   m. Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
   n. Jumlah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
   o. Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
   p. Jumlah laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
   q. Jumlah laporan Pengawasan Produksi dan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
   r. Jumlah Laporan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
   s. Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular
   a. Jumlah laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
   b. Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
   c. Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
   d. Jumlah laporan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
   e. Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Dalam Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini para pemangku kepentingan menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, sasaran daerah, keselarasan program kegiatan pembangunan daerah, menyelaraskan program kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan D.I. Yogyakarta. Menyelaraskan program kegiatan OPD ini ditujukan untuk optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Selanjutnya usulan-usulan program dan kegiatan hasil sidang pleno yang disimpulkan disesuaikan dalam Rancangan RKPD.

Pada perencanaan tahun 2026 ini selain mengakomodir program prioritas pembangunan daerah, juga mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan OPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kalurahan maupun kapanewon.

Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan RKPD guna membahas Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersama pemangku kepentingan. Adapun tujuan Forum Perangkat Daerah adalah : 1) Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD; 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah; 3) Menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.

Hasil Forum Gabungan RKPD kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Gabungan RKPD kabupaten. Aspirasi dan usulan tahun 2026 tersebut diterima oleh Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dan kemudian dilakukan kajian lebih lajut mengenai keterkaitan usulan kegiatan dengan arah pembangunan pertanian serta keterkaitan dengan isu-isu penting pembangunan pertanian di Kabupaten Gunungkidul. Untuk hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan disajikan dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 KabupatenKabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) Pelatihan budidaya bawang merah	Wonosobo I Banjarejo Tanjungsari	Jumlah Pelatihan Budidaya Bawang Merah yang terlaksana dengan baik	1	6,730,000	6,730,000	
2	(PIWK) Pelatihan budidaya bawang merah	Toboyo Timur, Plembutan, Playen, Gunungkidul	Jumlah Pelatihan Budidaya Bawang Merah yang terlaksana dengan baik	1	6,730,000	6,730,000	
3	(PIWK)Pelatihan budidaya bawang merah	Kalurahan Tepus, Tepus, Gunungkidul	Jumlah Pelatihan Budidaya Bawang Merah yang terlaksana dengan baik	1	6,730,000	6,730,000	
4	(PIWK)Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Plembutan, Playen, Gunungkidul	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	1	17,900,000	17,900,000	
5	(PIS) Pelatihan manajemen lumbung pangan desa	Kalurahan Giring	Jumlah Pelatihan manajemen lumbung pangan desa yang terlaksana dengan baik	1	6,100,000	6,100,000	
6	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Bulurejo, Semin, gunugkidul	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	1	17,900,000	17,900,000	
7	(PIS) Pelatihan budidaya jamur tiram	Balai Kalurahan Sumbergiri	Jumlah Pelatihan Budidaya Jamur Tiram yang terlaksana dengan baik	2	4,985,000	9,970,000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
8	(PIS) Pelatihan budidaya cabe	Padukuhan Wiladeg Kapanewon Karangmojo	Jumlah Pelatihan Budidaya Cabe yang terlaksana dengan baik	1	6,730,000	6,730,000	
9	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	3	17,900,000	53,700,000	
10	(PIS) Pemberian Bibit buah alpukat untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat	Banjarejo, Tanjungsari	Jumlah Pemberian Bibit buah alpukat untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat yang terlaksana dengan baik	4	2,730,600	10,922,400	
11	(PIS) Pelatihan budidaya jamur tiram	Bulurejo, Semin, gunugkidul	Jumlah Pelatihan Budidaya Jamur Tiram yang terlaksana dengan baik	1	4,985,000	4,985,000	
12	(PIS) Pemberian Bibit buah rambutan untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat	Padukuhan Gedangan, Padukuhan Pace A, Padukuhan Pace B, dan Padukuhan Bulu, Kalurahan Hargomulyo	Jumlah Pemberian Bibit buah rambutan untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat yang terlaksana dengan baik	4	1,898,100	7,592,400	
13	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Kalurahan Monggol Saptosari	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	1	17,900,000	17,900,000	
14	(PIS) Pelatihan budidaya jagung	bandung, songbanyu, girisubo	Jumlah Pelatihan Budidaya Jagung yang terlaksana dengan baik	2	17,060,000	17,060,000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
15	(PIS) Pelatihan budidaya jamur tiram	Giritirto	Jumlah Pelatihan Budidaya Jamur Tiram yang terlaksana dengan baik	1	4,985,000	4,985,000	
16	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Kalurahan Kepek Saptosari	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	1	17,900,000	17,900,000	
17	(PIS) Pelatihan manajemen lumbung pangan desa	Kalurahan Pampang	Jumlah Pelatihan manajemen lumbung pangan desa yang terlaksana dengan baik	1	6,100,000	6,100,000	
18	(PIS) Pelatihan budidaya jagung	Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul	Jumlah Pelatihan budidaya jagung yang terlaksana dengan baik	2	8,530,000	17,060,000	
19	(PIS) Pelatihan manajemen lumbung pangan desa	Balai Kalurahan Girisekar, Jl. Raya Panggang Wonosari Km 6,5 Girisekar Panggang Gunungkidul Yogyakarta 55872	Jumlah Pelatihan manajemen lumbung pangan desa yang terlaksana dengan baik	6	6,100,000	36,600,000	
20	(PIS) Pelatihan budidaya cabe	Kalurahan Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	Jumlah Pelatihan Budidaya Cabe yang terlaksana dengan baik	1	6,730,000	6,730,000	
21	(PIS) Pemberian Bibit buah mangga untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat	Padukuhan Ngasinan, Padukuhan Jetis, Padukuhan Balong, Padukuhan Jatibungkus dan Padukuhan Suru Kidul	Jumlah Pemberian Bibit buah mangga untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat yang terlaksana dengan baik	5	1,676,100	8,380,500	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
22	(PIS) Pelatihan budidaya bawang merah	Kalurahan Hargosari Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pelatihan Budidaya Bawang Merah yang terlaksana dengan baik	1	6,730,000	6,730,000	
23	(PIS) Pelatihan budidaya jagung	Kalurahan Giring	Jumlah Pelatihan Budidaya Jagung yang terlaksana dengan baik	1	8,530,000	8,530,000	
24	(PIS) Pelatihan budidaya bawang merah	Padukuhan Wediutah dan Gemulung Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu	Jumlah Pelatihan Budidaya Bawang Merah yang terlaksana dengan baik	2	13,460,000	13,460,000	
25	(PIS) Pemberian bantuan cultivator	Balai Kalurahan Kepek		1	23,000,000	23,000,000	
26	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	kalurahan wareng	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	1	106,063,000	106,063,000	
27	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	PILANGREJO NGLIPAR	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	1	106,063,000	106,063,000	
28	(PIS) Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi)	Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop Gunungkidul	Jumlah Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi)	1	1,800,000	1,800,000	
29	(PIS) Pelatihan budidaya cabe	Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop Gunungkidul	Jumlah Pelatihan Budidaya Cabe yang terlaksana dengan baik	1	6,730,000	6,730,000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
30	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Padukuhan Sumberan Kalurahan Tancep, Kapanewon Ngawen,Kab. Gunungkidul	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	1	106,063,000	106,063,000	
31	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Padukuhan Panjatan dan Padukuhan Pengkok	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	1	106,063,000	106,063,000	
32	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Nglegi, Patuk, Gunungkidul	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	1	106,063,000	106,063,000	
33	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Banaran VIII, RT 37/38 RW 08, Banaran , Playen, Gunungkidul	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	4	106,063,000	106,063,000	
34	(PIS) Pelatihan budidaya jagung	BALAI KALURAHAN KARANGDUWET KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL	Jumlah Pelatihan Budidaya Jagung yang terlaksana dengan baik	1	8,530,000	8,530,000	
35	(PIS) Pelatihan budidaya bawang merah	Dengok RT 004 RW 010 Pucanganom Rongkop	Jumlah Pelatihan Budidaya Bawang Merah yang terlaksana dengan baik	2	6,730,000	13,460,000	
36	(PIS) Sosialisasi AUTP(Asuransi Usaha Tanaman Padi)	Bototengah RT 02 RW 04 Botodayaan Rongkop	Jumlah Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi)	1	1,800,000	1,800,000	
37	(PIS) Pelatihan budidaya cabe	Kelompok Tani Rukun Lestari Dusun Ngepung Desa Karangmojo kecamatan Karangmojo	Jumlah Pelatihan Budidaya Cabe yang terlaksana dengan baik	1	6,730,000	6,730,000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
38	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Padukuhan Baran, Padukuhan Gunungmanuk,Padukuhan Trosari, Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	1	106,063,000	106,063,000	
39	(PIS) Pemberian bantuan Traktor Rotary Multifungsi	Jl.Ki Ageng Giring No.1 Kepek Wonosari Gunungkidul 55813	Jumlah Pemberian bantuan Traktor Rotary Multifungsi yang terlaksana dengan baik	1	55,000,000	55,000,000	
40	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Kalurahan Sidoharjo	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	2	17,900,000	35,800,000	
41	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Ngunutkidul, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	1	17,900,000	17,900,000	
42	(PIS) Sosialisasi AUTP(Asuransi Usaha Tanaman Padi)	balai kalurahan karangduwet kapanewon paliyan kabupaten gunungkidul	Jumlah Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi)	1	1,800,000	1,800,000	
43	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Kaligayam Lor, rt 03 rw 13, Rejosari,Semin,Gunungkidul	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	1	106,063,000	106,063,000	
44	(PIS) Pemberian bantuan cultivator	Kalurahan Hargosari Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pemberian bantuan cultivator yang terlaksana dengan baik	1	23,000,000	23,000,000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
45	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Getas, Rt 16/Rw 03,Getas,Playen,Gunungkidul	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	1	106,063,000	106,063,000	
46	(PIS) Pelatihan pembuatan keripik	Padukuhan Gedangan 1, Gedangrejo, Karangmojo	Jumlah Pelatihan Pembuatan Keripik yang terlaksana dengan baik	1	7,805,000	7,805,000	
47	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Kalurahan Gombang	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	4	106,063,000	424,252,000	
48	(PIS) Pelatihan budidaya cabe	kalurahan karangduwet kapanewon paliyan kabupaten gunungkidul	Jumlah Pelatihan Budidaya Cabe yang terlaksana dengan baik	2	6,730,000	13,460,000	
49	(PIS) Pelatihan pembuatan keripik	Balai Kalurahan Sumberwungu Tepus Gunungkidul (Pakwungu Sumberwungu Tepus)	Jumlah Pelatihan Pembuatan Keripik yang terlaksana dengan baik	1	7,805,000	7,805,000	
50	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Padukuhan Kalangbangi Lor A dan Gunungsari Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	2	106,063,000	212,126,000	
51	(PIS) Pelatihan budidaya bawang merah	Padukuhan Tunggul Timur, kalurahan Semanu, kapanewon Semanu	Jumlah Pelatihan Budidaya Bawang Merah yang terlaksana dengan baik	2	13,460,000	13,460,000	
52	(PIS) Pelatihan budidaya bawang merah	KALUAHAN BOHOL, KAPANEWON RONGKOP, GUNUGKIDUL	Jumlah Pelatihan Budidaya Bawang Merah yang terlaksana dengan baik	1	6,730,000	6,730,000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
53	(PIS) Pelatihan budidaya jamur tiram	KWT Mekar Padukuhan Jlantir 1, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul	Jumlah Pelatihan Budidaya Jamur Tiram yang terlaksana dengan baik	1	4,985,000	4,985,000	
54	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Padukuhan Candisari Kalurahan Hargosari Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	1	17,900,000	17,900,000	
55	(PIS) Pemberian Bibit buah kelengkeng untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat	Padukuhan Jambon, Padukuhan Jatirejo, Padukuhan Suru Lor, Padukuhan Suruh dan Padukuhan Mangli Kalurahan Hargomulyo	Jumlah Pemberian Bibit buah kelengkeng untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat yang terlaksana dengan baik	5	1,143,300	5,716,500	
56	(PIS) Pelatihan budidaya jamur tiram	kalurahan karangduwet kapanewon paliyan kabupaten gunungkidul	Jumlah Pelatihan Budidaya Jamur Tiram yang terlaksana dengan baik	2	4,985,000	9,970,000	
57	(PIS) Pemberian Bibit buah kelengkeng untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat	Balai Kalurahan Kanigoro	Jumlah Pemberian Bibit buah kelengkeng untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat yang terlaksana dengan baik	9	1,143,300	10,289,700	
58	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Padukuhan Wareng, kalurahan Semanu, kapanewon ssemanu	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	1	17,900,000	17,900,000	
59	(PIS) Pelatihan pembuatan keripik	Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop	Jumlah Pelatihan Pembuatan Keripik yang terlaksana dengan baik	1	7,805,000	7,805,000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
60	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Padukuhan Karangmojo Bejiharjo	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	2	35,800,000	35,800,000	
61	(PIS) Pelatihan budidaya bawang merah	Bototengah RT 02 RW 04 Botodayaan Rongkop Gunungkidul	Jumlah Pelatihan Budidaya Bawang Merah yang terlaksana dengan baik	1	6,730,000	6,730,000	
62	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	kalurahan kemadang	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	1	17,900,000	17,900,000	
63	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Balai Kalurahan Planjan	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	1	17,900,000	17,900,000	
64	(PIS) Pelatihan budidaya jamur tiram	Padukuhan Kenteng Kalurahan Wiladeg	Jumlah Pelatihan Budidaya Jamur Tiram yang terlaksana dengan baik	1	4,985,000	4,985,000	
65	(PIS) Pemberian Benih Kelapa Genjah	Balai Kalurahan Jetis	Jumlah Pemberian Benih Kelapa Genjah yang terlaksana dengan baik	1	19,226,000	19,226,000	
66	(PIS) Pemberian Bibit buah mangga untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat	Kedungkeris	Jumlah Pemberian Bibit buah mangga untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat yang terlaksana dengan baik	7	11,732,700	11,732,700	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
67	(PIS) Pemberian Bibit buah alpukat untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat	Balai Kalurahan Ngloro	Jumlah Pemberian Bibit buah alpukat untuk Sekolah/ Kelompok Masyarakat yang terlaksana dengan baik	2	2,730,600	5,461,200	
68	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	KWT Berkah Rejeki Padukuhan Tompak	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	1	17,900,000	17,900,000	
69	(PIS) Pemberian Benih Kelapa Genjah	Balai kalurahan Planjan	Jumlah Pemberian Benih Kelapa Genjah yang terlaksana dengan baik	1	19,226,000	19,226,000	
70	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	TOBOYO TIMUR, PLEMBUTAN, PLAYEN, GUNUNGKIDUL	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	1	106,063,000	106,063,000	
71	(PIS) Pemberian bantuan cultivator	Kalurahan Kemadang	Jumlah Pemberian bantuan cultivator yang terlaksana dengan baik	2	23,000,000	46,000,000	
72	(PIS) Pelatihan manajemen lumbung pangan desa	Pringombo B, Pringombo, Rongkop, Gunungkidul	Jumlah Pelatihan manajemen lumbung pangan desa yang terlaksana dengan baik	1	6,100,000	6,100,000	
73	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Kedungkeris	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	1	106,063,000	106,063,000	
74	(PIS) Pelatihan budidaya jamur tiram	kantor pemerintah baleharjo	Jumlah Pelatihan Budidaya Jamur Tiram yang terlaksana dengan baik	1	4,985,000	4,985,000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
75	(PIS) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Kalurahan Mulusan	Jumlah Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terlaksana dengan baik	1	17,900,000	17,900,000	
76	(PIS) Pelatihan budidaya cabe	Kalurahan Pampang	Jumlah Pelatihan Budidaya Cabe yang terlaksana dengan baik	2	6,730,000	13,460,000	
77	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Gunungkidul	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	1	106,063,000	106,063,000	
78	(PIS) Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi)	Kalurahan Pampang	Jumlah Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi) yang terlaksana dengan baik	2	1,800,000	3,600,000	
79	(PIS) Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi)	Grogol, Paliyan Gunungkidul	Jumlah Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi) yang terlaksana dengan baik	1	1,800,000	1,800,000	
80	(PIS) Pelatihan budidaya cabe	kalurahan Mulusan	Jumlah Pelatihan Budidaya Cabe yang terlaksana dengan baik	2	6,730,000	13,460,000	
81	(PIS) Pelatihan manajemen lumbung pangan desa	Sodo	Jumlah Pelatihan manajemen lumbung pangan desa yang terlaksana dengan baik	1	6,100,000	6,100,000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
82	(PIS) Pelatihan budidaya bawang merah	Kuwon Lor, Pcarejo, Semanu Gunungkidul	Jumlah Pelatihan Budidaya Bawang Merah yang terlaksana dengan baik	2	6,730,000	13,460,000	
83	(PIS) Pelatihan budidaya cabe	Balai Kalurahan Karangasem Paliyan	Jumlah Pelatihan Budidaya Cabe yang terlaksana dengan baik	2	6,730,000	13,460,000	
84	(PIS) Pelatihan budidaya jagung	Balai Kalurahan Karangasem Paliyan	Jumlah Pelatihan Budidaya Jagung yang terlaksana dengan baik	1	8,530,000	8,530,000	
85	(PIS) Pelatihan pembuatan keripik	Kuwon Lor, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul	Jumlah Pelatihan Pembuatan Keripik yang terlaksana dengan baik	2	7,805,000	15,610,000	
86	(PIS) Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi)	Sodo	Jumlah Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi) yang terlaksana dengan baik	1	1,800,000	1,800,000	
87	(PIS) Pelatihan budidaya cabe	Kalurahan Giring	Jumlah Pelatihan Budidaya Cabe yang terlaksana dengan baik	2	6,730,000	13,460,000	
88	(PIS) Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi)	Balai Kalurahan Karangasem Paliyan	Jumlah Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi) yang terlaksana dengan baik	1	1,800,000	1,800,000	
89	(PIS) Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi)	kalurahan Mulusan	Jumlah Sosialisasi AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi) yang terlaksana dengan baik	1	1,800,000	1,800,000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
90	(PIS) Pembuatan sumur/ irigasi pertanian	Girijati, Purwosari, Gunungkidul	Jumlah Pembuatan sumur/ irigasi pertanian yang terlaksana dengan baik	1	106,063,000	106,063,000	
1	PIWK - Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Ngestirejo, Tanjungsari	Jumlah Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1	4.600.000	4.600.000	diterima
2	PIWK - Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Giripanggung, Tepus	Jumlah Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1	4.600.000	4.600.000	diterima
3	PIWK - Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Purwodadi, Tepus	Jumlah Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1	4.600.000	4.600.000	diterima
4	PIWK - Pelatihan penanaman hijauan pakan ternak	Playen, Playen	Jumlah Pelatihan penanaman hijauan pakan ternak	2	5.200.000	5.200.000	diterima
5	PIWK - Pelatihan penanaman hijauan pakan ternak	Nglanggeran, Patuk	Jumlah Pelatihan penanaman hijauan pakan ternak	1	5.200.000	5.200.000	diterima

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
6	PIS - Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Giring, Paliyan	Jumlah Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1	4.600.000	4.600.000	masuk prioritas
7	PIS - Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, 1dan Halal)	Mulusan, Paliyan	Jumlah Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, 1dan Halal)	1	4.600.000	4.600.000	masuk prioritas
8	PIS - Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Sodo, Paliyan	Jumlah Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1	4.600.000	4.600.000	masuk prioritas
9	PIS - Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Karangduwet, Paliyan	Jumlah Pelatihan keluarga sehat melalui pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	1	4.600.000	4.600.000	masuk prioritas
10	PIS - Pelatihan penanganan hewan dan daging qurban	Giriasih, Purwosari	Jumlah Pelatihan penanganan hewan dan daging qurban	1	3.050.000	3.050.000	masuk prioritas

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
11	PIS - Pelatihan penanganan hewan dan daging qurban	Karangtengah, Wonosari	Jumlah Pelatihan penanganan hewan dan daging qurban	3	3.050.000	3.050.000	masuk prioritas
12	PIS - Pelatihan penanganan hewan dan daging qurban	Beji, Patuk	Jumlah Pelatihan penanganan hewan dan daging qurban	1	3.050.000	3.050.000	masuk prioritas
13	PIS - Pelatihan penanganan hewan dan daging qurban	Grogol, Paliyan	Jumlah Pelatihan penanganan hewan dan daging qurban	2	3.050.000	3.050.000	masuk prioritas
14	PIS - Pelatihan penanganan hewan dan daging qurban	Girimulyo, Panggang	Jumlah Pelatihan penanganan hewan dan daging qurban	1	3.050.000	3.050.000	masuk prioritas
15	PIS - Pelatihan pengolahan pakan ternak alternatif	Petir, Rongkop	Jumlah Pelatihan pengolahan pakan ternak alternatif	1	3.591.000	3.591.000	masuk prioritas
16	PIS - Pelatihan pengolahan pakan ternak alternatif	Giricahyo, Purwosari	Jumlah Pelatihan pengolahan pakan ternak alternatif	2	3.591.000	3.591.000	masuk prioritas
17	PIS - Pelatihan penanaman hijauan pakan ternak	Sumberwungu, Tepus	Jumlah Pelatihan penanaman hijauan pakan ternak	1	5.200.000	5.200.000	masuk prioritas
18	PIS - Pelatihan penanaman hijauan pakan ternak	Giriasih, Purwosari	Jumlah Pelatihan penanaman hijauan pakan ternak	1	5.200.000	5.200.000	masuk prioritas

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
19	PIS - Pelatihan penanaman hijauan pakan ternak	Petir, Rongkop	Jumlah Pelatihan penanaman hijauan pakan ternak	1	5.200.000	5.200.000	masuk prioritas
20	PIS - Pelatihan pengolahan pakan ternak alternatif	Beji, Ngawen	Jumlah Pelatihan pengolahan pakan ternak alternatif	1	3.591.000	3.591.000	masuk prioritas
21	PIS - Pelatihan pengolahan pakan ternak alternatif	Girimulyo, Panggang	Jumlah Pelatihan pengolahan pakan ternak alternatif	1	3.591.000	3.591.000	masuk prioritas
22	PIS - Pelatihan Gerakan Makan Telur Cegah Stunting Mantel Ceting	Petir, Rongkop	Jumlah Pelatihan Gerakan Makan Telur Cegah Stunting Mantel Ceting	1	2.425.000	2.425.000	masuk prioritas
23	PIS - Pelatihan Gerakan Makan Telur Cegah Stunting Mantel Ceting	Ngunut, Playen	Jumlah Pelatihan Gerakan Makan Telur Cegah Stunting Mantel Ceting	2	2.425.000	2.425.000	masuk prioritas
24	PIS - Pelatihan Gerakan Makan Telur Cegah Stunting Mantel Ceting	Karangmojo, Karangmojo	Jumlah Pelatihan Gerakan Makan Telur Cegah Stunting Mantel Ceting	1	2.425.000	2.425.000	masuk prioritas
25	PIS - Pelatihan Gerakan Makan Telur Cegah Stunting Mantel Ceting	Sampang, Gedangsari	Jumlah Pelatihan Gerakan Makan Telur Cegah Stunting Mantel Ceting	1	2.425.000	2.425.000	masuk prioritas

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
26	PIS - Pelatihan Gerakan Makan Telur Cegah Stunting Mantel Ceting	Kedungkeris, Nglipar	Jumlah Pelatihan Gerakan Makan Telur Cegah Stunting Mantel Ceting	4	2.425.000	2.425.000	masuk prioritas
27	PIS - Pelatihan Gerakan Makan Telur Cegah Stunting Mantel Ceting	Karangasem, Paliyan	Jumlah Pelatihan Gerakan Makan Telur Cegah Stunting Mantel Ceting	2	2.425.000	2.425.000	masuk prioritas

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Kabupaten Gunungkidul melakukan hubungan kerja dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia khususnya lingkup sektor Pertanian. Hubungan kerja ini didasari atas kesamaan program dan kegiatan melalui Eselon I terkait. Pembangunan Pertanian secara nasional di Indonesia kewenangannya dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Arah kebijakan pembangunan pertanian tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian setiap kurun waktu 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dalam kondisi lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang.

Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja akan mengacu pada Rencana Strategis Dinas sebagai penjabaran dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Strategis Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Tahun 2021-2026 berkedudukan sebagai kerangka dasar menajemen pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul yang mencerminkan aspirasi masyarakat pertaian, dipadukan dengan *top down policy* dari Pemerintah Pusat, dan penjabaran dari amanat RPJM dan RPJP Kabupaten Gunungkidul. Di dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY tahun 2005-2025
3. Rencana Strategis Kementrian Pertanian Tahun 2020-2024

Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 adalah Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Adapun Misi Kementerian Pertanian dalam mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing untuk kurun waktu 2020 – 2024 yaitu :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025, berisikan visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang adalah: “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”, dengan 4 misi untuk

mewujudkannya yaitu: (1) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal, (2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan, (3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif, dan (4) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Gunungkidul memiliki periodesasi yang berbeda dengan Renstra DPKP DIY, yaitu tahun 2022-2027. Secara garis besar tujuan yang hendak dicapai adalah (1) meningkatkan kertersediaan dan mutu pangan, (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian, dan (3) meningkatkan daya saing produk pertanian. Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Pangan Kabupaten/Kota (1) peningkatan kertersediaan dan mutu pangan, (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian, dan (3) peningkatan daya saing produk pertanian. Strategi dan Arah kebijakan sektor pertanian di kabupaten/kota secara garis besar adalah (1) mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan, (2) mengembangkan penganekaragaman pangan, pengawasan mutu dan keamanan pangan, (3) meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan daya saing, (4) mengikutsertakan personil dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pertanian, dan (5) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Renstra Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan merupakan hasil integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian. Sehingga dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan, dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas program dan kegiatan tahunan Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disamping sebagai rujukan dalam penyusunan usulan kegiatan yang bersumber dari dan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (APBN), Dana Alokasi Khusus serta sumber-sumber dana lainnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Akibat adanya penggabungan Dinas Pertanian dan Pangan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan mulai tahun 2026, tujuan dari kedua dinas yang sebelumnya berdiri sendiri telah diubah untuk mencerminkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar subsektor, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta memastikan pelaksanaan program yang mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan peternak, serta pengembangan agribisnis yang berkelanjutan.

Sebelum penggabungan, tujuan Dinas Pertanian dan Pangan berfokus pada peningkatan produksi pertanian, pengembangan ketahanan pangan, dan kelembagaan pertanian, sementara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menitikberatkan pada peningkatan produktivitas ternak, pengawasan mutu bibit ternak, dan pencegahan penyakit hewan. Namun, dengan terbentuknya Dinas Pertanian

Peternakan dan Pangan, tujuan-tujuan tersebut telah diselaraskan untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik, mengintegrasikan rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi pertanian dan peternakan hingga pengolahan dan distribusi pangan. Perubahan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan koordinasi antar subsektor, pemecahan program, dan kurangnya pendekatan terpadu dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Sejalan hal trsebut, Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih yaitu "Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026", dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian menetapkan tujuan Meningkatnya Pembangunan Pertanian Dan Ketahanan Pangan. Untuk tujuan, sasaran dan IKU Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan PD	Satuan	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1	Meningkatnya pembangunan pertanian dan ketahanan pangan	Nilai PDRB ADHK pertanian sub kategori tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Juta rupiah	2.682.555.247.135

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Sasaran PD Tahun 2026
1	Menurunnya ketidakcukupan pangan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment)	Persen	8,44
2	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton	1.551.906,69
		Jumlah produksi daging	Ton	8.632,04
		Jumlah produksi telur	Ton	8.458,64
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular (persen)	Persen	100

Tabel 3.3
IKU Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Tahun 2026

No	Indikator	Definisi Operasional /Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Sasaran PD Tahun 2026
	Nilai PDRB ADHK pertanian sub kategori tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (Rp)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah yang dihitung dengan harga pada tahun dasar tertentu. Tahun Dasar terbaru yang digunakan adalah 2010. PDRB ADHK menggambarkan nilai riil dan berguna untuk menghitung pertumbuhan ekonomi.	Juta rupiah	2.682.555.247.135
1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment)	PoU/ Prevalence of Undernourishment/ Prevalensi (Ketidakcukupan Konsumsi Pangan) adalah proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan pada tahun tertentu. Rumus: Jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan x jumlah penduduk	Persen	8,44
2	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubikayu); hortikultura (cabe, bawang merah, pisang, durian, alpukat, mangga); perkebunan (kakao, mete, tembakau, kelapa) Rumus : Total produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubikayu) + tanaman hortikultura (cabe, bawang merah, pisang, durian, alpukat, mangga) + tanaman perkebunan (kakao, mete, tembakau, kelapa) dalam setahun	Ton	1.551.906,69
	Jumlah produksi daging	Angka komulatif produksi laporan statistik peternakan untuk daging sapi, kerbau, domba,	Ton	8.632,04

No	Indikator	Definisi Operasional /Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Sasaran PD Tahun 2026
		kambing, ayam, itik, babi pada tahun ke n		
	Jumlah produksi telur	Angka komulatif produksi laporan statistik peternakan untuk telur ayam buras, ayam ras petelur, telur itik dan telur puyuh pada tahun ke n	Ton	8.458,64
3	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular (persen)	Jumlah kasus penyakit hewan menular yang ditangani dibagi jumlah kasus penyakit yang terlapor di kali 100%	Persen	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya manusia yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pertanian, Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan melaksanakan program yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
9. Program Penyuluhan Pertanian
10. Program Perizinan Usaha Pertanian
11. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Rekapulasi program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan 7 (tujuh) indikasi prioritas pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Ekonomi, meliputi investasi dan pariwisata, dan pengembangan sektor unggulan
2. Penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting
3. Ketahanan Pangan
4. Peningkatan kualitas SDM
5. Infrastuktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
6. Ketentramanan dan Ketertiban
7. Reformasi Birokrasi

Dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan 2026, disampaikan program, kegiatan dan anggaran tahun 2026. Program, kegiatan tahun 2026 Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan yang dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03 -	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan		92.5 skor indeks	2.302.225.000,00			92.5 skor indeks	470.999.500,00
2.09.03.2.01 -	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang terlaksana Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Peningkatan ketahanan pangan keluarga			740.562.500,00				390.512.500,00
2.09.03.2.01.0007 -	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		360 Keluarga	312.132.500,00			360 Keluarga	315.253.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.2.01.0008 -	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		4 laporan	4.280.000,00			4 laporan	-
2.09.03.2.01.0010 -	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan		2 Unit	419.500.000,00			2 Unit	70.400.000,00
2.09.03.2.01.0016 -	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		1 Dokumen	4.650.000,00			1 Dokumen	4.859.500,00
2.09.03.2.04 -	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dokumen pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi yang terlaksana			1.561.662.500,00				80.487.000,00
2.09.03.2.04.0001 -	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun								5.920.000,00
2.09.03.2.04.0002 -	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		4 Laporan	1.556.242.500,00			4 Laporan	74.525.000,00
2.09.04 -	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan		17.36 persen	172.062.900,00			17.36 persen	31.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.04.2.02 -	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			172.062.900,00				
2.09.04.2.02.0002 -	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4 Dokumen	151.182.900,00			4 Dokumen	-
2.09.04.2.02.0003 -	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota		4 Laporan	20.880.000,00			4 Laporan	31.400.000,00
2.09.05 -	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan		77 persen	69.959.842,00			77 persen	85.265.100,00
2.09.05.2.01 -	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			69.959.842,00				
2.09.05.2.01.0004 -	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		4 Dokumen	29.578.500,00			4 Dokumen	36.500.000,00
2.09.05.2.01.0006 -	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		4 Dokumen	16.630.400,00			4 Dokumen	16.765.100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.05.2.01.0007 -	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		4 Dokumen	23.750.942,00			4 Dokumen	32.000.000,00
2.22.08 -	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100 Persen	701.621.000,00			100 Persen	239.390.200,00
2.22.08.5.06 -	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Dokumen pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya yang terlaksana			701.621.000,00				
2.22.08.5.06.0001 -	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman		4 Laporan	550.000.000,00			4 Laporan	-
2.22.08.5.06.0007 -	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional		1 Dokumen	151.621.000,00			1 Dokumen	239.390.200,00
3.27.01 -	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		100 persen	17.737.755.549,00			100 persen	1.564.155.000,00
3.27.01.2.01 -	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah			197.840.000,00				30.370.000,00
3.27.01.2.01.0001 -	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	181.681.000,00			3 Dokumen	14.680.000,00
3.27.01.2.01.0002 -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1000000			1 Dokumen	1.100.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.2.01.0003 -	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1.485.000,00			1 Dokumen	1.500.000,00
3.27.01.2.01.0004 -	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1.249.000,00			1 Dokumen	1.300.000,00
3.27.01.2.01.0005 -	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1.200.000,00			1 Dokumen	790.000,00
3.27.01.2.01.0006 -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17 Laporan	8.665.000,00			17 Laporan	8.300.000,00
3.27.01.2.01.0007 -	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 laporan	2560000			6 laporan	2.700.000,00
3.27.01.2.02 -	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.522.731.310,00				23.900.000,00
3.27.01.2.02.0001 -	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1932 Orang/bulan	14.431.512.310,00			1932 Orang/bulan	-
3.27.01.2.02.0005 -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	3.599.000,00			1 Dokumen	3.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.2.02.0007 -	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		13 Laporan	87.620.000,00			13 Laporan	20.100.000,00
3.27.01.2.05 -	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian			45.250.000,00				105.600.000,00
3.27.01.2.05.0003 -	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 Dokumen	15.250.000,00			4 Dokumen	72.000.000,00
3.27.01.2.05.0009 -	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 Orang	30.000.000,00			6 Orang	33.600.000,00
3.27.01.2.06 -	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			424.916.000,00				167.085.000,00
3.27.01.2.06.0001 -	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	5.000.000,00			1 paket	5.250.000,00
3.27.01.2.06.0002 -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	67.635.000,00			1 paket	71.100.000,00
3.27.01.2.06.0003 -	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	3.500.000,00			1 paket	3.675.000,00
3.27.01.2.06.0005 -	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	5.060.000,00			1 paket	5.350.000,00
3.27.01.2.06.0006 -	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		299 dokumen	1.200.000,00			299 dokumen	1.260.000,00
3.27.01.2.06.0008 -	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 laporan	3.900.000,00			4 laporan	4.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.2.06.0009 -	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	338.621.000,00			4 Laporan	76.450.000,00
3.27.01.2.07 -	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			469.873.010,00				382.350.000,00
3.27.01.2.07.0005 -	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		80 Unit	77.745.000,00			80 Unit	82.350.000,00
3.27.01.2.07.0006 -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	392.128.010,00			3 Unit	300.000.000,00
3.27.01.2.08 -	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.369.225.981,00				252.780.000,00
3.27.01.2.08.0001 -	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 laporan	1.700.000,00			4 laporan	1.750.000,00
3.27.01.2.08.0002 -	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 laporan	1.366.925.981,00			4 laporan	250.400.000,00
3.27.01.2.08.0004 -	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	600.000,00			4 Laporan	630.000,00
3.27.01.2.09 -	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah			707.919.248,00				602.070.000,00
3.27.01.2.09.0002 -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		227 unit	238300000			227 unit	250.500.000,00
3.27.01.2.09.0006 -	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	5.500.000,00			10 Unit	5.770.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.2.09.0009 -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	456.319.248,00			3 Unit	339.500.000,00
3.27.01.2.09.0010 -	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20 Unit	7.800.000,00			20 Unit	6.300.000,00
3.27.02 -	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi benih padi bersertifikat balai benih pertanian Produksi Tanaman Pangan Produksi perkebunan dan hortikultura		12000 kg 1.221.134,27 ton 42.638,71 ton	2.619.616.400,00			12000 kg 1.221.134,27 ton 42.638,71 ton	838.183.000,00
3.27.02.2.01 -	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Laporan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Tersedianya benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih hasil perbanyakan			1.631.333.600,00				134.900.000,00
3.27.02.2.01.0001 -	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		4 Laporan	632.963.100,00			4 Laporan	38.100.000,00
3.27.02.2.01.0002 -	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		4 Laporan	117.100.000,00			4 Laporan	96.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.2.01.0003 -	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		12 Ton	519.306.900,00			12 Ton	-
3.27.02.2.01.0012 -	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan		4 Laporan	188.217.000,00			4 Laporan	-
3.27.02.2.01.0014 -	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan		4 Laporan	72.745.000,00			4 Laporan	-
3.27.02.2.01.0016 -	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura		4 Laporan	101.001.600,00			4 Laporan	-
3.27.02.2.03 -	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			758.750.000,00				563.750.000,00
3.27.02.2.03.0001 -	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		4 Laporan	758.750.000,00			4 Laporan	563.750.000,00
3.27.02.2.05 -	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan Produksi dan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Laporan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			229.532.800,00				139.533.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.2.05.0006 -	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		4 Laporan	11.500.000,00			4 Laporan	14.500.000,00
3.27.02.2.05.0008 -	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar		4 Laporan	50.175.000,00			4 Laporan	53.175.000,00
3.27.02.2.05.0009 -	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia		4 Laporan	167.857.800,00			4 Laporan	71.858.000,00
3.27.03 -	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana peternakan yang dapat digunakan dengan baik Persentase prasarana pertanian yang dapat digunakan dengan baik		85 persen 87.24 persen	732.586.800,00			85 persen 87.24 persen	348.450.000,00
3.27.03.2.01 -	Pengembangan Prasarana Pertanian	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B			559.669.600,00				58.800.000,00
3.27.03.2.01.0003 -	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		4 Laporan	522.679.600,00			4 Laporan	21.000.000,00
3.27.03.2.01.0015 -	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola		4 Dokumen	36.990.000,00			4 Dokumen	37.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.03.2.02 -	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Peternakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			172.917.200,00				289.650.000,00
3.27.03.2.02.0009 -	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	62.917.200,00			1 Unit	150.000.000,00
3.27.03.2.02.0010 -	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		1 Unit	110.000.000,00			1 Unit	139.650.000,00
3.27.04 -	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)		100 Persen	1.569.792.800,00			100 Persen	462.989.800,00
3.27.04.2.01 -	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			66.995.000,00				82.570.000,00
3.27.04.2.01.0008 -	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		4 Laporan	66.995.000,00			4 Laporan	82.570.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.04.2.03 -	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Laporan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			1.464.012.000,00				336.134.000,00
3.27.04.2.03.0001 -	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium		4 Laporan	74.300.000,00			4 Laporan	107.800.000,00
3.27.04.2.03.0002 -	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		4 Laporan	1.389.712.000,00			4 Laporan	228.334.000,00
3.27.04.2.04 -	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			11.085.000,00				16.085.000,00
3.27.04.2.04.0005 -	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi		6 Unit Usaha	11.085.000,00			6 Unit Usaha	16.085.000,00
3.27.04.2.05 -	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			27.700.800,00				28.200.800,00
3.27.04.2.05.0003 -	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan		5 Unit	27.700.800,00			5 Unit	28.200.800,00
3.27.05 -	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pensentase Bencana Tanaman Pangan Yang Tertangani		100 persen	138.554.500,00			100 persen	90.000.000,00
3.27.05.2.01 -	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura dan Perkebunan Luasan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan			138.554.500,00				90.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.05.2.01.0001 -	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		10 Ha	45.368.000,00			10 Ha	73.800.000,00
3.27.05.2.01.0002 -	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		9 Ha	93.186.500,00			9 Ha	16.200.000,00
3.27.06 -	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang sudah memiliki NIB		100 Persen	8.170.000,00			100 Persen	9.170.000,00
3.27.06.2.01 -	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			8.170.000,00				9.170.000,00
3.27.06.2.01.0005 -	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		4 Laporan	8.170.000,00			4 Laporan	9.170.000,00
3.27.07 -	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelompok Tani Yang Melakukan Pola Usaha Agribisnis		126 kelompok	4.771.032.000,00			126 kelompok	173.250.000,00
3.27.07.2.01 -	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			4.771.032.000,00				173.250.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.07.2.01.0001 -	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		18 Unit	1.895.633.000,00			18 Unit	89.250.000,00
3.27.07.2.01.0002 -	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		18 Unit	2.115.599.000,00			18 Unit	42.210.000,00
3.27.07.2.01.0003 -	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		18 unit	759.800.000,00			18 unit	41.790.000,00
					30.823.376.791,00				4.313.252.600,00

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

   Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholders* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Peternakan dan Pangan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
DINAS PERTANIAN PETERNAKAN
DAN PANGAN

ttd

RISMIYADI

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 disusun sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan rencana kerja ini mempertimbangkan berbagai aspek termasuk perkembangan teknologi, kebutuhan pasar kerja masa depan, serta tantangan geografis daerah. Dokumen ini juga merupakan manifestasi komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan pendidikan dengan nilai-nilai filosofis Ki Hajar Dewantara, tuntutan Revolusi Industri 4.0, dan standar pelayanan minimal pendidikan sesuai regulasi terbaru. Tujuan utama Renja tahun 2026 adalah mewujudkan pendidikan berkualitas, merata dan berdaya saing di Kabupaten Gunungkidul. Renja ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Sasaran Renja tahun 2026 mencakup peningkatan kompetensi pendidik, pemerataan akses pendidikan, peningkatan prestasi peserta didik, serta penguatan infrastruktur pendidikan yang mendukung pembelajaran di era digital.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Disamping menjabarkan Renstra, dalam menyusun Rencana Kerja PD juga harus mengacu pada RPJMD dan RKPD Kabupaten dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2026 merupakan tahun kelima dalam periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 – 2026 serta berpedoman pada visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RPJMD dan Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2026 harus disusun dan dirancang agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan dan target pembangunan yang belum dapat diwujudkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dinas Pendidikan harus mampu menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 yang lebih baik, komprehensif, dan aplikatif dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana Kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya serta memastikan terakomodirnya belanja wajib mengikat, kebijakan belanja prioritas, dan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses musrenbang serta pemulihan pasca COVID-19. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan Rencana Kerja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, Rencana Kerja merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2026 adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi penjabaran visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang dimuat dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada Rencana Kerja Dinas

Pendidikan Tahun 2026 mengacu program prioritas RKPD. Disamping berpedoman pada RKPD, Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2026 juga berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 untuk menyusun tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD, arah kebijakan pembangunan Lima Tahun Kelima RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.1350 yang ada di aplikasi SIPD, serta memperhatikan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan adalah :

1. mendeskripsikan tentang program–program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan;
2. program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas; dan
3. sebagai referensi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dalam proses awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB l. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB ll. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
- 2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan tahun lalu (n-2/ Tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/ Tahun 2025) juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. Realisasi program atau kegiatan tahun 2024 dan perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan tahun 2024 dan perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
3. Realisasi program atau kegiatan tahun 2024 dan perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 yang melebihi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2024;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pendidikan; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hal ini dapat terlihat dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun 2024 dan perkiraan realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 serta pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program atau kegiatan pada tahun berjalan seperti dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan s/d Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output dan Outcome)*/Sub Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pendidikan) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realiasai Capain Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik**	**100|Persen**	**22**	**100|Persen**	**100|Persen**	**100**	**100|Persen**	**100|Persen**	**100**
X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu***	***100|Persen***	***12.7***	***100|Persen***	***100|Persen***	**100**	***100|Persen***	***100|Persen***	**100**
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum PD yang terkompilasi; - Jumlah Dokumen penyusunan Rancangan awal Renja, Rancangan renja, Rancangan akhir renja, renja penetapan PD; - Jumlah dokumen Renja PD yang terselesaikan; - Jumlah dokumen Renja perubahan PD yang terselesaikan								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100

X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA yang terselesaikan								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	- Jumlah dokumen RKA Perubahan yang terselesaikan								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terselesaikan; - Jumlah dokumen perpanjian kinerja yang terselesaikan; - Jumlah dokumen ROPK yang terselesaikan								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang terselesaikan; - Jumlah dokumen perjanjian kinerja perubahan yang terselesaikan; - Jumlah dokumen perubahan ROPK yang terselesaikan								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen LKJIP yang terselesaikan								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100

X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen evaluasi RKPD yang terselesaikan; - Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi renja (evaluasi hasil RKPD); - Jumlah dokumen monev capaian SPM bidang pendidikan yang terselesaikan; - Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; - Jumlah dokumen hasil Monitoring dan evaluasi, terkait Implementasi Pendidikan Anti korupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; Jumlah jasa publikasi bidang pendidikan yang terfasilitasi								
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana		2 laporan	3 Dokumen	9 Dokumen	100	3 Dokumen	9 Dokumen	100
X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai disusun tepat waktu***	***100|Persen***	***25.82***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***

X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah GTT database yang terfasilitasi gajinya; - Jumlah PTT database yang terfasilitasi gajinya; - Jumlah bulan terfasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN; - Jumlah PTT UPT TK & SD/Korwil (1 orang x 13 bulan); - Jumlah PTT database SD (21 orang x 13 bulan); - Jumlah PTT database TK (2 orang x 13 bulan); - Jumlah GTT database TK (4 orang x 13 bulan); - Jumlah GTT database SD (6 orang x 13 bulan); - Jumlah Insentif GTT/PTT Kategori II (49 orang x 13 bulan); - Jumlah GTT database sebagai guru pengganti (GTT SD 776 orang + SMP 58 orang x 13 bulan); - Jumlah Insentif GTT/PTT/GTY/PTY (686 orang x 12 bulan) APBD Kabupaten; - Jumlah THR PTT Korwil Kecamatan; - Jumlah THR PTT SD; - Jumlah THR PTT TK; - Jumlah THR GTT TK; - Jumlah THR GTT SD; - Jumlah THR Insentif GTT/PTT Kategori II; - Jumlah THR data base sebagai GP (guru pengganti)								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1185 Orang/bulan	78.748 Orang/bulan	66402 Orang/bulan	100	78.748 Orang/bulan	66402 Orang/bulan	100
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah dokumen Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terselesaikan; - Jumlah dokumen personal file kepegawaian ASN Dinas yang terkelola								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terverifikasi								

		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi yang terfasilitasi								
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah dokumen laporan keuangan akir tahun yang terselesaikan; -Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK yang terselesaikan								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang terselesaikan								
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	- Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang terselesaikan; - Jumlah dokumen laporan Keuangan Bulanan/SPJ yang terselesaikan								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD		4 laporan	13 Laporan	13 Laporan	90	13 Laporan	13 Laporan	100
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran yang terselesaikan								
X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu***	***100|Persen***	***8.33***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100,000***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***

X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun dengan baik								
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	0		0 Dokumen	0
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pinjam pakai Barang Milik Daerah SKPD								
X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah peserta rakor dan penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah peserta mengikuti workshop Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan	0		0 Laporan	0
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang terselesaikan								
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100	16 Laporan	16 Laporan	100
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah dokumen BHP yang disusun; - Jumlah dokumen aset yang disusun								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD								
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen			0			0
X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian***	***100|Persen***	***0***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***

X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	- Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang terfasilitasi								
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0 unit			0			0
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100	14 Dokumen	14 Dokumen	100
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- Jumlah sekolah sasaran Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	- Jumlah kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, penilik, pamong belajar dan pejabat fungsional lainnya yang mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji								
		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		0 Orang		0 Orang	0		0 Orang	0
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan; - Jumlah Sosialisasi Geopark bagi guru dan pelajar; - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan dewan pendidikan; - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam pembinaan Komite Sekolah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			510 Orang	510 Orang	100	510 Orang	510 Orang	100
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen raperbub tentang PPDB								

		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0 Orang			0			0
X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Umum terlayani***	***101|Persen***	***29.07***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		18 paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	2 Paket	100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor semua kegiatan; - Jumlah perlengkapan komputer yang dibeli								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		29 paket	42 paket	18 paket	100	42 paket	18 paket	100
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		32 paket	2 Paket	10 Paket	100	2 Paket	10 Paket	100
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah barang habis pakai yang tersedia								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 paket						
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan; Jumlah lembar fotocopy								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		14 paket	2 paket	22 paket	100	2 paket	22 paket	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (12 Bulan)								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		0 Dokumen	0,0		0 Dokumen	0,0
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat dan tamu; Jumlah minuman dan snack untuk rapat dan tamu; Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah								

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100	25 Laporan	25 Laporan	100
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah pengembangan dan atau update modul sistem pemerintahan berbasis elektronik Dinas Pendidikan yang terfasilitasi; - Jumlah dokumen profil pendidikan								
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana***	***100|Persen***	***100***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	- Jumlah dan jenis kursi kerja (kursi putar/eksekutif) dibeli; - Jumlah dan jenis rak yang dibeli; - Jumlah pengadaan meja rapat (RR sasana among karsa, sasana pramudya, handayani) yang dibeli; - Jumlah kursi tunggu 4 set ruang unit layanan terpadu yang dibeli; - Jumlah alat permainan anak ruang unit layanan terpadu yang dibeli; - Jumlah lemari arsip dorong (mobile file) yang dibeli								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit		0 Unit	0		0 Unit	0
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah AC yang terbeli; - Jumlah kipas angin yang terbeli; - Jumlah CCTV yang terbeli								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit		0 Unit	0		0 Unit	0
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah korden yang terbeli								

X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi**	**100|Persen**	**8.18**	**100|Persen**	**100|Persen**	**100,000**	**100|Persen**	**100|Persen**	**100**
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (20 rekening X 12 Bulan); Jumlah tagihan air yang dibayar (18 rekening X 12 Bulan); - Jumlah sarana jasa telephon/kawat/faximile yang terbayar (2 rekening x 12 Bulan)								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		26 Laporan	576 Laporan	576 Laporan	100	576 Laporan	576 Laporan	100
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa lisensi perangkat server (fortigate dll) dan jasa perangkat lunak yang dibayar								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah sewa tanah Korwil (6 lokasi) Stadion Handayani dan Gedung Kesenian yang terbayarkan (2 lokasi)								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100	9 Laporan	9 Laporan	100
X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfaslitasi pemeliharaanya***	***101|Persen***	***32.88***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas (roda empat) yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya; Jumlah dan jenis kendaraan dinas (roda dua) yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya; Jumlah motor roda 3 yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 Unit	65 Unit	65 Unit	100	65 Unit	65 Unit	100
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah dan jenis mebelair yang dipelihara								

		Jumlah Mebel yang Dipelihara		144 Unit		0 Unit	0		0 Unit	0
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang dipelihara; Jumlah Mesin ketik yang dipelihara; Jumlah printer yang dipelihara; Jumlah sound system yang terpelihara; jumlah peralatan studio musik yang terpelihara; Jumlah kamera yang terpelihara; - Jumlah kunci pintu digital yang terfasilitasi pemeliharaannya; - Jumlah genset yang terfasilitasi pemeliharaannya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		13 Unit	16 Unit	16 Unit	100	16 Unit	16 Unit	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	\'\'- Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor (atap, pintu dan jendela, lantai, kamar kecil, pengecatan) korwil kecamatan yang dipelihara; - Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor (atap, pintu dan jendela, lantai, kamar kecil, pengecatan) yang dipelihara; - Jumlah sanitasi air bersih, tampungan air terfokus beserta saringan air bersih yg terpelihara								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 Unit	0		0 Unit	0
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang dipelihara; Jumlah jaringan internet yang dipelihara; - Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor (AC) yang dipelihara; - Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor (CCTV) yang dipelihara; - Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor (jaringan internet, jaringan telf, dll) yang dipelihara								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	30 Unit	30 Unit	100	30 Unit	30 Unit	100
X.XX.01.2.13	***Penataan Organisasi***	***Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah***	***82.03|Nilai***	***0***		***0|Nilai***	***0***		***0|Nilai***	***0***

X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	- Jumlah dokumen Pengukuran IKM; - Jumlah dokumen SOP yang direvisi; - Jumlah dokumen RTP; - Jumlah dokumen SPIP; - Jumlah Forum Konsultasi Publik yang terlaksana; - Jumlah petunjuk/banner/pengumuman yang dicetak; - Jumlah buletin pendidikan yang diterbitkan		0						
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD;; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar;; Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama;; Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;; Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP**	**90.95|Persen; 93.84|Persen; 99.61|Persen; 41.65|Persen; 56.40|Persen; 91.73|Persen; 99.20|Persen**	**87,75|Persen; 95,77|Persen; 99,61|Persen; 48,9|Persen; 156,83|Persen; 93,54|Persen; 99,2|Persen**	**94.21|Persen; 94.49|Persen; 99.64|Persen; 71.73|Persen; 57.40|Persen; 92.19|Persen; 99.27|Persen**	**94.21|Persen; 94.49|Persen; 99.64|Persen; 71.73|Persen; 57.40|Persen; 92.19|Persen; 99.27|Persen**	**100**	**94.21|Persen; 94.49|Persen; 99.64|Persen; 71.73|Persen; 57.40|Persen; 92.19|Persen; 99.27|Persen**	**94.21|Persen; 94.49|Persen; 99.64|Persen; 71.73|Persen; 57.40|Persen; 92.19|Persen; 99.27|Persen**	**100**
1.01.02.2.01	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	***Persentase SD yang terakreditasi A***	***64.96|Persen***	***19.84***	***67.09|Persen***	***67.09|Persen***	***100***	***67.09|Persen***	***67.09|Persen***	***100***
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun dari dana DAK			1 Ruang	1 Ruang	100	1 Ruang	1 Ruang	100
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	- Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun dari dana DAK			1 Ruang	1 Ruang	100	1 Ruang	1 Ruang	100
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Pembangunan ruang laboraturium komputer beserta perabotnya dari dana DAK								

		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		0 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	- Jumlah ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab dari dana DAK; - Jumlah ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat yang direhab dari dana DAU								
		Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		12 Ruang			0			0
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	1 Ruang	100	1 Ruang	1 Ruang	100
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	1 Ruang	100	1 Ruang	1 Ruang	100
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	- Jumlah ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang yang direhab dari dana DAK			1 Ruang	1 Ruang	100	1 Ruang	1 Ruang	100
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya dari dana DAK								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		0 Unit			0			0
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel pembangunan ruang guru yang diadakan; Jumlah mebel pembangunan ruang perpustakaan yang diadakan; Jumlah mebel pembangunan ruang laboratorium komputer yang diadakan; Jumlah mebel rehab ruang kelas yang diadakan; Jumlah mebel rehab ruang perpustakaan yang diadakan								
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		0 Paket	31 Paket	31 Paket	100	31 Paket	31 Paket	100

1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa miskin yang mendapatkan perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan Alat tulis (Buku tulis, Ballpoint, Penggaris, Pensil, Penghapus, Rautan) siswa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SD (SD Negeri); Jumlah siswa miskin yang mendapatkan perlengkapan dasar jenjang SD berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan Alat tulis (Buku tulis, Ballpoint, Penggaris, Pensil, Penghapus, Rautan) siswa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SD (SD Swasta); Jumlah siswa miskin retrieval jenjang SD yang mendapatkan perlengkapan sekolah berupa Sepatu,Tas,Seragam, Dasi, Ikat pinggang Sekolah; Jumlah siswa miskin retrieval jenjang SD yang mendapat beasiswa kurang mampu di Kec. Wonosari, Ponjong dan Karangmojo dari RESES								
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1090 Unit			0			0
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa SD yang memperoleh beasiswa bakat prestasi; Jumlah siswa retrieval ATS penerima Beasiswa miskin (Gunungkidulcerdas) yang tersedia dalam rangka peningkatan IPM								
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0 Peserta didik	378 Peserta didik	378 Peserta didik	100	378 Peserta didik	378 Peserta didik	100
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dari dana DAK; - Jumlah pengadaan media pendidikan dari dana DAK								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		0 Paket	3 paket	0 paket	100	3 paket	0 paket	100

1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah peserta try out uji kompetensi SD menggunakan aplikasi CBT\"; Jumlah sekolah peserta uji kompetensi sekolah SD menggunakan aplikasi CBT\"; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dan editor soal try out uji kompetensi dan Uji kompetensi Sekolah; Jumlah buku induk yang tercetak\"; Jumlah kalender pendidikan yang tercetak\"; Jumlah cetak Pedoman PPDB; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyusunan dan editor soal pengendali mutu SD; Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM); Jumlah Kepala sekolah/guru yang mengikuti sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		0 Satuan Pendidikan			0			0
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang mengikuti workshop akreditasi SD								
		Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		0 Satuan Pendidikan			0			0
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti FLSSN Tingkat kabupaten, propinsi dan nasional; Jumlah siswa yang mengikuti lomba pengembangan, minat, bakat istimewa Tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional; Jumlah siswa yang mengikuti KSN Tingkat Kabupaten; Jumlah Pembina KSN SD yang mengikuti pembinaan								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		180 Peserta didik	1120 Peserta didik	1120 Peserta didik	100	1120 Peserta didik	1120 Peserta didik	100

1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			615 Orang	615 Orang	45	615 Orang	615 Orang	100
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru dan pengawas jenjang SD yang terfasilitasi sertifikasinya; Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg; Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK dengan aplikasi simpeg; Jumlah peserta yang mengikuti dalam diklat guru pembelajar pasca uji kompetensi guru menggunakan aplikasi UKG\"; Jumlah Guru yang mengikuti diklat Kompetensi pendidik kelas atas dengan aplikasi UKG\"; Jumlah Guru yang mengikuti kegiatan diklat peningkatan Kompetensi pendidik kelas bawah dengan aplikasi UKG\"; Jumlah peserta mengikuti pendidikan PPG jenjang SD\"; Jumlah peserta yang mengikuti dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas guru konsultatif inklusi tk kec\"; Jumlah peserta yang mengikuti dalam pelatihan petugas perpustakaan\"; Jumlah Peserta yang dinyatakan lulus dalam pelatihan PAKEM\"; Jumlah Peserta yang mengikuti dalam pelatihan PAKEM\"; Jumlah peserta yang mengikuti da								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		252 Orang	640 Orang	640 Orang	100	640 Orang	640 Orang	100

1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Evaluasi Diri Sekolah menuju 8 SNP menggunakan aplikasi EDS; Jumlah peserta yang mengikuti diklat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); Jumlah sekolah yang mengikuti diklat sekolah penggerak								
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		0 Sekolah	466 Sekolah	466 Sekolah	100	466 Sekolah	466 Sekolah	100
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Operasinal Sekolah / BOS PUSAT (BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Jenjang SD								
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		0 Satuan Pendidikan	466 Satuan Penidikan	466 Satuan Penidikan	100	466 Satuan Penidikan	466 Satuan Penidikan	100
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah peserta workhsop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dalam penyusunan Kertas Kerja dan RKAS; Jumlah peserta workhsop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dalam penyusunan Penatausahaan; Jumlah peserta workhsop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dalam penyusunan perubahan kertas kerja dan RKAS; Jumlah peserta workhsop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dalam penyusunan Penatausahaan perubahan; Jumlah peserta workhsop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dalam penyusunan Kertas Kerja dan RKAS tahun N+1								

		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		0 Orang	466 Orang	466 Orang	100	466 Orang	466 Orang	100
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar									
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		4 Ruang	5 Ruang	5 Ruang	100	5 Ruang	5 Ruang	100
1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang			0			0
1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0 Ruang	150 Orang	150 Orang	100	150 Orang	150 Orang	100
1.01.02.2.01.36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0 Konten digital	0 Konten digital	0 Konten digital	100	0 Konten digital	0 Konten digital	100
1.01.02.2.01.37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang	240 orang	240 orang	100	240 orang	240 orang	100
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang			0			0
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			1 komunitas	1 komunitas	100	1 komunitas	1 komunitas	100
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			0 Kegiatan	0 Kegiatan	100	0 Kegiatan	0 Kegiatan	100
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			7 Ruang	7 Ruang	100	7 Ruang	7 Ruang	100

1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	3 Unit	100
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			0 Orang	0 Orang	100	0 Orang	0 Orang	100
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			466 Satuan Pendidikan	466 Satuan Pendidikan	100	466 Satuan Pendidikan	466 Satuan Pendidikan	100
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			25 Ruang	25 Ruang	100	25 Ruang	25 Ruang	100
1.01.02.2.02	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	***Persentase SMP yang terakreditasi A***	***88.5|Persen***	***33.92***	***92.04|Persen***	***92.04|Persen***	***100***	***92.04|Persen***	***92.04|Persen***	***100***
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang selesai dibangun dari DAU					0			0
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		0 Ruang			0			0
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		0 Ruang			0			0
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang selesai dibangun					0			0
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		0 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	100	2 Ruang	2 Ruang	100
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		0 Ruang			0			0
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	-Jumlah ruang Lab. Komputer sekolah negeri dan swasta yang dibangun								
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		0 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	100	3 Ruang	3 Ruang	100
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya sekolah negeri swasta yang dibangun								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		0 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100

1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah swasta yang selesai direhab dari dana DAK; Jumlah Ruang kelas sekolah negeri yang direhab dari dana DAK								
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	51 Ruang	51 Ruang	100	51 Ruang	51 Ruang	100
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi ruang guru sekolah negeri dari dana DAK; Jumlah Rehabilitasi ruang kepala sekolah sekolah negeri dari dana DAK; Jumlah Rehabilitasi ruang TU sekolah negeri dari dana DAK; Jumlah Rehabilitasi ruang TU sekolah swasta dari dana DAK								
		Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang			0			0
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang Unit Kesehatan sekolah Negeri yang selesai direhab dari dana DAK; Jumlah ruang Unit Kesehatan sekolah Swasta yang selesai direhab dari dana DAK								
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang	5 Ruang	5 Ruang	100	5 Ruang	5 Ruang	100
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah swasta yang direhab dari dana DAK; Jumlah perpustakaan sekolah negeri yang direhab dari dana DAK								
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	6 Ruang	6 Ruang	100	6 Ruang	6 Ruang	100

1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium ilmu pengetahuan Alam (IPA) sekolah swasta yang direhab dari dana DAK; Jumlah ruang laboratorium komputer sekolah negeri yang direhab dari dana DAK; Jumlah ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) sekolah negeri yang direhab dari dana DAK; Jumlah ruang laboratorium komputer sekolah swasta yang direhab dari dana DAK								
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	14 Ruang	14 Ruang	100	14 Ruang	14 Ruang	100
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban Siswa/Guru sekolah negeri yang selesai direhab dari dana DAK; Jumlah Jamban Siswa/Guru sekolah Swasta yang selesai direhab dari dana DAK; Jumlah ruang ibadah sekolah yang selesai direhab dari dana DAK								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Unit	11 Unit	11 Unit	100	11 Unit	11 Unit	100

1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeler ruang kelas SMP Swasta yang diadakan dari dana DAK; Jumlah mebeler ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan alam (IPA) SMP Swasta yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah Mebeler ruang laboratorium komputer SMP Swasta yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah mebeler ruang perpustakaan SMP swasta yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah mebeler ruang UKS SMP Swasta yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah ruang Tata Usaha SMP Swasta yang diadakan dari Dana DAKdari Dana DAK; Jumlah Mebelr ruang guru SMP Negeri yang diadakan dari dana DAK; Jumlah mebeler ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) SMP Negeri yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah mebeler ruang laboratorium komputer SMP Negeri yang diadakan dari dana DAK; Jumlah mebeler ruang perpustakaan SMP negeri yang diadakan dari Dana DAk; Jumlah mebeler ruang Tata Usaha SMP negeri yang diadakan dari dana DAK; Jumlah mebeler ruang UKS SMP Negeri yang diadakan dari Dana DAK; Jumlah mebeler ruang kelas SMP Negeri yang diad								
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		0 Paket	31 Paket	31 Paket	100	31 Paket	31 Paket	100

1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan Alat tulis (Buku tulis, Ballpoint, Penggaris, Pensil, Penghapus, Rautan, Tipe X, Cat Air) siswa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SMP (SMP Negeri); Jumlah siswa miskin retrieval jenjang SMP yang mendapatkan perlengkapan sekolah berupa Sepatu,Tas,Seragam, Dasi, Ikat pinggang Sekolah; Jumlah siswa miskin retrieval jenjang SMP yang mendapatkan perlengkapan sekolah berupa Sepatu,Tas,Seragam, Dasi, Ikat pinggang Sekolah dari PIS; Jumlah siswa miskin retrieval jenjang SMP yang mendapatkan perlengkapan sekolah berupa Sepatu,Tas,Seragam, Dasi, Ikat pinggang Sekolah dari RESES; Jumlah siswa miskin yang mendapat perlengkapan dasar jenjang SMP berupa set perlengkapan belajar yang terdiri dari buku tulis dan Alat tulis (Buku tulis, Ballpoint, Penggaris, Pensil, Penghapus, Rautan, Tipe X, Cat Air) siswa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)								
		Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia		819 Paket			0			0
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa penerima Beasiswa bakat dan prestasi SMP (@ Rp. 500.000); Jumlah penerima Beasiswa miskin (Gunungkidulcerdas) siswa Retrieval Anak Tidak Sekolah kembali sekolah SMP miskin yang tersedia dalam rangka peningkatan IPM								
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		916 Paket	276 peserta didik	266 peserta didik	100	276 peserta didik	266 peserta didik	100

1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah komputer client sekolah menengah pertama Negeri yang diadakan dari dana DAU untuk mendukung pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM); -Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika sekolah swasta dari dana DAK; Jumlah komputer server sekolah menengah pertama Negeri yang diadakan dari dana DAU untuk mendukung pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak dan AKM); Jumlah Peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika sekolah Negeri dari dana DAK; Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi sekolah swasta yang diadakan dari dana DAK; Jumlah pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sekolah negeri dari dana DAK; Jumlah peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Biologi sekolah negeri yang diadakan dari dana DAK; Jumlah komputer client sekolah menengah pertama Swasta yang diadakan dari dana DAU untuk mendukung pelaksanaan MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak dan AKM); Jumlah kompute									
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		0 Paket	13 paket	13 paket	100	13 paket	13 paket	100

1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Negeri; Jumlah Biaya Operasional penyelenggaraan Asesmen Sekolah, ASPD, dan Asesmen Nasional di sekolah jenjang SMP Swasta; Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan kurikulum\"; Jumlah peserta yang mengikuti Penilaian harian, tengah semester, akhir semester sekolah menegah pertama; Jumlah cetak kalender pendidikan; Jumlah cetak pedoman PPDB; Jumlah cetak sampul raport sekolah negeri; Jumlah cetak buku induk; Jumlah peserta yang mengikuti Workshop CBT; Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Pendampingan Strategi Pemenuhan SNP; Jumlah peserta workshop MERDEKA BELAJAR (sekolah Penggerak, AKM); Jumlah Kepala sekolah/guru yang mengikuti sosialisasi dan peningkatan kompetensi terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		12241peserta			0			0
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi akreditasi; Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tindak lanjut akreditasi								
		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		110 Satuan Pendidikan			0			0

1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-Jumlah peserta yang mengikuti Gala Siswa; -Jumlah peserta GSI tingkat Kabupaten, propinsi dan nasional; -Jumlah peserta lomba video edukasi guru dan siswa tingkat kabupaten, propinsi dan nasional; - Jumlah siswa peserta kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten, propinsi, kabupaten dan nasional; - Jumlah peserta yang mengikuti lomba FLSSN tingkat kabupaten, propinsi dan nasional; - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kuis KiHAJAR tingkat kabupaten, propinsi dan nasional; - Jumlah peserta yang mengikuti workshop gender; - Jumlah peserta yang mengikuti diklat OSIS; - Jumlah peserta yang mengikuti Gladi kawruh; - Jumlah peserta yang mengikuti Jambore Pendidikan Karakter; - Jumlah peserta yang mengikuti OPSI								
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		80 Peserta didik	642 Peserta didik	642 Peserta didik	100	642 Peserta didik	642 Peserta didik	100
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			50 Orang	50 Orang	44	50 Orang	50 Orang	100

1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Jumlah Guru dan pengawas jenjang SMP yang terfasilitasi sertifikasinya; - Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg; - Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK dengan menggunakan aplikasi simpeg; \"- Jumlah peserta mengikuti pendidikan PPG jenjang SMP\"; \"- Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan kinerja guru/Kepala Sekolah \"; \"-Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kinerja kepala sekolah\"; \"- Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Pelatihan Lesson Study; ; \"- Jumlah peserta yang dinyatakan mengikuti kegiatan Publikasi Ilmiah dan Karya Ilmiah bagi Guru SMP;								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		386 orang	433 Orang	433 Orang	100	433 Orang	433 Orang	100
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Evaluasi Diri Sekolah dalam rangka pemenuhan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan\".; Jumlah peserta yang mengikuti review Evaluasi Diri Sekolah dalam rangka pemenuhan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan\".								
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		392 satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	100	110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	100

1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS PUSAT) jenjang SMP								
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	100	110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	100
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dalam penyusunan kertas kerja, RKAS, Kertas kerja perubahan, penatausahaan dan penatausahaan perubahan serta penyusunan kertas kerja tahun N+1								
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		0 Orang	110 Orang	110 Orang	100	110 Orang	110 Orang	100
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU									
		Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang			0			0
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah									
		Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	100	2 Ruang	2 Ruang	100
1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0 Orang	110 Orang	110 Orang	100	110 Orang	110 Orang	100
1.01.02.2.02.49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0 Konten digital	70 Konten digital	70 Konten digital	100	70 Konten digital	70 Konten digital	100
1.01.02.2.02.50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang	110 Orang	110 Orang	100	110 Orang	110 Orang	100
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		12 Orang	110 Satdik	0 Satdik	0	110 Satdik	0 Satdik	0
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			2 Komunitas	1 Komunitas	100	2 Komunitas	1 Komunitas	100
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			24482 satuan Pendidikan	24482 satuan Pendidikan	100	24482 satuan Pendidikan	24482 satuan Pendidikan	100
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			2 Ruang	2 Ruang	100	2 Ruang	2 Ruang	100
1.01.02.2.02.60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			110 Satdik	110 Satdik	100	110 Satdik	110 Satdik	100
1.01.02.2.02.62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
1.01.02.2.02.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			7 Ruang	7 Ruang	100	7 Ruang	7 Ruang	100
1.01.02.2.03	***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***	***Persentase PAUD yang terakreditasi***	***59.78|Persen***	***60.53***	***63.98|Persen***	***63.98|Persen***	***100***	***63.98|Persen***	***63.98|Persen***	***100***
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun		1 Unit			0			0

1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah area bermain beserta APE luar ruang lembaga PAUD yang selesai dibangun untuk 1. Mrico TK PKK PUTRA PERTIWI, Ngestirejo Tanjungsari. 2. Jl. Yogyakarta- Wonosari Km.23, Putat, Patuk, Gunungkidul. 3. gading, playen,gunungkidul. 4. Getas, Playen, Gunungkidul dari PIS; Jumlah area bermain beserta APE luar ruang Lembaga PAUD yang selesai dibangun dari dana DAK; Jumlah area bermain beserta APE luar ruang lembaga PAUD yang selesai dibangun untuk SPS Amanah Insan Mandiri, BLIMBING, KARANGREJEK								
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		2 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	3 Unit	100
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah rehabilitasi ruang kelas PAUD dari PIS; Jumlah rehabilitasi ruang kelas PAUD dari RESES								
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		13 Unit	17 Unit	17 Unit	100	17 Unit	17 Unit	100
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 Unit	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	3 Unit	100
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		24 paket	7 Paket	7 Paket	100	7 Paket	7 Paket	100
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia		0 Paket			0			0
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan gebyar paud kecamatan, kabupaten dan propinsi; Jumlah peserta yang mengikuti gebyar paud kabupaten; Jumlah peserta kegiatan porseni siswa TK tingkat kabupaten, propinsi dan nasional								

		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		150 Peserta didik	144 Peserta didik	144 Peserta didik	100	144 Peserta didik	144 Peserta didik	100
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah pengadaan APE Lembaga paud yeng terbeli dari PIS; Jumlah pengadaan alat permainan Edukatif (APE) PAUD yang terbeli dari RESES; Jumlah pengadaan LCD Proyektor untuk mendukung KBM K-13 dan untuk mendukung Sekolah penggerak; Jumlah pengadaan Laptop untuk mendukung KBM K-13 dan untuk mendukung Sekolah penggerak; Jumlah pengadaan alat permainan Edukatif (APE) PAUD yang terbeli dari DAK								
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		1 Paket	8 Paket	8 Paket	100	8 Paket	8 Paket	100
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah pendidik PAUD Eks Bank Dunia yang mendapatkan stimulan dari Kabupaten; Jumlah THR Stimulan Pendidik PAUD Eks Bank Dunia; Jumlah Kalender Pendidikan yang dicetak								
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		556 Peserta didik	1256 Peserta didik	1256 Peserta didik	100	1256 Peserta didik	1256 Peserta didik	100
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			18 Orang	18 Orang	50	18 Orang	18 Orang	100

1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru dan pengawas jenjang TK yang terfasilitasi sertifikasinya; Jumlah peserta yang dinyatakan lulus dalam workshop penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menggunakan aplikasi simpeg; Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti penilaian PAK menggunakan aplikasi simpeg; Jumlah peserta yang mengikuti dalam workshop seni musik; Jumlah peserta yang mengikuti diklat mahir jenjang PAUD; Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru jenjang PAUD; Jumlah peserta yang mengikuti kegitan penilaian kinerjaGuru/Kepala Sekolah								
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		190 Orang	520 Orang	520 Orang	100	520 Orang	520 Orang	100
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		30 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	100	80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	100
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah satuan pendidikan penerima BOP/DAK Non Fisik PAUD								
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		0 Satuan Pendidikn	1198 Satuan Pendidikan	1198 Satuan Pendidikan	100	1198 Satuan Pendidikan	1198 Satuan Pendidikan	100
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah peserta yang mengikuri workshop pengelolaan dana BOP/DAK Non Fisik PAUD; Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan RAPBS dana BOP/DAK Non Fisik PAUD; Jumlah peserta yang mengikuti workshop penyusunan laporan dana BOP/DAK Non Fisik PAUD								
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		0 Orang	1198 Orang	1198 Orang	100	1198 Orang	1198 Orang	100

1.01.02.2.03.22	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		35 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0
1.01.02.2.03.23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		2 Konten digital	5 Konten Digital	5 Konten Digital	100	5 Konten Digital	5 Konten Digital	100
1.01.02.2.03.24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		35 Orang	0 Orang	0 Orang	100	0 Orang	0 Orang	100
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.02.2.03.27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang			0			0
1.01.02.2.03.28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			2 Ruang	2 Ruang	100	2 Ruang	2 Ruang	100
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			4 Komunitas	4 Komunitas	100	4 Komunitas	4 Komunitas	100
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			1 Ruang	1 Ruang	100	1 Ruang	1 Ruang	100
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			0 Orang	762 Satuan Pendidikan	100	0 Orang	762 Satuan Pendidikan	100
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			1.217 Paket	1.217 Paket	100	1.217 Paket	1.217 Paket	100
1.01.02.2.04	***Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	***Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi***	***21.82|Persen***	***46.15***	***41.17|Persen***	***41.17|Persen***	***100***	***41.17|Persen***	***41.17|Persen***	***100***
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Ruang Praktik Sanggar Kegiatan Belajar yang selesai dibangun dari dana DAK					0			0
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan						0			0

1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah mebelair ruang praktik Sanggar Kegiatan Belajar yang terfasilitasi dari dana DAK					0			0
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia		120 Paket			0			0
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta/Warga masyarakat yang mengikuti kursus -kursus di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)					0			0
		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0 Peserta didik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dan jenis alat praktik dan peraga siswa SKB dalam rangka mendukung MERDEKA BELAJAR (Sekolah Penggerak, AKM); Jumlah pengadaan peralatan praktik peserta kursus dan pelatihan (LKP); Jumlah pengadaan peralatan keterampilan SKB yang tersedia dari dana DAK					0			0

1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga belajar (non bop paket C) yang mengikuti paket C; Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH); Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal; Jumlah peserta yang mengikuti kursus Boga; Jumlah peserta yang mengikuti kursus coding; Jumlah peserta yang mengikuti kursus Bahasa Inggris; Jumlah peserta yang mengikuti kursus Bim Bel; Jumlah peserta yang mengikuti kursus Menulis Kreatif; Jumlah peserta yang mengikuti kursus tata Kecantikan; Jumlah peserta yang mengikuti kursus Video Editing; Jumlah peserta yang mengikuti kursus SENI BUDAYA JAWA; Jumlah peserta yang mengikuti kursus SENI VOKAL; Jumlah peserta yang mengikuti kursus BARISTA; Jumlah peserta yang mengikuti kursus INSTRUMEN MUSIK; Jumlah peserta yang mengiukuti UK PAUD; Jumlah peserta yang mengiukuti UK TATA BOGA; Jumlah peserta yang mengiukuti UK KURSUS KOMPUTER; JUMLAH program skb yan					0			0
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		0 Peserta didik			0			0
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta akreditasi pendidikan nonformal/kesetaraan yang selesai dilaksanakan; Jumlah peserta akreditasi pendidikan nonformal/kesetaraan yang selesai dilaksanakan								
		Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		0 Satuan Pendidikan			0			0

1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			10 Orang	10 Orang	50	10 Orang	10 Orang	100
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			17 Orang	17 Orang	100	17 Orang	17 Orang	100
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta workshop Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang terbina								
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	100	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	100
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket A; Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket B; Jumlah peserta didik penerima biaya operasional pendidikan (BOP/DAK NON FISIK) pendidikan nonformal/Kesetaraan Paket C								
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		0 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	100	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	100
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta workshop Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		0 Orang	60 Orang	60 Orang	100	60 Orang	60 Orang	100
1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian		0 Satuan Pendidikan			0			0

1.01.02.2.04.24	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		30 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0
1.01.02.2.04.25	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		3 Konten digital	0 Konten digital	0 Konten digital	0	0 Konten digital	0 Konten digital	0
1.01.02.2.04.26	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		39 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.02.2.04.28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.02.2.04.29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang			0			0
1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi			2 komunitas	2 komunitas	100	2 komunitas	2 komunitas	100
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			100 Paket	100 Paket	100	100 Paket	100 Paket	100
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			2832 peserta didik	2832 peserta didik	100	2832 peserta didik	2832 peserta didik	100
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal**	**100|Persen**	**0**	**100|Persen**	**100|Persen**	**100**	**100|Persen**	**100|Persen**	**100**
1.01.03.2.01	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar***	***Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar***	***100|Persen***	***0***	***100|Persen***	***0|Persen***	***0***	***100|Persen***	***0|Persen***	***0***
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	jumlah peserta workshop penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan SD yang terfasilitasi; Jumlah peserta workshop mulok batik; Jumlah dokumen KD muatan lokal pendidikan dasar yang tersusun								

		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		0 Dokumen			0			0
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah peserta workshop penyusunan silabus muatan lokal pendidikan SD yang terfasilitasi; Jumlah peserta workshop penyusunan silabus muatan lokal pendidikan SMP yang terfasilitasi; Jumlah dokumen Silabus muatan lokal pendidikan dasar yang tersusun								
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
1.01.03.2.02	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal***	***Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal***	***100|Persen***	***0***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang tersusun								
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan**	**49,22|Persen**	**25**	**51|Persen**	**51|Persen**	**100**	**51|Persen**	**51|Persen**	**100**

1.01.04.2.01	***Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	***Persentase Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;; Persentase Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;; Persentase Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;; Persentase Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;; Persentase Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;; Persentase Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;***	***73.07|Persen ; 27.37|Persen ; 61.37|Persen ; 85.47|Persen ; 71.79|Persen ; 80.53|Persen***	***25***	***76.98|Persen ; 47.72|Persen ; 66.49|Persen ; 87.61|Persen ; 79.61|Persen ; 88.5|Persen***	***76.98|Persen ; 47.72|Persen ; 66.49|Persen ; 87.61|Persen ; 79.61|Persen ; 88.5|Persen***	***100***	***76.98|Persen ; 47.72|Persen ; 66.49|Persen ; 87.61|Persen ; 79.61|Persen ; 88.5|Persen***	***76.98|Persen ; 47.72|Persen ; 66.49|Persen ; 87.61|Persen ; 79.61|Persen ; 88.5|Persen***	***100***
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang mengikuti dalam diklat calon kepala sekolah jenjang SD								

		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan**	**100|Persen**	**11.36**	**100|Persen**	**100|Persen**	***100***	**100|Persen**	**100|Persen**	***100***
1.01.05.2.01	***Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***	***Persentase permohonan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat terlayani***	***100|Persen***	***0***	***100|Persen***	***100|Persen***	***0***	***100|Persen***	***100|Persen***	***0***
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi; Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitas								
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah peserta rakor Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi; Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; Jumlah peserta rakor Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi; Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan Pendidikan SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								

		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
1.01.05.2.02	***Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***	***Persentase permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat terlayani***	***100|Persen***	***22.73***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***	***100|Persen***	***100|Persen***	***100***
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah peserta rakor penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi								
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah peserta rakor Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi; Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	- Jumlah peserta workshop Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terfasilitasi								

		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya; Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya; Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya**	**12,59|Persen; 13.12|Persen; 100|Persen**	**0**	**20.99|Persen; 23.87|Persen; 100|Persen**	**20.99|Persen; 23.87|Persen; 100|Persen**	**100**	**20.99|Persen; 23.87|Persen; 100|Persen**	**20.99|Persen; 23.87|Persen; 100|Persen**	**100**
2.22.08.2.10	***Pendidikan Berbasis Budaya***	***Presentase Pendidikan Berbasis Budaya yang terpenuhi***	***41.9|persen***	***0***	***48.29|persen***	***48.29|persen***	***100***	***48.29|persen***	***48.29|persen***	***100***
2.22.08.2.10.01	Pembinaan Muatan Lokal	Siswa SD yang dilatih membatik; Guru SD yang dilatih membatik; Guru SMP yang yang terbantu dalam mengemplementasikan muatan lokal membatik; Siswa SMP yang dilatih membatik; Pendidik PAUD Formal dan Non Formal yang dilatih Gamelan dalam pengasuhan peserta didik berbasis budaya		0						
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal		0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
			100				97,69			100

Berdasarkan APBDP tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul TA 2024, dan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA/A.6/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 23 Agustus 2024, Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi belanja langsung semula sebesar Rp. 715.259.653.288,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 759.460.981.380,00 atau bertambah Rp. 44.164.579.092,00 untuk melaksanakan 128 sub kegiatan, dan 12 kegiatan dari 6 program yang ada. Perubahan anggaran Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul untuk memenuhi gaji PPPK, TPG ke 13 dan 14, Tamsil Guru ke 13 dan 14, rehabilitasi gedung sekolah yang rusak, serta mencatatkan anggaran SiLPA BOS Kinerja Tahun 2023.

Sampai dengan bulan Desember 2024, tingkat penyerapan keuangan adalah sebesar 97,69 % atau Rp 741.949.794.039,00 dari jumlah anggaran seluruhnya dengan capain fisik rata-rata sebesar 99,98 %. Tingkat penyerapan keuangan sampai dengan triwulan keempat tidak mencapai 100%, namun capaian pekerjaan fisik dilapangan sudah mencapai 100%, dimana sisa dana merupakan Sisa belanja dan sisa kontrak yang disetor kembali ke kasda.

Dari tabel evaluasi pelaksanaan Renja PD seperti dalam tabel 2.1 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2005-2025 terealisasi. Dari tabel dapat kita liat bahwa rata-rata capain program/kegiatan baru sebesar 99,98% karena ada beberapa kegiatan yang pelaksanaan fisiknya sudah 100% namun penyerapan anggaran tidak 100% karena sisa belanja dan sisa kontrak, sehingga disetor ke kasda.

Capaian pada program/kegiatan tahun 2024 sampai dengan triwulan keempat (sampai dengan bulan Desember) kurang dari 100% sebanyak 5 sub kegiatan 5 Kegiatan 2 program. Capaian pada semua program/kegiatan tahun 2024 sampai dengan triwulan keempat (sampai dengan bulan Desember) mencapai 100% sebanyak 123 sub kegiatan 7 Kegiatan 4 program.

Realisasi capaian program/kegiatan tahun 2024 sampai dengan triwulan keempat, yang dapat dilihat pada table 2.1. menunjukkan angka 0% sampai dengan 100%. Angka 0% menunjukkan bahwa kegiatan yang tercantum dalam Renja tahun 2024 belum dapat dilaksanakan sampai dengan triwulan keempat. Sedangkan angka 100% menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
         Pagu anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 108.601.800,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 108.458.110,- atau 99.87%.
2. Program Pengelolaan Pendidikan.
   A. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
      1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
         Pagu anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.600.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar

Rp. 2.752.000,- atau 41.79% dikarenakan Penyediaan Pendidik dan Tendik SD ,SMP , dan PAUD Berdasarkan Surat Edaran Bersama 3 menteri (MendikbudRistek ,Mendagri dan BKN nomor 1 Tahun 2024, Nomor100.4.4.2/2028/57, Nomor 5 Tahun 2024) Tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah telah disampaikan ke BKPPD dan SETDA. Tetapi pelaksanaan Pelantikan terkendala aturan BKPPD dan Setda ,terkait Pelantikan dimasa 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah Penetapan Kepala Daerah tidak boleh ada Pelantikan tanpa ijin dan surat dari MENDAGRI ke Pemerintah Daerah.

2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah.

B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

   Pagu anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.600.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.032.000,- atau 15.64% dikarenakan Penyediaan Pendidik dan Tendik SD ,SMP , dan PAUD Berdasarkan Surat Edaran Bersama 3 menteri (MendikbudRistek ,Mendagri dan BKN nomor 1 Tahun 2024, Nomor100.4.4.2/2028/57, Nomor 5 Tahun 2024) Tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah telah disampaikan ke BKPPD dan SETDA. Tetapi pelaksanaan Pelantikan terkendala aturan BKPPD dan Setda ,terkait Pelantikan dimasa 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah Penetapan Kepala Daerah tidak boleh ada Pelantikan tanpa ijin dan surat dari MENDAGRI ke Pemerintah Daerah.

C. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD.

   Pagu anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.900.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.764.000,- atau 46.85% dikarenakan Penyediaan Pendidik dan Tendik SD ,SMP , dan PAUD Berdasarkan Surat Edaran Bersama 3 menteri (MendikbudRistek ,Mendagri dan BKN nomor 1 Tahun 2024, Nomor100.4.4.2/2028/57, Nomor 5 Tahun 2024) Tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah telah disampaikan ke BKPPD dan SETDA. Tetapi pelaksanaan Pelantikan terkendala aturan BKPPD dan Setda ,terkait Pelantikan dimasa 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah Penetapan Kepala Daerah tidak boleh ada Pelantikan tanpa ijin dan surat dari MENDAGRI ke Pemerintah Daerah.

D. Pengelolaan Pendidikan Nonfformal/Kesetaraan.

1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

   Pagu anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.399.900,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.032.000,- atau 23.46% dikarenakan Penyediaan Pendidik dan Tendik SD ,SMP , dan PAUD Berdasarkan Surat Edaran Bersama 3 menteri (MendikbudRistek ,Mendagri dan BKN nomor 1 Tahun 2024, Nomor100.4.4.2/2028/57, Nomor 5 Tahun 2024) Tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah telah disampaikan ke BKPPD dan SETDA. Tetapi pelaksanaan Pelantikan terkendala aturan BKPPD dan Setda ,terkait Pelantikan dimasa 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah Penetapan Kepala Daerah tidak boleh ada Pelantikan tanpa ijin dan surat dari MENDAGRI ke Pemerintah Daerah.

Sedangkan realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan sampai dengan Triwulan ke empat antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 63.806.175,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 50.527.500,- atau 79.19%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 3 Dokumen terealisasi 100%.
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.430.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.422.400,- atau 99,78%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target 1 Dokumen terealisasi 100%.
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.230.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.224.400,- atau 99.83%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target 1 Dokumen terealisasi 100%.
      4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 6.635.100,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.693.300,- atau 85.81%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target 2 Dokumen terealisasi 100%.
      5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA/SKPD.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.750.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.393.000,- atau 76,40%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan target 2 Dokumen terealisasi 100%.
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 65.959.900,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 65.856.400,- atau 99.84%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 6 laporan terealisasi 100%.
      7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 48.195.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 48.195.000,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 3 laporan terealisasi 100%.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 617.799.198.922,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 605.578.866.838,- atau 98.02%, dengan indikator kinerja keluaran jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 78.748 Orang/bulan terealisasi 100%.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 960.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 957.500,- atau 99.74%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target 4 Dokumen terealisasi 100%.
3. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.638.300,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.638.300,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Veri kasi Keuangan SKPD dengan target 12 Dokumen terealisasi 100%.
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.301.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.240.900,- atau 98.86%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target 12 Dokumen terealisasi 100%.
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 19.964.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 19.963.900,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 4 Dokumen terealisasi 100%.
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 300.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 300.000,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan dengan target 3 Dokumen terealisasi 100%.

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

1. Koordinasi dan Penilaian Barang milik Daerah SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.900.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.899.900,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan target 1 laporan terealisasi 100%.
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 687.670.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 677.770.000,- atau 98.56%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 16 laporan terealisasi 100%.

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 6.600.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.599.450,- atau 99.99%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 4 laporan terealisasi 100%.

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 140.164.400,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 87.045.592,- atau 62.10%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target 14 Dokumen terealisasi 100%.
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 440.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 440.000,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan target 1 Dokumen terealisasi 100%.
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 152.380.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 151.446.400,- atau 99.39%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 510 Orang terealisasi 100%.

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 9.884.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.678.400,- atau 97.91%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 2 paket terealisasi 100%.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 192.814.100,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 191.370.710,- atau 99.25%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 42 paket terealisasi 100%.
3. Penyediaan peralatan Rumah Tangga.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 167.286.315,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 150.094.342,- atau 89.72%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dengan target 2 paket terealisasi 100%.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 16.540.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 16.063.500,- atau 97.12%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 2 paket terealisasi 100%.
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 600.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar

Rp. 600.000,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 1 Laporan terealisasi 100%.

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 130.847.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 86.002.722,- atau 65.73%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 25 Laporan terealisasi 100%.
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 234.082.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 233.727.850,- atau 99.85%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan target 2 dokumen terealisasi 100%.

F. Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah.

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 530.048.467,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 414.966.052,- atau 78.29%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 576 laporan terealisasi 100%.
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 322.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 268.000.000,- atau 83.23%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 1 laporan terealisasi 100%.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 59.985.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 58.160.000,- atau 96.96%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target 9 laporan terealisasi 100%.

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 190.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 190.340.800,- atau 99.92%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 65 unit terealisasi 100%.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 571.786.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 571.773.750,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 16 unit terealisasi 100%.
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target 30 unit terealisasi 100%.

2. Program Pengelolaan Pendidikan.
   A. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
      1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 212.221.800,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 186.948.000,- atau 88.09%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun dengan target 1 ruang terealisasi 100%.
      2. Pembangunan Perpustakaan Sekolah.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 205.117.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 177.622.000,- atau 86.60%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun dengan target 1 ruang terealisasi 100%.
      3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 99.451.000,- atau 99.45%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun dengan target 1 unit terealisasi 100%.
      4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 134.415.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 119.649.000,- atau 89.01%. dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 1 ruang terealisasi 100%.
      5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 86.159.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 76.281.000,- atau 88.54%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 1 ruang terealisasi 100%.
      6. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 120.546.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 104.994.000,- atau 87.10%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 1 ruang terealisasi 100%.
      7. Pengadaan Mebel Sekolah.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 302.552.200,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 289.419.000,- atau 95.66%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia dengan target 31 paket terealisasi 100%.
      8. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 189.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 189.000.000,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima

Biaya Personil Peserta Didik dengan target 378 peserta didik terealisasi 100%.

9. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 286.518.000,- atau 95.51%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia dengan target 3 Paket terealisasi 100%.
10. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 248.105.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 247.199.750,- atau 99.64%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik dengan target 1.120 Peserta didik terealisasi 100%.
11. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 169.410.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 144.801.000,- atau 85.47%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi dengan target 640 Orang terealisasi 100%.
12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 48.530.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 48.237.500,- atau 99.40%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah dengan target 466 satdik terealisasi 100%.
13. Pengelolahan Dana BOS Sekolah Dasar.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 46.401.143.962,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 46.158.631.636,- atau 99.48%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS dengan target 466 satdik terealisasi 100%.
14. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 110.327.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 110.211.700,- atau 99.90%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan target 466 orang terealisasi 100%.
15. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.743.504.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.519.254.000,- atau 87.14%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun dengan target 5 ruang terealisasi 100%.
16. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 10.350.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 10.310.000,- atau 99.61%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan

Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dengan target 150 orang terealisasi 100%.

17. Pengembangan konten digital untuk pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 19.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 18.934.500,- atau 99.66%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan dengan target konten terealisasi 100%.
18. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 51.020.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 50.812.300,- atau 99.59%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan dengan target 240 orang terealisasi 100%.
19. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 20.944.300,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.868.895,- atau 99.64%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan target 1 dokumen terealisasi 100%.
20. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 14.932.000,- atau 99.55%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dengan target 1 dokumen terealisasi 100%.
21. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 9.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.464.000,- atau 99.62%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi dengan target 1 komunitas terealisasi 100%.
22. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 23.325.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 23.253.750,- atau 99.69%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan target kegiatan terealisasi 100%.
23. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 500.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 500.000,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia dengan target 1 paket terealisasi 100%.
24. Pembangunan Ruang Kelas Baru.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 134.460.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 115.198.000,- atau 85.67%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah dengan target 7 ruang terealisasi 100%.

25. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 520.800.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 505.928.000,- atau 97.14%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 3 unit terealisasi 100%.
26. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 31.960.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 31.694.800,- atau 99.17%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan dengan target orang terealisasi 100%.
27. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 133.146.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 131.255.400,- atau 98.58%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dengan target 466 satdik terealisasi 100%.
28. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.835.574.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.391.080.025,- atau 90.81%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 25 ruang terealisasi 100%.

B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
    1. Pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah.
       Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 399.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 359.181.000,- atau 90.02%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun dengan target 2 ruang terealisasi 100%.
    2. Pembangunan Laboratorium.
       Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 934.599.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 842.150.000,- atau 90.11%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun dengan target 3 ruang terealisasi 100%.
    3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
       Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 82.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 81.321.000,- atau 99.17%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun dengan target 1 unit terealisasi 100%.
    4. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.
       Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 7.091.645.116,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.288.326.154,- atau 88.67%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 51 ruang terealisasi 100%.
    5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah.
       Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 359.100.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar

Rp. 322.867.000,- atau 89.91%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 5 ruang terealisasi 100%.

6. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.157.100.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 998.512.000,- atau 86.29%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 6 ruang terealisasi 100%.
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.071.383.400,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.690.137.000,- atau 87.59%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 14 ruang terealisasi 100%.
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.020.116.925,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 897.620.765,- atau 87.99%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 11 unit terealisasi 100%.
9. Pengadaan Mebel Sekolah.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.675.950.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.656.565.000,- atau 99.28%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia dengan target 31 paket terealisasi 100%.
10. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 141.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 140.999.700,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik dengan target 276 peserta didik terealisasi 100%.
11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 840.025.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 821.262.000,- atau 97.77%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia dengan target 13 paket terealisasi 100%.
12. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 171.050.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 157.294.214,- atau 91.96%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik dengan target 642 peserta didik terealisasi 100%.
13. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 306.965.400,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 226.698.720,- atau 73.85%, dengan indikator kinerja

keluaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kuali kasi dengan target 433 orang terealisasi 100%.

14. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 112.504.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 112.502.030,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan dengan target 110 satdik terealisasi 100%.
15. Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 29.555.810.998,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 28.896.090.857,- atau 97.77%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS dengan target 110 satdik terealisasi 100%.
16. Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 71.455.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 71.454.310,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan target 110 orang terealisasi 100%.
17. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 154.728.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 135.592.000,- atau 87.63%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 2 ruang terealisasi 100%.
18. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 18.346.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 18.345.180,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dengan target 110 orang terealisasi 100%.
19. Pengembangan konten digital untuk pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 14.350.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 14.349.510,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan dengan target 70 konten digital terealisasi 100%.
20. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 18.850.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 18.849.270,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan dengan target 110 orang terealisasi 100%.
21. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.499.760,- atau 99.99%, dengan indikator kinerja keluaran

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan target 1 dokumen terealisasi 100%.

22. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 19.537.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 19.533.375,- atau 99.98%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dengan target 1 dokumen terealisasi 100%.
23. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 6.300.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.666.000,- atau 89.94%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi dengan target 2 komunitas terealisasi 100%.
24. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 321.117.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 320.765.792,- atau 99.89%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dengan target 24.482 orang terealisasi 100%.
25. Pembangunan Ruang Kelas Baru.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 369.478.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 318.019.000,- atau 86.07%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah dengan target 2 ruang terealisasi 100%.
26. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 31.960.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 30.319.292,- atau 94.87%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan dengan target 110 satdik terealisasi 100%.
27. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.996.000,- atau 99.93%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia dengan target 1 paket terealisasi 100%.
28. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 912.712.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 801.254.000,- atau 87.79%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 7 ruang terealisasi 100%.

C. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
   1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD.
      Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 555.135.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 521.552.000,- atau 93.95%, dengan indikator kinerja

keluaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun dengan target 3 unit terealisasi 100%.

2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.191.639.200,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.998.805.475,- atau 91.20%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 17 unit terealisasi 100%.
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 586.339.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 460.221.100,- atau 78.49%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat dengan target 3 unit terealisasi 100%.
4. Pengadaan Mebel PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 86.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 85.485.000,- atau 99.40%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia dengan target 7 paket terealisasi 100%.
5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 21.600.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 21.600.000,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik dengan target 144 peserta didik terealisasi 100%.
6. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 533.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 530.505.000,- atau 99.53%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia dengan target 8 paket terealisasi 100%.
7. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.257.275.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.255.708.100,- atau 99.88%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar dengan target 1.256 peserta didik terealisasi 100%.
8. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 96.060.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 44.035.500,- atau 45.84%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi dengan target 520 orang terealisasi 100%.
9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 67.247.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 67.170.100,- atau 99.88%, dengan indikator kinerja keluaran

Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen dengan target 80 satdik terealisasi 100%.

10. Pengelolaan Dana BOP PAUD.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 16.651.140.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 16.593.133.000,- atau 99.65%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP dengan target 1.198 satdik terealisasi 100%.
11. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Paud.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 57.017.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. 56.861.500,- atau 99.73%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD dengan target 1.198 satdik terealisasi 100%.
12. Pengembangan konten digital untuk pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 14.250.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 14.223.500,- atau 99.81%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan dengan target 5 konten digital terealisasi 100%.
13. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 31.960.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 31.884.200,- atau 99.76%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan dengan target orang terealisasi 100%.
14. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.808.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.798.200,- atau 99.80%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan target 1 dokumen terealisasi 100%.
15. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.808.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.798.200,- atau 99.80%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dengan target 1 dokumen terealisasi 100%.
16. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 409.130.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 396.697.000,- atau 96.96%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun dengan target 2 ruang terealisasi 100%.
17. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 10.100.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.470.000,- atau 93.76%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi dengan target 4 komunitas terealisasi 100%.
18. Pembangunan Ruang Kelas Baru.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 204.565.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 173.872.000,- atau 85%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah dengan target 1 ruang terealisasi 100%.

19. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 24.999.800,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 17.232.849,- atau 68.93%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi dengan target 762 satuan pendidikan terealisasi 100%.
20. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 48.680.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 47.463.000,- atau 97.50%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia dengan target 1.217 paket terealisasi 100%.

D. Pengelolaan Pendidikan Nonfformal/Kesetaraan.

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/kesetaraan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 25.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik dengan target 50 peserta didik terealisasi 100%.
2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 6.210.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.186.800,- atau 99.63%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kuali kasi dengan target 17 orang terealisasi 100%.
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 10.950.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 10.928.250,- atau 99.80%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen dengan target 25 satdik terealisasi 100%.
4. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.685.610.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.579.170.000,- atau 93.69%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP dengan target 25 satdik terealisasi 100%.
5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 6.350.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.327.000,- atau 99.64%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan

Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan target 60 orang terealisasi 100%.

6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.460.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.451.000,- atau 99.80%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan target 1 dokumen terealisasi 100%.
7. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.490.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.480.500,- atau 99.79%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan dengan target 1 dokumen terealisasi 100%.
8. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.550.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.037.000,- atau 88.73%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi dengan target 2 komunitas terealisasi 100%.
9. Pengadaan Perlengkapan Sekolah.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 20.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 19.490.000,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia dengan target 100 paket terealisasi 100%.
10. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.766.889.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.724.159.989,- atau 97.58%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dengan target 100 paket terealisasi 100%.

3. Program Pengembangan Kurikulum.
   A. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
      1. Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 29.160.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 29.093.500,- atau 99.77%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun dengan target 1 dokumen terealisasi 100%.

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
   A. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
      1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.120.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar

Rp. 611.000,- atau 54.55%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan target 2 dokumen terealisasi 100%.

2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.206.533.400,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.639.807.800,- atau 89.12%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan target 4 laporan terealisasi 100%.

5. Rogram Pengendalian Perizinan Pendidikan.
   A. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
      1. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.710.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.702.000,- atau 99.78%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan target 1 dokumen terealisasi 100%.
6. Rogram Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
   A. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya.
      1. Pembinaan Muatan Lokal.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi anggaran sebesar Rp. 183.916.275,- atau 91.96%, dengan indikator kinerja keluaran Persentase Sekolah Dasar (SD) Yang Menerapkan Muatan Lokal Berbasis Budaya Persentase Lembaga PAUD Yang Menerapkan Pengasuhan Peserta Didik Berbasis Budaya Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yang Menerapkan Muatan Lokal Berbasis Budaya dengan target 3 laporan terealisasi 100%.

Sedangkan realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan sampai dengan triwulan ke empat tidak ada.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi program/kegiatan yang direncanakan sampai dengan triwulan ke empat adalah rata-rata dikarenakan nilai kontrak yang terdapat sisa dan sisa anggaran disetor kembali ke kasda.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang direncanakan sampai dengan triwulan ke empat adalah rata-rata berkat pekerjaan fisik dilapangan yang bisa mencapai 100%, termasuk realisasi keuangannya juga mencapai 100% dikarenakan pada saat perubahan dilakukan efisiensi disesuaikan dengan kebutuhan riil dilapangan.

Sampai dengan triwulan ke empat tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target.

Sehingga rata-rata pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dapat terealisasi sesuai dengan target capaian program yang ada di Renstra.
Dari kondisi tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan, maka Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil adalah selalu meningkatkan koordinasi antar Bidang dan Subbag serta SKB dalam mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mencapai target program Renstra yang telah ditetapkan. Jika pekerjaan fisik dilapangan sudah mencapai 100% namun terdapat sisa dana, maka pada saat pelaksanaan perubahan anggaran dilakukan efisiensi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil dilapangan.

Perkiraan realisasi capaian program/kegiatan tahun 2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.
   A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 16.395.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.395.000,- atau 100%, dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen, terealisasi 100%.
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.725.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.725.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen terealisasi 100%.
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.910.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.910.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen terealisasi 100%.
      4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 6.080.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.760.600,- atau 94,75 %, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen terealisasi 100%.
      5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA/SKPD.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.225.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.225.000,- atau 100 %, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Perubahan DPA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen terealisasi 100%.
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 61.475.118,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.475.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan terealisasi 100%.

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 85.520.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.520.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan, terealisasi 100%.
8. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 167.214.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 167.214.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 data terealisasi 100%.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 571.185.378.048,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 571.185.378.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 78.748 Orang/Bulan terealisasi 100%.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.560.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.560.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen terealisasi 100%.
3. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.407.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.407.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen terealisasi 100%.
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 7.601.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.601.500,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 24 Dokumen terealisasi 100%.
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 25.450.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.435.495,- atau 99,94%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan terealisasi 100%.
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 300.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 300.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah

Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen terealisasi 100%.

7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 152.222.100,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.222.100,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan terealisasi 4 laporan atau 100%.

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 500.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 500.000,- atau 500.000%, dengan kinerja keluaran Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen terealisasi 100%.
2. Koordinasi dan Penilaian Barang milik Daerah SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 8.850.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.850.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan terealisasi 100%.
3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 8.100.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.100.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan terealisasi 100%.
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 703.560.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 703.560.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan terealisasi 100%.
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 14.020.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.020.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan terealisasi 100%.

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 106.725.600,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 106.725.600,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen terealisasi 100%.
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.960.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.960.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen terealisasi 100%.

3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 118.835.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 118.835.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 300 orang terealisasi 100%.

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 16.376.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.376.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 21 paket terealisasi 100%.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 513.837.250,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 513.837.250,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 132 paket terealisasi 100%.
3. Penyediaan peralatan Rumah Tangga.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 186.291.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 186.291.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 29 paket terealisasi 100%.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 48.460.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.460.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 59 paket terealisasi 100%.
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.200.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket terealisasi 100%.
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 10.840.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.840.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan 12 Laporan terealisasi 100%.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 137.353.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.353.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan terealisasi 100%.

8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 243.345.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 243.345.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen terealisasi 100%.

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 460.007.816,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 460.007.800,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan terealisasi 100%.
   2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
      Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 322.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 322.000.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan terealisasi 100%.
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
      Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 66.160.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 66.160.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6 laporan terealisasi 100%.

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   1. PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
      Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 172.600.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 172.600.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 72 unit terealisasi 100%.
   2. Pemeliharaan Mebel
      Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Mebel yang Dipelihara 100 unit terealisasi 100%.
   3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
      Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 88.706.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.706.000,- atau 88.706.000%, dengan kinerja keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 56 unit terealisasi 100%.
   4. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
      Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 234.795.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi

anggaran sebesar Rp. 234.795.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 unit terealisasi 100%.

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 26.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.000.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 54 unit terealisasi 100%.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN.
   A. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
      1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.781.395.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.781.395.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 unit terealisasi 100%.
      2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 174.625.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 174.625.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 ruang terealisasi 100%.
      3. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 202.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 202.000.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 ruang terealisasi 100%.
      4. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 331.160.500,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 331.160.500,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 600 Peserta Didik terealisasi 100%.
      5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 7.200.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 180 orang terealisasi 100%.
      6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 201.440.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 201.440.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 578 orang terealisasi 100%.

7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 64.305.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.305.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 40 Satuan Pendidikan terealisasi 100%.
8. Pengelolahan Dana BOS Sekolah Dasar.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 45.448.800.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.448.800.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 464 satdik terealisasi 100%.
9. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 126.380.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 126.380.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 464 orang terealisasi 100%.
10. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 10.350.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.340.000,- atau 99,9%, dengan kinerja keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi unutk pendidikan 40 orang terealisasi 100%.
11. Pengembangan konten digital untuk pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 18.999.800,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.946.470,- atau 99,72%, dengan kinerja keluaran Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 7 konten digital terealisasi 100%.
12. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 46.540.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.540.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 210 orang terealisasi 100%.
13. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 9.300.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.300.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang pendidikan 1 dokumen terealisasi 100%.
14. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 13.300.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 13.300.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 dokumen terealisasi 100%.

15. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 11.300.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.300.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 komunitas terealisasi 100%.
16. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 23.325.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.325.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 kegiatan terealisasi 100%.
17. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 71.400.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.400.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia 178 paket terealisasi 100%.
18. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp 431.112.060,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 431.112.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi 4 unit terealisasi 100%.
19. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 20.140.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.140.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan 464 orang terealisasi 100%.
20. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 229.825.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 229.825.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 464 satdik terealisasi 100%.
21. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.657.350.033,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.657.350.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 ruang terealisasi 100%.
22. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 89.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.000.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 178 Peserta Didik terealisasi 100%.
23. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 424.056.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 424.056.000,- atau 100%, dengan kinerja

keluaran Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 3 paket terealisasi 100%.

B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

1. Pembangunan ruang Unit Kesehatan Sekolah.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 349.184.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 349.184.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1 ruang terealisasi 100%.
2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.439.951.510,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.439.951.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 6 unit terealisasi 100%.
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.236.973.801,- dan sampai dengan bulan Desemebr 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.236.973.800,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 unit terealisasi 100%.
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 173.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 173.000.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 340 peserta didik terealisasi 100%.
5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 326.938.600,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 326.938.600,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 4.857 Peserta Didik terealisasi 100%.
6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 7.200.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkriaan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 180 orang terealisasi 100%.
7. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 147.999.200,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 147.999.200,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 629 orang terealisasi 100%.

8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 75.367.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.367.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 109 satdik terealisasi 100%.
9. Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 28.374.570.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.374.570.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 109 satdik terealisasi 100%.
10. Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 73.820.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.820.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 218 orang terealisasi 100%.
11. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 14.100.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.100.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi unutk pendidikan 109 orang terealisasi 100%.
12. Pengembangan konten digital untuk pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 13.450.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.450.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 70 konten digital terealisasi 100%.
13. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 14.650.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.650.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 109 orang terealisasi 100%.
14. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang 1 dokumen terealisasi 100%.
15. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 18.300.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.300.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 dokumen terealisasi 100%.
16. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 14.240.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.240.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 komunitas terealisasi 100%.

17. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 452.606.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 452.606.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 109 satuan pendidikan terealisasi 100%.
18. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 180 orang terealisasi 100%.
19. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 92.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.500.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 150 paket terealisasi 100%.
20. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 312.998.600,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 312.998.600,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 5 paket terealisasi 100%.

C. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 72.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 1 unit terealisasi 100%.
2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 78.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 78.500.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 157 peserta didik terealisasi 100%.
3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 6.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.500.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 180 orang terealisasi 100%.
4. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 145.925.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi

anggaran sebesar Rp. 145.925.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 362 orang terealisasi 100%.

5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 56.414.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.414.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 122 satdik terealisasi 100%.
6. Pengelolaan Dana BOP PAUD.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 16.052.220.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.052.220.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1.184 satdik terealisasi 100%.
7. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Paud.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 63.275.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.275.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 1.184 orang terealisasi 100%.
8. Pengembangan konten digital untuk pendidikan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 14.460.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.460.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 3 konten digital terealisasi 100%.
9. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 22.780.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.780.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 40 orang terealisasi 100%.
10. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.878.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.878.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang pendidikan 1 dokumen terealisasi 100%.
11. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.878.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.878.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 dokumen terealisasi 100%.
12. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 6.100.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.100.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 4 komunitas terealisasi 100%.

13. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 48.680.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.680.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1.217 Paket terealisasi 100%.
14. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 9.753.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.753.000.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 596 paket terealisasi 100%.
15. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD.
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.266.530.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.266.530.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 1.184 Peserta Didik terealisasi 100%.
16. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 383.760.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 383.760.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 4 ruang terealisasi 100%.
17. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
    Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 2.882.215.800,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.882.215.800,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 26 ruang terealisasi 100%.

D. Pengelolaan Pendidikan Nonfformal/Kesetaraan.
1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/kesetaraan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 39.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.500.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 79 peserta didik terealisasi 100%.
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 11.885.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.885.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 26 satdik terealisasi 100%.
3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.907.080.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.907.080.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 26 satuan pendidikan terealisasi 100%.
4. Peningkatan Kapasitas Pengolahan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.

Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.100.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.100.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 26 orang terealisasi 100%.

5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.500.000,- dan sampai dengan bulan Desemebr 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang pendidikan 1 dokumen terealisasi 100%.
6. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.560.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.492.000,- atau 98,51%, dengan kinerja keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 dokumen terealisasi 100%.
7. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik.
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 28.500.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.500.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 95 paket komunitas terealisasi 100%.
8. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
   Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.418.592.500,- dan sampai dengan bulan Desemebr 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.418.592.500,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 2.656 orang terealisasi 100%.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM.
   A. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
      1. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 dokumen terealisasi 100%.
      2. Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 dokumen terealisasi 100%.
   B. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
      1. Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 9.905.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi

anggaran sebesar Rp. 9.905.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun 2 dokumen terealisasi 100%.

4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.
   A. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
      1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 14.300.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.300.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 4 Dokumen terealisasi 100%.
      2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 4.453.858.800,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.453.858.800,- atau 26,46%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 4 Laporan terealisasi 100%.

5. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN.
   A. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
      1. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 3.660.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.660.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen terealisasi 100%.

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
   A. Pendidikan Berbasis Budaya
      1. Pembinaan Muatan Lokal
         Pagu anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2025 perkiraan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%, dengan kinerja keluaran Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal 1 laporan terealisasi 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, maka kedudukan Dinas merupakan unsur

pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum dibidang pendidikan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pendidikan;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan;
5. Pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal;
7. Penyusunan dan pengembangan kurikulum;
8. Pembinaan administrasi sekolah;
9. Peningkatan manajemen mutu pendidikan;
10. Pengoordinasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Dinas;
11. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pendidikan;
12. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pendidikan;
13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan; dan
14. Pengelolaan UPT.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Aksesibilitas dan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.21	7.32	7.6	7.35	97.99	Sangat Baik	7.86

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kualitas pendidikan meningkat	Harapan lama sekolah	Tahun	12.97	13.39	13.00	13.40	103.08	Sangat Baik	13.02
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Indikator: Nilai AKIP PD Tahun N-1	Skor	77.11	83.45	83.52	83,51	104,29	Sangat Baik	80.13

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

A. Sasaran 1: Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat

Kinerja sasaran Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Penjelasan hubungan sasaran. indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat	Rata-rata Lama Sekolah	RLS diperoleh dari Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$ Keterangan: RLS=Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas N = jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas X_i = Lama sekolah penduduk ke-I yang berusia 25 tahun
		Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah diperoleh dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi: $EYS_a^t = FKx \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : EYS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t FKx = Faktor Koreksi E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
			i = Usia (a, a+1, ..., n) ; P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Capaian Sasaran
Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1 Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat	Rata-rata lama sekolah	7,6	7.35	96.71	Sangat Tinggi
	Harapan Lama Sekolah	13,00	13.40	103.07	Sangat Tinggi

tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 96,71% untuk rata-rata lama sekolah dan 103.07% untuk harapan lama sekolah termasuk dalam kategori sangat tinggi. Untuk rata-rata lama sekolah dapat tercapai 7,35 tahun dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 7,6 tahun dan harapan lama sekolah tercapai 13,40 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 13 tahun.

Realisasi kinerja secara keseluruhan pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022-2024
serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat	Rata-rata lama sekolah	7.31	7.32	7.35	7.86	93.51
	Harapan Lama Sekolah	12.99	13.39	13.40	13.02	102.92

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator Persentase APK PAUD. APK SD. APK SMP. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar; Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama; dan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan

menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan yang dapat tercapai;

2) Program Pengembangan Kurikulum dengan indikator Persentase sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal dapat tercapai.
3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilaksanakan.
4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan indikator Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan dapat terlayani.
5) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator diterapkannya pendidikan berbasis pada satuan pendidikan.

Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah dengan Realisasi Level Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Kota di DIY

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, capaian Rata-rata Lama Sekolah untuk level nasional pada tahun 2024 adalah 8,85 tahun dan Harapan Lama Sekolah adalah 13,21 tahun. Dengan demikian, capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul yang sebesar 7,35 masih lebih rendah dari capaian nasional sebesar 8,85 tahun. Untuk level nasional bisa diartikan bahwa rata-rata lama tahun bersekolah yang dijalani oleh penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas adalah 8,85 setara jenjang kelas 8 atau putus sekolah saat semester 2 kelas 9 SMP. Sedangkan capaian rata-rata lama sekolah penduduk Gunungkidul pada jenjang kelas 7 SMP atau putus sekolah kelas 8 SMP.

Untuk capaian Harapan Lama Sekolah, capaian Gunungkidul lebih tinggi dari capaian nasional yang Harapan Lama Sekolahnya 13,21 tahun dan Gunungkidul adalah 13,40 tahun. Dengan demikian, anak-anak penduduk Gunungkidul yang pada tahun 2024 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,40 tahun atau hampir setara dengan lamanya masa pendidikan hingga setingkat Diploma II.

Adapun perbandingan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Kabupaten Kota Lain di DIY tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 2.7 Rata-rata Lama Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
Kulon Progo	9,17	9,18	9,20
Bantul	9,59	9,79	9,81
Gunungkidul	7,31	7,32	7,35
Sleman	10,94	11,01	11,33
Kota Yogyakarta	11,89	12,11	12,12
Prov. D.I. Yogyakarta	9,75	9,83	9,92

Gambar 2.8 Angka Harapan Lama Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
Kulon Progo	14,38	14,48	14,49
Bantul	15,48	15,61	15,63
Gunungkidul	13,33	13,39	13,40
Sleman	16,76	16,77	16,79
Kota Yogyakarta	17,61	17,62	17,66
Prov. D.I. Yogyakarta	15,65	15,66	15,70

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Dalam gambar 2.7 dan 2.8 diatas secara jelas memperlihatkan bahwa RLS dan angka HLS Kabupaten Gunungkidul menempati posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator, dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi jumlah anak usia 5- 6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikalikan 100 persen
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah siswa PAUD dibagi jumlah penduduk usia 5-6 tahun dikalikan 100 persen
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Sederajat	Jumlah Siswa SD/MI/SDLB/ sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB / Sederajat	Jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikalikan 100 persen
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD dibagi jumlah Penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP dibagi jumlah Penduduk usia 13-15 tahun dikalikan 100 persen
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar dipendidikan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
			dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	kesetaraan dibagi jumlah Penduduk usia 7-18 tahun yang tidak sekolah dikalikan 100 persen
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah sekolah jenjang PAUD. SD dan SMP yang telah menerapkan muatan lokal wajib dan pilihan dibagi jumlah sekolah keseluruhan jenjang pendidikan tertentu dikalikan 100 persen
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu yang telah terpenuhi PTK nya dibagi jumlah sekolah keseluruhan jenjang pendidikan tertentu dikalikan 100 persen
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan	Jumlah permohonan penerbitan izin pendirian sekolah swasta yang terlayani dibagi jumlah pengajuan permohonan penerbitan izin pendirian sekolah swasta dikalikan 100 persen

Capaian kinerja program tersaji dalam tabel 2.10 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat sebagai berikut :

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Program pada
Sasaran Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	1. 96.71 2. 103.07	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD	94,21	89,98	Sangat Tinggi
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	57.4	147,26	Sangat Tinggi
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Sederajat	92.19	90,91	Sangat Tinggi
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat	99.27	94,88	Sangat Tinggi

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94.49	94.84	Sangat Tinggi
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99.64	99.14	Sangat Tinggi
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	71,73	26,25	Rendah
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal	100	100	Sangat Tinggi
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	51	30,91	Sangat rendah
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase sekolah/ lembaga yang telah memiliki perizinan	100	100	Tinggi
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya	20,99	100	Tinggi
				Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya	23,87	100	Tinggi
				Persentase Sekolah Menengah	100	100	Tinggi

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
				Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya			
Rata-rata Capaian Indikator Program					68.40	88.68	Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat rata-rata 99.56%. sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat tersebut didukung dari:

1. Hasil Capaian Program Pengelolaan Pendidikan

a. Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. Sekolah Menengah Pertama. PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dapat dilaksanakan dengan baik;
Angka Partisipasi Kasar PAUD sangat tinggi. dari target 57,4% yang direncanakan dapat terealisasi 147,26% dengan capaian 256,55%

Gambar 2.3 Partisipasi anak usia 5-6 Tahun di PAUD
TK ABA Teguhan Playen dan TK Masyithoh Ngalang 1

2. Hasil Capaian Program Pengembangan Kurikulum

a. Program pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target 100%. hal ini karena penerapan kurikulum muatan lokal dapat diterapkan oleh seluruh satuan Pendidikan pada semua jenjang;

Gambar 2.4 Pengembangan Kurikulum

B. Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran. indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator

1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	*Nilai AKIP PD yang digunakan untuk capaian pada tahun n adalah nilai AKIP PD tahun n-1* Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJiP/033 tanggal 28 Maret 2024, adalah 83,51 masuk kategori A (Memuaskan)

Tabel 2.12 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2024			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	80.07	83,51	104,29	Sangat baik

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 80,07 terealisasi 83,51 sehingga capaian kinerja sebesar 104.29%. Dalam LHE AKIP Dinas Pendidikan tahun 2023 terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.

Saran dan rekomendasi sesuai hasil evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan implementasi SAKIP di Dinas Pendidikan. Tindak lanjut atas catatan saran/ rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	-	-
2	Pengukuran Kinerja	1. Melakukan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan reviu SOP Pengumpulan Data Kinerja
		2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran	Telah dilaksanakan koordinasi dan sosialisasi hasil evaluasi SAKIP dan evalausi berkala triwulanan

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		kinerja	
3	Pelaporan Kinerja	Menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/ provinsi/daerah sekitarnya	Realisasi kinerja RLS dan HLS pada level nasional/provinsi/kabupaten kota telah disajikan dalam pembahasan sasaran 1 di Bab III LKJIP ini
4	Evaluasi Akuntabilitas	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

Tabel 2.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	81,76	83.45	83,51	80.13	104.65

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 yaitu 83.45 (A), pada tahun 2023 naik menjadi 83,51 (A). Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran. indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
2	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$

Tabel 2.16 Capaian Kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	104,29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat yang didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul selain mengampu sasaran strategis juga mengampu SPM urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini. pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada tahun 2024 indeks pencapaian SPM di angka 71,83%. Capaian SPM bidang Pendidikan ini mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2023 sebesar 74.25 %. Hal ini disebabkan karena capaian pada pendidikan kesetaraan mengalami penurunan sebesar 4,01%. Namun demikian Rapor Pendidikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2023.

Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.17
Capaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM						71,83%
1 .	Pendidikan Anak Usia Dini					82,14%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	71,98%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	18671	16800	1871	89,98%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10,15%

	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	50,77%
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	92,63	92,27	0,36	99,61%
	2 . Angka partisipasi murni	%	100	62,77	37,23	62,77%
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	81,72	86,23	4,51	100,00%
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (DIV)	%	95,29	93,75	1,54	98,38%
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	0,82	99,18	0,82%
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	11,47	88,53	11,47%
	7 . Indeks distribusi guru	%	100	0,46	99,54	0,46%
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	81,21	18,79	81,21%
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	2,16	97,84	2,16%
2 .	Pendidikan Dasar					93,17%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77,10%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	89372	86132	3240	96,37%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16,07%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	80,35%
	SD					80,09%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	91,96	90,91	1,05	98,86%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	94,16	94,84	0,68	100,00%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	63,68	80,98	17,3	100,00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	45,62	70,84	25,22	100,00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100,00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100,00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	77,26	73,95	3,31	95,72%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,29	75,26	1,03	98,65%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61,93	56,25	5,68	90,83%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	11,47	88,53	11,47%
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	0,45	99,55	0,45%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	45,25	54,75	45,25%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0,01	0	0,01	100,00%
	SMP					80,60%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	99,23	94,88	4,35	95,62%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	99,63	99,14	0,49	99,51%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	77,66	84,98	7,32	100,00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	73,42	79,98	6,56	100,00%

	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100,00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100,00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	75,97	71,51	4,46	94,13%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,43	74,23	1,8	100,00%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61,47	55,89	5,58	90,92%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	12,75	87,25	12,75%
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	0,36	99,64	0,36%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	54,56	45,44	54,56%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100,00%
3 .	Pendidikan Kesetaraan					40,17%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	21,00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2564	673	1891	26,25%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,17%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	95,87%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	100,00%
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	56,69	26,25	30,44	46,30%
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	0	0	0	100,00%
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	0	0	0	100,00%
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	100,00%
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	100,00%
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	0	0	0	100,00%
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	0	0	0	100,00%
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	0	0	0	100,00%
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100,00%
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100,00%
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100,00%
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100,00%

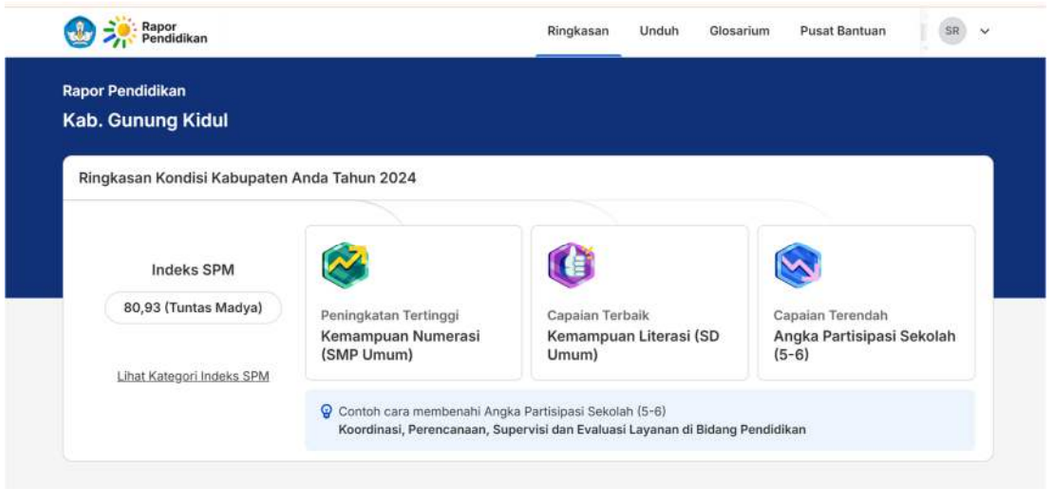

Gambar 2.17 Rapor Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Capaian Kinerja terkait Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Dalam rangka mewujudkan komitmen pembangunan berkeadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan telah melaksanakan kegiatan yang responsif gender, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang menyasar kepada kelompok rentan: perempuan dan anak.

Tabel 2.18 Jumlah Siswa SD dan SMP berdasar Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	23.353	21.484	44.837
2	SMP	12.419	11.419	23.838
Jumlah total		35.772	32.903	68.675

Sumber : Data siswa dibawah kewenangan Dinas Pendidikan Kab. Gunungkidul

Untuk kelompok rentan fakir miskin pada tahun 2024 telah direalisasikan biaya personal peserta didik sebagaimana berikut:

- Peserta Didik SD sebanyak 378 siswa sebesar Rp189.000.000
- Peserta Didik SMP sebanyak 276 siswa sebesar Rp138.000.000
- Peserta Didik PAUD sebanyak 144 siswa sebesar Rp21.600.000
- Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan sebanyak 50 orang sebesar Rp25.000.000.

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah dicapai, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama. Secara rinci hasil analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 seperti dalam tabel 2.19 dibawah ini.

Tabel 2.19
Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Terhadap Renstra PD Tahun 2021-2026
Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian Target Renstra PD		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IKU										
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,47	7,6	7,73	7,39	7,32	7,35	7,37	7,39	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,99	13	13,01	13,44	13,39	13,4	13,42	13,44	
3	Nilai AKIP	Skor	80,04	80,07	80,1	83,54	83,45	83,51	83,52	83,54	
	SPM										

1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	N/A	N/A	97,42	98,96	N/A	95,87	97,42	98,96	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan
2	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	N/A	N/A	99,61	99,87	N/A	99,34	99,61	99,87	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan

3	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	N/A	N/A	14,37	15,13	N/A	13,61	14,37	15,13	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	N/A	N/A	69,32	71,82	N/A	66,82	69,32	71,82	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
5	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	N/A	N/A	58,61	61,51	N/A	55,71	58,61	61,51	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan

6	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	N/A	N/A	80,58	81,68	N/A	79,48	80,58	81,68	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
7	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	N/A	N/A	69,41	70,91	N/A	67,91	69,41	70,91	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Nilai	N/A	N/A	89,31	93,32	N/A	88,13	89,31	93,32	Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/kabupaten.

9	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Nilai	N/A	N/A	95,71	96,21	N/A	93,76	95,71	96,21	Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di kota/kabupaten
10	Iklim keamanan SD	Nilai	N/A	N/A	77,54	78,44	N/A	76,64	77,54	78,44	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
11	Iklim keamanan SMP	Nilai	N/A	N/A	74,15	75,65	N/A	72,65	74,15	75,65	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar

12	Iklim kebinekaan SD	Nilai	N/A	N/A	75,26	76,26	N/A	74,26	75,26	76,26	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
13	Iklim kebinekaan SMP	Nilai	N/A	N/A	73,3	74,3	N/A	72,3	73,3	74,3	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar
14	Iklim inklusivitas SD	Nilai	N/A	N/A	60,94	63,44	N/A	58,44	60,94	63,44	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
15	Iklim inklusivitas SMP	Nilai	N/A	N/A	60,96	63,36	N/A	58,56	60,96	63,36	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar

1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	92,63	94,21	95,26	N/A	91,18	89,98	97,42	N/A	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	94,16	94,49	94,81	N/A	94,70	94,84	94,81	N/A	Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7 - 12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%

3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	99,63	99,64	99,66	N/A	97,72	99,14	99,66	N/A	Jumlah anak usia 13 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13 - 15tahun pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	56,69	71,73	81,75	N/A	30,72	26,25	81,75	N/A	Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar dipendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang

											bersangkutan
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	56,90	57,40	57,90	N/A	158,72	147,26	57,90	N/A	Jumlah siswa PAUD dibagi jumlah penduduk usia 0-6 tahun X 100 persen
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	91,96	92,19	92,42	N/A	90,46	90,91	92,42	N/A	Jumlah siswa SD dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun X 100 persen

7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	99,23	99,27	99,30	N/A	96,06	94,88	99,30	N/A	Jumlah siswa SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun X 100 persen
8	Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah sekolah jenjang PAUD, SD dan SMP yang telah menerapkan muatan lokal wajib dan pilihan dibagi jumlah sekolah keseluruhan jenjang pendidikan tertentu dikali 100 persen
9	Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	49,22	50,11	51,89	55,78	26,04	30,91	51,89	55,78	Jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu yang telah terpenuhi PTKnya dibagi jumlah sekolah keseluruhan jenjang pendidikan tertentu dikali 100 persen

10	Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah permohonan penerbitan izin pendirian sekolah swasta yang terlayani/Jumlah pengajuan permohonan penerbitan izin pendirian sekolah swasta kali 100%
11	Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang disediakan dan didistribusikan oleh pemerintah daerah ke Masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	0,50	N/A	N/A	N/A	0,50	**Jumlah bahasa dan sastra daerah yang disediakan dan didistribusikan oleh pemerintah daerah ke masyarakat / Jumlah bahasa dan sastra daerah yang ada di suatu wilayah kali 100%**
12	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	Persen	100,00	100,00	100,00	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	

13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Skor	N/A	N/A	80,01	83,54	83,45	83,51	80,01	83,54	Nilai AKIP PD yang digunakan untuk capaian pada tahun n adalah nilai AKIP PD tahun n-1Predikat AA (Nilai >90-100)Predikat A (Nilai >80-90)Predikat BB (Nilai >70-80)Predikat B (Nilai >60-70)Predikat CC (Nilai >50-60)Predikat C (Nilai >30-50)Predikat D (Nilai >0-30)
14	Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis budaya	Persen	13,12	18,49	23,87	N/A	51,50	100,00	51,52	N/A	Dihitung berdasarkan jumlah Sekolah Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal membatik dibagi jumlah Sekolah Dasar pada kabupaten

											yang bersangkutan dikali 100%
15	Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis budaya	Persen	100,00	100,00	100,00	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	Dihitung berdasarkan jumlah Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kurikulum muatan lokal membatik dibagi jumlah Sekolah Menengah Pertama pada kabupaten yang bersangkutan dikali 100%
16	Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya	Persen	12,59	16,79	20,99	N/A	12,59	100,00	20,99	N/A	Dihitung berdasarkan Jumlah lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya dibagi Jumlah lembaga PAUD pada Kabupaten yang bersangkutan x 100%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, selama tahun 2024 Dinas Pendidikan menghadapi hambatan dan permasalahan antara lain :

a. Kondisi sosial budaya masyarakat yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendidikan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih berada pada angka 7,35 tahun dan menjadi nilai terendah dibandingkan dengan Kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Perbedaan pemahaman tentang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
c. Belum terpenuhinya kualitas maupun kuantitas guru ASN pada sekolah negeri.
d. Masih rendahnya kesadaran dan minat masyarakat untuk mengikuti program Pendidikan Kesetaraan;
e. Potensi anak putus sekolah dikarenakan pengaruh lingkungan sosial, ekonomi dan kemudahan akses informasi;
f. Belum maksimalnya penerapan kurikulum merdeka dikarenakan perlunya penyesuaian metode pembelajaran serta keterlibatan orang tua, lingkungan serta semua stakeholder terkait;
g. Tidak adanya dukungan pendanaan dari daerah (BOSDA) untuk satuan pendidikan;
h. Kondisi bangunan sekolah masih banyak yang rusak baik karena bencana ataupun usia bangunan sudah tua; diperlukan koordinasi dengan bagian aset Pemerintah Daerah untuk pencatatan dan penghapusan aset sekolah negeri;

Untuk mewujudkan visi dan misi ketiga kepala daerah terpilih 2021 – 2026 yaitu Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah, maka rekomendasi dan catatan strategis pada tahun 2026 untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul antara lain :

a. Upaya Pemetaan, pemerataan dan peningkatan kualitas guru;
b. Mendorong pendidik untuk meningkatkan kualitas melalui komunitas belajar pendidik;
c. Upaya Pemenuhan Guru ASN pada Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD dan SMP;
d. Berkoordinasi dengan BKPPD dan BKN untuk pengajuan formasi guru ASN. penataan ulang guru ASN yang diperbantukan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
e. Upaya Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah;
f. Optimalisasi peran pemangku kepentingan pendidikan di semua jenjang untuk terus mendorong warga masyarakat yang berusia diatas 25 tahun agar meneruskan pendidikannya melalui program Pendidikan kesetaraan.;
g. Melakukan analisis dan mengajak kembali bersekolah terhadap anak putus sekolah;
h. Upaya mengoptimalkan penerapan kurikulum merdeka;
i. Mengoptimalkan pendanaan yang ada dengan cost sharing;
j. Upaya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan yang rusak.

2.3.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2024

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pendidikan pada tahun 2024 ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut, diantaranya adalah :

a. Pekerjaan fisik 100%, sedang realisasi keuangan tidak 100% karena melalui proses tender penyedia melakukan penawaran lebih rendah dari HPS.
b. Adanya THL yang mengundurkan diri.
c. Adanya kegiatan yang dilaksanakan setelah memasuki batas waktu akhir pencairan.
d. Penyediaan Pendidik dan Tendik SD ,SMP , dan PAUD Berdasarkan Surat Edaran Bersama 3 menteri (MendikbudRistek ,Mendagri dan BKN nomor 1 Tahun 2024, Nomor100.4.4.2/2028/57, Nomor 5 Tahun 2024) Tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah telah disampaikan ke BKPPD dan SETDA. Tetapi pelaksanaan Pelantikan terkendala aturan BKPPD dan Setda ,terkait Pelantikan dimasa 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah Penetapan Kepala Daerah tidak boleh ada Pelantikan tanpa ijin dan surat dari MENDAGRI ke Pemerintah Daerah.

2.3.2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian target kinerja

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

a. Penyesuain target capaian pada Tahun Anggaran 2026.
b. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan.
c. Efisiensi alokasi belanja.
d. Melakukan koordinasi dengan pihak ke-3 secara intens terkait penyelesaian kewajiban dan tanggungjawabnya.

2.3.3. Dampak pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional

Dampak yang ditimbulkan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah antara lain :

a. Peningkatan kapasitas Aparatur Perangkat Daerah dalam pemberian layanan pendidikan.
b. Peningkatan mutu layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
c. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Pendidikan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

Tabel. 2.20
Tantangan dan Peluang

No	Tantangan	Peluang
1	Arus reformasi birokrasi mengarah pada harapan	Paradigma pembangunan

	perbaikan kinerja birokrasi yang bermuara pada meningkatnya kinerja hasil pembangunan di seluruh sektor, termasuk terkait dengan sektor pendidikan. Pemenuhan jumlah tenaga pendidik dan layanan pendidikan yang berkualitas saat ini menjadi tuntutan yang besar yang memerlukan berbagai pembenahan baik yang menyangkut kinerja internal maupun eksternal. Paradigma tolok ukur kinerja pembangunan yang terkonsentrasi pada output mulai bergeser pada kinerja outcomes bahkan impact and benefit. Paradigma pembangunan saat ini tidak hanya sebatas pemenuhan infrastruktur tapi harus di imbangi dengan percepatan layanan administrasi dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha.	partisipatif yang mengedepankan prinsip keterlibatan multi sektor dan stakeholders merupakan peluang yang mendorong perbaikan tata kelola infrastruktur pendidikan di daerah.
2	Integrasi (keterpaduan) yang berbasis teknologi informasi dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian lintas sektoral sudah tidak hanya dalam satu daerah saja melainkan sudah lintas wilayah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan lainnya (stakeholders).	Era desentralisasi yang ditandai oleh kewenangan setiap daerah dalam mengelola sumber daya produktif untuk tata kelola pemerintahan yang baik, memungkinkan bagi setiap daerah untuk mengembangkan kerja sama sinergis lintas wilayah, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan
3	Pengembangan prasarana/ sarana di lingkungan Dinas Pendidikan terutama dalam mendekatkan pelayanan dan proses pengajaran, dan kebijakan	Agenda perbaikan kualitas pendidikan selalu didengungkan oleh masyarakat maupun LSM juga secara nasional menjadi tuntutan dan

	daerah baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Juga koordinasi lintas sektoral merupakan tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan akses informasi yang aktual dan transparan.	cita-cita semua lembaga negara. Persoalan tata kelola pemerintahan tidak lagi menjadi masalah internal lembaga melainkan menjadi perhatian masyarakat luas sebagai wujud kepedulian akan adanya pendidikan yang baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

a. Tantangan

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Dengan asumsi bahwa dalam kondisi yang normal, rata-rata lama sekolah di suatu wilayah tidak akan turun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini dimana Kabupaten Gunungkidul berada di urutan paling rendah.

Tabel. 2.21

No	Kabupaten/ Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kulonprogo	8.66	8.86	9.02	9.17	9,18
2	Bantul	9.54	9.55	9.57	9.59	9,79
3	**Gunungkidul**	**7.13**	**7.21**	**7.30**	**7.31**	**7,32**
4	Sleman	10.67	10.91	10.92	10.94	11,01
5	Yogyakarta	11.45	11.46	11.72	11.89	12,11

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

2) Angka Partisipasi sekolah

Sebagai aspek dasar dalam pembentukan SDM berkualitas, Pemerintah kemudian menetapkan program wajib belajar 12 tahun yang membutuhkan kerjasama dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan program tersebut. Keikutsertaan masyarakat ditinjau melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase dan terdiri dari 2 unsur yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

APM merupakan persentase penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Sedangkan, APK merupakan persentase penduduk yang masih sekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Secara rinci tersaji dalam tabel berikut.

Tabel. 2.22
Angka Partisipasi Sekolah

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (Persen)									
	APM					APK				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI	99.59	99.59	99.42	99.02	98,89	104.00	105.25	103.62	104.54	103,56
SMP/MTs	93.20	93.20	93.70	90.93	83,03	107.90	105.95	108.11	101.01	92,83

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul-Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

3) Disrupsi teknologi
   Kemajuan sains dan teknologi, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya pola belajar dan bermain anak yang sangat berpengaruh terhadap implementasi pendidikan karakter bagi mereka.
4) Semakin meningkatnya usia penduduk sekolah maka perlu diimbangi dengan infrastruktur sebagai salah satu upaya meningkatkan daya serap pendidikan.
5) Semakin meningkatnya layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Swasta atau Yayasan Pendidikan maka perlu ditingkatkan kualitas dalam pengelolaan pendidikan.
6) Kesenjangan dalam hal pemerataan guru yang berkualitas serta tata kelola pendidikan.
7) Penguasaan dan penerapan teknologi sebagai penunjang dalam pelaksanaan program layanan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas.

b. Peluang
   1) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut memiliki dampak terhadap peningkatan daya serap pendidikan.
   2) Bidang Pendidikan masuk kedalam salah satu prioritas pembangunan, implikasinya bahwa pendidikan menjadi salah satu program yang bersifat strategis.
   3) Seiring dengan meningkatnya kelompok usia sekolah maka meningkat pula lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola secara mandiri oleh swasta atau Yayasan Pendidikan.
   4) Dengan adanya arus globalisasi memberikan dampak positif bagi pengelolaan layanan pendidikan baik dalam hal riset, kerjasama peningkatan mutu tenaga pendidik maupun pertukaran pelajar.
   5) Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi memberikan dampak terhadap efektivitas dan efisien dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran baik melalui riset model

pembelajaran maupun pengenalan teknologi dalam pembelajaran.

6) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengembangan program layanan pendidikan.
7) Program Sekolah Penggerak yang memberikan dampak positif terhadap paradigma para pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.
8) Program Guru Penggerak yang memberikan dampak positif terhadap pembelajaran dengan paradigma baru untuk meningkatkan mutu pendidikan.

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan Tahun 2026. Hasil reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 disajikan pada tabel 2.23 berikut ini :

Tabel 2.23

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

NO	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)		(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas Pendidikan				**807.499.477.535**	**Dinas Pendidikan**				**700.431.198.746**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**807.499.477.535**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**700.431.198.746**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**807.499.477.535**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**700.431.198.746**	
1	**1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Kab. Gunungkidul			**225.836.435.235**	**1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Kab. Gunungkidul			**116.058.364.050**	
								Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 SD	**96.09**		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD;	**N/A**				Skor Kemampuan Literasi SD	**71.82**		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;	**N/A**				Skor Kemampuan Numerasi SD	**61.51**		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;	**N/A**				Iklim Keamanan SD	**78.44**		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP:	**N/A**				Iklim Kebinekaan SD	**76,26**		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama	**N/A**				Iklim Inklusivitas SD	**63,44**		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar;	**N/A**				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 SMP	**99.54**		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan	**N/A**				Skor Kemampuan Literasi SMP	**81.68**		
								Skor Kemampuan Numerasi SMP	**70.91**		
								Iklim Keamanan SMP	**75.65**		
								Iklim Kebinekaan SMP	**74.30**		

										Iklim Inklusivitas SMP	**63.36**		
										Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 PAUD	**93.06**		
										Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	**93.32**		
										Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	**96.21**		
										Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	**27.85**		
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Kab. Gunungkidul**			**89.735.812.836**	**1.01.02.2.01**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Kab. Gunungkidul**			**50.117.972.800**	
				Persentase SD yang terakreditasi A	***N/A***								
				Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi A	***N/A***								
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Gunungkidul			1.450.000.000	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Gunungkidul			0	
			SDN Sawah Panggang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit				SDN Sawah Panggang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			934.740.000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			284.776.800	
			SDN Gebang Tanjungsari, SDN Tambran II, Semin, SDN Gedangan Karangmojo	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang				SDN Gebang Tanjungsari, SDN Tambran II, Semin, SDN Gedangan Karangmojo	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang		
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Gunungkidul			888.110.000	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Gunungkidul			208.417.000	
			1. SDN CABE RONGKOP, 2. SDN MULOBARU WONOSARI, 3. SDN PIYAMAN I WONOSARI, 4. SDN PRENGGUK II GEDANGSARI, 5. SDN PAYAMAN II SEMIN , 5. SDN SREPENG SEMANU, 6. SDN JETIS II SAPTOSARI, 6.SDN CUWELO I SEMANU	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang				1. SDN CABE RONGKOP, 2. SDN MULOBARU WONOSARI, 3. SDN PIYAMAN I WONOSARI, 4. SDN PRENGGUK II GEDANGSARI, 5. SDN PAYAMAN II SEMIN , 5. SDN SREPENG SEMANU, 6. SDN JETIS II SAPTOSARI, 6.SDN CUWELO I SEMANU	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang		

	1.01.02.2.01.0 006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			745.882.500	1.01.02.2.01.0 006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			410.000.000	
			1. SDN KERINGAN SEMIN, 2.SDN NGLINDUR GIRISUBO, 3. SDN TILENG II TILENG, 4. SDN WONOSARI I WONOSARI, 5. SDN WONOSARI IV, 6.SDN PONJONG I PONJONG, 7. SDN SOKA WONOSARI, 8. SDN GOMBANG II PONJONG, 9.SDN SAWAHAN PLAYEN, 10.SDN BELIK TEPUS, 11. SD MUHAMMADI YAH UNGGULAN AL-FALAH GIRISUBO	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit				1. SDN KERINGAN SEMIN, 2.SDN NGLINDUR GIRISUBO, 3. SDN TILENG II TILENG, 4. SDN WONOSARI I WONOSARI, 5. SDN WONOSARI IV, 6.SDN PONJONG I PONJONG, 7. SDN SOKA WONOSARI, 8. SDN GOMBANG II PONJONG, 9.SDN SAWAHAN PLAYEN, 10.SDN BELIK TEPUS, 11. SD MUHAMMADI YAH UNGGULAN AL-FALAH GIRISUBO	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		
	1.01.02.2.01.0 007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Gunungkidul			200.000.000	1.01.02.2.01.0 007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		
	1.01.02.2.01.0 009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			239.298.000	1.01.02.2.01.0 009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			0	
			1.SDN JURANGJERO NGAWEN, 2.SDN SAMBIREJO NGAWEN, 3. SDN JATI SEMANU. 4.SDN PLEBENGAN SEMANU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang				1.SDN JURANGJERO NGAWEN, 2.SDN SAMBIREJO NGAWEN, 3. SDN JATI SEMANU. 4.SDN PLEBENGAN SEMANU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		

	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Gunungkidul			152.562.000	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Gunungkidul			629.964.000	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Gunungkidul			123.420.000	

		1.SDN GIRISEKAR PANGGANG, 2. SDN KANIGORO TANJUNGSARI. 3 SDN KLAMPOK PURWOSARI, 4. SDN WATUSIGAR NGAWEN. 5. SDN TUNGGAKNONGKO SEMANU, 6. SDN GOMBANG I PONJONG. 7. SDN MIJAHAN II SEMANU, 8.SDN JETIS SEMANU. 9.SDN TILENG II GIRISUBO, 10. SDN CUWELO II SEMANU, 11. SDN BOHOL RONGKOP, 12.SDN PUCANGANOM I RONGKOP. 13.SDN JAMBE WONOSARI. 14.SDN BANYUBENING III KARANGMOJO. 15.SDN GROGOL I KARANGMOJO. 16.SDN PETIR I RONGKOP, 17.SDN PLEMBUTANASRI PLAYEN, 18.SDN SIGERUNG NGLIPAR. 19.SDN NGEPOSARI SEMANU, 20.SDN CANDIBARU II KARANGMOJO. 21.SDN SERUT GEDANGSARI. 22.SDN GEDANGAN I GEDANGSARI. 23.SDN PRENGGUK II GEDANGSARI. 24.SDN YUYANG RONGKOP, 25.SDN PULEIRENG TEPUS. 26.SDN SUMBERWUNGU II TEPUS. 27.SDN DUWET WONOSARI, 28.SDN SINGKAR WONOSARI.	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang			1.SDN GIRISEKAR PANGGANG, 2. SDN KANIGORO TANJUNGSARI. 3 SDN KLAMPOK PURWOSARI, 4. SDN WATUSIGAR NGAWEN. 5. SDN TUNGGAKNONGKO SEMANU, 6. SDN GOMBANG I PONJONG. 7. SDN MIJAHAN II SEMANU, 8.SDN JETIS SEMANU. 9.SDN TILENG II GIRISUBO, 10. SDN CUWELO II SEMANU, 11. SDN BOHOL RONGKOP, 12.SDN PUCANGANOM I RONGKOP. 13.SDN JAMBE WONOSARI. 14.SDN BANYUBENING III KARANGMOJO. 15.SDN GROGOL I KARANGMOJO. 16.SDN PETIR I RONGKOP, 17.SDN PLEMBUTANASRI PLAYEN, 18.SDN SIGERUNG NGLIPAR. 19.SDN NGEPOSARI SEMANU, 20.SDN CANDIBARU II KARANGMOJO. 21.SDN SERUT GEDANGSARI. 22.SDN GEDANGAN I GEDANGSARI. 23.SDN PRENGGUK II GEDANGSARI. 24.SDN YUYANG RONGKOP, 25.SDN PULEIRENG TEPUS. 26.SDN SUMBERWUNGU II TEPUS. 27.SDN DUWET WONOSARI, 28.SDN SINGKAR WONOSARI.	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang		
	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Gunungkidul			1.000.000.000	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Gunungkidul			166.806.200	

				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	100 Paket					Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	100 Paket		Disdik
	1.01.02.2.01.0 016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Gunungkidul			2.435.000.000	1.01.02.2.01.0 016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	Sanggar Kegiatan Belajar
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4.870 Paket					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4.870 Paket		Disdik
	1.01.02.2.01.0 019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			100.000.000	1.01.02.2.01.0 019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	Sanggar Kegiatan Belajar
				Jumkah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan	10 Unit					Jumkah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan	10 Unit		Disdik
	1.01.02.2.01.0 025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Gunungkidul			247.199.750	1.01.02.2.01.0 025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Gunungkidul			412.144.500	Sanggar Kegiatan Belajar
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.120 Peserta Didik				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.120 Peserta Didik		
	1.01.02.2.01.0 026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			7.200.000	1.01.02.2.01.0 026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			7.200.000	Disdik
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	180 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	180 Orang		Sanggar Kegiatan Belajar
	1.01.02.2.01.0 027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			203.820.000	1.01.02.2.01.0 027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			103.070.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	552 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	552 Orang		
	1.01.02.2.01.0 028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Gunungkidul			48.237.500	1.01.02.2.01.0 028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Gunungkidul			45.280.000	Disdik
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	466 Satdik				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	466 Satdik		Sanggar Kegiatan Belajar
	1.01.02.2.01.0 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			58.554.381.636	1.01.02.2.01.0 029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			45.149.050.000	
			Kabupaten Gunungkidul (Penerima BOSDaerah & BOSP)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Program "**Bocah Pinter**")	464 Satdik				Kabupaten Gunungkidul (Penerima BOSDaerah & BOSP)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Program "**Bocah Pinter**")	464 Satdik		
	1.01.02.2.01.0 030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			110.211.700	1.01.02.2.01.0 030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			135.447.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	464 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	464 Orang		
	1.01.02.2.01.0 031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			1.519.254.000	1.01.02.2.01.0 031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			0	

			1. SDN BULUREJO II SEMIN, 2.SDN SUMBER SEMIN, 3.SDN MELIKAN RONGKOP, 4.SDN MIJAHAN II SEMANU, 5.SDN SUMBEREJO SEMIN, 6.SDN SEDONO SEMIN. 7.SDN BANYUSOCO II PLAYEN.	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang				1. SDN BULUREJO II SEMIN, 2.SDN SUMBER SEMIN, 3.SDN MELIKAN RONGKOP, 4.SDN MIJAHAN II SEMANU, 5.SDN SUMBEREJO SEMIN, 6.SDN SEDONO SEMIN. 7.SDN BANYUSOCO II PLAYEN.	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang		
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			1.750.000.000	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			0	Disdik
			1.SDN NGLERI PLAYEN,	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang				1.SDN NGLERI PLAYEN,	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		Sanggar Kegiatan Belajar
	1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul			50.000.000	1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	464 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	464 Orang		
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Gunungkidul			10.310.000	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Gunungkidul			8.700.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang		
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Gunungkidul			18.934.500	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Gunungkidul			20.959.800	Sanggar Kegiatan Belajar
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	14 Konten Digital				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	14 Konten Digital		
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			50.812.300	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			52.420.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	240 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	240 Orang		Sanggar Kegiatan Belajar
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			11.400.000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			12.300.000	

			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			14.932.000	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			13.965.000	Sanggar Kegiatan Belajar
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Gunungkidul			16.950.000	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Gunungkidul			7.725.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas		
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Gunungkidul			750.000.000	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	50 Paket				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	50 Paket		
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Gunungkidul			23.253.750	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Gunungkidul			17.265.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			116.000.000	1.01.02.2.01.045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang diterima Peserta Didik	2.320 Buku					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang diterima Peserta Didik	2.320 Buku		
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			89.000.000	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			193.500.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	178 Paket				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	178 Paket		
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Gunungkidul			735.669.000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Gunungkidul			958.067.000	
			SDN WONOSARI I WONOSARI (Lanjutan)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang				SDN WONOSARI I WONOSARI (Lanjutan)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang		
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			425.000.000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			318.400.000	

			1. SDN PENGKOK PATUK (3 Unit), 2. SDN HARGOSARI TANJUNGSARI, 3. SDN TEGALREJOBARU PONJONG, 4. SDN NGENEP SEMANU, 5.SDN TEMUIRENG PANGGANG, 6.SDN GUPAKAN TEPUS. 6.SDN NANAS PURWOSARI, 7.SDN CABE RONGKOP. 8.SDN MULUSAN I PALIYAN. 9.SDN WATUSIGAR I NGAWEN.	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit				1. SDN PENGKOK PATUK (3 Unit), 2. SDN HARGOSARI TANJUNGSARI, 3. SDN TEGALREJOBARU PONJONG, 4. SDN NGENEP SEMANU, 5.SDN TEMUIRENG PANGGANG, 6.SDN GUPAKAN TEPUS. 6.SDN NANAS PURWOSARI, 7.SDN CABE RONGKOP. 8.SDN MULUSAN I PALIYAN. 9.SDN WATUSIGAR I NGAWEN.	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			31.694.800	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			18.465.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	464 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	464 Orang		
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			131.255.400	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			215.572.500	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	464 Satuan Pendidikan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	464 Satuan Pendidikan		
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Gunungkidul			7.356.240.000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Gunungkidul			435.022.000	

		1. SDN MELIKAN RONGKOP (3RUANG), 2.SDN JEPITU III RONGKOP, 3.SDN GEDANGAN KARANGMOJO, 4.SDN GOMBANG II PONJONG, 5.SDN SIRAMAN III WONOSARI, 6.SDN SEDONO SEMIN, 7.SDN TEPUS I, 8.SDN GIRISEKAR, 8.SDN SAMBENG I NGAWEN, 9.SDN TANCEP I NGAWEN, 10.SDN RONGKOP, 11.SDN TAMBAKROMO II PONJONG, 12.SDN BUNDER II PATUK, 13.SDN HARGOSARI TANJUNGSARI (3 Ruang), 14. SDN KARANGWET AN KARANGMOJ O (1 Ruang), 14.SDN KLAMPOK PUWOSARI, 15.SDN JETIS II SAPTOSARI, 16.SDN JATISARI PONJONG, 17.SDN BOHOL RONGKOP, 18.SDN KROPAK TEPUS, 19.SDN KARANREJEK I WONOSARI, 20.SDN SENDANGSARI PONJONG, 21.SDN TUNGGAKNONGKO SEMANU, 22.SDN SIRAMAN II WONOSARI, 23.SDN KARANGDUWET II KARANGMOJO, 24.SDN GELARAN I KARANGMOJO, 25.SDN SOKOLIMAN KARANGMOJO, 26.SDN KARANTENGAH II PURWOSARI, 27.SDN PANGGANG I PANGGANG, 28.SDN PANGGANG II PANGGANG, 29.SDN BELIK TEPUS, 30.SDN PRENGGUK GEDANGSARI, 31.SDN CANDI GEDANGSARI, 32.SDN SERUTBARU GEDANGSARI, 33.SDN TILENG III GIRISUBO, 34.SDN KARANGANOM I KARANGMOJO, 35.SDN JETIS KARANGMOJO, 36. SDN NGLIPAR II NGLIPAR, 37.SDN JRAGUN SEMANU, 38.SDN KARANTENGAH III WONOSARI, 39.SDN PLEMBON PLAYEN, 40.SDN NGAWEN I	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	45 Ruang			1. SDN MELIKAN RONGKOP (3RUANG), 2.SDN JEPITU III RONGKOP, 3.SDN GEDANGAN KARANGMOJO, 4.SDN GOMBANG II PONJONG, 5.SDN SIRAMAN III WONOSARI, 6.SDN SEDONO SEMIN, 7.SDN TEPUS I, 8.SDN GIRISEKAR, 8.SDN SAMBENG I NGAWEN, 9.SDN TANCEP I NGAWEN, 10.SDN RONGKOP, 11.SDN TAMBAKROMO II PONJONG, 12.SDN BUNDER II PATUK, 13.SDN HARGOSARI TANJUNGSARI (3 Ruang), 14. SDN KARANGWET AN KARANGMOJ O (1 Ruang), 14.SDN KLAMPOK PUWOSARI, 15.SDN JETIS II SAPTOSARI, 16.SDN JATISARI PONJONG, 17.SDN BOHOL RONGKOP, 18.SDN KROPAK TEPUS, 19.SDN KARANREJEK I WONOSARI, 20.SDN SENDANGSARI PONJONG, 21.SDN TUNGGAKNONGKO SEMANU, 22.SDN SIRAMAN II WONOSARI, 23.SDN KARANGDUWET II KARANGMOJO, 24.SDN GELARAN I KARANGMOJO, 25.SDN SOKOLIMAN KARANGMOJO, 26.SDN KARANTENGAH II PURWOSARI, 27.SDN PANGGANG I PANGGANG, 28.SDN PANGGANG II PANGGANG, 29.SDN BELIK TEPUS, 30.SDN PRENGGUK GEDANGSARI, 31.SDN CANDI GEDANGSARI, 32.SDN SERUTBARU GEDANGSARI, 33.SDN TILENG III GIRISUBO, 34.SDN KARANGANOM I KARANGMOJO, 35.SDN JETIS KARANGMOJO, 36. SDN NGLIPAR II NGLIPAR, 37.SDN JRAGUN SEMANU, 38.SDN KARANTENGAH III WONOSARI, 39.SDN PLEMBON PLAYEN, 40.SDN NGAWEN I	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	45 Ruang		

		TANCEP, 41.SDN KATONGAN I NGLIPAR, 42.SDN GIRIMULYO PANGGANG, 43.SDN PENGKOK PATUK, 44.SDN SREPENG SEMANU, 45.SDN SURUBENDO PONJONG, 46.SDN TEPUS IV TEPUS, 47.SDN BANTALWATU TEPUS, 48.SDN DOGA PATUK, 49.SDN KANIGORO I SAPTOSARI, 50.SDN KARANGNONGKO III PURWOSARI. 51.SDN NONGKOSEPET PONJONG, 52.SDN HARGOSARI TANJUNGSARI, 53.SDN MENTEL I TANJUNGSARI, 54.SDN DENGOK SEMANU, 55.SDN PLAYEN IV PLAYEN, 56.SDN BANYUSOCO PLAYEN, 57.SDN BULU PLAYEN, 58.SDN KARANGNONGKO II PURWOSARI, 59.SDN GIRIASIH PURWOSARI, 60.SDN WILOSO II PANGGANG, 61.SDN SLAMETAN KARANGMOJO, 62.SDN CANDIREJO SEMIN, 63.SDN PEYOYAN II PURWOSARI, 64.SDN WADUK PATUK, 65.SDN KEPEK II SAPTOSARI, 66.SDN BARAN II RONGKOP, 67.SDN TROWONO III SAPTOSARI, 68.SDN PACAREJO SEMANU, 68.SDN JASEM SEMANU, 69.SDN DAYAKAN II SEMANU, 70.SDN KEMIRI II TANJUNGSARI, 71.SDN MULO BARU WONOSARI.				TANCEP, 41.SDN KATONGAN I NGLIPAR, 42.SDN GIRIMULYO PANGGANG, 43.SDN PENGKOK PATUK, 44.SDN SREPENG SEMANU, 45.SDN SURUBENDO PONJONG, 46.SDN TEPUS IV TEPUS, 47.SDN BANTALWATU TEPUS, 48.SDN DOGA PATUK, 49.SDN KANIGORO I SAPTOSARI, 50.SDN KARANGNONGKO III PURWOSARI. 51.SDN NONGKOSEPET PONJONG, 52.SDN HARGOSARI TANJUNGSARI, 53.SDN MENTEL I TANJUNGSARI, 54.SDN DENGOK SEMANU, 55.SDN PLAYEN IV PLAYEN, 56.SDN BANYUSOCO PLAYEN, 57.SDN BULU PLAYEN, 58.SDN KARANGNONGKO II PURWOSARI, 59.SDN GIRIASIH PURWOSARI, 60.SDN WILOSO II PANGGANG, 61.SDN SLAMETAN KARANGMOJO, 62.SDN CANDIREJO SEMIN, 63.SDN PEYOYAN II PURWOSARI, 64.SDN WADUK PATUK, 65.SDN KEPEK II SAPTOSARI, 66.SDN BARAN II RONGKOP, 67.SDN TROWONO III SAPTOSARI, 68.SDN PACAREJO SEMANU, 68.SDN JASEM SEMANU, 69.SDN DAYAKAN II SEMANU, 70.SDN KEMIRI II TANJUNGSARI, 71.SDN MULO BARU WONOSARI.				

	1.01.02.2.01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Kab. Gunungkidul			500.000.000	1.01.02.2.01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Kab. Gunungkidul			0	
			1. SDN HARGOSARI TANJUNGSARI (3 Ruang), 2. SDN KARANGWETAN KARANGMOJO (1 Runag), 3. SDN PENGKOK PATUK (6 Ruang), 4. SDN SUMBERGIRI PONJONG (1 Ruang)	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	2 Ruang				1. SDN HARGOSARI TANJUNGSARI (3 Ruang), 2. SDN KARANGWETAN KARANGMOJO (1 Runag), 3. SDN PENGKOK PATUK (6 Ruang), 4. SDN SUMBERGIRI PONJONG (1 Ruang)	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	2 Ruang		
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			1.250.000.000	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul			800.000.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.500 Peserta Didik				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.500 Peserta Didik		
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			6.938.500.000	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			0	
			1. SDN BANARAN III PLAYEN (DAU), 2. SDN BANTALWATU	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket				1. SDN BANARAN III PLAYEN (DAU), 2. SDN BANTALWATU	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket		
			TEPUS (DAU), 3. SDN BEJI NGAWEN (DAU), 4. SDN NGLINDUR GIRISUBO (DAU), 5. SDN JRAGUM SEMANU (DAU), 6.						TEPUS (DAU), 3. SDN BEJI NGAWEN (DAU), 4. SDN NGLINDUR GIRISUBO (DAU), 5. SDN JRAGUM SEMANU (DAU), 6.				
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kab. Gunungkidul**			**92.594.962.299**	**1.01.02.2.02**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Kab. Gunungkidul**			**35.840.372.650**	
				Persentase SMP yang terakreditasi A	**N/A**								
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi A	**N/A**								
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Gunungkidul			2.000.000.000	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Gunungkidul			0	

			1. SMP NEGERI 5 PANGGANG	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit				1. SMP NEGERI 5 PANGGANG	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		
	1.01.02.2.02.0 003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			1.850.000.000	1.01.02.2.02.0 003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			0	
			1. SMP NEGERI 1 SAPTOSARI, 2. SMP NEGERI 3 GEDANGSARI, SMP NEGERI 3 GIRISUBO , SMP IT DARRUL MAGHFIROH NGLIPAR	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang				1. SMP NEGERI 1 SAPTOSARI, 2. SMP NEGERI 3 GEDANGSARI, SMP NEGERI 3 GIRISUBO , SMP IT DARRUL MAGHFIROH NGLIPAR	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang		
	1.01.02.2.02.0 004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Gunungkidul			180.000.000	1.01.02.2.02.0 004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	
			SMP Negeri 1 Wonosari, SMP NEGERI 2 WONOSARI, SMP NEGERI 2 SAPTOSARI, SMP NEGERI 2 TEPUS, SMP NEGERI 2 GIRISUBO	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang				SMP Negeri 1 Wonosari, SMP NEGERI 2 WONOSARI, SMP NEGERI 2 SAPTOSARI, SMP NEGERI 2 TEPUS, SMP NEGERI 2 GIRISUBO	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		
	1.01.02.2.02.0 005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Gunungkidul			2.082.000.000	1.01.02.2.02.0 005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	
			1. SMP IT DARRUL MAGHFIROH NGLIPAR, 2. SMP IT TUNAS MULIA, 3. SMP MUHAMMADI YAH UNGGULAN ASHIDIQ NGAWEN, 4. . SMP SANJAYA TEPUS, 5. SMP TQS ASSALAAM TEPUS,6. SMP N 5 PANGGANG	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang				1. SMP IT DARRUL MAGHFIROH NGLIPAR, 2. SMP IT TUNAS MULIA, 3. SMP MUHAMMADI YAH UNGGULAN ASHIDIQ NGAWEN, 4. . SMP SANJAYA TEPUS, 5. SMP TQS ASSALAAM TEPUS,6. SMP N 5 PANGGANG	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang		
	1.01.02.2.02.0 006	Pembangunan Laboratorium	Kab. Gunungkidul			1.124.000.000	1.01.02.2.02.0 006	Pembangunan Laboratorium	Kab. Gunungkidul			0	

			SMP NEGERI 2 SAPTOSARI,SMP N 5 PANGGANG,SMP N 1 WONOSARI,SMP N 2 PALIYAN	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang				SMP NEGERI 2 SAPTOSARI,SMP N 5 PANGGANG,SMP N 1 WONOSARI,SMP N 2 PALIYAN	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang		
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			244.500.000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			1.062.498.500	
			1. SMP NEGERI 1 PATUK, 2. SMP SANJAYA TEPUS,3. SMP TQS ASSALAAMTEPUS,4. SMP N 2 NGLIPAR,5.SMP N 1 WONOSARI,6.SMP N 1 SAPTOSARI,7.SMP N 2 WONOSARI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit				1. SMP NEGERI 1 PATUK, 2. SMP SANJAYA TEPUS,3. SMP TQS ASSALAAMTEPUS,4. SMP N 2 NGLIPAR,5.SMP N 1 WONOSARI,6.SMP N 1 SAPTOSARI,7.SMP N 2 WONOSARI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Gunungkidul			6.534.927.180	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Gunungkidul			1.088.381.000	

		1.SMP N 3 GEDANGSARI,2.SMP N 2 GEDANGSARI,3.SMP N 3 SAPTOSARI,4.SMP N 2 SAPTOSARI,5.SMP N 5 NGAWEN,6.SMP N 4 NGAWEN,7.SMP N 1 NGAWEN,8.SMP N 3 GIRISUBO,9.SMP N 2 GIRISUBO,10.SMP N 1 GIRISUBO,11.SMP N 1 RONGKOP,12.SMP N 3 TANJUNGSARI,13.SMP N 2 TANJUNGSARI,14.SMP N 3 TEPUS,15.SMP N 2 TEPUS,16.SMP N 1 TEPUS,17.SMP N 3 SEMANU,18.SMP N 2 SEMANU,19.SMP N 4 PONJONG,20.SMP N 3 PONJONG,21.SMP N 4 SEMIN,22. SMP N 3 SEMIN,23.SMP N 2 SEMIN,24.SMP N 4 NGLIPAR,25.SMP N 3 NGILPAR,26.SMP N 2 NGLIPAR,27.SMP N 1 NGLIPAR, 28,SMP N 5 PATUK,29. SMP N 4 PATUK,30.SMP N 3 PATUK,31.SMP N 2 PATUK,32.SMP N 4 PLAYEN,33.SMP N 3 PLAYEN,34.SMP N 2 PLAYEN,35.SMP N 1 PLAYEN,36.SMP N 2 PURWOSARI,37.SMP N 4 PANGGANG,38.SMP N 3 PANGGANG,39.SMP N 1 PANGGANG,40.SMP N 2 PALIYAN,41.SMP N 1 PALIYAN,42.SMP N 4 WONOSARI,43.SMP N 3 WONOSARI,44.SMP N 2 WONOSARI,,45. SMP Pembangunan Karangmojo,46. SMP EKAKAPTI KARANGMOJO,47.SMP Muhammadiyah 2 Nglipar ,48.SMP MUHAMMADIYAH PANGGANG, 49.SMP MUHAMMADIYAH 2 PALIYAN, 50. SMPIT Tunas Mulia, 51.SMP KANISIUS WONOSARI,52. SMP MUHAMMADIYAH 1 WONOSARI,53.SMP Muhammadiyah Semin	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	53 Ruang			1.SMP N 3 GEDANGSARI,2.SMP N 2 GEDANGSARI,3.SMP N 3 SAPTOSARI,4.SMP N 2 SAPTOSARI,5.SMP N 5 NGAWEN,6.SMP N 4 NGAWEN,7.SMP N 1 NGAWEN,8.SMP N 3 GIRISUBO,9.SMP N 2 GIRISUBO,10.SMP N 1 GIRISUBO,11.SMP N 1 RONGKOP,12.SMP N 3 TANJUNGSARI,13.SMP N 2 TANJUNGSARI,14.SMP N 3 TEPUS,15.SMP N 2 TEPUS,16.SMP N 1 TEPUS,17.SMP N 3 SEMANU,18.SMP N 2 SEMANU,19.SMP N 4 PONJONG,20.SMP N 3 PONJONG,21.SMP N 4 SEMIN,22. SMP N 3 SEMIN,23.SMP N 2 SEMIN,24.SMP N 4 NGLIPAR,25.SMP N 3 NGILPAR,26.SMP N 2 NGLIPAR,27.SMP N 1 NGLIPAR, 28,SMP N 5 PATUK,29. SMP N 4 PATUK,30.SMP N 3 PATUK,31.SMP N 2 PATUK,32.SMP N 4 PLAYEN,33.SMP N 3 PLAYEN,34.SMP N 2 PLAYEN,35.SMP N 1 PLAYEN,36.SMP N 2 PURWOSARI,37.SMP N 4 PANGGANG,38.SMP N 3 PANGGANG,39.SMP N 1 PANGGANG,40.SMP N 2 PALIYAN,41.SMP N 1 PALIYAN,42.SMP N 4 WONOSARI,43.SMP N 3 WONOSARI,44.SMP N 2 WONOSARI,,45. SMP Pembangunan Karangmojo,46. SMP EKAKAPTI KARANGMOJO,47.SMP Muhammadiyah 2 Nglipar ,48.SMP MUHAMMADIYAH PANGGANG, 49.SMP MUHAMMADIYAH 2 PALIYAN, 50. SMPIT Tunas Mulia, 51.SMP KANISIUS WONOSARI,52. SMP MUHAMMADIYAH 1 WONOSARI,53.SMP Muhammadiyah Semin	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	53 Ruang		

	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Gunungkidul			322.867.000	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	
			1. SMP N 2 SAPTOSARI,2. SMP N 2 NGLIPAR,3.SMP NEGERI 5 PATUK	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang				1. SMP N 2 SAPTOSARI,2. SMP N 2 NGLIPAR,3.SMP NEGERI 5 PATUK	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Gunungkidul			998.512.000	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Gunungkidul			352.049.000	
			1.SMP NEGERI 3 SEMANU,2.SMP NEGERI 5 PATUK,3. SMP NEGERI 4 SEMIN,4. SMP N 2 SAPTOSARI,5.SMP N 1 NGAWEN,6.SMP N 2 PALIYAN,7.SMP N 2 WONOSARI,8.SMP N 3 GIRISUBO,9. SMP NEGERI 2 SAPTOSARI,10. SMP IT Tunas Mulia, 11. SMP MUHAMMADIYAH 1 NGLIPAR	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang				1.SMP NEGERI 3 SEMANU,2.SMP NEGERI 5 PATUK,3. SMP NEGERI 4 SEMIN,4. SMP N 2 SAPTOSARI,5.SMP N 1 NGAWEN,6.SMP N 2 PALIYAN,7.SMP N 2 WONOSARI,8.SMP N 3 GIRISUBO,9. SMP NEGERI 2 SAPTOSARI,10. SMP IT Tunas Mulia, 11. SMP MUHAMMADIYAH 1 NGLIPAR	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang		
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Gunungkidul			2.690.137.000	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Gunungkidul			870.905.350	

			1.SMP NEGERI 3 SEMANU,2.SMP NEGERI 5 PATUK,3. SMP NEGERI 4 SEMIN,4. SMP NEGERI 4 NGAWEN, 5.SMP N 2 SAPTOSARI,6. SMP N 1 NGAWEN,7. SMP N 1 SAPTOSARI,8. SMP N 2 PALIYAN, 9. SMP N 3 GIRISUBO,10.SMP N 2 WONOSARI,11.SMP N 3 GIRISUBO	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang				1.SMP NEGERI 3 SEMANU,2.SMP NEGERI 5 PATUK,3. SMP NEGERI 4 SEMIN,4. SMP NEGERI 4 NGAWEN, 5.SMP N 2 SAPTOSARI,6. SMP N 1 NGAWEN,7. SMP N 1 SAPTOSARI,8. SMP N 2 PALIYAN, 9. SMP N 3 GIRISUBO,10.SMP N 2 WONOSARI,11.SMP N 3 GIRISUBO	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang		
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Gunungkidul			450.000.000	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Gunungkidul			0	
			1. SMP NEGERI 2 SAPTOSARI (Lab IPA), 2. SMP NEGERI 4 PONJONG (Lab Komputer)	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang				1. SMP NEGERI 2 SAPTOSARI (Lab IPA), 2. SMP NEGERI 4 PONJONG (Lab Komputer)	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			897.620.765	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			240.100.000	

			1.SMP NEGERI 3 SEMANU,2.SMP NEGERI 5 PATUK,3. SMP NEGERI 4 SEMIN,4. SMP NEGERI 4 NGAWEN, 5.SMP N 2 SAPTOSARI,6. SMP N 1 NGAWEN,7. SMP N 1 SAPTOSARI,8. SMP N 2 PALIYAN, 9. SMP N 3 GIRISUBO,10. SMP MUHAMMADIYAH SEMANU, 11.SMP MUHAMMADIYAH 1 TEPUS	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Unit				1.SMP NEGERI 3 SEMANU,2.SMP NEGERI 5 PATUK,3. SMP NEGERI 4 SEMIN,4. SMP NEGERI 4 NGAWEN, 5.SMP N 2 SAPTOSARI,6. SMP N 1 NGAWEN,7. SMP N 1 SAPTOSARI,8. SMP N 2 PALIYAN, 9. SMP N 3 GIRISUBO,10. SMP MUHAMMADIYAH SEMANU, 11.SMP MUHAMMADIYAH 1 TEPUS	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Unit		
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Gunungkidul			2.656.565.000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	
			1.SMP NEGERI 3 SEMANU,2.SMP NEGERI 5 PATUK,3. SMP NEGERI 4 SEMIN,4. SMP NEGERI 4 NGAWEN, 5.SMP N 2 SAPTOSARI,6. SMP N 1 NGAWEN,7. SMP N 1 SAPTOSARI,8. SMP N 2 PALIYAN, 9. SMP N 3 GIRISUBO	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	31 Paket				1.SMP NEGERI 3 SEMANU,2.SMP NEGERI 5 PATUK,3. SMP NEGERI 4 SEMIN,4. SMP NEGERI 4 NGAWEN, 5.SMP N 2 SAPTOSARI,6. SMP N 1 NGAWEN,7. SMP N 1 SAPTOSARI,8. SMP N 2 PALIYAN, 9. SMP N 3 GIRISUBO	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	31 Paket		
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			75.000.000	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit		
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul			2.500.000.000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul			1.000.225.000	

			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5.000 Peserta Didik				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5.000 Peserta Didik		
	1.01.02.2.02.0 038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Gunungkidul			157.294.214	1.01.02.2.02.0 038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Gunungkidul			501.270.500	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	642 Peserta Didik				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	642 Peserta Didik		
	1.01.02.2.02.0 039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul			7.200.000	1.01.02.2.02.0 039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul			7.200.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	180 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	180 Orang		
	1.01.02.2.02.0 040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul			165.379.200	1.01.02.2.02.0 040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul			113.474.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	329 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	329 Orang		
	1.01.02.2.02.0 041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Gunungkidul			75.500.000	1.01.02.2.02.0 041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Gunungkidul			64.556.600	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	109 Satuan Pendidikan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	109 Satuan Pendidikan		
	1.01.02.2.02.0 042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul			53.734.070.000	1.01.02.2.02.0 042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul			28.674.320.000	
			Kabupaten Gunungkidul (BOSDaerah&BOSP)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Program Unggulan "Optimis Kurika")	109 Satuan Pendidikan				Kabupaten Gunungkidul (BOSDaerah&BOSP)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Program Unggulan "Optimis Kurika")	109 Satuan Pendidikan		
	1.01.02.2.02.0 043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul			120.500.000	1.01.02.2.02.0 043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul			83.837.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	218 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	218 Orang		
	1.01.02.2.02.0 047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul			25.000.000	1.01.02.2.02.0 047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	109 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	109 Orang		
	1.01.02.2.02.0 048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Gunungkidul			18.345.180	1.01.02.2.02.0 048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Gunungkidul			14.100.000	

			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	109 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	109 Orang		
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Gunungkidul			30.000.000	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Gunungkidul			13.500.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	109 Konten Digital				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	109 Konten Digital		
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			20.000.000	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			14.649.900	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	109 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	109 Orang		
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			4.499.760	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			4.500.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			25.000.000	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			18.299.800	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Gunungkidul			22.600.000	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Gunungkidul			7.368.500	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas		
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Gunungkidul			25.000.000	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Gunungkidul			15.000.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			320.800.000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			347.754.800	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	109 Satuan Pendidikan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	109 Satuan Pendidikan		
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Gunungkidul			960.000.000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Gunungkidul			0	

			1. SMP NEGERI 3 WONOSARI (2 ruang), 2. SMP NEGERI 1 NGAWEN (2 ruang), 3. SMP NEGERI 2 WONOSARI (2 orang)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang				1. SMP NEGERI 3 WONOSARI (2 ruang), 2. SMP NEGERI 1 NGAWEN (2 ruang), 3. SMP NEGERI 2 WONOSARI (2 orang)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang		
	1.01.02.2.02.0 060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			30.320.000	1.01.02.2.02.0 060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			12.000.000	Disdik
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	109 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	109 Orang		sanggar Kegiatan Belajar
	1.01.02.2.02.0 061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			595.825.000	1.01.02.2.02.0 061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	23,833 Buku					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	23,833 Buku		
	1.01.02.2.02.0 062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			1.150.000.000	1.01.02.2.02.0 062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			190.000.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2300 Paket				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2300 Paket		
	1.01.02.2.02.0 064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			1.045.000.000	1.01.02.2.02.0 064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			1.144.382.700	
			1.SMP NEGERI 3 SEMANU,2.SMP NEGERI 5 PATUK,3.SMP NEGERI 4 SEMIN,4.SMP NEGERI 4 NGAWEN,5.SMP N 2 SAPTOSARI,6.SMP N 1 NGAWEN,7.SMP N 1 TEPUS,8.SMP N 2 PALIYAN,9.SMP N 3 GIRISUBO,10.SMP N 2 WONOSARI	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang				1.SMP NEGERI 3 SEMANU,2.SMP NEGERI 5 PATUK,3.SMP NEGERI 4 SEMIN,4.SMP NEGERI 4 NGAWEN,5.SMP N 2 SAPTOSARI,6.SMP N 1 NGAWEN,7.SMP N 1 TEPUS,8.SMP N 2 PALIYAN,9.SMP N 3 GIRISUBO,10.SMP N 2 WONOSARI	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang		
	1.01.02.2.02.0 065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Kab. Gunungkidul			900.000.000	1.01.02.2.02.0 065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Kab. Gunungkidul			0	

			1. SMP NEGERI 3 WONOSARI (2 ruang), 2. SMP NEGERI 1 NGAWEN (2 ruang), 3. SMP NEGERI 2 WONOSARI (2 orang)	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	6 Ruang				1. SMP NEGERI 3 WONOSARI (2 ruang), 2. SMP NEGERI 1 NGAWEN (2 ruang), 3. SMP NEGERI 2 WONOSARI (2 orang)	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	6 Ruang		
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			6.921.500.000	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			0	
			1. SMP NEGERI 4 PANGGANG (DAU), 2. SMP MUHAMMADI YAH UNGGULAN ASHIDIQ NGAWEN (DAU), 3. SMP TQS ASSALAAM TEPUS (DAU), 4. SMP IT TUNAS MULIA (DAU), 5. SMP MUHAMMADI YAH TANJUNGSA RI (DAU), 6. SMP PEMBANGUN AN PONJONG (DAU)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	109 Paket				1. SMP NEGERI 4 PANGGANG (DAU), 2. SMP MUHAMMADI YAH UNGGULAN ASHIDIQ NGAWEN (DAU), 3. SMP TQS ASSALAAM TEPUS (DAU), 4. SMP IT TUNAS MULIA (DAU), 5. SMP MUHAMMADI YAH TANJUNGSA RI (DAU), 6. SMP PEMBANGUN AN PONJONG (DAU)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	109 Paket		
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Gunungkidul			1.635.000.000	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Gunungkidul			0	

			1. SMP NEGERI 4 PANGGANG (DAU), 2. SMP MUHAMMADI YAH UNGGULAN ASHIDIQ NGAWEN (DAU), 3. SMP TQS ASSALAAM TEPUS (DAU), 4. SMP IT TUNAS MULIA (DAU), 5. SMP MUHAMMADI YAH TANJUNGSA RI (DAU), 6. SMP PEMBANGUN AN PONJONG (DAU)	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	109 Paket				1. SMP NEGERI 4 PANGGANG (DAU), 2. SMP MUHAMMADI YAH UNGGULAN ASHIDIQ NGAWEN (DAU), 3. SMP TQS ASSALAAM TEPUS (DAU), 4. SMP IT TUNAS MULIA (DAU), 5. SMP MUHAMMADI YAH TANJUNGSA RI (DAU), 6. SMP PEMBANGUN AN PONJONG (DAU)	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	109 Paket		
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Kab. Gunungkidul**			**33.563.020.100**	**1.01.02.2.03**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Kab. Gunungkidul**			**23.217.634.600**	
				Persentase PAUD yang terakreditasi	**N/A**								
				Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi	**N/A**								**Disdik**
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Gunungkidul			600.000.000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Gunungkidul			456.049.200	

			1. TK NEGERI 1 MARET PLAYEN (DAU), 2. TK NEGERI GEDANGSARI (DAU), 3. TK N EGERI SAPTOSARI 4. TK NEGERI GIRISUBU 5. TK NEGERI PONJONG 6. TK NEGERI SEMANU 7. TK NEGERI PURWOSARI 8. TK NEGERI PALIYAN 9. TK NEGERI GIRISUBO 10. TK NEGERI SEMIN 11. TK NEGERI PATUK 12. TK NEGERI RONGKOP	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit				1. TK NEGERI 1 MARET PLAYEN (DAU), 2. TK NEGERI GEDANGSARI (DAU), 3. TK N EGERI SAPTOSARI 4. TK NEGERI GIRISUBU 5. TK NEGERI PONJONG 6. TK NEGERI SEMANU 7. TK NEGERI PURWOSARI 8. TK NEGERI PALIYAN 9. TK NEGERI GIRISUBO 10. TK NEGERI SEMIN 11. TK NEGERI PATUK 12. TK NEGERI RONGKOP	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit		
	1.01.02.2.03.0 007	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Gunungkidul			73.300.000	1.01.02.2.03.0 007	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Gunungkidul			120.000.000	
			1. TK NEGERI 1 MARET PLAYEN, 2. TK NEGERI GIRISUBO, 3. TK NEGERI KARANGMOJ O, 4. TK NEGERI PANGGANG, 5. TK NEGERI PATUK, 6. TK NEGERI RONGKOP	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	6 Paket				1. TK NEGERI 1 MARET PLAYEN, 2. TK NEGERI GIRISUBO, 3. TK NEGERI KARANGMOJ O, 4. TK NEGERI PANGGANG, 5. TK NEGERI PATUK, 6. TK NEGERI RONGKOP	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	6 Paket		
3	1.01.02.2.03.0 011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Gunungkidul			21.600.000	1.01.02.2.03.0 011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Gunungkidul			593.000.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	144 Peserta Didik				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	144 Peserta Didik		
	1.01.02.2.03.0 015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Gunungkidul			7.200.000	1.01.02.2.03.0 015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Gunungkidul			4.912.500	

			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	180 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	180 Orang		
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Gunungkidul			88.025.000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Gunungkidul			147.252.500	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	368 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	368 Orang		
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Gunungkidul			63.914.000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Gunungkidul			44.760.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	108 Satuan Pendidikan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	108 Satuan Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Gunungkidul			21.545.370.000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Gunungkidul			16.052.220.000	
			Kabupaten Gunungkidul (BOSPDaerah dan BOP PAUD)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Program "**Bocah Pinter**")	1184 Satuan Pendidikan				Kabupaten Gunungkidul (BOSPDaerah dan BOP PAUD)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Program "**Bocah Pinter**")	1184 Satuan Pendidikan		
4	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Gunungkidul			63.275.000	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Gunungkidul			181.585.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1184 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1184 Orang		
	1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab. Gunungkidul			25.000.000	1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	30 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	30 Orang		
5	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Gunungkidul			15.000.000	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Gunungkidul			19.110.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang		
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Gunungkidul			14.460.000	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Gunungkidul			19.110.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3 Konten Digital				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3 Konten Digital		
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			31.000.000	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			19.110.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	72 orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	72 orang		

	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			10.000.000	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			3.930.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			10.000.000	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			3.930.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		
8	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			396.697.000	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			0	
			1. TK NEGERI GEDANGSARI, 2.. TK NEGERI TANJUNGSARI	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang				1. TK NEGERI GEDANGSARI, 2.. TK NEGERI TANJUNGSARI	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Gunungkidul			6.100.000	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Gunungkidul			6.100.000	
TOTAL			Kabupaten Gunungkidul (K3TK, KKG, PMM)	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas				Kabupaten Gunungkidul (K3TK, KKG, PMM)	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Gunungkidul			576.000.000	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Gunungkidul			222.890.740	
			TK NEGERI PANGGANG	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang				TK NEGERI PANGGANG	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang		
	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Gunungkidul			225.000.000	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Gunungkidul			0	
			TK NEGERI PANGGANG	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	18 Paket				TK NEGERI PANGGANG	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	18 Paket		
	1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Gunungkidul			1.575.000.000	1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	

			1. TK NEGERI PURWOSARI, 2. TK NEGERI RONGKOP, 3. TK NEGERI SAPTOSARI, 4. TK NEGERI TANJUNGSA RI, 5. TK NEGERI TEPUS, 6. TK NEGERI GEDANGSARI , 7. TK NEGERI GIRISUBO, 8. TK NEGERI PALIYAN, 9. TK NEGERI PANGGANG, 10. TK NEGERI PATUK	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang				1. TK NEGERI PURWOSARI, 2. TK NEGERI RONGKOP, 3. TK NEGERI SAPTOSARI, 4. TK NEGERI TANJUNGSA RI, 5. TK NEGERI TEPUS, 6. TK NEGERI GEDANGSARI , 7. TK NEGERI GIRISUBO, 8. TK NEGERI PALIYAN, 9. TK NEGERI PANGGANG, 10. TK NEGERI PATUK	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang		
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			50.000.000	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			35.379.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600 Peserta didik				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	600 Peserta didik		
	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			276.625.000	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	11065 Buku				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	11065 Buku		
	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Gunungkidul			300.000.000	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang				Kabupaten Gunungkidul	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Gunungkidul			20.000.000	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Gunungkidul			7.200.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	120 Kegiatan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	120 Kegiatan		

	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			20.000.000	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			12.937.500	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	762 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	762 Orang		
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Gunungkidul			2.000.000.000	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Gunungkidul			1.214.516.900	
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			47.463.000	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			51.708.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1217 Paket				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1217 Paket		
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			30.000.000	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit		
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Gunungkidul			460.221.100	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Gunungkidul			135.010.000	
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seang/Berat	3 Unit					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seang/Berat	3 Unit		
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kab. Gunungkidul			665.000.000	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kab. Gunungkidul			56.000.000	

			1. TK NEGERI 1 MARET PLAYEN (DAU), 2. TK NEGERI GEDANGSARI (DAU), 3. TK NEGERI KARANGMOJ O (DAU), 4. TK NEGERI PALIYAN (DAU), 5. TK NEGERI PONJONG (DAU), 6. TK NEGERI PURWOSARI (DAU), 7. TK NEGERI SEMANU (DAU), 8. TK NEGERI SEMIN (DAU), 9. TK NEGERI T	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	12 Paket				1. TK NEGERI 1 MARET PLAYEN (DAU), 2. TK NEGERI GEDANGSARI (DAU), 3. TK NEGERI KARANGMOJ O (DAU), 4. TK NEGERI PALIYAN (DAU), 5. TK NEGERI PONJONG (DAU), 6. TK NEGERI PURWOSARI (DAU), 7. TK NEGERI SEMANU (DAU), 8. TK NEGERI SEMIN (DAU), 9. TK NEGERI T	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	12 Paket		
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Gunungkidul			2.266.530.000	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Gunungkidul			3.023.750.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1184 Satuan Pendidikan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1184 Satuan Pendidikan		
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			263.760.000	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			50.000.000	

			1.TK NEGERI GIRISUBO, 2. TK NEGERI PANGGANG, 3. TK NEGERI PONJONG, 4. TK NEGERI KARANGMOJO, 5. TK NEGERI NGAWEN, 6. TK NEGERI TANJUNGSARI, 7. TK NEGERI SEMANU, 8. TK NEGERI WONOSARI, 9. TK NEGERI PLAYEN, 10. TK NEGERI PALIYAN	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang				1.TK NEGERI GIRISUBO, 2. TK NEGERI PANGGANG, 3. TK NEGERI PONJONG, 4. TK NEGERI KARANGMOJO, 5. TK NEGERI NGAWEN, 6. TK NEGERI TANJUNGSARI, 7. TK NEGERI SEMANU, 8. TK NEGERI WONOSARI, 9. TK NEGERI PLAYEN, 10. TK NEGERI PALIYAN	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Gunungkidul			1.816.480.000	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Gunungkidul			737.173.260	
			TK NEGERI dan TK SWASTA	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang				TK NEGERI dan TK SWASTA	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang		
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Kab. Gunungkidul**			**9.942.640.000**	**1.01.02.2.04**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Kab. Gunungkidul**			**6.882.384.000**	
				Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	**N/A**								
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			750.000.000	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			130.000.000	
			Kabupaten Gunungkiudl	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.500 Peserta Didik				Kabupaten Gunungkiudl	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.500 Peserta Didik		
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			5.100.000	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			1.575.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	90 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	90 Orang		
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			6.210.000	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			5.037.500	

			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	17 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	17 Orang		
	1.01.02.2.04.0 016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			12.000.000	1.01.02.2.04.0 016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			16.525.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	26 Satuan Pendidikan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	26 Satuan Pendidikan		
	1.01.02.2.04.0 017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			4.907.080.000	1.01.02.2.04.0 017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			1.907.080.000	
			Kabupaten Gunungkidul (BOSDaerah & BOP Kesetaraan)	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Program Unggulan "**Geni Seko Gunung**")	26 Satuan Pendidikan				Kabupaten Gunungkidul (BOSDaerah & BOP Kesetaraan)	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Program Unggulan "**Geni Seko Gunung**")	26 Satuan Pendidikan		
	1.01.02.2.04.0 018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			5.000.000	1.01.02.2.04.0 018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			7.655.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	26 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	26 Orang		
	1.01.02.2.04.0 024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Gunungkidul			5.000.000	1.01.02.2.04.0 024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Gunungkidul			16.410.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	26 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	26 Orang		
	1.01.02.2.04.0 025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Gunungkidul			15.000.000	1.01.02.2.04.0 025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Kab. Gunungkidul			16.410.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		
	1.01.02.2.04.0 026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			5.000.000	1.01.02.2.04.0 026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			16.410.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	26 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	26 Orang		
	1.01.02.2.04.0 027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			5.000.000	1.01.02.2.04.0 027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			3.505.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		
	1.01.02.2.04.0 028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			5.000.000	1.01.02.2.04.0 028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			3.505.000	

			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		
	1.01.02.2.04.0 030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Gunungkidul			6.100.000	1.01.02.2.04.0 030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Gunungkidul			2.350.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		
	1.01.02.2.04.0 031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Gunungkidul			5.000.000	1.01.02.2.04.0 031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Gunungkidul			3.505.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		
	1.01.02.2.04.0 032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			150.000.000	1.01.02.2.04.0 032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	20 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	20 Orang		
	1.01.02.2.04.0 033	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Gunungkidul			390.000.000	1.01.02.2.04.0 033	Penyediaan infrastruktur TIK	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	26 Paket				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	26 Paket		
	1.01.02.2.04.0 035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			18.000.000	1.01.02.2.04.0 035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			16.410.000	
			Kab Gunungkidul (EXPO Hasil Belajar PNF)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik				Kab Gunungkidul (EXPO Hasil Belajar PNF)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		
	1.01.02.2.04.0 036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			42.000.000	1.01.02.2.04.0 036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	135 Paket				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	135 Paket		
	1.01.02.2.04.0 037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			66.150.000	1.01.02.2.04.0 037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2.646 Buku					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2.646 Buku		
	1.01.02.2.04.0 038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			350.000.000	1.01.02.2.04.0 038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		
	1.01.02.2.04.0 039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Gunungkidul			350.000.000	1.01.02.2.04.0 039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		
	1.01.02.2.04.0 041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			150.000.000	1.01.02.2.04.0 041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	

				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		
	1.01.02.2.04.0 042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			10.000.000	1.01.02.2.04.0 042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	26 Orang					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	26 Orang		
	1.01.02.2.04.0 043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Kab. Gunungkidul			150.000.000	1.01.02.2.04.0 043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		
	1.01.02.2.04.0 044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Gunungkidul			2.000.000.000	1.01.02.2.04.0 044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		
	1.01.02.2.04.0 046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			280.000.000	1.01.02.2.04.0 046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Gunungkidul			4.736.006.500	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2.832 Peserta Didik				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2.832 Peserta Didik		
	1.01.02.2.04.0 049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			10.000.000	1.01.02.2.04.0 049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		
	1.01.02.2.04.0 052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			45.000.000	1.01.02.2.04.0 052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		
	1.01.02.2.04.0 055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			50.000.000	1.01.02.2.04.0 055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		
	1.01.02.2.04.0 061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Gunungkidul			150.000.000	1.01.02.2.04.0 061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		
	1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Kab. Gunungkidul			**919.393.500**	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Kab. Gunungkidul			**65.065.000**	

				Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal	**100**					**Persentase Satuan Pendidikan yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal**	**100**		
	1.01.03.2.01	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar***	Kab. Gunungkidul			***192.800.000***	***1.01.03.2.01***	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar***	Kab. Gunungkidul			***57.630.000***	
				Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	***100***								
	1.01.03.2.01.0 002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul			25.000.000	1.01.03.2.01.0 002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul			14.400.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	2 Dokumen		
	1.01.03.2.01.0 003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul			92.800.000	1.01.03.2.01.0 003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	464 Buku				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	464 Buku		
	1.01.03.2.01.0 004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul			25.000.000	1.01.03.2.01.0 004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul			14.130.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	200 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	200 Orang		
	1.01.03.2.01.0 006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul			25.000.000	1.01.03.2.01.0 006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul			14.130.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen		
	1.01.03.2.01.0 007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul			25.000.000	1.01.03.2.01.0 007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul			14.970.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen		
	1.01.03.2.02	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal***	Kab. Gunungkidul			***726.593.500***	***1.01.03.2.02***	***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal***	Kab. Gunungkidul			***7.435.000***	
				Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	***100***								
	1.01.03.2.02.0 002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Gunungkidul			10.000.000	1.01.03.2.02.0 002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Gunungkidul			3.930.000	

			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen		
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Gunungkidul			687.500.000	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	27.500 Buku				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	27.500 Buku		
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Gunungkidul			29.093.500	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Gunungkidul			3.505.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen		
	1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Kab. Gunungkidul			**4.468.158.800**	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Kab. Gunungkidul			**4.269.591.400**	
				Persentase Satuan Pendidikan Yang Tercukupi Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	**55,78%**					**Indeks Pemerataan Guru**	**27.80%**		
	1.01.04.2.01	***Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	Kab. Gunungkidul			***4.468.158.800***	***1.01.04.2.01***	***Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	Kab. Gunungkidul			***4.269.591.400***	
				Persentase Guru PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;	######								
				Persentase Kepala PAUD (Formal) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;	######								
				Persentase Guru SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;	######								

				Persentase Kepala SD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;	******							
				Persentase Guru SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan bersertifikat pendidik;	******							
				Persentase Kepala SMP yang memiliki ijazah D-IV atau S1, yang bersertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;	******							
	1.01.04.2.01.0 001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			14.300.000	1.01.04.2.01.0 001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			277.631.400	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen		
	1.01.04.2.01.0 002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			4.453.858.800	1.01.04.2.01.0 002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul			3.991.960.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan		
	1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Kab. Gunungkidul			**10.000.000**	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Kab. Gunungkidul			**3.332.500**	
				Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan	**100**					**Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui**	**100**		
	1.01.05.2.01	***Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***	Kab. Gunungkidul			***5.000.000***	***1.01.05.2.01***	***Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***	Kab. Gunungkidul			***0***	

				Persentase permohonan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat terlayani	***95***							
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Gunungkidul			5.000.000	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		
	1.01.05.2.02	***Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***	Kab. Gunungkidul			***5.000.000***	***1.01.05.2.02***	***Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***	Kab. Gunungkidul			***3.332.500***	
				Persentase permohonan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat terlayani	***100***							
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Gunungkidul			5.000.000	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Gunungkidul			3.332.500	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		
	01:01:06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**					**01:01:06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	Kab. Gunungkidul			**0**	
										Persentase pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah	**0,5**		
	1.01.06.2.01	***Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***					***1.01.06.2.01***	***Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	Kab. Gunungkidul			***0***	
	1.01.06.2.01.0008	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah				250.000.000	1.01.06.2.01.0008	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah				0	
				Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	18 Buku					Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	0 Buku		

	2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Gunungkidul			**0**	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Gunungkidul			**100.000.000**	
				Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya	**N/A**					**Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya**	**0.5**		
				Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan kurikulum muatan lokal membatik	**N/A**					**Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik**	**0.5**		
				Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan kurikulum muatan lokal membatik	**N/A**								
	2.22.08.5.08	***Pendidikan Berbasis Budaya***	Kab. Gunungkidul			***0***	***2.22.08.5.08***	***Pendidikan Berbasis Budaya***	Kab. Gunungkidul			***100.000.000***	
				Persentase Pendidikan Berbasis Budaya yang terpenuhi	**N/A**								
	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal	Kab. Gunungkidul			*0*	2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal	Kab. Gunungkidul			*100.000.000*	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	N/A				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	N/A		
	X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Gunungkidul			**576.265.490.000**	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Gunungkidul			**579.934.845.796**	
			Kab. Gunungkidul						Kab. Gunungkidul				
			Kab. Gunungkidul	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83,54**				Kab. Gunungkidul	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**84.51**		
	X.XX.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Kab. Gunungkidul			***970.000.000***	***X.XX.01.2.01***	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	Kab. Gunungkidul			***293.514.000***	
				Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	***100 Persen***								
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul			40.000.000	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul			32.155.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul			10.000.000	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul			10.600.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen		

	X.XX.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul			10.000.000	X.XX.01.2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul			10.600.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen		
	X.XX.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul			10.000.000	X.XX.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul			10.600.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen		
	X.XX.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul			10.000.000	X.XX.01.2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul			10.600.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen		
	X.XX.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul			100.000.000	X.XX.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul			64.635.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		
	X.XX.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul			390.000.000	X.XX.01.2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul			74.324.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		
	X.XX.01.2.01.0 009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Gunungkidul			350.000.000	X.XX.01.2.01.0 009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Gunungkidul			80.000.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		
	X.XX.01.2.01.0 010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul			25.000.000	X.XX.01.2.01.0 010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul			0	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		
	X.XX.01.2.01.0 013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kab. Gunungkidul			25.000.000	X.XX.01.2.01.0 013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kab. Gunungkidul			0	

			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		
	X.XX.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	*Kab. Gunungkidul*			***571.380.800.000***	***X.XX.01.2.02***	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	*Kab. Gunungkidul*			***575.970.371.116***	
				Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai disusun tepat waktu	***100 Persen***								
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul			571.186.000.000	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul			575.800.466.116	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78.748 Orang/bulan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78.748 Orang/bulan		
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Gunungkidul			2.000.000	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Gunungkidul			1.560.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
	X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Gunungkidul			4.000.000	X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Gunungkidul			4.500.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		
	X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Gunungkidul			8.000.000	X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Gunungkidul			8.000.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen		
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul			25.500.000	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul			25.700.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		
	X.XX.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Gunungkidul			300.000	X.XX.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Gunungkidul			300.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul			155.000.000	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul			129.845.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan		

	X.XX.01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	Kab. Gunungkidul			***736.500.000***	***X.XX.01.2.03***	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	Kab. Gunungkidul			***289.485.000***	
				Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu	***100 Persen***					***Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang selesai disusun tepat waktu***	***100 Persen***		
	X.XX.01.2.03.0 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul			500.000	X.XX.01.2.03.0 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul			625.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
	X.XX.01.2.03.0 003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul			9.000.000	X.XX.01.2.03.0 003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul			9.600.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		
	X.XX.01.2.03.0 004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul			8.500.000	X.XX.01.2.03.0 004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul			9.500.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	X.XX.01.2.03.0 005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul			704.000.000	X.XX.01.2.03.0 005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul			252.990.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	X.XX.01.2.03.0 006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul			14.500.000	X.XX.01.2.03.0 006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul			16.770.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		
	X.XX.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Kab. Gunungkidul***			***265.000.000***	***X.XX.01.2.05***	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Kab. Gunungkidul***			***269.535.600***	
				Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian	***100 Persen***								
	X.XX.01.2.05.0 003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul			107.000.000	X.XX.01.2.05.0 003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul			111.380.600	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen		
	X.XX.01.2.05.0 005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Gunungkidul			3.000.000	X.XX.01.2.05.0 005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Gunungkidul			4.120.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		
	X.XX.01.2.05.0 010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Gunungkidul			155.000.000	X.XX.01.2.05.0 010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Gunungkidul			154.035.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang		

	X.XX.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kab. Gunungkidul***			***1.331.800.000***	***X.XX.01.2.06***	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kab. Gunungkidul***			***1.649.553.800***	
				Persentase Administrasi Umum terlayani	***100 Persen***					***Persentase Administrasi Umum terlayani***	***100 Persen***		
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul			16.000.000	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul			29.357.800	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket		
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul			500.000.000	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul			767.330.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	438 Paket				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	438 Paket		
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul			187.000.000	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul			268.847.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket		
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul			48.500.000	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul			55.153.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	59 Paket				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	59 Paket		
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul			1.300.000	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul			1.200.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul			12.000.000	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul			12.715.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul			217.000.000	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul			210.322.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
	X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gunungkidul			350.000.000	X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gunungkidul			304.629.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		
	X.XX.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Kab. Gunungkidul			***208.390.000***	***X.XX.01.2.07***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Kab. Gunungkidul			***115.000.000***	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	***100 Persen***					***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana***	***100 Persen***		

	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul			148.390.000	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul			115.000.000	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	174 Unit					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	174 Unit		
	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul			30.000.000	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		
	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul			30.000.000	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul			0	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		
	X.XX.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Kab. Gunungkidul			***850.000.000***	***X.XX.01.2.08***	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Kab. Gunungkidul			***857.318.280***	
				Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	***100 Persen***					***Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi***	***100 Persen***		
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul			461.000.000	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul			460.054.280	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul			322.000.000	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul			322.000.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul			67.000.000	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul			75.264.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		
	X.XX.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Kab. Gunungkidul			***523.000.000***	***X.XX.01.2.09***	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Kab. Gunungkidul			***490.068.000***	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfaslitasi pemeliharaanya	***100 Persen***					***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terfaslitasi pemeliharaanya***	***100 Persen***		
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul			173.000.000	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul			172.600.000	

			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit		
	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul			5.000.000	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul			5.000.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit		
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul			65.000.000	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul			104.620.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit		
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul			250.000.000	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul			186.848.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul			30.000.000	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul			21.000.000	
			Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit				Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit		
	Total					**807.499.477.535**	**Total**					**700.431.198.746**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Rencana Kerja Tahun 2026, Dinas Pendidikan mengakomodir hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang Kalurahan maupun Kapanewon.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum Perangkat Daerah. Forum ini dilakukan untuk menyelaraskan usulan kegiatan, lokasi serta sasaran penerima dalam Renja Dinas Pendidikan. Hasil usulan program dan kegiatan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang tertuang sebagaimana tabel 2.24a dan tabel 2.24b berikut ini :

Tabel 2.24a.
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra 2021-2026)	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra 2025-2029)	Usulan	Alamat	Koefisien/Volume	Satuan	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
						Dinas Pendidikan								**3.618.295.200**	
1	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD;**	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 SD			**96.09**			**3.618.295.200**	
							Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar;	Skor Kemampuan Literasi SD			**71.82**				
							Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama;	Skor Kemampuan Numerasi SD			**61.51**				
							Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan	Iklim Keamanan SD			**78.44**				
							Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD;	Iklim Kebinekaan SD			**76,26**				
							Angka Partisipasi	Iklim Inklusivitas SD			**63,44**				

							Kasar (APK) SD;								
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 SMP			**99.54**				
								Skor Kemampuan Literasi SMP			**81.68**				
								Skor Kemampuan Numerasi SMP			**70.91**				
								Iklim Keamanan SMP			**75.65**				
								Iklim Kebinekaan SMP			**74.30**				
								Iklim Inklusivitas SMP			**63.36**				
								Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6 PAUD			**93.06**				
								Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B			**93.32**				
								Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV			**96.21**				
								Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan			**27.85**				
	1	***01***	***02***	***2.01***		***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	***Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi A***					-		***164.362.000***	
							Persentase SD yang terakreditasi A								
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar									
								Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	PIS	Kalurahan Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	50	Peserta Didik	500.000	25.000.000	
								Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	PIS	Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari. Kabupaten Gunungkidul	30	Peserta Didik	500.000	15.000.000	
								Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	PIS	Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul	16	Peserta Didik	500.000	8.000.000	
								Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	PIS	Kalurahan Mulusan	4	Peserta Didik	500.000	2.000.000	

	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	PIS	Bulurejo, Semin, gunugkidul	1	Paket	114.362.000	114.362.000	
	1	***01***	***02***	***2.02***		***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	***Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi A***					-		***26.250.000***	
							Persentase SMP yang terakreditasi A								
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama									
								Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	PIS	Kalurahan Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	30	Peserta Didik	750.000	22.500.000	
								Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	PIS	Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari. Kabupaten Gunungkidul	5	Peserta Didik	750.000	3.750.000	
	1	***01***	***I***	***2.03***		***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***	***Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi***							***2.784.683.200***	
							Persentase PAUD yang terakreditasi								
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	***PIS***	***Klepu RT 01/RW 04, Giriwungu, Panggang***	***1,00***	***Unit***	***95.356.700***	***95.356.700***	
									PIS	***Banaran III, RT 13 RW 03 Banaran, Playen Gunungkidul***	***1,00***	***Unit***	***137.500.000***	***137.500.000***	
									PIS	***KLUMPIT, KENTENG, PONJONG, GUNUNGKIDUL***	***1,00***	***Unit***	***137.550.000***	***137.550.000***	

									PIS	***Munggur, 002/002, Ngipak, Karangmojo***	***1,00***	***Unit***	***123.000.000***	***123.000.000***	
									PIS	***pADUKUHAN dONDONG rt 04/04 jETIS, sAPTOSARI***	***1,00***	***Unit***	***123.000.000***	***123.000.000***	
									PIS	***Padukuhan Cekel RT 09 RW 03 Jetis Saptosari***	***0.3***	***Meter***	***41.265.000***	***41.265.000***	
									PIS	***Padukuhan Jetis RT 04 RW 01 Jetis Saptosari***	***0.25***	***Meter***	***34.387.500***	***34.387.500***	
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD									
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	2	Paket	15.000.000	30.000.000	
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	Kalurahan Giripanggung,Tepus, Gunungkidul	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	Padukuhan Tompak	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	PAUD Matahari Padukuhan Munggur dan PAUD Seruni Padukuhan Dungkasi, Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo	2	Paket	15.000.000	30.000.000	
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	Plumbungan, Gedangrejo, Karangmojo	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	Padukuhan Karangnongko	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	Jlantir 1, Gedangrejo, Karangmojo	1	Paket	15.000.000	15.000.000	

								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	PAUD PELANGI BANGSA ,DUSUN NGEPUNG KALURAHAN KARANGMOJO	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	Karangayu, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	Jati, Karangasem, Ponjong, Gunungkidul	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	Kalurahan Giring	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	Kalurahan Bendungan (PAUD AL AMIN Selang dan PAUD AL HIDAYAH Watudalang)	2	Paket	15.000.000	30.000.000	
								Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	PIS	PAUD Kalurahan Natah, Nglipar	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
								Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	PIS	Sendangrejo Rt 01 RW 04,Tancep,Ngawen,Gunungkidul(Koordinat Lokasi PAUD KB Rosalia indah,-7.802972757553083 110.67135716375425)	1	Ruang	247.064.000	247.064.000	
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seang/Berat	PIS	Trosari II, Tepus, Tepus, Gunungkidul	1	Unit	40.000.000	40.000.000	
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seang/Berat	PIS	Kalurahan Karangasem Kapanewon Paliyan	2	Unit	40.000.000	80.000.000	

								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seang/Berat	PIS	Weru Petir Rongkop	1	Unit	40.000.000	40.000.000	
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Nglegi, Patuk, Gunungkidul	2	Paket	25.000.000	50.000.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	GEBLUG RT/RW 001/001, KENTENG, PONJONG, GUNUNGKIDUL	6	Paket	10.139.000	60.834.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul	2	Paket	25.000.000	50.000.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Kalurahan Girisekar, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872	9	Paket	10.139.000	91.251.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Giritirto	5	Paket	10.139.000	50.695.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Padukuhan Ngembes RT 005 / RW 001	1	Paket	25.000.000	25.000.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	PAUD MAWAR, Patuk RT 004 RW 001 Patuk Patuk Gunungkidul	1	Paket	10.139.000	10.139.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Giriasih, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia	3	Paket	25.000.000	75.000.000	

								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Panjatan RT 09 / RW 02	1	Paket	25.000.000	25.000.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari. Kabupaten Gunungkidul	5	Paket	10.139.000	50.695.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Banjarejo, Tanungsari	4	Paket	10.139.000	40.556.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Kepuh Karangawen Girisubo	1	Paket	10.139.000	10.139.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	PAUD CEMPAKA, Sumbertetes RT 020 RW 004 Patuk Patuk Gunungkidul	1	Paket	10.139.000	10.139.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	PAUD SPS Tunas Muda, Pampang (Kedungdowo Wetan RT015/RW004, Pampang, Paliyan, Gunungkidul)	1	Paket	10.139.000	10.139.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Ngunut playen gunungkidul	1	Paket	10.139.000	10.139.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Ngunut Playen Gunungkidul	1	Paket	25.000.000	25.000.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Padukuhan Mojosari, Kalurahan Jetis	1	Paket	25.000.000	25.000.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul	2	Paket	25.000.000	50.000.000	

								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Padukuhan Waduk, Padukuhan Trosari, Padukuhan Salam, Padukuhan Trosari, Padukuhan Baran Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk	2	Paket	25.000.000	50.000.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Padukuhan Gadungsari, Wonosari	2	Paket	10.139.000	20.278.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	Kalurahan Hargsoari Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul	3	Paket	10.139.000	30.417.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	PAUD Kalurahan Natah, Nglipar	1	Paket	25.000.000	25.000.000	
								Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	PIS	PAUD Kalurahan Natah, Nglipar	1	Paket	10.139.000	10.139.000	
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
								Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	PIS	Klepu 002/001 Giriasih Purwosari Gunungkidul	1	Ruang	70.000.000	70.000.000	
								Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	PIS	Gading VII, RT 005, RW 007 dan Gading X RT 006, RW 010, Gading, Playen , Gunungkidul	1	Ruang	100.000.000	100.000.000	
								Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	PIS	PAUD Kalurahan Nglipar, Nglipar	1	Ruang	70.000.000	70.000.000	
								Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	PIS	Kalurahan Sidoharjo	1	Ruang	100.000.000	100.000.000	

								Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	PIS	Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu	2	Ruang	100.000.000	200.000.000	
								Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	PIS	Mendongan, Bandung, Playen, Gunungkidul	1	Ruang	100.000.000	100.000.000	
	1	***01***	***02***	***2.04***		***Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	***Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi***					-		***643.000.000***	
							Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang terakreditasi								
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Kalurahan Terbah	1	Warga Belajar	1.690.000	1.690.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Kalurahan Kemadang	15	Warga Belajar	1.690.000	25.350.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Watugajah,Gedangsari,	10	Warga Belajar	1.160.000	11.600.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Kalurahan Wunung	7	Warga Belajar	1.160.000	8.120.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Kalurahan Piyaman	14	Warga Belajar	1.690.000	23.660.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	kalurahan karangduwet kapanewon paliyan kabupaten gunungkidul	75	Warga Belajar	1.690.000	126.750.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Dengok, Playen Gunungkidul	24	Warga Belajar	1.690.000	40.560.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Watugajah,Gedangsari,	10	Warga Belajar	1.690.000	16.900.000	

								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Gatak 006/Gari, Wonosari, Gunungkidul	4	Warga Belajar	1.690.000	6.760.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Kalurahan Wunung	49	Warga Belajar	1.690.000	82.810.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Kalurahan Piyaman	1	Warga Belajar	1.160.000	1.160.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Gatak 006/009, Gari Wonosari, Gunungkidul	1	Warga Belajar	1.160.000	1.160.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Jl. Wediombo Km7, Candirejo, Semanu	1	Warga Belajar	1.690.000	1.690.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Beji, Ngawen, Gunungkidul	20	Warga Belajar	1.690.000	33.800.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul	54	Warga Belajar	1.690.000	91.260.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Kaluirahan Karangasem Kapanewon Paliyan	32	Warga Belajar	1.690.000	54.080.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	PKBM Bangun Warga, Padukuhan Kalangbangi Kulon, Ngeposari, Semanu	5	Warga Belajar	1.160.000	5.800.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Kalurahan Gombang	40	Warga Belajar	1.690.000	67.600.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	PKBM Bangun Warga, Padukuhan Kalangbangi Kulon, Ngeposari, Semanu	5	Warga Belajar	1.690.000	8.450.000	

								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Kalurahan Hargosari Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul	5	Warga Belajar	1.690.000	8.450.000	
								Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	PIS	Kuwon Lor, Pacarejo Semanu	15	Warga Belajar	1.690.000	25.350.000	
	JUMLAH													**3.618.295.200**	

Tabel 2.24b.
REKAPITULASI USULAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA RESES KESELURUHAN, TAHUN 2026

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian tema dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Tema Pembangunan Nasional dalam RKP tahun 2026 adalah ”kedaulatan pangan dan energi, serta penguatan ekonomi yang produktif dan inklusif sebagai fondasi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045” dengan 8 Prioritas Nasional (PN) sesuai 8 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu:

PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, ekonomi Hijau, dan ekonomi Biru

PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

PN 4 : Memperkuat Pembangunan SUmber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas

PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskian

PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Arah Kebijakan dan strategi Pembangunan RPJM 2025-2029 bidang Pendidikan pada PN 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas yaitu:

1. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
   a. Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   b. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas
   c. Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
   d. Pencegahan dan penangan Anak Tidak Sekolah (ATS)
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
   a. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK)
   b. Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran berkualitas, termasuk peningkatan kecakapan literasi kelas awal, serta penguatan karakter dan *wellbeing* peserta didik dan pendidik
   c. Pemantapan sistem asesmen komprehensif
   d. Pengembangan anak usia dini holistic-integratif
   e. Peningkatan kualitas Pendidikan agama dan Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   f. Penerapan kuirkulum yang kontektual berpusat pada peserta didik serta focus pada karakter dan kompetensi esensial
   g. Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul
   h. Revitalisasi Pendidikan non formal
3. Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas
   a. Peningkatan kualitas Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan
   b. Rekognisi lulusan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan
   c. Penguatan penjaminan mutu Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan
4. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
   a. Reformasi Pendidikan keguruan melalui penguatan LPTK dan revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)
   b. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier professional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
5. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan
   a. Penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan
   b. Peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Pendidikan khususnya terkait pemanfaatan anggaran Pendidikan
   c. Penguatan sistem penjaminan mutu
6. Penguatan Pendidikan Tinggi dan Pengembangan bidang STEAM
   a. Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
   b. Pengembangan STEAM
   c. Penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah Masyarakat ilmiah

d. Peningkatan kualitas dan pengelolaan dosesn serta tenaga kependidikan
7. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja
   a. Penguatan Pendidikan menengah vokasi
   b. Penguatan Pendidikan tinggi vokasi
   c. Penguatan pelatihan vokasi
   d. Penguatan produktivitas tenaga kerja melalui penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif
8. Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional
   a. Penguatan kapasitas iptek dan inovasi
   b. Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi
   c. Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara massif di berbagai bidang
   d. Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing
9. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)
   a. Pengembangan manajemen talenta nasional (MTN) seni budaya
   b. Pengembangan manajemen talenta nasional (MTN) riset inovasi
   c. Pengembangan manajemen talenta nasional (MTN) olahraga
   d. Penguatan tata Kelola manajemen talenta nasional (MTN)
10. Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi
   a. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan
   b. Peningkatan budaya kegemaran membaca

Tema RKPD Pemda DIY tahun 2026 adalah “Pengembangan sektor unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif” dan RPJMD D.I.Yogyakarta Tahun 2022-2027 dengan visi “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja” melalui:
1. Reformasi Kalurahan;
2. Pemberdayaan Kawasan Selatan;
3. Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi.

Adapun prioritas Pembangunan Pemda DIY pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1. Penurunan tingkat kemiskinan.
2. Peningkatan kehidupan ekonomi yang layak.
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta.
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas social, antar wilayah).
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan.
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dirumuskan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 yaitu “Penguatan pondasi pembangunan melalui peningkatan derajat pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi berdasarkan potensi daerah yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat”. Tema tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan ekonomi :
   a. Investasi dan pariwisata
   b. Pengembangan sektor unggulan
2. Penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim, dan penanggulangan stunting;
3. Ketahanan pangan;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Infrastruktur, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana;
6. Ketentraman dan ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul selanjutnya menjadi acuan bagi PD dalam penentuan perencanaan program kegiatan tahun 2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 mengacu pada tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Secara langsung Dinas Pendidikan mendukung pencapaian prioritas daerah keempat yaitu peningkatan kualitas SDM dengan sasaran daerah derajat kualitas SDM meningkat. Rencana Kerja ini dijabarkan dalam program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2026 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD serta memperhatikan rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Pengaliran prioritas daerah sampai pada indikator sasaran PD disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
3.	Peningkatan Kualitas SDM	Derajat Kualitas SDM meningkat	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat	Indeks SPM Bidang Pendidikan

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, telah ditetapkan tujuan dan IKU Dinas Pendidikan beserta indikator dan target kinerja untuk tahun 2026. Capaian

indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,35 dan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,40 pada tahun 2024. Melihat capaian target-target tersebut, maka dilakukan perubahan proyeksi terhadap target tujuan kinerja, Sasaran dan target IKU Dinas Pendidikan sebagaimana berikut:

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Pendidikan

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2030
1	Meningkatnya Derajad Pendidikan Penduduk	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	7,47 13,52

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Pendidikan

NO	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2026
1	Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan meningkat	Indeks SPM Bidang Pendidikan	87.01

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan

NO	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU PD Tahun 2026
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Penduduk	1. Rata-rata lama sekolah	7,39
		2. Harapan lama sekolah	13.44
2	Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan meningkat	Indeks SPM Bidang Pendidikan	87.01

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Kebijakan Umum Bupati;
3. Prioritas Pembangunan;
4. Pencapaian SDGs;
5. Pengurangan Kemiskinan;
6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
8. Pencapaian IKU;
9. Pengentasan warga buta aksara;
10. Pengentasan Anak Tidak Sekolah;
11. Kebijakan Merdeka Belajar

Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2026 terdiri atas 6 program yang dijabarkan dalam 16 kegiatan dan 126 sub kegiatan, dengan kebutuhan dana / pagu indikatif senilai Rp. 700.431.198.746,-, dengan lokasi pelaksanaan di seluruh Gunungkidul. Rekapitulasi program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan sebagaimana telah disebutkan diatas, disajikan dalam tabel 4.1. dan hasil perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 disajikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.1

Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Dinas Pendidikan		**700.431.198.746**	
					1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**700.431.198.746**	
					1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		**700.431.198.746**	
Peningkatan Kualitas SDM	**Derajat Kualitas SDM meningkat**	**Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat**	**Nilai AKIP PD**	**84,5**	**1**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**579.934.845.796**	
					1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	293.514.000	
					1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
											Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.155.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			

										Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.600.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
										Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.600.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
										Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10.600.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
										Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10.600.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.635.000	DINAS PENDIDIKAN

					1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
											Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.324.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			
											Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	575.970.371.116	
					1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
											Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	575.800.466.116	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
											Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.560.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
											Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.500.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			

										Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
										Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.700.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
										Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	300.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	129.845.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	289.485.000	
					1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		

										Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	625.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		
										Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	9.600.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
										Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9.500.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
										Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	252.990.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
										Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.770.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	269.535.600	
					1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		

											Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	111.380.600	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
											Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.120.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
											Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	154.035.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.649.553.800	
					1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
											Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	29.357.800	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
											Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	767.330.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
											Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	268.847.000	DINAS PENDIDIKAN

					1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
											Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55.153.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
											Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.200.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
											Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.715.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
											Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.322.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
											Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	304.629.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		115.000.000	
					1	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebel		115.000.000	

										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	857.318.280	
					1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
											Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	460.054.280	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
											Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	322.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
											Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75.264.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	490.068.000	
					1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

											Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	172.600.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel			
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
											Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104.620.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
											Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	186.848.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
											Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21.000.000	DINAS PENDIDIKAN
		Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat	Indeks SPM Bidang Pendidikan	87.01	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	116.058.364.050	

					1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	50.117.972.800	
					1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
											Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	284.776.800	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
											Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	208.417.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
											Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	410.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
											Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	123.420.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah			
											Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	166.806.200	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			

											Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	412.144.500	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
											Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.200.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
											Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	103.070.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
											Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	45.280.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
											Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	45.149.050.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			

											Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135.447.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
											Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	8.700.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
											Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	20.959.800	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
											Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	52.420.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
											Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12.300.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			

											Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	13.965.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
											Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7.725.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
											Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	17.265.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
											Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	193.500.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			
											Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	958.067.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
											Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	318.400.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			

											Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	18.465.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			
											Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	215.572.500	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
											Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	435.022.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			
											Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	35.840.372.650	
					1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
											Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.062.498.500	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			

										Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.088.381.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		
										Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	352.049.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		
										Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	870.905.350	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
										Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	240.100.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		
										Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.000.225.000	DINAS PENDIDIKAN

					1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
											Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	501.270.500	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
											Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.200.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
											Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	113.474.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
											Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	64.556.600	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
											Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	28.674.320.000	DINAS PENDIDIKAN

					1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
											Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	83.837.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
											Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	14.100.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
											Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	13.500.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
											Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	14.649.900	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
											Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.500.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			

											Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	18.299.800	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
											Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7.368.500	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
											Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
											Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	347.754.800	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
											Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	12.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			

										Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	190.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
										Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.144.382.700	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	23.217.634.600	
					1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
										Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	456.049.200	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD		
										Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		
										Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	593.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		
										Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	4.912.500	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		

											Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	147.252.500	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			
											Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44.760.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			
											Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	16.052.220.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			
											Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	181.585.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
											Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	19.110.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			

										Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	19.110.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
										Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	19.110.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
										Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3.930.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
										Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3.930.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
										Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	6.100.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru		
										Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	222.890.740	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik		

										Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	35.379.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		
										Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.200.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
										Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	12.937.500	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		
										Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1.214.516.900	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
										Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	51.708.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		

											Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seang/Berat	135.010.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			
											Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	56.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			
											Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	3.023.750.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
											Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
											Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	737.173.260	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	6.882.384.000	
					1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			

										Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	130.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
										Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.575.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
										Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5.037.500	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
										Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16.525.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
										Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.907.080.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		

											Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.655.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
											Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	16.410.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
											Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	16.410.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
											Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	16.410.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
											Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3.505.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			

											Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3.505.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
											Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2.350.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
											Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3.505.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			
											Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16.410.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
											Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	4.736.006.500	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	65.065.000	

					1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	57.630.000	
					1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
											Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	14.400.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
											Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	14.130.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar			
											Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	14.130.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
											Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	14.970.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	7.435.000	
					1	0	0	2.0	000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan			

						1	3	2	2	Nonformal			
											Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	3.930.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
											Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	3.505.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	4.269.591.400	
					1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	4.269.591.400	
					1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			

											Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	277.631.400	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
											Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.991.960.000	DINAS PENDIDIKAN
					1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	3.332.500	
					1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	3.332.500	
					1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			

										Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3.332.500	DINAS PENDIDIKAN
					2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100.000.000	
					2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	100.000.000	
					2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	100.000.000	
					2	22	08	5.08		Pendidikan Berbasis Budaya	-	100.000.000	
					2	22	08	5.08	0001	Pembinaan Muatan Lokal			
											Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
					JUMLAH							**700.431.198.746**	

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Pendidikan				700.431.198.746,00				709.089.988.500,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				700.331.198.746,00				708.789.988.500,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				700.331.198.746,00				708.789.988.500,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		84,51 Nilai	579.934.845.796,00			-	575.799.578.000,00
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		undefined undefined	293.514.000,00			-	816.000.000,00
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	32.155.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.000.000,00
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			26.000.000,00
1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			26.000.000,00
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			26.000.000,00
1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	10.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			26.000.000,00
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	6 Laporan	64.635.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	9 Laporan	74.324.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			390.000.000,00
1	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								

						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Data	80.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			182.000.000,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		undefined undefined	575.970.371.116,00			-	571.383.378.000,00
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.795 Orang/bulan	575.800.466.116,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			571.185.378.000,00
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.560.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.500.000,00
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	4.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00
1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	8.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	4 Laporan	25.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			26.000.000,00
1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			500.000,00

1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	13 Laporan	129.845.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			154.000.000,00
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		undefined undefined	289.485.000,00			-	748.000.000,00
1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	625.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			500.000,00
1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Laporan	9.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			9.000.000,00
1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	9.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.500.000,00
1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Laporan	252.990.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			715.000.000,00
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Laporan	16.770.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.000.000,00
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian		undefined undefined	269.535.600,00			-	208.000.000,00

1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	111.380.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			107.000.000,00
1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.120.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000,00
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	571 Orang	154.035.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum		undefined undefined	1.649.553.800,00			-	1.318.200.000,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	21 Paket	29.357.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			16.500.000,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	438 Paket	767.330.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			500.000.000,00
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	23 Paket	268.847.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			187.000.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	59 Paket	55.153.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			48.500.000,00

1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.200.000,00
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.715.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.000.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	78 Laporan	210.322.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000.000,00
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	304.629.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			350.000.000,00
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		undefined undefined	115.000.000,00			-	0,00
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	115.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		undefined undefined	857.318.280,00			-	850.000.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	12 Laporan	460.054.280,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			461.000.000,00

1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Laporan	322.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			322.000.000,00
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	6 Laporan	75.264.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			67.000.000,00
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		undefined undefined	490.068.000,00			-	476.000.000,00
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	72 Unit	172.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			138.500.000,00
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	100 Unit	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.500.000,00
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	49 Unit	104.620.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			60.000.000,00
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	19 Unit	186.848.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000,00
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	56 Unit	21.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00

1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Skor Kemampuan Numerasi SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Inklusivitas SD Skor Kemampuan Numerasi SMP Skor Kemampuan Literasi SD Iklim Kebinekaan SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebinekaan SD Iklim Keamanan SD Skor Kemampuan Literasi SMP Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 PAUD Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 SD Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 SMP		27,85 Persentase 61,51 Nilai 63,36 Nilai 63,44 Nilai 70,91 Nilai 71,82 Nilai 74,30 Nilai 75,65 Nilai 76,26 Nilai 78,44 Nilai 81,68 Nilai 93,06 Persentase 93,32 Persentase 96,09 Persentase 96,21 Persentase 99,54 Persentase	116.058.364.050,00			-	128.406.410.500,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Sekolah Dasar			50.117.972.800,00			-	56.661.550.000,00
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar	1 Ruang	284.776.800,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			1.500.000.000,00
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar	1 Ruang	208.417.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			1.700.000.000,00
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Tileng Kab. Gunungkidul, Girisubo,	2 Unit	410.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			525.000.000,00

							Nglindur						
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	123.420.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			0,00
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah								
						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	166.806.200,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			0,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1.076 Peserta Didik	412.144.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			350.000.000,00
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	150 Orang	7.200.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			8.000.000,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	508 Orang	103.070.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			250.000.000,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								

						Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	40 Satuan Pendidikan	45.280.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			65.000.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464 Satuan Pendidikan	45.149.050.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA			44.999.050.000,00
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	464 Orang	135.447.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			250.000.000,00
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	40 Orang	8.700.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			22.000.000,00
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	14 Konten Digital	20.959.800,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			20.000.000,00
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	52.420.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			45.000.000,00
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Dokumen	12.300.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			12.000.000,00
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Dokumen	13.965.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			14.000.000,00
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	3 Komunitas	7.725.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			11.500.000,00
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Kegiatan	17.265.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			14.500.000,00
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	515 Paket	193.500.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			350.000.000,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4 Ruang	958.067.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			1.500.000.000,00
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								

						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sumbergiri Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Hargosari	4 Unit	318.400.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			300.000.000,00
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	70 Orang	18.465.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			20.500.000,00
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik								
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	464 Satuan Pendidikan	215.572.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			130.000.000,00
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Hargosari	4 Ruang	435.022.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			2.075.000.000,00
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.600 Peserta Didik	800.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			2.500.000.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Sekolah Menengah Pertama		undefined undefined	35.840.372.650,00			-	35.882.300.500,00

1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus	1 Unit	1.062.498.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			850.000.000,00
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Ruang	1.088.381.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			912.480.500,00
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	1 Ruang	352.049.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			0,00
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium							
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk	1 Ruang	870.905.350,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			0,00
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Gunungkidul, Paliyan, Sodo	2 Unit	240.100.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			0,00
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2000 Peserta Didik	1.000.225.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			2.500.000.000,00
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							

						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	4857 Peserta Didik	501.270.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			350.000.000,00
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	150 Orang	7.200.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			7.500.000,00
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	361 Orang	113.474.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			1.085.000.000,00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	109 Satuan Pendidikan	64.556.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			75.500.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109 Satuan Pendidikan	28.674.320.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA			28.824.320.000,00
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	218 Orang	83.837.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			197.500.000,00
1	0	0	2.0	004	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								

	1	2	2	8									
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	66 Orang	14.100.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			25.000.000,00
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	66 Konten Digital	13.500.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			30.000.000,00
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	66 Orang	14.649.900,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			20.000.000,00
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Dokumen	4.500.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			15.000.000,00
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Dokumen	18.299.800,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			25.000.000,00
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	4 Komunitas	7.368.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			30.000.000,00
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								

						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Kegiatan	15.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			25.000.000,00
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	108 Satuan Pendidikan	347.754.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			500.000.000,00
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	49 Orang	12.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			30.000.000,00
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	317 Paket	190.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			380.000.000,00
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Paliyan, Sodo	4 Ruang	1.144.382.700,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			0,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		undefined undefined	23.217.634.600,00			-	30.021.480.000,00
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								

						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Gunungkidul, Playen, Banaran Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu Kab. Gunungkidul, Ponjong, Kenteng Kab. Gunungkidul, Saptosari, Jetis	5 Unit	456.049.200,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			0,00
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD								
						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	8 Paket	120.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			150.000.000,00
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD								
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.186 Peserta Didik	593.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			2.500.000.000,00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	105 Orang	4.912.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			6.500.000.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	341 Orang	147.252.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			885.000.000,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								

						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	180 Satuan Pendidikan	44.760.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			43.000.000,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD								
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.186 Satuan Pendidikan	16.052.220.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA			16.052.220.000,00
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD								
						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.186 Orang	181.585.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			150.000.000,00
1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	36 Orang	19.110.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			15.000.000,00
1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	3 Konten Digital	19.110.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			30.000.000,00
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	36 Orang	19.110.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			25.000.000,00

1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Dokumen	3.930.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			10.000.000,00
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Dokumen	3.930.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			10.000.000,00
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	4 Komunitas	6.100.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			25.000.000,00
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Tancep	1 Ruang	222.890.740,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik								
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	108 Peserta didik	35.379.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			50.000.000,00
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Kegiatan	7.200.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			20.000.000,00
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan								
						Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	120 Orang	12.937.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			20.000.000,00

1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.214.516.900,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			1.100.000.000,00
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.112 Paket	51.708.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			49.000.000,00
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Paliyan, Karangasem Kab. Gunungkidul, Rongkop, Petir	4 Unit	135.010.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			0,00
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD								
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	56.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			0,00
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD								
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.186 Satuan Pendidikan	3.023.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			2.227.260.000,00
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								

						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ruang	50.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			0,00
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Playen, Gading Kab. Gunungkidul, Playen, Bandung Kab. Gunungkidul, Tepus, Sidoharjo Kab. Gunungkidul, Semanu, Semanu Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih	7 Ruang	737.173.260,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			160.000.000,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya kebutuhan pendidikan penduduk usia Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		undefined undefined	6.882.384.000,00			-	5.841.080.000,00
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260 Peserta Didik	130.000.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			550.000.000,00
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								

						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	30 Orang	1.575.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			5.000.000,00
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	15 Orang	5.037.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			15.000.000,00
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	26 Satuan Pendidikan	16.525.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			12.000.000,00
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Satuan Pendidikan	1.907.080.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA			1.907.080.000,00
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Orang	7.655.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			6.500.000,00
1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	26 Orang	16.410.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			5.000.000,00

1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan								
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	3 Konten Digital	16.410.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			15.000.000,00
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	26 Orang	16.410.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			5.000.000,00
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Dokumen	3.505.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			5.000.000,00
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan								
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Dokumen	3.505.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			5.000.000,00
1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Komunitas	2.350.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			7.500.000,00
1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Kegiatan	3.505.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			5.000.000,00
1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik								

						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	26 Peserta Didik	16.410.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			18.000.000,00
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.693 Peserta Didik	4.736.006.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			3.280.000.000,00
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal		100 Persentase	65.065.000,00			-	110.000.000,00
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terbentuknya pemahaman peserta didik Pendidikan Dasar terhadap keunggulan, kearifan, dan identitas daerah		undefined undefined	57.630.000,00			-	90.000.000,00
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
						Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Dokumen	14.400.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			25.000.000,00
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
						Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	70 Orang	14.130.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			25.000.000,00
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar								
						Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	2 Dokumen	14.130.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			25.000.000,00
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar								

						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	14.970.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			15.000.000,00
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terbentuknya pemahaman peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terhadap keunggulan, kearifan, dan identitas daerah		undefined undefined	7.435.000,00			-	20.000.000,00
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
						Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Dokumen	3.930.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			10.000.000,00
1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
						Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Dokumen	3.505.000,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			10.000.000,00
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru		27.80 Persentase	4.269.591.400,00			-	4.469.000.000,00
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya kebutuhan guru di seluruh Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		undefined undefined	4.269.591.400,00			-	4.469.000.000,00
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	4 Dokumen	277.631.400,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			15.000.000,00
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								

						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	4 Laporan	3.991.960.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			4.454.000.000,00
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui		100 Persentase	3.332.500,00			-	5.000.000,00
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terbitnya dokumen Izin Pendirian PAUD dan Pendidikan Nonformal Swasta yang sah secara hukum			3.332.500,00			-	5.000.000,00
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Dokumen	3.332.500,00	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			5.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100.000.000,00				300.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				300.000.000,00
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya		0.5 Persentase	100.000.000,00			-	300.000.000,00
2	22	08	5.08		Pendidikan Berbasis Budaya	Terciptanya peserta didik dengan sikap santun, peduli lingkungan, dan mampu hidup harmonis di tengah keberagaman budaya		undefined undefined	100.000.000,00			-	300.000.000,00
2	22	08	5.08	0001	Pembinaan Muatan Lokal								
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	100.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			300.000.000,00
J U M L A H									**700.431.198.746**				**709.089.988.500**

Tabel 4.2a

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KAB. GUNUNGKIDUL

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sanggar Kegiatan Belajar				553.964.000,00				712.910.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				553.964.000,00				712.910.000,00
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				553.964.000,00				712.910.000,00
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		84,51 Nilai	287.863.500,00			-	298.010.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum		undefined undefined	165.613.900,00			-	190.010.000,00
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Paket	6.775.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.000.000,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Paket	88.058.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.510.000,00
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Paket	55.380.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			55.500.000,00
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	2 Paket	9.240.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.000.000,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	2 Laporan	6.160.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		undefined undefined	65.685.600,00			-	66.000.000,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	36 Laporan	65.685.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			66.000.000,00
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		undefined undefined	56.564.000,00			-	42.000.000,00
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Unit	25.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			26.000.000,00
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	50 Unit	26.164.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11.000.000,00
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	15 Unit	4.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00

1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Skor Kemampuan Numerasi SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Inklusivitas SD Skor Kemampuan Numerasi SMP Skor Kemampuan Literasi SD Iklim Kebinekaan SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebinekaan SD Iklim Keamanan SD Skor Kemampuan Literasi SMP Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 PAUD Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 SD Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 SMP		27,85 Persentase 61,51 Nilai 63,36 Nilai 63,44 Nilai 70,91 Nilai 71,82 Nilai 74,30 Nilai 75,65 Nilai 76,26 Nilai 78,44 Nilai 81,68 Nilai 93,06 Persentase 93,32 Persentase 96,09 Persentase 96,21 Persentase 99,54 Persentase	266.100.500,00			-	414.900.000,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Partisipasi anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat		undefined undefined	27.300.000,00			-	84.500.000,00
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD								
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	1 Satuan Pendidikan	27.300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			84.500.000,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Partisipasi anak usia Pendidikan Nonformal/Kesetaraan meningkat		undefined undefined	238.800.500,00			-	330.400.000,00

1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	30 Peserta Didik	238.800.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			330.400.000,00
J U M L A H									**553.964.000,00**				**712.910.000,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan merupakan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun. Disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul serta Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2021-2026.

Pada bab penutup Rencana Kerja tahun 2026 ini mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Rencana Kerja tahun 2026 disusun dengan memperhatikan isu strategis, sumber daya dan potensi yang dimiliki serta melibatkan peran dari pemangku kepentingan atau *stakeholder* terkait melalui aspirasi masyarakat maupun usulan dewan. Hal ini dilaksanakan melalui proses Musrenbang tingkat Kapanewon hingga Kabupaten.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2026 Dinas Pendidikan merencanakan untuk melaksanakan 6 program dengan 16 kegiatan dan 126 sub kegiatan , dimana di dalamnya terdapat sub kegiatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan ini menjadi acuan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Tahun 2026, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.

Dalam pengendalian tersebut, dapat terlihat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan. Apabila dari hasil evaluasi

ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2026.

Wonosari, 1 Agustus 2025
DINAS PENDIDIKAN,

ttd

NUNUK SETYOWATI

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2026, dana indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan

2. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
   Persiapan penyusunan renja meliputi :
   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun renja perangkat daerah
   b. Orientasi mengenai renja perangkat daerah
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun renja perangkat daerah
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD
2) Penyusunan Renja Perangkat Daerah
   Perangkat Daerah menyusun Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mencakup :
   a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
   b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

   Hasil perumusan Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
   a. pendahuluan;
   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. penutup.
3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
   Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah dengan maksud dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan RKPD.
4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
   Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat

Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

5) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk disempurnakan dan disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

6) Penetapan
BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dari renja sampai renja final dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu renstra Badan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, RKPD, dan rancangan akhir RKPD. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
b. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan RKPD.

Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan RKPD menjadi rancangan RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat ditunjukkan pada gambar 1.2 dan 1.3 berikut:

Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

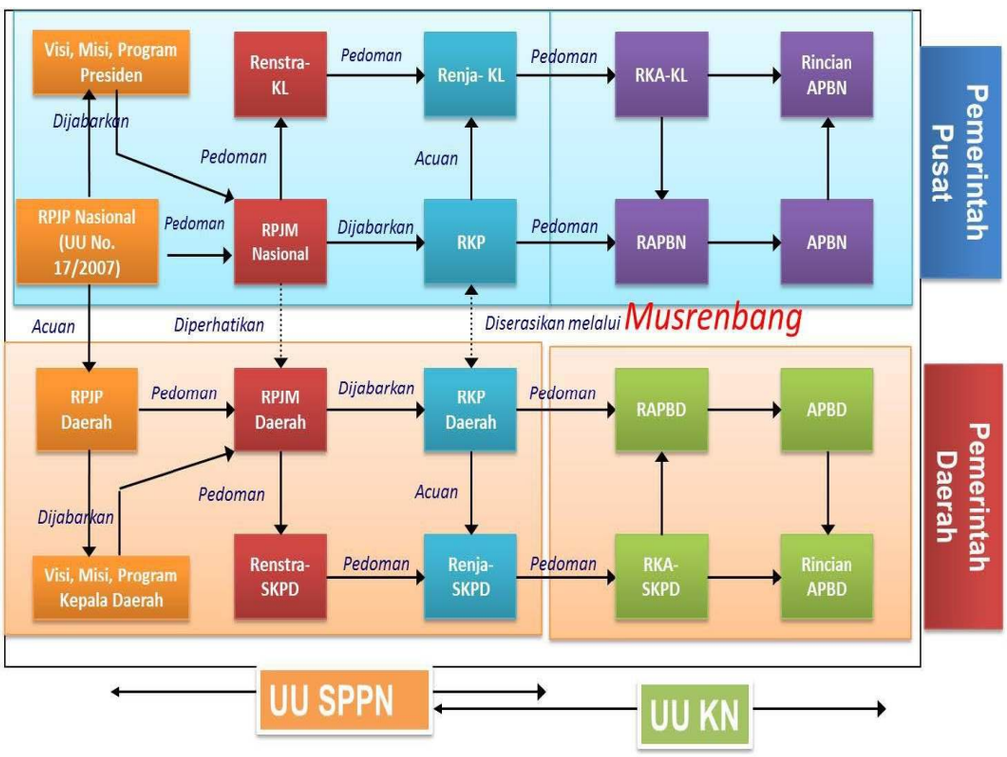

Gambar 1. 3 Keterkaitan Antar Rencana Pembangunan Daerah

1.2. Landasan Hukum

1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

   Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah., diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ditunjukkan pada Gambar 1.4.

Gambar 1. 4 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

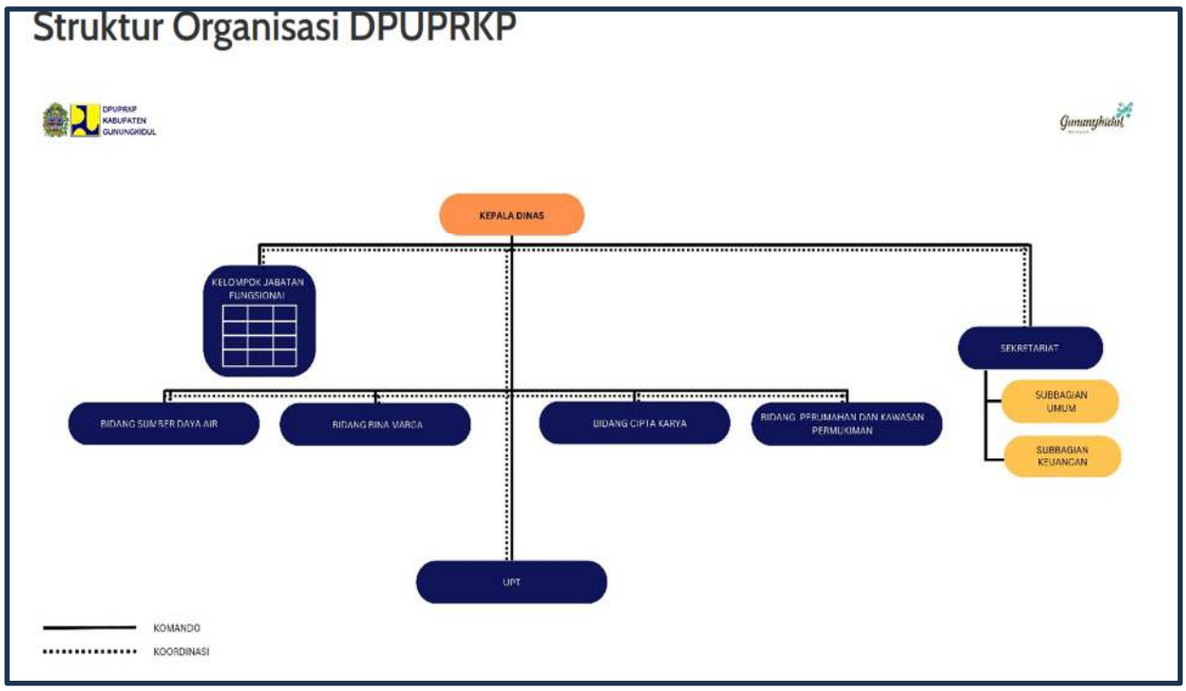

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
d. pelaksanaan pembinaan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
f. pelaksanaan pembinaan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
g. pengendalian teknis bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
h. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;
i. pelaksanaan kerja sama bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
n. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
o. pengelolaan UPT.

2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
   Dasar hukum penyusunan Renja PD ini adalah:
   1) Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
   2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
   3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42);
   4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
   6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencaaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
   7) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
   8) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
   9) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
   10) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah;
   11) Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan
   1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah
      Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 disusun dengan maksud :
      1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman jangka pendek (1 tahun) untuk tahun 2026;
      2. Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
   2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam jangka 1 tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Pemerintah DIY, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayananPerangkat Daerah;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berisikan uraian mengenai:
a. Data jumlah dan nama program, kegiatan dan sub kegiatan yang muncul pada tahap penyempurnaan rencana kerja perangkat daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan OPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kalurahan maupun kapanewon.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasiona
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
4.2. Prioritas Pembangunan
4.3. Pencapaian SDGs
4.4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
4.5. Pencapaian IKU

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Renja PD dan Capaian Renstra PD

Pada bagian ini akan diuraikan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, dengan melihat realisasi pelaksanaan progam dan kegiatan pada tahun 2024. Dari program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 tidak terjadi perubahan susunan komponen sub kegiatan. Di dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024, direncanakan sebanyak 14 program, 24 kegiatan dan 74 sub kegiatan.

Setelah beberapa kali perubahan, total pagu anggaran di dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebesar Rp81.648.506.244.

Sampai dengan Triwulan IV Bulan Desember 2024 realisasi belanja adalah sebesar Rp79.102.586.949 atau sebesar 96,88%.

Adapun capaian serapan program yang masih di bawah 95% adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber daya Air dari pagu Rp4.003.020.000 serapan sampai Triwulan IV Rp3.640.589.941 atau 90,95%;
2. Program Penataan Bangunan Gedung dari pagu Rp 10.051.636.409 serapan sampai Triwulan IV Rp9.315.059.700 atau 92,67%;
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dari pagu Rp 215.000.000 serapan sampai Triwulan IV Rp199.406.000 atau 92,75%;
4. Program Pengembangan Perumahan dari pagu Rp 1.745.474.665 serapan sampai Triwulan IV Rp1.636.856.865 atau 93,78%.

Sedangkan capaian serapan program yang mencapai diatas 95% adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari pagu Rp7.167.017.950 Serapan sampai Triwulan IV Rp6.815.358.848 atau 95,09%;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum dari pagu Rp1.467.698.520 serapan sampai Triwulan IV Rp1.454.986.500 atau 99,13%;
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dari pagu Rp 75,000,000 serapan sampai Triwulan IV Rp74.408.000 atau 99,21%;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah dari pagu Rp1.539.500.000 serapan sampai Triwulan IV Rp1.501.077.500 atau 97,50%;
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dari pagu Rp 90,000,000 serapan sampai Triwulan IV Rp89.763.000 atau 99,74%;
6. Program Penyelenggaraan Jalan dari pagu Rp45.115.608.700 serapan sampai Triwulan IV Rp44.476.452.295 atau 98,58%;
7. Program Kawasan Permukiman dari pagu Rp156.450.000 serapan sampai Triwulan IV Rp153.164.000 atau 97,90%;

8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman KumuH dari pagu Rp3.428.000.000 serapan sampai Triwulan IV Rp3.428.000.000 atau 100%;
9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) dari pagu Rp6.592.920.000 serapan sampai Triwulan IV Rp6.316.284.300 atau 95,80%;
10. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dari pagu Rp1.180.000 serapan sampai Triwulan IV Rp1.180.000 atau 100%.

Dari 14 Program tersebut ada 4 program yang capaian serapannya di bawah 95%. Faktor-faktor penyebabnya antara lain adalah

1. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di tahun sama, sehingga berpotensi terjadinya kemunduran pelaksanaan kegiatan;
2. Keberadaan dan implementasi regulasi yang dikembangkan secara optimal dapat mempengaruhi efektivitas peningkatan kinerja;
3. Perubahan desain pekerjaan, hal ini membuat desain perencanaan mengalami perubahan dan membuat mundur pekerjaan;
4. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah
5. Ketersedaiaan anggaran yang baik dan semakin implementatifnya ketersediaan anggaran dalam pelayanan publik, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kinerja.

Kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran yang perlu ditempuh dengan memperhatikan capaian kinerja Renstra untuk tahun 2024 dalam mengatasi faktor-faktor tidak tercapainya target kinerja kegiatan, yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pegawai untuk melaksanakan tugas secara maksimal guna memperoleh hasil yang terbaik sehingga dapat mencapai terget kinerja yang sudah direncanakan;
2. Meningkatkan koordinasi secara intensif terkait dengan penyelesaian faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya target kinerja;
3. Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana dan teknologi informasi yang ada semaksimal mungkin, guna menunjang tercapaianya target kinerja;
4. Mengoptimalkan pengendalian internal secara berkala dalam rangka menjamin capaian kinerja;
5. Memperbaiki proses penyusunan anggaran kegiatan fisik yang dilelangkan, agar dalam menyusun HPS tidak terdapat selisih yang jauh dengan harga penawaran yang selama ini masih dikisaran angka 20%.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat s/d Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100|Persen	102,56	100|Persen	100	100	100|Persen	100|Persen	100
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan disusun	15|Dokumen	100	15|Dokumen	100	100	15|Dokumen	15|Dokumen	100
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7|Dokumen	4|Dokumen	4|Dokumen	100	4|Dokumen	4|Dokumen	100
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1|Dokumen	1|Dokumen	100
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1|Dokumen	1|Dokumen	100
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil		3|Dokumen	3|Dokumen	3|Dokumen	100	3|Dokumen	3|Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2|Dokumen	2|Dokumen	2|Dokumen	100	2|Dokumen	2|Dokumen	100
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		15|Laporan	15|Laporan	15|Laporan	100	15|Laporan	15|Laporan	100
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	16|Dokumen	100	16|Dokumen	16|Dokumen	100	16|Dokumen	16|Dokumen	100
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1330|Orang /bulan	1064|Orang /bulan	1064|Orang /bulan	100	1106|Orang /bulan	1106|Orang/bulan	100
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1|Laporan	1|Laporan	1|Laporan	100	1|Laporan	1|Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12|Laporan	14|Laporan	14|Laporan	100	14|Laporan	14|Laporan	100
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai dilayani dalam pengelolaan administasi kepegawaian	95|orang	100	95|orang	95|orang	100	95|orang	95|orang	100
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0|Paket	0|Paket	0|Paket	0	0|Paket	0|Paket	100
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		5|Dokumen	5|Dokumen	5|Dokumen	100	5|Dokumen	5|Dokumen	100
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5|Orang	1|Orang	1|Orang	100	1|Orang	1|Orang	100
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan dilayani dalam pelaksanaan	6|Kegiatan	100	6|Kegiatan	100	100	6|Kegiatan	6|Kegiatan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		administrasi umum Perangkat daerah								
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1|Paket	2|Paket	2|Paket	100	2|Paket	2|Paket	100
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2|Paket	2|Paket	2|Paket	100	2|Paket	2|Paket	100
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12|Paket	12|Paket	12|Paket	100	12|Paket	12|Paket	100
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		372|Dokumen	365|Dokumen	365|Dokumen	100	365|Dokumen	365|Dokumen	100
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12|Laporan	12|Laporan	12|Laporan	100	12|Laporan	12|Laporan	100
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12|Laporan	12|Laporan	12|Laporan	100	12|Laporan	12|Laporan	100
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12|Dokumen	12|Dokumen	12|Dokumen	100	12|Dokumen	12|Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14|Laporan	100	14|Laporan	100	100	14|Laporan	14|Laporan	100
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12|Laporan	12|Laporan	12|Laporan	100	12|Laporan	12|Laporan	100
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		96|Laporan	96|Laporan	96|Laporan	100	96|Laporan	96|Laporan	100
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2|Laporan	2|Laporan	2|Laporan	100	2|Laporan	2|Laporan	100
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah dipelihara	114|Unit	113,33	114|Unit	100	100	114|Unit	114|Unit	100
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		28|Unit	28|Unit	28|Unit	100	29|Unit	29|Unit	100
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan		20|Unit	20|Unit	20|Unit	100	20|Unit	20|Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	dibayarkan Perizinannya								
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		51|Unit	25|Unit	25|Unit	100	25|Unit	25|Unit	100
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5|Unit	2|Unit	2|Unit	100	2|Unit	2|Unit	100
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10|Unit	20|Unit	20|Unit	100	20|Unit	20|Unit	100
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik)	33,18|persen	72,22	30,53|Persen	100	100	31,858|Persen	31,858|Persen	100
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan pengaman sungai dikelola	8|Lokasi	100	8|Lokasi	100	100	8|Lokasi	8|Lokasi	100
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun		1|Titik	1|Titik	1|Titik	100	0|Titik	0|Titik	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.02.2.01.18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		0|KM	0|KM	0|KM	0	0|KM	0|KM	100
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi		1|Unit	0|Unit	0|Unit	0	1|Unit	1|Unit	100
1.03.02.2.01.22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi		3|Titik	1|Titik	1|Titik	100	0|Titik	0|Titik	100
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		0|KM	0,04|KM	0,04|KM	100	0|KM	0|KM	100
1.03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota		3|Dokumen	0|Dokumen	0|Dokumen	0	0|Dokumen	0|Dokumen	100
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		280|Orang	9|Lembaga	9|Lembaga	100	2|Lembaga	2|Lembaga	100
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA		28|Orang	0|Orang	0|Orang	0	0|Orang	0|Orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.03.02.2.01.64	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		2|Unit	0|Danau	0|Danau	0	0|Danau	0|Danau	100
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Dikelola	22|Daerah Irigasi	54,55	22|Daerah Irigasi	100	100	22|Daerah Irigasi	22|Daerah Irigasi	100
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun		2|Dokumen	2|Dokumen	2|Dokumen	100	2|Dokumen	2|Dokumen	100
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		0.16|KM	0,7|KM	0,7|KM	100	0|KM	0|KM	100
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		1.2|KM	0|KM	0|KM	0	0,25|KM	0,25|KM	100
1.03.02.2.02.13	Peningkatan Jaringan	Panjang Jaringan Irigasi		0.3|KM	1|KM	1|KM	100	0|KM	0|KM	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Irigasi Air Tanah	Air Tanah yang Ditingkatkan								
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		0.4|KM	0,17|KM	0,20|KM	117	0|KM	0|KM	100
1.03.02.2.02.19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi		0.3|KM	0,07|KM	0,07|KM	100	0.12|KM	0,22|KM	100
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		0.2|KM	0,35|KM	0.350000000 00000003|K M	100	0.27|KM	0.27|KM	100
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara		5|Bendung	0|Bendung	0|Bendung	0	0|Bendung	0|Bendung	100
1.03.02.2.02.25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara		43|Titik	0|Titik	0|Titik	0	8|Titik	8|Titik	100
1.03.02.2.02.26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara		2|KM	0,4|KM	0,4|KM	100	0.35|KM	0.35|KM	100
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi		12|Unit	12|Lembaga	12|Lembaga	100	12|Lembaga	12|Lembaga	100
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN	Persentase kepala keluarga berakses air minum layak	90,45|persen	80	85,19|Persen	100	100	87,85	87,85	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	AIR MINUM									
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Spamdes yang memiliki sistem mantap	211|Unit	80	211|Unit	100	100	211|Unit	211|Unit	100
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM		6|Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat		89|SR	0,22|Liter/Detik	0,22|Liter/Detik	100	3|Liter/Detik	3|Liter/Detik	100
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui peningkatan SPAM PDAM/SPAM Berbasis Masyarakat		0.6|6 LTR/DT	0,12|Liter/Detik	0,12|Liter/Detik	100	2.4|Liter/Detik	2.4|Liter/Detik	100
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi		300|Kelompok Masyarakat	280|Orang	280|Orang	100	320|Orang	320|Orang	100
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat		63|Unit	13|Unit	13|Unit	100	84|Unit	84|Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kawasan Perdesaan	yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan								
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan	60|Persen	100	50|Persen	100	100	0|Persen	0|Persen	100
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana persampahan dibangun	9|Unit	100	9|Unit	100	100	0|Unit	9|Unit	100
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		1|rumah tangga	108|Ton/hari	108|Ton/hari	100	0|Ton/hari	108|Ton/hari	100
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak	92,56|persen	100	87,34|persen	100	50	89,98|persen	89,98|persen	100
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak	500|KK	100	500|KK	100		500|KK	500|KK	100
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki		24|Rumah Tangga	150|Rumah Tangga	150|Rumah Tangga	100	92|Rumah Tangga	266|Rumah Tangga	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengolahan Setempat	Septik								
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik		147|7 Orang	8|Penyelenggara	8|Penyelenggara	100	70|Penyelenggara	78|Penyelenggara	100
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara		1|Unit	2|Unit	2|Unit	100	3|Unit	3|Unit	100
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		500|Rumah Tangga	16 M^3/Hari	16 M^3/Hari	0	0|M^3/Hari	0|M^3/Hari	100
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi		25|M^3/Hari	0|M^3/Hari	0|M^3/Hari	0	25|M^3/Hari	25|M^3/Hari	100
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik	53|Persen	125	50|Persen	100	40	52|Persen	52|Persen	100
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase	1500|KK	125	1500|KK	100		1500|KK	1500|KK	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	lingkungan								
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		60|M	50|M	50|M	100	102|M	212|M	100
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi		75|M	0|M	0|M	0	102|M	177|M	100
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan PSU Kawasan PSU Ibukota Kecamatan	100|Persen	100	0|Persen	0|Persen	0	0|Persen	100|Persen	100
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibukota Kapanewon yang dibangun Infrastruktur Permukiman	7|IKK	100	0|IKK	0|IKK	0	0|IKK	0|IKK	100
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		6|Sistem Jaringan	-	-	-	-	6|Sistem Jaringan	100
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Keandalan gedung Pemerintah	85,71|Persen	100	77,55|Persen	100	100	81,63|Persen	81,63|Persen	100
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	Jumlah Gedung Pemerintah Kewenangan Kabupaten ditata	5|Unit	100	5|Unit	100	100	5|Unit	5|Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung									
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		12|Dokumen	12|Dokumen	12|Dokumen	100	12|Dokumen	36|Dokumen	100
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		2|Dokumen	2|Dokumen	2|Dokumen	100	5|Dokumen	9|Dokumen	100
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai		4|Unit	12|Bangunan Gedung	13|Bangunan Gedung	108	5|Bangunan Gedung	22|Bangunan Gedung	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dengan kondisi baik	81,16|Persen	97,1	72,522|Persen	100	100	76,84|Persen	76,84|Persen	100
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan kewenangan kabupaten dengan kondisi baik	22|KM	97,1	22 Km	100	100	22 Kilometer	22 Kilometer	100
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan		1|Dokumen	0|Dokumen	0|Dokumen	0	0|Dokumen	1|Dokumen	100
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan		2|Dokumen	1157,16|KM	1086,141|KM	0	1157,16|KM	3.400|KM	100
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		1.4|KM	0,1|KM	0.11|KM	100	5,435|KM	6,9|KM	100
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar		0.05|KM	1,3|KM	1,3|KM	100	0,25|KM	1,6|KM	100
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		6.02|KM	4,2|KM	4,2|KM	100	0,462|KM	11|KM	100
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		7.1|KM	10,6|KM	12,5|KM	117	10,3|KM	29,90|KM	100
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		2|KM	0|KM	0|KM	0	0|KM	0|KM	100
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		26.299999999999997|KM	8,1|KM	11,3|KM	137	4,4|KM	41|KM	100
1.03.10.2.01.12	Pembangunan	Panjang Jembatan yang		0|M	0|M	0|M	0	0|M	0|M	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jembatan	Dibangun								
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian		46.7|M	1|Jembatan	1|Jembatan	100	0|Jembatan	2|Jembatan	100
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi		114.3|M	0|Jembatan	0|Jembatan	0	0|Jembatan	0|Jembatan	100
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		496|M	0|Jembatan	0|Jembatan	0	0|Jembatan	0|Jembatan	100
1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		240|M	0|Jembatan	0|Jembatan	0	0|Jembatan	0|Jembatan	100
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		1|Dokumen	0|KM	0|KM	0	0|KM	0|KM	100
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		3|Dokumen	0|KM	0|KM	0	0|KM	0|KM	100
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	45|persen	100	35|persen	100		40|persen	40|persen	100
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	90|Orang	100	90|Orang	100		90|Orang	90|Orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan		84|Orang	40|Orang	40|Orang	100	72|Orang	196|Orang	100
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi		40|Orang	40|Orang	40|Orang	100	60|Orang	140|Orang	100
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi sistem informasi data kinerja Jasa Konstruksi dikelola	1|Buah	100	1|Buah	100		1|Buah	1|Buah	100
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi		1|Laporan	1|Layanan Informasi	1|Layanan Informasi	100	1|Layanan Informasi	3|Layanan Informasi	100
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		1|Dokumen	1|Perangkat Pendukung	1|Perangkat Pendukung	100	0|Perangkat Pendukung	2|Perangkat Pendukung	100
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan	84|Perusahaan	100	84|Perusahaan	100		84|Perusahaan	84|Perusahaan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jasa Konstruksi	Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		12|Laporan	12|Badan Usaha	12|Badan Usaha	100	84|Badan Usaha	96|Badan Usaha	100
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik	100|Persen	100	0|Persen	0	0	80|Persen	80|Persen	100
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		2|Dokumen	100	0|Dokumen	0|Dokumen	0	1|Dokumen	1|Dokumen	100
1.03.13.5.02.18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul; Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Pelabuhan Gesing		1|dokumen; 3|kalurahan	0|Dokumen	0|Dokumen	0	4|Dokumen	5|Dokumen	100
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase peningkatan penyediaan akses	30|Persen	88,89	20|Persen	0	0	25|Persen	25|Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERUMAHAN	perumahan yang layak, aman, dan terjangkau								
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota didata	500|Unit	100	500|Unit	0	0	500|Unit	500|Unit	100
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		2|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	0	1|Dokumen	4|Dokumen	100
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		2|Dokumen	0|Dokumen	0|Dokumen	0	0|Dokumen	2|Dokumen	100
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		2|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	0	0|Dokumen	3|Dokumen	100
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang		2|Dokumen	0|Dokumen	0|Dokumen	0	1|Dokumen	3Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Terverifikasi								
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Dibangun/ Direhabilitasi	20|Unit	75	20|Unit Rumah	0	0	20|Unit	20|Unit	100
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		6|Unit Rumah	1|Unit Rumah	1Unit Rumah	100	6|Unit Rumah	6|Unit Rumah	100
1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota		0.09|Ha	-	-	-	-	-	-
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		6|Unit Rumah	1|Unit Rumah	1|Unit Rumah	100	6|Unit Rumah	13|Unit Rumah	100
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun		1|Unit Rumah	1|Unit Rumah	1|Unit Rumah	100	4|Unit Rumah	6|Unit Rumah	100
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan	Penurunan Persentase	75|Persen	100	60|Persen	0	0	65|Persen	65|Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Hunian Rumah Susun								
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	0	1|Dokumen	3|Dokumen	100
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan PSU kawasan permukiman	38,12|persen	100	30,04|Persen	0	0	34,08|Persen	34,08|Persen	100
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang memiliki dokumen penataan dan peningkatan	2|Kawasan	100	0|Kawasan	0	0	2|Kawasan	2|Kawasan	100
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		2|Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kepala Keluarga di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha meneri peningkatan kualitas	10|KK	100	20|Kepala Keluarga	0	0	20|KK	20|KK	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		1|Dokumen	2|Dokumen	0|Dokumen	0	1|Dokumen	2|Dokumen	100
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan PSU dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh	25|persen	100	16,67|persen	100		20|persen	20|persen	100
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapanewon Penerima program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	8|Kapanewon	100	6|Kecamatan	100		6|Kapanewon	6|Kapanewon	100
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		325|Unit Rumah	163|Unit Rumah	163|Unit Rumah	100	235|Unit Rumah	723|Unit Rumah	100
1.04.05	PROGRAM	Persentase Perumahan	100|persen	100	60|persen	76,67	128	80|persen	80|persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU								
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang mendapat fasilitasi layanan bantuan PSU	15|Lokasi	100	15|Lokasi	76,67		15|Lokasi	15|Lokasi	100
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		1|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	100	0|Dokumen	2|Dokumen	100
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		6|Lokasi	59|Lokasi	60|Lokasi	1067	1|Lokasi	120|Lokasi	100
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU	100|persen	100	50|persen	0	0	75|persen	75|persen	100
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang	Jumlah Pengembang Perumahan dengan	20|Lokasi	100	20|Lokasi	0	0	20|Lokasi	20|Lokasi	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Kualifikasi Kecil disertifikasi								
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		1|Laporan	1|Laporan	1|Laporan	0	0|Laporan	2|Laporan	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan PD diukur dari beberapa indikator, yaitu indikator capaian kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*), capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), capaian sasaran pembangunan milenium (SDGs) dan capaian standar pelayanan minimal (SPM). Indikator capaian kinerja (*output* dan *outcome*) program dan kegiatan, sebagaimana termuat dalam dokumen DPA, digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. *Capaian Kinerja Program dan Kegiatan*

   Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tahun anggaran 2024 terdiri atas 14 program dan 24 kegiatan serta 74 Sub kegiatan. Jumlah anggaran untuk membiayai program dan kegiatan tersebut mencapai Rp81.648.506.244 dan sampai dengan Triwulan IV Bulan Desember 2024 realisasi belanja adalah sebesar Rp79.102.586.949 atau sebesar 96,88%.

2. *Capaian Kinerja Pelayanan Berdasar SDGs*

   Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur air bersih diupayakan untuk memenuhi kecukupan air bersih bagi penduduk. Target ini dicapai melalui program penyediaan dan pengelolaan air baku dengan kegiatan peningkatan partisipasi 100% masyarakat dalam pengelolaan air yang dilaksanakan dalam bentuk pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) secara berkelanjutan. Kegiatan pembangunan SPAM tahun 2024 dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, di wilayah Kalurahan Kalurahan Plembutan, Kalurahan Giricahyo, dan Kalurahan Kedungkeris.

   Selain pembanguan dan perluasan SPAM, tahun 2024 DPUPKP juga menambah jaringan listrik sebanyak tiga paket di SPAM Ngobaran untuk mendukung operasional IPA Ngobaran yang baru saja selesai dibangun oleh pemerintah pusat.

   Kondisi akses pelayanan air bersih yang layak diseluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 mencapai 90,59%. Terdapat 19 Kelurahan yang telah mencapai status “TUNTAS AKSES” dengan capaian akses pelayaan air bersih layak mencapai lebih dari sama dengan 100% meliputi: Wonosari, Kepek, Piyaman, Gari, Selang, Baleharjo, Wareng, Mulo, Pengkok, Salam, Giritirto, Kampung, Bendung, Girikarto, Girimulyo, Giriwungu, Bohol, Kepek, dan Candirejo.

   Pelayanan drainase sebagian besar masih terpusat di kota Wonosari dan wilayah-wilayah di ibukota Kapanewon (IKK), dengan jaringan berupa saluran alami dan buatan, serta kondisi ada yang terbuka dan yang tertutup, dengan tingkat kandungan sedimentasi yang cukup tinggi. Sedangkan sanitasi masyarakat, cakupan pelayanan air limbah masih rendah. Namun demikian, untuk pelayanan persampahan sistem 3R (*Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (daur ulang)) sudah dalam kategori cukup.

   Peningkatan penyediaan fasilitas sanitasi yang layak bagi masyarakat melalui program lingkungan sehat perumahan, dengan kegiatan Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK di 5 (lima) lokasi (Kalurahan/Kapanewon), antara lain yaitu Playen, Ngleri, Paliyan, Mulusan, Panggang, Girikarto, Semanu, Candirejo, Semin, Semin.

Kondisi pelayanan infrastruktur jalan sudah dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, meskipun belum semua ruas jalan dalam kondisi baik. Fokus penanganan jalan diarahkan pada peningkatan akses jalan di wilayah perbatasan dan perdesaan. Untuk mencapai kinerja pelayanan yang lebih baik, pelayanan infrastruktur jalan dibedakan antara jalan kabupaten dan jalan poros kalurahan. Untuk ruas jalan kabupaten di antaranya ditangani melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, dan kegiatan rehabilitasi jalan, serta kegiatan penanganan mendesak jalan dan jembatan. Sedangkan untuk jalan perdesaan ditangani melalui kegiatan pembangunan/peningkatan dari sumber dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) kalurahan.

Untuk jalan kabupaten, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2024 dapat mewujudkan jalan dalam kondisi mantap mencapai 681,508 Km atau 62,75%, dari total panjang jalan 1.086,141 Km. Namun demikian, jalan dengan kondisi rusak masih cukup besar, yaitu 188,928 km (17,39%) kondisi rusak ringan dan 215,705 (19,86%) kondisi rusak berat. Kondisi ini masih menjadi beban dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan, terutama bila mengingat tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas yang semakin meningkat.

3. *Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)*

Kinerja pelayanan di bidang penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum hingga akhir Desember 2024, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1) Dalam pencapaian sasaran sentra produksi memiliki infrastruktur air yang memadai, kinerja pelayanan masih belum sesuai dengan target. Penyediaan air untuk lahan pertanian secara berkelanjutan baru mencapai 70,45%. Hal ini memiliki keterkaitan dengan jumlah pemanfaatan air untuk irigasi dan sumur pompa yang belum optimal. Penambahan jaringan irigasi untuk pertanian juga masih dalam tahap konstruksi, meskipun di beberapa lokasi kegiatan konstruksi sudah selesai dilaksanakan. Penyediaan sumber air baku bagi kebutuhan air minum masyarakat juga masih belum menunjukkan penambahan yang berarti.
2) Dalam pencapaian sasaran sentra produksi memiliki infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai, kinerja pelayanan juga belum menunjukkan hasil yang maksimal. Meskipun kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten sebagian sudah selesai dilaksanakan, tetapi diproyeksikan baru 55,80% sentra produksi yang memiliki jalan kabupaten yang memadai. Ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 63.28 % dari total 1.157,16 km panjang jalan kabupaten. Penyediaan jembatan yang memadai bertambah 3 (tiga) unit. Penyediaan jalan dan jembatan untuk pengembangan kawasan perbatasan juga meningkat menjadi 80%. Dalam mendukung pengembangan obyek wisata, dilakukan kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jalur jalan menuju obyek wisata, seperti Tepus-Poktunggal, Jepitu-Pantai Jungwok, Nglanggeran (Anggaran DPUPESDM DIY), Goa Pindul dan Sri Gethuk, hingga mencapai 50%. Sementara untuk pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) dari panjang 76 km sudah mencapai 64,00 km. Upaya peningkatan jalan terus diupayakan dalam rangka mendukung dibukanya Bandara Internasional Yogyakarta yang mencakup pelayanan Yogyakarta, Jawa Tengah bagian selatan dan Jawa Timur bagian barat yang berorientasi

untuk mendukung tujuan wisata di Yogyakarta khususnya Kabupaten Gunungkidul.

3) Dalam mencapai sasaran kawasan permukiman dan kawasan strategis memiliki infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi yang memadai, penyediaan infrastruktur air bersih di kawasan sentra produksi maupun kawasan permukiman mencapai 88,34%. Penyediaan infrastruktur sanitasi pengelolaan limbah di kawasan sentra produksi mencapai 88,79 infrastruktur sanitasi mencapai 88,22%, dan infrastruktur drainase yang memadai mencapai 81,46%. Untuk kawasan permukiman yang memiliki infrastruktur sanitasi pengelolaan air limbah sebesar 61,91%. Di kawasan obyek wisata, ketersediaan air bersih mencapai 100%, sanitasi pengelolaan limbah 88,22%, jumlah bangunan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) mencapai 34,50%, dan rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) 70,69%.
4) Dalam mencapai sasaran penyelenggaraan infrastruktur dan industri jasa konstruksi lebih baik, upaya pembinaan pelaku jasa konstruksi berkapasitas dan berkompeten mencapai 100%.
5) Dalam mencapai sasaran kinerja pelayanan dinas pekerjaan umum meningkat, peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan infrastruktur mencapai 83%, pelaksanaan pelaporan secara benar dan tepat waktu mencapai 100%, peningkatan kinerja aparatur mencapai 59%, dan peningkatan kinerja akuntabilitas publik penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum mencapai 83%.

4. *Capaian Kinerja Pelayanan Berdasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)*

Kinerja pelayanan di bidang penyediaan infrastruktur diukur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

1) Sumber daya air, dengan prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum sehari-hari bagi masyarakat gunungkidul diupayakan untuk terus ditingkatkan hingga 90% melalui pemanfaatan sumber air yang ada dan pencarian sumber air baru untuk dieksplorasi. Upaya penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada ditargetkan mencapai 88,23%, ditempuh melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, baik dalam bentuk kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada maupun melalui kegiatan perkuatan irigasi partisipatif.
2) Jalan, yaitu dengan target tersedianya jaringan dan ruas jalan. Dari aspek aksesibilitas, ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/ kota sudah dapat terpenuhi. Dari aspek mobilitas, ketersediaan jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan diupayakan peningkatan, meskipun kondisi secara geografis menjadi tantangan yang berat. Untuk memudahkan mobilitas masyarakat, pembangunan jalan dilakukan mulai dari jalan di kawasan permukiman hingga jalan-jalan akses menuju pusat-pusat kegiatan. Dari aspek keselamatan, ketersediaan jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat juga diupayakan untuk dapat dipenuhi. Dari aspek kondisi jalan, diupayakan ketersediaan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Dari aspek kecepatan,diupayakan ketersediaan jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana sesuai dengan kondisi daerah.

3) Air minum, dengan kluster pelayanan yaitu tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. Upaya pemenuhan kebutuhan air minum dilakukan secara terus menerus dengan memaksimalkan sumber air yang ada.
4) Penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan), diupayakan penyediaan pelayanan untuk air limbah permukiman. Pelayanan air limbah permukiman, berupa ketersediaan sistem air limbah setempat yang memadai, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota dilakukan melalui peningkatan penyediaan fasilitas sanitasi bagi masyarakat.
5) Penanganan permukiman kumuh di perkotaan dilakukan dengan mengupayakan berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ada. Untuk penanganan yang lebih terarah, diperlukan adanya penetapan luasan kawasan permukiman kumuh.
6) Penataan bangunan dan lingkungan, melalui pelayanan masyarakat dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara online melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) dan penyediaan pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN). Kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB yang masih rendah diupayakan dan didorong melalui kegiatan sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.
7) Jasa konstruksi, sudah dilakukan penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap. Yang masih perlu diupayakan adalan dalam hal peningkatan kinerja jasa konstruksi, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja penyediaan infrastruktur. Ketersediaan sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun juga semakin ditingkatkan, sehingga kebutuhan informasi jasa konstruksi dapat terpenuhi dengan baik.
8) Perumahan. Dalam upaya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau, baik cakupan ketersediaan rumah layak huni dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, kondisi saat ini relatif cukup memadai, meskipun untuk pelayanan mendatang akan semakin perlu peningkatan seiring dengan perkembangan kota. Untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman, kondisi lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) juga perlu disiapkan.

5. *Capaian Kinerja Pelayanan Berdasar Indikator Kinerja Kunci (IKK)*

Kinerja pelayanan di bidang penyediaan infrastruktur diukur dari capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) mencakup 2 (dua) bidang, yaitu:

1) Wilayah dan Lingkungan, mencakup:
   - Kondisi infrastruktur sanitasi untuk rumah tinggal mengalami peningkatan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat. Hampir 88,22% rumah tinggal memiliki sanitasi, meskipun sanitasinya masih bersifat individual dan kondisinya belum memenuhi persyaratan teknis. Persoalan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur sanitasi komunal adalah kondisi geografis dengan lokasi tempat tinggal yang jarang, di samping ketersediaan air bersih yang kurang. Sehingga pekerjaan yang paling tepat untuk mencapai target sanitasi adalah pembangunan tangki septik individu.

- Kondisi rumah tinggal di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa jumlah rumah tinggal mencapai 187.671 unit. Melalui program penanganan rumah tinggal layak huni yang didanai melalui APBN, jumlah rumah tinggal layak huni mencapai 96,56% atau 181.223 unit; Rasio permukiman layak huni mencapai 97,90%.

2) Pelayanan di bidang infrastruktur penunjang, mencakup:
   - Penyediaan infrastruktur pengairan berupa penyediaan jaringan irigasi di 6 (enam) wilayah kepengamatan, yaitu Wonosari, Ponjong, Semin, Playen, Nglipar dan Patuk, untuk mengairi lahan pertanian seluas ±10.610,10 ha.
   - Penyediaan infrastruktur jalan dengan Ruas jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 681,508 Km atau 62,75%, dari total panjang jalan 1.086,141 Km. Namun demikian, jalan dengan kondisi rusak masih cukup besar, yaitu 188,928 km (17,39%) kondisi rusak ringan dan 215,705 (19,86%) kondisi rusak berat.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
A	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) (Renstra 2021-2026)										
1	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai	63,08	67,56	72,28	n/a	70,67	72,14	72,28	n/a	
2	Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	25,06	35,34	46,82	n/a	21,66	29,42	46,82	n/a	
3	Nilai AKIP PD	Nilai	82	82,5	83	n/a	82,03	82,11	83	n/a	
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) (Renstra 2025-2029)										
1	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	n/a	56,6	n/a	n/a	n/a	56,6	
2	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	n/a	n/a	n/a	74	n/a	n/a	n/a	74	
3	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	n/a	n/a	n/a	30,5	n/a	n/a	n/a	30,5	
B	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)										
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (%)	100	100	100	100	100	97	100	100	
3	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (%)									
4	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) (Renstra 2021-2026)										
	Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum										
1	Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik	Persentase	29,2	30,53	31,86	n/a	18,73	18,75	31,86	n/a	
2	Persentase kepala keluarga berakses air minum layak	Persentase	83,21	85,19	87,85	n/a	90,59	91,65	87,85	n/a	
3	Persentase ketersediaan sapras persampahan (TPA,TPST,TPS3R)	Persentase	45	50	55	n/a	61,11	66,67	55	n/a	
4	Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak	Persentase	85,39	87,34	89,98	n/a	88,53	98,95	89,98	n/a	
5	Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik	Persentase	48	50	52	n/a	0	0	52	n/a	
6	Persentase keandalan gedung pemerintah	Persentase	73,46	77,55	82,86	n/a	84,91	88,67	82,86	n/a	
7	Persentase panjang jalan dengan kondisi baik	Persentase	68,2	72,52	76,84	n/a	63,07	61,39	76,84	n/a	
8	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Persentase	30	35	40	n/a	78,54	94,74	40	n/a	

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
9	Persentase dukungan sarana dan prasaran kistimewaan urusan tata ruang terbangun	Persentase	40	0	0	n/a	0	0	0	n/a	
	Nilai Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman										
1	Persentase penyediaan akses perumahan yang layak aman dan terjangkau	Persentase	10	15	20	n/a	52,94	46,75	20	n/a	
2	Persentase kebutuhan PSU kawasan permukiman	Persentase	26.01	40,04	34,08	n/a	0	0	34,08	n/a	
3	Persentase luas permukiman kumuh ditangani	Persentase	26.01	40,04	34,08	n/a	0	0	34,08	n/a	
4	Persentase perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Persentase	40	60	62	n/a	24	24	62	n/a	
5	Persentase pemenuhan pembiayaan perumahan yang didukung sistem kebijakan strategi pembiayaan yang legal	Persentase	70	80	90	n/a	25	70	90	n/a	
6	Persentase luas kawasan tertangani infrastruktur permukiman di kawasan yang ditangani daerah	Persentase	26,01	30,05	34,09	n/a	0	0	34,09	n/a	
7	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Persentase	100	100	100	n/a	100	100	100	n/a	
8	Persentase kesesuaian program dalam renja PD terhadap RKPD	Persentase	100	100	100	n/a	100	100	100	n/a	
9	Persentase kesesuaian program dan renstra PD terhadap RPJMD	Persentase	100	100	100	n/a	100	100	100	n/a	
10	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	n/a	100	100	100	n/a	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) (Renstra 2025-2029)										

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase	n/a	n/a	n/a	89,21	n/a	n/a	n/a	89,21	
2	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persentase	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	100	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase	n/a	n/a	n/a	3,48	n/a	n/a	n/a	3,48	
4	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	100	
5	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Persentase	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	100	
6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	100	
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase	n/a	n/a	n/a	64,19	n/a	n/a	n/a	64,19	
8	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persentase	n/a	n/a	n/a	63,03	n/a	n/a	n/a	63,03	
9	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase	n/a	n/a	n/a	74,22	n/a	n/a	n/a	74,22	
10	Berkurangnya unit RTLH jumlah	Persentase	n/a	n/a	n/a	6,38	n/a	n/a	n/a	6,38	

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	(Rumah Tidak Layak Huni)										
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persentase	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	100	
12	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase	n/a	n/a	n/a	0,48	n/a	n/a	n/a	0,48	
13	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	100	
14	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Persentase	n/a	n/a	n/a	5,75	n/a	n/a	n/a	5,75	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Di dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Tugas (pasal 289): Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.
2. Fungsi (pasal 290): untuk dapat menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 289, Dinas mempunyai fungsi:
    a. perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
    b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
    c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
    d. pelaksanaan pembinaan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
    e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
    f. pelaksanaan pembinaan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
    g. pengendalian teknis bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
    h. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;
    i. pelaksanaan kerja sama bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;
    j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
    k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
    l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
    m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
    n. pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
    o. pengelolaan UPT.

Dari rincian fungsi tersebut, secara garis besar Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi pelayanan penyediaan infrastruktur yang mencakup:

a. Infrastruktur pengairan meliputi penyediaan jaringan irigasi (saluran sekunder), dan pemanfaatan sumber air;
b. Infrastruktur bina marga meliputi penyediaan jaringan jalan dan jembatan, dan pengelolaan laboratorium dan alat-alat berat;
c. Infrastruktur cipta karya meliputi infrastruktur permukiman yang berupa jalan lingkungan dan jalan poros kalurahan, sistem penyediaan air minum, sanitasi, pembinaan jasa konstruksi, dan pembinaan perumahan.
d. Infrastruktur perumahan dan permukiman meliputi infrastruktur rumah swadaya, perumahan formal dan penangan kawasan kumuh.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul diarahkan kepada pencapaian target-target RPJMD (IKU), SPM, dan IKK. Tingkat kinerja pelayanan baik di bidang pengairan, bina marga, cipta karya dan perumahan, diukur dengan target-target tersebut. Pencapaian target RPJMD, SPM dan IKK, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab di depan, menjadi fokus bagi penyelenggaraan pelayanan. Tingkat kinerja pelayanan PD hingga tahun anggaran 2024 menunjukkan kondisi yang masih jauh dari target-target yang telah ditetapkan terutama pada sanitasi, air minum, kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni . Di satu sisi, target-target pelayanan yang harus dicapai yang termuat dalam dokumen perencanaan (khususnya RPJMD) adalah kondisi ideal yang harus diwujudkan. Di sisi lain, ketersediaan anggaran yang tidak memadai untuk pencapaian target-target tahunan relatif terbatas. Dengan kondisi tersebut, program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat sepenuhnya mencapai target tahunan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan penting yang perlu mendapat perhatian terutama program dan kegiatan yang terkait penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, air minum, infrastruktur permukiman, dan infrastruktur irigasi, yang memiliki peran penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan akses di wilayah kalurahan dan perbatasan, serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat di sentra-sentra produksi maupun untuk destinasi wisata.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, adalah:

a. Ketersediaan peralatan terbatas. Pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum akan sangat bergantung pada dukungan peralatan yang ada. Kebutuhan peralatan, baik peralatan ringan hingga peralatan berat diperlukan untuk mendukung kegiatan. Beberapa peralatan penting yang masih kurang antara lain, alat GPS (*global positioning system*), *buldozer, mini excavator dan tandem roller*. Meskipun sudah dilakukan penambahan peralatan, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan. Kurangnya peralatan ini menjadikan kinerja penyelenggaraan infrastruktur menjadi tidak maksimal.
b. Kemampuan/ kapasitas teknis sumber daya manusia yang tidak merata. Kekurangan sumber daya manusia dari sisi ini akan memunculkan adanya kesenjangan dan perbedaan pemahaman yang berbeda antara personil satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap suatu aturan. Dalam jangka pendek, kebutuhan akan adanya pendidikan dan pelatihan teknis penting untuk mengatasi kelemahan ini. Dalam jangka panjang, permasalahan ini akan memerlukan penanganan yang memadai dari sisi sistem penerimaan pegawai.
c. Dukungan data yang valid dan *up to date* masih kurang. Pelaksanaan setiap program dan kegiatan idealnya dimulai dari data. Sehingga ketiadaan data yang valid dan *up to date* akan menjadi kendala, terlebih bila dikaitkan dengan pemenuhan target yang harus dicapai. Data yang tidak valid dan *up to date* dapat membawa kepada hasil kegiatan yang bias dan salah sasaran. Sehingga diperlukan upaya - *updating* data yang mampu mendukung kegiatan perencanaan yang baik.
d. Keberadaan peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan juga masih belum lengkap. Beberapa peraturan daerah yang menjadi acuan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini. Meskipun beberapa peraturan daerah sudah ditetapkan, akan tetapi keberadaan produk hukum sebagai acuan pelaksanaan kegiatan ke

depan perlu dilengkapi dan disempurnakan. Pelayanan terhadap masyarakat juga belum dilaksanakan dengan prosedur operasi standar (SOP) secara memadai. Upaya untuk penyusunan SOP yang sudah dilakukan belum mencakup semua kegiatan pelayanan, sehingga masih diperlukan waktu untuk terwujudnya SOP yang lebih lengkap.

Kondisi permasalahan dan hambatan tersebut memiliki dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/ internasional (SPM, SDGs). Sehingga pembinaan dan peningkatan terhadap kondisi-kondisi tersebut akan menjadi kunci bagi keberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dan dalam penyelenggaraan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum secara lebih baik.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. Untuk dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, baik dalam visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional (standar pelayanan minimal, dan *millenium development goals*), perlu dipecahkan keempat kendala dan hambatan utama tersebut.

Strategi pencapaian target RKPD tahun 2026 perlu dirumuskan dengan lebih detail mengingat keterbatasan anggaran. Untuk penanganan jalan dan jembatan kabupaten perlu ditempuh upaya pengusulan jalan strategis ke tingkat Pemerintah DIY ataupun Pemerintah Pusat baik yang sifatnya tugas pembantuan dari satker ataupun dana DAK. Untuk pencapaian target air minum dan sanitasi perlu dilakukan pemetaan untuk kawasan yang memerlukan dana besar didorong untuk dapat diakomodasi oleh Pemerintah Pusat melalui Satker Air Bersih dan Sanitasi, kawasan yang memerlukan dana sedang ditangani DAK dan penanganan ringan dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul. Bidang irigasi juga perlu untuk berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai agar penyediaan air baku dan jaringan irigasi baru dapat direalisasikan dari dana APBN.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pada bagian ini akan ditunjukkan data jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang muncul pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul tahun 2026. Pada Rancangan Awal Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul terdapat 14 Program, 25 Kegiatan dan 100 Sub Kegiatan. Kemudian pada tahapan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja terjadi penyesuaian berupa pengurangan menjadi 11 Program 21 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan.

Terdapat pula perubahan kebutuhan anggaran dikarenakan dinamika dalam proses penyusunan rencana kerja yang berisi susunan program dan kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholders). Adanya perbedaan pada tahap Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja ini dapat mencerminkan peran para pemangku kepentingan di dalam proses penyusunan rencana kerja. Banyaknya usulan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan sebagai wujud banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi dalam perencanaan. Adapun daftar program, kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 serta perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
				9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
				11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				17	Fasilitasi Kunjungan Tamu					16	Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
				18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
				25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan					25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					Bangunan Lainnya						dan Bangunan Lainnya
				27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)					2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
		7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				28	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota					27	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
				29	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota						
				30	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota						
				31	Operasi dan Pemeliharaan Danau						
				32	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya						
				33	Rehabilitasi Sumur Air						

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					Tanah untuk Air Baku						
				34	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						
				35	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku						
				36	Rehabilitasi Tanggul Sungai						
		8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					8	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				37	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						
				38	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					28	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				39	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah					29	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
				40	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					30	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				41	Rehabilitasi Bendung Irigasi						
				42	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah					31	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
				43	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					32	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
				44	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi						
				45	Operasi dan					33	Operasi dan

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah						Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
				46	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah					34	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
				47	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi					35	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
				48	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					36	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
3	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEMPENYEDIAAN AIR MINUM					3	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEMPENYEDIAAN AIR MINUM				
		9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
				49	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					37	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
				50	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					38	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
				51	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan					39	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					Perpipaan						Perpipaan
				52	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					40	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
				53	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					41	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMDAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										
		10	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								
				54	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						
5	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
		11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				55	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						
				56	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman						
				57	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik					42	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					(SPALD)						Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				58	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					43	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				59	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					44	Penyediaan Unit pengolahan setempat
6	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
		12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				60	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan					45	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
				61	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan					46	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
		13	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					12	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
				62	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					47	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				63	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran					48	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
				64	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan					49	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
		14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					13	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
				65	Pengelolaan Leger Jalan						
				66	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						
				67	Penggantian Jembatan						
				68	Pembangunan Jalan					50	Pembangunan Jalan
				69	Rekonstruksi Jalan					51	Rekonstruksi Jalan
				70	Pemeliharaan Berkala Jalan						

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
				71	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa					52	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
				72	Pelebaran Jalan Menuju Standar						
				73	Pemeliharaan Rutin Jembatan						
				74	Rehabilitasi Jembatan						
				75	Pemeliharaan Berkala Jembatan						
				76	Survey Kondisi Jalan/Jembatan					53	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
				77	Rehabilitasi Jalan					54	Rehabilitasi Jalan
				78	Pemeliharaan Rutin Jalan					55	Pemeliharaan Rutin Jalan
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
		15	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					14	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
				79	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis					56	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
				80	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					57	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
		16	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					15	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
				81	Penyediaan Perangkat						

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi						
				82	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi					58	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
		17	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					16	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
				83	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						
				84	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					59	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					9	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
		18	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					17	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
				85	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						
				86	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					60	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
				87	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena						

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					Relokasi Program Kabupaten/Kota						
				88	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						
				89	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						
										61	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		19	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					18	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
				90	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					62	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
				91	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana					63	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
				92	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					64	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		20	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					19	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
				93	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau					65	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					Rumah Khusus						dan/atau Rumah Khusus
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										
		21	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
				94	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah						
		22	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
				95	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						
				96	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU						
12	PROGRAM PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					10	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
		23	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota					20	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
				97	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah					66	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah

Penyandingan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026											
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026						Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026					
Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan	Nomor Urut Program	Uraian Program	Nomor Urut Kegiatan	Uraian Kegiatan	Nomor Urut Sub Kegiatan	Uraian Sub Kegiatan
					10 (Sepuluh) Ha						10 (Sepuluh) Ha
13	PROGRAM PENINGKATANPRASARANA, SARANA DAN UTILITASUMUM (PSU)					11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
		24	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					21	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
				98	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						
				99	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					67	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
14	PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN SERTIFIKASI,KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
		25	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil								
				100	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil						

Keterangan:

	Tidak terdanai
	Pemutakhiran
	Baru

Tabel 2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		100 Persen	7.434.733.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		83,05 Persen	7.662.595.268,00
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan disusun		15 Dokumen	26.200.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	46.152.500,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	7 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	4 Dokumen	18.770.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	750.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	750.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	3 Dokumen	750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	3 Dokumen	4.432.500,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Dokumen	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Dokumen	1.560.000,00
6	Koordinasi dan	Jumlah Laporan Capaian	Kab.	1 Laporan	16.200.000	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	Kab.	1 Laporan	19.890.000,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gunungkidul, Wonosari, Kepek			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Gunungkidul, Wonosari, Kepek		
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu		16 Dokumen	5.117.389.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	5.002.923.060,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1330 Orang/bulan	5.105.389.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1022 Orang / Bulan	4.969.333.060,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Laporan	2.000.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	14 Laporan	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	14 Laporan	31.590.000,00
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS dilayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian		95 Orang	60.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian		-	58.607.208,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Gunungkidul	1 Paket	32.000.000					
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	5 Dokumen	3.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	54.607.208,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	89 Orang	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Orang	4.000.000,00
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan dilayani dalam pelaksanaan administrasi umum Perangkat daerah		6 Kegiatan	523.944.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum		-	735.192.500,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Paket	16.678.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Paket	374.756.000,00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Paket	34.750.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Paket	23.717.000,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	372 Dokumen	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	365 Dokumen	1.200.000,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Laporan	66.170.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Laporan	66.670.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Laporan	393.324.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Laporan	251.534.000,00
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Dokumen	2.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Dokumen	637.500,00
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14 Laporan	676.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	606.571.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul,	12 Laporan	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kab. Gunungkidul,	12 Laporan	100.000,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Wonosari, Kepek				Surat Menyurat	Wonosari, Kepek		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	96 Laporan	80.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	96 Laporan	207.400.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Laporan	596.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Laporan	399.071.000,00
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah dipelihara		114 Unit	1.030.700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	1.213.149.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	29 Unit	169.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	29 Unit	260.900.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	23 Unit	670.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	18 Unit	423.820.000,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	63 Unit	52.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	25 Unit	12.080.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	5 Unit	131.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Unit	510.349.000,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	5 Unit	6.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	20 Unit	6.000.000,00
II	PROGRAM	Persentase Daerah Irigasi		33,18 Persen	7.022.400.000	PROGRAM	Persentase Daerah		22 Persen	2.193.353.367,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)	(DI) dalam kondisi baik)				PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Irigasi (DI) dalam kondisi baik)			
A	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan pengaman sungai dikelola		8Lokasi	2.145.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wilayah sungai dikelola dengan baik		-	60.787.500,00
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Kab. Gunungkidul	9 Lembaga	375.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Lembaga	60.787.500,00
2	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	3 Dokumen	75.000.000					
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab. Gunungkidul	9 Lembaga	20.000.000					
4	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul	5 Danau	600.000.000					
5	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	2 Unit	200.000.000					
6	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	3 Titik	275.000.000					
7	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Kab. Gunungkidul	0,1 KM	200.000.000					
8	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Kab. Gunungkidul	1 Titik	200.000.000					
9	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	0,1 KM	200.000.000					

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Dikelola		22Daerah Irigasi	4.877.400.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan air untuk tiap musim tanam secara kontinyu		-	2.132.565.867,00
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Kab. Gunungkidul	0,5 KM	500.000.000					
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Gunungkidul	1,5 KM	1.754.250.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Ponjong	0,23 KM	339.530.000,00
3	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Kab. Gunungkidul	0,4 KM	375.000.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Wiladeg Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak	0,23 KM	339.530.000,00
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	0,4 KM	165.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab.	0,34 KM	501.850.000,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
								Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sawahan Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sumbergiri		
5	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	3 Bendung	210.000.000					
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	0,5 KM	375.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sidorejo	0,23 KM	339.530.000,00
7	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul	0,2 KM	200.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,19 KM	142.542.500,00
8	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul	5 Bendung	250.000.000					
9	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul	43 Titik	500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 UNIT	60.000.000
10	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul	2 KM	324.750.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,20 KM	153.738.367,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Kab. Gunungkidul	12 Lembaga	23.400.000	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Lembaga	34.255.000,00
12	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	221.590.000,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEMPENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kepala keluarga berakses air minum layak		90,45 Persen	2.375.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Air Minum Perpipaan		52,76 Persen	1.363.945.000,00
A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Spamdes yang memiliki sistem mantap		211Unit	2.375.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Spamdes yang memiliki sistem mantap		- -	1.363.945.000,00
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Gunungkidul	300 Orang	300.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Orang	47.150.000,00
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab. Gunungkidul	6 Liter/Detik	808.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo	2,7 Liter/Detik	236.095.000,00
3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kab. Gunungkidul	1 Liter/Detik	743.500.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab.	0,92 Liter/Detik	719.800.000,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
								Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro		
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul	3 Unit	250.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	40.200.000,00
5	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Gunungkidul	59 SR	273.500.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	71 SR	320.700.000,00
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMDAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan		60 Persen	0					
A	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana persampahan dibangun		9 Unit	0					
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS		0 Ton/hari	0					
V	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak		92,56 Persen	1.350.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		15,10 Persen	599.050.000,00
A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak		500KK	1.350.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan sanitasi		- -	599.050.000,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	Kab. Gunungkidul	25 MÂ³/Hari	100.000.000					
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kab. Gunungkidul	50 MÂ³/Hari	100.000.000					
3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Kab. Gunungkidul	10 Penyelenggara	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Penyelenggara	27.550.000,00
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul	2 Unit	100.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	77.240.000,00
5	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kab. Gunungkidul	150 Rumah Tangga	1.000.000.000	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Rumah Tangga	494.260.000,00
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik		53 Persen	500.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik		80 Persen	300.000.000,00
A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan		1500 KK	500.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan		- -	300.000.000,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota				
1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kab. Gunungkidul	492 M	250.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	25 M	50.000.000,00
2	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	Kab. Gunungkidul	395 M	250.000.000	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	127 M	250.000.000,00
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penanganan PSU Kawasan PSU Ibukota Kecamatan		100 Persen	15.360.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		89 Persen	10.600.090.000,00
A	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Ibukota Kapanewon yang dibangun Infrastruktur Permukiman		7 IKK	15.360.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan		- -	10.600.090.000,00
1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Kab. Gunungkidul	1 Bangunan Gedung	3.000.000.000	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	3 Bangunan Gedung	2.386.890.000,00
2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	12.000.000.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	1 Dokumen	8.000.000.000,00
3	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat	Kab. Gunungkidul	12 Dokumen	360.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	12 Dokumen	213.200.000,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan	Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Semua Kel/Desa		
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dengan kondisi baik		81,16 Persen	26.008.910.960	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		63,03 Persen	54.543.470.472,00
A	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan kewenangan kabupaten dengan kondisi baik		22Kilometer	26.008.910.960	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pencapaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten		- -	54.543.470.472,00
1	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	100.000.000					
2	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Kab. Gunungkidul	1157,16 KM	300.000.000					
3	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Kab. Gunungkidul	1 Jembatan	3.000.000.000					
4	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kab. Gunungkidul	3,2 KM	3.000.000.000	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman Kab. Gunungkidul,	7,34 KM	10.286.561.502,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
								Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng Kab. Gunungkidul, Paliyan, Sodo Kab. Gunungkidul, Paliyan, Pampang Kab. Gunungkidul, Paliyan, Karangduwet Kab. Gunungkidul, Paliyan, Giring Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu Kab. Gunungkidul, Ponjong, Ponjong Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul,		

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
								Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Saptosari, Ngloro Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo		
5	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kab. Gunungkidul	8,7 KM	5.000.000.000	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sidorejo Kab. Gunungkidul, Rongkop, Karangwuni Kab.	7,10 KM	29.988.368.861,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
								Gunungkidul, Rongkop, Semugih Kab. Gunungkidul, Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Saptosari, Planjan Kab. Gunungkidul, Girisubo, Nglindur Kab. Gunungkidul, Girisubo, Balong Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto		
6	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kab. Gunungkidul	1,3 KM	500.000.000					
7	Pemantauan dan	Panjang Jalan Kewenangan	Kab.	1157,16 KM	125.000.000	Pemantauan dan	Panjang Jalan	Kab.	1086,141	229.592.500,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Gunungkidul			Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KM	
8	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Kab. Gunungkidul	2,5 KM	3.000.000.000					
9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Gunungkidul	5 Jembatan	250.000.000					
10	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	1 Jembatan	750.000.000					
11	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Kab. Gunungkidul	232 Jembatan	250.000.000					
12	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kab. Gunungkidul	1157,16 KM	798.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1086,141 KM	352.115.000,00
13	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	2,5 KM	1.000.000.000	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,96 KM	1.247.323.184
14	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Gunungkidul	10,5 KM	7.935.910.960	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,4 KM	1.592.509.425,00
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		45 Persen	796.250.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Bidang Konstruksi Yang Kompeten Dan Profesional		20 Persen	99.899.500,00
A	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		90 Orang	454.250.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		- -	81.529.500,00
1	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	90 Orang	29.250.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	60 Orang	38.880.000,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Operator dan Teknisi atau Analis	Difasilitasi Sertifikasi				Teknisi atau Analis	yang Difasilitasi Sertifikasi			
2	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	90 Orang	425.000.000	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	90 Orang	42.649.500,00
B	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi sistem informasi data kinerja Jasa Konstruksi dikelola		1 Buah	300.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		- -	1.890.000,00
1	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Perangkat Pendukung	50.000.000					
2	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Layanan Informasi	250.000.000	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Layanan Informasi	1.890.000,00
C	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		84 Perusahaan	42.000.000	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi		- -	16.480.000,00
1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Paket Pekerjaan	21.000.000					
2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	84 Badan Usaha	21.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Badan Usaha	16.480.000,00
X	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau		30 Persen	2.950.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		93,57 Persen	1.970.900.000,00
A	Pendataan	Jumlah Rumah Korban		500 Unit	800.000.000	Pendataan Penyediaan	Rumah Korban		- -	83.150.000,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota didata				dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bencana dan Relokasi Program Pemerintah terdata			
1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	200.000.000					
2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	200.000.000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00
3	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	100.000.000					
4	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	100.000.000					
5	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	200.000.000					
6						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	43.150.000,00
B	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Dibangun/ Direhabilitasi		20 Unit	1.150.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Beserta PSU		- -	706.850.000,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
							terlaksana			
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Gunungkidul	10 Unit Rumah	150.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit Rumah	174.150.000,00
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Gunungkidul	10 Unit Rumah	300.000.000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit Rumah	303.150.000,00
3	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	1 Unit Rumah	700.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Rumah	229.550.000,00
C	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah penurunan penghunian rumah susun		5 Hunian	1.000.000.000	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		- -	1.180.900.000,00
1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	1.000.000.000	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangrejek	1 Dokumen	1.180.900.000,00
XI	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan PSU kawasan permukiman		38,12 Persen	400.000.000					
A	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang memiliki dokumen penataan dan peningkatan		2 Kawasan	200.000.000					
1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kab. Gunungkidul	200 Rumah Tangga	200.000.000					

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Rumah									
B	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kepala Keluarga di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha meneri peningkatan kualitas		10 KK	200.000.000					
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Gunungkidul	10 Unit Rumah	100.000.000					
2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	100.000.000					
XII	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan PSU dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh		25 Persen	2.000.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan PSU Dalam Rangka Pencegahan Tumbuhnya Kawasan Permukiman Kumuh		20 Persen	5.380.280.000,00
A	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapanewon Penerima program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		6Kapanewon	2.000.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	RTLH yang direhabilitasi		- -	5.380.280.000,00
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Gunungkidul	200 Unit Rumah	2.000.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256 Unit Rumah	5.380.280.000,00
XIII	PROGRAM PENINGKATANPRASARANA, SARANA DAN UTILITASUMUM (PSU)	Persentase Perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU		100 Persen	1.300.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU		20 Persen	99.877.000,00
A	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten		15 Lokasi	1.300.000.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pemenuhan Kebutuhan PSU di Perumahan dan		- -	99.877.000,00

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
							Permukiman			
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	200.000.000					
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Gunungkidul	10 Lokasi	1.100.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lokasi	99.877.000,00
XIV	PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN SERTIFIKASI,KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU		100 Persen	7.500.000					
A	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil disertifikasi		20 Lokasi	7.500.000					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kab. Gunungkidul	1 Laporan	7.500.000					
Total					67.504.793.960	Total				84.813.460.607,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan diawali dengan pengumpulan program dan kegiatan dari bidang-bidang dan UPT yang ada di lingkungan DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul. Langkah selanjutnya, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah serta program dan kegiatan mampu memenuhi kebutuhan, bermanfaat bagi masyarakat, diadakan musrenbang di semua kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam proses musrenbang para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari masyarakat kapanewon/desa yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, diberi kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dapat benar-benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan dalam usulan program kegiatan PIWK dan sectoral (PIS). Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan dibahas lagi pada Forum Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk mendapatkan penyempurnaan atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kapanewonsehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran serta memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Pada forum ini disampaikan data rekapitulasi hasil musrenbang, dan kemudian disepakati bersama hasil forum perangkat daerah tersebut. Namun, usulan-usulan tersebut tidak seluruhnya dapat terakomodir karena keterbatasan anggaran. Adapun rekapitulasi usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2. 5 Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul

USULAN PIWK

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Keterangan
1	(PIWK) Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	Ruas Jalan Sampang-Serut (1416) Padukuhan Nglengkong Rt 29/06, Serut, Gedangsari. Gunungkidul	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,15	KM	1.066.878.130,26	160.031.720	
2	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2,5 meter	Ruas Jalan Sampang-Gantiwarno (1407) Karangasem Rt.03/02, sampang gedangsari gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,045	KM	6.077.561.704,86	273.490.277	
3	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 3 meter	Ruas Jalan Sampang-Serut (1416) Padukuhan Nglengkong Rt 29/06, Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,014	KM	8.725.078.120,97	122.151.094	
4	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Kabupeten Gunugkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10	Unit Rumah	20.000.000,00	200.000.000	
5	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter) (Cor beton)	Ruas Jalan Mangli-Mertelu (1415) Kalurahan Hargomulyo	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,211	KM	2.496.941.361,95	527.934.001	
6	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Nglindur-Bohol (1612) Nglindur wetan Nglindur Girisubo	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,3	KM	1.771.590.606,94	531.477.182	
7	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Tileng-Banagung (1610) Tileng	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,3	KM	1.771.590.606,94	531.477.182	
8	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Bejiharjo karangmojo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000	
9	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Bendungan, lokasi 1) Mento Utomo RT03 RW01	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Keterangan
		Bendungan, 2) Margito RT01 RW 02 Selang, 3)Desi Pertiwi RT 03 RW03, 4) Pargiyo RT04 RW04 Gandu 1, 5) Nandi Wibowo RT04 RW05 Gandu 2	Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					
10	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	4	Unit Rumah	20.000.000,00	80.000.000	
11	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	SUDARTO , SUWARSONO , SUPINAH DUSUN NGEPUNG RT 02 RW 14 DESA KARANGMOJO KECAMATAN KARANGMOJO	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000	
12	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	1. Kelor, Kelor Karangmojo 2. sudimoro, Kelor, Karangmojo. 3. Ngunutlor, Kelor, Karangmojo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000	
13	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Wiladeg Kapanewon Karangmojo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000	
14	Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jatiayu-Ngeblak,Jatiayu Karangmojo Gunungkidul (Ruas Jalan 0212)	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,5	KM	1.771.590.606,94	885.293.087	
15	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	4	Unit Rumah	20.000.000,00	80.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Keterangan
			dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					
16	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Sambirejo Ngawen Gunungkidul DIY	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	4	Unit Rumah	20.000.000,00	80.000.000	
17	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Tancep,Ngawen	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	7	Unit Rumah	20.000.000,00	140.000.000	
18	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Banaran-Watusigar (1310) Banaran-Bejono, Beji, Ngawen	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,115	KM	1.771.590.606,94	203.732.920	
19	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Ngawen-Gununggambar (1303) Kampung, Ngawen, Gunungkidul.	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,115	KM	1.771.590.606,94	203.732.920	
20	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Randusari-Cikal (1314) Kalurahan watusigar, Ngawen	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,115	KM	1.771.590.606,94	203.732.920	
21	(PIWK) Pembangunan drainase Tipe A (Kecil)	Ruas Jalan Lingkar Nglipar Selatan (0214) Nglipar Kidul, Nglipar, Gunungkidul	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,172	KM	1.035.718.334,07	178.143.553	
22	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kebonjero RT 001/ RW 006	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10	Unit Rumah	20.000.000,00	200.000.000	
23	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Kabupaten Pengkol-Kedungpoh (0203) Kedungpoh Kulon Nglipar Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,145	KM	1.771.590.606,94	256.948.184	
24	(PIWK) Rehabilitasi jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Kabupaten Ngabdirejo-Pilangrejo (0206)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,229	KM	1.122.044.470,30	256.948.184	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Keterangan
		perempatan pasar wotgalih ke utara Wotgalih Pilangrejo Nglipar						
25	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Kabupaten Ngabdirejo-Pilangrejo (0206) dari pom mini Ngabdirejo - Pilangrejo	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,2	KM	1.771.590.606,94	354.318.121	
26	(PIWK) Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	Ruas Jalan Singkil-Giring (0503) Giring, Paliyan	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,1756	KM	1.066.878.130,26	187.343.800	
27	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Grogol	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	6	Unit Rumah	20.000.000,00	120.000.000	
28	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	kalurahan karangduwet kapanewon paliyan kabupaten gungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	8	Unit Rumah	20.000.000,00	160.000.000	
29	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalureahan Mulusan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5	Unit Rumah	20.000.000,00	100.000.000	
30	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Pampang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	9	Unit Rumah	20.000.000,00	180.000.000	
31	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Sodo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar	9	Unit Rumah	20.000.000,00	180.000.000	Berdadarkan data BNBA dari BAPPEDA, hanya 8 unit

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Keterangan
			Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					
32	(PIWK) Pembangunan drainase Tipe A (Kecil)	Ruas Jalan Panggang-Pejaten (0606) Pudak, Giriwungu, Panggang, Gunungkidul	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,196	KM	1.035.718.334,07	203.000.794	
33	Pembangunan Talud Jalan Tinggi 3 meter	Ruas Jalan Panggang-Temuireng (0611) Temuireng II, Girisuko panggang Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,023	KM	8.725.078.120,97	200.676.797	
34	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Giriharjo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10	Unit Rumah	20.000.000,00	200.000.000	
35	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Girikarto	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10	Unit Rumah	20.000.000,00	200.000.000	
36	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	kalurahan Girimulyo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10	Unit Rumah	20.000.000,00	200.000.000	
37	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Girisekar, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55872	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10	Unit Rumah	20.000.000,00	200.000.000	
38	(PIWK) Pembangunan sistem jaringan air minum perpipaan	gembyong, ngoro-oro, patuk	Jumlah sambungan Rumah yang terlayani oleh pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	41	SR	6.560.000,00	268.960.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Keterangan
			Jaringan Perpipaan					
39	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 5 meter)	Ruas Jalan Patuk-Pengkok (0411) Kapanewon Patuk	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,34	KM	2.214.488.258,68	752.926.008	
40	(PIWK) Pembangunan drainase Tipe A (Kecil)	Ruas Jalan Simpang Ngunut-Dengok (0311) Ngunut Tengah, Ngunut, Playen , Gunungkidul	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,15	KM	1.035.718.334,07	155.357.750	
41	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Ngleri	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	4	Unit Rumah	20.000.000,00	80.000.000	
42	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas jalan playen - gembol (0301), depan SDN Banyusoco 2	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,156	KM	1.771.590.606,94	276.368.135	
43	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Plembutan-Dengok (0316) Tanjung II RT 17 RW 03, Bleberan, Playen , Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,183	KM	1.771.590.606,94	324.201.081	
44	(PIWK) Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	Ruas Jalan Pokcucak-Ponjong (1009) Ponjong, Ponjong, Gunungkidul	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,807	KM	1.066.878.130,26	860.970.651	
45	Pembangunan drainase T(PIWK) ipe B (Sedang)	Jalan Sp. Panggang - Klampok. No Ruas 0602. Padukuhan Gubar Rt 10 Rw 05, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,1	KM	1.066.878.130,26	106.687.813	
46	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1 meter	Jalan Karangnongko - Pantai Bekah. Nomor Ruas 1808. Karangnongko Rt 04 Rw 06, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,1	KM	942.848.497,19	94.284.850	
47	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1,5 meter	Trasih 004/002 Giriasih Purwosari Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,1	KM	2.237.260.273,10	223.726.027	
48	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	giricahyo, purwosari	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2	Unit Rumah	20.000.000,00	40.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Keterangan
49	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Widoro Rt 07 Rw 01, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	4	Unit Rumah	20.000.000,00	80.000.000	
50	(PIWK) Perluasan sistem jaringan air minum perpipaan	giricahyo,purwosari	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	30	SR	4.540.000,00	136.200.000	
51	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter) (Cor beton)	Ruas Jalan Blado-Ploso (1804)	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,142	KM	2.496.941.361,95	354.318.121	
52	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Karangwuni-Baran (1110) Karangwuni Kapanewon Rongkop Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,25	KM	1.771.590.606,94	442.897.652	
53	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Tejo-Ngelo (1111) Slawu, RT 001 RW 009, Pucanganom, Rongkop	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,25	KM	1.771.590.606,94	442.897.652	
54	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Semugih-Petir (1105) Padukuhan Purworejo, Semugih, Rongkop, Gunungkidul.	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,2262	KM	1.771.590.606,94	400.733.795	
55	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2 meter	Ruas Jalan Girisekar-Temanggung (0605) Mojosari Jetis Saptosari	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,049	KM	3.936.260.260,22	192.876.753	
56	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2,5 meter	Ruas Jalan Temanggung-Krambilsawit (1502) NGLORO, JALAN NGLORO-KRAMBILSAWIT	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,05	KM	6.077.561.704,86	303.878.085	
57	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Pucung-Klepu (1511) Sepanjang Jalan Kabupaten ruas Pucung-Klepu (1511) tepatnya di Padukuhan Belimbing	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,3	KM	1.771.590.606,94	531.477.182	
58	(PIWK) Pembangunan drainase Tipe A (Kecil)	Ruas jalan Kabupaten 0802 Semanu - Semuluh, Padukuhan ngebrak timur, lokasi komplek pasar hewan	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,2	KM	1.035.718.334,07	207.143.667	
59	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Tungaknongko-Sambirejo No. 0815, di	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,2	KM	1.771.590.606,94	354.318.121	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Keterangan
		Padukuhan Kalangbangi Kulon, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul						
60	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Serpeng-Semanu (0810) Kuwon Lor, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,2	KM	1.771.590.606,94	354.318.121	
61	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Semuluh-Pasar Ngenep (0808) Jln Semuluh-Ngeneb	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,2	KM	1.771.590.606,94	354.318.121	
62	(PIWK) Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	Ruas Jalan 1210 (karangsari-semin) Dusun Putuk 003/007, Karangsari, Semin, Gunungkidul	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,2214	KM	1.066.878.130,26	236.206.818	
63	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2 meter	Ruas Jalan Widoro-Simpang Tiga Bendung (1203) Padukuhan Bendung Kalurahan Bendung Semin Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,1	KM	3.936.260.260,22	393.626.026	
64	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2 meter	Ruas Lingkar Timur Kota Semin (1222) Seminwetan RT 01 sampai 03, pundungsari, semin	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,05	KM	3.936.260.260,22	196.813.013	
65	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	(Ruas Jalan No. 1201) Ruas Jalan Semin-Kalilunyu, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,2	KM	1.771.590.606,94	354.318.121	
66	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Duwet-Kemejing (1213) Padukuhan Duwet Kal. Kemejing Kap. Semin	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,2	KM	1.771.590.606,94	354.318.121	
67	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1,5 meter	Ruas Jalan Mentel-Panggul (1703) Jambu, Kalurahan hargosari, kapanewon tanjungsari.	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,05	KM	2.237.260.273,10	111.863.014	
68	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2 meter	Ruas Jalan Guyangan-Walikangin (1702) Banjarejo, Tanjungsari	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,04	KM	3.936.260.260,22	157.450.410	
69	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2 meter	Ruas Jalan Kemiri-Pulebener (1705) Padukuhan Ngasem, Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,0552	KM	3.936.260.260,22	217.281.566	
70	(PIWK) Pembangunan	Ruas Jalan Bintaos-Mendang	Panjang Talud Jalan Kabupaten	0,0352	KM	6.077.561.704,86	213.930.172	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Keterangan
	Talud Jalan Tinggi 2,5 meter	(0708) Padukuhan Kudu, Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul	Dibangun					
71	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Banjarejo Tanjungsari	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2	Unit Rumah	20.000.000,00	40.000.000	
72	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	padukuhan mojosari, kalurahan hargosari, kapanewon tanjungsari	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5	Unit Rumah	20.000.000,00	100.000.000	
73	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Kemadang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	7	Unit Rumah	20.000.000,00	140.000.000	
74	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2,5 meter	Jalan Balong - Panggul Ruas(1601) Trenggulun, Giripanggung, Tepus		0,04	KM	6.077.561.704,86	243.102.468	
75	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Rt.004 Rw.005 Padukuhan Gesing 1,Kalurahan Purwodadi,ewon Tepus,Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1	Unit Rumah	20.000.000,00	20.000.000	
76	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Sidoharjo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	5	Unit Rumah	20.000.000,00	100.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Keterangan
			Ha yang Diperbaiki					
77	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Tepus	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	7	Unit Rumah	20.000.000,00	140.000.000	
78	(PIWK) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Ruas Jalan Candirejo-Hargosari (0830) Karangtengah I dan Karangtengah II Sumberwungu Tepus	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,15	KM	1.771.590.606,94	265.738.591	
79	(PIWK) Pembangunan drainase Tipe A (Kecil)	Ruas Jalan Ki Ageng Giring Sisi Barat (0119) Padukuhan Besari, Kalurahan Siraman, Kap. Wonosari, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,15	KM	1.035.718.334,07	155.357.750	
80	(PIWK) Pembangunan drainase Tipe A (Kecil)	Ruas Jalan Pangarsan (0102) Padukuhan Purbosari	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,2	KM	1.035.718.334,07	207.143.667	
81	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2,5 meter	Ruas Jalan Karangrejek-Dunggubah I (0138) Karanggumuk II RT 034 RW 015 Karangrejek Wonosari Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,015	KM	6.077.561.704,86	91.163.426	
82	(PIWK) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2,5 meter	Ruas Jalan Duwet-Wareng (0130) singkar II	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,03	KM	6.077.561.704,86	182.326.851	
83	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Gatak 006/009, Gari, Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	4	Unit Rumah	20.000.000,00	80.000.000	
84	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	MULO MULO WONOSARI GUNUNGKIDUL	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5	Unit Rumah	20.000.000,00	100.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Keterangan
85	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2	Unit Rumah	20.000.000,00	40.000.000	
86	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000	
87	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Padukuhan Winong Rt 004 Rw 006, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1	Unit Rumah	20.000.000,00	20.000.000	
88	(PIWK) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kamal, Teguhan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5	Unit Rumah	20.000.000,00	100.000.000	
JUMLAH							19.559.932.335	

Usulan PIS
(Berdasarkan Data dari BAPPEDA)

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIS) Pembangunan drainase Tipe A (Kecil)	Jalan Jeruksari-Tawarsari	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,1	KM	1.035.718.334,07	103.571.833,00	
2	(PIS) Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	Ruas Singkil-Giring 0503, Giring, Paliyan	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,155	KM	1.066.878.130,26	165.366.110,00	
3	(PIS) Pembangunan	Balai Kalurahan Karangduwet	Panjang Drainase Jalan Kabupaten	0,1045	KM	1.066.878.130,26	111.488.765,00	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Catatan
	drainase Tipe B (Sedang)	Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul	Dibangun					
4	(PIS) Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	Padukuhan Polaman RT006/RW002, Kalurahan Pampang, Paliyan (Ruas 0501 Grogol - Sp. Wareng (Polaman, Pampang)	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,069	KM	1.066.878.130,26	73.614.591,00	
5	(PIS) Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	Sodo	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,0864	KM	1.066.878.130,26	92.178.271,00	
6	(PIS) Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	siyono kidul RT 42 RW 008, Logandeng, Playen, Gunungkidul	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,1	KM	1.066.878.130,26	106.687.813,00	
7	(PIS) Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	Jalan kabupaten 5,8 km , Rejosari - Glagah	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,27	KM	1.066.878.130,26	288.057.095,00	
8	(PIS) Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	Padukuhan Piyaman II, Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,1	KM	1.066.878.130,26	106.687.813,00	
9	(PIS) Pembangunan drainase Tipe B (Sedang)	RT04 RW09 Padukuhan Randukuning III, Kalurahan Selang	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	0,09	KM	1.066.878.130,26	96.019.032,00	
10	(PIS) Pembangunan sistem jaringan air minum perpipaan	Kedungkeris	Jumlah sambungan Rumah yang terlayani oleh pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	29	SR	6.560.000,00	190.240.000,00	
11	(PIS) Pembangunan sistem jaringan air minum perpipaan	kantor kalurahan baleharjo	Jumlah sambungan Rumah yang terlayani oleh pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10	SR	6.560.000,00	65.600.000,00	
12	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1 meter	Kalurahan Karangasem Kapanewon Paliyan	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,083	KM	942.848.497,19	78.256.425,00	
13	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1 meter	Tanjung, Rt 23-24/Rw 04,Getas,Playen,Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,2	KM	942.848.497,19	188.569.699,00	
14	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1 meter	Jalan Giritirto- Giripurwo. No Ruas 1801. Jlumbang Rt 04 Rw 10, Giripurwo, Purwosari, Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,2	KM	942.848.497,19	188.569.699,00	
15	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1 meter	Kalurahan Krambilsawit (Ruas Jalan Ngondelkulon-Bibis)	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,15	KM	942.848.497,19	141.427.275,00	
16	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1,5 meter	Padukuhan Mendak, Kalurahan Girisekar, Kapanewon Panggang, Kabupaten	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,05	KM	2.237.260.273,10	111.863.014,00	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Catatan
		Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872						
17	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1,5 meter	Padukuhan Mojosari 001/003 Hargosari Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,05	KM	2.237.260.273,10	111.863.014,00	
18	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1,5 meter	Kalurahan Kemadang	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,05	KM	2.237.260.273,10	111.863.014,00	
19	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 1,5 meter	Padukuhan Jaten RT 04 RW 02, Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,021	KM	2.237.260.273,10	46.982.466,00	
20	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2 meter	Kalurahan Girikarto	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,032	KM	3.936.260.260,22	125.960.328,00	
21	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2 meter	GEBLUG, KENTENG, PONJONG, GUNUNGKIDUL	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,1	KM	3.936.260.260,22	393.626.026,00	
22	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2 meter	Padukuhan Walikangin RT 04, RW 07, Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,02	KM	3.936.260.260,22	78.725.205,00	
23	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 2,5 meter	Jambu Banjarejo Tanjungsari	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,02	KM	6.077.561.704,86	121.551.234,00	
24	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 3 meter	kalurahan Girimuyo	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,015	KM	8.725.078.120,97	130.876.172,00	
25	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 3 meter	Dadapan RT 020 RW 008 Petir Rongkop	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,05	KM	8.725.078.120,97	436.253.906,00	
26	(PIS) Pembangunan Talud Jalan Tinggi 3 meter	Ruas Jalan Kabupaten nomor 1503, Planjan -Kanigoro , tepatnya disepanjang jalan SMP 3 Saptosari lama.	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,03	KM	8.725.078.120,97	261.752.344,00	
27	(PIS) Perbaikan RTLH (di dalam Kawasan Kumuh)	Jalan Patuk-Pengkok Kapanewon Patuk	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000,00	
28	(PIS) Perbaikan RTLH (di dalam Kawasan Kumuh)	Kalurahan Terbah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000,00	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Catatan
			dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					
29	(PIS) Perbaikan RTLH (di dalam Kawasan Kumuh)	Padukuhan Jeruksari, Wonosari,	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1	Unit Rumah	20.000.000,00	20.000.000,00	
30	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Jepitu, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2	Unit Rumah	20.000.000,00	40.000.000,00	
31	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Jalan sadeng km 4.5 Nglindur Girisubo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2	Unit Rumah	20.000.000,00	40.000.000,00	
32	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	balai kalurahan mulusan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5	Unit Rumah	20.000.000,00	100.000.000,00	
33	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Giriharjo, Panggang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1	Unit Rumah	20.000.000,00	20.000.000,00	
34	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Girisuko panggang gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar	4	Unit Rumah	20.000.000,00	80.000.000,00	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Catatan
			Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					
35	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Giriwungu, Panggang, Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	4	Unit Rumah	20.000.000,00	80.000.000,00	
36	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Nglegi, Patuk, Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000,00	
37	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	ngoro-oro, patuk	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000,00	
38	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Padukuhan Panjatan dan Padukuhan Pengkok	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000,00	
39	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Semoyo,Semoyo.Patuk Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000,00	
40	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Girijati, Purwosari, Gunungkiudul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000,00	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Catatan
			Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					
41	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Jl. Wediombo Km7, Candirejo, Semanu, Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000,00	
42	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	kalurahan Dadapayu, Semanu, Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3	Unit Rumah	20.000.000,00	60.000.000,00	
43	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Sarinten (Kuwon Kidul RT 006 RW 014), Manto Rejo Sukam (Kuwon Kidul RT 003 RW 014), Roni Setiawan (Jonge RT 004 RW 004), Jumanto (Jelok RT 005 RW 003)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	4	Unit Rumah	20.000.000,00	80.000.000,00	
44	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Padukuhan Tambakrejo, Semanu, Semanu, gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	4	Unit Rumah	20.000.000,00	80.000.000,00	
45	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	7	Unit Rumah	20.000.000,00	140.000.000,00	
46	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	Jalan Baron Km 2 Karangrejek Wonosari Gunungkidul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap	4	Unit Rumah	20.000.000,00	80.000.000,00	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume		Harga Satuan	Anggaran	Catatan
			Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					
47	(PIS) Perbaikan RTLH (di luar Kawasan Kumuh)	MULO MULO WONOSARI GK	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	4	Unit Rumah	20.000.000,00	80.000.000,00	
48	(PIS) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Jalan Gunungbatur, Balong, Girisubo, Gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,3	KM	1.771.590.606,94	531.477.182,00	
49	(PIS) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Jurangjero, ngawen, gunungkidul	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,181	KM	1.771.590.606,94	320.657.900,00	
50	(PIS) Rekonstruksi Jalan (lebar 4 meter)	Padukuhan Kedungwanglu	Panjang Talud Jalan Kabupaten Dibangun	0,2	KM	1.771.590.606,94	354.318.121,00	
TOTAL							6.514.104.347,00	

Catatan: Usulan termasuk atribusi pekerjaan

Usulan POKIR Dewan
(Berdasarkan Data dari BAPPEDA)

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume		Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas 0819 Semanu-Semanu Selatan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
2	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	ruas jalan 0130 Duwet-Wareng (pangkal Mutazam kebarat)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
3	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Mulusan - Pampang (0506) , Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
4	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan (1202) Tahunan - Bulurejo, Tahunan RT 05 Rw 04, Bulurejo, Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
5	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan (0411) Patuk - Pengkok, Kalinampu RT 27 RW 06, Pegkok, Patuk, Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
6	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	JL GETAS -SRIKOYO RUAS 0314 (PEREMPATAN GETAS ARAH GUBUGRUBUH - NGRANCANG), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume		Harga Satuan	Anggaran	Catatan
7	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan (0807) Jonge - Sp3 Semanu, Per4 Jonge - Kali Suci Jetis Wetan, Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
8	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas 0137 Karangtengah-Bejiharjo (P.0 Karang lor) , Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
9	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas 0134 Jeruksari-Tawarsari (P.0 Jeruksari), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
10	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas 0708 Bintaos-Mendang (P0 Mendang I), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
11	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	No Ruas 1207 Semin - SP. Pundungsari (Depan Pasar Sapi), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
12	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Logantung - Ngawen (1212), lokasi ujung semin Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
13	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	NO RUAS JLN, 022, NO RUAS BARU, 0304, PLAYEN, NGLERI, Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
14	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Nomor Ruas jalan yang benar adalah nomor 1210 (Karangsari-Semin)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
15	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	NO RUAS JALAN 1710, Kemadang-Jambu, KAPANEWON TANJUNGSARI, Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
16	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Wotgaleh-Watusigar (1317) Klegung RT 05 Katongan Nglipar, Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
17	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	JL. PLAYEN-NGLERI RUAS 0304 (JALUR PLAYEN GADING-TUMPAK KE BARAT ARAH NGASEMREJO), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
18	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Duwet - Wareng I (0130) Dunggubah II RT 01 - Dunggubah RT 04 (Depan Rumah Sakit Multazam Kebarat sampai Makam., Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
19	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Mulo-Kamal (0146) RT 12 RW 04, Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
20	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Tambakromo-Kenteng (1004) Bulurejo RT 05 RW 05 Tambakromo Ponjong, Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
21	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Nitikan Barat-Semanu Tengah (0820), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
22	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Paliyan-Gempol (0504), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
23	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	RUAS JALAN SEMULUH - PS. NGENEP 0808,	Panjang Jalan yang	200	Meter	200.000.000	200.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume		Harga Satuan	Anggaran	Catatan
		(TUGU BATAS DESA DADAPAYU KE ARAH TIMUR - ARAH PASAR NGENEP) , Kab. Gunungkidul	Direhabilitasi					
24	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	NO RUAS JLN LAMA 317, NO RUAS JLN BARU 1308, JURANGJERO, SAMBIREJO, Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
25	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas 0815 Tunggaknongko - Sambirejo (P.0 Kalangbangi Kulon), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
26	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Kemiri-Pulebener (1705), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
27	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Semin-Kalilunyu (1201) Padukuhan Kalitekuk, Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
28	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Logantung - Ngawen (1212), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
29	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Playen - Ngleri (0304), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
30	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Mertelu - Tegalrejo (gupit) (1413), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
31	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Macanmati - Wiloso (0615), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
32	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Tunggaknongko - Sambirejo (0815), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
33	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Plembutan - Dengok (0316), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
34	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Sumberwungu - Regedeg (0707), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
35	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Pucung - Klepu (1511), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
36	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	NO RUAS JLN 0816, SINDON-PLEMBENGAN, KAPANEWON SEMANU, Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
37	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Jatiayu - Gunungbang (0912), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
38	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Bunder - Plumbungan (0410), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
39	(POKIR) Pembangunan Drainase Jalan	Sawahan - SP Pundungsari (1003), Kab. Gunungkidul	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
40	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	nomor ruas jalan yang benar adalah 0615 (Girisekar-Kadisobo)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
41	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Jl. Girisekar - Gedad 0608 (Temuireng 2, RT 001/RW 008 Girisuko, Panggang), Kab.	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume		Harga Satuan	Anggaran	Catatan
		Gunungkidul						
42	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Pakel – Petir 1102, (Dusun Ngelo Pringombo Menuju Siyono Petir), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
43	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Puerwodadi - Pantai Timang (0705), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
44	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Siyono - Walikan 0151, (Siyono Kidul RT 041, Logandeng, Playen), Kab. Gunungkidul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
45	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Ruas0211 Kedfungkeris-Pengkol (titik awal Pengkol RT 02)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
46	(POKIR) Pembangunan Drainase Jalan	jl Kab. ruas 1404 Jelok- Watugajah (draenase) dsn gunungclik rt 6- RT7)	Panjang Drainase Jalan Kabupaten Dibangun	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
47	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Kepil - Sayangan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
48	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Grogol - Karanglor, Bejiharjo	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
49	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Mulusan - Pampang	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
50	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Jl. Kab; Serpeng-Semanu 0818 - 0817	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
51	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Nitikan Barat; Semanu Tengah	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
52	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Jl. Kab; ruas 0322 Bandung - Bogor (Padukuhan Bogor 1/Playen)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
53	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Jl. Kab; ruas 0315 Bogor - Pulutan (Padukuhan Bogor 2)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
54	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Jl. Kab; ruas 0824, Kauman - Gombang (padukuhan ngrejek wetan kulon Gombang	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
55	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Jl. Kab; ruas 0709, Giripanggung - Ngelo (Padukuhan Klapaloro 2;Giripanggung	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
56	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Jl. Kab; Pejaten, Petung, Panggang (0617)	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
57	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Jl. Plebengan s.d sindon	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
58	(POKIR) Rehabilitasi Jalan	Jl. Kab. Duren - Tempuran (tiku dusun tempuran kulon,Kampung, Ngawen	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	200	Meter	200.000.000	200.000.000	
TOTAL							11.600.000.000	

Catatan: Usulan termasuk atribusi pekerjaan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pengembangan pelayanan infrastruktur 5 tahun ke depan, merupakan hasil dari pengaruh-pengaruh oleh perkembangan kebijakan dan kondisi yang terjadi di lingkungan global, nasional, dan lokal. Untuk memprediksikan kemungkinan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan PD, berikut tinjauan singkat mengenai arah kebijakan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum di tingkat nasional, provinsi, dan kebijakan kabupaten.

Kebijakan nasional pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman mengacu pada upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk: memperkuat konektivitas antarwilayah, memenuhi kebutuhan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, memenuhi pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kota yang modern berkelanjutan dan inklusif.

Di tingkat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Arah Kebijakan dalam isu strategis pemerintah pusat dan pemerintah D.I. Yogyakarta yang disampaikan oleh Bappeda D.I Yogyakarta dalam Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 sebagai berikut:

a. Isu strategis nasional
   - Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
   - Kemandirian melalui Swasembada Pangan, Air dan Energi;
   - Pengembangan Infrastruktur;
   - Memperkuat Daya Saing SDM;
   - Hilirisasi dan Pengembangan Industri berbasis SDA;
   - Membangun dari Desa;
   - Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata Kelola; dan
   - Kehidupan yang Harmonis dengan Alam, Lingkungan dan Budaya

b. Isu strategis D.I Yogyakarta
   - Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan);
   - Pengembangan Wilayah Selatan DIY;
   - Perkembangan Teknologi Informasi;
   - Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif;
   - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
   - Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik;
   - Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borobudur Yogyakarta-Prambanan;
   - Penguatan Ketahanan Pangan;
   - Pelestarian dan Pengelolaan Budaya;
   - Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan;
   - Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
   - Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital.

c. Isu strategis daerah
   1. Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim;

2. Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata;
3. Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha;
4. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas;
5. Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum;
6. Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik.

Tujuan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang ingin mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat wisata, pendidikan dan budaya. Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, dukungan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan air baku, peningkatan kondisi lingkungan dan permukiman, dan peningkatan pemanfaatan ruang. Secara umum aksesibilitas wilayah di Provinsi DIY cukup baik, meskipun daya dukung jalan yang masih rendah. Dengan pengembangan infrastruktur jalan, mobilitas perekonomian wilayah akan semakin meningkat. Untuk meningkatkan kondisi lingkungan, diperlukan pengembangan permukiman secara lintas sektor, penyediaan air bersih, pengelolaan dan penanganan air limbah dan sanitasi, pengelolaan dan pelayanan persampahan, drainase, juga penyelenggaraan tata bangunan dan lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berdasarkan pada isu-isu yang berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, dan dengan melihat kondisi yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Rencana Kerja PD, sebagai berikut:

Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, tujuan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum yang akan dicapai adalah: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur.

Sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan DPUPRKP

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Layanan Infrastruktur	59,8

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran adalah menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan didukung jasa usaha konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran yang sifatnya strategis, yaitu melalui meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan dan meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan Penganggaran serta meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi.

Selanjutnya adalah menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum perumahan rakyat dan kawasan permukiman untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi daerah dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran strategis yaitu meningkatnya dukungan kedaulatan pangan, energi, meningkatnya ketahanan air meningkatkan akses konektivitas, produktivitas, efisiensi, dan pelayanan pada sentra produksi daerah, serta meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan, meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan formal.

Tabel 3. 2 Sasaran DPUPRKP

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2026
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	74
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	30,5

Tabel 3. 3 F (IKU) DPUPRKP Tahun 2026

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Layanan Infrastruktur	56,6
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	74
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	30,5

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

A. Visi dan Misi

Dengan berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY ,serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Endah Subekti Kuntariningsih, S.E, M.P dan Joko Parwoto, S.E., M.M , dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai Visi Kabupaten Gunungkidul, ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

1) Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2) Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3) Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal
4) Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5) Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa

B. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

Misi 5 Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa;

Program- program Pembangunan pada Misi 5 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
7. Program Pengembangan Permukiman;
8. Program Penataan Bangunan Gedung;
9. Program Penyelenggaraan Jalan;
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
11. Program Pengembangan Perumahan;
12. Program Kawasan Permukiman;
13. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
15. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

4.2. Prioritas Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2025-2029, merumuskan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 adalah: “Penguatan Fondasi Pembangunan melalui peningkatan derajat pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi berdasarkan potensi daerah yang lestari menuju kesejahteraan masyarakat”.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 yang telah ditetapkan tersebut mengamanatkan adanya dukungan pelayanan di bidang infrastruktur pekerjaan umum, yaitu:

7. Program Alam Lestari

   Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan ketahanan warga terhadap bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi, pelestarian kawasan lindung, perbaikan manajemen sampah, dan perluasan Kalurahan Tangguh Bencana.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan sebagai pendukung dan penyedia layanan di bidang infrastruktur pekerjaan umum, antara lain infrastruktur air, sanitasi, dan jaringan jalan, untuk sentra-sentra produksi, kawasan permukiman, destinasi wisata, maupun kawasan ekonomi lainnya.

4.3. Pencapaian SDGs

1. Tujuan SDGs:
   a. Tanpa Kemiskinan
   b. Tanpa Kelaparan

c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
d. Pendidikan Berkulitas
e. Kesetaraan Gender
f. Air Bersih dan Senitasi Layak
g. Energi Bersih dan Terjangkau
h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
i. Industri, Inovasi, dan Infrastuktur
j. Berkurangnya Kesenjangan
k. Kota dan Komunitas Berkelanjutan
l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
m. Penanganan Perubahan Iklim
n. Ekosistem Laut
o. Ekosistem Daratan
p. Perdamaian, Keadialan, dan Kelembagaan yang Tangguh
q. Kemitraan Untuk Mecapai Tujuan

2. Sasaran SDGs:
   a. Menurunkan hingga setengahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%.
   b. Mengurangi jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya.
   c. Pada 2018, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
   d. Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia.
   e. Mengurangi hingga dua per tiga-nya tingkat kematian anak di bawah 5 tahun.
   f. Mengurangi hingga tiga per empat-nya tingkat kematian ibu di Indonesia.
   g. Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia.
   h. Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran malaria dan penyakit menular lain di Indonesia.
   i. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serta mengembalikan sumber daya yang hilang.
   j. Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.
   k. Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh.
   l. Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.
   m. Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tarif dan bebas kuota untuk produk ekspor mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan bantuan pembangunan resmi (*official development assistance - ODA*) yang lebih besar kepada negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.
   n. Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecil.
   o. Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.

p. Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum muda.
q. Bekerja sama dengan perusahaan farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembang.
r. Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk pencapaian target SDGs, secara umum, peran Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai pendukung dalam penyediaan infrastruktur dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan satu, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, diselenggarakan pelayanan dan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum yang dapat mendukung peningkatan akses bagi masyarakat miskin. Secara khusus, peran Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman fokus pada tujuan ke-7 dan sasaran ke-10 yaitu, mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, yang ditempuh dengan kegiatan di bidang ke-cipta karya-an. Indikator untuk pencapaian target ini adalah:

1. Proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total, perdesaan dan perkotaan) (%).
2. Cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (KK – kepala keluarga).
3. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total, perdesaan, dan perkotaan) (%).

Kemajuan SDGs yang telah dicapai Kabupaten Gunungkidul dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum adalah:

1. Penyediaan infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan penduduk perbatasan, melalui pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan perdesaan.
2. Penyediaan air minum, baik melalui air perpipaan, air dengan sumber terlindungi, dan air dengan sumber tidak terlindungi.
3. Pelayanan sanitasi dasar, yaitu air limbah dan persampahan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).

Kondisi pelayanan infrastruktur jalan sudah dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, meskipun diakui bahwa belum semua ruas jalan dalam kondisi baik. Fokus penanganan jalan diarahkan pada peningkatan akses jalan di wilayah perbatasan dan perdesaan. Untuk mencapai kinerja yang baik, pelayanan infrastruktur jalan dibedakan antara jalan kabupaten dan jalan perdesaan (atau jalan poros desa).

Untuk jalan kabupaten di antaranya ditangani melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, dan kegiatan rehabilitasi jalan. Sedangkan untuk jalan perdesaan ditangani melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jalan perdesaan. Untuk jalan kabupaten, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2024 kondisi mantap mencapai 681,508 Km atau 62,75%, dari total panjang jalan 1.086,141 Km. Namun demikian, jalan dengan kondisi rusak masih cukup besar, yaitu 188,928 km (17,39%) kondisi rusak ringan dan 215,705 (19,86%) kondisi rusak berat.

4.4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat. Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (SPM) memberikan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelayanan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum sebagai acuan pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota

terdiri atas

a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum;
b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum; dan
c. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayananpengolahan Air Limbah Domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a pada SPM Bidang PerumahanRakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

4.5. Pencapaian IKU

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas berkaitan dengan IKU sampai dengan pada tahun 2024 telah mencapai sebagai berikut :

1) Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum meningkat sebesar : 72,14
2) Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman meningkat sebesar : 29,42
3) Nilai Akip PD meningkat sebesar: 82,03 (A)

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat Tahun 2026 dirumuskan menjadi 11 program dan 21 kegiatan serta 67 Sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp 84.813.460.607,00.

Tabel 4. 1 Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	OPD Penanggung jawab
										Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	84.813.460.607,00	DPUPRKP
					1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	84.813.460.607,00	DPUPRKP
Alam Lestari	Terciptanya kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelnajutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	74	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	77.362.403.607,00	DPUPRKP
					1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.662.595.268,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.152.500,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.770.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.432.500,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.560.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.890.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	OPD Penanggung jawab
					1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.002.923.060,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.969.333.060,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.590.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.607.208,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54.607.208,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.000.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	735.192.500,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.678.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	374.756.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.717.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.670.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.534.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	637.500,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	OPD Penanggung jawab
					1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.571.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.400.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.071.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.213.149.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.900.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	423.820.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.080.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	510.349.000,00	DPUPRKP
					1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	DPUPRKP
					1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.193.353.367,00	DPUPRKP
					1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.787.500,00	DPUPRKP
					1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	60.787.500,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	OPD Penanggung jawab
										Kewenangan Kabupaten/Kota		
					1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.132.565.867,00	DPUPRKP
					1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	339.530.000,00	DPUPRKP
					1	03	02	2.02	0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	339.530.000,00	DPUPRKP
					1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	501.850.000,00	DPUPRKP
					1	03	02	2.02	0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	339.530.000,00	DPUPRKP
					1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	142.542.500,00	DPUPRKP
					1	03	02	2.02	0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	153.738.367,00	DPUPRKP
					1	03	02	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	34.255.000,00	DPUPRKP
					1	03	02	2.02	0046	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	60.000.000,00	DPUPRKP
					1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	221.590.000,00	DPUPRKP
					1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.363.945.000,00	DPUPRKP
					1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.363.945.000,00	DPUPRKP
					1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan	47.150.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	OPD Penanggung jawab
										dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
					1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	236.095.000,00	DPUPRKP
					1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	719.800.000,00	DPUPRKP
					1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.200.000,00	DPUPRKP
					1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	320.700.000,00	DPUPRKP
					1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	599.050.000,00	DPUPRKP
					1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	599.050.000,00	DPUPRKP
					1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	77.240.000,00	DPUPRKP
					1	03	05	2.01	0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	27.550.000,00	DPUPRKP
					1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	494.260.000,00	DPUPRKP
					1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	300.000.000,00	DPUPRKP
					1	03	06	2.01		Pengelolaan dan	300.000.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	OPD Penanggung jawab
										Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
					1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	50.000.000,00	DPUPRKP
					1	03	06	2.01	0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	250.000.000,00	DPUPRKP
					1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.600.090.000,00	DPUPRKP
					1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10.600.090.000,00	DPUPRKP
					1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.386.890.000,00	DPUPRKP
					1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000.000,00	DPUPRKP
					1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung	213.200.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	OPD Penanggung jawab
										melalui SIMBG		
					1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	54.543.470.472,00	DPUPRKP
					1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	54.543.470.472,00	DPUPRKP
					1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	352.115.000,00	DPUPRKP
					1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.592.509.425,00	DPUPRKP
					1	03	10	2.01	0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	229.592.500,00	DPUPRKP
					1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	10.286.561.502,00	DPUPRKP
					1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan	12.094.323.184,00	DPUPRKP
					1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	29.988.368.861,00	DPUPRKP
					1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	99.899.500,00	DPUPRKP
					1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	81.529.500,00	DPUPRKP
					1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	38.880.000,00	DPUPRKP
					1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	42.649.500,00	DPUPRKP
					1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.890.000,00	DPUPRKP
					1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.890.000,00	DPUPRKP
					1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa	16.480.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	OPD Penanggung jawab
										Konstruksi		
					1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	16.480.000,00	DPUPRKP
Alam Lestari	Terciptanya kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelnajutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	30,5	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.451.057.000,00	DPUPRKP
					1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.970.900.000,00	DPUPRKP
					1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	83.150.000,00	DPUPRKP
					1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	40.000.000,00	DPUPRKP
					1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	43.150.000,00	DPUPRKP
					1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	706.850.000,00	DPUPRKP
					1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	174.150.000,00	DPUPRKP
					1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	303.150.000,00	DPUPRKP
					1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	229.550.000,00	DPUPRKP
					1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah	1.180.900.000,00	DPUPRKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	OPD Penanggung jawab
										Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
					1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.180.900.000,00	DPUPRKP
					1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	5.380.280.000,00	DPUPRKP
					1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5.380.280.000,00	DPUPRKP
					1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.380.280.000,00	DPUPRKP
					1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	99.877.000,00	DPUPRKP
					1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	99.877.000,00	DPUPRKP
					1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	99.877.000,00	DPUPRKP
					J U M L A H						84.813.460.607,00	DPUPRKP

Tabel 4. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Nama PD: DPUPRKP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman				84.813.460.607,00				32.631.401.750,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				84.813.460.607,00				32.631.401.750,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				77.362.403.607,00				30.591.524.750,00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		83,05 Persen	7.662.595.268,00			83,75 Persen	6.877.017.388,00
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- -	46.152.500,00			--	43.600.000,00
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	4 Dokumen	18.770.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	16.780.000,00
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	750.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	750.000,00
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	3 Dokumen	4.432.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	4.050.000,00
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Dokumen	1.560.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	1.460.000,00
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	15 Laporan	19.890.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Laporan	19.810.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						SKPD							
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		- -	5.002.923.060,00			--	4.328.276.388,00
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1022 Orang/bulan	4.969.333.060,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1190 Orang/bulan	4.293.176.388,00
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Laporan	2.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	2.500.000,00
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	14 Laporan	31.590.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Laporan	32.600.000,00
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian		- -	58.607.208,00			--	58.995.012,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	5 Dokumen	54.607.208,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen	54.995.012,00
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Orang	4.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Orang	4.000.000,00
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum		- -	735.192.500,00			--	578.684.500,00
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Paket	16.678.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	16.678.000,00
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Paket	374.756.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	298.964.000,00
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang	Kab. Gunungkidul,	12 Paket	23.717.000,00	DANA		12 Paket	23.525.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Wonosari, Kepek			ALOKASI UMUM (DAU)			
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	365 Dokumen	1.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		365 Dokumen	1.300.000,00
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Laporan	66.670.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	54.677.500,00
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Laporan	251.534.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	183.000.000,00
1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Dokumen	637.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	540.000,00
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		- -	606.571.000,00			- -	630.515.260,00
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan	Kab. Gunungkidul,	12 Laporan	100.000,00	DANA		12 Laporan	100.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wonosari, Kepek			ALOKASI UMUM (DAU)			
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	96 Laporan	207.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		96 Laporan	207.400.000,00
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Laporan	399.071.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	423.015.260,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		- -	1.213.149.000,00			- -	1.236.946.228,00
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	29 Unit	260.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		29 Unit	300.900.000,00
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Alat Besar								
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	18 Unit	423.820.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Unit	423.045.000,00
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	25 Unit	12.080.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Unit	13.080.000,00
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Unit	510.349.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	491.921.228,00
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	20 Unit	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Unit	8.000.000,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik		22 Persen	2.193.353.367,00			22 Persen	2.220.728.367,00
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Wilayah sungai dikelola dengan baik		--	60.787.500,00			--	61.345.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Lembaga	60.787.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9 Lembaga	61.345.000,00
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan air untuk tiap musim tanam secara kontinyu		- -	2.132.565.867,00				2.159.383.367,00
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan								
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bejiharjo Kab. Gunungkidul, Ponjong, Ponjong	0,23 KM	339.530.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,23 KM	338.680.000,00
1	03	02	2.02	0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah								
						Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Ngeposari Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul,	0,23 KM	339.530.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,23 KM	338.680.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Karangmojo, Wiladeg						
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran Kab. Gunungkidul, Patuk, Bunder Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sawahan Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sumbergiri	0,34 KM	501.850.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,31 KM	451.000.000,00
1	03	02	2.02	0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah								
						Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Ngipak Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sidorejo	0,23 KM	339.530.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,23 KM	338.680.000,00
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan								
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,19 KM	142.542.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,27 KM	250.000.000,00
1	03	02	2.02	0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah								
						Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	0,20 KM	153.738.367,00	DANA ALOKASI		0,2 KM	147.073.367,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dioperasikan dan Dipelihara	Semua Kel/Desa			UMUM (DAU)			
1	03	02	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi								
						Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Lembaga	34.255.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Lembaga	34.310.000,00
1	03	02	2.02	0046	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah								
						Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 UNIT	60.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 UNIT	60.000.000,00
1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa								
						Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	221.590.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	200.960.000,00
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Air Minum Perpipaan		52,76 Persen	1.363.945.000,00			55,25 Persen	749.215.000,00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Spamdes yang memiliki sistem mantap		- -	1.363.945.000,00			--	749.215.000,00
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
						Jumlah Masyarakat yang	Kab. Gunungkidul,	400 Orang	47.150.000,00	DANA		600 Orang	47.150.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			ALOKASI UMUM (DAU)			
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo	2,7 Liter/Detik	236.095.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3,4 Liter/Detik	236.095.000,00
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris Kab. Gunungkidul, Playen, Ngawu Kab. Gunungkidul, Patuk, Ngoro-oro	0,92 Liter/Detik	719.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,62 Liter/Detik	241.470.000,00
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	40.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Unit	40.000.000,00
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
						Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo	71 SR	320.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		41 SR	184.500.000,00
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		15,10 Persen	599.050.000,00			17,99 Persen	599.050.000,00
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan sanitasi		- -	599.050.000,00			--	599.050.000,00
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	77.240.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	77.240.000,00
1	03	05	2.01	0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
						Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Penyelenggara	27.550.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Penyelenggara	27.550.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat								
						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Rumah Tangga	494.260.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45 Rumah Tangga	494.260.000,00
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik		80 Persen	300.000.000,00			81 Persen	100.000.000,00
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan		- -	300.000.000,00			--	100.000.000,00
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan								
						Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo	25 M	50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 M	50.000.000,00
1	03	06	2.01	0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan								
						Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	127 M	250.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 M	50.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		89 Persen	10.600.090.000,00			90 Persen	6.000.090.000,00
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan		- -	10.600.090.000,00			--	6.000.090.000,00
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	3 Bangunan Gedung	2.386.890.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Bangunan Gedung	286.890.000,00
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	1 Dokumen	8.000.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	5.500.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	213.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	213.200.000,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		63,03 Persen	54.543.470.472,00			63,52 Persen	13.945.524.495,00
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pencapaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten		- -	54.543.470.472,00				13.945.524.495,00
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
						Panjang Jalan/Jembatan	Kab. Gunungkidul,	1086,141 KM	352.115.000,00	DANA		1086,14 KM	350.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						yang Disurvey Kondisinya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			ALOKASI UMUM (DAU)			
1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan								
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,4 KM	1.592.509.425,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7,13 KM	3.311.835.098,00
1	03	10	2.01	0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa								
						Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1086,141 KM	229.592.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1086,14 KM	229.592.500,00
1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan								
						Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Nglipar, Nglipar Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut Kab. Gunungkidul, Playen, Getas Kab. Gunungkidul,	7,34 KM	10.286.561.502,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,056 KM	850.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Playen, Logandeng Kab. Gunungkidul, Paliyan, Pampang Kab. Gunungkidul, Paliyan, Karangduwet Kab. Gunungkidul, Paliyan, Giring Kab. Gunungkidul, Paliyan, Sodo Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu Kab. Gunungkidul, Ponjong, Ponjong Kab. Gunungkidul, Semin, Rejosari Kab. Gunungkidul, Semin, Karangsari Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Serut Kab. Gunungkidul, Saptosari, Ngloro Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giripurwo						
1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan								
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	9,88 KM	12.094.323.184,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6,98 KM	8.500.796.897,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng Kab. Gunungkidul, Panggang, Giriwungu Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo						
1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan								
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Nglipar, Natah Kab. Gunungkidul, Playen, Bleberan Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco Kab. Gunungkidul, Patuk, Salam Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Jatiayu Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sidorejo Kab. Gunungkidul, Rongkop, Karangwuni Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semugih Kab. Gunungkidul, Semin, Kalitekuk Kab. Gunungkidul,	7,10 KM	29.988.368.861,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,3 KM	703.300.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Semin, Kemejing Kab. Gunungkidul, Ngawen, Kampung Kab. Gunungkidul, Ngawen, Watusigar Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo Kab. Gunungkidul, Saptosari, Planjan Kab. Gunungkidul, Girisubo, Nglindur Kab. Gunungkidul, Girisubo, Balong Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto						
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Bidang Konstruksi Yang Kompeten Dan Profesional		20 Persen	99.899.500,00			40 Persen	99.899.500,00
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		- -	81.529.500,00			- -	81.529.500,00
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis								
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	60 Orang	38.880.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Orang	38.880.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis								
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	90 Orang	42.649.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		90 Orang	42.649.500,00
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		- -	1.890.000,00			- -	1.890.000,00
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi								
						Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Layanan Informasi	1.890.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Layanan Informasi	1.890.000,00
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi		- -	16.480.000,00			- -	16.480.000,00
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								
						Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Badan Usaha	16.480.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Badan Usaha	16.480.000,00
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				7.451.057.000,00				2.039.877.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		93,57 Persen	1.970.900.000,00			93,75 Persen	1.240.000.000,00
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah terdata		- -	83.150.000,00			--	83.150.000,00
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani								
						Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	40.000.000,00
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	43.150.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	43.150.000,00
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Beserta PSU terlaksana		- -	706.850.000,00			--	706.850.000,00
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Korban Bencana								
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit Rumah	174.150.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit Rumah	174.150.000,00
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana								
						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit Rumah	303.150.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Unit Rumah	303.150.000,00
1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
						Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Rumah	229.550.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit Rumah	229.550.000,00
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		- -	1.180.900.000,00			- -	450.000.000,00
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus								
						Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangrejek	1 Dokumen	1.180.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	450.000.000,00
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan PSU Dalam Rangka Pencegahan Tumbuhnya Kawasan Permukiman Kumuh		20 Persen	5.380.280.000,00			40 Persen	700.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	RTLH yang direhabilitasi		- -	5.380.280.000,00			--	700.000.000,00
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256 Unit Rumah	5.380.280.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35 Unit Rumah	700.000.000,00
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU		20 Persen	99.877.000,00			40 Persen	99.877.000,00
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pemenuhan Kebutuhan PSU di Perumahan dan Permukiman		- -	99.877.000,00			--	99.877.000,00
1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan								
						Jumlah Lokasi Perumahan	Kab. Gunungkidul,	1 Lokasi	99.877.000,00	DANA		1 Lokasi	99.877.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			ALOKASI UMUM (DAU)			
J U M L A H									84.813.460.607,00				32.631.401.750,00

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kapanewon hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN,

ttd

RAKHMADIAN WIJAYANTO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen ini memuat program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen resmi, Renja PD memiliki kedudukan strategis karena berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan di tingkat Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja PD juga menjadi bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang keseluruhannya mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Penyusunan Renja PD dilaksanakan secara terpadu, partisipatif, dan demokratis. Dokumen ini digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Selain itu, Renja PD juga menjadi acuan dalam pengusulan program dan kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi, Dana Keistimewaan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang baru. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 didasarkan pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan sasaran daerah sebagaimana tercantum dalam kesepakatan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Sasaran pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran masing-masing Perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat tercapai keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daera, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri No. 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara RI Tahun 2021 No. 590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025.
13. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dokumen ini

disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul, serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2025–2029, yang telah dirumuskan berdasarkan visi dan misi Bupati terpilih Tahun 2025–2045, yaitu:
"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban."

Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berkontribusi melalui pelaksanaan Misi ke-6, yaitu:

"Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia."

Renja Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Dokumen ini juga berfungsi sebagai tolok ukur penilaian kinerja dinas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1.3.2. Tujuan Penyusunan

Berpijak pada maksud tersebut, tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan operasional bagi perangkat dinas dalam mengimplementasikan RKPD Tahun 2026 secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
2. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selama Tahun 2026 secara terarah dan terukur.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026, sebagai bagian dari proses penganggaran daerah.
4. Menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian serta evaluasi atas pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
- 2.4. Rencana Kerja RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
4.1.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
4.2.Prioritas, sasaran daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Gunungkidul
4.3. Uraian garis besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG *(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)*

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)*

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renja bertujuan untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin relevansi dan efektivitas perencanaan, penyusunan Renja didahului dengan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dihubungkan dengan capaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan ketercapaian target Rencana Strategis (Renstra) dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan. Selain itu, evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, diperlukan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2024 dan penyajian perkiraan pencapaian target Renstra hingga tahun tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul melaksanakan 8 program, yang dijabarkan ke dalam 19 kegiatan dan selanjutnya diimplementasikan melalui 41 subkegiatan. Seluruh kegiatan tersebut didanai berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dengan total pagu anggaran sebesar Rp11.298.127.285,00 (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut mencapai Rp9.640.908.046,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan ribu empat puluh enam rupiah), atau sebesar 85,33% dari total pagu anggaran. Sementara itu, sisa anggaran yang tidak terserap tercatat sebesar Rp1.657.219.239,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), atau setara dengan 14,67%.

Gambaran capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dilakukan secara daring melalui aplikasi e-Monev SIPANDA. Laporan evaluasi tersebut menyajikan data dan narasi atas kinerja yang telah dicapai selama tahun berjalan.

2.1.1. Program *Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.*

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 34.098.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 33.742.000,00 atau

terserap 98,96%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1). Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 34.098.000, dengan realisasi sebesar Rp 33.742.000,00 atau terserap 98,96%.

2.1.2. Program *Penyelenggaraan Penataan Ruang.*

Anggaran pada program ini sebesar Rp. 223.001.500,00 dengan realisasi keuangan Rp. 220.365.675,00 atau 98,82% dengan capaian fisik 100%. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan *Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 48.760.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 48.343.675,00 atau terserap 99,15%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 32.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 31.763.675,00 atau terserap 98,95%.
   2) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 16.660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.580.000atau terserap 99,52%.
b. Kegiatan *Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 72.644.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 71.581.200,00 atau terserap 98,54%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1) *Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 72.644.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 71.581.200,00 atau terserap 98,54%.
c. Kegiatan *Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 24.965.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.965.000,00 atau terserap 100%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1) *Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.965.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.965.000,00 atau terserap 100%.
d. Kegiatan *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.* Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.76.632.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.75.475.800,00 atau terserap 98,49%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 67.382.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 66.225.800,00 atau terserap 98,28%.
   2) Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.250.000,00 atau terserap 100%.

2.1.3. Program *Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang*. Anggaran pada program ini sebesar Rp. 1.612.539.600,00 dengan realisasi keuangan Rp. 1.534.799.364,00 atau 95.18% dengan capaian fisik 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan *Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.612.539.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.534.799.364,00 atau terserap 95.18%, yang terdiri dari 1 sub

kegiatan, yaitu:

1) *Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.612.539.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.534.799.364,00 atau terserap 95.18%.

2.1.4. Program *Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*. Anggaran pada program ini sebesar Rp. 2.984.371.719,00 dengan realisasi keuangan Rp. 2.864.507.612,00 atau 95.98% dengan capaian fisik 100%. Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 47.124.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 46.291.300,00 atau terserap 98,23%, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
   1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.* Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 40.747.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 39.915.000,00 atau terserap 97,96%.
   2) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 725,000,00 atau terserap 100%.
   3) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 725.000,00 atau terserap 100%.
   4) *Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 875.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 875.000,00 atau terserap 100%.
   5) *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.000.000,00 atau terserap 100%.
   6) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.551.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.551.500,00 atau terserap 100%.
   7) *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.499.800,00 atau terserap 99.99%.

b. Kegiatan *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.117.897.232,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.082.125.203,00 atau terserap 98,31%, yang terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
   1) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.079.901.232,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.045.136.703,00 atau terserap 77.06%.
   2) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.853.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.853.500,00 atau terserap 100%.
   3) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 36.142.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 35.135.000,00 atau terserap 97.21%.

c. Kegiatan *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 18.011.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.911.788,00 atau terserap 82.79%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1) *Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 18.011.900,00

dengan realisasi sebesar Rp 14.911.788,00 atau terserap 82.79%.

d. Kegiatan *Administrasi Umum Perangkat Daerah.* Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 237.529.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 187.551.828,00 atau terserap 78,96%, yang terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu:
   1) *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.* Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 6.193.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.192.000,00 atau terserap 99,98%.
   2) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 40.563.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 40.556.440,00 atau terserap 99,98%.
   3) *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 7.926.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.565.000,00 atau terserap 70,21%.
   4) *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.* Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.338.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.918.000,00 atau terserap 99.9%.
   5) *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.* Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.080.000,00 atau terserap 90%.
   6) *Fasilitasi Kunjungan Tamu*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.975.000,00 atau terserap 85%.
   7) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 166.809.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 117.491.488,00 atau terserap 78,43%.

e. Kegiatan *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 22.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 22.300.000,00 atau terserap 97,81%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1) *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 22.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 22.300.000,00 atau terserap 97,81%.

f. Kegiatan *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 129.129.813,00 dengan realisasi sebesar Rp 105.334.162,00 atau terserap 81.57%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 24.247.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 23.411.000,00 atau terserap 96,55%.
   2) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 104.882.313,00 dengan realisasi sebesar Rp 81.923.162,00 atau terserap 78,11%.

g. Kegiatan *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 411.878.874,00 dengan realisasi sebesar Rp 405.993.331,00 atau terserap 98,57%, yang terdiri dari 4 sub kegiatan, yaitu:
   1) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 135.906.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 133.540.331,00 atau terserap 98,26%.
   2) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*. Anggaran pada sub

kegiatan ini sebesar Rp 10.160.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.410.000,00 atau terserap 92,62%.

3) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 263.712.874,00 dengan realisasi sebesar Rp 260.943.000,00 atau terserap 98,95%.

4) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 2.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.100.000,00 atau terserap 100%.

2.1.5. Program *Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan*. Anggaran pada program ini sebesar Rp11.850.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. Rp11.850.000,00 atau 100% dengan capaian fisik 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan *Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 11.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.850.000,00 atau terserap 60,42%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) *Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp11.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.850.000,00 atau terserap 100%.

2.1.6. Program *Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan*. Anggaran pada program ini sebesar Rp.1.622.059.126,00 dengan realisasi keuangan Rp729.442.252,00 atau 44.97% dengan capaian fisik 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan *Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.622.059.126,00 dengan realisasi keuangan Rp729.442.252,00 atau terserap 44.97%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) *Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar .1.622.059.126,00 dengan realisasi keuangan Rp729.442.252,00 atau terserap 44.97%.

2.1.7. Program *Penatagunaan Tanah.* Anggaran pada program ini sebesar Rp.81.315.000,00 dengan realisasi keuangan Rp81.314.900,00 atau 100% dengan capaian fisik 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan *Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 81.315.000,00 dengan realisasi sebesar Rp81.314.900,00 atau terserap 100%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

1) *Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 81.315.000,00 dengan realisasi sebesar Rp81.314.900,00 atau terserap 100%.

2.1.8. Program *Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.* Anggaran pada program ini sebesar Rp.4.728.892.340,00 dengan realisasi keuangan Rp4.164.886.243,00 atau 88.07% dengan capaian fisik 99.13%.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan *Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.4.728.892.340,00 dengan realisasi keuangan Rp4.164.886.243,00 atau terserap 88.07%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) *Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.385.609.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.332.128.096,00 atau terserap 86,46%.
   2) *Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa.* Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 187.114.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 186.211.157,00 atau terserap 99,52%.

b. Kegiatan *Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 447.957.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 432.406.990,00 atau terserap 96.53%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
   1) *Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 142.737.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 141.267.665,00 atau terserap 98,97%.
   2) *Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 305.220.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 291.139.325,00 atau terserap 95,39%.

c. Kegiatan *Sarana dan Prasarana Keistimewaan*. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 240.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 214.140.000,00 atau terserap 89,23%, yang terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:
   1) *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan*. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 240.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 214.140.000,00 atau terserap 89,23%.

Adapun Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* s.d Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target Program/kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025	tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100	99,89%	99,89%	100	100	
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		100%	40	60%	60%	100%	80%	80%	80%
1	3	9	2		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		100%	40	60%	60%	100%	80%	80%	80%
1	3	9	2	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	4 DOKUMEN	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	80%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Lingkungan di Kabupaten/Kota									
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		100%	54,97	72,38%	72,38%	100%	86,40%	86,40%	86,40%
1	3	12	2	01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		100%	66,33	86,67%	86,67%	100,00%	93,34%	*93,34%*	93,34%
1	3	12	2	5	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	
1	3	12	2	6	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	4 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	
1	3	12	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100%	45,38%	64,62%	64,62%	100,00%	82,31%	82,31%	82,31%
1	3	12	2	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	82,31%
1	3	12	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100%	53,85%	69,23%	69,23%	100,00%	84.,62%	84.,62%	84.,62%
1	3	12	2	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	4 dokumen	1 sistem	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	84.,62%
1	3	12	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100%	54,33%	69%	69%	100,00%	85,33%	85,33%	85,33%
1	3	12	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	12 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	
1	3	12	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	3	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		100%	28.89%	48,89%	48,89%	100%	74.44%	74.44%	74.44%
1	3	13	5		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		100%	32,78%	47,78%	47,78%	100,00%	73,89%	73,89%	73,89
1	3	13	5	2	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0Dokumen	0 Dokumen	0%
1	3	13	5	5	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	3 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	4 dokumen	18 dokumen	600%
1	3	13	5	6	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0dokumen	0%
1	3	13	5		Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis		100%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	3	13	5	1	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	4 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	2dokumen	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			1						
2	10	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
2	10	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 dokumen	
2	10	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 DOKUMEN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	
2	10	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 DOKUMEN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	
2	10	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 DOKUMEN	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	
2	10	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	umlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	6 dokumen	
2	10	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68 LAPORAN	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	17 laporan	51 laporan	
2	10	1	#	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	18 dokumen	
2	10	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2030 orang	812 orang	406 orang	406 orang	100%	406 orang	1624 orang	
2	10	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	
2	10	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	52 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100%	13 laporan	13 laporan	
2	10	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
2	10	1	2	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1	4 Dokumen	12 Dokumen	
2	10	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
2	10	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	12 paket	
2	10	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	10 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	20 paket	
2	10	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	12 paket	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44 paket	11 paket	11 paket	11 paket	100%	11 paket	33 paket	
2	10	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1460 dokumen	366 dokumen	366 paket	366 paket	100%	366 paket	1098 paket	
2	10	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 laporan	12 laporan	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	
2	10	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424 laporan	53 laporan	48 laporan	48 laporan	100%	106 laporan	207 laporan	
2	10	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100	100%	100%	100,00%	100 persen	100%	100%
2	10	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	1 unit	3 unit	3 unit	100%	6 unit	10 unit	
2	10	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	98.25	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
2	10	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	
2	10	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	100%	72 Laporan	216 Laporan	
2	10	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	97.93	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
2	10	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1300 unit	260 unit	247 unit	247 unit	100%	247 unit	754 unit	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
2	10	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	10 unit	13 unit	13 unit	100%	10 unit	33 unit	
2	10	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	
2	10	1	2	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100%	17 unit	51 unit	
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		100%	40%	60%	60%	100%	80%	80%	80%
2	10	4	2		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	40%	60%	60%	100%	80%	80%	80%
2	10	4	2	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24 berita acara	6 berita acara	6 berita acara	6 berita acara	100%	6 berita acara	18 berita acara	
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		100%	40%	60%	60%	100%	80%	80%	80%
2	10	5	2		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	40%	60%	60%	100,00%	80%	80%	80%

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	5	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	7 dokumen	15 dokumen	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANA		100%	40%	60%	60%	100%	80%	80%	80%
2	10	10	2		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		100%	40%	60%	60%	100,00%	80%	80%	80%
2	10	10	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8 Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	6 laporan	
2	10	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		100%	54.94%	75,72%	75,06%	99,13%	75.72%	75.72%	75.72%
2	10	11	5		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		100%	35,57%	75,72%	74,39%	98,24%	81,21%	81,21%	81,21%
2	10	11	5	1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	16 dokumen	4 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	86%	7 dokumen	18 dokumen	
2	10	11	5	2	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	8 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0!	0 dokumen	0 dokumen	
2	10	11	5	4	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	100 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	100%	50 dokumen	150 dokumen	
2	10	11	5	6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	24 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	#DIV/0!	0 laporan	0 laporan	

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Program/Kegiatan Urusan Pertanahan								
2	10	11	5		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		100%	46,60%	64,08%	64,08%	100,00%	82,04%	82,04%	82,04%
2	10	11	5	1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	120 dokumen	35 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	100%	30 dokumen	98 dokumen	
2	10	11	5	2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	26 berita acara	7 berita acara	14 berita acara	14 berita acara	100%	80 berita acara	101 berita acara	
2	10	11	5		Sarana dan Prasarana Keistimewaan		100%	56%	78%	78%	100%	89%	89%	89%
2	10	11	5	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	18 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	2 unit	5 unit	

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 urusan, 8 program 19 kegiatan yang diimplementasikan ke dalam 41 sub kegiatan, dari 8 indikator kinerja program yang ditetapkan. Capaian kinerja berdasarkan target tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang belum memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan antara lain :
    a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang capaian keuangan sebesar 95.18.
    Pada sub kegiatan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang terdapat sisa anggaran sebesar 77.740.236,00, karena sisa perjalanan dinas ke Jakarta. Ini terjadi karena beberapa pertemuan yang di agendakan ke Jakarta dengan BIG dan Kementerian ATR BPN, namun pihak pusat menghendaki pertemuan di laksanakan di Jawa Tengah, sehingga cukup di fasilitasi dengan mobil dinas saja.
    b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **95.98**
        1. pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Devisi serapan anggaran sebesar 49,317,512 disebabkan terdapat sisa anggaran untuk belanja tiket
        2. sub kegiatan Gaji sisa 34.764.529,00 karena anggaran untuk P3K yang semula di anggarkan untuk 4 orang, tetapi yang lolos seleksi di terima hanya 3 orang
        3. pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat sisa sebesar 22.959.151,00 karena terdapat penambahan daya Listrik, sehingga menganggarkan biaya Listrik untuk rekening yang di lakukan penambahan daya tersebut, tetapi realisasi pembayaran tidak sebesar rencana perhitungannya.c. Program
        Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
    d. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan sebesar 44.97
    pada program ini hanya 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sisa anggaran sebesar 892.616.873,65. Hal ini di karenakan dalam pengadaan tanah yang di peruntukan Relokasi SD Sawah Girisekar Panggang diperoleh harga appraisal 1/3 dari anggaran yang di sediakan sehingga tidak bisa terserap semuanya
    e. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan sebesar 88.07
        1. pada sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdapat sisa anggaran sebesar

521.692.744,00 karena sisa untuk pembayaran SPS dari BPN pada rekening belanja Jasa pengukuran tanah.

2. Pada sub kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa terdapat sisa anggaran sebesar 14.081.175,00, karena sisa pembayaran SPS dari BPN pada rekening belanja Jasa pengukuran tanah.
3. Pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan tertdapat sisa anggaran 25.860.000,00 karena sisa kontrak pengadaan barang

2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan antara lain:
   a. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota.
   b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
   c. Program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
   d. Program Penatagunaan Tanah dengan kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran sesuai yang direncanakan Tahun 2024:
   Tidak ada program dan kegiatan tahun 2024 yang melebihi taraget.
4. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. Adanya target yang cpapaianya melibatkan pihak terkait sehingga untuk mencapai target tergantung dari kinerja pihak terkait.
   b. Terpenuhinya target berkat upaya keras Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan pihak terkait.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2026 antara lain:

   Dalam upaya pencapaian kinerja di PD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tidak lepas dari koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik itu dari pihak Kalurahan maupun dari instansi vertikal dengan BPN. Untuk itu di perlukan strategi kemitraan yang kolaboratif sehingga target yang akan di capai menjadi lebih mudah dalam pelaksanaannya. Upaya-upaya yang mungkin dilakukan adalah :

   a. Membangun kemitraan yang kolaboratif dengan pihak-pihak terkait dalam upaya optimalisasi capaian kinerja dengan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

b. Membangun tata kelola bersama dengan dalam bentuk perjanjian formal seperti tim pelaksanaan kegiatan
c. Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing
d. Menggunakan mediasi formal dan in formal dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses pelaksanaan kegiatan berlangsung.
e. Menumbuhkan sikap saling percaya dengan pihak-pihak terkait untuk membangun komitmen bersama, sehingga terjadi sinkronisasi target kinerja bersama untuk konsensus bersama.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:
   a. Lebih mengoptimalkan SDM yang tersedia serta komunikasi dan koordinasi antar bidang lebih ditingkatkan.
   b. Melalui mekanisme perubahan anggaran untuk merevisi target kinerja
   c. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kajian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran strategis.

Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) dilakukan dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU hingga Triwulan III Tahun 2024, diperoleh gambaran mengenai kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dirinci dalam uraian berikut:

1. IKU Persentase Tata kelola administrasi pertanahan meningkat dengan dengan indikator Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanahan Target Tahun 2024 sebesar 61,57%, terealisasi 61,51% dengan capaian 99,9%.
2. IKU Meningkatnya Akuntabilitas PD dengan indikator Nilai AKIP PD target 81,5 sedangkan realsisasi untuk Tahun 2024 adalah 81,5
3. Pada IKU Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang meningkat dengan indikator Peresentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang Target Tahun 2024 sebesar 66,87%, sampai triwulan 3 (tiga) terealisasi 66,87% dengan capaian 100%.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Tahun 2020-2024 sampai dengnan triwulan 3 (tiga) dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2021 – 2024 Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai target/standard (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD				RERALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12
1	Tata Kelola Administrasi Pertanahan meningkat)**	Persentase tata kelola administrasi pertanahan	NA	19,07	41,49	61,57	NA	19,07	41,49	61,51	80,81	100	
2	Meningkatnya Akuntabilitas PD)**	Nilai AKIP PD	NA	81	81,5	81,5	NA	81	80.43	81,5	82	82	
3	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang meningkat)**	Presentase penyelenggaraan administrasi penataan ruang	NA	29,37	48,43	66,87	NA	29,37	48,43	66,87	83,56	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)*

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadaP pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

Terdapat 3 (tiga) isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul yaitu :

1. Tertib Administrasi Pertanahan
    1) Belum ada keselarasan Peta Dasar antara peta Kalurahan, BPN dan Provinsi DIY
    2) alih fungsi lahan tanah kalurahan dari pertanian ke non pertanian banyak yang belum dilengkapi ijin
    3) tukar menukar tanah warga dengan tanah kalurahan (kejadian tahun 1986 s.d 2003) tidak diikuti dengan penyelesaian administrasi (belum disertipikatkan sesuai penguasaan hak)
2. Perijinan Pemanfaatan ruang / investasi
    1) Proses reviu RTRW memerlukan waktu yg cukup lama karena harus menyelaraskan berbagai peraturan baik vertikal maupun horizontal
    2) RDTR masih dalam proses penyusunan (prosesnya sama dengan penyusunan RTRW)
    3) Dalam RTRW yang disusun terdapat muatan LSD, KP2B yang cukup luas, sehingga proses pengajuan perijinan pada lokasi tersebut menjadi lama (mekanisme pengeluaran LSD dan atau KP2B berbeda)
    4) Revieu RTRW belum selesainya dan atau penetapan RDTR maka penilaian perwujudan RTR belum bisa dilaksanakan
    5) Pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap penataan ruang masih kurang
    6) Proses reviu RTRW memerlukan waktu yg cukup lama karena harus menyelaraskan berbagai peraturan baik vertikal maupun horizontal
3. Pengawasan dan pengendalian tata ruang
    1) Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, luasanya + 50,9% dari luas wilayah Gunungkidul (757,13 KM2 dari1.485,36 KM2) maka perlu aturan yang lebih rinci
    2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang oleh UMKM yang ijinnya melalui OSS masih lemah
    3) Perijinan lokasi pertambangan yang dilakukan oleh Propinsi menggunakan skala peta yang berbeda sehingga dimungkinkan terjadi kekurang tepatan dalam menentukan lokasi
    4) Payung hukum terhadap insentif dan disinsentif belum ada
    5) Peran Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) masih berorientasi kepada aspek pemanfaaran ruang/kajian pertimbangan untuk KKPR. Aspek perencanaan dan pengendalian belum dilaksanakan secara optimal

6) Dukungan terhadap pengendalian dan pengawasan masih kurang baik dari aspek SDM, anggaran sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pertanahan dan urusan Tata Ruang. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2025, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan di tunjukkan dalam tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

Permasalahan	Hambatan
Belum optimalnya pengendalian dan penggunaan tanah desa	Masih banyaknya pemanfaatan Tanah Desa yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
Belum optimalnya pengawasan pelanggaran Tata Ruang	Belum adanya personel PPNS Tata Ruang
	Aturan teknis penegakan Perda Tata Ruang belum ada
	RDTR belum semuanya menjadi perbup
	Peran serta masyarakat masih Rendah dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Masih terdapat bidang tanah Pemda yang belum memiliki sertipikat	Rendahnya tertib administrasi Pertanahan tanah Pemda sebelum Tahun 2017
Tingginya permasalahan tukar menukar tanah Desa dengan tanah masyarakat yang belum mendapat kepastian hukum	Kesulitan dalam pencarian Bukti administrasi dan kronologi terjadinya tukar menukar tanah disebabkan kejadian tukar menukar sudah sangat lama

2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah capaian capaian program nasional/ internasional, SPM dan MDGs.

a) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peratanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Gunungkidul secara optimal masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai;
b) Tenaga fungsional masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Gunungkidul;
c) Tidak tersedianya PPNS dalam upaya penegakan Hukum.
d) Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.3.3. Tantangan, Peluang dan Rekomendasi Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah.

Selama Tahun 2024, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga menghadapi beberapa tantangan dan peluang yaitu:

a) Tantangan

Tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) adalah:

1. Inkosistensi kebijakan pemerintah pusat di bidang pertanahan.

2. Tingginya alih fungsi lahan oleh berbagai pihak kepentingan.
3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
4. Spekulan tanah yang selalu bergerak untuk mempercepat perubahan penggunaan tanah.
5. Perlindungan Aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengawasan dan pengendalian pertanahan dan pemanfaatan ruang belum jelas.

b) Peluang

Peluang pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul dalam rangka peningkatan pelayanan adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal.
2. Penyediaan data dan sistem informasi yang handal, meliputi data base Pertanahan Tata Ruang dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan pengendalian pertanahan dan tata ruang.
3. Peningkatan antara Stakeholders di bidang pertanahan melalui Forum Komunikasi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Upaya Dinas Pertanahan dan tata ruang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Tersedianya petunjuk teknis dan SOP pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang.
2. Terwujudnya data pendukung pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah dan tata ruang.
3. Terwujudnya database peta pertanahan
4. Terkelolanya data dan integrasi pertanahan.
5. Meningkatnya kesadaran pelaku pembangunan terhadap pemanfaatan tanah dan pengendalian tata ruang
6. Terselesaikannya proses pelepasan, perubahan dan sewa menyewa tanah desa.
7. Teradministrasinya penggunaan tanah SG yang dipakai Pemda.
8. Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pertanahandan tata ruang yang diproses melalui Pemerintah Kabupaten.
9. Digitalisasi pemanfaatan tanah desa agar tanah desa dapat teradminitrasi lebih baik.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengendalian pertanahan dan tata ruang tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal.
2. Tersedianya data dan sitem informasi yang handal, meliputi data base Pertanahan dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan pengendalian pertanahan dan tata ruang.
3. Koordinasi dengan stakeholders di bidang pertanahan melalui Forum Komunikasi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.
4. Pelaksanaan bimibingan teknis pengawasan pemanfaatan tanah.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

2.3.4. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategi untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti adalah sebagai berikut:

1. Program penataan bangunan dan lingkungannya:
   a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program penyelenggaraan penataan ruang:
   a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
   d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan tata ruang
   a. Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
5. Program penyelesaian sengketa tanah garapan:
   a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan:
   a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh PemerintahDaera Kabupaten/Kota.
7. Program penatagunaan tanah:
   a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
8. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan pertanahan:
   a. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
   b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
   c. Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan.

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Gunungkidul dengan partisipasi dari berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah yang ada.

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* pada Ranwal RKPD 2026 merencanakan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dan Keuangan,

dan 7 program utama , di antaranya; Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rogram Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Program Penatagunaan Tanah, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.

Untuk tahun 2026 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* merancang program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator rencana kinerja tahunan 2026 . Berikut disampaikan secara singkat review program yang ada di dokumen Rancangan Akhir RKPD 2026 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)*, dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2. 4. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul
Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)*

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
					13.477.409.870,74					**13.477.409.870,74**	
	1 - Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				**1.502.097.000,00**	1 - Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				**1.502.097.000,00**	
	1.03 - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				**1.502.097.000,00**	1.03 - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				**1.502.097.000,00**	
1,	39816 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		***Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan***	**3,33 Persen**	**210.000.000,00**	39816 - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		***Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan***	**3,33 Persen**	**210.000.000,00**	
	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota		*Dokumen Penataan Bangunan Dan Lingkungan*		210.000.000,00	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota		*Dokumen Penataan Bangunan Dan Lingkungan*		210.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan					1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan					

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan Yang Disusun Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	210.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan Yang Disusun Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	210.000.000,00	
2,	40911 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		***Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang***	**15,70 Persen**	**574.742.000,00**	40911 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		***Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang***	**15,70 Persen**	**574.742.000,00**	
	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kabupaten/Kota		*Dokumen Legal Rtrw Dan Rrtr Yang Telah Ditetapkan Secara Formal Melalui Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, Sebagai Dasar Hukum Dan Acuan Dalam Pemanfaatan Ruang Dan Pengendalian*		120.410.000,00	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (Rrtr) Kabupaten/Kota		*Dokumen Legal Rtrw Dan Rrtr Yang Telah Ditetapkan Secara Formal Melalui Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, Sebagai Dasar Hukum Dan Acuan Dalam Pemanfaatan Ruang Dan Pengendalian*		120.410.000,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
			Pembangunan Di Wilayah Kabupaten/Kota.					*Pembangunan Di Wilayah Kabupaten/Kota.*			
	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi Rdtr Kabupaten/Kota					1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi Rdtr Kabupaten/Kota					
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi Rdtr Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	76.750.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi Rdtr Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	76.750.000,00	
	1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang					1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang					
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamata	*Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang*	1 Publikasi	43.660.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamata	*Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang*	1 Publikasi	43.660.000,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
		n, Semua Kel/Desa					n, Semua Kel/Desa				
	1.03.12.2.02 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		*Terlaksananya Forum Koordinasi Dan Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang*		97.057.000,00	1.03.12.2.02 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		*Terlaksananya Forum Koordinasi Dan Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang*		97.057.000,00	
	1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang					1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang					
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Tanggung Jawab Masyarakat*	9 Kegiatan	97.057.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Dan Tanggung Jawab Masyarakat*	9 Kegiatan	97.057.000,00	
	1.03.12.2.03 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		*Terlaksanannya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*		157.275.000,00	1.03.12.2.03 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		*Terlaksanannya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*		157.275.000,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Layanan Persetujuan Kkpr Sesuai Dengan Ketentuan Waktu Yang Berlaku*	400 Layanan	77.625.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Layanan Persetujuan Kkpr Sesuai Dengan Ketentuan Waktu Yang Berlaku*	400 Layanan	77.625.000,00	
	1.03.12.2.03.0007 - Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang					1.03.12.2.03.0007 - Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang					
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang*	2 Sistem Informasi	79.650.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sistem Informasi Dan Komunikasi Penataan Ruang*	2 Sistem Informasi	79.650.000,00	
	1.03.12.2.04 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan		*Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan*		200.000.000,00	1.03.12.2.04 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan		*Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan*		200.000.000,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	Ruang Daerah Kabupaten/Kota		*Ruang Daerah Kabupaten/Kota*			Ruang Daerah Kabupaten/Kota		*Ruang Daerah Kabupaten/Kota*			
	1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan/Atau Pernyataan Mandiri Pelaku Umk					1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan/Atau Pernyataan Mandiri Pelaku Umk					
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Dokumen Tekstual Dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*	1 Dokumen	100.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Dokumen Tekstual Dan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*	1 Dokumen	100.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas Dan Fungsi Forum Penataan Ruang					1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas Dan Fungsi Forum Penataan Ruang					

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Forum Penataan Ruang*	1 Laporan	50.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Forum Penataan Ruang*	1 Laporan	50.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan Rtr					1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan Rtr					
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Tekstual Dan Spasial Hasil Penilaian Perwujudan Rtr*	1 Dokumen	50.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Tekstual Dan Spasial Hasil Penilaian Perwujudan Rtr*	1 Dokumen	50.000.000,00	
3,	41277 - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		***Persentase Rencana Tata Ruang (Rtrw/Rdtr) Pada Kawasan Satuan Ruang Strategis (Srs) Tanah Kasultanan Dan Satuan Ruang Strategis Tanah Kadipaten***	**8,33 Persen**	**717.355.000,00**	41277 - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		***Persentase Rencana Tata Ruang (Rtrw/Rdtr) Pada Kawasan Satuan Ruang Strategis (Srs) Tanah Kasultanan Dan Satuan Ruang Strategis Tanah Kadipaten***	**8,33 Persen**	**717.355.000,00**	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	1.03.13.5.01 - Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten		*Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten*		717.355.000,00	1.03.13.5.01 - Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten		*Tersusunnya Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten*		717.355.000,00	
	1.03.13.5.01.0005 - Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang					1.03.13.5.01.0005 - Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang					
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang*	1 Dokumen	357.355.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang*	1 Dokumen	357.355.000,00	
	1.03.13.5.01.0007 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten					1.03.13.5.01.0007 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten					

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	-	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Rtbl Pada Ruang Strategis Kesultanan Dan Kadipaten*	1 Dokumen	360.000.000,00	-	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Rtbl Pada Ruang Strategis Kesultanan Dan Kadipaten*	1 Dokumen	360.000.000,00	
	2 - Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				**11.975.312.870,74**	2 - Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				**11.975.312.870,74**	
	2.10 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				**11.975.312.870,74**	2.10 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				**11.975.312.870,74**	
1,	36932 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Perangkat Daerah***	**82,5 Nilai**	**3.050.572.370,74**	36932 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) Perangkat Daerah***	**82,5 Nilai**	**3.050.572.370,74**	
	2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan		*Dokumen Perencanaan, Penganggaran,*		40.450.100,00	2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan		*Dokumen Perencanaan, Penganggaran,*		40.450.100,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			
	2.10.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.10.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	23.357.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	23.357.000,00	
	2.10.01.2.01.0002 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd					2.10.01.2.01.0002 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd*	1 Dokumen	725.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd*	1 Dokumen	725.000,00	
	2.10.01.2.01.0003 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen					2.10.01.2.01.0003 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen					

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	Perubahan Rka-Skpd					Perubahan Rka-Skpd					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd*	1 Dokumen	725.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd*	1 Dokumen	725.000,00	
	2.10.01.2.01.0004 - Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd					2.10.01.2.01.0004 - Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd*	2 Dokumen	875.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd*	2 Dokumen	875.000,00	
	2.10.01.2.01.0005 - Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd					2.10.01.2.01.0005 - Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd					

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd*	2 Dokumen	1.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd*	2 Dokumen	1.000.000,00	
	2.10.01.2.01.0006 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd					2.10.01.2.01.0006 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd*	17 Laporan	7.550.100,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd*	17 Laporan	7.550.100,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	2.10.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.10.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	1.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	1.500.000,00	
	2.10.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.10.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	-					-					
	-	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan*	1 Berita Acara	4.718.000,00	-	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan*	1 Berita Acara	4.718.000,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
			Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					*Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*			
	2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		2.374.320.970,74	2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		2.374.320.970,74	
	2.10.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn					2.10.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn*	436 Orang/Bulan	2.357.468.370,74		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn*	436 Orang/Bulan	2.357.468.370,74	
	2.10.01.2.02.0005 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd					2.10.01.2.02.0005 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd					

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd*	1 Laporan	1.852.800,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd*	1 Laporan	1.852.800,00	
	2.10.01.2.02.0007 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd					2.10.01.2.02.0007 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana N/ Semesteran Skpd*	13 Laporan	14.999.800,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana N/ Semesteran Skpd*	13 Laporan	14.999.800,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	2.10.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*		3.000.000,00	2.10.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*		3.000.000,00	
	2.10.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd					2.10.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd*	16 Laporan	3.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd*	16 Laporan	3.000.000,00	
	2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Kepegawaian*		4.500.000,00	2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Kepegawaian*		4.500.000,00	
	2.10.01.2.05.0003 - Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					2.10.01.2.05.0003 - Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
		Kab. Gunungkidul, Playen,	*Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	4 Dokumen	4.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen,	*Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	4 Dokumen	4.500.000,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
		Logandeng					Logandeng				
	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Umum*		258.501.300,00	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Umum*		258.501.300,00	
	2.10.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.10.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan*	2 Paket	5.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan*	2 Paket	5.000.000,00	
	2.10.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor					2.10.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor					
		Kab. Gunungkidul, Playen,	*Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan*	5 Paket	61.380.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen,	*Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan*	5 Paket	61.380.000,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
		Logandeng					Logandeng				
	2.10.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.10.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan*	3 Paket	6.605.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan*	3 Paket	6.605.000,00	
	2.10.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan					2.10.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan*	2 Paket	10.686.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan*	2 Paket	10.686.000,00	
	2.10.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					2.10.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu					

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
		-	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	2.850.000,00		-	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	2.850.000,00	
	2.10.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd					2.10.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd*	100 Laporan	171.980.300,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd*	100 Laporan	171.980.300,00	
	2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*		18.065.000,00	2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*		18.065.000,00	
	2.10.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya					2.10.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan*	2 Unit	18.065.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan*	2 Unit	18.065.000,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		96.435.000,00	2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		96.435.000,00	
	2.10.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.10.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	30.599.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	30.599.000,00	
	2.10.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik					2.10.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan*	36 Laporan	65.836.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan*	36 Laporan	65.836.000,00	
	2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		255.300.000,00	2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		255.300.000,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah					
	2.10.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan					2.10.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya*	247 Unit	153.655.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya*	247 Unit	153.655.000,00	
	2.10.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya					2.10.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara*	14 Unit	18.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara*	14 Unit	18.000.000,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	2.10.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya					2.10.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	80.645.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	80.645.000,00	
	2.10.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya					2.10.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya					
		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi*	10 Unit	3.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	*Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi*	10 Unit	3.000.000,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
2,	38027 - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		***Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat Yang Dilakukan Melalui Mediasi***	**20 Persen**	**40.500.000,00**	38027 - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		***Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat Yang Dilakukan Melalui Mediasi***	**20 Persen**	**40.500.000,00**	
	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		*Tersusunya Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		40.500.000,00	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		*Tersusunya Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*		40.500.000,00	
	2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Dalam 1 (Satu)*	10 Berita Acara	40.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Dalam 1 (Satu)*	10 Berita Acara	40.500.000,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
			Daerah Kabupaten/Kota					*Daerah Kabupaten/Kota*			
3,	38393 - Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		***Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan***	**20 Persen**	**617.305.000,00**	38393 - Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		***Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan***	**20 Persen**	**617.305.000,00**	
	-					-					
	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan*		617.305.000,00	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan*		617.305.000,00	
	2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	617.305.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	617.305.000,00	
4,	40219 - Program Penatagunaan Tanah		***Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani***	**20 Persen**	**160.000.000,00**	40219 - Program Penatagunaan Tanah		***Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani***	**20 Persen**	**160.000.000,00**	
	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota		*Tersusunnya Laporan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Tersusun*		160.000.000,00	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota		*Tersusunnya Laporan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Yang Tersusun*		160.000.000,00	
	2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	-	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	3 Laporan	160.000.000,00	-	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	3 Laporan	160.000.000,00	
	-					-					
5,	40584 - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan		***Persentase Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kalurahan Dan Tanah Warga Yang Terdaftar Untuk Memiliki Legalitas Hak Atas Tanah Serta Pemanfaatan Tanah Sultan Ground (Sg) Dan Tanah Kalurahan Yang Sesuai Prinsip Keistimewaan Dan Peruntukan Sosial-Kultural***	**23,24 Persen**	**6.932.993.000,00**	40584 - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan		***Persentase Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kalurahan Dan Tanah Warga Yang Terdaftar Untuk Memiliki Legalitas Hak Atas Tanah Serta Pemanfaatan Tanah Sultan Ground (Sg) Dan Tanah Kalurahan Yang Sesuai Prinsip Keistimewaan Dan Peruntukan Sosial-Kultural***	**23,24 Persen**	**6.932.993.000,00**	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten		*Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten*		6.932.993.000,00	2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten		*Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten*		6.932.993.000,00	
	2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten					2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten					
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat*	7 Dokumen	6.584.626.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat*	7 Dokumen	6.584.626.000,00	
	2.10.11.5.01.0004 - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Dan Tanah Desa					2.10.11.5.01.0004 - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Dan Tanah Desa					

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Dan Tanah Desa*	4 Dokumen	348.367.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Dan Tanah Desa*	4 Dokumen	348.367.000,00	
6,			***Persentase Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kalurahan Dan Tanah Warga Yang Terdaftar Untuk Memiliki Legalitas Hak Atas Tanah Serta Pemanfaatan Tanah Sultan Ground (Sg) Dan Tanah Kalurahan Yang Sesuai Prinsip Keistimewaan Dan Peruntukan Sosial-Kultural***	**23,24 Persen**	**1.173.942.500,00**			***Persentase Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kalurahan Dan Tanah Warga Yang Terdaftar Untuk Memiliki Legalitas Hak Atas Tanah Serta Pemanfaatan Tanah Sultan Ground (Sg) Dan Tanah Kalurahan Yang Sesuai Prinsip Keistimewaan Dan Peruntukan Sosial-Kultural***	**23,24 Persen**	**1.173.942.500,00**	
	2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan		*Terlaksananya Pemanfaatan Tanah*		1.173.942.500,00	2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan		*Terlaksananya Pemanfaatan Tanah*		1.173.942.500,00	

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
	Dan Tanah Kadipaten		*Kasultanan Dan Tanah Kadipaten*			Dan Tanah Kadipaten		*Kasultanan Dan Tanah Kadipaten*			
	2.10.11.5.02.0001 - Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan Dan Kadipaten					2.10.11.5.02.0001 - Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan Dan Kadipaten					
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan Dan Kadipaten*	30 Dokumen	273.723.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan Dan Kadipaten*	30 Dokumen	273.723.000,00	
	2.10.11.5.02.0002 - Penanganan Keberatan Dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten Dan Tanah Desa					2.10.11.5.02.0002 - Penanganan Keberatan Dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten Dan Tanah Desa					

No	Kebutuhan					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**		**Lokasi**		**Target Kinerja**	**Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1		5	4	6	7		5	4	6	7	9
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan Dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten Dan Tanah Desa*	85 Berita Acara	900.219.500,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan Dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten Dan Tanah Desa*	85 Berita Acara	900.219.500,00	
					13.477.409.870,74					**13.477.409.870,74**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Untuk mendapatkan kesesuaian program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul di bidang Tata Ruang, telah diselenggarakan berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan baik yang dilaksanakan secara umum melalui Musrenbang Kapanewon maupun yang dilaksanakan secara khusus melalui Forum PD Bidang Pertanahan dan Tata Ruang. Musrenbang Kabupaten melibatkan beberapa pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait, LSM, Perguruan Tinggi di Gunungkidul, dan Perangkat Daerah terkait. Pada renja 2026 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tidak terdapat usulan PIWK dan PIS.

Tabel 2. 5. Usulan PIS dan PIWK pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
	NIHIL						

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(*KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA*)

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

3.1.1. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

a) Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul;
b) Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu tahun; dan
c) Menciptakan kepastian kebijakan.

3.1.2. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah:

a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026;
b) Menjadikan acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
c) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara seksi-seksi di lingkup Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul;
d) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran.
e)

Hubungan antara tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. 1. Tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No.	Tujuan OPD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Meningkatkan Tatakelola Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	46,10

Tabel 3. 2. Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

NO	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Proyeksi Target Sasaran PD Tahun 2026

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan	54,93
2	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian tata ruang terhadap RTRW	37,27

Tabel 3. 3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tataruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

NO	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Tatakelola Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	46,10
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan	54,93
3	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian tata ruang terhadap RTRW	37,27

3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian tema dan prio ritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Berlandaskan RPJPN Tahun 2005–2025 maka agenda pembangunan dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional, yaitu:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2025, tema pembangunan adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan" dengan prioritas pembangunan :

1) Penekanan Pembangunan di wilayah Selatan yang diharmonisasi dengan konsep Renaissance Yogyakarta;
2) Penggunaan dan Penerapan Teknologi Informasi yang menjadi platform dalam setiap program/Kegiatan;
3) Reformasi Kalurahan yang dikembangkan secara cascading dapat terkoneksi di tingkat provinsi dan kabupaten.

Selaras dengan kedua tema tersebut, maka dirumuskan tema pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 "Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia".

Tema dan prioritas pembangunan daerah ini menjadi dasar bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* untuk merumuskan program dan kegiatan Tahun 2026. Selain itu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* juga tetap memperhatikan target dalam RPJMD Tahun 2021- 2026, Kebijakan Umum Bupati, dan target Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Dalam perumusan sasaran perangkat daerah, selain mempertimbangkan rumusan tujuan dan sasaran daerah maupun tujuan perangkat daerah, juga mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan Indikator Kinerja Utama berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama adalah alasan hakiki yang melatar belakangi eksistensi perangkat daerah dalam jajaran kelembagaan di daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* untuk periode tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 273/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)*.

Tabel 3. 4. Indikator Kinerja Utama

NO	Tujuan / Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Proyeksi Target Sasaran PD Tahun 2026
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	46,1
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan	54,93

3	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian tata ruang terhadap RTRW	37,27

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan program dan kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Rencana kerja tahunan ini berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 2025-2029 Kabupaten Gunungkidul.

Visi Kepala Daerah tahun 2025-2029:

"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Misi Kepala Daerah tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban
6. **Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia**

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul mendukung misi ke 6 bupati.

Dengan pertimbangan Tema pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2026 dan Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) tahun 2026, indikasi tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 adalah "Penguatan Pondasi dalam mewujudkan Visi Gunungkidul yang Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Ketentraman dan Ketertiban;
2. Reformasi Birokrasi;
3. Pendidikan dan Kesehatan;
4. Ketahanan Pangan;

5. Ekonomi, UKM, Investasi dan Pariwisata;
6. Penanggulangan Kemiskinan;
7. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana.

4.2. Prioritas, sasaran daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Gunungkidul

Program merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaiamana diuraikan dalam kebijakan.

Kegiatan instansi merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberika dukungan pada pencapaian visi dan misi daerah.

Dengan melaksanakan program dan kegiatan diharap akan dapat mewujudkan pelayanan secara profesional terhadap tugas dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul dan mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Berikut kami sajikan rekapitulasi program dan kegiatan yang menjabarkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul pada tabel 4.1 :

Tabel 4. 1. Prioritas, sasaran daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Lestari	Terwujudnya Ketahanan Sosial Budaya, Dan Ekologi Yang Lestari	Sasaran 1 : Tata Kelola Administrasi Pertanahan Meningkat	Indeks Administrasi Pertanahan	62	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	40.500.000	
					2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.500.000	
					2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.500.000	Bidang Pertanahan DPTR GK
					2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	617.305.000	
					2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	617.305.000	
					2.10.05.2.01.0002	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	617.305.000	Bidang Pertanahan DPTR GK
					2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	160.000.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	
					2.10.10.2.01.0001	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	160.000.000	Bidang Pertanahan DPTR GK
					2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	6.932.993.000	
					2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	6.932.993.000	
					2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	6.584.626.000	Bidang Pertanahan DPTR GK
					2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Dan Tanah Desa	348.367.000	
					1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.173.942.500	
					2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	1.173.942.500	Bidang Dalwas DPTR GK
					2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan Dan Kadipaten	273.723.000	Bidang Dalwas DPTR GK
					2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan Dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten Dan Tanah Desa	900.219.500	Bidang Pertanahan DPTR GK

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.050.572.371	Sekretariat DPTR GK
					2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.450.100	
					2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.357.000	
					2.10.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	725.000	
					2.10.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	725.000	
					2.10.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	875.000	
					2.10.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000	
					2.10.01.2.01.0006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.550.100	
					2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	
					2.10.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.718.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.374.320.971	
					2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.357.468.371	
					2.10.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.852.800	
					2.10.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.999.800	
					2.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3.000.000	
					2.10.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	3.000.000	
					2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	
					2.10.01.2.05.0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.500.000	
					2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.501.300	
					2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	61.380.000	
					2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.605.000	
					2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	10.686.000	
					2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.850.000	
					2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	171.980.300	
					2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.065.000	
					2.10.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	18.065.000	
					2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.435.000	
					2.10.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.599.000	
					2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	65.836.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.300.000	
					2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	153.655.000	
					2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	18.000.000	
					2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	80.645.000	
					2.10.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	3.000.000	
		Sasaran 2 : Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	25	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	210.000.000	
					1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	
					1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	Bidang Tata Ruang DPTR GK

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	574.742.000	
					1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	120.410.000	
					1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	76.750.000	Bidang Tata Ruang DPTR GK
					1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	43.660.000	Bidang Tata Ruang DPTR GK
					1.03.12.2.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	97.057.000	
					1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	97.057.000	Bidang Tata Ruang DPTR GK
					1.03.12.2.03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	157.275.000	
					1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	77.625.000	Bidang Dalwas DPTR GK
					-	-	79.650.000	
					1.03.12.2.04	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
					1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan/Atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	100.000.000	Bidang Dalwas DPTR GK

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas Dan Fungsi Forum Penataan Ruang	50.000.000	Bidang Dalwas DPTR GK
					1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR	50.000.000	Bidang Dalwas DPTR GK
					1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	717.355.000	
					1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	717.355.000	
					1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	357.355.000	Bidang Tata Ruang DPTR GK
					1.03.13.5.01.0007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan Dan Kadipaten	360.000.000	Bidang Tata Ruang DPTR GK

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 serta Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026-2030;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026-2030 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul. Dalam hal ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Gunungkidul memiliki peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Gunungkidul;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

4.3. Uraian garis besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Gunungkidul memiliki 8 (delapan) rumusan program, 19 (sembilan belas) rumusan kegiatan, dan 41 (empat puluh satu) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp. 13.477.409.870,74 (tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh koma tujuh puluh empat rupiah).

Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

4.3.1. Program *Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.* Anggaran untuk program ini sebesar Rp 3.050.572.371 Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri dari 8 (sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh enam) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 40.450.100 Kegiatan ini terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 23.357.000
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 725.000
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran Rp. 725.000
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 875.000
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan anggaran Rp. 1.000.000
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran Rp. 7.550.100.
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 1.500.000
8. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran 4.718.000

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.374.320.971 Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 2.357.468.371
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran Rp. 1.853.000
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 14.999.800
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.000.000 Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp. 3.000.000
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 4.500.000 Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
   1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp. 4.500.000
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 258.501.300 Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp 5.000.000
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 61.380.000
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran Rp. 6.605.000
   4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran Rp. 10.686.000
   5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 2.850.000
   6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp. 171.980.300
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 18.065.000 Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp 18.065.000

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 96.435.000 Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 30.599.000
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp. 65.836.000

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 255.300.000 Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran Rp. 153.655.000
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 18.000.000
   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 80.645.000
   4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 3.000.000

2. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 210.000.000 Program ini dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 210.000.000 Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 210.000.000
3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
   Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 574.742.000 Program ini dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 120.410.000 Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 76.750.000
      2) Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 43.660.000
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 97.057.000 Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      1) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 97.057.000
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 157.275.000 Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan anggaran Rp. 77.625.000
2) Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang, dengan anggaran Rp. 79.650.000

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 200.000.000 Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK, dengan anggaran Rp. 100.000.000,00
2) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang, dengan anggaran Rp. 50.000.000
3) Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan, dengan anggaran Rp. 50.000.000

4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.
Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 717.355.000 Program ini dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 717.355.000 Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, dengan anggaran Rp. 360.000.000,00
2) Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang, dengan anggaran Rp. 357.355.000

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 40.500.000 Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.000.000 Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 40.500.000

6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 617.305.000. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:
a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 617.305.000 Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 617.305.000

7. Program Penatagunaan Tanah.
Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 160.000.000 Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan

Pengawasan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 160.000.000 Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
    1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, dengan anggaran Rp. 160.000.000

8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.106.935.500 Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan dan Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

   a. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.932.993.000 Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dengan anggaran Rp. 6.584.626.000
      2) Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa, dengan anggaran Rp. 348.367.000
   b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.173.942.500 Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
      1) Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, dengan anggaran Rp. 273.723.000
      2) Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa, dengan anggaran Rp. 900,219,500.00

Secara rinci, rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renwal Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel 4.2. berikut:

Tabel 4. 2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA				13.477.409.870,74				13.848.975.332,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.502.097.000,00				1.387.355.000,00
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.502.097.000,00				1.387.355.000,00
1,	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	*Persentase penataan bangunan dan lingkungan*		3,33 Persen	210.000.000,00			-	210.000.000,00
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan*			210.000.000,00			-	210.000.000,00
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	210.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			210.000.000,00
2,	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	*Persentase penyelenggaraan penataan ruang*		15,70 Persen	574.742.000,00			-	460.000.000,00
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Dokumen legal RTRW dan RRTR yang telah ditetapkan secara formal melalui peraturan daerah/peraturan kepala daerah, sebagai dasar hukum dan acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan di wilayah kabupaten/kota.*			120.410.000,00			-	85.000.000,00
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota								
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	76.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			35.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RDTR Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa						
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang								
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Publikasi	43.660.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Forum Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang*			97.057.000,00			-	75.000.000,00
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang								
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Kegiatan	97.057.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksanannya koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*			157.275.000,00			-	90.000.000,00
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang								
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Layanan	77.625.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang								
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Sistem Informasi	79.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.000.000,00
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*			200.000.000,00			-	210.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK								
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR								
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			60.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3,	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	*Persentase rencana tata ruang (RTRW/RDTR) pada kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Tanah Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Tanah Kadipaten*		8,33 Persen	717.355.000,00			-	717.355.000,00
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	*Tersusunnya Perencanaan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten*			717.355.000,00			-	717.355.000,00
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	357.355.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			357.355.000,00
	1.03.13.5.01.0007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	360.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			360.000.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.975.312.870,74				12.461.620.332,00
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				11.975.312.870,74				12.461.620.332,00
1,	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah*		82,5 Nilai	3.050.572.370,74			-	2.695.192.732,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			40.450.100,00			-	36.200.100,00
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	3 Dokumen	23.357.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			23.825.000,00
	2.10.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	1 Dokumen	725.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			725.000,00
	2.10.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	1 Dokumen	725.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			725.000,00
	2.10.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	2 Dokumen	875.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			875.000,00
	2.10.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	2 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000,00
	2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	17 Laporan	7.550.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.550.100,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	4 Laporan	1.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.500.000,00
	2.10.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	1 Berita Acara	4.718.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			2.374.320.970,74			-	2.147.045.732,00
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	436 Orang/bulan	2.357.468.370,74	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.130.192.732,00
	2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	1 Laporan	1.852.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.853.000,00
	2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	13 Laporan	14.999.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.000.000,00
	2.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*			3.000.000,00			-	3.000.000,00
	2.10.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Penatausahaan	Kab. Gunungkidu	16 Laporan	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Barang Milik Daerah pada SKPD	l, Playen, Logandeng						
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Kepegawaian*			4.500.000,00			-	4.500.000,00
	2.10.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	4 Dokumen	4.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.500.000,00
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Umum*			258.501.300,00			-	264.275.900,00
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	2 Paket	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan	Kab. Gunungkidu	5 Paket	61.380.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			61.330.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan	l, Playen, Logandeng						
	2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	3 Paket	6.605.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.605.000,00
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	2 Paket	10.686.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.677.900,00
	2.10.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan	2.850.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	100 Laporan	171.980.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			180.663.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*			18.065.000,00			-	14.000.000,00
	2.10.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	2 Unit	18.065.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			14.000.000,00
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			96.435.000,00			-	66.436.000,00
	2.10.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	12 Laporan	30.599.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			600.000,00
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	36 Laporan	65.836.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			65.836.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*			255.300.000,00			-	159.735.000,00
	2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	247 Unit	153.655.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			123.300.000,00
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	14 Unit	18.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			13.500.000,00
	2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	1 Unit	80.645.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			19.935.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.10.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	10 Unit	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00
2,	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	*Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi*		20 Persen	40.500.000,00			-	35.000.000,00
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersusunya Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*			40.500.000,00			-	35.000.000,00
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Berita Acara	40.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			35.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3,	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	*Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan*		20 Persen	617.305.000,00			-	35.000.000,00
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan*			617.305.000,00			-	35.000.000,00
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	617.305.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			35.000.000,00
4,	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	*Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani*		20 Persen	160.000.000,00			-	110.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Tersusunnya laporan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersusun*			160.000.000,00			-	110.000.000,00
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah								
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	160.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000,00
5,	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	*Persentase bidang tanah Kasultanan, tanah kalurahan dan tanah warga yang terdaftar untuk memiliki legalitas hak atas tanah serta pemanfaatan tanah Sultan Ground (SG) dan tanah kalurahan yang sesuai prinsip keistimewaan dan peruntukan sosial-kultural*		23,24 Persen	6.932.993.000,00			-	8.507.695.600,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*			6.932.993.000,00			-	8.507.695.600,00
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	6.584.626.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			8.149.328.600,00
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa								
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	348.367.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			358.367.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6,	-	-	*Persentase bidang tanah Kasultanan, tanah kalurahan dan tanah warga yang terdaftar untuk memiliki legalitas hak atas tanah serta pemanfaatan tanah Sultan Ground (SG) dan tanah kalurahan yang sesuai prinsip keistimewaan dan peruntukan sosial-kultural*		23,24 Persen	1.173.942.500,00			-	1.078.732.000,00
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	*Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*			1.173.942.500,00			-	1.078.732.000,00
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten								
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	273.723.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			278.732.000,00
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85 Berita Acara	900.219.500,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			800.000.000,00
	J U M L A H					13.477.409.870,74				13.848.975.332,00

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Penyusunan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, dan prakiraan maju dengan dokumen Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dokumen Renja yang berkualitas akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada Renstra 2025-2029, Renja Tahun 2026 memerlukan alokasi anggaran sebesar Rp13.477.409.870,74 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh koma tujuh puluh empat rupiah) agar seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan bertanggung jawab.

5.1. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan merupakan upaya terencana untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik pada masa mendatang melalui pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana, diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tahun 2026 disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, sekaligus pedoman bagi seluruh pihak terkait untuk melaksanakan program dan kegiatan secara bertanggung jawab sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Wonosari,
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang,

ttd

FAJAR RIDWAN

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun yang memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 merupakan upaya penting untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam pengelolaan lingkungan hidup yang semakin kompleks. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Gunungkidul memiliki potensi yang besar, tetapi juga menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang memerlukan perhatian khusus dan tindakan nyata. Rencana kerja ini dirancang sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, berkelanjutan dan seimbang dengan pembangunan daerah.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, sehingga diharapkan ada keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan PD dengan perencanaan daerah dan provinsi dan kementerian terkait. Rumusan program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan data dan asumsi-asumsi yang tepat dan akurat, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Mengingat Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan maka Rencana Kerja ini telah disinkronkan dengan Visi Misi Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Renja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada prioritas ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dengan sasaran daerah kualitas lingkungan hidup meningkat. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap

permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi *stakeholder* dan dinamika perkembangan lingkungan strategis, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

Proses penyusunan Renja PD dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi: persiapan penyusunan Renja PD, penyusunan rancangan Renja PD, pelaksanaan forum PD, dan penetapan Renja PD. Penyusunan Renja PD juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai arah, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan kebutuhan pendanaan. Dengan disusunnya Renja ini diharapkan memudahkan dalam pengukuran kinerja Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 ini didasarkan pada peraturan dan perundang–undangan yang ada agar mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi bisa sesuai dengan peraturan di tingkat pusat maupun daerah. Adapun dasar hukum untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-undang Nomor 123 tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Rencana Kerja Tahun 2026;
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pedoman Desk Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Pra RKA Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 mengacu pada pencapaian indikator sasaran program yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 maupun dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebesar Rp.17.547.990.500,00 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.10.518.375.100,00 (sepuluh miliar delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) dan belanja modal sebesar Rp.7.029.615.400,00 (tujuh miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) yang dijabarkan dalam 9 program, 17 kegiatan dan 43 sub kegiatan.

Sampai dengan akhir triwulan IV, sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA/A.8/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tentang Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan penambahan anggaran, sehingga total alokasi anggarannya menjadi Rp.18.007.320.186,00 (delapan belas milyar tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.10.634.614.446,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan belanja modal sebesar Rp.7.372.705.740,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang dijabarkan dalam dalam 9 program, 17 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.17.342.820.347,00 atau 96,31% dengan capaian target kinerja 89,69%

Adapun capaian target Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
   Beberapa kegiatan yang didanai dari sumber dana APBD maupun DANAIS Tahun 2024 yang belum memenuhi target yang direncanakan meliputi program/kegiatan :
   A. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
      Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
      1. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (93,87)
      2. Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu (99,85)

B. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota:
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (98,53)
      b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (96,99)
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (95,38)
      b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD (94,49)
   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (88,51)
      b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (84,99)
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (97,72)
      b. Fasilitas Kunjungan Tamu (82,31)
      c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (88,05)
   5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (99,16)
   6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (95,91)
      b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (80,07)
      c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (99,88)

C. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan :
   1. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota (96,75)
   2. Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (99,29)

D. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
      a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (97,13)
      b. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (98,95)
   2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (99,57)

E. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)
   Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
   1. Pengelolaan kebun raya (99,46)
   2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (97,28)
   3. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (99,91)
   4. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya di Luar Kawasan Hutan (99,80)

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (99,74)

G. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (99,92)
2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (99,62)
3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal / Lembaga Masyarakat / Komunitas / Kelompok Masyarakat (99,86)

H. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota (99,69)

I. Program pengelolaan persampahan
1. Kegiatan Pengelolaan Sampah
   a. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (98,43)
   b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (98,43)
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta pada Sub Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah (99,83)

2. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024 yang memenuhi target kinerja yang direncanakan :
A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
1. Kegiatan Perencanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (100,00)
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (100,00)
   c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (100,00)
   d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (100,00)
   e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100,00)

2. Kegiatan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (100,00)

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100,00)
   b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100,00)

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100,00)
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100,00)
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100,00)
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100,00)

4. Realisasi Program/Kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil direncanakan

   Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 tidak ada yang melebihi target kinerja keluaran

5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2024:
   a. Sisa lelang pengadaan pagar
   b. Pembayaran THL sesuai hari masuk
   c. Belanja listrik, air, telepon dan BPSJ Ketenagakerjaan dibayarkan sesuai tagihan
   d. Belanja kunjungan tamu direalisasikan sesuai dengan tamu yang datang

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tidak tercapainya target kinerja kegiatan

   Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengedepankan skala prioritas terutama untuk program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Program kegiatan utama harus diberikan prioritas lebih dibandingkan dengan program dan kegiatan pendukung, sehingga target kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai serta fokus pada target capaian kinerja yang telah dibuat.

Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s.d. tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024					Target program / kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
								Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Outcome	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	persen	102,23	persen	100	persen	107,33	persen	107,33%	100	274,5	persen	2,75
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	output	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,286	indeks	100	indeks	4,286	indeks	128,57	indeks	2999,77%	4,286	189,37	indeks	44,18
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	3	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100,00%	4	9	dokumen	3
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	1	2	dokumen	0,5

2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	1	3	dokumen	0,75
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dokumen	2	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100,00%	2	8	dokumen	0,67
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	2	4	dokumen	0,5
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	17	laporan	17	laporan	17	laporan	17	laporan	100,00%	17	46	laporan	0,68

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100,00%	2	10	laporan	0,63
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	219,33	indeks	99,84	indeks	219,33	indeks	99,94	indeks	45,57%	219,33	401,28	indeks	1,83
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546	orang	641	orang	574	Orang/bulan	573	orang	99,83%	588	1.715,00	orang	0,67
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00%	1	3	laporan	0,75

2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	laporan	13	laporan	14	laporan	14	laporan	100,00%	13	36	laporan	0,69
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25	indeks	100	indeks	25	indeks	100	indeks	400,00%	25	125	indeks	5
2.11.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	6	dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	12	12	Dokumen	0,5
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	orang	4	orang	2	Orang	2	Orang	100,00%	3	48	Orang	1,09

2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	69	indeks	111,67	indeks	69	indeks	105	indeks	152,17%	69	258,34	indeks	3,74
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	4	paket	4	paket	4	paket	100,00%	4	11	paket	0,69
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	paket	13	paket	12	paket	12	paket	100,00%	19	35	paket	2,69
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	5	paket	5	paket	5	paket	5	paket	100,00%	5	14	paket	2,8
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	19	laporan	12	Laporan	15	laporan	125,00%	12	41	Laporan	3,42
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	33	Laporan	2,75

2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah	20	unit	100	unit	2	unit	100	unit		20	220	unit	2,65
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	unit	95	unit	0	-	0	unit	0,00%	5			0
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1	unit	2	unit	2		2	unit	100,00%	1	4		4
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75	laporan	100	laporan	75	laporan	86,11	laporan	114,81%	75	233,33	laporan	3,11
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	24	laporan	12	laporan	11	laporan	91,67%	12	56	laporan	2,33
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	48	laporan	36	laporan	36	laporan	100,00%	36	123	laporan	2,56
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	laporan	3	laporan	3	Laporan	2	Laporan	66,67%	2	8	Laporan	2

			yang Disediakan													
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71	Unit	100	unit	71	unit	100	unit	140,85%	71			0
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	laporan	12	laporan	14	Unit	14	unit	100,00%	13	36	unit	2,57
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37	Unit	32	unit	24	Unit	24	unit	100,00%	37	88	unit	2,32
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	1	unit	1	unit	1	unit	100,00%	1	3	unit	3
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20	Unit	18	unit	20	unit	20	unit	100,00%	20	47	unit	2,61

			yang Dipelihara/ Direhabilitasi													
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik			100		50	persen	100	persen	200,00%	75	175	persen	1,75
1.03.13.2.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	0	Dokumen	100		3	dokumen	100	laporan		3	103		8,58
1.03.13.2.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	0	Dokumen	7	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100,00%	0	9		4,5
1.03.13.2.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	0	Dokumen			1	dokumen	1	dokumen	100,00%	9	1		1

2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik	100	Persen	100	persen	60	persen	100	persen	166,67%	80	213,34	persen	2,13
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	31	Dokumen	100		31	dokumen	100		322,58%	31	164,34	dokumen	5,3
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun			1	dokumen	0		0			0			0
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	30	Dokumen	30	dokumen	15	dokumen	15	dokumen	100,00%	30	70	dokumen	0,58

2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang Berisi Arahan/Muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan Mengakomodir Arahan RPPLH Provinsi					2	dokumen	2		100,00%	0			
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Pengendalian Pencemaran	70	persen	100	persen	60	persen	83,33	persen	138,88%	65	181,67	persen	2,6
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2	dokumen	100		2	dokumen	100	dokumen		2	102	dokumen	17
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	dokumen	1	dokumen	1	Dokumen	1		100,00%	1			0

2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengujian yang Dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan	3	dokumen	1	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100,00%	3	2	dokumen	2
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Indek Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11	indeks	100		11	indeks	50	indeks	454,55%	11	61	indeks	5,55
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	1	laporan	50,00%	2	5	laporan	2,5
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik	58	persen	100	persen	54	persen	100	persen	185,19%	56	231	persen	3,98
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	35,02	ha	100	persen	35,02	ha	100		285,55%	35,02	210,02	ha	6

2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya		Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Kabupaten /Kota			9	ha	9	ha	9	ha	100,00%	9	27	ha	0,75
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten /Kota	1,02	ha	1,02	ha	1,02	ha	1	ha	98,04%	1,02	3,04	ha	0,75
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		Unit Taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten /Kota	3	Unit	15	ha	3	Unit	3	ha	100,00%	3	33	ha	2,2
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten /Kota	3	unit	10	ha	10	Unit	10		100,00%	6	20	ha	2

2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pemgelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik	60	persen	96,83	persen	40	persen	100	persen	250,00%	50	226,83	persen	3,78
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31,5	indeks	96,83	indeks	31,5	indeks	100	indeks	317,46%	31,5	208,33	indeks	6,61

2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			59	laporan	0	-	0			0	122		0,48
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD			1	dokumen	0	-	0			0			0

2.11.06.2.01.05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi					10	Badan usaha	10		100,00%				
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi	60	Badan usaha						8		63	0	persen	#DIV/0!

2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup	82	Persen	100	persen	62	Persen	100	persen	161,29%	72	238,67	persen	2,91
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85,67	Indeks	100		85,67	Indeks	100	indeks	116,73%	85,67	252,34	indeks	2,95
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			5	lembaga	0	-	0			0			0
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	4	dokumen	2		3	dokumen	3	dokumen	100,00%	4	4	dokumen	0,5

			Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan													
2.11.08.2.01.003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50	orang	240	orang	180	orang	180	orang	100,00%	180	670	orang	0,67
2.11.08.2.01.005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat		Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5	Lembaga			2	Lembaga	2	lembaga	100,00%	2			
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup	70	persen	100	persen	0	-	0			56			0
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	6	entitas			0	-	0			6	6		1

			/Kota													
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2	entitas	6	entitas	0	-	0			6			0
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,00%	100	266,67	persen	2,67
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1	dokumen	100		1	dokumen	1		100,00%	1			0

2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Dikelola	8	Pengaduan			3	Pengaduan	3		100,00%	6			
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Sampah dikelola	30,5	persen	99,17	persen	27	persen	95,94	persen	355,33%	29	183,2	persen	6,01
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah		Indeks Pengelolaan Sampah	5.718,38	indeks	98,76	indeks	5.718,38	indeks	93,92	indeks	1,64%	5.718,38	5.849,69	indeks	1,02
2.11.11.2.01.0044	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3	kelompok	13,00	kelompok	1		1		100,00%	7	1.490,00	kelompok	2,07

2.11.11.2.01.0020	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional		Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	16.536	ton	16.541	ton	19.819,50	ton	17.407,00	ton	87,83%	16.770,24	46.402,50	ton	0,68
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		Jumlah Unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	4	unit	100		1	unit	100			1	101		101
2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah		Jumlah Unit/Usaha/ Swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100,00%	1	3	unit	3

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung dan mencapai tujuan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan beberapa strategi dan kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan alat untuk mencapai kinerja pelayanan sesuai tupoksi yang dimandatkan ke Dinas Lingkungan Hidup

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta indikator kinerja RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Tolok ukur dan indikator kinerja SPM mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Menurut peraturan tersebut ada 4 jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan Kabupaten/Kota yaitu :

1. Pencegahan pencemaran air dengan indikatornya adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air yang merupakan hasil pembagian dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pecemaran air dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dikalikan 100%.
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikatornya adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara yang merupakan hasil pembagian dari jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventaris dikalikan 100%.
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa dengan indikatornya adalah persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya yang merupakan hasil pembagian dari luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dengan luasan lahan yang diperuntukan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dikalikan 100%.
4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikatornya adalah prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti yang merupakan hasil pembagian dari jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dengan

jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 tahun dikalikan 100%.

Tolok ukur dan indikator kinerja IKK didasarkan pada format IKK untuk kabupaten dalam tataran pelaksanaan kebijakan aspek capaian kinerja urusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang meliputi beberapa indikator berikut:

1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL diukur dengan perbandingan antara jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi dibagi jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL dikalikan 100%.
2. Pengelolaan limbah B3 diukur dengan memperbandingkan antara jumlah ijin yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan yang wajib memiliki ijin dikalikan 1.000.
3. Pengelolaan limbah B3 yang diawasi diukur dengan memperbandingkan antara jumlah pengawasan terhadap pengelolaan B3 dibanding jumlah data kegiatan yang memiliki ijin dikalikan 1.000.
4. Penegakan hukum lingkungan diukur dengan memperbandingkan antara jumlah kasus lingkungan yang ditangani dibagi jumlah kasus lingkungan yang harus ditangani dikalikan 1.000.
5. Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air) diukur dengan memperbandingkan antara pelaksanaan penetapan status mutu air diukur dengan memperbandingkan antara jumlah sungai dan/atau danau yang telah ditetapkan statusnya dibagi jumlah sungai dan/atau danau dikalikan 1.000.
   Pengendalian potensi sumber pencemaran air diukur dengan memperbandingkan antara jumlah beban pencemaran air yang telah dikendalikan dibagi jumlah beban pencemaran air yang dihasilkan dikalikan 1.000. Sampling pemantauan kualitas air sungai dan/atau danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau diukur dengan memperbandingkan antara jumlah titik pengambilan sampling dibagi jumlah titik pemantauan rutin yang ditetapkan dikalikan 1000.

Tolok ukur dan indikator kinerja didasarkan pada perhitungan teknis, selanjutnya hasil analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2
Pencapain Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan(IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	12	14
1	Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup	nilai	38,35	46,25	54,15	62,05	80,61	95,26	95,27		
2	Nilai AKIP PD	nilai	80,07	80,09	80,11	80,13	81,04	82,32	82,82		
3	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan	persen	54	58	61	65	57,05	58,32	58,55		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif (Widodo, 2001:75). Terkait dengan hal tersebut maka tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Adapun hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah koordinasi dan sinergisitas dengan dinas instansi terkait yang mempunyai hubungan dalam mewujudkan pemberdayaan pengelolaan lingkungan, pemantauan dan pengawasan lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ditemui beberapa permasalahan dan hambatan seperti kurangnya sumber pendanaan, keterbatasan sarana dan prasarana kerja, lemahnya kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terbatasnya data informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta belum adanya tenaga fungsional bidang lingkungan hidup. Permasalahan dan hambatan tersebut diusahakan untuk dapat diatasi dengan memafaatkan sumberdaya yang ada sehingga tidak berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap pencapaian program nasional seperti SPM bidang Lingkungan Hidup dan MDGs

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah bahwa isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi padahal saat ini masalah lingkungan merupakan isu global sehingga mau tidak mau masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu pusat perhatian karena meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik *(good environmental governance)*.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggaran tugas dan fungsi antara lain :

A. Pengurangan dan Penanganan Sampah Belum Optimal
   1. Jumlah SDM yang terbatas sehingga pelayanan penanganan sampah tidak bisa menjangkau semua wilayah.
   2. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai sehingga perlu penggalian sumber dana untuk investasi terutama dari pihak swasta.
   3. Kondisi TPA yang dioperasikan secara *sanitary landfill* memerlukan upaya rehabilitasi agar pencemaran lingkungan dan sumber-sumber air dapat diminimalkan. Perlunya komitmen pihak eksekutif dan legislatif dalam alokasi biaya untuk rehabilitasi TPA dan penyiapan lokasi TPA baru di Kalurahan Banjarejo Kapanewon Tanjungsari.
   4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah secara baik seperti pemilahan sampah secara organik dan anorganik. Oleh sebab iu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pertingnya pengurangan sampah plastik dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Program 3R harus dilaksanakan melalui Pendidikan, Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan,
   5. Peningkatan volume sampah yang dihasilkan akibat pertumbuhan sektor pariwisata sehingga diperlukan fasilitas pengelolaan sampah di kawasan wisata dan pemukiman

6. lemahnya penegakan perda atas pelanggaran pembuangan sampah.

B. Pencemaran air, udara, tanah dan LB3 yang semakin meningkat

Kegiatan pembangunan fisik, industri, rumah tangga, dan transportasi semakin meningkat yang tidak disertai kesadaran masyarakat/dunia usaha dalam partisipasi pengelolaan lingkungan menyebabkan tingkat pencemaran semakin meningkat.

C. Timbulnya dampak negatif akibat Usaha/Kegiatan

Meningkatnya pertumbuhan kegiatan usaha/industri dengan tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang masih rendah menjadi penyebab kerusakan lingkungan.

D. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam tanpa mengindahkan kemampuan serta daya dukung lingkungan menyebabkan tingginya kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

E. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Budaya tingkah laku masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya, semakin kompleksnya permasalahan sosial yang timbul di masyarakat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

F. Belum terwujudnya kota berwawasan lingkungan

Adanya peningkatan penggunaan lahan untuk pembangunan fisik menjadi salah satu penyebab keterbatasan ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau sehingga kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau baik publik maupun privat masih rendah.

G. Belum teridentifikasinya keanekaragaman hayati

Keterbatasan anggaran yang ada mengakibatkan keanekaragaman hayati yang ada tidak terkelola dengan baik yang bisa mengancam punahnya keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan perencanaan dari bawah dengan berbagai pertimbangan diantaranya ketersediaan SDM, dana, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan faktor – faktor lain yang terkait, berdasarkan skala prioritas sehingga diharapkan perencanaan yang disusun akan mampu menjawab kebutuhan.

Hasil analisis kebutuhan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui forum Musrenbang dengan mempertimbangkan berbagai masukan terhadap rencana program, Kegiatan dan Sub kegiatan dari sisi ketersediaan anggaran, lokasi sasaran, target indikator keluaran dan hasil maka sesuai kondisi pada tahun berjalan dan proyeksi tahun yang akan datang terdapat penyesuaian kegiatan.

Penjelasan temuan–temuan setelah proses pembandingan RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, dilaksanakan dengan mengkaji terhadap perbedaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD, atau program , Kegiatan dan Sub kegiatan yang sama tetapi besaran biaya dan ruang lingkup kegiatannya berbeda

Perbandingan data antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana dengan Baik	100%	12.326.917.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana dengan Baik	100%	12.326.917.000	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		12.326.917.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		12.326.917.000	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	12	12.000.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	12	12.000.000.000	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 dokumen	326.917.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 dokumen	326.917.000	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,32 nilai	3.661.585.797	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,32 nilai	3.661.585.797	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		48.380.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		48.380.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.250.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.535.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.535.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	900.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.850.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.850.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 dokumen	1.500.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihkitar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihkitar Realiosasi Kinerja SKPD	17 laporan	35.995.000	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihkitar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihkitar Realiosasi Kinerja SKPD	17 laporan	35.995.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1.350.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1.350.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.918.095.797	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.918.095.797	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546 orang/bulan	2.910.220.797	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546 orang/bulan	2.910.220.797	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	5.875.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 laporan	5.875.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawiaan		17.550.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawiaan		17.550.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	17.550.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	17.550.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum		241.370.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum		241.370.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4.400.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	54.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	54.000.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	9.532.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	9.532.900	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	168.438.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	168.438.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		18.331.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		18.331.000	
	Pengadaan Mebel	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	10.896.000	Pengadaan Mebel	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	10.896.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	3 unit	7.435.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	3 unit	7.435.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		268.358.100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		268.358.100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	66.760.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	66.760.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	65.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	65.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	136.598.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	136.598.100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		149.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		149.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	95.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	95.700.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 unit	14.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 unit	14.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	33.300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	33.300.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 unit	6.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 unit	6.000.000	
3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	80 persen	49.255.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	80 persen	49.255.000	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/Kota		Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		49.255.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/Kota		Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		49.255.000	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	30 dokumen	49.255.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	30 dokumen	49.255.000	
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Kualitas Lingkungan Hidup dalam Kondisi Baik Persentase parameter yang dapat diuji	71,90% 88,24%	738.495.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Kualitas Lingkungan Hidup dalam Kondisi Baik Persentase parameter yang dapat diuji	71,90% 88,24%	738.495.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Persentase Laporan Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah yang Tersusun dan Terpublikasi	100,00%				Persentase Laporan Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah yang Tersusun dan Terpublikasi	100,00%		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Urusan Laboratorium Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Urusan Pengendalian Pencemaran		663.495.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Urusan Laboratorium Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Urusan Pengendalian Pencemaran		663.495.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	283.495.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	283.495.000	
	Pengelolaan Laboratorium lingkungan kabupaten Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengujian yang Dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan	3 dokumen	380.000.000	Pengelolaan Laboratorium lingkungan kabupaten Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengujian yang Dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan	3 dokumen	380.000.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam satu tahun		75.000.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam satu tahun		75.000.000	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 laporan	75.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 laporan	75.000.000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Taman Perkotaan Terpelihara dengan Baik Persentase RTH dalam Kondisi Baik	100% 58%	1.576.074.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Taman Perkotaan Terpelihara dengan Baik Persentase RTH dalam Kondisi Baik	100% 58%	1.576.074.000	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Urusan Kebersihan dan Pertamanan Luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan		1.576.074.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Urusan Kebersihan dan Pertamanan Luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan		1.576.074.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	kab. Gunungkidul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1,02 ha	1.386.644.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	kab. Gunungkidul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1,02 ha	1.386.644.000	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	Kapanewon Ngawen, Kapanewon Tepus	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 unit	174.120.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya	Kapanewon Ngawen, Kapanewon Tepus	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 unit	174.120.000	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	kab. Gunungkidul	Unit Taman Kehati diluar kawasan hutan yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	15.310.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	kab. Gunungkidul	Unit Taman Kehati diluar kawasan hutan yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	15.310.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH	26%	40.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH	26%	40.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan		40.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan		40.000.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi	60 Badan Usaha	40.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi	60 Badan Usaha	40.000.000	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase Masyarakat yang Meningkat Kapasitas/Kemampuannya dalam Pelestarian Sumber Daya Alam	20 persen 20 persen	180.350.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase Masyarakat yang Meningkat Kapasitas/Kemampuannya dalam Pelestarian Sumber Daya Alam	20 persen 20 persen	180.350.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pengembangan Kapasitas		180.350.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pengembangan Kapasitas		180.350.000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	45.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	45.000.000	
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Masyarakat/KelompokMasyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	60 orang	10.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Masyarakat/KelompokMasyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	60 orang	10.000.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	9 Lembaga	125.350.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	9 Lembaga	125.350.000	
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20 persen	30.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20 persen	30.000.000	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 entitas	30.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Gunungkidul	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 entitas	30.000.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Dugaan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	100 persen	8.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Dugaan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	100 persen	8.000.000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		8.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		8.000.000	
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Dikelola	6 pengaduan	8.000.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Dikelola	6 pengaduan	8.000.000	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Pengelolaan Sampah (Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah) Persentase penanganan sampah di wilayah Kabupaten	38,90 persen 17,79 persen	5.632.635.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Pengelolaan Sampah (Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah) Persentase penanganan sampah di wilayah Kabupaten	38,90 persen 17,79 persen	5.632.635.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Pengelolaan Sampah		Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Kebersihan dan Pertamanan Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Pengembangan Kapasitas		5.623.225.000	Pengelolaan Sampah		Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Kebersihan dan Pertamanan Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Pengembangan Kapasitas		5.623.225.000	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	19 kelompok	327.100.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	19 kelompok	327.100.000	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan,Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	20440 ton	5.296.125.000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan,Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	20440 ton	5.296.125.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		Unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta		9.410.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		Unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta		9.410.000	

No	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/ Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1 unit	9.410.000	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/ Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1 unit	9.410.000	
	JUMLAH				24.243.311.797	JUMLAH				24.243.311.797	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mendapatkan kesesuaian program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul di bidang lingkungan, telah diselenggarakan berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan baik yang dilaksanakan secara umum melalui Musrenbang Kecamatan maupun yang dilaksanakan secara khusus melalui Forum PD Bidang Lingkungan Hidup. Musrenbang Kabupaten melibatkan beberapa pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait pelayanan bidang lingkungan hidup, LSM, Perguruan Tinggi di Gunungkidul, dan PD terkait. Dalam rangkaian pelaksanaan Musrenbang tersebut didapati berbagai usulan yang sebagian besar sangat terkait dengan isu strategis dan prioritas pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 .Usulan program dan kegiatan dari masyarakat di tahun 2026 . Usulan terdiri dari Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dan Pagu Indikatif Sektoral (PIS). Program tersebut dapat dilihat dalam table 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIS) - Pembelian Bibit Tanaman	Kalurahan Monggol Saptosari	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	22.280.000	22.280.000	
2	(PIS) - Pembelian Bibit Tanaman	Balai Kalurahan Planjan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	22.280.000	22.280.000	
3	(PIS) - Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan bank sampah	Kebonjero RT 001/ RW 006	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Paket	20.190.000	20.190.000	
4	(PIS) - Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan bank sampah	Padukuhan Pilangrejo Kalurahan Pilangrejo	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Paket	20.190.000	20.190.000	
5	(PIS) - Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan bank sampah	Balai Kalurahan Kanigoro	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Paket	20.190.000	20.190.000	
6	(PIS) - Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan bank sampah	Balai Kalurahan Planjan	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Paket	20.190.000	20.190.000	
7	(PIS)-Pendampingan TPS3R	Kalurahan Giriharjo	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 kelompok	73.700.000	73.700.000	
8	(PIS) - Fasilitasi bank sampah	Kepuh Karangawen Girisubo Gunungkidul DIY	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 kelompok	6.190.000	24.760.000	
9	(PIS) - Fasilitasi bank sampah	Nglindur Girisubo Gunungkidul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 kelompok	6.190.000	24.760.000	
10	(PIS) - Fasilitasi bank sampah	Kalurahan Nglipar kabupaten Gunungkidul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 kelompok	6.190.000	12.380.000	

11	(PIS) - Tempat sampah beroda	Desa Giring, Paliyan, Gunungkidul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Set	3.000.000	3.000.000	
12	(PIS) - Tempat sampah terpilah	Giriasih	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Set	1.500.000	9.000.000	
13	(PIS) - Tempat sampah terpilah	Jalan Baron Km 2 Karangrejek Wonosari Gunungkidul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Set	1.500.000	4.500.000	
14	(PIWK) - Fasilitasi Gerakan Kali Bersih	Jl.Ki Ageng Giring No.1 Kepek Wonosari	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Paket	21.000.000	63.000.000	
15	(PIWK) - Fasilitasi Gerakan Kali Bersih	Padukuhan Ringinsari dan Gadungsari, Kalurahan Wonosari	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Paket	21.000.000	42.000.000	
16	(PIWK) - Gerakan Kali Bersih	Karangtengah	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Paket	3.475.000	3.475.000	
17	(PIWK) - Pembelian Bibit Tanaman	Balai desa Sambirejo Ngawen Gunungkidul DIY	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	22.280.000	22.280.000	
18	(PIWK) - Pembelian Bibit Tanaman	Gatak 006/009, Gari, Wonosari, Gunungkidul	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	22.280.000	22.280.000	
19	(PIWK) - Tempat sampah beroda	Kalurahan Bendungan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Set	3.000.000	9.000.000	
20	(PIWK) - Tempat sampah beroda	Kedungkeris	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Set	3.000.000	3.000.000	
21	(PIWK) - Tempat sampah beroda	Jl.Ki Ageng Giring No.1 Kepek Wonosari	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Set	3.000.000	30.000.000	

22	(PIWK) - Tempat sampah beroda	Kalurahan Selang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Set	3.000.000	18.000.000	
23	(PIWK) - Tempat sampah beroda	Kantor Balai Kalurahan Wonosari dan 7 Balai Padukuhan di Wonosari	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Set	3.000.000	21.000.000	
24	(PIWK) - Tempat sampah terpilah	balai kalurahan beji	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	14 Set	1.500.000	21.000.000	
25	(PIWK) - Tempat sampah terpilah	Nglegi, Patuk, Gunungkidul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	22 Set	1.500.000	33.000.000	
26	(PIWK) - Tempat sampah terpilah	Giriasih	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Set	1.500.000	6.000.000	
27	(PIWK) - Tempat sampah terpilah	Balai Padukuhan Di Kalurahan Wonosari	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Set	1.500.000	9.000.000	
			Jumlah			580.455.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Renja ini memuat informasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan rencana tingkat capaian (target) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

Program dan kegiatan yang disasar tersebut tidak lepas dari kerangka kebijakan nasional sehingga perlu untuk menelaahnya dan menyesuaikan dengan kebijakan baik tingkat Nasional maupun Provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul terhadap kebijakan nasional dilaksanakan secara berjenang/hierarki selaras dengan pencapaian visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai sub sistem perencanaan pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa seluruh target dan sasaran pencapaiannya harus mendukung sasaran dan target pembangunan nasional serta memiliki sinergitas yang harmonis dalam semua strategi kebijakannya.

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan tahun 2026 dirumuskan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih yaitu:

a. Visi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029:
   “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”

b. Misi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2029:
   1) Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
   2) Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
   3) Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan sosial yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif;
   4) Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
   5) Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban;
   6) Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur Bangsa Indonesia.

c. Program Strategis
   1) Bocah Pintar
   2) Warga Sehat
   3) Tani Makmur & UMKM Berdaya
   4) Gunungkidul Berdikari
   5) Pamong Nglayani & Ngayomi
   6) Warga Gayeng-Guyub
   7) Alam Lestari

Berdasarkan visi, misi dan program strategis tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Mendukung misi keenam serta program strategis ke-tujuh.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Lingkungan Hidup lima tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran ini didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan target Renstra 2025-2029, rumusan tujuan dan sasaran PD merupakan penjabaran dari sasaran daerah yang ditetapkan dengan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun tahun 2025 - 2029, telah ditetapkan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama beserta target kinerja untuk tahun 2026, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Tujuan Dinas Lingkungan Hidup	Target Kinerja Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026
1.	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Air	75.50

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Dinas Lingkungan Hidup	Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup	Target Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026
1	Terjaganya kualitas air, udara dan tutupan lahan di Kabupaten Gunungkidul	Indeks Kualitas Lahan	60.93%
		Indeks Kualitas Udara	72.36%

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Terjaganya kualitas air, udara dan tutupan lahan di Kabupaten Gunungkidul	Indeks Kualitas Lahan	60.93%
		Indeks Kualitas Udara	72.36%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program merupakan kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sehingga kerangka anggaran dapat menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul termasuk salah satu perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Persampahan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Pada tahun 2026 nilai retribusi ditargetkan sebesar Rp.1.025.379.000 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.1
Target Pendapatan Asli Daerah

Kode Rekening	Uraian	Target 2026
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.000.900.200
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	24.478.800
	Jumlah	1.025.379.000

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota maka jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup daerah kabupaten adalah:

a) Pelayanan pencegahan pencemaran air;
b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
c) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
d) Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Visi misi dan program strategis Kepala Daerah periode 2025 – 2029 dipakai sebagai dasar dalam menentukan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

a. Jumlah Program dan Kegiatan
   Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2026 mengampu 10 program,18 Kegiatan, 43 sub kegiatan
b. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Kabupaten Gunungkidul, Semua Kecamatan, semua Kelurahan/Desa
c. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
   Pagu Indikatif Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2026 sebesar Rp.24.243.311.797

d. Sumber Dana Pagu Indikatif Dinas Lingkungan Hidup berasal dari Dana Alokasi Umum, PIS, PIWK dan Dana Keistimewaan.

Adapun program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan untuk pembangunan daerah terincian dalam program / kegiatan /sub kegiatan tersebut dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
Program Alam Lestari	Terwujudnnya Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologi yang lestari	Terjaganya kualitas air, udara dan tutupan lahan di Kabupaten Gunungkidul	- Indeks Kualitas Lahan - Indeks Kualitas Udara	60.93% 72.36%	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	738.495.000	DLH
					2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	663.495.000	DLH
					2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	283.495.000	DLH
					2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	380.000.000	DLH
					2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	75.000.000	DLH
					2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	75.000.000	DLH

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.576.074.000	DLH
					2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.576.074.000	DLH
					2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.386.644.000	DLH
					2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	174.120.000	DLH
					2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman di Luar Kawasan Hutan	15.310.000	DLH
					2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	180.350.000	DLH
					2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.350.000	DLH
					2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	45.000.000	DLH
					2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	10.000.000	DLH

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	125.350.000	DLH
					2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	30.000.000	DLH
					2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	DLH
					2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30.000.000	DLH
					2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.632.635.000	DLH
					2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.623.225.000	DLH
					2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	327.100.000	DLH

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.11.11.2.01.0020	Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota ata TPA/TPST Regional	5.296.125.000	DLH
					2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	9.410.000	DLH
					2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	9.410.000	DLH
					2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.661.585.797	DLH
					2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.380.000	DLH
					2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.250.000	DLH
					2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.535.000	DLH
					2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900.000	DLH
					2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.850.000	DLH
					2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	DLH

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	35.995.000	DLH
					2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.350.000	DLH
					2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.918.095.797	DLH
					2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.910.220.797	DLH
					2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	DLH
					2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.875.000	DLH
					2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.550.000	DLH
					2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.550.000	DLH
					2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.370.900	DLH
					2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.400.000	DLH
					2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000	DLH

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.532.900	DLH
					2.11.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	DLH
					2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.438.000	DLH
					2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.331.000	DLH
					2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	10.896.000	DLH
					2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.435.000	DLH
					2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.358.100	DLH
					2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.760.000	DLH
					2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000	DLH
					2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.598.100	DLH
					2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.500.000	DLH
					2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.700.000	DLH

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.500.000	DLH
					2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.300.000	DLH
					2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	DLH
					1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	12.326.917.000	DLH
					1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	12.326.917.000	DLH
					1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	12.000.000.000	DLH
					1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	326.917.000	DLH
					2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	49.255.000	DLH
					2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/Kota	49.255.000	DLH
					2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	49.255.000	DLH

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	40.000.000	DLH
					2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	DLH
					2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40.000.000	DLH
					2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	8.000.000	DLH
					2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	8.000.000	DLH

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
					2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	8.000.000	DLH
						Jumlah	24.243.311.797	

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTAURUSAN TATA RUANG	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana dengan Baik		100%	12.326.917.000				4.670.661.000
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			12.326.917.000				4.670.661.000
1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Kabupaten Gunungkidul	12 Dokumen	12.000.000.000	DANAIS	-		2.518.670.000
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Kabupaten Gunungkidul	1 Dokumen	326.917.000	DANAIS	-		2.151.991.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti		80 persen	49.255.000				20.000.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			49.255.000				20.000.000
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul, semua kecamatan, semua kel/Desa	15 Dokumen	49.255.000	DAU	THL Pengadministrasi Umum 1 orang		20.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kualitas Lingkungan Hidup dalam Kondisi Baik Persentase parameter yang dapat diuji Persentase Laporan Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah yang Tersusun dan Terpublikasi		71,90% 88,24% 100,00%	738.495.000				590.000.000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Urusan Laboratorium Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Urusan Pengendalian Pencemaran			663.495.000				550.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangtengah Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	283.495.000	DAU	-		200.000.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kabupaten Gunungkidul	3 Dokumen	380.000.000	DAU			350.000.000
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam satu tahun		2 laporan	75.000.000				40.000.000
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kabupaten Gunungkidul	2 laporan	75.000.000	DAU	-		40.000.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI(KEHATI)	Persentase Taman Perkotaan Terpelihara dengan Baik		100%	1.576.074.000				4.190.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase RTH dalam Kondisi Baik		58%					
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Urusan Kebersihan dan Pertamanan Luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan			1.576.074.000				4.190.000.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,02 Ha	1.386.644.000	DAU			3.400.000.000
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Gunungkidul, Tepus Purwodadi, Kab.Gunungkidul,Ngawen,Beji	10 Unit	174.120.000	DAU	-		40.000.000
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari Kab. Gunungkidul, Ngawen, Sambirejo	1 Unit	15.310.000	DAU	-		750.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZINLINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pemgelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik		26%	40.000.000				64.000.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan			40.000.000				64.000.000
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kabupaten Gunungkidul , semua kecamatan, semua kel/Desa	40 Badan Usaha	40.000.000	DAU	-		64.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase Masyarakat yang Meningkat Kapasitas/Kemampuannya dalam Pelestarian Sumber Daya Alam		20 persen 20 persen	180.350.000				525.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Konservasi dan Kerusakan Lahan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pengembangan Kapasitas			180.350.000				525.000.000
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kabupaten Gunungkidul, semua kecamatan, semua kel/Desa	4 Dokumen	45.000.000	DAU	-		420.000.000
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kabupaten Gunungkidul, semua kecamatan, semua kel/Desa	60 Orang	10.000.000	DAU	-		50.000.000
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kabupaten Gunungkidul, semua kecamatan, semua kel/Desa	7 Lembaga	125.350.000	DAU	-		55.000.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		20 persen	30.000.000				185.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000				185.000.000
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kabupaten Gunungkidul , semua kecamatan, semua kel/Desa	2 Entitas	30.000.000	DAU	-		185.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Dugaan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup		100 persen	8.000.000				65.000.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			8.000.000				65.000.000
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kabupaten Gunungkidul	6 Pengaduan	8.000.000	DAU	-		65.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah (Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah) Persentase penanganan sampah di wilayah Kabupaten		38,90 persen 17,79 persen	5.632.635.000				4.755.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Kebersihan dan Pertamanan Indeks Pengelolaan Sampah Urusan Pengembangan Kapasitas			5.623.225.000				4.745.000.000
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kabupaten Gunungkidul, semua kecamatan, semua kel/Desa	19 Kelompok	327.100.000	DAU	-		250.000.000
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kabupaten Gunungkidul, semua kecamatan, semua kel/Desa	20.440 ton	5.296.125.000	DAU	Upah THL Kebersihan 123 orang		4.495.000.000
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta			9.410.000				10.000.000
2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Kabupaten Gunungkidul, semua kecamatan, semua kel/Desa	1 Unit	9.410.000	DAU	-		10.000.000
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		83,32 nilai	3.661.585.797				5.130.924.140
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			48.380.000				55.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	3 dokumen	5.250.000	DAU	-		8.000.000
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	1 Dokumen	1.535.000	DAU	-		2.000.000
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	1 Dokumen	900.000	DAU	-		2.000.000
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	2 Dokumen	1.850.000	DAU	-		3.000.000
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	2 Dokumen	1.500.000	DAU	-		2.000.000
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	17 Laporan	35.995.000	DAU			35.000.000
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	2 Laporan	1.350.000	DAU	-		3.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.918.095.797				4.522.424.140
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	546 Orang/bulan	2.910.220.797	DAU			4.484.424.140
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	1 Laporan	2.000.000	DAU			3.000.000
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	13 Laporan	5.875.000	DAU			35.000.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawiaan			17.550.000				51.500.000
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	12 Dokumen	0	DAU			5.000.000
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	3 Orang	17.550.000	DAU			46.500.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			241.370.900				167.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	4 Paket	4.400.000	DAU			2.000.000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	14 Paket	54.000.000	DAU			75.000.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	5 Paket	9.532.900	DAU			10.000.000
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	12 Laporan	5.000.000	DAU			3.500.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	12 Laporan	168.438.000	DAU			76.500.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah			18.331.000				20.000.000
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	1 Unit	10.896.000	DAU			10.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	3 Unit	7.435.000	DAU			10.000.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			268.358.100				190.000.000
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	12 Laporan	66.760.000	DAU			45.000.000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	36 Laporan	65.000.000	DAU			65.000.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	3 Laporan	136.598.100	DAU			80.000.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah			149.500.000				125.000.000
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	13 Unit	95.700.000	DAU			90.000.000
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	37 Unit	14.500.000	DAU			10.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	1 Unit	33.300.000	DAU			15.000.000
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Gunungkidul, Playen, Logandeng	20 Unit	6.000.000	DAU			10.000.000
Jumlah					24.243.311.797				20.195.585.140

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting
   Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Gunungkidul,
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

ANTONIUS HARY SUKMONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kewajiban tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamanatkan adanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Tahapan selanjutnya setelah Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan tersebut kemudian harus ditindaklanjuti penyusunan perencanaan pada Perangkat Daerah (Perangkat Daerah), yaitu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (RENJA).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul juga berkewajiban menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja ini harus berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah memuat beberapa tahapan, antara lain :

1. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :
   a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
   b. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
   c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
   d. Penetapan Renja Perangkat Daerah.
2. Keterkaitan dokumen perencanaan
   a. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD;
      RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Perangkat Daerah disesuaikan dengan Program Prioritas RKPD.

b. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas Perangkat Daerah.
c. Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian Dan Lembaga dan Perangkat Daerah Provinsi.
Renja Perangkat Daerah memperhatikan program dan kegiatan Renja Kementerian Dan Lembaga dan Perangkat Daerah Provinsi.

3. Tindak lanjut proses penyusunan RAPBD
Setelah Renja Perangkat Daerah ini terbentuk kemudian dapat diolah lagi untuk penentuan pagu indikatif dalam penyusunan RAPBD kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

a. Sebagai pedoman untuk merealisasikan sasaran RPJMD Perangkat Daerah terutama terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui penentuan target kinerja serta prioritas program dan kegiatan jangka 1 (satu) tahun;
b. Sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD pada tahun 2026 dengan susunan organisasi perangkat daerah yang baru; dan
c. Sebagai salah satu dasar pembinaan dan pengendalian program/kegiatan Tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

a. Meningkatkan kualitas perencanaan periode 1 (satu) tahun organisasi perangkat daerah yang baru agar selaras dengan kaidah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
b. Mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan.
c. Mempermudah pengendalian dan pembinaan program/kegiatan jangka menengah serta program/kegiatan tahunan organisasi perangkat daerah yang baru.
d. Untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyesuaikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provins
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

BAB. II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Keberhasilan suatu program, kegiatan, dan sub kegiatan selama ini lebih banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik dan keuangan. Semakin tinggi realisasi capaian fisik dan keuangan, maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila program/kegiatan/sub kegiatan yang penyerapannya keuangan dan fisiknya 100% atau sesuai target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil. Untuk saat ini disamping pencapaian fisik dan keuangan juga dilihat sejauhmana tingkat manfaat dari program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun, sehingga sesuai dengan harapan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai komitmen untuk berusaha mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan begitu pula dengan capaian target di Renstra.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 melaksanakan 8 program, 17 kegiatan, dan 56 sub kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
   a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
      1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencapai 97,13%
      2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 84,87%
      3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai 77,98%
      4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 82,10%
      5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 99,99%
   b. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
      1) Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa mencapai 100%
   c. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
      1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa mencapai 95,20%
   d. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
      1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota mencapai 99,54%

e. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
   1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal mencapai 99,10%
   2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) mencapai 99,97%
   3) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota mencapai 80,69%
f. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
   1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mencapai 99,56%
g. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
   1) Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan mencapai 93,37%

2. Program dan Kegiatan tahun 2024 yang memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
   a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
      1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 100%
   b. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
      1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk mencapai 100%
      2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 100%
   c. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
      1) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB mencapai 100%

3. Progam dan Kegiatan Tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
   Selama tahun 2024, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak ada yang capaiannya melebihi target yang ditentukan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja progam dan kegiatan tahun 2024, masih ada beberapa permasalahan, diantaranya:
1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Tahun 2024 masih ada 4 jabatan fungsional (kasi) yang masih kosong.
2. Keterbatasan anggaran yang diberikan, sehingga tidak bisa melakukan pengadaan sarana prasarana baru untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2026 adalah:
1. Keterbatasan anggaran yang diberikan sehingga belum mampu membeli sarana prasarana baru untuk meningkatkan kinerja pegawai.
2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada, pegawai yang pensiun tahun 2025 sejumlah 1 (satu) orang dan tahun 2026 sejumlah 2 (dua) orang.

Adapun Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

1. Memanfaatkan sarana prasarana yang ada semaksimal mungkin sehingga semua pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik.
2. Mengoptimalkan kinerja pegawai yang ada agar seluruh pekerjaan dapat terselesaikan sesuai target yang direncanakan, dengan cara mengangkat ketua tim kerja untuk mengampu ketugasan pejabat fungsional yang masih kosong.

Untuk mengukur capaian target di tahun 2024 dilaksanakan dengan melihat dari laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah melalui aplikasi E-Monev (sipanda).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.13.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,433 indeks	4,433 indeks	4,433 indeks	4,433 indeks	100	4,433 indeks	4,433 indeks	100
2.13.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 dokomen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2.13.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.13.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100	17 Laporan	17 Laporan	100
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100	14 laporan	14 laporan	100
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	476 Orang/bulan	374 Orang/bul	374 Orang/bul	100	378 Orang/bulan	378 Orang/bulan	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100	13 Laporan	13 Laporan	100
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	6 dokumen	6 dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	6 dokumen	6 dokumen	100
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100	10 kegiatan	10 kegiatan	100
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	100
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	288 Dokumen	247 Dokumen	247 Dokumen	247 Dokumen	100	365 Dokumen	365 Dokumen	100
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	45 Laporan	38 Laporan	35 Laporan	92.11	45 Laporan	45 Laporan	100
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100	6 kegiatan	6 kegiatan	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100	48 Laporan	48 Laporan	100
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	16 Laporan	16 Laporan	100
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	438 unit	349 unit	349 unit	349 unit	100	438 unit	438 unit	100
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	209 Unit	242 Unit	242 Unit	242 Unit	100	290 Unit	290 Unit	100
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	0 unit	10 Unit	10 Unit	100	35 Unit	35 Unit	100
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	29 Unit	3 Unit	3 Unit	100	27 Unit	27 Unit	100
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15 Unit	5 Unit	5 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerja sama antar Desa	18 dokumen	18 dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100	18 dokumen	18 dokumen	100
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	18 dokumen	18 dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100	18 Dokumen	18 Dokumen	100
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kalurahan Yang Menetapkan APBKal Tepat Waktu	100 persen	100 persen	99 persen	99 persen	100	100 persen	100 persen	100
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	100	14 kegiatan	14 kegiatan	100
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4 Dokumen	13 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	0 dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	177 Dokumen	146 Dokumen	146 Dokumen	146 Dokumen	100	177 Dokumen	177 Dokumen	100
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	721 Dokumen	720 Dokumen	721 Dokumen	721 Dokumen	100	721 Dokumen	721 Dokumen	100
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	234 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	100	90 Orang	90 Orang	100
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13 Laporan	1 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100	13 Laporan	13 Laporan	100
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	18 Dokumen	19 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100	18 Dokumen	18 Dokumen	100
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	289 Dokumen	288 Dokumen	289 Dokumen	289 Dokumen	100	289 Dokumen	289 Dokumen	100
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	144 Orang	432 Orang	144 Orang	144 Orang	100	1652 Orang	1652 Orang	100
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	144 Laporan	144 Laporan	144 Laporan	144 Laporan	100	144 Laporan	144 Laporan	100
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakat Dalam Pembangunan	100 persen	85 persen	90 persen	90 persen	100	95 persen	95 persen	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	4 kegiatan	4 kegiatan	100
2.13.05.2.01 .03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	61 Lembaga	153 Lembaga	153 Lembaga	100	80 Lembaga	80 Lembaga	100
2.13.05.2.01 .05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.13.05.2.01 .08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Usia 25 - 49 Tahun	22.2 tahun	22,7 tahun	22,8 tahun	22,8 tahun	100	23 tahun	23 tahun	100
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Satuan Pendidikan	10 satuan pendidikan	10 satuan pendidikan	10 satuan pendidikan	100	10 satuan pendidikan	10 satuan pendidikan	100
2.14.02.2.01 .09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	100	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	10 kegiatan	10 kegiatan	100
2.14.02.2.02 .20	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	9.3 persen	8,25 persen	8,20 persen	8,20 persen	100	8,15 persen	8,15 persen	100
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	18 laporan	18 laporan	18 Laporan	18 Laporan	100	18 laporan	18 laporan	100
2.14.03.2.01 .10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100	18 Laporan	18 Laporan	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1573 orang	1573 Orang	1573 orang	1573 orang	100	1573 orang	1573 orang	100
2.14.03.2.02 .04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1579 Orang	1573 Orang	1573 Orang	1573 Orang	100	1578 Orang	1578 Orang	100
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten yang terlaksana	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	4 kegiatan	100
2.14.03.2.03 .01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	55 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3575 Orang	3000 Orang	3000 Orang	3000 Orang	100	3000 Orang	3000 Orang	100
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	18 Laporan	18 Laporan	100
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	144 Kampung	38 Kampung	38 Kampung	38 Kampung	100	38 kampung	38 kampung	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	144 Kampung	38 Kampung	38 Kampung	38 Kampung	100	-	-	100
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Yang Aktif	1,7 persen	77 persen	79 persen	79 persen	100	80 persen	80 persen	100
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0 kelompok	1021 Kelompok	1053 Kelompok	1053 Kelompok	100	1021 kelompok	1021 kelompok	100
2.14.04.2.01.26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0 kelompok	1021 Kelompok	1053 Kelompok	1053 Kelompok	100	1068 Orang	1068 Orang	100

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan	100 persen	70 persen	80 persen	80 persen	100	90 persen	90 persen	100
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	144 lembaga	144 lembaga	144 lembaga	144 lembaga	100	144 Lembaga	144 Lembaga	100
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kajian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dilakukan dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU Tahun 2024, diperoleh gambaran mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dirinci dalam uraian berikut:

1. IKU Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu dengan target 90%, terealisasi sebesar 90,27%
2. IKU Nilai AKIP PD dengan target 82,5 terealisasi sebesar 82,99
3. IKU Persentase pemakaian alat kontrasepsi modern dengan target 78,14% terealisasi sebesar 71,12%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM)	Satuan (IKU, SPM)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)											
1	Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu	persen	80%	85%	90%	95%	100%	84.7%	90.3%	90%	94%	Jumlah kalurahan yang melaporakan LPPKal tepat waktu : Jumlah seluruh kalurahan x 100%
2	persentase desa mandiri	persen	17.36%	20.83%	24.31%	27.78%	31.25%	46.50%	87.50%	24.31%	87.50%	Jumlah desa mandiri : jumlah seluruh desa x 100%
3	Nilai AKIP PD	persen	78.11	80.11	82.11	85.3	84.5	83.9	82.99	0.8211	84.5	diambil dari data e-sakip kab. Gunungkidul
4	persentase pemakaian alat kontrasepsi modern	persen	78.10%	78.12%	78.14%	78.16%	78.18%	72.47%	70.39%	78.14%	69.40%	jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi modern : Jumlah PUS x 100%
B	SPM Bidang Keluarga Berencana											
1	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	persen	78.50%	78.60%	78.70%	78.80%	78.90%	72.95%	71.12%	78.70%	78.90%	jumlah PA : jumlah PUS x 100%
2	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak tidak terpenuhi (Unmet Need)	persen	8.33%	8.30%	8.25%	8.20%	8.15%	12.0%	9.38%	8.25%	8.15%	jumlah Unmet Need : jumlah PUS x 100%
3	Cakupan Anggota Bina keluarga Balita (BKB)	persen	75.22%	75.24%	75.26%	75.28%	75.30%	13.88%	12.69%	75.26%	75.30%	jumlah anggota : jumlah sasaran x 100%

No	Indikator (IKU, SPM)	Satuan (IKU, SPM)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
4	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB	persen	67.80%	67.90%	68.00%	68.10%	68.20%	32.08%	37.35%	68.00%	68.20%	jumlah peserta KB : jumlah anggota x 100%
5	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKP)	rasio	0.38	0.38	0.39	0.40	0.41	0.29	0.28	0.39	0.41	jumlah PLKB : jumlah desa

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul antara lain :

a. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km^2 merupakan kabupaten terluas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kondisi geomorfologi yang bervariasi memberikan peluang investasi yang bervariasi pula sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing;
b. Masih belum optimalnya pedoman dari Pusat dalam penyusunan perencanaan sehingga masih banyak terjadi perubahan di tengah-tengah pelaksanaan program;
c. Kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat;
d. Semakin baik peran serta masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan pembangunan.
e. Alokasi dana yang langsung ke Desa sudah semakin besar;
f. DAK Non Fisik Bidang KB terlaksana dengan baik tetapi masih banyak kendala terutama karena penjabaran juknis yang terbatas pada kegiatan tertentu, sehingga tidak optimal dalam penyerapan anggaran.

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berdasarkan analisis diatas dan kondisi riil saat ini dapat disimpulkan faktor- faktor yang menjadi peluang dan tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kinerja pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Peluang.
    1. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat;
    2. Pelaksanaan otonomi daerah termasuk didalamnya otonomi desa yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat;
    4. Adanya program-program terpadu dari pusat dan provinsi secara lintas sektor;
    5. Adanya budaya gotong royong di masyarakat sehingga menunjang pemberdayaan dalam partisipasi masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelestarian hasil pembangunan di kalurahan;
6. Masih banyak potensi yang ada di masyarakat sebagai dasar untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional;
8. Telah terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Teknis Operasionalnya;
9. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung program KB Nasional;
10. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga.

b. Ancaman
1. Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan ketergantungan yang semakin besar kepada pemerintah pusat;
2. Sarana dan prasarana daerah yang belum dapat berkompetisi dalam lingkup regional;
3. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa, longsor dan angin puting beliung. Juga masih belum teratasinya permasalahan kekeringan di musim kemarau;
4. Persaingan antar daerah yang semakin meningkat;
5. Pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui media sosial yang tidak terbatas;
6. Pemahaman keyakinan yang mempengaruhi ketidakikutsertaan ber-keluarga berencana;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul sabagai berikut :

a. Kekuatan.
1. Aparatur pemerintah yang cukup memadai dari aspek kualitas dan penguasaan bidang tugasnya;
2. Suasana lingkungan kerja kondusif.;
3. Adanya Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Semangat kerja yang cukup baik;
5. Adanya komitmen dari aparat/pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akan menguatkan etos kerja;
6. Kondisi gedung kantor yang sudah semakin representatif;
7. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa;
8. Prestasi-prestasi yang diraih oleh desa atau kelompok di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Kelemahan
   1. Penggunaan teknologi informasi yang belum optimal;
   2. Belum adanya regenerasi aparatur pemerintah akibat kebijakan moratorium PNS;
   3. Belum optimalnya penataan personil sesuai kompetensi yang dimiliki;
   4. Sarana dan prasarana belum memadai, terutama parkir kendaraan;
   5. Terbitnya Permendes PDT dan PMK lebih lambat dari tata kelola yang ada di pemerintahan kalurahan;

Berdasarkan analisa tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pelestarian hasil pembangunan di kalurahan belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan;
2. Potensi masyarakat belum dikelola secara Optimal, sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara signifikan;
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana sudah baik, namun masih perlu dioptimalkan;
4. Kualitas pelayanan KB perlu ditingkatkan;
5. Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah dalam rangka *good governance;*
6. Masih perlu kerja keras dari para pelaksana kegiatan terkait dana desa untuk dapat melaksanakan Undang-Undang Desa sebagaimana yang diharapkan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya :

1. Kemandirian masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan serta pelestarian hasil pembangunan di desa masih rendah;
2. Belum tercapainya upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat;
3. Akses dan kualitas pelayanan KB belum optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian pembangunan serta pelestarian hasil pembangunan di desa masih rendah;
2. Turunnya Permendes PDT & Transmigrasi yang terkait petunjuk teknis Dana Desa perlu pemahaman di tingkat daerah dan kalurahan;
3. Potensi ekonomi masyarakat belum dikelola secara maksimal;
4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana kurang maksimal dan perlu komunikasi informasi dan edukasi (KIE) yang berkelanjutan.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional (Standar Pelayanan Minimal*)*
Untuk mendapatkan potret gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Gunungkidul terkait dengan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berikut dijabarkan secara rinci kedua hal tersebut yang meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang fisik, bidang pemberdayaan perempuan, bidang keluarga berencana, dan bidang pemerintahan. Gambaran kondisi dan permasalahan ini selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan, strategi, dan program kegiatan.

a. Kondisi Saat Ini
   1. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
   2. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
   3. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
   4. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
   5. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.
   6. Kondisi sebagian jalan masih belum sempurna khususnya jalan kabupaten dan desa.
   7. Masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan pemerintahan.
   8. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur daerah.
   9. Belum efektifnya pengawasan melekat.
   10. Masih terdapat pelanggaran disiplin aparatur daerah.
   11. Masih tingginya angka kelahiran oleh perempuan dibawah usia 20 tahun.
   12. Perlunya pengetahuan terkait dampak kependudukan dan Keluarga Berencana.

b. Permasalahan
   1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
   2. Masih tingginya angka Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
   3. Tekanan globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan.
   4. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.
   5. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai.
   6. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
   7. Kualitas sumber daya manusia Pemerintah belum merata, hal ini dilihat dari jenjang pendidikan yang ada tingkat SLTA masih mendominasi.
   8. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum maksimal.
   9. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai.
   10. Kesadaran terhadap norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera belum optimal

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut telah dirumuskan misi, tujuan *(grand strategy)* dan sasaran pembangunan jangka menengah yang sekaligus merupakan tujuan dan sasaran yang harus diemban dan diwujudkan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029, antara lain:

a. Misi
   1. Misi 5 : Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban
   2. Misi 6 : Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa
b. Strategi
   1. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
   2. Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan
   3. Peningkatan pengendalian penduduk dengan menurukan laju pertumbuhan penduduk
   4. Peningkatan pembinaan keluarga berencana dan peningkatan keluarga sejahtera
c. Sasaran.
   1. Akuntabilitas pemerintahan kalurahan meningkat
   2. Pemberdayaan masyarakat meningkat
   3. Meningkatnya Kepesertaan KB pada PUS
   4. Meningkatnya keaktifan kelompok Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan.
   1. Meningkatkan kapasitas tenaga Penyuluh KB di tingkat kapanewon.
   2. Meningkatkan jumlah tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)di tingkat kapanewon dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat kalurahan.
   3. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dan anggaran program KB di kabupaten/kota yang kurang memadai.
   4. Meningkatkan pembinaan institusi KB yang berada di lini lapangan.
   5. Meningkatkan sinergi kebijakan dalam pembangunan kependudukan dan KB baik di pusat maupun di daerah.
   6. Meningkatkan kapasitas lembaga kalurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
   7. Meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
b. Peluang.
   1. Dengan disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional
   2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten /Kota memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan program KB di tingkat Pusat dan Kabupaten/Kota.
4. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukungan program KB Nasional.
5. Telah terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Teknis Operasionalnya.
6. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Adapun reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul, kami sajikan dalam table berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18,427,211,076	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15,455,372,563	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9,603,743,986	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				7,410,325,763	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	5,500,044,030	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84.5	3,222,443,163	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.433 indeks	91,445,626	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	33,803,200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65,275,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,960,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,650,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,285,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,650,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wunung	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,245,000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2,750,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2,165,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,205,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,475,300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	13,230,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	5,734,900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32 Laporan	4,685,626	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,753,000	
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang	1 Berita Acara	3,185,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	14 laporan	4,534,030,679	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2,294,215,963	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan	4,519,030,679	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	2,276,620,963	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,280,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	13 laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	13 Laporan	15,315,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	6 Dokumen	4,600,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawiaan	-	5,082,300	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	4,600,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	5,082,300	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani	10 kegiatan	246,797,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum	-	296,027,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13,332,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8,396,900	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	62,410,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	57,945,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	19,845,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	5,258,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	24,460,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15,422,100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	496 Dokumen	1,984,500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	288 Dokumen	1,200,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4,200,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	116,765,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	168,292,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	5,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	35,313,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	17 unit	37,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	46,000,000	
	Pengadaan Mebel	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	22,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Wonosari,	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	16,000,000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 Unit	15,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	10,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	20,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	6 kegiatan	213,543,225	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	188,552,125	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22,402,800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,003,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	148,837,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	110,399,125	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	42,302,925	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	75,150,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	438 unit	372,627,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	358,762,575	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	242 Unit	194,460,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	209 Unit	216,100,000	
	Pemeliharaan Mebel	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	62 Unit	4,630,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	1,200,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 unit	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	11,250,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	130,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	124,812,575	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	13,537,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	5,400,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan	100 persen	11,025,000	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Persentase kalurahan yang melaksanakan kerjasama antar desa	100 persen	8,730,000	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		Jumlah Fasilitasi Kerja sama antar Desa	18 dokumen	11,025,000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		kalurahan yang terfasilitasi kerjasama antardesa	-	8,730,000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	18 dokumen	11,025,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	18 Dokumen	8,730,000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu	100 persen	3,835,792,456	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Kalurahan yang mendapatkan fasilitasidalam penyelenggaraan administrasi kalurahan	100 persen	3,694,060,600	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang terlaksana	14 kegiatan	3,835,792,456	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset	- -	3,694,060,600	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13 dokumen	3,073,691,131	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4 Dokumen	55,145,000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3 dokumen	150,000,000						
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	145 Dokumen	40,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	177 Dokumen	18,210,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	580 Dokumen	113,520,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	721 Dokumen	34,780,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	90 Orang	10,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	234 Orang	53,432,000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2 Dokumen	10,000,000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	2,550,000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	79,500,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	31,405,000	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	10,000,000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	200,545,000	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	8,820,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13 Laporan	2,998,275,600	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	19 Dokumen	19,845,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	18 Dokumen	7,265,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	290 Dokumen	89,666,325	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	289 Dokumen	68,777,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	432 Orang	10,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	144 Orang	14,281,000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	144 Laporan	10,000,000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	144 Laporan	2,060,000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	210,750,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	207,335,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakat dalam pembangunan	100 persen	256,882,500	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase lembaga kemasyarakatan kalurahan yang dibina	100 persen	485,092,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 kegiatan	256,882,500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan yang dibina	-	485,092,000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	162 Lembaga	55,125,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	114,112,000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	3,307,500	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	47,305,000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	33,075,000						
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5 Dokumen	165,375,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	3 Dokumen	193,920,000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	4 Dokumen	129,755,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7,705,408,890	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7,675,171,800	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25 - 49 tahun	23.02 tahun	1,345,011,640	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Seluruh Wanita Usia 25-49 Tahun	22.2 tahun	419,822,600	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	10 satuan pendidikan	665,868,750	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		sekolah yang mendapatkan pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan	-	1,199,900	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Gunungkidul	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	10 Satuan Pendidikan	665,868,750	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	1 Satuan Pendidikan	1,199,900	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 kegiatan	679,142,890	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		pelaporan data dan informasi keluarga	-	418,622,700	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	1 Laporan	60,300,000	
						Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedianya	1 Dokumen	9,967,500	
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	212,100,000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	123,120,000	
	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	679,142,890	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	13,135,200	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.1 persen	4,745,645,250	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9.3 persen	4,702,309,200	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	18 laporan	1,490,730,000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		koordinasi lintas sektor tingkat kapanewon	-	1,651,634,900	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Laporan	1,490,730,000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	978,489,900	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi	10 Laporan	372,300,000	
						Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	3 Dokumen	100,000,000	
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	1 Dokumen	10,000,000	
						Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	1 Organisasi	190,845,000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1573 orang	691,200,000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		pembinaan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	1,163,615,000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1573 Orang	691,200,000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1579 Orang	1,163,615,000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten yang terlaksana	4 kegiatan	2,413,955,250	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi	-	1,477,059,300	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	55 Laporan	131,385,000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	78,607,500	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3000 Orang	925,200,000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3575 Orang	1,324,392,500	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	18 Unit	1,072,815,000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	38,502,000	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	160 orang	284,555,250	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	35,557,300	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	38 kampung	149,760,000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		pelatihan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung KB	-	410,000,000	
						Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah DASHAT di Kampung KB	18 Unit	1,199,900	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	38 Kampung	149,760,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	144 Kampung	408,800,100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	82 persen	1,614,752,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	1,7 persen	2,553,040,000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1021 kelompok	1,614,752,000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		PUS yang melaksanakan konseling	-	203,440,000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1021 Kelompok	1,614,752,000						

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8 Laporan / Dokumen	73,440,000	
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	130,000,000	
						Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	-	2,349,600,000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	1,068,000,000	
						Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	1,281,600,000	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1,118,058,200	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				369,875,000	
	SEKRETARIAT DAERAH				1,118,058,200	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Presentase Kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan	100 persen	369,875,000	

No.	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan	100 persen	1,118,058,200	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan	-	369,875,000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	144 lembaga	1,118,058,200	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Keluraha n yang Didampingi	5 Dokumen	369,875,000	
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	144 Lembaga	1,118,058,200						

2.4. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Melalui usulan dari bawah lewat musrendus, musrendes, musrebang kecamatan dan musrenbang kabupaten.
2. Melalui proposal dari kelompok masyarakat yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Berdasarkan usulan dari dinas terkait.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki usulan program dan kegitan pembangunan dari pemangku kepentingan Kabupaten Gunungkidul.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. BKKBN

Sasaran strategis BKKBN untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas sebagaimana tertuang dalam Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025, adalah:

1) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP);
2) Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);
3) Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
4) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
5) Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19 tahun); dan
6) Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun). Hal ini senada dengan indikator kinerja DP3AP2KB yang terkait dengan program Bangga Kencana, yaitu: CBR, CPR, Unmetneed dan persentase kelompok bina keluarga.

3.1.2. BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY

Pada Renstra Tahun 2023-2026, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan tujuan Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1) Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren. Indikator dari sasaran pertama ini yaitu meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan. Target tahunan dari sasaran ini bersifat absolut yaitu 100% setiap tahunnya.
2) Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator dari sasaran kedua ini adalah persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan. Formulasi penentuan target kinerja sasaran pada tiap tahunnya didapatkan dari rerata cakupan kepemilikan dokumen penting kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Dasar penentuan target kinerja sasaran mempertimbangkan pada target kinerja sasaran baik nasional maupun kabupaten/kota
3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah. Sasaran ketiga merupakan sasaran yang bersifat mandatory dan harus dicantumkan dalam renstra setiap instansi pemerintah. Indikator dari sasaran ketiga adalahkategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan target empat tahun ke

depan masuk dalam kategori A atau sangat baik secara berturut-turut.

3.1.3. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY

Pada Rancangan Akhir Renstra Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY Tahun 2022-2027 menetapkan tujuan Meningkatkan kualitas kebijakan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis yaitu

1) Meningkatnya kualitas bahan rumusan kebijakan, kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi desa/kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat
2) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Bupati. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, dan terukur.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik, Pengendalian Angka Kelahiran dan Pembangunan Keluarga, meliputi 4 sasaran :
   a) Akuntabilitas pemerintahan kalurahan meningkat
   b) Pemberdayaan masyarakat meningkat
   c) PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat
   d) Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA)

Berikut disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan tabel 3.1 sebagai berikut :

TABEL 3.1
TUJUAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2030
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang baik, Pengendalian Angka Kelahiran dan Pembangunan Keluarga	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan	96.53%
		Total Fertility Rate (TFR	1,95

TABEL 3.2
SASARAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2026
1	Akuntabilitas pemerintahan kalurahan meningkat	Persentase Kalurahan yang Menyusun LPPKal Tepat Waktu	100%
2	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase Desa Mandiri	87,5%
3	PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern	69,4%
4	Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA)	Persentase Kelompok Kegiatan yang Aktif Melaksanakan Kegiatan	16,34%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program prioritas RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kelompok sasaran program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari masyarakat meliputi kelompok masyarakat, keluarga, perempuan, anak serta lembaga kalurahan. Sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diantaranya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul kedalam rencana kegiatan untuk setiap program.

   Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

   Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

   Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaaan *(ex ente)*, tahap pelaksanaan *(on going)*, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi *(ex post).*

   Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Dalam implementasi misi sebagai upaya terwujudnya visi Kabupaten Gunungkidul diarahkan pada sasaran sebagai berikut :

1. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
2. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Jumah program dan kegiatan sesuai yang dijabarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, yaitu 8 program, 19 kegiatan, dan 72 sub kegiatan.

Program lintas Perangkat Daerah merupakan program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan melibatkan Perangkat Daerah lain. Pada rencana tahun 2026 program ini meliputi :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
4. Program Pengendalian Penduduk
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Sasaran dan program/kegiatan/ sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026 disajikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat				2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7,410,325,763	DPMKP2KB
		Akuntabilitas pemerintahan kalurahan meningkat	Persentase Kalurahan yang Menyusun LPPKal Tepat Waktu	100%	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,694,060,600	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3,694,060,600	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	55,145,000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	18,210,000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	34,780,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	53,432,000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2,550,000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	31,405,000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	200,545,000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2,998,275,600	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	7,265,000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	68,777,000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	14,281,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2,060,000	DPMKP2KB
					2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	207,335,000	DPMKP2KB
					4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	369,875,000	DPMKP2KB
					4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	369,875,000	DPMKP2KB
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	369,875,000	DPMKP2KB
					4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantre	369,875,000	DPMKP2KB
					2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,222,443,163	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,803,200	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,960,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,285,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,245,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,165,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,475,300	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,734,900	DPMKP2KB
					2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,753,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,185,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,294,215,963	DPMKP2KB
					2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,276,620,963	DPMKP2KB
					2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,280,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15,315,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,082,300	DPMKP2KB
					2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,082,300	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	296,027,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,396,900	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57,945,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,258,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,422,100	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,200,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4,200,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168,292,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35,313,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46,000,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	16,000,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188,552,125	DPMKP2KB
					2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,003,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110,399,125	DPMKP2KB
					2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75,150,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358,762,575	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216,100,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1,200,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,250,000	DPMKP2KB
					2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124,812,575	DPMKP2KB
					2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,400,000	DPMKP2KB
		Pemberdayaan masyarakat meningkat	Persentase Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa	97.92%	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	8,730,000	DPMKP2KB
					2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	8,730,000	DPMKP2KB
					2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	8,730,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	485,092,000	DPMKP2KB
					2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	485,092,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	114,112,000	DPMKP2KB
					2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	47,305,000	DPMKP2KB
					2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	193,920,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	129,755,000	DPMKP2KB
Peningkatan Kualitas SDM	Derajat Kualitas SDM meningkat				2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7,675,171,800	DPMKP2KB
		Meningkatnya Kepesertaan KB pada PUS	Persentase PUS yang Menjadi Peserta KB Modern	71.20%	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	419,822,600	DPMKP2KB
					2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1,199,900	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	1,199,900	DPMKP2KB
					2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	418,622,700	DPMKP2KB
					2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	60,300,000	DPMKP2KB
					2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	9,967,500	DPMKP2KB
					2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	212,100,000	DPMKP2KB
					2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	123,120,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga,	13,135,200	DPMKP2KB
					2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4,702,309,200	DPMKP2KB
					2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	1,651,634,900	DPMKP2KB
					2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	978,489,900	DPMKP2KB
					2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	372,300,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100,000,000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	10,000,000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	190,845,000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1,163,615,000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,163,615,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,477,059,300	DPMKP2KB
					2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	78,607,500	DPMKP2KB
					2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1,324,392,500	DPMKP2KB
					2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38,502,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	35,557,300	DPMKP2KB
					2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	410,000,000	DPMKP2KB
					2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	1,199,900	DPMKP2KB
					2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	408,800,100	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
		Meningkatnya keaktifan kelompok Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Persentase Kelompok Kegiatan (Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) yang Aktif Melaksanakan Kegiatan	16.34%	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,553,040,000	DPMKP2KB
					2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	203,440,000	DPMKP2KB
					2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	73,440,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130,000,000	DPMKP2KB
					2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2,349,600,000	DPMKP2KB

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,068,000,000	DPMKP2KB
					2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1,281,600,000	DPMKP2KB

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten gunungkidul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DATA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN				15,455,372,563				11,402,439,452
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				7,410,325,763				9,311,026,312
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		84.5	3,222,443,163				4,801,796,812
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	33,803,200				57,500,000
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 Dokumen	11,960,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			21,500,000
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	2,285,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5,000,000
2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wunung	1 Dokumen	2,245,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5,000,000

2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 Dokumen	2,165,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6,000,000
2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 Dokumen	2,475,300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3,500,000
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	17 Laporan	5,734,900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8,000,000
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	3 Laporan	3,753,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5,000,000
2.13.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Berita Acara	3,185,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3,500,000
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	2,294,215,963				3,656,396,812

2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	462 Orang/bulan	2,276,620,963	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3,603,558,312
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Laporan	2,280,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2,299,000
2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	13 Laporan	15,315,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50,539,500
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawiaan		-	5,082,300				45,000,000
2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	6 Dokumen	5,082,300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			45,000,000
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum		-	296,027,000				293,200,000
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Paket	8,396,900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			9,000,000
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	14 paket	57,945,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			85,000,000
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4 paket	5,258,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6,500,000

2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Paket	15,422,100	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			16,500,000
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	288 Dokumen	1,200,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1,200,000
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Laporan	4,200,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5,000,000
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	36 laporan	168,292,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			135,000,000
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4 Dokumen	35,313,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			35,000,000
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		-	46,000,000				0
2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4 unit	16,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 unit	10,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	2 unit	20,000,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	188,552,125				216,200,000

2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Laporan	3,003,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6,200,000
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	48 Laporan	110,399,125	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			125,000,000
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	16 Laporan	75,150,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			85,000,000
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	358,762,575				533,500,000
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	209 Unit	216,100,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250,000,000
2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	15 Unit	1,200,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2,000,000
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	27 Unit	11,250,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20,000,000
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Unit	124,812,575	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250,000,000
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	10 Unit	5,400,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11,500,000

2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase kalurahan yang melaksanakan kerjasama antar desa		100 persen	8,730,000				11,000,000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	kalurahan yang terfasilitasi kerjasama antardesa		-	8,730,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11,000,000
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	18 Dokumen	8,730,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11,000,000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kalurahan yang mendapatkan fasilitasidalam penyelenggaraan administrasi kalurahan		100 persen	3,694,060,600				4,118,229,500
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset kalurahan Kalurahan yang mendapatkan pembinaan penyelenggaraan administrasi kalurahan		- -	3,694,060,600				4,118,229,500

2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	4 Dokumen	55,145,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			170,000,000
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177 Dokumen	18,210,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20,076,500
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	721 Dokumen	34,780,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			38,345,000
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	234 Orang	53,432,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			80,000,000
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,550,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7,000,000
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	31,405,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50,000,000
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	200,545,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			400,000,000
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	13 Laporan	2,998,275,600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3,050,000,000

2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	7,265,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			9,000,000
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289 Dokumen	68,777,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			70,808,000
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	144 Orang	14,281,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30,000,000
2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144 Laporan	2,060,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8,000,000
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	207,335,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			185,000,000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kalurahan yang dibina		100 persen	485,092,000				380,000,000

2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan yang dibina		-	485,092,000				380,000,000
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	114,112,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			90,000,000
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	47,305,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40,000,000
2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	193,920,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250,000,000

2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	129,755,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			130,000,000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7,675,171,800				2,091,413,140
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Seluruh Wanita Usia 25-49 Tahun		22.2 tahun	419,822,600				750,272,890
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	sekolah yang mendapatkan pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan		-	1,199,900				4,800,000
2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Satuan Pendidikan	1,199,900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4,800,000

2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	pelaporan data dan informasi keluarga		-	418,622,700				745,472,890
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	60,300,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			66,330,000
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedianya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	9,967,500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	212,100,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			0
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	123,120,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			0
2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	1 Dokumen	13,135,200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			679,142,890
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		9.3 persen	4,702,309,200				1,341,140,250

2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	koordinasi lintas sektor tingkat kapanewon		-	1,651,634,900				1,490,730,000
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	978,489,900	DAK NON FISIK-BOKB-KB			1,490,730,000
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	372,300,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			0

2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	100,000,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			0
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10,000,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			0
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Organisasi	190,845,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			0
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	pembinaan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		-	1,163,615,000				691,200,000

2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1579 Orang	1,163,615,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			691,200,000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	faskes yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi		-	1,477,059,300				1,341,140,250
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	78,607,500	DAK NON FISIK-BOKB-KB			131,385,000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3575 Orang	1,324,392,500	DAK NON FISIK-BOKB-KB			925,200,000
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	38,502,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			0

2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	35,557,300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			284,555,250
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	pelatihan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung KB		-	410,000,000				0
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	18 Unit	1,199,900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144 Kampung	408,800,100	DAK NON FISIK-BOKB-KB			0
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga		1,7 persen	2,553,040,000				0
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PUS yang melaksanakan konseling		-	203,440,000				0

2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan / Dokumen	73,440,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			0
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	130,000,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			0
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting		-	2,349,600,000				0
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 laporan	1,068,000,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			0

2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 laporan	1,281,600,000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			0
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				369,875,000				0
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan		100 persen	369,875,000				0
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan		-	369,875,000				0
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		5 Dokumen	369,875,000				0

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting
   1. Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan, Musrenbang tingkat kalurahan hingga Forum Perangkat Daerah

b. Kaidah Pelaksanaan

   Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

   Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,

ttd

SUJARWO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepastian investasi disertai dengan iklim usaha yang kondusif dan berkomitmen dari pemerintah daerah merupakan salah satu faktor utama dalam rangka mendorong dan memperkuat stabilitas perekonomian daerah demi terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan serta peningkatan investasi di Kabupaten Gunungkidul. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu senantiasa berusaha meningkatkan pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul serta kualitas pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan implementasi dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki demi terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, diperlukan adanya sebuah rumusan perencanaan yang sistematis baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya sebuah perencanaan strategis ditingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah.

Selanjutnya, berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang memuat perencanaan program dan kegiatan disertai dengan struktur pendanaan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah untuk perencanaan satu tahun yang akan datang. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rencana program dan kegiatan prioritas maupun non prioritas dalam rangka mendukung proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah juga menyajikan tentang kebijakan, permasalahan serta program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan serta dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan saling bersinergi dengan program/kegiatan Perangkat Daerah lain.

Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 merupakan penjabaran rencana kerja dalam kurun waktu satu tahun kedepan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai acuan untuk melaksanakan program

dan kegiatan selama periode satu tahun. Dokumen Renja ini juga merupakan landasan serta pedoman dalam proses penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026.

Mengingat dokumen Renja merupakan dokumen yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan maupun penyesuaian dengan situasi dan kondisi terkini pada tahun berjalan. Oleh sebab itu, perubahan maupun penyesuaian tersebut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 15 tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan, keselarasan serta konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pengawasan program/kegitan Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Kerja ini melaksanakan fungsi manajerial sebagai *planner*, *organizer* maupun *controller* terhadap program/kegiatan yang akan dilaksanakan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah :

a. Menciptakan keselarasan, keserasian dan kesinergian antar program dan kegiatan Perangkat Daerah
b. Sebagai acuan dan pedoman dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026
c. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi antara proses perencanaan dan penganggaran pada tahun 2026 dengan bidang urusan serta susunan Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKASANAAN RENCANA KERJA DPMPTSP

- Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra DPMPTSP
- Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP
- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
- Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

- Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP

- Rencana Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra DPMPTSP

Berlandaskan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, telah ditetapkan perubahan struktur dan susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban amanat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tercantum dalam Pasal 376 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
c. UPT; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan menyelengarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu senantiasa melaksanakan program/kegiatan guna mendorong peningkatan iklim investasi serta kegiatan berusaha di Kabupaten Gunungkidul dan peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu kepada Masyarakat.

Evaluasi pencapaian target kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 disusun berdasarkan target dan realisasi kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam laporan evaluasi pencapaian kinerja e-monev Bappeda triwulan IV tahun 2024 sesuai pada saat Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun. Hasil evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024

menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% dengan penyerapan keuangan sebesar 98,04% atau sebesar Rp. 3.334.303.141 dari target anggaran belanja sebesar Rp. 3.401.083.748 sesuai yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024 nomor DPPA/A.6/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 65.073.800
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 1.333.681.912
    3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 350.000
    4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 740.000
    5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 14.728.608
    6. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 294.681.476
    7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 353.434.532
    8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 202.586.600

b. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 80.870.130

c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 78.569.150

d. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 148.186.500

e. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 644.020.433

f. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan keuangan sebesar Rp. 117.380.000

1.1.1 Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapai serta terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

a. Adanya perubahan dan pergeseran anggaran disesuaikan dengan situasi serta kondisi terkini yang menyebabkan program kegiatan belum bisa dilaksanakan, serta tidak terpenuhinya target kinerja yang menyebabkan tidak terserap maksimalnya anggaran yang ada.
b. Penyebab terpenuhinya beberapa program kegiatan tahun 2024 karena sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tanpa menemui suatu permasalahan dan kendala yang berarti dalam proses pelaksanaannya. *Positioning* positif atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan, serta pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan melalui koordinasi internal serta eksternal sudah berjalan cukup baik.

1.1.2 Faktor-faktor yang Diperkirakan Akan Mempengaruhi Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2026

Program dan Kegiatan yang sudah mencapai target dalam pelaksanaannya diharapkan akan mampu memberikan tren positif terhadap peningkatan iklim berusaha serta minat investasi di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan juga tidak luput menjadi indikator yang senantiasa akan berusaha ditingkatkan dari waktu ke waktu, salah satunya melalui optimalisasi keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Meskipun demikian, menyikapi dinamika yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berusaha untuk meningkatkan kinerja atas *core business* termasuk strategi kebijakan dan penyikapan yang cepat atas dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan sektor investasi, penyesuaian atas kondisi perekonomian serta

pergantian kepempimpinan akan membantu mencapai kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Beberapa strategi dan inovasi dapat dilakukan antara lain dengan melakukan audiensi serta koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian, dalam hal ini baik Kementerian Investasi, Kementerian PANRB, maupun Kementerian Perhubungan dalam kaitannya dengan pemanfaatan Terminal Tipe A Dhaksinarga Wonosari sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul. Optimalisasi keberadaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul termasuk didalamnya pengembangan sarana dan prasarana pendukung harus menjadi perhatian dalam kaitannya mendukung pencapaian target kinerja menuju kualitas pelayanan prima yang lebih baik serta pengembangan iklim berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul.

1.1.3 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Dilaksanakan

Proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah merupakan satu kesatuan kegiatan yang saling terintegrasi. Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dalam rangka mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya sebuah target yang telah ditetapkan diantaranya adalah dengan menggunakan pendekatan kinerja dalam prinsip penganggaran, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja baik itu *output* maupun *outcome* dari perencanaan alokasi input yang ditetapkan. Kebijakan pemberian kemudahan atau insentif terhadap kegiatan berusaha perlu ditindaklanjuti serta disinergikan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, penguatan tim kerja di Internal Perangkat Daerah untuk saling bekerja sama mewujudkan kinerja dalam keterbatasan jumlah sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang ada.

Adanya sistem plafonisasi anggaran menyebabkan ruang ligkup inovasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik menjadi terbatas. Namun demikian, dukungan kebijakan umum Bupati diharapkan mampu untuk memberi ruang

gerak perencanaan dan penganggaran yang lebih memadai dari sisi pendanaan, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Upaya pengembangan dan pengoptimalan pelayanan online serta implementasi dari aplikasi *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA*) untuk memperluas pasar investasi tentunya membutuhkan dukungan baik sarana prasarana, promosi, serta fasilitas lainnya yang akan berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran.

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi lintas instansi, sinergitas program dan kegiatan sejenis dengan lintas instansi, serta melakukan audiensi kepada para *stakeholders* tentang kondisi yang ada merupakan cara lain untuk mengatasi keterbatasan agar pelayanan tetap berjalan secara optimal. Kedepannya, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu cerminan pelayanan publik di Kabupaten Gunungkidul bisa mendapatkan porsi anggaran yang memadai sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai.

Mengingat misi Bupati Gunungkidul tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan pembangunan manusia dengan keunggulan potensi daerah maka sebagai Perangkat Daerah yang turut serta mendukung pencapaian misi tersebut, kebijakan yang dapat diambil diantaranya adalah dengan mendorong percepatan regulasi peraturan ditingkat Kabupaten yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini, reviu dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan efektifitas tim teknis lintas instansi, serta peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumberdaya manusia khususnya percepatan pemahaman atas kebijakan dari Pemerintah Pusat yang implementasinya harus segera diselaraskan oleh Pemerintah Daerah. Optimalisasi kinerja baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun peningkatan iklim investasi perlu adanya pengawalan serta penguatan dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai.

Perjanjian kerjasama pinjam pakai Terminal Tipe A Dhaksinarga Wonosari dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sejak tahun 2020 yang dimanfaatkan menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul mendapatkan

apresiasi positif dari berbagai pihak, dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Keberadaan Mal Pelayanan Publik ini merupakan suatu inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal, sekaligus menjadi *growth pole* baru perekonomian daerah. Pengembangan Mal Pelayanan Publik baik dari segi kelengkapan sarana prasarana pendukung maupun penambahan instansi-instansi vertikal masih terus dilakukan sampai saat ini. Sejalan dengan kondisi yang ada, prioritas pendanaan dengan efisiensi dan inovasi atas pelaksanaan program kegiatan dilakukan secara simultan dan dinamis demi mendukung keberhasilan pelaksanaan amanat pembangunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghadapi beberapa permasalahan serta kendala diantaranya adalah sumberdaya manusia yang secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi standar, alokasi dari anggaran belanja yang tersedia belum mencukupi, pelaksanaan prosedur yang belum konsisten serta masih minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, terdapat 5 (lima) tolok ukur kinerja pelayanan, baik yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 370/KPTS/2021 yang terdiri dari dua Indikator yaitu:

1. Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani
2. Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menitikberatkan fokus pada strategi percepatan investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung Kabupaten Gunungkidul sebagai destinasi tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya. Melalui perbaikan kualitas pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, maka seluruh proses perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten diharapkan akan lebih cepat terlayani dan dapat dengan signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan disektor investasi.

Secara detail dan terperinci, target serta realisasi dari capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	95,27 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen
2.18.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100 Persen	17 Laporan	17 Laporan	100 Persen
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu	100 Persen	90,96 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	686 Orang/ Bulan	449 Orang/ Bulan	686 Orang/bulan	686 Orang/ Bulan	100 Persen	686 Orang/ Bulan	686 Orang/ Bulan	100 Persen
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100 Persen	13 Laporan	13 Laporan	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada Perangkat Daerah yang terkelola dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pendapatan daerah yang disusun tepat waktu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	1 Orang	-	-	-	5 Orang	5 Orang	100 Persen
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlayani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 paket	4 Paket	100 Persen	4 Paket	4 Paket	100 Persen
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 paket	2 paket	100 Persen	2 Paket	2 Paket	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 paket	2 paket	100 Persen	2 Paket	2 Paket	100 Persen
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	730 Dokumen	730 Dokumen	365 dokumen	365 Dokumen	100 Persen	730 Dokumen	730 Dokumen	100 Persen
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 laporan	4 Laporan	100 Persen	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	24 laporan	24 Laporan	100 Persen	24 Laporan	24 Laporan	100 Persen
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	-	-	-	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100 Persen
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	100 Persen
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	100 Persen	72 Laporan	72 Laporan	100 Persen
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100 Persen	14 Laporan	14 Laporan	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	195 Unit	195 Unit	195 unit	195 Unit	100 Persen	195 Unit	195 Unit	100 Persen
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	-	-	-	6 Unit	6 Unit	100 Persen
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	31 Unit	31 Unit	31 unit	31 Unit	100 Persen	31 Unit	31 Unit	100 Persen
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 unit	1 Unit	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.01.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit	18 unit	18 Unit	100 Persen	18 Unit	18 Unit	100 Persen
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.02.2.02. 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	3 Dokumen	3 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.03.2.01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	4 Dokumen	4 Dokomen	4 dokumen	4 Dokumen	100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	100 Persen	114,09 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintudi bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 Persen	114,09 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sitem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2250 Dokumen	2884 Dokumen	2250 Pelaku Usaha	2250 Pelaku Usaha	100 Persen	2250 Dokumen	2250 Dokumen	100 Persen
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100 Persen	50 Orang	50 Orang	100 Persen
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaa penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	750 Pelaku Usaha	998 Pelaku Usaha	1900 Pelaku Usaha	1900 Pelaku Usaha	100 Persen	750 Pelaku Usaha	750 Pelaku Usaha	100 Persen
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	14 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	22 Kegiatan Usaha	22 Kegiatan Usaha	100 Persen	14 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha	100 Persen
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik	100 Persen	126,04 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11= (10/6)
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	126,04 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2250 Dokumen	2836 Dokumen	2250 Dokumen	2250 Dokumen	100 Persen	2250 Dokumen	2250 Dokumen	100 Persen

Disamping berusaha untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh program-program prioritas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul juga melaksanakan program penunjang atau pendukung dalam rangka mencapai hasil pelayanan terbaik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memiliki tren meningkat setiap tahunnya, laporan keuangan yang disusun tepat waktu, maupun seluruh dokumen perencanaan disusun sesuai dengan dokumen-dokumen yang mendasari penyusunannya.

Pada tahun 2026, diharapkan realisasi capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029.

Adapun proyeksi capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul yang telah tercantum dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terhadap Renstra PD Tahun 2025-2029
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Proyeksi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah					Catatan Analisis
			Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Poin	85.03	85.08	85.13	85.18	85.23	85.03	85.08	85.13	85.18	85.23	
3.	Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul	Rupiah	838.084.626.109	845.627.387.744	854.083.661.621	863.478.581.899	873.840.324.882	838.084.626. 109	845.627.387. 744	854.083.661.621	863.478.581.899	873.840.324.882	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senantiasa bersifat dinamis sesuai dengan perubahan regulasi maupun iklim dan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ada sejumlah 73 jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani. Namun seiring perubahan kebijakan pusat dengan ditiadakannya ijin prinsip, berikut konsekuensinya pada perizinan yang berkesesuaian, maka pada saat ini terdapat 57 jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani. Hingga regulasi terbaru melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada level nasional telah terbit pula kebijakan tentang pelayanan perizinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti. Perubahan yang dinamis atas aplikasi *Online Single Submission (OSS)* yang diperbarui harus pula diikuti dengan cepat dan berkesinambungan. Dasar hukum dari Pemerintah Pusat terus berkembang, seiring terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, berikut rencana Implementasi *Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)* yang harus disikapi dengan penyesuaian di daerah. Kemudahan berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk saat ini.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan sebuah inovasi dan terobosan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik di Kabupaten Gunungkidul. Pengembangan MPP ini menjadi isu penting terutama dalam pemenuhan sarana prasarana, penguatan sistem, SDM,

maupun fasilitas untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik dan terstandar.

Sektor investasi merupakan salah satu program unggulan dari Bupati, promosi dan pengembangan iklim penanaman modal menjadi penting sebagai upaya peningkatan jumlah investasi di Kabupaten Gunungkidul. Demikian pula pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan perundang-undangan yang sinergis dengan keseluruhan tugas dan fungsi lainnya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam mengejawantahkan kinerja terbaik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentu saja tidak terlepas dari masalah dan hambatan yang dihadapi. Secara garis besar beberapa masalah dan hambatan yang dihadapi antara lain :

1. Kompetensi petugas pemberi pelayanan perlu ditingkatkan baik berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku termasuk pemahaman atas implementasi teknis terhadap regulasi yang dinamis;
2. Jumlah sumberdaya yang masih terbatas;
3. Keterbatasan dan permasalahan teknis dalam implementasi *Online Single Submission* sebagaimana kebijakan pemerintah pusat yang terus berkembang dan mengalami penyesuaian;
4. Masih minimnya penataan ruang dan fasilitas sarana dan prasarana sebagai pendukung pelayanan publik diantaranya seperti belum adanya ruang bermain anak, kantin, ruang pengaduan, garasi, penataan tempat parkir, penataan selasar, dan kendaraan untuk mobilisasi pelayanan terutama di Mal Pelayanan Publik;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kinerja ASN;
6. Keterbatasan alokasi anggaran.

Peluang daerah menarik investor untuk bersedia menanamkan modalnya di daerah sangat terbuka. Upaya pertama untuk dapat menjadi daerah tujuan investasi adalah daya tarik daerah bagi investor. Penerapan sistem pelayanan online diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan serta investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong terealisasinya visi Kepala Daerah tahun 2025-2029 yaitu Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban dengan misi Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas

Produksi Pangan Oleh Petani dan Nelayan, Serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil Menengah yang Inklusif dan Kreatif.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik *(good governance)* telah menerapkan mekanisme pembuatan kuitansi pada pelanggan agar pembayaran biaya retribusi perizinan langsung ditunaikan ke Bank BPD DIY dan masuk ke rekening Kasda Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, dampak terhadap program nasional, sistem pelayanan *online* dan digital diharapkan mampu menaikkan apresiasi publik dan penilaian pelayanan publik baik dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia, BPKP, maupun Instansi lainnya.

Berdasarkan kondisi dan isu penting yang dihadapi tersebut, terdapat tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :

a. Semakin banyaknya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.
b. Peluang kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah alur proses perizinan, telah dilakukan peningkatan pelayanan terpadu dengan manajemen perizinan yang terintegrasi secara elektronik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara online terus ditingkatkan. Implementasi pelayanan senantiasa dilakukan dengan penyesuaian dan respon cepat atas dinamika regulasi dan kebijakan dari pusat.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 antara lain :

a. Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berikut implementasinya;
b. Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP);
c. Peningkatan kompetensi petugas pemberi pelayanan;
d. Percepatan regulasi terkait dengan perizinan yang diberikan;

e. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik dan untuk pelaksanaan tugas fungsi menarik investasi;
f. Penyesuaian strategi dalam perumusan dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sebagai konsekuensi dinamika kebijakan tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang telah dicapai oleh Perangkat Daerah, terkait dengan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan pada RKPD. Review terhadap RKPD meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator program kegiatan, tolok ukur kinerja atau target sasaran program kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merencanakan untuk melaksanakan 6 program yang terdiri dari 5 program prioritas didukung 1 program penunjang yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.861.035.665. Pada tahapan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah daerah yang terkait penganggaran serta kemampuan pendanaan maka pagu indikatif semua Perangkat Daerah nantinya dapat mengalami penyesuaian, demikian pula dimungkinkan ada perubahan pada tahapan selanjutnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pencermatan kembali terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan mengikuti arah kebijakan umum Bupati Gunungkidul.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu berkaitan dengan pelayanan perizinan *online* melalui OSS-RBA, penataan selasar dan lahan parkir, pengadaan fasilitas tempat ibadah, penataan ruang arsip, ketersediaan ruang pengaduan masyarakat serta tentunya pengembangan Mal Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung percepatan investasi daerah, pelaksanaan *Investor Gathering* maupun Temu Bisnis dengan para pengusaha berbasis tematik serta kegiatan pameran potensi investasi sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih agar dapat dikemas sedemikian rupa dalam rencana kerja kedepan.

Usulan program dan kegiatan dari stakeholders khususnya pelaksanaan dispensasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah muncul sejak tahun 2018 memerlukan telaah kebijakan yang lebih detail dan strategis, termasuk dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sehingga belum sepenuhnya bisa diakomodir. Berkaitan dengan pemberian Persetujuan Bangunan gedung (PBG) terdapat pula usulan tentang perubahan besaran retribusi yang diberlakukan.

Selanjutnya, usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Mal Pelayanan Publik telah ditindaklanjuti melalui kerjasama dan koordinasi khususnya dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PanRB Republik Indonesia. Proses pengembangan Mal Pelayanan Publik ini masih terus dilaksanakan sejalan dengan Rekomendasi hasil visitasi dari Kementerian terkait dengan tetap mempertimbangkan alokasi anggaran yang ada. Sedangkan untuk usulan Pagu Indikatif Sektoral (PIS), Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon (PIWK) dan Pokok Pikiran (Pokir) tidak ada yang dialokasikan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Rencana Kerja tahun 2026 ini.

Tabel 2.3
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Satuan Harga	Anggaran	Catatan
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
dst.	-	-	-	-	-	-	-

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berbasis risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berikut rencana implementasi OSS-RBA merupakan seperangkat kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam kaitannya mendorong stabilitas perekonomian khususnya dari sektor investasi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan berbagai persiapan dan antisipasi untuk menyikapinya, terutama berkenaan dengan paket kebijakan kemudahan izin berusaha. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menindaklanjuti dengan inisiasi percepatan perumusan regulasi tentang pelimpahan wewenang, pelayanan *online* dan *offline* serta penandatanganan digital. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang dan Tanggungjawab Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah ditetapkan, regulasi ini akan segera direview serta disesuaikan dalam kerangka mewujudkan sinergitas dengan mengikuti dinamika dari Pemerintah Pusat. Sedangkan dengan mulai beroperasinya secara penuh Yogyakarta International Airport (YIA) sejak tahun 2020 lalu serta terus dikembangkannya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) diharapkan mampu mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul melalui peningkatan daya tarik investasi.

Agenda kebijakan nasional yang selaras dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Prioritas pembangunan yang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pembangunan

manusia unggul dengan sasaran meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, tema pembangunan yang diangkat oleh Kabupaten Gunungkidul adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dengan prioritas pembangunan yang didukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Ekonomi melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Investasi dan Pariwisata dengan sasaran daerah yang hendak dicapai adalah meningkatnya nilai investasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 berpedoman pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan termasuk didalamnya kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan daerah yang terdapat pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran Perangkat Daerah, sehingga akan terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar waktu dan antar lembaga.

Tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan yang termuat dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif. Sebagai alat ukur untuk menunjukkan tingkat pencapaian tujuan perlu dirumuskan indikator dan target kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20
		Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul	Realisasi Investasi Kabupaten Gunungkidul	838.084.626.109	845.627.387.744	854.083.661.621	863.478.581.899	873.840.324.882
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	85.03	85.08	85.13	85.18	85.23

Pengaliran tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai kedalam indikator sasaran Perangkat Daerah beserta target kinerjanya pada tahun 2026 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul

No.	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan	Target Akhir Kinerja Tujuan PD Tahun 2030
1	TUJUAN : Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	1.20 %

Selain tiga sasaran perangkat daerah yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran daerah, terdapat satu tujuan perangkat daerah lainnya yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dalam tabel 3.2 yaitu Meningkatnya Investasi berbasis potensi unggulan daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan suatu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terukur untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan dalam jangka waktu tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang didukung oleh beberapa sub kegiatan dibawahnya sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih detail dan terukur. Program Kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 mengacu pada RKPD tahun 2026. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain adalah :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Pencapaian Prioritas dan Sasaran Daerah
3. Prioritas Pembangunan
4. Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)*
5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
7. Sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu tahun 2026 terdiri dari 5 program prioritas dan 1 program penunjang yang dijabarkan dalam 13 kegiatan dengan 38 sub kegiatan yang telah disesuaikan sebagaimana reviu Rencana Strategis dan Penyandingan sesuai dengan Kepmendagri nomor 050/5889 tahun 2021. Program dan Kegiatan tersebut dibiayai dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan total perkiraan anggaran belanja sebesar Rp. 3.861.035.665. Rekapitulasi program kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran PD	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penanaman Modal / Investasi; Pelayanan Perizinan	Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	85.03	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	285.912.000	225.000.000	DPMPTSP
								Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	48.757.000	40.000.000	DPMPTSP

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran PD	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	126.015.000	275.000.000	DPMPTSP
			Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul	Realisasi Investasi di Kabupaten Gunungkidul	838.084.626.109	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	118.475.000	190.000.000	DPMPTSP
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	137.156.000	110.000.000	DPMPTSP

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	Perangkat Daerah
				Indikator Sasaran PD	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6.807.500	10.000.000	DPMPTSP
								Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	201.770.000	327.700.000	DPMPTSP
								Pengawasan Penanaman Modal	65.310.000	67.566.950	DPMPTSP

Kelima program prioritas yang direncanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 didukung oleh satu program dan Sembilan kegiatan penunjang tugas dan fungsi sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Program dan Kegiatan Penunjang Tugas dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul

No.	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Maju (2027)	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.870.833.165	4.612.593.050	DPMPTSP
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.032.000	84.500.000	DPMPTSP
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.864.224.665	2.697.124.600	DPMPTSP
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000	650.000	DPMPTSP
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.150.000	1.500.000	DPMPTSP
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.561.700	66.500.000	DPMPTSP
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.514.000	1.058.242.500	DPMPTSP
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.450.800	462.495.950	DPMPTSP
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.880.000	241.000.000	DPMPTSP

Rumusan rencana program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dan Perkiraan Maju tahun 2027 secara terperinci dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	82,61 Poin	2.870.833.165	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		82,62 Poin	4.612.593.050
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul		54.032.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			84.500.000
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	3 Dokumen	45.237.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	42.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	1.330.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	29.250.000
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	1.070.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	1.250.000
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	1.505.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	2.000.000
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	1.505.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	2.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul	17 Laporan	1.605.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17 Laporan	1.750.000
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	4 Laporan	780.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	750.000
2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	1 Berita Acara	1.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Berita Acara	5.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul		1.864.244.665	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.697.124.600
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	812 Orang/bulan	1.826.759.665	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		812 Orang/bulan	2.658.624.600
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Gunungkidul	1 Laporan	2.180.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	3.000.000
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	13 Laporan	35.305.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Laporan	35.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul		1.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			750.000
2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	1.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	750.000
2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	Kab. Gunungkidul		1.150.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.500.000
2.18.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Gunungkidul	12 Dokumen	1.150.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	1.500.000
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul		64.561.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			66.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gunungkidul	1 Paket	14.775.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	18.500.000
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	45.786.700	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	42.000.000
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul	1 Orang	4.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Orang	6.000.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum	Kab. Gunungkidul		361.514.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.058.242.500
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Gunungkidul	1 Paket	7.530.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Paket	56.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Gunungkidul	2 Paket	229.887.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	660.000.000
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Gunungkidul	2 Paket	16.638.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	17.700.000
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kab. Gunungkidul	365 Dokumen	1.080.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		365 Dokumen	3.600.000
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	4 Laporan	3.750.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	8.000.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul	24 Laporan	102.104.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Laporan	311.692.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	525.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	750.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul		403.450.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			462.975.950
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Gunungkidul	72 Laporan	262.780.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		72 Laporan	317.975.950
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Gunungkidul	14 Laporan	140.668.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Laporan	145.000.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul		120.880.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			241.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Gunungkidul	180 Unit	87.700.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		180 Unit	135.000.000
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara	Kab. Gunungkidul	10 Unit	600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Unit	6.000.000
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul	32 Unit	10.200.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		32 Unit	17.500.000
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	1 Unit	16.380.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	65.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	20 Unit	6.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20 Unit	17.500.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peta Potensi Investasi Daerah Kabupaten yang Tersusun	Kab. Gunungkidul	100 Persen	118.475.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Persen	190.000.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen Pengembangan Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul		118.475.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			190.000.000
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	3 Dokumen	118.475.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	190.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Kab. Gunungkidul	10 Persen	137.156.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Persen	110.000.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal Daerah terealisasi	Kab. Gunungkidul		137.156.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.000.000
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	3 Dokumen	137.156.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	110.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Perizinan Sesuai Ketentuan	Kab. Gunungkidul	100 Persen	334.669.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Persen	265.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang diterbitkan	Kab. Gunungkidul		334.669.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			265.000.000
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Gunungkidul	2250 Pelaku Usaha	285.912.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2250 Pelaku Usaha	225.000.000
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Gunungkidul	50 Pelaku Usaha	48.757.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Pelaku Usaha	40.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Kab. Gunungkidul	100 Persen	273.887.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Persen	405.266.950
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha yang terfasilitasi Perizinan dan Pelaporan LKPM	Kab. Gunungkidul		273.887.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			405.266.950
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Gunungkidul	15 Kegiatan Usaha	6.807.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15 Kegiatan Usaha	10.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Gunungkidul	860 Pelaku Usaha	201.770.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		860 Pelaku Usaha	327.700.000
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha, Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Gunungkidul	30 Kegiatan Usaha	65.310.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Kegiatan Usaha	67.566.950

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Kab. Gunungkidul	100 Persen	126.015.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100 Persen	275.000.000
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Database Perizinan yang terkelola dengan baik	Kab. Gunungkidul		126.015.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			275.000.000
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Gunungkidul	2250 Dokumen	126.015.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2250 Dokumen	275.000.000
					3.861.035.665				5.857.860.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk kurun waktu perencanaan satu tahun kedepan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 disusun dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki. Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menjadi bahan untuk proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2026.

Pada bagian akhir dari penutup Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 mencakup tiga pokok bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

   Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul telah dan akan selalu melibatkan para *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholders* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang hingga Forum Gabungan Perangkat Daerah ditingkat Kabupaten. Dalam proses penyusunannya, Rencana Kerja ini juga memperhatikan keselarasan dan sinergitas dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Disamping itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga selalu mengadakan evaluasi terhadap hasil kinerja selama ini untuk memberikan hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

   Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan adalah sebuah kunci sukses pembangunan daerah. Artinya, kualitas perencanaan dapat mendukung keberhasilan serta kelancaran

pelaksanaan pembangunan daerah dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen, konsistensi dan integritas yang tinggi serta menjadi acuan dalam proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, semangat, kejujuran, dan disiplin dari para pelaku pembangunan *(stakeholders)* yang harus senantiasa dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang, dengan memanfaatkan dan mengelola seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin dan memastikan agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen Pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan. Adanya instrument pengendalian tersebut telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program kegiatan tersebut oleh masing-masing pelaksana teknis kegiatan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Pada tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merencanakan akan melaksanakan 5 (lima) program prioritas dengan 1 (satu) program penunjang. Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan mampu digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan program kegiatan serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Apabila didalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahun 2026 terdapat keterbatasan dalam hal alokasi anggaran, maka program kegiatan yang akan disusun dalam RKA didasarkan pada pertimbangan skala prioritas. Sedangkan untuk program kegiatan yang tidak bisa terakomodir ditahun 2026, akan dianggarkan ditahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 merupakan arah kebijakan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul ditahun 2026. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing pihak dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses pembangunan daerah. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ttd

AGUNG DANARTA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD memuat kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan Renstra

PD. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Dokumen Renja PD selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pelayanan masyarakat tahun 2026. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam Dokumen Renja PD akan tercermin pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD tahun anggaran 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2026 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomoor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomr 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Surat Edaran Bupati Gunungkidul 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sebagai acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 sehingga akan tercapai target yang sudah ditetapkan.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah untuk:

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiran maju yang disusun dalam rancangan awal renja dengan rentra perangkat daerah.
4. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

5. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Substansi pada bagian ini memuat tentang kajian/reviu terhadap hasil Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2/Tahun 2023) dan perkiraan capaian target tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebesar Rp. 4.261.714.434,00 yang dijabarkan dalam 5 program, 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami pergeseran/penambahan anggaran yaitu antara lain pergeseran/ tambahan tunjangan hari raya untuk THL, penambahan BPJS untuk THL, pergeseran insentif pendapatan, tambahan tagihan air dan rehabilitasi talud TPI Baron sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan mengelola anggaran sebesar Rp. 4.555.849.434,00

Dalam perubahan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 untuk mendukung program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan penyesuaian penambahan maupun pengurangan target kinerja maupun pagu indikatif untuk menunjang penyelenggaran pelayanan.Adapun penyesuaian pagu antara lain digunakan untuk Rehabilitasi mesin pabrik es, rehabilitasi 7 TPI, pengadaan laptop, televisi, Gorden, AC, tambah daya Posikandu dan pemasangan teralis Posikandu, sedangkan untuk pengurangan pagu dari sisa perhitungan listrik,telepon dan pendampingan Peraturan daerah yang tidak dilaksanakan. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ditetapkan dengan Nomor DPPA/A.6/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 23 Agustus 2024, memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 4.734.191.790,00. Setelah Perubahan

Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat tambahan pagu Gaji ASN sebesar Rp. 7.810.000,00 dan memperoleh tambahan pagu anggaran sebesar Rp. 98.851.037,00 yang berasal dari Dana Insentif Fiskal untuk rehabilitasi mesin Pabrik Es, sehingga pada TA 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan mengelola anggaran sebesar Rp. 4.840.752.827,00 terealisasi sebesar Rp. 4.780.762.949,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 59.989.878,00 atau presentase capaian 98,76 %

Realisasi capaian program dan faktor-faktor penyebabnya sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 4 program yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan yaitu:
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian 100 % terealisasi 98,26 %
    2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan target capaian 100 % terealisasi 99,51%
    3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan target capaian 100 % terealisasi 99,74%
    4. Program Pengolahan dan Pemasaran Perikanan dengan target capaian 100 % terealisasi 99,97%
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, berdasarkan hasil evaluasi Renja pada Triwulan IV Tahun 2024 terdapat 1 Program yang memenuhi target kinerja dan hasil yaitu Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan capaian 100 %
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan, pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah:
    1. Selisih pagu anggaran dan nilai kontrak pengadaan barang/jasa
    2. Pembayaran honor THL sesuai jumlah hari masuk kerja
    3. Insentif PAD yang tidak bisa dibayarkan karena pendapatan tidak bisa memenuhi target.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

Dampak yang mungkin ditimbulkan akibat ketidaktercapaian target kinerja antara lain:

a) Tidak tercapainya indikator tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan mengakibatkan turunnya kinerja OPD
b) Tidak tercapainya target program dan kegiatan

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain :
    1. Meningkatkan frekuensi koordinasi antara PA, PPK dan PPTK
    2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
    3. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala
    4. Mengoptimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah

Gambaran evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/ Kegiatan (*Output dan Outcome*)/Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 = (5+7+9)		11=(10/4)
3.25.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100.00	%	100%
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersusun	84	Jenis	15	Jenis	7	Jenis	7	Jenis	100%	17	Jenis	39	Jenis	46%
		Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	2	Dokumen	3	4	4	Dokumen	-	4	Dokumen	6	Dokumen	100%
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	NA	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	NA	Dokumen	3	Dokumen	NA	Dokumen	-	3	Dokumen	3	Dokumen	100%
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	NA	Dokumen	2	Dokumen	NA	Dokumen	-	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	Laporan	NA	Dokumen	17	Dokumen	17	Dokumen	100%	17	Laporan	17	Laporan	100%
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	NA	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100%	5	Laporan	5	Laporan	100%
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersusun	20	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	100%	4	Jenis	12	Jenis	60%
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518	Orang/Bulan	NA	Orang/Bulan	448	Orang/Bulan	448	Orang/Bulan	100%	504	Orang/Bulan	504	Orang/Bulan	97%
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	NA	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	1	Laporan	100%
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	Laporan	NA	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	100%	13	Laporan	13	Laporan	100%
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi (ASN)	37	ASN	31	ASN	32	ASN	32	ASN	100%	36	ASN	34	ASN	92%
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
3.25.01.2.05.03	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	-	1	Paket	1	Paket	100%
3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	NA	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	6	Dokumen	6	Dokumen	100%
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	NA	Orang	7	Orang	NA	Orang	-	7	Orang	7	Orang	100%
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	35	Layanan	6	Layanan	7	Layanan	7	Layanan	100%	7	Layanan	7	Layanan	20%
		Persentase Administrasi Umum Terlayani	100	Persen	100	Persen	100	Persen	93.76	Persen	94%	100	Persen	97.92	Persen	98%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/ Kegiatan (*Output dan Outcome*)/Sub Kegiatan (*Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 = (5+7+9)		11=(10/4)
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	-	12	Paket	12	Paket	100%
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	Paket	NA	Paket	17	Paket	NA	Paket	-	17	Paket	17	Paket	100%
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	NA	Paket	12	Paket	NA	Paket	-	12	Paket	12	Paket	100%
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	NA	Paket	12	Paket	NA	Paket	-	12	Paket	12	Paket	100%
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365	Dokumen	NA	Dokumen	365	Dokumen	365	Dokumen	100%	365	Dokumen	365	Dokumen	100%
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	NA	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	4	Laporan	100%
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	NA	Laporan	22	Laporan	22	Laporan	-	24	Laporan	24	Laporan	100%
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia	14	Layanan	NA	Layanan	2	Layanan	2	Layanan	100%	3	Layanan	5	Layanan	36%
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	300%
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	NA	Unit	2	Unit	0	Unit	0%	2	Unit	2	Unit	100%
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	7	Unit	7	Unit	100%
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	NA	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	2	Unit	2	Unit	67%
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	15	Layanan	2	Layanan	3	Layanan	3	Layanan	100%	3	Layanan	8	Layanan	53%
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	160.48	Persen	160%	100	Persen	120.16	Persen	120%
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	4	Laporan	4	Laporan	25%
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300	Laporan	NA	Laporan	300	Laporan	300	Laporan	100%	300	Laporan	300	Laporan	100%
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	NA	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan	25%
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	20	Layanan	4	Layanan	4	Layanan	4	Layanan	100%	4	Layanan	12	Layanan	60%
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	96.43	Persen	96%	100	Persen	98.81	Persen	99%
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	716	Unit	NA	Unit	716	Unit	716	Unit	100%	716	Unit	716	Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/ Kegiatan (*Output dan Outcome*)/Sub Kegiatan (*Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 = (5+7+9)		11=(10/4)
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	Unit	NA	Unit	26	Unit	26	Unit	100%	27	Unit	27	Unit	100%
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	-	4	Unit	4	Unit	100%
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44	Unit	NA	Unit	10	Unit	10	Unit	100%	24	Unit	24	Unit	55%
3.25.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	3	Jenis	3	Jenis	NA	Jenis	3	Jenis	-	NA	Jenis	6	Jenis	200%
		Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah meningkat	86.2	Skor	80.37	Skor	NA	Skor	81.17	Skor	-	NA	Skor	161.54	Skor	187%
3.25.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM OPD (DKP, UPT BBI, UPT TPI)	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	#VALUE!	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
3.25.03	PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai pendapatan nelayan	34,576,493	Rupiah	25,240,357	Rupiah	32,684,514	Rupiah	32,744,828	Rupiah	1	34,085,243	Rupiah	30,690,143	Rupiah	89%
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB yang dibina dan terfasilitasi	96	Kelompok	43	Kelompok	12	Kelompok	5	Kelompok	42%	26	Kelompok	74	Kelompok	77%
		Persentase KUB yang terfasilitasi	223	Persen	NA	Persen	28	Persen	41.67	Persen	149%	60.47	Persen	102	Persen	46%
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	360	Orang	NA	Orang	310	Orang	310	Orang	-	360	Orang	360	Orang	100%
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang beroperasi	8	TPI	8	TPI	8	TPI	8	TPI	100%	8	TPI	8	TPI	100%
		Persentase TPI yang beroperasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah sosialisasi dan implementasi regulasi terkait pengelolaan tempat pelelangan ikan	NA	Angkatan	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	NA	Kali	-
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	15	Layanan	12	Bulan	15	Bulan	15	Bulan	100%	14	Bulan	14	Bulan	93%
3.25.04	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai pendapatan pembudidaya ikan	4,558,755.32	Rupiah	5,279,834.96	Rupiah	4,235,295.87	Rupiah	5,424,234.00	Rupiah	128%	4,474,333.93	Rupiah	5,059,467.63	Rupiah	111%
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang dibina dan terfasilitasi	352	Kelompok	72	Kelompok	60	Kelompok	20	Kelompok	33%	89	Kelompok	181	Kelompok	51%
		Persentase pokdakan yang terfasilitasi	79.46	Persen	NA	Persen	13.54	Persen	33.00	Persen	244%	20.09	Persen	53.09	Persen	67%
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	NA	Angkatan	8	Angkatan	NA	Angkatan	NA	Angkatan	-	NA	Angkatan	8	Angkatan	-
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	104	Kelompok	NA	Kelompok	74	Kelompok	74	Kelompok	-	89	Kelompok	89	Kelompok	86%
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat rekomendasi/tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil	25	Rekomendasi	NA	Rekomendasi	NA	Rekomendasi	-	Rekomendasi		NA	Rekomendasi	60	Rekomendasi	240%
		Persentase pokdakan yang telah mendapatkan surat rekomendasi/ tanda daftar	2.26	Persen	NA	Persen	NA	Persen	-	Persen	-	NA	Persen	NA	Persen	-
3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil	NA	Angkatan	NA	Angkatan	NA	Angkatan	NA	Angkatan	NA	NA	Angkatan	NA	Angkatan	#VALUE!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/ Kegiatan (*Output dan Outcome*)/Sub Kegiatan (*Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 = (5+7+9)		11=(10/4)
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarpras pembudidayaan ikan yang difasilitasi	8	Jenis	3	Jenis	8	Jenis	3	Jenis	38%	8	Jenis	14	Jenis	175%
		Jumlah produksi perikanan budidaya	11,426	Ton	12,182	Ton	10,579	Ton	12,348	Ton	117%	10,579	Ton	11,703	Ton	102%
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16	Unit	NA	Unit	16	Unit	16	Unit	100%	16	Unit	16	Unit	100%
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43	Unit	NA	Unit	33	Unit	33	Unit	100%	43	Unit	43	Unit	100%
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	6	Dokumen	NA	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	6	Dokumen	6	Dokumen	100%
3.25.05	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah perairan umum daratan yang diawasi	60	Lokasi	NA	Lokasi	12	Lokasi	12	Lokasi	100%	12	Lokasi	24	Lokasi	40%
		Persentase perairan umum daratan yang diawasi	16.30	Persen	NA	Persen	3.26	Persen	3.26	Persen	100%	3.26	Persen	6.52	Persen	40%
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4	Dokumen	NA	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	-	4	Dokumen	4	Dokumen	100%
3.25.06	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan	29.50	Kilogram/ Kapita	27.69	Kilogram/ Kapita	27.50	Kilogram/ Kapita	29	Kilogram / Kapita	106%	28.00	Kilogram / Kapita	27.69	Kilogram / Kapita	94%
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklahsar yang dibina dan terfasilitasi	74	Kelompok	8	Kelompok	11	Kelompok	29	Kelompok	264%	12	Kelompok	37	Kelompok	50%
		Persentase poklahsar terfasilitasi	113.85	Persen	NA	Persen	16.92	Persen	44.62	Persen	264%	18.46	Persen	63.08	Persen	55%
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	18	Unit Usaha	NA	Unit Usaha	15	Unit Usaha	15	Unit Usaha	100%	18	Unit Usaha	18	Unit Usaha	100%
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumah layanan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia	49	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	6	Jenis	300%	12	Jenis	8	Jenis	16%
		Angka ketersediaan ikan	30.27	Kilogram/ Kapita	28.78	Kilogram/ Kapita	28.27	Kilogram/ Kapita	30.78	Kilogram / Kapita	109%	28.88	Kilogram / Kapita	29.48	Kilogram / Kapita	97%
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	495.009	Ton	NA	Ton	382.441	Ton	382.441	Ton	100%	803.57	Ton	803.57	Ton	162%
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	225	Pelaku Usaha	NA	Pelaku Usaha	NA	Pelaku Usaha	NA	Pelaku Usaha	-	235	Pelaku Usaha	235	Pelaku Usaha	104%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa jenis layanan kepada masyarakat, yaitu:

a. Pelayanan Pemberian Obat/Vaksin Ikan.
b. Pelayanan Penjualan Es Balok.
c. Pelayanan Konsultasi dan Data Perikanan.
d. Pelayanan Penjualan Benih Ikan di UPT BBI Mina Kencana.
e. Pelayanan Pelelangan Ikan di UPT TPI Arghamina.

Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2026, yaitu :

a. Kenaikan harga pakan ikan.
b. Cuaca/iklim/musim ikan.
c. Mesin Pabrik Es yang sudah tua sering terjadi kerusakan
d. Keterbatasan sarana prasarana dan SDM

Upaya-upaya yang dapat dilaksanakan dalam hal pengambilan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor yang dalam rangka diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2026, yaitu:

a. Pengoptimalan operasionalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
b. Pemberian pelatihan/bantuan sarana prasarana kepada masyarakat untuk mempercepat pemulihan ekonomi;
c. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan/sub kegiatan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY serta Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan kegiatan pelayanan dalam arti tugas dan fungsi Dinas itu sendiri yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
        f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
        c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD
    1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
        a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
        d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
        f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
        g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        h. Pengadaan Mebel
    1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
        b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
        c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
        d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
    2.1 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
        a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
    2.2 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
        a. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
    3.1 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
        a. Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
    3.2 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
        a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
        b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
        c. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
    4.1 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
        a. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
    5.1 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
        a. Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
    5.2 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
        a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
        b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil

Sedangkan target dan capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	IKU										
	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan										
1	Nilai pendapatan perikanan tangkap	Rp/ Tahun	32,684,514	33,455,006	34,085,243	34,735,243	32,744,828	33,455,006	34,085,243	34,735,243	
2	Nilai pendapatan pembudidaya ikan	Rp/Tahun	4,235,296	4,315,207	4,474,334	4,633,591	4,968,797	4,315,207	4,474,334	4,633,591	
B	IKK *OUTCOME*										
1.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Kg/ Tahun	14,489,536	14,960,113	15,319,671	15,679,229	16,841,139	14,960,113	15,319,671	15,679,229	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai peran strategis dalam pemenuhan prioritas ketahanan pangan. Isu-isu strategis pembangunan lingkup kelautan dan perikanan tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan;
2. Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
3. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia lingkup kelautan dan perikanan;
4. Peningkatan kualitas kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
5. Peningkatan ketersediaan sarana produksi perikanan;
6. Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
7. Peningkatan akses permodalan lingkup kelautan dan perikanan;
8. Peningkatan akses pemasaran hasil olahan perikanan;
9. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;
10. Pengembangan pola kemitraan;
11. Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan; dan
12. Pelestarian potensi sumberdaya hayati kelautan dan perikanan yang terkendali.

2.4. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

Secara umum, masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, atau tidak ada hambatan dan kendala, akan tetapi dalam pelaksanaan pelayanan beberapa hambatan dan kendala yang dihadapai diantaranya:

1. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang Kelautan dan Perikanan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
2. Skala usaha perikanan pada umumnya masih berskala kecil dan bersifat tradisional;
3. Harga pakan yang terkadang masih cukup tinggi;
4. Persoalan di TPI karena kurangnya SDM sehingga di setiap TPI tidak ada petugas dari Dinas yang mengawasi setiap hari aktivitas TPI.
5. Kondisi fasilitas sarana prasarana Balai Benih Ikan banyak yang rusak, baik bangunan utama seperti kolam dan saluran maupun bangunan penunjang, selain itu juga kurangnya ketersediaan air saat musim kemarau;

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Pembangunan berkelanjutan

Beberapa hambatan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan dinas terkait dengan pencapaian target kinerja Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Bupati dan ditindaklanjuti dengan Indikator Kinerja Program Dinas Kelautan dan Perikanan.

2.5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan perikanan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kebupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 serta Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul 2021-2024. Kebijakan pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis perikanan dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis perikanan, yaitu : mengembangkan kawasan peruntukan perikanan sebagai kawasan produksi ikan yang higienis dan unggul dan pengembangan minapolitan, optimalisasi perikanan tangkap didukung dengan peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan yang dapat mendorong swasembada ikan dan industrialisasi perikanan.

Tantangan pelayanan urusan kelautan dan perikanan yang harus dihadapi antara lain:

- Harga ikan yang tidak stabil menyulitkan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
- Kenaikan suhu laut dan perubahan pola cuaca mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan
- Pencemaran air laut merusak habitat dan mengancam biota laut.
- Nelayan kecil seringkali kesulitan mengakses modal, teknologi, dan pasar.
- Banyak nelayan hidup dalam kemiskinan, terutama di daerah pesisir
- Kecelakaan kapal perikanan seringkali terjadi, menyebabkan kerugian jiwa dan materi.
- Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan stres pada ikan, penyakit, bahkan kematian

- Kesulitan dalam mendapatkan pakan berkualitas dengan harga terjangkau menjadi kendala bagi pembudidaya
- Penyakit ikan, baik yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit, dapat menyebabkan kerugian besar.
- Pembudidaya seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses modal untuk pengembangan usaha.
- Perubahan iklim dapat mempengaruhi kondisi perairan dan ketersediaan sumber daya ikan.
- Penangkapan ikan ilegal dapat merusak ekosistem perairan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan

Peluang Pelayanan urusan kelautan dan perikanan antara lain :

- Adanya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, program, dan bantuan modal dapat mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan
- Terdapat peluang untuk mengembangkan berbagai jenis produk olahan perikanan, seperti makanan dan camilan berbahan ikan
- Penerapan teknologi dan praktik budidaya yang baik, produksi perikanan dapat ditingkatkan.
- Pengembangan budidaya perikanan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
- Sektor perikanan dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata, seperti wisata pemancingan atau edukasi budidaya ikan
- Pengembangan budidaya laut seperti budidaya rumput laut, kerang-kerangan, dan ikan bernilai tinggi (kakap, kerapu) memiliki potensi besar.
- Pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti produk olahan siap saji, dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha.

Kawasan peruntukan perikanan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 38, yaitu:

a. Rencana penetapan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf d meliputi :
   a. kawasan budi daya air tawar meliputi seluruh kecamatan;
   b. kawasan budi daya perikanan laut di Kecamatan Tepus; dan

c. kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir meliputi Kecamatan Panggang, Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus dan Kecamatan Girisubo.

2. Rencana pengembangan prasarana transportasi perikanan meliputi :
   a. pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
   b. pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI)
3. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Pantai Sadeng Kecamatan Girisubo;
4. Pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
   a. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Gesing, Kecamatan Panggang;
   b. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Ngrenehan, Kecamatan Saptosari;
   c. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Baron, Kecamatan Tanjungsari;
   d. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Ngandong, Kecamatan Tanjungsari;
   e. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Drini, Kecamatan Tanjungsari;
   f. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Sundak, Kecamatan Tepus;\
   g. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Siung, Kecamatan Tepus; dan
   h. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Wediombo, Kecamatan Girisubo.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan ketentuan:

a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan budidaya perikanan;
b. kegiatan yang diizinkan meliputi budidaya perikanan, perikanan organik, penelitian dan wisata; dan
c. pelarangan kegiatan perusakan lingkungan hidup dalam budi daya perikanan yang tidak ramah lingkungan.

Implementasi kebijakan dan strategi pengembangan sektor perikanan tidak dapat lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perangkat daerah. Sarana prasarana utama dan pendukung pelayanan publik yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu :

1. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Kapanewon Wonosari.
2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sejumlah 8 (delapan) unit, meliputi : TPI Higienis Sadeng, TPI Nampu, TPI Siung, TPI Ngandong, TPI Drini, TPI Baron, TPI Ngrenehan, dan TPI Gesing).
3. Balai Benih Ikan (BBI) sejumlah 2 (dua) unit yang berlokasi di Susukan dan Beton, Kapanewon Ponjong.

4. Pabrik es sejumlah 1 (satu) unit yang berlokasi di Siraman, Kapanewon Wonosari.
5. Gedung Pos Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU) di Kapanewon Wonosari.
6. Gedung Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan (P3HP) di Pantai Krakal.
7. Depo Pemasaran Ikan di Kapanewon Ponjong.

Potensi lahan untuk perikanan budidaya darat seluas 37,76 ha dan penangkapan ikan perairan umum (telaga, sungai, bendungan, dll) dengan luas 99,82 ha. Pemanfaatan potensi tersebut terkait erat dengan *stakeholder* sektor perikanan. Pelaku utama sektor perikanan merupakan komponen penting dan strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Gunungkidul. Kelompok pelaku utama perikanan terbagi menjadi 5 (lima), yaitu :

1. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
2. Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN);
3. Kelompok Pengolah Pemasar (POKLAHSAR);
4. Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR); dan
5. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya dan tangkap bertujuan menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Produk hasil perikanan yang berkualitas dipasarkan melalui jaringan pemasaran yang sudah terbentuk ataupun penumbuhan jaringan baru. Perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan kecenderungan jaringan pemasaran konvensional bergeser menjadi jaringan pemasaran secara digital.

Formulasi isu-isu penting yang berupa rekomendasi dan catatan strategis
Isu strategis merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan perikanan yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan;
2. Peningkatan mutu dan keamanan pangan;

3. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia lingkup kelautan dan perikanan;
4. Peningkatan kualitas kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
5. Peningkatan ketersediaan sarana produksi perikanan;
6. Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
7. Peningkatan akses permodalan lingkup kelautan dan perikanan;
8. Peningkatan akses pemasaran hasil olahan perikanan;
9. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;
10. Pengembangan pola kemitraan;
11. Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan; dan
12. Pelestarian potensi sumberdaya hayati kelautan dan perikanan yang terkendali.

2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, *stakeholder* dan pemerintah sendiri. Rancangan RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan RKPD menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan analisis kebutuhan serta melihat isu strategis, tantangan dan hambatan yang muncul, beberapa faktor penentu keberhasilan di tahun 2026 antara lain :

1. Pendampingan, pembinaan, pelatihan dan penyuluhan pada kelompok pelaku usaha perikanan secara intensif.
2. Peremajaan infrastruktur utama produksi benih ikan, produksi es balok, tempat pelelangan ikan dan gedung P3HP.
3. Memberikan bantuan stimulan berupa barang kepada pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan.
4. Meningkatkan kegiatan pelatihan pengolahan hasil perikanan.
5. Meningkatkan kegiatan kampanye makan ikan untuk ibu hamil/balita sebagai upaya penurunan angka *stunting*.

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5,574,150,771	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7,574,150,771	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.50	3,719,042,671	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidul	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.50	3,719,042,671	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		43,879,800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		43,879,800	
			Dokumen Evaluasi Kinerja					Dokumen Evaluasi Kinerja			
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	37,719,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	37,719,500	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,065,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,065,000	
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	490,300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	490,300	
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	810,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	810,000	
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	360,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	360,000	
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	1,935,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	1,935,000	
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1,500,000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,846,311,865	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,846,311,865	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546 Orang/Bulan	2,804,056,765	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	546 Orang/Bulan	2,804,056,765	
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,555,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,555,000	
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	40,700,100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	40,700,100	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Dokumen Administrasi Kepegawaian		84,983,680	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Dokumen Administrasi Kepegawaian		84,983,680	
1)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0 Paket	-	
2)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	69,233,680	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	69,233,680	
3)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	15,750,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	15,750,000	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Luar Daerah	Dokumen Admistrasi Umum		122,968,100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Luar Daerah	Dokumen Admistrasi Umum		122,968,100	
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3,482,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3,482,000	
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50,050,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50,050,000	
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7,188,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7,188,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4,989,100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4,989,100	
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	0 Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	0 Dokumen	-	
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1,500,000	
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Luar DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	55,759,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Luar DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	55,759,000	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		10,773,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		10,773,000	
1)	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10,773,000	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10,773,000	
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
3)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		236,616,226	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		236,616,226	
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	-	
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300 Laporan	235,416,226	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300 Laporan	235,416,226	
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,200,000	
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		373,510,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		373,510,000	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	626 Unit	237,355,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	626 Unit	237,355,000	
2)	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	-	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	-	
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	5,850,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	5,850,000	
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4Unit	37,440,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4Unit	37,440,000	
5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	92,865,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	92,865,000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab. Gunungkidul	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	4527 Ton	819,657,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kab. Gunungkidul	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	4527 Ton	819,657,000	
A	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota		211,196,000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota		211,196,000	
1)	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	360 Orang	211,196,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	360 Orang	211,196,000	
B	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Gunungkidul	Jumlah pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI		608,461,000	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Gunungkidul	Jumlah pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI		608,461,000	
1)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Gunungkidul	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Dokumen		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Gunungkidul	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Dokumen		
2)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	15 Layanan	608,461,000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	15 Layanan	608,461,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Gunungkidul	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	11797.34 Ton	631,467,600	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kab. Gunungkidul	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	11797.34 Ton	631,467,600	
A	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah pemberdayaan pembudi daya ikan kecil		92,704,700	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah pemberdayaan pembudi daya ikan kecil		92,704,700	
1)	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 Kelompok	92,704,700	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 Kelompok	92,704,700	
B	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Gunungkidul	Laporan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		538,762,900	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Gunungkidul	Laporan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		538,762,900	
			Laporan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Laporan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
			Laporan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Laporan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	356,208,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	356,208,000	
2)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	149,554,900	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	149,554,900	
3)	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	6 Dokumen	33,000,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	6 Dokumen	33,000,000	
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Gunungkidul	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	54 persen	32,839,500	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Gunungkidul	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	54 persen	32,839,500	
A	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		32,839,500	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		32,839,500	
1)	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	32,839,500	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	32,839,500	
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kab. Gunungkidul	Angka Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun	9.5 Kg	371,144,000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kab. Gunungkidul	Angka Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun	9.5 Kg	371,144,000	
A	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		23,660,000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		23,660,000	
1)	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	14 Unit Usaha	23,660,000	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	14 Unit Usaha	23,660,000	
B	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Laporan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		347,484,000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Laporan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		347,484,000	
			Laporan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Laporan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500 Ton	239,824,000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500 Ton	239,824,000	
2)	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	107,660,000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	107,660,000	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2,000,000,000	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Persentase Pelaksanaan Program Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 persen	2,000,000,000	
						Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Jumlah Obyek kearifan lokal dan potensi budaya yang dikembangkan		2,000,000,000	
						Pengembangan Lumbung Mataraman	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	2 laporan	500,000,000	
						Pengembangan Budaya Bahari	Kab. Gunungkidul, DIY, luar DIY	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	5 objek	1,500,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan diawali dengan pengumpulan program dan kegiatan dari sekretariat, bidang-bidang teknis, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 2 (dua) UPT, yaitu UPT Balai Benih Ikan (BBI) Mina Kencana dan UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arghamina. Langkah selanjutnya, agar perencanaan lebih sempurna dan dapat menyerap usulan dari bawah serta program dan kegiatan mampu memenuhi kebutuhan, serta bermanfaat bagi masyarakat, diadakan Musrenbang di semua kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pada kegiatan musrenbang para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari masyarakat kapanewon/kalurahan yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah (PD), diberi kesempatan untuk mengusulkan program/kegiatan dalam kamus usulan yang terkait langsung dengan pelayanan PD. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan yang dilaksanakan PD dapat benar-benar tepat sasaran, bermanfaat dan mampu menampung kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, secara organisasi pemangku kepentingan dapat dikategorikan dalam lingkup yang lebih luas, yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan komunitas. Secara perorangan atau kelompok, pemangku kepentingan mencakup aparat pemerintah (lingkup nasional hingga lokal), peneliti, penyuluh, pengawas perikanan, pembudidaya, nelayan, pengepul, pengolah dan pemasar, masyarakat penagwas, petani garam, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu (1) teknokratis; (2) partisipatif; (3) politis; serta (4) *top down* dan *bottom up*. Konsekuensi logis terhadap 4 (empat) pendekatan perencanaan tersebut adalah pentingnya sinergitas dan integritas serta potensi dana yang ada harus diarahkan secara bijak untuk mendanai program pembangunan tersebut.

Musrenbang kapanewon merupakan bentuk nyata dari salah satu pendekatan perencanaan yaitu pendekatan partisipatif. Mekanisme

musrenbang juga dipergunakan sebagai wahana untuk mempertemukan dan mensinergikan beberapa pendekatan perencanaan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*).

Hasil dari usulan yang muncul di musrenbang tersebut dikelompokkan dalam usulan program kegiatan PIWK (Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan) dan PIS (Pagu Indikatif Sektoral). Sebagai langkah penyempurnaan, hasil rekapan dibahas lagi pada Forum Organisasi Perangkat Daerah. Forum ini dilaksanakan untuk dapat mendapat penyempurnaan atas rekapitulasi usulan hasil musrenbang kapanewon sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lebih mengena, sesuai target dan sasaran, serta memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gunungkidul. Dalam forum ini disampaikan rekapitulasi hasil musrenbang, ditanggapi oleh peserta dan kemudian disepakati bersama hasil forum OPD tersebut.

Kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul juga dijadikan sarana untuk menjembatani usulan program/kegiatan tahun 2026. Semua komponen tersebut dikompilasi dan dianalisa kesesuaiannya dengan dokumen rencana strategis serta dokumen RKPD sehingga nantinya rencana program dan kegiatan mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dapat terwujud. Usulan yang sudah disetujui dan memenuhi persyaratan dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
	PIS						
1	Bimbingan Teknis Kaderisasi Nelayan	Kalurahan Girikarto, Wiloso RT 004 RW 004, Girikarto, Panggang, Gunungkidul	Jumlah Bimbingan Teknis Kaderisasi Nelayan	1	3,425,000	3,425,000	Diterima
2	Kampanye Gemar Makan Ikan di PAUD-TK	Padukuhan Bulu, Kalurahan Hargomulyo, Gedangsari	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1	3,675,000	3,675,000	Diterima
3	Kampanye Gemar Makan Ikan di PAUD-TK	PAUD-TK Kalurahan Kedungpoh, gentungan, kedungpoh, Nglipar	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1	3,675,000	3,675,000	Diterima
4	Kampanye Gemar Makan Ikan di PAUD-TK	Kalurahan Giring, Paliyan	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1	3,675,000	3,675,000	Diterima
5	Kampanye Gemar Makan Ikan di PAUD-TK	Grogol, Paliyan Gunungkidul	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1	3,675,000	3,675,000	Diterima
6	Kampanye Gemar Makan Ikan di PAUD-TK	Kalurahan Karangasem Kapanewon Paliyan	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	2	3,675,000	7,350,000	Diterima
7	Kampanye Gemar Makan Ikan di PAUD-TK	Kalurahan Pampang Paliyan	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1	3,675,000	3,675,000	Diterima
8	Kampanye Gemar Makan Ikan di PAUD-TK	Paud Di Kalurahan Karangwuni KB Bakti siwi Saban, TK ABA II Kerdonmiri, TK ABA XVII Saban, TK ABA V Tirisan.	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	4	3,675,000	14,700,000	Diterima
9	Kampanye Gemar Makan Ikan di PAUD-TK	Rejosari Sumberwungu Tepus Gunungkidul PAUD KB AL Husna	Jumlah Kampanye gemar makan ikan di PAUD-TK	1	3,675,000	3,675,000	Diterima
10	Kampanye Gemar Makan Ikan di Posyandu	Padukuhan Suruh, Kalurahan Hargomulyo, Gedangsari	Jumlah Kampanye Gemar Makan Ikan di Posyandu	1	4,475,000	4,475,000	Diterima
11	Kampanye Gemar Makan Ikan di Posyandu	Pondok, kayen, karangasem, sengonkerep, mongkrong dan sidomulyo Sampang, Gedangsari, Gunungkidul	Jumlah Kampanye Gemar Makan Ikan di Posyandu	6	4,475,000	26,850,000	Diterima
12	Kampanye Gemar Makan Ikan di Posyandu	Posyandu 7 dusun seKalurahan Kedungpoh, Nglipar	Jumlah Kampanye Gemar Makan Ikan di Posyandu	7	4,475,000	31,325,000	Diterima
13	Kampanye Gemar Makan Ikan di Posyandu	Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul terdapat 10 posyandu di antara lain sebagai berikut : 1. Posyandu Sari Asih Padukuhan Kerdonmiri, 2. Posyandu Bakti Siwi Padukuhan Saban, 3. Posyandu Lestari Padukuhan Duwet, 4. Posyandu Rahayu Padukuhan Suruh, 5. Posyandu Sejati Padukuhan Karangwuni, 6. Posyandu Mekar Sari Padukuhan Pampang, 7. Posyandu Ngudi Makmur Padukuhan Tirisan, 8. Posyandu Sederhana Padukuhan Sriten, 9. Posyandu Langgeng Padukuhan Ngejring, dan 10. Posyandu Aneka Tunggal Padukuhan Ngerong.	Jumlah Kampanye Gemar Makan Ikan di Posyandu	10	4,475,000	44,750,000	Diterima
14	Kampanye Gemar Makan Ikan di Posyandu	Kalurahan Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	Jumlah Kampanye Gemar Makan Ikan di Posyandu	6	4,475,000	26,850,000	Diterima

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
15	Kampanye Gemar Makan Ikan di Posyandu	DUNGGUBAH II	Jumlah Kampanye Gemar Makan Ikan di Posyandu	1	4,475,000	4,475,000	Diterima
16	Kampanye Gemar Makan Ikan Lansia	kalurahan Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	Jumlah Kampanye Gemar Makan Ikan Lansia	1	4,240,000	4,240,000	Diterima
17	Pelatihan Budidaya Air Tawar	Grogol, Paliyan, Gunungkidul	Jumlah Budidaya Air Tawar	1	15,400,000	15,400,000	Diterima
18	Pelatihan Budidaya Air Tawar	Kalurahan Pampang	Jumlah Budidaya Air Tawar	1	15,400,000	15,400,000	Diterima
19	Pelatihan Budidaya ikan di telaga	Karanggede B, Jerukwudel, Girisubo, Gunungkidul	Jumlah Budidaya ikan di Telaga	1	5,700,000	5,700,000	Diterima
20	Pembinaan Pokdakan	Ngunutkidul, Kelor, Karangmojo, Gunungkidul	Jumlah Pembinaan Pokdakan	1	2,400,000	2,400,000	Diterima
21	Pelatihan Kerajinan Hasil Laut Non Konsumsi	bandung songbanyu girisubo	Jumlah Pelatihan Kerajinan Hasil Laut Non Konsumsi	2	14,425,000	28,850,000	Diterima
22	Pelatihan Kerajinan Hasil Laut Non Konsumsi	Giriwungu, Panggang, Gunungkidul	Jumlah Pelatihan Kerajinan Hasil Laut Non Konsumsi	1	14,425,000	14,425,000	Diterima
23	Pelatihan pengolahan hasil perikanan	Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop Gunungkidul	Jumlah Pelatihan pengolahan hasil perikanan	1	13,475,000	13,475,000	Diterima
24	Pelatihan pengolahan hasil perikanan	Balai Kalurahan Kanigoro	Jumlah Pelatihan pengolahan hasil perikanan	2	13,475,000	26,950,000	Diterima
					JUMLAH	313,090,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul juga menselaraskan dengan arah dan kebijakan Kementerian terkait yang termuat dalam Renstra Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta. Hal ini dilakukan agar apa yang ditetapkan sebagai arah dan kebijakan Kementerian serta Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diselaraskan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, sehingga perwujudan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan D.I. Yogyakarta (DKP DIY) dapat dijabarkan dan dijadikan pedoman oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun tujuan dan sasarannya. Sinkronisasi baik visi maupun misi ini sangat penting agar dalam pelaksanaan program kegiatan KKP dan DKP DIY dapat diakses dan dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul karena sudah tercantum dalam Rencana Kerja Dinas.

Telaahan Renja Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul terhadap kebijakan nasional dilaksanakan secara berjenjang/hierarki selaras dengan pencapaian visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai sub sistem perencanaan pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa seluruh target dan sasaran pencapaiannya harus mendukung sasaran dan target pembangunan nasional serta memiliki sinergitas yang harmonis dalam semua strategi kebijakannya.

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan tahun 2026 dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagai berikut:

a. Visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:

   “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”

   Tema pembangunan kabupaten Gunungkidul dijabarkan dalam program prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

   1. Program Bocah Pintar
   2. Program Warga Sehat
   3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
   4. Program Gunungkidul Berdikari

5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Gayeng-Guyup
7. Program Alam Lestari

b. Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
   1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
   2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
   3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
   4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
   5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa

   Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung Misi ke-dua, yaitu "Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif "

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan Nasional dalam isu strategis Pemerintah pusat dan DIY sebagai berikut :

a. Isu Strategis Nasional
   - Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
   - Kemandirian melalui swasembada pangan, air dan energi.
   - Pengembangan infrastruktur
   - Memperkuat daya saing SDM
   - Hilirisasi dan pengembangan industri berbasis SDA
   - Membangun dari Desa
   - Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata kelola
   - Kehidupan yang harmonis dengan alam, lingkungan dan budaya

b. Isu Strategis Provinsi
   - Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan (wilayah maupun pendapatan).
   - Pengembangan Wilayah Selatan DIY.
   - Perkembangan teknologi informasi.
   - Pemenuhan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif
   - Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
   - Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
   - Penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas leyanan public
   - Penyelesaian destinasi super prioritas Borobudur Yogyakarta-Prambanan
   - Penguatan ketahanan pangan
   - Peestarian dan pengelolaan budaya
   - Penguatan resiliensi dan manajemen bencana, serta pembangunan berkelanjutan
   - Penguatan kapasitas fiscal
   - Pengembangan ekonomi kreatif termasuk ekonomi digital

Tema pembangunan Kebupaten Gunungkidul tahun 2026 adalah:
"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban."
Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pintar;
2. Program Warga Sehat;
3. Program tani Makmur dan UMKM Berdaya;
4. Program Gunungkidul Berdikari;
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi;
6. Program Warga Gayeng dan Guyup;
7. Program Alam Lestari.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan

Rumusan tujuan dan sasaran PD disusun berdasarkan prioritas sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul. Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1.	Meningkatnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menuju kemandirian ekonomi daerah	Nilai Produksi Perikanan	404.135.066.032 (Rupiah)

Tabel 3.2.
Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2026
1.	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan Per Kapita Masyarakat Perikanan	47.490.861 (Rupiah)

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Meningkatnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menuju kemandirian ekonomi daerah	Nilai Produksi Perikanan	404.135.066.032 (Rupiah)
2	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan Per Kapita Masyarakat Perikanan	47.490.861 (Rupiah)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029 yaitu Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Aggaran 2026 mencakup 5 program, 14 Kegiatan, dan 39 Sub kegiatan. Rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan indikator kinerja dan pendanaan disajikan dalam Tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
										DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	**7,574,150,771**	
Tani Makmur dan UMKM Berdaya	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkulitas dan berdaya saing	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan Per Kapita Masyarakat Perikanan	Rp 47,491,086	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5,574,150,771	DKP
					3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,574,150,771	DKP
					3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	819,657,000	DKP
					3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	211,196,000	DKP
					3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	211,196,000	DKP
					3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	608,461,000	DKP
					3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	608,461,000	DKP
					3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	631,467,600	DKP
					3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	92,704,700	DKP
					3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	92,704,700	DKP
					3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	538,762,900	DKP
					3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	356,208,000	DKP
					3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	149,554,900	DKP
					3	25	04	2.04	09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33,000,000	DKP
					3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	32,839,500	DKP
					3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	32,839,500	DKP
					3	25	05	2.01	07	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	32,839,500	DKP
					3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	371,144,000	DKP
					3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	23,660,000	DKP
					3	25	06	2.02	02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	23,660,000	DKP
					3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	347,484,000	DKP
					3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	239,824,000	DKP
					3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	107,660,000	DKP
					3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,719,042,671	DKP
					3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,879,800	DKP
					3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,719,500	DKP
					3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,065,000	DKP
					3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	490,300	DKP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	810,000	DKP
					3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	360,000	DKP
					3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,935,000	DKP
					3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,500,000	DKP
					3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,846,311,865.44	DKP
					3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,804,056,765.44	DKP
					3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,555,000	DKP
					3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	40,700,100	DKP
					3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84,983,680	DKP
					3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	DKP
					3	25	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	69,233,680	DKP
					3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,750,000	DKP
					3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	122,968,100	DKP
					3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,482,000	DKP
					3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,050,000	DKP
					3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,188,000	DKP
					3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4,989,100	DKP
					3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	DKP
					3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,500,000	DKP
					3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55,759,000	DKP
					3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10,773,000	DKP
					3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	10,773,000	DKP
					3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	DKP
					3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	DKP
					3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236,616,226	DKP
					3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	DKP
					3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235,416,226	DKP
					3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,200,000	DKP
					3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373,510,000	DKP
					3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237,355,000	DKP
					3	25	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	-	
					3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,850,000	DKP
					3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37,440,000	DKP
					3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92,865,000	DKP
					2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,000,000,000	
					2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2,000,000,000	
					2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2,000,000,000	
					2	22	08.5	06		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	2,000,000,000	
					2	22	08	06	01	Pengembangan Lumbung Mataraman	500,000,000	
					2	22	08	06	05	Pengembangan Budaya Bahari	1,500,000,000	

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5,574,150,771				6,247,156,906.79
3.25.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		82,50 Nilai	3,719,042,671				3,265,913,906.79
3.25.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			43,879,800				46,323,000
3.25.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	3 Dokumen	37,719,500	DAU		4 Dokumen	38,495,000
3.25.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	1,065,000	DAU		1 dok	1,550,000
3.25.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	490,300	DAU		1 dok	850,000
3.25.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	3 Dokumen	810,000	DAU		2 dokumen	1,810,000
3.25.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	360,000	DAU		2 dokumen	700,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul	17 Laporan	1,935,000	DAU		17 laporan	1,040,000
3.25.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	5 Laporan	1,500,000	DAU		8 Laporan	1,878,000
3.25.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,846,311,865				2,542,415,907
3.25.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	546 Orang/Bulan	2,804,056,765	DAU		546	2,498,901,607
3.25.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	1 Laporan	1,555,000	DAU		1 lap	1,705,000
3.25.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	13 Laporan	40,700,100	DAU		13 laporan	41,809,300
3.25.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			84,983,680				60,000,000
3.25.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	6 Dokumen	69,233,680	DAU		6 dokumen	43,500,000
3.25.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul	60 Orang	15,750,000	DAU		4 orang	16,500,000
3.25.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Admistrasi Umum Perangkat Daerah			122,968,100				108,000,000
3.25.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul	12 Paket	3,482,000	DAU		12 paket	3,750,000
3.25.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul	13 Paket	50,050,000	DAU		15 paket	35,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul	12 Paket	7,188,000	DAU		12 paket	4,250,000
3.25.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul	12 Paket	4,989,100	DAU		12 paket	5,000,000
3.25.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	4 Laporan	1,500,000	DAU		4 laporan	2,000,000
3.25.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Luar daerah	17 Laporan	55,759,000	DAU		16 lap	58,000,000
3.25.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10,773,000				14,100,000
3.25.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunungkidul	1 Unit	10,773,000	DAU		2 Unit	14,100,000
3.25.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			236,616,226				237,300,000
3.25.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul	300 Laporan	235,416,226	DAU		300 laporan	236,100,000
3.25.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul	12 Laporan	1,200,000	DAU		12 laporan	1,200,000
3.25.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			373,510,000				257,775,000
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul	626 Unit	237,355,000	DAU		704 unit	209,725,000
3.25.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul	19 Unit	5,850,000	DAU		28 unit	5,850,000
3.25.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	4 Unit	37,440,000	DAU		5 unit	40,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul	10 Unit	92,865,000	DAU		6 unit	2,200,000
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		4527 Ton	819,657,000				305,450,000
3.25.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota			211,196,000				64,200,000
3.25.03.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Gunungkidul	360 Orang	211,196,000	DAU			64,200,000
3.25.03.2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI			608,461,000				241,250,000
3.25.03.2.03.02.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Gunungkidul	15 Layanan	608,461,000	DAU		15 layanan	241,250,000
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		11797.34 Ton	631,467,600				360,383,000
3.25.04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	pemberdayaan pembudi daya ikan kecil			92,704,700				63,300,000
3.25.04.2.02.04.	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul	15 Kelompok	92,704,700	DAU		33 kelompok	63,300,000
3.25.04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Laporan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			538,762,900				297,083,000
		Laporan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Laporan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.04.2.04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	16 Unit	356,208,000	DAU		15 unit	153,883,000
3.25.04.2.04.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	4 Unit	149,554,900	DAU		8 unit	105,200,000
3.25.04.2.04.04.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Kab. Gunungkidul	6 Dokumen	33,000,000	DAU		6 dokumen	38,000,000
3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		54 Persen	32,839,500				34,800,000
3.25.05.2.01.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat DiusahakanDalam Kabupaten/Kota			32,839,500				34,800,000
3.25.05.2.01.07	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul	10 Pelaku Usaha	32,839,500	DAU		4 pelaku usaha	34,800,000
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun		9.5 Kg	371,144,000				280,610,000
3.25.06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			23,660,000				29,810,000
3.25.06.2.02.02	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Gunungkidul	14 Unit Usaha	23,660,000	DAU		18 unit usaha	29,810,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			347,484,000				250,800,000
		Laporan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
3.25.06.2.03.01.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	500 Ton	239,824,000	DAU		495,009 Ton	160,400,000
3.25.06.2.03.02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Gunungkidul	20 Pelaku Usaha	107,660,000	DAU		25 Pelaku Usaha	90,400,000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,000,000,000				2,000,000,000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2,000,000,000				2,000,000,000
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAANYOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pelaksanaan Program Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100 persen	2,000,000,000				2,000,000,000
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Obyek kearifan lokal dan potensi budaya yang dikembangkan			2,000,000,000				2,000,000,000
2.22.08.5.06.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Kab. Gunungkidul	2 laporan	500,000,000	Danais		2 laporan	500,000,000
2.22.08.5.06.05	Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Kab. Gunungkidul	5 objek	1,500,000,000	Danais		8 obyek	1,500,000,000
Total					7,574,150,771				6,247,156,907

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan (PD) Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Daerah. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Renja Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 mencakup tiga bahasan antara lain catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder*s atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholders* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders)* yang tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat

kelautan dan perikanan pada khususnya. Untuk menjamin agar program/kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan. Acuan yang dipakai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan atau Kegiatan Pembangunan.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing subbag, seksi dan UPT. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan maka tingkat capaian kinerja tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

ttd

M. JOHAN WIJAYANTO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

BAB I

1. Pendahuluan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tahun 2026 merupakan tahun kelima dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 sehingga dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja PD) Tahun 2026 harus berpedoman pada visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Renja Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 merupakan penjabaran rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat

Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul menyusun dokumen Renja untuk mewujudkan formulasi perencanaan pembangunan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan.

1.1 Latar Belakang

Proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*Stake holder*) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2026 sebagai bahan evaluasi kinerja.

Garis besar proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kab. Gunungkidul adalah :

1) Tahap Persiapan
   Kegiatan penyusunan rancangan Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2026 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen
   Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, reviu RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda.
3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja
   Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian disahkan oleh Bupati melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

a. Keterkaitan Renja dengan Renstra

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul berpedoman kepada Renstra Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD dan berkoordinasi dengan Bappeda.

b. Keterkaitan Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisaata Kabupaten Gunungkidul memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BPK, BPKP dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Sura Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dimaksudkan untuk merumuskan dokumen penjabaran perencanaan yang memuat rencana program dan kegiatan pembangunan daerah bidang pariwisata selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah :

a. Sebagai pedoman dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta visi dan misi Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Sebagai pedoman tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.
c. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.
d. Sebagai pedoman penilaian Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap pelaksanaan kinerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga tugas pokok dan fungsinya Tahun 2026.

1.4 Sistematis Penulisan

Penyajian Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul berpedoman dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata
2.4 Review Terhadap RKPD
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap capaian kinerja Tahun 2024 (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2025), mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapain target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Sehingga pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

2.1.1 Realisasi program dan kegiatan tahun 2024.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Perangkat Daerah Nomor No DPPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/ 001/2024 pagu anggaran menjadi Rp. 16.696.802.282 dengan rincian Anggaran Belanja sebagai berikut :

Belanja Operasional : Rp. 11.176.685.612
Belanja Modal : Rp. 5.520.116.670

Adapun Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV Tahun anggaran 2024 sebesar Rp 15.508.662.005 atau 92,88% dari total anggaran sebesar Rp. Rp. 16.696.802.282

Hasil pengukuran kinerja triwulan ke IV diatas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA
    1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

       Sub Kegiatan :

       a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
          Pagu anggaran sebesar Rp. 41.627.500,00 sampai Triwulan IV terelisasi sebesar Rp. 40.795.000,00 atau 98%.
       b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
          Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.180.000 sampai dengan Triwulan IIV terelisasi sebesar Rp. 2.176.000 atau 99,83%.
       c. Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
          Pagu Anggaran sebesar Rp.1.360.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 1.280.000 atau 100%.
       d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
          Pagu anggaran sebesar Rp.1.270.000 sampai Triwulan IV terelasisasi sebesar Rp. 1.270.000 atau 100%.
       e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
          Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.280.000 sampai dengan Triwulan IV terelisasi sebesar Rp. 1.280.000 atau 100%
       f. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pagu Anggaran Rp.7.000.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 7.000.000 atau 100%
       g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
          Pagu Anggaran sebesar Rp.3.340.000,00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 3.340.000,00 atau 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pagu anggaran sebesar Rp. 3.943.665.282 sampai dengan Triwulan IV terelisasi sebesar Rp. 3.704.799.068 atau 93,94%.
   b. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pagu Anggaran sebesar Rp.3.000.000,00 sampai dengan Triwulan IV sudah terelisasi Rp.3.000.000,00 atau 100%.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Pagu Anggaran sebesar Rp.64.135.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 62.335.000 atau 97,19%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   a. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pagu Anggaran sebesar Rp. 83.664.400 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 78.062.680 atau 93,30%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.800.000 sampai Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 16.776.500 atau 99,86%.
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu Anggaran sebesar Rp. 80.678.500 sampai dengan Triwulan IV terelaisasi sebesar Rp. 71.171.000 atau sebesar 88,22%.
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pagu Anggaran sebesar Rp.23.800.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.23.729.000 atau 99,99%.
   d. Fasilitasi Kunjungan Tamu Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.500.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 30.400.000 atau 99,67%.
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pagu Anggaran sebesar Rp. 166.443.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 145.816.044 atau 87,61%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan Jasa Surat menyurat Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.047.500 sampai denga Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 24.215.000 atau 96,68%.
   b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Pagu Anggaran sebesar Rp.168.159.530,00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 166.896.658 atau 99,25%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Sub Kegiatan :
   a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
      Pagu Anggaran sebesar Rp.223.595.200,00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 220.875.972 atau 98,78%.
   b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya

Pagu Anggaran sebesar Rp.19.500.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 19.500.000 atau 100%.

c. Pemeliharaan/Reabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya
Pagua Anggaran sebesar Rp. 191.419.500 sampai dengan Triwulan IV terealisasi.Rp. 188.713.000 atau 98,59%

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pagu Anggaran sebesar Rp.55.195.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.55.163.850 atau 99,94%

Realisasi dari Program ini sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 sebesar 98,89% dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 489.709.700 terealisasi sebesar Rp.484.252.822 sehingga terdapat sisa anggara sebesar Rp. 5.456.878.

2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA.
Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

a. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran sebesar Rp.1.961.779.700 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp.1.939.193.835 atau 98,85%

2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran sebesar Rp.878.220.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi Rp.862.899.489 atau 98,26%

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Pagu Anggaran sebesar Rp. 98.010.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 96.210.000 atau 98,16%.

3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan5 sub kegiatan yaitu :

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.225.000.000, sampai dengen Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.223.180.000 atau 99,19%.

b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.267.105.000 sampai dengen Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.260.405.000 atau 97,49%.

c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.48.882.500 sampai dengen Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.48.005.000 atau 98,20%.

d. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pagu anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.3.000.000

sampai dengen Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 3.000.000 atau 100%.

4. PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

   Program ini terdiri dari :

   1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pagu Anggaran sebesar Rp.417.275.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 413.930.000 atau 99,20%

      Sub Kegiatan :

      a. Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
         Pagu anggaran Rp. 53.100.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.53.100.000 atau 100%.
      b. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
         Pagu Anggaran sebesar Rp.97.000.000 sampa dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.97.000.000 atau 100%
      c. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata
         Pagu Anggaran sebesar Rp.57.300.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 57.300.000 atau 100%
      d. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif.
         Pagu Anggaran sebesar Rp.41.030.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 41.030.000 atau 100%
      e. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
         Pagu Anggaran sebesar Rp.168.845.000 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 165.500.000 atau 98,02%

   2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

      Sub Kegiatan :

      a. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
         Pagu anggaran Rp. 40.000.000,00 sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp.40.000.000,00 atau 100%.
      b. Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif.
         Pagu Anggaran sebesar Rp.25.000.000 sampa dengan Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 25.000.000 atau 100%

Secara umum program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik . Dari total anggaran sebesar Rp16.696.802.282 terealisasi sebesar Rp 15.508.662.005 atau 92,88%

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024, adalah seperti terdapat pada Tabel 2.1 (terlampir).

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatid, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja Resntra Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.13.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**									
1.03.13.2.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**									
1.03.13.2.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	4 dokumen	80%
1.03.13.2.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	1 dokumen	7 dokumen	117%
2.22.3.26.01.08.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**									
2.22.3.26.01.08.2.08.02.	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**									
	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	10 Obyek	6 Obyek	3 Obyek	3 Obyek	100	2 Obyek	11 Obyek	110%
2.22.3.26.01.08.2.08.14	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**									

	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	10 lembaga	6 lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100	0 Lembaga	5 Obyek	90%
3.26.3.26.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
3.26.3.26.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perubahan yang disusun	5 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Renja yang disusun	5 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	3 Dokumen	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
		`	5 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	5 kali	100%
3.26.3.26.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	5 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.26.3.26.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan	5 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.26.3.26.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	`	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja	5 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)	5 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
3.26.3.26.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan	5 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	5 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
3.26.3.26.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	5 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100%

		Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	5 Dokumen	3 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Jumlah Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja PD	20 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	20 Dokumen	100%
		Jumlah Penyusunan Laporan TEPRA / Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan (A1) PD	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	60 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
3.26.3.26.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan 53 ASN	70 bulan	42 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	70 bulan	100%
3.26.3.26.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
3.26.3.26.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan keuangan semesteran	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	10 Dokumen	100%
		Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/SPJ	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	50%	12 Dokumen	60 Dokumen	100%
3.26.3.26.01.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunya laporan Prognosis realisasi anggaran	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
3.26.3.26.01.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengelolaan administrasi ASN	30 orang	18 orang	6 orang	6 orang	100%	6 orang	30 orang	100%
3.26.3.26.01.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	10 orang	6 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	10 orang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
3.26.3.26.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 jenis	5 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	8 jenis	100%
3.26.3.26.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	6 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	12 paket	100%

3.26.3.26.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 paket	18 paket	6 paket	6 paket	100%	6 paket	30 paket	100%
3.26.3.26.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	6 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	10 paket	100%
3.26.3.26.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan),	996 dokumen	747 dokumen	125 dokumen	125 dokumen	100%	124 dokumen	996 dokumen	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	54 laporan	9 laporan	9 laporan	100%	9 laporan	72 laporan	100%
3.26.3.26.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	448 laporan	264 laporan	92 laporan	92 laporan	100%	92 laporan	448 laporan	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3.26.3.26.01.02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan kantor	7 unit	4 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	7 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3.26.3.26.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 laporan	36 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	48 laporan	100%
3.26.3.26.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1008 laporan	756 laporan	126 laporan	126 laporan	100%	126 laporan	1008 laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3.26.3.26.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1248 unit	936 unit	156 unit	156 unit	100%	156 unit	1248 unit	100%
3.26.3.26.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 unit	66 unit	11 unit	11 unit	100%	11 unit	88 unit	100%
3.26.3.26.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	8 unit	5 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	8 unit	100%

		Direhabilitasi								
3.26.3.26.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC	120 unit	90 unit	15 unit	15 unit	100%	15 unit	120 unit	100%
3.26.3.26.01.02.	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**									
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota									
3.26.3.26.01.02.2.01.03.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	72 lokasi	54 lokasi	9 lokasi	9 lokasi	100%	9 lokasi	72 lokasi	100%
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									
3.26.3.26.01.02.2.03.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	16 unit	12 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	16 unit	100%
3.26.3.26.01.02.2.03.06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	8 Laporan	100%
3.26.3.26.01.03.	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**									
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									
3.26.3.26.01.03.2.01.01.	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 dokumen	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	16 dokumen	100%
3.26.3.26.01.03.2.01.02.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	20 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	20 Laporan	100%

3.26.3.26.01.03.2.01.03.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	20 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	20 dokumen	100%
3.26.3.26.01.03.2.01.04.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	15 dokumen	9 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	15 dokumen	100%
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	4 dokumen	100%
3.26.3.26.01.05.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**									
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									
3.26.3.26.01.05.2.01.01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dasar Ekraft	600 orang	360 orang	60 orang	60 orang	100%	120 orang	600 orang	100%
3.26.3.26.01.05.2.01.02.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi melalui DAK Non Fisik	320 orang	160 orang	80 orang	80 orang	100%	80 orang	320 orang	100%
3.26.3.26.01.05.2.01.03.	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelaku pariwisata yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan	360 orang	180 orang	90 orang	90 orang	100%	90 orang	360 orang	100%
3.26.3.26.01.05.2.01.04.	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	160 orang	80 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	160 orang	100%
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	8 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	100%
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	100%

	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif									
3.26.3.26.01.05.2.02.01.	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti bimbingan teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif	40 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	20 orang	40 orang	100%
3.26.3.26.01.05.2.02.02.	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	40 orang	20 orang	10 orang	10 orang	100%	10 orang	40 orang	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan. Di samping itu, juga mempunyai fungsi Perumusan kebijakan umum di bidang pariwisata, Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepariwisataan, Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata, Pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata, Pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata, Pembinaan, dan pengembangan indsutri pariwisata, Pembinaan pelaksanaan kerja sama di bidang pariwisata dan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepariwisataan, Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepariwisataan, Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepariwisataan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga diukur dengan beberapa target kinerja, masing-masing dengan indikator yang telah ditetapkan. Didalam penterjemahan Visi dan Misi Bupati, kinerja pelayanan di Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga terutama untuk mendukung Misi 3 yaitu Memantapkan Pengelolaan Pariwisata Yang Profesional yang bertujuan untuk Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan mendukung sasaran daerah yaitu Daya Saing Pariwisata Meningkat.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 262/KPTS/2017 pada tanggal 13 November 2017 yang terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Belanja Wisatawan Jumlah Kunjungan Wisatawan. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Misi Pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 khususnya Misi ke-2 dinyatakan secara jelas, bahwa untuk memajukan Kabupaten Gunungkidul, salah satu upaya yang dilakukan adalah Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.

2. Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Nilai Belanja Wisatawan
b. Jumlah Kunjungan wisatawan

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 baik target Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Realisasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga selama periode Renstra selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel. 2.2

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU dan Non IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU dan Non IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	5	6	7	7	9	9	11	7	12
	Nilai Belanja Wisatawan	Rupiah	110.000	135.000	190.000	200.000	243.000	414.113	190.000	200.000	
	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	2.800.000	3.100.000	3.500.000	4.000.000	3.708.597	3.286.940	3.500.000	4.000.000	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen	80,02	80,03	80,04	80,05	82,10	82,18	80,04	80,05	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kabupaten Gunungkidul mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi. Jumlah pelaku usaha pariwisata juga cukup banyak. Minat masyarakat untuk berwirausaha cukup tinggi didukung perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-royong dan tingkat hubungan sosial serta kebudayaan masyarakat yang masih kondusif.

Potensi daya tarik wisata baik berupa alam, budaya dan buatan cukup banyak tersedia di Kabupaten Gunungkidul. Daya tarik wisata alam yang sudah dikembangkan antara lain berupa pantai, bukit, hutan, pegunungan, gua, air terjun/curug, embung, sungai. Daya tarik wisata budaya yang telah dikembangakan baik yang bersifat berwujud (tangible), seperti benda cagar budaya, perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas dan museum maupun yang bersifat tidak berwujud (intangible) berupa kesenian. Sedangkan daya tarik wisata buatan yang telah dikembangkan antara lain Kolam Renang dan Wahana Permainan Air, dan Embung.

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga mempunyai peran dan posisi yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga mengemban amanat penting untuk menjadikan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul sebagai suatu lembaga yang maju, mandiri dan mempunyai daya saing.

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga senantiasa dinamis sesuai perubahan kondisi dan regulasi maupun iklim dan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga yang senantiasa harus menyesuaikan dinamika, kreatif, dan inovatif; adanya pelimpahan kewenangan yang membawa konsekuensi pada beberapa aspek dalam internal organisasi tentu saja menjadi tantangan sekaligus permasalahan bagi perangkat daerah.

Tantangan dalam mendukung pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul antara lain :

a. Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya
b. Masih dipengaruhi dan ditentukan atau tergantung oleh agen perjalanan wisata dari luar
c. Modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul antara lain :

a. Adanya permintaan wisata alam yang cukup tinggi;
b. Berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif;
c. Investasi usaha wisata masih terbuka di sejumlah kawasan;
d. Perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kepuasan wisatawan
e. Terbukanya akses pasar Internasional.
f. Budaya daerah mendukung perkembangan pariwisata daerah

2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review terhadap Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil reviu, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini berimbas ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Tantangan dalam mendukung pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul antara lain :

a. Persaingan dengan daerah lain yang sama potensinya
b. Masih dipengaruhi dan ditentukan atau tergantung oleh agen perjalanan wisata dari luar
c. Modernisasi dapat mengancam eksistensi budaya asli

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul antara lain :

a. Tumbuhnya minat wisatawan terhadap wisata minat khusus
b. Berkembangnya destinasi yang dikelola oleh masyarakat (Desa Wisata maupun swasta)
c. Perkembangan tehnologi informasi

Sedangkan permasalah-permaslahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwsta Kabupaten Gunungkidul adalah :

a. Belum optimalnya pembangunan aksesibilitas, akomodasi, infrastrukur dan atraksi wisata di destinasi wisata
b. kapasitas SDM pariwsata dan ekonimi kreatif belum memenuhi standar
c. belum optimalnya komunikasi pemasaran dan kerjasama pariwisata
d. belum tersedianya Kreatif Hub bagi ruang inkubasi dan transaksi bagi pelaku pariwisata dan ekonimu kreatif

Penjabaran program kegiatan berdasarkan reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel. 2.3

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul

RANCANGAN AWAL RENJA PD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**15.532.231.082,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**15.532.231.082,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.925.500.000,00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**1.925.500.000,00**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		**Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terlaksana**	**100 persen**	**1.925.500.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**		**Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terlaksana**	**100 persen**	**1.925.500.000,00**	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Pariwisata	1 layanan	1.925.500.000,00	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana pendukung Pariwisata	1 layanan	1.925.500.000,00	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu					Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	1.925.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	1.925.500.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**302.000.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**302.000.000,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**302.000.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**302.000.000,00**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		**Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terlaksana**	**100 persen**	**302.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terlaksana**	**100 persen**	**302.000.000,00**	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Jumlah Event wisata budaya yang terselenggara	2 event	250.000.000,00	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Jumlah Event wisata budaya yang terselenggara	2 event	250.000.000,00	
	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya					Pengembangan Atraksi Wisata Budaya					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari,	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	250.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari,	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	250.000.000,00	

		Kepek					Kepek				
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Workshop Pengelolaan Desa Wisata	2 kali	52.000.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Workshop Pengelolaan Desa Wisata	2 kali	52.000.000,00	
	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya					Peningkatan Lembaga Wisata Budaya					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	2 Lembaga	52.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	2 Lembaga	52.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**13.304.731.082,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**12.674.828.454,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**13.304.731.082,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**12.674.828.454,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik**	**100 persen**	**7.300.100.184,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik**	**100 persen**	**7.033.552.556,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4676 Indeks	135.150.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4676 Indeks	53.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	45.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.900.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.150.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	12.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	9.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	73.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7500 indeks	5.887.450.184,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7500 indeks	5.777.652.556,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	616 Orang/bulan	5.794.950.184,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	616 Orang/bulan	5.686.652.556,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	14 Laporan	88.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	14 Laporan	87.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah orang yang terfiasilitasi administrasi kepegawaian	44 orang	55.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah orang yang terfiasilitasi administrasi kepegawaian	44 orang	53.000.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	45.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	43.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	2 Orang	10.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	2 Orang	10.000.000,00	

			Pelatihan					Pelatihan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	245333 indeks	520.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	245333 indeks	472.400.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	115.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	80.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	180.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	170.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	49.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	47.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	249 Dokumen	1.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	249 Dokumen	1.400.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18 Laporan	12.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18 Laporan	11.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan	148.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan	149.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Pengadaan Peralatan kantor	2 unit	20.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Pengadaan Peralatan kantor	2 unit	24.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127000 indeks	237.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127000 indeks	226.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	60.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	55.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	252 Laporan	177.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	252 Laporan	171.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,75 indeks	444.500.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,75 indeks	427.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	312 Unit	225.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	312 Unit	221.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	20.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	185.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	175.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	12.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	11.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		-	-	**4.430.230.898,00**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		-	-	**4.429.275.898,00**	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		-	-	1.520.687.000,00	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		-	-	1.520.687.000,00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					

		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	18 Orang	1.520.687.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	18 Orang	1.520.687.000,00	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		-	-	2.909.543.898,00	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		-	-	2.908.588.898,00	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	2.484.543.898,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	2.483.588.898,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	425.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	425.000.000,00	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		**-**	-	**974.400.000,00**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**-**	**-**	**812.000.000,00**	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		-	-	974.400.000,00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		-	-	812.000.000,00	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	65.900.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	140.000.000,00	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	80.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	80.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	42.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	42.000.000,00	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	510.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	400.000.000,00	

	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	276.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	150.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		**-**	-	600.000.000,00	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**-**	**-**	**400.000.000,00**	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		-	-	520.000.000,00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		-	-	340.000.000,00	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif					Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	90.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	45.000.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 Orang	75.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 Orang	45.000.000,00	
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI					Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI					
		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	240 Orang	275.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	240 Orang	200.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata					Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	80 Orang	0,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	80 Orang	0,00	
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang	80.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang	50.000.000,00	

	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		-	-	80.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		-	-	60.000.000,00	
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	10 Orang	45.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	10 Orang	35.000.000,00	
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif					Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif					
		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	35.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang	25.000.000,00	
					15.532.231.082,00					**15.532.231.082,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Dinas Paraiwsata, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan, dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan. Sesuai Tupoksi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga usulan Program dan Kegiatan Prioritas

1. Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   Usulan :
   a. PIS - Pembinaan Desa Wisata
      Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari para pemangku kepentingan yang telah terakomodir ada 8 usulan.

   b. PIS - Pembinaan Pokdarwis
      Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari para pemangku kepentingan yang telah terakomodir ada 11 usulan.
2. Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
   Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI

   Usulan :
   a. (PIS) - Pelatihan SDM Usaha Jasa Pariwisata
      Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari para pemangku kepentingan yang telah terakomodir ada 5 usulan.

   b. (PIS) - Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif
      Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari para pemangku kepentingan yang telah terakomodir ada 8 usulan.
3. Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota
   Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

   Usulan :
   a. ((PIS) - Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP) Tahun 2026 dari para pemangku kepentingan yang telah terakomodir ada 2 usulan.

4. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat

Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota

Usulan :

a. ((PIWK) - Pengadaan Sarpras Olahraga Tahun 2026 dari para pemangku kepentingan yang telah terakomodir ada 2 usulan.

b. (Pengadaan Sarpras Olahraga Tahun 2026 Tahun 2026 dari para pemangku kepentingan yang telah terakomodir ada 8 usulan.

Hasil musrenbang bidang pariwisata tingkat kelurahan dan kecamatan dapat dilihat sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 (Lampiran)

Tabel 2.4
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator	Vol	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(PIS) - Pelatihan SDM Usaha Jasa Pariwisata	Kalurahan Pucung, Girisubo	Pembinaan	1	9.990.000	9.990.000	
2	(PIS) - Pelatihan SDM Usaha Jasa Pariwisata	Padangan Banjarejo Tanjungsari	Pembinaan	1	9.900.000	9.900.000	
3	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Kalurahan Pucung	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
4	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Watusigar	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
5	(PIS) - (Pembinaan Desa Wisata)	Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
6	(PIS) -(Pembinaan Desa Wisata)	Kalurahan Grogol	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
7	(PIS) - (Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif)	Kepuh Karangawen girisubo	Pembinaan	1	9.990.000	9.990.000	
8	(PIS) - (Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif)	Watusigar, Ngawen	Pembinaan	2	9.990.000	19.980.000	
9	(PIS) - (Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif)	Padukuhan Gebang Wetan-gebang kulon, Kalurahan Melikan, Rongkop	Pembinaan	1	9.990.000	9.990.000	
10	(PIS) - (Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif)	Giriwungu, Panggang, Gununkidul	Pembinaan	1	9.990.000	9.990.000	
11	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	giricahyo,purwosari	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
12	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Widoro Rt 07 Rw 01, Giripurwo, Purwosari	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
13	(PIS) - (Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif)	Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop Gunungkidul	Pembinaan	1	9.990.000	9.990.000	
14	(PIS) - (Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif)	Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari	Pembinaan	1	9.990.000	9.990.000	
15	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Trasih 001/002 Giriasih Purwosari Gunungkidul	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
16	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Tungkluk, Beji, Ngawen	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	

17	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Kepuh Karangawen Girisubo Gunungkidul	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
18	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Balai Padukuhan Tungu	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
19	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	jurangjero, ngawen, gunungkidul	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
20	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Giriwungu, Panggang, gunungkidul	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
21	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
22	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Kalurahan Karangtengah	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
23	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Kebonjero RT 001/ RW 006	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
24	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Kalurahan Tepus, Tepus, Gunungkidul	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
25	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
26	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Tungkluk, Beji, Ngawen, Gunungkidul	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
27	(PIS) - (Pembinaan Pokdarwis)	Kepuh Karangawen Girisubo Gunungkidul	Pembinaan	1	16.625.000	16.625.000	
28	(PIS) - (Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif)	Padukuhan Wotawati	Pembinaan	1	9.990.000	9.990.000	
29	(PIS) - Pelatihan SDM Usaha Jasa Pariwisata	Jepitu, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul	Pembinaan	1	9.990.000	9.990.000	
30	(PIS) - Pelatihan SDM Usaha Jasa Pariwisata	girisuko, panggang gunungkidul	Pembinaan	1	9.990.000	9.990.000	
31	(PIS) - Pelatihan SDM Usaha Jasa Pariwisata	Girijati, Purwosari, Gunungkidul	Pembinaan	1	9.990.000	9.990.000	
32	(PIS) - (Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif)	bejiharjo	Pembinaan	1	9.990.000	9.990.000	
33	(PIS) - Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP)	Kalurahan Katongan, Nglipar, Kab. Gunungkkidul	Pembinaan	1	50.000.000	50.000.000	
34	(PIS) - Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP)	Rejosari, Semin, Kab. Gunungkidul	Pembinaan	1	50.000.000	50.000.000	
35	(PIWK) - Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola	Kalurahan Selang, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul	Pembinaan	2	8.500.000	17.000.000	

36	(PIWK) - Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor	GOR Bagas Waras, Kalurahan Kepek, Kapanewon Saptosari, Kab. Gunungkidul	Pembinaan	1	8.450.000	8.450.000	
37	(PIS) - Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola	Lapangan Sepak Bola Buhbandung Songbanyu Girisubo, Lapangan Sepak Bola Plalar Joho Songbanyu Girisubo, Kab. Gunungkidul	Pembinaan	2	8.500.000	17.000.000	
38	(PIS) - Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola	Lapangan Sepak Bola Kalurahan Kedungpoh, Ngawen, Kab. Gunungkidul	Pembinaan	1	8.500.000	8.500.000	
39	(PIS) - Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola	Lapangan Sepakbola Grogol, Paliyan, Kab. Gunungkidul	Pembinaan	1	8.500.000	8.500.000	
40	(PIS) - Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola	Lapangan Sepak Bola Baleharjo, Wonosari, Kab. Gunungkidul	Pembinaan	1	8.500.000	8.500.000	
41	(PIS) - Pengadaan Sarpras Olahraga Sepak Bola	Gatak 006/009, Gari, Wonosari, Kab. Gunungkidul	Pembinaan	1	8.500.000	8.500.000	
42	(PIS) - Pengadaan Sarpras Olahraga Tenis Meja	Logandeng, Playen, Kab. Gunung Kidul	Pembinaan	1	7.500.000	7.500.000	
43	(PIS) - Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor	Panggang I, Panggang II, Panggang III, Kab. Gunungkidul	Pembinaan	3	8.450.000	25.350.000	
44	(PIS) - Pengadaan Sarpras Olahraga Voli indoor	Padukuhan Wuru dan Padukuhan Songgoringgi, Kalurahan Bohol, Kapnewon Rongkop, Kab. Gunungkidul	Pembinaan	2	8.450.000	16.900.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Dalam menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan harus sesuai dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (RKP 2026) merupakan RKP Tahun ke lima RPJMD 2021-2026. Tema prioritas pembangunan Tahun 2026 dirumuskan dengan berdasarkan pada visi dan misi kepala daerah juga memperhatikan arah kebijakan dalam isu strategis Propinsi DIY dan Daerah sebagai berikut :

a. Isu strategis provinsi
- Reformasi kalurahan dan Percepatan Pembangunan Perdesaan
- Pengembangan wilayah selatan DIY
- Perkembangan teknologi informasi
- Respon peluang transnasional
- Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan Simetris-Asimetris
- Percepatan penanggulangan kemiskinan
- Upaya pemajuan kebudayaan
- Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
- Kesesuaian pemanfaatan ruang
- Kualitas lingkungan hidup

b. Isu strategis daerah
- Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - Pengembangan potensi Pariwisata
- Pengembangan kebudayaan pendukung pariwisata
- Peningkatan Investasi - Perkembangan Teknologi Informasi
- Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana
- Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW
- Pembangunan Infrastruktur yang ramah lingkungan
- Ketahanan air, pangan dan energi
- Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah
- Pengembangan inovasi daerah
- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah kalurahan

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 adalah *"Penguatan Ekonomi Daerah , Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur dan Peningkatan SDM yang Unggul"* sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2026 adalah :

1. Peningkatan Ekonomi:

a. Investasi Pariwisata
b. Pengembangan Sektor Unggulan

2. Penurunan angka kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Demi tercapainya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul selaras dengan Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterjemahkan ke dalam Sasaran Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul diantaranya kapasitas sumber daya manusia meningkat sesuai dan sejalan dengan sasaran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya turut serta mendukung prioritas pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Ekonomi;

Program prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul dijabarkan kembali dalam program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi kepala daerah yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Tujuan
Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga kabupaten Gunungkidul

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Satuan	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	Meningkatnya nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga	Indeks nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga	Indeks	70,33

Sasaran pembangunan daerah yang terdapat pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran PD, sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar waktu dan antar lembaga. Sasaran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Satuan	Target Sasaran PD Tahun 2026
1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		6,56-7,44
		Nilai Belanja Wisatawan nusantara	Rupiah	525.000
		Nilai Belanja Wisatawan mancanegara	Rupiah	1.000.000
2	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan pemuda	Persentase Partisipasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Persentase	81,00
3	Meningkatnya Prestasi olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Persentase	77,00

Indikator Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran PD, sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar waktu dan antar lembaga. Sasaran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul

No	IKU	Indikator Indikator IKU	Target Kinerja IKU
	Meningkatnya nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga	Indeks nilai tambah pariwisata , ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga	70,33
	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	6,56-7,44
		Nilai Belanja Wisatawan nusantara	525.000
		Nilai Belanja Wisatawan mancanegara	1.000.000
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan pemuda	Persentase Partisipasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif	81,00
	Meningkatnya Prestasi olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	77,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul adalah Dinas adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga. Menurut tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang harus dijalankan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul terkait visi, misi dan program pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, program prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga untuk lima tahun mendatang adalah mengimplementasikan misi ketiga RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 yaitu :

Misi ketiga RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029
Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif dengan sasaran daerah adalah Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat melalui strategi Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan fasilitas destinasi pariwisata dengan sasaran PD Daya Saing Pariwisata Meningkat melalui prioritas

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA dengan indikator kinerja program Daya Tarik Wisata dengan sarana prasarana lengkap; Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA dengan indikator kinerja program Persentase layanan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana dengan kegiatan: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF dengan indikator kinerja program Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terfasilitasi
dengan kegiatan :

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

4.2 Anggaran Belanja

Sesuai dengan RKPD kabupaten Gunugkidul Tahun Anggaran 2026 Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di dukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD. Pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.5.389.546.867,00 yang didalamnya belum termasuk Belanja Pegawai / Belanja gaji

Tahun Anggaran 2026 Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan 10 Program, 24 kegiatan dan 72 Sub Kegiatan .

Program dan kegiatan di kelompokkan dalam dua jenis yaitu Program dan Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan dan Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwsata tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata,
   Indikator Kinerja Utamanya adalah Daya Tarik Wisata dengan sarana prasarana lengkap; Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi. Total kebutuhan dana sebesar Rp 1.228.217.000,00 yang terdiri dari 2 (Kegiatan) kegiatan yaitu:
   a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
      dengan pagu anggaran Rp. 864.967.000,00
      Sub Kegiatan :
      - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 864.967.000,00

   b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 363.250.000,00
      Sub Kegiatan :
      - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 240.000.000,00
      - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp.123.250.000,00

2. Program Pemasaran Pariwsata,
   Indikator Kinerja Utamanya adalah Persentase layanan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana. Total kebutuhan dana sebesar Rp.329.645.000,00 yang terdiri dari 1 (Kegiatan) yaitu:
   a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Rp. 329.645.000,00
      Sub Kegiatan :
      - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan pagu anggaran Rp.15.000.000,00
      - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, dengan pagu anggaran Rp.11.645.000,00
      - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan pagu anggaran Rp.3.000.000,00

- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp.250.000.000,00
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

   Indikator Kinerja Utamanya adalah Persentase layanan Pengembangan Ekonomi Kretaif nmelalui Pemanfaatn dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Total kebutuhan dana sebesar Rp.20.000.000,00 yang terdiri dari 1 (Kegiatan) yaitu:

   a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan pagu Rp.20.000.000,00

      Sub Kegiatan :

      - Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif, dengan pagu anggaran Rp.10.000.000,00
      - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan pagu anggaran Rp.10.000.000,00

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi

   Indikator Kinerja Utamanya adalah Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terfasilitasi. Total kebutuhan dana sebesar Rp.284.960.000,00 yang terdiri dari 2 (Kegiatan) yaitu:

   a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan pagu Rp.205.000.000,00

      Sub Kegiatan :

      - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, dengan pagu anggaran Rp.45.000.000,00
      - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI, dengan pagu anggaran Rp.10.000.000,00
      - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata, dengan pagu anggaran Rp.10.000.000,00
      - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, dengan pagu anggaran Rp,45.000.000,00
      - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan pagu anggaran Rp.95.000.000,00

   b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan pagu Rp.79.960.000,00

      Sub Kegiatan :

      - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan pagu anggaran Rp.49.960.000,00
      - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif dengan pagu anggaran Rp.30.000.000,00

Tabel 4.1

Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rek					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6					7	8	9
Meningkatnya nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga	Indeks nilai tambah pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	6,56-7,44	3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.342.009.300,00	Disparekrafpora
					3	26	2	02.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.781.466.800,00	
			Nilai Belanja Wisatawan nusantara	525.000	3	26	2	02.01	7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.604.606.800,00	
			Nilai Belanja Wisatawan mancanegara	1.000.000	3	26	2	03.01	8	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	176.860.000,00	
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan pemuda	Persentase Partisipasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif	81	3	26	2	02.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.120.355.000,00	
					3	26	2	02.02	4	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.120.355.000,00	
					3	26	2	02.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	440.187.500,00	
		Meningkatnya Prestasi olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	77	3	26	2	02.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	439.125.000,00	
					3	26	2	02.03	8	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	1.062.500,00	
					3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	327.997.000,00	Disparekrafpora

					3	26	3	02.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	327.997.000,00	
					3	26	3	02.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	47.305.000,00	
					3	26	3	02.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	11.645.000,00	
					3	26	3	02.01	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.000.000,00	
					3	26	3	02.01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	216.047.000,00	
					3	26	3	02.01	7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	50.000.000,00	
					3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	20.000.000,00	Disparekrafpora
					3	26	4	02.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	20.000.000,00	
					3	26	4	02.02	9	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	3.000.000,00	
					3	26	4	02.02	12	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	5.000.000,00	
					3	26	4	02.02	17	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	7.000.000,00	
					3	26	4	02.02	22	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	5.000.000,00	
					3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	493.330.000,00	Disparekrafpora
					3	26	5	02.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	323.460.000,00	
					3	26	5	02.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	45.000.000,00	
					3	26	5	02.01	8	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	59.950.000,00	

					3	26	5	02.01	9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	10.000.000,00	
					3	26	5	02.01	10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	45.000.000,00	
					3	26	5	02.01	11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	163.510.000,00	
					3	26	5	02.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	169.870.000,00	
					3	26	5	02.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	139.870.000,00	
					3	26	5	02.02	7	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	30.000.000,00	
					2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	656.805.000,00	Disparekrafpora
					2	19	2	02.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	342.365.000,00	
					2	19	2	02.01	10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	7.900.000,00	
					2	19	2	02.01	11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	89.625.000,00	
					2	19	2	02.01	12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	2.847.500,00	
					2	19	2	02.01	14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	171.992.500,00	

					2	19	2	02.01	15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	70.000.000,00	
					2	19	2	02.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	314.440.000,00	
					2	19	2	02.02	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	314.440.000,00	
					2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.145.989.000,00	
					2	19	3	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.050.600.000,00	
					2	19	3	02.01	5	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.050.000.000,00	
					2	19	3	02.01	6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	600.000,00	
					2	19	3	02.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.571.850.000,00	
					2	19	3	02.02	4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	
					2	19	3	02.02	5	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	400.000.000,00	
					2	19	3	02.02	6	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	671.850.000,00	
					2	19	3	02.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	429.039.000,00	

					2	19	3	02.03	7	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	1.250.000,00	
					2	19	3	02.03	8	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1.250.000,00	
					2	19	3	02.03	9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	425.289.000,00	
					2	19	3	02.03	10	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1.250.000,00	
					2	19	3	02.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	94.500.000,00	
					2	19	3	02.05	6	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	42.250.000,00	
					2	19	3	02.05	7	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1.125.000,00	
					2	19	3	02.05	8	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	1.125.000,00	
					2	19	3	02.05	10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	50.000.000,00	
					2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000,00	
					2	19	4	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000,00	
					2	19	4	02.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000,00	
					1	3	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1.076.400.000,00	
					1	3	13	05.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.076.400.000,00	

					1	3	13	05.02	2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	487.800.000,00	
					1	3	13	05.02	3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	588.600.000,00	
					2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.665.000.100,00	
					2	22	8	05.06		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	1.500.000.000,00	
					2	22	8	05.06	2	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	700.000.000,00	
					2	22	8	05.06	3	Pengembangan Industri Kreatif	800.000.000,00	
					2	22	8	05.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	165.000.100,00	
					2	22	8	05.07	10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	165.000.100,00	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

Pada Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga ada satu program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota yaitu penunjang Bidang Pariwisata. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik. Program Penunjang pada Urusan Bidang Pariwisata tersebut terdiri dari 7 kegiatan dengan pagu indikatif Rp.3.526.724.867,00 dan target program 100% Kegiatan tersebut meliputi:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target 2026	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA				**19.367.030.965**				**21.620.109.467**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.076.400.000**				**1.076.400.000**
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**1.076.400.000**				**1.076.400.000**
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Presentase Kawasan Ruang Strategis yang Direncanakan, Dikembangkan dan Dimanfaatkan**		**100 persen**	**1.076.400.000**			**-**	**1.076.400.000**
1	03	13	5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terfasilitasinya Sarana prasarana wisata di Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu Terselengaranya event di destinasi wisata pantai selatan dan Geosite Gunungsewu		-	1.076.400.000			-	1.076.400.000
1	03	13	5.02	0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan								
						Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Ngestirejo	1 Dokumen	487.800.000	DANA KEISTIMEWAAN DIY	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		487.800.000

1	03	13	5.02	0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu							
						Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran	1 Dokumen	588.600.000	DANA KEISTIMEWAAN DIY	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	588.600.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.667.794.100**			**10.544.125.000**
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**5.002.794.000**			**8.879.125.000**
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Partisipasi Organisasi Kepemudaan yang Aktif**		**81,00 Persen**	**656.805.000**			**676.625.000**
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemuda pelopor kabupaten kota yang berpartisipasi dalam Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda dan kepemudaan, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kab terlaksana		-	342.365.000			501.625.000
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota							
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	7.900.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	16.625.000
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota							

						Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	70 Orang	89.625.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		70.000.000
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda								
						Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	50 Orang	2.847.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		100.000.000
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota								
						Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1758 Orang	171.992.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		165.000.000
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota								
						Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	40 Orang	70.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		150.000.000
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Kabupaten terlaksana		-	314.440.000			-	175.000.000
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota								

						Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	100 Orang	314.440.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		175.000.000
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase atlet yang masuk pelatda**		**6,00 Persen**	**4.145.989.000**			**-**	**7.677.500.000**
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga		-	1.050.600.000			-	790.000.000
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota								
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	180 Unit	1.050.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		690.000.000
2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar								
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		100.000.000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten		- -	2.571.850.000			-	5.570.000.000
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota								

						Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Kegiatan	1.500.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		3.620.000.000
2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota								
						Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Kegiatan	400.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		157.500.000
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga								
						Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1760 Orang	671.850.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		1.792.500.000
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi terlaksana		-	429.039.000			-	752.500.000
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga								
						Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	190 Orang	1.250.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		100.000.000
2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)								
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	37 Pelatda	1.250.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		127.500.000
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota								

						Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	122 Orang	425.289.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		470.000.000
2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota								
						Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Mulo	1 Dokumen	1.250.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		55.000.000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi yang terlaksana		-	94.500.000			-	565.000.000
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi								
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	3 Laporan	42.250.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		430.000.000
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan								
						Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Laporan	1.125.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		55.000.000
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	1.125.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OR		55.000.000
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional								

						Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Lembaga	50.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		25.000.000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase kelembagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka**		**100 Persen**	**200.000.000**			**-**	**525.000.000**
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Organisasi kepramukaan yang dibina dan dikembangkan			200.000.000			-	525.000.000
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah								
						Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Organisasi	200.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		525.000.000
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**1.665.000.100**				**1.665.000.000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**100 persen**	**1.665.000.100**			**-**	**1.665.000.000**

2	22	08	5.06		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terselengaranya event di Desa Wisata berprestasi dengan klasifikasi berkembang, maju, atau mandiriTerselengaranya event di destinasi wisata pantai selatanTerselengaranya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata berbasis masyarakatTerselenggaranya event ekonomi kreatif dan sertifikasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif			1.500.000.000			-	1.500.000.000
2	22	08	5.06	0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya								
						Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Objek	700.000.000	DANA KEISTIMEWAAN DIY	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		700.000.000
2	22	08	5.06	0003	Pengembangan Industri Kreatif								
						Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Unit	800.000.000	DANA KEISTIMEWAAN DIY	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		800.000.000
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Workshop Pengelolaan Desa Wisata			165.000.100			-	165.000.000
2	22	08	5.07	0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni								
						Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	3 Laporan	165.000.100	DANA KEISTIMEWAAN DIY	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		165.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**11.622.836.865**				**9.999.584.467**
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**11.622.836.865**				**9.999.584.467**

3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP PD**		**82,19 persen**	**7.439.500.565**			**-**	**4.190.617.467**
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja yang tersusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu			64.015.200			-	41.995.000
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	3 Dokumen	44.115.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		20.795.000
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wunung	1 Dokumen	3.130.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OR		3.500.000
3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	1.620.200	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		1.800.000
3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	3 Dokumen	1.620.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		1.700.000
3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Dokumen	1.585.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		1.700.000
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	18 Laporan	8.605.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		9.000.000
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Laporan	3.340.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		3.500.000
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu			6.145.539.101			-	2.598.721.867
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	36 Orang/bulan	6.059.916.601	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		2.516.336.867
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Laporan	3.060.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		3.500.000
3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	13 Laporan	82.562.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		78.885.000
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawiaan			112.846.264			-	134.517.600
3	26	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	6 Dokumen	102.846.264	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		119.517.600
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Orang	10.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		15.000.000
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			457.053.600			-	685.983.000
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	4 Paket	12.838.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		20.500.000
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	4 Paket	78.041.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		115.593.000
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Paket	134.802.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		160.000.000
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Paket	25.040.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OR		32.500.000
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Dokumen	1.200.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		1.500.000
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Laporan	21.160.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN		35.000.000

											OLAHRAGA		
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Laporan	183.972.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		320.890.000
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah			14.148.000			-	95.000.000
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Unit	14.148.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		95.000.000
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			229.398.400			-	211.400.000
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Laporan	31.655.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, OR		1.400.000
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	252 Laporan	197.743.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OR		210.000.000
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah terlaksana			416.500.000			-	423.000.000

3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	312 Unit	235.610.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		180.000.000
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	25 Unit	12.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		13.000.000
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	2 Unit	159.890.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		200.000.000
3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	30 Unit	9.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		30.000.000
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Indeks Daya Tarik Destinasi Pariwisata**		**41,48 indeks**	**3.342.009.300**			**-**	**4.454.967.000**
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dukungan Peningkatan Pendapatan Sektor Pariwisata			1.781.466.800			-	2.614.967.000
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								

						Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	12 Laporan	1.604.606.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		1.750.000.000
3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota								
						Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	18 Orang	176.860.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		864.967.000
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Sarana dan prasarna pariwisata di Destinasi wisata yang direhab			1.120.355.000			-	1.750.000.000
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	3 Unit	1.120.355.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		1.750.000.000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa berstatus desa wisata rintisan bertambah dan Dokumen Riparda yang tersusun			440.187.500			-	90.000.000
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Laporan	439.125.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		90.000.000
3	26	02	2.03	0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota								

						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	1.062.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		0
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase peningkatan publikasi pariwisata**		**6.10 persen**	**327.997.000**			**-**	**774.000.000**
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Event dan promosi pariwisata yang dilaksanakan			327.997.000			-	774.000.000
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	47.305.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		100.000.000
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri								
						Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	11.645.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		70.000.000
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	3.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		4.000.000
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota								

						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	5 Kegiatan	216.047.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, OR		350.000.000
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	4 Promosi	50.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		250.000.000
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh rekomendasi HKI**		**100 persen**	**20.000.000**			**-**	**110.000.000**
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh rekomendasi HKI			20.000.000			-	110.000.000
3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif								
						Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Dokumen	3.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		70.000.000
3	26	04	2.02	0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah								
						Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Lembaga	5.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		10.000.000
3	26	04	2.02	0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif								

						Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Promosi	7.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		20.000.000
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual								
						Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	3 Produk	5.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		10.000.000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih dan tersertifikasi**		**100 persen**	**493.330.000**			**-**	**470.000.000**
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	SDM pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi			323.460.000			-	395.000.000
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif								
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	1 Laporan	45.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		45.000.000
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI								
						Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	130 Orang	59.950.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OR		90.000.000
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata								

						Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Mulo	25 Orang	10.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		40.000.000
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	25 Orang	45.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		60.000.000
3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Mulo	1 Laporan	163.510.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		160.000.000
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	SDM ekonomi kreatif yang terlatih dan tersertifikasi			169.870.000			-	75.000.000
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	290 Orang	139.870.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA		45.000.000
3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif								
						Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	10 Orang	30.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OR		30.000.000
J U M L A H									**19.367.030.965**				**21.620.109.467**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas PD Tahun 2026 mengacu pada rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat Program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju,disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan prioritas dari usulan tiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga diharapkan ketersediaan anggaran bisa menyesuaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan ini akan dilaksanakan di tahun 2026 dengan memperhatikan pedoman, peraturan dan kebijakan yang harus dipatuhi. Diharapkan perencanaan tahunan ini semua program dan kegiatan dapat tertampung dan dilaksanakan, dan tidak hanya menjadi sebuah dokumen.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Forum Lintas Perangkat Daerah. Sehubungan dengan adanya Pemilu dan Pilkada maka anggaran banyak terserap untuk kegiatan tersebut, sehingga ada beberapa kegiatan di Tahun 2025 belum/tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA, DAN OLAHRAGA,

ttd

ONENG WINDU WARDANA. S.Si. M.Si

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RANCANGAN RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sehingga Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun harus berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2025-2029 serta arah kebijakan pembangunan tahun pertama sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Kabupaten Gunungkidul, Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisi program dan kegiatan disertai dengan pendanaan indikatif, untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melakukan penyelarasan dengan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026. Tema, prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :

Visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 :

“Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif;
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat , Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban;
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Tema Pembangunan Nasional dan DIY.

Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2026 adalah : “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Meningkatkan Daya Saing” yang dijabarkan dalam Prioritas Nasional yaitu :

1. Peningkatan daya saing ekonomi;
2. Penguatan UMKM dan koperasi;
3. Peningkatan kualitas produk;
4. Pemberian bantuan gizi;
5. Penuntasan kasus TBC;
6. Pembangunan Rumah Sakit;
7. Peningkatan produktivitas pertanian;
8. Pembangunan sekolah unggulan
9. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrim
10. Pemantapan kelembagaan pemerintahan

sedangkan untuk Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2026 adalah : “Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”

Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 adalah :“ Penguatan Ekonomi Daerah, Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur dan Peningkatan SDM yang Unggul”

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Penurunan Angka Kemiskinan dan Penanggulangan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban;
7. Reformasi Birokrasi.

Dari ke 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah di atas tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja adalah Peningkatan Ekonomi. Dalam penyusunan rencana kerja ini juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, juga disinergikan dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga,

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY serta Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Trnasmigrasi DIY.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomr 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul *Nomor 4* Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul *Nomor 3* Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
13. Peraturan Bupati Gunungkidul *Nomor 77* Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul *Nomor 78* Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud
   Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2026 adalah sebagai pedoman, dasar dan acuan bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2026 sebagai implementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Tujuan
   Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) PD yaitu :
   - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi;
   - Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN
- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu terhadap RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PERDAGANGAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2,tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1, tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan.

1. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2024 yang memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
   Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yang memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah :
   a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, capaian kinerja 100% realisasi keuangan 95,7560%, terdiri dari :
      - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan capaian kinerja 100% realisasi keuangan 95,60%.
      - Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya capaian kinerja 100% realisasi keuangan 99,97%.
   b. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri capaian kinerja 100% realisasi keuangan 82,14% terdiri dari :
      - Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri capaian kinerja 100% realisasi keuangan 82,14%.
   c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting capaian kinerja 100% realisasi keuangan 82,55% terdiri dari :
      - Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 100% realisasi keuangan 77,50%.
      - Kegiatan Pengendalian Harga,dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota capaian kinerja 100% realisasi keuangan 100%.
      - Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 100% realisasi keuangan 32,89%.
   d. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan capaian kinerja 100% realisasi keuangan 100% terdiri dari :
      - Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 100% realisasi keuangan 100%.
   e. Program Pengembangan Ekspor, capaian kinerja 100%, realisasi keuangan 99,75% terdiri dari :
      - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 100% realisasi keuangan 100% .

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, capaian kinerja 100% realisasi keuangan 70,01% terdiri dari :
   - Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja 100% realisasi keuangan 68,30%
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian kinerja 100% realisasi keuangan 98,18%
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian kinerja 100% realisasi keuangan 87,29%
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capaian kinerja 100% realisasi keuangan 89,36%
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja 100% realisasi keuangan 88,26%
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja 100% realisasi keuangan 97,46%

2. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
   Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2024 tidak ada yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah :
   a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, capaian kinerja 103,02% realisasi keuangan 99,98% terdiri dari :
      - Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya capaian kinerja 103%, realisasi keuangan 99,98%.
   b. Program Program Standarrisasi Dan Perlindungan Konsumen capaian kinerja 100,45% realisasi keuangan 89,89% terdiri dari :
      - Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan capaian kinerja 100,45% realisasi keuangan 89,89%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2024
   a. Faktor penyebab tidak tercapai target Tahun 2024 adalah :
      Semua program dan kegiatan mencapai target kinerja yang direncanakan.
   b. Faktor penyebab capaian yang melebihi target sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah :
      - Antusiasme masyarakat untuk bisa mengikuti Gelar Potensi Gunungkidul sangat besar.
      - Kesadaran masyarakat untuk melakukan tera/tera ulang semakin meningkat
   c. Faktor-faktor yang diperkiraan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024
      Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 yaitu keterbatasan kemampuan pendanaan daerah karena kurangnya dana transfer dari pusat menyebabkan dukungan anggaran untuk mencapai target kinerja kurang maksimal.

d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
   Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah fokus pada target capaian kinerja yang telah dibuat dan jadwal yang telah ditentukan serta mencari terobosan dana tidak hanya mengandalkan APBD saja.

Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcomes)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
2	**22**	**08**				**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**Persentase IKM yang mengikuti pameran**	100							
2	**22**	**08**	**2**	**8**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya**	100							
2	22	08	2	8	3	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yangdikembangkan	378	100	104	106	101,92	70	276	73,01
3	**30**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul**	**Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik**	100							
3	**30**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu**	100							
3	30	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	4	4	4	100	3	11	64,71
3	30	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	2	1	1	100	1	4	100,00
3	30	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	1	1	1	100	1	3	75,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcomes)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
3	30	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	2	2	2	100	2	6	75,00
3	30	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	1	2	2	100	2	5	125
3	30	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	12	17	17	100	17	46	67,65
3	30	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	20	5	5	6	100	5	16	80,00
3	30	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	100							
3	30	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4928	938	1162	1162	100	1092	2.859	64,77
3	30	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	1	1	100	1	3	75,00
3	30	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52	13	13	13	100	13	39	75
3	**30**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian**	100							
3	30	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	5	7	7	100	7	19	79,17
3	30	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	0	0	0	0	3	3	30,00

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcomes)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
3	**30**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum terlayani**	100							
3	30	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23	4	4	4	100	4	12	52,17
3	30	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	5	6	6	100	21	30	133,33
3	30	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	4	5	5	100	10	19	79,17
3	30	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	144	31	36	36	100	18	85	59,03
3	30	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000	187	0	0	0	250	437	43,70
3	30	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	6	12	12	100	12	30	62,50
3	30	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	16	12	12	100	24	52	8,67
3	30	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan terlaksana**	100							
3	30	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	67	19	0	0	0	85	104	155,22
3	30	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	4	0	0	0	3	7	29,17
3	30	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	0	0	0	0	0	0	0,00
3	**30**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana**	100							
3	30	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16	4	4	4	100	0	8	50

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcomes)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
3	30	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288	27	36	36	100	36	99	34,38
3	30	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	9	12	12	100	12	33	68,75
3	**30**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100							
3	30	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1984	496	256	256	100	420	1.172	59,07
3	30	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200	50	5	5	100	20	75	37,50
3	30	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	452	110	55	55	100	108	273	60,40
3	30	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	1	0	0	0	1	2	50,00
3	30	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	60	15	6	6	100	15	36	60,00
3	**30**	**02**				**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi**	100							
3	**30**	**02**	**2**	**01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Persentase layanan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan**	100							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcomes)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
3	**30**	**02**	**2**	**01**	**02**	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	5	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100,00
3	**30**	**02**	**2**	**06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Layanan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi**	100							
3	30	02	2	06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)maupun Produsen B2 (P-B2)	52	9	13	13	100	5	27	51,92
3	**30**	**03**				**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi**	100							
3	**30**	**03**	**2**	**01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**persentase layanan sarana distribusi perdagangan**	100							
3	30	03	2	01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	160	40	40	40	100	40	120	75
3	30	03	2	01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	160	40	40	40	100	40	120	75
3	**30**	**03**	**2**	**02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang dilaksanakan**	100							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcomes)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
3	30	03	2	02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100	11	9	6	66,67	25	42	42,00
3	**30**	**4**				**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya**	100							
3	**30**	**4**	**2**	**01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase layanan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dipantau dan diawasi**	100							
3	30	4	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	9	1	4	4	100	4	9	100
3	30	4	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	9	1	4	4	100	4	9	100
3	**30**	**4**	**2**	**02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan Ketersediaan data informasi dan perdagangan**	100							
3	30	4	2	02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	36	9	12	12	100	12	33	91,67

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcomes)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
3	30	4	2	02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	9	1	4	4	100	4	8	88,89
3	**30**	**4**	**2**	**03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase layanan terhadap pemeriksanaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi**	100							
3	30	4	2	03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	20	3	5	5	100	5	13	65
3	30	4	2	03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	20	3	5	5	100	5	13	65
3	**30**	**5**				**Program Pengembangan Ekspor**	**IKM yang berorientasi Ekspor**	32							
3	**30**	**5**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan penyelenggaran promosi dagang**	100							
3	30	5	2	01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	24	4	2	2	100	8	14	58,33
3	30	5	2	01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	20	10	n/a	n/a	n/a	n/a	10	50,00
3	30	5	2	01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	60	n/a	20	30	150	20	50	83,33
3	**30**	**6**				**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase UTTP yang ditera/tera ulang**	21,05							
3	**30**	**6**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase layanan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan**	100							

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcomes)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022*			Target Program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d tahu berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
3	30	6	2	01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,Alat Timbang, dan AlatPerlengkapan Ditera Ulang	15.400	1.638	4.000	4.045	75,98	4.000	9.683	62,88
3	30	6	2	01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	800	100	50	50	100	200	350	43,75
3	**30**	**7**				**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Persentase IKM yang mengikuti promosi produk**	100							
3	**30**	**7**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase layanan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	100							
3	30	07	2	01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	4	100,00
3	30	7	2	01	05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	180	40	70	70	100	60	170	94,44
3	30	7	2	01	06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	12	n/a	50	50	100	10	60	500

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2. dimana ada 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

1) Persentase pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 15% (kumulatif).
2) Pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai sebesar 35% (kumulatif)

Selanjutnya hasil analisis pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, ditampilkan dalam format tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU,SPM,IKK)	Satuan (IKU,SPM,IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase pertumbuhan nilai sektor perdagangan	persen	10	15	20	25	21,97	29,04	30	30	
2	Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai	persen	30	35	40	45	30	35	40	45	
3	Nilai AKIP PD	Nilai	80,10	82,15	80,20	80,25	80,96	81,73	82	82	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan

1. Pada tahun 2024, realisasi pencapaian sasaran pertumbuhan sektor perdagangan menunjukan hasil yang positif. Untuk mencapai target sasaran pertumbuhan sektor perdagangan tersebut dilaksanakan melalui 7 program prioritas yaitu :
   a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   b. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   c. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
   d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   e. Program Pengembangan Ekspor
   f. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
   g. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

   Sedangkan hal yang dilakukan untuk mengoptimalkan tingkat kinerja Dinas Perdagangan antara lain : Optimalisasi pendapatan dan keterbatasan lahan, mengintensifkan kegiatan promosi pemasaran produk lokal baik tingkat kabupaten maupun nasional, semakin menggiatkan promosi pasar tradisional di berbagai media dan event-event tertentu, meningkatkan pemantauan dan stabilisasi harga maupun distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dengan melakukan kegiatan pasar murah di berbagai lokasi serta lebih giat melakukan sosialisasi tentang tera dan tera ulang.

2. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :
   a. Belum optimalnya penyediaan fasilitas pasar rakyat yang memadai;
   b. Pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya sebarannya tidak merata, sehingga di beberapa wilayah distribusinya kurang merata;
   c. Hasil produk yang diekspor masih secara tidak langsung melalui eksportir dari luar daerah karena jumlah eksportir di Kabupaten Gunungkidul sangat sedikit;
   d. Belum semua pedagang paham/sadar bahwa tera/tera ulang timbangan wajib dilakukan setiap tahun sekali.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional

   Dengan melihat permasalahan yang dihadapi tidak menyurutkan langkah Dinas Perdagangan untuk ikut memajukan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah: “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”. Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul menjalankan Misi Bupati yang ke 2 yaitu : “Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”, dan sapta karya ke- 5 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan pedagang dengan membangun Sentra Industri Pertanian, Sentra Industri Peternakan, dan Perdagangan berbasis masyarakat;”

   Untuk menunjang keberhasilan pencapaian Misi dan Sapta Karya dari Bupati Gunungkidul tersebut Dinas Perdagangan melaksanakan 6 (enam) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang, yang salah satu programnya yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi

Perdagangan, dengan capaian programnya adalah pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan salah satu sasaran Bupati Gunungkidul yaitu pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai. Yang dimaksud pertumbuhan pasar dengan fasilitas memadai adalah bahwa pasar rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul harus diupayakan untuk pasar bukan hanya dari membangun baru fisik bangunan pasar dari tidak ada menjadi ada, tetapi lebih kepada penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik untuk keberhasilan pencapaian sasaran Bupati dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal ini pengunjung pasar yang mengarah kepada pasar sehat diantaranya pemisahan jenis dagangan yang basah dan kering, penyediaan wastafel, pasar yang sirkulasi udaranya baik, penerangan yang cukup penyediaan air bersih dan kondisi saluran air limbah sesuai aturan dari instansi terkait .

4. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul adalah :
   a. Tantangan
      1) Keberadaan dan Pertumbuhan pasar-pasar modern di Kabupaten Gunungkidul;
      2) Perlunya ditingkatkan kesadaran pedagang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya;
      3) Lahan untuk pengembangan pasar tidak ada;
      4) Permintaan layanan konsumen semakin tinggi.
   b. Peluang
      1) Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata;
      2) Potensi sumber daya ekonomi.

5. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
   a. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas;
   b. Mewujudkan peningkatan pendapatan pasar;
   c. Mewujudkan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
   d. Mewujudkan pasar sehat yang menyeluruh .

2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul dan tingkat kinerja yang dicapai Dinas Perdagangan dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

Reviu ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Perdagangan dari RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mengacu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi.

RKPD yang ada berasal dari usulan program dan kegiatan tahun yang lalu dan RKPD Kabupaten Tahun 2026, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang

diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi dan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas serta kinerja kegiatan yang belum tercapai maksimal pada renstra sebelumnya.

Reviu dari hasil analisis dengan membandingkan antara renja dengan hasil analisa kebutuhan, secara lengkap reviu disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**920.000.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.432.061.500,00**	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**682.061.500,00**	
						PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)**	**100 persen**	**6.700.000,00**	
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		*Dokumen Rencana Tenaga kerja*		*6.700.000,00*	
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	3.250.000,00	
						Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	25 orang	3.450.000,00	
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)**	**65,86-67,63 persen**	**510.406.500,00**	
						Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		*Pencari kerja yang meningkat kompetensinya*		*503.326.500,00*	
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 orang	373.326.500,00	
						Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	6 lembaga	130.000.000,00	
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		*Lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi*		*7.080.000,00*	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	14 lembaga	7.080.000,00	
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**	**75,01-76,99 persen**		
						Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		*Pencari kerja yang ditempatkan*		*2.500.000,00*	
						Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50 orang	2.500.000,00	
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		*Tingkat Kesempatan Kerja*		*67.217.500*	
						Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750 orang	67.217.500	
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)**	**40 persen**	**5.237.500,00**	
						Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama*		*4.837.500,00*	
						Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	6 perusahaan	4.837.500,00	
						Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		*Perselisihan hubungan industrial yang dicegah*		*90.400.000,00*	
						Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 perkara	30.675.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
						Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 AP dan SP	6.867.500,00	
						Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	47.720.000,00	
						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 orang	5.137.500,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**920.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**750.000.000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		**Persentase IKM yang mengikuti pameran**	**100 Persen**	**920.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Persentase IKM yang mengikuti pameran**	**100 persen**	**750.000.000**	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		*Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi dalam Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*	*100 unit*	*920.000.000*	*Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*		*Unit Usaha yang difasilitasi dalam Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*	*75 umkm*	*750.000.000*	
			Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	100							
	Pengembangan Industri Kreatif	Kab. Gunungkidul	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	100 unit	920.000.000	Pengembangan Industri Kreatif	Kab. Gunungkidul	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	75 umkm	750.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**14.127.787.359**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**11.016.022.845,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**14.127.787.359**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**10.924.130.345,00**	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik**	**100 Persen**	**9.321.265.359**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai AKIP PD**	**82**	**6.346.114.819,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*4,576 Indeks*	*70.000.000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja* *Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*11.593.750*	
			Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	57.140.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	781.250	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.320.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	625.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	468.750	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	330.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	468.750	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	7.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	3.750.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.260.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	750.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*428,90 indeks*	*7.971.864.359*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*14 laporan*	*5.651.408.246,00*	
			Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	*100 Persen*							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1274 Orang/bulan	7.938.664.359	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	5.604.703.446,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	31.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	10.250.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*4,5 Indeks*	*68.328.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*		*6.562.500*	
			Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen					100 Persen		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	3.328.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 dokumen	1.562.500	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	65.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*53,48 Indeks*	*206.150.000*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*174.218.643*	
			Persentase Administrasi Umum terlayani	100 Persen							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	7.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.744.375	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	67.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	50.639.063	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	4.600.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	5.261.875	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 paket	21.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	15.229.375	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250 Dokumen	1.350.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250 Dokumen	750.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	101.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	96.593.956	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	*6 unit*	*20.000.000*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Dokumen laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*	*13 unit*	***15.678.125***	
			Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	*100 Persen*							
	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	9.115.625	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	6.562.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana*	*76 Laporan*	*498.932.000*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*48 laporan*	***81.312.500***	
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	*100 Persen*							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan	455.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	80.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.350.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.312.500	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi pemeliharaanya*	*675 unit*	*486.000.000*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*380 unit*	*177.156.250*	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*100 Persen*							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	496 Unit	280.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	300 unit	144.500.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	1.750.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	1.562.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	113 unit	72.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	25.468.750	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	115.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	16.750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	5.625.000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		**Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi**	**100 Persen**	**20.948.000**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		**Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi**	**100 persen**	**17.500.000**	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		*Jumlah laporan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan*	*5 laporan*	*10.448.000*	*Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan*		*Pengawasan terhadap Pelaku usaha dalam perizinan dan pendaftaran perusahaan*	*5 Laporan*	***9.375.000***	
			Persentase layanan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan								

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Kab. Gunungkidul	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	5 laporan	10.448.000	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Kab. Gunungkidul	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	5 laporan	9.375.000	
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		*Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	*13 Laporan*	*10.500.000*	*Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*		*Pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya*	*5 laporan*	***8.125.000***	
			Persentase Layanan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya yang diawasi	*100 persen*							
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	13 laporan	10.500.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	5 laporan	8.125.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		**Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi**	**100 Persen**	**3.672.750.000**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		**Persentase pertumbuhan Omset pasar rakyat**	**2 persen**	**3.643.121.526,00**	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		*Indeks Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	*40 Indeks*	*3.573.000.000*	*Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*		*Sarana dan prasana pasar rakyat yang memadai*	*40 unit*	*3.643.121.526,00*	
			Persentase layanan sarana distribusi perdagangan	*100 persen*							
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	40 Unit	1.573.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	40 Unit	1.150.291.460,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	40 Unit	2.000.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	40 Unit	2.492.830.066,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		*Jumlah dokumen hasil Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*	*25 dokumen*	*99.750.000*	*Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*		*Pembinaan terhadap komunitas pasar*	*12 dokumen*	*162.255.000,00*	
			Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dilaksanakan	*100 persen*							
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan	25 Dokumen	99.750.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan	12 dokumen	162.255.000,00	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		**Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya**	**100 Persen**	**93.161.000**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		**Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**100 persen**	**170.310.000,00**	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		*Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	*2 laporan*	*60.086.000*	*Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*		*Laporan ketersediaan barang pokok dan barang penting*	*8 laporan*	*112.310.000,00*	
			Persentase layanan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya yang dipantau dan diawasi	*100 persen*							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	6.615.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	7.375.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	53.471.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	104.935.000,00	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		*Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	*13 Laporan*	*18.743.000*	*Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*		*Laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*	*16 laporan*	*45.500.000,00*	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase layanan Ketersediaan data informasi perdagangan	*100 Persen*							
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	7.167.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	35.812.500,00	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	11.576.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	9.687.500	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		*Indeks Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*5 Indeks*	*14.332.000*	*Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		*Laporan pengawasan kelengkapan legalitas dokumen perizinan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi*	*5 indeks*	*12.500.000,00*	
			Persentase layanan terhadap pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	*100 Persen*							
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5 Dokumen	7.166.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5 Dokumen	6.250.000	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	7.166.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	6.250.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		**IKM yang berorientasi Ekspor**	**32 Unit**	**587.075.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		**Nilai ekspor barang dan jasa**	**11,2 - 12,5 T**	**149.203.000,00**	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang		*Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang*	*26 Pelaku Usaha*	*587.075.000*	*Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang*		*Fasilitasi pelaku usaha berorientiasi ekspor*	*26 Pelaku Usaha*	*149.203.000,00*	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		*terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*			*terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*					
			Persentase layanan penyelenggaran promosi dagang	100 Persen							
	Pameran Dagang Nasional	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 pelaku usaha	537.075.000	Pameran Dagang Nasional	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	7 Pelaku Usaha	139.288.500,00	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	20 pelaku usaha	50.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	20 Pelaku Usaha	9.218.750,00	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		**Persentase UTTP yang ditera/tera ulang**	**21,05 Persen**	**294.500.000**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		**Persentase UTTP yang ditera/tera ulang**	**12,73 persen**	**196.360.000**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		*Indeks Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*	*2100 indeks*	*294.500.000*	*Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*		*Laporan kemetrologian*		*196.360.000,00*	
			Persentase layanan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	*2050 Indeks*							
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Gunungkidul	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4000 unit	275.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Gunungkidul	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4400 uttp	186.485.000,00	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 orang	19.500.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Gunungkidul	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	90 orang	9.875.000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		**Persentase IKM yang mengikuti promosi produk**	**100 persen**	**138.088.000**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**Persentase peningkatan omset IKM**	**10 persen**	***239.295.000,00***	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		*Indeks Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	*32 indeks*	*138.088.000*	*Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*		*Fasilitasi promosi produk UMKM*	*375 umkm*	*239.295.000,00*	
			Persentase layanan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*100 Persen*							

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	60 UMKM	132.300.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 umkm	128.255.000,00	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yangmemperoleh fasilitasipemasaran produk dalamnegeri melalui kemitraandengan retail, marketplace,perhotelan dan jasaakomodasi	4 UMKM	5.788.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yangmemperoleh fasilitasipemasaran produk dalamnegeri melalui kemitraandengan retail, marketplace,perhotelan dan jasaakomodasi	300 umkm	111.040.000,00	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				**91.892.500,00**	
						PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		**Persentase Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan**	**100 persen**	**91.892.500,00**	
						Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		*Transmigran yang terfasilitasi pemberangkatan dan penempatannya*		*91.892.500,00*	
						Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	4 KK	60.660.000,00	
						Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat		Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	4 KK	225.000,00	
						Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal		Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	225 orang	27.895.000,00	
						Cek Kesehatan Calon Transmigran		Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	4 KK	3.112.500,00	
Jumlah					15.047.787.359	Jumlah				12.448.084.500,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jejaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi, maupun dari hasil kajian kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan serta mengakomodir pokok-pokok pikiran dari Dewan.

Perencanaan kegiatan pada Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul mendasarkan pada :

a. Program Dinas berdasar usulan dari data teknis terkait tupoksi dinas, yaitu :
   1. Program Perencanaan Tenaga Kerja,
   2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,
   3. Program Penempatan Tenaga Kerja,
   4. Program Hubungan Industrial,
   5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
   7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan,
   8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan,
   9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,
   10. Program Pengembangan Ekspor,
   11. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,
   12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri,
   13. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

b. Usulan dari masyarakat dengan mekanisme Musrenbang
   Pada tahun 2026 usulan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Perdagangan dan Tenaga kerja sebanyak 13 usulan yang dapat diterima dan semua dapat terdanai dari penganggaran PIWK (Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan) 3 usulan dan PIS (Pagu Indikatif Sektoral) sebanyak 10 usulan.

c. Usulan dari pokok-pokok pikiran anggota dewan
   Pada tahun 2026 tidak ada usulan dari pokok-pokok pikiran anggota dewan kepada Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja tetapi program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2026 diusahakan dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran anggota dewan.

Secara lengkap dan menyeluruh usulan dari masyarakat dengan mekanisme Musrenbang ditampilkan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1.	(PIWK) - Pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	Monggol, Saptosari Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dan melalui pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	1 kelompok	13.880.000,00	13.880.000,00	Diterima
2.	(PIWK) - Pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	Sumberwungu, Tepus Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dan melalui pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	1 kelompok	13.880.000,00	13.880.000,00	Diterima
3.	(PIS) - Pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	Nglindur, Girisubo, Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dan melalui pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	1 kelompok	13.880.000,00	13.880.000,00	Diterima
4.	(PIS) - Pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	Girisekar, Panggang Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dan melalui pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	1 kelompok	13.880.000,00	13.880.000,00	Diterima
5.	(PIS) - Pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	Siraman, Wonosari Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dan melalui pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	2 kelompok	13.880.000,00	27.760.000,00	Diterima
6.	(PIS) - Pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	Planjan, Saptosari Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dan melalui pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	1 kelompok	13.880.000,00	13.880.000,00	Diterima

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
7.	(PIS) - Pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	Ngloro, Saptosari Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dan melalui pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	1 kelompok	13.880.000,00	13.880.000,00	Diterima
8.	(PIS) - Pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	Sidoharjo, Tepus Kab. Gunungkidul	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi dan melalui pelatihan Digital Marketing pada marketplace UMKM.gunungkidulkab.go.id	2 kelompok	13.880.000,00	27.760.000,00	Diterima
9.	(PIS) - Promosi Produk Pelaku Usaha	Petir, Rongkop Kab. Gunungkidul	Promosi Produk bagi 10 pelaku usaha kuliner	2 kelompok	18.800.000,00	37.600.000,00	Diterima
10.	(PIS) - Promosi Produk Pelaku Usaha	Karangasem, Paliyan Kab. Gunungkidul	Promosi Produk bagi 10 pelaku usaha kuliner	1 kelompok	18.800.000,00	18.800.000,00	Diterima
11.	(PIS) - Promosi Produk Pelaku Usaha	Giritirto, Purwosari Kab. Gunungkidul	Promosi Produk bagi 10 pelaku usaha kuliner	1 kelompok	18.800.000,00	18.800.000,00	Diterima
12.	(PIS) - Promosi Produk Pelaku Usaha	Tileng, Girisubo Kab. Gunungkidul	Promosi Produk bagi 10 pelaku usaha kuliner	1 kelompok	18.800.000,00	18.800.000,00	Diterima
13.	(PIWK) - Pelatihan Pengelasan	Sendang 2, Sawahan, Ponjong	Pelatihan Pengelasan	1 kelompok	71.654.000,00	71.654.000,00	Diterima

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Dalam menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan harus sesuai dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (RKP 2026) merupakan RKP Tahun kedua RPJMN 2025-2029. Tema prioritas pembangunan Tahun 2026 disusun dengan merespon dampak yang diakibatkan oleh pandemi *corona virus disease2019 (covid-19),* sehingga akan mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2026 adalah: “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Meningkatkan Daya Saing.”

Untuk mendukung pembangunan nasional tema prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul juga harus sejalan dengan tema Pembangunan DIY yaitu: ”Pengembangan Sektor Unggulan Yang Kreatif Dan Inovatif Menuju Pertumbuhan Ekonomi Yg Inklusif”. Prioritas pembangunan DIY sesuai dalam RKPD DIY Tahun 2026 yaitu :

a. Penurunan tingkat kemiskinan;
b. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
c. Pencegahan dan penurunan stunting;
d. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
e. Penurunan ketimpangan (anatar social, antar wilayah);
f. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan;
g. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terteram.

Berdasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, Tema Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 adalah :“ Penguatan Ekonomi Daerah, Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur dan Peningkatan SDM yang Unggul”

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul akan dilaksanakan dengan 7 Program prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2026 yaitu :

a. Peningkatan Ekonomi;
b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Penanggulangan Stunting;
c. Ketahanan Pangan;
d. Peningkatan Kualitas SDM;
e. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
f. Ketentraman dan Ketertiban;
g. Reformasi Birokrasi.

Demi tercapainya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka

prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul selaras dengan Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterjemahkan ke dalam Sasaran Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul diantaranya pendapatan masyarakat yang meningkat sesuai dan sejalan dengan sasaran Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul yaitu Kontribusi Sektor Perdagangan dan Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja.

Program pembangunan bidang perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergiskan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Telaah terhadap kondisi perekonomian nasional pada tahun 2026 diselaraskan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Prsiden khususnya dalam mendukung sasaran strategis agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi dengan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama perdagangan dan tenaga kerja internasional meminimalisasi dampak globalisasi dan mengembangkan kapasitas perdagangan dan tenaga kerja nasional atau sembilan agenda nasional khususnya pada meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Sesuai dengan tema pembangunan DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menentukan kebijakan meningkatkan meningkatan daya saing industri dan perdagangan, meningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan mengembangkan pasar baru, meningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatan kualitas produk dan jasa, mengendalian harga dan stabilitas pasokan, melakukan pengawasan terhadap peredaran barang, meningkatan kerja sama antar pelaku industri dan perdagangan dan meningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk dalam negeri. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempunyai kebijakan meningkatkan kualitas daya saing tennaga kerja dengan focus pada program-progran pelatihan, meningkatkan lapangan kerja baru dengan menempatan tenaga kerja ke dalam perusahaan-perusahaan maupun melalui dukungan terhadap wirausaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi yaitu dengan membantu masyarakat yang ingin berpindah ke daerah lain agar mendapatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan.

Terkait kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai yaitu dengan dibangunannya jalur lintas yang menghubungkan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul melewati Ngoro Oro Patuk, Gedangsari dan Gading Playen. Di mana pembangunan ini akan selesai Tahun 2026 dan Jalan Lintas Selatan yang semakin terbangun panjang akan membuka pintu bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul dari segala arah. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung akan membawa dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan UMKM dan penyerapan tenaga kerja. Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja menyikapi dengan mempersiapkan UMKM agar bisa mempromosikan produk-produknya dan mempersiapkan tenaga kerja lokal dengan meningkatkan ketrampilan dan kompetensi dengan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan.

Sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam pengentasan kemiskinan selama ini ditujukan di wilayah-wilayah yang

menjadi prioritas kecamatan miskin, yaitu Kecamatan Playen, Semin, Nglipar, Tepus, Girisubo, Gedangsari, Saptosari dengan pembangunan yang merata akan meningkatkan akses dan perekonomian. Untuk mendukung kebijakan tersebut Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja yang mengampu urusan bidang perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi diantaranya melaksakan hal-hal sebagai berikut:

- selalu memperhatikan kondisi sarana distribusi perdagangan rakyat di tengah menjamurnya pasar-pasar modern dan online shop yaitu Pasar Rakyat yang masih sangat dibutuhkan masyarakat pedesaan. selalu memantau p
- pemerataan distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya sebagai salah satu cara mengendalikan stabilisasi harga.
- Melaksanakan pelatihan-pelatihan masyarakat untuk meningktakan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul adalah : “Terwujudnya daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja”.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2026 yaitu :

- Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan
- Meningkatnya penempatan tenaga kerja

Tujuan, prioritas dan sasaran Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja disajikan sebagaimana dalam tabel 3.1 dan 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja PD Tahun 2030
1	Terwujudnya daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja	Indeks daya saing sektor perdagangan dan tenaga kerja	84,68

Tabel 3.2
Prioritas dan Sasaran Dinas Perdagangan

No	*Prioritas*	*Sasaran Daerah*	*Indikator Sasaran Daerah (Outcome)*	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Ekonomi	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkulitas dan berdaya saing	PDRB	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	PDRB sektor perdagangan

Prioritas dan Sasaran Dinas Perdagangan

No	*Prioritas*	*Sasaran Daerah*	*Indikator Sasaran Daerah (Outcome)*	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dari suatu tujuan oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (5) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran dirancang pula indikator sasaran sesuai tugas dan fungsi PD. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun berjalan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian targetnya. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahun secara berkesinambungan sejalan dengan ditetapkan dalam Rencana Strategis. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja antara lain sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2026
1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	8,68 - 8,89
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	65%

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, dan dalam rangka mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul, maka disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja seperti tersaji dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja IKU Tahun 2026
1	PDRB sektor perdagangan	Persentase PDRB sektor perdagangan	8,68 - 8,89
2	Penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	65

a. Belanja Operasi

Dalam Renja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2026 selain melaksanakan program dan kegiatan yang masuk dalam Belanja Daerah yang meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa juga melaksanakan Belanja Modal, Belanja Pegawai yaitu anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gaji pegawai Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul, selama 1 (satu) tahun sebanyak 110 orang, anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp5.604.703.446,00 yang terdiri dari gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan,tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum,tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji dan tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.

b. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul disusun melalui mekanisme penyusunan sesuai format Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026, dan dalam rangka pencapaian visi, misi, Kebijakan Umum Bupati dan mewujudkan prioritas pembangunan. Rumusan rencana program dan kegiatan yang disusun merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renja Tahun 2025 yang lalu, identifikasi isu-isu staretgis, reviu atas rencana awal Renja PD, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

c. Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2026

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020, Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2026 akan melaksanakan 13 program, 26 Kegiatan, 61 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, terdiri dari 1 kegiatan :
   a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), terdiri dari 2 sub kegiatan :
      - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
      - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari 2 kegiatan :
   a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, terdiri dari 2 sub kegiatan :
      - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
      - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, terdiri dari 1 sub kegiatan :
   - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3. Program Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari 2 kegiatan :
   a. Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 sub kegiatan :
      - Perluasan Kesempatan Kerja
   b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, terdiri dari 1 sub kegiatan :
      - Job Fair/Bursa Kerja

4. Program Hubungan Industrial, terdiri dari 2 kegiatan :
   a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 sub kegiatan :
      - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
   b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 sub kegiatan :
      - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
      - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota, terdiri dari 7 kegiatan :
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan :
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :
      - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Mebel
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, terdiri dari 2 kegiatan :
   a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan, terdiri dari 1 sub kegiatan :
      - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan took swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektrik
   b. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 1 sub kegiatan :
      - Pengawasan Distribusi,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2(P-B2).

7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari 2 kegiatan:
   a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari 2 sub kegiatan :
      - Penyediaan Sarana distribusi Perdagangan
      - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
   b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, terdiri dari 1 sub kegiatan :
      - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, terdiri dari 3 kegiatan :
   a. Kegiatan Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota, terdiri dari 2 sub kegiatan :
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
   b. Kegiatan Pengendalian Harga,Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Pasar, terdiri dari 2 sub kegiatan :
      - Pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
      - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
   c. Kegiatan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota, terdiri dari 2 sub kegiatan :
      - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
      - Pengawsan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

9. Program Pengembangan Ekspor, terdiri dari 1 kegiatan :
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 sub kegiatan :
      - Pameran Dagang Nasional
      - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

10. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari 1 kegiatan:
    a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, terdiri dari 2 sub kegiatan :
       - Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,Tera Ulang
       - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, terdiri dari 1 kegiatan :
    a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, terdiri dari 2 sub kegiatan :
       - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
       - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

12. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, terdiri dari 1 kegiatan :
    a. Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi, terdiri dari 1 sub kegiatan :
       - Pengembangan Industri Kreatif

13. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari 1 kegiatan :
    a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 sub kegiatan :
        - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
        - Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat
        - Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal
        - Cek Kesehatan Calon Transmigran

Prioritas, Sasaran Daerah Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 tersaji dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2026

Prioritas	*Sasaran Daerah*	*Indikator Sasaran Daerah*	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Ekonomi	*Terwujudnya perekonomian daerah yang berkulitas dan berdaya saing*	*PDRB*	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan	8.68-8.89	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	7.375.000,00	6.615.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
								Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	104.935.000,00	53.471.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
							Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam satu(1) Kabupaten/Kota	35.812.500,00	7.167.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Prioritas	*Sasaran Daerah*	*Indikator Sasaran Daerah*	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pemantauan Harga Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	9.687.500,00	11.576.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
							Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	6.250.000,00	7.166.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
								Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6.250.000,00	7.166.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
						Program Pengembangan Eksport	Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk	Pameran Dagang Nasional	139.988.500,00	537.075.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Prioritas	*Sasaran Daerah*	*Indikator Sasaran Daerah*	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							eksport unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	9.215.000,00	50.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
						Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal,berupa Tera,Tera Ulang	186.485.000,00	275.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
								Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	9.875.000,00	19.500.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
						Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	128.255.000,00	132.300.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Prioritas	*Sasaran Daerah*	*Indikator Sasaran Daerah*	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	111.040.000,00	5.788.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
						Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan took swalayan melalui Ssistem Perizinan Berusaha melalui Sisten Elektronik	9.375.000,00	19.950.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Prioritas	*Sasaran Daerah*	*Indikator Sasaran Daerah*	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya(PA-B2) maupun ProdusenB2(P-B2)	8.125.000,00	15.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
						Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Industri Kreatif	750.000.000,00	920.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Prioritas	*Sasaran Daerah*	*Indikator Sasaran Daerah*	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.150.291.460,00	1.573.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
								Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.492.830.066,00	2.000.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
							Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	162.225.500,00	99.750.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	65%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	3.250.000,00	3.850.000	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
								Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	3.450.000,00	7.350.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Prioritas	*Sasaran Daerah*	*Indikator Sasaran Daerah*	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	373.326.500,00	1.103.870.100,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
								Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	130.000.000,00	165.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
							Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	7.080.000,00	4.600.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	2.500.000,00	1.750.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Prioritas	*Sasaran Daerah*	*Indikator Sasaran Daerah*	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	67.217.500,00	139.635.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
						Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	4.837.500,00	7.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
							Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.675.000,00	100.485.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Prioritas	*Sasaran Daerah*	*Indikator Sasaran Daerah*	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	6.867.500,00	7.850.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
								Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	47.720.000,00	46.640.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
								Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5.137.500,00	5.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Prioritas	*Sasaran Daerah*	*Indikator Sasaran Daerah*	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD
				Indikator	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.660.000,00	113.005.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
								Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	225.000,00	2.920.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
								Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	27.895.000,00	35.210.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
								Cek Kesehatan Calon Transmigran	3.112.500,00	4.725.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
Total									6.101.969.526,00	7.476.162.136,00	

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2026

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Maju 2027 (Rp.)	SKPD
1	2	3	4	5
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.346.114.819,00	8.910.192.359,00	
3.30.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.298.700,00	70.000.000,00	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.155.000,00	57.140.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	882.000,00	1.650.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	625.000,00	1.320.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	568.750,00	1.100.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	468.750,00	330.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.850.000,00	7.200.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000,00	1.260.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.651.408.246,00	7.971.864.359,00	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.604.703.446,00	7.938.664.359,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.02.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.750.000,00	2.200.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.954.800,00	31.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.562.500,00	68.328.000,00	
3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.562.500,00	3.328.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	65.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.676.900,00	206.150.000,00	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.742.000,00	7.200.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.496.000,00	67.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.259.000,00	4.600.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Maju 2027 (Rp.)	SKPD
1	2	3	4	5
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.341.900,00	21.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.350.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	3.500.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.06.0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.638.000,00	101.500.000,00	Dinas Perdagangan
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.512.000,00	20.000.000,00	
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	9.512.000,00	20.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.506.473,00	87.850.000,00	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listri	80.055.140,00	45.500.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.451.333,00	42.350.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.150.000,00	486.000.000,00	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.600.000,00	280.000.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	1.750.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.550.000,00	72.500.000	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja
3.30.01.2.09.00010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000,00	16.750.000,00	Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 tersebut di atas, akan dilaksanakan dan didanai dengan pagu indikatif anggaran sebesar Rp15.345.354.459,00 (lima Belas Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan sumber anggaran pendanaan dari APBD Kabupaten Gunungkidul, selengkapnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Tahun 2026 disajikan dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		9	10
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**682.061.500,00**				**1.593.780.100**
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Capaian dokumen Perencanaan Tenaga Kerja**		**100 persen**	**6.700.000**				**11.200.000**
2.07.02.2.01	*Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)*	*Dokumen Rencana Tenaga kerja*			*6.700.000*				*11.200.000*
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Gunungkidul	1 Dokumen	3.250.000	Dana Alokasi Umum			3.850.000
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Kab.Gunungkidul	25 Orang	3.450.000	Dana Alokasi Umum			7.350.000
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)**		**65,86-67,63 persen**	**510.406.500**				**1.274.220.100**
2.07.03.2.01	*Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	*Pencari kerja yang meningkat kompetensinya*			*503.326.500*				*1.269.620.100*
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab.Gunungkidul	64 Orang	373.326.500	Dana Alokasi Umum			1.103.870.100
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi	Kab.Gunungkidul	6 Lembaga	130.000.000	Dana Alokasi Umum			165.750.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		9	10
		dan Produktivitas pada Tahun n							
2.07.03.2.02	*Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*	*Lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi*			*7.080.000*				*4.600.000*
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab.Gunungkidul	14 Lembaga	7.080.000	Dana Alokasi Umum			4.600.000
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**		**75,01-76,99 persen**	**69.717.500**				**141.385.000**
2.07.04.2.01	*Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota*	*Pencari kerja yang ditempatkan*			*2.500.000*				*1.750.000*
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab.Gunungkidul	50 Orang	2.500.000	Dana Alokasi Umum			1.750.000
2.07.04.2.03	*Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*	*Tingkat Kesempatan Kerja*			*67.217.500*				*139.635.000*
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab.Gunungkidul	750 Orang	67.217.500	Dana Alokasi Umum			139.635.000
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)**		**40 persen**	**95.237.500**				**166.975.000**
2.07.05.2.01	*Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama*			*4.837.500*				*7.000.000*
2.07.05.2.01.0003	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab.Gunungkidul	6 Perusahaan	4.837.500	Dana Alokasi Umum			7.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		9	10
2.07.05.2.02	*Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*	*Perselisihan hubungan industrial yang di cegah*			*90.400.000*				*159.975.000*
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab.Gunungkidul	4 Perkara	30.675.000	Dana Alokasi Umum			100.485.000
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab.Gunungkidul	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	6.867.500	Dana Alokasi Umum			7.850.000
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab.Gunungkidul	1 Lembaga	47.720.000	Dana Alokasi Umum			46.640.000
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab.Gunungkidul	50 Orang	5.137.500	Dana Alokasi Umum			5.000.000
2.22	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN**				**750.000.000**				**920.000.000,00**
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase IKM yang mengikuti pameran**		**100 persen**	**750.000.000**				**920.000.000,00**
2.22.08.5.06	*Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*	*Unit Usaha yang difasilitasi dalam Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*			*750.000.000*				*920.000.000,00*

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		9	10
2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah industri kreatif yang dikembangkan	Kab. Gunungkidul	105 unit	750.000.000	Dana Keistimewaan Yogyakarta			920.000.000,00
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN**								
3.30	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN**				**10.924.130.345**				**13.716.714.359,00**
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP PD**		**82 nilai**	**6.346.114.819**				**8.910.192.359**
3.30.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah* *Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			44.298.700	Dana Alokasi Umum			70.000.000,00
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	2 dokumen	37.155.000	Dana Alokasi Umum			57.140.000,00
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	2 dokumen	882.000	Dana Alokasi Umum			1.650.000,00
3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	2 dokumen	625.000	Dana Alokasi Umum			1.320.000,00
3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	2 dokumen	568.000	Dana Alokasi Umum			1.100.000,00
3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	2 dokumen	468.750	Dana Alokasi Umum			330.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		9	10
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	17 laporan	3.850.000	Dana Alokasi Umum			7.200.000,00
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	5 laporan	750.000	Dana Alokasi Umum			1.260.000,00
3.30.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			5.651.408.246				7.971.864.359,00
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	75 0rang/bulan	5.604.703.446	Dana Alokasi Umum			7.938.664.359,00
3.30.01.2.02.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	1 laporan	1.750.000	Dana Alokasi Umum			2.200.000,00
3.30.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	13 laporan	44.954.800	Dana Alokasi Umum			31.000.000,00
3.30.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*			6.562.500				68.328.000,00
3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	7 dokumen	1.562.500	Dana Alokasi Umum			3.328.000,00
3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	1 orang	5.000.000	Dana Alokasi Umum			65.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		9	10
		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
3.30.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Dokumen Administrasi Umum*			277.676.900				206.150.000,00
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	4 paket	3.742.000	Dana Alokasi Umum			7.200.000,00
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	21 paket	52.496.000	Dana Alokasi Umum			67.000.000,00
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	10 paket	5.259.000	Dana Alokasi Umum			4.600.000,00
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	18 paket	10.341.900	Dana Alokasi Umum			21.000.000,00
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	250 Dokumen	1.200.000	Dana Alokasi Umum			1.350.000,00
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	12 laporan	2.000.000	Dana Alokasi Umum			3.500.000,00
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	24 laporan	202.638.000	Dana Alokasi Umum			101.500.000,00
3.30.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Dokumen laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*			9.512.000	Dana Alokasi Umum			20.000.000,00
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	2 unit	9.512.000	Dana Alokasi Umum			20.000.000,00
3.30.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			182.506.473				87.850.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		9	10
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	36 laporan	80.055.140	Dana Alokasi Umum			46.500.000
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	12 Laporan	102.2451.333	Dana Alokasi Umum			42.350.000,00
3.30.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*			*174.150.000*				*486.000.000,00*
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	329 unit	143.600.000	Dana Alokasi Umum			280.000.000,00
3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	14 unit	1.500.000	Dana Alokasi Umum			1.750.000,00
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	61 unit	24.550.000	Dana Alokasi Umum			72.500.000,00
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atas Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	15 unit	4.500.000	Dana Alokasi Umum			16.750.000,00
03.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi**	**Kab. Gunungkidul**	**100 persen**	**17.500.000**				**20.948.000**
3.30.02.2.01	*Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan*	*Pengawasan terhadap Pelaku usaha dalam perizinan dan pendaftaran perusahaan*			*9.375.000*				*10.448.000,00*
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen,	Jumlah laporan Hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk	Kab. Gunungkidul	5 laporan	9.375.000	Dana Alokasi Umum			10.448.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		9	10
	grosir/perkulakan dan took swalayan melalui Ssistem Perizinan Berusaha melalui Sisten Elektronik	distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Ssistem Perizinan Berusaha melalui Sisten Elektronik							
3.30.02.2.06	*Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	*Pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya*			*8.125.000*				*10.500.000,00*
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2	Kab. Gunungkidul	5 laporan	8.125.000	Dana Alokasi Umum			10.500.000,00
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pertumbuhan Omset pasar rakyat**	**Kab. Gunungkidul**	**2 persen**	**3.805.347.026**				**3.672.750.000,00**
3.30.03.2.01	*Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	*Sarana dan prasana pasar rakyat yang memadai*			*3.643.121.526*				*3.573.000.000,00*
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	40 unit	1.150.291.460	Dana Alokasi Umum			1.573.000.000,00
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	40 unit	2.492.830.066	Dana Alokasi Umum			2.000.000.000,00
3.30.03.2.02	*Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*	*Pembinaan terhadap komunitas pasar*	*Kab. Gunungkidul*		*162.225.500*				*99.750.000,00*
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Gunungkidul	12 dokumen	162.225.500	Dana Alokasi Umum			99.750.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		9	10
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting**		**100 persen**	**170.310.000**				**93.161.000,00**
3.30.04.2.01	*Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	*Laporan ketersediaan barang pokok dan barang penting*			*112.310.000*				*60.086.000,00*
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	4 laporan	7.375.000	Dana Alokasi Umum			6.615.000,00
3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	4 laporan	104.935.000	Dana Alokasi Umum			53.471.000,00
3.30.04.2.02	*Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	*Laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*			*45.500.000*				*18.743.000,00*
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	4 laporan	35.812.500	Dana Alokasi Umum			7.167.000,00
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	12 laporan	9.687.500	Dana Alokasi Umum			11.576.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		9	10
3.30.04.2.03	*Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Laporan pengawasan kelengkapan legalitas dokumen perizinan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi*			*12.500.000*				*14.332.000,00*
3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	5 dokumen	6.250.000	Dana Alokasi Umum			7.166.000,00
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	5 laporan	6.250.000	Dana Alokasi Umum			7.166.000,00
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai ekspor barang dan jasa**		**11.200–12.500 M**	**149.203.500**				**587.075.000,00**
3.30.05.2.01	*Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Fasilitasi pelaku usaha berorientiasi ekspor*			*149.203.500*				*587.075.000,00*
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jakarta, Jakarta, DIY	6 pelaku usaha	139.988.500	Dana Alokasi Umum			537.075.000,00
3.30.05.2.01.0006	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	20 pelaku usaha	9.215.000	Dana Alokasi Umum			50.000.000,00
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase UTTP yang ditera/tera ulang**		**12,73 persen**	**196.360.000**				**294.500.000,00**
3.30.06.2.01	*Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*	*Laporan kemetrologian*			*196.360.000*				*294.500.000,00*
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Wilayah Kabupaten Gunungkidul	4400 uttp	186.485.000	Dana Alokasi Umum			275.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		9	10
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab.Gunungkidul	90 orang	9.875.000	Dana Alokasi Umum			19.500.000,00
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase peningkatan omset IKM**		**10 persen**	**239.295.000**				**138.088.000,00**
3.30.07.2.01	*Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	*Fasilitasi promosi produk UMKM*			*229.295.000*				*138.088.000,00*
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunungkidul	100 umkm	128.255.000	Dana Alokasi Umum			132.300.000,00
3.30.07.2.01.0003	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kabupaten Gunungkidul	300 umkm	111.040.000	Dana Alokasi Umum			5.788.000,00
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**91.892.500**				**149.860.000**
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan**		**100 persen**	**91.892.500**				**149.860.000**
3.32.03.2.01	*Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Transmigran yang terfasilitasi pemberangkatan dan penempatannya*			91.892.500				149.860.000
3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kab.Gunungkidul	4 KK	60.660.000	Dana Alokasi Umum			113.005.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7		9	10
3.32.03.2.01.0008	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	Kab.Gunungkidul	4 KK	225.000	Dana Alokasi Umum			2.920.000
3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab.Gunungkidul	225 Orang	27.895.000	Dana Alokasi Umum			29.210.000
3.32.03.2.01.0016	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	Kab.Gunungkidul	4 KK	3.112.500	Dana Alokasi Umum			4.725.000

BABV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas PD Tahun 2026 mengacu pada rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat Program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju,disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan prioritas dari usulan tiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga diharapkan ketersediaan anggaran bisa menyesuaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan ini akan dilaksanakan di tahun 2026 dengan memperhatikan pedoman, peraturan dan kebijakan yang harus dipatuhi. Diharapkan perencanaan tahunan ini semua program dan kegiatan dapat tertampung dan dilaksanakan, dan tidak hanya menjadi sebuah dokumen.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Forum Gabungan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada awal Tahun 2025 maka Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 yang mana waktu penyusunan Renja Tahun 2026 simultan dengan waktu penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau prosesselanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

ttd

KELIK YUNIANTORO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu (1) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima (5) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renja serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Rencana Pembangunan Perencanaan yang sistematis dan matang, baik dari perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi Perangkat Daerah. RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah (PD) yang telah tersusun merupakan dasar untuk menyusun perencanaan tahap selanjutnya, yaitu Renja yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang.

Keterkaitan dokumen perencanaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Renja PD dengan RKPD
   RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif. Renja PD disesuaikan dengan program prioritas PD.
2. Renja PD dengan Renstra PD

Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.

3. Renja PD dengan Renja K/L (Kementerian/ Lembaga) dan PD Provinsi
   Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD provinsi.

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029. Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dan memuat arah kebijakan, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme Musrenbang. Selain itu Renja memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja PD juga disinergikan dengan Renja Kementerian/Lembaga serta Renja Provinsi.

Penyusunan Renja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum PD, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Renja. Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026 menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan dalam RAPBD tahun 2026 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta memuat rencana program kegiatan sesuai dengan tupoksi PD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan agar penyusunan Renja PD hingga pengamanan alokasinya di RAPBD 2026 dapat berjalan efektif. Langkah-langkah tersebut antara lain :

1. Melanjutkan implementasi *Money Follow Program;*
2. Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat-Daerah;
3. Memperkuat kendali program.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disempurnakan dengan berpedoman pada rancangan RKPD Tahun 2026, memastikan terakomodirnya belanja wajib dan mengikat, kebijakan belanja prioritas, memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD Tahun 2026, yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2026;
3. Menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. *Reviu* terhadap Renja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja tahunan tetap berpedoman pada tahap perencanaan sebelumnya. Untuk itu dalam proses penyusunan Renja-SKPD tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan *review* capaian Rencana Strategis (Renstra) PD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian target kinerja.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2/Tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2025) dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan.

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yang mendapatkan alokasi anggaran dalam DPPA adalah sebesar Rp 26.974.766.214,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 26.962.806.214,00 dan belanja modal sebesar Rp 12.000.000,00. Belanja Operasi dibagi menjadi Belanja Pegawai Sebesar Rp 3.223.994.490,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 23.738.771.724,00. Sedangkan belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 94.600.00,00 dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp 12.000.000,00. Jumlah program kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 terdiri dari 16 program, 23 kegiatan, dan 61 sub kegiatan.

Pencapaian Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja s.d Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 | Persen	99.35 | Persen	100|Persen	99.86 | Persen	99.86	100 |Persen	100 | Persen	100
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.714 | Indeks	4.429|Indeks	4.429|Indeks	4.429|Indeks	100	4.429|Indeks	4.429 | Indeks	93,95

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|Persen	100 | Persen	100
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 | Dokumen	4|Dokumen	4|Dokumen	4|Dokumen	100	4|Dokumen;	4 | Dokumen	100
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 | Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1|Dokumen	1 | Dokumen	100
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 | Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1|Dokumen	1 | Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 | Dokumen	2|Dokumen	2|Dokumen	2|Dokumen	100	2|Dokumen	2 | Dokumen	100
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 | Dokumen	2|Dokumen	2|Dokumen	2|Dokumen	100	2|Dokumen	2 | Dokumen	100
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 | Laporan	17|Laporan	17|Laporan	17|Laporan	100	17|Laporan	17 | Laporan	100
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 | Laporan	4|Laporan	4|Laporan	4|Laporan	100	4|Laporan	4 | Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 | Berita Acara	-	-	-	-	1 | Berita Acara	1 | Berita Acara	100
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	266 | Indeks	264 |Indeks	266|Indeks	266|Indeks	100	266|Indeks	266 | Indeks	100
		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|persen	100 | persen	100
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 | Orang/bulan	774|Orang/bulan	686|Orang/bulan	686|Orang/bulan	100	784 Orang / Bulan	784 | Orang/Bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 | Laporan	1|Laporan	1|Laporan	1|Laporan	100	1 | Laporan	1 | Laporan	100
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 | Laporan	13|Laporan	13|Laporan	13|Laporan	100	13 | Laporan	13 | Laporan	100
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pengelolaan BMD	2 | laporan	2 | laporan	2|Laporan	2|Laporan	100	2|laporan	2 | laporan	100
		Persentase laporan administrasi pengelolaan BMD yang tersusun tepat waktu	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|persen	100 | persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 | Laporan	4|Laporan	2|Laporan	2|Laporan	100	2 lLaporan	2 | Laporan	100
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 | Indeks	100	24|Indeks	24|Indeks	100	6|indeks	6 | indeks	24
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|persen	100 | persen	100
2.17.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 | Dokumen	8|Dokumen	10|Dokumen	10|Dokumen	100	11|Dokumen	11 | Dokumen	100
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	56,000 | Indeks	54.07 | Persen	56.222|Indeks	56.222|Indeks	99.55	56.000 indeks	56,000 | indeks	100
		Persentase Administrasi Umum terlayani	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|persen	100 | persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 | Paket	4|Paket	2|Paket	2|Paket	100	4|paket	4 | paket	100
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 | Paket	5|Paket	4|Paket	4|Paket	100	5|paket	5 | paket	100
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 | Paket	6|Paket	3|Paket	3|Paket	100	6|paket	6 | paket	100
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 | Paket	12|Paket	3|Paket	3|Paket	100	12|paket	12 | paket	100
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 | Laporan	4|Laporan	4|Laporan	4|Laporan	100	4|Laporan	4 | Laporan	100
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104 | Laporan	92|Laporan	32|Laporan	31|Laporan	96.88	104|Laporan	104 | Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 | Dokumen	4|Dokumen	4|Dokumen	4|Dokumen	100	4|Dokumen	4 | Dokumen	100
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 | Unit	25|Unit	100 | Persen	100 | Persen	100	21|Unit	21 | Unit	161,54
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 | Laporan	96|Laporan	66|Laporan	66|Laporan	100	84|laporan	84 | laporan	100
2.17.01.2.08.01	Penyedian jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 | Laporan	4|Laporan	1|Laporan	1|Laporan	100	4|laporan	4 | laporan	100
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 | Laporan	3|Laporan	100 | Persen	100 | Persen	100	3|laporan	3 | laporan	100
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562 | Unit	561|unit	562|Unit	561 | unit	99.91	494|unit	494 | unit	87,90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	494 | Unit	453|Unit	100 | Persen	100 | Persen	100	494|unit	494 | unit	100
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 | Unit	24|Unit	30|Unit	30|Unit	100	6|unit	6 | unit	100
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 | Unit	36|Unit	32|Unit	32|Unit	100	36|unit	36 | unit	100
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 | Unit	2|Unit	3|Unit	3|Unit	100	1|unit	1 | unit	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 | Unit	20|Unit	23|Unit	23|Unit	100	24|unit	24 | unit	100
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100 | persen	100|persen	100|persen	100|persen	100	100|persen	100 | persen	100
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah layanan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	2 | Layanan	100 | Persen	2|Layanan	2|Layanan	100	2|layanan	2 | layanan	100
		Persentase Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja, Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja,	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|Persen	100 | Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	192 | Orang	80|Orang	32|Orang	32|Orang	100	192 | Orang	192 | Orang	100
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	6 | Lembaga	5|Lembaga	1|Lembaga	1|Lembaga	100	6|lembaga	6 | Lembaga	100
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja	7 | persen	5|persen	6|persen	6|persen	100	7|persen	7 | persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang terserap	750 | Orang	100	600|Orang	600|Orang	100	700|orang	700 | orang	93,33
		Persentase tenaga kerja yang terserap	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|Persen	100 | Persen	100
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	0 | Orang	2730|Orang	6448|Orang	6448|Orang	100	0|Orang	0 | Orang	100
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah layanan pengelolaan informasi pasar kerja	1 | Layanan	2|layanan	1|Layanan	1|Layanan	100	1|layanan	1 | layanan	100
		Persentase tenaga kerja yang terserap	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|Persen	100 | Persen	100
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	750 | Orang	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	700|Orang	700 | Orang	93,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	100 | persen	100|persen	100|persen	100|persen	100	100|persen	100 | persen	100
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	3 | Layanan	100 | Persen	3|layanan	3|layanan	100	3|layanan	3 | layanan	100
		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|Persen	100 | persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 | Perkara	4|Perkara	4|Perkara	4|Perkara	100	4|perkara	4 | perkara	100
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2 | Asosiasi dan Serikat Pekerja	2|Asosiasi	2|Asosiasi dan Serikat Pekerja	2|Asosiasi dan Serikat Pekerja	100	2|Asosiasi dan Serikat Pekerja	2 | Asosiasi dan Serikat Pekerja	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 | Lembaga	1|Lembaga	1|Lembaga	1|Lembaga	100	1|Lembaga	1 | Lembaga	100
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi yang memiliki NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan/atau pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan	-	10|koperasi	10|koperasi	10|koperasi	100	-	-	-
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang terfasilitasi dalam pengurusan NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	-	10|koperasi	10|Koperasi	10|Koperasi	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase koperasi yang terfasilitasi dalam pengurusan NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	-	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	-	-	-
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	10|Unit Usaha	20|Unit Usaha	20|Unit Usaha	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	71 | Persen	66|Persen	68|Persen	68|Persen	100	70|Persen	70 | Persen	98,59
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang terbina dan terawasi	150 | koperasi	100|koperasi	110|Koperasi	110|Koperasi	100	120|unit usaha	120 | unit usaha	80
		Persentase koperasi yang terbina dan terawasi	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|persen	100 | persen	100
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-	100 | Persen	10|Unit Usaha	10|Unit Usaha	100	10|Unit Usaha	10 | Unit Usaha	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	100 | Persen	15|Unit Usaha	15|Unit Usaha	100	10|Unit Usaha	10 | Unit Usaha	100
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi dengan predikat sehat	34 | koperasi	28|koperasi	30|koperasi	30|koperasi	100	32|koperasi	32 | koperasi	94,12
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	100 | koperasi	70|koperasi	80|Koperasi	80|Koperasi	100	90|koperasi	90 | koperasi	90
		Persentase penilaian Kesehatan koperasi	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100 |persen	100 | persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100 | Unit Usaha	70|Unit Usaha	30|Unit Usaha	30|Unit Usaha	100	90|unit usaha	90 | unit usaha	90
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya	80 | persen	77|persen	78|persen	78|persen	100	90|persen	90 | persen	112,5
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 | layanan	100 | Persen	1|layanan	1|layanan	100	1|layanan	1 | layanan	100
		Persentase SDM koperasi peserta diklat yang bersertifikat	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|persen	100 | persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	1577 | Orang	100 | Persen	510|Orang	510|Orang	100	1.577|Orang	1.577 | Orang	100
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase kenaikan aset koperasi	16,5 | persen	15|persen	15.5|persen	15.5|persen	100	16|persen	16 | persen	96,97
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9 | layanan	9|layanan	10|Layanan	10|Layanan	100	9|layanan	9 | layanan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase koperasi yang mengalami kenaikan volume usaha	39,02 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	38,54|persen	38,54 | persen	98,77
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	#N/A	-	317|Unit Usaha	317|Unit Usaha	100	240|Unit Usaha	240 | Unit Usaha	#N/A
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	#N/A	-	-	-	100	600|unit usaha	600|unit usaha	#N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pemberdayaan UMKM	100 | persen	40|persen	60|persen	60|persen	100	80|persen	80|persen	80
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah layanan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	6 | layanan	100 | Persen	6|Layanan	6|Layanan	100	6|layanan	6 | layanan	100
		Persentase layanan pemberdayaan usaha mikro	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|persen	100 | persen	100
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	-	100 | Persen	100|Unit Usaha	100|Unit Usaha	100	100|Unit Usaha	100|Unit Usaha	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	270 | Unit Usaha	60|Unit Usaha	30|Unit Usaha	30|Unit Usaha	100	269|Unit Usaha	269|Unit Usaha	99,63
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	180 | Unit Usaha	60|Unit Usaha	60|Unit Usaha	60|Unit Usaha	100	120|Unit Usaha	120|Unit Usaha	66,67
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	890 | Unit Usaha	1510| Unit Usaha	470|Unit Usaha	470|Unit Usaha	100	890|Unit Usaha	890 | Unit Usaha	100
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	240 | Orang	12|Orang	20|Orang	20|Orang	100	240|orang	240 | orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.07.2.01.06	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	240 | Orang	180|orang	270|Orang	270|Orang	100	240|orang	240 | orang	100
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro	100 | persen	40|persen	60|persen	60|persen	100	80|persen	80 | persen	80
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah layanan Pengembangan Usaha Mikro	4 | layanan	4|layanan	4|Layanan	4|Layanan	100	1|layanan	1 | layanan	25
		Persentase layanan pengembangan usaha mikro	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|persen	100 | persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	-	370|Unit Usaha	-	-	-	-	-	100
2.17.08.2.01.06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	-	110|Unit Usaha	110|Unit Usaha	100	840|Unit Usaha	840|Unit Usaha	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase IKM yang mengikuti even pengembangan kearifan lokal	100 | persen	40|persen	60|persen	60|persen	100	80|persen	80 | persen	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.22.08.2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	1 | layanan	1|layanan	1|Layanan	1|Layanan	100	1|layanan	1 | layanan	100
		Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|persen	100 | persen	100
2.22.08.2.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	150 | Unit	100|Unit	90|Unit	90|Unit	100	150|unit	150 | unit	100
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	80|persen	80 | persen	80
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penyusunan dan evaluasi RPIK	5 | layanan	5|layanan	5|Layanan	5|Layanan	100	5|layanan	5 | layanan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase pemenuhan pelayanan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|persen	100 | persen	100
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 | Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1|dokumen	1 | dokumen	100
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 | Dokumen	11|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1|dokumen	1 | dokumen	100
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 | Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	100	2|dokumen	2 | dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 | Dokumen	4|Dokumen	4|Dokumen	4|Dokumen	100	6|dokumen	6 | dokumen	100
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 | Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1|dokumen	1 | dokumen	100
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI) Kabupaten/Kota	100 | persen	40|persen	60|persen	60|persen	100	80|persen	80 | persen	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mempunyai Nomor Induk Berusaha, Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar	60 | IKM	30|IKM	40|IKM	40|IKM	100	50|IKM	50 | IKM	83,33
		Persentase pemenuhan perizinan industri kecil dan menengah	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|persen	100 | persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 | dokumen	1 | dokumen	100 | Persen	100 | Persen	100	1|dokumen	1 | dokumen	100
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan	1 | dokumen	1 | dokumen	100 | Persen	100 | Persen	100	1|dokumen	1 | dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat								
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS	100 | persen	40|persen	60|persen	60|persen	100	80|persen	80 | persen	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Penyediaan Informasi Industri	3 | layanan	3|layanan	3|Layanan	3|Layanan	100	3|Layanan	3 | Layanan	100
		Persentase layanan Penyediaan Informasi Industri	100 | persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100 | Persen	100 | Persen	100
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 | Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1|dokumen	1 | dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 | Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1|dokumen	1 | dokumen	100
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 | Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	1|Dokumen	100	1|dokumen	1 | dokumen	100
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi	100 | persen	100|persen	100|persen	100|persen	100	100|persen	100 | persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 | Layanan	4|layanan	4|Layanan	4|Layanan	100	2|layanan	2 | layanan	50
		Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100 | Persen	100	100|persen	100 | persen	100
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	15 | Kepala Keluarga	5|Kepala Keluarga	2|Kepala Keluarga	2|Kepala Keluarga	100	4|Kepala Keluarga	4 | Kepala Keluarga	26,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output dan Outcome*) /Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program/ kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.32.03.2.01.08	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	-	5|KK	2|KK	2|KK	100	4|KK	4 | KK	-
3.32.03.2.01.16	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	15 | KK	5|KK	2|KK	2|KK	100	4|KK	4 | KK	26,67
3.32.03.2.01.17	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	750 | Orang	600|orang	90|Orang	90|Orang	100	225|Orang	225 | Orang	30

Dari 16 (enam belas) program Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga kerja pada tahun 2024 hanya 1 (satu) program penempatan tenaga kerja yang capaian kinerja fisik di bawah 100%. Program penempatan tenaga kerja merupakan salah satu program strategis dalam upaya penanggulangan pengangguran dan peningkatan kesempatan kerja. Namun, dalam pelaksanaannya pada tahun berjalan (tahun 2024), realisasi kinerja program ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu hanya sebesar 4,79% dari target 6%, sehingga tingkat capaian kinerja program adalah sebesar 79,83%. Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program penempatan tenaga kerja di antaranya terbatasnya lapangan kerja baru, kesenjangan kompetensi pencari kerja, dan belum optimalnya partisipasi mitra dunia usaha dan industri. Sisanya 15 (lima belas) program dengan capaian kinerja program sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian Program/ Kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja merupakan hasil dari pengerahan sumber daya yang ada, dukungan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya secara integral dan sinergis dalam memenuhi program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga kerja pada tahun 2024. Untuk mengoptimalkan capaian program dan kegiatan serta mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Memberdayakan industri dalam pengadaan barang dan jasa (P3DN);
2. Legalitas usaha industri, mutu, dan standar industri bagi para pelaku usaha/ IKM di Kabupaten Gunungkidul;
3. Menetapkan sentra Industri/Kerajinan sesuai wilayah dan komoditas di Kabupaten Gunungkidul;
4. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM Koperasi;
5. Perluasan akses pembiayaan usaha;
6. Perluasan akses pemasaran;
7. Pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi dalam wujud pembinaan yang bersifat vokasional;
8. Penetapan Upah Minimum Kabupaten;
9. Peningkatan kualitas pekerja;
10. Pendidikan dan pelatihan kerja.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja tuntas berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat pada pemerintah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pembangunan, oleh karena itu

dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan. Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya.

Pada tahun 2026 ada perubahan SOTK dinas dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan tenaga kerja menjadi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, koperasi, dan usaha kecil dan menengah. Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama (IKU) PD.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sesuai dengan renstra tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 348/KPTS/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pertumbuhan sektor industri
2. Nilai omset koperasi aktif
3. Persentase pertumbuhan omset UMKM yang dibina
4. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
5. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 periode Rencana Strategis tahun 2025-2029 belum ditetapkan sampai dengan Rencana Kerja Tahun 2026 di tetapkan. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%),
2. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%),
3. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Indikator (IKU, SPM,IKK)	Satuan (IKU, SPM,IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	5	6	7	7		9	9	10	11		12
IKU (Indikator Kinerja Utama)													
1	Nilai Omset koperasi aktif	Rupiah	46.605.312.000	47.405.312.000	48.305.312.000	49.305.312.000	49.405.312.000	97.638.916.350	88.350.969.795	97.638.916.350	88.350.969.795	49.405.312.000	
2	Persentase Pertumbuhan omset UMKM yang dibina	Persen	9,35	9,46	9,94	10,12	10,26	15,10	17,57	15,10	17,57	10,26	
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	50	55	61	68	75	44,50	56,53	61	68	75	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	10,5	12,2	13,9	15,6	17,3	11,90	13,61	13,9	15,6	17,3	
5	Persentase pertumbuhan sektor industri	Persen	3	6	10	15	20	3	6	10	15	20	
Indikator Kinerja Pendukung													
1	Nilai AKIP PD	Nilai/ Skore	80,05	80,20	80,40	80,60	80,80	78,59	80,70	82,68	82,68	80,80	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu Stategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat stategis dalam menentukan sasaran dan program pembangunan yang tepat pula. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelahaan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelengaraan urusan pemerintahan dan pembangunan. Isu strategis Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan aktivitas ekonomi pada sektor riil yang berkelanjutan,
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim.

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Pembentukan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki tugas fungsi untuk untuk melaksanakan urusan Pembinaan di Bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan hasil analisis tersebut dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia koperasi dan UKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan Usaha Mikro Kecil,
2. Masih terbatasnya sumber daya finansial koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Masih lemahnya kualitas kelembagaan koperasi;
4. Produk koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah belum mampu bersaing di pasar nasional maupun global;
5. Kesadaran kepemilikan legalitas usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih terbatas;
6. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi industri;
7. Kurangnya daya saing produk Industri Kecil dan Menengah (IKM);
8. Masih lemahnya kelembagaan pada sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gunungkidul;

2.4 *Reviu* terhadap Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Reviu terhadap Rancangan awal RKPD dilakukan untuk mengetahui program kegiatan mana yang memang benar-benar dibutuhkan oleh Perangkat Daerah maupun masyarakat sehingga ada skala prioritas pada program kegiatan terutama untuk mengantisipasi apabila ternyata ketersediaan anggaran tidak mencukupi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan Rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Dengan adanya analisis kebutuhan maka diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Analisis kebutuhan juga dilakukan untuk menyempurnakan rancangan akhir renja sehingga menjadi Rancangan Renja Akhir yang tepat sasaran, program, kegiatan, target, lokasi maupun penganggaran.

Untuk Penyempurnaan Rancangan Awal Renja 2026 Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah dapat disimpulkan bahwa total anggaran adalah sebesar 16.052.297.398,00 yang terdiri dari anggaran DAU Kegiatan. Perangkat Daerah harus mengoptimalkan dana yang tersedia untuk membiayai kebutuhan dan kegiatan prioritas namun tetap mendukung upaya pencapaian IKU Perangkat Daerah dan visi misi Bupati dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada seoptimal mungkin. Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan terdiri dari 16 program, 24 kegiatan dan 65 sub kegiatan. Berdasarkan Penyempurnaan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah:Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 persen	6.814.761.084	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.70 Persen	4.024.336.682,00	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen	102.423.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	- -	104.338.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	75.670.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	77.115.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	4.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.225.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.308.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.900.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	3.460.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.619.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2.960.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.140.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	8.225.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	10.079.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Laporan	4.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5 Laporan	1.525.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Berita Acara	1.735.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 Persen	5.935.460.584	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3.459.274.882,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 Orang/bulan	5.852.753.084	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 Orang/bulan	3.367.262.882,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.935.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	5.207.500,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	78.772.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	86.804.500,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase laporan administrasi pengelolaan BMD yang tersusun tepat waktu	100 Persen	2.100.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	-	600.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.100.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	600.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	64.397.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawian	-	1.590.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 dokumen	29.397.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	1.590.000,00	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	39 orang	35.000.000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum terlayani	100 Persen	317.163.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum	-	246.682.800,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.915.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	74.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	120.300.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wonosari Wonosari						kantor yang disediakan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.823.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	22.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.315.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	1.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104 Laporan	133.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	112.879.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	950.300,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	48.500.000						
	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 unit	28.500.000						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	20.000.000						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	201.702.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	72.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	28.852.500						
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber	84 Laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	12 Laporan	72.000.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wonosari Wonosari	Daya Air dan Listrik yang Disediakan					dan Listrik yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	209.627.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	139.851.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	494 unit	94.177.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	124.600.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 unit	2.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	500.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	9.351.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 unit	99.350.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Kab. Gunungkid	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1 Unit	600.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wonosari Wonosari	Dipelihara/Direhabilitasi			dan Bangunan Lainnya	ul Wonosari Wonosari	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	3.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul Wonosari Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	4.800.000,00	
						PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Pertumbuhan volume usaha koperasi	5.25 Persen	23.782.500,00	
						Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Koperasi yang terfasilitasi dalam pengurusan ijin usaha simpan pinjam	-	23.782.500,00	
						Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan	10 Unit Usaha	23.782.500,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
5	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	71 Persen	66.100.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	100 Persen	13.850.000,00	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase koperasi yang terbina dan terawasi	100 Persen	66.100.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Koperasi yang terbina dan terawasi	-	13.850.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 Unit Usaha	26.100.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	10 Unit Usaha	2.100.000,00	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	150 Unit Usaha	40.000.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 Unit Usaha	11.750.000,00	
7	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Jumlah koperasi dengan predikat sehat	34 koperasi	25.610.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase koperasi aktif	69.61 Persen	3.650.000,00	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penilaian kesehatan koperasi	100 Persen	25.610.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	-	3.650.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha	25.610.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	3.650.000,00	
7	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya	80 persen	639.220.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya	0.67 Persen	240.175.000,00	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM koperasi peserta diklat yang bersertifikat	100 Persen	639.220.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya pemahaman SDM koperasi	-	240.175.000,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1.577 Orang	639.220.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	425 Orang	240.175.000,00	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN		Persentase kenaikan aset koperasi	16,5 persen	248.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN		meningkatnya koperasi yang berkualitas	32.63 Persen	132.100.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PERLINDUNGAN KOPERASI					PERLINDUNGAN KOPERASI					
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang mengalami kenaikan volume usaha	39,02 Persen	248.500.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang mengalami kenaikan volume usaha	-	132.100.000,00	
						Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	13 Kelompok Masyarakat	45.915.000,00	
						Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	60 Unit Usaha	8.675.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	242 Unit Usaha	248.500.000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	570 Unit Usaha	77.510.000,00 0	
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pemberdayaan UMKM	100 persen	879.337.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase umkm yang bertransformasi dari informal ke formal pemberdayaan UMKM	0.50 Persen	1.212.527.000,00	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase layanan pemberdayaan usaha mikro	100 Persen	879.337.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		pertumbuhan wirausaha baru	-	1.212.527.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	270 Unit Usaha	53.270.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	80 Unit Usaha	16.080.000,00	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	180 Unit Usaha	31.212.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	95.450.000,00	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	890 Unit Usaha	550.355.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	80.440.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	240 Orang	17.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	60 Orang	6.575.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40 Unit Usaha	5.445.000,00	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	100 Unit Usaha	227.000.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	60 Unit Usaha	3.065.000,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	240 Orang	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	950 Orang	1.005.472.000,00	
10	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro	100 persen	628.055.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	0.21-0.45	241.740.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase layanan pengembangan usaha mikro	100 Persen	628.055.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Transformasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil	-	241.740.000,00	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1662 Unit Usaha	628.055.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	600 Unit Usaha	241.740.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase IKM yang mengikuti even pengembangan kearifan lokal	100 persen	337.795.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 Persen	781.930.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Persentase layanan kegiatan pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	100 Persen	227.795.000	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		pelaku usaha yang di fasilitasi dalam Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	375.000.000,00	
	Pengembangan Industri Kreatif	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	3 unit	227.795.000	Pengembangan Industri Kreatif	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	165 Unit	375.000.000,00	
	Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase layanan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	100 Persen	110.000.000	Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya		UMKM yang di fasilitasi dalam pengembangan Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya	-	406.930.000,00	
	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	1 Laporan	110.000.000	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	3 Laporan	406.930.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan	80 persen	439.467.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase realisasi investasi sektor industri	5.8 Persen	643.622.354,00	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan pelayanan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100 Persen	439.467.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten	-	643.622.354,00	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	9.305.000,00	
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	220.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	9 Dokumen	312.457.354,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 dokumen	15.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	8.655.000,00	
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 dokumen	275.000.000	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	294.085.000,00	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	10.000.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	2.600.000,00	
						Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) dilevel Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	• Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi,	1 Dokumen	16.520.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								• Jumlah produk halal yang dapat di implementasi kan			
13	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI)	100 persen	131.175.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin usaha industri yang diterbitkan	50.69 Persen	30.655.000,00	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan perizinan industri kecil dan menengah	100 Persen	131.175.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan perizinan industri kecil dan menengah	-	30.655.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri	1 Dokumen	9.815.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	121.175.000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat	4 Dokumen	20.840.000,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			Base Approach (OSS RBA)		risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
14	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS	100 persen	70.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS	4.74 Persen	112.255.150,00	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan		Persentase layanan Penyediaan Informasi Industri	100 Persen	70.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI		akun SIINas yang terverifikasi	-	112.255.150,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	55.000.000	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	15.785.000,00	
	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	5.000.000	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	86.655.150,00	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	10.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	9.815.000,00	
TOTAL					16.052.297.398					7.460.623.686,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan daerah. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan tersebut. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dalam program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan usulan kegiatan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat. Melalui Musrenbang kecamatan dan Forum Perangkat Daerah, usulan dari masyarakat ditelaah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain faktor tingkat urgensi, isi-isu penting penyelengaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, serta pemerataan lokasi dengan mempertimbangkan potensi wilayah dengan harapan berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak.

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Usulan-usulan tersebut perlu dianalisis secara seksama untuk memastikan kesesuaiannya dengan isu-isu strategis yang dihadapi, serta relevansinya terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Gunungkidul. Dalam konteks penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM memiliki fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM), penguatan kelembagaan koperasi dan sentra industri, serta perluasan akses pasar melalui digitalisasi. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama, di antaranya:

1. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia koperasi dan UKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan;
2. Masih terbatasnya akses terhadap pembiayaan atau sumber daya finansial bagi koperasi dan UMKM;
3. Lemahnya kualitas kelembagaan koperasi;
4. Produk koperasi dan UMKM yang belum mampu bersaing di pasar nasional maupun global;
5. Rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas usaha;
6. Keterbatasan kemampuan teknologi dan inovasi pada sektor industri;
7. Kurangnya daya saing produk IKM;

8. Masih lemahnya kelembagaan pada sentra IKM di Kabupaten Gunungkidul.

Dari hasil penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa mayoritas usulan yang diajukan memiliki kesesuaian langsung dengan isu-isu di atas serta mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas. Sebagian besar usulan berupa kegiatan pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi, yang mengarah pada peningkatan kapasitas SDM, penguatan kompetensi kewirausahaan, pengembangan produk lokal, serta digitalisasi pemasaran UMKM. Usulan pelatihan wirausaha pemula di berbagai bidang seperti kerajinan batik, ecoprint, kain perca, makanan olahan lokal, sablon kain, kerajinan kayu dan bambu, jasa rias (MUA), desain hantaran, dan barbershop menunjukkan adanya kebutuhan riil masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dasar usaha. Kegiatan ini sejalan dengan isu keterbatasan SDM serta upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif dan berbasis potensi lokal. Pelatihan digital marketing bagi UMKM yang diusulkan dalam jumlah signifikan menandakan masih rendahnya penguasaan teknologi pemasaran daring di kalangan pelaku UMKM. Kegiatan ini sangat relevan dengan isu lemahnya daya saing dan akses pasar produk UMKM, sekaligus mendukung arah kebijakan digitalisasi ekonomi daerah. Beberapa usulan lain, seperti pelatihan inovasi dan diversifikasi produk, peningkatan kualitas kemasan, serta inkubasi bisnis, juga sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal di pasar. Sementara itu, sosialisasi terkait legalitas usaha (NIB, IUI, Sertifikat Standar) dan perizinan industri (SIINas) merupakan langkah penting untuk mendorong formalitas usaha dan mendukung pembentukan ekosistem industri yang tertib administrasi dan hukum. Selain itu, usulan pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi perkoperasian mencerminkan upaya pemberdayaan masyarakat dari sisi kelembagaan dan karakter kewirausahaan, yang juga merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas koperasi serta daya tahan UMKM. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa seluruh usulan kegiatan masyarakat telah mencerminkan kebutuhan riil di lapangan dan memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan isu-isu strategis pembangunan sektor perindustrian, koperasi, dan UKM di Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, usulan-usulan tersebut layak dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam prioritas program kegiatan Dinas untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang ekonomi kerakyatan.

Namun dengan adanya keterbatasan anggaran daerah, usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses Musrenbang tidak dapat diakomodir secara maksimal. Untuk usulan dari proses Musrenbang adalah alokasi PIWK, e-reses dan sebagian usulan dari PIS kecamatan yang dapat diakomodir. Hal ini tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan mengingat kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan untuk dapat mengakomodir semua usulan.

Pencermatan dari Instansi Perencanaan Kabupaten yang dilakukan melalui Desk dengan Bappeda juga dilakukan untuk meminimalisir kesalahan demi lebih sempurnanya Renja yang disusun, baik dalam kesesuaian nomenklatur kegiatan, rasionalisasi anggaran maupun ketepatan penentuan indikator kinerja. Secara total

sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Renja Awal 2026, usulan PIS dan PIWK pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2026 yang merupakan hasil Musrenbang Kecamatan.

Data usulan program kegiatan Tahun 2026 dalam Rancangan Renja 2026 dari para Pemangku Kepentingan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1.	PIWK	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Kerajinan batik kain	Ngleri Lor	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Kerajinan batik kain	1	21.630.000	21.630.000	-
2.	PIWK	Pelatihan Jasa Make Up Artis (MUA)	Balai kalurahan Ponjong	Jumlah kelompok pelatihan jasa MUA yang terlatih keterampilan tata rias/ make up wajah	1	38.366.000	38.366.000	-
3.	PIWK	Inkubasi Bisnis Pengembangan Produk	Balai Kalurahan Mulusan	Jumlah kelompok peserta Inkubasi Bisnis Pengembangan Produk yang meningkat kualitas produknya.	0	20.875.000	0	Inkubasi bisnis Pengembangan Produk di ganti dengan Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
4.	PIWK	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal	Padukuhan Siraman I, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	-
5.	PIWK	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Kalurahan Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	-
6.	PIWK	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Kerajinan batik kain	Kalurahan Sidoharjo	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Kerajinan batik kain	1	21.630.000	21.630.000	-
7.	PIWK	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Balai Kalurahan Sumberwungu Tepus Gunungkidul (Pakwungu Sumberwungu Tepus)	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	-

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
8.	PIWK	Pelatihan Jasa Make Up Artis (MUA)	Gading IV, RT 001, RW 004, Gading, Playen, Gunungkidul	Jumlah kelompok pelatihan jasa MUA yang terlatih keterampilan tata rias/ make up wajah	1	38.366.000	38.366.000	-
9.	PIWK	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal	Balai Kalurahan Sumberwungu Ttepus Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	-
10.	PIWK	Pelatihan Desain Hantaran Pernikahan	Kedungkeris	Jumlah kelompok Pelatihan Desain Hantaran Pernikahan yang terlatih ketrampilan menghias dan membuat Hantaran Pernikahan.	1	29.098.000	29.098.000	-
11.	PIWK	Pelatihan Jasa Barbershop	Gading IV, RT 001, RW 004, Gading, Playen, Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Jasa Barbershop yang terlatih ketrampilan menata rambut.	1	42.610.000	42.610.000	-
12.	PIWK	Pelatihan Desain Hantaran Pernikahan	Gading IV, RT 001, RW 004, Gading, Playen, Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Desain Hantaran Pernikahan yang terlatih ketrampilan menghias dan membuat Hantaran Pernikahan.	1	29.098.000	29.098.000	-

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
13.	PIWK	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal	Balai Kalurahan Purwodadi,Rt .03 Rw.15,Purwodadi,Tepus,Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	-
14.	PIWK	Pelatihan Peningkatan Kualitas Makanan Olahan Lokal	balai kalurahan mulusan	Jumlah kelompok Pelatihan Peningkatan Kualitas Makanan Olahan Lokal yang terlatih ketrampilan lanjutan di bidang Makanan Olahan Lokal	1	18.630.000	18.630.000	-
15.	PIWK	Pelatihan Jasa Make Up Artis (MUA)	Nogosari 1, Nogosari 2, Nogosari 3, Jamburejo, Bandung, Kepil, Mendongan, Sayangan, Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kelompok pelatihan jasa MUA yang terlatih keterampilan tata rias/ make up wajah	1	38.366.000	38.366.000	-

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
16.	PIWK	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal	Balai kalurahan mulusan	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	2	18.630.000	37.260.000	Inkubasi bisnis Pengembangan Produk di ganti dengan Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal
17.	PIWK	Pelatihan Jasa Barbershop	Balai Kalurahan Bandung, Bandung RT 020/ RW 005, Bandung, Playen, Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Jasa Barbershop yang terlatih ketrampilan menata rambut.	1	42.610.000	42.610.000	-
18.	PIWK	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Gatak 006/009, Gari, Wonosari, Gunungkidul	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	-
19.	PIWK	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Selang, Wonosari, Gunungkidul	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	-
20.	PIWK	Pelatihan Digital	Kalurahan Grogol	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing	1	12.100.000	12.100.000	-

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
		Marketing bagi UMKM		yang meningkat pemahamannya.				
			Jumlah Pagu PIWK				**474.054.000**	
21.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula Bidang Teknik Ecoprint	Kalurahan Hargosari Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Teknik Ecoprint yang terlatih ketrampilannya di bidang teknik ecoprint	1	19.130.000	19.130.000	
22.	PIS	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Gunungkidul	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	
23.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula Bidang Teknik Ecoprint	Sendang 2, Sawahan, Ponjong	Jumlah kelompok Pelatihan Teknik Ecoprint yang terlatih ketrampilannya di bidang teknik ecoprint	1	19.130.000	19.130.000	
24.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang	Kalurahan Semanu	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
		Makanan Olahan						
25.	PIS	Pelatihan inovasi produk dan diversifikasi produk kerajinan kayu	Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul	jumlah Kelompok Sentra/Calon sentra yang dibina dalam Pelatihan peningkatan kualitas, inovasi dan diversifikasi industri kerajinan kayu	1	21.696.677	21.696.677	
26.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal	Balong Rt 004 Rw 007, Balong, Girisubo, Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	
27.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal	Jl sadeng km 4.5 Nglindur Girisubo Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	
28.	PIS	Sosialisasi Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS),	Tileng, Girisubo, Gunungkidul	Jumlah angkatan IKM yang terfasilitasi dan mengikuti sosialisasi SIINAS	1	5.055.000	5.055.000	

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
		Izin Usaha Industri (IUI)						
29.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Kerajinan Kain Perca	Kalurahan Bendungan	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Kerajinan kain perca	1	19.290.000	19.290.000	
30.	PIS	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Kalurahan Kelor, Karangmojo, Gunungkidul	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	
31.	PIS	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Munggur, 002/002, ngipak, karangmojo	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	
32.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Kerajinan Kain Perca	Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Kerajinan kain perca	1	19.290.000	19.290.000	

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
33.	PIS	Pelatihan Kemasan Olahan Makanan	Beji, Ngawen, Gunungkidul	Jumlah Kelompok Sentra/Calon sentra yang dibina dalam Pelatihan kemasan olahan makanan dan minuman	1	15.930.000	15.930.000	
34.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal	Jurangjero, ngawen, gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	
35.	PIS	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Jurangjero, ngawen, Gunungkidul	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	
36.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal	Balai Dusun Sambeng II Desa Sambirejo, Ngawen, Gunungkidul, DIY	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	
37.	PIS	Pelatihan minuman tradisional kekinian	Kedungkeris	Jumlah Kelompok Sentra/Calon sentra yang dibina dalam Pelatihan peningkatan kualitas, diversifikasi, produk dan kemasan industri minuman tradisional kekinian	1	18.975.000	18.975.000	

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
38.	PIS	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Kebonjero RT 001/ RW 006	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	
39.	PIS	Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Jati, Karangasem, Ponjong, Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM yang terlatih di bidang kewirausahaan dan manajemen UMKM	1	10.170.000	10.170.000	
40.	PIS	Sosialisasi perizinan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Balai kalaurahan mulusan	Jumlah angkatan IKM yang terfasilitasi dan mengikuti sosialisasi SIINAS	1	5.055.000	5.055.000	
41.	PIS	Pelatihan kerajinan tembaga	Sodo	Jumlah Kelompok Sentra/Calon sentra yang dibina dalam Pelatihan peningkatan kualitas, inovasi dan diversifikasi industri kerajinan tembaga	1	30.670.000	30.670.000	
42.	PIS	Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Sodo	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	10.170.000	10.170.000	
43.	PIS	Pelatihan Jasa Make Up Artis (MUA)	Balai Kalurahan Girimulyo	Jumlah kelompok pelatihan jasa MUA yang terlatih keterampilan tata rias/ make up wajah	1	38.366.000	38.366.000	

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
44.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula Bidang Teknik Ecoprint	Doga, RT 09, RW 02, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Teknik Ecoprint yang terlatih ketrampilannya di bidang teknik ecoprint	1	19.130.000	19.130.000	
45.	PIS	Pelatihan batik kain	Kalurahan Patuk, Gluntung RT 013 RW 003 Patuk Patuk Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Kerajinan batik kain	1	31.770.000	31.770.000	
46.	PIS	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Kalurahan Terbah	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	
47.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Kerajinan batik kain	Sawahan I RT 28 RW 05, Bleberan, Playen, Gunungkidul (Balai Kalurahan Bleberan)	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Kerajinan batik kain	1	21.630.000	21.630.000	
48.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Kerajinan batik kain	Bedoyo Kidul RT 001 RW 006, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul 55892	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Kerajinan batik kain	1	21.630.000	21.630.000	

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
49.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula Bidang Teknik Ecoprint	Balai Kalurahan Ponjong	Jumlah kelompok Pelatihan Teknik Ecoprint yang terlatih ketrampilannya di bidang teknik ecoprint	1	19.130.000	19.130.000	
50.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula Bidang Teknik Ecoprint	Bolodukuh Lor	Jumlah kelompok Pelatihan Teknik Ecoprint yang terlatih ketrampilannya di bidang teknik ecoprint	1	19.130.000	19.130.000	
51.	PIS	Sosialisasi perkoperasian	Bototengah RT 02 RW 04 Botodayaan Rongkop	Jumlah kelompok sosialisasi perkoperasian yang meningkat pemahamannya	1	5.705.000	5.705.000	
52.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal	Bototengah TR 02 RW 04 Botodayaan Rongkop	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	
53.	PIS	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Bototengah RT 02 RW 04 Botodayaan Rongkop	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
54.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal	Padukuhan Jerukgulung Rt 002/Rw 008, Kalurahan Melikan, Kapanewon Rongkop	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	
55.	PIS	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Padukuhan Ngricik, Kalurahan Melikan, kapanewon Rongkop,	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	
56.	PIS	Pelatihan inovasi produk dan diversifikasi produk kerajinan kayu	Kalurahan Mertelu	jumlah Kelompok Sentra/Calon sentra yang dibina dalam Pelatihan peningkatan kualitas, inovasi dan diversifikasi industri kerajinan kayu	1	21.696.677	21.696.677	
57.	PIS	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Pakel, Pringombo, Rongkop,	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	
58.	PIS	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Balai Kalurahan Kanigoro	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
59.	PIS	Sosialisasi Perkoperasian	Balai Kalurahan Krambilsawit	Jumlah kelompok sosialisasi perkoperasian yang meningkat pemahamannya	1	5.705.000	5.705.000	
60.	PIS	Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM	Balai Kalurahan Planjan	Jumlah kelompok peserta Pelatihan Digital Marketing yang meningkat pemahamannya.	1	12.100.000	12.100.000	
61.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	Bulurejo, Semin, Gunugkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	
62.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan	Sulur 1 RT. 024 RW. 006 Kal. Kemejing Kap. Semin	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	
63.	PIS	Pelatihan inovasi produk dan diversifikasi produk kerajinan bambu	Sempu Lor, Kalurahan Rejosari	Jumlah Kelompok Sentra/Calon sentra yang dibina dalam Pelatihan inovasi produk dan disversifikasi produk kerajinan bambu	1	21.229.000	21.229.000	
64.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula Bidang	Kalurahan Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Teknik Ecoprint yang terlatih ketrampilannya di bidang teknik ecoprint	1	19.130.000	19.130.000	

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
		Teknik Ecoprint						
65.	PIS	Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Kalurahan Giripanggung, Tepus, Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM yang terlatih di bidang kewirausahaan dan manajemen UMKM	1	10.170.000	10.170.000	
66.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Kerajinan batik kain	Balai Kalurahan Purwodadi,Rt.03 rw.15,Cepogo,Purwodadi,Tepus,Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Kerajinan batik kain	1	21.630.000	21.630.000	
67.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Sablon Kain	Balai Kalurahan Purwodadi,rt.03 rw.15,Cepogo, Purwodadi, Tepus, Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Sablon Kain	1	19.632.000	19.632.000	
68.	PIS	Pelatihan Olahan Ketela	Kalurahan Tepus, Tepus, Gunungkidul	Jumlah Kelompok Sentra/Calon sentra yang dibina dalam Pelatihan peningkatan kualitas, diversifikasi produk dan	1	17.720.000	17.720.000	

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
				kemasan olahan makanan bahan dasar ketela				
69.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan Lokal	Kalurahan Tepus, Tepus, Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Makanan Olahan yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Makanan Olahan	1	18.630.000	18.630.000	
70.	PIS	Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Kalurahan Tepus, Tepus, Gunungkidul	Jumlah kelompok Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM yang terlatih di bidang kewirausahaan dan manajemen UMKM	1	10.170.000	10.170.000	
71.	PIS	Pelatihan batik kain	Kantor Pemerintah Baleharjo	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Kerajinan batik kain	1	31.770.000	31.770.000	
72.	PIS	Sosialisasi Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS), Izin Usaha Industri (IUI)	Gatak 006/009, Gari, Wonosari, Gunungkidul	Jumlah angkatan IKM yang terfasilitasi dan mengikuti sosialisasi SIINAS	1	5.055.000	5.055.000	

No	PIS/PIWK	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien / Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
73.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula Bidang Teknik Ecoprint	Kalurahan Karangtengah	Jumlah kelompok Pelatihan Teknik Ecoprint yang terlatih ketrampilannya di bidang teknik ecoprint	1	19.130.000	19.130.000	
74.	PIS	Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Kalurahan Karangtengah	Jumlah kelompok Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM yang terlatih di bidang kewirausahaan dan manajemen UMKM	1	10.170.000	10.170.000	
75.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula bidang Kerajinan batik kain	Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	Jumlah kelompok Pelatihan Wirausaha Pemula yang terlatih ketrampilan dasar di bidang Kerajinan batik kain	1	21.630.000	21.630.000	
76.	PIS	Pelatihan Wirausaha Pemula Bidang Teknik Ecoprint	Giritirto, GIRITIRTO, PURWOSARI	Jumlah kelompok Pelatihan Teknik Ecoprint yang terlatih ketrampilannya di bidang teknik ecoprint	1	19.130.000	19.130.000	
PAGU PIS							**944.420.354**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/ bottom-up*. Dalam menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan harus sesuai dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disinergikan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Stabilitas dan pelaksanaan pembangunan secara merata untuk kepentingan rakyat didukung oleh dokumen perencanaan yang mantap dan bersinergi dengan dokumen yang sudah ada.

Berdasarkan konsep rancangan awal RPJMN Tahun 2025-2029 dari Kementerian PPN/Bappenas, Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**". Pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden melalui 8 (delapan) Misi (Asta Cita), meliputi :

1. Memperkokoh idiologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi,
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z), dan penyandang disabilitas,
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengambangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan,

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan,
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragam untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Agenda nasional yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah adalah astacita ke 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima), dan 6 (enam). Program prioritas nasional juga menjadi dasar dalam menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja di daerah, 17 (tujuh belas) program prioritas nasional tersebut adalah:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan system penerimaan negara:
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi:
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi:
5. Pemberantasan kemiskinan:
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba:
7. Menjamin tersedianya pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat:
8. Penguatan pendidikn, sains, dan teknologi serta digitalisasi:
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif:
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas:
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup:
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani:
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan:
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya:
15. Melanjutkan hilirisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritime untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi:
16. Memastikan kerukunan antar umat beragam, kebebasan beribadah. Pendirian, dan perawatan rumah ibadah:
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah bernaung pada 3 (tiga) kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah. Program Kegiatan yang dilaksanakan harus selaras dan mendukung terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh masing-masing kementerian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil, Dan Menengah

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dengan memperhatikan rumusan Rancangan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta berpedoman pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2026 sebagaimana telah disajikan dalam RKPD tahun 2026.

Tujuan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah Terwujudnya nilai tambah sektor Perindustrian, Koperasi dan UKM. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2026 adalah:

1. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB,
2. Meningkatnya volume usaha koperasi
3. Meningkatnya rasio kewirausahaan

Prioritas dan sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tersaji dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
1	Tani Makmur & UMKM Berdaya	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkulitas dan berdaya saing	PDRB ADHK	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
				Meningkatnya volume usaha koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
				Meningkatnya rasio kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Selanjutnya kami sajikan hubungan antara tujuan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tujuan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada akhir tahun 2030 dan Proyeksi target kinerja Tujuan PD tahun 2026 dilihat dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030	Proyeksi Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya nilai tambah sektor Perindustrian, Koperasi dan UKM	Indeks nilai tambah sektor perindustrian, koperasi dan UKM	80,23	79,24

Sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, Indikator beserta targetnya disajikan dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2026	Proyeksi Target Sasaran PD Tahun 2026
1.	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,38-8,71	8,38-8,71
2.	Meningkatnya volume usaha koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,77-2,06	1,77-2,06
3.	Meningkatnya rasio kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,614-2,090	1,614-2,090

Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator dan target Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026, disajikan dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU PD Tahun 2026	Proyeksi Target IKU PD Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,38-8,71	8,38-8,71
2	Meningkatnya volume usaha koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,77-2,06	1,77-2,06
3	Meningkatnya rasio kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,614-2,090	1,614-2,090

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 berikut pendanaannya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah
2. Prioritas Pembangunan
3. Pengurangan kemiskinan
4. Pengurangan ketimpangan pendapatan dan wilayah
5. Pencapaian IKU
6. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Tema, Prioritas, dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dirumuskan dengan berdasar pada Visi dan Misi Kepala daerah terpilih sebagai berikut :

a. Visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
   “MEMBANGUN MASYARAKAT ADIL MAKMUR, LESTARI DAN BERKEADABAN”
b. Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
   1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
   2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia yang sehat jasmani dan rohani.
   3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
   4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
   5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
   6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mendukung misi Kepala Daerah yang ke-3 yaitu: “Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk

kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif."

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 adalah :

"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Dari ke tujuh prioritas dan sasaran daerah di atas tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah adalah mendukung prioritas ke 3 (tiga), yaitu Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, juga disinergikan dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta Rencana Kerja Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program kegiatan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah juga diarahkan pada pencapaian IKU yang selaras dengan tupoksi pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%),
2. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%),
3. Rasio kewirausahaan Daerah (%).

Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026 hanya terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja operasi untuk membiayai program kegiatan Perangkat Daerah juga diarahkan pada pencapaian IKU yang selaras dengan tupoksi dinas. Hal ini dapat ditempuh melalui pengembangan Industri, koperasi dan UMKM dengan memanfaatkan segenap potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Mendasar pada nomenklatur yang termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026 terdiri dari 11 program, 19 Kegiatan, 55 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kewenangannya

Perumusan program kegiatan pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah dikaitkan dengan sasaran PD dan Pagu indikatif total pada Rancangan Akhir Renja yang telah ditetapkan untuk pendanaan program kegiatan pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan

Menengah pada Tahun 2026 yaitu sebesar Rp7.460.623.686,00 dan prakiraan maju Tahun 2027 sebesar Rp9.288.010.101,00.

Adapun rencana pendanaan program dan kegiatan prioritas, program dan kegiatan pendukung, serta Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 secara rinci masing – masing dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2, dan 4.3.

Tabel 4.1

Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penangung jawab
Tani Makmur & UMKM Berdaya	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkulitas dan berdaya saing	Meningkatnya volume usaha koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,614-2.090	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.460.623.686	
					2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.024.336.682	
					2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.338.000	
					2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.115.000	
					2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.225.000	
					2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.900.000	
					2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.619.000,	
					2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.140.000	
					2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.079.000	
					2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.525.000	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penangung jawab
					2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.735.000	
					2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.459.274.882	
					2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.367.262.882	
					2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.207.500	
					2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	86.804.500	
					2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	600.000	
					2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000	
					2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.590.000	
					2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.590.000	
					2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.682.800	
					2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.915.500	
					2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.300.000	
					2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.823.000	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penangung jawab
					2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.315.000	
					2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	
					2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.879.000	
					2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	950.300	
					2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.000.000	
					2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	
					2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.851.000	
					2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.600.000	
					2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	500.000	
					2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.351.000	
					2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000	
					2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.800.000	
					2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	23.782.500	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penangung jawab
					2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.782.500	
					2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.782.500	
					2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	13.850.000	
					2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	13.850.000	
					2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2.100.000	
					2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	11.750.000,	
					2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	3.650.000	
					2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.650.000	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penangung jawab
					2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.650.000	
					2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	240.175.000	
					2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	240.175.000	
					2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	240.175.000	
					2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	132.100.000	
					2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	132.100.000	
					2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	45.915.000	
					2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	8.675.000	
					2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	77.510.000	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penangung jawab
						Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya rasio kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,77-2.06	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.212.527.000	
					2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.212.527.000	
					2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	16.080.000	
					2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	95.450.000	
					2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	80.440.000	
					2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	6.575.000	
					2.17.07.2.01.0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5.445.000	
					2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	3.065.000	
					2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta	1.005.472.000	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penangung jawab
						Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro		
					2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	241.740.000	
					2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	241.740.000	
					2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	241.740.000	
					2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	781.930.000	
					2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	781.930.000	
					2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	375.000.000	
					2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif	375.000.000	
					2.22.08.5.06.0003	Adat, seni, tradisi dan Lembaga budaya	406.930.000	
					2.22.08.5.07.0013	Pengembangan kewirausahaan desa	406.930.000	
		Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,38-8,71	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
					3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
					3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	643.622.354	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penangung jawab
					3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	643.622.354	
					3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	9.305.000	
					3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	312.457.354	
					3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8.655.000	
					3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	294.085.000	
					3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2.600.000	
					3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	16.520.000	
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	30.655.000	
					3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	30.655.000	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penangung jawab
					3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	9.815.000	
					3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	20.840.000	
					3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	112.255.150	
					3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	112.255.150	
					3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15.785.000	
					3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	86.655.150	

Prioritas	Sasaran daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penangung jawab
					3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	9.815.000	
						TOTAL	**7.460.623.686**	

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**7.460.623.686**				
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**5.892.161.182**				
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***		**82.70 persen**	**4.024.336.682**				**5.612.927.602**
2.17.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah*		- -	104.338.000				136.630.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	77.115.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			95.655.000
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.225.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.700.000
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.900.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.900.000
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.619.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.580.000
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3.140.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.140.0000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	10.079.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.780.000
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	1.525.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.275.000
2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	1.735.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.600.000
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		-	3.459.274.882				4.508.818.802

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	784 Orang/bulan	3.367.262.882	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.344.508.802
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.207.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.235,000
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	86.804.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			159.075.000
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*		-	600.000				1.700,000
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.700,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Kepegawian*		-	1.590.000				30.058.800
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	1.590.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.058.800
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Umum*		-	246.682.800				427.425.000
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 paket	2.915.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.122.000
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 paket	120.300.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			67.406.000
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 paket	3.823.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.668.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 paket	4.315.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.576.000
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 laporan	1,500,000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.500,000
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Laporan	112.879.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			340.203.000
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	950.300	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.950,000
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		-	72.000.000				107.670.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	72.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			107.670,000
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		-	139.851.000				400.625.000
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	124.600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			276.375.000
2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 unit	500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 unit	9.351.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			16.650,000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.600.000
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 unit	4.800.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.000.000
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	***Pertumbuhan volume usaha koperasi***		**5.25 Persen**	**23.782.500**				**32.162.500**
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Koperasi yang terfasilitasi dalam pengurusan ijin usaha simpan pinjam*		-	23.782.500				32.162.500
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit Usaha	23.782.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			32.162.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi***		**61.54 Persen**	**13.850.000**				**33.925.000**
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah koperasi yang terbina dan terawasi*		-	13.850.000				33.925.000
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 unit Usaha	2.100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2,100,000
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 unit Usaha	11.750.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			31.825,000
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase koperasi aktif***		**69.61 Persen**	**3.650.000**				**57.775.000**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi*		-	3.650.000				57.775.000
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 unit Usaha	3.650.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			57.775.000
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya***		**100 Persen**	**240.175.000**				**314.590.000**
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pemahaman SDM koperasi*		-	240.175.000				314.590.000
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425 Orang	240.175.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			314.590.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas***		**18.43 Persen**	**132.100.000**				**195.970.000**
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi*		-	**132.100.000**				195.970.000
2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	*Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Kelompok Masyarakat	45.915.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			14.660.000
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Unit Usaha	8.675.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			13.750.000
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	*Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570 Unit Usaha	77.510.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			167.560.000
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA**	***Persentase umkm yang bertransformasi dari informal ke formal***		**0.50 Persen**	**1.212.527.000**				**963.289.666**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*pertumbuhan wirausaha baru*		-	**1.212.527.000**				968.739.666
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 unit usaha	16.080.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			346.665.000
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 unit usaha	95.450.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			82.900.000
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit usaha	80.440.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			68.220.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	*Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 orang	6.575.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.600.000
2.07.2.01.0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	*Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit Usaha	5.445.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.450.000
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Unit Usaha	3.065.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.430.000
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950 Orang	1.005.472.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			450.474.666
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)***		**0.20-0.45 Persen**	**241.740.000**				**730.785.000**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Transformasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil*		-	241.740.000				730.785.000
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600 Unit Usaha	241.740.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			730.785.000
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**781.930.000**				**948.385.000**
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***		**100 Persen**	**781.930.000**				
2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	*Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang di fasilitasi*		-	375.000.000				
2.22.08.5.06.0003	Pengembangan Industri Kreatif	*Jumlah Industri Kreatif yang dikembangkan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165 Unit	375.000.000	DANA KEISTIMEWAAN DIY			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang difasilitasi*		-	406.930.000				
2.22.08.5.07.0013	Pengembangan Kewirausahaan Desa	*Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	406.930.000	DANA KEISTIMEWAAN DIY			0
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**786.532.504**				
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**786.532.504**				**1.333.295.333**
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase realisasi investasi sektor industri***		**5.80 Persen**	**643.622.354**				**1.087.203.333,**
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Dokumen evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten*		-	643.622.354				1.087.203.333,
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.305.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			18.165.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	312.457.354	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			531.691.333
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	8.655.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			86.990.000
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	294.085.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			440.017.000
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.500.000
3.31.02.2.01.008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16.520.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.840.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan							
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase Izin usaha industri yang diterbitkan***		**50.69 Persen**	**30.655.000**				**106.210.000**
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*legalitas usaha sektor industri yang diterbitkan*		-	30.655.000				106.210.000
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.815.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			9.815.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat							
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	*Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	20.840.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			98.865.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kewenangan pemerintah pusat							
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS***		**4.74 Persen**	**112.255.150**				**145.252.000**
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*akun SIINas yang terverifikasi*		-	112.255.150				24.500.000
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	15.785.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			24.500.000
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	86.655.150	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			110.937.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	*Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.815.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			9.815.000
		J U M L A H			**7.460.623.686**				**9.288.010.101**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026. Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dan merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang selaras dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2026 mencakup tiga bahasan, yaitu:

a. Catatan Penting

Kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, namun demikian sikap mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan *(stakeholders*) tetap harus dikedepankan. Adanya perpaduan antara dua hal tersebut dapat dijadikan modal dalam mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dalam proses Murenbang tingkat kecamatan hingga Musrenbang Kabupaten.

Rencana Kerja ini juga memuat rencana anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program kegiatan. Namun demikian ketersediaan anggaran juga memegang peranan penting. Untuk mengantisipasi apabila ketersediaan anggaran tidak mencukupi maka ditetapkan skala prioritas mulai dari kebutuhan yang paling mendesak dan sangat dibutuhkan serta menyangkut kepentingan publik.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan program dan kegiatan dari tahun ke tahun merupakan kesinambungan yang saling berkaitan dan apa yang diperoleh tahun-tahun sebelumnya berpengaruh pada perencanaan tahun berikutnya, sehingga benar-benar diperlukan perencanaan yang matang melalui langkah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya penyempurnaan pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Perencanaan yang baik merupakan dasar pelaksanaan yang menjadi salah satu kunci sukses pembangunan daerah. Perencanaan ini dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi, sikap mental, semangat, kejujuran, dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dan menjadi acuan dalam proses selanjutnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka diperlukan instrument pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja Tahun 2026 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2026, dimana Renja Tahun 2026 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target dan sasaran tertentu, metode pelaksanaannya maupun hasil yang dicapai sehingga mencerminkan ada tidaknya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya.

Selanjutnya dokumen perencanaan ini merupakan landasan serta pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026 nanti terutama kegiatan yang merupakan skala prioritas, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Wonosari,
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI,
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

ttd

SUPARTONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tema, prioritas, dan sasaran pembangunan tahun 2026 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati "*Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban*". Guna mewujudkan visi tersebut Bupati mempunyai enam misi yaitu;

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Perumusan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan dalam isu strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan isu strategis Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Isu strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan), Pengembangan Wilayah Selatan DIY, Perkembangan Teknologi Informasi, Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif, Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta-Prambanan, Penguatan Ketahanan Pangan, Pelestarian dan Pengelolaan Budaya, Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan, Penguatan Kapasitas Fiskal, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital.

Isu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meliputi ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim, ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan

peningkatan akses pelayanan dasar belum merata, belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha, kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas, belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum, masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 adalah *"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"*.

Tema tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa indikasi prioritas dan sasaran daerah. Terdapat indikasi prioritas yang sesuai dengan ketugasan BKPPD yaitu Program Pamong Nglayani dan Ngayomi.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan BKPPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja BKPPD Tahun 2026 disusun berdasarkan kajian terhadap kondisi pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BKPPD.

Perumusan Renja BKPPD Tahun 2026 dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data;
2. Analisis gambaran pelayanan BKPPD;
3. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
4. Perumusan tujuan dan sasaran;
5. Perumusan kegiatan prioritas;

Renja BKPPD Tahun 2026 disusun berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2021-2026, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta indikasi tema pembangunan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Penyusunan Renja BKPPD Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran BKPPD Kabupaten Gunungkidul untuk jangka waktu satu tahun, dimulai 01 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

2. Tujuan

   Adapun tujuan disusunnya Renja BKPPD Kabupaten Gunungkidul ini yaitu memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kepegawaian daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja BKPPD Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. *Review* Terhadap Rencana Kerja

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun anggaran 2024, dan perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja 2025 sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Tinjauan terhadap hasil evaluasi tersebut untuk mengidentifikasi kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program BKPPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari BKPPD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

Tinjauan didasarkan atas perkiraan capaian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 Nomor DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024, sebagaimana diubah dengan DPPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/2024.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kinerja pelayanan;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 terdapat kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;

Kegiatan yang belum memenuhi target tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN tidak memenuhi target dikarenakan Jadwal kegiatan Seleksi CPNS dan PPPK Tahap I maupun Tahap II Tahun 2024 dilanjutkan tahun berikutnya. Hal tersebut menyesuaikan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Untuk kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN tidak memenuhi target dari 178 orang hanya terpenuhi 176 orang. Hal tersebut menyesuaikan jumlah pengajuan ijin belajar ASN.

Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan meliputi sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
7. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
11. Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
13. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
16. Pengelolaan Promosi ASN;
17. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN;
18. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
19. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
20. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur;
21. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar;
22. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
23. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD;
24. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
25. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbardaya Air, dan Listrik;
28. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
29. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
30. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
31. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
32. Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan;
33. Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN;
34. Pengelolaan Data Kepegawaian;
35. Pengelolaan Mutasi ASN;
36. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
37. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai;
38. Pembinaan Disiplin ASN;
39. Penyelenggaraan Penyembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Keberhasilan ini dipengaruhi oleh adanya dukungan anggaran dan pola koordinasi yang terjalin dengan baik sehingga dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian target kinerja kegiatan terutama pada target kinerja yang tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga.

Program dan kegiatan yang terealisasi melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2024 tidak ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2024 antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan kepegawaian;
2. Dukungan anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pelayanan kepegawaian;
3. Komitmen pelaksana untuk berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kebijakan yang perlu ditempuh dengan memperhatikan capaian kinerja Renstra untuk tahun 2024 sehingga capaian kinerja dari Renstra sesuai dengan yang ditargetkan yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dengan memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang dapat menghambat pelayanan kepegawaian;
2. Meningkatkan pengetahuan pejabat yang menangani kepegawaian dan ASN dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sehingga dapat mengurangi kendala-kendala yang bersifat administratif dalam penyelesaian proses administrasi kepegawaian;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian.
4. Meningkatkan komitmen pegawai untuk melaksanakan tugas secara maksimal guna memperoleh hasil yang terbaik.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dituangkan dalam Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. 2025
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana**	**Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		
4.01.04.2.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Jumlah ASN yang lulus diklat keistimewaan kabupaten/kota	5 laporan	4 laporan	3 laporan	3 laporan	100	1 laporan	8 laporan	160
4.01.04.2.02.03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	5 laporan	4 laporan	3 laporan	3 laporan	100	1 laporan	8 laporan	160
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**	**persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah kabupaten**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100 persen**		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD tersusun	35 dokumen	34 dokumen	34 dokumen	34 dokumen	100	34 dokumen	102 dokumen	291,4
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	12 dokumen	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300
03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	7 dokumen	233,3
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	300
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100	17 laporan	51 dokumen	300
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	18 dokumen	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun tepat waktu**	**28 laporan**	**28 laporan**	**28 laporan**	**28 laporan**	**100**	**28 laporan**	**84 laporan**	**300**
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	672 orang	672 orang	658 orang	658 orang	99.5	660 orang/bulan	1990 orang	196,1
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 dokumen	300
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 la poran	100	13 la poran	39 dokumen	300
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian**	**5 laporan**	**6 laporan**	**5 laporan**	**5 laporan**	**100**			
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	0 paket	60 paket	0 paket	0 paket	100	60 paket	120 paket	0
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	100	5 dokumen	12 dokumen	240

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	60 orang	0 orang	0 orang	100	60 orang	120 orang	200
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah kegiatan administrasi umum terpenuhi	187 laporan	187 laporan	187 laporan	187 laporan	100	187 laporan	561 laporan	300
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	6 paket	300
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	3 paket	3 paket	100	4 paket	9 paket	450
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100	2 paket	5 paket	250
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	3 paket	3 paket	100	2 paket	9 paket	225
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	698 dokumen	698 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	722 dokumen	103,4
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	7 laporan	5 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	14 laporan	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 laporan	67 laporan	6 laporan	6 laporan	100	6 laporan	79 laporan	98,75
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah kebutuhan jasa penunjang terpenuhi**	**138 laporan**	**138 laporan**	**138 laporan**	**138 laporan**	**100**			
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	2 laporan	2 laporan	100	5 laporan	19 laporan	158,3
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang disediakan	120 laporan	120 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	134 laporan	111,6
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	7 laporan	19 laporan	316,6
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah terlaksana**	**120 unit**	**121 unit**	**120 unit**	**120 unit**	**100**			
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannnya	63 unit	63 unit	23 unit	23 unit	100	51 unit	137 unit	217,4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	45 unit	13 unit	13 unit	100	26 unit	84 unit	186,6
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	2 unit	8 unit	266,6
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 unit	15 unit	4 unit	4 unit	100	15 unit	34 unit	226,6
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	1 unit	0 unit	0 unit	100	1 unit	2 unit	66,6
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**95.34 persen**			**100**	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan pegawai sesuai formasi, pensiun tepat waktu dan tersedianya data yang up to date	12 dokumen	12 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	26 dokumen	216,6
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	7 dokumen	7 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	87.3	3 dokumen	13 dokumen	185,7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		ASN								
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	4 dokumen	6 dokumen	600
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	7 dokumen	700
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah pengisian jabatan struktural dan mutasi ASN sesuai kompetensi serta kenaikan pangkat ASN tepat waktu*	15 dokumen	15 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100			
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	300
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	18 dokumen	300
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	7 dokumen	7 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	13 dokumen	185,7

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah pengembangan SDM ASN*	6 dokumen	7 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100			
5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	4 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	13 dokumen	325
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan Lanjutan	265 orang	265 orang	178 orang	178 orang	98.8	158 orang	601orang	226,7
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah penilaian kinerja tepat waktu dan pemberian penghargaan ASN serta kasus ASN yang terselesaikan**	**70 laporan**	**70 laporan**	**70 laporan**	**70 laporan**	**100**	**70 laporan**	**210 laporan**	**300**
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	15 dokumen	15 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	33 dokumen	220
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	7 laporan	7 laporan	3 laporan	3 laporan	100	4 laporan	14 laporan	200
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	8505 orang	505 orang	29.750 orang	29.750 orang	100	29.750 orang	60.005 orang	1,08
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	70,6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra PD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	3 laporan	3 laporan	814 orang	814 orang	100	250 orang	1.064 orang	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	40 laporan	40 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	44 laporan	110
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan evaluasi disiplin ASN	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0 laporan	100	0 laporan	1 laporan	100
5.04.02	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase pengiriman dilkat sesuai kebutuhan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional	330 orang	240 orang	150 orang	150 orang	100	126 orang	516 orang	156,3
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	330 orang	240 orang	150 orang	150 orang	100	126 orang	516 orang	156,3

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2024 dapat diberikan analisis/penjelasan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Tata Laksana

   Kegiatan:

   Peningkatan Budaya Pemerintahan .

   Sub Kegiatan :

   1). Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan.

   Capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 100%. Diklat yang direncanakan sebanyak 90 orang terbagi dalam 3 angkatan. dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan rencana. Hal ini didukung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, UPT Balai Diklat BKPPD, dan Paniradya Keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku penanggung jawab teknis pengelolaan Dana Keistimewaan.

2. Program Kepegawaian Daerah

   Kegiatan :

   a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

      Sub Kegiatan :

      1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN.

      Kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepegawaian nasional, hal ini menyebabkan realisasi kinerja tidak dapat mencapai 100 persen. Hal itu dikarenakan pelaksanaan seleksi CASN yang dijadwalkan pemerintah pusat proses pelaksanaannya lompat tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Yang terlaksana tahun 2024 yaitu seleksi CPNS dan PPPK tahap 1. Untuk PPPK tahap 2 dan proses pemberkasan dan pengangkatan dijadwalkan pada tahun 2025, sehingga capaian kinerja tidak maksimal sesuai target.

      2) Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN

      Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini yaitu capaian fisik tercapai sesuai target yaitu 100% sedangkan capaian keuangan 83,28 persen. Dari target 1 dokumen terpenuhi seluruhnya. Kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana karena adanya dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

      3) Pengelolaan Data Kepegawaian

      Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini yaitu capaian fisik tercapai sesuai target yaitu 100% sedangkan capaian keuangan 83,28 persen. Dari target 3 dokumen terpenuhi seluruhnya. Kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana karena adanya dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

   b. Mutasi dan Promosi ASN

      Pada kegiatan Mutasi dan Promosi ASN terdapat 3 sub kegiatan meliputi;

      1. Pengelolaan Mutasi ASN;
      2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
      3. Pengelolaan Promosi ASN.

      Semua kegiatan terlaksana dan mencapai target yang sudah ditentukan. Keberhasilan dalam mencapai target didukung oleh anggaran dan komunikasi antar pemangku kebijkan serta stakeholder terkait berjalan dengan baik sehingga capaian kinerja keluaran dapat tercapai semua.

.

Pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN capaian kinerja yaitu 100% untuk capaian fisik dan 99,32% untuk capaian keuangan.

c. Pengembangan Kompetensi ASN

Pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, dan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN. Dengan dasar data yang akurat realisasi kegiatan dapat dilaksanakan maksimal sesuai dengan perencanaan. Capain fisik 100% dan capaian keuangannya 99,61 %.

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terdiri dari 6 sub kegiatan meliputi;

1. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
2. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
3. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
4. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaandan Tanda Jasa Aparatur;
5. Pembinaan Disiplin ASN;
6. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

Untuk Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur semua sub kegiatan capaian kinerja fisik tercapai 100 persen dan capaian keuangan rata-rata mencapai 99,98%. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa jumlah kasus pelanggaran disiplin terselesaikan semua didukung dengan sarana prasarana yang memadai dan menunjukkan bahwa tingkat disiplin ASN cukup tinggi.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

Pengembangan Kompetensi Teknis

Sub Kegiatan :

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.Capaian kinerja untuk Sub Kegiatan ini sebesar 100%. Dari target 150 orang dapat terealisasi seluruhnya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	SATUAN (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	7	8	7	8	12		11	12	14
1	Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pengangkatan dan pemindahan PNS yang sesuai formasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu dibagi dengan jumlah total PNS naik pangkat dan pensiun
2	Persentase Pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah PNS yang memperoleh sertifikat diklat dan tugas belajar dibagi jumlah total PNS yang mengikuti diklat dan tugas belajar
3	Persentase pelanggaran dan kasus PNS yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah pelanggaran dan kasus PNS yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran dan kasus PNS
4	Indeks Kepuasan penerima layanan	80	80,00	80,00	80,00	80,50	81,75	81,45	81,75	82,50	Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang terisi dikali nilai

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	SATUAN (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	7	8	7	8	12		11	12	14
											penimbang
5	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah laporan keuangan disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan keuangan disusun
6	Persentase kesesuaian program dalam Rencana kerja (Renja) PD terhadap program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam rencana kerja PD dibagi dengan jumlah program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
7	Persentase kesesuaiaan program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam Renstra PD dibagi dengan jumlah program dalam RPJMD
8	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dibagi dengan jumlah administrasi perkantoran yang dibutuhkan

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	SATUAN (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	7	8	7	8	12		11	12	14
9	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan
10	Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah ASN PD yang taat aturan dibagi dengan jumlah ASN PD

Tabel 2.3
Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan
Terhadap Renstra PD Tahun 2021-2026
Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA /NILAI TARGET STANDART(IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD					PROYEKSI CAPAIAN RENSTRA PD					CATATAN ANALISIS
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks profesionalitas ASN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hasil rata-rata dari : 1. Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pemindahan PNS yang sesuai kompetensi 2. Persentase Pengiriman Peserta Diklat dan Tugas Belajar sesuai kebutuhan 3. Persentase Kasus ASN yang terselesaikan
2	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam Renja dibagi jumlah program dalam RKPD dan jumlah program dalam Renstra dibagi jumlah program dalam RPJMD
3	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah laporan keuangan disusun tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan disusun

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA /NILAI TARGET STANDART(IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PD					PROYEKSI CAPAIAN RENSTRA PD					CATATAN ANALISIS
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)	80,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang terisi dikali nilai penimbang

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan administrasi kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Gunungkidul didelenggarakan mengacu kepada Peraturan Bupati Gunugkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Adapun bagan struktur organisasi BKPPD berdasarkan peraturan tersebut sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi BKPPD

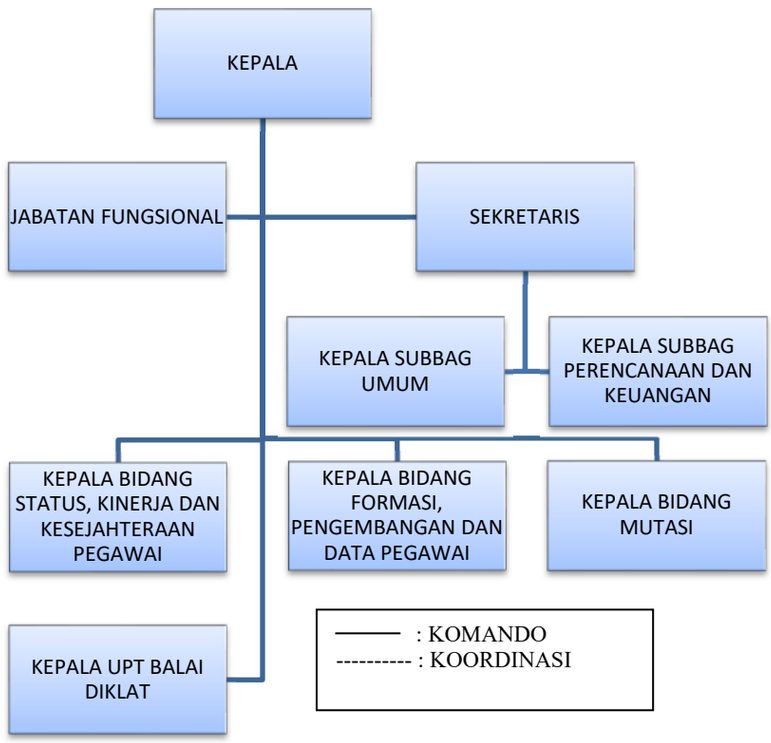

Pelaksanaan pelayanan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara umum cukup baik. Namun masih terdapat permasalahan dan hambatan sehingga hasil yang dicapai belum optimal.

Permasalahan dan hambatan tersebut dapat dibagi menjadi permasalahan yaitu eksternal dan internal.

1. Masalah eksternal

   Sebagian besar hasil akhir dari program dan kegiatan BKPPD ditentukan oleh stakeholder/pemangku kepentingan di luar perangkat daerah sehingga berpengaruh pada capaian kinerja.

   Badan Kepegawaian Negara baik pusat maupun regional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Negara, Kementrian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan dan yang lainnya merupakan pemangku kepentingan yang berperan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKPPD.

2. Permasalahan internal

   Permasalahan internal yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia serta pemenuhan persyaratan administratif kepegawaian yang diajukan seringkali belum lengkap sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut.

Tantangan yang dimungkinkan dihadapi oleh BKPPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

a. Dinamika politik lokal dan nasional yang dapat mempengaruhi pola manajemen kepegawaian;
b. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan teknologi pengelolaan data yang bergerak cepat.
c. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
d. Komitmen dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang belum memadai;
e. Pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur.

Peluang yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan dalam mengatasi tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu :

a. Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dengan melakukan reformasi birokrasi;
b. Memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam mewujudkan sistem informasi kepegawaian yang dapat menjadi sarana pengolahan dan penyajian data yang cepat dan akurat.
c. Adanya lembaga pendidikan dan pelatihan yang dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan Diklat;
d. Kerjasama kemitraan dalam proses pelayanan kepegawaian (Taspen, BPJS, Taperum);
e. Banyaknya penawaran program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti melalui program diklat teknis dan fungsional, beasiswa tugas belajar di dalam dan luar negeri, dan penawaran pendidikan formal atas biaya sendiri;
f. Adanya permohonan PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk alih tugas ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
g. Membangun komitmen untuk melayani dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan melakukan inovasi dalam meningkatkan kepuasan masyarakatt ASN.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan dan kajian hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi .

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra.

Dengan melihat tugas pokok dan fungsi BKPPD dengan memperhatikan dinamika masyarakat dan tuntutan profesionalitas birokrasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengupayakan pembangunan secara keseluruhan serta dalam peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026 yaitu :

a. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur melalui pengadaan Pegawai baik PNS maupun PPPK;
b. Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
c. Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional;
d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepegawaian;
e. Peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi.

Isu-isu tersebut menjadi prioritas karena mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung penyediaan sumberdaya aparatur yang kompeten dan profesional. Untuk itu ditetapkan beberapa prioritas seperti tersebut diatas, yang pada akhirnya akan mengarah pada pencapaian Reformasi Birokrasi dan pada akhirnya memberikan kontribusi untuk "Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah

Review terhadap Rencana Kerja BKPPD tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	-	454.956.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100 Persen	454.956.000,00	
A.	Peningkatan Budaya Pemerintahan		ASN yang lulus diklat keistimewaan kabupaten/kota	-	454.956.000,00	Peningkatan Budaya Pemerintahan		ASN yang lulus diklat keistimewaan kabupaten/kota	90 Orang	454.956.000,00	
1.	Penyelenggaraan DiklatKeistimewaanKabupaten/Kota	BKPPD	JumlahLaporan Hasil Diklat KeistimewaanDiselenggarakan	3 Laporan	454.956.000,00	Penyelenggaraan DiklatKeistimewaanKabupaten/Kota	BKPPD	JumlahLaporan HasilDiklat KeistimewaanKabupaten/Kota yangDiselenggarakan	3 Laporan	454.956.000,00	
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan	100 persen	4.862.529.370,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan	100 persen	5.225.021.383,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik			DAERAH KABUPATEN		Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana dengan Baik			
A.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	6.300.000,00	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	6.190.000,00	
1.	Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	BKPPD	Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	4 Dokumen	2.000.000,00	Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	BKPPD	Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	4 Dokumen	1.565.000,00	
2.	Koordinasi danPenyusunan DokumenRKA-SKPD	BKPPD	JumlahDokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000,00	Koordinasi danPenyusunan DokumenRKA-SKPD	BKPPD	JumlahDokumenRKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	575.000,00	
3	Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahanRKA-SKPD	BKPPD	Jumlah DokumenPerubahanRKA-SKPDdanLaporan Hasil KoordinasiPen	1 Dokumen	500.000,00	Koordinasi danPenyusunan DokumenPerubahanRKA-SKPD	BKPPD	Jumlah DokumenPerubahanRKA-SKPDdanLaporan Hasil KoordinasiPeny	1 Dokumen	575.000,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			yusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD					usunan DokumenPerubahan RKA-SKPD			
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	650.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKPPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	650.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKPPD	Jumlah DokumenPerubahanDPA-SKPDdanLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenPerubahanDPA-SKPD	2 Dokumen	650.000,00	Koordinasi danPenyusunan PerubahanDPA-SKPD	BKPPD	Jumlah DokumenPerubahanDPA-SKPDdanLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenPerubahanDPA-SKPD	2 Dokumen	650.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	17 Laporan	1.500.000,00	Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	BKPPD	Jumlah Laporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil	17 Laporan	1.585.000,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					KoordinasiPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD			
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	500.000,00	EvaluasiKinerjaPerangkatDaerah	BKPPD	Jumlah Laporan EvaluasiKinerja PerangkatDaerah	5 Laporan	590.000,00	
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.173.879.370,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.426.260.983,00	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/bulan	4.169.979.370,00	PenyediaanGaji danTunjangan ASN	BKPPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	734 Orang/bulan	4.422.431.983,00	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	425.000,00	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	BKPPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	13 Laporan	3.500.000,00	Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan	BKPPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	13 Laporan	3.404.000,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD			Bulanan/Triwulanan/ SemesteranSKPD		Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Laporan	2.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	31.280.000,00	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	2.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	BKPPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	31.280.000,00	
3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKPPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
D.	Administrasi Umum PerangkatDaerah		Dokumen Administrasi Umum	7 Laporan	186.350.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum	7 Laporan	182.506.000,00	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.995.000,00	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	95.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	54.586.000,00	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKPPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	Penyediaan PeralatanRumahTangga	BKPPD	JumlahPaketPeralatanRumah Tangga yangDisediakan	2 Paket	4.543.000,00	
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPPD	Jumlah Paket BarangCetakandan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20.150.000,00	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	BKPPD	Jumlah Dokumen Bahan	698 Dokumen	2.500.000,00	Penyediaan Bahan BacaandanPeratura	BKPPD	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Perundang- undangan		Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			nPerundang-undangan		BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan			
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	10.000.000,00	FasilitasiKunjungan Tamu	BKPPD	JumlahLaporanFasilitasiKunjunganTamu	12 Laporan	9.975.000,00	
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	59.850.000,00	Penyelenggaraan RapatKoordinasidanKonsultasiSKPD	BKPPD	Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasidanKonsultasiSKPD	6 Laporan	77.857.000,00	
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen laporan pengadaan barang milik daerah	20 unit	62.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen laporan pengadaan barang milik daerah	21 unit	86.869.000,00	
1.	Pengadaan Mebel	BKPPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	12.000.000,00	PengadaanMebel	BKPPD	JumlahPaketMebelyangDisediakan	15 Unit	10.200.000,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPPD	JumlahUnit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	76.669.000,00	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Gedung Kantor danBangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kebutuhan Jasa Terpenuhi	3 Laporan	257.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksana dengan Baik	3 Laporan	258.387.000,00	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan	100.000.000,00	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	BKPPD	Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yangDisediakan	12 Laporan	104.770.000,00	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	155.000.000,00	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	BKPPD	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yangDisediakan	7 Laporan	151.617.000,00	
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPPD	Dokumen pemeliharaan barang milik daerah	94 unit	175.000.000,00	Pemeiharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen pemeliharaan barang milik daerah	100 unit	233.528.400,00	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	90.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	88.500.000,00	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	15.000.000,00	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	BKPPD	JumlahPeralatan dan Mesin LainnyayangDipelihara	31 Unit	16.030.000,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	55.000.000,00	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Gedung Kantor danBangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	114.530.000,00	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau BangunanLainnyayangDipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	4.500.000,00	
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan PrasaranaPendukung GedungKantor atau BangunanLainnya	BKPPD	Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunanLainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.968.400,00	
III.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPPD	Persentase Terlaksananya Layanan dan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	100 persen	1.007.450.000,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Terlaksananya Layanan dan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	100 persen	126.517.470.000,00	
A.	Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi KepegawaianASN		Pengadaan Pegawai Sesuai Formasi, Pensiun Tepat Waktu, dan Tersedianya	3 Dokumen	528.000.000,00	Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi KepegawaianASN		Pengadaan Pegawai Sesuai Formasi, Pensiun Tepat Waktu, dan Tersedianya Data	3 Dokumen	528.760.000,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Data yang Up To Date					yang Up To Date			
1.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	500.000.000,00	Penyusunan RencanaKebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	500.710.000,00	
2.	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	4 Dokumen	5.000.000,00	Perumusan BahanKebijakan Pemberhentian ASN	BKPPD	Jumlah DokumenHasilperumusan BahanKebijakan PemberhentianASN	4 Dokumen	5.050.000,00	
3.	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	23.000.000,00	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	23.000.000,00	
B.	Mutasi dan Promosi ASN		Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN sesuai Kompetensi serta Kenaikan Pangkat ASN	3 Dokumen	364.000.000,00	Mutasi dan Promosi		Pengisian Jabatan Struktural dan Mutasi ASN sesuai Formasi Serta Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	3 Dokumen	357.924.000,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Tepat Waktu								
1.	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	4.000.000,00	PengelolaanMutasiASN	BKPPD	Jumlah DokumenHasilPelaksanaan MutasiJabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Administrasi,Jabatan PelaksanadanMutasiASNantarDaerah	2 Dokumen	3.985.000,00	
2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPPD	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Dokumen	60.000.000,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPPD	Jumlah PengelolaanKenaikanPangkatASN	6 Dokumen	59.440.000,00	
3.	Pengelolaan Promosi ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	300.000.000,00	Pengelolaan Promosi ASN	BKPPD	Jumlah DokumenHasilPengelolaanPromosiASN	3 Dokumen	294.499.000,00	
B.	PengembanganKompetensiASN		Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN	2 Dokumen	26.000.000,00	Pengembangan Kompetensi ASN		Pengembangan SDM ASN	2 Dokumen	363.998.000,00	
1.	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	15.500.000,00	Pengeloaan AdministrasiDiklatdanSertifikasiASN	BKPPD	Jumlah DokumenHasilPengelolaan AdministrasiDiklatdanSertifikasi ASN	4 Dokumen	353.500.000,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPPD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 Orang	10.500.000,00	Pengelolaan PendidikanLanjutan ASN	BKPPD	Jumlah ASN yangMendapatkan PendidikanLanjutan	150 Orang	10.498.000,00	
C.	PenilaiandanEvaluasi KinerjaAparatur		Penilaian Kinerja Tepat Waktu dan Pemberian Penghargaan ASN serta Kasus ASN yang Terselesaikan	7 Laporan	89.450.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Penilaian Kinerja Tepat Waktu dan Pemberian Penghargaan ASN serta Pelanggaran Disiplin ASN yang Terselesaikan	5 Laporan	125.266.788.000,00	
1.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 Dokumen	15.500.000,00	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPPD	Jumlah Dokumen HasilPenyusunan KebijakanPenilaian dan EvaluasiKinerjaAparatur	6 Dokumen	15.500.000,00	
2.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Laporan	6.000.000,00	EvaluasiHasilPenilaiandan Evaluasi KinerjaAparatur	BKPPD	Jumlah Dokumen HasilEvaluasiHasilPenilaiandanEvaluasiKinerja Aparatur	4 Laporan	6.000.000,00	
3.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPPD	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	2125 Orang	950.000,00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKPPD	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	30250 Orang	125.178.588.000,00	Pagu TPP ASN kurang

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	BKPPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2 Dokumen	16.000.000,00	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan danTanda Jasa Aparatur	BKPPD	Jumlah DokumenHasilEvaluasi PelaksanaanPemberian PenghargaandanTandaJasaAparatur	2 Dokumen	16.000.000,00	
5.	Pembinaan Disiplin ASN	BKPPD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	6.000.000,00	PembinaanDisiplinASN	BKPPD	Jumlah ASN yangMendapatkan PembinaanKedisiplinan	225 Orang	6.000.000,00	
6.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7 Laporan	45.000.000,00	Pengelolaan PenyelesaianPelanggaranDisiplinASN	BKPPD	Jumlah Laporan HasilPengelolaan PenyelesaianPelanggaranDisiplin ASN	8 Laporan	44.700.000,00	
7.	Evaluasi Disiplin ASN	BKPPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	0 Laporan	0,00	Evaluasi Disiplin ASN	BKPPD	Jumlah Laporan HasilEvaluasi Disiplin ASN	0 Laporan	0,00	
IV.	PROGRAMPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA		Presentase ASN yang Meningkat Kompetensi Teknis dan Fungsionalnya	100 persen	300.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang Meningkat Kompetensi Teknis dan Fungsionalnya	100 persen	299.999.000,00	
A.	PengembanganKompetensiTeknis		ASN yang Lulus Diklat Teknis dan Fungsional	180 Orang	300.000.000,00	Pengembangan Kompetensi Teknis		ASN yang Lulus Diklat Teknis dan Fungsional	150 Orang	299.999.000,00	
1.	Penyelenggaraan Pengembangan	BKPPD	Jumlah ASN yang Mengikuti	180 Orang	300.000.000,00	PenyelenggaraanPengembanganKompete	BKPPD	Jumlah ASN yangMengikuti	150 Orang	299.999.000,00	

	RENCANA RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Pengembangan Kompetensi			nsiTeknisUmum,Inti, dan Pilihan bagiJabatan AdministrasiPenyelenggara UrusanPemerintahan Konkuren,Perangkat DaerahPenunjang, dan UrusanPemerintahanUmum		Pengembangan Kompetensi			
Total					**6.624.935.370,00**					**132.497.446.383,00**	

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan tahap yang krusial untuk menjamin keselarasan antara kebijakan pembangunan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering ditemukan adanya perbedaan antara anggaran pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang diperoleh setelah dilakukan kajian mendalam terhadap kondisi, permasalahan, dan aspirasi masyarakat.

Perbedaan tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, rancangan awal RKPD umumnya disusun berdasarkan proyeksi anggaran yang tercantum pada Renstra yang diturunkan ke rancangan awal RKPD sebagai patokan, sementara hasil analisis kebutuhan didasarkan pada data empiris yang lebih komprehensif dan terkini, termasuk hasil Forum PD, Musrenbang, survei lapangan, serta masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedua, pada tahap awal perencanaan, belum seluruh kebutuhan prioritas dapat tergambarkan secara rinci, sehingga rancangan awal lebih bersifat indikatif. Setelah dilakukan proses pemetaan kebutuhan secara partisipatif dan teknokratik, muncul kebutuhan-kebutuhan baru atau terjadi perubahan prioritas yang berdampak pada besaran alokasi anggaran.

Ketiga, dinamika fiskal daerah seperti perubahan proyeksi pendapatan, transfer dari pusat, maupun penyesuaian terhadap kewajiban belanja wajib dan mengikat juga turut memengaruhi kapasitas riil pembiayaan program dan kegiatan. Hal ini mendorong perlunya realokasi anggaran agar tetap sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Dengan demikian, perbedaan anggaran antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan merupakan hal yang wajar dalam proses perencanaan. Namun perbedaan tersebut harus dikelola secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif dan berbasis data. Tujuannya adalah agar RKPD yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, sekaligus realistis terhadap kemampuan fiskal daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dengan tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara.

Pada Forum Lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2025 terdapat masukan yang mempunyai konsekuensi penambahan anggaran dan masukan yang mendorong peningkatan pelayanan kepegawaian namun tidak mempunyai konsekuensi penambahan anggaran. Adapun masukan dan usulan semua sesuai dengan tupoksi BKPPD saat ini seperti penambahan anggaran untuk pelayanan kenaikan pangkat yang awalnya hanya 2 periode sekarang menjadi 6 periode, pengadaan alat untuk sarana pembuatan video yang mana akan digunakan untuk aplikasi Piwulang guna meningkatkan kompetensi ASN dengan metode LMS (*Learning Management System*). Hal ini guna menekan biaya kebutuhan diklat teknis agar lebih efisien ditengah program efisiensi nasional.

Selain itu ada usulan dari peserta forum PD untuk memindahkan aula rapat BKPPD yang biasa digunakan untuk rapat besar agar dipindahkan ke lantai 1, dalam rangka mendukung responsif gender di Kabupaten Guungkidul dan memperhatikan kemudahan akses bagi penerima layanan. Hal tersebut dikarenakan memerhatikan kondisi penerima layanan yang disabilitas ataupun penerima layanan yang sudah berumur agar mudah dalam mendapatkan layanan. Masukan dan usulan hasil forum PD dirincikan dalam tabel berikut;

Tabel 2.5
Usulan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No.	Usulan	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	2	4	5	6	7	8
1.	Pagu SE Bupati Nomor 13 Tahun 2025 belum termasuk Gaji dan tunjangan ASN, PPPK, THL,BPJS serta Anggaran Diklat Teknis maupun Diklatpim, Dana Keistimewaan, Anggaran TPP ASN					Belum terakomodir dalam pagu awal renja
2.	Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS yang awalnya setiap tahun 2 kali menjadi 6 kali dalam satu tahun	Jumlah Usulan kenaikan pangkat PNS	6 periode	20.000.000	120.000.000	Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya terkait kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada negara, sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 4 tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS yang semula hanya 2 kali dalam setahun menjadi 6 kali dalam setahun untuk periodisasi.
3.	Mohon pertimbangan dan solusi untuk mengurangi antrian pelatihan kepemimpinan tersebut mengingat urgensi pelatihan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi JPT Pratama secara khusus dan meningkatkan kompetensi ASN di Kabupaten Gunungkidul secara umum. **(BELUM termasuk pengukuran kompetensi guna pemetaan Manajeman**	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 orang	33.000.000	6.600.000.000	Meningkatkan kompetensi ASN sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas dalam proses seleksi JPT pratama sekaligus mengurangi jumlah antrean yang belum melaksanakan diklat PKA maupun PKP yang mencapai 200 orang. Berdasarkan peraturan Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan tentang Pelatihan Kepemimpinan dan berdasarkan data Pejabat Eselon IV dan III di Kabupaten Gunungkidul masih terdapat (ratusan) pejabat yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan baik PKP maupun PKA. Sementara itu, pengiriman peserta pelatihan kepemimpinan selama ini hanya (belasan orang) secara total, untuk masing-masing PKA dan PKP tidak sampai 10 orang. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada di BKPPD

No.	Usulan	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	2	4	5	6	7	8
	Talenta)					untuk kegiatan pelatihan kepemimpinan.
4.	Pengadaan Teleprompter Kamera	Jumlah Unit	1 Unit	4.200.000	4.200.000	Sarana pembuatan video untuk aplikasi Piwulang guna meningkatkan kompetensi ASN dengan metode LMS (*Learning Management System*). Hal ini guna menekan biaya kebutuhan diklat teknis agar lebih efisien ditengah program efisiensi nasional.
5.	Pengadaan Paket PC Dekstop Grafik dan Video Editing	Jumlah Unit	1 Unit	26.460.000	26.460.000	Sarana pembuatan video untuk aplikasi Piwulang guna meningkatkan kompetensi ASN dengan metode LMS (*Learning Management System*). Hal ini guna menekan biaya kebutuhan diklat teknis agar lebih efisien ditengah program efisiensi nasional.
6.	Pengadaan Monitor PC 27 inch UHD-4K, IPS, Bordeles	Jumlah Unit	1 Unit	4.150.000	4.150.000	Fasilitasi Pranata komputer dalam melaksanakan tupoksinya agar berjalan lancar, terutama dalam Penghitungan TPP memerlukan Monitor yang lebih besar.
7.	Aula rapat diklat untuk dipindahkan di lantai 1	-	-	-	-	Dalam rangka mendukung responsif gender dan memperhatikan kemudahan akses bagi penerima layanan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

RPJM Nasional ditujukan untuk lebih menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, memantapkan dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Tata kelola pemerintahan baik merupakan salah satu agenda dalam pelaksanaan RPJM Nasional, dalam arti bagaimana membangun Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui kinerja secara terpadu, penuh integritas dan akuntabel,taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah daerah yang memadai.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi politik, hukum dan tata kelola, demokrasi dan hak asasi manusia, kemandirian melalui swasembada pangan, air dan energi, pegembangan infrastruktur, memeperkuat daya saing SDM, hilirisasi dan pengembangan industri berbasis SDA, membangun dari desa, dan kehidupan yang harmonis dengan alam, lingkungan dan budaya.

Untuk mendukung pencapaian tujuan nasional yaitu dalam mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, substansi inti dari reformasi birokrasi dan tata kelola di bidang kepegawaian yaitu melalui penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekruitmen, pengembangan, penempatan, promosi dan mutasi PNS.

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan pada Pemerintah Daerah bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yaitu dengan peningkatan kualitas pelayanan pegawai di lingkup BKPPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan baik kepada PNS maupun kepada masyarakat. Harapannya tingkat kepuasan masyarakat maupun PNS dapat meningkat. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maupun pembinaan dan pengembangan aparatur. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Beberapa isu strategis dalam manajemen kepegawaian di tingkat Pemerintah Daerah DIY perlu mendapatkan perhatian di tingkat Kabupaten, di antaranya :

1. Komitmen Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan *Good Governance* dalam

pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Daerah;

2. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur untuk mengembangkan kompetensi;
3. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi pegawai dan mutasi jabatan berdasarkan merit sistem. Otimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan assessment center;
4. Pemetaan pegawai dengan manajemen talent untuk mewujudkan manajemen suksesi dalam implementasi merit system sesuai amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan instansi-instansi terkait;
6. Pengembangan sistem *reward and punishment* dengan mengedepankan kinerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk menyiapkan program dan kegiatan yang selaras dan mampu memenuhi tuntutan pelayanan kepegawaian.

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan hasil evaluasi, secara umum masih terdapat permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme birokrasi diantaranya :

a. Terbatasnya sarana dan prasarana;
b. Keterbatasan jumlah PNS dan jumlah pensiun yang cukup besar;
c. Perlunya peningkatan komitmen untuk melayani dengan sepenuh hati dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
d. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam pengelolaan data dan pelayanan kepegawaian.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 diharapkan dapat mendukung capaian target draft RPJM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, sebagai unsur pendukung pelaksanaan ketugasan organisasi pemerintah daerah, penguatan kapasitas aparatur melalui pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta pengembangan kapasitas aparatur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelayanan dan upaya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam sasaran daerah serta penjabaran tahun pertama draft RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Tahun 2026 merupakan tahun yang sangat strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, karena menjadi titik transisi antara pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya dengan RPJMD periode yang baru. Sebagai tahun pertama pasca pemilihan kepala daerah. Renja Tahun 2026 berperan penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus membuka ruang penyesuaian arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Penyusunan Renja Tahun 2026 diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas capaian pembangunan yang telah dirintis dalam RPJMD 2021–2026, sekaligus mulai menyelaraskan dengan isu-isu strategis yang diangkat dalam dokumen awal RPJMD 2025–2029.

Sasaran Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2026 yang hendak dicapai dalam upaya pencapaian target kinerja pelayanan berdasarkan rumusan sasaran dalam Sasaran daerah yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH (OUTCOME)	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH (OUTCOME)
1	Reformasi Birokrasi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Nilai AKIP	Aparatur yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional
				Aparatur yang profesional dan berkinerja baik	Persentase pegawai dengan SKP bernilai minimal baik

Selanjutnya disajikanhubungan antara tujuan dengan sasaran Perangkat Daerah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Tahun 2026
1	Terwujudnya Profesionalitas ASN serta Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	100

Tabel 3.3
Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026
1	Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat	Indeks profesionalitas ASN	100
2	Aparatur yang profesional dan berkinerja baik	Persentase pegawai dengan SKP bernilai minimal baik	100

Selain itu disajikan pula Indikator Kinerja Utama seperti dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Indeks profesionalitas ASN	nilai	100
2.	Persentase pegawai dengan SKP bernilai minimal baik	persen	100
3.	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	persen	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2026 sejumlah 4 program dengan 13 kegiatan dan 45 sub kegiatan baik dalam fungsi kesekretariatan maupun pelayanan. Mengingat bahwa merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi *supporting staff* bukan *operating core* maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan lebih banyak bersifat fasilitasi dan administratif baik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang bersifat kelapangan adalah program dan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan kepegawaian maupun pendataan pegawai. Sedangkan untuk program dan kegiatan yang lebih bersifat fasilitasi dan administratif berlokasi pada sendiri atau instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Kepegawaian Negara baik yang ada di Yogyakarta maupun di Jakarta, Sekretariat Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara dan lain sebagainya.

Program/kegiatan dalam Renja tahun 2026 dibiayai dengan anggaran sebesar Rp132.042.490.383,00 yang bersumber dari APBD, sedangkan kegiatan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp454.956.000,00 untuk penyelenggaraan diklat keistimewaan. Sehingga total anggaran yang dikelola yaitu sebesar Rp132.497.446.383,00.

Program dan kegiatan pada Tahun 2026 disusun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian. Program dan kegiatan yang disusun meliputi 4 program dengan 13 kegiatan dan 45 sub kegiatan yang merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang kesekretariatan serta program, kegiatan dan sub kegiatan utama.

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatifnya. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah melalui tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari penyusunan rancangan awal yang kemudian dibahas dalam forum Perangkat Daerah, forum Musrenbang tingkat Kabupaten, penyusunan rancangan akhir hingga ditetapkan melalui Peraturan Bupati sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPPD Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	**Sasaran Daerah**	**Sasaran PD**	**Indikator Sasaran**	**Target Sasaran PD**	**Kode**					**Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Pagu Indikatif**	**Penanggung Jawab**
Reformasi Birokrasi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Aparatur yang profesional dan berkinerja baik	Persentase pegawai dengan SKP bernilai minimal baik	100	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**126.517.470.000,00**	BKPDD
					5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	528.760.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	500.710.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	5.050.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	23.000.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	357.924.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	3.985.000,00	BKPDD

					5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	59.440.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	294.499.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	363.998.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	353.500.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	10.498.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	125.266.788.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.500.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.000.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	125.178.588.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	16.000.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	6.000.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	44.700.000,00	BKPDD
					5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	0,00	BKPDD
					5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	299.999.000,00	BKPDD

					5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	299.999.000,00	BKPDD
		Aparatur yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	100	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	299.999.000,00	
					5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**5.225.021.383,00**	BKPDD
					5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.190.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.565.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	575.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	575.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	650.000,00	BKPDD

					5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	650.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.585.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	590.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.426.260.983,00	BKPDD
					5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.422.431.983,00	BKPDD
					5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	425.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.404.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.280.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	BKPDD

					5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	31.280.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	BKPDD
					5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.506.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.995.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.586.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.543.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.150.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.975.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.857.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86.869.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	10.200.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.669.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	BKPDD

					5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.387.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.770.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151.617.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.528.400,00	BKPDD
					5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.500.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.030.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.530.000,00	BKPDD
					5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000,00	BKPDD
					5	3	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.968.400,00	BKPDD

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH				**132.497.446.383,00**				**416.365.600.000,00**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**454.956.000,00**				**355.000.000,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**454.956.000,00**				**355.000.000,00**
4,01,04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan***		**100 Persen**	**454.956.000,00**			**-**	**355.000.000,00**
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	*ASN yang lulus diklat keistimewaan kabupaten/ kota*			454.956.000,00			-	355.000.000,00
4.01.04.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	454.956.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			355.000.000,00

5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**132.042.490.383,00**				**416.010.600.000,00**
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**131.742.491.383,00**				**415.234.600.000,00**
5,03,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik***		**100 persen**	**5.225.021.383,00**			**-**	**296.431.600.000,00**
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen* Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.210.000,00			-	32.000.000,00
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	1.585.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			9.500.000,00
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	575.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	575.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00

5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000,00
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	1.585.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	590.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.500.000,00
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen* Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.426.260.983,00			-	4.010.000.000,00
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	734 Orang/bulan	4.422.431.983,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.000.000.000,00
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	425.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00

5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	3.404.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.000.000,00
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen* Administrasi Kepegawaian			925.000,00			-	5.000.000,00
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	925.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen* Administrasi Umum			182.506.000,00			-	291.250.600.000,00
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	12.995.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			13.000.000,00
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	54.586.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			291.000.000.000,00

5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	4.543.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	20.150.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.000.000,00
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.600.000,00
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	9.975.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			14.000.000,00
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	77.857.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			155.000.000,00
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*			86.869.000,00			-	265.000.000,00

5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	10.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	76.669.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			115.000.000,00
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kebutuhan jasa penunjang terpenuhi*			288.742.000,00			-	379.000.000,00
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	32.355.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			54.000.000,00
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	104.770.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			220.000.000,00
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	151.617.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			105.000.000,00
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*			233.508.400,00			-	490.000.000,00

5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51 Unit	88.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			175.000.000,00
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31 Unit	16.030.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.000.000,00
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	114.530.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			140.000.000,00
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	4.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00
5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	9.948.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			70.000.000,00
5,03,02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian***		**100 persen**	**126.517.470.000,00**			**-**	**118.803.000.000,00**

5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Pengadaan pegawai sesuai formasi, pensiun tepat waktu, dan tersedianya data yang up to date*			528.760.000,00			-	1.175.000.000,00
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	500.710.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.100.000.000,00
5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	5.050.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	23.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			70.000.000,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Pengisian jabatan struktural dan mutasi ASN sesuai kompetensi serta kenaikan pangkat ASN tepat waktu*			357.924.000,00			-	425.000.000,00
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3.985.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			35.000.000,00

5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN								
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	59.440.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			90.000.000,00
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	294.499.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			300.000.000,00
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Pengembangan sumber daya manusia ASN*			363.998.000,00			-	3.968.000.000,00
5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	353.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.438.000.000,00
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN								
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	10.498.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			530.000.000,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Penilaian kinerja tepat waktu dan pemberian penghargaan ASN serta kasus ASN yang terselesaikan*			125.266.788.000,00			-	113.235.000.000,00
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	15.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00

5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.000.000,00
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai								
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30250 Orang	125.178.588.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			113.000.000.000,00
5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur								
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	16.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			55.000.000,00
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN								
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225 Orang	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN								
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	44.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**299.999.000,00**				**776.000.000,00**
5,04,02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Presentase ASN yang Meningkat Kompetensi Teknis dan Fungsionalnya***		**100 persen**	**299.999.000,00**			**-**	**776.000.000,00**

5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional*			299.999.000,00			-	776.000.000,00
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	299.999.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			776.000.000,00
		J U M L A H			**132.497.446.383,00**				**416.365.600.000,00**

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan arah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yang disusun berdasarkan sasaran daerah, dengan memperhatikan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan, yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

Mengingat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan prioritas kebijakan nasional, agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kebijakan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan lebih baik dan komprehensif perlu didukung anggaran yang memadai baik dari APBD maupun APBN.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

Dalam penyusunan Rencana Kerja BKPPD Tahun 2026 melibatkan peran serta pemangku kepentingan dalam upaya menghasilkan Rencana Kerja yang dapat menampung aspirasi pemangku kepentingan baik masyarakat, maupun Perangkat Daerah lainnnya serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan di bidang sumber daya aparatur pada tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pada yang merupakan komitmen untuk memberikan kepastian dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkesinambungan.

Rencana Kerja tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk periode 1(satu) tahun yaitu tahun 2026 yang akan dimulai dari tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan DaerahTahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2026 baik dalam lingkup program maupun kegiatan, telah diupayakan dalam pelaksanaannya dapat sinergis dan berjalan dengan lancar. Komitmen, konsistensi, partisipasi, kerja keras dan semangat dari

seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja ini mutlak diperlukan.Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Rencana dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari, 1 Agustus 2025
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH,

ttd

ISKANDAR

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG RANCANGAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RANCANGAN RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan yang ada di Rancangan Awal Renja PD harus tercantum dalam Renstra PD yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh Tim Kerja dan masing-masing Kasubag pada Sekretariat dan Kasubid Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pengendalian, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset dan Bidang Akuntansi yang mana telah disesuaikan dengan kebutuhan riil, agar kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul guna dilakukan pencermatan dan penyelarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hasil pencermatan dan penyelarasan tersebut untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja PD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2021 – 2026 yang penyusunannya mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang anggaran, pendataan dan penetapan pajak daerah, penagihan, pelayanan dan pengendalian, perbendaharaan, aset dan akuntansi, dituntut adanya profesionalisme didalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu proses aktivitas kerja di bidang keuangan yang dimulai dari perencanaan, penggalian, pendataan, pengkoordinasian, penetapan, pemungutan, pembelanjaan, akuntansi, pembantuan, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan, agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud aparatur yang bersih dan terselenggaranya pemerintahan yang dipercaya. Dengan demikian akan terwujud adanya pemerintahan yang baik (Good Governance) dan sekaligus pemerintah yang bersih (Clean Government) sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2026 disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Udang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tetang Kabupaten Gunungkidul di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,14, dan 15 dari

Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2029 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah;

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;
18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tertanggal 7 Februari 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, dan tata kerja yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatanya.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Sebagai pedoman atau landasan operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 202 6 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKAD
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja BKAD dan Capaian Renstra BKAD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD
2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKAD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD dan Capaian Renstra BKAD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;

b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel.2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan *(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2023*			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Rrogram, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	16	16	21	21	100	21	21	131.25
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Renja	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Renja perubahan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Profil BKAD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pelaksanaan forum perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen ROPK	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen KAK BKAD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA perubahan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen perubahan perjanjian kerja	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	2	2	100	2	2	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17	17	17	100	17	17	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKiJP	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Tepra	0	0	0	0	0	0	0	0
		Laporan e-monev	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	5	5	5	100	5	5	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	0	14	0	0	0	0	0	0
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	0	100	0	0	0	0	0	0
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	0	14	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Insentif pemungutan pajak dan retribusi terbayar	0	4	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008	1008	1008	864	85,71	1008	1008	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Jawaban tidak lanjut pemeriksaan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	1	1	100	1	1	100
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan SPJ bulanan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen laporan semesteran	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	13	13	100	13	13	100
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN terlayani	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8	8	8	8	100	8	8	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani	0	0	0	0	0	0	0	0
		Persentase administrasi umum terlayani	0	0	0	0	0	0	0	0
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	5	5	100	5	5	100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat tulis kantor	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Printer yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Roll O Pack Arsip yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	20	20	20	100	20	20	100
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah tea/cofee warmer yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah tea set/chinaware yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Trolley yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Tangga alumunium yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	4	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah lembar fotocopy	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	24	24	24	100	24	24	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat kabar tersedia (2 surat kabar x 12 bulan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah minum snack tamu tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi luar daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Frekuensi rapat , konsultasi, dan koordinasi dalam daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah makan minum rapat tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah makan snack rapat tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	0	0	0	0	0	0	0	0
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas roda 2	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Kendaraan dinas roda 4	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	3	3	4	133	3	3	100
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Almari Ruang Kepala yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Meja Rapat Kayu yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Kursi Rapat yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	200	0	0	0	0	200	200	100
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin antrian yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pengadaan smart tv 50' (set: 1 & bid : 4 Akt, perb, aset, pelyn) yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vacuum cleaner yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pesawat telepon cordless yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mesin Fax yang terbeli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	4	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	0	6	0	0	0	0	0	0
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	0	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	0	2632	0	0	0	0	0	0
		Jumlah paket dokumen terkirim	0	12	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	100	12	12	100
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah 2 rekening air terbayar	0	24	0	0	0	0	0	0
		Jumlah 3 rekening listrik terbayar	0	36	0	0	0	0	0	0
		Jumlah 3 rekening telpon terbayar	0	36	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	96	96	96	100	96	96	100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan gedung terbayar	0	O	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	4	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang milik daerah terlaksana	0	0	0	0	0	0	0	0
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	0	0	0	0	0	0	0	0
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah kendaraan roda 2 terpelihara	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah kendaraan roda 4 terbayar pajaknya	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah kendaraan roda 2 terbayar pajaknya	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	138	73	138	138	100	138	138	100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer / server terfasilitasi pemeliharaannya	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah notebook / laptop terfasilitasi pemeliharaannya	0	0	0	0	0	0	0	0
		Porforator terfasilitasi pemeliharaannya	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	18	18	18	100	18	18	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab kamar mandi	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rehab berat atap Gd. Unit II (+desain ulang)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rehab Ruang Rapat BKAD (4 ruang)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rehab Interior Ruang Sekretariat (R. kerja Sek, desk recepsionist, pengaduan, R. tunggu tamu) & Ruang Kepala (Ruang tamu & R. kerja)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan taman	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penataan jaringan listrik gedung BKAD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC terfasilitasi pemeliharaannya	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	20	20	20	100	20	20	100
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nilai IKM PD	0	0	0	0	0	0	0	0
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen SOP	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen SPIP	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen RTP	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen survey kepuasan masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Penetapan APBD Tepat Waktu - Penyelesaian SP2D tepat waktu - Persentase penyampaian laporan keuangan PD tepat waktu	0	0	0	0	0	0	0	0
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah layanan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Persentase Penyampaian RAPBD minggu pertama Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen rancangan KUA/PPAS	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen KUA/PPAS	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen percermatan usulan belanja hibah, bansos, bagi hasil dan BKK	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8	8	8	8	100	8	8	100
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen rancangan KUA/PPAS Perubahan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen KUA/PPAS Perubahan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen pencermatan usulan belanja hibah, bansos, bagi hasil dan BKK Perubahan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6	6	6	6	100	6	6	100
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA hasil desk	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	47	47	47	47	100	47	47	100
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan hasil desk	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	47	47	47	47	100	47	47	100
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	47	47	47	47	100	47	47	100
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	47	47	47	47	100	47	47	100
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen RAPBD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perda APBD	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Perbup Penjabaran APBD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3	3	3	3	100	3	3	100
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan RAPBD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perbup Perubahan Penjabaran APBD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3	3	3	3	100	3	3	100
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Analisis standar belanja	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Peraturan Bupati Standar satuan harga	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Peraturan bupati harga satuan paket kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	4	4	4	100	4	4	100
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah kesepakatan perencanaan anggaran belanja daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	2	2	2	100	2	2	100
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah kesepakatan perencanaan anggaran pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2	2	2	2	100	2	2	100
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah layanan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terlaksana	0	0	0	0	0	0	0	0
		Persentase Penyelesaian SP2D tepat waktu (2 hari)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas dan Rekonsiliasi Bank	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12	12	12	100	4	4	16.67
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SP2D Non Gaji	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen SP2D Gaji dan Potongan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen SPD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Anggaran Kas	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen administrasi gaji yang mengupdate data terkini	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen laporan realisasi belanja pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen laporan realisasi SP2D non gaji	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31	31	31	31	100	31	31	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi penyertaan modal daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Perbup tentang Penatausahaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	3	3	3	3	100	3	3	100
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Konfirmasi transfer	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dana keistimewaan dan tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen laporan DAK fisik, DAK Non fisik, DID dan dana keistimewaan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	105	105	105	105	100	105	105	100
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen laporan potongan IWP	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen laporan potongan taperum	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen laporan PPh ps 21	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen penelitian, klarifikasi dan pelaporan PPn/PPh	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen pemotongan JKK, JKM ASN/DPRD, JKN ASN/DPRD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Jaminan Kematian terbayar	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Bulan Jaminan Kesehatan Nasional terbayar	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Bulan Jaminan kecelakaan kerja terbayar	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	12	12	12	100	12	12	100
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dengan bank	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Surat Keputusan Piutang dan Utang Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	13	13	13	13	100	13	13	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	32	32	32	32	100	32	32	100
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen laporan pemakaian benda berharga	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen Pengesahan pertanggungjawaban pendapatan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi benda berharga	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20	20	20	20	100	20	20	100
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengesahan Ganti Uang / Tambah Uang (GU/TU)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen Surat Keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47	47	47	47	100	47	47	100
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Layanan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terlaksana	0	0	0	0	0	0	0	0
		Persentase PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	0	0	0	0	0	0	0	0
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pencatatan pertanggungjawaban pendapatan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pencatatan pertanggungjawaban belanja dan pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pencatatan pertanggungjawban aset dan selain asset	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	24	24	24	24	100	24	24	100
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahunan dan Semesteran	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Ikhtisar laporan keuangan desa	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	96	96	96	96	100	96	96	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda pertanggungjawaban APBD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100	2	2	100
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen kebijakan akuntansi pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Sistem akuntansi pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	2	2	2	100	2	2	100
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Peserta Bimtek penyusunan laporan keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah SKPD Peserta Bimtek penyusunan laporan keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Upgrade dan kustemisasi aplikasi SIPKD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	126	126	126	126	0	126	126	100
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyaluran bantuan keuangan yang terfasilitasi	0	2	0	0	0	0	0	0
		Persentase Penyaluran Bantuan Keuangan yang tepat waktu	0	100	0	0	0	0	0	0
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus infrastruktur	0	2	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2	1	2	2	100	2	2	100
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah fasilitasi dana darurat dan mendesak	0	12	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	10	12	12	100	12	12	100
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkan ke neraca	0	0	0	0	0	0	0	0
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah layanan kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase PD yang menyampaikan Laporan BMD dengan benar dan tepat waktu	0	0	0	0	0	0	0	0
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Perbup SHBJ	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perbup perubahan SHBJ	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	2	2	2	100	2	2	100
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen standart kebutuhan BMD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan barang perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen analisa kebutuhan BMD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Custemisasi aplikasi e-SHBJ / e-RKBMD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sim Aset yang up to date	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah laporan BMD semester 1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen laporan BMD audited	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	2	2	2	100	2	2	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan inventarisasi BMD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aplikasi SIM inventarisasi yang up to date	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pembangunan pagar BMD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan gudang BKAD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan gedung siyono	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen penilaian BMD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah fasilitasi pemantauan kerugian daerah	0	1	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penghapusan BMD	0	22	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen pemindahtanganan BMD	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10	10	10	10	100	10	10	100
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen rekonsiliasi laporan penetapan status penggunaan BMD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen rekonsiliasi penggunaan sementara dan BMD yang dioperasionalkan oleh pihak lain	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen rekonsiliasi alih status BMD	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen rekonsiliasi pengelolaan aset persediaan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	3	4	4	100	4	4	100
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen rekonsiliasi laporan BMD audited dan unaudited	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	0	2	2	100	2	2	100
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD peserta bimtek pengurus barang dan pejabat penatausahaan barang	0	48	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	151	0	151	130	86,09	151	151	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase Capaian target obyek dan subyek pajak - Persentase capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola	0	100	0	0	0	0	0	0
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah layanan pengelolaan pendapatan daerah terlaksana	0	9	0	0	0	0	0	0
		Persentase capaian target obyek dan subyek pajak dan capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola	0	100	0	0	0	0	0	0
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah forum pendapatan se DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen standarisasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah sosialiasi pengelolaan PBB P2	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
		Monitoring penyampaian SPPTP PBB	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Intensifikasi jenis pajak daerah dan tunggakannya	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah pemberian Penghargaan Kalurahan lunas PBB P2	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah stimulus SPPT terbayar	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10	0	10	10	100	10	10	100
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penghargaan wajib pajak terlaksana	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Sosialisasi pajak daerah terlaksana	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	1	1	100	1	1	100
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah reklame dan air tanah) yang ditetapkan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Sosialisasi wajib pajak terlaksana	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	144	144	144	144	100	144	144	100
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen penerimaan pajak penerangan jalan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah pendataan obyek dan subyek pajak (9 jenis pajak)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Pemutakhiran data subyek dan obyek pajak bumi dan bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	12	12	12	100	12	12	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang konsultasi dan terdampingi	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12000	12000	12000	12655	105,4	12000	12000	100
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan obyek pajak yang dilakukan (self assesment)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2	2	2	2	100	2	2	100
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	12	10	100	12	12	100
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen administrasi pelayanan pajak daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	12	12	12	100	12	12	100
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Dokumen Retribusi pemakaian kekayaan daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8	8	8	8	100	8	8	100

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kinerja program kegiatan BKAD dapat terlaksana dengan baik. Adapun beberapa kegiatan yang **tidak tercapai sesuai target kinerja** program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, karena rapat koordinasi yang tidak seluruhnya dilaksanakan;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, disebabkan rapat P3DN belum terlaksana sesuai jadwal;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi karena Diklat yang semula untuk Pajak terkendala batas usia;
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor karena disesuaikan dengan kebutuhan atau kerusakan yang ada pada instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena Belanja ATK (Persediaan) tergantung kebutuhan;
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan karena terdapat perubahan di DPPA sehingga pembayaran belum bisa dilaksanakan;
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga karena disesuaikan kebutuhan peralatan rumah tangga;
8. Fasilitasi Kunjungan Tamu belum semua terserap karena tentatif, tergantung kedatangan tamu ke Badan Keuangan dan Aset Daerah , acara luar daerah dan undangan luar daerah;
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD belum semua terserap sesuai angkas karena tentatif, tergantung kebutuhan rapat, perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, karena Gaji THL dibayarkan sesuai dengan hari kerja dan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan/kerusakan;
11. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pelaksanaan Service laptop dan komputer bulan September terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan SPJ dibayarkan sesuai dengan tagihan;

13. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Aplikasi masih dalam pengerjaan;
14. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah terdapat kendala penyelesaian administrasi/SPJ perjalanan dinas semenjak berhentinya aplikasi Srikandi, memerlukan penyesuaian terkait hal ini, dan menelusuri dokumen-dokumen SPJ yang sebelumnya sudah diselesaikan di aplikasi Srikandi.

Pada tahun 2024 akibat perekonomian global yang lesu berimbas pula ke Indonesia, diperkirakan hingga tahun 2025 masih berlangsung. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2026 antara lain :

1. Pergeseran anggaran
2. Penurunan pendapatan
3. Kenaikan belanja tidak terduga
4. Belanja wajib yang diarahkan pemerintahan yang baru menyebabkan penyesuaian perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya program/kegiatan pada tahun 2024 antara lain Intensifikasi PBB lebih ditingkatkan, jemput bola sampai desa sehingga Wajib Pajak lebih mudah untuk bayar pajaknya; adanya inovasi pembayaran pajak dengan system online sehingga memudahkan masyarakat menunaikan kewajiban membayar pajak.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung program prioritas nasional 2026 dalam memperkuat stabilitas politik hukum ketahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik juga mendukung program prioritas Daerah yaitu penguatan *good governance* pada berbagai tingkatan serta Reformasi Birokrasi pada tingkat Kabupaten telah menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program pembangunan di Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul dapat terlaksana sesuai rencana.

Kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga program pembangunan yang mewadahi aspirasi masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Tingginya tingkat

kualitas dan kemampuan sumber daya aparatur akan menjadi indikator berhasilnya program pembangunan yang direncanakan. Selain itu terjadinya peningkatan kualitas sumber daya aparatur akan sejalan dengan profesionalitas pelayanan publik sehingga good governance dapat berjalan sesuai amanat reformasi birokrasi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2026 ada tiga target sesuai IKU BKAD yang tertuang dalam Dokumen Renstra BKAD Tahun 2021 -2026 yaitu :

1. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan;
2. Kualitas Penatausahaan Aset Daerah Meningkat dengan indikator Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Pendapatan Asli Daerah Meningkat dengan indikator Persentase Kenaikan PAD yang dikelola

Dari 3 target pencapaian kinerja BKAD tersebut secara keseluruhan tercapai dengan baik, dapat di uraikan pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Terhadap Renstra PD Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisi
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)			(10)	(11)	(12)	(12)	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan 1. Penetapan APBD tepat waktu; 2. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu; 3. Persentase penyampaian Laporan Keuangan PD tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	99,29	100	100	

2	Indeks Pengelolaan Aset Daerah 1. Jumlah tanah bersertifikat/jumlah semua tanah BMD 2. Jumlah kendaraan berdokumen lengkap/jumlah kendaraan BMD 3. Jumlah BMD yang dimanfaatkan / jumlah BMD yang seharusnya dapat dimanfaatkan 4. Jumlah BMD yang diamankan/jumlah BMD yang perlu diamankan.	persen	100	100	100	100	79,70	86,37	90	100	
3	Persentase Kenaikan PAD yang dikelola	persen	5.09	3.89	4,62	4,62	-2,24	8,68	3,89	4,62	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi BKAD Kabupaten Gunungkidul

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi BKAD dalam pencapaian visi, misi Bupati secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan memperhatikan nilai - nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja BKAD dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang dilakukan telah berjalan dengan baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan BKAD tetap mendapatkan atau menemui hal kritis dan berbagai macam persoalan atau hambatan.

Isu – isu atau permasalahan yang dihadapi BKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor Eksternal antara lain :

1. Belum optimalnya penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD) pada tahapan penatausahaan dan pelaporan;
2. Perubahan regulasi yang terkait dengan pengelolaan BMD;
3. Terdapat ketidaksinkronan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan BMD dengan regulasi yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Dalam pengelolaan pendapatan ketergantungan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih tinggi sehingga tingkat kemandirian daerah rendah.

Faktor Internal anata lain :

1. Belum optimalnya penyampaian data SPPT PBB-P2 khususnya kepada wajib pajak yang berdomisili di luar daerah karena sulit/tidak diketahui alamatnya;
2. Belum tersedianya peta bidang poligon untuk pemutakhiran data PBB-P2;
3. Belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah;

4. Belum adanya personil ASN di BKAD yang menguasai terkait dengan pemeriksa pajak dan juru sita pajak;

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan yang ada di BKAD. Adapun solusi/hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan pelayanan berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan penggunaan aplikasi SIPD secara penuh dengan cadangan aplikasi pendamping;
2. Mempelajari setiap perkembangan regulasi dan menyesuaikan dengan regulasi daerah;
3. Melakukan penelusuran wajib pajak bersama dengan tim kalurahan dan kapanewon;
4. Menyusun peta bidang poligon;
5. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemda DIY;
6. Melakukan berbagai upaya optimalisasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara ekstensifikasi, intensifikasi dan berbgai kemudahan dalam layanan pembayaran pajak daerah;
7. Mengirimkan aparatur/pegawai untuk mengikuti bimtek, seminar maupun pelatihan baik secara luring maupun daring;
8. Rekonsiliasi data secara rutin dan berkala;
9. Mengajukan permohonan dan atau mengikutkan personil untuk mengikuti pelatihan pemeriksa pajak dan juru sita pajak;

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Bupati serta tujuan BKAD pada khususnya.

Kinerja yang telah dicapai BKAD merupakan buah kerja keras seluruh sumber daya aparatur, hasil koordinasi dengan seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat.

Prestasi kerja yang diraih diantaranya:

1. Mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK dengan dukungan stakeholder terkait untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk kesembilan kali.
2. Penghargaan Wajib Pajak Instansi Pemerintah atas Kepatuhan Penyampaian SPPT Masa tepat waktu selama tahun pajak 2024;
3. Peningkatan jumlah Kalurahan lunas PBB sampai dengan tanggal jatuh tempo;

Dalam rangka peningkatan pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah harus bisa menjawab setiap tantangan/permasalahan dan peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pajak daerah serta pelayanan SP2D. Badan Keuangan dan Aset Daerah harus bisa memberikan pelayanan yang cepat, transparan serta memberikan kemudahan bagi semua lapisan masyarakat sesuai standar pelayanan.

Sudah cukup jelas bahwa setiap penyelenggara pelayanan harus mampu memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan transparan. Menjawab tantangan itu Badan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan terobosan dengan menyediakan sistem informasi. Dengan begitu tidak lain teknologi informasi berperan besar dalam rangka pemenuhan untuk kecepatan pelayanan.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 terhadap analisis kebutuhan dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					**366.986.292.628,00**					**394.694.150.094,00**	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**366.986.292.628,00**					**394.694.150.094,00**	
KEUANGAN					**366.986.292.628,00**					**394.694.150.094,00**	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Persentase kesesuaian program keistimewaan	**N/A**	**N/A**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Persentase kesesuaian program keistimewaan	100 persen	**65.000.000,00**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		**Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan**	**N/A**	**N/A**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**		**Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan**	4 Dokumen	**65.000.000,00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY**	**N/A**	**N/A**	**Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan**	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY**	4 Laporan	**65.000.000,00**	
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik***	**100 Persen**	**12.494.800.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksana dengan Baik***	**100 persen**	**12.678.704.980,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21 Dokumen	61.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun*	21 Dokumen	25.997.900,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	3.007.100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.200.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.200.200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.200.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.199.900,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1.199.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	2 Dokumen	1.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	2 Dokumen	1.199.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	17 Laporan	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	17 Laporan	6.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	6.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	2.200.000,00	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	9.999.900,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu*	14 Dokumen	9.150.500.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu*	14 Dokumen	9.649.984.040.12	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1008 Orang /Bulan	9.100.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	1106 Orang/bulan	9.578.475.340,12	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1.199.000,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1 Dokumen	3.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1 Dokumen	1.199.900,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	13 Laporan	44.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	13 Laporan	69.109.800,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian*	80 Orang	24.650.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian*	79 Orang	16.600.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	8 Dokumen	2.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	14 Dokumen	1.500.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	3 Orang	22.650.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	3 Orang	15.100.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani*	11 kegiatan	795.150.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Jumlah kegiatan administrasi umum terlayani*	11 kegiatan	335.737.300,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	5.992.800,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	20 Paket	344.300.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	20 Paket	215.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	7.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	4 Paket	6.499.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	24 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	24 Paket	15.002.500,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	360 Dokumen	2.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	360 Dokumen	1.200.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	71.250.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	5.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	334.700.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	87.043.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana*	2 unit	1.500.000.000,00	
	Pengadaan Mebel	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	2 Unit	3.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	2.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana*	3 kegiatan	1.000.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana*	N/A	N/A	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	3 Unit	1.000.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	N/A	N/A	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana*	6 kegiatan	533.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana*	6 kegiatan	513.804.143,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	30.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	700.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	108 Laporan	303.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	108 Laporan	304.049.143,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	200.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	209.055.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana*	4 kegiatan	930.500.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Jumlah layanan pemeliharaan Barang milik daerah terlaksana*	4 kegiatan	631.081.596,88	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	138 Unit	386.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	222 Unit	433.855.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	9 Unit	20.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	9 Unit	10.800.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	507.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	176.526.596,88	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	17.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	12 Unit	9.900.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		***Penetapan APBD Tepat Waktu; Penyelesaian SP2D tepat waktu; Persentase Penyampaian Laporan Keuangan PD tepat waktu.***	**100 Persen**	**348.884.956.628,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		***Penetapan APBD Tepat Waktu; Penyelesaian SP2D tepat waktu; Persentase Penyampaian Laporan Keuangan PD tepat waktu***	**100 persen**	**378.270.192.614,00**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		*Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*	8 Dokumen	1.427.674.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		*Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*	8 Dokumen	1.154.204.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	4 Dokumen	246.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	4 Dokumen	189.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	4 Dokumen	128.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	4 Dokumen	119.600.100,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	47 Dokumen	26.100.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	47 Dokumen	15.000.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	47 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	47 Dokumen	15.000.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*	47 Dokumen	115.820.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*	47 Dokumen	99.600.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*	47 Dokumen	110.680.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*	47 Dokumen	104.599.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	4 Dokumen	400.224.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	4 Dokumen	261.504.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	4 Dokumen	238.650.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	4 Dokumen	234.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	4 Dokumen	131.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	4 Dokumen	104.999.800,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	2 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	2 Dokumen	9.000.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan*	2 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan*	2 Dokumen	1.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		*Jumlah layanan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah yang terlaksana*	9 kegiatan	45.721.030.128,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		*Jumlah layanan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah yang terlaksana*	9 kegiatan	48.604.104.614,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	24 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	24 Dokumen	6.000.000,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	17 Dokumen	114.453.000,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	17 Dokumen	94.740.000,00	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah*	2 Dokumen	10.000.000,00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah*	2 Dokumen	500.000,00	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	82 Dokumen	35.915.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	82 Dokumen	37.250.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	12 Laporan	45.494.699.128,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	12 Laporan	48.418.934.614,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas*	13 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas*	13 Dokumen	980.000,00	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	32 Dokumen	24.054.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	32 Dokumen	9.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	8 Dokumen	10.650.000,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	8 Dokumen	1.700.000,00	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	49 Orang	2.759.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	49 Orang	35.000.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah layanan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terlaksana*	5 kegiatan	657.701.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		*Jumlah layanan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terlaksana*	5 kegiatan	529.270.000,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,Pendapatan-LO, dan Beban*	24 Dokumen	126.600.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	24 Dokumen	87.960.000,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	4 Laporan	55.470.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	4 Laporan	53.305.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	302.100.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	310.920.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	2 Dokumen	10.626.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	2 Dokumen	6.375.000,00	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	2 Dokumen	44.505.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	2 Dokumen	13.997.500,00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	162 Orang	118.400.000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	162 Orang	56.712.500,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-	301.078.551.500,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		-		327.982.613.500,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	2 Laporan	296.078.551.500,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	2 laporan	321.482.613.500,00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	2 Laporan	5.000.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	2 laporan	6.500.000.000,00	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		***Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkam ke neraca***	**100 Persen**	**1.063.741.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		***Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkam ke neraca***	**100 persen**	**545.637.500**	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		*Jumlah layanan kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana*	13 kegiatan	1.063.741.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah		*Jumlah layanan kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang terlaksana*	13 kegiatan	545.637.500,00	
	Penyusunan Standar Harga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	2 Dokumen	63.130.000,00	Penyusunan Standar Harga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	3 Dokumen	160.000.000,00	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	1 Dokumen	36.740.000,00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	1 Dokumen	35.055.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	4 Dokumen	52.671.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	4 Dokumen	12.800.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	176.500.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	2 Laporan	169.740.000,00	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	1 Laporan	15.000.000,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	1 Laporan	17.380.000,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	3 Laporan	350.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	3 Laporan	76.000.000,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	1 Laporan	80.000.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	1 Laporan	6.197.500,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	1 Laporan	75.000.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	1 Laporan	35.755.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	10 Dokumen	35.700.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	10 Dokumen	7.000.000,00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	4 Laporan	90.000.000,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	4 Laporan	17.000.000,00	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	2 Laporan	50.000.000,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	2 Laporan	6.000.000,00	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	151 Orang	39.000.000,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	140 Orang	2.700.000,00	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		***Persentase Capaian target obyek dan subyek pajak: Persentase capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola***	**100 Persen**	**4.542.795.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		***Persentase Capaian target obyek dan subyek pajak: Persentase capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola***	**100 persen**	**3.134.615.000,00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		*Jumlah layanan pengelolaan pendapatan daerah terlaksana*	9 kegiatan	4.542.795.000,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		*Jumlah layanan pengelolaan pendapatan daerah terlaksana*	9 kegiatan	3.134.615.000,00	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah*	1 Dokumen	22.000.000,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah*	1 Dokumen	12.000.000,00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	1 Laporan	300.000.000,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	1 Laporan	184.000.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	144 Unit	355.795.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	144 Unit	324.675.000,00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	12 Laporan	670.000.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	12 Laporan	332.305.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	12000 Layanan	100.000.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	14000 Layanan	35.700.000,00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*	2 Dokumen	70.000.000,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*	2 Dokumen	2.800.000,00	
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	12 Dokumen	2.850.000.000,00	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	12 Dokumen	2.118.370.000,00	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	12 Dokumen	70.000.000,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	12 Dokumen	3.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	12 Laporan	105.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	12 Laporan	121.765.000,00	
					366.986.292.628,00					**394.694.150.094,00**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dengan dimulainya Pemerintahan di bawah Presiden yang baru, terdapat beberapa kebijakan susulan yang merupakan janji pada saat kampanye Pilpres. Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan kebutuhan anggaran akibat kebijakan baru yang muncul dimaksud, seperti program makan sehat bergizi dan kenaikan gaji tenaga pendidik.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yaitu dilaksanakannya penggunaan aplikasi SIPD secara penuh mulai 2025, sebagai tindak lanjut dari Pakta Integritas yang telah ditandatangani Sekretaris Daerah.

Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, terdapat penurunan pendapatan akibat telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tidak lanjut dari undang-undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 pada dasarnya merujuk pada tema pembangunan nasional (RKP) tahun 2026 dan tema pembangunan Pemerintah Daerah DIY (RKPD DIY) tahun 2026 sebagai berikut :

1. Tema Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2026
   “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif," “
2. Tema pembangunan DIY (RKPD DIY) tahun 2026
   “Digitalisasi dan transformasi pembangunan"

Berdasarkan tema nasional dan provinsi tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban*”.*

Dalam rangka mendukung visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2025 – 2029 yaitu **“Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”**

Rencana Kerja BKAD tahun 2026 disusun dengan mencermati perolehan keberhasilan pembangunan tahun 2025 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada tahun 2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter

2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Dalam rangka melaksanakan fungsi BKAD sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pelaksanaan urusan kesekretariatan diperlukan suatu perencanaan kerja yang baik dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas.

Tabel 3.1
Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Penerapan SAP dan Kecukupan Pengungkapan LKPD	100

Tabel 3.2
Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2026
1	Tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	100 %
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Kualitas pengelolaan BMD Meningkat	88,5 %
3	Meningkatnya pendapatan asli daerah yang dikelola	Persentase PAD yang dikelola terhadap pendapatan daerah	7,49 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	82,82 %

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama BKAD 2026

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Penerapan SAP dan Kecukupan Pengungkapan LKPD	100
2	Tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	100
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	Kualitas pengelolaan BMD Meningkat	88,5
4	Meningkatnya pendapatan asli daerah yang dikelola	Persentase PAD yang dikelola terhadap pendapatan asli daerah	7,49

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menjawab dan mengatasi isu-isu strategis dan melaksanakan tugas fungsinya sebagai SKPD maupun SKPKD serta dalam rangka mendukung percepatan peningkatan ekonomi akibat kelesuan ekonomi global, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul merencanakan 4 program 12 kegiatan dan 77 sub kegiatan pada tahun 2026

Pada bab ini diuraikan rumusan Prioritas Sasaran Daerah dan rencana program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026, yang mana bahwa tahun 2026 merupakan tahun transisi antara RPJMD/Renstra PD lama (2021 – 2026) dengan RPJMD/Rentra PD baru. Rumusan Prioritas Sasaran Daerah dan rencana program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Prioritas, Sasaran Daerah , Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kabupaten Gunungkidul

Prioritas		SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD		URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PENANGGUNGJAWAB
					INDIKATOR	TARGET			
1		2	3	4	5	6	7	8	12
1.	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Opini BPK	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang dikelola	Persentase PAD yang dikelola terhadapPendapatan Daerah	7,49 persen	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**3.134.615.000,00**	BKAD
							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.134.615.000,00	
							Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	12.000.000,00	BKAD
							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	184.000.000,00	BKAD
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	324.675.000,00	BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	12
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	332.305.000,00	BKAD
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	35.700.000,00	BKAD
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2.800.000,00	BKAD
						Penagihan Pajak Daerah	2.118.370.000,00	BKAD
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.000.000,00	BKAD
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	121.765.000,00	BKAD
			Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkualitas	Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat	100 persen	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**378.270.192.614,00**	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.154.204.500,00	

1		2	3	4	5	6	7	8	12
							Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	189.200.000,00	BKAD
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	119.600.100,00	BKAD
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	15.000.000,00	BKAD
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	15.000.000,00	BKAD
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	99.600.000,00	BKAD
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	104.599.800,00	BKAD
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	261.504.800,00	BKAD

1		2	3	4	5	6	7	8	12
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	234.200.000,00	BKAD
							Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	104.999.800,00	BKAD
							Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	9.000.000,00	BKAD
							Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1.500.000,00	BKAD
							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	48.604.104.614,00	BKAD
							Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6.000.000,00	
							Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	94.740.000,00	BKAD
							Penatausahaan Pembiayaan Daerah	500.000,00	BKAD

1		2	3	4	5	6	7	8	12
							Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	37.250.000,00	BKAD
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48.418.934.614,00	BKAD
							Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	980.000,00	BKAD

1		2	3	4	5	6	7	8	12
							Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	9.000.000,00	BKAD
							Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1.700.000	BKAD
							Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	35.000.000	BKAD
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	529.270.000,00	BKAD

1		2	3	4	5	6	7	8	12
							Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	87.960.000,00	BKAD
							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	53.305.000,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	310.920.000,00	BKAD

1		2	3	4	5	6	7	8	12
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6.375.000,00	BKAD
							Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	13.997.500,00	BKAD
							Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	56.712.500,00	BKAD
							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	327.982.613.500,00	BKAD
							Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	321.482.613.500,00	BKAD
							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.500.000.000,00	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	Kualitas Pengelolaan BMD Meningkat		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	545.637.500,00	

1		2	3	4	5	6	7	8	12
							Pengelolaan Barang Milik Daerah	545.637.500,00	BKAD
							Penyusunan Standar Harga	160.000.000	BKAD
							Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	35.055.000,00	BKAD
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12.800.000,00	BKAD
							Penatausahaan Barang Milik Daerah	169.740.000,00	BKAD
							Inventarisasi Barang Milik Daerah	17.380.000,00	BKAD
							Pengamanan Barang Milik Daerah	76.000.000,00	BKAD
							Penilaian Barang Milik Daerah	6.197.500,00	BKAD

1		2	3	4	5	6	7	8	12
							Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	35.755.000,00	BKAD
							Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7.000.000,00	BKAD
							Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	17.010.000,00	BKAD
							Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6.000.000,00	BKAD
							Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2.700.000,00	BKAD
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	65.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5	6	7	8	12
						Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	65.000.000	
						Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	65.000.000	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	12.678.704.980,00	BKAD
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.997.900,00	BKAD
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.007.100,00	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.200.200,00	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.199.900,00	BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	12
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.199.900,00	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.190.900,00	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	BKAD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.200.000,00	BKAD
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.900,00	BKAD
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.649.984.040,12	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.578.475.340,12	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.199.000,00	BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	12
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.199.900,00	BKAD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	69.109.800,00	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.600.000,00	BKAD
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.500.000,00	BKAD
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.100.000,00	BKAD
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.737.300,00	BKAD
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.992.800,00	BKAD
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.000.000,00	BKAD
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.499.000,00	BKAD

1	2	3	4	5	6	7	8	12
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.002.500,00	BKAD
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	BKAD
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	BKAD
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.043.000,00	**BKAD**
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.505.500.000,00	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000.000,00	BKAD
						Pengadaan Mebel	3.000.000,00	BKAD

1		2	3	4	5	6	7	8	12
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	BKAD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.804.143,00	BKAD
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00	**BKAD**
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.049.143,00	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.055.000,00	BKAD
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.081.596,88	BKAD

1		2	3	4	5	6	7	8	12
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	396.600.000	BKAD
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.800.000,00	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.000.000	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
								394.694.150.094,00	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada penambahan sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang.

Pada bab ini dipaparkan juga rumusan rencana program dan kegiatan BKAD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**394.694.150.094,00**				**249.119.978.909,82**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**65.000.000,00**				**66.950.000,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**65.000.000,00**				**66.950.000,00**
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase kesesuaian program keistimewaan***		**100 persen**	**65.000.000,00**			**100 persen**	**66.950.000,00**
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	*Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan*		- Dokumen	65.000.000,00		Aparatur	- Dokumen	66.950.000,00
4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY*	-	4 Laporan	65.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Aparatur	4 Laporan	66.950.000,00
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**394.629.150.094,00**				**249.053.028.909,82**
5.02	**KEUANGAN**				**394.629.150.094,00**				**249.053.028.909,82**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***		**100 persen**	**12.678.704.980,00**			**100 persen**	**12.969.075.000,00**
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		- -	25.997.900,00		Aparatur	- -	66.990.000,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3.007.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	3 Dokumen	38.500.000,00
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.200.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Dokumen	1.320.000,00
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.199.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Dokumen	1.320.000,00
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.199.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Dokumen	1.320.000,00
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.190.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Dokumen	1.430.000,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	17 Laporan	16.500.000,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	2.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	5 Laporan	6.600.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	9.999.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Berita Acara	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		- -	9.649.984.040,12		Aparatur	- -	10.065.550.000,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1106 Orang/bulan	9.578.475.340,12	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1106 Orang/bulan	10.010.000.000,00
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.199.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Laporan	3.300.000,00
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.199.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Dokumen	3.300.000,00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	69.109.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	13 Laporan	48.950.000,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*		- -	16.600.000,00		Aparatur	- -	27.115.000,00
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	1.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	14 Dokumen	2.200.000,00
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	15.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	3 Orang	24.915.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Umum*		- -	335.737.300,00		Aparatur	- -	807.800.000,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5.992.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	5 Paket	16.500.000,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Paket	215.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	20 Paket	378.730.000,00
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	6.499.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	4 Paket	0,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Paket	15.002.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	24 Paket	22.000.000,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360 Dokumen	1.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	360 Dokumen	2.400.000,00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	12 Laporan	20.000.000,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	87.043.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	12 Laporan	368.170.000,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*		- -	1.505.500.000,00		Aparatur	- -	424.000.000,00
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1.500.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Unit	400.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Unit	22.000.000,00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	2.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Unit	2.000.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		- -	513.804.143,00		Aparatur	- -	554.070.000,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	12 Laporan	770.000,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108 Laporan	304.049.143,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	108 Laporan	333.300.000,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	209.055.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	4 Laporan	220.000.000,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		- -	631.081.596,88		Aparatur	-- -	1.023.550.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222 Unit	433.855.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	222 Unit	425.150.000,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	10.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	9 Unit	22.000.000,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	176.526.596,88	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	3 Unit	557.700.000,00
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	9.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	12 Unit	18.700.000,00
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Penetapan APBD Tepat Waktu***		**100 persen**	**378.270.192.614,00**			**100 persen**	**229.603.264.309,82**
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Dokumen Rencana Anggaran Daerah*		- -	1.154.204.500,00		Aparatur	- -	1.422.026.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	189.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	4 Dokumen	270.710.000,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	119.600.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	4 Dokumen	140.910.000,00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Dokumen	15.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	47 Dokumen	28.710.000,00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Dokumen	15.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	47 Dokumen	27.500.000,00
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Dokumen	99.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	47 Dokumen	127.402.000,00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Dokumen	104.599.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	47 Dokumen	121.748.000,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	261.504.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	4 Dokumen	440.246.400,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	234.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	4 Dokumen	114.100.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	104.999.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	4 Dokumen	144.100.000,00
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	9.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Dokumen	3.300.000,00
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Dokumen	3.300.000,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daeah*		- -	48.604.104.614,00		Aparatur	- -	179.911.584.840,00
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	24 Dokumen	27.500.000,00
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	94.740.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	17 Dokumen	125.898.200.000,00
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Dokumen	11.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 Dokumen	37.250.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	82 Dokumen	39.506.500,00
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	48.418.934.614,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	12 Laporan	50.044.169.040,00
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	980.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	13 Dokumen	3.850.000.000,00
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Dokumen	9.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	32 Dokumen	26.459.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	1.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	8 Dokumen	11.715.000,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49 Orang	35.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	49 Orang	3.034.900,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*		- -	529.270.000,00		Aparatur	- -	723.471.100,00
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	87.960.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	24 Dokumen	139.260.000,00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	53.305.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	4 Laporan	61.017.000,00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	310.920.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Dokumen	332.310.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.375.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Dokumen	11.688.600,00
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	13.997.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Dokumen	48.955.500,00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162 Orang	56.712.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	162 Orang	130.240.000,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*		- -	327.982.613.500,00		Aparatur	- -	47.546.181.969,82
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	321.482.613.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Laporan	30.000.000.000,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	6.500.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Laporan	17.546.181.969,82
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkam ke neraca Persentase nilai BMD yang tersaji di neraca***		**100 persen**	**545.637.500,00**			**100 persen**	**1.170.115.100,00**
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah*		- -	545.637.500,00		Aparatur	- -	1.170.115.100,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	160.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	3 Dokumen	69.443.000,00
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	35.055.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Dokumen	40.414.000,00
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	12.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	4 Dokumen	57.938.100,00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	169.740.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Laporan	194.150.000,00
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	17.380.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Laporan	16.500.000,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	76.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	3 Laporan	385.000.000,00
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	6.197.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Laporan	88.000.000,00
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	35.755.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Laporan	82.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	7.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	10 Dokumen	39.270.000,00
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	17.010.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	4 Laporan	99.000.000,00
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Laporan	55.000.000,00
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140 Orang	2.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	140 Orang	42.900.000,00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***Persentase ketetapan pajak dan kepatuhan wajib pajak meningkat***		**100 Persen**	**3.134.615.000,00**			**100 Persen**	**5.310.574.500,00**
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah*		- -	3.134.615.000,00		Aparatur	- -	5.310.574.500,00
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	12.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Dokumen	24.200.000,00
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	184.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	1 Laporan	330.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144 Unit	324.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	144 Unit	391.374.500,00
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	332.305.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	12 Laporan	737.000.000,00
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14000 Layanan	35.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	14000 Layanan	110.000.000,00
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	2 Dokumen	77.000.000,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.118.370.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	12 Dokumen	3.448.500.000,00
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	12 Dokumen	77.000.000,00
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	121.765.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Aparatur	12 Laporan	115.500.000,00
J U M L A H					**394.694.150.094,00**				**249.119.978.909,82**

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. Oleh sebab itu Rencana Kerja Badan Keuangan, dan Aset Daerah disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2024 s/d tahun 2025 serta sumber dana kegiatan.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan PD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Badan Keuangan, dan Aset Daerah Tahun 2026 disusun menurut tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang merupakan penjabaran visi misi kepala daerah. Rencana Kerja Badan Keuangan, dan Aset Daerah disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

4.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan, dan Aset Daerah telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

4.3 Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana

pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana dan pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

ttd

PUTRO SAPTO WAHYONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, penyebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diubah menjadi Perangkat Daerah (PD), sehingga Rencana Kerja SKPD selanjutnya akan disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Renja PD merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD yang disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Renja PD merupakan perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD. Renja PD merupakan instrumen penting bagi PD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja PD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap penahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing PD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Selanjutnya, dokumen rancangan Renja PD yang telah didiskusikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan

masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum PD. Forum PD membahas rancangan Renja PD melalui penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kapanewon, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran, dan penyesuaian pendanaan program, dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja PD, yang difasilitasi oleh PD terkait.

Rancangan Renja PD hasil Forum PD menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yang selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD. Penetapan rancangan akhir RKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya RKPD ini menjadi acuan penyempurnaan Renja PD. Renja PD akan menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan, dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran APBD.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memuat visi dan misi Bupati terpilih, dan menjadi dasar penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2026, oleh karena itu dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026 harus berpedoman pada visi dan misi RPJMD Tahun 2025 – 2029 sesuai tema dan prioritas perencanaan tahun 2026. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2026 juga disusun berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2025 - 2029 dan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mempunyai fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Dengan berpedoman pada visi dan misi kepala daerah baru, Rencana Kerja Bapperida tahun 2026 mendukung misi 4, yaitu Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Bapperida Tahun 2026 mendukung sasaran daerah Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor I23 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Bapperida Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran prioritas pembangunan daerah yang harus dilaksanakan Bapperida pada tahun 2026. Rencana Kerja Bapperida Tahun 2026 juga merupakan kompilasi program kegiatan prioritas hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025 yang terangkum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Bapperida Tahun 2026 adalah untuk memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai pedoman dalam menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Tahun 2026 dan proses awal penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Bapperida Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPERIDA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida dan Capaian Renstra Bapperida

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026. Menurut Renstra Bapperida Tahun 2021-2026, pada tahun 2024 terdapat 6 program, 17 kegiatan dan 54 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp6.163.240.087,00. Namun berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Tahun Anggaran 2024, BAPPERIDA mendapatkan alokasi belanja daerah sebesar Rp10.268.402.705,00 untuk melaksanakan 5 program dengan 14 kegiatan dan 49 sub kegiatan. Ketidaksesuaian antara jumlah anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan Renstra BAPPERIDA Tahun 2024 dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 didasarkan pada arah kebijakan dari kepala daerah dan kemampuan pendanaan yang ada.

Faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2024 antara lain :

1. Sarana prasarana dan fasilitas perkantoran yang belum cukup memadai untuk mendukung metode kerja yang baru;
2. Adanya semangat, motivasi kerja dan budaya kerja yang tinggi di internal Bapperida;
3. Komitmen PD mitra dan para pemangku kepentingan yang cukup baik untuk mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
4. Komitmen kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi serta lembaga lainnya yang semakin baik.

Berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2024 di atas, upaya yang perlu dilakukan agar capaian target kinerja tahun 2024 tetap optimal diantaranya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga dapat menunjang capaian kinerja. Selain itu, pengendalian internal juga perlu dilaksanakan secara berkala dalam rangka menjamin capaian kinerja yang optimal.

Perubahan anggaran yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor DPPA/A.7/5.01.5.05.0.00.01.0000/ 001/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024, Bapperida mendapatkan alokasi belanja operasi sebesar Rp10.312.939.395,00 dan belanja modal sebesar Rp303.501.000,00 untuk melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 50 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut, belanja operasi dan belanja modal dapat direalisasikan masing-masing sebesar Rp9.887.255.206,00 (95,58%) dan Rp297.273.250,00 (97,95%).

Berdasarkan capaian kinerja keuangan masing-masing kegiatan sampai tahun anggaran 2024, rata-rata capaian sebesar 94,77%. Kegiatan pertama dengan capaian kinerja keuangan paling rendah adalah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah yakni sebesar 85,89%. Hal ini disebabkan karena tagihan listrik yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan jumlah anggaran. Kegiatan berikutnya yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah yakni sebesar 88,01%. Hal ini disebabkan karena anggaran dari subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi terealisasi lebih rendah disebabkan adanya pembatasan koordinasi luar daerah dan sisa realisasi tiket perjalanan yang lebih rendah daripada SHBJ yang ada. Kegiatan ketiga adalah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian keuangan sebesar 89,35%. Hal ini disebabkan karena realisasi tagihan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN lebih rendah dari yang dianggarkan.

Adapun capaian kinerja program dan kegiatan Bapperida Tahun 2024 dan perkiraan realisasi capaian tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Bapperida

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 (5+7+9)		11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik	100	persen	100	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	100	persen	100
1.03.13.2.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen kajian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang tersusun	7	dokumen	7	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	7	dokumen	100
		Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang terlaksana	100	persen	100	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	100	persen	100.00
1.03.13.2.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Kawasan Gesing	n/a	n/a	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Infrastruktur Listrik Kawasan Gesing	n/a	n/a	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1.03.13.2.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Masterplan pengembangan kawasan wisata minat khusus di Kapanewon Rongkop	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Masterplan pengembangan kawasan wisata minat khusus di Kapanewon Tanjungsari	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Penyusunan Masterplan dan Kajian Ekonomi Pengembangan Kawasan Wisata Minat Khusus Karst di Kapanewon Rongkop	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Penyusunan Masterplan dan Kajian Ekonomi Pengembangan Kawasan Wisata Minat Khusus Karst di Kapanewon Tanjungsari	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	4	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	n/a	1	dokumen	25.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9			10 (5+7+9)		11=(10/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian program keistimewaan	100	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.01.04.2.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	2	jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	100	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.01.04.2.05.01	Penyusunan Rencana Program Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun	4	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.01.04.2.05.03	Penyusunan Rencana Program Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	4	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	2	jenis	2	jenis	2	jenis	2	jenis	100	2	jenis		2	jenis	100.00
		Persentase kesesuaian program keistimewaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100	persen	98.33	persen	100	persen	97.57	persen	98	100	persen		98.63	persen	98.63
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Rencana Program Keistimewaan Tahun n	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		1	dokumen	100.00
		Jumlah Rencana Program Keistimewaan Tahun n+1	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		1	dokumen	100.00
		Jumlah Rencana Program Keistimewaan Tahun n+2	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		1	dokumen	100.00
		Jumlah Program Keistimewaan yang Disusun	12	dokumen	7	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	100	6	dokumen		18	dokumen	150.00
4.01.04.2.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dana keistimewaan akhir tahun	1	laporan	1	laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		1	laporan	100.00
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dana keistimewaan per tahapan	2	laporan	2	laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		2	laporan	100.00
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dana keistimewaan per triwulan	4	laporan	4	laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		4	laporan	100.00
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	28	laporan	8	laporan	8	laporan	8	laporan	100	7	laporan		23	laporan	82.14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 (5+7+9)		11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															#DIV/0!
5.01	PERENCANAAN															#DIV/0!
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100	persen	97.39	persen	100	persen	97.74	persen	97.74	100	persen	98.38	persen	98.38
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	15	jenis	15	jenis	15	jenis	15	jenis	100	15	jenis	15	jenis	100.00
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100	persen	100	persen	100	persen	96.67	persen	97	100	persen	98.89	persen	98.89
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Forum PD	1	kali	1	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	kali	100.00
		Jumlah Dokumen Perubahan Renja	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Renja	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Profil PD	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	4	dokumen	10	dokumen	47.62
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	50.00
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	3	dokumen	75.00
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen ROPK	1	dokumen	0	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	dokumen	-
		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	dokumen	6	dokumen	75.00
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Perubahan Perjanjian Kinerja	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	dokumen	6	dokumen	75.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 (5+7+9)		11=(10/4)
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	85	laporan	17	laporan	17	laporan	17	laporan	100	17	dokumen	51	dokumen	60.00
5.01.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan e Monev)	4	laporan	4	laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	laporan	100.00
		Jumlah Laporan TEPRA	12	laporan	12	laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	laporan	100.00
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	laporan	4	laporan	4	laporan	3	laporan	75	4	laporan	11	laporan	68.75
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan tersusun	14	dokumen	14	dokumen	14	dokumen	14	dokumen	100	14	dokumen	14	dokumen	100.00
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	persen	100.00	persen	100.00
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	14	bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14	bulan	100.00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840	orang/bulan	669	orang/bulan	700	orang/bulan	621	orang/bulan	89	644	orang/bulan	644	orang/bulan	76.67
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	laporan	1	laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	laporan	100.00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	3	laporan	75.00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	12	dokumen	12	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52	dokumen	13	laporan	13	laporan	13	laporan	100	13	laporan	39	dokumen	75.00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	60	ASN	44	ASN	48	ASN	44	ASN	92	48	ASN	48	ASN	80.00
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	persen	91.67	persen	100	persen	100	persen	100	100	persen	97.22	persen	97.22
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang Tertangani	53	ASN	48	ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48	ASN	90.57
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100	4	dokumen	12	dokumen	75.00
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat	4	orang	0	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0	orang	-
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16	orang	3	orang	1	orang	1	orang	100	5	orang	9	orang	56.25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 (5+7+9)		11=(10/4)
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	7	layanan	7	layanan	7	layanan	7	layanan	100	7	layanan	7	layanan	100.00
		Persentase Administrasi Umum terlayani	100	persen	97.5	persen	100	persen	100	persen	100.00	100	persen	99.17	persen	99.17
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik tersedia	18	jenis	18	jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18	jenis	100.00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	11	paket	12	paket	12	paket	100	12	paket	12	paket	100.00
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	50	unit	50	jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	jenis	100.00
		Jumlah Pengadaan Komputer/ PC	6	unit	6	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	jenis	100.00
		Jumlah Pengadaan Printer	6	unit	6	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	jenis	100.00
		Jumlah Pengadaan Notebook/ Laptop	6	unit	7	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	jenis	116.67
		Jumlah Pengadaan UPS/ Stabilizer	6	unit	6	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	jenis	100.00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12	paket	12	paket	12	paket	12	paket	100	12	paket	12	paket	100.00
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	11	jenis	11	jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11	jenis	100.00
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	12	paket	1	paket	1	paket	100	12	paket	12	paket	100.00
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	4	jenis	4	jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	jenis	100.00
		Jumlah Fotocopy	28000	lembar	15000	lembar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15000	lembar	53.57
		Jumlah Penjilidan	90	buah	80	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80	buah	88.89
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	5	Paket	4	Paket	4	Paket	100	5	paket	5	paket	100.00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tagihan Surat Kabar dibayar (2 rekening X 12 bulan)	24	bulan	24	bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24	bulan	100.00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	2808	Dokumen	239	dokumen	247	dokumen	237	dokumen	95.95	247	dokumen	723	dokumen	25.75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 (5+7+9)		11=(10/4)
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia Untuk Tamu	100	orang	90	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	90	orang	90.00
		Jumlah Snack dan Minuman Tersedia Untuk Tamu	250	orang	250	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	250	orang	100.00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	80	laporan	10	laporan	10	laporan	10	laporan	100.00	4	laporan	24	laporan	30.00
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Konsultasi dan Koordinasi dalam DIY	120	OH	25	OH	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25	OH	20.83
		Frekuensi Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	282	OH	36	OH	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	36	OH	12.77
		Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia Untuk Rapat	150	orang	150	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	150	orang	100.00
		Jumlah Snack dan Minuman Tersedia Untuk Rapat	250	orang	250	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	250	orang	100.00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	laporan	55	laporan	27	laporan	27	laporan	n/a	23	laporan	105	laporan	145.83
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia	4	layanan	1	layanan	1	layanan	1	layanan	100	0	layanan	1	layanan	25.00
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	87.50	persen	88	0	persen	62.50	persen	62.50
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Kursi Rapat	8	unit	6	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	unit	75.00
		Jumlah Pengadaan Meja Rapat	16	unit	5	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	unit	31.25
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan LCD Proyektor	3	unit	2	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	unit	66.67
		Jumlah Pengadaan Sound System Ruang Rapat	1	unit	1	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	unit	100.00
		Jumlah Pengadaan Wireless Sound Ruang Rapat	1	unit	1	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	unit	100.00
		Jumlah Pengadaan Lemari Arsip	2	unit	1	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	unit	50.00
		Jumlah Pengadaan TV Monitor Ruang Rapat	1	unit	1	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	unit	100.00
		Jumlah Pengadaan TV Monitor Pimpinan Rapat	1	unit	1	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	unit	100.00
		Jumlah Pengadaan GPS	1	unit	1	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	unit	100.00
		Jumlah Pengadaan Meteran	2	unit	2	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	unit	100.00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	unit	4	unit	8	unit	7	unit	88	n/a	n/a	4	unit	23.53

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024						Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10 (5+7+9)		11=(10/4)
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan AC	2	unit	2	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	unit	100.00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3	layanan	3	layanan	3	layanan	3	layanan	100	3	layanan	3	layanan	100.00	
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	persen	100.00	persen	100.00	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Dokumen yang dikirim	60	buah	50	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	buah	83.33	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16	laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100	4	laporan	12	laporan	75.00	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air dibayar (1 rekening X 12 bulan)	12	bulan	12	bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	bulan	100.00	
		Jumlah Tagihan Listrik dibayar (3 rekening X 12 bulan)	36	bulan	36	bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	36	bulan	100.00	
		Jumlah Tagihan Telefon dibayar (2 rekening X 12 bulan)	24	bulan	24	bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24	bulan	100.00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288	laporan	72	laporan	72	laporan	72	laporan	100	72	laporan	216	laporan	75.00	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor Dibayar	3	termin	3	termin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	termin	100.00	
		Jumlah tagihan sampah dibayar	12	bulan	10	bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	bulan	83.33	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	28	laporan	16	laporan	8	laporan	8	laporan	100	16	laporan	40	laporan	142.86	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	5	layanan	5	layanan	5	layanan	5	layanan	100	5	layanan	5	layanan	100.00	
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	persen	100.00	persen	100.00	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas yang Dipelihara	7	unit	7	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	unit	100.00	
		Jumlah Mobil Dinas yang Terbayar Pajaknya	7	unit	7	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	unit	100.00	
		Jumlah Motor Dinas yang Dipelihara	18	unit	14	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14	unit	77.78	
		Jumlah Motor Dinas yang Terbayar Pajaknya	18	unit	18	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18	unit	100.00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	325	unit	308	unit	364	unit	364	unit	100	316	unit	316	unit	97.23	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 (5+7+9)		11=(10/4)
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair Terpelihara	20	unit	20	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	unit	100.00
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	unit	50	unit	20	unit	20	unit	100	13	unit	20	unit	100.00
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer/Notebook Terfasilitasi Pemeliharaannya	12	unit	15	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15	unit	125.00
		Jumlah Mesin Ketik Terfasilitasi Pemeliharaannya	5	unit	5	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	unit	100.00
		Jumlah Printer Terfasilitasi Pemeliharaannya	7	unit	7	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	unit	100.00
		Jumlah Genset Terfasilitasi Pemeliharaannya	1	unit	1	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	unit	100.00
		Jumlah Tabung APAR Terfasilitasi Pemeliharaannya	2	unit	2	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	unit	100.00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	unit	25	unit	36	unit	36	unit	100	43	unit	36	unit	116.13
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	3	unit	3	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	unit	100.00
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100	2	unit	1	unit	100.00
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang Terpelihara	15	unit	15	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15	unit	100.00
		Jumlah tambah daya listrik	1	rekening	1	rekening	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	unit	100.00
		Jumlah Rehab Ruang Rapat/ Bidang	2	unit	1	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	unit	50.00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	19	unit	26	unit	26	unit	100	23	unit	23	unit	153.33
5.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah jenis dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	3	jenis	3	jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	jenis	100.00
		Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Bappeda	82.5	skor	82.78	skor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	82.78	skor	100.34
5.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Evaluasi SOP	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen RTP/SPIP	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	2	dokumen	2	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	dokumen	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 (5+7+9)		11=(10/4)
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	100	persen	100.78	persen	100	persen	98.43	persen	98.43	100	persen	99.74	persen	99.74
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	4	jenis	4	jenis	4	jenis	4	jenis	100.00	4	jenis	4	jenis	100.00
		Persentase kesesuaian program dalam : 1. RKPD terhadap RPJMD 2. APBD terhadap RKPD	100	persen	99.61	persen	100	persen	95.61	persen	95.61	100	persen	98.41	persen	98.41
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah kesepakatan koordinasi pendataan potensi dan permasalahan daerah	3	kesepakatan	3	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	kesepakatan	100.00
		Jumlah pendamping SID yang terlatih	19	orang	19	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19	orang	100.00
		Jumlah pengembangan aplikasi SIDA SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH	2	aplikasi	2	aplikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	aplikasi	100.00
		Jumlah SDM Kecamatan dan OPD yang paham mengenai SIKAB GUMREGAH	54	orang	54	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	54	orang	100.00
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Usulan DAK	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Usulan PIWK	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100.00	2	dokumen	6	dokumen	75.00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan dalam Musrenbang RKPD	1	kesepakatan	1	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	kesepakatan	100.00
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4	Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	100.00	1	Berita Acara	3	Berita Acara	75.00
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kompilasi Dokumen DURP Tahun 2023 Hasil Musrenbang Kecamatan	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	72	Usulan	18	Usulan	18	Usulan	18	Usulan	n/a	18	Usulan	54	Usulan	75.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun n+1	1 dokumen	1 dokumen	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	1 dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	1 dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Tahun n+1	1 dokumen	1 dokumen	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	1 dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen RKPD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	1 dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen RKPD Tahun n+1	1 dokumen	1 dokumen	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	1 dokumen	100.00
		Jumlah kesepakatan koordinasi perencanaan daerah	4 kesepakatan	4 kesepakatan	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	4 modul aplikasi	100.00
		Jumlah Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 kesepakatan	2 kesepakatan	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	2 kesepakatan	100.00
		Jumlah Kastemisasi Sistem Informasi Perencanaan	2 modul aplikasi	1 modul aplikasi	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	1 modul aplikasi	50.00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	13 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	n/a	11 dokumen	27 dokumen	207.69
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100.00	2 jenis	2 jenis	100.00
		Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100.00	100 persen	100.00 persen	100.00
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku informasi pembangunan daerah Kab. Gunungkidul	1 dokumen	1 dokumen	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	1 dokumen	100.00
		Jumlah Buku informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Gunungkidul	1 dokumen	1 dokumen	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	1 dokumen	100.00
		Jumlah kesepakatan koordinasi Forum Data SDI Kab. Gunungkidul	2 kesepakatan	2 kesepakatan	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	2 kesepakatan	100.00
		Jumlah kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan	2 kesepakatan	2 kesepakatan	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	2 kesepakatan	100.00
		Jumlah pembuatan video profil	1 video	1 video	n/a n/a	n/a n/a	n/a	n/a n/a	1 video	100.00
		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 masukan	4 masukan	4 dokumen	4 dokumen	100.00	3 masukan	11 masuikan	220.00
5.01.02.2.02.03	Penyusunan ProfilPembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku ProfilPembangunan Daerah yang Diterbitkan	8 buku	2 buku	2 buku	2 buku	100.00	2 buku	6 buku	75.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 (5+7+9)		11=(10/4)
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun	2	jenis	2	jenis	2	jenis	2	jenis	100.00	2	jenis	2	jenis	100.00
		Persentase capaian program pendukung sasaran pembangunan daerah	100	persen	102.74	persen	100	persen	96.73	persen	96.73	98	persen	99.16	persen	99.16
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pelaporan Bantuan Keuangan Pemerintah DIY	4	laporan	4	laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	laporan	100.00
		Jumlah dokumen pelaporan capaian SDGs	2	laporan	2	laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	laporan	100.00
		Jumlah Dokumen pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)	4	laporan	4	laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	laporan	100.00
		Jumlah Dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional HAM	3	laporan	3	laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	laporan	100.00
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	52	laporan	13	laporan	13	Laporan	13	laporan	100.00	13	laporan	39	laporan	75.00
5.01.02.2.03.01	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi hasil/ capaian target RPJMD	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen evaluasi hasil RKPD dan RKPD Perubahan	4	dokumen	4	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	dokumen	100.00
		Jumlah kastemisasi aplikasi SIPANDA	1	modul aplikasi	1	modul aplikasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	modul aplikasi	100.00
		Jumlah kesepakatan dalam rangka pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan hasil capaian target RPJMD	4	kesepakatan	4	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	kesepakatan	100.00
		Jumlah pewakilan OPD yang memperoleh Bimtek SIPANDA	47	OPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	36	laporan	9	laporan	9	laporan	9	laporan	100.00	9	laporan	27	laporan	75.00
5.01.02	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program sektoral	100	persen	99.61	persen	100	persen	97.21	persen	97.21	100	persen	98.94	persen	98.94
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	3	jenis	3	jenis	3	jenis	3	jenis	100.00	3	jenis	3	jenis	100.00
		Persentase Kesesuaian Program Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100	persen	99.32	persen	100	persen	96.68	persen	96.68	100	persen	98.67	persen	98.67
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Raperbup Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Kesepakatan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	kesepakatan	6	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	kesepakatan	100.00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	12	dokumen	4	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100.00	4	dokumen	11	dokumen	91.67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 (5+7+9)		11=(10/4)
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	kesepakatan	100.00
		Jumlah Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan	4	kesepakatan	4	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	kesepakatan	100.00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100.00	4	dokumen	12	dokumen	60.00
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sikronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	20	laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100.00	4	laporan	12	laporan	60.00
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian yang tersusun	3	jenis	3	jenis	3	jenis	3	jenis	100.00	3	jenis	3	jenis	100.00
		Persentase Kesesuaian Program Bidang Perekonomian dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100	persen	99.52	persen	100	persen	99.52	persen	99.52	100	persen	99.68	persen	99.68
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Mijahan	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan industri, perdagangan, dan koperasi	3	kesepakatan	3	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	kesepakatan	100.00
		Jumlah Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Pariwisata dan Penanaman Modal	4	kesepakatan	4	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	kesepakatan	100.00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28	dokumen	6	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	100.00	5	dokumen	16	dokumen	57.14
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	24	laporan	5	laporan	5	laporan	5	laporan	100.00	5	laporan	15	laporan	62.50
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kelautan	3	kesepakatan	3	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	kesepakatan	100.00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100.00	6	dokumen	18	dokumen	64.29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 (5+7+9)		11=(10/4)
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun	3	jenis	3	jenis	3	jenis	3	jenis	100.00	3	jenis	3	jenis	100.00
		Persentase Kesesuaian Program Bidang Fisik dan Prasarana dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100	persen	100	persen	100	persen	93.43	persen	93.43	100	persen	97.81	persen	97.81
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Review Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah Dokumen Review RISPAM	1	dokumen	1	dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	dokumen	100.00
		Jumlah kesepakatan perencanaan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman	2	kesepakatan	1	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	kesepakatan	50.00
		Jumlah kesepakatan perencanaan panitia kemitraan	6	kesepakatan	6	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	kesepakatan	100.00
		Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan pekerjaan umum	8	kesepakatan	8	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	8	kesepakatan	100.00
		Jumlah kesepakatan perencanaan pembangunan perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman	4	kesepakatan	4	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	kesepakatan	100.00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daeerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	26	dokumen	6	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100.00	4	dokumen	14	dokumen	53.85
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sikronisasi Renstra/Renja dengan RRKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	24	laporan	4	laporan	2	laporan	2	laporan	100.00	2	laporan	8	laporan	33.33
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Pertanahan dan Tata Ruang	6	kesepakatan	6	kesepakatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	kesepakatan	100.00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	12	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00	3	dokumen	6	dokumen	50.00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	88.89	persen	50	persen	75	persen	75	persen	100.00	85.71	persen	85.71	persen	96.42
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah kelitbangan yang terlaksana	14	buah	3	buah	3	buah	3	buah	100.00	3	buah	3	buah	21.43
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	persen	27.78	persen	47.22	persen	47.22	persen	100.00	72.22	persen	72.22	persen	72.22

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output dan Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Peragkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10 (5+7+9)		11=(10/4)
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Penelitian	2	penelitian	2	penelitian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	penelitian	100.00
		Jumlah Forum Jaringan Penelitian	4	kali	1	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	kali	25.00
		Jumlah OPD Yang Mendapat Pendampingan Inovasi Daerah (Klik Si Indah)	47	OPD	47	OPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	47	OPD	100.00
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Teknologi dan Inovasi	8	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100.00	4	dokumen	7	dokumen	87.50
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Pelaksanaan Forum Pengembangan Inovasi Daerah	4	kali	1	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	kali	25.00
		Jumlah Pemberian Penghargaan lomba Karya Ilmiah, Penelitian dan Inovasi Daerah	2	kategori	2	kategori	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	kategori	100.00
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	8	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	2	laporan	5	laporan	62.50
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Desiminasi/seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan	2	kali	1	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	kali	50.00
		Jumlah Lokakarya Pengembangan inovasi daerah dilaksanakan	2	kali	1	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	kali	50.00
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	10	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100.00	2	laporan	4	laporan	40.00

Faktor – faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2026 di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah antara lain yaitu:

1. Perencanaan
   Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dapat dirumuskan beberapa permasalahannya yaitu:
   a. Perubahan regulasi yang cepat berdampak pada perubahan dokumen perencanaan;
   b. Penentuan rumus penghitungan capaian fisik/ kinerja belum mencerminkan sebuah *outcome* baik pada kegiatan maupun program;
   c. Berkurangnya pendanaan non APBD untuk anggaran kegiatan OPD terkait; dan
   d. Profesionalisme dan kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan.
2. Penelitian dan Pengembangan Daerah
   Indeks inovasi daerah dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:
   a. Belum optimalnya dukungan perangkat daerah dan peran masyarakat;
   b. Belum adanya budaya berinovasi dalam diri ASN;
   c. Belum lengkapnya regulasi pendukung pengembangan riset dan inovasi daerah; dan
   d. Adanya perubahan parameter kategori penilaian dari Kementerian Dalam Negeri sehingga indeks inovasi daerah belum optimal.

Dengan adanya beberapa permasalahan di atas maka perlu kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, namun secara umum tidak terlalu berdampak terhadap pencapaian sasaran daerah maupun sasaran PD. Beberapa kebijakan/ tindakan antara lain;

1. Penerapan nomeklatur baru serta aplikasi terintegrasi untuk perencanaan dan penganggaran;
2. Koordinasi secara intensif dengan Pemda DIY dan Kementrian agar tetap ada alokasi Dana Keistimewaan dan DAK Fisik/ Non Fisik untuk OPD terkait (Perlu pencermatan kembali terhadap rumus penghitungan capaian kinerja yang sudah ditetapkan);
3. Perlu adanya diklat dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Perangkat Daerah; dan
4. Perlu adanya Perbup yang mengatur bahwa ASN/ OPD wajib berinovasi minimal satu OPD, Kapanewon satu inovasi setiap tahunnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bapperida sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dan dibantu oleh Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas kesekretariatan. Bapperida mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan Tugas Pembantuan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan serta mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan Urusan Keistimewaan.

Dalam pelaksanaan ketugasan, Bapperida Kabupaten Gunungkidul mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bapperida sebagaimana sudah ditetapkan

dalam Renstra tahun 2021-2026. Dalam melaksanakan ketugasannya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi capaian kinerja Bapperida seperti yang sudah disampaikan diatas, namun selalu di-usahakan hasil yang optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU,SPM,IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah										
	Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100	100	100	99,68	97,74	100	100	Rerata capaian persentase kesesuaian program dan evaluasi pembangunan daerah dari masing-masing program perencanaan
2	Meningkatnya implementasi inovasi daerah										
	Indeks Inovasi Daerah	indeks	3977	4177	4457	4807	54,67	46,60	4457	4807	Menunjukan jumlah total nilai inovasi daerah yang terverifikasi (Penilaian Kemendagri)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda										
	Nilai AKIP Bappeda	skor	A 86,54	A 86,97	A 87,18	A 87,40	A 86,68	A 86,80	A 87,18	A 87,40	Hasil dari Reviu Irda terkait evaluasi LKjIP Perangkat Daerah
	Data Tahun 2024										
	Data Renstra 2021-2026										

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara umum telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dalam pola *working plan* Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan yang memadukan proses teknokratik, politik, partisipatif, serta proses *bottom-up* maupun *top down*. Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan dapat lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum optimal (hanya sebagai pelengkap) dalam proses perencanaan. Bapperida memiliki peran sangat penting dan utama dalam menjaga konsistensi dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Peran ini membutuhkan dukungan yang utuh dari segenap pemangku kepentingan.

Untuk dapat mewujudkan perencanaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kapasitas lembaga perencana dan kemampuan teknis personel perencanaan perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penyusunan usulan pembangunan dalam bentuk kegiatan yang benar-benar dibutuhkan (berkualitas, efektif dan efisien), bukan berdasarkan pada kegiatan yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor .... Tahun ..... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Bapperida mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian penugasan urusan Keistimewaan. Bapperida terbagi menjadi 5 Bidang dan 1 Sekretariat dengan 2 Sub Bagian. Adapun Struktur Organisasi Bapperida disajikan pada Gambar 2.1.

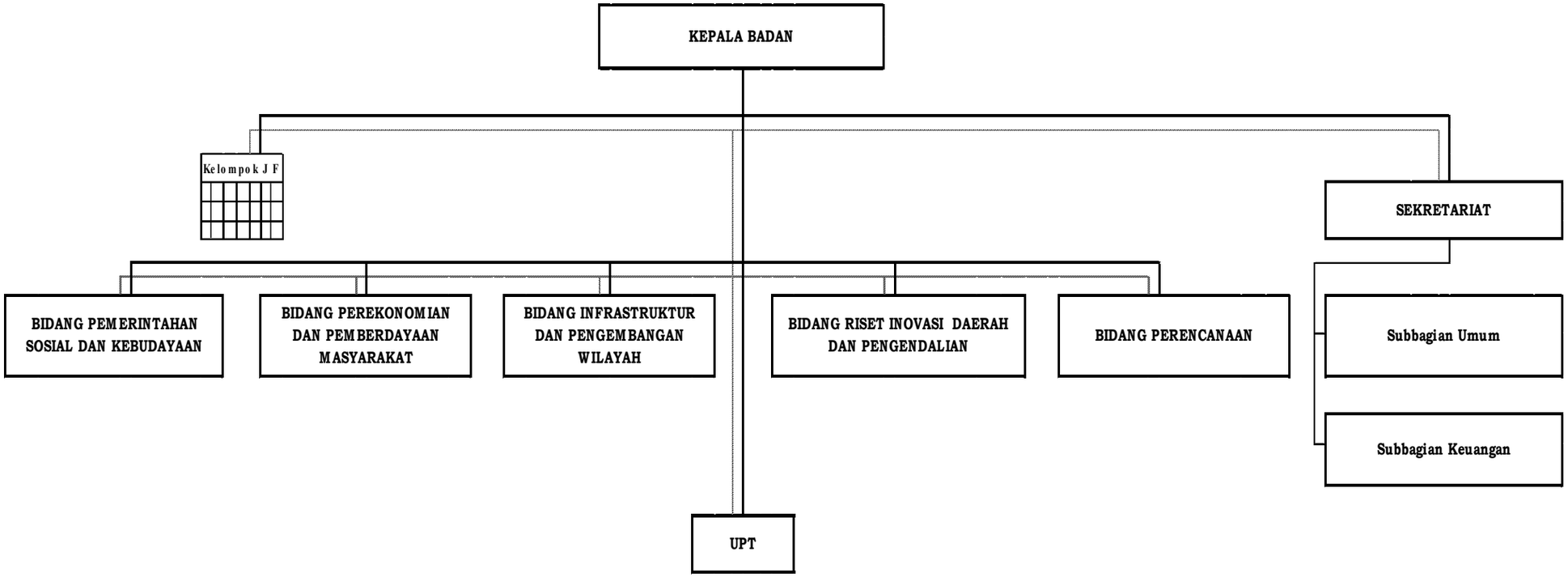

Gambar 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023

Secara internal, Bapperida menghadapi kendala karena adanya permasalahan antara lain:

1. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) perencana ;
2. Terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang baik bagi proses dan lembaga perencanaan pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara reliabel dan akurat;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan jika dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada; dan

Permasalahan yang dihadapi Bapperida secara umum belum berdampak terhadap pencapaian Sasaran Daerah dan Sasaran PD, karena Bapperida ditopang oleh ASN yang memiliki motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik. Selain itu, dukungan aplikasi yang terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan daerah, cukup membantu Bapperida dan seluruh PD dalam menyusun dokumen perencanaan. Dalam mengemban tugasnya, Bapperida mempunyai peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang terkait faktor eksternal. Peluang yang ada antara lain:

1. Adanya regulasi yang memberikan kejelasan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan dari tahap perencanaan sampai penganggaran;
2. Adanya regulasi yang mengatur penguatan penelitian dan pengembangan;
3. Penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional:
4. Kebijakan dari pemerintah pusat mengenai prioritas pembangunan dengan prinsip berkualitas, efektif dan efisien memberikan pedoman kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana menentukan program prioritas beserta pagu anggarannya;:
5. Dengan penentuan program prioritas yang lebih fokus dan sinkron dengan prioritas nasional dan provinsi, akan memberikan kesempatan untuk meraih anggaran dari APBD DIY dan APBN; dan
6. Adanya anggaran dana keistimewaan.

Adapun tantangan yang dihadapi Bapperida dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
2. Perumusan kebijakan berbasis riset;
3. Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran di internal Pemerintah Daerah maupun dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat;
4. Penerapan nomenklatur baru serta aplikasi terintegrasi untuk perencanaan dan penganggaran daerah;
5. Pemenuhan persyaratan teknis untuk pengajuan usulan program dan kegiatan ke Pemerintah DIY dan Pemerintah pusat; dan
6. Kualitas aparat perencana belum merata di setiap Perangkat Daerah.

Dengan melihat permasalahan yang ada, serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka isu-isu penting yang harus dilaksanakan Bapperida adalah:

1. Mewujudkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Meningkatkan penelitian dan inovasi daerah sebagai dasar kebijakan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia perencana yang handal untuk memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah;
4. Menyusun dokumen perencanaan untuk mendukung pengembangan wilayah dan memenuhi persyaratan penganggaran dari Pusat dan DIY; dan
5. Meningkatkan penggunaan dana keistimewaan untuk kegiatan pembangunan daerah.

2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Bapperida merencanakan untuk melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 17 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp9.580.167.511,00 (Sembilan milyar lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah).

Pagu anggaran dapat berubah, tahapan cukup penting yang mempengaruhi perubahan yang terjadi adalah adanya kebijakan untuk menyelaraskan dokumen perencanaan yang disusun, agar memiliki alur pikir yang lebih logis antara prioritas pembangunan daerah, sasaran, indikator sasaran daerah, yang kemudian dialirkan ke dalam sasaran dan indikator sasaran PD, dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan PD. Penambahan, pengurangan, ataupun penyesuaian anggaran dan target kinerja sub kegiatan merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka penyelarasan prioritas pembangunan daerah, mengakomodir kebijakan umum Bupati, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hasil analisis kebutuhan Bappeda yang telah disesuaikan kemudian menjadi bagian dari RKPD dengan beberapa perubahan output dan pagu, sebagaimana disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul
Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik	100 Persen	5,000,000						
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Jumlah dokumen kajian Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Kasultanan dan Kadipaten tersusun	1 Dokumen	5,000,000						
			Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten yang terlaksana	100 Persen							
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kars Gunung Sewu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 Dokumen	5,000,000						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian program keistimewaan	100 Persen	138,825,000						
	Perencanaan Rancangan Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang		Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pengendalian keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang	2 jenis	5,000,000						
			Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik	100 Persen							
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun	1 Dokumen	2,500,000						

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Rencana Program Keistimewaan dan Kegiatan Urusan Tata Ruang	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	1 Dokumen	2,500,000						
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan yang tersusun	2 jenis	133,825,000						
			Persentase kesesuaian program keistimewaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen							
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 Dokumen	50,860,000						
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	7 Laporan	82,965,000						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	6,885,082,511	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	6,885,082,511	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	15 jenis	38,850,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun	15 jenis	38,850,000	
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen				Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100 Persen		

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	29,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	29,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	350,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	350,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	350,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 dokumen	650,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 dokumen	650,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	4,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	4,500,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2,500,000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan tersusun	14 dokumen	5,870,832,511	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan tersusun	14 dokumen	5,870,832,511	
			Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 Persen				Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 Persen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 orang/bulan	5,837,832,511	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 orang/bulan	5,837,832,511	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	30,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi	62 ASN	57,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terfasilitasi	62 ASN	57,500,000	
			Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen				Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	7,500,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	7,500,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	50,000,000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	7 layanan	415,900,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	7 layanan	415,900,000	
			Persentase Administrasi Umum terlayani	100 Persen				Persentase Administrasi Umum terlayani	100 Persen		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disesiakan	12 Paket	147,400,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disesiakan	12 Paket	147,400,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4,500,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	12,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	12,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	702 Dokumen	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	702 Dokumen	3,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	20 Laporan	8,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	20 Laporan	8,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	232,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	232,000,000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia	2 layanan	24,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia	2 layanan	24,000,000	
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100 Persen				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100 Persen		
	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	8,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	8,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- unit	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- unit	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	16,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	16,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 layanan	219,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 layanan	219,000,000	
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	129,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	129,000,000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 laporan	88,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 laporan	88,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	5 layanan	259,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	5 layanan	259,000,000	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	325 unit	120,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	325 unit	120,000,000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	5,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	5,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 unit	14,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 unit	14,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	100,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	20,000,000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	100 persen	741,350,000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	100 persen	741,350,000	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	4 jenis	438,250,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	4 jenis	438,250,000	
			Persentase kesesuaian program dalam : 1. RKPD terhadap RPJMD 2. APBD terhadap RKPD	100 Persen				Persentase kesesuaian program dalam : 1. RKPD terhadap RPJMD 2. APBD terhadap RKPD	100 Persen		
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 dokumen	28,100,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 dokumen	28,100,000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	39,050,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	39,050,000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	18 Usulan	17,700,000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	18 Usulan	17,700,000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	353,400,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	353,400,000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah jenis kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan	2 jenis	151,200,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah jenis kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan	2 jenis	151,200,000	
			Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terlayani	100 Persen				Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terlayani	100 Persen		
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen	40,000,000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen	40,000,000	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 buku	111,200,000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 buku	111,200,000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah jenis laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun	2 jenis	151,900,000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah jenis laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun	2 jenis	151,900,000	
			Persentase capaian program pendukung sasaran pembangunan daerah	98 Persen				Persentase capaian program pendukung sasaran pembangunan daerah	98 Persen		
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	13 laporan	56,200,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	13 laporan	56,200,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 laporan	95,700,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 laporan	95,700,000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian program sektoral	100 Persen	1,496,500,000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian program sektoral	100 Persen	1,496,500,000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan yang tersusun	3 jenis	167,800,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan Sosial dan Kebudayaan yang tersusun	3 jenis	167,800,000	
			Persentase Kesesuaian Program Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen				Persentase Kesesuaian Program Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kebudayaan dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	68,300,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	68,300,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	55,500,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	55,500,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sikronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 laporan	44,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Sikronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 laporan	44,000,000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun	3 jenis	586,300,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun	3 jenis	586,300,000	
			Persentase Kesesuaian Program Bidang Perekonomian dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen				Persentase Kesesuaian Program Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	300,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	300,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	73,200,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	73,200,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang DIkoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD	7 Dokumen	213,100,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang DIkoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD	7 Dokumen	213,100,000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang IInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang tersusun	3 jenis	742,400,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah jenis kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang IInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang tersusun	3 jenis	742,400,000	
			Persentase Kesesuaian Program Bidang Fisik dan Prasarana dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen				Persentase Kesesuaian Program Bidang Infrastruktdan Pengembangan Wilayah dalam : 1. Renja PD terhadap Renstra PD 2. APBD terhadap Renja PD	100 Persen		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daeerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	350,900,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daeerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	350,900,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Sikronisasi Renstra/Renja dengan RRKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	191,500,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Sikronisasi Renstra/Renja dengan RRKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	191,500,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	200,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	200,000,000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	88,89	Persen	313,410,000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	88,89	Persen	313,410,000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah kelitbangan yang terlaksana	3	buah	313,410,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah kelitbangan yang terlaksana	3	buah	313,410,000	
			Persentase implementasi rencana kelitbangan	100.00	Persen				Persentase implementasi rencana kelitbangan	100.00	Persen		
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Teknologi dan Inovasi	2	Dokumen	152,210,000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan Teknologi dan Inovasi	2	Dokumen	152,210,000	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2	Laporan	142,300,000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2	Laporan	142,300,000	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3	Laporan	18,900,000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3	Laporan	18,900,000	
TOTAL						9,580,167,511						9,436,342,511	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi-Daerah, terlebih dahulu telah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Bapperida, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida dan hasil analisis kebutuhan Bapperida. Namun demikian, di Bapperida tidak ada program dan kegiatan usulan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4

Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPERIDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2025-2029 menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 mengacu pada Asta Cita, yaitu:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.;
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY tahun 2022-2027, tema pembangunan tahun 2026 belum ditetapkan. Sebagaimana arahan dalam RPJPN 2005-2025 sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN Tahun 2020-2024 disusun dengan berlandaskan pada RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi

Presiden yang kemudian diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan PublikPeningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;

Selaras dengan penjelasan tersebut diatas, maka dirumuskan tema pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 *"Membangun Masyarakat Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban".*

Tema dan prioritas pembangunan daerah ini menjadi dasar bagi Bapperida untuk merumuskan program dan kegiatan Tahun 2026. Selain itu Bapperida juga tetap memperhatikan target dalam RPJMD Tahun 2025-2029, Kebijakan Umum Bupati, dan target Renstra Perangkat Daerah BAPPERIDA Tahun 2025-2029 dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bapperida

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tahun 2026 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam prioritas pembangunan daerah yang telah disusun berdasarkan tema pembangunan Tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah mendukung pencapaian indikasi prioritas dan sasaran daerah kelima, yaitu: Program Pamong Nglayani dan Ngayomi. Pengaliran prioritas daerah sampai kedalam indikator sasaran perangkat daerah yang menjadi sasaran utama Bappeda disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Tujuan Bapperida

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2030
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	93,85
		Indeks Inovasi Daerah	49,45

Tujuan Bapperida ini kemudian dijabarkan dalam dua sasaran perangkat daerah yaitu :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya peran serta penelitian dalam memberikan rekomendasi kebijakan daerah.

Tabel 3.2
Sasaran Bapperida

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2026
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah	98,8%
2.	Meningkatnya peran serta riset, penelitian dan inovasi dalam memberikan rekomendasi kebijakan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil riset, penelitian dan inovasi	83%

Terdapat perubahan tujuan dan sasaran PD, mulai tahun 2026 sehingga untuk target PD juga mengalami perubahan dari renstra tahun 2021-2026. Proyeksi target tujuan dan sasaran PD tahun 2026 telah disamakan dengan target tujuan dan sasaran PD Tahun 2026 pada Renstra tahun 2025-2026. Mulai tahun 2025 tujuan PD juga menjadi IKU PD maka tahun 2026 tujuan dan sasaran PD terlampir dalam IKU, seperti yang tercantum dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Bapperida

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	86,70	Tujuan PD
		Indeks Inovasi Daerah	47,35	
2.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah	98,8%	Sasaran PD
	Meningkatnya peran serta riset, penelitian dan inovasi dalam memberikan rekomendasi kebijakan daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil riset, penelitian dan inovasi	83%	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026 Visi Kepala Daerah adalah "*Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"*. Sementara dalam Bab III telah diuraikan bahwa Bapperida sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan, mendukung Misi keempat Bupati terpilih, yaitu "*Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban*". Penyusunan Renja Tahun 2026 merupakan masa transisi RPJMD/Renstra tahun 2021 – 2026 dengan RPJMD/Renstra tahun 2025 – 2029. Bapperida sebagai Perangkat Daerah mempunyai dua Sasaran PD dan mendukung Prioritas dan Sasaran Daerah kelima untuk perencanaan tahun 2026, yaitu Program Pamong Nglayani dan Ngayomi. Pengaliran Sasaran Bapperida ke dalam 6 program yang dijabarkan dalam 16 kegiatan dan 52 sub kegiatan pada tahun 2026 selengkapnya Rumusan Rencana Kerja Bapperida Tahun 2026 disajikan dalam tabel 4.1.dan 4.2.

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bapperida Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terwujudnya tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Daerah	98,80%	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.105.475.000	Bappeda
					4.01	SEKRETARIAT DAERAH	1.105.475.000	
					4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.105.475.000	
					4.01.04.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	450.000.000	
					4.01.04.5.05.0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	450.000.000	
					4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	655.475.000	
					4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	500.000.000	
					4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	155.475.000	
					5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.124.235.690	
					5.01	PERENCANAAN	6.855.869.190	
					5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.969.118.890,00	
					5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.127.900	
					5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.705.000	
					5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	502.500	
					5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	405.000	
					5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.500	
					5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	640.000	
					5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.844.900	
					5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
					5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.761.264.660,00	
					5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.720.039.760,00	
					5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.199.900	
					5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.025.000	
					5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.141.300	
					5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.841.300	
					5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.300.000	
					5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.369.000	
					5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.456.000	
					5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.361.000	
					5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.049.000	
					5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
					5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
					5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.875.000	
					5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.428.000	
					5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	175.000.000,00	
					5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	
					5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.000.000	
					5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
					5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.246.030	
					5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
					5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.746.080	
					5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.499.950	
					5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.970.000	
					5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.799.000	
					5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.040.000	
					5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.852.000	
					5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.479.000	
					5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.800.000	
					5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	604.160.500	
					5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	275.764.500	
					5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	28.100.000	
					5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	22.138.000	
					5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	38.460.000	
					5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	187.066.500	
					5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	244.164.000	
					5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	126.814.000	
					5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	117.350.000	
					5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	84.232.000	
					5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	55.852.000	
					5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	28.380.000	
					5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.282.589.800	
					5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	211.790.000	
					5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72.535.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
					5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.000.000	
					5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	104.255.000	
					5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	700.799.800	
					5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	525.000.000	
					5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	55.799.800	
					5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	120.000.000	
					5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	370.000.000	
					5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.000.000	
					5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	30.000.000	
					5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	295.000.000	
		Meningkatnya peran serta riset,	Persentase rekomendasi kebijakan	83%	5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	268.366.500	
					5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	139.186.500	
					5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	
					5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0	
					5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	0	
					5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	139.186.500	
					5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	81.426.000	
					5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	50.610.500	
					5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	7.150.000	
					5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	129.180.000	
					5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	129.180.000	
					5.05.03.2.02.0012	Fasiitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	129.180.000	
					TOTAL		**8.229.710.690,00**	

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bapperida Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1.105.475.000,00				0
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				1.105.475.000,00				0
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase kesesuaian program keistimewaan**		**100 Persen**	**1.105.475.000,00**				0
4	01	04	5.05		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun			450.000.000,00			0	0
	01	04	5.05	0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	450.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		0	0
4	01	04	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun			655.475.000,00			0	0
4	01	04	5.06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	500.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		0	0
	01	04	5.06	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	155.475.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		0	0
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.124.235.690,00				0
5	01				PERENCANAAN				6.855.869.190,00				0
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**		**86,77 (A) Nilai**	**4.969.118.890,00**			-	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda yang tersusun			46.127.900,00				0
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda Kab. Gunungkidul	3 Dokumen	40.705.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bappeda Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	502.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bappeda Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	405.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bappeda Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	750.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bappeda Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	640.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappeda Kab. Gunungkidul	17 Laporan	1.844.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappeda Kab. Gunungkidul	4 Laporan	1.280.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tersusun			3.761.264.660,00				0
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kab. Gunungkidul	658 Orang/bulan	3.720.039.760,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappeda Kab. Gunungkidul	1 Laporan	1.199.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bappeda Kab. Gunungkidul	13 Laporan	40.025.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen kepegawaian yang tersusun			42.141.300,00				0
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bappeda Kab. Gunungkidul	4 Dokumen	16.841.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bappeda Kab. Gunungkidul	2 Orang	25.300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan umum yang tersedia			258.369.000,00				0
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Gunungkidul	12 Paket	6.456.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Gunungkidul	12 Paket	59.361.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bappeda Kab. Gunungkidul	12 Paket	2.049.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bappeda Kab. Gunungkidul	4 Paket	10.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bappeda Kab. Gunungkidul	247 Dokumen	1.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bappeda Kab. Gunungkidul	10 Laporan	14.875.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappeda Kab. Gunungkidul	20 Laporan	164.428.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia			175.000.000,00				0
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bappeda Kab. Gunungkidul	1 Unit	175.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan jasa penunjang yang tersedia			222.246.030,00				0
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappeda Kab. Gunungkidul	4 Laporan	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappeda Kab. Gunungkidul	72 Laporan	119.746.080,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappeda Kab. Gunungkidul	16 Laporan	101.499.950,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemelihraan barang milik daerah yang tersedia			463.970.000,00				0
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bappeda Kab. Gunungkidul	364 Unit	294.799.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappeda Kab. Gunungkidul	30 Unit	10.852.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappeda Kab. Gunungkidul	1 Unit	152.479.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappeda Kab. Gunungkidul	16 Unit	4.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian kinerja RKPD terhadap target kinerja RKPD**		**94 %**	**604.160.500,00**				0
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun			275.764.500,00				0
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	28.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	22.138.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Usulan	38.460.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	187.066.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen kesepakatan koordinasi penyusunan profil dan informasi pembangunan yang tersusun			244.164.000,00			0	0
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	126.814.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Buku	117.350.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun			84.232.000,00				0
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	55.852.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Laporan	28.380.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan Renja PD dengan Renstra PD pada bidang Sektoral**		**93 %**	**1.282.589.800,00**				0
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun			211.790.000,00				0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	72.535.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	35.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	104.255.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun			700.799.800,00				0
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	525.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	55.799.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	120.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen kesepakatan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun			370.000.000,00			0	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	45.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	30.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	295.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				268.366.500,00				0
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase kajian berbasis bukti dalam memecahkan masalah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah**		**67 %**	**139.186.500,00**				0
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen kelitbangan yang terlaksana			139.186.500,00				0
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	81.426.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	50.610.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.150.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
5	**05**	**03**			**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Inovasi di Daerah**		**100 %**	**129.180.000,00**				0
5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Dokumen Invensi dan Inovasi yang tersusun			129.180.000,00				0
5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	129.180.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0	0
TOTAL									**8.229.710.690,00**				0

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja Bapperida Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, serta diselaraskan dengan tema dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dan RKPD DIY Tahun 2026. Rencana Kerja Bapperida Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Bapperida, tema dan prioritas pembangunan daerah, analisis kebutuhan, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran daerah, sasaran Perangkat Daerah, usulan dari para pemangku kepentingan serta pagu indikatif Perangkat Daerah. Pada Rumusan Rencana Kerja Bapperida memuat 6 program yang dijabarkan dalam 16 kegiatan dan 52 sub kegiatan pada tahun 2026 dengan pagu indikatif sebesar Rp8.229.710.690,00 (Delapan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur, dan akuntabel yang dijadikan dasar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah. Kualitas rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders)* yang tetap harus dikedepankan.

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Bapperida Tahun 2026 telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang dan Forum PD.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang berdasarkan pada pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Bapperida sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya. Demikian Rencana Kerja Bapperida ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET,
DAN INOVASI DAERAH,

ttd

MOHAMAD ARIF ALDIAN

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)* dan akuntabel sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan adanya penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan yang baik oleh masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen perencanaan harus memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta mempertahankan dan meningkatkan prestasi pembangunan yang telah dicapai di daerah. Karena itu, perencanaan tersebut harus disusun berpedoman pada RPJMD dan rencana strategis Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan, sehingga dapat dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Tahun 2026 merupakan tahun keempat dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja PD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhattikan usulan program dan kegiatan dari masyrakat melalui mekanisme musrenbang.

Penyusunan Renja juga mengacu pada Renja K/L dan Renja Provinsi dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan

mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ditingkat nasional dengan pembangunan daerah. Realisasi dari perencanaan dalam dokumen Renja Tahun 2025 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I23 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Darah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perngkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

15. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026:
16. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rencangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kurun waktu tahun 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026, adalah :

1. Mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan program-program pembangunan di Kabupaten Gunungkidul;
2. Memberikan pedoman dan acuan dalam menyusun rencana kerja dan rencana kinerja anggaran Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya manusia, sumber dana, dan sarana prasarana dalam organisasi;
5. Meningkatkan produktivitas dan kinerja Perangkat Daerah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026. disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB. IV. PENUTUP
5.1. Catatan Penting
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk melihat apakah penyusunan renja telah mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah serta evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2026 ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp34.822.839.501,00,00 dengan rincian Belanja Pegawai Rp1.546.303.401,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.999.192.932,00, dan Belanja Hibah Rp30.192.343.168,00 meliputi 6 (enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan.

Tingkat capaian kinerja program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 adalah 98,77% dengan realisasi serapan keuangan sebesar Rp34.394.508.903,00,00

2.1.1. Realisasi capaian target program dan kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Semua Program dan kegiatan telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

2.1.2. Realisasi capaian target program dan kegiatan tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (96,46%)
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (98,98%)
        3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (96,67%).
        4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (98,59%)

5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (66,35%)

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (99,91%)

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (99,22%)

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (98,64%)

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (100%)

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (98,93%)

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (78,98%)

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (99,82%)

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (96,98%)

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (93,66%)

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100%)

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (90 %)

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (21,85 %)

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (64,88%)

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (38,07%)

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (99,75%)

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (99,62 %)

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (97,67%)

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (99,95 %)

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100%)

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (94,41%)

2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (100%)

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

      1) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah (89,09 %)

      2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (99,92%)

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

      1) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (69,98%)

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

      1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (92,40%)

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (99,80%)

2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (57,97%)

3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (92,33%)

4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (100%)

5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (74,33%)

2.1.3. Realisasi capaian target program dan kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan

Realisasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 tidak terdapat target kinerja keluaran dan hasil yang melebihi target.

2.1.4. Faktor – faktor yang mempengaruhi realisasi kinerja tahun 2024

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, atau melebihinya target kinerja program/kegiatan dari target yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan :

   a. Adanya kebijakan pemerintah, baik propinsi, kabupaten, maupun pusat, sehingga program/kegiatan yang sudah direncanakan belum atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.

   b. Pelaksanaan program/kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena :

   a. Adanya komitmen bersama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta mitra kerjanya untuk melaksanakan program dan kegiatan.

b. Berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan kerangka acuan kerja yang direncanakan

2.1.5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2025

1. Terbatasnya personil (ASN) yang ada dan berkurang karena pensiun menyebabkan kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
2. Peran dan Fungsi para pemangku kepentingan, lembaga non struktural (FKUB, BNK, FKDM, FPK, PPWK) yang perlu ditingkatkan.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang diambil berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Terbatasnya personil (ASN) yang ada dan berkurang karena pensiun menyebabkan kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Hal ini diatasi dengan mengoptimalkan THL yang telah ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Penguatan koordinasi, kerjasama dan *networking*/jejaring dengan mitra kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Secara terinci rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, dapat terlihat dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evalusi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*outputs*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan baik	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	100%	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*outputs*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*outputs*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	17 Dokumen	17 Dokumen	100%
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*outputs*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%	4 layanan	4 layanan	100%
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	100%	294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	100%
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	13 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	100%
8.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian terlaksana	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%
8.01.01.2.02.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	8 layanan	8 layanan	8 layanan	8 layanan	100%	8 layanan	8 layanan	100%
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*outputs*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	100%	13 Paket	13 Paket	100%
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	100%	350 Dokumen	350 Dokumen	100%
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	65%	20 Laporan	20 Laporan	100%
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin terlaksana	16 layanan	16 layanan	16 layanan	16 layanan	100%	16 layanan	16 layanan	100%
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	16 unit	100%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	6 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan	100%	12 layanan	12 layanan	100%
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*outputs*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	100%	36 laporan	36 laporan	100%
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	12 layanan	12 layanan	12 layanan	12 layanan	100%	12 layanan	12 layanan	100%
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	46 unit	46 unit	46 unit	100%	46 unit	46 unit	100%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100%	22 unit	22 unit	100%
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*outputs*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	100 persen	85 persen	90 persen	90 persen	90 persen	95 persen	95 persen	100%
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis budaya	1 kali	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
2.22.08.2.09.23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	100%	-	75%	75%	100%	80%	80%	100%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	26 kali	-	48 kali	48 kali	100%	19 kali	19 kali	100%
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	150 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*outputs*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	-	80 Orang	80 Orang	100%	80 Orang	80 Orang	100%
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	82,5%	82,5%	82,5%	82,5%	100%	82,5%	82,5%	100%
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100%	300 orang	300 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*outputs*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100%	20 laporan	20 laporan	100%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	76%	70%	72%	100%	100%	74%	74%	100%
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	8 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	150 orang	150 Orang	150 orang	100%	150 Orang	150 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*outputs*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	100%	-	75%	75%	100%	80%	80%	100%
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	9 kali	-	35 kali	35 kali	100%	5 kali	5 kali	100%
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	150 orang	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*outputs*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	93%	90%	91%	100%	100%	92%	90%	100%
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	24 layanan	24 layanan	24 layanan	24 layanan	100%	24 layanan	24 layanan	100%
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	150 orang	100%
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*outputs*)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2023			Target program / kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegitan,dan subkegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pembantu kepala daerah yang mempunyai fungsi sebagai penunjang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagimana sudah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU,SPM, IKK)	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		(IKU, SPM, IKK)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	SASARAN IKU										
1.	Persentase konflik Sosial yang tertangani	Persen	90	91	92	93	100	100	92	93	
2.	Nilai AKIP PD	skor	80,1	80,15	80,20	80,25	82,55*	82,78*	80,20	80,25	
B.	SASARAN NON IKU										
1.	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	persen	85	90	95	100	85	90	95	100	
2.	Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	persen	80	82,5	82,5	82,5	80	100	82,5	82,5	
3.	Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	persen	70	72	74	76	70	100	74	76	
4.	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	persen	85	90	95	100	85	90	95	100	

5.	Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	persen	90	91	92	93	100	100	92	93	
No	Indikator (IKU,SPM, IKK)	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		(IKU, SPM, IKK)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	persen	72	74	76	78	72	100	76	78	
7.	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
C.	SPM										
	-										
D.	IKK										
	-										

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah, adalah sebagai berikut :

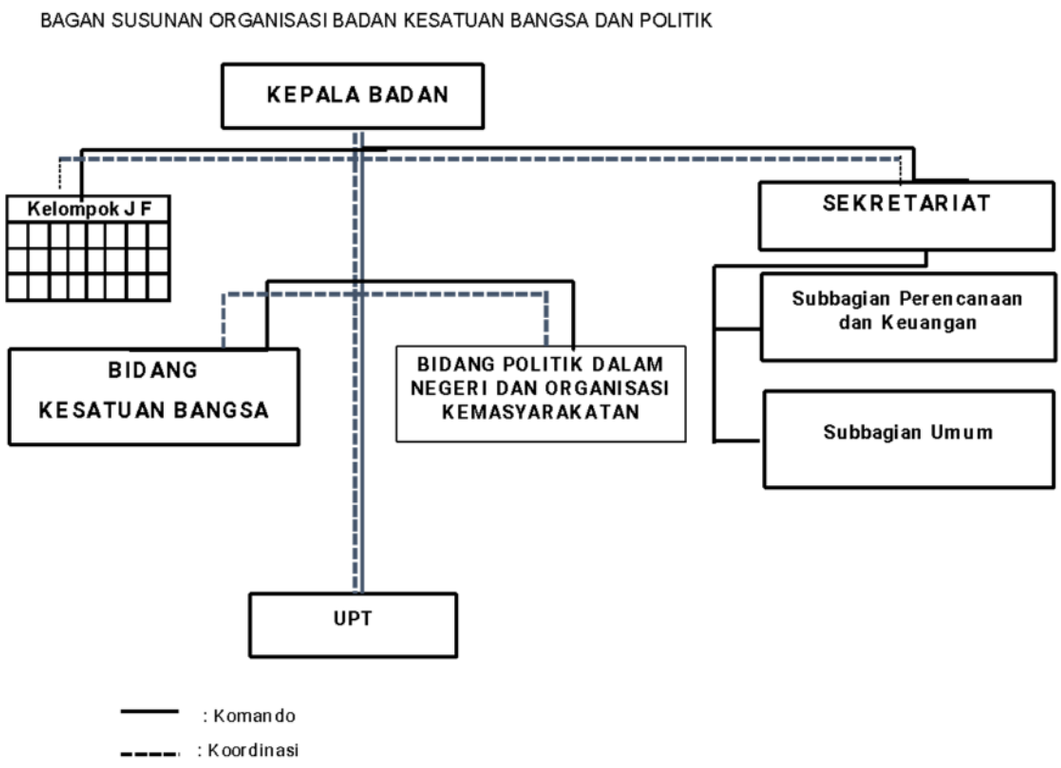

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal Kritis Terkait Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam upaya menciptakan stabilitas kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan (ipoleksosbudhankam) di daerah dengan cukup baik. Hal tersebut tercermin dalam capaian indikator yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni persentase konflik sosial yang tertangani tergolong cukup berhasil. Hal tersebut terlihat dari IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: Persentase konflik sosial yang tertangani (100%)

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya :

1. Belum optimalnya pemahaman kehidupan demokrasi (angka partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan);
2. Adanya potensi konflik berbau SARA di masyarakat;

3. Adanya potensi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai efek dari semakain ramainya kunjungan wisata dan mobilitas penduduk tinggi;
4. Adanya bibit-bibit ormas yang disinyalir tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan meresahkan masyarakat.
5. Menurunnya rasa nasionalisme dan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat

2.3.3 Dampak

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional :

1. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih rendah
2. Kenyamanan dan ketertiban terganggu serta meresahkan masyarakat, generasi muda menjadi generasi yang tidak berkualitas baik secara mental maupun fisik.
3. Menjamurnya ormas-ormas yang tidak memiliki ijin, tidak ada kejelasan tentang legalitasnya serta tidak sesuai aturan yang berlaku yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
4. Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap Pancasila berdampak pada fenomena menurunnya rasa nasionalisme, kecendrungan perilaku dan kepribadian bangsa semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila, serta kehilangan jati diri sebagai suatu individu yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan stabilitas ideologi politik, ekonomi dan sosial budaya (ipoleksosbud) daerah, antara lain adalah :

1. Masyarakat Gunungkidul yang heterogen;
2. Pertumbuhan penduduk, perumahan baru dan tempat wisata/hiburan yang cukup signifikan;
3. Adanya dinamika budaya politik masyarakat;
4. Pengaruh globalisasi, budaya asing, teknologi informasi, liberalisme, westernisasi dan pasar terbuka;
5. Pengaruh ideologi trans-nasional, isu HAM;
6. Peredaran Narkoba yang meresahkan masyarakat;
7. Munculnya beberapa aksi kenakalan remaja yang mengarah pada penyimpangan moralitas.

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan stabilitas ipoleksosbudhankam daerah, antara lain :

1. Partisipasi politik masyarakat Gunungkidul dalam Pemilu rata-rata 80%;
2. Sebagian masyarakat masih menjunjung tinggi kebudayaan jawa yang adiluhung;
3. Bahwa setiap warga negara berkewajiban turut serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

2.3.4 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Mengacu agenda pembangunan nasional, indikasi tema pembangunan DIY, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025, akan melaksanakan prioritas tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
2) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di bidang kesatuan bangsa, ketahanan dan kewaspadaan nasional;
3) Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik;
5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM);
6) Meningkatkan kelembagaan daerah dalam penanganan konflik masyarakat;
7) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan penyalahgunaan narkotika.

Prioritas tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyikapi isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten Gunungkidul dalam bidang kesatuan bangsa, yaitu:

1) Perlunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga akan meningkatkan profesionalime aparat dan meningkatnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
2) Perlunya perhatian terhadap permasalahan di bidang politik, hukum, HAM dan ketertiban, agar mampu mendorong terwujudnya peningkatan kesadaran politik masyarakat;
3) Perlunya penguatan organisasi kemasyarakatan/LSM sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka ikut memberdayakan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul;
4) Perlunya meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan nasional dan daerah sebagai prasyarat stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
5) Perlunya penanganan konflik secara simultan dengan mengacu pada tindak lanjut implementasi Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6) Perlunya membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bela negara dan menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dasar ideologi Pancasila;
7) Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam perkembangannya, berdasarkan analisis kebutuhan terdapat rasionalisasi pagu anggaran pada beberapa kegiatan yang telah direncanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pagu indikatif sebesar Rp7.127.877.325,24 yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan antara lain:

Adapun hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, adalah sebagai berikut :

I. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan

a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

1. Subkegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya berdasarkan analisis kebutuhan terdapat anggaran sebesar Rp450.000.000,00

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berdasarkan analisis kebutuhan terdapat anggaran sebesar Rp36.150.000,00.
2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD terdapat anggaran Rp32.939.900,00 .
3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD anggaran sebesar Rp1.879.800,00.
4. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD terdapat anggaran Rp1.919.800,00.
5. Sukegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD terdapat anggaran Rp1.759.900,00.
6. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp32.785.000,00.
7. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp899.000,00.
8. Subkegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp7.206.000,00.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berdasarkan analisis kebutuhan terdapat anggaran sebesar Rp1.710.417.785,24.
2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran terdapat anggaran sebesar Rp2.464.900,00.
3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD anggaran Rp37.947.000,00.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian terdapat anggaran sebesar Rp32.454.100,00

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terdapat anggaran Rp9.119.000,00.
2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terdapat pengurangan anggaran Rp73.744.000,00
3. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga terdapat anggaran sebesar Rp5.000.000,00.
4. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terdapat anggaran sebesar Rp5.799.900,00.
5. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terdapat anggaran sebesar Rp1.200.000,00.
6. Subkegiatan Fasilitasi kunjungan Tamu terdapat anggaran sebesar Rp23.104.000,00.
7. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terdapat anggaran sebesar Rp233.104.000,00.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp37.845.000,00

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terdapat penambahan anggaran sebesar Rp63.935.800,00.
2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat anggaran sebesar Rp63.917.000,00.
3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terdapat anggaran sebesar Rp5.600.000,00.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat anggaran Rp68.000,000,00.
2. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berdasarkan analisis kebutuhan terdapat anggaran Rp14.350.000,00.
3. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat pengurangan anggaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah semula Rp26.580.000,00
4. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar sebesar Rp6.000.000,00

III. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terdapat anggaran Rp141.471.000,00.
2. Subkegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka sebesar Rp1.115.000,00.

IV. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah terdapat anggaran Rp274.913.100,00.
2. Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah anggaran Rp1.496.578.740,00.

V. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah anggaran Rp270.425.700,00 .

VI. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah anggaran Rp270.425.700,00.

VII. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1. Subkegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah anggaran Rp2.245.000,00.
2. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat anggaran Rp43.510.000,00 .
3. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah anggaran Rp209.050.000,00
4. Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah terdapat anggaran Rp39.589.900,00
5. Subkegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdapat anggaran Rp201.614.800,00.

Untuk lebih jelasnya, hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Tahun 2026 dapat kita lihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	76 %	500.000.000				78 Persen	450.000.000,00	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis	3 Kali		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Politik berbasis	1 Kali	450.000.000,00	
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen	500.000.000	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1 Dokumen	450.000.000,00	
	SEMUA URUSAN					SEMUA URUSAN					
	PROGRAM:					PROGRAM:					
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100%	2.217.929.152	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100%	2.206.095.024,60	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	**(11)**	**(12)**
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun	28 Dokumen	94.601.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tersusun	29 Dokumen	16.291.000	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32.991.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.101.000	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	30.527.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	360.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	880.000	
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	790.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	920.000	
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	430.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	760.000	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	29.093.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	2.430.000	
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Laporan	410.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	5 Laporan	900.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksan	4 layanan	1.660.705.765	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi keuangan terlaksan	4 layanan	1.603.462.224,60	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	1.624.885.765	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	1.593.842.224,60	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.325.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	13 Laporan	34.495.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	13 Laporan	7.620.000	

			Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD					Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD			

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 dokumen	332.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	332.200	
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	332.200	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	332.200	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	9 layanan	222.115.787	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum terlaksana	8 layanan	176.542.600	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.215.660	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.216.100	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.085.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	28.085.500	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4.882.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000	
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.081.027	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.800.000	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	350 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	350 Dokumen	1.200.000	

			yang Disediakan					yang Disediakan			

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	176.651.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	132.241.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesbangpol			69.540.000		Badan Kesbangpol			56.310.000	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	69.540.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	56.310.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	6 layanan	80.464.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	6 layanan	65.567.000	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	33.385.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.650.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	42.204.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	53.917.000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.875.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	12 layanan	90.170.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah terlaksana	12 Layanan	107.590.000	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	154 Unit	62.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	62.600.000	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	12.710.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	12.410.000	
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	8.860.000	Pemeliharaan/ RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	26.580.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	20 Unit	6.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	20 Unit	6.000.000	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	85%	1.311.465.234	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	90%	126.315.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	23 Kali	1.311.465.234	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	26 Kali	126.315.000	

a	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	390 Orang	154.845.000	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	126.315.000	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kab. Gunungkidul	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	3 Dokumen	1.156.620.234	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	0.	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	82,5%	1.521.885.340	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada	82,5%	207.634.400	

1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat	33 Layanan	1.521.885.340	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Pendidikan Politik Masyarakat	32 Layanan	207.634.400	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	662 Orang	100.074.600	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	106.149.600	
b	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	20 Laporan	1.421.810.740	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	20 Laporan	101.485.000	

	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	74%	74.290.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan	76%	52.660.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	7 Kali	74.290.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Pembinaan Ormas dan LSM	8 Kali	52.660.000	
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	300 Orang	74.290.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	300 Orang	52.660.000	

			Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	95%	318.703.800	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama	100%	146.253.800	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	3 Kali	318.703.800	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	4 Kali	146.253.800	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang	**318.703.800**	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	450 Orang	146.253.800	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI		Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	92%	**408.144.800**	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI		Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah	93 %	272.758.800	

	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	53 Layanan	**408.144.800**	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Fasilitasi Perumusan kebijakan teknis penanganan konflik Sosial	53 Layanan	272.758.800	
a	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	**1.254.100**	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2.245.100	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	210 Orang	48.385.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	28.360.000	

c	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	970 Orang	183.460.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	134.944.000	
d	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	32.154.900	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	39.589.900	

No.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
e	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	142.899.800	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	67.619.800	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian dipadukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kapanewon usulan program/kegiatan dari masyarakat lewat kamus usulan yang dibuat untuk tahun 2026, Forum Perangkat Daerah, serta Musrenbang Kabupaten. Dengan mempertimbangkan faktor skala prioritas, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi masyarakat tersebut dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tercermin dalam program/kegiatan yang dibiayai dengan alokasi anggaran PIWK dan PIS, yang selengkapnya tersaji dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	(PIWK) – Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Kalurahan Kemadang, Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000	7.575.000	
2	(PIWK) – Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Jl.Ki Ageng Giring No.1 Kepek Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000	7.575.000	
3	(PIWK) - Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Krambilsawit, Saptosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000	7.575.000	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	(PIWK) - Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Playen I, Playen, Playen, Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000	7.575.000	
5	(PIWK) Sosilaisasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda	Balai kalurahan beji	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.575.000	7.575.000	
6	PIS-Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
7	PIS-Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Selang, Wonosari, Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
8	PIS-Sosilaisasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda	Kalurahan Tancep,Ngawen, Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
9	PIS-Pembinaan Kerukunan Umat beragama bagi masyarakat	Kalurahan tancep Kapanewon Ngawen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
10	PIS-Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Kalurahan Tancep	Jumlah Ormas dan LSM yang memahami tentang pemerintahan dan pembangunan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
11	PIS-Pembinaan Politik Masyarakat	Kalurahan Tancep Kapanewon Ngawen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di	1 Angkatan	7.125.000,00	7.125.000,00	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Daerah				
12	PIS-Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial	Kalurahan watusigar, kapanewon ngawen, kabupaten gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
13	PIS-Pembinaan Politik Masyarakat	Kalurahan watusigar, kapanewon ngawen , kabupaten gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Angkatan	7.125.000,00	7.125.000,00	
14	PIS-Pembinaan Kerukunan Umat beragama bagi Masyarakat	Kedungkeris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
15	PIS-Pembinaan/ penyuluhan pencegahan dan penanganan konflik sosial	Kalurahan Kedungpoh, Nglipar	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
16	PIS-Sosilaisasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda	Sodo	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
17	PIS-Sosilaisasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda	Kalurahan Banyusoco	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
18	PIS-Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Pringapus, RT 001 RW 004, Pucanganom, Rongkop	Jumlah Ormas dan LSM yang memahami tentang pemerintahan dan pembangunan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	PIS-Pembinaan Politik Masyarakat	Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Angkatan	7.125.000,00	7.125.000,00	
20	PIS-Sosilaisasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda	Balai Kalurahan Sumberwungu Tepus (Pakwungu Sumberwungu Tepus)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
21	PIS-Sosilaisasi Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda	Dungubag 2 Duwet Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
22	PIS-Pembinaan Kerukunan Umat beragama bagi masyarakat	Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	
23	Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Petir A RT 001 RW 001 Petir Rongkop Gunungkidul	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Angkatan	7.575.000,00	7.575.000,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026 yaitu : *"Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Meningkatkan Daya Saing"*. Sejalan dengan tema pembangunan nasional tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2026 menetapkan tema pembangunan sebagai berikut : *"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Produktivitas sektor Unggulan serta Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi "*

Dengan berpedoman pada tema pembangunan nasional dan tema pembangunan DIY serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi pembagunan daerah, Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan tahun 2026 : *"Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan"*.

Selanjutnya tema pembangunan tersebut, dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026, sebagai berikut :

1. Penguatan Pondasi kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial untuk Semua :
    a. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
    b. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
2. Penguatan Penggunaan Iptek, Penerapan Inovasi dan Peningkatan Produktivitas Ekonomi sebagai Upaya Menurunkan Ketimpangan melalui Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan Meningkatkan Peran Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Inklusif dan Berkelanjutan;
    a. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
3. Meletakkan Dasar Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, dan Budaya Berkelanjutan
    a. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.
4. Menguatkan Pondasi Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta penguatan reformasi kalurahan untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
    a. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Penguatan Pondasi Ketangguhan Diplomasi dan Daya Gentar Kawasan dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah guna terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan

Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

a. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah yang tercermin dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 yang dikaitkan dengan kondisi dinamika Ipoleksosbudhankam yang berkembang di daerah.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dijabarkan sebagaimana di bawah ini :

a. Tujuan PD Tahun 2021-2026

Tujuan yang akan dicapai, adalah :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran berpolitik masyarakat.

Tabel 3.1

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan Tahun 2026
1.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Indeks Harmoni Indonesia	6,70
		persentase partai politik, ormas yang melaksanakan sosialiasi bela negara dan wawasan kebangsaan	70,01
		Persentase konflik sosial yang tertangani	94

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra Tahun 2021- 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026
1	Meningkatnya pemahaman anggota parpol dan ormas terhadap pancasila dan bela negara melalui pendidikan politik	Persentase partai politik, ormas yang melaksanakan sosialiasi bela negara dan wawasan kebangsaan	70.01%
2.	Meningkatnya Ketahanan Ideologi,	Persentase konflik sosial yang tertangani	94%

	Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan Masyarakat		
3.	Meningkatnya Harmoni dan Kerukunan	Persentase Partai Politik, Ormas Yang Melaksanakan Sosialiasi Bela Negara Dan Wawasan Kebangsaan	6.70

Berdasarkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 359/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tercantum dalam tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU tahun 2026
1	Persentase partai politik, ormas yang melaksanakan sosialiasi bela negara dan wawasan kebangsaan	persentase partai politik, ormas yang melaksanakan sosialiasi bela negara dan wawasan kebangsaan	100%
2	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persentase konflik sosial yang tertangani	93%

Selanjutnya berdasarkan IKU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan indikator kinerja program dengan keputusan Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 13/KPTS/2022 tentang Indikator Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Program Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/Formulasi
1.	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	∑ Jumlah calon peserta paskibraka Se Kabupaten Gunungkidul / ∑ Jumlah siswa kelas X Se Kabupaten Gunungkidul x 100 % Tipologi data:Non Kumulatif
2.	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya	∑ Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70 / ∑ jumlah peserta yang mengikuti pembinaan x 100 % Tipologi data:Non Kumulatif

3.	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	Persentase pelaksanaan pendidikan politik di masyarakat	∑ Jumlah peserta pembinaan dengan nilai diatas 70 ——————————— x 100 % ∑ jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Tipologi data:Non Kumulatif
3.	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Aktif	∑ Ormas yang melapor ——————————— X100% ∑ Ormas yang terdaftar Tipologi data : Non Komulatif
4.	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	∑ Jumlah kebijakan yang terealisasi ——————————— x 100 % ∑ Jumlah rumusan kebijakan Tipologi data:Non Kumulatif
5.	Meningkatnya ketahanan IPOLEK SOSBUD HANKAM Masyarakat	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	∑ konflik sosial yang tertangani ——————————— x 100 % ∑ konflik sosial yang terjadi Tipologi data:Non Kumulatif
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten (akumulasi capaian kegiatan)	Rerata Capaian Indikator kinerja kegiatan x 100% Tipologi data:Non Kumulatif

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

   Berdasarkan visi dan misi Bupati, maka prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dengan sasaran daerah yaitu ketentraman, ketertiban, dan keamananan masyarakat meningkat.

2. Kebijakan anggaran

   Sumber pendanaan yang diperoleh dari APBD Kabupaten sangat terbatas sehingga program dan kegiatan dengan prioritas anggaran diutamakan pada kegiatan pokok yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah sesuai pagu indikatif. Kebijakan atas pagu indikatif dilakukan melalui proses penganggaran, yaitu dengan memperkirakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

   Berdasarkan prioritas pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka pada tahun anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa merencanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) subkegiatan. Rencana anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut disusun berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta prakiraan maju pada tahun anggaran berkenaan. Pada tahun 2024 belanja gaji ASN dan hibah/bansos dimasukkan dalam Renja Perangkat Daerah beserta pagu anggarannya sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2026

No.	Uraian	Pagu PD (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.174.688.130,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	176.696.240,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	89.252.809,80
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	17.480.965,60
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	90.763.750,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	52.808.000,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.260.500,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.417.750,00
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	51.961.350,00
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.267.948,00
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.733.757,75
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.063.182,04
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.306,95
14	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.095,10
	Total	1.710.417.785,24

Tabel 4.2

HIBAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

No.	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMILU	NILAI BANTUAN PERSUARA	JUMLAH BANTUAN (Rp)	PEMBULATAN BESARNYA BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5=(3x4)	6
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	97.383	3.500	340.840.500	340.840.500
2	Partai Nasdem	87.448	3.500	306.068.000	306.068.000
3	Partai Amanat Nasional	45.579	3.500	159.526.500	159.526.500
4	Partai Golongan Karya	62.330	3.500	218.155.000	218.155.000
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	55.309	3.500	193.581.500	193.581.500
6	Partai Kebangkitan Bangsa	68.563	3.500	239.970.500	239.970.500
7	Partai Keadilan Sejahtera	39.913	3.500	139.695.500	139.695.500
8	Partai Demokrat	13.265	3.500	46.427.500	46.427.500
			Total	1.644.265.000	1.644.265.000

Hasil perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3

Sasaran dan Program/Kegiatan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan /Subkegiatan
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	I Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		a Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		2 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
		II Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
		2 Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
		III Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		IV Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1	Meningkatnya ketahanan masyarakat	V Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

			1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
		VI	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
			a	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
			1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	VII	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
			a	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		d	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

a. Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dari tabel 4.3 tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melaksanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) subkegiatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 (satu) program difokuskan untuk penguatan kapasitas internal Perangkat Daerah dan 6 (enam) program dilakukan untuk mendukung visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Anggaran untuk melaksanakan 7 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 13 (tiga belas) kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026.

Untuk lebih jelasnya kami paparkan rekapitulasi program dan kegiatan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan	Program / Kegiatan /Subkegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	Ketentraman dan Ketertiban	I Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.256.417.000	
		a Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.256.417.000	
		1 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1.115.000.000	
		2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	141.471.000	
		II Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.238.507.400	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.238.507.400	
		1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	274.913.100	
		2 Pelaksanaan Monitoring Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.963.550.000	
		III Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	270.425.700	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	270.425.700	
		1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	270.425.700	
		IV Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	373.135.300	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	373.135.300	
		1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	373.135.300	

		Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
		V Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	496.009.700	
		a Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	496.009.700	
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.245.100	
		2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	43.510.000	
		3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	209.050.000	
		4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	39.589.900	
		5 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	201.614.800	
		VI Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	450.000.000	
		a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	450.000.000	
		1 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	450.000.000	
		VII Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.510.343.785,24	
		a Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	115.540.300	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.150.000	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	32.939.900	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.879.800	
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.919.800	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.759.900	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.785.000	
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	890.900	
		8 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.206.000	

		b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.750.856.685,24	
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.710.417.785,24	
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.464.900	
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37.974.000	
		c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.454.100	
			1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32.454.100	
		d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.176.900	
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.119.000	
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.744.000	
			3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	
			4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.799.900	
			5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
			6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.210.000	
			7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.104.000	
		e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.845.000	
			1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.845.000	
		f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.540.800	
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.005.000	
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.935.800	
			3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.600.000	
		g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.930.000	
			1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000	
			2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.350.000	
			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.580.000	
			4 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	

b. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan prioritas, sasaran dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 akan kami paparkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut :

Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penagnggung jawab
Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	92%	2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	450.000.000	BAKESBANGPOL
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	450.000.000	BAKESBANGPOL
					2.22.08.5.07.18	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	450.000.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.256.471.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02.2.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.256.471.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	141.471.000	BAKESBANGPOL
					8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1.115.000.000	BAKESBANGPOL
					8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.771.491.840	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penagnggung jawab
Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya pemahaman anggota parpol dan ormas terhadap pancasila dan bela negara melalui pendidikan politik	Persentase partai politik, ormas yang melaksanakan sosialiasi bela negara dan wawasan kebangsaan	100%	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.771.491.840	BAKESBANGPOL
					8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	274.913.100	BAKESBANGPOL
					8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.963.550.000	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penagnggung jawab
Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	93%	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	270.425.700	BAKESBANGPOL
					8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	270.425.700	BAKESBANGPOL
					8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	270.425.700	BAKESBANGPOL
					8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	373.135.300	BAKESBANGPOL
					8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	373.135.300	BAKESBANGPOL
					8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	373.135.300	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penagnggung jawab
Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	93%	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	496.009.700	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	496.009.700	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.245.000	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	43.510.000	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	209.050.000	BAKESBANGPOL

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Indikatif	PD Penagnggung jawab
Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya ketahanan masyarakat	Persentase konflik sosial yang tertangani	91%	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	39.589.900	BAKESBANGPOL
					8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	201.614.800	BAKESBANGPOL

Tabel rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut

Tabel 4.6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa da Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyesuaian Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				**7.594.848.585,24**				**7.009.788.889,00**
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	**22**	**08**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**450.000.000**				**400.000.000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya**		**100%**	**450.000.000**			**76%**	**400.000.000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Ketahanan Sosial Budaya Terbangun**	**Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100%**	**450.000.000**				**400.000.000**
2	22	08	5.07	0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	450.000.000	Dana Keistimewaan DIY		1 Dokumen	400.000.000,00
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				**6.677.877.325,24**				**6.609.788.889,00**
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**6.677.877.325,24**				**6.609.788.889,00**
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**6.677.877.325,24**				**6.609.788.889,00**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah**		**80,30%**	**2.510.299.485,24**			**80,35%**	**2.820.007.000,00**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan yang tersusun**		**100%**	**115.540.300,00**			**100%**	**83.208.000,00**
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	36.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	49.868.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyesuaian Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	32.939.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	19.250.000,00
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.879.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	300.000,00
8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.919.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	960.000,00
8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.759.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	480.000,00
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	32.785.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Laporan	2.450.000,00
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	899.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	900.000,00
8	01	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita acara	7.206.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita acara	9.000.000,00
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Laporan Keuangan tersusun**		**4 Layanan**	**1.750.856.685,24**			**4 Layanan**	**2.326.722.000,00**
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294 Orang/bulan	1.710.417.785,24	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		294 Orang/bulan	2.319.022.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyesuaian Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.464.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.000.000,00
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	37.974.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	5.700.000,00
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen Kepegawaian yang tersusun**		**1 Layanan**	**32.454.100,00**			**1 Layanan**	**2.000.000,00**
8	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	32.454.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	2.000.000,00
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Layanan Umum tersedia**		**8 Layanan**	**351.176.900,00**			**8 Layanan**	**196.380.000,00**
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	9.119.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	3.000.000,00
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	73.744.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Paket	48.500.000,00
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	6.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyesuaian Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	5.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Paket	14.500.000,00
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360 Dokumen	1.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		360 Dokumen	1.250.000,00
	01	01	2.06	008	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	23.210.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	24.230.000,00
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	233.104.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	98.900.000,00
8	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**		**6 Unit**	**37.845.000,00**			**2 Unit**	**20.000.000,00**
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	37.845.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	20.000.000,00
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana**		**6 Laporan**	**107.540.800,00**			**6 Laporan**	**78.372.000,00**
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	38.005.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	7.000.000,00
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	63.935.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	54.917.000,00
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	5.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	16.455.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027

							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyesuaian Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik**		**4 layanan**	**114.885.600,00**			**4 layanan**	**113.325.000,00**
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154 Unit	68.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		46 Unit	66.250.000,00
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	14.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Unit	10.700.000,00
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	26.535.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	30.375.000,00
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	6.000.000,00
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**6,7 INDEKS**	**1.256.471.000,00**			**6,8 INDEKS**	**1.207.599.234,00**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Pembinaan wawasan kebangsaan**		**100%**	**1.256.471.000,00**			**100%**	**1.207.599.234,00**
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370 Orang	141.471.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		750 Orang	9.000.000,00
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1.115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	1.198.599.234,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027

							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyesuaian Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Meningkatnya etika dan budaya politik**		**70,01 %**	**1.771.536.140,00**			**70,02%**	**1.291.407.758,00**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Pendidikan Politik pada Partai Politik**		**100%**	**1.771.536.140,00**			**100 %**	**1.291.407.758,00**
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000 Orang	274.957.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Orang	147.895.000,00
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	1.496.578.740,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	1.143.512.758,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027

							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyesuaian Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan**		**67%**	**270.425.700,00**			**68%**	**76.625.000,00**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan Aktif**		**7 Kali**	**270.425.700,00**			**7 Kali**	**76.625.000,00**
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1700 Orang	270.425.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Orang	76.625.000,00
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat**		**100%**	**373.135.300,00**			**100%**	**80.100.000,00**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan**		**9 Kali**	**373.135.300,00**			**9 Kali**	**80.100.000,00**
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	490 Orang	373.135.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400 Orang	80.100.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyesuaian Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan**		**93%**	**496.009.700,00**			**94%**	**1.134.049.897,00**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah**		**45 Layanan**	**496.009.700,00**				**1.134.049.897,00**
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.245.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	62.100.000,00
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140 Orang	43.510.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Orang	94.249.897,00
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	

							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Penyesuaian Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1080 Orang	209.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	153.200.000,00
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	39.589.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Laporan	124.200.000,00
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	201.614.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	700.300.000,00
								TOTAL	**7.127.877.325,24**				**7.109.788.889,00**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD. Pagu alokasi Badan Kesbangpol pada tahun 2026 sebesar Rp7.127.877.325,24. dengan rincian: DAU murni sebesar Rp2.831.717.224,60. Yang belum teranggarkan Pebinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka kurang Rp. 186.657.600,00. Tamabahan honor Sekretariat Forkopimda kurang 2 bulan sebesar Rp. 7.100.000,00. Pelaksanaan koordinasi Bidang kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan oaring asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penenganan konflik di daerah Rp15.300.000,00. Penyedia jasa layanan umum kantor (Tenaga Outsourching) Rp.120.294.000,00. Honor Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol non ASN Rp2.200.000,00. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 20.000.000,00.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan

program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman rencana dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

ttd

JOHAN EKO SUDARTO

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rancangan awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Tahun 2026, RKA Tahun 2026, yang digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Pada tahun 2026 penyusunan rencana kerja berpedoman pada RPJMD 2026-2039 sehingga Renja PD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada draft RPJMD terbaru dan draft Rencana Strategis PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan

masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

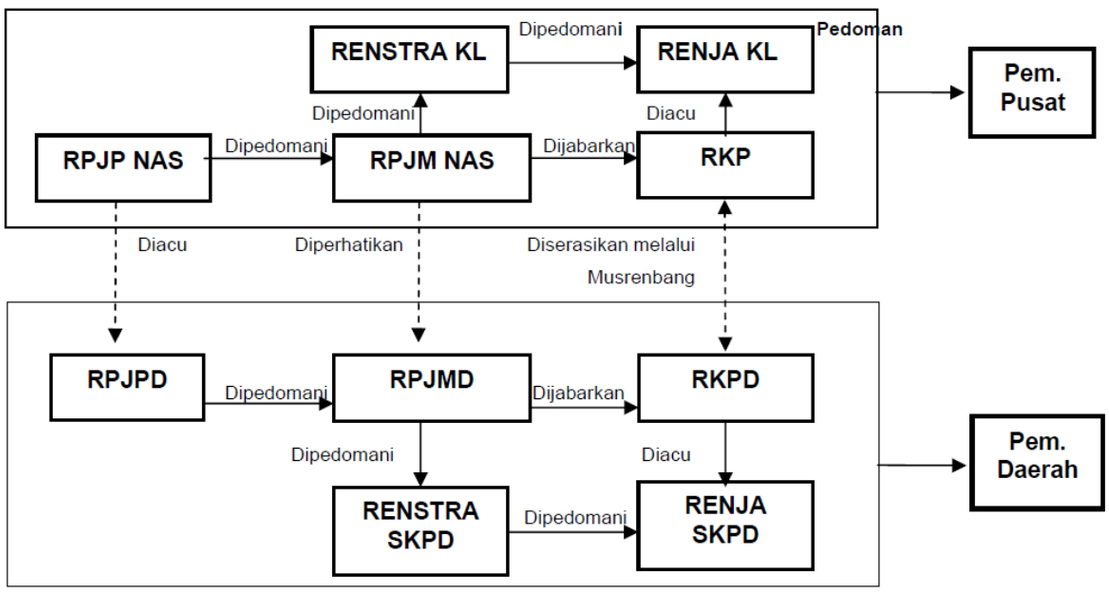

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul menyusun Renja Tahun 2026.

Penyusunan ini berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan, Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan dokumen renstra 2025-2029.

Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul menjabarkan rencana kegiatan BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi, sub kegiatan dan prioritas daerah, sasaran daerah pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah harus sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 ini adalah:

1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2) Undang-undang (UU) Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14) Instruksi Mentri Dalam Negeri no 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
20) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah;
21) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22) Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
23) Surat Edaran No 26 Tahun 2025 tentang Pedoman Desk Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Pra RKA Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud
   1) Pedoman awal bagi BPBD Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul.

   2) Pedoman awal dan kerangka acuan dalam proses penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, dan evaluasi di lingkungan BPBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.

b. Tujuan
   1) Sebagai landasan operasional awal BPBD Kabupaten Gunungkidul untuk penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran (RKA), ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
   2) Sebagai pedoman awal untuk monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD dan Capaian Renstra BPBD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

BAB. V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Untuk memantapkan program dan kegiatan tahun 2026 diperlukan evaluasi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses program dan kegiatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD dan Capaian Renstra BPBD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap lingkungannya. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Rencana Strategis BPBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2024.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) program, antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penanggulangan Bencana
c. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Pada tahun anggaran 2024, BPBD mendapatkan anggaran sebesar Rp 5.052.828.109,- (lima miliar lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan rupiah). Sampai dengan triwulan IV atau sampai dengan bulan Desember 2024, dari target realisasi keuangan Rp 5.052.828.109,- (100,00%) terealisasi sebesar Rp 4.945.393.196,- (97,87%) dana yang belum terserap sebesar Rp 107.434.913,-.

Adanya sisa anggaran tersebut antara lain pada Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, dan Honorarium bagi Tenaga Harian Lepas.

Secara lengkap capaian realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Presentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan tata ruang terlaksana**	**100 persen**	**100 persen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
1	**03**	**13**	**5.01**		**Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Persentase Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten terlaksana**	**0**	**3 Dokumen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
1	03	13	5.01	01	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	03	13	5.01	05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan	N/A	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Tata Ruang								
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten terlaksana**	**100 persen**	**100 persen**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
1	03	13	5.02	03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	50 persen	2 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	03	13	5.02	18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	N/A	3 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terlaksana dengan baik**	**100 persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan tersusun**	**7 dokumen**	**26 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**100,00 %**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**100,00 %**
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00 %	7 Dokumen	7 dokumen	100,00%
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	100,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Dokumen RKA-SKPD								
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	17 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100,00 %	14 Laporan	14 Laporan	100%
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	7 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	100,00 %	7 laporan	7 laporan	100,00%
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan disusun**	**30 Dokumen**	**30 Dokumen**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**100,00 %**	**30 dokumen**	**100,00%**	**100,00 %**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 orang/bulan	308 orang/bulan	308 orang/bulan	308 orang/bulan	100,00 %	308 orang/bulan	308 orang/bulan	100,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 laporan	1 laporan	100,00%
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28 dokumen	12 laporan	28 Laporan	28 Laporan	100,00 %	14 Laporan	14 Laporan	100,00%
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN terfasilitasi admintrasi kepegawaian**	**22 orang**	**22 orang**	**22 Orang**	**22 Orang**	**100,00 %**	**22 orang**	**100,00%**	**100,00 %**
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 orang	20 Orang	2 Orang	2 Orang	100,00 %	10 Orang	10 Orang	100,00%
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan adminitrasi umum perangkat daerah tersedia**	**8 jenis**	**8 jenis**	**8 jenis**	**8 jenis**	**100,00 %**	**8 jenis**	**8 Jenis**	**100,00 %**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	155 buah	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100,00 %	2 Paket	2 Paket	100,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00 %	4 Paket	4 Paket	100,00%
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	4 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00 %	2 paket	2 paket	100,00%
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	6 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00 %	4 Paket	4 Paket	100,00%
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	720 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00%
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pembelian barang milik daerah**	**127 unit**	**127 unit**	**127 Unit**	**127 Unit**	**100,00 %**	**127 unit**	**100,00%**	**100,00 %**
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	88 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00 %	27 Unit	27 Unit	100,00%
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	26 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%	25 Unit	25 Unit	100,00%
1	05	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 unit	1 Unit	0 unit	0 unit	0,00%	0 unit	0 unit	0,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah layanan penunjang adminitrasi perkantoran tersedia**	**4 jenis**	**4 jenis**	**4 Jenis**	**3 Jenis**	**88,33%**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**100,00 %**
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28 laporan	28 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	100,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	N/A	96 Laporan	96 Laporan	100,00 %	96 laporan	96 laporan	100,00%
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00%
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa layanan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran**	**5 jenis**	**N/A**	**5 jenis**	**5 jenis**	**100,00 %**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**N/A**	**116 Unit**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**100,00 %**
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	18 Unit	9 Unit	9 Unit	100,00 %	19 Unit	19 Unit	100,00%
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	30 Unit	7 Unit	7 Unit	100,00 %	12 Unit	12 Unit	100,00%
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	46 Unit	12 Unit	12 Unit	100,00 %	25 Unit	25 Unit	100,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	46 Unit	12 Unit	12 Unit	100,00 %	25 Unit	25 Unit	100,00%
1	0 5	0 1	2.0 9	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00 %	1 Unit	1 Unit	100,00%
1	0 5	0 1	2.0 9	0001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00 %	6 Unit	6 Unit	100,00%
1	**0 5**	**0 3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**100,00%**	**100,00 %**
1	**0 5**	**0 3**	**2.0 1**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota tersedia**	**2 jenis**	**2 jenis**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**100,00 %**	**2 jenis**	**2 jenis**	**100,00 %**
1	0 5	0 3	2.0 1	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	60 orang	60 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan BencanaKabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	N/A	N/A	1400 Orang	1400 Orang	100,00 %	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	660 Orang	660 Orang	100,00%
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**24 dokumen**	**24 dokumen**	**24 dokumen**	**24 Dokumen**	**100,00 %**	**24 dokumen**	**24 dokumen**	**100,00 %**
1	05	03	2.02	0002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	140 orang	140 Orang	1 Kawasan	1 Kawasan	100,00 %	2 Kawasan	2 Kawasan	100,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Seragam TRC dan Petugas Kedaruratan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan APD personil (mantol)	N/A	30 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan koordinasi FPRB Kabupaten Jumlah Upacara peringatan Bulan PRB	N/A	4 Kesepakatan 1 Kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 kawasan	5 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	100,00 %	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Kawasan	3 Kawasan	100,00%
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitu Pasna) rencana rehabilitasi dan	15 dokumen	21 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						rekonstruksi pasca bencana (R3P)								
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	24 orang	24 Orang	24 orang	24 orang	100,00 %	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80 Orang	80 Orang	100%
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3 dokumen	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 orang	300 orang	30 Orang	30 Orang	100,00 %	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300 Orang	300 Orang	100,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota								
1	05	03	2.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	umlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah penanganan kejadian bencana**	**200 kejadian**	**200 kejadian**	**200 kejadian**	**200 kejadian**	**100,00 %**	**200 kejadian**	**200 kejadian**	**100,00 %**
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00 %	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
1	05	03	2.03	0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 orang	300 orang	200 Orang	200 Orang	100,00 %	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350 Orang	350 Orang	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Korban Bencana								
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00 %	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100%
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana tersusun**	**3 dokumen**	**3 Dokumen**	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**100,00 %**	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**100,00 %**
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daera	2 Kesepakatan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %	N/A	N/A	N/A
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 desa/kalurahan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00 %	1 Laporan	1 laporan	100,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	03	2.02	0007	Koorinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitu Pasna) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	15 Dokumen	21 Dokumen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %	N/A	N/A	N/A
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**100,00%**	**100,00 %**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan BahanBerbahaya dan Beracun Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota**	**Jumlah penanganan kejadian kebakaran**	**50 lokasi**	**50 lokasi**	**50 lokasi**	**50 lokasi**	**100,00 %**	**50 lokasi**	**100,00%**	**100,00 %**
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Gunungkidul	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunny	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00 %	12 laporan	12 laporan	100,00%
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah lokasi penanganan kejadian kebakaran/penyelamatan non kebakaran	N/A	50 liter 10 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahan/zat pemadam api cair Jumlah pengisian tabung apar	N/A	2 unit 28 stel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	38 unit	38 Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	111 Unit	111 Unit	100,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	24 orang	24 Orang	4 Orang	4 Orang	100,00 %	50 Orang	50 Orang	100,00%
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Jumlah laporan inspeksi peralatan proteksi kebakaran**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100,00 %**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100,00 %**
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran setiap tahunnya**	**30 orang**	**30 orang**	**30 orang**	**30 Orang**	**100,00 %**	**30 orang**	**30 orang**	**100,00 %**
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 orang	30 Orang	30 orang	30 orang	100,00 %	30 orang	30 orang	100,00%
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup	N/A	N/A	1 Kalurahan	1 Kalurahan	100,00 %	1 Kalurahan	1 Kalurahan	100,00%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya								

Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal :
   a. belum optimalnya pelaksanaan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana;
   b. belum optimalnya implementasi peraturan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana;
   c. kurang lengkapnya regulasi dan standar prosedur pelayanan dalam penanggulangan bencana
   d. belum optimalnya pendataan, sosialisasi, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran;
   e. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai;
   f. kurangnya ketersediaan anggaran operasional, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD belum optimal;
2. Faktor eksternal :
   a. kondisi geografis dan luas wilayah mengakibatkan sulitnya akses;
   b. kondisi cuaca dan iklim yang tidak bisa diprediksi;
   c. masih banyak penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana dan cukup terpencil;
   d. kondisi kemampuan ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah;
   e. masih kurangnya peran serta masyarakat dunia usaha dalam pengurangan resiko bencana;
   f. kegiatan pembangunan yang belum berwawasan bencana; dan
   g. kegiatan masyarakat lebih kepada aspek ekonomi (*profit oriented*).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKU, IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, juga berdasarkan hasil analisis pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan Perundang–undangan terkait kinerja pelayanan urusan Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Gunungkidul memiliki 8 (delapan) ancaman bencana berupa: tanah longsor, banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tsunami dan abrasi, kebakaran, dan wabah penyakit. Secara umum, pelayanan yang diampu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Gunungkidul dari semua ancaman bencana. Pelayanan kepada masyarakat diupayakan melalui tiga tahapan, yaitu : Tahap pra bencana, Tahap saat bencana, dan Tahap pasca bencana

Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya tahap pra bencana adalah :

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan, meliputi penerbitan kebijakan pengurangan resiko bencana (perda, perbub, SK bupati, rencana kontijensi, rencana operasi, SOP, dll) serta pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
b. Peningkatan kapasitas masyarakat meliputi peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana (sosialisasi, lokakarya, gladi, pelatihan, dll) Kalurahan Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dll.

Jenis-jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya penanganan saat bencana adalah : penanganan darurat bencana yang meliputi evakuasi dan pencarian korban, penanganan pengungsi (logistik, kesehatan, fasum, fasos, dll) serta penanganan darurat fasum-fasos. Sedangkan jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup upaya penanganan pasca bencana adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di bidang fisik dan non fisik, dengan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dan swasta.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana, dan mempunyai fungsi:

a) perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana;
b) perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
c) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penanggulangan bencana;
d) penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
e) penetapan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f) pelaksanaan penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
g) penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
h) pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
i) pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
j) pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
k) pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
l) pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
m) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penanggulangan bencana;
n) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penanggulangan bencana;
o) pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
p) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penanggulangan bencana; dan
q) pengelolaan UPT.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunungkidul

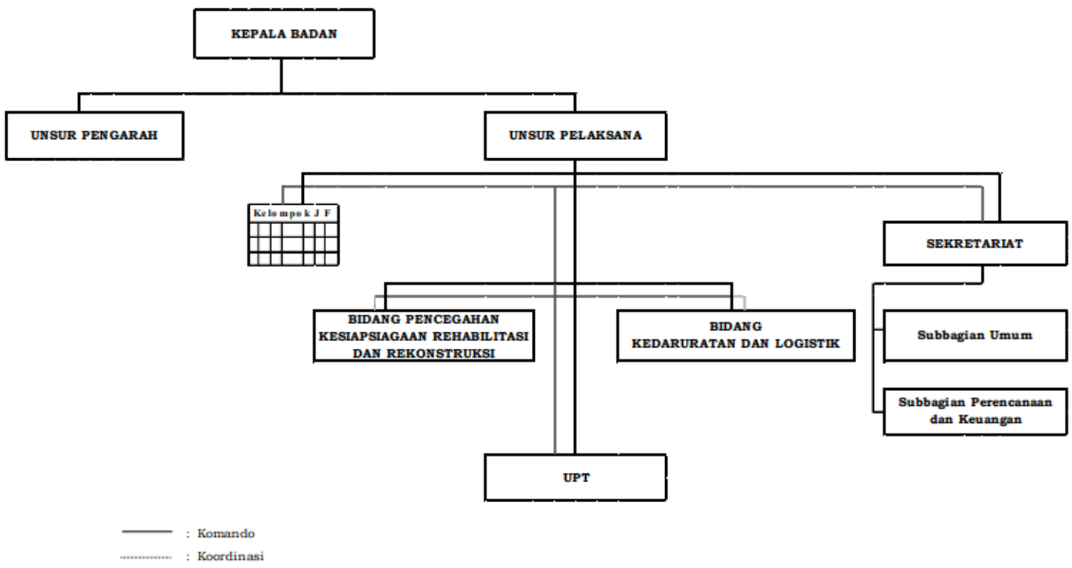

Unit pelaksana teknis dibawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Unit Pelaskana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. UPT Pemadam Kebakaran ini merupakan UPT kelas A pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan hewan.

Fungsi UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunungkidul yaitu:

a) penyusunan rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
b) penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pemadam Kebakaran;
c) pelaksanaan pemadaman kebakaran;
d) penyelenggaraan pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran;
e) pelaksanaan diseminasi dan bimbingan teknis di bidang pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran;
f) pelaksanaan penyelamatan darurat terhadap jiwa manusia dan hewan yang terancam keselamatannya dan memerlukan bantuan sarana prasarana pemadam kebakaran;
g) pengelolaan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran;
h) pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pemadam Kebakaran;
i) penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Pemadam Kebakaran;
j) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran; dan
k) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi UPT Pemadam Kebakaran

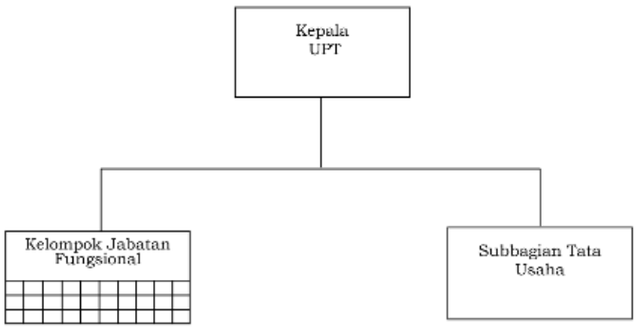

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan indikator kinerja utama pelayanan di bidang penanggulangan bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 369/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Presentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat.

   Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah kalurahan tangguh bencana terbentuk}}{\text{Jumlah kalurahan}} \times 100\%$

   Pada tahun anggaran 2024 ditargetkan 1 (satu) kalurahan yang terbentuk menjadi kalurahan tangguh bencana. Realisasinya adalah sebanyak 1 (satu) kalurahan tangguh bencana terbentuk atau 100%. Yaitu Kalurahan Sidorejo (Ponjong). Sehingga capaian sampai dengan tahun 2024, sebanyak 88 kalurahan telah terbentuk menjadi Kalurahan Tangguh Bencana, atau baru 61,11% dari total kalurahan di Gunungkidul.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Realisasi Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

No	Kegiatan	Sumber Dana
		APBD Gunungkidul
1	Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana	Sidorejo Kapanewon Ponjong
2	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	SMP 1 Paliyan
3	Gladi Kesiapsiagaan	Umbulrejo, Ponjong
4	Pelatihan Relawan	Jepitu, Kapanewon Girisubo

2. Presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani

   Formulasi perhitungan : $\frac{\textit{jumlah kejadian bencana kebakaran tertangani}}{\textit{jumlah kejadian bencana kebakaran}} \times 100\%$

   Untuk tahun anggaran 2024 target kejadian kebakaran sebanyak 50 kejadian. Namun demikian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, terjadi 110 kejadian kebakaran. Meningkatnya kejadian kebakaran ini dipicu oleh kemarau panjang. Sedangkan sampai dengan 31 Desember 2024, telah melaksanakan 158 kegiatan penyelamatan non kebakaran.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Tahun 2024

Relawan Kebakaran	Penanganan oleh UPT Pemadam Kebakaran	
	Respon time <15 menit	Respon time >15 menit
110 kejadian	91 kejadian	19 kejadian
	Respon time > 15 menit dikarenakan Lokasi yang jauh dari pos induk pemadam kebakaran, petugas melakukan pendinginan dan memastikan tidak ada titik api	

Capaian untuk indikator ini adalah 100%. Namun demikian *respon time* terhadap kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran tidak bisa seluruhnya sesuai target yaitu 15 menit. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang luas dan pos pemadam kebakaran hanya ada di Kapanewon Wonosari, dan Kapanewon Karangmojo.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
A.	INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL										
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,70	0,75	0,80	0,90	0,73	0,77	0,80	0,81	
B.	INDIKATOR KINERJA UTAMA BPBD										
1.	Persentase (%) kejadian bencana/kebakaran tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase (%) Masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	Persen	54,86	58,33	61,81	65,28	60,41	61,11	61,81	63,19	
C.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM										
1.	Nilai AKIP PD	Nilai	82	82,5	83	83,5	82,35	83,61	83,93	84,13	
2.	Persentase (%) dukungan tata ruang keistimewaan teradap penanggulangan bencana	Persen	25	50	75	100	25	0	0	0	
3.	Persentase (%) kejadian bencana/kebakaran tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase (%) Masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat	Persen	54,86	58,33	61,81	65,28	60,41	61,11	61,81	63,19	

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
D.	INDIKATOR SPM										
D1	SUB URUSAN BENCANA										
1	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	Persen	100	100	100	100	91,6	91,68	100	100	
3	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakasi korban bencana.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
D2	SUB URUSAN KEBAKARAN										
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Persen	100	100	100	100	100	82,73	100	100	
2	Prosedur operasional penanganan penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, …dst.)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan /Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Persen	100	100	100	100	16,67	13,33	100	100	
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Persen	100	100	100	100	100	86,36	100	100	
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul diamanatkan untuk melaksanakan SPM bidang Trantibulinmas Jenis pelayanan dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
b. Pelayanan informasi rawan bencana
c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan
e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

Untuk pelaksanaan SPM ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul mengacu pada turunan PP No 2 Tahun 2018 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Laporan dilaksanakan secara berjenjang dari Perangkat Daerah sampai ke Kementerian Dalam Negeri.

Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Indikator Kinerja pada Standar Pelayanan Minimal tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 2.5
Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kebencanaan Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
(1)	(2)	(3)			(4)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		**TUNTAS UTAMA**			**97,23%**
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**				**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	776.584	776.584	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**20,00%**
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	0,01	0,01	**0**	**100,00%**
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	774.441	774.441	**0**	**100,00%**
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	30.684	30.684	**0**	**100,00%**
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	28	28	**0**	**100,00%**

2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**				**91,68%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	487.216	487.216	**-**	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**11,68%**
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	1318	221	**1097**	**16,77%**
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	139	139	**0**	**100,00%**
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**				**100,00%**
	ya				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	12001	12001	**0**	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**20,00%**

	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1	1	**0**	**100,00%**
	2 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	701	701	**0**	**100,00%**
	3 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0,01	0,01	**0**	**100,00%**
	4 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	12001	12001	**0**	**100,00%**
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	699	699	**0**	**100,00%**

Tabel 2.6
Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemadam Kebakaran Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul

KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
(1)	(2)	(3)			(4)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		**TUNTAS MADYA**			
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**				**97,08%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	111	111	**0**	**100,00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang /**	**Jumlah Mutu Barang /**	**Jumlah Mutu Barang /**	**17,08%**

		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	95	95	**0**	**100,00%**
	2 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	24	4	**20**	**16,67%**
	3 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	95	91	**4**	**95,79%**
	4 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	130	130	**0**	**100,00%**
	5 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	5	5	**0**	**100,00%**
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	3	3	**0**	**100,00%**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dengan kedudukan dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki lingkup pelayanan yang luas. Kabupaten Gunungkidul adalah daerah rawan bencana, namun sulit untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam penanggulangan bencana. Karakteristik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya berbeda. Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Salah satu kinerja yang dapat diukur pada tahun 2024 adalah jumlah Kalurahan Tangguh Bencana yang telah diinisiasi dan dibentuk oleh BPBD maupun pihak lain sesuai unsur penthahelix yaitu keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha media massa maupun akademisi dalam program penanggulangan bencana. Dari 144 kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, sampai tahun 2024 sudah terbentuk 88 kalurahan tangguh bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Bencana berimplikasi terhadap semua sektor, oleh sebab itu upaya pengurangan risiko bencana, penanganan tanggap darurat, penanganan pasca bencana harus melibatkan semua sektor baik pemerintah, swasta/dunia usaha, dan masyarakat. Penanggulangan bencana harus dibebankan kepada segenap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, kalangan swasta/korporasi dan masyarakat itu sendiri, terlebih lagi dengan terbitnya PP Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur pelayanan minimal bagi masyarakat salah satunya urusan trantibulinmas dan kebencanaan.

Tabel 2.7
Kekuatan dan kelemahan yang dihadapi selama tahun 2024

Kekuatan	Kelemahan/Tantangan
1 Landasan hukum kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul 2 Adanya institusi formal di bidang kebencanaan dan kebakaran 3 Adanya komitmen pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat 4 Adanya sistem komando penanggulangan bencana yang berlaku secara nasional 5 Adanya modal sosial masyarakat yang tinggi 6 Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dan kebakaran 7 Adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari penanganan darurat (*emergency response*) menjadi pengurangan resiko bencana (*disaster risk*	1. Kuantitas dan kualitas aparatur masih perlu ditingkatkan 2. Sarana dan prasarana penunjang yang masih perlu ditingkatkan 3. Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola di bidang kebencanaan dan kebakaran 4. Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan kebakaran karena perubahan iklim global yang berpengaruh pada cuaca lokal dan mengakibatkan kejadian bencana 5. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana dan kebakaran

Kekuatan	Kelemahan/Tantangan
reduction) 8 Adanya isu nasional yaitu Megatrush di pesisir selatan	6. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta penyebarannya yang tidak merata di wilayah rawan bencana 7. Kerentanan masyarakat tentang bencana relatif masih tinggi baik dari sisi kependudukan, ekonomis maupun fisik lingkungan serta kegiatan pembangunan yang belum berwawasan bencana 8. Masyarakat masih belum memahami isu tersebut dimana dijadikan sebuah bencana yang dalam waktu dekat akan terjadi, sedangkan isu tersebut hanya sebuah pengertian berupa potensi terjadinya gempa di pesisir selatan.

Tabel 2.8
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama tahun 2024

Permasalahan	Hambatan
1. Belum memiliki analisa pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana 2. Kompetensi personil belum merata dan memadai 3. Manajeman penataan personil belum efektif dan efisien 4. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana belum merata 5. Prosedur dan mekanisme koordinasi lintas lembaga (pemerintah dan non pemerintah) belum terstandar secara resmi	1. Keterbatasan anggaran 2. Pelatihan pegawai untuk peningkatan kompetensi belum merata kepada semua pegawai 3. Belum memiliki peta/rencana kesiapsiagaan untuk setiap bencana secara menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen lintas sektoral

Berdasarkan data pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Gunungkidul dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang harus ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.
Beberapa isu strategis tersebut adalah:

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan.
   Menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat.
   a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

b. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
c. Peningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka Penanggulangan Bencana.
d. Pengkajian dan pemantauan risiko bencana dan perencanaan terpadu serta pengembangan sistem peringatan dini
e. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap aspek pembangunan daerah

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (urusan kebencanaan dan urusan pemadaman kebakaran)
   Beberapa catatan dalam pemenuhan SPM antara lain :
   a. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, dan ketentuan lainnnya. Hal ini tentunya kedepan menjadi tantangan bagi BPBD dalam upaya pemenuhan pencapaian penerapannya.
   b. Dari sisi jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar jumlah personil pemadam yang mengikuti diklat bersertifikat sebanyak 9 (sembilan) personil dari 27 personil damkar. Peningkatan kualitas perlu terus dilaksanakan dengan mengikutsertakan Aparatur PBK ke dalam diklat-diklat yang bersertifikasi.
3. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik bencana
4. Penguatan sistem komunikasi, operasi, data, dan informasi
5. Penyediaan peralatan penanggulangan bencana berdasarkan standar kebutuhan sarana prasarana/rencana kebutuhan barang
6. Pemenuhan standar kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan SDM
7. Penanganan tematik kawasan rawan bencana dan kebakaran
8. Peningkatan efektivitas pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana dan kebakaran
9. Peningkatan sistem peringatan dini kebencanaan
10. Pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya sadar bencana dan ketahanan menghadapi bencana
11. Peningkatan kemampuan aparatur, masyarakat dan pelaku usaha dalam deteksi dini dan penanganan bencana dan kebakaran.
12. Perubahan iklim global.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD mengalami beberapa hambatan dan kendala baik dari internal maupun eksternal. Antara lain:

1. Cakupan pelayanan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang hampir 46% dari luas wilayah DIY dan karena keberagaman ancaman bencana yang ada memerlukan perhatian yang lebih serius dalam upaya penanggulangan bencana.
2. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbukit-bukit dan kerentanan dari sisi fisik, ekonomi yang cukup tinggi serta masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
3. Keterbatasan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) saat ini yang hanya 1 WMK untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. WMK Karangmojo sudah beroperasi yang dapat

meningkatkan cakupan layanan BPBD terhadap kejadian bencana/kebakaran. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan dan barat belum ada WMK.

Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang disusun pada tahun 2023, Kabupaten Gunungkidul minimal memiliki 9 (sembilan) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan sebaran sebagai berikut:

Gambar 2.3
Peta Rencana Sebaran Pos Sektor Pemadam Kebakaran di Gunungkidul

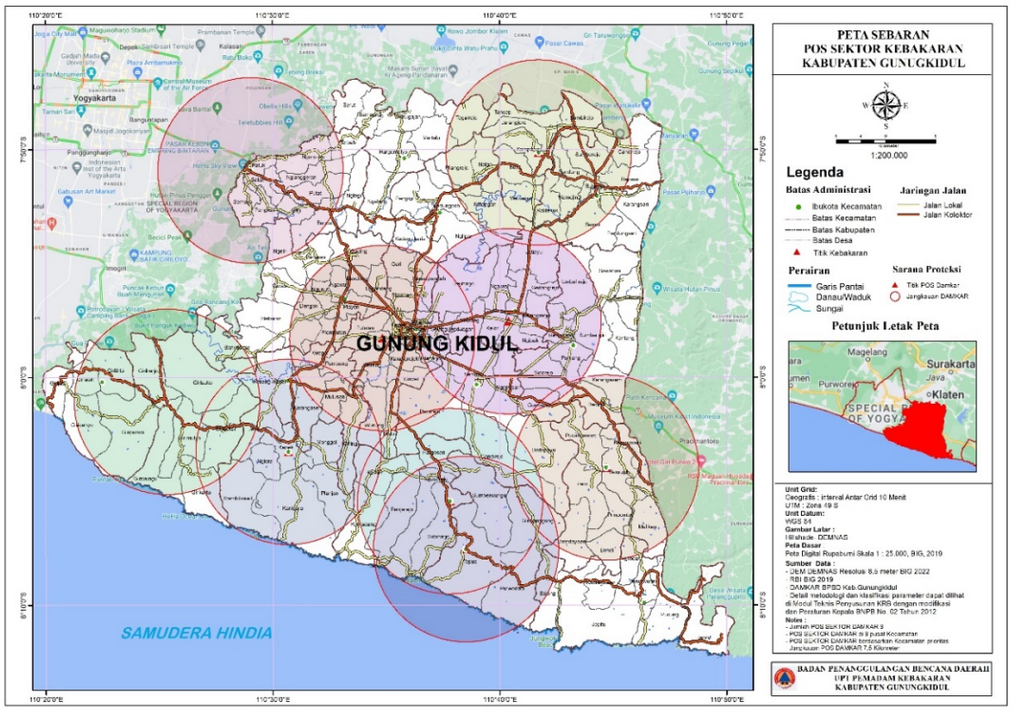

4. Keterbatasan kuantitas dan kualitas personil yang ada pada BPBD yang masih kurang dari kebutuhan ideal dan belum sesuai dengan analisa jabatan.
5. Belum tersusunnya peraturan bupati tentang bantuan khusus kepada korban bencana, dan regulasi turuan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 lainnya.

Terhadap permasalahan dan hambatan yang dihadapi BPBD berdampak dalam perwujudan misi dan sasaran pembangunan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul, BPBD berupaya untuk:

a) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
b) meningkatkan persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini secara efektif dengan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, kedaruratan dan logistik dan penanganan pasca bencana;
c) memelihara, mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ketugasan;
d) meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, wawasan, keterampilan dan profesionalisme dari sumber daya manusia yang ada; dan

e) menciptakan sistem manajemen penanggulangan bencana yang terpadu dengan melibatkan seluruh unsur.

2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja pemerintah Daerah

Berdasarkan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, maka perlu dilakukan reviu terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Terdapat beberapa rumusan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD. Hasil penyandingan dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**5.282.500.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.543.659.401**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**5.282.500.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**5.543.659.401**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100 persen	**3.062.400.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik (%)	100 persen	**2.975.388.865**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan tersusun (Dokumen)**	**7 dokumen**	**66.400.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan tersusun (Dokumen)**	**7 dokumen**	**46.046.900**	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	34.270.000	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	35.866.900	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.815.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.090.000	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.815.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.480.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1.030.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	1.700.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	18.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	4.080.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan disusun**	**30 dokumen**	**2.257.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan disusun**	**30 dokumen**	**2.036.864.469**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/bulan	2.174.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	434 Orang/bulan	2.001.394.469	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	33.490.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se SKPD	28 Laporan	48.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triw	13 Laporan	1.980.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								ulanan/Se SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah ASN Terlayani Kepegawaian**	**22 orang**	**7.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah ASN Terlayani Kepegawaian**	**22 orang**	**41.181.000**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	2.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	31.255.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	9.926.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah layanan adminitrasi umum perangkat daerah tersedia (Jenis)**	**8 jenis**	**230.600.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah layanan adminitrasi umum perangkat daerah tersedia**	**8 jenis**	**62.482.000**	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								(Jenis)			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7.260.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.197.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Ka0ntor yang Disediakan	18 Paket	27.486.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	10.740.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.690.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.989.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.400.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	113.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.620.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah pembelian barang milik daerah (Jenis)**	**127 Unit**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pembelian barang milik daerah (Jenis)**	**127 Unit**	**5.824.000**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30 unit	2.304.000	Anggaran belum terakomodir
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	27 Unit	3.520.000	Anggaran belum terakomodir
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah layanan penunjang adminitrasi perkantoran tersedia**	**4 jenis**	**128.400.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah layanan penunjang adminitrasi perkantoran tersedia**	**4 jenis**	**271.150.396**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28 Laporan	6.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	150.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan	67.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan	125.564.496	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	54.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	145.435.900	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah jasa layanan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran**	**5 jenis**	**373.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah jasa layanan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran**	**5 jenis**	**511.840.000**	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	283.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	340.800.000	
	Pemeliharaan Mebel	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	4.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	250.000	Anggaran belum terakomodir
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	37.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	166.670.000	
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	Anggaran belum terakomodir

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	3.900.000	Anggaran belum terakomodir
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	4.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	13 Unit	3.900.000	
						Penataan Organisasi					
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	-	Anggaran belum terakomodir
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		**Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana (%)**	**100 persen**	**1.472.600.000**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana (%)**	**100 persen**	**1.679.743.536**	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		**Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana mendapat informasi rawan bencana**	**2 jenis**	**65.000.000**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana mendapat informasi rawan**	**2 jenis**	**5.590.000**	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								bencana			
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	30 Orang	65.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Ngunut, Playen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	30 Orang	5.590.000	(PIWK) - Sosialisasi pengurangan risiko bencana Ngunut, Playen, Gunungkidul
						Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama	1 Dokumen	-	Mendukung SPM

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								dalam 1 (satu) tahun			
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)**	**24 dokumen**	**368.000.000**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Dokumen)**	**24 dokumen**	**213.258.000**	
						Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	-	Anggaran belum terakomodir

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	12 Unit	8.212.000	PIS - Penyediaan prasarana informasi rawan bencana di Tepus, Tepus, Gunungkidul Mendukung SPM
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kanigoro	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	300 Orang	11.950.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kanigoro	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	28.715.000	Mendukung SPM Anggaran Belum terakomodir

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 Keluarga	-	Anggaran belum terakomodir
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5 Kawasan	166.050.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Gunungkidul, Playen I, Playen Kab. Gunungkidul, Giriasih, Purwosari	Jumlah Kawasan yang DitingkatkanKapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 kawasan	140.673.000	PIWK - Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana Playen I, Playen, Playen, Gunungkidul dan PIWK - Giriasih, Purwosari, Gunungkidul

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	24 Orang	15.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	24 Orang	5.595.000	
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	3 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	300.000	Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	65.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 dokumen		Anggaran belum terakomodir

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	-	Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-	Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	20.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Blembem, Candirejo, Semin, Gunungkidul Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2 kawasan	29.763.000	PIS - Pelatihan Relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Blembem, Candirejo, Semin, Gunungkidul dan Tepus, Tepus, Gunungkidul Mendukung SPM
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**Jumlah penanganan kejadian bencana**	**200 kejadian**	**952.600.000**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Jumlah penanganan kejadian bencana**	**200 kejadian**	**1.328.477.000**	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 Laporan	20.000.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	12 Laporan	-	Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 Dokumen	419.600.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 dokumen	1.035.044.500	Mendukung SPM
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	200 Orang	-	Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM
						Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	2 Dokumen	1.152.500	Anggaran belum terakomodir

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	100 Orang	-	Anggaran belum terakomodir
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Orang	340.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	100.000.000	Mendukung SPM
						Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan	1 Dokumen	-	Anggaran belum terakomodir

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu			
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	12 Laporan	173.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	12 laporan	192.280.000	Mendukung SPM
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana tersusun**	**3 dokumen**	**87.000.000**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana tersusun**	**3 dokumen**	**132.462.636**	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	-	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	5.690.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	2.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	-	Anggaran belum terakomodir
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0 Dokumen	-	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	-	Anggaran belum terakomodir
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 Laporan	-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	2.725.000	
						Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	2 Orang	-	Anggaran belum terakomodir

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang	-	Anggaran belum terakomodir
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	15 Kegiatan	85.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Ko	2 Kegiatan	111.512.636	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								ta yang dilegalkan			
						Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan	1 Lembaga	-	Anggaran belum terakomodir

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal			
						Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	-	Anggaran belum terakomodir
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	-	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	10.260.000	10260000

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	150.000	Anggaran belum terakomodir
						Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	2.125.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		**Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)**	**100 persen**	**747.500.000**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (%)**	**100 persen**	**888.527.000**	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan**	**50 lokasi**	**734.000.000**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan**	**200 kegiatan/1 okus**	**863.761.400**	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	-	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen		Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	675.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	833.595.400	Mendukung SPM
						Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen		Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM
						Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan	1 Dokumen		Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota			
						Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen		Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	24 Orang	5.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50 orang	30.166.000	Mendukung SPM

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	1 Desa/Kelurahan	-	Anggaran belum terakomodir
						Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	1 laporan	-	Anggaran belum terakomodir

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	38 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	111 unit	-	Anggaran belum terakomodir
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Dokumen	4.000.000	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 dokumen	-	Anggaran belum terakomodir

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	1 Keluarga	-	Anggaran belum terakomodir
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		**Jumlah dokumen hasil inspeksi peralatan pemadam kebakaran**	**1 Dokumen**	**8.500.000**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**Jumlah dokumen hasil inspeksi peralatan pemadam kebakaran**	**1 Dokumen**	**1.110.000**	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Ling yang Dipersyaratkan Ha Memiliki Sistem Proteks Kebakaran	1 Dokumen	8.500.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Ling yang Dipersyaratkan Ha Memiliki Sistem Proteks Kebakaran	1 Dokumen	1.110.000	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen		Anggaran belum terakomodir
						Investigasi Kejadian Kebakaran				-	
						Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	-	Anggaran belum terakomodir

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		**Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya**	**30 orang**	**5.000.000**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya**	**30 orang**	**23.655.600**	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 Orang	5.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 Orang	3.940.000	Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	0 Desa/Kelurahan	-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap	1 desa/Kelurahan	19.715.600	Mendukung SPM

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Tahunnya			
						Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen		Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM
						Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia**	**12 Dokumen**	**-**	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	-	Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM
						Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	-	Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	-	Anggaran belum terakomodir
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	20 Unit	-	Anggaran belum terakomodir Mendukung SPM
					5.282.500.000					**5.543.659.401**	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Pennaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Hasil analisis kebutuhan dimaksud kemudian dipadukan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah,serta Musrenbang Kabupaten. Dengan mempertimbangkan faktor skala prioritas, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi masyarakat tersebut dapat melengkapi usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tercermin dalam program/kegiatan yang dibiayai dengan alokasi anggaran PIWK dan PIS, yang selengkapnya tersaji dalam tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.10
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Pembentukan Kaltana	Kalurahan Terbah, Patuk, gunungkidul	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1	77.365.000	77.365.000	Usulan ditolak. Sudah terbentuk Kaltana
2	(PIWK) - Pembentukan Kaltana	Kalurahan Playen I, Playen, Gunungkidul	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1	77.365.000	77.365.000	Usulan diterima

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
3	(PIWK) - Penyediaan papan rambu informasi rawan bencana	Kalurahan Giriasih, Purwosari, Gunungkidul	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2	9.600.000	19.200.000	Usulan diterima
4	(PIWK) - Sosialisasi pengurangan risiko bencana	Kalurahan Ngunut, Playen, Gunungkidul	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1	5.590.000	5.590.000	Usulan diterima

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
6	(PIS) - Pelatihan Relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Blembem, Kalurahan Candirejo, Semin, Gunungkidul	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1	16.390.000		Usulan diterima
7	(PIS) - Pelatihan Relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Kalurahan Tepus, Tepus, Gunungkidul	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1	16.390.000	16.390.000	Usulan diterima
8	(PIS) - Penyediaan prasarana informasi rawan bencana	Kalurahan Giriasih, Purwosari, Gunungkidul	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1	9.600.000	9.600.000	Usulan diterima

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
9	(PIS) - Penyediaan prasarana informasi rawan bencana	Kalurahan Tepus, Tepus, Gunungkidul	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1	9.600.000	9.600.000	Usulan diterima

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam penyusunan Rancangana akhir ini, BPBD Kabupaten Gunungkidul menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2025 mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dimana telah mengamanatkan untuk memprioritaskan pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta arahan dari BNPB untuk melaksanakan peningkatan ketahanan bencana melalui:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
2. Peningkatan pengetahuan kebencanaan; dan
3. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antar pelaku (daerah, nasional dan internasional).

Dalam perencanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga memperhatikan hasil Rakornas. Berikut rumusan hasil Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2024 antara lain :

1. Memperkuat kerjasama para pihak dalam pengembangan teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan;
2. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana melalui inisiatif kolaborasi dan kemitraan berdasarkan Rencana Aksi Pemenuhan SPM, serta mendorong BPBD bekerja sama dengan Bappeda untuk melakukan sinkronisasi program dan anggaran penanggulangan bencana di daerah agar selaras dengan perencanaan di pusat (BNPB)
3. Melakukan upaya penguatan kapasitas personil, sumberdaya dan kelembagaan penanggulangan bencana melalui transformasi tata kelola, peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan sarana prasarana, secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut
4. Memperkuat tata kelola kedaruratan dan logistik, serta meningkatkan sistem kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi
5. Mempercepat implementasi berbagai inisiatif strategi pembiayaan alternatif (termasuk *Pooling Fund* Bencana) untuk pra, darurat, dan pasca bencana dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan risiko bencana di daerah, serta memperhatikan tata kelola anggaran kebencanaan yang akuntabel;
6. Mendorong implementasi Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) sebagai *Big Data* dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan monitoring evaluasi sistem nasional penanggulangan bencana secara komprehensif dan terukur, selaras dengan komitmen percepatan digitalisasi layanan pemerintah.
7. Membangun komitmen BPBD untuk melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat terkait isu-isu di bidang penanggulangan bencana berbasis elektronik, untuk mewujudkan akuntabilitas penanggulangan bencana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
8. Mendorong terbentuknya mekanisme respon kedaruratan di tingkat daerah melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multisektor di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. (berdasarkan Surat Mendagri 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022)

9. Mendorong Pemerintah Daerah membentuk tim Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana, menyusun R3P dengan melibatkan multi helix, memasukkan bidang RR dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), melakukan pemulihan baik yang bersifat konstruksi maupun non-konstruksi yang efektif dan efisien.

Sebagai implementasi arah kebijakan nasional, maka BPBD Kabupaten Gunungkidul telah melakukan beberapa strategi kesiapsiagaan dan ketahanan bencana:

1. Kesiapsiagaan masyarakat
   Penguatan penanggulangan bencana di tingkat masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Dimana sampai dengan tahun 2024, telah terbentuk 88 Kaltana dan 43 SPAB.
2. Kesiapsiagaan sarana prasarana
   Untuk menghadapi situasi bencana, BPBD Kabupaten Gunungkidul dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana penunjang, antara lain mobil tangki untuk dropping air, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulan, mobil dan motor untuk operasional, serta ews (*early warning system*) untuk bencana tsunami dan tanah longsor.
3. Kesiapsiagaan personil
   Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Kabupaten Gunungkidul didukung oleh 89 personil, yaitu :
   a. 18 PNS, 13 PPPK
   b. 26 Tenaga Harian Lepas yang terdiri :
      - tenaga administrasi umum 5 orang
      - tenaga teknis Pusdalops 6 orang
      - tenaga teknis pemadam kebakaran 15 orang
   c. 24 orang Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk *assessment* dan evakuasi bencana
   d. 8 Tenaga Outsourscing yang terdiri :
      - tenaga kebersihan 2 orang
      - sopir pemadam kebakaran 6 orang
4. Penguatan kerjasama lintas sektoral
   Kerjasama lintas sektoral, baik dengan instansi pemerintah maupun swasta, telah di terapkan oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul untuk waktu yang lama. Antara lain kerjasama dengan Baznas Kabupaten Gunungkidul untuk penanganan rehab rekon rumah yang terdampak bencana.

Selain memperhatikan kebijakan nasional, rencana kerja BPBD Kabupaten Gunungkidul juga berusaha menselaraskan kebijakan di tingkat provinsi. Dimana sesuai dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka kebijakan penanggulangan D.I.Yogyakarta difokuskan untuk menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas, mengingat problem utama atau *root of the problem* dalam penanggulangan bencana adalah masih relatif tingginya kerentanan dan masih relatif rendahnya kapasitas, maka penyelenggaraan penanggulangan PB diarahkan pada penurunan kerentanan dan peningkatan kapasitas.

Masing-masing elemen pokok-pokok strategi dalam manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku koordinator, komando dan pelaksana penanggulangan bencana di daerah;

2. Penguatan kesiapsiagaan pada semua tingkatan masyarakat dan dunia usaha;
3. Membangun Sistim Peringatan Dini yang handal;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengurangan risiko bencana;
5. Mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana dalam rencana pembangunan daerah;
6. Perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu dan komprehensif;
7. APBD yang berperspektif pengurangan risiko bencana;
8. Mendayagunakan rencana tata ruang wilayah sebagai untuk mengurangi risiko bencana;
9. Menyusun regulasi penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan daerah;
10. Menyusun mekanisme, standar dan kerangka kerja penanggulangan bencana;
11. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yg memiliki kompetensi dalam penanggulangan becana;
12. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang handal;
13. Mengembangkan sistem informasi manajemen sumber daya penanggulangan bencana;
14. Melaksanakan penelitian, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
15. Mengkampanyekan budaya sadar bencana;
16. Membentuk dan mengembangan desa atau kelurahan tangguh bencana;
17. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam program pendidikan;
18. Membentuk forum multipihak dalam penanggulangan bencana;
19. Membangun jejaring dengan lembaga penanggulangan bencana;
20. Mengembangkan Sistem Komando Tanggap Darurat;
21. Melakukan review dan simulasi rencana konjitensi dan darurat bencana secara berkala
22. Pemulihan menjadi sebuah kesempatan membangun dengan lebih baik;
23. Mencari sumber daya, memperkuat aliansi-aliansi, dan memastikan keberlanjutan (*sustainability*) proses pemulihan.

Dari hasil sinkronisasi Visi RPJMN, dan RPJMD DIY, RPJMD Kabupaten Gunungkidul menetapkan visi *"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"* yang selanjutnya dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran daerah. Sedangkan misi kepala daerah tahun 2025-2029 antara lain: Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa. Dari sasaran-sasaran daerah kemudian dijadikan landasan penentuan strategi pembangunan dan arah kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 ditetapkan dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan lima tahun pertama sebagaimana digariskan dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul (RPJMD). Dimana RPJMD periode 2025-2029 diarahkan untuk pencapaian misi jangka panjang yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap

bencana. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka BPBD mendukung dalam pencapaian prioritas pemulihan infrastruktur, lingkungan dan peningkatan pengelolaan bencana dengan sasaran kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 dan Kajian Risiko Bencana 2022-2026, jenis bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah gempa bumi, gerakan tanah dan longsor, banjir, angin topan, kekeringan, gelombang pasang, tsunami.

Tujuan dan sasaran kinerja BPBD adalah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Sasaran daerah adalah Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat dengan strategi peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan indikator prosentase kalurahan tangguh bencana. Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dari sasaran tersebut dirumuskan tujuan yang ingin dicapai untuk tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari prioritas sasaran daerah yang dilaksanakan melalui program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana dan program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Tabel 3.1
Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026

No.	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (*outcome*)
1	Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA)

Selain Prioritas dan sasaran tugas pokok fungsi di atas BPBD juga mengampu prioritas reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan 1 (satu) sasaran meningkatnya akuntabilitas PD yang dicapai melalui program kegiatan kesekretariatan pada BPBD Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 3.2
Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan BPBD	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan BPBD Akhir Tahun 2030
1	Meningkatkan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,85

Tabel 3.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran BPBD	Indikator Sasaran	Target Sasaran BPBD Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA)	63,58

Dalam rangka pencapaian Tujuan Utama, BPBD telah menetapkan Indikator Tujuan Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 369/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Gunungkidul. Target, rumusan dan indikator kinerja utama pada BPBD tahun 2026 tersaji dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2026

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai Indeks Ketahanan Daerah	0,81
2	Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)	Persentase Kalurahan Tangguh Bencana terbentuk	63.58

Indikator kinerja utama tersebut dicapai dengan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD. Dalam mendukung indikator tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU), BPBD berkomitmen untuk melaksanakan peran strategisnya dengan tema pembangunan di tahun 2026 yaitu Penguatan pondasi pembangunan melalui peningkatan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana, dalam hal ini tertuang dalam kebijakan yang telah ditetapkan melalui rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan BPBD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana	1. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Meningkatkan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan, evakuasi korban bencana dan penanganan pasca bencana
		Meningkatkan layanan dan kapasitas serta kesiapsiagaan menuju ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan terhadap bencana, dan upaya pengurangan risiko bencana
			Meningkatkan kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung penanggulangan dan pengurangan risiko bencana
		Meningkatkan pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban.	a. Menambah dan meningkatan cakupan layanan WMK dalam pemadaman dan pengendalian kebakaran b. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Gunungkidul, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Gunungkidul, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Gunungkidul.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh BPBD dengan dukungan PD lain serta masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur.

Dasar dari rumusan program adalah sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Program juga dirumuskan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban. Guna mewujudkan Visi Kabupaten Gunungkidul tersebut telah ditetapkan misi-misi. BPBD Kabupaten Gunungkidul mendukung capaian Misi No 6 yaitu: Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029.

Maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, BPBD termasuk dalam prioritas meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan ketahanan warga terhadap bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi, pelestarian Kawasan lindung, perbaikan manajemen sampah, dan perluasan Kalurahan Tangguh Bencana.

Di samping program prioritas dan sasaran daerah dalam tugas pokok fungsi kelembagaan BPBD juga menjalankan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran dengan 4 (empat) indikator pencapaian target standar yang telah ditetapkan, dan 3 (tiga) Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Bencana. Program Kerja BPBD yang secara langsung mendukung tugas pokok dan fungsi pada tahun 2026 sebanyak 2 program yang dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan. Setiap program dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPBD. Keterkaitan prioritas, sasaran, tujuan dan program kegiatan yang ada pada BPBD

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana	Ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA)	63,58 persen	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.685.787.636	BPBD
					1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5.590.000,00	BPBD
					1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	5.590.000	BPBD
					1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	213.258.000	BPBD
					1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	8.212.000	BPBD
					1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	28.715.000	BPBD
					1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	140.673.000	BPBD
					1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	5.595.000	BPBD

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
					1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	255.900	BPBD
					1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	29.763.000	BPBD
					1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.328.477.000	BPBD
					1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.035.044.500	BPBD
					1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	1.152.500	BPBD
					1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	BPBD
					1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	192.280.000	BPBD
					1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	132.462.636	BPBD
					1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	5.690.000	BPBD
					1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2.725.000	BPBD
					1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	111.512.636	BPBD
					1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	10.260.000	BPBD

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
					1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	150.000	BPBD
					1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	2.125.000	BPBD
					1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	888.527.000	BPBD
					1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	863.761.400	BPBD
					1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	833.595.400	BPBD
					1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	30.166.000	BPBD
					1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.110.000	BPBD
					1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.110.000	BPBD
					1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	23.655.600	BPBD

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
					1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	3.940.000	BPBD
					1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	19.715.600	BPBD

Jumlah program pada penanggulangan bencana pada BPBD tahun 2026 sebanyak 2 (dua) program dan terbagi dalam 8 (delapan) kegiatan. Sesuai dengan prioritas dalam RPJMD penyebaran lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana diprioritaskan pada daerah rawan bencana di Kabupaten Gunungkidul.

Pada kegiatan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana untuk melaksanakan amanat dari SPM Penanggulangan bencana berupa pelayanan informasi potensi bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Pada kegiatan penanganan darurat bencana adalah pelaksanaan dari amanat SPM tentang pelayanan penyelamatan dan evakuasi bencana.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi juga mendapat alokasi program dan kegiatan yang didanai dari APBD DIY melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD DIY, Dana Keistimewaan, maupun dari APBN melalui kegiatan-kegiatan BNPB. Bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD DIY dan BNPB sejalan dengan program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul diantaranya adalah pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana, pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan Sosialisasi pengurangan risiko bencana, serta pengadaan sarana prasarana. Kerjasama tersebut sangat membantu BPBD dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Selain program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD juga melaksanakan program kegiatan yang secara tidak langsung mendukung pencapaian kinerja. Program Kegiatan ini dilakukan di sekretariat sebagai unsur pendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan adminitrasi perkantoran. Program-program pendukung itu kemudian dijabarkan dalam kegiatan dalam rangka fasilitasi kelancaran kegiatan melalui penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran, penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, pelaporan keuangan, perencanaan kinerja dan pelaporan sampai dengan evaluasi pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah. Program kegiatan dimaksud seperti tersaji dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi BPBD
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	SKPD
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.975.388.865	BPBD
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.046.900	BPBD
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.036.864.469	BPBD
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.181.000	BPBD
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.482.000	BPBD
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	5.824.000	BPBD

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	SKPD
	Pemerintah Daerah		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.150.396	BPBD
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.840.000	BPBD
Total		2.975.388.865	

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026, yang dilakukan oleh BPBD adalah dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur dasar dan peningkatan pengelolaan bencana yang kemudian ditetapkan sasaran daerah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat. Sasaran ini diukur dengan pencapaian indikator persentase kalurahan tangguh bencana yang sudah dibentuk. Sasaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sistem penanggulangan bencana yang terencana, integratif dan responsif meningkat dengan indikator sasaran persentase kejadian bencana tertangani.

Secara keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Rencana Kerja ini untuk tahun anggaran 2026 melaksanakan 3 (tiga) Program yang terbagi dalam 16 (enam belas) kegiatan. Total pagu indikatif pada BPBD tahun 2026 sebesar Rp 5.072.984.311. Terdapat 2 program yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana yang terbagi dalam 8 kegiatan. Sementara 8 kegiatan merupakan kegiatan pendukung kinerja yang dilaksanakan di sekretariat BPBD.

Program dan kegiatan ini telah sesuai dengan Rencana Strategis BPBD Tahun 2026-2029. Dengan perkembangnya waktu, nantinya akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan melalui rencana kerja untuk tahun 2026. Dimungkinkan terdapat pergeseran, penyesuaian indikator maupun anggaran yang merupakan hasil dari penyandingan dengan peraturan baru tentang nomenklatur, penyederhanaan, dan efisiensi anggaran sebagai upaya dalam efektifitas penggunaan anggaran dan penyesuaian kebutuhan operasional. Penyesuaian juga akan dilakukan atas hasil evaluasi rencana kerja dan kebutuhan agar lebih sederhana dan terukur.

Secara terinci rumusan rancangan awal RKPD Tahun 2026 disajikan dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**5.543.659.401,00**				**5.966.920.046,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.543.659.401,00**				**5.966.920.046,00**
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**5.543.659.401,00**				**5.966.920.046,00**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	-	**84.13**	**2.975.388.865,00**			**-**	**3.394.309.510,00**
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*			46.046.900,00			-	69.227.000,00
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	7 Dokumen	35.866.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			37.097.000,00
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	1 Dokumen	1.090.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.815.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	1 Dokumen	800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.815.000,00
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	2 Dokumen	1.480.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.000.000,00
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	2 Dokumen	1.030.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.200.000,00
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	16 Laporan	1.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.300.000,00
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	7 Laporan	4.080.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			18.000.000,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen administrasi Keuangan Daerah*			2.036.864.569,00			-	2.251.560.000,00
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	434 Orang/bulan	2.001.394.569,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.174.000.000,00
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	1 Laporan	33.490.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			29.560.000,00
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	13 Laporan	1.980.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			48.000.000,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Kepegawaian*			41.181.000,00			-	7.000.000,00
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	31.255.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000,00
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Orang	9.926.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Umum*			62.482.000,00			-	214.440.000,00
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	4 Paket	3.197.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.260.000,00
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	18 Paket	27.486.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	4 Paket	1.690.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.740.000,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	12 Paket	16.989.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.600.000,00
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.840.000,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	8.620.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			113.000.000,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*			5.824.000,00			-	246.440.200,00
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Unit	2.304.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			115.000.000,00
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	4 Unit	3.520.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			131.440.200,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			271.150.396,00			-	178.442.310,00
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	1 Laporan	150.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			200.000,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	96 Laporan	125.564.496,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			124.242.310,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	145.435.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			54.000.000,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*			511.840.000,00			-	427.200.000,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	340.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			337.200.000,00
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	30 Unit	250.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.000.000,00
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	3 Unit	166.670.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			37.000.000,00
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	1 Unit	220.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			45.000.000,00
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman	13 Unit	3.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.000.000,00
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase penanganan tanggap bencana darurat**		**100**	**1.679.743.536,00**			**-**	**1.765.931.036,00**
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Layanan Informasi Rawan Bencana*			5.590.000,00			-	28.750.000,00
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut	30 Orang	5.590.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			28.750.000,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*			213.213.900,00			-	751.528.400,00
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus	12 Unit	8.212.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			309.720.000,00
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								
		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	28.715.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			43.970.000,00
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Gunungkidul, Playen, Playen Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giriasih	3 Kawasan	140.673.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			177.430.000,00
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Orang	5.595.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.670.000,00
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	255.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			142.683.400,00
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Semin, Candirejo	2 Kawasan	29.763.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			62.055.000,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*			1.328.477.000,00			-	645.025.000,00
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	1.035.044.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			217.000.000,00
1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.152.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.370.000,00
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			156.690.000,00
1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana								
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	192.280.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			230.965.000,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Dokumen pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*			132.462.636,00			-	340.627.636,00
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.690.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			18.640.000,00
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana								

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.725.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.310.000,00
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kegiatan	111.512.636,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			208.562.636,00
1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.260.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			21.900.000,00
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota								
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			82.065.000,00
1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.125.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.150.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase kalurahan yang terbentuk Relawan Kebakaran**		**3.47**	**888.527.000,00**			**-**	**806.679.500,00**
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Dokumen layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah*			863.761.400,00			-	718.844.000,00
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	833.595.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			658.000.000,00
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran								
		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Orang	30.166.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			60.844.000,00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Laporan inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*			1.110.000,00			-	8.500.000,00
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	1.110.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.500.000,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Dokumen pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*			23.655.600,00			-	79.335.500,00
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat								

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	3.940.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran								
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Desa/Kelurahan	19.715.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			74.335.500,00
J U M L A H					**5.543.659.401,00**				**5.966.920.046,00**

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) BPBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 ini merupakan rancangan rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rancangan ini memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dan SPM Sub Urusan Kebakaran, Indikator Kinerja Utama Bupati dan BPBD, TPB/SDGs, Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten Gunungkidul yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, prioritas daerah, sasaran daerah, capaian indikator serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 disusun dengan pendekatan berdasarkan landasan hukum yang terkait.
2. Renja BPBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 memuat tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator kerja, sasaran program, target yang akan dicapai serta penganggaran dana.
3. Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPBD Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun Renja serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Pada Tahun 2026.

Dengan harapan hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat terealisasi dan memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana.

Salam Tangguh, Salam Siaga, Salam Kemanusiaan.

Wonosari,
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

PURWONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 Tahun 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Kapanewon Wonosari merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Dearah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan
b. Penyusunan rancangan awal
c. Penyusunan rancangan
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
e. Perumusan rancangan akhir
f. Penetapan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kapanewon Wonosari dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan UUD 1945 pasal 4 ayat 1, Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Panewu, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kapanewon dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kapanewon maka perencanaan tujuan kapanewon mendukung perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembanguna yang ingin dicapai pemerintah kapanewon bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kapanewon Wonosari memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Wonosari serta kerangka pendanaan daerah , Renja PD kapanewon secara substansial sesuai dengan visi dan misi dan rencana resmi daerah (RKPD,RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Derah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Dearah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2026 menyesuaikan urusan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru, serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja perangkat daerah, adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiran maju yang disusun dalam rancangan awal renja dengan rentra perangkat daerah.

4. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
5. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kapanewon Wonosari Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Wonosari dan Capaian Renstra Kapanewon Wonosari
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Wonosari
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Wonosari
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Wonosari dan Capaian Renstra Kapanewon Wonosari

Rencana Kerja Kapanewon Wonosari tahun 2024 sesuai DPA Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 telah teranggarkan sebesar Rp. 1.875.636.238,00 yang terdiri dari delapan program, enam belas kegiatan dan empat puluh delapan subkegiatan. Selanjutnya Kapanewon Wonosari mengalami pergeseran anggaran untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan adanya penambahan daya listrik, selain itu juga ada pergeseran karena adanya tambahan tunjangan hari raya untuk tenaga harian lepas. Sehubungan dengan hal tersebut Kapanewon Wonosari telah melakukan pergeseran anggaran sehingga pagu yang dikelola Kapanewon Wonosari menjadi sebesar Rp. 1.942.223.420,00.

Sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024 penyerapan anggaran mencapai Rp.344.122.589,00 (18,35%) dari target anggaran Rp.684.466.931,00 (36,49%), pengadaan bansos jamban dan septictank terkendala pada perubahan BNBA, kegiatan Hari Jadi ditargetkan pada triwulan II tetapi pelaksanaannya di triwulan IV serta pagu subkegiatan belanja gaji ASN jumlahnya melebihi dari kebutuhan gaji sampai dengan akhir tahun 2024. Oleh karena itu, dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 Kapanewon Wonosari perlu menyusun perubahan rencana kerja tahun 2024.

Dalam perubahan rencana kerja Kapanewon Wonosari Tahun 2024 untuk mendukung program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan penyesuaian penambahan mapun pengurangan target kinerja maupun pagu indikatif untuk menunjang penyelenggaran pelayanan. Adapun penyesuaian pagu digunakan untuk pelaksanaan Kirab Bregodo dalam rangka memperingati Hari Jadi Gunungkidul dan pengurangan pagu untuk kegiatan pemilihan lurah karena tahun 2024 ini tidak terlaksana mengikuti kebijakan dari pemerintah. Dokumen Perubahan DPA tahun 2024 telah ditetapkan dengan Nomor DPPA/A.6/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dengan total pagu sebesar Rp 1.942.223.420,00. Pada tahun anggaran

2024 Kapanewon Wonosari telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan, adapun realisasi anggaran tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Realiasasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Tahun Anggaran 2024 Kapanewon Wonosari

No.	Program/kegiatan/subkegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)	Capaian Fisik (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	100.000.000	100,00	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	100.000.000	100,00	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000,00	100,00	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	11.9895.000	11.9895.000	100,00	100
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	11.9895.000	11.9895.000	100,00	100
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	11.9895.000	11.9895.000	100,00	100
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.473.794.520	1.453.621.451	98,63	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.355.000	7.355.000	100,00	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.170.000	3.170.000	100,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	990.000	990.000	100,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	375.000	375.000	100,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	400.000	400.000	100,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	300.000	300.000	100,00	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.120.000	1.120.000	100,00	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	100,00	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.268.042.470	1.258.395.269	99,23	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.262.642.470	1.252.995.269	99,23	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	500.000	100,00	100

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	100
	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	5.250.900,00	4.248.288,00	80,90	100
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.250.900,00	4.248.288,00	80,90	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.995.500,00	23.995.500,00	100,00	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.264.500,00	2.264.500,00	100,00	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.781.000,00	12.781.000,00	100,00	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.062.000,00	2.062.000,00	100,00	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.038.000,00	3.038.000,00	100,00	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.500.000,00	6.400.000,00	98,46	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.103.650,00	61.723.474,00	86,80	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.940.550,00	6.140.620,00	88,47	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.620.600,00	35.682.234,00	81,80	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.542.500,00	19.900.620,00	96,87	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.547.000,00	91.503.920,00	99,95	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.900.000,00	43.878.800,00	99,95	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000,00	4.060.000,00	100,00	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.687.000,00	42.665.120,00	99,94	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900,000,00	900.000,00	100,00	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	69.582.500,00	67.161.020,00	98,73	100
	Koordinasi Penyeleggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.550.000,00	10.550.000,00	100,00	100
	Koordinasi/SinergiPerencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.550.000,00	10.550.000,00	100,00	100

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	59.032.500,00	56.611.020,00	95,89	100
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	32.085.000,00	30.425.400,00	94,82	100
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.947.500,00	26.185.620,00	97,17	100
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.229.000,00	37.229.000,00	99,93	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.100.000,00	27.100.000,00	99,92	100
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	20.100.000,00	20.100.000,00	100,00	100
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.129.000,00	10.129.000,00	100,00	100
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.209.000,00	7.209.000,00	100,00	100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	100
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.260.000,00	6.260.000,00	100,00	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.260.000,00	6.260.000,00	100,00	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.260.000,00	2.260.000,00	100,00	100
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.000.000	4.000.000	100,00	100
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	112.100.000,00	112.100.000,00	100,00	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	112.100.000,00	112.100.000,00	100,00	100
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000	100.000.000	100,00	100

	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan	1000.000	1.000.000,00	100,00	100
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	100
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.362.400,00	20.910.000,0	89,50	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.362.400,00	20.910.000,0	89,50	100
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.345.000,00	4.345.000,00	100,00	100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.702.400,00	3.250.000,00	56,99	100
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.015.000,00	2.015.000,00	100,00	100
	Total	**1.942.223.420,00**	**1.917.176.471,00**	**98,71**	**100**

Secara umum realisasi capaian program dan kegiatan Kapanewon Wonosari telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tidak ada realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
b. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 secara keseluruhan telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
c. Tidak ada realiasi program dan kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan.
d. Faktor-faktor terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2024 adalah komitmen dan kerja keras yang dilakukan Kapanewon Wonosari untuk memastikan pencapain kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan.
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD antara lain Alokasi anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan, Adanya regulasi/kebijakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kegiatan harus menyesuaikan kebijakan.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang diperkirakan akan memengaruhi upaya pencapaian target kinerja adalah berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten agar pelaksanaan program/kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan, serta berkoordinasi dengan TAPD terakait alokasi anggaran terealisasi sesuai dengan usulan yang ada.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Wonosari Tahun 2024, disajikan dalam tabel. 2.2. sebagai berikut:

Tabel.2.2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON WONOSARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik**														
7.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana*	*NA*	*dokumen*	*26*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	NA	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*
		Indeks perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	*4,286*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*4,286*	*Indeks*	*4,286*	*Indeks*	100	*4,286*	*Indeks*	*4,286*	*Indeks*	*100*
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	NA	*dokumen*	1	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	*NA*
		Jumlah dokumen Renja perubahan	NA	*dokumen*	1	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	*NA*
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	*dokumen*	NA	*dokumen*	2	*dokumen*	2	*dokumen*	100	2	*dokumen*	2	*dokumen*	*100*
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	NA	*dokumen*	1	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	*NA*

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	*dokumen*	NA	*dokumen*	1	*dokumen*	1	*dokumen*	100	1	*dokumen*	1	*dokumen*	*100*
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	NA	*dokumen*	1	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	*NA*
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	*dokumen*	NA	*dokumen*	1	*dokumen*	1	*dokumen*	100	1	*dokumen*	1	*dokumen*	*100*
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	NA	*dokumen*	1	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	*NA*
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	NA	*dokumen*	1	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	*NA*
		Jumlah dokumen ROPK	NA	*dokumen*	1	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	*NA*
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	3	*dokumen*	NA	*dokumen*	3	*dokumen*	3	*dokumen*	100	3	*dokumen*	3	*dokumen*	*100*
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	NA	*dokumen*	1	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	*NA*
		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	NA	*dokumen*	1	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	*NA*
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	*dokumen*	NA	*dokumen*	2	*dokumen*	0	*dokumen*	0	2	*dokumen*	2	*dokumen*	*100*

7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	*laporan*	NA	*laporan*	17	*laporan*	12	*laporan*	71	17	*laporan*	17	*laporan*	*100*
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP	NA	*dokumen*	1	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	*NA*
		Jumlah laporan e monev	NA	*dokumen*	4	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	*NA*
		Jumlah Laporan Teppra	NA	*dokumen*	12	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	NA	NA	*dokumen*	NA	*dokumen*	*NA*
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	*dokumen*	NA	*dokumen*	4	*dokumen*	2	*dokumen*	50	4	*dokumen*	4	*dokumen*	*100*
7.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu*	*NA*	*dokumen*	*14*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	NA	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*
		Indeks adminitrasi keuangan perangkat daerah	*79,333*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*79.333*	*Indeks*	*79,333*	*Indeks*	0	*79,333*	*Indeks*	*79,333*	*Indeks*	*100*
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	14	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	14	bulan	14	bulan	*100*
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	bulan	NA	bulan	14	bulan	9	bulan	64	224	bulan	224	bulan	*100*
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	NA	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	NA	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	1	laporan	*100*
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	NA	dokumen	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	NA	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	laporan	NA	laporan	13	laporan	10	laporan	77	13	laporan	13	laporan	*100*
7.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian*	*NA*	*orang*	*11*	*orang*	*NA*	*orang*	*NA*	*orang*	NA	*NA*	*orang*	*NA*	*orang*	*NA*
		Jumlah Administrasi kepegawaian perangkat daerah	*6*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*6*	*dokumen*	*6*	*dokumen*	100	*6*	*dokumen*	*6*	*dokumen*	*100*
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	NA	orang	11	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	*NA*
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dokumen	NA	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	NA	6	dokumen	6	dokumen	*100*
7.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi*	*NA*	*paket*	*5*	*paket*	*NA*	*paket*	*NA*	*paket*	NA	*NA*	*paket*	*NA*	*paket*	*NA*
		Indeks Administrasi Umum Perangkat daerah	*58,833*	*indeks*	*NA*	*indeks*	*58,83*	*indeks*	*58,333*	*indeks*	*58,333*	*58,833*	*indeks*	*58,833*	*indeks*	*100*

7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	NA	paket	4	paket	NA	paket	NA	paket	NA	NA	paket	NA	paket	*NA*
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	NA	paket	4	paket	3	paket	75	4	paket	4	paket	*100*
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	NA	paket	12	paket	NA	paket	NA	paket	NA	NA	paket	NA	paket	*NA*
		Jumlah laptop yang terbeli	NA	unit	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	NA	unit	*NA*
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	paket	NA	paket	13	paket	10	paket	77	13	paket	13	paket	*100*
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	NA	paket	12	paket	NA	paket	NA	paket	NA	NA	paket	NA	paket	*NA*
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket	NA	paket	12	paket	9	paket	75	12	paket	12	paket	*100*
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	NA	bendel	20	bendel	NA	bendel	NA	bendel	NA	NA	bendel	NA	bendel	*NA*
		Jumlah lembar penggandaan	NA	lembar	4800	lembar	NA	lembar	NA	lembar	NA	NA	lembar	NA	lembar	*NA*
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	NA	paket	12	paket	12	paket	100	12	paket	12	paket	*100*

7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	NA	bulan	12	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	NA	bulan	NA	bulan	*NA*
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	248	dokumen	NA	dokumen	248	dokumen	248	dokumen	NA	248	dokumen	248	dokumen	*100*
7.01.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	laporan	NA	laporan	9	laporan	6	laporan	67	9	laporan	9	laporan	*100*
7.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana*	*NA*	*jenis*	*2*	*jenis*	*NA*	*jenis*	*NA*	*jenis*	NA	*NA*	*jenis*	*NA*	*jenis*	*NA*
		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	*5*	*unit*	*NA*	*unit*	*5*	*unit*	*5*	*unit*	100	*5*	*unit*	*5*	*unit*	*100*
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sound system yang terbeli	NA	paket	1	paket	NA	paket	NA	paket	NA	NA	paket	NA	paket	*NA*
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	NA	unit	1	unit	1	unit	100	1	unit	1	unit	*100*
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terbeli	NA	Unit	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	*NA*
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	NA	unit	4	unit	4	unit	100	4	unit	4	unit	*100*
7.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana*	*NA*	*layanan*	*3*	*layanan*	*NA*	*layanan*	*NA*	*layanan*	NA	*NA*	*layanan*	*NA*	*layanan*	*NA*

		Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	*60*	*laporan*	*NA*	*laporan*	*60*	*laporan*	*60*	*laporan*	NA	*60*	*laporan*	*60*	*laporan*	*100*
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah hari terfasilitasinya pengadministrasian surat menyurat	NA	hari	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	NA	hari	*NA*
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	NA	Laporan	12	Laporan	9	Laporan	75	12	Laporan	12	Laporan	*100*
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar (1 rekening X 12 Bulan)	NA	rekening	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	rekening	NA	rekening	*NA*
		Jumlah rekening air yang terbayar	NA	rekening	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	rekening	NA	rekening	*NA*
		Jumlah rekening telephone yang terbayar	NA	rekening	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	rekening	NA	rekening	*NA*
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	NA	laporan	36	laporan	27	laporan	75	36	laporan	36	laporan	*100*
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah hari terfasilitasinya kebersihan kantor.	NA	hari	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	NA	hari	*NA*
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	NA	laporan	12	laporan	12	laporan	NA	12	laporan	12	laporan	*100*
7.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana*	*NA*	*layanan*	*4*	*layanan*	*NA*	*layanan*	*NA*	*layanan*	NA	*NA*	*layanan*	*NA*	*layanan*	*NA*

		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	*160*	*unit*	*NA*	*unit*	*160*	*unit*	*160*	*unit*	100	*160*	*unit*	*160*	*unit*	*100*
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	NA	unit	1	unit	NA	unit	0	unit	NA	NA	unit	NA	unit	*NA*
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	NA	paket	4	paket	NA	paket	NA	paket	NA	NA	paket	NA	paket	*NA*
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	NA	unit	10	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	NA	unit	*NA*
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	NA	paket	4	paket	NA	paket	NA	paket	NA	NA	paket	NA	paket	*NA*
		Jumlah BBM Kendaraan dinas roda dua dan roda empat.	NA	liter	250	liter	NA	liter	NA	liter	NA	NA	liter	NA	liter	*NA*
7.01.01.2.09.0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165	unit	NA	unit	165	unit	128	unit	78	165	unit	165	unit	*100*
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	NA	unit	4	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	NA	unit	*NA*
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	NA	iunit	3	iunit	NA	iunit	NA	iunit	NA	NA	iunit	NA	iunit	*NA*
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	NA	unit	4	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	NA	unit	*NA*

		Jumlah sound system yang terfasilitasi pemeliharaannya.	NA	unit	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	NA	unit	*NA*
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	unit	NA	unit	12	unit	7	unit	58	12	unit	12	unit	*100*
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	NA	paket	1	paket	NA	paket	NA	paket	NA	NA	paket	NA	paket	*NA*
		Jumlah hari terfasilitasinya keamanan gedung kantor.	NA	Hari	365	Hari	NA	Hari	NA	Hari	NA	NA	Hari	NA	Hari	*NA*
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	NA	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	1	laporan	*100*
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terfasilitasi pemeliharaannya.	NA	unit	4	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	NA	unit	*NA*
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	NA	unit	4	unit	4	unit	100	4	unit	4	unit	*100*
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP/SPIP	NA	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*
		Jumlah dokumen SKM	NA	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*
		Jumlah dokumen SOP	NA	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	0	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana**														
7.01.02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksana.*	*NA*	Layanan	*1*	layanan	*NA*	layanan	*NA*	layanan	NA	*NA*	layanan	*NA*	layanan	*NA*
		Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	*15*	*laporan*	*NA*	*laporan*	*15*	*laporan*	*15*	*laporan*	100	*15*	*laporan*	*15*	*laporan*	*100*
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah cabang olahraga yang dibina	NA	cabor	3	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	NA	cabor	NA	cabor	*NA*
		Jumlah kesepakatan dan pelestarian pengembangan budaya	NA	kesepakatn	4	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	*NA*
		Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan	NA	kelompok	5	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	kelompok	NA	kelompok	*NA*
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul	NA	kesepakatn	4	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	*NA*
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15	laporan	NA	laporan	15	laporan	15	laporan	100	15	laporan	15	laporan	*100*
7.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terlaksana.*	*NA*	*Layanan*	*2*	*layanan*	*NA*	*layanan*	*NA*	*layanan*	NA	*NA*	*layanan*	*NA*	*layanan*	*NA*

		Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	*19*	*laporan*	*NA*	*laporan*	*19*	*laporan*	*19*	*laporan*	100	*19*	*laporan*	*19*	*laporan*	*100*
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	NA	kesepakatn	4	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	*NA*
		Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB	NA	kesepakatn	4	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	*NA*
		Jumlah dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial	NA	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*
		Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK	NA	kesepakatn	4	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	*NA*
		Jumlah septic tank untuk kk miskin (PIWK)	NA	KK	47	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	NA	KK	*NA*
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5	laporan	NA	laporan	5	laporan	5	laporan	100	5	laporan	5	laporan	*100*
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	NA	layanan	1500	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	NA	layanan	*NA*
		Jumlah peserta pembinaan /koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum	NA	orang	10	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	*NA*
		Jumlah peserta sosialisasi pengurusan ijin UMK	NA	orang	10	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	*NA*

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	NA	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100	3	Laporan	3	Laporan	*100*
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi**														
7.01.03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terfasilitasi*	*NA*	*layanan*	*2*	*layanan*	*NA*	*layanan*	*NA*	*layanan*	NA	*NA*	*layanan*	*NA*	*layanan*	*NA*
		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*9,5*	*indeks*	*NA*	*indeks*	*9,5*	*indeks*	*9,5*	*indeks*	100	*9,5*	*indeks*	*9,5*	*indeks*	*100*
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan RPJMDesa dan RKPDes	NA	desa	14	desa	NA	desa	NA	desa	NA	NA	desa	NA	desa	*NA*
		Dokumen usulan musrenbang	NA	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*
		jumlah bimtek perencanaan pembangunan kalurahan terselenggara (PIWK)	NA	kali	2	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	*NA*
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15	dokumen	NA	dokumen	15	dokumen	15	dokumen	100	15	dokumen	15	dokumen	*100*
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang meningkat kapasitasnya	NA	orang	14	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	*NA*
		Jumlah profil desa dan kecamatan tersusun	NA	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*

		terlaksananya pembinaan perencanaan pembangunan desa secara aplikasi	NA	orang	14	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	*NA*
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	NA	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	4	Laporan	*100*
7.01.03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon terfasilitasi*	*NA*	*Lembaga*	*2*	*Lembaga*	*NA*	*Lembaga*	*NA*	*Lembaga*	NA	*NA*	*Lembaga*	*NA*	*Lembaga*	*NA*
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*1,5*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*1,5*	*Indeks*	*1,5*	*Indeks*	100	*1,5*	*Indeks*	*1,5*	*Indeks*	*100*
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	NA	kesepakatn	4	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	*NA*
		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna	NA	kesepakatn	4	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	*NA*
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Lembaga kemasyarakatan	NA	Lembaga kemasyarakatan	2	Lembaga kemasyarakatan	2	Lembaga kemasyarakatan	100	2	Lembaga kemasyarakatan	2	Lembaga kemasyarakatan	*100*
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	NA	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	*NA*
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	NA	kelompok	2	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	kelompok	NA	kelompok	*NA*
		jumlah industri kecil/rumah tangga yang meningkat pengetahuannya	NA	orang	10	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	*NA*

		jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	laporan	NA	laporan	3	laporan	3	laporan	100	3	laporan	3	laporan	*100*
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi**														
7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*jumlah safari tarawih tingkat Kecamatan yang terlaksana.*	*NA*	*kali*	*1*	*kali*	*NA*	*kali*	*NA*	*kali*	NA	*NA*	*kali*	*NA*	*kali*	*NA*
		Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*1*	*laporan*	*NA*	*laporan*	*1*	*laporan*	*1*	*laporan*	100	*1*	*laporan*	*1*	*laporan*	*100*
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat kecamatan	NA	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	*NA*
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	laporan	NA	laporan	1	laporan	1	laporan	NA	1	laporan	1	laporan	*100*
7.01.04.2.02	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi.*	*NA*	*layanan*	*1*	*layanan*	*NA*	*layanan*	*NA*	*layanan*	NA	*NA*	*layanan*	*NA*	*layanan*	*NA*
		Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*1*	*laporan*	*NA*	*laporan*	*1*	*laporan*	*1*	*laporan*	100	*1*	*laporan*	*1*	*laporan*	*100*
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan	NA	kesepakatn	4	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	*NA*

		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	laporan	NA	laporan	1	laporan	1	laporan	NA	1	laporan	1	laporan	*100*
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi**														
7.01.05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi*	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*26,333*	*indeks*	*NA*	*indeks*	*26,33*	*indeks*	*26,333*	*indeks*	100	*26,333*	*indeks*	*26,333*	*indeks*	*100*
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah paskib kecamatan yang dibentuk dan dilatih	NA	orang	8	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	*NA*
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan P	70	orang	NA	orang	70	orang	70	orang	100	70	orang	70	orang	*100*
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kesepakatan penanganan perempuan dan anak korban KDRT	NA	kesepakatn	4	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	*NA*

		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	laporan	NA	laporan	4	laporan	4	laporan	100	4	laporan	4	laporan	*1,00*
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kesepakatan Koordinasi FORKOMPIMCA	NA	kesepakatn	4	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	NA	NA	kesepakatn	NA	kesepakatn	*NA*
		Jumlah laporan hasil patroli bersama	NA	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokumen	NA	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	100	5	dokumen	5	dokumen	*100*
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana**														
7.01.06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana*	*NA*	*Layanan*	*6*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*
		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*45*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*45*	*dokumen*	*45*	*dokumen*	100	*45*	*dokumen*	*45*	*dokumen*	*100*
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan penyusunan produk hukum desa	NA	kali	10	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	*NA*
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	dokumen	NA	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	1	dokumen	*100*
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan pemerintahan desa	NA	kali	4	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	*NA*

		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	NA	kali	4	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	*NA*
		Jumlah monografi kalurahan dan kapanewon yang tersusun	NA	dokumen	30	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34	dokumen	NA	dokumen	34	dokumen	0	dokumen	0	34	dokumen	34	dokumen	*100*
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBDes	NA	kali	2	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	*NA*
		Frekuensi monev pengelolaan keuangan kalurahan	NA	kali	2	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	*NA*
		Penyusunan dokumen siklus tahunan desa	NA	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*
		Jumlah bimtek pengelolaan keuangan desa terselenggara (PIWK).	NA	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	*NA*
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	dokumen	NA	dokumen	5	dokumen	3	dokumen	60	5	dokumen	5	dokumen	*100*
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pamong Kalurahan yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	NA	Orang	14	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	*NA*
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	dokumen	NA	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	1	dokumen	1	dokumen	*100*

7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	dokumen	NA	dokumen	2	dokumen	0	dokumen	0	2	dokumen	2	dokumen	*100*
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Linmas yg diharapkan meningkat pengetahuannya.	NA	orang	10	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	*NA*
		Jumlah satgas siaga bencana yang meningkat kemampuannya	NA	orang	10	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	*NA*
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Dokumen	NA	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	Dokumen	*100*
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan**														
		Jumlah Adat,Seni,Tradisi dan Lembaga Budaya	*1*	*laporan*	*NA*	*laporan*	*1*	*laporan*	*1*	*laporan*	100	*1*	*laporan*	*1*	*laporan*	*100*
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan hari kesitimewaan DIY.	NA	Event	0	Event	NA	Event	NA	Event	NA	NA	Event	NA	Event	*NA*
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	1	laporan	NA	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	1	laporan	*100*
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan.**														
4.01.04.5.01	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan di Kalurahan yang tersusun.*	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	NA	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*

		Jumlah Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan dikalurahan yang tersusun	*2*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*2*	*dokumen*	*1*	*dokumen*	50	*2*	*dokumen*	*2*	*dokumen*	*100*
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kalurahan yang didampingi	2	dokumen	NA	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	50	2	dokumen	2	dokumen	*100*
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan di Kalurahan. Rencana Program Kegiatan Keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024.	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	*NA*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Wonosari mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kapanewon Wonosari sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, di samping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Wonosari merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan setrategis Pemerintah. Adapun tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah Kapanewon Wonosari. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui pelayananan satu pintu/pelayanan terpadu di Kapanewon, jenis layanan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Surat Izin Keramaian
2. Pelayanan BPJS
3. Pelayanan SKTM
4. Pelayanan SKCK
5. Pelayanan waris
6. Surat pernyataan beda nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir
7. Pelayanan pinjaman perangkat daerah
8. Pelayanan pengajuan proposal
9. Surat keterangan tunjangan keluarga/KP4
10. Rekomendasi Pelaksanaan Nikah Karena Dilaksanakan Kurang Dari 10 Hari Setelah Pendaftaran
11. Pengelolaan Pengaduan Pada Penyelenggara Pelayanan Publik

Indikator kinerja utama kapanewon ditetapkan oleh Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021, salah satu upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas kinerja kapanewon perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon tahun 2026.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Wonosari Kabupaten gunungkidul disajikan dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Wonosari
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
									Capaian Target Renstra PD		
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	84,64	84,67	84,70	84,73	84,64	84,67	84,70	84,73	
2.	Nilai AKIP	Nilai	80.08	81,01	81,04	81,07	80.08	81,01	81,04	81,07	
3.	Jumlah Potensi Budaya	Potensi Budaya	2	2	2	2	2	2	2	2	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Peragkat Daerah Kecamatan/Kapanewon Wonosari.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kapanewon Wonosari telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kapanewon Wonosari. Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berisi uraian sebagai berikut:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kapanewon Wonosari antara lain:
   a. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada tingkat kapanewon maupun kalurahan sehingga memengaruhi kinerja dan pelayanan tugas pokok yang kurang maksimal
   b. Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi tentang pengentrian data-data terkait data pamong kalurahan/lembaga terkait.
   c. Pemahaman dan pengendalian SOP pelayanan di kalurahan-kalurahan belum optimal karena masih ada permohonan yang persyaratannya belum lengkap.
   d. Adanya perubahan regulasi/peraturan yang akan memengaruhi proses perencanaan di kapanewon dan kalurahan, pekerjaan dapat terselesaikan tetapi tidak tepat waktu.
   e. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke kapanewon dan kalurahan
   f. Angka kemiskinan masih perlu ditangani, data kemiskinan kurang valid karena adanya perbedaan data BNBA miskin antara pusat, daerah dan realita lapangan serta indikator kemiskinan sering berubah/kriteria penerima bantuan berubah.
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Dearah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*).

   Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026-2030 adalah ”Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

   Dalam upaya pencapaian visi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2026-2030 yang meliputi :

a. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri
b. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani
c. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif
d. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
e. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban
f. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur Bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

a. Isu strategis nasional
   - Demokrasi dan hak asasi manusia
   - Kemandirian melalui swasembada pangan, air dan energi
   - Pengembangan infrastruktur
   - Memperkuat daya saing SDM
   - Hilirisasi dan pengembangan industri berbasis SDA
   - Membangun dari desa
   - Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata kelola
   - Kehidupan yang harmonis dengan alam, lingkungan dan budaya
b. Isu strategis Daerah Istimewa Yogyakarta
   - Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
   - Pengembangan wilayah selatan DIY
   - Perkembangan teknologi informasi
   - Pemenuhan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif

- Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- Penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik
- Penyelesaian destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta – Prambanan
- Penguatan ketahanan pangan
- Pelestarian dan pengelolaan budaya
- Penguatan resiliensi dan manajemen bencana, serta pembangunan berkelanjutan
- Penguatan kapasitas fiskal
- Pengembangan ekonomi kreatif termasuk ekonomi digital

c. Isu strategis daerah

- Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
- Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
- Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
- Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas,cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
- Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2026-2030 adalah “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub

7. Program Alam Lestari

Adapun prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Wonosari adalah Reformasi Birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat serta prioritas peningkatan ekonomi dengan sasaran daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat.

Mendasar tugas pokok Kapanewon Wonosari, fungsi yang diemban oleh Kapanewon Wonosari adalah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;

- Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Tugas dan fungsi Kapanewon Wonosari terkait dengan visi dan misi daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Wonosari dapat mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan publik.

Pemerintah Kapanewon Wonosari sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat agar tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat termasuk sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Wonosari. Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Wonosari beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi Kapanewon Wonosari antara lain:

- Jumlah sumber daya manusia yang terbatas;
- Kapanewon sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kapanewon hanya sebatas pengelolaa gaji pegawai dan biaya operasional Kapanewon. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui perangkat daerah terkait.
- Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- Kondisi sosial masyarakat dan Kalurahan yang cukup beragam
- Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir tindak dari masyarakat
- Permohonan KK dan KTP di wilayah Kapanewon Wonosari cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya satu (1) orang maka diperlukan kerja ekstra untuk mencukupi target tersebut
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut kapanewon untuk responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Tingginya angka kemiskinan, daerah perbatasan yang rawan konflik
- Infrastruktur Pedesaan yang kurang baik (Jalan, Jembatan, Drainase)
- Kurangnya Akses Teknologi Pertanian, Peternakan,Perindustrian/ Kerajinan, Permodalan, dan Pemasaran produk
- Kurangnya Akses Air Bersih, Pendidikan, dan kesehatan

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan Kapanewon Wonosari antara lain:

- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kapanewon, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kapanewon Wonosari dengan Forkompimka, Dinas Instansi, Korwil, lurah dan pamong kalurahan, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan , keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi.

- Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

   Selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Wonosari yaitu:

   a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
   b. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan
   c. Kemampuan keuangan relatif terbatas
   d. Masih banyaknya jumlah masyarakat miskin
   e. Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/menengah
   f. Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimal.

   Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah tahun 2026-2030 maka Kapanenewon Wonosari berperan aktif dalam perumusan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. Adapun program yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

   - Program Penyeleggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   - Program Penyeleggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan inspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD telah dilakukan melalui musyawarah mulai dari tingkat kalurahan, kapanewon dan kabupaten dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kapanewon Wonosari berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah pagu pendanaannya.

Dalam reviu terhadap Rencana Kerja Kapanewon Wonosari Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan terdapat point-point sebagai berikut:

1. Proses pertama yang dilakukan adalah membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Total pagu Kapanewon Wonosari pada rancangan awal sebesar Rp 1.733.696.054,00 Sesuai dengan SE Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 besaran pagu untuk Kapanewon Wonosari sebesar Rp.1.733.696.054,00 yang terdiri dari anggaran DAU sebesar 400.000.000,00 dan anggaran PIWK sebesar Rp 26.210.000,00, gaji ASN sebesar Rp. 1.307.486.054. Untuk pagu DAIS dan THL masih menungu ketetapan dari Pemerintah Daerah.
2. Alasan dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan adalah untuk mengetahui kebutuhan riil dari Kapanewon Wonosari, salah satunya dengan menyesuaikan Program, Kegiatan, subkegiatan dan indikator subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan pagu anggaran.

3. Proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan menghasilkan adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD yaitu untuk program yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta, Anggaran gaji maupun THL belum ada anggarannya di tahapan ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, bagian ini diuraiakan dalam kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Asosiasi-asosiasi, pergurunan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun hasil informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kalurahan maupun kapanewon. Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/lingkungan yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum musrenbangkal.
2. Hasil musrenbang Kapanewon merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu isu penting dari masing masing SKPD yang ada. Kegiatan musrenbang kapanewon yang telah disepakati antara lain dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial berupa jamban dan septictank kepada kk miskin, dalam bidang ekonomi menyelenggarakan bimtek perencanaan pembangunan kalurahan dan bimtek pengelolaan keuangan kalurahan.
3. Kedepan kamus usulan sudah ada sehingga pada saat pelaksanaan musrenbangkal semua usulan program kegiatan yang ada di kalurahan bisa terakomodir sesuai kegiatan yang direncanakan, sehingga terjadi sinkronisasi data antara usulan pemerintah kalurahan, kapanewon dan kabupaten.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisine/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) – Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Kapanewon Wonosari	Jumlah Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Terselenggara	1 kali	4.460.000	4.460.000	Diterima
2	(PIWK) – Sosialisasi calon pengantin (Catin)	Kapanewon Wonosari	Jumlah Sosialisasi calon pengantin (Catin)	1 angkatan	3.150.000	3.150.000	Diterima
3	(PIWK) Pelatihan Perencanaan pembangunan di Desa	Semenrejo 01/02, Pulutan, Wonosari	Jumlah Pelatihan Perencanaan pembangunan di Desa	1 Kali`	18.600.000	18.600.000	Diterima

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional tentang kapanewon tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Sedangkan Kapanewon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019,yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Wonosari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2026 Kapanewon Wonosari juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari adanya dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan menggambarkan hal hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional dan kegiatan pokok yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun penjabaran sasaran daerah kedalam sasaran Perangkat Daerah dalam format sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan Pembangunan Kapanewon Wonosari

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	2	3	4
	Tujuan :		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	84,73

Tabel 3.2

Sasaran Pembangunan Kapanewon Wonosari

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2026
1	2	3	4
	Sasaran :		
1.	Dokumen keuangan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepatÂ Waktu	100
3.	Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4.	Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.53%

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Wonosari

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Targrt Kinerja IKU
1	2	3	4
Tujuan			
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	84,73
Sasaran			
1.	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
		Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,53

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan rancangan Renja Kapanewon Wonosari Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Wonosari meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON WONOSARI

Perencanaan Kinerja Kapanewon Wonosari tahun 2026 mendasar pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 – 2030 yaitu terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat tahun 2026. Oleh karena itu rencana kinerja tahun 2026 diprioritaskan pada kegiatan pembinaan atau fasilitasi kalurahan, kegiatan PIWK, penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan STOP BABS atau jamban sehat, evaluasi APBKal dan RKPKal, koordinasi penanggulangan kemiskinan serta koordinasi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

4.1. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan yaitu:

1. Sebagai konsekuensi untuk merealisasikan program/kegiatan Kapanewon Wonosari dalam rangka mendorong visi dan misi Bupati Kepala Daerah.
2. Prioritas pembangunan, dalam hal ini prioritas Kapanewon Wonosari adalah reformasi birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat, serta prioritas peningkatan ekononomi dengan sasaran daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat.
3. Pengurangan kemiskinan dengan mengembangkan kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dengan meningkatkan ketrampilan dalam mengolah hasil bumi/pertanian menjadi produk bernilai tambah dan Peningkatan akses pemasaran melalui promosi produk.
4. Pencapaian IKU untuk tahun 2026-2030 dengan indikator kinerja utama “Indeks Pelayanan Kapanewon” yang formulasi perhitungannya menggunakan lima komponen yaitu persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu, persentase KK miskin yang tertangani, persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum, dan nilai indeks kepuasan masyarakat.
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dengan penumbuhan BUMKalurahan yang dapat menumbuhkan iklim usaha kecil yang produktif.

6. Melakukan program promosi kesehatan, dimana lebih diupayakan untuk membiasakan masyarakat melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.
7. Penyuluhan Keluarga Berencana bagi semua warga, kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan usia dini.
8. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanakan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, baik di Pemerintahan Kalurahan maupun Kapanewon
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif.
10. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lainsebagai berikuti:

Berdasarkan Rancangan Program dan Kegiatan Kapanewon Wonosari Tahun 2026 terdiri dari 8 program , 16 kegiatan dan 48 subkegiatan dimana dalam pelaksanaanya kegiatan untuk difokuskan pada pelayanan masyarakat tersebar di wilayah Wonosari yang terdiri dari 14 kalurahan. Adapun total pagu Renja tahun 2026 sebesar Rp 2.776.976.646,00 sedangkan untuk perkiraan tahun 2027 sebesar Rp 2.115.253.194,00

Jumlah Prioritas Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kapanewon Wonosari tahun 2026 dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Prioritas Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan

Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
		3						
Pamong Nglayani & Ngayomi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,73 Indeks	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.624.081.246**	
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.919.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.050.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.445.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.615.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.525.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.159.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.509.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	616.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.363.879.646	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.357.119.646	KAPANEWON

								WONOSARI
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.760.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.100.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang milik Daerah pada SKPD	1.100.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.683.632	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.683.632	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.932.400	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.998.400	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.062.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.222.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.450.000	KAPANEWON

								WONOSARI
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	15.001.700	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.08.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.08.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.001.700	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.204.868	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	340.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.199.868	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.665.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.360.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.900.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4000.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.660.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**6.999.900**	

					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.999.900	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.999.900	KAPANEWON WONOSARI
		kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		KAPANEWON WONOSARI
					4.01.04.5.01.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan		
		kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**95.418.800**	
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.700.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	38.700.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.920.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**40.378.000**	
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.378.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.500.000	KAPANEWON WONOSARI

					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.150.800	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.485.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.999.700	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.530.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.212.500	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.500.000	KAPANEWON WONOSARI
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100 Persen	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**100.000.000,00**	
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	KAPANEWON WONOSARI
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**32.180.000**	
					7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	32.180.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32.180.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.375.000**	
		Meningkatnya Kesejahteraan	Persentase Kegiatan	100 Persen	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.375.000	KAPANEWON WONOSARI

		Sosial	Sosial		7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3.375.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**769.517.000**	
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	769.517.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	769.517.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**108.401.700**	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**108.401.700**	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.970.000	KAPANEWON WONOSARI
					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.431.700	KAPANEWON WONOSARI
					J U M L A H		**2.776.976.646**	

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, di Kapanewon Wonosari dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**1.328.331.310,00**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.919.000
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.050.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.445.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.615.000
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.525.000
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.159.000
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.509.000
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	616.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.363.879.646
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.357.119.646
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.760.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.100.000
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.100.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.683.632
4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.683.632
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.932.400
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.998.400
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.062.000
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.222.000
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.450.000
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	15.001.700
6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.001.700
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.204.868
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	340.000
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.199.868
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.665.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.360.000
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.900.000
8.2	Pemeliharaan Mebel	500.000,00
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4000.000
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.660.000
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000
J U M L A H		**1.624.081.246**

Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp.2.776.976.646,00. Seluruhnya bersumber pada APBD Kabupaten Gunungkidul.

Program dan kegiatan Kapanewon Wonosari yang direncanakan melalui Renja Kapanewon Wonosari Tahun 2026 dan rencana maju di tahun 2027 secara rinci dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kapanewon Wonosari

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan PD dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	10	8	9	8	16	11	14	15	16
						Kapanewon Wonosari				2.776.976.646,00		2.115.253.194,00				2.115.253.194,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100.000.000,00		100.000.000,00				100.000.000,00
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00		100.000.000,00				100.000.000,00
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-		-	100.000.000,00	-	100.000.000,00			-	100.000.000,00
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-		-	100.000.000,00	-	100.000.000,00		-	-	100.000.000,00
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja										
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-		100.000.000,00
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				32.180.000,00		40.000.000,00				40.000.000,00
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				32.180.000,00		40.000.000,00				40.000.000,00
2	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-		-	32.180.000,00	-	40.000.000,00			-	40.000.000,00

	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-		-	32.180.000,00	-	40.000.000,00		-	-	40.000.000,00
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan										
							Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	32.180.000,00	2 Dokumen	40.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-		40.000.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.644.796.646,00		1.975.253.194,00				1.975.253.194,00
	7	01				KECAMATAN				2.644.796.646,00		1.975.253.194,00				1.975.253.194,00
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	1.624.081.246,00	-	1.681.748.729,00			-	1.681.748.729,00
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	12.919.000,00	-	14.303.000,00		-	-	14.303.000,00
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	4.050.000,00	2 Dokumen	4.050.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		4.050.000,00
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.445.000,00	1 Dokumen	1.445.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.445.000,00
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.615.000,00	1 Dokumen	1.615.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.615.000,00
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua	2 Dokumen	1.525.000,00	2 Dokumen	1.525.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.525.000,00

								Kel/Desa								
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.159.000,00	2 Dokumen	1.159.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.159.000,00
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	17 Laporan	2.509.000,00	17 Laporan	2.509.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2.509.000,00
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	4 Laporan	616.000,00	4 Laporan	2.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2.000.000,00
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	1.363.879.646,00	-	1.379.620.357,00		-	-	1.379.620.357,00
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	266 Orang/bulan	1.357.119.646,00	266 Orang/bulan	1.372.860.357,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.372.860.357,00
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.760.000,00	1 Laporan	1.760.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.760.000,00
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	13 Laporan	5.000.000,00	13 Laporan	5.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5.000.000,00

	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	1.100.000,00	-	1.210.000,00		-	-	1.210.000,00
	7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari	12 Dokumen	1.100.000,00	12 Dokumen	1.210.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.210.000,00
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	5.683.632,00	-	5.683.632,00		-	-	5.683.632,00
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5.683.632,00	6 Dokumen	5.683.632,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5.683.632,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	36.932.400,00	-	42.181.500,00		-	-	42.181.500,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	4 Paket	1.998.400,00	4 Paket	3.497.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3.497.500,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	12 Bulan Paket	18.000.000,00	12 Bulan Paket	22.165.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		22.165.000,00
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	12 Bulan Paket	2.062.000,00	12 Bulan Paket	3.997.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3.997.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	12 Bulan Paket	3.222.000,00	12 Bulan Paket	3.222.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3.222.000,00

	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	248 Dokumen	1.200.000,00	248 Dokumen	1.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.200.000,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	2.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2.100.000,00
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	12 Laporan	9.450.000,00	12 Laporan	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		6.000.000,00
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	15.001.700,00	-	38.150.000,00		-	-	38.150.000,00
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	1 Unit	18.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		18.650.000,00
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Unit	15.001.700,00	1 Unit	19.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		19.500.000,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	135.204.868,00	-	116.334.240,00		-	-	116.334.240,00
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	4 Laporan	340.000,00	4 Laporan	357.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		357.000,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	48 Laporan	43.199.868,00	48 Laporan	59.554.740,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		59.554.740,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	12 Laporan	91.665.000,00	12 Laporan	56.422.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		56.422.500,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	53.360.000,00	-	84.266.000,00		-	-	84.266.000,00
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	240 Unit	43.900.000,00	240 Unit	69.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		69.800.000,00
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	18 Unit	4.000.000,00	18 Unit	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		6.000.000,00
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Unit	3.660.000,00	1 Unit	6.666.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		6.666.000,00
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	7 Unit	1.800.000,00	7 Unit	1.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1.800.000,00
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		-	6.999.900,00	-	35.735.000,00			-	35.735.000,00

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-		-	6.999.900,00	-	35.735.000,00		-	-	35.735.000,00
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	12 Laporan	6.999.900,00	12 Laporan	35.735.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		35.735.000,00
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		-	95.418.800,00	-	98.795.740,00			-	98.795.740,00
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		-	48.700.000,00	-	47.508.000,00		-	-	47.508.000,00
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	17 Dokumen	38.700.000,00	17 Dokumen	37.508.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		37.508.000,00
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	15 Laporan	10.000.000,00	15 Laporan	10.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		10.000.000,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	40.423.800,00	-	42.444.990,00		-	-	42.444.990,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	18 Pokmas / Ormas	40.423.800,00	18 Pokmas / Ormas	42.444.990,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		42.444.990,00
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		-	2.920.000,00	-	5.299.000,00		-	-	5.299.000,00

	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	3 Laporan	2.920.000,00	3 Laporan	5.299.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		5.299.000,00
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-		-	3.375.000,00	-	3.543.750,00		-	-	3.543.750,00
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	70 Keluarga	3.375.000,00	70 Keluarga	3.543.750,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3.543.750,00
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-		-	769.517.000,00	-	9.380.000,00			-	9.380.000,00
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	769.517.000,00	-	9.380.000,00		-	-	9.380.000,00
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	16 Laporan	769.517.000,00	16 Laporan	9.380.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		9.380.000,00
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-		-	108.401.700,00	-	109.170.000,00			-	109.170.000,00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		-	108.401.700,00	-	109.170.000,00		-	-	109.170.000,00
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	75 Orang	99.970.000,00	75 Orang	99.970.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		99.970.000,00
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	8.431.700,00	4 Dokumen	9.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		9.200.000,00
8	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-		-	40.378.000,00	-	40.423.725,00			-	40.423.725,00
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		-	40.378.000,00	-	40.423.725,00		-	-	40.423.725,00
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	3.500.000,00	4 Dokumen	3.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3.500.000,00
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	3.150.800,00	30 Dokumen	3.150.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3.150.800,00
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	76 Dokumen	17.485.000,00	76 Dokumen	22.399.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		22.399.900,00
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa										
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.999.700,00	1 Dokumen	2.999.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2.999.800,00
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa										
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	7.530.000,00	2 Dokumen	2.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2.500.000,00
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa										
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	4 Dokumen Dokumen	3.212.500,00	4 Dokumen Dokumen	3.373.125,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3.373.125,00
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa										
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.500.000,00	2 Dokumen	2.500.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2.500.100,00
									J U M L A H	**2.776.976.646,00**		**2.115.253.194,00**				**2.115.253.194,00**

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan (PD) Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Renja Kapanewon Wonosari Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Daerah. Renja Kapanewon Wonosari disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Renja Kapanewon Wonosari yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD.

Renja Kapanewon Wonosari Tahun 2026 mencakup tiga bahasan antara lain catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Renja Kapanewon Wonosari telah dan akan selalu melibatkan peran *(stakeholder)* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *(stakeholder)* dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

5.2. Kaidah pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan *(stakeholders)*, tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana tindak lanjut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada

akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Tidak hanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan saja yang terlihat, namun tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Renja Kapanewon Wonosari Tahun 2026sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pembangunan.Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

`

Wonosari,
KAPANEWON WONOSARI

ttd

SUSTIWININGSING

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON PALIYAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Kapanewon Paliyan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Kapanewon Paliyan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Dokumen Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Paliyan, yang disusun berpedoman kepada Renstra Kapanewon Paliyan dan RKPD.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Dearah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan
b. Penyusunan rancangan awal
c. Penyusunan rancangan
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
e. Perumusan rancangan akhir
f. Penetapan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kapanewon Paliyan dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan UUD 1945 pasal 4 ayat 1, Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Panewu, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kapanewon dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kapanewon maka perencanaan tujuan kapanewon mendukung perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembanguna yang ingin dicapai pemerintah kapanewon bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kapanewon Paliyan memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Paliyan serta kerangka pendanaan daerah, Renja PD kapanewon secara substansial sesuai dengan visi dan misi dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, maka Bupati terpilih harus menyusun RPJMD tahun 2025-2029. Sejalan terhadap penyusunan RPJMD maka perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memuat visi dan misi Bupati terpilih, dan menjadi dasar penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2026.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan hasil evaluasi Renja tahun 2025 dimana hal tersebut dimaksud untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat optimal pencapaian sasaran Renstra Perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Paliyan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungi Serta tata Kerja Kapanewon;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2026 menyesuaikan urusan dan Susunan Perangkat Daerah, serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, adalah:

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiran maju yang disusun dalam rancangan awal renja dengan rentra perangkat daerah.
4. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
5. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kapanewon Paliyan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Paliyan dan Capaian Renstra Kapanewon Paliyan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Paliyan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Paliyan
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON PALIYAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Paliyan dan Capaian Renstra Kapanewon Paliyan

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon paliyan Kabupaten Gunungkidul disusun berdasar pada prioritas program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Disamping itu, juga memperhatikan hasil masukan dari para pemangku kepentingan *(stakeholders)* melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat Kalurahan, Kapanewon maupun Kabupaten. Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten telah disepakati berbagai program dan kegiatan yang diikuti dengan pendanaan indikatif untuk selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Kapanewon Paliyan disusun dan ditetapkan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan selama ini lebih banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik dan keuangan. Semakin tinggi capaian persentase realisasi fisik dan keuangan, maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila program/kegiatan yang penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil dan tidak ada masalah. Oleh karena itu, ke depan perlu dilihat sejauh mana tingkat manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar seperti yang diharapkan.

Kapanewon Paliyan sebagai Perangkat Daerah mempunyai komitmen, berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 2024 Kapanewon Paliyan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.972.977.433 telah terealisasi sebesar Rp. 1.939.812.552 (98.32%).

Secara garis besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Paliyan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Keluaran dan Hasil yang Direncanakan;
   1.1 Di Kapanewon Paliyan tahun 2024 tidak ada realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang Telah Memenuhi Target Kinerja Keluaran dan Hasil yang Direncanakan;
   2.1 Di Kapanewon Paliyan tahun 2024 secara keseluruhan telah memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang Melebihi Target Kinerja Keluaran yang Direncanakan;
   3.1 Di Kapanewon Paliyan tahun 2024 tidak ada realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan.

4. Faktor - Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya, atau Melebihi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 ;
   4.1 Faktor terpenuhinya Target Kinerja Program dan Kegiatan adalah komitmen dan kerja keras yang dilakukan Kapanewon Paliyan untuk memastikan pencapain kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD antara lain;
   5.1 Alokasi anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan, Adanya regulasi/kebijakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kegiatan harus menyesuaikan kebijakan;
6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Mengatasi Faktor – Faktor Penyebab Tersebut antara lain :
   6.1 Mengikuti proses dan alur perencanaan anggaran sesuai regulasi yang di tetapkan oleh Tim Anggaran Kabupaten Gunungkidul;
   6.2 Meningkatkan frekuensi koordinasi di antara PA, PPK dan PPTK;
   6.3 Berkoordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten agar pelaksanaan program/kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan, serta berkoordinasi dengan TAPD terakait alokasi anggaran terealisasi sesuai dengan usulan yang ada.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan Pencapaian Renstra tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi dan Evalusai Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Paliyan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output* dan *outcome*)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realiasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik													
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	26	dokumen	26	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	26	dokumen	100,00
		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,28	indeks	8,14	indeks	8,14	indeks	8,14	indeks	100,00	8,28	indeks	8,28	indeks	100,00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen perubahan renja	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen Renstra PD	1	dokumen	0	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	0	dokumen	0,00

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	2	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100,00	3	dokumen	8	dokumen	80,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	3	dokumen	75,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	3	dokumen	75,00

X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen ROPK	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen perjanjian kinerja	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	6	dokumen	75,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00

		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	6	dokumen	75,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	laporan	17	laporan	17	laporan	17	laporan	100,00	17	laporan	51	laporan	75,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan TEPRA	12	dokumen	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	12	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen LKJiP	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah laporan e monev	4	dokumen	4	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	4	dokumen	100,00

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	128	laporan	32	laporan	32	laporan	32	laporan	100,00	31	laporan	95	laporan	74,22
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79,33	indeks	79,33	indeks	79,33	indeks	79,33	indeks	100,00	79,33	indeks	79,33	indeks	100,00
		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	14	Dokumen	14	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	14	layanan	100,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	14	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	NA	bulan	14	bulan	100,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	896	orang/ bulan	224	orang/ bulan	238	orang/ bulan	238	orang/ bulan	100,00	252	orang/ bulan	714	orang/ bulan	79,69
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	3	laporan	75,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	12	dokumen	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	12	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52	laporan	13	laporan	13	laporan	13	laporan	100,00	13	laporan	39	laporan	75,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100,00	6	dokumen	18	dokumen	300,00
		Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1	layanan	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	1	layanan	100,00
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	16	orang	15	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	15	orang	93,75

		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100,00	6	dokumen	18	dokumen	75,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	6	layanan	6	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	6	layanan	100,00
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	43,71	indeks	43,57	indeks	43,57	indeks	43,57	indeks	100,00	43,87	indeks	43,57	indeks	99,68
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	4	paket belanja	4	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	paket belanja	4	paket belanja	100,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	paket	4	paket	4	paket	4	paket	100,00	4	paket	12	paket	75,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12	paket belanja	12	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	paket belanja	12	paket belanja	100,00

		Jumlap laptop yang terbeli	1	unit	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	1	unit	100,00
		Jumlah personal komputer terbeli	1	buah	1	unit	NA	buah	NA	unit	NA	NA	buah	1	buah	100,00
		Jumlah televisi terbeli	0	unit	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	0	unit	0,00
		Jumlah feeling cabinet terbeli	2	buah	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0,00
		Jumlah printer terbeli	0	unit	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	1	unit	0,00
		Jumlah almari besi terbeli	0	paket belanja	0	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	paket belanja	0	paket belanja	0,00
		Jumlah LCD Proyektor terbeli	0	paket belanja	0	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	paket belanja	0	paket belanja	0,00
		Jumlah mesin ketik terbeli	1	paket belanja	0	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	paket belanja	0	paket belanja	0,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	69	paket	16	paket	12	paket	12	paket	100,00	17	paket	45	paket	65,22

X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang di beli	4	paket belanja	2	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	paket belanja	2	paket belanja	50,00
		Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor	2	paket belanja	4	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	paket belanja	4	paket belanja	200,00
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	paket	6	paket	4	paket	4	paket	100,00	4	paket	14	paket	58,33
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	187	bendel	182	bendel	NA	bendel	NA	bendel	NA	NA	bendel	182	bendel	97,33
		Jumlah lembar penggandaan	4000	lembar	4200	lembar	NA	lembar	NA	lembar	NA	NA	lembar	4100	lembar	102,50
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	paket	2	paket	2	paket	2	paket	100,00	2	paket	6	paket	75,00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibayar	12	rekening	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	rekening	12	rekening	100,00

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	992	dokumen	248	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0,00	0	dokumen	248	dokumen	25,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi minum dan snack	120	orang	120	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	120	orang	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00	12	laporan	36	laporan	75,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah minuman dan snack terseia untuk rapat	250	orang	250	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	250	orang	100,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi SKPD	184	orang	90	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	90	orang	48,91
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68	laporan	17	laporan	3	laporan	3	laporan	100,00	20	laporan	40	laporan	58,82

X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	layanan	2	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	2	layanan	100,00
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47	unit	1	unit	4	unit	4	unit	100,00	15	unit	20	unit	42,55
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meja rapat (kayu) yang terbeli	0	unit	0	unit	NA	buah	NA	unit	NA	NA	buah	0	buah	0,00
		Jumlah meja 1/2 biro yang terbeli	0	unit	0	unit	NA	lembar	NA	unit	NA	NA	lembar	0	lembar	0,00
		Jumlah kursi rapat yang terbeli	25	unit	0	unit	NA	lembar	NA	unit	NA	NA	lembar	0	lembar	0,00
		Jumlah kursi tamu yang terbeli	0	unit	0	set	NA	lembar	NA	set	NA	NA	lembar	0	lembar	0,00
		Jumlah rak kayu terbeli	0	unit	0	unit	NA	lembar	NA	unit	NA	NA	lembar	0	lembar	0,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	unit	0	unit	8	unit	8	unit	100,00	0	unit	8	unit	32,00

X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah wireless terbeli	1	unit	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	0	unit	0,00
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0,00	1	unit	1	unit	100,00
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terbeli	1	unit	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	0	unit	0,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	1	unit	0	unit	0	unit	0,00	2	unit	3	unit	100,00
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah selokan terbangun	0	paket pekerjaan	0	paket pekerjaan	NA	paket pekerjaan	NA	paket pekerjaan	NA	NA	paket pekerjaan	0	paket pekerjaan	0,00
		Jumlah bangunan dapur yang terbangun	1	paket pekerjaan	0	paket pekerjaan	NA	paket pekerjaan	NA	paket pekerjaan	NA	NA	paket pekerjaan	0	paket pekerjaan	0,00

		Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0,00	0	unit	0	unit	0,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	layanan	2	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	2	layanan	100,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292	laporan	73	laporan	73	laporan	73	laporan	100,00	73	laporan	219	laporan	75,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa tagihan telephone yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	12	rekening	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	rekening	12	rekening	100,00
		Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (2 rekening X 12 Bulan)	24	rekening	24	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	rekening	24	rekening	100,00

		Jumlah tagihan air yang dibayar (2 rekening X 12 Bulan)	24	rekening	24	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	rekening	24	rekening	100,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240	laporan	60	laporan	60	laporan	60	laporan	100,00	60	laporan	180	laporan	75,00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sewa tanah terbayarkan	1	Tahun	1	Tahun	NA	tahun	NA	tahun	NA	NA	tahun	1	tahun	100,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	laporan	13	laporan	13	laporan	13	laporan	100,00	13	laporan	39	laporan	75,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	layanan	4	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	4	layanan	100,00

		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689	unit	170	unit	172	unit	172	unit	100,00	173	unit	515	unit	74,75
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya	1	unit	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	1	unit	100,00
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	12	paket pemeliharaan	12	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	paket pemeliharaan	12	paket pemeliharaan	100,00
		Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya	9	unit	9	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	9	unit	100,00
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	12	paket pemeliharaan	12	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	paket pemeliharaan	12	paket pemeliharaan	100,00

X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	564	unit	141	unit	141	unit	141	unit	NA	141	unit	423	unit	75,00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	unit	3	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	3	unit	75,00
		Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	11	unit	9	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	9	unit	81,82
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	2	unit	2	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	2	unit	100,00
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	9	unit	7	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	7	unit	77,78
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	87	unit	20	unit	8	unit	8	unit	100,00	22	unit	20	unit	22,99

X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah hari terfasilitasinya jasa keamanan kantor	365	hari	365	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	365	hari	100,00
		Jumah pemeliharaan gedung/kantor	2	unit	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	1	unit	50,00
		Jumah pemeliharaan rumah dinas terpelihara	1	unit	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	1	unit	100,00
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8	unit	2	unit	1	unit	1	unit	100,00	2	unit	5	unit	62,50
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	7	unit	7	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	7	unit	100,00

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	28	unit	7	unit	4	unit	4	unit	100,00	7	unit	18	unit	64,29
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah penataan organisasi	4	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	25,00
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP/SPIP	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen SOP	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen SKM	2	dokumen	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	2	dokumen	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana														

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1	layanan	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	1	layanan	100,00
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	100,00	3	laporan	9	laporan	75,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelompok seni yang terbinaibina	7	kelompok	7	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	kelompok	7	kelompok	100,00
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan hari jadi Kabupaten Gunungkidul	1	kesepakatan	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100,00

		Jumlah cabang olah raga yang terbina	4	Cabor	4	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	NA	cabor	4	cabor	100,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	100,00	3	laporan	9	laporan	75,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2	layanan	2	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	2	layanan	100,00

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	96	laporan	20	laporan	24	laporan	24	laporan	100,00	24	laporan	68	laporan	70,83
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB	2	kesepakatan	2	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	2	kesepakatan	100,00
		Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	2	kesepakatan	2	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	2	kesepakatan	100,00
		Jumlah dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK	2	kesepakatan	2	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	2	kesepakatan	100,00
		Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat	360	tangki	470	tangki	NA	tangki	NA	tangki	NA	NA	tangki	470	tangki	130,56

		Jumlah koordinasi pelaksanaan pengadaan bansos	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK	20	KK	20	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	20	KK	100,00
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PAH PIWK)	5	KK	5	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	5	KK	100,00
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan septic tank (PIWK)	11	KK	11	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	11	KK	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	40	laporan	6	laporan	7	laporan	7	laporan	100,00	0	laporan	13	laporan	32,50

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	2500	layanan	2100	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	2100	layanan	84,00
		Jumlah peserta kordinasi IUMK	40	orang	40	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	40	orang	100,00
		Jumlah peserta koordinasi pelayanan terpadu	40	orang	40	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	40	orang	100,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56	laporan	14	laporan	14	laporan	14	laporan	100,00	14	laporan	42	laporan	75,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi														

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	2	layanan	2	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	2	layanan	100,00
		Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	9,5	indeks	9,5	indeks	9,5	indeks	9,5	indeks	100,00	9,5	indeks	9,5	indeks	100,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen usulan rencana kegaitan (DURP)	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMKal dan RKPKal	7	kalurahan	7	kalurahan	NA	kalurahan	NA	kaluraha n	NA	NA	kalurahan	7	kaluraha n	100,00
		Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan yang meningkat kapasitasnya	45	orang	45	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	45	orang	100,00

		Jumlah bimtek prencanaan pembangunan desa (PIWK)	0	orang	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	0,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	36	dokumen	9	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100,00	9	dokumen	26	dokumen	72,22
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kapanewon	4	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	25,00
		Jumlah dokumen profil kapanewon dan Kalurahan	1	dokumen	8	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	8	dokumen	800,00

		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kabupaten	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40	laporan	10	laporan	9	laporan	9	laporan	100,00	9	laporan	28	laporan	70,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2	layanan	2	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	2	layanan	100,00
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12	indeks	3	indeks	3	indeks	3	indeks	100,00	3	indeks	9	indeks	75,00
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	12	kesepakatan	12	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	12	kesepakatan	100,00

		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna	0	kesepakatan	0	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	0	kesepakatan	0,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	lembaga kemasyarakatan	2	lembaga kemasyarakatan	1	lembaga kemasyarakatan	1	lembaga kemasyarakatan	100,00	2	lembaga kemasyarakatan	5	lembaga kemasyarakatan	62,50
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	7	kelompok	7	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	kelompok	7	kelompok	100,00
		Jumlah kesepakatan koordinasi masa tanam, perbenihan, pemupukan, perkebunan, peternakan, dan budidaya perikanan	1	kesepakatan	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100,00

		Jumlah pelaku insutri kecil/rumahtangga yang meningkt pengetahuannya	30	orang	30	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	30	orang	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16	laporan	4	laporan	3	laporan	3	laporan	100,00	2	laporan	9	laporan	56,25
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi														
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	layanan	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	1	layanan	100,00
		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	laporan	4	laporan	2	laporan	2	laporan	100,00	2	laporan	8	laporan	100,00

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	52	laporan	2	laporan	13	laporan	13	laporan	100,00	1	laporan	16	laporan	30,77
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat kapanewon	50	orang	2	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	2	kali	4,00
		Jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat kapanewon	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	100,00	2	laporan	6	laporan	75,00

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi														100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	layanan	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	1	layanan	100,00
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	39,5	indeks	39,5	indeks	39,5	indeks	39,5	indeks	100,00	39,5	indeks	39,5	indeks	100,00

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI yang terfasilitasi	1	kali	1	kegiatan	NA	kegiatan	NA	kegiatan	NA	NA	kegiatan	1	kegiatan	100,00
		Jumlah paskib kapanewon yang terbentuk dan dilatih	75	orang	75	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	75	orang	100,00
		Jumlah paduan suara kapanewon yang terbentuk dan dilatih	40	orang	40	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	40	orang	100,00

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	orang	75	orang	75	orang	75	orang	100,00	75	orang	225	orang	75,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kesepakatan koordinasi forkompimka	1	kesepakatan	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100,00

		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100,00	4	dokumen	12	dokumen	75,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana														
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6	layanan	6	Layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	6	layanan	100,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	128	dokumen	33	dokumen	32	dokumen	32	dokumen	100,00	32	dokumen	97	dokumen	75,78

7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pembinaan produk hukum kalurahan	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	6	dokumen	75,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen monografi kalurahan dan kapanewon	16	dokumen	16	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	16	dokumen	100,00
		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	2	kesepakatan	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	50,00
		Jumlah koordinasi bidang pemerintahan	4	kali	2	kali	NA	kesepakatan	NA	kali	NA	NA	kesepakatan	2	kesepakatan	50,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	72	dokumen	18	dokumen	18	dokumen	18	dokumen	100,00	18	dokumen	54	dokumen	75,00

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasiltasi penyusunan APBDes	7	dokumen	1	dokumen	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	14,29
		Jumlah fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa	7	kalurahan	2	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	2	kali	28,57
		Jumlah pembinaan keuangan desa	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah fasilitasi pendayagunaan aset desa	7	kalurahan	1	Desa	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	14,29
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	dokumen	5	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100,00	4	dokumen	13	dokumen	65,00

7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	70	orang	65	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	65	orang	92,86
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	3	dokumen	75,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kalurahan yang menyelenggarakan pemilihan lurah	3	kalurahan	0	kalurahan	NA	kalurahan	NA	kalurahan	NA	NA	kalurahan	0	kalurahan	0,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	3	dokumen	60,00

7.01.06.2.01.07	Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD/BPK yang meningkat pengetahuannya dan pemahamanya dalam penyelenggaraan pemerintaha kalurahan	63	orang	63	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	63	orang	100,00
		Jumlah dokumen Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	3	dokumen	75,00
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggrakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kalurahan	3	kalurahan	3	kalurahan	NA	kalurahan	NA	kaluraha n	NA	NA	kalurahan	3	kaluraha n	100,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100,00	2	dokumen	8	dokumen	66,67

7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0,00	8	dokumen	8	dokumen	80,00
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	70	orang	70	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	70	orang	100,00
		Jumlah peserta pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana	30	orang	30	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	30	orang	100,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	1	dokumen	5	dokumen	62,50
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															

2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi														
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	4	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	3	laporan	75,00
		Jumlah kegiatan adat, seni dan lembaga budaya	1	jenis	1	jenis	NA	jenis	NA	jenis	NA	NA	jenis	1	jenis	100,00
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan Hari Keistimewaan DIY	1	even	1	even	NA	even	NA	even	NA	NA	even	1	even	100,00
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	3	laporan	75,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															

4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan														
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	6	dokumen	75,00
4.01.04.5.06.01	Penysusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	8	layanan	2	layanan	4	layanan	4	layanan	100,00	2	layanan	8	layanan	100,00
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	0	dokumen	4	dokumen	50,00

		Jumlah kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	2	layanan	2	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	layanan	2	layanan	100,00
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon /Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	8	dokumen	0	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100,00	3	dokumen	7	dokumen	87,50
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di kalurahan	1	laporan	1	laporan	NA	laporan	NA	laporan	NA	NA	laporan	1	laporan	100,00
		Rencana Program kegiatan keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan tahun 2024	2	dokumen	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	2	dokumen	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Paliyan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kapanewon Paliyan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, di samping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Paliyan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan setrategis Pemerintah. Adapun tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah Kapanewon Paliyan. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui pelayananan satu pintu/pelayanan terpadu di Kapanewon, jenis layanan yg dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Legalisasi Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga (KK);
3. Pelayanan Dispensasi Nikah;
4. Pelayanan Surat Pindah Datang/Pergi Penduduk;
5. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. Pelayanan Legalisasi Akta Kelahiran;
7. Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan/Ho;
8. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Pelayanan akta kematian

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kapanewon perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon tahun 2026. Kinerja pelayanan Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Paliyan
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
											Capaian Target Renstra PD			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)													
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat													
	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	93.21	96.10	96.14	96.15	96.60	93.54	96.44	96.56	96.14	96.15	96.60	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Peragkat Daerah Kecamatan/Kapanewon Paliyan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kapanewon Paliyan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kapanewon Paliyan. Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berisi uraian sebagai berikut:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kapanewon Paliyan antara lain:
   a. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada tingkat kapanewon maupun kalurahan sehingga memengaruhi kinerja dan pelayanan tugas pokok yang kurang maksimal
   b. Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi tentang pengentrian data-data terkait data pamong kalurahan/lembaga terkait.
   c. Pemahaman dan pengendalian SOP pelayanan di kalurahan-kalurahan belum optimal karena masih ada permohonan yang persyaratannya belum lengkap.
   d. Adanya perubahan regulasi/peraturan yang akan memengaruhi proses perencanaan di kapanewon dan kalurahan, pekerjaan dapat terselesaikan tetapi tidak tepat waktu.
   e. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke kapanewon dan kalurahan
   f. Angka kemiskinan masih perlu ditangani, data kemiskinan kurang valid karena adanya perbedaan data BNBA miskin antara pusat, daerah dan realita lapangan serta indikator kemiskinan sering berubah/kriteria penerima bantuan berubah.
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Dearah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*).

   Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah ”Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

   Dalam upaya pencapaian visi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 yang meliputi :

   a. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri
   b. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani
   c. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif
   d. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
   e. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban
   f. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur Bangsa Indonesia.

   Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2025 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY sebagai berikut:

a. Isu strategis nasional
- Demokrasi dan hak asasi manusia
- Kemandirian melalui swasembada pangan, air dan energi
- Pengembangan infrastruktur
- Memperkuat daya saing SDM
- Hilirisasi dan pengembangan industri berbasis SDA
- Membangun dari desa
- Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata kelola
- Kehidupan yang harmonis dengan alam, lingkungan dan budaya

b. Isu strategis Daerah Istimewa Yogyakarta
- Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
- Pengembangan wilayah selatan DIY
- Perkembangan teknologi informasi
- Pemenuhan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif
- Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- Penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik
- Penyelesaian destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta – Prambanan
- Penguatan ketahanan pangan
- Pelestarian dan pengelolaan budaya
- Penguatan resiliensi dan manajemen bencana, serta pembangunan berkelanjutan
- Penguatan kapasitas fiskal
- Pengembangan ekonomi kreatif termasuk ekonomi digital

c. Isu strategis daerah
- Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
- Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
- Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
- Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas,cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
- Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Adapun prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Paliyan adalah Reformasi Birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat serta prioritas peningkatan ekonomi dengan sasaran daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat.

Mendasar tugas pokok Kapanewon Paliyan, fungsi yang diemban oleh Kapanewon Paliyan adalah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Tugas dan fungsi Kapanewon Paliyan terkait dengan visi dan misi daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Paliyan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan publik.

Pemerintah Kapanewon Paliyan sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat agar tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat termasuk sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Paliyan. Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
   Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Paliyan beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi Kapanewon Paliyan antara lain:
   - Jumlah sumber daya manusia yang terbatas;
   - Kapanewon sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kapanewon hanya sebatas pengelolaa gaji pegawai dan biaya operasional Kapanewon. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui perangkat daerah terkait.
   - Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal dan tepat waktu.
   - Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir tindak dari masyarakat
   - Permohonan KK dan KTP di wilayah Kapanewon Paliyan cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya satu (1) orang maka diperlukan kerja ekstra untuk mencukupi target tersebut
   - Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut kapanewon untuk responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
   - Tingginya angka kemiskinan, daerah perbatasan yang rawan konflik
   - Infrastruktur Pedesaan yang kurang baik (Jalan, Jembatan, Drainase)
   - Kurangnya Akses Teknologi Pertanian, Peternakan, Perindustrian/Kerajinan, Permodalan, dan Pemasaran produk
   - Kurangnya Akses Air Bersih, Pendidikan, dan kesehatan

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan Kapanewon Paliyan antara lain:

- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kapanewon, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kapanewon Paliyan dengan Forkompimka, Dinas Instansi, Korwil, lurah dan pamong kalurahan, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan , keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi.
- Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan

4. Formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Paliyan yaitu:

a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
b. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan
c. Kemampuan keuangan relatif terbatas
d. Masih banyaknya jumlah masyarakat miskin
e. Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/menengah

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah tahun 2025-2029 maka Kapanenewon Paliyan berperan aktif dalam perumusan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. Adapun program yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Program Penyeleggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- Program Penyeleggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan inspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD telah dilakukan melalui musyawarah mulai dari tingkat kalurahan, kapanewon dan kabupaten dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan

anggaran. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kapanewon Paliyan berharap mampu memberikan fsilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah pagu pendanaannya.

Dalam reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan terdapat point-point sebagai berikut:

1. Proses pertama yang dilakukan adalah membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Total pagu Kapanewon Paliyan pada rancangan awal sebesar Rp 2.596.371.155. Pada tahapan penyempurnaan awal renja ini pagu menjadi sebesar Rp 2.478.871.197,00. Ada beberapa baik program, kegiatan maupun subkegiatan yang mengalami penyesuaian karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan pagu anggaran.
2. Alasan dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan adalah untuk mengetahui kebutuhan nyata dari Kapanewon Paliyan, salah satunya dengan menyesuaikan Program, Kegiatan, subkegiatan dan indikator subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan pagu anggaran.
3. Proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan menghasilkan adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD yaitu untuk program yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta di tahapan ini belum masuk di matrik renja, adanya perbedaan pagu anggaran baik program, kegiatan maupun subkegiatan yang menyesuaikan dengan pagu anggaran dan kebutuhan. Secara rinci hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Paliyan

Recana Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	persen	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	persen	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Adat, tradisi, Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	1	laporan	100.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Adat, tradisi, Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan			100.000.000	
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	laporan	100.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	laporan	100.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan	100	persen	40.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan	100	persen	40.000.000	

	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	2	dokumen	40.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			40.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	dokumen	40.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	dokumen	40.000.000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.10	Nilai	1.290.825.197	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.10	Nilai	1.418.888.197	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28	dokumen	12.770.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			77.380.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2.520.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	32.875.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	990.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	990.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	870.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	870.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dokumen	1.460.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dokumen	35.715.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dokumen	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dokumen	1.300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	laporan	3.990.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	laporan	3.990.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	laporan	1.640.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	laporan	1.640.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28	Dokumen	1.124.061.197	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.124.061.197	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Paliyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	orang/ bulan	1.120.901.197	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Paliyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	orang/ bulan	1.120.901.197	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.380.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.380.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13	laporan	1.780.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13	laporan	1.780.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	28	laporan	1.960.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			1.960.000	

	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	28	laporan	1.960.000	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	28	laporan	1.960.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian yang disusun	6	dokumen	1.510.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawaian			1.510.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dokumen	1.510.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dokumen	1.510.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum	48	dokumen	49.334.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum			80.482.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Paliyan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	3.252.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Paliyan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	2.924.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Paliyan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	paket	25.821.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Paliyan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	paket	25.794.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Paliyan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	5.256.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Paliyan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	5.256.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	2.070.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	2.070.000	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	125.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	1.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	laporan	12.810.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	laporan	42.938.000	
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77	Layanan	41.490.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73.795.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	890.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	890.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	38.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	38.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	laporan	2.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	laporan	34.905.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	173	unit	59.700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah			59.700.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141	unit	42.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141	unit	42.100.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	unit	6.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	unit	6.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	8.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	8.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9	unit	2.700.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Paliyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9	unit	2.700.000	

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana	100	persen	8.915.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana	100	persen	8.915.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14	laporan	8.915.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			8.915.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14	laporan	8.915.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14	laporan	8.915.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	100	persen	395.995.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	100	persen	394.975.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	18	dokumen	37.499.500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan			37.499.500	

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9	dokumen	23.439.500	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9	dokumen	23.439.500	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9	Laporan	14.060.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9	Laporan	14.060.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	25	laporan	348.485.500	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi			347.465.500	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25	Pokmas/Ormas	348.485.500	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25	Pokmas/Ormas	347.465.500	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	2	dokumen	6.475.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			6.475.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	laporan	6.475.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	laporan	6.475.000	

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	7	kalurahan	3.535.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan			3.535.000	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kapanewon Paliyan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	21	Keluarga	3.535.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kapanewon Paliyan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	21	Keluarga	3.535.000	
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	persen	384.396.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	persen	387.261.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55	orang	384.396.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			387.261.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9	laporan	384.396.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9	laporan	387.261.000	

7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	persen	99.202.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	persen	99.202.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3	laporan	99.202.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			99.202.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Paliyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	orang	91.437.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Paliyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	orang	91.437.000	

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16	dokumen	7.765.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16	dokumen	7.765.000	
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	persen	29.630.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	persen	29.630.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28	dokumen	29.630.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			29.630.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2	dokumen	3.200.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2	dokumen	3.200.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18	dokumen	3.395.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18	dokumen	3.395.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	dokumen	13.535.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	dokumen	13.535.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	dokumen	2.690.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	dokumen	2.690.000	
	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah dokumen fasilitiasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	1	dokumen	3.770.000	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah dokumen fasilitiasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	1	dokumen	3.770.000	
	Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	dokumen	735.000	Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	dokumen	735.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	dokumen	2.305.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Paliyan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	dokumen	2.305.000	
						2.348.963.197						2.478.871.197	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, bagian ini diuraiakan dalam kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Asosiasi-asosiasi, pergurunan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun hasil informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kalurahan maupun kapanewon. Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/lingkungan yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum musrenbangkal.
2. Di forum musrebangkal menghasilkan skala prioritas usulan tingkat kalurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari kalurahan untuk mengawal usulan tersebut di forum musrenbang tingkat Kapanewon.
3. Hasil musrenbang Kapanewon merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu isu penting dari masing masing SKPD yang ada. Kegiatan musrenbang kapanewon yang telah disepakati antara lain dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial berupa jamban dan septictank kepada keluarga miskin, dalam bidang ekonomi menyelenggarakan bimtek perencanaan pembangunan kalurahan dan bimtek pengelolaan keuangan kalurahan.
4. Kedepan kamus usulan sudah ada sehingga pada saat pelaksanaan musrenbangkal semua usulan program kegiatan yg ada di kalurahan bisa terakomodir sesuai kegiatan yang direncanakan, sehingga terjadi sinkronisasi data antara usulan pemerintah kalurahan, kapanewon dan kabupaten.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisine/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	PIWK – Pembangunan Jamban dan Pembuangan Akhir Tinja bagi KK miskin - Kapanewon Paliyan	Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan	Terlaksananya kegiatan Pembangunan jamban dan pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	5 KK	7.734.500	38.672.500	Diterima
2	PIWK – Bantuan Sosial Penampungan Air Hujan (PAH) - Kapanewon Paliyan	Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan	Terlaksananya kegiatan pembangunan PAH bagi KK miskin	19 KK	9.462.000	179.778.000	Diterima
3	PIWK – Pembangunan Jamban dan Pembuangan Akhir Tinja bagi KK miskin - Kapanewon Paliyan	Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan	Terlaksananya kegiatan Pembangunan jamban dan pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	1 KK	7.734.500	7.734.500	Diterima
4	PIWK – Pembangunan Jamban dan Pembuangan Akhir Tinja bagi KK miskin - Kapanewon Paliyan	Kalurahan Mulusan, Kapanewon Paliyan	Terlaksananya kegiatan Pembangunan jamban dan pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	2 KK	7.734.500	15.469.000	Diterima
5	PIWK – Pembangunan Jamban dan Pembuangan Akhir Tinja bagi KK miskin - Kapanewon Paliyan	Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan	Terlaksananya kegiatan Pembangunan jamban dan pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	1 KK	7.734.500	7.734.500	Diterima

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah sehingga diharapkan program dan kegiatan perangkat daerah dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Kebijakan nasional tentang kapanewon tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Sedangkan Kapanewon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Paliyan sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2026 Kapanewon Paliyan juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari adanya dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan menggambarkan hal hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional dan kegiatan pokok yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun penjabaran sasaran daerah kedalam sasaran Perangkat Daerah dalam format sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Kapanewon Paliyan

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks pelayanan Kapanewon	96.68

Tabel 3.2
Sasaran Kapanewon Paliyan

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD 2026
1.	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase kegiatan sosial	100
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat	82.99

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Paliyan Tahun 2026

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,60
1.	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase kegiatan sosial	100
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat	82.99

Tujuan dari pada penyusunan Renja Kapanewon Paliyan Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
5. Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Paliyan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan;;
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani;
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON PALIYAN

Rencana Kerja merupakan kumpulan Program dan kegitan, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kapanewon Paliyan dalam menyusun program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor yang memang harus direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan yaitu:
   a. Sebagai konsekuensi untuk merealisasikan program/kegiatan Kapanewon Paliyan dalam rangka mendorong visi dan misi Bupati Kepala Daerah.
   b. Prioritas pembangunan, dalam hal ini prioritas Kapanewon Paliyan adalah reformasi birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat, serta prioritas peningkatan ekononomi dengan sasaran daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat.
   c. Pengurangan kemiskinan dengan mengembangkan kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dengan meningkatkan ketrampilan dalam mengolah hasil bumi/pertanian menjadi produk bernilai tambah dan Peningkatan akses pemasaran melalui promosi produk.
   d. Pencapaian IKU untuk tahun 2025-2029 dengan indikator kinerja utama “Indeks Pelayanan Kapanewon” yang formulasi perhitungannya menggunakan lima komponen yaitu persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu, persentase kegiaan sosial terlaksana, persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, dan indeks kepuasan masyarakat.
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dengan penumbuhan BUMKalurahan yang dapat menumbuhkan iklim usaha kecil yang produktif.
   f. Melakukan program promosi kesehatan, dimana lebih diupayakan untuk membiasakan masyarakat melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.
   g. Penyuluhan Keluarga Berencana bagi semua warga, kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan usia dini.
   h. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanakan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, baik di Pemerintahan Kalurahan maupun Kapanewon
   i. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif.
   j. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain sebagai berikuti:

   Berdasarkan Rancangan Program dan Kegiatan Kapanewon Paliyan Tahun 2026 terdiri dari 8 program , 17 kegiatan dan 43 subkegiatan dimana dalam pelaksanaanya kegiatan untuk difokuskan pada pelayanan masyarakat tersebar di wilayah Paliyan yang terdiri dari 7 kalurahan. Adapun total pagu Rancangan Awal Renja tahun 2026 sebesar Rp 2.478.871.197,00, sedangkan untuk perkiraan tahun 2027 sebesar Rp

2.714.998.097,00. Progam dan kegiatan Pembangunan Kapanewon Paliyan Tahun 2026 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Progam Pembangunan
Kapanewon Paliyan Tahun 2026

No.	Sasaran Kapanewon Paliyan	Nama Progam/ Kegiatan
1.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	1. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
2.	Dokumen keuangan yang berkualitas	1. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.	Kesejahteraan Sosial Meningkat	1. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
4.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	1. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan a. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kalurahan

5.	Pelayanan Umum yang Berkualitas	1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan 2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah d. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah f. Administrasi Umum Perangkat Daerah g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selanjutnya rekapitulasi program dan kegiatan prioritas pembangunan yang lebih terperinci dijelaskan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6					7	8	9
Pamong, Nglayani & Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100 Persen	2	##	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	Kapanewon Paliyan
					2	##	8	507		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	Kapanewon Paliyan
					2	##	8	507	6	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	Kapanewon Paliyan
		Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000	Kapanewon Paliyan

					4	1	4	501		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000	Kapanewon Paliyan
					4	1	4	501	7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000	Kapanewon Paliyan
		Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,99 Persen	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.418.888.197	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.380.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.875.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	990.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	870.000	Kapanewon Paliyan

					7	1	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.715.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.300.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.990.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.640.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.124.061.197	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.120.901.197	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.380.000	Kapanewon Paliyan

					7	1	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.780.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.960.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	1.960.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.510.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.510.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.482.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.924.000	Kapanewon Paliyan

					7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.794.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.256.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.070.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.938.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.795.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	890.000	Kapanewon Paliyan

					7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.000.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.905.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.700.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.100.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	Kapanewon Paliyan

					7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.000.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	1	209	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.700.000	Kapanewon Paliyan
		Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,99 Persen	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.915.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	2	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.915.000	Kapanewon Paliyan

					7	1	2	202	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.915.000	Kapanewon Paliyan
		Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	394.975.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37.499.500	Kapanewon Paliyan
					7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	23.439.500	Kapanewon Paliyan

					7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.060.000	Kapanewon Paliyan
		Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100 Persen	7	1	3	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	347.465.500	Kapanewon Paliyan
					7	1	3	201	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	347.465.500	Kapanewon Paliyan
					7	1	3	203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.475.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	3	203	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.475.000	Kapanewon Paliyan
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	7	1	3	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.535.000	Kapanewon Paliyan

					7	1	3	206	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3.535.000	Kapanewon Paliyan
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	387.261.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	387.261.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	387.261.000	Kapanewon Paliyan
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	99.202.000	Kapanewon Paliyan

					7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	99.202.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	91.437.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	5	201	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.765.000	Kapanewon Paliyan
		Dokumen keuangan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.630.000	Kapanewon Paliyan

					7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.630.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	6	201	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.200.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	6	201	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.395.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.535.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	6	201	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.690.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	6	201	6	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	3.770.000	Kapanewon Paliyan

					7	1	6	201	7	Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	735.000	Kapanewon Paliyan
					7	1	6	201	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.305.000	Kapanewon Paliyan
											2.478.871.197	

Selanjutnya rumusan program dan kegiata Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Paliyan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan		100	persen	100.000.000			100	persen	100.000.000
2	22	8	507		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adat, tradisi, Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan				100.000.000					100.000.000
2	22	8	507	6	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kapanewon Paliyan	1	laporan	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		1	laporan	100.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH									

4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan		100	persen	40.000.000			100	persen	30.000.000
4	1	4	501		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000					30.000.000
4	1	4	501	7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kapanewon Paliyan	3	dokumen	40.000.000	Dana Keistimewaan DIY		3	dokumen	30.000.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN										
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		82.10	Nilai	1.418.888.197			100	persen	1.623.978.197

7	1	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77.380.000						83.440.000
7	1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Paliyan	2	dokumen	32.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	dokumen		35.075.000
7	1	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Paliyan	1	dokumen	990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	dokumen		1.870.000
7	1	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Paliyan	1	dokumen	870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	dokumen		1.670.000
7	1	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kapanewon Paliyan	2	dokumen	35.715.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	dokumen		36.365.000

7	1	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Paliyan	2	dokumen	1.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	dokumen	2.100.000
7	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Paliyan	17	laporan	3.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17	laporan	4.510.000
7	1	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Paliyan	3	laporan	1.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	laporan	1.850.000
7	1	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.124.061.197					1.125.681.197
7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Paliyan	238	orang/ bulan	1.120.901.197	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		238	orang/ bulan	1.120.901.197

7	1	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Paliyan	1	laporan	1.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	laporan	2.280.000
7	1	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Paliyan	13	laporan	1.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13	laporan	2.500.000
7	1	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah				1.960.000					2.500.000
7	1	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		28	laporan	1.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28	dokumen	2.500.000
7	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian				1.510.000					2.500.000

7	1	1	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Paliyan	6	dokumen	1.510.000			6	dokumen	2.500.000
7	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum				80.482.000					112.152.000
7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Paliyan	4	paket	2.924.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	paket	3.762.000
7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Paliyan	13	paket	25.794.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16	paket	52.329.000
7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kapanewon Paliyan	4	paket	5.256.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	paket	6.256.000
7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kapanewon Paliyan	2	paket	2.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	paket	3.950.000

7	1	1	206	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Paliyan	12	laporan	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	laporan	2.500.000
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Paliyan	13	laporan	42.938.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14	laporan	43.355.000
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				73.795.000					210.005.000
7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Paliyan	4	laporan	890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	laporan	90.000.000
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kapanewon Paliyan	60	laporan	38.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60	laporan	40.500.000

7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kapanewon Paliyan	13	laporan	34.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13	laporan	79.505.000
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah				59.700.000					87.700.000
7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kapanewon Paliyan	141	unit	42.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		141	unit	47.100.000
7	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kapanewon Paliyan	21	unit	6.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24	unit	6.900.000
7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kapanewon Paliyan	2	unit	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	unit	10.000.000

7	1	1	209	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kapanewon Paliyan	9	unit	2.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9	unit	23.700.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana		100	persen	8.915.000			100	persen	9.915.000
7	1	2	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				8.915.000					9.915.000
7	1	2	202	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	14	laporan	8.915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14	laporan	9.915.000

7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		100	persen	394.975.000			100	persen	401.443.500
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan				37.499.500					40.030.000
7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Paliyan	9	dokumen	23.439.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9	dokumen	23.990.000
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	9	Laporan	14.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9	laporan	16.040.000

7	1	3	202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi				347.465.500						344.878.500
7	1	3	201	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kapanewon Paliyan	25	Pokmas/Ormas	347.465.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25	Pokmas/Ormas		344.878.500
7	1	3	203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan				6.475.000						8.175.000
7	1	3	203	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Paliyan	2	laporan	6.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	laporan		8.175.000

7	1	3	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan				3.535.000					8.360.000
7	1	3	206	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kapanewon Paliyan	21	Keluarga	3.535.000			21	keluarga	8.360.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	persen	387.261.000			100	persen	389.833.500
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				387.261.000					389.833.500

7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Paliyan	9	laporan	387.261.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9	laporan	389.833.500
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100	persen	99.202.000			100	persen	103.277.900
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				99.202.000					103.277.900

7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Paliyan	75	orang	91.437.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75	orang	94.412.900
7	1	5	201	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Paliyan	16	dokumen	7.765.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16	dokumen	8.865.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100	persen	29.630.000			100	persen	56.550.000

7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				29.630.000					56.550.000
7	1	6	201	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Paliyan	2	dokumen	3.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	dokumen	3.705.000
7	1	6	201	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Paliyan	18	dokumen	3.395.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18	dokumen	3.885.000
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Paliyan	4	dokumen	13.535.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	dokumen	15.550.000
7	1	6	201	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Paliyan	1	dokumen	2.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	dokumen	3.200.000

7	1	6	201	6	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah dokumen fasilitiasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kapanewon Paliyan	1	dokumen	3.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	dokumen	7.540.000
7	1	6	201	7	Fasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Paliyan	1	dokumen	735.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	dokumen	1.000.000
7	1	6	201	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Paliyan	2	dokumen	2.305.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14	dokumen	21.670.000
Jumlah										2.478.871.197					2.714.998.097

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan (PD) Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Renja Kapanewon Paliyan Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Daerah. Renja Kapanewon Paliyan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Renja Kapanewon Paliyan yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD.
Renja Kapanewon Paliyan Tahun 2026 mencakup tiga bahasan antara lain catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Renja Kapanewon Paliyan telah dan akan selalu melibatkan peran *(stakeholder)* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *(stakeholder)* dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

5.2. Kaidah pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan *(stakeholders)*, tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana tindak lanjut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Tidak hanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan saja yang terlihat, namun tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Renja Kapanewon Paliyan Tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
KAPANEWON PALIYAN,

ttd

DASNO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON PANGGANG
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam kerangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Rencana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2029 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2029, yang merupakan dokumen untuk menerjemahkan dan menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Program dan Kegiatan Pembangunan Tahunan Daerah.

Sebagai tahun pertama dalam periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, tahun 2026 dalam upaya penyelesaian capaian target pembangunan yang telah diraih pada periode perencanaan pembangunan daerah sebelumnya dan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana diatur dalam RKPD Tahun 2026 merupakan instrumen tentang arah dan kebijakan operasional pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun berjalan yang menjadi panduan dan acuan Bupati bersama DPRD dalam menyusun Kebijakan Umum Belanja Anggaran serta penentuan prioritas dan pagu anggaran sementara yang menjadi dasar Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2026. Dalam hal ini Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memastikan terakomodirnya belanja wajib mengikat, kebijakan belanja prioritas, dan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan, dengan memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Panggang Tahun 2026 juga dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2025. Proses pelaksanaan musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kalurahan, musrenbang kapanewon, dan musrenbang kabupaten termasuk didalamnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk mengawal usulan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi sampai ditetapkannya RKPD Kabupaten Gunungkidul.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara khusus diatur dalam pasal 126 sampai dengan pasal 130.

Sinkronisasi perencanaan merupakan hal utama, Renja Kapanewon Panggang Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi dan konsistensi dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rumusan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renja Kapanewon Panggang dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi berdasarkan data dan asumsi-asumsi yang tepat dan akurat, serta berdasarkan hasil evaluasi Renja Kapanewon Panggang tahun lalu dan tahun berjalan. Semua program kegiatan yang dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kapanewon Panggang dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan UUD 1945 pasal 4 ayat 1, Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Panewu, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kapanewon dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kapanewon maka perencanaan tujuan kapanewon mendukung perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pemerintah kapanewon bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kapanewon Panggang memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Panggang serta kerangka pendanaan daerah , Renja PD kapanewon secara substansial sesuai dengan visi dan misi dan rencana resmi daerah (RKPD,RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja Kapanewon Panggang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sintem informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Kapanewon Panggang Tahun 2026

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Kapanewon Panggang Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kapanewon Panggang
4. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.3.2 Tujuan

Rancangan Renja Kapanewon Panggang disusun untuk menjadi dasar pijakan dan gambaran rencana pembangunan Kapanewon Panggang pada Tahun 2026 yang akan dilaksanakan melalui jawatan dan subbag yang ada di dalamnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon, sehingga pembangunan yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan Renja Kapanewon Panggang Tahun 2026 ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON PANGGANG
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kapanewon Panggang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Panggang
- 2.4 Review Terhadap Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON PANGGANG
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Panggang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON PANGGANG
- 4.1 Rencana Kerja

BAB V PENUTUP
- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON PANGGANG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Kapanewon Panggang

Pada bagian ini memuat tentang evaluasi capaian rencana kerja tahun TA 2024 yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target dalam Rencana Strategis Kapanewon Panggang Tahun 2021-2026. Seperti halnya tahun sebelumnya, yang masih tetap perlu menjadi perhatian terkait dengan upaya pencapaian target kinerja adalah jumlah karyawan Kapanewon Panggang yang dari tahun ke tahun semakin berkurang dan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 hanya terdapat 15 orang PNS dan 1 orang P3K. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kinerja organisasi karena pada personil-personil tertentu mesti merangkap beberapa tugas pada unit kerja (seksi/ subbag) yang berbeda.

Upaya Kapanewon Panggang untuk mengatasi kendala akibat dari minimnya jumlah pegawai adalah dengan mengajukan penambahan Pegawai. Melalui penambahan pegawai sangat berpengaruh terhadap tingkat capaian kinerja Kapanewon Panggang, namun demikian capaian kinerja tetap tidak bisa semua terlaksana dikarenakan ada kebijakan TAPD.

1). Berikut output kegiatan Kapanewon Panggang Tahun 2024 yang tidak dapat terealisasi sesuai target yang direncanakan akibat adanya Kebijakan:

No	Nama Program/ Kegiatan	Target Keluaran	Capaian Keluaran	Persentase Capaian	Keterangan
1	Pemilihan Kepala Desa	1	0	0%	Tidak dilaksanakan karena kebijakan daerah (TAPD)

2). Kegiatan Kapanewon Panggang yang terealisasi sesuai target yang direncanakan:

No	Nama Program / Kegiatan	Target Keluaran	Capaian Keluaran	Persentase Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja di Kecamatan	2 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%

11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	2 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
12	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
14	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
15	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan *(Adat, Seni, Tradisi, Budaya)*	1 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%
16	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1 sub kegiatan	Tercapai seluruhnya	100%

3). Kegiatan Kapanewon Panggang yang terealisasi melebihi target yang direncanakan:
Di Kapanewon Panggang tidak ada kegiatan yang pelaksanaannya melebihi target perencanaan.

4). Faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja Kapanewon Panggang adalah dipengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tertentu.
Faktor yang mendukung terealisasinya pelaksanaan program kegiatan sesuai target adala komitmen, kedisiplinan dan etos kerja PPTK dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan.

5). Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya program/kegiatan yaitu :
   a. Mengikuti proses dan alur perencanaan anggaran sesuai regulasi yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Kabupaten Gunungkidul.
   b. Meningkatkan frekuensi koordinasi antara PA, PPK dan PPTK.

Pada Kapanewon Panggang tidak terdapat kegiatan yang terealisasi melebihi target yang direncanakan. Untuk Tahun Anggaran 2024 Kapanewon Panggang melaksanakan 8 program yang terbagi dalam 16 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Selanjutnya berdasarkan laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Proyeksi Pencapaian Renstra Kapanewon Panggang sampai dengan Tahun 2025 selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.1.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Panggang dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Panggang

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
	Urusan :									
	Semua urusan pemerintahan umum									
	Program :									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Outcome :								
		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan :	Output :								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daearah yang terfasilitasi	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	4	6	6	100%	2	8	80%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	2	1	1	100%	1	4	80%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	2	1	1	100%	1	4	80%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	4	2	2	100%	2	8	80%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	10	4	2	2	100%	2	8	80%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85	34	17	17	100%	17	68	80%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	4	2	2	100%	2	8	80%
	Kegiatan :	Output :								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									
7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1190	476	238	238	100%	238	1904	80%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	2	1	1	100%	1	4	80%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	65	26	13	13	100%	13	52	80%
	Kegiatan :	Output :								
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
	Sub Kegiatan:									
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	5	2	1	1	100%	1	4	80%
	Kegiatan :	Output :								
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	8	4	4	100%	4	16	80%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	24	12	12	100%	12	48	80%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	24	12	12	100%	12	48	80%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28650	11460	5730	5730	100%	5730	22920	80%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.2.06.06.05	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan pe rundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	24	0	0	100%	0	24	100%
7.01.2.06.06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000	400	200	200	100%	200	800	80%
7.01.2.06.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	240	120	120	100%	120	480	80%
	Kegiatan :	Output :								
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjangurusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	184	80	39	39	100%	45	164	89%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23	5	6	6	100%	7	2	78%
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	0	2	2	100%	2	4	80%
	Kegiatan :	Output :								

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
	Sub Kegiatan:									
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	24	12	12	100%	12	48	80%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360	144	72	72	100%	72	288	80%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	24	12	12	100%	12	48	80%
	Kegiatan :	Output :								

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana-]	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (unit)	355	142	71	71	100%	71	284	80%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	748	291	150	150	100%	153	594	79%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	6	5	5	100%	5	16	80%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25	10	5	5	100%	5	20	100%
	Program :									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Outcome :								
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	0%
	Kegiatan:	Output :								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	80%
	Sub Kegiatan:									

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25	10	5	5	100%	5	20	80%
	Kegiatan:	Output :								
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	80%
	Sub Kegiatan:									
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10	4	2	2	100%	2	80	80%
7.01.02.2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	600	240	120	120	100%	120	480	80%
	Program :									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Outcome :								

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	80%
	Kegiatan :	Output :								
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	80%
	Sub Kegiatan:									
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	60	24	12	12	100%	12	48	80%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	600	240	120	120	100%	120	480	80%
	Kegiatan:	Output:								
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	80%
	Sub Kegiatan:									

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	4	2	2	100%	2	8	80%
	Sub Kegiatan:									
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15	6	3	3	100%	3	12	80.5%
	Program :									
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Outcome :								
		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	80%
	Kegiatan :									
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Output :								
		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	80%
	Sub Kegiatan:									

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.04.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	2	1	1	100%	1	4	80
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan (laporan)	60	24	12	12	100%	12	48	80%
7.01.04.2.01.01	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat	5	2	1	1	100%	1	4	80%
	Program :									
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Outcome :								
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	80%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
	Kegiatan:	Output :								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksanan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	80%
	Sub Kegiatan:									
7.01.05.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	375	150	75	75	100%	75	300	80%
7.01.05.2.01.5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10	4	2	2	100%	2	8	80%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.05.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	24	12	12	100%	12	48	80%
	Program :									
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Outcome :								
		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan:	Output:								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	2	2	2	100%	2	6	75%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
7.01.06.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10	4	2	2	100%	2	8	80%
7.01.06.2.01.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	2	1	1	100%	1	4	80%
7.01.06.2.01.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	2	1	1	100%	1	4	80%
7.01.06.2.01.8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	2	1	1	100%	1	4	80%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	250	100	50	50	100%	50	200	80%
	Program :									
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Outcome :								

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
		Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan :									
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Output :								
		Persentase adat, tradisi, dan lembaga budaya yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	5	2	1	1	100%	1	4	80%
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Outcome:								
		persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan:	Output :								

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output dan outcome) /Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerjac apaian Program (Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2024			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan yang terfasilitasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan:									
4.01.01.5.01.06	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Jumlah dokumen hasil penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	5	2	1	1	0%	1	4	80%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang

Pada bagian ini diuraikan mengenai capaian kinerja pelayanan Kapanewon Panggang berdasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan. Kapanewon Panggang sebagai OPD dengan fungsi pelayanan publik, fasilitasi dan koordinasi memiliki tugas yang bersifat intern dan ekstern. Tugas intern berkaitan dengan tugas pokok yang berhubungan dengan administrasi perkantoran sedang tugas ekstern bersifat fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Untuk penentuan tolok ukur kinerja berdasarkan pada target-target yang hendak dicapai sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis Kapanewon Panggang tahun 2021-2026 yakni Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.

Dari beberapa sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra, ada sasaran yang menjadi indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja Kapanewon Panggang sebagai wujud dukungan terhadap upaya pencapaian target kinerja RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul periode Tahun 2021-2026 secara langsung berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan. Sasaran Kinerja Utama Kapanewon Panggang pada periode 2021-2026 adalah Kualitas penyelenggaraan pelayanan kapanewon meningkat dengan Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pelayanan Kapanewon. Indikator Kinerja Utama Kapanewon Panggang memiliki 5 komponen di dalamnya yang terdiri dari:

1. Persentase penyusunan APBKal Tepat Waktu
2. Persentase penyusunan RKPKal tepat waktu
3. Persentase KK miskin yang tertangani
4. Persentase ketentraman dan keteriban umum
5. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kapanewon.

Dengan formulasi perhitungan: ∑ (20% x persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase KK miskin yang tertangani) + (20% x penanganan ketentraman dan ketertiban umum) + (20% x persentase nilai indeks kepuasan masyarakat)

Kelima unsur tersebut masing-masing diampu oleh jawatan projo, jawatan kemakmuran, jawatan sosial, jawatan keamanan dan jawatan pelayanan umum, yang kemudian diformulasikan menjadi rumusan indikator pelayanan kapanewon dengan satuan indeks.

Indikator Kinerja Kapanewon Panggang Tahun 2024 diukur dengan 3 sasaran strategis sebagai berikut.

1. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Kapanewon
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai AKIP
3. Pelestarian Potensi Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dengan indikator kinerja Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan.

Dari ketiga sasaran strategis diatas masing-masing kinerjanya tercapai sesuai target yang ditetapkan. Indeks Pelayanan Kapanewon ditargetkan 94,19 tercapai 96,38, dengan tingkat capaian Kinerja 102,4%. Nilai AKIP dengan target indeks 80,10 tercapai 81,05. Indikator kinerja sasaran strategis Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan yang ditargetkan 5 dengan jumlah yang tercapai 5, sehingga tingkat capaian mencapai 100% .

Dari analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2024 memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui intervensi adanya program dan kegiatan pengadaan bantuan sosial kepada

masyarakat, pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih, kesetaraan gender, peningkatan kesehatan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya analisis kinerja Kapanewon Panggang terhadap proyeksi capaian kinerja sasaran strategis dan IKU Kapanewon Panggang untuk periode tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 350/KPTS/2021 dengan Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat, dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon untuk Tahun 2024 ditargetkan 94,19.
Berikut kami sajikan table 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang Tahun 2023 dan 2024 serta Proyeksi Tahun 2025 dan Tahun 2026.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	TAhun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	94,07	94,11	94,15	94,19	94,07	96,38	96,39	96,40	Analisa dan evaluasi target kinerja dilaksanakan di akhir tahun

Selain Indikator Kinerja Utama, Kinerja Pelayanan Kapanewon Panggang Tahun 2021-2026 juga diukur dengan 2 sasaran strategis lainnya yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja sasaran Nilai AKIP dengan target nilai 80,30 pada tahun 2025.
2. Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan dengan target 5 potensi budaya pada tahun 2025.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Panggang

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Panggang maka diperlukan tentang potret Kapanewon Panggang saat ini.Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD Kapanewon Panggang sudah mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga tidak perlu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.
Indikator kinerja dan sasaran yang tersebut menggambarkan pencapaian Rencana Kerja Kapanewon Panggang. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Panggang, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Panggang adalah sebagai berikut :

2.3.1.1 Bidang Pemerintahan

a. Kondisi
   1) Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan masyarakat/publik
   2) Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
   3) Belum efektifnya pengawasan melekat
   4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat pada masalah hukum
b. Permasalahan
   1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
   2) Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata
   3) Belum cukup tertatanya sistem pembinaan ASN dan kinerja ASN
   4) Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai
   5) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

2.3.1.2 Bidang Ekonomi

a. Kondisi
   1) Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
   2) Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
   3) Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional
   4) Belum optimalnya penanganan obyek wisata
   5) Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya
   6) Perdagangan/perniagaan kurang berkembang
   7) Potensi industri kecil terutama dalam pemasaran kurang.
b. Permasalahan
   1) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok
   2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar PD maupun sumber dana

2.3.1.3 Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi Saat ini
   1) Di beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan karena geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan besar sulit masuk
   2) Masih banyaknya jalan yang kurang representatif yang belum memadai untuk jalur transportasi.
b. Permasalahan
   1) Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai
   2) Terbatasnya pemahaman Masyarakat tentang pengurangan bahaya bencana

2.3.1.4 Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini
   1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
   2) Masih banyaknya pengangguran
   3) Terdapatnya potensi Seni Budaya yang belum difasilitasi dan dikembangkan
   4) Terdapatnya potensi Atlet Olah Raga yang belum difasilitasi dan dikembangkan
b. Permasalahan
   1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
   2) Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya
   3) Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar
   4) Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja
   5) Kurangnya Peluang Kerja di Wilayah Kapanewon Panggang

2.3.2 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional atau Internasional.

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah "Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 yang meliputi :

a. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri
b. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani
c. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif
d. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
e. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, Undang–Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban
f. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur Bangsa Indonesia.

Kinerja pelayanan di Kapanewon Panggang mengacu pada tugas dan fungsi Kapanewon Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
n. penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Panggang terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2026-2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Panggang dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan Desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik. Pemerintah Kapanewon Panggang sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Panggang. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan

SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Panggang, yang meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Panggang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan penerangan jalan
2. Adanya potensi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
3. Adanya potensi Wisata Alam
4. Adanya Potensi Wisata Religi
5. Adanya Potensi Wisata Budaya
6. Adanya Potensi Ekonomi (Batik, Olahan Makanan, Minuman herbal, Gula Merah, Kerajinan tas, Kerajinan akar kayu, kerajinan canting)
7. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, pertanian dan lain - lain
8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
9. Adanya Standar Pelayanan Minimal

Faktor Penghambat :

1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian seperti,jagung, kedelai, kacang tanah dll
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
7. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor.

2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kapanewon Panggang

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra Kapanewon Panggang 2025-2029, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal.

a. Analisis Internal

   Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Panggang dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon.

   1) Kondisi Fisik Dasar

      Kapanewon Panggang, sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Gunungkidul, memiliki karakteristik geografis yang unik dan mempengaruhi

berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Kondisi fisik dasar ini mencakup topografi, hidrologi, tanah, dan iklim.

a. Topografi

Kapanewon Panggang didominasi oleh perbukitan karst yang khas dengan bentuk lahan seperti bukit, lembah, dan doline. Kondisi topografi ini memberikan pemandangan yang indah namun juga menyulitkan dalam pengembangan infrastruktur dan pertanian.

Ciri khas topografi Kapanewon Panggang:

Kemiringan lereng: Cukup curam, terutama di bagian selatan.

Tinggi tempat: Bervariasi, dengan titik tertinggi berada di bagian selatan.

Potensi bencana: Rawan longsor dan kekeringan.

b. Hidrologi

Sistem hidrologi di Kapanewon Panggang sangat dipengaruhi oleh kondisi geologis karst. Sungai-sungai di wilayah ini cenderung pendek dan alirannya tidak teratur, terutama pada musim kemarau.

Ciri khas hidrologi Kapanewon Panggang:

Sungai bawah tanah: Banyak ditemukan sungai bawah tanah yang terhubung dengan doline dan gua.

Sumber mata air: Terdapat beberapa sumber mata air yang menjadi sumber air bagi masyarakat.

Potensi kekeringan: Cukup tinggi, terutama pada musim kemarau.

c. Tanah

Jenis tanah di Kapanewon Panggang didominasi oleh litosol dan andosol. Litosol adalah jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan keras, sedangkan andosol terbentuk dari abu vulkanik. Kedua jenis tanah ini memiliki karakteristik yang kurang subur dan sulit diolah untuk pertanian.

2) Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

a. Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda, yaitu menggelembung pada kelompok usia 26-55 tahun
b. Penduduk usia kerja akhir (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi ke luar daerah
c. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani.

3) Kondisi Perekonomian

a. Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kapanewon Panggang, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa
b. Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil tembakau), dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi.

4) Kondisi Pemerintahan

Aparat Kapanewon telah melaksanakan tugas dan

fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon :

a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyatakat kalurahan.
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
d. Pengoordinasian upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum.
e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di wilayah Kapanewon.
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga di maknai sebagai kalurahan.
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon.
i. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon.
j. Penyelenggaraan system pengendalian intern di bidang penyelenggraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan Masyarakat kalurahan.
k. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon.
l. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kapanewon Panggang sebagai berikut :

1. Kekuatan
    a) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon
    b) Struktur organisasi dan formasi jabatan pada Kapanewon Panggang telah diisi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi
    c) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan

hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan

d) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya peternakan
e) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu dan meubel bambu yang cukup prospektif

2. Kelemahan
   a) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, longsor dan kekeringan
   b) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi
   c) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi
   d) Penguasaan teknologi masih rendah
   e) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif
   f) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur Kapanewon dan desa belum optimal
   g) Jumlah ASN yang setiap tahun selalu berkurang karena memasuki purna tugas

b. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Kapanewon Panggang dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar akhir untuk meletakkan kerangka pembangunan kapanewon.

1. Peluang
   a) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional
   b) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
   c) Adanya kerjasama antara Kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten–kabupaten di sekitarnya
   d) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat
2. Tantangan
   a) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
   b) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan
   c) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif
   d) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Panggang yaitu:

a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
b. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan
c. Kemampuan keuangan relatif terbatas
d. Masih banyaknya jumlah masyarakat miskin
e. Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/menengah
f. Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimal

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah tahun 2025-2029 maka Kapanenewon Panggang berperan aktif dalam perumusan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. Adapun program yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyeleggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
b. Program Penyeleggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
f. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
g. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
h. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Proses perumusan/penyusunan rancangan awal RKPD didahului dengan analisis kebutuhan pada perangkat daerah khususnya satu tahun yang berkenaan. Di Kapanewon Panggang proses itu dilaksanakan dengan menggunakan data dasar hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan untuk tahun berikutnya. Dari evaluasi tersebut diketahui berapa banyak program/kegiatan yang masih dibutuhkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya dan berapa banyak program/kegiatan yang sudah tidak dibutuhkan untuk dilaksanakan lagi karena sudah selesai (tercapai target akhir) atau tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Di samping itu juga dilaksanakan inventarisasi kebutuhan untuk tahun berikutnya yang pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan. Hasil dari kedua proses tersebut disusun menjadi daftar kebutuhan program/kegiatan tahun berikutnya. Proses ini diperlukan untuk menjamin keberlangsungan suatu program/kegiatan yang tidak bisa selesai dilaksanakan dalam satu tahun anggaran maupun untuk menilai pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dari sisi capaian indikator, anggaran, dan sebagainya. Disamping itu juga untuk mensinkronkan rencana kebutuhan perangkat daerah yang pada akhirnya akan diketahui kegiatan-kegiatan yang harus ditambahkan pada kegiatan-kegiatan

tahun berikutnya. Apabila dilihat dari usulan-usulan berdasarkan pada kebutuhan maka seharusnya akan mempengaruhi besaran pagu dan akan menyebabkan besaran dana lebih besar dari rancangan awal RKPD. Namun demikian usulan tetap mengacu pada konsistensi dalam setiap tahapan perencanaan dan kebijakan RKPD Pemerintah Daerah. Tahapan selanjutnya adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD TA 2025 dengan hasil analisis kebutuhan seperti tersebut di atas. Hal ini dilakukan untuk melihat konsistensi usulan kebutuhan program dan kegiatan dalam tiap tahapan perencanaan. Pada tahapan reviu terdapat perbedaan antara analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD pada kegiatan Sosial Kemasyarakatan yaitu jumlah usulan bantuan sosial jamban sehat dana PIWK yang lebih sedikit dari rancangan awal disebabkan kondisi riil di lapangan sudah banyak masyarakat miskin yang membuat jamban sehat secara mandiri, namun demikian data di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki penampungan air hujan (PAH) dan penampungan limbah (saptictang). Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang jumlah volume dan besaran anggaran berbeda dengan rancangan awal disebabkan karena menyesuaikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pusat.

Setelah membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan tahapan selanjutnya adalah menuangkan hasil analisis kebutuhan ke dalam format reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.4.1. berikut :

Tabel 2.4.1
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah: Kapanewon Panggang

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100%	100.000.000	
1.1	Kegiatan: Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 laporan	100.000.000	Kegiatan: Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 laporan	100.000.000	
1.1.1	Sub Kegiatan: Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul, Panggang	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 laporan	100.000.000	Sub Kegiatan: Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul, Panggang	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 laporan	100.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100%	25.970.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan terfasilitasi	100%	40.000.000	
2.1	Kegiatan: Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	3 dokumen	25.970.000	Kegiatan: Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	3 dokumen	40.000.000	
2.1.1	Sub Kegiatan: Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Panggang	 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelur	 3 dokumen	 25.970.000	Sub Kegiatan: Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Panggang	 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/K	 3 dokumen	 40.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.,00)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
			ahan yang Didampingi					emantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi			
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100%	**2.053.024.506**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100%	**1.481.387.596**	
	Kegiatan:					Kegiatan:					
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		**10.050.000**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		**11.800.000**	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.625.000	
3.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	960.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.135.000,000	
3.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	720.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	840,000	
3.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	840.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1.345,000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	800.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1.197.500	
3.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	2.880.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	2.885.000	
3.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2.150.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.232.500	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.,00)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
3.2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Dokumen Administrasi Keuangan perangkat Daerah tersusun		**1.667.474.506**	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Dokumen Administrasi Keuangan perangkat Daerah tersusun		**1.253.125.486**	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
3.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 orang/bl	1.660.824.506	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	244 orang/bl	1.246.657.986	
3.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	987.500	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	5.480.000	
3.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Aset	28 laporan	930.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Aset	28 laporan	930.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.,00)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 laporan	930.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 laporan	930.000	
3.4	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	6 dokumen	1.500.000	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	6 dokumen	1.500.000	
3.4.1	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	1.500.000	Sub Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	1.500.000	
3.5	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Dokumen administrasi umum Perangkat Daerah		112.400.000	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Dokumen administrasi umum Perangkat Daerah		43.305.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
3.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket belanja	3.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket belanja	3.000.000	
3.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	88.040.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	22.585.000	
3.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.500.000	
3.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	2 Paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	2 Paket	3.500.000	
3.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi	12 Laporan	2.000.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kunjungan Tamu			
3.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	88.660.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	9.720.000	
3.6	Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	28 unit	63.780.000	Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		23.037.000	
3.6.1	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	21.530.000	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	14.420.000	
3.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	35.750.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	8.617.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Lainnya yang Disediakan			
3.7	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: JUmlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	108 laporan	54.540.000	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: JUmlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		78.816.672	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
3.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	21.420.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 laporan	34.212.500	
3.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	22.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	32.004.172	
3.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	24 laporan	10.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	24 laporan	12,600,000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Umum Kantor yang Disediakan					Umum Kantor yang Disediakan			
3.8	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	174 unit	143.280.000	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah		69.433.438	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
3.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117 unit	49.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	127 unit	40.300.000	
3.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	35 unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah printer yang terfasilitasi	23 unit	10.500,000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								pemeliharaannya			
3.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	74.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	14.793.438	
3.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit	4.780.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	3.840.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100%	206.085.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100%	4.818.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan		167.240.000	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan		4.818.000	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
4.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 laporan	33.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 laporan	4.818.000	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Terfasilitasi	100%	66.995.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	100%	161.837.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kalurahan Terfasilitasi			
7.1	Kegiatan; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen	33.255.000	Kegiatan; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Gunungkidul, Panggang	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen	36.864.000	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
7.1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 dokumrn	24.355.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9 dokumen	24.259.000	
7.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	8.900.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	4 Laporan	12.605.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Wilayah Kecamatan			
	Kegiatan:					Kegiatan:					
7.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan		114.091.000	
7.2.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/ormas		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/ormas	114.091.000	
7.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		36.390.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		7.792.000	
7.3.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	3 Laporan	7.792.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Ekonomi Masyarakat			
7.4	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan		3.090.000	
7.4.1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 Keluarga	3.090.000	
7.4.2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1 Keluarga	0	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum terfasilitasi	100%	17.725.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	363.084.000	
5.1	Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: "Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum"	2 laporan	12.215.000	Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 laporan	363.084.000	
5.1.1	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	12.215.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	2 laporan	363.084.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Wilayah Kecamatan			
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	**113.960.000**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Gunungkidul, Panggang	Outcome: Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	82.643.400	
6.1	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		113.960.000	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang	Output: Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		82.643.400	
	Sub Kegiatan;					Sub Kegiatan;					
6.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	75 Orang	85.200.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	75 Orang	75.243.400	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
6.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	25.990.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 dokumen	7.400.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	106.300.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	31.151.000	
	Kegiatan:					**Kegiatan:**					
8.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	63 dokume	106.300.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa		31.151.000	
	Sub Kegiatan:					Sub Kegiatan:					
8.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa	2 Dokumen	1.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa	2 dokumen	973.000	
8.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 dokumen	8.750.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	16 dokumen	1.650.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.,00)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Pemerintahan Desa			
8.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 dokumen	63.550.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 dokumen	10.090.000	
8.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18 dokumen	18.250.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8 dokumen	5.250.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	8.132.000	

No.	Rencana Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.,00)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
8.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	4.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 dokumen	3.103.500	
8.1.6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	3.500.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	1.952.500	
	Jumlah				**2.742.709.50**					**2.264.920.966**	**-**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif yang bertujuan mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah. Seluruh usulan diperoleh melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Padukuhan (Musrenbangdus), Musrenbang Kalurahan (Musrenbangkal), hingga Musrenbang Kapanewon.

Pada forum Musrenbang Kapanewon Panggang, usulan dari padukuhan dan kalurahan dibahas bersama instansi terkait untuk disepakati sebagai rencana prioritas, yang selanjutnya menjadi dasar usulan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghitungan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan dan Penyusunan Program Pembangunan Prioritas, usulan masyarakat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Usulan berdasarkan Pagu Indikatif Sektoral (PIS), dan
2. Usulan berdasarkan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK).

Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk memperluas ruang akomodasi usulan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2026, total nilai usulan program dan kegiatan masyarakat dari pemangku kepentingan di wilayah Kapanewon Panggang yang masuk dalam skema PIS dan PIWK adalah sebesar Rp100.548.500,-, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5.1.

Tabel 2.5.1

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisi/ volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIS) – Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Pembangunan Jamban dan pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin)	Giriharjo, Panggang, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan Pembangunan Jamban dan Pembungan akhir tinja sehat	6	7.734.500	46.407.000	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 6 KK Koefisien : 6 KK Anggaran : 46.407.000
2	(PIS) – Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Pembangunan Jamban dan pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin)	Giriharjo, Panggang, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan Pembangunan Jamban dan Pembungan akhir tinja sehat	7	7.734.500	54.141.500	Rekomendasi : Disetujui dengan volume 7 KK Koefisien : 7 KK Anggaran : 54.141.500

Usulan tersebut sejalan dengan isu-isu penting dan tugas Kapanewon Panggang dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

1. Isu Kemiskinan dan Akses Sanitasi Dasar
   - Isu: Masih terdapat keluarga miskin yang belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dasar (jamban sehat dan sistem pembuangan akhir tinja yang layak).
   - Kesesuaian: Kegiatan pembangunan jamban sehat untuk keluarga miskin secara langsung mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang merupakan tugas lintas sektor melibatkan Kapanewon dan Kalurahan.
   - Dasar Tugas/Fungsi: Kapanewon memiliki tugas dalam fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk program pemberdayaan dan perbaikan infrastruktur dasar.
2. Isu Ketimpangan Layanan Dasar antar Wilayah
   - Isu: Ketimpangan layanan dasar antara padukuhan/desa yang lebih berkembang dengan wilayah padukuhan yang masih tertinggal.
   - Kesesuaian: Usulan ini mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur sanitasi antar wilayah di Kapanewon Panggang.
   - Tupoksi terkait: Fungsi koordinasi pembangunan dan pengelolaan program berdasarkan prinsip keadilan dan kewilayahan yang menjadi bagian dari urusan wajib pelayanan dasar.
3. Implementasi Pendekatan Pembangunan Partisipatif (Bottom-Up)
   - Isu: Perlunya penguatan sinergi perencanaan pembangunan dari bawah (padukuhan-kalurahan-kapanewon).
   - Kesesuaian: Usulan ini merupakan hasil Musrenbangdus, Musrenbangkal, dan Musrenbang Kapanewon yang memperlihatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan solusi atas masalah mereka sendiri.
   - Tupoksi terkait: Kapanewon sebagai simpul koordinasi perencanaan pembangunan partisipatif dan penghubung antara kalurahan dan pemerintah kabupaten.
4. Peningkatan Efektivitas Penggunaan Dana Publik
   - Isu: Optimalisasi anggaran pembangunan agar tepat sasaran dan berbasis kebutuhan real masyarakat.
   - Kesesuaian: Penetapan volume dan koefisien didasarkan pada data lapangan (jumlah KK miskin di lokasi), menjadikan program ini tepat sasaran dan efisien secara anggaran.
   - Tupoksi terkait: Kapanewon berperan dalam merumuskan skala prioritas pembangunan serta mengawal agar usulan masyarakat tidak keluar dari arah kebijakan daerah.

Usulan kegiatan pembangunan jamban dan pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin sangat sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kapanewon, serta relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Panggang, yaitu:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar (akses sanitasi).
- Mendukung pengurangan kemiskinan ekstrem.
- Meningkatkan efektivitas pembinaan pemerintahan desa.
- Mendorong penyusunan program pembangunan yang lebih partisipatif dan terukur.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON PANGGANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan, rencana kerja Perangkat Daerah Kapanewon Panggang disusun dengan memperhatikan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Hal ini bertujuan agar program dan kegiatan yang dirancang mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan provinsi secara terpadu, sesuai dengan prinsip bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Isu Strategis Nasional Tahun 2026, terdapat delapan agenda besar pembangunan, di antaranya penguatan demokrasi dan HAM, swasembada pangan, peningkatan daya saing SDM, hilirisasi industri berbasis SDA, serta penguatan tata kelola dan keberlanjutan lingkungan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan isu-isu strategis yang mencakup pengurangan kemiskinan, pengembangan wilayah selatan DIY, pemenuhan layanan dasar, penguatan SDM, dan pembangunan berkelanjutan berbasis budaya.

Adapun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam dokumen perencanaan tahun 2026 mengangkat isu strategis daerah yang meliputi tantangan dalam kualitas lingkungan, kesenjangan wilayah, penguatan ekonomi lokal, kualitas SDM, pelayanan publik berbasis digital, dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Seluruh isu tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah dengan tema: "Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban" yang dikonkretkan melalui tujuh program prioritas, yaitu:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Guyub dan Gayeng
7. Program Alam Lestari

Sinkronisasi Perencanaan

Rencana kerja Kapanewon Panggang Tahun 2026 telah disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dan dukungan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, sebagai berikut:

Arah Kebijakan Nasional	Isu Strategis Provinsi DIY	Isu Strategis Daerah Gunungkidul	Keterkaitan Program/Kegiatan Kapanewon Panggang
Membangun dari desa	Pengembangan wilayah selatan	Ketimpangan wilayah, akses layanan	Pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan sosial di wilayah padukuhan terpencil

Daya saing SDM	Peningkatan kualitas SDM	Kualitas SDM terbatas	Kegiatan peningkatan kapasitas, pendidikan nonformal, fasilitasi jambanisasi, sosialisasi kesehatan
Reformasi tata kelola	Reformasi birokrasi	Tata kelola belum optimal	Peningkatan layanan publik berbasis digital dan koordinasi lintas sektor
Ketahanan pangan	Ketahanan pangan	Ekonomi lokal belum optimal	Fasilitasi kegiatan pertanian, UMKM, dan bantuan produktif masyarakat
Kehidupan harmonis dengan lingkungan	Pembangunan berkelanjutan	Penurunan kualitas lingkungan hidup	Program mitigasi bencana, jambanisasi sehat, dan penanganan lingkungan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Panggang

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap satuan kerja dalam rentang waktu yang telah direncanakan. Sedang sasaran adalah target yang akan diharapkan dari suatu tujuan yang telah dirumuskan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD sesuai Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Panggang 2025-2029 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Tujuan Pembangunan Kapanewon Panggang

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2030
1	2	3	4
	Tujuan :		
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,44

Tabel 3.2.2
Sasaran Pembangunan Kapanewon Panggang

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2026
1	2	3	4
	Sasaran :		
1.	Dokumen keuangan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,0

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Panggang 2025-2029, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Panggang

No.	Tujuan/Sasaran IKU	Indikator Kinerja IKU	Targrt Kinerja IKU 2026
1	2	3	4
Tujuan			
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,40
Sasaran			
1.	Dokumen keuangan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4.	Ketentraman dan ketertiban umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan Umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,1

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan rancangan Renja Kapanewon Panggang Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Panggang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan merupakan syarat mutlak suatu daerah untuk berkembang dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibutuhkan perencanaan yang sistematis dan terpadu. Untuk itu dibutuhkan Rancangan Rencana Kerja dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Periode satu tahun yang memuat kebijakan Rencana Pembiayaan Aparatur Perangkat Daerah, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran serta target-target yang hendak dicapai, sebagai dasar pijakan dan gambaran rencana pembangunan Kapanewon Panggang.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan adalah bentuk tindak lanjut/realisasi dari program yang telah ditentukan sebelumnya. Program kerja dibedakan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu :

1. Program PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh satu PD
2. Program Lintas PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lain
3. Program Kewilayahan PD, merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program PD lain untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

Program dan Kegiatan Kapanewon Panggang dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan Kalurahan. Program dan kegiatan tersebut juga mengacu pada Renstra Kapanewon Panggang tahun 2022-2026, yang juga disesuaikan dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Kapanewon sebagaimana disepakati dalam forum gabungan SKPD Kapanewon.

Renja Kapanewon Panggang tahun 2026 terdiri dari 3 Urusan 8 Program 18 Kegiatan dan mencakup 45 Sub kegiatan. Dari program-program tersebut, merupakan program yang menyasar pada internal SKPD yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, dan program yang ditujukan bagi masyarakat dan Kalurahan di wilayah Kapanewon Panggang.

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah 2.264.920.996,00 dengan perkiraan maju pada tahun berikutnya sebesar Rp1.691.299398,00. Seluruhnya bersumber pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul serta dari Dana Keistimewa Yogyakarta.

Jumlah Prioritas Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kapanewon Panggang tahun 2026 dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Prioritas Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pamong Nglayani & Ngayomi	Terwujudnya Sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel	Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,1 Indeks	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.481.387.596,0**	
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.240.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.625.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.135.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	840.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.345.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.197.500,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.865.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.232.500,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.253.125.486,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.246.657.986,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	987.500,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.480.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	930.000,00	KAPANEWON PANGGANG

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	930.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.500.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.305.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.585.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.720.000	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.037.000	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	14.420.000	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	8.617.000	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.816.672,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.212.500,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.004.172,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.600.000,00	KAPANEWON PANGGANG

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.433.438,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.793.438,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.840.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**4.818.000,00**	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.818.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.818.000,00	KAPANEWON PANGGANG
		Dokumen Keuangan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**40.000.000,00**	KAPANEWON PANGGANG
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**47.746.000,00**	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.864.000,00	KAPANEWON PANGGANG

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dokumen Perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	24.259.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.605.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.792.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.792.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**31.151.000,00**	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.151.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	973.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.650.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.090.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.250.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.132.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.103.500,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.952.500,00	KAPANEWON PANGGANG
				100 Persen	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**100.000.000,00**	KAPANEWON PANGGANG

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	KAPANEWON PANGGANG
		Kesejahteraan Sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial		**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**114.091.000,00**	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	114.091.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	114.091.000,00	KAPANEWON PANGGANG
		Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.090.000,00**	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.090.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3.090.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**363.084.000,00**	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	363.084.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	363.084.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**82.643.400,00**	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	82.643.400,00	KAPANEWON PANGGANG
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	75.243.400,00	KAPANEWON PANGGANG

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.400.000,00	KAPANEWON PANGGANG
					J U M L A H		**2.264.920.996,00**	KAPANEWON PANGGANG

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, di Kapanewon Panggang dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**1.481.387.596,00**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.240.000,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.625.000,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.135.000,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	840.000,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.345.000,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.197.500,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.865.000,00
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.232.500,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.253.125.486,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.246.657.986,00
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	987.500,00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.480.000,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	930.000,00
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	930.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000,00
4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.500.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.305.000,00
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.585.000,00
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.500.000,00
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.720.000,00
6	Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.037.000,00
6.1	Pengadaan Mebel	14.420.000,00
6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.617.000,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.816.672,00

7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.212.500,00
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.004.172,00
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.600.000,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.433.438,00
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000,00
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000,00
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.793.438,00
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.840.000,00
J U M L A H		**1.481.387.596,00**

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp. 1.481.387.596,00 Seluruhnya bersumber pada APBD Kabupaten Gunungkidul.

Program dan kegiatan Kapanewon Panggang yang direncanakan melalui Renja Kapanewon Panggang Tahun 2026 dan rencana maju di tahun 2027 secara rinci dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Kapanewon Panggang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KAPANEWON PANGGANG				**2.264.920.966,00**				**1.691.299.398,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.000.000,00**				**100.000.000,00**
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100.000.000,00**				**100.000.000,00**
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***		100 Persen	**100.000.000,00**			100 Persen	**100.000.000,00**
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Adat,Tradisi,Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan*			100.000.000,00				100.000.000,00
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Laporan	100.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Laporan	100.000.000,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**40.000.000,00**				**40.000.000,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.000.000,00**				**40.000.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN TERLAKSANA***		100 Persen	**40.000.000,00**			100 Persen	**40.000.000,00**
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*			40.000.000,00				40.000.000,00
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	Kab. Gunungkidul, Panggang	3 Dokumen	40.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Kab. Gunungkidul, Panggang	3 Dokumen	40.000.000,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.124.920.996,00**				**1.551.299.398,00**
7.01	**KECAMATAN**				**2.124.920.996,00**				**1.551.299.398,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana***		100 persen	**1.481.387.596,00**			100 persen	**1.386.304.398,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			11.240.00,00				11.600.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Panggang	3 Dokumen	2.625.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	3 Dokumen	3.250.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Dokumen	1.135.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Dokumen	960.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Dokumen	840.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Dokumen	720.000,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Dokumen	1.345.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Dokumen	840.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Dokumen	1.197.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Dokumen	800.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kab. Gunungkidul, Panggang	17 Laporan	2.865.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	17 Laporan	2.880.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Panggang	3 Laporan	1.232.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	3 Laporan	2.150.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			1.253.125.486,00				1.203.699.398,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Gunungkidul, Panggang	244 Orang/bulan	1.246.657.986,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	252 Orang/bulan	1.197.199.398,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Laporan	987.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Laporan	1.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	Kab. Gunungkidul, Panggang	13 Laporan	5.480.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	13 Laporan	5.500.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*			930.000,00				850.000,00
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kab. Gunungkidul, Panggang	28 Laporan	930.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	28 Laporan	850.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*			1.500.000,00				1.500.000,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Kab. Gunungkidul, Panggang	6 Dokumen	1.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	6 Dokumen	1.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Umum*			43.305.000,00				29.660.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	4 Paket	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	4 Paket	3.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	6 Paket	22.585.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	6 Paket	14.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	4 Paket	2.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	4 Paket	2.500.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Paket	3.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Paket	3.500.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Gunungkidul, Panggang	12 Laporan	2.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	12 Laporan	2.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Gunungkidul, Panggang	22 Laporan	9.720.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	22 Laporan	4.660.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Gunungkidul, Panggang		23.037.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Laporan	23.000.000,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket mebel yang di sediakan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	20 unit	14.420.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	10 unit	15.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	*Jumlah unit* sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 unit	8.617.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 unit	8.000.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			78.816.672,00				48.105.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Gunungkidul, Panggang	9 Laporan	34.212.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	9 Laporan	3.500.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	72 Laporan	32.004.172.,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	72 Laporan	32.005.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	24 Laporan	12.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	24 Laporan	12.600.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*			69.433.438,00				67.890.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kab. Gunungkidul, Panggang	127 Unit	40.300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	127 Unit	40.300.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Gunungkidul, Panggang	23 Unit	10.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	23 Unit	11.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Unit	14.793.438,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Unit	12.750.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Panggang	11 Unit	3.840.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	11 Unit	3.840.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana***		100 Persen	**4.818.000,00**			100 Persen	**4.500.000,00**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*			4.818.000,00				4.500.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	14 Laporan	4.818.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	14 Laporan	4.500.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan Terfasilitasi***		100 Persen	**161.837.000,00**			100 Persen	**44.230.000,00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*			36.864.000,00				36.955.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	9 Dokumen	24.259.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	9 Dokumen	24.355.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	4 Laporan	12.605.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	4 Laporan	12.600.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Laporan kegiatan pemberdayaan kalurahan*			114.091.000,00				0
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	15 Pokmas / Ormas	114.091.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	‘-	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan*			7.792.000,00				7.275.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	Kab. Gunungkidul, Panggang	3 Laporan	7.792.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	3 Laporan	7.275.000,00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*			3.090.000,00				0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Keluarga	3.090.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	25 Keluarga	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Lembaga yang dibina***		100 Persen	**363.084.000,00**			100 Persen	**2.395.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*			363.084.000,00				2.395.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Laporan	363.084.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Laporan	2.395.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***		100 Persen	**82.643.400,00**			100 Persen	**82.700.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*			82.643.400,00				82.700.000,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara*	Kab. Gunungkidul, Panggang	75 Orang	75.243.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	75 Orang	75.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*							
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Panggang	24 Dokumen	7.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	24 Dokumen	7.500.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***		100 Persen	**31.151.000,00**			100 Persen	**31.170.000,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*			31.151.000,00				31.170.000,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Dokumen	973.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Dokumen	1.000.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Kab. Gunungkidul, Panggang	16 Dokumen	1.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	16 Dokumen	4.000.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Kab. Gunungkidul, Panggang	18 Dokumen	10.090.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	18 Dokumen	7.0000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*	Kab. Gunungkidul, Panggang	8 Dokumen	5.250.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	8 Dokumen	4.600.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Dokumen	8.132.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	1 Dokumen	8.770.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Dokumen	3.103.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Dokumen	3.000.000,00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Dokumen	1.952.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Panggang	2 Dokumen	2.800.000,00
Jumlah					**2.264.920.996,00**				**1.691.299.398,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Panggang Tahun 2026 yang disusun pada Tahun 2025 ini merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Kapanewon Panggang untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Panggang. Renja ini menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat selama satu tahun ke depan.

Bab penutup ini memuat tiga bagian utama, yaitu:

a. Catatan Penting

Penyusunan Renja Kapanewon Panggang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, serta meminimalkan potensi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik merupakan landasan utama keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kualitas perencanaan harus didukung oleh komitmen dan konsistensi seluruh unsur, baik pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder lainnya. Dukungan terhadap pelaksanaan Renja harus diwujudkan dalam bentuk disiplin, etos kerja, kejujuran, serta integritas dari seluruh unsur pelaksana pembangunan, agar visi dan misi pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan merupakan upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menjamin program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, diperlukan sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Pengendalian ini mengacu pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Melalui pengendalian dan evaluasi tersebut, dapat diketahui sejauh mana capaian pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Hal ini juga menjadi alat ukur kinerja perangkat Kapanewon, baik jawatan maupun kesekretariatan, dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Dokumen Renja Kapanewon Panggang Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaan, dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang tersedia demi terwujudnya tujuan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa dokumen Renja ini merupakan instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas dan integritas pelaksanaan program kegiatan, sehingga setiap perangkat Kapanewon dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 dapat berjalan dengan efektif dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Wonosari,
KAPANEWON PANGGANG,

ttd

TAUVIQ NUR HIDAYAT

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON TEPUS
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam regulasi tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus di susun ditingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukankebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusundengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guberbur, Bupati, dan Walikota menjadiUndang-undang, disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu, Kepala Daerah terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, maka Bupati terpilih harus menyusun RPJMD tahun 2025-2029. Sejalan terhadap penyusunan RPJMD maka perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memuat visi dan misi Bupati terpilih, dan menjadi dasar penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2026. Tahapan penyusunan Renja 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Renja
   Tahap ini adalah proses penyempurnaan rancangan awal Renja. Proses ini mencakup penyempurnaan pada rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
2. Forum Perangkat Daerah
   Rancangan Renja yang telah disempurnakan dibahas dan disempurnakan kembali dalam Forum PD. Forum PD ini dilakukan untuk memperoleh saran dan masukan dari pemangku kepentingan dan untuk mempertajam target program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
3. Penyusunan Rancangan Akhir
   Merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
4. Penetapan Renja PD
   Renja PD yang sudah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renja Kapanewon Tepus 2026 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainya adalah:

1. Renja PD dengan RKPD
   RKPD menjadi acuan dalam perumusan program , kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif. Renja PD disesuaikan dengan program prioritas PD.
2. Renja PD dengan Renstra PD
   Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja K/L (Kementrian/ Lembaga) dan PD Provinsi
   Renja PD memperhatikan program dan kegaiatan Renja K/L dan PD Provinsi.
   Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

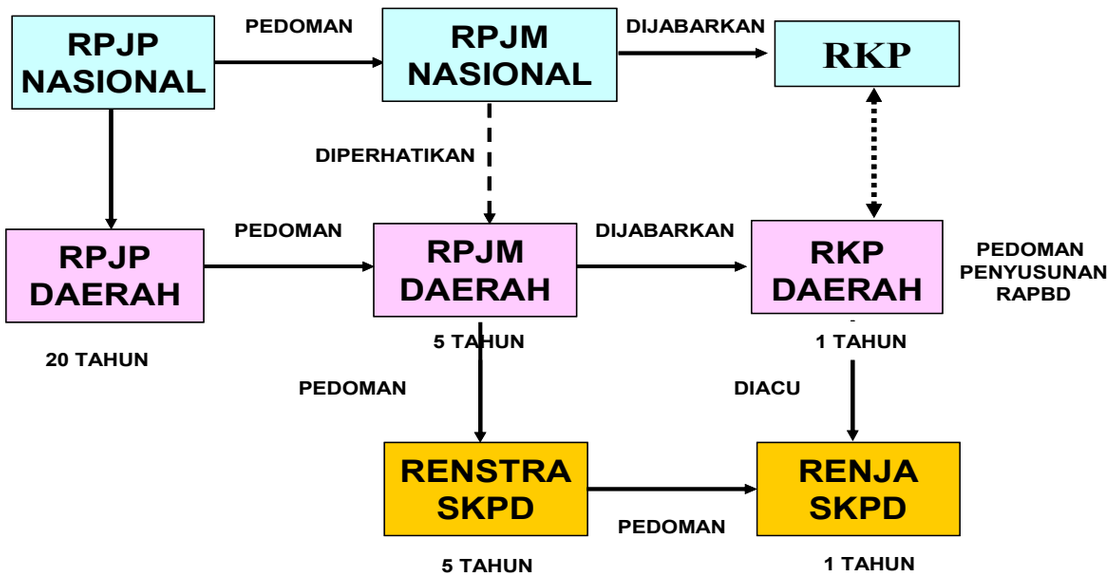

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kapanewon Tepus Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di D.I Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2026 menyesuaikan urusan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru, serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
5. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Kapanewon Tepus.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Kapanewon Tepus Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Tepus
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Tepus dan Capaian Renstra Kapanewon Tepus
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Tepus
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III Tujuan Dan Sasaran Kapanewon Tepus
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Tepus
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Kapanewon Tepus
Bab V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KAPANEWON TEPUS

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kapanewon Tepus

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul disusun mendasar pada prioritas program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Disamping itu, juga memperhatikan hasil masukan dari para pemangku kepentingan *(stakeholders)* melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat kelurahan, Kapanewon maupun Kabupaten. Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten telah disepakati berbagai program dan kegiatan yang diikuti dengan pendanaan indikatif untuk selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Kapanewon Tepus disusun dan ditetapkan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan selama ini lebih banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik dan keuangan. Semakin tinggi capaian persentase realisasi fisik dan keuangan, maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila program/kegiatan yang penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil dan tidak ada masalah. Oleh karena itu, ke depan perlu dilihat sejauh mana tingkat manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar seperti yang diharapkan.

Kapanewon Tepus sebagai Perangkat Daerah mempunyai komitmen, berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan.

Secara garis besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Tepus tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
   Untuk Program dan kegiatan yang realisasinya tidak memenuhi target kinerja tidak ada. Semua yang ditargetkan sudah memenuhi yang ditargetkan.
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
   Kapanewon Tepus pada tahun 2024 mengampu 8 program yaitu:
   - Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
   - Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan
   - Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
   - Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
   - Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
   - Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
   - Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
   - Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

   Dari 8 program tersebut telah terpenuhi target kinerja keluaran yang telah direncanakan. Pada tahun 2024 capaian fisik Kapanewon Tepus mencapai 100%. (sumber laporan TEPPRA tahun 2024)

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
   Untuk Program dan kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja tidak ada. Semua yang ditargetkan sudah memenuhi yang ditargetkan.
4. Faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja Kapanewon Tepus adalah:
   - Kebijakan dan regulasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang selalu berubah- ubah. Seringkali regulasi muncul setelah DPA tersusun.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD
   1. Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakkor-faktor yang diperkirakan akan memengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2026 adalah :
   - Berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten agar pelaksanaan program/kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
   - Berkoordinasi dengan TAPD terakait alokasi anggaran terealisasi sesuai dengan usulan yang ada.
   - Mengikuti alur perencanaan dan penganggaran sesuai regulasi yang ditetapkan.
   - Melihat capaian tahun- tahun sebelumnya.
   - Mengoptimalkan koordinasi internal di Kapanewon Tepus

   Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan Pencapaian Renstra tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Tepus Tahun dan
Pencapaian Renstra Kapanewon Tepus s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Tepus

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	26 dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	26 dokumen	100,00
		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,25 Indeks	8,11 Indeks	8,11 Indeks	8,11 Indeks	100,00	8,11 Indeks	8,11 Indeks	98,30
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen Renja Perubahan	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	8 Dokumen	80
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	75
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100,00	1 dokumen	3 dokumen	75
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen ROPK	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	100,00	2 dokumen	6 dokumen	75
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	100,00	2 dokumen	6 dokumen	75
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68 Laporan	17 dokumen	17 dokumen	17 Dokumen	100,00	17 dokumen	51 dokumen	75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen laporan monev	4 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	4,00 dokumen	100
		Jumlah laporan Teppra	12 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	12,00 dokumen	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	100,00	32 Laporan	96 Laporan	75
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan	14 dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	14 dokumen	100,00
		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74,67 Indeks	74.67 Indeks	74.67 Indeks	74.67 Indeks	NA	74.67 Indeks	74,67 Indeks	100
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	NA bulan	NA bulan	NA Bulan	NA	NA bulan	14 bulan	100,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/ bulan	168 Orang/ bulan	202 Orang/ bulan	202 Orang/ bulan	100,00	187 Orang/ bulan	557 Orang/ bulan	66,30
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	75
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan / SPJ bulanan	12 dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	12 dokumen	100
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	1 dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52 Laporan	13,00 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100,00	13 Laporan	39 Laporan	75
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 layanan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	1	100
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	100,00	6 dokumen	18 dokumen	75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	15 orang	NA orang	NA orang	NA Orang	NA	NA orang	15 orang	100
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	18 Dokumen	75
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Kapanewon terfasilitasi	6 layanan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	6	100
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,15 Indeks	49,15 Indeks	49,15 Indeks	49,15 Indeks	100,00	48,15 Indeks	49,15 Indeks	102,08
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	3 paket pembelian	NA paket pembelian	NA paket pembelian	NA paket pembelian	NA	NA paket pembelian	3 paket pembelian	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 PAket	3 PAket	3 PAket	3 Paket	100,00	3 Paket	9 PAket	75
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor terbeli	3 paket pembelian	NA paket pembelian	NA paket pembelian	NA paket pembelian	NA	NA paket pembelian	3 paket pembelian	100
		Jumlah laptop terbeli	1 unit	NA unit	NA unit	NA Unit	NA	NA unit	1 unit	100
		Jumlah mesin ketik terbeli	1 unit	NA unit	NA unit	NA Unit	NA	NA unit	1 unit	100
		Jumlah komputer terbeli	0 unit	NA unit	NA unit	NA Unit	NA	NA unit	0 unit	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	9 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	4 Paket	16 Paket	69,57
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan terbeli	3 paket pembelian	NA paket pembelian	NA paket pembelian	NA paket pembelian	NA	NA paket pembelian	3 paket pembelian	100
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	9 Paket	75
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	75 bendel	NA bendel	NA bendel	NA Bendel	NA	NA bendel	75 bendel	100
		Jumlah lembar penggandaan	6500 lembar	NA lembar	NA lembar	NA Lembar	NA	NA lembar	6500 lembar	100
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100,00	7 Paket	21 Paket	75
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar terbayar	12 rekening	NA rekening	NA rekening	NA Rekening	NA	NA rekening	12 rekening	100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	992 Dokumen	248 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	248 Dokumen	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA Laporan	NA Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	12 Laporan	12 Dokumen	0
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat terfasilitasi minum dan snacknya	110 orang	NA orang	NA orang	NA Orang	NA	NA orang	110 orang	100,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	30 kali	NA kali	NA kali	NA Kali	NA	NA kali	30 kali	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	48 Laporan	50
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 layanan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	2 layanan	100
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18 Unit	9 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00	7 Unit	20 Unit	111,11
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi tamu terbeli	0 set	NA set	NA set	NA Set	NA	NA set	NA NA	NA
		Jumlah meja rapat pimpinan terbeli	0 buah	NA buah	NA buah	NA Buah	NA	NA buah	NA NA	NA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	9 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	50 Unit	59 Unit	842,86
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah UPS yang terbeli	0 unit	NA unit	NA unit	NA Unit	NA	NA unit	NA unit	NA
		Jumlah LCD proyektor terbeli	1 unit	NA unit	NA unit	NA Unit	NA	NA unit	1 unit	100
		Jumlah peralatan sound terbeli	1 set	NA set	NA set	NA Set	NA	NA set	1 set	100
		Jumlah Genset terbeli	0 unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	NA NA	0
		Jumlah felling cabinet terbeli	0 unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	NA NA	0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	1 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00	2 Unit	7 Unit	63,64
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	0 unit	0 Unit	0,00	3 Unit	3 Unit	0,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 layanan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	2 layanan	100
		Jumah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100,00	48 Laporan	144 Laporan	75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim; Jumlah hari terfasilitasinya jasa surat menyurat	248;40 hari; surat	NA hari; surat	NA hari; surat	NA hari; surat	NA	NA hari; surat	246,40 hari; surat	99,19
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar (3 rekening X 12 bulan)	36 rekening	NA rekening	NA rekening	NA Rekening	NA	NA rekening	36,00 rekening	100
		Jumlah rekening air yang terbayar	12 rekening	NA rekening	NA rekening	NA Rekening	NA	NA rekening	12,00 rekening	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100,00	48 Laporan	144 Laporan	75
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 layanan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	4 layanan	100
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552 Unit	141 Unit	141 Unit	141 Unit	100,00	137 Unit	419 Unit	75,91

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas terbayar pajaknya	1 unit	NA unit	NA unit	NA Unit	NA	NA unit	0 unit	0
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	12 paket pemeliharaan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	12 paket pemeliharaan	100
		Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya	9 unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	9 unit	100,00
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	4 paket pemeliharaan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	4 paket pemeliharaan	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	272 Unit	68 Unit	68 Unit	68 Unit	100,00	68 Unit	204 Unit	75
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	180 Unit	45 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	0 Unit	0 Unit	0
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	5 unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	5 unit	100
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	2 unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	2 unit	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	5 unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	5 unit	100
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	5 unit	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	5 unit	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	21 Unit	14 Unit	14 Unit	100,00	19 Unit	54 Unit	75,00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor; Jumlah hari terfasilitasinya keamanan kantor	3;366 paket pemeliharaan;hari	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	3 ,212 paket pemeliharaan ; hari	100; 100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	6 Unit	75
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	2 unit	NA unit	NA unit	NA Unit	NA	NA unit	2 unit	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	4 NA	2 unit	2 Unit	100,00	2 NA	8 NA	50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	3 Unit	75
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah layanan Penataan Organisasi	1 layanan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	1 layanan	100
		nilai IKM	80,84 indeks	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	80,92 indeks	100,10
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP/SPIP	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah dokumen SKM	2 dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA Dokumen	NA	NA Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah dokumen SOP	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100
07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah layanan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 layanan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	1 layanan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	3 Laporan	9 Laporan	75
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah cabang olahraga yang dibina	3 cabang olahraga	NA cabang olahraga	NA cabang olahraga	NA cabang olahraga	NA	NA cabang olahraga	3 cabang olahraga	100
		Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan	3 kelompok	NA kelompok	NA kelompok	NA Kelompok	NA	NA kelompok	3 kelompok	100
		Jumlah keikutsertaan upacra kirab hari jadi Gunungkidul	1 Kali	NA Kali	NA Kali	NA Kali	NA	NA Kali	1 Kali	100
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	7 Laporan	58,33333333

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah layanan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2 layanan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	2 layanan	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	72 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100,00	18 Laporan	54 Laporan	75
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan forum kapanewon sehat	1 kesepakatan	NA kesepakatan	NA kesepakatan	NA Kesepakatan	NA	NA kesepakatan	1 kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan kalurahan siaga	1 kesepakatan	NA kesepakatan	NA kesepakatan	NA Kesepakatan	NA	NA kesepakatan	1 kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	2 Kesepakatan	NA Kesepakatan	NA Kesepakatan	NA Kesepakatan	NA	NA Kesepakatan	2 Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan update data SID/ SIKAB	1 kesepakatan	NA kesepakatan	NA kesepakatan	NA Kesepakatan	NA	NA kesepakatan	1 kesepakatan	100
		Jumlah layanan dropping air	687 tangki	NA tangki	NA tangki	NA Tangka	NA	NA tangki	600 tangki	87,34

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat	20 KK	NA KK	NA KK	NA KK	NA	NA KK	20 KK	100
		Jumlah rapat koordinasi jamban sehat	0 kali	NA kali	2 kali	NA Kali	NA	2 kali	2 kali	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	0 Laporan	12 Laporan	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	1200 layanan	NA layanan	NA layanan	NA Layanan	NA	NA layanan	1200 layanan	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	75
07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah layanan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 layanan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	2 layanan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6,5 Indeks	6,5 Indeks	6,5 Indeks	6,5 Indeks	100,00	6,5 Indeks	6,5 Indeks	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen usulan rencana kegiatan (DURP)	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMKaldan RKPKal	5 kalurahan	NA kalurahan	NA kalurahan	NA Kalurahan	NA	NA kalurahan	5 kalurahan	100
		Jumlah Bimtek perencanaan pembangunan desa terselenggara (PIWK)	1 kali	NA kali	NA kali	NA Kali	NA	NA kali	1 kali	100
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	28 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	7 Dokumen	20 Dokumen	71,42
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perlombaan kalurahan tingkat Kapanewon	1 kali	NA kali	NA kali	NA Kali	NA	NA kali	1 kali	100
		Jumlah pendampingan lomba kalurahan	1 kali	NA kali	NA kali	NA Kali	NA	NA kali	1 kali	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		tingkat Kabupaten								
		Jumlah dokumen profil kalurahan dan profil Kapanewon tersusun	6 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA Dokumen	NA	NA dokumen	6 dokumen	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,00	6 Laporan	18 Laporan	75
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah layanan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2 layanan	NA layanan	NA layanan	NA layanan	NA	NA layanan	2 layanan	100
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,5 Indeks	2,5 Indeks	2,5 Indeks	2,5 Indeks	100,00	2,5 Indeks	2,5 Indeks	100
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah frekuensi pertemuan PKK	12 kali	NA kali	NA kali	NA kali	NA	NA kali	12 kali	100
		Jumlah lembaga karang taruna terbina	1 lembaga	NA lembaga	NA lembaga	NA lembaga	NA	NA lembaga	1 lembaga	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga	2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00	2 Lembaga	5 Lembaga	62,5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA	NA dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah kesepakatan koordinasi masa tanam, perbenihan, pemupukan, perkebunan, peternakan, dan budidaya perikanan	1 kesepakatan	NA kesepakatan	NA kesepakatan	NA kesepakatan	NA	NA kesepakatan	1 kesepakatan	100
		Jumlah keikutsertaan pameran industri kecil	1 kali	NA kali	NA kali	NA kali	NA	NA kali	1 kali	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	3 Laporan	9 Laporan	75
07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah layanan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 layanan	NA layanan	NA layanan	NA layanan	NA	NA layanan	1 layanan	100
		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	6 Laporan	75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikan di Wilayah Kecamatan	jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikan di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah frekuensi koordinasi FKUB	1 kali	NA kali	NA kali	NA kali	NA	NA kali	1 kali	100
		Jumlah pelaksanaan safari taraweh tingkat Kapanewon	1 kali	NA kali	NA kali	NA kali	NA	NA kali	1 kali	100
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	4 Laporan	50
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah layanan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 layanan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	1 layanan	100
		Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Paraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daeah	4 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0 Laporan	1 Laporan	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kesepakatan koordinasi PEKAT	1 kesepakatan	NA kesepakatan	NA kesepakatan	NA kesepakatan	NA	NA kesepakatan	1 kesepakatan	100
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0 Laporan	1 Laporan	25
07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 layanan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	2 layanan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38 Indeks	38 NA	38 NA	38 NA	100,00	38 NA	38 Indeks	100
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan HUT yang terfasilitasi pelaksanaannya	1 kali	NA kali	NA kali	NA kali	NA	NA kali	1 kali	100
		Jumlah PASKIBRA Kapanewon yang dibentuk dan dilatih	71 orang	NA orang	NA orang	NA orang	NA	NA orang	71 orang	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100,00	75 Orang	225 Orang	75
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan patroli terpadu bersama Forkompimkap	12 kali	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	12 kali	100
		Jumlah koordinasi forkompimkap	2 kali	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	2 kali	100
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	1 dokumen	25

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 layanan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	7 layanan	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	233 Dokumen	58 dokumen	59 dokumen	59 dokumen	100	59 dokumen	178 dokumen	76,39
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pembinaan penyusunan produk hukum kalurahan	1 kali	NA kali	NA kali	NA kali	NA	NA kali	1 kali	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	40 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	10 Dokumen	30 Dokumen	75
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	1 kesepakatan	NA kesepakatan	NA kesepakatan	NA kesepakatan	NA	NA kesepakatan	1 kesepakatan	100
		Jumlah dokumen monografi kalurahan dan kapanewon yang	12 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA	NA dokumen	6 dokumen	50

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		tersusun								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	36 Dokumen	75
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKal	3 kali	NA kali	NA kali	NA kali	NA	NA kali	3 kali	100,00
		Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset kalurahan	1 kali	NA kali	NA kali	NA kali	NA	NA kali	1 kali	100
		Jumlah frekuensi koordinasi bidang administrasi pertanahan dan tanah kas kalurahan	1 kali	NA kali	NA kali	NA kali	NA	NA kali	1 kali	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	108 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	100,00	27 Dokumen	81 Dokumen	75
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kalurahan yang menyelenggarakan pemilihan Lurah	0 kalurahan	0 kalurahan	0 kalurahan	0 kalurahan	NA	0 kalurahan	0 kalurahan	0
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD/BPK yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	30 orang	NA orang	NA orang	NA orang	NA	NA orang	30 orang	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2 Dokumen	4 Dokumen	100
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangakatan dan pemberhentian pamong kalurahan	12 rekomendasi	NA rekomendasi	NA rekomendasi	NA rekomendasi	NA	NA rekomendasi	12 rekomendasi	100,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00	8 Dokumen	19 Dokumen	118,75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisari Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisari Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	NA Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	3 Dokumen	3 Dokumen	0
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	50 orang	NA orang	NA orang	NA orang	NA	NA orang	50 orang	100
		Jumlah kesepakatan koordinasi pembinaan mitigasi bencana alam	1 kesepakatan	NA kesepakatan	NA kesepakatan	NA kesepakatan	NA	NA kesepakatan	1 kesepakatan	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	75
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	2 Dokumen	50
02:22:08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah layanan kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 layanan	NA layanan	NA layanan	NA layanan	NA	NA layanan	1 layanan	100
		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	75
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan hari keistimewaan DIY	2 even	NA even	NA even	NA even	NA	NA even	1 even	50
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4 Laporan	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	NA NA	NA
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Jogja	0 0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 laporan	0
04:01:04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100,00	100 Persen	100 Persen	100
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah layanan kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terfasilitasi	1 layanan	NA layanan	NA layanan	NA layanan	NA	NA layanan	1 layanan	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan(Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	8 Dokumen	NA NA	NA NA	NA NA	NA	NA NA	NA NA	0
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Laporan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	NA NA	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	3 dokumen	8 dokumen	NA
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	8 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	5 Dokumen	62,5
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Rencana program kegiatan keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024	2 dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA dokumen	NA	NA dokumen	0 dokumen	0
		Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan	1 laporan	NA laporan	NA laporan	NA laporan	NA	NA laporan	0 laporan	0
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	NA NA	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	3 dokumen	8 dokumen	0

Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 adalah 100 %. Tabel tersebut menyajikan output dari masing-masing sub kegaiatan sesuai dengan target pada tahun 2024. Data di ambil dari laporan monev tahun 2024 . Untuk capaian keuangan terinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Capaian keuangan Kapanewon Tepus Tahun 2024

PROGRAM			Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi Tingkat Capaian	Alasan
Nama Program	Tolok Ukur	Satuan			
1	2	3	4	5	6
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Masukan : Dana	Rp	100.000.000,00	100.000.000,00	
	Keluaran : Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terfasilitasi	Persen	100	100	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Masukan : Dana	Rp	40.000.000,00	40.000.000,00	
	Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persen	100	100	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : Dana	Rp	1.243.147.860,00	1.211.751.285,00	Efisensi gaji ASN , tagihan listrik, dan tagihan air ,sisa belanja e purcaching
	Keluaran: Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	Persen	100	100	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Masukan : Dana	Rp	223.415.000,00	222.044.000,00	Sisa anggaran belanja barang
	Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana	Persen	100	100	

PROGRAM			Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi Tingkat Capaian	Alasan
Nama Program	Tolok Ukur	Satuan			
1	2	3	4	5	6
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Masukan : Dana	Rp	39.430.000,00	39.430.000,00	
	Keluaran : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi	Persen	100	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Masukan : Dana	Rp	8.400.000,00	8.400.000,00	
	Keluaran : Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi	Persen	100	100	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Masukan : Dana	Rp	105.900.000,00	105.813.100,00	Sisa belanja BPJS Paskibra
	Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terfasilitasi	Persen	100	100	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Masukan : Dana	Rp	38.907.500,00	38.815.000,00	Sisa belanja gaji THL
	Keluaran : Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlasana	Persen	100	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Tepus

Kapanewon Tepus dibentuk dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon Tepus sebagai salah satu perangkat daerah yang diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Tugas tersebut diampu oleh bidang- bidang di kapanewon. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh jawatan yang berkaitan dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu/ Pelayanan Terpadu di Kapanewon. Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di Kapanewon Tepus terdiri dari :

1. Pelayanan Legalisasi Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga (KK);
3. Pelayanan Dispensasi Nikah;
4. Pelayanan Surat Pindah Datang/Pergi Penduduk;
5. Pelayanan Legalisasi Akta Kelahiran dan KIA;
6. Pelayanan akta kematian
7. Pelayanan BPJS/SKTM
8. Pelayanan Pegajuan Kredit Kelompok Masyarakat
9. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

Dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dengan berbekal pada potensi yang dimiliki, Kapanewon Tepus telah mampu melaksanakan pelayanan satu pintu. Hasilnya cukup signifikan terbukti dari hasil quisioner yang disampaikan kepada masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat Kapanewon Tepus terhadap pelayanan yang diberikan cukup tinggi.

Di samping itu, berkat adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar instansi tingkat Kapanewon maupun dengan Pemerintah Kelurahan dan lembaga Kelurahan, penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kapanewon Tepus dapat terealisasi dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan. Dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

Namun demikian bukan berarti tidak adanya hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya menjadi permasalahan tersendiri di Kapanewon Tepus dalam mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatannya.

Indikator kinerja utama kapanewon ditetapkan oleh Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021, salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kapanewon perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon tahun 2026. Kinerja pelayanan Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Tepus
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM ,IKK)	Satuan (IKU,SPM,IKK)	Target Renstra Kecamatan Tepus					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
A.	Indikator Kinerja Utama											
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat											
	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,17	96,19	96,22	96,32	96,37	96,19	96,32	96,32	96,37	

Mendasar pada tabel di atas, capaian kinerja pelayanan Kapanewon Tepus tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu 96.16 naik menjadi 96,32 atau naik 0,13%.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Tepus

Kapanewon Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari ; 2 orang eselon III.a, 5 orang eselon IV.a, 2 orang eselon IV.b. Aktivitas kinerja Kapanewon Tepus dilaksanakan oleh PNS golongan II: 4 orang, golongan III: 8 orang, golongan IV: 2 orang dan PPPK 1 orang serta THL: 3 orang. Dalam perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kapanewon Tepus dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

Tabel 2.4
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kapanewon Tepus terinci pada tabel berikut:

No.	Masalah	Penyebab Permasalahan	Akar Masalah
1.	Tugas-tugas belum dapat diselesaikan dengan optimal	- Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang dimiliki	- Jumlah Pegawai Terbatas - Kemampuan SDM yang belum optimal
2.	Masih belum optimalnya pemberian layanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan adm. Kependudukan	- Ketergantungan dengan alat (jaringan internet) sangat tinggi - Partisipasi masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan masih kurang	- Jaringan internet belum stabil - Kemampuan SDM masyarakat kurang
3.	Keterbatasan dalam menyusun program dan kegiatan	- Penyerahan kewenangan belum di barengi dengan alokasi anggaran dari APBD	- Alokasi/ Pagu anggaran terbatas
4.	Masih belum optimalnya penanganan masyarakat kekurangan air bersih	- Belum optimalnya pemanfaatan sumber air bersih yang ada	- Sumber air yang ada belum dikelola dengan baik karena terbatasnya SDM
5.	Masyarakat kategori miskin dan pengangguran masih cukup tinggi	- Peluang dan lapangan kerja sangat minim	- Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah
6.	Peluang wirausaha sangat minim	- Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha,	- Keahlian yang dimiliki masih sangat terbatas

No.	Masalah	Penyebab Permasalahan	Akar Masalah
		jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat	
7.	Minimnya hasil pertanian sedangkan masyarakat di kapanewon Tepus sebagian besar merupakan petani	- Minimnya teknologi pertanian - Partisipasi masyarakat untuk belajar ilmu baru masih rendah - Belum adanya pendampingan pada petani	- Terbatasnya anggaran untuk pelatihan dan pendampingan - Di sebagian wilayah kapanewon terdapat kera ekor panjang
8.	Angka stunting tinggi	- Pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat masih rendah - Tingkat kemiskinan	- SDM yang kurang memadai - Penghasilan yang masih kurang

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon, serta mendasar pada hasil identifikasi faktor permasalahan sebagaimana tersebut pada tabel di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kapanewon Tepus yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan Rencana Strategis Kapanewon Tepus.

1. Faktor penghambat :
   a. Sangat minimnya kesempatan bagi aparatur pemerintah Kapanewon dan Kelurahan untuk mengikuti diklat teknis sesuai dengan bidangnya;
   b. Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan pada alat dan jaringan internet. Partisipasi masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan masih kurang.
   c. Anggaran belanja Kapanewon tergantung pada kemampuan APBD Kabupaten, sehingga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas tidak lepas dari faktor pendanaan;
   d. Kebijakan pemerintah (regulasi) yang selalu berubah-ubah, yang berakibat pada kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas mengingat terbatasnya kapasitas SDM aparat dalam memahami berbagai regulasi;
   e. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah;
   f. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi (daya beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan);
   g. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum; dan
   h. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
   i. Belum optimalnya sumber daya yang ada misalnya tanah. Dalam pertanian masih tergantung pada musim hujan. Sehingga masa panen hanya terjadi pada musim hujan saja.

j. Pemahaman tentang kesehatan di lingkungan masyarakat masih rendah sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti stunting.

2. Faktor pendorong :

a. Masih kentalnya jiwa gotong royong di masyarakat;
b. Jumlah sumber daya manusia yang memadai;
c. Adanya pendampingan/pembinaan kepada perangkat kalurahan dan lembaga-lembaga kelurahan serta mengirimkan perangkat kalurahan dan lembaga kalurahan mengikuti pembekalan/pelatihan;
d. Kesadaran masyarakat untuk berswadaya cukup tinggi;
e. Masih adanya program pemberian/penyaluran bantuan setiap bulan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima;
f. Kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan otonomi daerah;
g. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha ekonomi produktif;
h. Banyaknya sumber-sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan air bersih;
i. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah; dan
j. Letak Kapanewon Tepus yang cukup strategis dekat dengan rencana Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang mudah diakses dari berbagai arah.

2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Dearah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Melenium Development Goals).

Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Indikasi Visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

b. Indikasi Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis pemerintah pusat dan pemerintah D.I. Yogyakarta yang disampaikan oleh

Bappeda D.I Yogyakarta dalam Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 sebagai berikut:

a. Isu strategis nasional
   - Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
   - Kemandirian melalui Swasembada Pangan, Air dan Energi;
   - Pengembangan Infrastruktur;
   - Memperkuat Daya Saing SDM;
   - Hilirisasi dan Pengembangan Industri berbasis SDA;
   - Membangun dari Desa;
   - Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata Kelola; dan
   - Kehidupan yang Harmonis dengan Alam, Lingkungan dan Budaya.

b. Isu strategis D.I Yogyakarta
   - Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
   - Pengembangan Wilayah Selatan DIY
   - Perkembangan Teknologi Informasi
   - Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif
   - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
   - Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
   - Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta-Prambanan
   - Penguatan Ketahanan Pangan
   - Pelestarian dan Pengelolaan Budaya
   - Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan
   - Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
   - Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital

c. Isu strategis daerah
   - Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
   - Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
   - Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
   - Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
   - Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
   - Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, indikasi tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah:

"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestar

Dari beberapa prioritas di atas yang masuk dalam Kapanewon Tepus adalah Program Pamong Nglayani dan Ngayomi. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi meliputi meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan..

Untuk mendukung tugas Kapanewon maka disertai fungsi Kapanewon yaitu:

- perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- pengoordinasian pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum.
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon.
- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai Kalurahan.
- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon.
- penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon.
- penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon.
- penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

Sebelum menentukan isu-isu penting/strategis, lebih dahulu akan disajikan tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan

tujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu : faktor internal yang bersifat saat ini (*present condition*) dan cenderung mudah dikontrol *(controlable)* dan faktor eksternal yang bersifat masa depan *(future condition)* dan cenderung sulit dikontrol *(uncontrolable).*

1. Faktor *Internal*

   Faktor *internal* dari lingkungan strategis Kapanewon Tepus dalam satu tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

   a. Kekuatan (*Strength*)
      1) Adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi;
      2) Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik;
      3) Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
      4) Tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas; dan
      5) Terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.
   b. Kelemahan (*Weakness*)
      1) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang dimiliki;
      2) Kurangnya kualitas sumber daya manusia (profesionalisme, pengetahuan, dan ketrampilan);
      3) Belum adanya jabatan fungsional layanan;
      4) Belum efektifnya pengawasan melekat

2. Faktor *Eksternal*

   Faktor *eksternal* dari lingkungan strategis Kapanewon Tepus dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

   a. Peluang (*Opportunity*)
      1) Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
      2) Kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas layanan;
      3) Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan;
      4) Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral (UPT, Pemerintah Kalurahan dan Forkompimkap);
      5) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja;
      6) Banyaknya kelompok usaha ekonomis produktif;
      7) Tersedianya obyek wisata pantai yang potensial;
      8) Tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar kelurahan dan kapanewon;
      9) Pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional;
      10) Tersedianya sumber-sumber mata air bersih;
      11) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang pembangunan;
      12) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang industri dan jasa perdagangan; dan

13) Berkembangnya kepedulian atas penanganan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.

b. Tantangan (*Threat*)
   1) Belum semua peraturan-peraturan bersifat operasional, sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum;
   2) Kebutuhan air bersih masyarakat belum dapat tercukupi dengan merata;
   3) Produktivitas hasil produksi pertanian belum optimal yang menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;
   4) kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terkait hal baru masih rendah
   5) Masih cukup banyak masyarakat Kapanewon Tepus dengan kategori miskin, yang akan memberikan dampak luas.
   6) Perubahan budaya di lingkungan masyarakat yang cenderung condong ke kebiasaan kurang baik.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan di Kapanewon Tepus serta mendorong dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, yaitu :

a. Mengingat masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan masyarakat ke depan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan teknis;
b. Kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan terutama pada jaringan internet.
c. Dukungan pendanaan kegiatan di tingkat Kapanewon perlu ditingkatkan;
d. Banyaknya rakyat miskin dengan tingkat pendapatan yang masih rendah, ke depan perlu didorong dalam pengembangan penciptaan lapangan kerja; dan
e. Optimalisasi pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/ menengah.

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan *(stakeholders)*. Hal demikian karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD setidaknya lebih dahulu telah dimusyawarahkan mulai dari tingkat Kelurahan, Kapanewon, dan Kabupaten. Atau dengan kata lain telah dimusyawarahkan dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kapanewon Tepus berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah plafon pendanaannya.

Pada bab ini merupakan proses membandingkan kebutuhan rancanngan awal Renja PD dan analisis kebutuhuan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada di Kapanewon Tepus dengan program kegiatan yang lebih prioritas pada tahun 2026.

Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kapanewon Tepus dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi serta pendanaan yang tersedia. Dalam bab ini terdapat perbedaan nomenklatur pada Ranwal karena menyesuaikan regulasi / aturan

terutama terkait dengan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kemiskinan. Program dan kegiatan tersebut Secara rinci tertuang dalam tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 disajikan dalam tabel 2.5, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Tepus

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 Persen	100.000.000,00	
	Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya					Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya		Adat, Tradisi,Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan		100.000.000,00	
	Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00	
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan					Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100 Persen	40.000.000,00	
	Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		40.000.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerapan Dan Pendampingan Keistimewaan Di Kapanewon/Kemantren Dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan Di Kapanewon/Kemantren Dan Kalurahan/Kelurahan Yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000,00	Penerapan Dan Pendampingan Keistimewaan Di Kapanewon/Kemantren Dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan Di Kapanewon/Kemantren Dan Kalurahan/Kelurahan Yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1.293.431.427,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.80 indeks	1.293.431.427,00	
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.876.900,00	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.876.900,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.800.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.800.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	1 Dokumen	450.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	1 Dokumen	450.000,00	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	1 Dokumen	498.900,00	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	1 Dokumen	498.900,00	
	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd	2 Dokumen	605.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd	2 Dokumen	605.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	2 Dokumen	440.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	2 Dokumen	440.000,00	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	17 Laporan	1.243.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	17 Laporan	1.243.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.840.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.840.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.132.809.032,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.132.809.032,00	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	224 Orang/Bulan	1.128.509.032,00	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	224 Orang/Bulan	1.128.509.032,00	
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	1 Laporan	1.000.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	1 Laporan	1.000.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	13 Laporan	3.300.000,00	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	13 Laporan	3.300.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Aset		1.522.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		1.522.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	28 Dokumen	1.522.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	28 Dokumen	1.522.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.650.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawiaan		2.650.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	2.650.000,00	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	2.650.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				33.578.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum		33.578.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	2.625.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	2.625.000,00	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	15.867.000,00	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	3 Paket	15.867.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	3 Paket	2.976.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	3 Paket	2.976.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang	7 Paket	3.675.000,00	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	7 Paket	3.675.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disediakan								
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	1.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	1.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	12 Laporan	7.435.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	12 Laporan	7.435.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.430.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		7.430.000,00	
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	5 Unit	7.430.000,00	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	5 Unit	7.430.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				31.065.495,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		31.065.495,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	810.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	810.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	48 Laporan	17.655.495,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	48 Laporan	17.655.495,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	24 Laporan	12.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	24 Laporan	12.600.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.500.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		77.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	68 Unit	42.100.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	68 Unit	42.100.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	19 Unit	7.800.000,00	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	19 Unit	7.800.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	600.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	600.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				7.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana	100 persen	7.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan				7.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		7.000.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.000.000,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				314.388.500,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	100 persen	314.388.500,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				31.385.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan		31.385.000,00	
	Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	19.975.000,00	Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	19.975.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	11.410.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	11.410.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				265.141.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Laporan kegiatan pembedayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi		265.141.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	22 Pokmas / Ormas	265.141.000,00	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	23 Pokmas / Ormas	265.141.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				14.432.500,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			14.432.500,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	14.432.500,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	14.432.500,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan		Jumlah Kalurahan Yang Mengikiuti Sosialisasi Mitigasi Bencana		3.430.000,00	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Kalurahan Yang Mengikiuti Sosialisasi Mitigasi Bencana		3.430.000,00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 Keluarga	3.430.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 Keluarga	3.430.000,00	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				282.397.500,00	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	282.397.500,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				282.397.500,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		282.397.500,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	282.397.500,00	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	282.397.500,00	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				111.609.900,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		111.609.900,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				111.609.900,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		111.609.900,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	101.799.900,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	101.799.900,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	4 Dokumen	9.810.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	4 Dokumen	9.810.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		53.920.000,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	53.920.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Umlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		53.920.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		53.920.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul , Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	1.210.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	10 Dokumen	1.210.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	1.190.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	1.190.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	42.550.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	42.550.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1 Dokumen	4.540.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1 Dokumen	4.540.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal Renja Pd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	2.780.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	2.780.000,00	
	Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	1.650.000,00	Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	1.650.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Idealnya, proses penyusunan program dan kegiatan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan *(stakeholders)*. Melalui mekanisme yang demikian diharapkan benar-benar aspiratif dan semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan. Mekanisme yang demikian oleh Pemerintah Kapanewon Tepus telah dilakukan, karena setiap kali menyusun program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun ke depan lebih dahulu dilakukan musyawarah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat kalurahan maupun tingkat kapanewon. Usulan Program dan kegiatan disusun sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten disesuaikan dengan isu-isu strategis/penting yang ada serta telah disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas dari masing-masing kalurahan dengan sumber pendanaan baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Harapannya semua usulan yang disusun nantinya dapat direalisasi untuk kepentingan masyarakat umum.

Disamping melalui forum Musrenbang tingkat kabupaten, Pemerintah Kapanewon Tepus melalui kewenangan yang dimiliki mencoba melakukan koordinasi dengan PD terkait, dengan harapan dapat merealisasi apa yang menjadi harapan masyarakat. Walaupun tidak semua yang diusulkan bisa terakomodir dalam RKPD Kabupaten. Adapun usulan Pemangku Kepentingan (Musrenbang Kapanewon) untuk program PIWK sebesar Rp 142.676.000,00 terinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
	Program :Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan: Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						
	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	Kalurahan Sidoharjo	Jumlah KK yang memperoleh bantuan sarana BABS	11/KK	7.734.500,00	85.079.500,00	Prioritas
	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin	Kalurahan Tepus	Jumlah KK yang memperoleh bantuan sarana BABS	5/KK	7.734.500,00	38.672.500,00	Prioritas
	Bantuan Sosial PAH	Kalurahan Tepus	Jumlah KK yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PAH)	2/KK	9.462.000,00	18.924.000,00	Prioritas
Total						142.676.000,00	

Mendasar pada tabel di atas, usulan program/ kegiatan tahun 2026 dari pemangku kepentingan (lewat Musrenbang) hanya ada 1 usulan PIWK yang masuk dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kapanewon Tepus.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON TEPUS

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional tentang Kapanewon tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Sedangkan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Tepus sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan *(stakeholders).*

Pada tahun 2026 Kapanewon Tepus juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Tepus

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari adanya kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026.

Tabel 3.1
Tujuan Kapanewon Tepus

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96.60

Sumber data: Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel 3.2
Sasaran Kapanewon Tepus

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD 2026
1	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu	100
2	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu	100
3	Kesejahteraan Sosial Meningkat	persentase kegiatan sosial	100
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100
5	Pelayanan Umum yang Berkualitas	indeks kepuasan masyarakat	81,87

Sumber data: Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Tepus Tahun 2026

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
Tujuan			
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,37
Sasaran			
2	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu	100
3	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu	100

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
4	Kesejahteraan Sosial Meningkat	persentase kegiatan sosial	100
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100
6	Pelayanan Umum yang Berkualitas	indeks kepuasan masyarakat	81,87

Sumber data: Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan Renja Kapanewon Tepus Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026;
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan;
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
5. Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Tepus meliputi :

1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani;
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja merupakan kumpulan Program dan kegitan, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kapanewon Tepus dalam menyusun program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor yang memang harus direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, yaitu :

1. Sebagai konsekuensi untuk merealisasi program/ kegiatan Kapanewon Tepus dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
2. Meningkatkan layanan publik kepada masyarakat;
3. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanaan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, baik di Pemerintahan Kelurahan maupun Kapanewon;
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif;
5. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
6. Mengembangkan UMKM yang ada di wilayah Kapanewon Tepus;
7. Pengurangan angka stunting

Berdasarkan Rancangan Program dan Kegiatan Kapanewon Tepus Tahun 2026 terdiri dari 8 program dan 18 kegiatan dimana dalam pelaksanaanya kegiatan untuk difokuskan pada pelayanan masyarakat tersebar di wilayah Kapanewon Tepus yang terdiri dari 5 kalurahan. Delapan program yang diampu 2 diantaranya adalah program dana keistimewaan yakni bidang kelembagaan dan kebudayaan. Program dan kegiatan Pembangunan Kapanewon Tepus Tahun 2026 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Kapanewon Tepus

NO	Sasaran Kapanewon Tepus	Nama Program/ Kegiatan
1.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
2.	Dokumen keuangan yang berkualitas	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	Sasaran Kapanewon Tepus	Nama Program/ Kegiatan
3	Kesejahteraan sosial meningkat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan - Adat, Tradisi, Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan
4	Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5	Pelayanan umum yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selanjutnya program/ kegiatan dan sub kegiatan Kapanewon Tepus tahun 2026 berdasar 7 (tujuh) prioritas pembangunan yaitu sesuai tabel berikut:

Tabel 4. 2
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kapanewon Tepus

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
Pamong Nglayani & Ngayomi	Terwujudnya system penyelenggara pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu	100	7					UNSUR KEWILAYAHAN		
					7	1				KECAMATAN		
					7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.817.500,00	
					7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.385.000,00	
					7	1	3	2	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	19.975.000,00	KAPANEWON TEPUS
					7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.410.000,00	KAPANEWON TEPUS
					7	1	3	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	14.432.500,00	
					7	1	3	2	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	14.432.500,00	KAPANEWON TEPUS
					4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					4	1	4	5		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000,00	
					4	1	4	5	7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000,00	KAPANEWON TEPUS
		Dokumen Keuangan yang Berkualitas	persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu	100	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.920.000,00	
					7	1	6	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.920.000,00	
					7	1	6	2	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.210.000,00	KAPANEWON TEPUS
					7	1	6	2	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.190.000,00	KAPANEWON TEPUS
					7	1	6	2	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	42.550.000,00	KAPANEWON TEPUS
					7	1	6	2	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.540.000,00	KAPANEWON TEPUS
					7	1	6	2	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.780.000,00	KAPANEWON TEPUS
					7	1	6	2	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.650.000,00	KAPANEWON TEPUS

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
		Kesejahteraan Sosial Meningkat	persentase kegiatan sosial	100	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	265.141.000,00	
					7	1	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	265.141.000,00	
					7	1	3	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan	265.141.000,00	KAPANEWON TEPUS
					2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	
					2	22	8	5,1		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	
					2	22	8	5,1	6	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	KAPANEWON TEPUS
		Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	282.397.500,00	
					7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	282.397.500,00	
					7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	282.397.500,00	KAPANEWON TEPUS

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
					7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.609.900,00	
					7	1	5	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.609.900,00	
					7	1	5	2	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	101.799.900,00	KAPANEWON TEPUS
					7	1	5	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.810.000,00	KAPANEWON TEPUS
					7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.430.000,00	
					7	1	3	2,1		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	3.430.000,00	
					7	1	3	2,1	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3.430.000,00	KAPANEWON TEPUS

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
		Pelayanan Umum yang Berkualitas	indeks kepuasan masyarakat	81,87	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.000.000,00	
					7	1	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.000.000,00	
					7	1	2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.000.000,00	KAPANEWON TEPUS
Total											909.315.900,00	

Program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2026

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.293.431.427	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.876.900	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000	KAPANEWON TEPUS
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	450.000	KAPANEWON TEPUS
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	498.900	KAPANEWON TEPUS
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	605.000	KAPANEWON TEPUS
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	440.000	KAPANEWON TEPUS
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.243.000	KAPANEWON TEPUS
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.840.000	KAPANEWON TEPUS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.132.809.032	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.128.509.032	KAPANEWON TEPUS
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	KAPANEWON TEPUS
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.300.000	KAPANEWON TEPUS
Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	1.522.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.522.000	KAPANEWON TEPUS
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.650.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.650.000	KAPANEWON TEPUS
Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.578.000	

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.625.000	KAPANEWON TEPUS
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.867.000	KAPANEWON TEPUS
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.976.000	KAPANEWON TEPUS
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.675.000	KAPANEWON TEPUS
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000	KAPANEWON TEPUS
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.435.000	KAPANEWON TEPUS
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.430.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.430.000	KAPANEWON TEPUS
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.065.495	
Penyediaan jasa surat menyurat	810.000	KAPANEWON TEPUS
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.655.495	KAPANEWON TEPUS
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.600.000	KAPANEWON TEPUS
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.500.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.100.000	KAPANEWON TEPUS
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000	KAPANEWON TEPUS
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	KAPANEWON TEPUS
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000	KAPANEWON TEPUS
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	KAPANEWON TEPUS

Rumusan rencana program dan kegiatan Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Tepus

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kapanewon Tepus				2.202.747.327,00				2.231.680.415,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100.000.000,00				100.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				100.000.000,00
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100 persen	100.000.000,00			100 persen	100.000.000,00
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adat, Tradisi,Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan		- -	100.000.000,00			- -	100.000.000,00
2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		1 Laporan	100.000.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				40.000.000,00				30.000.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000,00				30.000.000,00
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan		100 persen	40.000.000,00			100 persen	30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		- -	40.000.000,00			- -	40.000.000,00
4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		3 Dokumen	40.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.062.747.327,00				2.091.680.415,00
7	01				KECAMATAN				2.062.747.327,00				2.091.680.415,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		82.80 indeks	1.293.431.427,00			82.80 indeks	1.446.857.015,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.876.900,00				9.803.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	2.300.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	450.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	900.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	498.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	900.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	605.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	830.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	440.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	590.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	17 Laporan	1.243.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17 Laporan	1.768.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul,	4 Laporan	1.840.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	2.515.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Tepus, Semua Kel/Desa						
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.132.809.032,00				1.253.381.215,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	224 Orang/bulan	1.128.509.032,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		224 Orang/bulan	1.249.081.215,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	13 Laporan	3.300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Laporan	3.300.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			1.522.000,00				1.892.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	28 Laporan	1.522.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		28 Laporan	1.892.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawiaan			2.650.000,00				6.580.800,00
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	2.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	6.580.800,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			33.578.000,00				52.100.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	3 Paket	2.625.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	3 Paket	15.867.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	33.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	3 Paket	2.976.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Paket	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	7 Paket	3.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Paket	4.000.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	11 Laporan	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Laporan	1.600.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	12 Laporan	7.435.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	7.500.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah			7.430.000,00				20.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	5 Unit	7.430.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Unit	20.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.065.495,00				31.600.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	4 Laporan	810.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	1.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	48 Laporan	17.655.495,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		48 Laporan	18.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	24 Laporan	12.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Laporan	12.600.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah			77.500.000,00				71.500.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua	68 Unit	42.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		68 Unit	42.100.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kel/Desa						
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	19 Unit	7.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		19 Unit	10.800.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	2 Unit	25.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	15.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	2 Unit	600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Unit	600.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	1 Unit	2.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Unit	3.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana		100 Persen	7.000.000,00			100 Persen	8.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			7.000.000,00				8.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	12 Laporan	7.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	8.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		100 Persen	314.388.500,00			100 Persen	180.031.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan			31.385.000,00				32.010.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	19.975.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	20.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	6 Laporan	11.410.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Laporan	12.010.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan kegiatan pembedayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi			265.141.000,00				123.141.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kel/Desa	23 Pokmas / Ormas	265.141.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		23 Pokmas / Ormas	123.141.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			14.432.500,00				16.500.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	3 Laporan	14.432.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Laporan	16.500.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan			3.430.000,00				8.380.000,00
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	25 Keluarga	3.430.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25 Keluarga	8.380.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 Persen	282.397.500,00			100 Persen	282.962.500,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			282.397.500,00				282.962.500,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	7 Laporan	282.397.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Laporan	282.962.500,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100 Persen	111.609.900,00			100 Persen	114.159.900,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			111.609.900,00				114.159.900,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	75 Orang	101.799.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75 Orang	102.999.900,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	9.810.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	11.160.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100 Persen	53.920.000,00			100 Persen	59.670.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			53.920.000,00				59.670.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	1.210.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10 Dokumen	1.660.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.190.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	1.640.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	26 Dokumen	42.550.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		26 Dokumen	41.150.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.540.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	4.990.000,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.780.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	3.580.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan DanaPagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Tepus, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	6.650.000,00
J U M L A H									**2.202.747.327,00**				**2.231.680.415,00**

Dari usulan tersebut di atas terdapat usulan PWIK sebesar Rp 142.676.000,00 yang merupakan usulan jamban sehat dan PAH yaitu di kalurahan Sidoharjo sebanyak 11 KK penerima Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat, kalurahan Tepus 5 KKPembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat dan 2 KK penerima PAH, yang terinci dalam tabel berikut:

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	KETERANGAN
1	SUGINAH	Blekonang I, RT03/RW05, Tepus, Tepus, Gk	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
2	REBO	Trosari II, RT03/RW04, Tepus, Tepus, Gk	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
3	HARDI SALAMUN	Trosari II, RT01/RW04, Tepus, Tepus, Gk	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
4	KALIS	Trosari II, RT04/RW04, Tepus, Tepus, Gk	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
5	RUKIMAN	Trosari II, RT02/RW04, Tepus, Tepus, Gk	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
6	TUPON	Bintaos, RT 02 RW 02, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
7	KASDI	Klepu, RT 02 RW 03, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
8	WAKIDI	Jati RT 02 RW 04, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
9	KLIWON	Klepu RT 05 RW 03, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
10	NGADINEM	Klepu RT 05 RW 03, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
11	SULIYEM	Puleireng RT 02 RW 07, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
12	SUMANTO	Pulengelo RT 01 RW 08, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
13	SARTONO	Klepu RT 05 RW 03, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
14	MARTO WAKIYO	Pulekulon RT 03RW 11, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
15	EDY ARI WIBOWO	Pulekulon RT 01 RW 11, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	KETERANGAN
16	TINGAAL SUTARJO	Pulekulon RT 01 RW 11, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul	Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin
17	SUYATNO	Singkil, RT04/RW12, Tepus, Tepus, Gk	Bantuan Sosial PAH
18	TUKINAH	Singkil, RT04/RW12, Tepus, Tepus, Gk	Bantuan Sosial PAH

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Tepus Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Kapanewon Tepus disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, Rencana Kerja Kapanewon Tepus yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Bab Penutup Rencana Kerja Kapanewon Tepus Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Tepus telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Tepus tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing- masing

dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran tahun 2026.

Wonosari,
KAPANEWON TEPUS,

ttd

SUBIYANTORO

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON RONGKOP
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainya antara lain :

1. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, harus mengacu pada dokumen

RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya yang disesuaikan dengan Program Prioritas PD.

2. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, artinya Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L (Kementerian/Lembaga) dan Perangkat Daerah Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja Perangkat Daerah juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan Perangkat Daerah Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

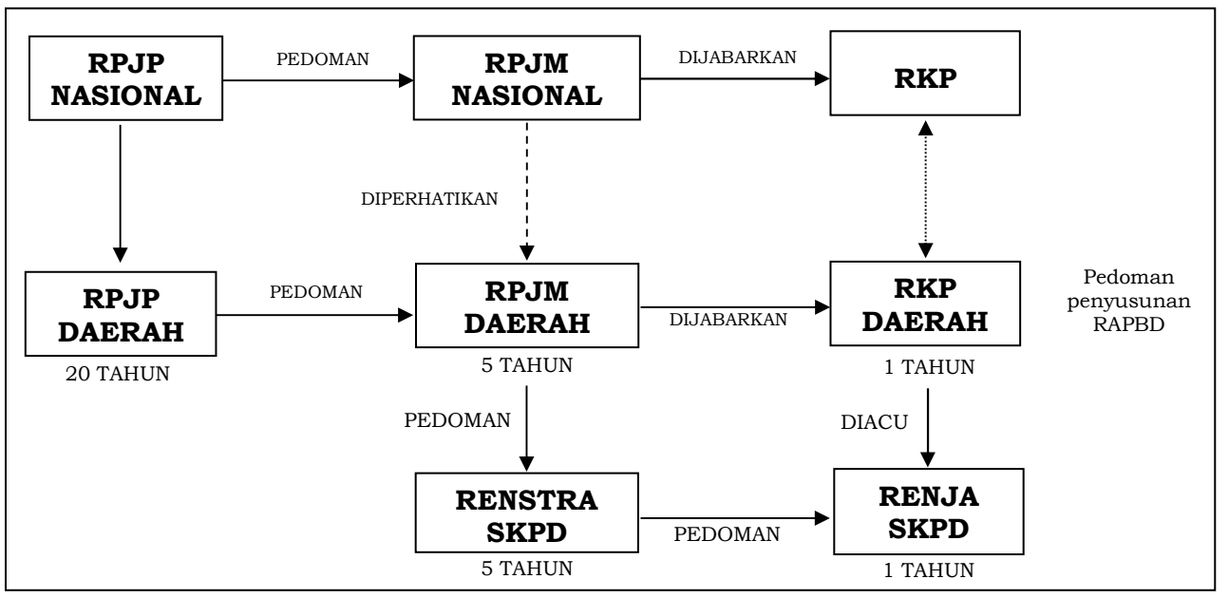

Bagan 1 : Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sehingga Renja PD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Rongkop tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 -2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kapanewon Rongkop adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kapanewon Rongkop dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2025.
3. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.

4. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Kapanewon Rongkop sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON RONGKOP
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Rongkop dan Capaian Renstra Kapanewon Rongkop

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Rongkop

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON RONGKOP
- 4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KAPANEWON RONGKOP

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Rongkop dan Capaian Renstra Kapanewon Rongkop

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Rongkop Tahun 2026 mengacu pada APBD Tahun 2025 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Rongkop berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan atau Tahun 2025.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Rongkop atau realisasi APBD untuk Kapanewon Rongkop yang disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2024 dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Pada Perangkat Daerah Kapanewon Rongkop dalam pelaksanaan Renja 2024 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, dengan kata lain target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan terpenuhi.
2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Pada Perangkat Daerah Kapanewon Rongkop dalam pelaksanaan Renja 2024 program dan kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
3. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang sudah memenuhi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;
   Realisasi program dan kegiatan Kapanewon Rongkop pada Tahun 2024 tidak ada yang target kinerja keluarannya melebihi dari target yang yang direncanakan dalam Renja Tahun 2024.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2024.
   a. Dalam rangka efisiesi waktu sebagian kegiatan Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain.
   b. Dalam rangka efisiensi anggaran sebagian kegiatan menggunakan anggaran dari Pemerintah Kalurahan.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian Tahun 2024;
   a. Adanya kesinkronan kegiatan yang dianggarkan perangkat daerah Kapanewon Rongkop dengan agenda kegiatan yang di selenggarakan perangkat daerah di tingkat Kabupaten.
   b. Adanya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
   c. Sumber Daya Manusia yang ada di perangkat daerah Kapanewon Rongkop yang kurang.
   d. Kenaikan harga BBM yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan lainnya.
   e. Rasionalisasi Anggaran tahun 2024 untuk memenuhi alokasi belanja wajib/mengikat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.
   a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala jawatan dan kepala sub bagian yang menangani kegiatan.
   b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait baik masalah pelaksanaan kegiatan maupun pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon.

c. Melaksanakan efisiensi anggaran tahun 2024 sesuai ketentuan/intruksi.

Dari uraian di atas rekapitulasi hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Rongkop dan pencapaian Renstra Kapanewon Rongkop s/d Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Rongkop

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
X.XX.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun*	*26*	*Dokumen*	*26*	*Dokumen*	*26*	*Dokumen*	*26*	*Dokumen*	*100*	*NA*	*Dokumen*	*26*	*Dokumen*	*100*
		Persentase Dokumen Perencanaan Tersusun Tepat Waktu	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*96,08*	*Persen*	*96,08*
		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*4,576*	*Indek*	*NA*	*Indek*	*NA*	*Indek*	*NA*	*Indek*	*NA*	*4,147*	*Indek*	*4,147*	*Indek*	*90,63*
		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah dokumen Renja perubahan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah dokumen draft Renstra	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	NA	Dokumen	0	Dokumen	0
		Jumlah dokumen Renstra	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	NA	Dokumen	0	Dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	2	Dokumen	2	Dokumen	10
X.XX. 01.2. 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	*100*	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	1	Dokumen	1	Dokumen	25
X.XX. 01.2. 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	1	Dokumen	1	Dokumen	25
X.XX. 01.2. 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen ROPK	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	2	Dokumen	3	Dokumen	25
X.XX. 01.2. 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	8	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	2	Dokumen	2	Dokumen	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD														
X.XX. 01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	17	Laporan	17	Laporan	25
X.XX. 01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah laporan e Monev	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	NA	Dokumen	4	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Teppra	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	NA	Dokumen	12	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	32	Laporan	4	Laporan	25
X.XX. 01.2.0 2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Keuangan Tersusun*	*NA*	*Dokumen*	*14*	*Dokumen*	*14*	*Dokumen*	*14*	*Dokumen*	*100*	*NA*	*Dokumen*	*12*	*Dokumen*	*100*
		Persentase Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*88,57 8*	*Indek*	*NA*	*Indek*	*NA*	*Indek*	*NA*	*Indek*	*NA*	*88,57 8*	*Indek*	*88,57 8*	*Indek*	*100*
		Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
X.XX. 01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	14	Bulan	14	Bulan	14	Bulan	*100*	NA	Bulan	14	Bulan	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008	Orang/bul an	NA	Orang/bul an	NA	Orang/b ulan	NA	Orang/b ulan	NA	252	Orang/bu lan	252	Orang/b ulan	25
X.XX. 01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokume n	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan	4	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	1	Laporan	1	Laporan	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
X.XX. 01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	NA	Dokumen	12	Dokumen	100
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	13	Laporan	13	Laporan	25
X.XX. 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Layanan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*
		Tolok Ukur Target Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*24*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	*25*
		Presentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terselesaikan	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
X.XX. 01.2. 05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	18	Orang	18	Orang	15	Orang	15	Orang	100	NA	Orang	15	Orang	83,33
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	6	Dokumen	6	Dokumen	25
X.XX.	*Administrasi Umum*	*Jumlah Layanan Administrasi*	*7*	*Layanan*	*7*	*Layanan*	*7*	*Layanan*	*7*	*Layanan*	*100*	*NA*	*Layanan*	*7*	*Layanan*	*100*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
01.2.06	*Perangkat Daerah*	*Umum Perangkat Daerah Terfasilitasi*														
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	*42,330*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*42,614*	*Indeks*	*42,614*	*Indeks*	*100*
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	*100*	NA	Paket Belanja	4	Paket Belanja	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	4	Paket	4	Paket	25
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	100	NA	Paket Belanja	4	Paket Belanja	100
		Jumlah Laptop terbeli	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah Kompute/PC terbeli	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Printer terbeli	1	Unit	0	Unit	1	Unit	1	Unit	100	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Filling Kabinet Terbeli	4	Buah	0	Buah	1	Buah	1	Buah	100	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	6	Paket	16	Paket	18,75
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	100	NA	Paket Belanja	4	Paket Belanja	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	5	Paket	5	Paket	29,41
X.XX.01.2.	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Barang Cetakan (20 BKP, 20 Disposisi, 4 Amplop	55	Bendel	55	Bendel	55	Bendel	55	Bendel	100	NA	Bendel	55	Bendel	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
06.05	Penggandaan	Berkop, 12 SPPD)														
		Jumlah lembar penggandaan	7200	Lembar	7200	Lembar	1200	Lembar	1200	Lembar	100	NA	Lembar	1200	Lembar	100
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	2	Paket	2	Paket	25
X.XX. 01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (12 Bulan X 1 Rekening)	12	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	100	NA	Rekening	12	Rekening	100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	992	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	248	Dokumen	248	Dokumen	25
X.XX. 01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minum dan sneck untuk tamu yang terfasilitasi	275	Orang	275	Orang	75	Orang	275	Orang	100	NA	Orang	275	Orang	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	12	Laporan	12	Laporan	25
X.XX. 01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat karyawan karyawati terfasilitasi	275	Orang	275	Orang	240	Orang	275	Orang	100	NA	Orang	275	Orang	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	14	Kali	0	Kali	14	Kali	14	Kali	100	NA	Kali	14	Kali	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	12	Laporan	12	Laporan	25
X.XX. 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terfasilitasi*	*2*	*Layanan*	*0*	*Layanan*	*02*	*Layanan*	*0*	*Layanan*	-	*NA*	*Layanan*	*0*	*Layanan*	*0*
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*12*	*Unit*	*NA*	*Unit*	*NA*	*Unit*	*NA*	*Unit*	*NA*	*NA*	*Unit*	*0*	*Unit*	*0*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	0	NA	Unit	0	Unit	0
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah filling cabinet terbeli terbeli	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah Webcam terbeli	2	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	NA	Unit	2	Unit	100
		Jumlah mic meja terbeli	2	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	NA	Paket	2	Paket	100
		Jumlah stand mic terbeli	2	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	NA	Unit	2	Unit	100
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	33,33
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gorden yang terbeli	0	Meter	0	Meter	0	Meter	0	Meter	0	NA	Meter	0	Meter	0
		Jumlah Pintu Pagar Besi terbeli	0	Buah	0	Buah	0	Buah	0	Buah	0	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	82	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	30	Unit	36,58
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
X.XX.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3*	*Layanan*	*3*	*Layanan*	*3*	*Layanan*	*3*	*Layanan*	100	*NA*	*Layanan*	*3*	*Layanan*	*100*
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*12*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*12*	*Laporan*	*12*	*Laporan*	*27*
		Persentase Penyediaan Jasa	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tefasilitasi														
X.XX. 01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan terfasilitasinya tenaga pengadministrasian	247	Hari	12	Bulan	247	Hari	247	Hari	100	NA	Hari	247	Hari	100
		Jumlah surat terkirim	1500	Surat	0	Surat	1500	Surat	1500	Surat	100	NA	Surat	1500	Surat	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	16	Laporan	16	Laporan	33
X.XX. 01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Telephon Dibayar (1 Rekening x 12 Bulan)	12	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	100	NA	Rekening	12	Rekening	100
		Jumlah Air Dibayar (1 Rekening x 12 bulan)	12	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	100	NA	Rekening	12	Rekening	100
		Jumlah Listrik Dibayar (1 Rekening x 12 Bulan)	12	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	100	NA	Rekening	12	Rekening	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	36	Laporan	36	Laporan	25
X.XX. 01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Termin Jasa Kebersihan di Bayar (non thl)	12	Termin	0	Termin	12	Termin	12	Termin	100	NA	Termin	12	Termin	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	12	Laporan	12	Laporan	25
X.XX. 01.2.0 9	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi*	*4*	*Layanan*	*4*	*Layanan*	*4*	*Layanan*	*4*	*Layanan*	*100*	*NA*	*Layanan*	*4*	*Layanan*	*100*
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*72,99*	*Persen*	*72,99*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*784*	*Unit*	*NA*	*Unit*	*NA*	*Unit*	*NA*	*Unit*	*NA*	*196*	*Unit*	*196*	*Unit*	*25*
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
X.XX. 01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	4	Paket pemeliharaan	4	Paket pemeliharaan	4	Paket pemeliharaan	4	Paket pemeliharaan	100	NA	Paket pemeliharaan	4	Paket pemeliharaan	100
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	9	Unit	9	Unit	9	Unit	9	Unit	100	NA	Unit	9	Unit	100
		Jumlah peket pemeliharaan motor dinas	36	Paket pemeliharaan	36	Paket pemeliharaan	36	Paket pemeliharaan	36	Paket pemeliharaan	100	NA	Paket pemeliharaan	36	Paket pemeliharaan	100
X.XX. 01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	684	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	171	Unit	171	Unit	25
X.XX. 01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100	NA	Unit	4	Unit	100
		Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	7	Unit	7	Unit	7	Unit	7	Unit	100	NA	Unit	7	Unit	100
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	7	Unit	7	Unit	7	Unit	7	Unit	100	NA	Unit	7	Unit	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	18	Unit	18	Unit	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan gedung kantor	1	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	100	NA	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	100
		Jumlah gedung kantor yang terfasilitasi keamanannya	365	Hari	366	Hari	365	Hari	365	Hari	100	NA	Hari	365	Hari	100
		Jumlah Paket Pemeliharaan rumah dinas	1	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	100	NA	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	3	Unit	3	Unit	25
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	Unit	4	Unit	4	Unit	4	Unit	100	NA	Unit	4	Unit	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	4	Unit	4	Unit	25
X.XX.01.2.13	*Penataan Organisasi*	*Jumlah dokumen IKM,SOP,SPIP tersusun*	*NA*	*Dokumen*	*4*	*Dokumen*	*4*	*Dokumen*	*4*	*Dokumen*	*100*	*NA*	*Dokumen*	*4*	*Dokumen*	100
		Persentase dokumen IKM tersusun	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	NA	Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah dokumen SOP	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen RTP/SPIP	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*0*	*Layanan*	*0*
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*2*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*100*
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah kegiatan cabang olahraga yang diikuti dalam Porkab/Pordes*	4	Cabor	4	Cabor	4	Cabor	4	Cabor	100	NA	Cabor	4	Cabor	100
		Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan	4	Kelompok	4	Kelompok	4	Kelompok	0	Kelompok	0	NA	Kelompok	0	Kelompok	0
		Jumlah partisipasi peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	2	Laporan	2	Laporan	25
7.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit*	*Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*100*	*NA*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*100*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	*Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*														
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	*8*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*25*
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01. 02.2. 02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	2	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat	420	Tengki	420	Tengki	366	Tengki	366	Tengki	100	NA	Tengki	195	Tengki	46,43
		Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah pelaksanaan pengadaan bansos	0	Kali	0	Kali	30	Kali	30	Kali	100	NA	Kali	0	Kali	0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	5	Laporan	5	Laporan	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	1200	Layanan	1200	Layanan	1200	Layanan	1200	Layanan	100	NA	Layanan	1200	Layanan	100
		Jumlah peserta pembinaan /koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum	36	Orang	36	Orang	36	Orang	36	Orang	100	NA	Orang	36	Orang	100
		Jumlah peserta sosialisasi pengurusan ijin UMK	30	Orang	0	Orang	30	Orang	30	Orang	100	NA	Orang	30	Orang	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	14	Laporan	14	Laporan	25
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Jumlah Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	100	*NA*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*100*
		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*9,5*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*9,5*	*Indeks*	*9,5*	*Indeks*	*100*
		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen Musrenbang	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan RPJMDesa dan RKPDes	8	Kalurahan	8	Kalurahan	8	Kalurahan	8	Kalurahan	100	NA	Kalurahan	8	Kalurahan	100
		Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang meningkat kapasitasnya	8	Kalurahan	8	Kalurahan	8	Kalurahan	8	Kalurahan	100	NA	Kalurahan	8	Kalurahan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Bimtek Perencanaan Pembangunan Kalurahan Terselenggara	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	NA	Kali	1	Kali	100
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	72	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	18	Dokumen	18	Dokumen	25
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lomba Kalurahan	1	Kali	0	Kali	1	Kali	1	Kali	100	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah profil Kalurahan dan Kapanewon tersusun	9	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	100	NA	Dokumen	9	Dokumen	100
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba Kalurahan tingkat kabupaten	1	Kali	0	Kali	1	Kali	1	Kali	100	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	11	Laporan	11	Laporan	25
7.01.03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Layanan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*100*	*NA*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*100*
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*10*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*10*	*Indeks*	*10*	*Indeks*	*100*
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Tingkat Kecamatan														
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan Forum anak	1	Kesepakatan	0	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah frekuensi rakor TP PKK	12	Kali	12	Kali	12	Kali	12	Kali	100	NA	Kali	12	Kali	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	52	Lembaga Kemasyarakatan	NA	Lembaga Kemasyarakatan	NA	Lembaga Kemasyarakatan	NA	Lembaga Kemasyarakatan	NA	13	Lembaga Kemasyarakatan	13	Lembaga Kemasyarakatan	25
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	1	Kelompok	0	Kelompok	1	Kelompok	1	Kelompok	100	NA	Kelompok	1	Kelompok	100
		Jumlah kesepakatan koordinasi masa tanam, pembersihan, pemupukan, perkebunan, peternakan dan budidaya perikanan	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	2	Kesepakatan	100
		Jumlah pelaku industri kecil/rumah tangga yang meningkat pengetahuannya	20	Orang	20	Orang	20	Orang	20	Orang	100	NA	Orang	20	Orang	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	4	Laporan	4	Laporan	25
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	100	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*8*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*25*
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat Kapanewon	40	Orang	0	Orang	40	Orang	40	Orang	100	NA	Orang	40	Orang	100
		jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat Kapanewon	1	Kali	0	Kali	1	Kali	1	Kali	100	NA	Kali	1	Kali	20
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	2	Laporan	2	Laporan	25
7.01.04.2.02	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*Jumlah Layanan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	100	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*4*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*25*
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	Laporan	1	Laporan	25
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Jumlah Layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*100*	*NA*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*100*
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*33,3*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*33,3*	*Indeks*	*33,30*	*Indeks*	*100*
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah Kegiatan HUT yang terfasilitasi Pelaksanaannya	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	NA	Kegiatan	1	Kegiatan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K															
		Jumlah paskib Kapanewon yang dibentuk dan dilatih	75	Orang	73	Orang	75	Orang	75	Orang	100	NA	Orang	75	Orang	100
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan P	300	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	75	Orang	75	Orang	25
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah pelaksanaan patroli terpadu bersama Forkompincam*	12	Kali	12	Kali	12	Kali	12	Kali	100	NA	Kali	12	Kali	100
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	12	Dokumen	12	Dokumen	25
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Jumlah Layanan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*9*	*Layanan*	*9*	*Layanan*	*9*	*Layanan*	*9*	*Layanan*	*100*	*NA*	*Layanan*	*9*	*Layanan*	*100*
		Persentase Fasilitasi,	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*200*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*50*	*Dokumen*	*50*	*Dokumen*	*25*
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01. 06.2. 01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pembinaan penyusunan produk hukum Kalurahan	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	1	Dokumen	1	Dokumen	25
7.01. 06.2. 01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah monografi kalurahan dan kapanewon yang tersusun	18	Dokumen	18	Dokumen	18	Dokumen	18	Dokumen	100	NA	Dokumen	18	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	72	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	18	Dokumen	18	Dokumen	25
7.01. 06.2. 01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKal	8	Kali	8	Kali	8	Kali	8	Kali	100	NA	Kali	8	Kali	100
		Frekuensi monev pengelolaan keuangan kalurahan	8	Kali	8	Kali	8	Kali	8	Kali	100	NA	Kali	8	Kali	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	72	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	18	Dokumen	18	Dokumen	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Pendayagunaan Aset Desa														
7.01. 06.2. 01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah koordinasi dengan Lurah dan Pamong lainnya	4	Kali	0	Kali	4	Kali	4	Kali	100	NA	Kali	4	Kali	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	5	Dokumen	5	Dokumen	20
7.01. 06.2. 01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	*Jumlah BPD/BPK yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan*	30	Orang	30	Orang	30	Orang	30	Orang	100	NA	Orang	30	Orang	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	1	Dokumen	1	Dokumen	25
7.01. 06.2. 01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggarakan pengisian pamong kalurahan dan atau staf pamong kalurahan	5	Rekomendasi	0	Rekomendasi	5	Rekomendasi	5	Rekomendasi	100	NA	Rekomendasi	5	Rekomendasi	100
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	5	Dokumen	5	Dokumen	25
7.01. 06.2. 01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100	NA	Orang	50	Orang	100
		Jumlah koordinasi Mitigasi Bencana	1	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Kali	100	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	2	Dokumen	2	Dokumen	25
2.22. 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	kebudayaan														
2.22.08.2.09	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Jumlah Layanan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksana*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*
		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*2*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*Laporan*	*NA*	*1*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*100*
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
2.22.08.2.09.07	*Gelar Budaya Jogja*	*Jumlah gelar budaya Jogja*	*1*	*Kali*	*0*	*Kali*	*1*	*Even*	*1*	*Event*	*100*	*NA*	*Kali*	*1*	*Kali*	*100*
2.22.08.2.09.16	*Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*	*Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*	*4*	*Laporan*	*0*	*Laporan*	*0*	*Laporan*	*0*	*Laporan*	*NA*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*25*
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
4.01.04.5.01	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*Jumlah Layanan Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*8*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*25*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output dan outcome)/subkegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	8	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	2	Dokumen	2	Dokumen	25
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan; Rencana Program Kegiatan Keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurana Tahun 2024	1;2	Laporan; Dokumen	0	Laporan; Dokumen	1;2	Laporan; Dokumen	1;2	Laporan; Dokumen	100	NA	Laporan; Dokumen	1;2	Laporan; Dokumen	100

Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 adalah 100 %. Tabel tersebut menyajikan output dari masing-masing sub kegaiatan sesuai dengan target pada tahun 2024. Data di ambil dari laporan monev tahun 2024. Untuk capaian keuangan terinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Capaian keuangan Kapanewon Rongkop Tahun 2024

PROGRAM			Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi Tingkat Capaian	Alasan
Nama Program	Tolok Ukur	Satuan			
1	2	3	4	5	6
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Masukan : Dana	Rp	100.000.000	100.000.000	
	Keluaran : Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terfasilitasi	Persen	100	100	

PROGRAM			Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi Tingkat Capaian	Alasan
Nama Program	Tolok Ukur	Satuan			
1	2	3	4	5	6
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Masukan : Dana	Rp	105.570.000	105.370.000	Sisa dari belanja perjalanan dinas
	Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Persen	100	99,81	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : Dana	Rp	1.416.864.766	1.394.940.554	Sisa belanja upah THL, Efisensi gaji ASN, sisa belanja minek, belanja perjalanan dinas, belanja alat listrik, belanja modal peralatan kantor, tagihan listrik, dan tagihan air
	Keluaran: Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	Persen	100	98,45	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Masukan : Dana	Rp	62.230.000	62.230.000	
	Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terlaksana	Persen	100	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Masukan : Dana	Rp	35.512.000	35.362.000	Sisa belanja perjalana dinas
	Keluaran : Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Terfasilitasi	Persen	100	99,57	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Masukan : Dana	Rp	3.565.000	3.565.000	
	Keluaran : Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terfasilitasi	Persen	100	100	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Masukan : Dana	Rp	108.470.000	108.420.000	Sisa belanja perjalanan dinas

PROGRAM			Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi Tingkat Capaian	Alasan
Nama Program	Tolok Ukur	Satuan			
1	2	3	4	5	6
	Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terfasilitasi	Persen	100	100	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Masukan : Dana	Rp	9.303.000	9.303.000	
	Keluaran : Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlasana	Persen	100	100	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Rongkop

Indikator capaian kinerja pelayanan Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM),sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pengukuran capaian kienerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Rongkop dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagi berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Rongkop
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Kapanewon Rongkop				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indikator Kinerja Utama										
	Kualitas Penhyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat										
	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	82,45	82,47	82,50	82,52	96,98	97,10	97,12	97,15	

Realisasi Indeks Pelayanan Kapanewon Rongkop mengalami kenaikan dari 96,98 pada tahun 2023 menjadi 97,10 pada tahun 2024, atau naik sebesar 0,12%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Rongkop

2.3.1 Tugas dan Fungsi Kapanewon Rongkop

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon bahwa Kapanewon Rongkop mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
n. Penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kapanewon Rongkop

Berdasarkan penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya di Kapanewon Rongkop masih menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kapanewon dan Kalurahan
3. Masih rendahnya sumber daya manusia Pamong Kalurahan
4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat dalam masalah peraturan perundangan.
5. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal
6. Angka kemiskinan masih perlu ditangani serius
7. Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan belum seluruhnya berjalan dengan efektif
8. Implementasi kerjasama antar daerah belum berjalan secara optimal

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Kapanewon Rongkop adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia Pamong Kalurahan belum merata.

2. Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil yang ditempatkan di Kecamatan.
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang masih kurang karena keterbatasan anggaran.
4. Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai kompetensi dibidang Akuntansi
5. Harga kebutuhan pokok masyarakat semakin tinggi
6. Kurangnya SDM yang berkompeten
7. Terbatasnya anggaran dan SDM

2.3.3 Beberapa dampak yang dialami terhadap capaian visi dan misi Kepala Dearah, pada capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Melenium Development Goals*).

Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Indikasi Visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
   "Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"
b. Indikasi Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
   1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
   2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
   3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
   4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
   5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
   6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis pemerintah pusat dan pemerintah D.I. Yogyakarta yang disampaikan oleh Bappeda D.I Yogyakarta dalam Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 sebagai berikut:

a. Isu strategis nasional
   - Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
   - Kemandirian melalui Swasembada Pangan, Air dan Energi;
   - Pengembangan Infrastruktur;

- Memperkuat Daya Saing SDM;
- Hilirisasi dan Pengembangan Industri berbasis SDA;
- Membangun dari Desa;
- Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata Kelola; dan
- Kehidupan yang Harmonis dengan Alam, Lingkungan dan Budaya

b. Isu strategis D.I Yogyakarta
- Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
- Pengembangan Wilayah Selatan DIY
- Perkembangan Teknologi Informasi
- Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif
- Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta-Prambanan
- Penguatan Ketahanan Pangan
- Pelestarian dan Pengelolaan Budaya
- Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan
- Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
- Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital

c. Isu strategis daerah
- Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
- Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
- Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
- Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
- Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, indikasi tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah:

"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Adapun prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Rongkop mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul

Nomor 45 Tahun 2023 yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon. Tugas dan fungsi Kapanewon Rongkop terkait dengan visi dan misi daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Rongkop dapat mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan serta meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Rongkop sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan memerlukan penunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat agar tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat termasuk sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Rongkop. Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berikut merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi beberapa faktor, yaitu Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kapanewon Rongkop dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Peluang (*Opportunities*)
   1. Peraturan/Regulasi yang konkrit dan jelas
   2. Perkembangan tehnologi informasi yang semakin cepat dan akurat
   3. Semangat kerjasama dan gotong royong aparatur dan masyarakat Kalurahan cukup baik
   4. Situasi dan kondisi Kalurahan yang cukup kondusif, aman dan terkendali.
   5. Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat

b. Ancaman (*Threat*)
   1) Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan.
   2) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
   3) Kondisi sosial masyarakat dan Kalurahan yang cukup beragam
   4) Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah mengikuti mekanisme pasar.
   5) Perubahan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata yang meningkatkan potensi penyakit masyarakat,

gesekan/konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta bahaya perdagangan orang.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Rongkop dalam lima tahun yang akan datang, yaitu :

a. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal
b. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
c. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi
d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal
e. Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimal
f. Infrastruktur publik belum memadai dan belum merata
g. Pelestarian budaya masih rendah.
h. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan.

2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal demikian karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD setidaknya lebih dahulu telah dimusyawarahkan mulai dari tingkat Kelurahan, Kapanewon, dan Kabupaten. Atau dengan kata lain telah dimusyawarahkan dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran, yang mengakibatkan program kegiatan pada rancangan awal di Kapanewon Rongkop tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kapanewon Rongkop berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah plafon pendanaannya.

Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kapanewon Rongkop dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi serta pendanaan yang tersedia. Secara rinci hasil review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	1.795.069.482	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	100 Persen	203.400.900	
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.290 Indeks	39.300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.290 Indeks	20.268.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7.350.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.325.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.385.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	24.496.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.625.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.623.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	3.301.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	2.760.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	4.200.000	
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.578 Indeks	1.634.004.621	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.578 Indeks	1.155.614.667	
	Penyediaan Gaji dan	Kab.	Jumlah Orang yang Menerima	252 Orang	1.628.554.621	Penyediaan Gaji dan	Kab.	Jumlah Orang yang Menerima	252 Orang	1.149.129.667	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tunjangan ASN	Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Gaji dan Tunjangan ASN			Tunjangan ASN	Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Gaji dan Tunjangan ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.995.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	13 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	13 Laporan	4.490.000	
3.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.842.800	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	2.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	7.842.800	
3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.755 Indeks	65.715.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.185 Indeks	67.050.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.809.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	37.620.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	49.001.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.100.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.600.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.468.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.200.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Rongkop,	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Rongkop,	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.640.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.145.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.832.500	
3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	24.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	5.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	16.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan	55.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Laporan	20.246.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.390.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	510.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	14.030.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	19.136.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.980.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000	
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196 Unit	71.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196 Unit	53.300.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	171 Unit	30.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	171 Unit	42.100.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	5.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	3.700.000	
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	9.825.000	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	24.875.000	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.500.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	336.765.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	13.970.000	
4.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	8.400.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	8.080.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	8.400.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	8.080.000	
4.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19 Laporan	328.365.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	14 Laporan	5.890.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	320.485.000						
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	7.880.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	5.890.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan terfasilitas	100 Persen	60.262.650	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan dan kelurahan terfasilitas	100 Persen	49.782.100	
5.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.5 Indeks	42.742.650	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.5 Indeks	37.292.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	18 Dokum	29.742.650	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	18 Dokumen	25.977.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	13.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	11.315.000	
5.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10 Indeks	17.520.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10 Indeks	12.490.100	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Lembaga Kemasyarakatan	8.650.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Lembaga Kemasyarakatan	6.440.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	8.870.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	6.050.100	
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	10.800.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	9.740.000	
6.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	9.800.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	9.740.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.645.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	9.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	8.095.000	
6.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1.000.000						
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	1 Laporan	1.000.000						

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Republik Indonesia		Indonesia								
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	42.550.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	110.187.900	
7.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.3 Indeks	42.550.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.3 Indeks	110.187.900	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	36.250.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	94.762.900	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	6.300.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	15.425.000	
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kalurahan terlaksana	100 Persen	32.810.396	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kalurahan terlaksana	100 Persen	86.277.000	
8.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50 Dokumen	32.810.396	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50 Dokumen	86.277.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1.800.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8 Dokumen	1.720.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	2.200.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	1.810.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	13.750.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	6.965.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelurahan					Kelurahan				
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 Dokumen	4.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	2.110.000	
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	2.035.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	2.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	6.865.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5 Dokumen	4.200.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8 Dokumen	7.990.000	
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	53.815.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	4.860.396	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2.967.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				150.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	100.000.000	
7.1	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*		*Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*2 Laporan*	*150.000.000*	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*		*Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*1 Laporan*	*100.000.000*	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	150.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	100.000.000	
	SEKRETARIAT DAERAH				25.970.000	SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN		Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan	100 Persen	25.970.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN		Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan	100 Persen	40.000.000	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KETATALAKSANAAN					KETATALAKSANAAN					
8.1	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*		*Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*2 Dokumen*	*25.970.000*	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*		*Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*3 Dokumen*	*40.000.000*	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	25.970.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000	
					2.454.227.528					1.739.279.667	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kapanewon Rongkop pada tahun anggaran 2015 sesuai dengan Renstra Kapanewon Rongkop telah merencanakan lanjutan untuk merehabilitasi gedung kantor, sesuai hasil sosialisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, pembangunan Gedung Kantor Kapanewon Rongkop sudah selesai terlaksana Tahun 2019. Sedangkan pada Tahun 2020 Pemerintah Kecamatan merencanakan untuk dapat dilaksanakan rehab berat Aula Kapanewon Rongkop yang mana saat ini kondisi dari bangunan tersebut juga perlu untuk disesuaikan dengan tata ruang kantor kecamatan sehingga dapat selaras, yang dalam pelaksanaannya kami serahkan kepada instansi tehnis di tingkat kabupaten, namun belum terlaksana akibat Pandemi COVID-19, harapan kami dari Kapanewon Rongkop untuk tetap dilaksanakan Rehabilitasi pada tahun mendatang.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, Pokok-pokok Pikiran DPRD maupun hasil pengumpulan informasi PD dari penelitihan lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kalurahan maupun Kapanewon.

Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut :

1. Pembahasan DURKP hasil usulan Musrenbangkal yang dilanjutkan di sidang kelompok pada kegiatan Musrenbang Kapanewon yang disusun menurut skala prioritas;

2. Hasil dari sidang masing-masing kelompok dilanjutkan pleno yang menghasilkan usulan yang disepakati dari masing-masing pemangku kepentingan yang diketahui Bappeda dan Instansi/OPD pelaksana Kegiatan.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan pada Pleno tersebut yang ditanda tangani perwakilan Kalurahan, BPD, LPMD dan Panewu.

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 dari Para pemangku Kepentingan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.4 :

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien /Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	NIHIL						

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Dari peraturan-peraturan yang ada tersebut, jelas bahwa Panewu atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai perangkat daerah kabupaten.

Kapanewon Rongkop sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Untuk memperjelas arah pembangunan daerah pada setiap tahun, tahapan perencanaan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 juga dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (road map) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Sebagai upaya untuk mewujudkan keterkaitan antara dokumen perencanaan, dilakukan dengan penyelarasan dengan tema dan prioritas nasional maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2026 Kapanewon Rongkop juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Kalurahan. Dana

Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Rongkop

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari adanya dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan menggambarkan hal hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional dan kegiatan pokok yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun penjabaran sasaran daerah kedalam sasaran Perangkat Daerah dalam format sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Pembangunan Kapanewon Rongkop

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	2	3	4
	Tujuan :		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,30

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Kapanewon Rongkop

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2026
1	2	3	4
	Sasaran :		
1.	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Rongkop 2025-2029, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Rongkop

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4
Tujuan			
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,30
Sasaran			
1	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
2	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
3	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
4	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan rancangan awal Renja Kapanewon Rongkop Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026;
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan;
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Rongkop meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani;
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan kumpulan Program dan kegitan, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kapanewon Rongkop dalam menyusun program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor yang memang harus direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, yaitu :

1. Sebagai konsekuensi untuk merealisasi program/ kegiatan Kapanewon Rongkop dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
2. Meningkatkan layanan publik kepada masyarakat;
3. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanaan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, baik di Pemerintahan Kelurahan maupun Kapanewon;
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif;
5. Mengembangkan UMKM yang ada di wilayah Kapanewon Rongkop;

Berdasarkan Rancangan Program dan Kegiatan Kapanewon Rongkop Tahun 2026 terdiri dari 8 program dan 18 kegiatan dimana dalam pelaksanaanya kegiatan untuk difokuskan pada pelayanan masyarakat tersebar di wilayah Kapanewon Rongkop yang terdiri dari 5 kalurahan. Delapan program yang diampu 2 diantaranya adalah program dana keistimewaan yakni bidang kelembagaan dan kebudayaan. Program dan kegiatan Pembangunan Kapanewon Rongkop Tahun 2026 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Kapanewon Rongkop

NO	Sasaran Kapanewon Rongkop	Nama Progam/ Kegiatan
1.	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan a. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

3.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah e. Administrasi Umum Perangkat Daerah f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selanjutnya program/ kegiatan dan sub kegiatan Kapanewon Rongkop tahun 2026 prioritas pembangunan yaitu sesuai tabel berikut:

Tabel 4.2

Prioritas Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pamong Nglayani & Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50 Indeks	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.395.673.668,00**	
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.287.500,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.890.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.277.500,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.220.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.350.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.400.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.825.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.325.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.157.579.464,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.150.529.464,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.960.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.090.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.190.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.190.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.452.800,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.452.800,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.604.100,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.806.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.965.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.608.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.970.100,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.955.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	5.000.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunana Lainnya	5.000.000,00	KAPANEWON RONGKOP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.703.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.998.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.955.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.856.804,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.100.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.950.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.306.804,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**36.137.500,00**	
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.137.500,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.137.500,00	KAPANEWON RONGKOP
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**40.000.000,00**	
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**42.634.100,00**	
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	36.772.500,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.910.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.862.500,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.861.600,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.861.600,00	KAPANEWON RONGKOP
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**31.231.500,00**	
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.231.500,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.680.000,00	KAPANEWON RONGKOP

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.035.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.076.500,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.245.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.907.500,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.625.500,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6.635.000,00	KAPANEWON RONGKOP
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100 Persen	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**100.000.000,00**	
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**75.837.000,00**	
					7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	75.837.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.837.000,00	KAPANEWON RONGKOP
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**870.000,00**	
					7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	870.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	870.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**439.246.000,00**	
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	439.246.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	439.246.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**114.008.900,00**	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	114.008.900,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.303.900,00	KAPANEWON RONGKOP
					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.705.000,00	KAPANEWON RONGKOP
					J U M L A H		**2.275.638.668,00**	

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, di Kapanewon Rongkop dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.3

Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2026

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.395.673.668	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.287.500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.890.000	KAPANEWON RONGKOP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.277.500	KAPANEWON RONGKOP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.220.000	KAPANEWON RONGKOP
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.350.000	KAPANEWON RONGKOP
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.400.000	KAPANEWON RONGKOP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.825.000	KAPANEWON RONGKOP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.325.000	KAPANEWON RONGKOP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.157.579.464	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.150.529.464	KAPANEWON RONGKOP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.960.000	KAPANEWON RONGKOP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.090.000	KAPANEWON RONGKOP
Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	2.190.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.190.000	KAPANEWON RONGKOP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.452.800	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.452.800	KAPANEWON RONGKOP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.604.100	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.806.000	KAPANEWON RONGKOP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.965.000	KAPANEWON RONGKOP
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.608.000	KAPANEWON RONGKOP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.970.100	KAPANEWON RONGKOP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	KAPANEWON RONGKOP

Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000	KAPANEWON RONGKOP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.955.000	KAPANEWON RONGKOP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	KAPANEWON RONGKOP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.703.000	
Penyediaan jasa surat menyurat	750.000	KAPANEWON RONGKOP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.998.000	KAPANEWON RONGKOP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.955.000	KAPANEWON RONGKOP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.856.804	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.100.000	KAPANEWON RONGKOP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.950.000	KAPANEWON RONGKOP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.306.804	KAPANEWON RONGKOP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000	KAPANEWON RONGKOP

Rumusan rencana program dan kegiatan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan/Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Rongkop

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.000.000,00**				**100.000.000,00**
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100.000.000,00**				**100.000.000,00**
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan***		**100 Persen**	**100.000.000,00**			**100 Persen**	**100.000.000,00**
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan*			100.000.000,00				100.000.000,00
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		1 Laporan	100.000.000,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**40.000.000,00**				**40.000.000,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.000.000,00**				**40.000.000,00**
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan***		**100 Persen**	**40.000.000,00**			**100 Persen**	**40.000.000,00**
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*			40.000.000,00				40.000.000,00
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		3 Dokumen	40.000.000,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.135.638.668,00**				**1.816.681.600,00**
7.01	**KECAMATAN**				**2.135.638.668,00**				**1.816.681.600,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***		**82,2 Indeks**	**1.395.673.668,00**			**82,7 Indeks**	**1.533.431.600,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			46.287.500,00				15.932.500,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	34.890.000,00	DAU		2 Dokumen	4.535.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.277.500,00	DAU		1 Dokumen	1.277.500,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.220.000,00	DAU		1 Dokumen	1.220.000,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.350.000,00	DAU		2 Dokumen	1.350.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.400.000,00	DAU		2 Dokumen	1.400.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	17 Laporan	2.825.000,00	DAU		17 Laporan	2.825.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	4 Laporan	3.325.000,00	DAU		4 Laporan	3.325.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			1.157.579.464,00				1.322050.000,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	252 Orang/bulan	1.150.529.464,00	DAU		252 Orang/bulan	1.325.000.000,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.960.000,00	DAU		1 Laporan	1.960.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	13 Laporan	5.090.000,00	DAU		13 Laporan	5.090.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*			2.190.000,00				2.400.000,00
7.01.01.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik*	Kab. Gunungkidul,	28 Laporan	2.190.000,00	DANA	Kab.	28 Laporan	2.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.03.0006	SKPD	*Daerah pada SKPD*	Rongkop, Semua Kel/Desa			ALOKASI UMUM (DAU)	Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*			7.452.800,00				7.625.000,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	7.452.800,00	DAU		7 Dokumen	7.625.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Umum*			71.604.100,00				78.242.100,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	4 Paket	2.806.000,00	DAU		4 Paket	2.806.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	6 Paket	49.965.000,00	DAU		6 Paket	56.108.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	4 Paket	2.608.000,00	DAU		4 Paket	2.608.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	2 Paket	2.970.100,00	DAU		2 Paket	2.970.100,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	248 Dokumen	1.200.000,00	DAU		248 Dokumen	1.200.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.100.000,00	DAU		12 Laporan	2.300.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Laporan	9.955.000,00	DAU		12 Laporan	10.250.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa		5.000.000,00	DAU			0,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	1 Unit	5.000.000,00	DAU		0 Unit	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			51.703.000,00				21.448.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Laporan	750.000,00	DAU		12 Laporan	850.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	24 Laporan	19.998.000,00	DAU		24 Laporan	19.998.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30.955.000,00	DAU		12 Laporan	600.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*			53.856.804,00				54.300.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	171 Unit	42.100.000,00	DAU		171 Unit	42.100.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	10 Unit	3.950.000,00	DAU		10 Unit	4.150.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	1 Unit	6.306.804,00	DAU		1 Unit	6.550.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	5 Unit	1.500.000,00	DAU		5 Unit	1.500.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana***		**100 Persen**	**36.137.500,00**			**100 Persen**	**6.250.000,00**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*			36.137.500,00				6.250.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Laporan	36.137.500,00	DAU		13 Laporan	6.250.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan***		**100 Persen**	**119.341.100,00**			**100 Persen**	**125.300.000,00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*			36.772.500,00				37.350.000,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	25.910.000,00	DAU		18 Dokumen	26.150.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	10 Laporan	10.862.500,00	DAU		10 Laporan	11.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi*			75.837.000,00				76.100.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Pokmas / Ormas	75.837.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Pokmas / Ormas	76.100.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan*			5.861.600,00				6.150.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	4 Laporan	5.861.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	6.150.000,00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*			870.000,00				950.000,00
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	25 Keluarga	870.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	25 Keluarga	950.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum***		**100 Persen**	**439.246.000,00**			**100 Persen**	**3.200.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*			439.246.000,00				3.200.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	10 Laporan	439.246.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	3.200.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***		**100 Persen**	**114.008.900,00**			**100 Persen**	**114.400.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*			114.008.900,00				114.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	75 Orang	99.303.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75 Orang	99.500.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	14.705.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	14.900.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*		**100 Persen**	**31.231.500,00**			**100 Persen**	**34.100.000,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*			31.231.500,00				34.100.000,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	1.680.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Dokumen	1.900.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.035.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	2.300.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	9.076.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	9.400.000,00
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	3.245.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	3.600.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.907.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Dokumen	7.500.000,00
7.01.06.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka*	Kab. Gunungkidul,	1 Dokumen	4.652.500,00	DANA		1 Dokumen	4.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.01.0007	Badan Permusyawaratan Desa	*Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	Rongkop, Semua Kel/Desa			ALOKASI UMUM (DAU)			
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	Kab. Gunungkidul, Rongkop, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	6.635.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen	4.600.000,00
J U M L A H					**2.275.638.668,00**				**1.689.129.667,00**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rancanagan Awal Rencana Kerja 2026 berisi Rencana Kerja Kapanewon Rongkop Tahun 2026 yang memuat evaluasi Renja Kapanewon Rongkop tahun 2024 sampai triwulan III, tujuan, sasaran dan rencana kerja serta pendanaan Kapanewon Rongkop. Rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Rongkop disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki serta menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di Renstra Perangkat Daerah. Rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Rongkop juga merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan menyusun rancangan awal Rencana Kerja ini diharapkan bisa menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Rongkop Tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam Rencana Kerja Tahun 2026 dan penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

KAPANEWON RONGKOP,

ttd

EDY SEDONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON SEMANU
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainya antara lain :

1. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, harus mengacu pada dokumen

RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya yang disesuaikan dengan Program Prioritas PD.

2. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, artinya Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L (Kementerian/Lembaga) dan Perangkat Daerah Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja Perangkat Daerah juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan Perangkat Daerah Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

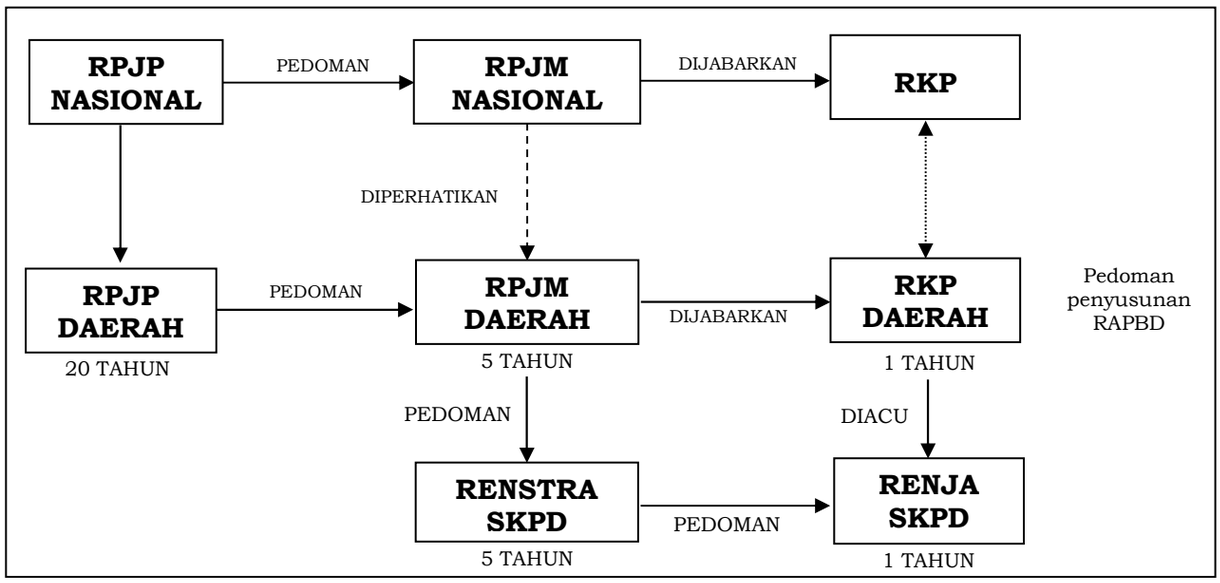

Bagan 1 : Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sehingga Renja PD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Semanu tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di D.I Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kapanewon Semanu adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.

3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Kapanewon Semanu adalah:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON SEMANU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Semanu dan Capaian Renstra Kapanewon Semanu

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON SEMANU
- 3.1 Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Semanu

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KAPANEWON SEMANU
- 4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON SEMANU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Semanu dan Capaian Renstra Kapanewon Semanu

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Semanu Tahun 2026 mengacu pada APBD Tahun 2026 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Semanu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan atau Tahun 2025.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Semanu atau realisasi APBD untuk Kapanewon Semanu yang disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2024 dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Pada Perangkat Daerah Kapanewon Semanu dalam pelaksanaan Renja 2024 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, dengan kata lain target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan terpenuhi.
2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Pada Perangkat Daerah Kapanewon Semanu dalam pelaksanaan Renja 2024 program dan kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
3. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang sudah memenuhi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;
   Realisasi program dan kegiatan Kapanewon Semanu pada Tahun 2024 tidak ada yang target kinerja keluarannya melebihi dari target yang yang direncanakan dalam Renja Tahun 2024.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2024.
   a. Dalam rangka efisiesi waktu sebagian kegiatan Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain.
   b. Munculnya kebijakan/ regulasi setelah program/ kegiatan dan target ditetapkan.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian Tahun 2024;
   a. Adanya kesinkronan kegiatan yang dianggarkan perangkat daerah Kapanewon Semanu dengan agenda kegiatan yang di selenggarakan perangkat daerah di tingkat Kabupaten.
   b. Adanya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
   c. Sumber Daya Manusia yang ada di perangkat daerah Kapanewon Semanu yang kurang.
   d. Kenaikan harga BBM yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan lainnya.
   e. Rasionalisasi Anggaran tahun 2024 untuk memenuhi alokasi belanja wajib/mengikat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.
   a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala jawatan dan kepala sub bagian yang menangani kegiatan.

b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait baik masalah pelaksanaan kegiatan maupun pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon.
c. Melaksanakan efisiensi anggaran tahun 2024 sesuai ketentuan/intruksi.

Dari uraian di atas rekapitulasi hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Semanu dan pencapaian Renstra Kapanewon Semanu s/d Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Semanu dan
Pencapaian Renstra Kapanewon Semanu s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Semanu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
X.XX.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Tersusun*	*26*	*Dokumen*	*26*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*NA*	*Dokumen*	*26*	*Dokumen*	*100*
		Persentase Dokumen Perencanaan Tersusun Tepat Waktu	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*4,576*	*Indek*	*4,147*	*Indek*	*4,576*	*Indek*	*4,576*	*Indek*	*100*	*4,576*	*Indek*	*4,43*	*Indek*	*96,875*
		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah dokumen Renja perubahan	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah dokumen draft Renstra	0	Dokumen	0	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	0	Dokumen	0
		Jumlah dokumen Renstra	0	Dokumen	0	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	0	Dokumen	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3	Dokumen	8	Dokumen	40
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
X.XX.01 .2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	75
X.XX.01 .2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen ROPK	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	12	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	50
X.XX.01 .2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	75
X.XX.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	100	17	Laporan	47	Laporan	69,12
X.XX.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah laporan e Monev	4	Dokumen	4	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	4	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Teppra	12	Dokumen	12	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	12	Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	32	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	4	Laporan	25
X.XX.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Keuangan Tersusun*	*NA*	*Dokumen*	*14*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*NA*	*Dokumen*	*14*	*Dokumen*	*0*
		Persentase Laporan Keuangan Tersusun Tepat Waktu	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*88,578*	*Indek*	*88,578*	*Indek*	*88,578*	*Indek*	*88,578*	*Indek*	*100*	*88,578*	*Indek*	*88,58*	*Indek*	*100*
		Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	14	Bulan	NA	Bulan	NA	Bulan	NA	NA	Bulan	14	Bulan	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008	Orang/bulan	252	Orang/bulan	200	Orang/bulan	200	Orang/bulan	100	210	Orang/bulan	622	Orang/bulan	61,71
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	75
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	12	Dokumen	12	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	12	Dokumen	100
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52	Laporan	13	Laporan	25	Laporan	25	Laporan	100	25	Laporan	25	Laporan	48,08

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
X.XX.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Layanan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*0*
		Tolok Ukur Target Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*24*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	*100*	*6*	*Dokumen*	*14*	*Dokumen*	*58,33*
		Presentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terselesaikan	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	18	Orang	15	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	15	Orang	83,33
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100	7	Dokumen	15	Dokumen	62,5
X.XX.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*42,328*	*Indeks*	*42,328*	*Indeks*	*42,328*	*Indeks*	*42,328*	*Indeks*	*NA*	*NA*	*Indeks*	*42,33*	*Indeks*	*100*
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	*42,33*	*Indeks*	*42,185*	*Indeks*	*42,328*	*Indeks*	*42,328*	*Indeks*	*100*	*42,185*	*Indeks*	*42,23*	*Indeks*	*99,77*
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Indeks*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	4	Paket Belanja	5	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	NA	Paket Belanja	5	Paket Belanja	125
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	100	4	Paket	11	Paket	68,75
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	NA	Paket Belanja	4	Paket Belanja	100
		Jumlah Laptop terbeli	1	Unit	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Kompute/PC terbeli	0	Unit	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Printer terbeli	1	Unit	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah mesin ketik terbeli	0	Unit	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Filling Kabinet Terbeli	4	Buah	0	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32	Paket	6	Paket	5	Paket	5	Paket	100	6	Paket	16	Paket	50
X.XX.01 .2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	4	Paket Belanja	4	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	NA	Paket Belanja	4	Paket Belanja	100
		Jumlah Penyediaan Prealatan Rumah Tangga	1	Set	0	Set	NA	Set	NA	Set	NA	NA	Set	0	Set	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100	4	Paket	13	Paket	76,47
X.XX.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan (20 BKP, 20 Disposisi, 4 Amplop Berkop, 12 SPPD)	54	Bendel	56	Bendel	NA	Bendel	NA	Bendel	NA	NA	Bendel	56	Bendel	103,70
		Jumlah lembar penggandaan	9000	Lembar	9000	Lembar	NA	Lembar	NA	Lembar	NA	NA	Lembar	9000	Lembar	100
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32	Paket	8	Paket	8	Paket	8	Paket	100	8	Paket	22	Paket	68,75
X.XX.01 .2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar (12 Bulan X 1 Rekening)	12	Rekening	12	Rekening	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	NA	Rekening	12	Rekening	100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	992	Dokumen	248	Dokumen	248	Dokumen	248	Dokumen	100	248	Dokumen	682	Dokumen	68,75
X.XX.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minum dan sneck untuk tamu yang terfasilitasi	75	Orang	75	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	75	Orang	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	33	Laporan	68,75
X.XX.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat karyawan karyawati terfasilitasi	240	Orang	240	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	240	Orang	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12	Kali	12	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	12	Kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	33	Laporan	68,75
X.XX.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terfasilitasi*	*100*	*Layanan*	*0*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*0*	*Layanan*	*0*
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*73*	*Unit*	*NA*	*Unit*	*29*	*Unit*	*29*	*Unit*	*100*	*7*	*Unit*	*36*	*Unit*	*49,32*
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Almari Buku Arsip Dinamis Terbeli	0	Buah	0	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah rak Arsip terbeli	0	Buah	0	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah kursi tamu eksklusif terbeli	0	Set	0	Set	NA	Set	NA	Set	NA	NA	Set	0	Set	0
		Jumlah Rak Almari Arsip Kaca Terbeli	0	Buah	0	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah Meja 1 Biro Terbeli	0	Buah	0	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah Meja Pimpong	0	Buah	0	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah Almari Arsip Besi terbeli	0	Buah	0	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah Kursi Kerja Putar Terbeli	0	Buah	0	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah kursi tamu Sekretariat terbeli	0	Set	0	Set	NA	Set	NA	Set	NA	NA	Set	0	Set	0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	Unit	0	Unit	3	Unit	3	Unit	100	0	Unit	3	Unit	5
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah TV LED terbeli	0	Unit	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Wireless Speaker terbeli	0	Unit	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah sound system ruang rapat	0	Paket	0	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	0	Paket	0
		Jumlah Pemotong Rumput terbeli	0	Unit	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah genset terbeli	0	Unit	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah LCD Proyektor yang terbeli	1	Unit	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	NA	Unit	2	Unit	2	Unit	100	1	Unit	3	Unit	33,33
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terbeli	0	Unit	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah gorden yang terbeli	0	Meter	0	Meter	NA	Meter	NA	Meter	NA	NA	Meter	0	Meter	0
		Jumlah Lantai Conblock	0	Meter persegi	0	Meter persegi	NA	Meter persegi	NA	Meter persegi	NA	NA	Meter persegi	0	Meter persegi	0
		Jumlah Pintu Besi Stainles terbeli	0	Buah	0	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah Pintu Kaca Ruang Pimpinan terbeli	0	Buah	0	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah galvalum terbeli (80+32 meter persegi)	0	Meter Persegi	0	Meter Persegi	NA	Meter Persegi	NA	Meter Persegi	NA	NA	Meter Persegi	0	Meter Persegi	0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	Unit	NA	Unit	4	Unit	4	Unit	100	5	Unit	9	Unit	112,5
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	Unit	NA	Unit	0	Unit	0	Unit	100	5	Unit	5	Unit	0
X.XX.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*3*	*Layanan*	*3*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*3*	*Layanan*	*100*
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*240*	*Laporan*	*64*	*Laporan*	*60*	*Laporan*	*60*	*Laporan*	*100*	*60*	*Laporan*	*169*	*Laporan*	*70,42*
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Daerah Tefasilitasi														
X.XX.01 .2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan terfasilitasinya tenaga pengadministrasian	12	Bulan	12	Bulan	NA	Bulan	NA	Bulan	NA	NA	Bulan	12	Bulan	100
		Jumlah surat terkirim	600	Surat	600	Surat	NA	Surat	NA	Surat	NA	NA	Surat	600	Surat	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	16	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	23	Laporan	47,92
X.XX.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Telephon Dibayar (1 Rekening x 12 Bulan)	12	Rekening	12	Rekening	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	NA	Rekening	12	Rekening	100
		Jumlah Air Dibayar (1 Rekening x 12 bulan)	12	Rekening	12	Rekening	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	NA	Rekening	12	Rekening	100
		Jumlah Listrik Dibayar (1 Rekening x 12 Bulan)	12	Rekening	12	Rekening	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	NA	Rekening	12	Rekening	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	100	36	Laporan	99	Laporan	68,75
X.XX.01 .2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Termin Jasa Kebersihan di Bayar (non thl)	12	Termin	12	Termin	NA	Termin	NA	Termin	NA	NA	Termin	12	Termin	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	33	Laporan	68,75
X.XX.01. 2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi*	*4*	*Layanan*	*4*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*4*	*Layanan*	*100*
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*885*	*Unit*	*185*	*Unit*	*177*	*Unit*	*177*	*Unit*	*100*	*180*	*Unit*	*531*	*Unit*	*60*
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	1	Unit	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	4	Paket pemeliharaan	4	Paket pemeliharaan	NA	Paket pemeliharaan	NA	Paket pemeliharaan	NA	NA	Paket pemeliharaan	4	Paket pemeliharaan	100
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	7	Unit	7	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	7	Unit	100
		Jumlah peket pemeliharaan motor dinas	28	Paket pemeliharaan	28	Paket pemeliharaan	NA	Paket pemeliharaan	NA	Paket pemeliharaan	NA	NA	Paket pemeliharaan	28	Paket pemeliharaan	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	544	Unit	136	Unit	119	Unit	119	Unit	100	136	Unit	379	Unit	69,67
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pemeliharaan Mebel	0	Paket pemeliharaan	0	Paket pemeliharaan	NA	Paket pemeliharaan	NA	Paket pemeliharaan	NA	NA	Paket pemeliharaan	0	Paket pemeliharaan	0
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	16	Unit	20	Unit	0	Unit	0	Unit	100	20	Unit	40	Unit	250
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	7	Unit	7	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	7	Unit	100
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	2	Unit	2	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	2	Unit	100
		Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	6	Unit	6	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	6	Unit	100
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	7	Unit	7	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	7	Unit	100
		Jumlah LCD Proyektor Terfasilitasi Pemeliharaannya	2	Unit	2	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	2	Unit	100
		Jumlah BBM Genset yang tersedia	0	Liter	0	Liter	NA	Liter	NA	Liter	NA	NA	Liter	0	Liter	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99	Unit	20	Unit	14	Unit	14	Unit	100	21	Unit	47	Unit	47,47
X.XX.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan gedung kantor eternit/plafon	10	Paket Pemeliharaan	2	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	NA	Paket Pemeliharaan	2	Paket Pemeliharaan	20
		Jumlah gedung kantor yang terfasilitasi keamanannya	365	Hari	365	Hari	NA	Hari	NA	Hari	NA	NA	Hari	365	Hari	100
		Jumlah Paket Pemeliharaan rehap Gedung Ruang Kerja Kator	0	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	NA	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	0
		Jumlah Paket Pemeliharaan Rehap Gedung untuk ruang rapat	0	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	NA	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	0
		Jumlah Paket Pemeliharaan Rehap saluran air hujan	0	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	NA	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	0
		Jumlah Paket Pemeliharaan Terlaksananya rehap Gudang Kator untuk Ruangan Arsip	0	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	NA	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	0
		Jumlah Paket Pemeliharaan Rehap Bangunan WC/Toilet Kantor	1	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	NA	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	100
		Jumlah Paket Pemeliharaan Rehap Bangunan Mushola Kantor	0	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	NA	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	0
		Jumlah Paket Pemeliharaan Pengecatan Tembok Dinding Kantor	1	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	NA	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	100
		Jumlah Paket Pemeliharaan Rehap Pagar /Pintu Gerbang Kantor	1	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	NA	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	100
		Jumlah Paket Pemeliharaan Bangunan Tempat Sampah (L 2M X P	0	Paket Pemelihar	0	Paket Pemelihar	NA	Paket Pemelihar	NA	Paket Pemelihar	NA	NA	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemelihar	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		3M X T 1M)		aan		aan		aan		aan			raan		aan	
		Jumlah Pintu Gerbang Pagar Bumi Terpelihara	0	Set	0	Set	NA	Set	NA	Set	NA	NA	Set	0	Set	0
		Jumlah Paket Pemeliharaan Bangunan Tempat Sampah (L 2M X P 3M X T 1M)	0	Buah	0	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	0	Buah	0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	2	Unit	33,33
X.XX.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terfasilitasi pemeliharaannya	8	Unit	8	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	8	Unit	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32	Unit	8	Unit	4	Unit	4	Unit	100	8	Unit	20	Unit	62,5
X.XX.01 .2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	100	0	Unit	0	Unit	0
X.XX.01. 2.13	*Penataan Organisasi*	*Jumlah dokumen IKM,SOP,SPIP tersusun*	*NA*	*Dokumen*	*4*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*NA*	*Dokumen*	*4*	*Dokumen*	*0*
		Persentase dokumen IKM tersusun	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*100*
X.XX.01 .2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	2	Dokumen	2	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah dokumen SOP	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen RTP/SPIP	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*0*	*Layanan*	*0*
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*20*	*Laporan*	*21*	*Laporan*	*5*	*Laporan*	*5*	*Laporan*	*100*	*5*	*Laporan*	*28,5*	*Laporan*	*142,5*
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pembinaan Cabor yang Diikuti Dalam PORKAB	4	Cabor	4	Cabor	NA	Cabor	NA	Cabor	NA	NA	Cabor	4	Cabor	100
		Jumlah kesepakatan pelestarian pengembangan budaya	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah Event festival kesenian tingkat Kapanewon yang terselenggara	1	Event	1	Event	NA	Event	NA	Event	NA	NA	Event	1	Event	100
		Jumlah kelompok Kesenian yang dibina dan dipentaskan untuk Hari Jadi dan Peringatan HUT	0	Kelompok	0	Kelompok	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA	NA	Kelompok	0	Kelompok	0
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	20	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	5	Laporan	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
7.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*100*
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*100*
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	*88*	*Laporan*	*22*	*Laporan*	*22*	*Laporan*	*22*	*Laporan*	*88,46*	*22*	*Laporan*	*68,87*	*Laporan*	*78,26*
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan forum Kalurahan siaga	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah kesepakatan forum Kapanewon sehat	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat	70	Tengki	40	Tengki	NA	Tengki	NA	Tengki	NA	NA	Tengki	40	Tengki	57,14
		Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah koordinasi pelaksanaan pengadaan bansos	0	Kali	0	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	0	Kali	0
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)	82	KK	82	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	82	KK	100
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan	11	KK	11	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	11	KK	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	32	Laporan	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	0	Laporan	10	Laporan	31,25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	8000	Layanan	8000	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	8000	Layanan	100
		Jumlah peserta pembinaan	25	Orang	25	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	25	Orang	100
		/koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum														
		Jumlah peserta sosialisasi pengurusan ijin UMK	25	Orang	25	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	25	Orang	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	56	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	64,29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Kecamatan														
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.03. 2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Jumlah Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*100*
		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*9,5*	*Indeks*	*9,5*	*Indeks*	*9,5*	*Indeks*	*9,5*	*Indeks*	*100*	*9,5*	*Indeks*	*9,50*	*Indeks*	*100*
		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen usulan rencana kegiatan (DURP)/Musrenbang	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMKal dan RKPKal	5	Kaluraha n	5	Kaluraha n	NA	Kaluraha n	NA	Kaluraha n	NA	NA	Kaluraha n	5	Kaluraha n	100
		Evaluasi Penyusunan RKPKal	5	Kaluraha n	5	Kaluraha n	NA	Kaluraha n	NA	Kaluraha n	NA	NA	Kaluraha n	5	Kaluraha n	100
		Jumlah Bimtek Perencanaan Pembangunan Kalurahan Terselenggara (PIWK)	1	Kali	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
7.01.03. 2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	44	Dokumen	11	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100	12	Dokumen	29	Dokumen	65,91
7.01.03. 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah perlombaan Kalurahan tingkat Kapanewon	1	Kali	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah Dokumen profil Kalurahan dan Kapanewon tersusun	6	Dokumen	6	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	6	Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba Kalurahan tingkat kabupaten	1	Kali	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100	8	Laporan	23	Laporan	71,875
7.01.03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Layanan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*100*
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Layanan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*2*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*2*	*Layanan*	*100*
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*10*	*Indeks*	*10*	*Indeks*	*10*	*Indeks*	*10*	*Indeks*	*100*	*10*	*Indeks*	*10*	*Indeks*	*100*
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan Posdaya Pasangan Usia Subur	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan Forum anak	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan penanganan pencegahan pernikahan usia anak	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	12	Kali	12	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	12	Kali	100
		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	64	Lembaga Kemasyarakatan	16	Lembaga Kemasyarakatan	12	Lembaga Kemasyarakatan	12	Lembaga Kemasyarakatan	100	14	Lembaga Kemasyarakatan	39	Lembaga Kemasyarakatan	60,94
7.01.03.	Fasilitasi Pengembangan	Dokumen hasil monev bidang	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.03.04	Usaha Ekonomi Masyarakat	pemberdayaan masyarakat														
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	5	Kelompok	5	Kelompok	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA	NA	Kelompok	5	Kelompok	100
		Jumlah kesepakatan koordinasi Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Pelaku industri kecil/rumah tangga yang meningkat pengetahuannya	20	Orang	20	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	20	Orang	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	4	Laporan	9	Laporan	56,25
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*8*	*Laporan*	*4*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*100*	*2*	*Laporan*	*8*	*Laporan*	*100*
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat Kapanewon	5	Kali	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	20
		jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat Kapanewon	25	Kali	5	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	5	Kali	20
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	8	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	4	Laporan	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Agama dan Tokoh Masyarakat														
7.01.04.2.02	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*Jumlah Layanan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*8*	*Laporan*	*0*	*Laporan*	*0*	*Laporan*	*0*	*Laporan*	*100*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*25*
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	*100*	*Persen*	*0*	*Persen*	*0*	*Persen*	*0*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*33,33*	*Persen*	*33,33*
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan (PIWK)	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pengetahuan Tentang Bahaya Narkoba	1	Kali	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8	Laporan	0	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	0	Laporan	2	Laporan	25
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Jumlah Layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terfasilitasi	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*33,3*	*Indeks*	*33,3*	*Indeks*	*33,3*	*Indeks*	*33,3*	*Indeks*	*100*	*33,3*	*Indeks*	*33,30*	*Indeks*	*100*
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah Kegiatan HUT yang terfasilitasi Pelaksanaannya	1	Kali	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah paskib Kapanewon yang dibentuk dan dilatih	75	Orang	75	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	75	Orang	100
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan P	300	Orang	75	Orang	75	Orang	75	Orang	100	75	Orang	75	Orang	25
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kesepakatan penanganan perempuan dan anak korban KDRT	0	Kesepakatan	0	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	0	Kesepakatan	0
		Jumlah Laporan Konflik yang	4	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100	0	Laporan	1	Laporan	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan														
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kesepakatan Koordinasi FORKOMPIMKAB	12	Kesepakatan	12	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	12	Kesepakatan	100
		Jumlah Pelaksanaan patroli bersama	12	Kali	12	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	12	Kali	100
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	96	Dokumen	24	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	24	Dokumen	57	Dokumen	59,375
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Jumlah Layanan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*9*	*Layanan*	*9*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*9*	*Layanan*	*100*
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*196*	*Dokumen*	*49*	*Dokumen*	*49*	*Dokumen*	*49*	*Dokumen*	*100*	*49*	*Dokumen*	*120,87*	*Dokumen*	*61,67*
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pembinaan penyusunan produk hukum Kalurahan	1	Kali	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	37,5
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi bidang pemerintahan	1	Kali	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	2	Kali	2	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	2	Kali	100
		Jumlah monografi kalurahan yang tersusun	10	Dokumen	10	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	10	Dokumen	100
		Jumlah monografi kapanewon yang tersusun	2	Dokumen	2	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	52	Dokumen	13	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100	13	Dokumen	26	Dokumen	50
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKal	1	Kali	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Frekuensi monev pengelolaan keuangan kalurahan	10	Kali	10	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	10	Kali	100
		Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset kalurahan yang terlaksana	1	Kali	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah Kesepakatan hasil Rakor Pelestarian Aset- aset program Pemberdayaan masyarakat Kalurahan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Monitoring Pengendalian dan Evaluasi APBKal	5	Kalurahan	5	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	5	Kalurahan	100
		Jumlah Kalurahan yang dapat menyusun Siklus tahunan Kalurahan	5	Kalurahan	5	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	5	Kalurahan	100
		Jumlah Kalurahan yang menyelenggarakan penataan administrasi pertanahan dan tanah kas Kalurahan	25	Kalurahan	5	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	5	Kalurahan	20
		Jumlah Dokumen Administrasi pertanahan dan tanah kas desa	2	Dokumen	2	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	84	Dokumen	21	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100	29	Dokumen	52	Dokumen	61,90
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat	Jumlah koordinasi dengan Lurah dan Pamong lainnya	1	Kali	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Desa															
		Jumlah Orang (Pamong Kalurahan) yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	30	Orang	30	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	30	Orang	100
		Jumlah Kalurahan Yang diFasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah	0	Kalurahan	0	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	0	Kalurahan	0
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	30
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100	1	Dokumen	1		0
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Orang (BAMUSKAL) yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	54	Orang	54	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	54	Orang	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100	2	Dokumen	3	Dokumen	75
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi kalurahan yang menyelenggarakan pengisian pamong kalurahan dan atau staf pamong kalurahan	6	Rekomendasi	6	Rekomendasi	NA	Rekomendasi	NA	Rekomendasi	NA	NA	Rekomendasi	6	Rekomendasi	100
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	24	Dokumen	6	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100	1	Dokumen	8	Dokumen	33,33
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Orang (anggota linmas) yang diharapkan meningkat pengetahuanny	80	Orang	80	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	80	Orang	100
		Jumlah Kesepakatan koordinasi Mitiga dan pencegahan Bencana	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	8	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	7	Dokumen	9	Dokumen	112,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah koordinasi fasilitasi kerjasama antar Kalurahan	1	Kali	2	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	2	Kali	200
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100	2	Dokumen	3	Dokumen	75
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah kesepakatan koordinasi tataruang kalurahan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100	0	Dokumen	1	Dokumen	25
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
2.22.08.2.09	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Jumlah Layanan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksana*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*
		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*2*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*100*	*1*	*Laporan*	*3*	*Laporan*	*100*
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	*100*	*Persen*	*0*	*Persen*	*0*	*Persen*	*0*	*Persen*	*100*	*0*	*Persen*	*0*	*Persen*	*0*
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah gelar budaya Jogja	1	Kali	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	NA	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target program /kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.22.08.2.09.16	*Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*	*Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi*	*4*	*Laporan*	*0*	*Laporan*	*0*	*Laporan*	*0*	*Laporan*	*100*	*0*	*Laporan*	*0*	*Laporan*	*0*
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
4.01.04.5.01	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*Jumlah Layanan Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*1*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	*1*	*Layanan*	*100*
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
		Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*8*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*4*	*Dokumen*	*4*	*Dokumen*	*100*	*2*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	*75*
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*
4.01.04.2.06	*Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*	*Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*	*0*	*0*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*100*	*0*	*Dokumen*	*3*		*0*
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	0	0	2	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	0	Dokumen	4		0
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampinggggg	8	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	100	3	Dokumen	3	Dokumen	37,5
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan; Rencana Program Kegiatan Keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurana Tahun 2024	1;2	Laporan; Dokumen	1;2	Laporan; Dokumen	NA	Laporan; Dokumen	NA	Laporan; Dokumen	NA	NA	Laporan; Dokumen	1;2	Laporan; Dokumen	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Semanu

Indikator capaian kinerja pelayanan Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM),sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pengukuran capaian kienerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Semanu dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagi berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Semanu
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Kapanewon Semanu					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Indikator Kinerja Utama											
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat											
	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	82,2	82,5	82,8	83	96,82	96,60	96,62	96,32	96,37	

Realisasi Indeks Pelayanan Kapanewon Semanu mengalami kenaikan dari 96,60 pada tahun 2023 menjadi 96,62 pada tahun 2024, atau naik sebesar 0,02%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Semanu

2.3.1 Tugas dan Fungsi Kapanewon Semanu

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon bahwa Kapanewon Semanu mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
n. Penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kapanewon Semanu

Berdasarkan penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya di Kapanewon Semanu masih menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kapanewon dan Kalurahan
3. Masih rendahnya sumber daya manusia Pamong Kalurahan
4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat dalam masalah peraturan perundangan.
5. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal
6. Angka kemiskinan masih perlu ditangani serius
7. Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan belum seluruhnya berjalan dengan efektif
8. Implementasi kerjasama antar daerah belum berjalan secara optimal

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Kapanewon Semanu adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia Pamong Kalurahan belum merata.
2. Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil yang ditempatkan di Kecamatan.
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang masih kurang karena keterbatasan anggaran.

4. Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai kompetensi dibidang Akuntansi
5. Harga kebutuhan pokok masyarakat semakin tinggi
6. Kurangnya SDM yang berkompeten
7. Terbatasnya anggaran dan SDM

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Dearah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Melenium Development Goals*).

Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Indikasi Visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
   "Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"
b. Indikasi Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
   1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
   2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
   3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
   4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
   5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
   6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis pemerintah pusat dan pemerintah D.I. Yogyakarta yang disampaikan oleh Bappeda D.I Yogyakarta dalam Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 sebagai berikut:

a. Isu strategis nasional
   - Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
   - Kemandirian melalui Swasembada Pangan, Air dan Energi;
   - Pengembangan Infrastruktur;
   - Memperkuat Daya Saing SDM;
   - Hilirisasi dan Pengembangan Industri berbasis SDA;
   - Membangun dari Desa;
   - Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata Kelola; dan
   - Kehidupan yang Harmonis dengan Alam, Lingkungan dan Budaya
b. Isu strategis D.I Yogyakarta

- Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
- Pengembangan Wilayah Selatan DIY
- Perkembangan Teknologi Informasi
- Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif
- Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta-Prambanan
- Penguatan Ketahanan Pangan
- Pelestarian dan Pengelolaan Budaya
- Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan
- Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
- Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital

c. Isu strategis daerah
- Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
- Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
- Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
- Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
- Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, indikasi tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah:

"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Adapun prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Semanu adalah Pamong Nglayani dan Ngayomi meliputi meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan.

Tugas dan fungsi Kapanewon Semanu terkait dengan visi dan misi daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Semanu dapat mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan publik.

Pemerintah Kapanewon Semanu sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat agar tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat termasuk sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Semanu. Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi beberapa faktor. Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kapanewon Semanu dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Peluang (*Opportunities*)
   1) Regulasi yang jelas
   2) Perkembangan tehnologi informasi yang semakin cepat
   3) Semangat kerjasama dan gotong royong aparatur dan masyarakat Kalurahan cukup baik
   4) Situasi dan kondisi Kalurahan yang cukup kondusif, aman dan terkendali.
   5) Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat

b. Ancaman (*Threat*)
   1) Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan.
   2) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
   3) Kondisi sosial masyarakat dan Kalurahan yang cukup beragam
   4) Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah mengikuti mekanisme pasar.
   5) Perubahan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata yang meningkatkan potensi penyakit masyarakat, gesekan/konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta bahaya perdagangan orang.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Semanu dalam lima tahun yang akan datang, yaitu :

a. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal
b. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
c. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi
d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal
e. Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimal
f. Infrastruktur publik belum memadai dan belum merata
g. Pelestarian budaya masih rendah.
h. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan.

2.4 *Reviuw* terhadap Rancangan Awal RKPD

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal demikian karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD setidaknya lebih dahulu telah dimusyawarahkan mulai dari tingkat Kelurahan, Kapanewon, dan Kabupaten. Atau dengan kata lain telah dimusyawarahkan dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran, yang mengakibatkan program kegiatan pada rancangan awal di Kapanewon Semanu tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kapanewon Semanu berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah plafon pendanaannya.

Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kapanewon Semanu dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi serta pendanaan yang tersedia. Secara rinci hasil review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Semanu

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan**	**100 Persen**	**150.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	100 Persen	**100.000.000,00**	
1.1	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*		*Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*2 Laporan*	*150.000.000,00*	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*		*Adat,Tradisi,Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan*		*100.000.000,00*	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	150.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan**	**100 Persen**	**25.970.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**	100 Persen	**40.000.000,00**	
2.1	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*		*Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*2 Dokumen*	*25.970.000,00*	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*		*Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*		*40.000.000,00*	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	2 Dokumen	25.970.000,00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000,00	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik**	**100 Persen**	**2.615.451.813,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	82.9 Indeks	**1.328.331.310,00**	
3.1	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*4,576 Indek*	*67.115.000,00*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*48.720.500,00*	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	37.830.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	38.130.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.115.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	897.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.115.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	897.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	6.560.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.049.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.995.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	2 Dokumen	1.049.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	8.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	3.220.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.800.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.477.500,00	
3.2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*88,58 Indek*	*1.940.094.813,00*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*1.026.041.810,00*	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/ bulan	1.926.539.813,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	1.019.121.810,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1.932.500,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SKPD					SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	10.055.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	4.987.500,00	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*		2.840.000,00	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 Laporan	2.840.000,00	
3.3	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*6 Dokumen*	*5.250.000,00*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*		*400.000,00*	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	5.250.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	400.000,00	
3.4	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*42,33 Indeks*	*107.790.000,00*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Dokumen Administrasi Umum*		*77.423.000,00*	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.800.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.628.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	75.700.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	43.231.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.150.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.568.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	6.350.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	6.336.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.440.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	296 Dokumen	1.200.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	750.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.240.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.600.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.220.000,00	
3.5	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*1 Unit*	*11.700.000,00*						
	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	11.700.000,00						
3.6	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*60 Laporan*	*111.990.000,00*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*120.106.000,00*	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21.600.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	30.995.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	52.440.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	46.156.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37.950.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	42.955.000,00	
3.7	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*177 Unit*	*371.512.000,00*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		*52.800.000,00*	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	136 Unit	38.350.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	136 Unit	38.500.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul,	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	11.800.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul,	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	500.000,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semanu, Semua Kel/Desa					Semanu, Semua Kel/Desa				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	21.282.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	8.400.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	283.680.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	10.400.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2.400.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.000.000,00						
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana**	**100 Persen**	**120.507.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana**	100 Persen	**6.617.500,00**	
4.1	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*5 Laporan*	*51.650.000,00*						
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	51.650.000,00						
4.2	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*2 Laporan*	*68.857.000,00*	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		*6.617.500,00*	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	45.007.000,00						

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	23.850.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	6.617.500,00	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi**	**100 Persen**	**124.470.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan**	100 Persen	**96.280.500,00**	
5.1	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		*Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*9,5 Indeks*	*87.090.000,00*	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		*44.557.500,00*	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 Dokumen	11.150.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	34.785.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	75.940.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	9.772.500,00	
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi*		*40.440.000,00*	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	40.440.000,00	
5.2	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*		*Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*10 Indeks*	*37.380.000,00*	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*		*Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan*		*7.408.000,00*	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Lembaga Kemasyarakatan	19.100.000,00						
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	18.280.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	7.408.000,00	
						Pemberdayaan dan		*Laporan Pemberdayaan*		*3.875.000,00*	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		*dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*			
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 Keluarga	3.875.000,00	
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi**	**100 Persen**	**26.075.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100 Persen	**279.197.500,00**	
6.1	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*2 Laporan*	*14.695.000,00*	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		*279.197.500,00*	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	14.695.000,00						
6.2	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*		*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*2 Laporan*	*11.380.000,00*						
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	11.380.000,00						
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	279.197.500,00	
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi**	**100 Persen**	**84.650.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	100 Persen	**105.633.900,00**	
7.1	*Penyelenggaraan Urusan*		*Indeks Penyelenggaraan*	*33,3 Indeks*	*84.650.000,00*	*Penyelenggaraan*		*Laporan Penyelenggaraan*		*105.633.900,00*	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*			*Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*		*Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan P	75 Orang	70.670.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	94.238.900,00	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	3.200.000,00						
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	10.780.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	11.395.000,00	
8	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana**	**100 Persen**	**96.591.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100 Persen	**20.223.500,00**	
8.1	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		*Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*49 Dokumen*	*96.591.000,00*	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		*20.223.500,00*	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	4.350.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1.332.500,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	13 Dokumen	14.340.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	7 Dokumen	1.992.500,00	

Rencana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kel/Desa	Pemerintahan Desa				Kel/Desa	Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	42.011.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	29 Dokumen	9.141.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3 Dokumen	7.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	367.500,00	
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	4.020.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	4.950.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Dokumen	1.965.000,00	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6 Dokumen	4.500.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1.405.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	14.620.000,00						
	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	3.030.000,00						
Jumlah	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1.790.000,00						
					3.243.714.813,00					**1.976.284.210,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kapanewon Semanu pada tahun anggaran 2015 sesuai dengan Renstra Kapanewon Semanu telah merencanakan lanjutan untuk merehabilitasi gedung kantor, sesuai hasil sosialisasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, pembangunan Gedung Kantor Kapanewon Semanu sudah selesai terlaksana Tahun 2019. Sedangkan pada Tahun 2020 Pemerintah Kecamatan merencanakan untuk dapat dilaksanakan rehab berat Aula Kapanewon Semanu yang mana saat ini kondisi dari bangunan tersebut juga perlu untuk disesuaikan dengan tata ruang kantor Kapanewon sehingga dapat selaras, yang dalam pelaksanaannya kami serahkan kepada instansi teknis di tingkat kabupaten, namun belum terlaksana akibat Pandemi COVID-19, harapan kami dari Kapanewon Semanu untuk tetap dilaksanakan Rehabilitasi pada tahun mendatang.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, Pokok-pokok Pikiran DPRD maupun hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kalurahan maupun Kapanewon.

Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut :

1. Pembahasan DURKP hasil usulan Musrenbangkal yang dilanjutkan di siding kelompok pada kegiatan Musrenbang Kapanewon yang disusun menurut skala prioritas;
2. Hasil dari siding masing-masing kelompok dilanjutkan pleno yang menghasilkan usulan yang disepakati dari masing-masing pemangku kepentingan yang diketahuiBappeda dan Instansi/OPD pelaksana Kegiaatan.
3. Berita Acara Hasil Kesepakatan pada Pleno tersebut yang ditanda tangani perwakilan Kalurahan, BPD, LPMD dan Panewu.

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 dari Para pemangku Kepentingan Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien /Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Pelatihan perencanaan pembangunan di desa	Candirejo (Jl. Wediombo Km7, Candirejo, Semanu, Gunungkidul)	Pelatihan perencanaan pembangunan di desa	1 Kali	18.600.000,00	18.600.000,00	PIWK

Kegiatan yang menyasar langsung pada masyarakat, melalui Pagu Indikatif Sektoral (PIWK) yaitu Pelatihan perencanaan pembangunan di desa di Kalurahan Semanu dengan anggaran sejumlah Rp18.600.000,00.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, KAPANEWON SEMANU

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Dari peraturan-peraturan yang ada tersebut, jelas bahwa Panewu atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai perangkat daerah kabupaten.

Kapanewon Semanu sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Untuk memperjelas arah pembangunan daerah pada setiap tahun, tahapan perencanaan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 juga dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (road map) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Sebagai upaya untuk mewujudkan keterkaitan antara dokumen perencanaan, dilakukan dengan penyelarasan dengan tema dan prioritas nasional maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2026 Kapanewon Semanu juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Kalurahan.

Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Semanu

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerjaRenstra PD.

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD sesuai Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Semanu 2025-2029 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Pembangunan Kapanewon Semanu

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	2	3	4
	Tujuan :		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,82

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Kapanewon Semanu

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2026
1	2	3	4
	Sasaran :		
1.	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu	100
2.	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,10

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Semanu 2025-2029, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Semanu

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Targrt Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4
Tujuan			
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,82
Sasaran			
1.	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,10

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan rancangan Renja Kapanewon Semanu Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Semanu meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kapanewon Semanu dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan Kalurahan. Program dan kegiatan tersebut juga mengacu pada Renstra Kapanewon Semanu tahun 2022-2026, yang juga disesuaikan dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Kapanewon sebagaimana disepakati dalam forum gabungan SKPD Kapanewon.

Renja Kapanewon Semanu tahun 2026 terdiri dari 3 Urusan 8 Program 15 Kegiatan dan mencakup 46 Sub kegiatan. Dari program-program tersebut, merupakan program yang menyasar pada internal SKPD yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, dan program yang ditujukan bagi masyarakat dan Kalurahan di wilayah Kapanewon Semanu.

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp1.976.284.210,00 dengan perkiraan maju pada tahun berikutnya sebesar Rp2.581.369.150,00. Seluruhnya bersumber pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul serta dari Dana Keistimewa Yogyakarta.

Jumlah Prioritas Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kapanewon Semanu tahun 2026 dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Prioritas Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pamong Nglayani & Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,1 Indeks	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.328.331.310,00**	
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.720.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.130.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	897.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	897.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.049.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.049.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.220.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.477.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.026.041.810,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.019.121.810,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.932.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.987.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.840.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.840.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	400.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.423.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.628.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.231.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.568.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.336.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.240.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.106.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.995.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.156.000,00	KAPANEWON SEMANU

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.955.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.800.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.500.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	500.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.400.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.400.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**6.617.500,00**	
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.617.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.617.500,00	KAPANEWON SEMANU
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**40.000.000,00**	
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000,00	KAPANEWON SEMANU
					4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**51.965.500,00**	
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.557.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	34.785.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.772.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.408.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.408.000,00	KAPANEWON SEMANU
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**20.223.500,00**	
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.223.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.332.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.992.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.141.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	367.500,00	KAPANEWON SEMANU

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.020.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.965.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.405.000,00	KAPANEWON SEMANU
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100 Persen	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**100.000.000,00**	
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	KAPANEWON SEMANU
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**40.440.000,00**	
					7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	40.440.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.440.000,00	KAPANEWON SEMANU
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**3.875.000,00**	
					7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.875.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3.875.000,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**279.197.500,00**	
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	279.197.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	279.197.500,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**105.633.900,00**	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	105.633.900,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	94.238.900,00	KAPANEWON SEMANU
					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.395.000,00	KAPANEWON SEMANU
					J U M L A H		**1.976.284.210,00**	

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, di Kapanewon Semanu dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**1.328.331.310,00**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.720.500,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.130.000,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	897.500,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	897.500,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.049.000,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.049.000,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.220.000,00
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.477.500,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.026.041.810,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.019.121.810,00
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.932.500,00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.987.500,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.840.000,00
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.840.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000,00
4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	400.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.423.000,00
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.628.000,00
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.231.000,00
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.568.000,00
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.336.000,00
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.240.000,00
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.106.000,00
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.995.000,00
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.156.000,00
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.955.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.800.000,00
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.500.000,00
7.2	Pemeliharaan Mebel	500.000,00
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.400.000,00
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000,00
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.400.000,00
J U M L A H		**1.976.284.210,00**

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp1.976.284.210,00. Seluruhnya bersumber pada APBD Kabupaten Gunungkidul.

Program dan kegiatan Kapanewon Semanu yang direncanakan melalui Renja Kapanewon Semanu Tahun 2026 dan rencana maju di tahun 2027 secara rinci dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KAPANEWON SEMANU				**1.976.284.210,00**				**2.581.369.150,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.000.000,00**				**100.000.000,00**
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100.000.000,00**				**100.000.000,00**
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***		100 Persen	**100.000.000,00**			100 Persen	**100.000.000,00**
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Adat,Tradisi,Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan*			100.000.000,00				100.000.000,00
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**40.000.000,00**				**30.000.000,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.000.000,00**				**30.000.000,00**
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan***		100 Persen	**40.000.000,00**			100 Persen	**30.000.000,00**
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*			40.000.000,00				30.000.000,00
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	30.000.000,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.836.284.210,00**				**2.451.369.150,00**
7.01	**KECAMATAN**				**1.836.284.210,00**				**2.451.369.150,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah***		82.9 Indeks	**1.328.331.310,00**			83 Indeks	**2.133.985.100,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			48.720.500,00				14.465.500,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	38.130.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3.875.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	897.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	897.500,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	897.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	897.500,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.049.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.049.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.049.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.049.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	17 Laporan	3.220.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	17 Laporan	3.220.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	4 Laporan	3.477.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	4 Laporan	3.477.500,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			1.026.041.810,00				1.863.920.000,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua	210 Orang/bulan	1.019.121.810,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua	252 Orang/bulan	1.857.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kel/Desa				Kel/Desa		
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.932.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.932.500,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	13 Laporan	4.987.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	13 Laporan	4.987.500,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*			2.840.000,00				3.024.000,00
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	28 Laporan	2.840.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	28 Laporan	3.024.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*			400.000,00				1.197.500,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	1.197.500,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Umum*			77.423.000,00				77.423.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	4 Paket	6.628.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	4 Paket	6.628.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	6 Paket	43.231.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	6 Paket	43.231.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	4 Paket	7.568.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	4 Paket	7.568.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	8 Paket	6.336.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	8 Paket	6.336.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	296 Dokumen	1.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	296 Dokumen	1.200.000,00
7.01.01.2.06.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi*	Kab. Gunungkidul,	12 Laporan	2.240.000,00	DANA ALOKASI	Kab. Gunungkidul,	12 Laporan	2.240.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0008		*Kunjungan Tamu*	Semanu, Semua Kel/Desa			UMUM (DAU)	Semanu, Semua Kel/Desa		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.220.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.220.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			120.106.000,00				67.038.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	4 Laporan	30.995.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2.400.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	36 Laporan	46.156.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	36 Laporan	52.038.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	42.955.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.600.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*			52.800.000,00				106.917.100,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	136 Unit	38.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	136 Unit	38.500.000,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	10 Unit	500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	20 Unit	2.300.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	19 Unit	8.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	21 Unit	14.516.100,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Unit	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	2 Unit	42.361.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	8 Unit	2.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	8 Unit	9.240.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana***		100 Persen	**6.617.500,00**			100 Persen	**21.735.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*			6.617.500,00				21.735.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	13 Laporan	6.617.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	13 Laporan	21.735.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan***		100 Persen	**96.280.500,00**			100 Persen	**109.934.000,00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*			44.557.500,00				44.775.000,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	34.785.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	34.785.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	8 Laporan	9.772.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	8 Laporan	9.990.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi*			40.440.000,00				45.440.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	19 Pokmas / Ormas	40.440.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	22 Pokmas / Ormas	45.440.000,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan*			7.408.000,00				14.469.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	4 Laporan	7.408.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	5 Laporan	14.469.000,00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*			3.875.000,00				5.250.000,00
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	25 Keluarga	3.875.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	25 Keluarga	5.250.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum***		100 Persen	**279.197.500,00**			100 Persen	**3.150.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*			279.197.500,00				3.150.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	7 Laporan	279.197.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	2 Laporan	3.150.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***		100 Persen	**105.633.900,00**			100 Persen	**116.395.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*			105.633.900,00				116.395.000,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	75 Orang	94.238.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	75 Orang	105.000.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	11.395.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	11.395.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***		100 Persen	**20.223.500,00**			100 Persen	**66.170.050,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*			20.223.500,00				66.170.050,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua	1 Dokumen	1.332.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua	1 Dokumen	3.864.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peraturan Kepala Desa	*Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	Kel/Desa				Kel/Desa		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	1.992.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	12.757.500,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	29 Dokumen	9.141.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	29 Dokumen	40.867.050,00
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	367.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.291.500,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.020.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.020.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	1.965.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	1.965.000,00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.405.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kab. Gunungkidul, Semanu, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.405.000,00
Jumlah					**1.976.284.210,00**				**2.581.369.150,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Semanu Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis Kapanewon dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Beberapa hal penting sebagai penutup dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja memerlukan sinergi antar jawatan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Komitmen terhadap capaian kinerja harus terus dijaga dengan mengedepankan pelayanan prima dan berkualitas.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program juga harus berorientasi pada hasil yang terukur, memperhatikan asas manfaat, serta didukung oleh koordinasi lintas sektor.

c. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari dokumen ini meliputi pelaksanaan forum Musrenbang Kapanewon, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta pemantauan dan evaluasi rutin atas capaian indikator kinerja. Evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan dan pengembangan Renja tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja Kapanewon Semanu Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan harapan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Wonosari,

KAPANEWON SEMANU,

ttd

EMMANUEL KRISNO JUWOTO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON PONJONG
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,mengamanatkan adanya penyempurnaan dalam sistem perencanaan nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya berdasarkan pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu, Kepala Daerah terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, maka Bupati terpilih harus menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. Sejalan terhadap penyusunan RPJMD maka Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029. Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memuat visi dan misi Bupati terpilih, dan menjadi dasar penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1(satu) tahun. Rencana Kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, tahap

pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan RKPD dan Renja PD dilaksanakan secara simultan, oleh karena itu untuk menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD) dan dokumen Renja PD maka perlu penyempurnaan dokumen Renja PD tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

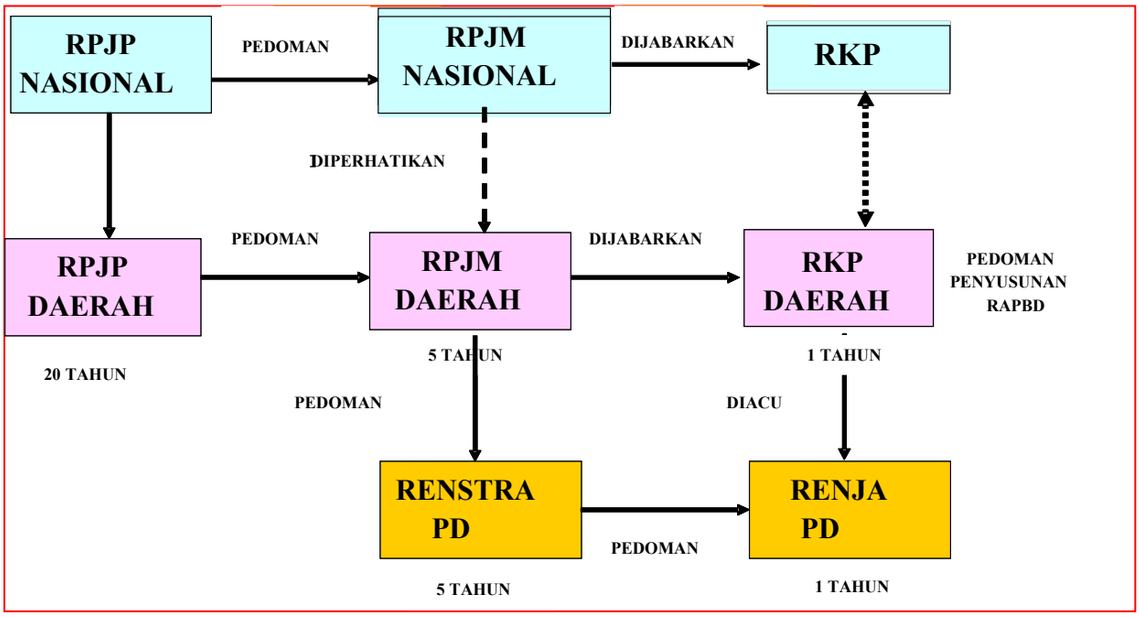

Bagan 1 : Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Ponjong memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Ponjong serta kerangka pendanaan daerah, Renja PD kapanewon secara substansial sesuai dengan visi dan misi serta rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten dan tindak lanjut dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Ponjong tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 123 Nomor 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemeintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tenang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor: 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kapanewon Ponjong adalah untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu di tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja kapanewon ini adalah:

1. Sebagai acuan operasional kegiatan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kapanewon;

2. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan;
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kapanewon Ponjong tahun 2026 adalah:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON PONJONG
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kapanewon Ponjong
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Ponjong
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Ponjong
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON PONJONG
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Ponjong

BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KAPANEWON PONJONG

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KAPANEWON PONJONG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Ponjong dan Capaian Renstra Kapanewon Ponjong

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Ponjong Tahun 2026 mengacu pada APBD Tahun 2025 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Ponjong berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan dan tahun 2024. Rencana Kerja Kapanewon Ponjong tahun 2025 sesuai dengan DPA nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025 teranggarkan Rp 1.976.655.964,00, terdiri dari 8 program 16 kegiatan dan 42 subkegiatan. Terdiri dari belanja operasi Rp 1.751.605.964,00 dan belanja modal Rp45.050.000,00.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Ponjong atau realisasi APBD untuk Kapanewon Ponjong yang disampaikan melalui E-Monev. Kapanewon Ponjong telah mencapai 97,17 % untuk realisasi keuangannya, dan 100 % untuk realisasi kinerjanya. Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan IV tahun 2024. Terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1	2	4	5	7
1.	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
2.	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	118.895.000,00	118.895.000,00	100,00%
3.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.282.532.951,00	1.251.541.299,00	97,58%
4.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	340.104.900,00	314.509.900,00	92,47%
5.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	30.860.000,00	30.730.000,00	99,58%
6.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	13.040.000,00	13.000.000,00	99,69%
7.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	108.577.000,00	108.526.900,00	99,95%
8.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	14.190.000,00	14.140.000,00	99,65%
	JUMLAH	**2.008.199.851,00**	**1.951.343.099,00**	97,17%

Evaluasi terhadap realisasi tahun 2024 adalah sebagi berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan yaitu tercapai 100%. Ada beberapa program yang realisasi keuangannya tidak 100% adalah
    a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan capaian realisasi keuangan 97,58%. Hal ini karena terjadi mutasi dan pensiun ASN.
    b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan capaian realisasi keuangan 92,47%. Hal ini karena kegiatan bantuan sosial jambanisasi dan droping air memakai nilai kontrak yang nilainya dibawah anggaran. Sehingga terdapat sisa anggaran
    c. Program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan dengan capaian realisasi keuangan 99,58%. Hal ini karena terjadi mutasi ASN dari golongan IV ke golongan III, sehingga belanja perjalanan dinas menjadi sisa anggarannya.
    d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian realisasi keuangan 99,69%. Hal ini karena terjadi mutasi ASN dari golongan IV ke golongan III, sehingga belanja perjalanan dinas menjadi sisa anggarannya.
    e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian realisasi keuangan 99,95%. Hal ini karena terjadi mutasi ASN dari golongan IV ke golongan III, sehingga belanja perjalanan dinas menjadi sisa anggarannya.
    f. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan capaian realisasi keuangan 99,65%. Hal ini karena terjadi mutasi ASN dari golongan IV ke golongan III, sehingga belanja perjalanan dinas menjadi sisa anggarannya.

2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Ada beberapa program yang tercapai realisasi keuangannya seebsar 100% adalah
    a. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan.
    b. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
3. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan adalah tidak ada karena program mengacu pada anggaran yang tersedia dan buka OPD yang menerima pendapatan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2024 adalah adanya efisiensi anggaran.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian Tahun 2026 adalah:
    a. Munculnya kebijakan/regulasi setelah program kegiatan dan target ditetapkan.
    b. Pelaksanaan kegiatan yang harus menyesuaikan agenda/jadwal dari Kabupaten.
    c. Adanya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut adalah:
   a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala jawatan dan kepala sub bagian yang menangani kegiatan.
   b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait baik masalah pelaksanaan kegiatan maupun pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon

Dari uraian di atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Ponjong sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Ponjong dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Ponjong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024				Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.22.08.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan**														
2.22.08.2.09	*Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Jumlah laporan kegiatan adat seni tradisi dan lembaga budaya terlaksana*														
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan gelar budaya Jogja	5	Laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	4	laporan	80%
4.	**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
4.01.04.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan**														
4.01.04.5.06	*Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*	*Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*														
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	10	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	3	dokumen	11	dokumen	110%
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7.01	**KECAMATAN**															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota terlaksana**														
7.01.01.2.01.	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Indeks perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*														
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	Dokumen	2	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	8	dokumen	80%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	4	dokumen	80%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	10	Dokumen	4	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	8	dokumen	80%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	10	Dokumen	4	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	8	dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	85	laporan	34	laporan	17	laporan	17	laporan	100%	17	laporan	68	laporan	80%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20	Laporan	8	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	4	laporan	16	laporan	80%
7.01.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks administrasi keuangan perangkat daerah*														
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	840	orang/bulan	336	orang/bulan	168	orang/bulan	168	orang/bulan	100%	196	orang/bulan	700	orang/bulan	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	5	Laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	3	laporan	60%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	65	Laporan	26	laporan	13	laporan	13	laporan	100%	13	laporan	52	laporan	80%
7.01.01.2.05.	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah*														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	30	Dokumen	12	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100%	6	dokumen	24	dokumen	80%
7.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks administrasi umum perangkat daerah*														
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerapan bangunan kantor yang disediakan	20	paket belanja	8	paket belanja	4	paket belanja	4	paket belanja	100%	4	paket belanja	16	paket belanja	80%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35	paket belanja	14	paket belanja	7	paket belanja	7	paket belanja	100%	9	paket belanja	30	paket belanja	86%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	30	paket belanja	12	paket belanja	6	paket belanja	6	paket belanja	100%	6	paket belanja	24	paket belanja	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	75	paket belanja	30	paket belanja	15	paket belanja	15	paket belanja	100%	15	paket belanja	60	paket belanja	80%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1240	Dokumen	496	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	0	dokumen	496	dokumen	40%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50	Laporan	20	laporan	10	laporan	10	laporan	100%	10	laporan	40	laporan	80%
7.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*														
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	300	Laporan	120	laporan	60	laporan	60	laporan	100%	60	laporan	240	laporan	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.01.2.09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana*														
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	320	Unit	128	Unit	64	unit	64	unit	100%	64	unit	256	unit	80%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	125	Unit	50	Unit	25	unit	25	unit	100%	25	unit	100	unit	80%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	Unit	2	Unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	4	unit	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15	Unit	6	Unit	3	Unit	3	unit	100%	3	unit	12	unit	80%
7.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana**	**100%**													
7.01.02.2.01.	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah istansi vertikal terkait	25	Laporan	10	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	1	laporan	13	laporan	52%
7.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*Jumlah Laporan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*														
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	45	Laporan	18	laporan	7	laporan	7	laporan	100%	5	laporan	30	laporan	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65	Laporan	26	laporan	13	laporan	13	laporan	100%	13	laporan	52	laporan	80%
7.01.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi**	**100%**													
7.01.03.2.01.	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa*														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.03.2.01.01	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	65	dokumen	26	dokumen	13	dokumen	13	dokumen	100%	13	dokumen	52	dokumen	80%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65	Laporan	26	laporan	13	laporan	13	laporan	100%	13	laporan	52	laporan	80%
7.01.03.2.03.	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	3	**4**		**5**		**6**		**7**		**8=(7/6)**	**9**		**10=(5+7+9)**		**11=(10/4)**
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	10	Lembaga	4	lembaga	2	lembaga	2	lembaga	100%	2	lembaga	8	lembaga	80%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25	Laporan	10	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	2	laporan	14	laporan	56%
7.01.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi**	**100%**													
7.01.04.2.01.	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Indeks Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Lainnya	5	Laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	4	laporan	80%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	Laporan	4	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	2	laporan	8	laporan	80%
7.01.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi**	**100%**													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.05.2.01.	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*														
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	375	Orang	150	orang	75	orang	75	orang	100%	75	orang	300	orang	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	3	**4**		**5**		**6**		**7**		**8=(7/6)**	**9**		**10=(5+7+9)**		**11=(10/4)**
7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	25	Dokumen	10	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	100%	5	dokumen	20	dokumen	80%
7.01.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana**	**100%**													
7.01.06.2.01.	*Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Indeks Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*														
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	120	Dokumen	48	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	100%	24	Dokumen	96	Dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	15	Dokumen	4	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	10	Dokumen	67%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	11	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	1	dokumen	1	Dokumen	9%
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	11	dokumen	11	Dokumen	100%
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kalurahan yang menyelenggarakan pengisian pamong kalurahan dan atau staf pamong Kalurahan	11	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	0%	1	dokumen	3	Dokumen	27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Ponjong Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Ponjong tahun lalu 2024					Target program / kegiatan (Renja Kap Ponjong tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Ponjong s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Ponjong Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	8	Dokumen	80%
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	0	Dokumen	3	Dokumen	60%
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	0	Dokumen	3	Dokumen	60%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Ponjong

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelayanan Kecamatan/ Kapanewon digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Ponjong serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dinyatakan bahwa tugas pokok Kapanewon adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi yang harus diemban oleh pemerintah Kapanewon mencakup bidang pemerintah umum dan pemerintah desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang pembangunan masyarakat dan desa, bidang kesejahteraan sosial. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh seksi melalui program / kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi dalam setiap tahun anggaran.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Ponjong berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Kualitas penyelenggaraaan pemerintahan desa meningkat yang diharapkan pada akhir periode renstra mencapai 100%. Adapun formula indikator kinerja utama adalah:

- Persentase kalurahan yang menyusun RKPKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Persentase kalurahan yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Persentase kegiatan sosial terlaksana.
- Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.
- Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survey kepada Masyarakat pengguna layanan.

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Ponjong dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Indikator	Satuan (IKU, SPM,IKK)	Target Renstra Kapanewon Ponjong				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(IKU, SPM, IKK)		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indikator IKU	Satuan IKU	91.5	91.7	91.8	92	84,39	84,41	91.8	91.8	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Kapanewon Ponjong

Kinerja pelayanan di Kapanewon Ponjong mengacu pada tugas dan fungsi Kapanewon sebagaimana terdapat dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
n. penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

p. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Ponjong, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Ponjong dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Ponjong sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kapanewon Ponjong secara langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :

1. Terfasilitasinya pelayanan administrasi kependudukan
2. Terfasilitasinya pelayanan administrasi pemerintahan secara umum (Dispensasi Nikah, Penerbitan ijin UMK, Persetujuan SKTM, Surat Keterangan Domisili, surat keterangan ahli waris dll)
3. Terfasilitasinya kegiatan pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
4. Terfasilitasinya kegiatan monitoring Penyaluran BLT.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
6. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraanpemerintah kalurahan.
7. Terfasilitasinya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
8. Terfasilitasinya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan kalurahan.
10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal (lomba jatilan, karawitan, pedalangan dll)
12. Terfasilitasinya pembuatan buku profil desa, buku profil Kapanewon dan monografi Kalurahan

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ponjong maka diperlukan tentang potret Kapanewon Ponjong saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ponjong adalah sebagai berikut :

2.3.1 Permasalahan dan hambatan

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ponjong maka diperlukan data gambaran kondisi dan saat ini. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh KapanewonPonjong adalah sebagai berikut:

1. Bidang Sosial Budaya
   a. Kondisi
      1. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap pelestarian Budaya;
      2. Keberadaan kebudayaan yang ada di masyarakat masih bersifat kedaerahan;

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari budaya pesta;
4. Belum tepatnya pemanfaatan teknologi/medsos bagi generasi muda;
5. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan didalam masyarakat;

b. Permasalahan

1. Masih rendahnya minat generasi muda dalam upaya pelestarian budaya;
2. Inventarisasi budaya yang ada dimasyarakat belum optimal;
3. Masih banyaknya minat masyarakat terhadap budaya pesta atau hajatan;
4. Efek negatif teknologi terhadap generasi muda;
5. Masih banyaknya pengangguran;
6. Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang menjunjung tinggi toleransi

2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi

1. Keterbatasan SDM serta kurang meratanya pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha;
2. Masih banyaknya petani yang menerapkan sistem pertanian secara tradisi dan menggunakan peralatan yang seadanya;
3. Penjualan hasil industri belum optimal seperti, kerajinan akar wangi, mainan anak-anak, dan lain-lain;
4. Belum tercukupiya kebutuhan bahan baku untuk produk tertentu sehingga masih harus mengimpor dari luar daerah;
5. Memberikan pemahaman terhadap pelaku ekonomi untuk bisa bekerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak ketiga;

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya sumber daya manusia dari pelaku ekonomi;
2. Masih banyaknya petani yang belum memanfaatkan teknologi pertanian;
3. Belum adanya pusat penjualan (*show room*) bagi hasil industri di Kapanewon Ponjong;
4. Kondisi geografis yang kurang mendukung untuk tersedianya bahan baku untuk jenis-jenis produk tertentu;
5. Masih kurangnya minat pelaku ekonomi untuk menangkap peluang kerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak ketiga;

3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Mengoptimalkan Gedung yang sudah ada;
2. Kondisi jalan Sebagian bergelombang dan rusak sehingga mengganggu transportasi;
3. Belum optimalnya penataan pedagang pasar dan pedagang kali lima;
4. Tempat pembuangan sampah menggunakan yang sudah ada dan tempat pembuangan akhir di bawa ke daerah lain;
5. Perlunya pemahaman terhadap kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah;
6. Sebagian masyarakat telah memiliki kendaraan sendiri;
7. Keberadaan angkutan umum kurang memadai;
8. Perlunya peningkatan kesadaran mayarakat terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU);

9. Memberikan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya petunjuk arah;
10. Memberikan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

b. Permasalahan

1. Masih terbatasnya sarana gedung Kapanewon Ponjong sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
2. Angkutan yang bertonase berat akan mengakibatkan rusaknya jalan;
3. Belum tertibnya penataan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
4. Masih kurangnya tempat pembuangan sampah dan belum adanya tempat pembuangan akhir;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah;
6. Kurangnya angkutan umum;
7. Masih rendahnya minat masyarakat terhadap pemanfaatan angkutan umum;
8. Kurangnya penerangan jalan umum (PJU) pada titik-titik tertentu;
9. Kurangnya petunjuk arah di lokasi-lokasi tertentu;
10. Masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

4. Pemerintahan dan Ketertiban

a. Kondisi Saat Ini

1. Perlunya penambahan personil baik ASN maupun THL;
2. Perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan ASN;
3. Perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Kalurahan;
4. Memberikan pemahaman terhadap Pemerintah Kalurahan tentang ketepatan penyusunan Laporan;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hukum;
6. Mengupayakan koordinasi dengan wilayah perbatasan;
7. Memberikan pemahaman tentang Pengadministrasian Tanah Kas Kalurahan;
8. Perlunya sosialisasi/penyuluhan Penyakit Masyarakat;
9. Mengupayakan peningkatan pemetaaan Daerah Rawan Bencana.

b. Permasalahan

1. Kurangnya personil ASN;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia personil ASN yang tidak merata;
3. Kualitas SDM Perangkat Kalurahan yang tidak merata;
4. Masih adanya sebagian Pemerintah Kalurahan yang terlambat dalam penyusunan Laporan;
5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum;
6. Belum terlaksananya koordinasi antara wilayah perbatasan secara rutin;
7. Belum optimalnya Pengadministrasian Tanah Kas Kalurahan;
8. Masih adanya Penyakit Masyarakat;
9. Kurang optimalnya pemetaan Daerah rawan Bencana.

2.3.2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SGDs (Sustainable Development Goals)

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target- target TPB/SDGs di tingkat nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program.

Tema , prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026 dirumuskan berdasar pada visi misi Kepala Daerah. Untuk merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan Nasional dan DIY. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, Kapanewon Ponjong melakukan pembenahan, peningkatan sistem dan prosedur dalam pelayanan kepada masyarakat.

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah " Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026". Pada tahapan lima tahun pertama ini pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju.
Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang meliputi :

a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis
b. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kapanewon Ponjong adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Peningkatan perekonomian masyarakat
6. Peningkatan kesejahteraan sosial

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Ponjong terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Ponjong dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan Desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Ponjong sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat,

merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Ponjong. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Ponjong, yang meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Ponjong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan penerangan jalan
2. Adanya potensi sumber daya air
3. Adanya potensi wisata
4. Adanya potensi kerajinan (Batik, Mebel,dll)
5. Adanya potensi Wisata yang belum terekspose
6. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, pertanian dan lain - lain
7. Meningkatnya jumlah alat transportasi
8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
9. Adanya Industri Olahan Makanan
10. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11. Peningkatan fasilitas kesehatan dan kebersihan bagi masyarakat
12. Pemberian bantuan stimulan bagi KK miskin
13. Pemberian edukasi penerapan PHBS bagi masyarakat
14. Pengembangan SDM masyarakat

Faktor Penghambat :

1. Banyaknya pertambahan pengangguran dan rumah tangga miskin karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK)
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian seperti, jagung, kedelai, kacang tanah dll
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
7. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor.

Adapun Prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Ponjong adalah Reformasi Birokrasi dengan sasaran daerah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.

Dari penjabaran visi dan misi, maka tugas dan fungsi Kapanewon Ponjong adalah:

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon.

4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kalurahan.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
6. Peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan.
7. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan.

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD adalah :

1. Kualitas dan kuantitas SDM kedinasan yang kurang sesuai dengan load factor activity, mengakibatkan kurang optimalnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
2. Kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung layanan.
3. Terbatasnya anggaran untuk meningkatkan kapasitas pelayanan PD.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan PD adalah:

1. Akses yang mudah dijangkau karena berada ditengah-tengah wilayah dan dekat dengan tempat umum.
2. Sumber informasi yang mudah didapat dari situs/website.
3. Kemajuan teknologi yang memudahkan untuk mempercepat pelayanan PD.

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik:
    a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
    b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan:
    a. Koordinasi kegiatan pembangunan desa
    b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum:
    a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
    b. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:
    a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa:
    a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 memberikan gambaran tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD kabupaten, APBD propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) memberikan informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk Tahun Anggaran 2026, Besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan Kapanewon Ponjong Tahun Anggaran 2026 direncanakan sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan keterbasan Anggaran. Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat desa/kalurahan sampai ditingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi penghitungan anggaran pemerintah daerah. Secara umum pada rancangan awal semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun dengan keterbatasan dana yang dimiliki daerah setelah sampai proses musrenbang ditingkat kabupaten besaran angkanya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Secara lengkap Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada matriks lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan kami sajikan di tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Ponjong

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2.22.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**										
2.22.08.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**100%**							
2.22.08.2.5.07	*Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya*		Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan			*Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya*		*Jumlah laporan kegiatan adat seni tradisi dan lembaga budaya*	*0%*		
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Kap.Ponjong	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 laporan	100.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kap.Ponjong	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 laporan	100.000.000	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
4.	**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**										
4.01.04.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	**100%**							
4.01.04.5.01.	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*		Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*Kap.Ponjong*	*Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*0%*		
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kaluahan/Kelurahan	Kap.Ponjong	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 dokumen	40.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kaluahan/Kelurahan	Kap.Ponjong	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 dokumen	40.000.000	
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**										

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	**81,50 Nilai**							
7.01.01.2 .01.	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*0%*		
7.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Ponjong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	37.055.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap. Ponjong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	37.055.000	
7.01.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kap. Ponjong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.575.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kap. Ponjong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.575.000	
7.01.01.2 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kap Ponjong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.315.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kap Ponjong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.315.000	
7.01.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kap Ponjong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.815.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kap Ponjong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.815.000	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kap Ponjong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.615.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kap Ponjong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.615.000	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kap. Ponjong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dokumen	2.936.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kap. Ponjong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dokumen	2.936.800	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Ponjong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.580.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap. Ponjong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.580.000	
7.01.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*0%*		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap Ponjong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 orang/bulan	1.142.672.230	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kap Ponjong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 orang/bulan	1.142.672.230	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kap Ponjong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.630.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kap Ponjong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.630.000	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kap Ponjong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 laporan	39.625.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme s teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 laporan	39.625.000	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		0	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 laporan	1.860.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 laporan	1.860.000	
7.01.01.2.05.	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		Dokumen Administrasi Kepegawiaan			*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*			
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kap Ponjong	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	8.264.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kap Ponjong	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	8.264.800	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7.01.01.2 .06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Dokumen Administrasi Umum*			*Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*Dokumen Administrasi Umum*	*0%*		
7.01.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kap Ponjong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.234.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kap Ponjong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.234.000	
7.01.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap Ponjong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	29.922.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kap Ponjong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	29.922.000	
7.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kap Ponjong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	10.399.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kap Ponjong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	10.399.000	
7.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kap Ponjong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	5 paket	2.263.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kap Ponjong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	5 paket	2.263.000	
7.01.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kap Ponjong	Jumlah Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	950.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kap Ponjong	Jumlah Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	950.000	
7.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap Ponjong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	7.680.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap Ponjong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	7.680.000	
7.01.01.2 .07.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*			*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		*Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*	*0*	*0*	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7.01.01.2 .07.0005	Pengadaan Mebel	Kap Ponjong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	13.600.000	Pengadaan Mebel	Kap Ponjong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	13.600.000	
7.01.01.2 .08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*0%*		
7.01.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kap.Ponjong	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	920.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kap.Ponjong	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	920.000	
7.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap.Ponjong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	35.668.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kap.Ponjong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	35.668.000	
7.01.01.2 .09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*			*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	*0*		
7.01.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap.Ponjong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 unit	40.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kap.Ponjong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 unit	40.300.000	
7.01.01.2 .09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kap.Ponjong	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	500.000	Pemeliharaan Mebel	Kap.Ponjong	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	500.000	
7.01.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kap.Ponjong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	6.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kap.Ponjong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	6.600.000	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap.Ponjong	Jumlah Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 unit	5.700.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kap.Ponjong	Jumlah Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 unit	5.700.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap Ponjong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	900.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kap Ponjong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	900.000	
7.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana	**100%**							
7.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*		*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*			*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*		*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*0*		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap Ponjong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	38.385.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap Ponjong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	38.385.000	
7.01.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	**100%**							

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	DESA DAN KELURAHAN										
7.01.03.2 .01.	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan*			*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan*	*0*		
7.01.03.2 .01.0001	Sinkornisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kap.Po njong	Jumlah Dokumen Sinkornisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 dokumen	21.433.000	Sinkornisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kap.Ponj ong	Jumlah Dokumen Sinkornisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 dokumen	21.433.000	
7.01.03.2 .01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap.Po njong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	9.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap.Ponj ong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	9.500.000	
7.01.03.2 .02.	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		*Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi*			*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*		*Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi*	*0*	*0*	
7.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kap.Po njong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	419.651.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kap.Ponj ong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	419.651.000	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7.01.03.2 .03.	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*		*Laporan pemberdayaan lembaga masyarakat*			*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*		*Laporan pemberdayaan lembaga masyarakat*	*0*		
7.01.03.2 .03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kap.Po njong	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	3.738.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kap.Ponj ong	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	3.738.000	
7.01.03.2 .06.	*Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*		*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*			*Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*		*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*	*0*	*0*	
7.01.03.2 .06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kap.Po njong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 keluarga	1.325.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kap.Ponj ong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 keluarga	1.325.000	
7.01.03.2 .06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kap.Po njong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 keluarga	1.245.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kap.Ponj ong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 keluarga	1.245.000	
7.01.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**100%**							

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7.01.04.2 .01.	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*			*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*0%*		
7.01.04.2 .01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kap.Ponjong	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 laporan	604.633.500	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kap.Ponjong	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 laporan	604.633.500	
7.01.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**100%**							
7.01.05.2 .01.	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*		*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*0*		

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik	Kap.Ponjong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	111.988.400	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik	Kap.Ponjong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	111.988.400	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kap.Ponjong	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 dokumen	6.750.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kap.Ponjong	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 dokumen	6.750.000	
7.01.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**100%**							

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7.01.06.2 .01.	*Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Kap.Po njong*	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			*Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*0%*		
7.01.06.2 .01.0002	Fasilitasi Adminsitrasi Tata Pemerintahan Desa	Kap.Po njong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 dokumen	2.160.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kap.Ponj ong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 dokumen	2.160.000	
7.01.06.2 .01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kap.Po njong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 dokumen	5.545.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kap.Ponj ong	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 dokumen	5.545.000	
7.01.06.2 .01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kap.Po njong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	3.770.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kap.Ponj ong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	3.770.000	
7.01.06.2 .01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kap.Po njong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 dokumen	1.805.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kap.Ponj ong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 dokumen	1.805.000	

	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Nomor	**Program/kegiatan/ sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7.01.06.2.01.0008	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kap.Ponjong	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	2.160.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kap.Ponjong	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	2.160.000	
					2.775.668.730					2.775.668.730	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) memberikan informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk Tahun Anggaran 2026, Besaran angka atau kebutuhan dana tersebut direncanakan sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan keterbasan Anggaran. Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui proses pengusulan dari para pemangku kepentingan seperti unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait , LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kalurahan maupun kapanewon.

Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut :

1. Pembahasan DURKP hasil usulan Musrenbangdes yang dilanjutkan di sidang kelompok pada kegiatan Musrenbang Kapanewon yang disusun menurut skala prioritas;

2. Hasil dari sidang masing-masing kelompok dilanjutkan pleno yang menghasilkan usulan yang disepakati dari masing-masing pemangku kepentingan yang diketahui Bappeda dan Instansi/OPD pelaksana Kegiaatan.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan pada Pleno tersebut yang ditanda tangani perwakilan Desa, BPD, LPMD dan Camat/Panewu.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi penghitungan anggaran pemerintah daerah. Secara umum pada rancangan awal semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun dengan keterbatasan dana yang dimiliki daerah setelah sampai proses musrenbang ditingkat kabupaten besaran angkanya tidak sesuai dengan kebutuhan. Usulan masyarakat yang masuk dalam hasil Musrenbang Kapanewon tahun 2026 disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Bimtek pengelolaan keuangan Desa - KAPANEWON PONJONG	Balai Kalurahan Sumbergiri, Ponjong Gunungkidul	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan : Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan :Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa **Indikator : Jumlah Bimtek pengelolaan keuangan Desa terselenggara**	kali/1	4.460.000	4.460.000,00	Diterima
2	(PIWK) - Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi Rumah Tangga miskin - KAPANEWON PONJONG	Kalurahan Bedoyo, Ponjong Gunungkidul	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan :Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **Indikator : Jumlah Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi Rumah Tangga miskin**	KK /16	7.734.500	123.752.000,00	Diterima
3	(PIWK) - Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi Rumah Tangga miskin - KAPANEWON PONJONG	Kalurahan Umbulrejo, Ponjong Gunungkidul	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan :Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **Indikator : Jumlah Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi Rumah Tangga miskin**	KK /28	7.734.500	216.566.000,00	Diterima
					Jumlah	**344.778.000,00**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional tentang kapanewon tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Sedangkan Kapanewon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Ponjong sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Ponjong

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kapanewon dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen renstra kapanewon. Untuk sasaran Kapanewon Ponjong dirumuskan dengan berdasar kepada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran Kapanewon Ponjong tahun 2026 (Renja Kapanewon Ponjong tahun 2026) sebagaimana telah disajikan pula dalam RKPD tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lampiran XXXVI telah ditetapkan tujuan dan target kinerja tujuan untuk tahun 2026, yaitu IKU PD, indikator dan target IKU PD. Berikut disajikan tabel penjabaran sasaran daerah kedalam sasaran perangkat daerah Kapanewon Ponjong.

Dalam prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan tema pembangunan tahun 2026, secara langsung Kapanewon Ponjong mendukung pencapaian prioritas daerah yaitu Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1
Prioritas dan Sasaran Daerah

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, eifisien dan akuntabel	Opini BPK	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu
				Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu
				Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial
				Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari tabel Realisasi Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ponjong pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Realisasi Tujuan Kapanewon Ponjong Tahun 2024

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target 2024	Realisasi
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	91,7	84,41
2	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	4	4

Tabel 3.2.3
Tujuan Kapanewon Ponjong

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun Akhir Tahun 2030
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,32

Dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Gunungkidul No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Setelah ditentukan tujuan PD selanjutnya adalah menentukan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Realisasi Sasaran PD tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2.4
Realisasi Sasaran Kapanewon Ponjong tahun 2024

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)	Target 2024	Realiasasi 2024
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	91,7	84,41
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	81,50 (A)	81,05A)
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	4	4

Sasaran Kapanewon Ponjong pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.5
Sasaran Kapanewon Ponjong

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)	Target Sasaran PD Tahun 2026
1	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3	Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4	Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5	Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,9

Sasaran PD yang pertama adalah meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan dengan indicator persentase penyusunan RKPKal dan APBKal benar dan tepat waktu sebesar 100% yang diampu oleh jawatan kemakmuran dan jawatan praja. Kedua meningkatnya Kesejahteraan Sosial dengan indicator persentase kegiatan social terlaksana sebesar 100% diampu oleh jawatan social. Ketiga meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon dengan indicator persenatse koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar 100% diampu oleh jawatan keamanan. Yang keempat adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon dengan indicator indeks kepuasan masyarakat sebesar 85,90 yang diampu oleh jawatan pelayanan umum. Target ini didukung oleh program penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota.Selain itu untuk dapat memenuhi target tersebut juga didukung semua pihak dengan : koordinasi intensif, komitmen, optimalisasi sarana, dan peningkatan kapasitas aparatur.

Indikator Kinerja Utama adalah alasan hakiki yang melatarbelakangi eksistensi perangkat daerah dalam jajaran kelembagaan di daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi Kapanewon, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Ponjong telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021 pada tanggal 26 November 2021. Setelah disepakatinya Indikator Kinerja Utama, maka Perangkat Daerah berkewajiban untuk mengerahkan sumber daya yang ada dalam rangka pencapaian sasaran strategis tersebut. Rumusan mengenai Indikator Kinerja Utama Kapanewon Ponjong adalah

Tabel 3.2.6
Realisasi IKU Kapanewon Ponjong Tahun 2024

No	IKU	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	91,7	84,41

Tabel 3.2.7
Rumus Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	IKU	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	20% x Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu	100
			20% x Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu	100
			20% x Persentase kegiatan sosial terlaksana	100
			20% x Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terlaksana	100
			20% x Persentase nilai indeks kepuasan masyarakat	85,9

Tabel 3.2.8
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Ponjong Tahun 2026

Target Indikator Kinerja Utama di Kapanewon Ponjong Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,18

Dari tabel diatas diketahui bahwa tujuan Kapanewon Ponjong ada 1 (satu) dengan indikator yaitu Indeks kualitas pelayanan kapanewon tahun 2026 yang diukur dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) dengan target sebesar 97,18. Naik dibanding realisasi di tahun 2024 adalah 84,41 dengan target 91,7.

Selain itu tujuan dari pada penyusunan rancangan Renja Kapanewon Ponjong Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah

3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Ponjong meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain pembangunan Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan pada visi misi Kepala Daerah. Untuk merumuskan tema pembangunan daerah tahun 2026 di Kabupaten Gunungkidul juga memperhatikan arah kebijakan Nasional dan DIY. Sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasioanal dan di tingkat provinsi untuk mencapai target TPB/SDGs yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat diantaranya : pengurangan kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan,dll. Untuk mencapai target tersebut diperlukan SPM (Standar Pelayanan Kemiskinan) sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu sebagai control terhadap kinerja pemerintah daerah dan memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah.

Kebijakan umum pemerintah mengacu pada pembangunan yang goodgovernance, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil. Dengan demikian anggaran Negara baik pusat dan daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja (disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinganka masyarakat.

Program dan Kegiatan Kapanewon Ponjong dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan kalurahan. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra Kapanewon Ponjong tahun 2025-2029, yang juga disesuaikan dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Kapanewon sebagaimana disepakati dalam forum gabungan SKPD Kapanewon.

4.2 Uraian garis besar mengenai program dan kegiatan

Rencana Kerja Kapanewon Ponjong tahun 2026 terdiri dari 6 Program 13 Kegiatan dan mencakup 42 Sub kegiatan. Dari program-program tersebut, merupakan program yang menyasar pada internal SKPD yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya.

Sedangkan selebihnya, dan program yang ditujukan bagi masyarakat dan desa, terutama untuk wilayah miskin yang ada di Kapanewon Ponjong.

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp 2.775.668.730,00 dengan perkiraan maju pada tahun berikutnya sebesar Rp 2.779.159.730,00. Kegiatan tersebut bersumber pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 2.635.668.730,00.

Penyebaran lokasi program dan kegiatan dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, dan Jawatan Umum sifat penyebaran lokasinya adalah menyeluruh ke semua kalurahan di wilayah Kapanewon Ponjong. Terkecuali program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, lokasi kegiatan ini di kantor Kapanewon yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kapanewon Ponjong. Dari usulan program dan kegiatan Kapanewon berasumsi kebutuhan selama Tahun Anggaran untuk kebutuhan Kapanewon Ponjong, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 memberikan gambaran tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

Jumlah program Kapanewon Ponjong untuk tahun 2026 yang mendasar pada strategi prioritas pembangunan tentang Reformasi Birokrasi adalah

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2026 dapat dilihat dari tabel 4.2.1 berikut:

Tabel 4.2.1
Prioritas Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Taeget Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100	**2.22.08.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	Kap.Ponjong
					2.22.08.5.07.006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100	**4.01.04.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000	Kap.Ponjong
					4.01.04.5.01.007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	40.000.000	
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,90	7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**1.401.579.830**	Kap. Ponjong
					7.01.01.2.01.	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*48.891.800*	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Taeget Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	efektif, efiseien, dan akuntabel				7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.055.000	
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.575.000	
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.315.000	
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.815.000	
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.615.000	
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.936.800	
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.580.000	
					7.01.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*1.183.927.230*	
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.142.672.230	
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.630.000	
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	39.625.000	
					7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.860.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Taeget Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
					7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.860.000	
					7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.264.800	
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.264.800	
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.448.000	
					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.234.000	
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.922.000	
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.399.000	
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.263.000	
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	950.000	
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.680.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Taeget Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.600.000	
					7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	13.600.000	
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.588.000	
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	920.000	
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.668.000	
					7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.000.000	
					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000	
					7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	500.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Taeget Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.600.000	
					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.700.000	
					7.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000	
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,90	**7.01.02.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**38.385.000**	Kap. Ponjong
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	38.385.000	
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.385.000	
Pamong Nglayani	Terwujudnya sistem penyelenggara	Meningkatnya efektivitas peran	Persentase Penyusunan RKPKal	100	**7.01.03.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**456.892.000**	Kap. Ponjong

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Taeget Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
dan Ngayomi	pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Benar dan Tepat Waktu		*7.01.03.2.01.*	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.933.000	
					7.01.03.2.01.0001	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	21.433.000	
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.500.000	
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100	*7.01.03.2.02.*	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	419.651.000	
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	419.651.000	
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100	*7.01.03.2.03.*	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.738.000	
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.738.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Taeget Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	*7.01.03.2.06.*	*Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	2.570.000	
					7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1.325.000	
					7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1.245.000	
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	**7.01.04.**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**604.633.500**	Kap. Ponjong
					7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	604.633.500	
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	604.633.500	
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	**7.01.05.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**118.738.400**	Kap. Ponjong
					7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	118.738.400	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Taeget Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	111.988.400	
					7.01.05.2.01.0001	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.750.000	
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100	**7.01.06.**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**15.440.000**	Kap. Ponjong
					7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.440.000	
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.160.000	
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.545.000	
					7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.770.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Taeget Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.805.000	
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.160.000	
						J U M L A H	**2.775.668.730**	

Tabel 4.2.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kapanewon Ponjong
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Ponjong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2.22.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								
2.22.08.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Prosentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**100%**	**100.000.000**			**100%**	**100.000.000**
2.22.08.5.07	*Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Adat, tradisi, seni dan Lembaga budaya yang dilestarikan*			*100.000.000*				*100.000.000*
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kap.ponjong	1 laporan	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		1 laporan	100.000.000
4.	**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**								
4.01.04.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**100%**	**40.000.000**				**40.000.000**
4.01.04.5.01	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*			*40.000.000*				*40.000.000*
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kap.Ponjong		40.000.000	Dana Keistimewaan DIY			40.000.000
7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7.01	**KECAMATAN**				**2.635.668.730**				**2.639.159.730**
7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**		**81,50 Nilai**	**1.401.579.830**				**1.399.889.830**
7.01.01.2.01.	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			*48.891.800*				*48.891.800*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kap.ponjong	2 Dokumen	37.055.000	APBD		2 Dokumen	37.055.000
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kap.ponjong	1 Dokumen	1.575.000	APBD		1 Dokumen	1.575.000
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kap.ponjong	1 Dokumen	1.315.000	APBD		1 Dokumen	1.315.000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kap.ponjong	2 Dokumen	1.815.000	APBD		2 Dokumen	1.815.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kap.ponjong	2 Dokumen	1.615.000	APBD		2 Dokumen	1.615.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kap.ponjong	17 laporan	2.936.800	APBD		17 laporan	2.936.800
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kap.ponjong	4 laporan	2.580.000	APBD		4 laporan	2.580.000
7.01.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			*1.183.927.230*				*1.183.927.230*
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kap.ponjong	196 orang/bulan	1.142.672.230	APBD		196 orang/bulan	1.142.672.230

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kap.ponjong	1 laporan	1.630.000	APBD		1 laporan	1.630.000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme s teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	Kap.ponjong	13 laporan	39.625.000	APBD		13 laporan	39.625.000
7.01.01.2.03.	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*			*1.860.000*				*1.860.000*
7.01.01.2.02.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kap.ponjong	28 laporan	1.860.000	APBD		28 laporan	1.860.000
7.01.01.2.05.	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Dokumen Administrasi Kepegawaian*			*8.264.800*				*8.264.800*
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kap.ponjong	6 dokumen	8.264.800	APBD		6 dokumen	8.264.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Dokumen Administrasi Umum*			*54.448.000*				*48.958.000*
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kap.ponjong	4 paket	3.234.000	APBD		4 paket	3.234.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kap.ponjong	7 paket	29.922.000	APBD		7 paket	29.922.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kap.ponjong	6 paket	10.399.000	APBD		6 paket	10.399.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kap.ponjong	5 paket	2.263.000	APBD		5 paket	2.263.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kap.ponjong	12 laporan	950.000	APBD		12 laporan	950.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kap.ponjong	10 laporan	7.680.000	APBD		10 laporan	2.190.000
7.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah*			*13.600.000*				*13.600.000*
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kap.ponjong	20 unit	13.600.000	APBD		20 unit	13.600.000
7.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			*36.588.000*				*36.588.000*
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kap.ponjong	4 laporan	920.000	APBD		4 laporan	920.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kap.ponjong	60 laporan	35.668.000	APBD		60 laporan	35.668.000
7.01.01.2.09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	Kap.ponjong		*54.000.000*				*57.800.000*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kap.ponjong	64 unit	40.300.000	APBD		64 unit	40.300.000
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kap.ponjong	10 unit	500.000	APBD		10 unit	2.000.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kap.ponjong	15 unit	6.600.000	APBD		15 unit	6.600.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kap.ponjong	1 unit	5.700.000	APBD		1 unit	8.000.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kap.ponjong	3 unit	900.000	APBD		3 Unit	900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana**		**100%**	**38.385.000**			**100%**	**38.385.000**
7.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*Laporan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*			*38.385.000*				*38.385.000*
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap.ponjong	12 laporan	38.385.000	APBD		12 laporan	38.385.000
7.01.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**100%**	**456.892.000**			**100%**	**463.053.000**
7.01.03.2.01.	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*			*30.933.000*				*30.933.000*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.01.01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kap.ponjong	4 dokumen	21.433.000	APBD		4 dokumen	21.433.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kap.ponjong	13 laporan	9.500.000	APBD		13 laporan	9.500.000
7.01.03.2.02.	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	*Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan*			*419.651.000*				*425.650.000*
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kap.ponjong	10 Pokmas / Ormas	419.651.000	APBD		10 Pokmas / Ormas	425.650.000
7.01.03.2.03.	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan*			*3.738.000*				*3.900.000*
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kap.ponjong	2 laporan	3.738.000	APBD		2 laporan	3.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.06.	*Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*			2.570.000				2.570.000
7.01.03.2.06.0 010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kap.ponjong	30 keluarga	1.325.000	APBD		30 keluarga	1.325.000
7.01.03.2.06.0 011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kap.ponjong	30 keluarga	1.245.000	APBD		30 keluarga	1.245.000
7.01.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kap Ponjong**	**100%**	**604.633.500**			**100%**	**604.633.500**
7.01.04.2.01.	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*			*604.633.500*				*604.633.500*
7.01.04.2.01.0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		13 laporan	604.633.500	APBD		13 laporan	604.633.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**		**100%**	**118.738.400**			**100%**	**118.738.400**
7.01.05.2.01.	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*			*118.738.400*				*118.738.400*
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Kap.Ponjong	75 orang	111.988.400	APBD		75 orang	111.988.400
7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		5 dokumen	6.750.000	APBD		5 dokumen	6.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**		**100%**	**15.440.000**			**100%**	**14.460.000**
7.01.06.2.01.	*Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*			*15.440.000*				*14.460.000*
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		24 Dokumen	2.160.000	APBD		24 Dokumen	2.160.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		2 dokumen	5.545.000	APBD		2 dokumen	2.540.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 dokumen	3.770.000	APBD		1 dokumen	5.100.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		11 dokumen	1.805.000	APBD		4 dokumen	2.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegitan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir (RP)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		2 dokumen	2.160.000	APBD		2 dokumen	2.160.000
	T O T A L				**2.775.668.730**				**2.779.159.730**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kapanewon Ponjong Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama satu tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Ponjong Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan pemerintah daerah. Rencana Kerja Kapanewon Ponjong disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Ponjong yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Renja Kapanewon Ponjong tahun 2026 mencakup tiga hal penting antara lain:

1. Catatan Penting

   Proses penyusunan maupun pelaksanaan Renja Kapanewon Ponjong selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dillakukan mulai proses Musrenbang dari Tingkat padukuhan hingga Musrenbang Tingkat Kapanewon.

2. Kaidah Pelaksanaan

   Kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan Pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku Pembangunan dengan komitmen dan konsisten yang tinggi serta menjadi acuan dalam proses pembangunan selanjutnya. Selain itu diperlukan sikap dan mental dalam bekerjasama, kejujuran dan disiplin bagi para pelaku pembangunan.

3. Rencana Tindak Lanjut

   Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Tidak hanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan saja yang terlihat, namun tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Ponjong Tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan daerah. Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam Rencana Kerja Tahun 2026 dan penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

KAPANEWON PONJONG,

ttd

IRWAN TRIWIBOWO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainya antara lain :

1. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya yang disesuaikan dengan Program Prioritas PD.
2. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, artinya Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L (Kementerian/Lembaga) dan Perangkat Daerah Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja Perangkat Daerah juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan Perangkat Daerah Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

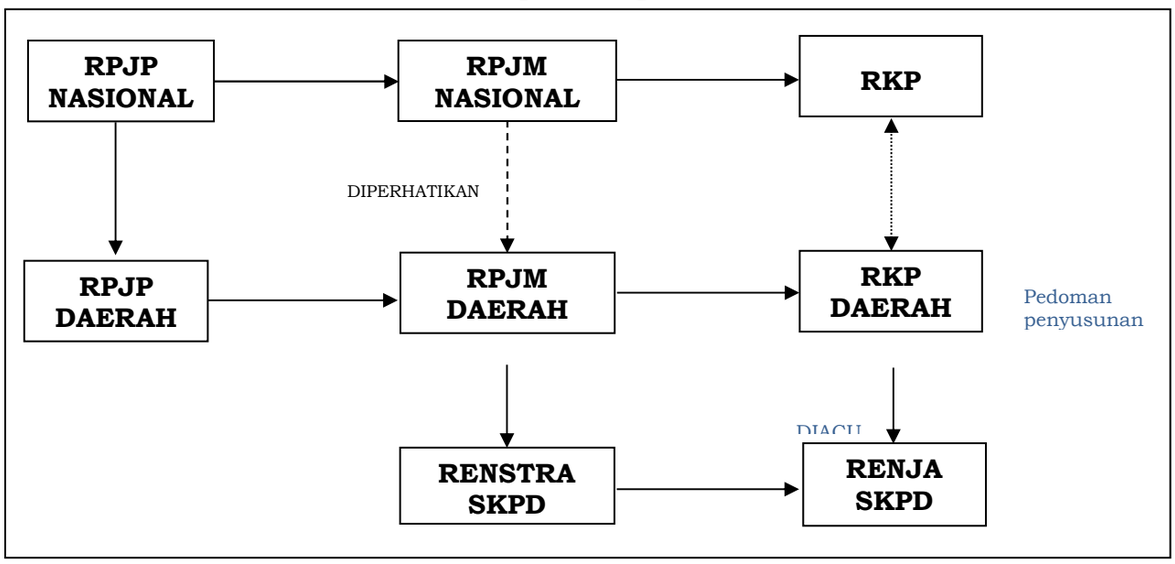

Bagan 1 : Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sehingga Renja PD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 123 Nomor 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemeintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tenang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045.
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor: 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kapanewon KARANGMOJO adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.

3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON KARANGMOJO

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Karangmojo dan Capaian Renstra Kapanewon Karangmojo
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Karangmojo
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Karangmojo
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON KARANGMOJO

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON KARANGMOJO

- 4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan
- 4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON KARANGMOJO

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Karangmojo dan Capaian Renstra Kapanewon Karangmojo

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Karangmojo Tahun 2026 mengacu pada APBD Tahun 2025 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Karangmojo berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan dan tahun 2024. Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo tahun 2025 sesuai dengan DPA nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025 teranggarkan Rp 1.804.579.539,00, terdiri dari 8 program 16 kegiatan dan 42 subkegiatan. Terdiri dari belanja operasi Rp 1.758.615.539,00 dan belanja modal Rp45.964.000,00.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Karangmojo atau realisasi APBD untuk Kapanewon Karangmojo yang disampaikan melalui E-Monev. Kapanewon Karangmojo telah mencapai 98,80 % untuk realisasi keuangannya, dan 96,41 % untuk realisasi kinerjanya. Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan IV tahun 2024. Terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1	2	4	5	7
1	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100,000,000.00	100,000,000.00	100
2	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	108,470,000.00	108,470,000.00	100
3	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1,267,367,656.00	1,247,215,799.00	98.41
4	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	37,822,800.00	37,816,800.00	99.98
5	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	42,196,500.00	42,196,500.00	100
6	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	8,699,900.00	8,699,900.00	100
7	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	107,799,800.00	107,796,900.00	99.99
8	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12,849,900.00	12,849,700.00	99.99
JUMLAH		**1,685,206,560.00**	**1,665,045,604.00**	98.80

Evaluasi terhadap realisasi tahun 2024 adalah sebagi berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan yaitu tercapai 100%. Ada beberapa program yang realisasi keuangannya tidak 100% adalah
    a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan capaian realisasi keuangan 98,41%. Hal ini karena terjadi mutasi dan pensiun ASN.
    b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan capaian realisasi keuangan 99,98%. Hal ini karena kegiatan bantuan sosial jambanisasi memakai nilai kontrak yang nilainya dibawah anggaran. Sehingga terdapat sisa anggaran.
    c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian realisasi keuangan 99,99%. Hal ini karena pembayaran BPJS Paskibraka tidak menggunakan biaya administrasi sehingga terdapat sisa anggaran.
    d. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan capaian realisasi keuangan 99,65%. Hal ini karena adanya sisa uang belanja kearsipan yang tidak bias di ambil sehingga menjadi sisa anggaran.

2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Ada beberapa program yang tercapai realisasi keuangannya seebsar 100% adalah
    a. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan.
    b. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
    c. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
    d. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
3. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan adalah tidak ada karena program mengacu pada anggaran yang tersedia dan buka OPD yang menerima pendapatan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2024 adalah adanya efisiensi anggaran.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian Tahun 2026 adalah:
    a. Munculnya kebijakan/regulasi setelah program kegiatan dan target ditetapkan.
    b. Pelaksanaan kegiatan yang harus menyesuaikan agenda/jadwal dari Kabupaten.
    c. Adanya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut adalah:
    a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala jawatan dan kepala sub bagian yang menangani kegiatan.
    b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait baik masalah pelaksanaan kegiatan maupun pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon

Dari uraian di atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Karangmojo sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Karangmojo dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Karangmojo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Karangmojo Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Karangmojo tahun lalu 2024				Target program / kegiatan (Renja Kap Karangmojo tahun 2025)		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kap Karangmojo s.d Tahun berjalan		
							Target Renja Kap Karangmojo Tahun 2024		Realisasi Renja Kap Karangmojo Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																

2.22.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**															
2.22.08.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan**														
2.22.08.2.09	*Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Jumlah laporan kegiatan adat seni tradisi dan lembaga budaya terlaksana*														
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah laporan gelar budaya Jogja	2	Laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	100%	2	laporan	2	laporan	100%
4	**URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**															

4.01.04.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan**														
4.01.04.5.06	*Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*	*Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan*														
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	2	dokumen	2	dokumen	50%
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**															

7.01	**KECAMATAN**															
7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota terlaksana**														
7.01.01.2.01.	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Indeks perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*														
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	3	dokumen	3	dokumen	150%

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	dokumen	100%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	3	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	2	dokumen	100%

7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	1	dokumen	50%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17	laporan	17	laporan	17	laporan	17	laporan	100%	17	laporan	17	laporan	100%

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	Laporan	8	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	4	laporan	16	laporan	400%
7.01.01.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks administrasi keuangan perangkat daerah*														
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	224	orang/bulan	336	orang/bulan	224	orang/bulan	224	orang/bulan	100%	224	orang/bulan	196	orang/bulan	88%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1	Laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1	laporan	100%

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semes teran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	13	Laporan	26	laporan	13	laporan	13	laporan	100%	13	laporan	14	laporan	108%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28	Laporan	28	laporan	28	laporan	28	laporan	100%	28	Laporan	28	Laporan	100%

7.01.01.2.05.	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah*														
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	6	Dokumen	12	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100%	6	dokumen	6	dokumen	100%
7.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks administrasi umum perangkat daerah*														
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerapan bangunan kantor yang disediakan	4	paket belanja	8	paket belanja	4	paket belanja	4	paket belanja	100%	4	paket belanja	4	paket belanja	100%

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	paket belanja	14	paket belanja	7	paket belanja	7	paket belanja	100%	9	paket belanja	15	paket belanja	125%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6	paket belanja	12	paket belanja	6	paket belanja	6	paket belanja	100%	6	paket belanja	19	paket belanja	317%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14	paket belanja	30	paket belanja	15	paket belanja	15	paket belanja	100%	15	paket belanja	17	paket belanja	121%
	Fasilitasi Kunjunagn Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	12	Laporan	100%

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	12	laporan	10	laporan	10	laporan	100%		10	laporan	12	laporan	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%		1	Unit	1	Unit	100%
7.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*														

7.01.01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*4*	*Laporan*	*4*	*Laporan*	*4*	*Laporan*	*4*	*Laporan*	100%		*4*	*Laporan*	*4*	*Laporan*	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	Laporan	36	laporan	36	laporan	36	laporan	100%		36	laporan	36	laporan	100%
7.01.01.2.09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana*															
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	135	Unit	9	Unit	9	unit	9	unit	100%		9	unit	8	unit	6%

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8	Unit	3	Unit	3	unit	3	unit	100%	3	unit	9	unit	113%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	2	Unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	27	unit	2700%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15	Unit	6	Unit	3	Unit	3	unit	100%	3	unit	12	unit	80%
7.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana**	**100 %**													

7.01.02.2.01.	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*			1											
7.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*Jumlah Laporan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*														#DIV/0!
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	13	laporan	13	laporan	13	laporan	100%	13	laporan	12	laporan	100%
7.01.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi**	**100 %**													

7.01.03.2.01.	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*															
7.01.03.2.01.002	*Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	*11*	*Dokumen*	*11*	*Dokumen*	*11*	*Dokumen*	*11*	*Dokumen*	100%		*11*	*Dokumen*	*11*	*Dokumen*	100%
7.01.03.2.01.003	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*10*	*Laporan*	*10*	*Laporan*	*10*	*Laporan*	*10*	*Laporan*	100%		*10*	*Laporan*	*10*	*Laporan*	100%
7.01.03.2.02	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*																

7.01.03.2.02.0003	*Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	*10*	*Pokmas/Ormas*	*10*	*Pokmas/Ormas*	*10*	*Pokmas/Ormas*	*10*	*Pokmas/Ormas*	100%		*10*	*Pokmas/Ormas*	*10*	*Pokmas/Ormas*	100%
7.01.03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*																
7.01.03.2.03.0004	*Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	*Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	100%		*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	100%
7.01.03.2.06	*Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*																
7.01.03.2.06.0010	*Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	*Jumlah Keluargayang mengkikuti Pelatihan Tanggap Bencana Alam*	*90*	*Keluarga*	*90*	*Keluarga*	*90*	*Keluarga*	*90*	*Keluarga*	100%		*90*	*Keluarga*	*90*	*Keluarga*	100%

7.01.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi**	**100 %**													
7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*														
7.01.04.2.1.0 001	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*11*	*Laporan*	1	laporan	1	laporan	1	laporan			1	laporan	1	laporan	9%
7.01.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi**	**100 %**													0%

7.01.05.2.01.	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*														

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	75	Orang	150	orang	75	orang	75	orang	100%	75	orang	75	orang	100%

7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	dokumen	25%
7.01.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana**	**100 %**													0%
7.01.06.2.01.	*Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Indeks Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*														
7.01.06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka enyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	*18*	*Dokumen*	1	*Dokumen*	1	*Dokumen*	1	*Dokumen*			1	*Dokumen*	9	*Dokumen*	50%

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	2	Dokumen	48	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	100%	24	Dokumen	9	Dokumen	450%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	28	Dokumen	4	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	5	Dokumen	18%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	1	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	1	dokumen	1	Dokumen	100%
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0%	11	dokumen	11	Dokumen	1100%

7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kalurahan yang menyelenggarakan pengisian pamong kalurahan dan atau staf pamong Kalurahan	1	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	0%	1	dokumen	3	Dokumen	300%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Karangmojo

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelayanan Kecamatan/ Kapanewon digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Karangmojo serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dinyatakan bahwa tugas pokok Kapanewon adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi yang harus diemban oleh pemerintah Kapanewon mencakup bidang pemerintah umum dan pemerintah desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang pembangunan masyarakat dan desa, bidang kesejahteraan sosial. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh seksi melalui program / kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi dalam setiap tahun anggaran.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Karangmojo berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Kualitas penyelenggaraaan pemerintahan desa meningkat yang diharapkan pada akhir periode renstra mencapai 100%. Adapun formula indikator kinerja utama adalah:

- Persentase kalurahan yang menyusun RKPKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Persentase kalurahan yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Persentase kegiatan sosial terlaksana.
- Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.
- Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survey kepada Masyarakat pengguna layanan.

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Karangmojo dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Indikator	Satuan (IKU, SPM,IKK)	Target Renstra Kapanewon Karangmojo				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	(IKU, SPM, IKK)		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indikator IKU	Satuan IKU	92.65	92.70	92.75	92.75	92.65	92.70	96,90	97.10	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Kapanewon Karangmojo

Kinerja pelayanan di Kapanewon Karangmojo mengacu pada tugas dan fungsi Kapanewon sebagaimana terdapat dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
n. penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan

o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
p. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Karangmojo, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Karangmojo dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Karangmojo sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kapanewon Karangmojo secara langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :

1. Terfasilitasinya pelayanan administrasi kependudukan
2. Terfasilitasinya pelayanan administrasi pemerintahan secara umum (Dispensasi Nikah, Penerbitan ijin UMK, Persetujuan SKTM, Surat Keterangan Domisili, surat keterangan ahli waris dll)
3. Terfasilitasinya kegiatan pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
4. Terfasilitasinya kegiatan monitoring Penyaluran BLT.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
6. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraanpemerintah kalurahan.
7. Terfasilitasinya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
8. Terfasilitasinya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan kalurahan.
10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal (lomba jatilan, karawitan, pedalangan dll)
12. Terfasilitasinya pembuatan buku profil desa, buku profil Kapanewon dan monografi Kalurahan

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Karangmojo maka diperlukan tentang potret Kapanewon Karangmojo saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Karangmojo adalah sebagai berikut :

2.3.1 Permasalahan dan hambatan

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Karangmojo maka diperlukan data gambaran kondisi dan saat ini. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh KapanewonKarangmojo adalah sebagai berikut:

1. **Bidang Sosial Budaya**
   a. **Kondisi**
      1. Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap pelestarian Budaya;
      2. Keberadaan kebudayaan yang ada di masyarakat masih bersifat kedaerahan;
      3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak dari budaya pesta;
      4. Belum tepatnya pemanfaatan teknologi/medsos bagi generasi muda;
      5. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan didalam masyarakat;
   b. **Permasalahan**
      1. Masih rendahnya minat generasi muda dalam upaya pelestarian budaya;
      2. Inventarisasi budaya yang ada dimasyarakat belum optimal;
      3. Masih banyaknya minat masyarakat terhadap budaya pesta atau hajatan;
      4. Efek negatif teknologi terhadap generasi muda;
      5. Masih banyaknya pengangguran;
      6. Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang menjunjung tinggi toleransi
2. **Bidang Ekonomi**
   a. **Kondisi**
      1. Keterbatasan SDM serta kurang meratanya pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha;
      2. Masih banyaknya petani yang menerapkan sistem pertanian secara tradisi dan menggunakan peralatan yang seadanya;
      3. Penjualan hasil industri belum optimal seperti, kerajinan akar wangi, mainan anak-anak, dan lain-lain;
      4. Belum tercukupiya kebutuhan bahan baku untuk produk tertentu sehingga masih harus mengimpor dari luar daerah;
      5. Memberikan pemahaman terhadap pelaku ekonomi untuk bisa bekerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak ketiga;
   b. **Permasalahan**
      1. Belum optimalnya sumber daya manusia dari pelaku ekonomi;
      2. Masih banyaknya petani yang belum memanfaatkan teknologi pertanian;
      3. Belum adanya pusat penjualan (*show room*) bagi hasil industri di Kapanewon Ponjong;
      4. Kondisi geografis yang kurang mendukung untuk tersedianya bahan baku untuk jenis-jenis produk tertentu;
      5. Masih kurangnya minat pelaku ekonomi untuk menangkap peluang kerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak ketiga;
3. **Bidang Fisik dan Prasarana**
   a. **Kondisi Saat ini**
      1. Mengoptimalkan Gedung yang sudah ada;
      2. Kondisi jalan Sebagian bergelombang dan rusak sehingga mengganggu transportasi;
      3. Belum optimalnya penataan pedagang pasar dan pedagang kali lima;

4. Tempat pembuangan sampah menggunakan yang sudah ada dan tempat pembuangan akhir di bawa ke daerah lain;
5. Perlunya pemahaman terhadap kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah;
6. Sebagian masyarakat telah memiliki kendaraan sendiri;
7. Keberadaan angkutan umum kurang memadai;
8. Perlunya peningkatan kesadaran mayarakat terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU);
9. Memberikan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya petunjuk arah;
10. Memberikan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

b. Permasalahan

1. Masih terbatasnya sarana gedung Kapanewon Karangmojo sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
2. Angkutan yang bertonase berat akan mengakibatkan rusaknya jalan;
3. Belum tertibnya penataan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
4. Masih kurangnya tempat pembuangan sampah dan belum adanya tempat pembuangan akhir;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah;
6. Kurangnya angkutan umum;
7. Masih rendahnya minat masyarakat terhadap pemanfaatan angkutan umum;
8. Kurangnya penerangan jalan umum (PJU) pada titik-titik tertentu;
9. Kurangnya petunjuk arah di lokasi-lokasi tertentu;
10. Masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

4. Pemerintahan dan Ketertiban

a. Kondisi Saat Ini

1. Perlunya penambahan personil baik ASN maupun THL;
2. Perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan ASN;
3. Perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Kalurahan;
4. Memberikan pemahaman terhadap Pemerintah Kalurahan tentang ketepatan penyusunan Laporan;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hukum;
6. Mengupayakan koordinasi dengan wilayah perbatasan;
7. Memberikan pemahaman tentang Pengadministrasian Tanah Kas Kalurahan;
8. Perlunya sosialisasi/penyuluhan Penyakit Masyarakat;
9. Mengupayakan peningkatan pemetaaan Daerah Rawan Bencana.

b. Permasalahan

1. Kurangnya personil ASN;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia personil ASN yang tidak merata;
3. Kualitas SDM Perangkat Kalurahan yang tidak merata;
4. Masih adanya sebagian Pemerintah Kalurahan yang terlambat dalam penyusunan Laporan;

5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum;
6. Belum terlaksananya koordinasi antara wilayah perbatasan secara rutin;
7. Belum optimalnya Pengadministrasian Tanah Kas Kalurahan;
8. Masih adanya Penyakit Masyarakat;

Kurang optimalnya pemetaan Daerah rawan Bencana

2.2. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 berpedoman pada program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Rancangan awal RKPD yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja PD termasuk Kapanewon Karangmojo disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (Musrenbangkal), dengan harapan akan mendapatkan berbagai masukan dari forum Musrenbang Kapanewon, Forum (gabungan) PD maupun Musrenbang Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/5889 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rancangan awal Renja 2025 Kapanewon Karangmojo telah dimutahirkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4.

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : KAPANEWON KARANGMOJO

NO	Rencana Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KAPANEWON KARANGMOJO				**2,314,799,776.60**					**1,817,518,673.00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**100,000,000.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100,000,000.00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**100,000,000.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100,000,000.00**	
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		***Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan***	**100 persen**	**100,000,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		***Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan***	**-**	**100,000,000.00**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		*Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	2 Laporan	100,000,000.00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		*Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	-	100,000,000.00	

	Gelar Budaya Jogja										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	1 Laporan	100,000,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*		100,000,000.00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				**40,000,000.00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**40,000,000.00**	
	SEKRETARIAT DAERAH				**40,000,000.00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**40,000,000.00**	
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		***Prosentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksaan***	**100 persen**	**40,000,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		***Prosentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksaan***	**-**	**40,000,000.00**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		*Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketata Laksanaan Keistimewaan*	2 Dokumen	40,000,000.00	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		*Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketata Laksanaan Keistimewaan*	-	40,000,000.00	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	3 Dokumen	40,000,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*		40,000,000.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**2,174,799,776.60**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1,677,518,673.00**	
	KECAMATAN				**2,174,799,776.60**	**KECAMATAN**				**1,677,518,673.00**	

1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik***	**100 persen**	**1,476,184,376.60**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik***	**-**	**1,449,728,673.00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 persen	15,112,500.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-	12,000,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	3,520,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*		2,500,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	2,010,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*		1,500,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	2,010,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*		1,500,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										

		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	1,935,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*		1,500,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	2 Dokumen	1,500,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*		1,500,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	17 Laporan	2,212,500.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*		2,000,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	1,925,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		1,500,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu*	100 persen	1,194,007,276.60	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu*	-	1,144,008,673.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	224 Orang/bulan	1,151,967,276.60		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*		1,102,508,673.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1,900,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*		1,500,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	13 Laporan	40,140,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*		40,000,000.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	2,130,000.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	2,000,000.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	28 Laporan	2,130,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*		2,000,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian*	100 persen	5,204,800.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian*	-	5,204,800.00	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	6 Dokumen	5,204,800.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*		5,204,800.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 persen	46,198,500.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-	61,943,900.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	2,519,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*		1,500,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	21,855,500.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*		18,852,900.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	6 Paket	2,699,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*		28,991,000.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	14 Paket	4,375,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*		4,000,000.00	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	2,000,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*		1,200,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12,750,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*		7,400,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	14,800,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	20,000,000.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	14,800,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*		20,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana*	100 persen	126,431,300.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana*	-	126,736,300.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	2,630,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*		2,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	32,736,300.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*		32,736,300.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	24 Laporan	91,065,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		92,000,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana*	100 persen	72,300,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana*	-	77,835,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	135 Unit	40,300,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*		41,700,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	8 Unit	3,800,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*		3,800,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	26,400,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		30,335,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	1,800,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*		2,000,000.00	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**-**	**-**	**11,000,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**-**	**-**	**23,000,000.00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 persen	11,000,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-	11,000,000.00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	11,000,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*		11,000,000.00	

3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi***	**100 persen**	**60,699,900.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi***	**-**	**58,390,000.00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Persentase Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	100 persen	15,800,000.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Persentase Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-	18,000,000.00	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	11 Dokumen	11,000,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*		11,000,000.00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	10 Laporan	4,800,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*		7,000,000.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Presentase koordinasi pemberdayaan kalurahan*	100 persen	33,000,000.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Presentase koordinasi pemberdayaan kalurahan*	-	28,000,000.00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10 Pokmas / Ormas	33,000,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		28,000,000.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Persentase Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	100 persen	4,889,900.00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Persentase Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-	10,890,000.00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	4,889,900.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*		4,890,000.00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		-	-	7,010,000.00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		-	-	1,500,000.00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	90 Keluarga	7,010,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*		1,500,000.00	
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		***Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi***	**100 persen**	**496,320,500.00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		***Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi***	**-**	**11,000,000.00**	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi*	100 persen	496,320,500.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi*	-	11,000,000.00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	11 Laporan	496,320,500.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*		5,000,000.00	
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		***Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi***	**100 persen**	**106,325,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		***Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi***	**-**	**105,000,000.00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	100 persen	106,325,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-	105,000,000.00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										

		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	75 Orang	100,000,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*		100,000,000.00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Dokumen	6,325,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*		5,000,000.00	
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana***	**100 persen**	**24,255,000.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana***	**-**	**30,400,000.00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana*	100 persen	24,255,000.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana*	-	30,400,000.00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										

		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	18 Dokumen	5,985,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*		6,000,000.00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	12 Dokumen	4,500,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*		4,500,000.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	28 Dokumen	5,000,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*		5,000,000.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	1 Dokumen	3,770,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*		3,770,000.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa										

		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	2 Dokumen	2,500,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*		2,500,000.00	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa										
		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	1 Dokumen	2,500,000.00		Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*		2,500,000.00	
					2,314,784,776.60					**1,817,518,673.00**	

2.3. Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah ditingkat Kapanewon dengan kegiatan memproses keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah Kapanewon. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan, kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan dengan benar menyampaikan ide-ide maupun anggaran dasar forum musrenbang dan menilai bagaimana suatu program pembangunan dalam 1 tahun anggaran dapat mewujudkan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Kapanewon Karangmojo 2022-2026, yang merupakan hasil analisis dari isu–isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal bertujuan untk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Karangmojo dengan menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon. Kemudian dalam analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kapanewon Karangmojo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tujuan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Karangmojo sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Kapanewon Karangmojo Tahun 2026 terfokus pada Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, sesuai dengan hasil usulan Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) Program dan 4 (empat) Kegiatan Prioritas yang bersumber dari dana DAU, adapun usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 disajikan dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
	PIWK dan PIS (NIHIL)					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional tentang kapanewon tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Sedangkan Kapanewon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Karangmojo sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2026 Kapanewon Karangmojo juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari adanya dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan

kedalam sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan menggambarkan hal hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional dan kegiatan pokok yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun penjabaran sasaran daerah kedalam sasaran Perangkat Daerah dalam format sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Kapanewon Karangmojo

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcame)
1	Pamong Ngelayani & Ngayomi	Terwujudnya Sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif,efisin, dan akuntabel	Opini BPK	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu
				Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu
				Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial
				Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan Sasaran PD dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut

Tabel 3.2
Tujuan Kapanewon Karangmojo

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026 dalam Renstra Tahun 2021-2026	Proyeksi Target Kinerja PD Tahun 2026
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97.10	97.10

Tabel.3.3
Sasaran Kapanewon Karangmojo Tahun 2026

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)	Target Sasaran PD Tahun 2026
1	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Kapanewon dengan tabel sebagai berikut :

Tabel.3.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Karangmojo

No.	IKU	IKU	Targrt IKU Tahun 2026
1	2	3	4
Tujuan			
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97.10
Sasaran			
1.	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan rancangan Renja Kapanewon Karangmojo Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah

3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Karangmojo meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON KARANGMOJO

Perencanaan Kinerja Kapanewon Karangmojo tahun 2026 mendasar pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 yaitu terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat tahun 2026. Oleh karena itu rencana kinerja tahun 2026 diprioritaskan pada kegiatan pembinaan atau fasilitasi kalurahan, kegiatan PIWK, evaluasi APBKal dan RKPKal, koordinasi penanggulangan kemiskinan serta koordinasi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan yaitu:

1. Sebagai konsekuensi untuk merealisasikan program/kegiatan Kapanewon Karangmojo dalam rangka mendorong visi dan misi Bupati Kepala Daerah.
2. Prioritas pembangunan, dalam hal ini prioritas Kapanewon Karangmojo adalah reformasi birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat, serta prioritas peningkatan ekononomi dengan sasaran daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat.
3. Pengurangan kemiskinan dengan mengembangkan kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dengan meningkatkan ketrampilan dalam mengolah hasil bumi/pertanian menjadi produk bernilai tambah dan Peningkatan akses pemasaran melalui promosi produk.
4. Pencapaian IKU untuk tahun 2022-2026 dengan indikator kinerja utama “Indeks Pelayanan Kapanewon” yang formulasi perhitungannya menggunakan lima komponen yaitu persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu, persentase KK miskin yang tertangani, persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum, dan nilai indeks kepuasan masyarakat.
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dengan penumbuhan BUMKalurahan yang dapat menumbuhkan iklim usaha kecil yang produktif.
6. Melakukan program promosi kesehatan, dimana lebih diupayakan untuk membiasakan masyarakat melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.
7. Penyuluhan Keluarga Berencana bagi semua warga, kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan pernikahan usia dini.
8. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanakan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, baik di Pemerintahan Kalurahan maupun Kapanewon
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif.
10. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain sebagai berikuti:

Berdasarkan Rancangan Program dan Kegiatan Kapanewon Karangmojo Tahun 2026 terdiri dari 8 program , 16 kegiatan dan 42 subkegiatan dimana dalam pelaksanaanya kegiatan untuk difokuskan

pada pelayanan masyarakat tersebar di wilayah Karangmojo yang terdiri dari 9 kalurahan. Adapun total pagu Rancangan Awal Renja tahun 2026 sebesar Rp 2.314.799.776,00 sedangkan untuk perkiraan tahun 2027 sebesar Rp 1.817.518.673,00 Progam dan kegiatan Pembangunan Kapanewon Karangmojo Tahun 2026 seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pamong Nglayani & Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.174.784.776.60**	
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.112.500,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.520.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.010.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.010.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.935.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.500.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.212.500,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.925.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.194.007.276.60	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.151.967.276.60	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.900.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.140.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.130.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.130.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.204.800,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.204.800,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.198.500,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.519.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.855.500,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.699.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.375.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.750.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.800.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.06.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.800.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.431.300,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.630.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.736.300,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.065.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.300.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.800.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.400.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**11.000.000,00**	
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11.000.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.000.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
		Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	**4.01.04**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**40.000.000,00**	
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**60.699.900,00**	
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.800.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11.000.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.800.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	33.000.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di kalurahan	33.000.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.889.900,00	KAPANEWON KARANGMOJO

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**24.255.000,00**	
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.255.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.985.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.500.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.770.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.500.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.500.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
		Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100 Persen	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**100.000.000,00**	
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
		Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**7.010.000,00**	
					7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.010.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	7.010.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**496.320.500,00**	
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	496.320.500,00	KAPANEWON KARANGMOJO

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	496.320.500,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**106.325.000,00**	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	106.325.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.325.000,00	KAPANEWON KARANGMOJO
					J U M L A H		**2.314.799.776,60**	

Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	10	8	9	11		15	16
	KAPANEWON KARANGMOJO				**2,314,784,776.60**				**1,817,518,673.00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100,000,000.00**				**100,000,000.00**
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100,000,000.00**				**100,000,000.00**
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan***		**100 persen**	**100,000,000.00**			**-**	**100,000,000.00**
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan*			100,000,000.00			-	100,000,000.00
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja								
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	2 Laporan	100,000,000.00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			100,000,000.00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**40,000,000.00**				**40,000,000.00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**40,000,000.00**				**40,000,000.00**

4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	***Prosentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksaan***		**100 persen**	**40,000,000.00**			**-**	**40,000,000.00**
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*			40,000,000.00			-	40,000,000.00
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan								
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40,000,000.00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			40,000,000.00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2,174,784,776.60**				**1,677,518,673.00**
7.01	**KECAMATAN**				**2,174,784776.60**				**1,677,518,673.00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik***		**100 persen**	**1,476,184,376.60**			**-**	**1,449,728,673.00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			15,112,500.00			-	12,000,000.00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3,520,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2,500,000.00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,010,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1,500,000.00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,010,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1,500,000.00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1,935,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1,500,000.00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1,500,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1,500,000.00

7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	17 Laporan	2,212,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2,000,000.00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1,925,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1,500,000.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			1,194,007,276.60			-	1,144,008,673.00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	224 Orang/bulan	1,151,967,276.60	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1,102,508,673.00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1,900,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1,500,000.00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	13 Laporan	40,140,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40,000,000.00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Adminitrasi Barang Milik Daerah*		-	2,130,000.00			-	2,000,000.00
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	28 Laporan	2,130,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2,000,000.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Adminitrasi Kepegawaian*			5,204,800.00			-	5,204,800.00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5,204,800.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5,204,800.00

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen Adminitrasi Umum*			46,198,500.00			-	61,943,900.00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	4 Paket	2,519,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1,500,000.00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	12 Paket	21,855,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			18,852,900.00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	6 Paket	2,699,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			28,991,000.00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	14 Paket	4,375,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4,000,000.00

7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1,200,000.00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12,750,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7,400,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Dokumen Laporan Pengadaan Milik Daerah*		-	14,800,000.00			-	20,000,000.00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	1 Unit	14,800,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20,000,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			126,431,300.00			-	126,736,300.00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2,630,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2,000,000.00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	36 Laporan	32,736,300.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			32,736,300.00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	24 Laporan	91,065,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			92,000,000.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*			72,300,000.00			-	77,835,000.00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	135 Unit	40,300,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			41,700,000.00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	8 Unit	3,800,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3,800,000.00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	1 Unit	26,400,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30,335,000.00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	6 Unit	1,800,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2,000,000.00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terlaksana***		**100 Persen**	**11,000,000.00**			**-**	**23,000,000.00**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*		100 persen	11,000,000.00			-	11,000,000.00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	12 Laporan	11,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11,000,000.00

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi***		**100 persen**	**60,699,900.00**			**-**	**58,390,000.00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*			15,800,000.00			-	18,000,000.00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	11,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11,000,000.00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	10 Laporan	4,800,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7,000,000.00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Laporan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan kalurahan*			33,000,000.00			-	28,000,000.00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	10 Pokmas / Ormas	33,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			28,000,000.00

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Laporan pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan*			4,889,900.00			-	10,890,000.00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4,889,900.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4,890,000.00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*		-	7,010,000.00			-	1,500,000.00
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	90 Keluarga	7,010,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1,500,000.00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi***		**100 persen**	**496,320,500.00**			**-**	**11,000,000.00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*			496,320,500.00			-	11,000,000.00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	11 Laporan	496,320,500.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5,000,000.00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi***		**100 persen**	**106,325,000.00**			**-**	**105,000,000.00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*			106,325,000.00			-	105,000,000.00

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	75 Orang	100,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100,000,000.00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	6,325,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5,000,000.00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana***		**100 persen**	**24,255000.00**			**-**	**30,400,000.00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*			24,255,000.00			-	30,400,000.00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	5.985.000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6,000,000.00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	4,500,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4,500,000.00

7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	28 Dokumen	5,000,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5,000,000.00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3,770,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3,770,000.00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2,500,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2,500,000.00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa								
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2,500,000.00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2,500,000.00
J U M L A H					**2,314,799,776.60**				**1,817,518,673.00**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan (PD) Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Renja Kapanewon Karangmojo Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Daerah. Renja Kapanewon Karangmojo disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Renja Kapanewon Karangmojo yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD.
Renja Kapanewon Karangmojo Tahun 2026 mencakup tiga bahasan antara lain catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Renja Kapanewon Karangmojo telah dan akan selalu melibatkan peran *(stakeholder)* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *(stakeholder)* dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

5.2. Kaidah pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan *(stakeholders)*, tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana tindak lanjut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Tidak hanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan saja yang terlihat, namun tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Renja Kapanewon Karangmojo Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
KAPANEWON KARANGMOJO,

ttd

SUGITO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Kapanewon Playen merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Dearah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan
b. Penyusunan rancangan awal
c. Penyusunan rancangan
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
e. Perumusan rancangan akhir
f. Penetapan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kapanewon Playen dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan UUD 1945 pasal 4 ayat 1, Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Panewu, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kapanewon dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kapanewon maka perencanaan tujuan kapanewon mendukung perencanaan pembangunan daerah sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pemerintah kapanewon bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kapanewon Playen memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Playen serta kerangka pendanaan daerah , Renja PD kapanewon secara substansial sesuai dengan visi dan misi dan rencana resmi daerah (RKPD,RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD. Melalui penyusunan Renja ini, diharapkan Kapanewon Playen dapat merumuskan prioritas pembangunan wilayah yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

1.2 Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Derah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Dearah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2026 menyesuaikan urusan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru, serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja perangkat daerah, adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiran maju yang disusun dalam rancangan awal renja dengan rentra perangkat daerah.
4. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
5. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kapanewon Playen Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Playen dan Capaian Renstra Kapanewon Playen
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Playen

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Playen
2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKASANAAN RECANA KERJA KAPANEWON PLAYEN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Playen dan Capaian Renstra Kapanewon Playen

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Playen Tahun 2026 mengacu pada APBD Tahun 2026 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Playen berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan atau Tahun 2025.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Playen atau realisasi APBD untuk Kapanewon Playen yang disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2024 dapat disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Tidak ada realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 secara keseluruhan telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
3. Tidak ada realiasi program dan kegiatan tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan.
4. Faktor-faktor terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2024 adalah komitmen dan kerja keras yang dilakukan Kapanewon Playen untuk memastikan pencapain kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD antara lain Alokasi anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan, Adanya regulasi/kebijakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kegiatan harus menyesuaikan kebijakan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja adalah berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten agar pelaksanaan program/kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan, serta berkoordinasi dengan TAPD terkait alokasi anggaran terealisasi sesuai dengan usulan yang ada.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Playen Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Kapanewon Playen sampai dengan tahun 2025, disajikan dalam tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Playen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik														
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	26	dokumen	26	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	26	dokumen	100,00
		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,29	indeks	4,14	indeks	4,14	indeks	4,14	indeks	-	4,29	indeks	4,29	indeks	100,00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen perubahan renja	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen Renstra PD	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0,00	0	dokumen	0	dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	2	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100,00	3	dokumen	8	dokumen	80,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	3	dokumen	75,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	3	dokumen	75,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen ROPK	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah dokumen perjanjian kinerja	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	6	dokumen	75,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	6	dokumen	75,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	laporan	17	laporan	17	laporan	17	laporan	100,00	17	laporan	51	laporan	75,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan TEPRA	12	dokumen	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	12	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen LKJiP	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah laporan e monev	4	dokumen	4	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	4	dokumen	100,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	16	laporan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100,00	4	laporan	12	laporan	75,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84	indeks	84	indeks	84	indeks	84	indeks	NA	84	indeks	84	indeks	100,00
		Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	4	layanan	4	layanan	NA	layanan	NA	layanan	-	NA	layanan	4	layanan	100,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	14	bulan	NA	bulan	NA	bulan	-	NA	bulan	14	bulan	100,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	952	orang/bulan	238	orang/bulan	205	orang/bulan	205	orang/bulan	100,00	210	orang/bulan	653	orang/bulan	68,59
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen		dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	3	laporan	75,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	12	dokumen	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	12	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52	laporan	13	laporan	13	laporan	13	laporan	100,00	13	laporan	39	laporan	75,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100,00	6	dokumen	18	dokumen	75,00
		Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1	layanan	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	-	NA	layanan	1	layanan	100,00
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	17	orang	17	orang	NA	orang	NA	orang	-	NA	orang	17	orang	100,00
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100,00	6	dokumen	18	dokumen	75,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	15	layanan	15	layanan	NA	layanan	NA	layanan	-	NA	layanan	15	layanan	100,00
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	45,43	indeks	43,71	indeks	45,00	indeks	45,00	indeks		46,14	indeks	45,43	indeks	100,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	6	paket belanja	6	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	-	NA	paket belanja	6	paket belanja	100,00
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	paket	4	paket	2	paket	2	paket	100,00	4	paket	10	paket	62,50
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12	paket belanja	12	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	-	NA	paket belanja	12	paket belanja	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlap laptop yang terbeli	2	unit	2	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	2	unit	100,00
		Jumlah box arsip yang terbeli	50	buah	50	buah	NA	buah	NA	buah	-	NA	buah	50	buah	100,00
		Jumlah printer dot matrix yang terbeli	1	unit	1	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	1	unit	100,00
		Jumlah map gantung yang terbeli	50	buah	50	buah	NA	buah	NA	buah	-	NA	buah	50	buah	100,00
		Jumlah filling kabinet yang terbeli	1	unit	1	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	1	unit	100,00
		Jumlah peralatan jaringan yang terbeli	1	paket belanja	1	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	-	NA	paket belanja	1	paket belanja	100,00
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	70	paket	15	paket	15	paket	13	paket	86,67	14	paket	42	paket	60,00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	6	paket belanja	6	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	-	NA	paket belanja	6	paket belanja	100,00
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	paket	4	paket	2	paket	2	paket	100,00	4	paket	10	paket	62,50
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	64	bendel	64	bendel	NA	bendel	NA	bendel	-	NA	bendel	64	bendel	100,00
		Jumlah lembar penggandaan	7500	lembar	7500	lembar	NA	lembar	NA	lembar	-	NA	lembar	7500	lembar	100,00
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	paket	2	paket	2	paket	2	paket	100,00	2	paket	6	paket	75,00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibayar	12	rekening	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	-	NA	rekening	12	rekening	100,00
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	992	dokumen	248	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0,00	0	dokumen	248	dokumen	25,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi minum dan snack	30	orang	30	orang	NA	orang	NA	orang	-	NA	orang	30	orang	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00	12	laporan	36	laporan	75,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat yang terfasilitasi minum dan snack	80	orang	80	orang	NA	orang	NA	orang	-	NA	orang	80	orang	100,00
		Jumlah peserta rapat yang terfasilitasi makan dan minum	30	orang	30	orang	NA	orang	NA	orang	-	NA	orang	30	orang	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112	laporan	19	laporan	15	laporan	15	laporan	100,00	19	laporan	53	laporan	47,32
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	jenis	3	jenis	NA	jenis	NA	jenis	-	NA	jenis	3	jenis	100,00
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78	unit	59	unit	7	unit	7	unit	100,00	5	unit	71	unit	91,03
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah rak arsip yang terbeli	2	buah	2	buah	NA	buah	NA	buah	-	NA	buah	2	buah	100,00
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37	unit	14	unit	0	unit	0	unit	0,00	30	unit	44	unit	118,92
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	unit	0	unit	0	unit	0	unit	-	1	unit	1	unit	20,00
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terbeli	3	unit	3	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	3	unit	100,00
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36	unit	2	unit	2	unit	2	unit	100,00	3	unit	7	unit	19,44
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah backdrop yang terbeli	1	buah	1	buah	NA	buah	NA	buah	-	NA	buah	1	buah	100,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	layanan	5	layanan	NA	layanan	NA	layanan	-	NA	layanan	5	layanan	100,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240	laporan	60	laporan	60	laporan	60	laporan	NA	60	laporan	180	laporan	75,00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	480	surat	480	surat	NA	surat	NA	surat	-	NA	surat	480	surat	100,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00	12	laporan	36	laporan	75,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa tagihan telephone yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	12	rekening	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	-	NA	rekening	12	rekening	100,00
		Jumlah Jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik (1 rekening X 12 Bulan)	12	rekening	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	-	NA	rekening	12	rekening	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah tagihan air yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	12	rekening	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	-	NA	rekening	12	rekening	100,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	laporan	36	laporan	36	laporan	36	laporan	100,00	36	laporan	108	laporan	75,00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah hari terfasilitasinya jasa kebersihan kantor	247	hari	208	hari	NA	hari	NA	hari	-	NA	hari	208	hari	84,21
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00	12	laporan	36	laporan	75,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	layanan	12	layanan	NA	layanan	NA	layanan	-	NA	layanan	12	layanan	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527	unit	116	unit	135	unit	135	unit		138	unit	389	unit	73,81
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya	1	unit	1	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	1	unit	100,00
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	12	paket pemeliharaan	12	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	-	NA	paket pemeliharaan	12	paket pemeliharaan	100,00
		Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya	8	unit	8	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	8	unit	100,00
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	72	paket pemeliharaan	72	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	-	NA	paket pemeliharaan	72	paket pemeliharaan	100,00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	364	unit	91	unit	91	unit	91	unit	100,00	91	unit	273	unit	75,00
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	10	unit	10	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	10	unit	100,00
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	unit	0	unit	0	unit	0	unit	-	0	unit	0	unit	0,00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	7	unit	4	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	4	unit	57,14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	6	unit	6	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	6	unit	100,00
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	1	unit	1	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	1	unit	100,00
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	8	unit	8	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	8	unit	100,00
		Jumlah mesin scan yang terfasilitasi pemeliharaannya	1	unit	1	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	1	unit	100,00
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103	unit	18	unit	5	unit	5	unit	100,00	17	unit	40	unit	38,83
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah hari terfasilitasinya jasa keamanan kantor	365	hari	365	hari	NA	hari	NA	hari	-	NA	hari	365	hari	100,00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	6	unit	6	unit	NA	unit	NA	unit	-	NA	unit	6	unit	100,00
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	unit	7	unit	4	unit	4	unit	100,00	8	unit	19	unit	63,33
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen evaluasi pelayanan publik	4	dokumen	4	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	4	dokumen	100,00
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP/SPIP	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen SOP	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen SKM	2	dokumen	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	2	dokumen	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana														
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	2	jenis	2	jenis	NA	jenis	NA	jenis		NA	jenis	2	jenis	100,00
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	100,00	2	laporan	6	laporan	75,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan	2	kelompok	2	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	-	NA	kelompok	2	kelompok	100,00
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan hari jadi Kabupaten Gunungkidul	1	kesepakatan	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	-	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100,00
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	3	laporan	6	laporan	75,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5	jenis	5	jenis	NA	jenis	NA	jenis	-	NA	jenis	5	jenis	100,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	58	laporan	16	laporan	14	laporan	14	laporan		14	laporan	44	laporan	75,86
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan pelaksanaan update data SID	1	kesepakatan	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	-	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100,00
		Jumlah koordinasi pelaksanaan pengadaan bansos	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	-	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6	laporan	3	laporan	2	laporan	2	laporan	100,00	0	laporan	5	laporan	83,33
7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	2100	layanan	2100	layanan	NA	layanan	NA	layanan	-	NA	layanan	2100	layanan	100,00
		Jumlah pelaksanaan pembinaan pelayanan umum	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	-	NA	kali	1	kali	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52	laporan	13	laporan	12	laporan	12	laporan	100,00	12	laporan	37	laporan	71,15
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi														
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	6	jenis	6	jenis	NA	jenis	NA	jenis	-	NA	jenis	6	jenis	100,00
		Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	15	indeks	9	indeks	8.5	indeks	8.5	indeks		8.5	indeks	9	indeks	56,67
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen musrenbang	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMKal	0	kalurahan	0	kalurahan	0	kalurahan	0	kalurahan	0,00	0	kalurahan	0	kalurahan	0,00
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RKPKal	13	kalurahan	13	kalurahan	NA	kalurahan	NA	kalurahan	-	NA	kalurahan	13	kalurahan	100,00
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	74	dokumen	16	dokumen	40	dokumen	40	dokumen	100,00	15	dokumen	71	dokumen	95,95
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kapanewon	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	-	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah dokumen profil kapanewon	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kabupaten	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	-	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	100,00	2	laporan	6	laporan	75,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6	jenis	6	jenis	NA	jenis	NA	jenis	-	NA	jenis	6	jenis	100,00
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3	indeks	3	indeks	3	indeks	3	indeks		3	indeks	3	indeks	100,00
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan bidang kesehatan dan KB	1	kesepakatan	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	-	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100,00
		Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	12	kesepakatan	12	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	-	NA	kesepakatan	12	kesepakatan	100,00
		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna	1	kesepakatan	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	-	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	lembaga kemasyarakatan	2	lembaga kemasyarakatan	1	lembaga kemasyarakatan	1	lembaga kemasyarakatan	100,00	2	lembaga kemasyarakatan	5	lembaga kemasyarakatan	62,50
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	2	kelompok	2	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	-	NA	kelompok	2	kelompok	100,00
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur kalurahan	13	kalurahan	13	kalurahan	NA	kalurahan	NA	kalurahan	-	NA	kalurahan	13	kalurahan	100,00
		Jumlah kesepakatan koordinasi kelompok pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan darat serta lingkungan hidup	1	kesepakatan	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	0,00	NA	kesepakatan	0	kesepakatan	0,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	16	laporan	4	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	5	laporan	10	laporan	62,50
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi														
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	layanan	2	layanan	NA	layanan	NA	layanan	-	NA	layanan	2	layanan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	NA	2	laporan	6	laporan	75,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8	laporan	2	laporan	2	laporan	2	laporan	100,00	1	laporan	5	laporan	62,50
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat kapanewon	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	-	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat kapanewon	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	0,00	NA	kali	0	kali	0,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	2	laporan	5	laporan	62,50
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	layanan	2	layanan	NA	layanan	NA	layanan	-	NA	layanan	2	layanan	100,00
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah penyakit masyakat yang terpetakan	1	pekat	1	pekat	NA	pekat	NA	pekat	-	NA	pekat	1	pekat	100,00
		Jumlah laporan hasil patroli bersama	1	dokumen	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	1	dokumen	100,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi														
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3	layanan	3	layanan	NA	layanan	NA	layanan	-	NA	layanan	3	layanan	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38	indeks	38	indeks	38	indeks	38	indeks	NA	38	indeks	38	indeks	100,00
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI yang terfasilitasi	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	-	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah paskib kapanewon yang terbentuk dan dilatih	75	orang	75	orang	NA	orang	NA	orang	-	NA	orang	75	orang	100,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	300	orang	75	orang	75	orang	75	orang	100,00	75	orang	225	orang	75,00
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kesepakatan koordinasi forkompimka	1	kesepakatan	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	-	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100,00
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	2	dokumen	4	dokumen	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana														
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13	jenis	13	jenis	NA	jenis	NA	jenis	-	NA	jenis	13	jenis	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	227	dokumen	61	dokumen	64	dokumen	64	dokumen		51	dokumen	176	dokumen	77,53
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pembinaan produk hukum kalurahan	2	kali	2	kali	NA	kali	NA	kali	-	NA	kali	2	kali	100,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	3	dokumen	75,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen monografi kalurahan	26	dokumen	26	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	26	dokumen	100,00
		Jumlah dokumen monografi kapanewon	2	dokumen	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	2	dokumen	100,00
		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	1	kesepakatan	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	-	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	112	dokumen	28	dokumen	28	dokumen	28	dokumen	100,00	28	dokumen	84	dokumen	75,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan kalurahan terselenggara	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	-	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah pembinaan siklus tahunan kalurahan	2	kali	2	kali	NA	kali	NA	kali	-	NA	kali	2	kali	100,00
		Jumlah pembinaan bidang tanah kas kalurahan	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	-	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah kalurahan yang terdampingi dalam penyusunan pengelolaan APB kalurahan	13	kalurahan	13	kalurahan	NA	kalurahan	NA	kalurahan	-	NA	kalurahan	13	kalurahan	100,00
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	72	dokumen	18	dokumen	15	dokumen	15	dokumen	100,00	17	dokumen	50	dokumen	69,44
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pamong kalurahan yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	26	orang	26	orang	NA	orang	NA	orang	-	NA	orang	26	orang	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,00	1	dokumen	3	dokumen	75,00
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	dokumen	NA	dokumen	0	dokumen	0	dokumen		2	dokumen	2	dokumen	50,00
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengisian pamong kalurahan	5	pamong kalurahan	5	pamong kalurahan	NA	pamong kalurahan	NA	pamong kalurahan	-	NA	pamong kalurahan	5	pamong kalurahan	100,00
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19	dokumen	10	dokumen	9	dokumen	9	dokumen	100,00	7	dokumen	26	dokumen	136,84
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	26	orang	26	orang	NA	orang	NA	orang	-	NA	orang	26	orang	100,00
		Jumlah koordinasi kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1	kali	1	kali	NA	kali	NA	kali	-	NA	kali	1	kali	100,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	6	dokumen	75,00
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kesepakatan kerjasama antar kalurahan	1	kesepakatan	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	-	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	-	0	dokumen	1	dokumen	25,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi														
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	4	laporan	NA	laporan	1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	2	laporan	50,00
		Jumlah kegiatan adat, seni dan lembaga budaya	1	jenis	1	jenis	NA	jenis	NA	jenis	-	NA	jenis	1	jenis	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) dan subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran kegiatan dan subkegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024					Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realiasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan Hari Keistimewaan DIY	1	even	1	even	NA	even	NA	even	-	NA	even	1	even	100,00
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					1	laporan	1	laporan	100,00	1	laporan	2	laporan	
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4	laporan	1	laporan	1	laporan	0	laporan	NA	1	laporan	2	laporan	50,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan														
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	NA	2	dokumen	2	dokumen	25,00
		Jumlah kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	2	layanan	2	layanan	NA	layanan	NA	layanan	-	NA	layanan	2	layanan	100,00
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	8	dokumen	0	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100,00	3	dokumen	7	dokumen	87,50
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di kalurahan	1	laporan	1	laporan	NA	laporan	NA	laporan	-	NA	laporan	1	laporan	100,00
		Rencana Program kegiatan keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan tahun 2024	2	dokumen	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	-	NA	dokumen	2	dokumen	100,00
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100,00	2	dokumen	6	dokumen	75,00
4.01.04.5.06.01	Penyusun Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	8	dokumen	2	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100,00	2	dokumen	8	dokumen	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Playen

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Playen mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kapanewon Playen sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, di samping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Playen merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan setrategis Pemerintah. Adapun tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah Kapanewon Playen. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui pelayananan satu pintu/pelayanan terpadu di Kapanewon, jenis layanan yg dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Surat Izin Keramaian
2. Pelayanan BPJS
3. Pelayanan SKTM
4. Pelayanan SKCK
5. Pelayanan waris
6. Surat pernyataan beda nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir
7. Pelayanan pinjaman perangkat daerah
8. Pelayanan pengajuan proposal
9. Surat keterangan tunjangan keluarga/KP4
10. Rekomendasi Pelaksanaan Nikah Karena Dilaksanakan Kurang Dari 10 Hari Setelah Pendaftaran
11. Pengelolaan Pengaduan Pada Penyelenggara Pelayanan Publik

Indikator kinerja utama kapanewon ditetapkan oleh Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021, salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kapanewon perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon tahun 2026. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Playen Kabupaten gunungkidul disajikan dalam Tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Playen
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian Target Renstra PD		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)										
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	76.10	76.15	95,89	95,90	85.32	85.70	95,89	95,90	

Mendasar pada tabel diatas, capaian kinerja pelayanan Kapanewon Playen tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu 85,32 naik menjadi 85,70 atau naik 0,38%

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan/Kapanewon Playen.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kapanewon Playen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kapanewon Playen. Perumusan isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berisi uraian sebagai berikut:

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kapanewon Playen antara lain:
   a. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada tingkat kapanewon maupun kalurahan sehingga memengaruhi kinerja dan pelayanan tugas pokok yang kurang maksimal
   b. Kewenangan kapanewon yang terbatas
   c. Sarana dan prasarana kapanewon kurang memadai
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Dearah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*).

   Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah ”Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

   Dalam upaya pencapaian visi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 yang meliputi :
   a. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri
   b. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani
   c. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif
   d. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
   e. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban
   f. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur Bangsa Indonesia.

   Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

   a. Isu strategis nasional
      - Demokrasi dan hak asasi manusia
      - Kemandirian melalui swasembada pangan, air dan energi
      - Pengembangan infrastruktur
      - Memperkuat daya saing SDM
      - Hilirisasi dan pengembangan industri berbasis SDA
      - Membangun dari desa
      - Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata kelola
      - Kehidupan yang harmonis dengan alam, lingkungan dan budaya

b. Isu strategis Daerah Istimewa Yogyakarta
- Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
- Pengembangan wilayah selatan DIY
- Perkembangan teknologi informasi
- Pemenuhan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif
- Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- Penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik
- Penyelesaian destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta – Prambanan
- Penguatan ketahanan pangan
- Pelestarian dan pengelolaan budaya
- Penguatan resiliensi dan manajemen bencana, serta pembangunan berkelanjutan
- Penguatan kapasitas fiskal
- Pengembangan ekonomi kreatif termasuk ekonomi digital

c. Isu strategis daerah
- Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
- Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
- Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
- Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas,cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
- Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:
1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Adapun prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Playen adalah Program Pamong Nglayani dan Ngayomi dengan sasaran daerah terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel.

Mendasar tugas pokok Kapanewon Playen, fungsi yang diemban oleh Kapanewon Playen adalah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Tugas dan fungsi Kapanewon Playen terkait dengan visi dan misi daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Playen dapat mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan publik.

Pemerintah Kapanewon Playen sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat agar tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat termasuk sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Playen. Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Playen beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi Kapanewon Playen antara lain:

- Jumlah sumber daya manusia yang terbatas;
- Kapanewon sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kapanewon hanya sebatas pengelolaa gaji pegawai dan biaya operasional Kapanewon. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui perangkat daerah terkait.
- Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- Kondisi sosial masyarakat dan Kalurahan yang cukup beragam
- Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir tindak dari masyarakat
- Permohonan KK dan KTP di wilayah Kapanewon Playen cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya satu (1) orang maka diperlukan kerja ekstra untuk mencukupi target tersebut
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut kapanewon untuk responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Tingginya angka kemiskinan, daerah perbatasan yang rawan konflik
- Infrastruktur Pedesaan yang kurang baik (Jalan, Jembatan, Drainase)
- Kurangnya Akses Teknologi Pertanian, Peternakan,Perindustrian/ Kerajinan, Permodalan, dan Pemasaran produk
- Kurangnya Akses Air Bersih, Pendidikan, dan kesehatan

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan Kapanewon Playen antara lain:

- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kapanewon, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kapanewon Playen dengan Forkompimka, Dinas Instansi, Korwil, lurah dan pamong kalurahan, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan , keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi.
- Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Mendasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kapanewon Playen yakini Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada tingkat kapanewon maupun kalurahan sehingga memengaruhi kinerja dan pelayanan tugas pokok yang kurang maksimal, Kewenangan kapanewon yang terbatas dan Sarana dan prasarana kapanewon kurang memadai maka dapat dirumuskan isu strategis Kapanewon Playen adalah Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah tahun 2025-2029 maka Kapanenewon Playen berperan aktif dalam perumusan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. Adapun program yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Program Penyeleggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- Program Penyeleggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan inspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD telah dilakukan melalui musyawarah mulai dari tingkat kalurahan, kapanewon dan kabupaten dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kapanewon Playen berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah pagu pendanaannya.

Dalam reviu terhadap Rencana Kerja Kapanewon Playen Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan terdapat point-point sebagai berikut:

1. Proses pertama yang dilakukan adalah membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Total pagu Kapanewon Playen pada rancangan awal sebesar Rp 2.850.510.143,00. Setelah melalui tahapan-tahapan terdapat perubahan pagu menjadi Rp 2.657.205.542,00. Ada beberapa program, kegiatan maupun subkegiatan yang mengalami penyesuaian karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan pagu anggaran.
2. Alasan dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan adalah untuk mengetahui kebutuhan riil dari Kapanewon Playen, salah satunya dengan menyesuaikan Program, Kegiatan, subkegiatan dan indikator subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan pagu anggaran.
3. Proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan menghasilkan adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD yaitu untuk program yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta mendasar Berita Acara Dana Keistimewaan, adanya penambahan pagu untuk kegiatan gotong – royong di Kalurahan yang bersinergi dengan TNI/Polri, untuk tahun anggaran 2026 terdapat anggaran untuk PPPK paruh waktu dan THL nondatabase. Secara rinci hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Playen

N0	RANCANGAN AWAL RENJA PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	4		5	7		8	9		10	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	100	persen	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	persen	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1	laporan	150.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan			100.000.000	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	laporan	150.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	laporan	100.000.000	Sesuai BA Dais
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan	100	persen	25.970.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	persen	40.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	2	dokumen	25.970.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			40.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2	dokumen	25.970.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3	dokumen	40.000.000	Sesuai BA Dais
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	persen	2.343.330.143	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.59	nilai	1.556.584.642	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.29	indeks	57.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.652.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	3.370.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	950.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	950.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dokumen	4.750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	dokumen	1.096.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dokumen	3.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	dokumen	1.136.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	laporan	2.645.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Pla	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	2.800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	2.505.000	

N0	RANCANGAN AWAL RENJA PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	4		5	7		8	9		10	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84	indeks	1.893.113.643	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.283.626.042	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Playen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238	orang/bulan	1.884.613.643	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Playen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	orang/bulan	1.279.021.042	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1.155.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	laporan	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	laporan	3.450.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6	dokumen	4.900.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawaian			1.264.800	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dokumen	4.900.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dokumen	1.264.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.43	indeks	67.976.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum			54.773.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	1.459.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	paket	42.896.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	paket	36.254.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	2.603.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	2.212.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	248	dokumen	1.080.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Playen	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	dokumen	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	1.350.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33	laporan	10.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19	laporan	10.895.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	unit	49.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah			10.347.000	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Playen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	unit	4.332.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3	unit	39.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	unit	0	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	unit	6.015.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	laporan	210.985.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145.721.300	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	41.555.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	94.738.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	46.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	50.383.300	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	123.230.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	600.000	

N0	RANCANGAN AWAL RENJA PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	4		5	7		8	9		10	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	138	unit	59.555.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah			48.200.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Playen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91	unit	40.275.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Playen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91	unit	36.700.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kapanewon Playen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	unit	2.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kapanewon Playen	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	unit	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	unit	11.780.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	unit	9.700.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Playen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	1.800.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	persen	81.700.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana	100	persen	7.526.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	laporan	60.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan fasilitasi kegiatan seni, budaya dan/atau olahraga	0	laporan	0	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	laporan	60.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	laporan	0	pindah ke subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	14	laporan	21.700.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			7.526.000	
4	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	laporan	6.700.000							pindah ke subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13	laporan	15.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	laporan	7.526.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100	persen	58.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	100	persen	98.982.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15	indeks	24.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			44.567.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	28	dokumen	12.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15	dokumen	36.397.000	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	12.000.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	8.170.000	
							Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan		Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan			43.053.000	

N0	RANCANGAN AWAL RENJA PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	4		5	7		8	9		10	
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kapanewon Playen	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	9	pokmas / ormas	43.053.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3	indeks	34.500.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			7.892.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Playen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	lembaga kemasyarakatan	16.500.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Playen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	lembaga kemasyarakatan	0	pindah ke subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	laporan	18.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	laporan	7.892.000	
							Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan			3.470.000	
							Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kapanewon Playen	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	26	keluarga	3.470.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	persen	25.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	persen	714.331.500	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	laporan	25.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			714.331.500	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	laporan	8.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15	laporan	714.331.500	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	laporan	17.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Playen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	laporan	0	pindah ke subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	persen	116.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	persen	106.726.400	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38	indeks	116.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			106.726.400	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Playen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	orang	110.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Playen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75	orang	99.191.400	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	dokumen	6.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	dokumen	7.535.000	
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100	persen	50.010.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	persen	33.055.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51	dokumen	50.010.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			33.055.000	

N0	RANCANGAN AWAL RENJA PD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2		3	4		5	7		8	9		10	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	dokumen	4.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	dokumen	3.680.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28	dokumen	4.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28	dokumen	1.790.000	
8	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18	dokumen	24.010.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30	dokumen	15.062.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	dokumen	4.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	dokumen	1.855.000	
							Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	dokumen	8.810.000	
							Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	dokumen	1.858.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	dokumen	9.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	dokumen	0	kegiatan mitigasi bencana pindah ke subkegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam; kegiatan pembinaan linmas pindah ke subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1	dokumen	5.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Playen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	dokumen	0	tidak menganggarkan di tahun 2026
						2.850.510.143						2.657.205.542	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, bagian ini diuraiakan dalam kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Asosiasi-asosiasi, pergurunan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun hasil informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kalurahan maupun kapanewon. Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/lingkungan yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum musrenbangkal
2. Di forum musrebangkal menghasilkan skala prioritas usulan tingkat kalurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari kalurahan untuk mengawal usulan tersebut di forum musrenbang tingkat Kapanewon
3. Hasil musrenbang Kapanewon merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu isu penting dari masing masing SKPD yang ada. Kegiatan musrenbang kapanewon yang telah disepakati antara lain dalam bidang ekonomi menyelenggarakan bimtek perencanaan pembangunan kalurahan dan bimtek pengelolaan keuangan kalurahan.
4. Kedepan kamus usulan sudah tersedia sehingga pada saat pelaksanaan musrenbangkal semua usulan program kegiatan yang ada di kalurahan bisa terakomodir sesuai kegiatan yang direncanakan, sehingga terjadi sinkronisasi data antara usulan pemerintah kalurahan, kapanewon dan kabupaten.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2026 disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisine/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Pelatihan perencanaan pembangunan di desa. - KAPANEWON PLAYEN	Dengok, Playen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul	Jumlah Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Terselenggara	1 kali	18.600.000	18.600.0000	Diterima
2	(PIWK) - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa - KAPANEWON PLAYEN	Kapanewon Playen	Jumlah Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Terselenggara	1 kali	4.460.000	4.460.000	Diterima

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional tentang kapanewon tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Sedangkan Kapanewon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Playen sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pada tahun 2026 Kapanewon Playen juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Playen

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isi – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Kapanewon Playen

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030
	Tujuan :		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	95.90

Tabel.3.2
Sasaran Kapanewon Playen

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran PD Tahun 2026
	Sasaran :		
1.	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.48

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan tabel sebagai berikut :

Tabel.3.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Playen Tahun 2026

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
	Tujuan		
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	95.90
	Sasaran		
1	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
2	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100

3	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.48

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan rancangan Renja Kapanewon Playen Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, mengintegrasikan program kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Playen meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON PLAYEN

Perencanaan Kinerja Kapanewon Playen tahun 2026 mendasar pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029 yaitu Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban. Oleh karena itu rencana kinerja tahun 2026 diprioritaskan pada kegiatan pembinaan atau fasilitasi kalurahan, kegiatan PIWK, kegiatan gotong -royong di kalurahan, evaluasi APBKal dan RKPKal, koordinasi penanggulangan kemiskinan serta koordinasi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

4.1. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan yaitu:

1. Sebagai konsekuensi untuk merealisasikan program/kegiatan Kapanewon Playen dalam rangka mendorong visi dan misi Bupati Kepala Daerah.
2. Prioritas pembangunan, dalam hal ini prioritas Kapanewon Playen adalah Pamong Nglayani dan Ngayomi dengan sasaran daerah terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel.
3. Pengurangan kemiskinan dengan berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana, keagamaan, tenaga kerja dan transmigrasi, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga, penanganan bencana serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di wilayah Kapanewon
4. Pencapaian IKU, Kapaenewon telah menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya. IKU tersebut dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dengan penumbuhan BUMKalurahan yang dapat menumbuhkan iklim usaha kecil yang produktif.
6. Melakukan program promosi kesehatan, dimana lebih diupayakan untuk membiasakan masyarakat melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.
7. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanakan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, baik di Pemerintahan Kalurahan maupun Kapanewon
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif.
9. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Berdasarkan Rancangan Program dan Kegiatan Kapanewon Playen Tahun 2026 terdiri dari 8 program, 17 kegiatan dan 46 subkegiatan dimana dalam pelaksanaanya kegiatan untuk difokuskan pada pelayanan masyarakat tersebar di wilayah Playen yang terdiri dari 13 kalurahan. Adapun total pagu Renja tahun 2026 sebesar Rp 2.657.205.542,00 sedangkan untuk perkiraan tahun 2027 sebesar Rp 2.801.310.542,00. Adapun Prioritas, Sasaran Daerah, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Playen dijelaskan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100	2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100.000.000	Kapanewon Playen
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	Kapanewon Playen
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	Kapanewon Playen
					4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	40.000.000	Kapanewon Playen
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000	Kapanewon Playen
					4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000	Kapanewon Playen
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,48	7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.556.584.642	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.652.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.370.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	950.000	Kapanewon Playen

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	950.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.096.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.136.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.645.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.505.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.283.626.042	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.279.021.042	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.155.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.450.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.264.800	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.264.800	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.773.500	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.459.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.254.000	Kapanewon Playen

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.603.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.212.500	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	1.350.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.895.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.347.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.07.0005	Pengedaan Mebel	4.332.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.015.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.721.300	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa surat menyurat	94.738.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.383.300	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.200.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya PemeliharaanPajak dab Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.700.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.700.000	Kapanewon Playen
					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000	Kapanewon Playen

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.526.000	Kapanewon Playen
					7.01.02.2.02	Penyelengaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.526.000	Kapanewon Playen
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektivitas pelaksanaan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	7.526.000	Kapanewon Playen
					7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	98.982.000	Kapanewon Playen
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.567.000	Kapanewon Playen
					7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	36.397.000	Kapanewon Playen
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.170.000	Kapanewon Playen
		Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	43.053.000	Kapanewon Playen
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di kalurahan	43.053.000	Kapanewon Playen
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.892.000	Kapanewon Playen
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.892.000	Kapanewon Playen
					7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.470.000	Kapanewon Playen

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
					7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3.470.000	Kapanewon Playen
					7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	714.331.500	Kapanewon Playen
					7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	714.331.500	Kapanewon Playen
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitass dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	714.331.500	Kapanewon Playen
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	106.726.400	Kapanewon Playen
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	99.191.400	Kapanewon Playen
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.191.400	Kapanewon Playen
					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.535.000	Kapanewon Playen

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran dan pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.055.000	Kapanewon Playen
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.055.000	Kapanewon Playen
			Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.680.000	Kapanewon Playen
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.790.000	Kapanewon Playen
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.062.000	Kapanewon Playen
					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.855.000	Kapanewon Playen
					7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.810.000	Kapanewon Playen
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.858.000	Kapanewon Playen
Total							2.657.205.542	

Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 secara rinci dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Playen

Kode Rekening	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100	persen	100.000.000			100	persen	100.000.000
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan				100.000.000					100.000.000
	2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	1	laporan	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		1	laporan	100.000.000
	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100	persen	40.000.000			100	persen	40.000.000
	4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000					40.000.000
	4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	3	dokumen	40.000.000	Dana Keistimewaan DIY		3	dokumen	40.000.000
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		81.59	nilai	1.556.584.642			81.77	nilai	1.682.129.042
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.652.000					14.872.000
1	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	2	dokumen	3.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	dokumen	4.360.000
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	1	dokumen	950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	dokumen	1.090.000

Kode Rekening	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	1	dokumen	950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	dokumen	950.000
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	2	dokumen	1.096.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	dokumen	1.351.000
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	2	dokumen	1.136.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	dokumen	1.136.000
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	17	laporan	2.645.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17	laporan	3.145.000
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	4	laporan	2.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	laporan	2.840.000
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.283.626.042					1.292.846.042
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	224	orang/bulan	1.279.021.042	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		224	orang/bulan	1.287.021.042
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	1	laporan	1.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	laporan	1.155.000
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	13	laporan	3.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13	laporan	4.670.000
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian				1.264.800					5.664.368
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	6	dokumen	1.264.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	dokumen	5.664.368
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum				54.773.500					73.347.000

Kode Rekening	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	4	paket	1.459.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	paket	3.457.000
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	15	paket	36.254.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17	paket	57.888.000
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	4	paket	2.603.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	paket	2.602.000
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	2	paket	2.212.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	paket	2.500.000
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	12	laporan	1.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	laporan	1.360.000
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	19	laporan	10.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19	laporan	5.540.000
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah				10.347.000					24.684.000
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	1	unit	4.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36	unit	24.684.000
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	1	unit	6.015.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	unit	0
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145.721.300					222.515.632
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	12	laporan	94.738.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	laporan	97.238.000
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	36	laporan	50.383.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36	laporan	50.383.232
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	12	laporan	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	laporan	74.894.400
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah				48.200.000					48.200.000

Kode Rekening	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	91	unit	36.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		91	unit	36.700.000
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	21	unit	9.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21	unit	9.700.000
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	6	unit	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6	unit	1.800.000
	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana		100	persen	7.526.000			100	persen	7.530.000
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				7.526.000					7.530.000
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	12	laporan	7.526.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	laporan	7.530.000
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan		100	persen	98.982.000			100	persen	99.630.000
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				44.567.000					44.670.000
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	15	dokumen	36.397.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14	dokumen	36.500.000
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	2	Laporan	8.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	Laporan	8.170.000
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan				43.053.000					43.060.000

Kode Rekening	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	9	pokmas/ormas	43.053.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9	pokmas/ormas	43.060.000
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan				7.892.000					7.900.000
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	4	laporan	7.892.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	laporan	7.900.000
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan				3.470.000					4.000.000
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	26	keluarga	3.470.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4.000.000
	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	persen	714.331.500			100	persen	711.331.500
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				714.331.500					711.331.500
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	15	laporan	714.331.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15	laporan	711.331.500
	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	persen	106.726.400			100	persen	107.035.000
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				106.726.400					107.035.000

Kode Rekening	Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	75	orang	99.191.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75	orang	99.500.000
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	4	dokumen	7.535.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	dokumen	7.535.000
	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100	persen	33.055.000			100	persen	53.655.000
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		70	dokumen	33.055.000			66	dokumen	53.655.000
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	1	dokumen	3.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	dokumen	3.700.000
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	28	dokumen	1.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28	dokumen	1.790.000
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	30	dokumen	15.062.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29	dokumen	15.500.000
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	1	dokumen	1.855.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	dokumen	2.000.000
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	5	dokumen	8.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	dokumen	25.665.000
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Playen, Semua Kel/Desa	5	dokumen	1.858.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	dokumen	5.000.000
											2.657.205.542					2.801.310.542

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan (PD) Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Renja Kapanewon Playen Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Daerah. Renja Kapanewon Playen disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Renja Kapanewon Playen yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD.
Renja Kapanewon Playen Tahun 2026 mencakup tiga bahasan antara lain catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Renja Kapanewon Playen telah dan akan selalu melibatkan peran *(stakeholder)* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *(stakeholder)* dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

5.2. Kaidah pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan *(stakeholders)*, tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana tindak lanjut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Tidak hanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan saja yang terlihat, namun tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Renja Kapanewon Playen Tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran tahun 2026.

Wonosari,
KAPANEWON PLAYEN,

ttd

AGUS SUMARYONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Nglipar yang selanjutnya disingkat Rancangan Renja Kapanewon Nglipar adalah dokumen perencanaan Kapanewon Nglipar untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Kapanewon Nglipar dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Kapanewon Nglipar disesuaikan dengan Program Prioritas RKPD. Rencana Kerja Kapanewon Nglipar dengan Renstra Kapanewon Nglipar, menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD Kabupaten Gunungkidul.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kapanewon Nglipar memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Nglipar serta kerangka pendanaan daerah , Recana Kerja Perangkat Daerah (kapanewon) secara substansial sesuai dengan visi dan misi dan rencana resmi daerah (RKPD,RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

Keterkaitan antara Rencana Kerja Kapanewon Nglipar 2026 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja Kapanewon Nglipar sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RKPD. Renja Kapanewon Nglipar 2026 memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu satu tahunan. RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya

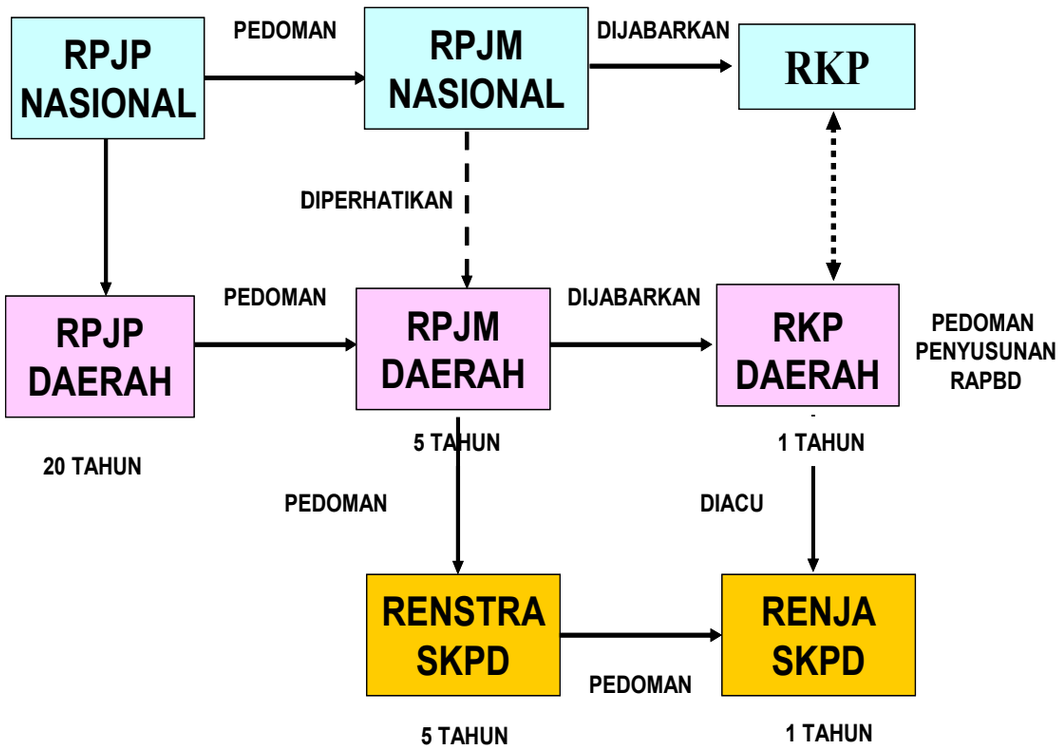

1.2. Landasan Hukum

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidl Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menegah Dearah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Kapanewon;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Nglipar Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2026, menyesuaikan urusan dan susunan perangkat baru, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan Tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029 yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
2. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kapanewon Nglipar.
3. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kapanewon Nglipar baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
4. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kapanewon Nglipar.

6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
7. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kapanewon Nglipar Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kapanewon Nglipar
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Nglipar
- 2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Kapanewon Nglipar

Rencana Kerja Kapanewon Nglipar Tahun 2024 sesuai DPA Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2024 tanggal 3 Januari 2024 telah teranggarkan sebesar Rp. 1.634.489.974,00 yang terdiri dari delapan program, enam belas kegiatan dan empat puluh tujuh subkegiatan. Selanjutnya Kapanewon Nglipar mengalami penambahan anggaran tunjangan hari raya bagi tenaga harian lepas, servis berat kendaraan operasional lapangan roda 4, Gaji PNS, BPJS Non ASN, ATK, dan Bregodo. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kapanewon Nglipar telah melakukan penambahan dan pergeseran anggaran sehingga pagu yang dikelola Kapanewon Nglipar menjadi sebesar Rp. 1.717.367.722,00 sesuai DPPA Nomor DPPA/A6/7.01.0.00.10.0000/01/ 2024.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 penyerapan anggaran mencapai Rp. 1.706.200.180,00 (99,35%) dari target anggaran Rp. 1.717.367.722,00. Penyebab realisasi tidak sesuai dengan target anggaran disebabkan karena realisasi anggaran pengadaan barang modal tidak terserap habis (efisiensi), dan jumlah belanja gaji ASN masih tersisa karena di bulan akhir tahun 2024 ada mutasi pergeseran 1 (satu) orang ASN ke OPD lain.

Untuk mendukung program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maka dalam Perubahan Rencana Kerja Kapanewon Nglipar Tahun 2024, diperlukan penyesuaian penambahan maupun pengurangan target kinerja maupun pagu indikatif untuk menunjang penyelenggaran pelayanan. Adapun penyesuaian pagu digunakan untuk penambahan gaji ASN, THR bagi THL, pelaksanaan Kirab Bregodo dalam rangka memperingati Hari Jadi Gunungkidul, penambahan biaya servis berat kendaraan operasional lapangan roda 4, BPJS Non ASN, ATK, dan pengurangan pagu untuk kegiatan pemilihan lurah karena tahun 2024 mengikuti kebijakan dari pemerintah (tambahan masa jabatan lurah 2 tahun). Setelah adanya Perubahan Rencana Kerja maka diikuti Perubahan DPA tahun 2024 telah ditetapkan dengan Nomor DPPA/A.6/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dengan total pagu sebesar Rp 1.717.367.722,00.

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Nglipar Tahun 2026 mengacu pada APBD Tahun 2026 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Nglipar berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan atau Tahun 2025.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Nglipar atau realisasi APBD untuk Kapanewon Nglipar yang disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2024 dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Pada Perangkat Daerah Kapanewon Nglipar dalam pelaksanaan Renja 2024 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, dengan kata lain target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan terpenuhi.

2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Pada Perangkat Daerah Kapanewon Nglipar dalam pelaksanaan Renja 2024 program dan kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
3. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang sudah memenuhi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;
   Realisasi program dan kegiatan Kapanewon Nglipar pada Tahun 2024 tidak ada yang target kinerja keluarannya melebihi dari target yang yang direncanakan dalam Renja Tahun 2024.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2024.
   a. Dalam rangka efisiesi waktu sebagian kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain.
   b. Munculnya kebijakan/regulasi setelah program/kegiatan dan target ditetapkan.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian Tahun 2024;
   a. Adanya kesinkronan kegiatan yang dianggarkan perangkat daerah Kapanewon Nglipar dengan agenda kegiatan yang di selenggarakan perangkat daerah di tingkat kabupaten.
   b. Adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
   c. Sumber Daya Manusia yang ada di perangkat daerah Kapanewon Nglipar yang kurang.
   d. Kenaikan harga BBM yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan lainnya.
   e. Rasionalisasi Anggaran tahun 2024 untuk memenuhi alokasi belanja wajib/mengikat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.
   a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala jawatan dan kepala sub bagian yang menangani kegiatan.
   b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait baik masalah pelaksanaan kegiatan maupun pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon.
   c. Melaksanakan efisiensi anggaran tahun 2024 sesuai ketentuan/intruksi.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Nglipar Tahun 2024 dan pencapaian Renstra 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Nglipar dan
Pencapaian Renstra Kapanewon Nglipar s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Kapanewon Nglipar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024					Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)
	URUSAN KEWILAYAHAN															
	KECAMATAN															
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
X.XX.01. 2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	100	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*0*
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	100	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	100
		Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	*8,29*	*Indeks*	*8,14*	*Indeks*	*8,14*	*Indeks*	*8,14*	*Indeks*	100	*8,29*	*Indeks*	8	*Indeks*	100

		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100	*100*	*Persen*	100	*Persen*	100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah dokumen Renja perubahan	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah dokumen draft Renstra	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah dokumen Renstra	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	3	dokumen	7	dokumen	100
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	3	dokumen	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah dokumen ROPK	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	100
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0

		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	100	17	Laporan	51	Laporan	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah laporan e monev	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah Laporan Teppra	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	4	Laporan	12	Laporan	100
X.XX.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*84*	*Indeks*	*84*	*Indeks*	*84*	*Indeks*	*84*	*Indeks*	100	*84*	*Indeks*	84	*Indeks*	100
		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	NA	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*100*	*Persen*	NA	*Persen*	0
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	NA	*Persen*	NA	*Persen*	NA	*Persen*	NA	*Persen*	NA	*100*	*Persen*	NA	*Persen*	0
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	NA	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	bulan	*NA*	NA	bulan	14	bulan	0
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224	orang/ bulan	224	orang/ bulan	224	orang/ bulan	224	orang/ bulan	100	224	orang/ bulan	672	orang/ bulan	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*	*NA*	dokumen	*NA*	dokumen	0
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	100
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*	NA	dokumen	NA	dokumen	0

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	100	13	Laporan	39	Laporan	100
X.XX.01. 2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	100	*6*	*Dokumen*	18	*Dokumen*	100
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	NA	*persen*	NA	*persen*	NA	*persen*	NA	*persen*	NA	NA	*persen*	NA	*persen*	0
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	NA	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	NA	*Persen*	0
X.XX.01. 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	NA	orang	NA	orang	NA	orang	*NA*	orang	*NA*	NA	orang	NA	orang	0
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100	6	Dokumen	18	Dokumen	100
X.XX.01. 2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*43,57*	*Indeks*	*43,71*	*Indeks*	*44,43*	*Indeks*	*44,43*	*Indeks*	100	*44,43*	*Indeks*	44	*Indeks*	100
		Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	0
		Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	0
X.XX.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	*NA*	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	NA	Paket Belanja	*NA*	Paket Belanja	0
		Jumlah Paket Komponen InstalasiJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	100	4	Paket	12	Paket	100
X.XX.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laptop terbeli	*NA*	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	*NA*	Unit	0
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	*NA*	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	NA	Paket Belanja	*NA*	Paket Belanja	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	5	Paket	5	Paket	5	Paket	100	5	Paket	15	Paket	100

X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	*NA*	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	NA	Paket Belanja	*NA*	Paket Belanja	0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	100	4	Paket	12	Paket	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	*NA*	Jenis	NA	Jenis	NA	Jenis	NA	Jenis	NA	NA	Jenis	*NA*	Jenis	0
		Jumlah barang penggandaan	*NA*	lembar	NA	lembar	NA	lembar	NA	lembar	NA	NA	lembar	*NA*	lembar	0
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	100	2	Paket	6	Paket	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	rekening	NA	rekening	0
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	248	Dokumen	248	Dokumen	248	Dokumen	248	Dokumen	100	248	Dokumen	744	Dokumen	100
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi minum dan sneck	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat yang terfasilitasi minum dan sneck	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	0
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	0
		Jumlah peserta rapat yang terfasilitasi makan dan minum	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	0
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	100
X.XX.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*2*	*Unit*	*2*	*Unit*	*2*	*Unit*	*2*	*Unit*	100	*2*	*Unit*	6	*Unit*	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	NA	*persen*	NA	*persen*	NA	*persen*	NA	*persen*	100	NA	*persen*	NA	*persen*	0
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	NA	*Persen*	NA	*Persen*	NA	*Persen*	NA	*Persen*	100	NA	*Persen*	100	*Persen*	0
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	unit	32	unit	NA	unit	NA	unit	100	NA	unit	32	unit	100

X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terbeli	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	0
		Jumlah CCTV yang terbeli	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	0
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	2	Unit	3	Unit	3	Unit	100	3	Unit	8	Unit	100
X.XX.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*60*	*Laporan*	*60*	*Laporan*	*60*	*Laporan*	*60*	*Laporan*	100	*100*	*Laporan*	240	*Laporan*	100
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana	NA	*persen*	NA	*persen*	NA	*persen*	NA	*persen*	100	NA	*persen*	NA	*persen*	0
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	NA	*persen*	NA	*persen*	NA	*persen*	NA	*persen*	100	NA	*persen*	NA	*persen*	0
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar (2 rekening X 12 Bulan)	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	NA	Rekening	NA	Rekening	0
		Jumlah rekening air yang terbayar (2 rekening X 12 Bulan)	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	NA	Rekening	NA	Rekening	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	24	Laporan	100	24	Laporan	72	Laporan	100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah hari terfasilitasinya jasa kebersihan	NA	termin	NA	termin	NA	termin	NA	termin	NA	NA	termin	247	termin	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	100
X.XX.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*4*	*Unit*	*4*	*Unit*	*4*	*Unit*	*4*	*Unit*	100	*4*	*Unit*	12	*Unit*	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	100	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	0

		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	0
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	NA	unit	0
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	0
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	0
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	0
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100	5	Unit	15	Unit	100
X.XX.01.2.09.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop yang terfasilitasi pemeliharaanya	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	0
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaanya	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	0
		Jumlah personal computer yang terfasilitasi pemeliharaanya	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	0
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaanya	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	0
		Jumlah sound system yang terfasilitasi pemeliharaanya	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	0
		Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100	5	Unit	15	Unit	100
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas rehab lantai kapanewon	NA	M2	NA	M2	NA	M2	NA	M2	NA	NA	M2	NA	M2	0
		Jumlah rehab papan nama kapanewon	NA	Paket pemeliharaan	NA	Paket pemeliharaan	NA	Paket pemeliharaan	NA	Paket pemeliharaan	NA	NA	Paket pemeliharaan	NA	Paket pemeliharaan	0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	3	Unit	100
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah hari keamanan gedung kantor yang terfasilitasi	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	NA	hari	0

		Jumlah laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	Laporan	100
X.XX.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terfasilitasi pemeliharaannya	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	100	NA	Unit	NA	Unit	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	3	Unit	100
X.XX.01. 2.13	*Penataan Organisasi*	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik*	NA	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	NA	*NA*	*dokumen*	NA	*dokumen*	0
		Nilai IKM	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	NA	NA	*Indeks*	NA	*Indeks*	0
X.XX.01. 2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP/SPIP, SOP, SIKM	*NA*	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	*NA*	dokumen	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.02. 2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	100	*2*	*Laporan*	6	*Laporan*	100
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	100	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	0
		Persentase layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	100	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	0
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah cabang olahraga yang dibina	NA	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	NA	cabor	NA	cabor	0

		Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	kelompok	NA	kelompok	0
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	0
		Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100	3	Laporan	9	Laporan	100
7.01.02. 2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*21*	*Laporan*	*21*	*Laporan*	*21*	*Laporan*	*21*	*Laporan*	100	*21*	*Laporan*	63	*Laporan*	100
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat	NA	*persen*	NA	*persen*	NA	*persen*	NA	*persen*	100	NA	*persen*	NA	*persen*	0
		Persentase jumlah layanan yang diberikan kepada masyarakat	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
7.01.02. 2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan forum kapanewon sehat	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	0
		Jumlah kesepakatan forum desa siaga	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	0
		Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	0
		Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	0
		Jumlah dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	0
		Jumlah koordinasi pelaksanaan pengadaan bansos	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	0
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	NA	KK	0
		Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	0

		Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat	NA	tangki	NA	tangki	NA	tangki	NA	tangki	NA	NA	tangki	NA	tangki	0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100	9	Laporan	27	Laporan	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	0
		Jumlah peserta sosialisasi pengurusan ijin UMK	NA	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	NA	Orang	0
		Jumlah peserta pembinaan /koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	0
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100	3	Laporan	9	Laporan	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Indeks Koordinasi Pemberdayaan Desa*	*8*	*Indeks*	*8,5*	*Indeks*	*8*	*Indeks*	*8*	*Indeks*	100	*8*	*Indeks*	24.5	*Indeks*	100
		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	100	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	0
		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	0
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen usulan rencana kegiatan (DURP)	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	0
		Jumlah Kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMKal dan RKPDes	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	0
		Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang meningkat kapasitasnya	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	0
		Jumlah Bimtek Perencanaan Pembangunan Kalurahan Terselenggara (PIWK)	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	0

7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	NA	4	dokumen	12	dokumen	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah profil kalurahan dan kapanewon tersusun	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah perlombaan kalurahan tingkat kapanewon	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	NA	Kali	0
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kabupaten	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	0
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100	3	Laporan	9	Laporan	100
7.01.03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*2*	*Indeks*	*2*	*Indeks*	*2*	*Indeks*	*2*	*Indeks*	100	*2*	*Indeks*	6	*Indeks*	100
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		persentase terfasilitasinya layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	0
		persentase terfasilitasinya layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	0
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	0
		Jumlah kesepakatan Posdaya	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	0
		Jumlah kesepakatan Forum anak	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	0
		Jumlah kesepakatan penanganan pencegahan pernikahan usia anak	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	0
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Lembaga Kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	100	4	Lembaga Kemasyarakatan	12	Lembaga Kemasyarakatan	100

7.01.03. 2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA	NA	Kelompok	NA	Kelompok	0
		Jumlah Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	0
		Jumlah kesepakatan koordinasi masa tanam, perbenihan, pemupukan, perkebunan, peternakan, dan budidaya perikanan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	0
		Jumlah industri kecil/rumah tangga yang meningkat pengetahuannya	NA	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	NA	Orang	0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.04. 2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	100	*1*	*Laporan*	3	*Laporan*	100
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	0
		Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	0
7.01.04. 2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat Kapanewon	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	NA	Kali	0
		Jumlah pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat kapanewon	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	0
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	6	Laporan	100

7.01.04. 2.02	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	100	*1*	*Laporan*	3	*Laporan*	100
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	0
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	0
7.01.04. 2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	0
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum yang terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen		Persen	0,0	100	Persen	100	Persen	100
7.01.05. 2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*41,5*	*Indeks*	*41,5*	*Indeks*	*41,5*	*Indeks*	*41,5*	*Indeks*	100	*41,5*	*Indeks*	41,50	*Indeks*	100
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	0

		Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	0
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Kegiatan HUT yang terfasilitasi Pelaksanaannya	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	0
		Jumlah paskib kapanewon yang dibentuk dan dilatih	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	0
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	75	Orang	80	Orang	80	Orang	80	Orang	100	75	Orang	235	Orang	100
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	NA	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	Orang	100	NA	Orang	NA	Orang	0
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kesepakatan Koordinasi FORKOMPIMKA	4	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	4	Kesepakatan	0
		Jumlah laporan hasil patroli bersama	12	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	12	Dokumen	0
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100

7.01.06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*58*	*Dokumen*	*57*	*Dokumen*	*60*	*Dokumen*	*60*	*Dokumen*	100	*60*	*Dokumen*	177	*Dokumen*	100
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	NA	*Persen*	NA
		Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	NA	*Persen*	NA
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peserta pembinaan penyusunan produk hukum desa	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	0
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	100
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan pemerintahan desa	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	0
		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	0
		Jumlah monografi kapanewon tersusun	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBDes	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	100	NA	dokumen	NA	dokumen	0
		Frekuensi monev pengelolaan keuangan kalurahan	NA	desa	NA	desa	NA	desa	NA	desa	NA	NA	desa	NA	desa	0
		Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset kalurahan yang terlaksana	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	NA	Kali	0
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100	4	dokumen	12	dokumen	100

7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah koordinasi dengan Lurah dan Pamong lainnya	2	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	NA	Kali	NA
		Jumlah Pamong Kalurahan yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	0
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	dokumen	6	dokumen	100
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggarakan pemilihan lurah	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	0	Kalurahan	0
		Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	0	1	dokumen	3	dokumen	100
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD/BPK yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	0
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	100
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengisian pamong kalurahan dan atau staf pamong kalurahan	NA	rekomendasi	NA	rekomendasi	NA	rekomendasi	NA	rekomendasi	NA	NA	rekomendasi	NA	rekomendasi	0
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	3	dokumen	100
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	0	NA	Dokumen	NA	Dokumen	0
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	100
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah kesepakatan koordinasi tataruang kalurahan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	0

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	100
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	300	Persen	300
2.22.08.5.07	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*2*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	100	*2*	*Laporan*	5	*Laporan*	100
		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	NA	*Persen*	0
		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	NA	*Persen*	0
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan Hari Keistimewaan DIY	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	NA	Kali	0
2.22.08.5.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	100
5.1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
	SEKRETARIAT DAERAH															
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	persen	100	persen	100
4.01.04.5.01	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	100	*2*	*Dokumen*	6	*Dokumen*	100

		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terlaksana	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	0
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terlaksana	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	0
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	Dokumen	100
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	Laporan	NA	Laporan	0
		Rencana Program Kegiatan Keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Nglipar

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Nglipar mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Kapanewon Nglipar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan upaya khusus dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kinerja pelayanan Kapanewon Nglipar merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan setrategis Pemerintah. Adapun tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah Kapanewon Nglipar. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui pelayananan satu pintu/pelayanan terpadu di Kapanewon, jenis layanan yg dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Surat Izin Keramaian
2. Pelayanan Rekomendasi BPJS
3. Pelayanan SKTM
4. Pelayanan Pengantar SKCK
5. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
6. Surat pernyataan beda nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir
7. Pelayanan pengajuan proposal
8. Rekomendasi Pelaksanaan Nikah Karena Dilaksanakan Kurang Dari 10 Hari Setelah Pendaftaran
9. Pengelolaan Pengaduan Pada Penyelenggara Pelayanan Publik

Indikator kinerja utama kapanewon ditetapkan oleh Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021, salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kapanewon perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon tahun 2026.

Indikator capaian kinerja pelayanan Kecamatan/Kapanewon Nglipar berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai yang telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pengukuran capaian kienerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Nglipar yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Yang Berkualitas”.

Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini dalam bentuk tabel 2.2. dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Nglipar
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK()	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Kapanewon Nglipar				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)										
1.	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	80,50	96,40	96,41	96,41	82,62	96,40	96,41	96,41	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kapanewon Nglipar dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Kapanewon Nglipar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon bahwa Kapanewon Nglipar mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
2) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
3) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
4) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum;
8) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah kapanewon;
9) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
10) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kapanewon;
11) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon;

12) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
13) Koordinasi, pemantaun, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah kapanewon;
14) Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Nglipar, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Nglipar dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik (good govermance) dengan cara meningkatkan pemahaman SDM aparat Kapanewon dan Kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Nglipar sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kapanewon Nglipar hingga tahun 2024 secara langsung bisa dinikmati masyarakat, antara lain :

1) Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat, seperti pembuatan SKCK, HO, Surat Keterangan Miskin, dll.
2) Terselesaikannya pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
3) Terlaksananya monitoring kegiatan penyaluran CPP.
4) Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
5) Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.
6) Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
7) Terlaksananya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
8) Terlaksananya kegiatan dropping air bagi masyarakat miskin.
9) Terlaksananya kegiatan safari taraweh.
10) Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan.
11) Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong-royong
12) Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya local (gelar budaya)
13) Terlaksananya pembuatan buku profil desa, profil Kecamatan/Kapanewon, dan monografi.
14) Terfasilitasinya proses dan mekanisme perizinan.

Adapun tingkat kinerja Kapanewon Nglipar yang tidak secara langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya kegiatan pelayanan antara lain :

1) Terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran
2) Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.

3) Terfasilitasinya penyelenggaraan ketatalaksanaan kepegawaian
4) Terfasilitasinya pengembangan kapasitas aparatur.
5) Terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja, seperti : LKjIP, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun, dan Laporan Keuangan Bulanan.
6) Terselesaikannya pelaporan barang milik daerah yaitu Laporan Aset dan Persediaan Bulanan maupun Semesteran.
7) Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon, Rencana Strategis Kapanewon, RKA, RKA Perubahan, ROPK, DPA, dan DPA Perubahan.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Kapanewon Nglipar adalah :

1) Kualitas sumberdaya manusia di Kalurahan belum merata,
2) Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil yang ditempatkan di Kapanewon.
3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang masih kurang karena keterbatasan anggaran.
4) Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai kompetensi di bidang Akuntansi.
5) Harga kebutuhan pokok masyarakat relative semakin tinggi.
6) Terbatasnya anggaran dan SDM.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kapanewon Nglipar.

Untuk mendapatkan potret gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Nglipar, berikut dijabarkan secara rinci yang meliputi bidang sosial, budaya, bidang ekonomi, bidang fisik, dan bidang pemerintahan.

1). Bidang Sosial Budaya

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan di bidang sosial budaya di Kapanewon Nglipar saat ini antara lain :

a. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
b. Masih banyak pengangguran.
c. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.

2). Bidang Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan bidang ekonomi yang ada di wilayah Kapanewon Nglipar saat ini antara lain :

a. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
b. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok
c. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
d. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing
e. dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya

3). Bidang Fisik Prasarana

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan bidang fisik/sarana prasarana yang ada di wilayah Kapanewon Nglipar saat ini antara lain :

a. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai; dan

b. Kondisi fisik sebagian gedung kantor yang rusak dan memiliki tata ruang yang kurang efisien.
c. Air sungai Oya belum dimanfaatkan secara optimal

4). Bidang Pemerintahan

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan bidang pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon Nglipar saat ini antara lain :

a. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
b. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata;
c. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS sehingga kinerja PNS belum maksimal;
d. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
e. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029 adalah "Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

Adapun Visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029, yang meliputi :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dari penjabaran Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2025 – 2029, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kapanewon Nglipar adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kapanewon
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan
5. Peningkatan perekonomian masyarakat

6. Peningkatan kesejahteraan sosial
7. Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
8. Pemulihan Kehidupan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
9. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikan
10. Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana
11. Reformasi Birokrasi

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis pemerintah pusat dan pemerintah D.I. Yogyakarta sebagai berikut :

a. Isu Strategis Nasional
    1. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
    2. Kemandirian melalui Swasembada Pangan, Air dan Energi;
    3. Pengembangan Infrastruktur;
    4. Memperkuat Daya Saing SDM;
    5. Hilirisasi dan Pengembangan Industri berbasis SDA;
    6. Membangun dari Desa;
    7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata Kelola; dan
    8. Kehidupan yang Harmonis dengan Alam, Lingkungan dan Budaya

b. Isu Strategis D.I Yogyakarta
    1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
    2. Pengembangan Wilayah Selatan DIY
    3. Perkembangan Teknologi Informasi
    4. Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif
    5. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
    6. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
    7. Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta-Prambanan
    8. Penguatan Ketahanan Pangan
    9. Pelestarian dan Pengelolaan Budaya
    10. Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan
    11. Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
    12. Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital

c. Isu Strategis Daerah
    1. Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
    2. Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
    3. Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha

4. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
5. Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
6. Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 yang merujuk pada visi Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 adalah : “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadapan”.

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut :

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Adapun prioritas untuk Kapanewon Nglipar adalah Pamong Nglayani dan Ngayomi. Sedangkan Sasarannya adalah Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Tugas dan fungsi Kapanewon Nglipar merujuk pada visi dan misi daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029, yaitu akan mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparatur Kapanewon dan Kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan publik.

Pemerintah Kapanewon Nglipar sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat termasuk SDA maupun SDM di wilayan Nglipar. Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan ketrampilan, profesionalitas, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi beberapa factor. Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kapanewon Nglipar dalam lima tahun yang akan dating dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities)
    1. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional;
    2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
b. Ancaman (Threat)
    1. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat;
    2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan;
    3. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif;
    4. Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat.

2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan inspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD telah dilakukan melalui musyawarah mulai dari tingkat kalurahan, kapanewon dan kabupaten dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Kapanewon Nglipar berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah pagu pendanaannya.

Dalam reviu terhadap Rencana Kerja Kapanewon Nglipar Tahun 2026 melalui proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut :

Tabel 2,3.
Reviu terhadap Rancangan Awal Kapanewon Nglipar Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Nglipar

No	Rencana Rancangan Awal Kapanewon Nglipar					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Prosentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 persen	150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Prosentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 persen	100.000.000,00	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				150.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000,00	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Pembinaan Kapanewon Kelembagaan Adat dan Tradisi Nglipar	1 laporan	150.000.000	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Pembinaan Kapanewon Kelembagaan Adat dan Tradisi Nglipar	1 laporan	100.000.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100 persen	25.970.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana	100 persen	40.000.000,00	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				25.970.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000,00	

	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul ,Patuk, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	2 dokumen	25.970.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi	2 dokumen	40.000.000,00	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100 persen	322.427.665	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana	100 persen	7.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	14.500.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				307.927.665	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				7.000.000	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	292.927.665	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	-	
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	15.000.000	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	7.000.000	

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100 persen	49.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi	100 persen	92.685.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				24.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				24.000.000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 dokumen	15.000.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9 dokumen	15.000.000	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan	9.000.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 laporan	9.000.000	
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		58.890.000	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/ Ormas	58.890.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				25.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan		3.400.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	- Lembaga Kemasyarakatan	-	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	3.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	3.400.000	

						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		6.395.000	
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kapanweon Nglipar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	28 Keluarga	2.900.000	
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kapanewon Nglipar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	35 Keluarga	3.495.000	
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100 persen	23.300.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	393.628.500	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.300.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		393.628.500	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9 laporan	393.628.500	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	13.300.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- laporan	-	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-	

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	10.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	-	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Terfasilitasi	100 persen	348.415.938	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Terfasilitasi	100 persen	103.400.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				348.415.938	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		103.400.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kapanewon Nglipar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 orang	335.415.938	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kapanewon Nglipar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	96.700.000	

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	13.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	6.700.000	
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHANDESA		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100 persen	108.700.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHANDESA		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	100 persen	24.305.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				108.700.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		24.305.000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 kalurahan	4.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 dokumen	3.050.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5.200.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	2.500.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	6.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	4.350.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	3.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	3.375.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	77.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	5.530.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	4.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	3.500.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	3.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- Dokumen	-	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1 Dokumen	2.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	- Dokumen	-	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	4.500.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 Dokumen	-	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	82,10	1.350.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	82,10 Indeks	1.458.679.760	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun*		54.613.000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	36.314.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.050.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	2.111.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	2.937.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	3.200.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.077.563.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.160.035.760	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Nglipar	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/ bulan	1.068.063.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Nglipar	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/ bulan	1.151.885.760	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 laporan	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	13 laporan	5.650.000	
						Administrasi Barang Miik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		1.600.000	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	1.600.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Kepegawiaan		10.104.900	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Nglipar	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Nglipar	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	10.104.900	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				51.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dokumen Administrasi Umum		50.296.000	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Nglipar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	4.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Nglipar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	2.500.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Nglipar	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 Paket	27.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Nglipar	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket	29.246.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Nglipar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	4 Paket	4.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Nglipar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	4 Paket	2.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kapanewon Nglipar	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	248 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kapanewon Nglipar	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	248 Dokumen	1.200.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9.350.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	2.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Nglipar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Dokumen	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				40.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		1.802.000	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Nglipar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	-	Pengadaan Mebel	Kapanewon Nglipar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	-	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Nglipar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	40.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Nglipar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	1.802.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87.685.000	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.375,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	20.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	21.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Nglipar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.310.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108.936.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		92.543.100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	54.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Nglipar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	129 unit	70.655.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Nglipar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	7.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Nglipar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	7.200.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Nglipar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	20.436.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Nglipar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	12.588.100	

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Nglipar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	26.700.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Nglipar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	2.100.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Nglipar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Nglipar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	-	
Jumlah Total					2.377.813.603	Jumlah Total				2.219.698.260	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan PD, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kalurahan maupun kapanewon. Akan tetapi untuk Kapanewon Nglipar tahun 2026 tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang tercover dalam Rencana Kerja Dinas Terkait. Adapun Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/lingkungan yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum musrenbangkal.
2. Hasil musrenbang Kapanewon merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu isu penting dari masing masing SKPD yang ada. Kegiatan musrenbang kapanewon yang telah disepakati antara lain dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial berupa jamban dan septictank kepada KK miskin, dalam bidang ekonomi menyelenggarakan bimtek perencanaan pembangunan kalurahan dan bimtek pengelolaan keuangan kalurahan.
3. Kedepan kamus usulan sudah ada sehingga pada saat pelaksanaan musrenbangkal semua usulan program kegiatan yang ada di kalurahan bisa terakomodir sesuai kegiatan yang direncanakan, sehingga terjadi sinkronisasi data antara usulan pemerintah kalurahan, kapanewon dan kabupaten.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan (PIWK) Tahun 2026 di Kapanewon Nglipar tidak ada

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
untuk Kapanewon Nglipar

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	NIHIL						

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Kapanewon Nglipar sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati selaku Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Rencana Kerja dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang makin baik serta unggul dalam persaingan di lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sesuai prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Tahun 2026 Kapanewon Nglipar masih terdapat anggaran Dana Keistimewaan DIY (Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan). Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Panewu Nglipar adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarkat desa. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang ada di Kapanewon;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Nglipar

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari adanya dalam kurun waktu yang ditentukan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada bentuk kuantitatif dan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dimana tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan menggambarkan hal hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional dan kegiatan pokok yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

Selanjutnya disajikan hubungan Tujuan Perangkat Daerah dengan Sasaran Perangkat Daerah dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Kapanewon Nglipar

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,41

Tabel 3.2
Sasaran Kapanewon Nglipar

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran PD Tahun 2026
1	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
2	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
3	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,05

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Kapanewon dengan tabel sebagai berikut :

Tabel.3.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Nglipar Tahun 2026

No	IKU	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,41

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Nglipar meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah.
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON NGLIPAR

Rencana Kerja Kapanewon Nglipar Tahun 2026 mendasar pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029 yaitu *"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"*

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan yaitu:

1. Sebagai konsekuensi untuk merealisasikan program/kegiatan Kapanewon Nglipar dalam rangka mendorong visi dan misi Kepala Daerah.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah baik kapanewon maupun kalurahan.
3. Pemanfaatan potensi yang ada dengan tujuan untuk mengatasi masalah kesejahteraan social.
4. Pencapaian IKU untuk tahun 2025-2029 dengan indikator kinerja utama "Indeks Pelayanan Kapanewon" yang formulasi perhitungannya menggunakan lima komponen yaitu persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu, persentase kegiatan sosial, persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, dan nilai indeks kepuasan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan prima.
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain sebagai berikuti:

Berdasarkan Rancangan Program dan Kegiatan Kapanewon Nglipar Tahun 2026 terdiri dari 8 program, 18 kegiatan dan 46 subkegiatan dimana dalam pelaksanaanya kegiatan untuk difokuskan pada pelayanan masyarakat tersebar di wilayah Nglipar yang terdiri dari 7 kalurahan. Adapun total pagu Rencana Kerja Kapanewon Nglipar Tahun 2026 sebesar Rp 2.219.698.260,00 sedangkan untuk perkiraan tahun 2027 sebesar Rp 2.355.898.088,00. Program dan kegiatan Pembangunan Kapanewon Nglipar Tahun 2026 seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pamong Nglayani & Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel.	Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,05	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.458.679.760,00	Kapanewon Nglipar
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.613.000,00	
					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.314.500,00	
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.050.000,00	
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.111.500,00	
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.937.000,00	
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.200.000,00	
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.160.035.760,83	
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.151.885.760,00	
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00	
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.650.000,00	

					7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.600.000,00	
					7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.600.000,00	
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.104.900,00	
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.104.900,00	
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.296.000,00	
					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.246.000,00	
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	
					7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.200.000,00	
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000,00	
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.350.000,00	
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.802.000,00	
					7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.802.000,00	
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.685.000,00	
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.375.000,00	
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	
					7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.310.000,00	
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.543.100,00	

					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.655.000,00	
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000,00	
					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.588.100,00	
					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.100.000,00	
					7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.000.000,00	
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.000.000,00	
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.000.000,00	
		Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000,00	
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000,00	
					4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000,00	
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.400.000,00	
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24.000.000,00	
					7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15.000.000,00	

					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.000.000,00	
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.400.000,00	
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.400.000,00	
		Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHANDESA	24.305.000,00	
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.305.000,00	
					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.500.000,00	
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.500.000,00	
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.500.000,00	
					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	
					7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9.270.000,00	
					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.500.000,00	
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.000,00	
		Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100 Persen	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	100.000.000,00	
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	
					7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	58.890.000,00	
					7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	58.890.000,00	
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	58.890.000,00	

		Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**6.395.000,00**	
					7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6.395.000,00	
					7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2.900.000,00	
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	3.495.000,00	
					7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**393.628.500,00**	
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	393.628.500,00	
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	393.628.500,00	
					7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**103.400.000,00**	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	103.400.000,00	
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	96.700.000,00	
					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.700.000,00	
					Jumlah		**2.219.698.260,00**	

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Kapanewon Nglipar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027		
							Lokasi	Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
					KAPANEWON NGLIPAR					2.219.698.260,00					2.355.898.088,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					100.000.000,00					100.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000,00					100.000.000,00
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi	Kapanewon Nglipar	100	persen	100.000.000,00	Dais DIY		100	persen	100.000.000,00
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000,00					100.000.000,00
2	22	08	5.07	006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	Laporan	100.000.000,00			1	laporan	100.000.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					40.000.000,00					40.000.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					40.000.000,00					40.000.000,00

4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan	Kapanewon Nglipar	100	persen	40.000.000,00	Dais DIY		100	persen	40.000.000,00
4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000,00					40.000.000,00
4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan diKapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi		2	dokumen	40.000.000,00			2	dokumen	40.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.079.698.260,00					2.215.898.088,00
7	01	01			KECAMATAN					2.079.698.260,00					2.215.898.088,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		82,10	indeks	1.458.679.760,00			82,15	indeks	1.543.698.088,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.613.000,00					32.000.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Nglipar,	2	dokumen	36.314.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	dokumen	8.000.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Nglipar,	1	dokumen	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	dokumen	4.000.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Nglipar	1	dokumen	2.111.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	dokumen	3.500.000,00

7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kapanewon Nglipar,	2	dokumen	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	dokumen	2.500.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Nglipar,	2	dokumen	2.937.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	dokumen	4.500.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Nglipar,	17	laporan	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		17	laporan	5.500.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Nglipar,	4	laporan	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	laporan	4.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.160.035.760,00					1.325.648.088,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Nglipar,	238	orang/ bulan	1.151.885.760,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		238	orang/ bulan	1.316.148.088,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Nglipar,	1	laporan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Nglipar,	13	laporan	5.650.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		13	laporan	6.500.000,00

7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah				1.600.000,00					2.500.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kapanewon Nglipar	24	Laporan	1.600.000,00			24	Laporan	2.500.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian				10.104.900,00					12.000.000,00
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Nglipar,	6	dokumen	10.104.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		6	dokumen	12.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum				50.296.000,00					55.050.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Nglipar,	4	paket	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	paket	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Nglipar,	4	paket	29.246.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	paket	32.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kapanewon Nglipar,	4	paket	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	paket	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kapanewon Nglipar,	2	paket	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	paket	3.500.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kapanewon Nglipar,	248	dokumen	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		248	dokumen	1.200.000,00

7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Nglipar,	12	laporan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Nglipar,	12	laporan	9.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	laporan	9.350.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah				1.802.000,00					10.000.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kapanewon Nglipar,	4	unit	1.802.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	unit	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87.685.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)				28.200.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Nglipar	4	Laporan	5.375.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	Laporan	4.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kapanewon Nglipar,	24	laporan	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		24	laporan	23.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kapanewon Nglipar,	12	laporan	61.310.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	laporan	1.200.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah				92.543.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)				78.300.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kapanewon Nglipar,	129	unit	70.655.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		129	unit	41.000.000,00

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kapanewon Nglipar,	22	unit	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		22	unit	12.500.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kapanewon Nglipar,	1	unit	12.588.100,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	unit	20.00.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kapanewon Nglipar,	4	unit	2.100.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	unit	4.800.000,00
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana**		**100**	**persen**	**7.000.000,00**			100	persen	7.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				7.000.000,00					7.000.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Nglipar,	12	laporan	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		12	laporan	7.000.000,00
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi**		**100**	**persen**	**92.685.000,00**			100	persen	100.900.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				24.000.000,00					28.500.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Nglipar,	9	dokumen	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		9	dokumen	17.500.000,00

7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Nglipar,	10	Laporan	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		10	Laporan	11.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				58.890.000,00					60.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kapanewon Nglipar	8	Pokmas/ Ormas	58.890.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	Pokmas/ Ormas	60.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan				3.400.000,00					5..400.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Nglipar,	2	laporan	3.400.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	laporan	5.400.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan				6.395.000,00					7.000.000,00
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kapanewon Nglipar	28	Keluarga	2.900.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		28	Keluarga	3.000.000,00
7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kapanewon Nglipar	35	Keluarga	3.495.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		35	Keluarga	4.000.000,00
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**100**	**persen**	**393.628.500,00**			100	persen	395.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				393.628.500,00					395.000.000,00

7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Nglipar,	9	laporan	393.628.500,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		9	laporan	395.000.000,00
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi**		**100**	**persen**	**103.400.000,00**			100	persen	107.300.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				103.400.000,00					107.300.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Nglipar,	75	orang	96.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		75	orang	101.200.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Nglipar,	4	dokumen	6.700.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	dokumen	6.100.000,00
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana**		**100**	**persen**	**24.305.000,00**			100	persen	62.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				24.305.000,00			58	dokumen	62.000.000,00

7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Nglipar,	2	dokumen	3.050.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	dokumen	4.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Nglipar,	16	dokumen	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		16	dokumen	4.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Nglipar,	2	dokumen	4.350.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		4	dokumen	7.000.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Nglipar,	1	dokumen	3.375.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		2	dokumen	4.500.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kapanewon Nglipar,	1	dokumen	5.530.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	dokumen	25.000.000,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Nglipar,	1	dokumen	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	dokumen	5.000.000,00
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Nglipar,	2	dokumen	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	dokumen	12.500.000,00

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Nglipar Tahun 2026 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan daerah. Rencana Kerja Kapanewon Nglipar disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Nglipar yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD.

Rencana Kerja Kapanewon Nglipar Tahun 2026 mencakup tiga bahasan antara lain catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Nglipar telah dan akan selalu melibatkan peran *(stakeholder)* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *(stakeholder)* dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

5.2. Kaidah pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan *(stakeholders)*, tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana tindak lanjut.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Tidak hanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan saja yang terlihat, namun tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Renja Kapanewon Nglipar sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap

pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
KAPANEWON NGLIPAR,

ttd

SUSTIWININGSIH

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON NGAWEN
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam regulasi tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun ditingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD. Renja PD disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), artinya, Renja PD disusun berdasarkan pada RKPD.

Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota juga berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan. Program/kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi Kapanewon, yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam Renja PD mengandung strategi yang menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Keterkaitan antara Renja Kapanewon Ngawen 2026 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja Kapanewon Ngawen sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RKPD. Renja Kapanewon Ngawen 2026 memuat arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu satu tahunan. RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

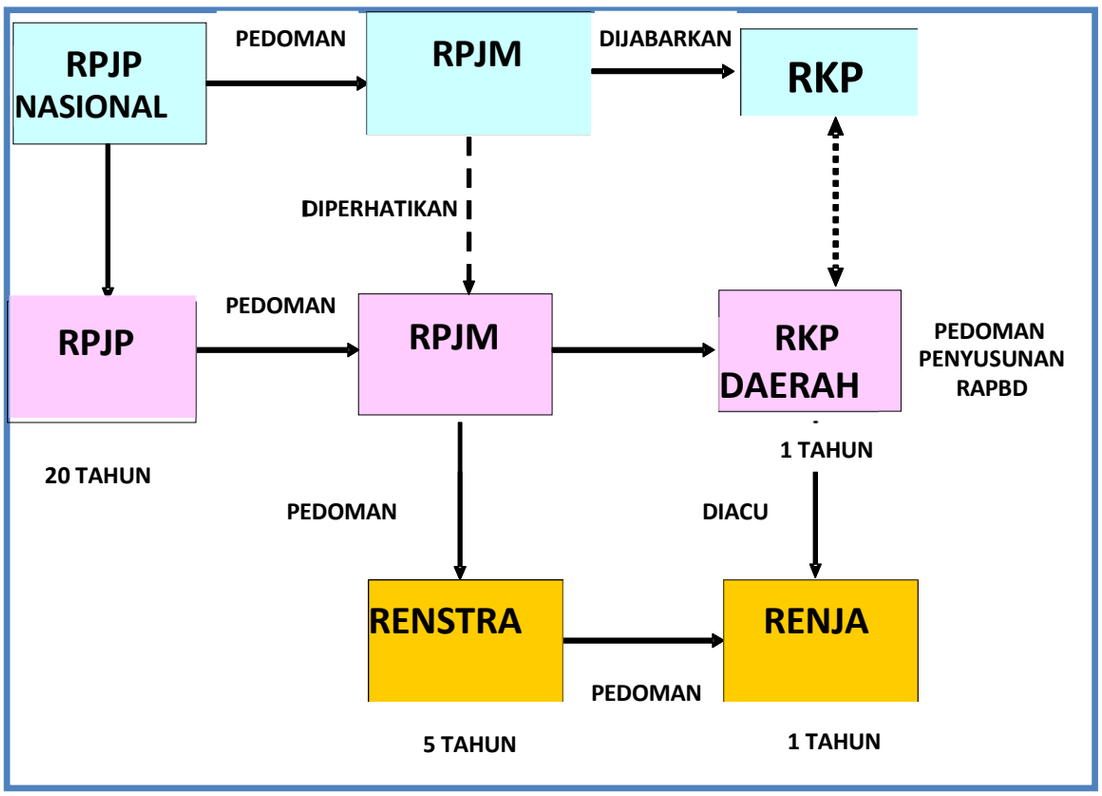

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja SKPD serta dokumen perencanaan lainnya

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja pada tahun 2026 ini didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
   b. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kapanewon Ngawen.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen Tahun 2026 adalah:
   a. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kapanewon Ngawen baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
   b. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
   c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kapanewon Ngawen.
   d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
   e. Menjadi dasar Penyusunan RKA Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kapanewon Ngawen Tahun 2026 disusun dengan sistem penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON NGAWEN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Ngawen dan Capaian Renja Kapanewon Ngawen
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Ngawen
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Ngawen
2.4 Reviu terhadap Rancangan RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON NGAWEN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Ngawen

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON NGAWEN

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
4.2 Uraian garis besar rekapitulasi program kegiatan
4.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kapanewon Ngawen
4.4 Rencana program dan kegiatan Kapanewon Ngawen

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA KAPANEWON NGAWEN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Kapanewon Ngawen dan Capaian Rancangan Renja Kapanewon Ngawen

Evaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul lebih terarah, terfokus serta untuk mencapai target sasaran tahun 2026.

Realisasi program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Pada Perangkat Daerah Kapanewon Ngawen dalam pelaksanaan Renja 2025 program dan kegiatan pada semester I (Bulan Juni) sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Kapanewon Ngawen Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.642.277.946	877.038.884	53,40
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*48.677.000*	*24.751.858*	50,85
	I. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.610.000	14.374.954	44,08
	II. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.310.000	1.309.980	100,00
	III. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.210.000	0	0,00
	IV. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.095.000	2.094.960	100,00
	V. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.420.000	0	0,00
	VI. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.405.000	4.134.860	64,56
	VII. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.627.000	2.837.104	78,22
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*1.232.212.598*	*637.509.521*	51,74
	I. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.222.557.598	631.084.721	51,62
	II. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.085.000	2.084.980	100,00
	III. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.570.000	4.339.820	57,33
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*7.855.800*	*4.259.697*	54,22
	I. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.855.800	4.259.697	54,22
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*63.695.400*	*34.981.465*	54,92
	I. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.932.000	1.306.900	67,64

			II. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.268.000	12.391.896	67,83
			III. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.419.000	11.645.000	44,08
			IV. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.476.400	3.238.000	72,33
			V. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	600.000	50,00
			VI. Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000	1.049.895	50,00
			VII. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.300.000	4.749.774	51,07
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*74.838.000*	*73.726.755*	98,52
			I. Pengadaan Mebel	52.062.000	51.501.780	98,92
			II. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.776.000	22.224.975	97,58
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*46.594.100*	*20.494.215*	43,98
			I. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.035.000	11.354.965	40,50
			II. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.559.100	9.139.250	49,24
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*168.405.048*	*81.315.373*	48,29
			I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.900.000	21.000.000	47,84
			II. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	3.600.000	52,17
			III. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.705.048	55.815.373	47,83
			IV. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000	900.000	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.245.000	3.399.961	23,87
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		*8.255.000*	*0*	0,00
			I. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.255.000	0	0,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		*5.990.000*	*3.399.961*	56,76
			I. Peningkatan Efektifitas	5.990.000	3.399.961	56,76

	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78.485.100	51.852.710	66,07
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*67.453.000*	*47.928.000*	71,05
	I. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	59.363.000	39.838.000	67,11
	II. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.090.000	8.090.000	100,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*11.032.100*	*3.924.710*	35,58
	I. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.432.000	3.924.710	52,81
	II. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.600.100	0	0,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.480.000	13.479.961	100,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*13.480.000*	*13.479.961*	100,00
	I. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.940.000	1.939.961	100,00
	II. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.540.000	11.540.000	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	93.661.500	6.124.895	6,54
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*93.661.500*	*6.124.895*	6,54
	I. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	82.911.500	0	0,00
	II. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.750.000	6.124.895	56,98

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			63.686.000	35.165.522	55,22
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*63.686.000*	*35.165.522*	55,22
			I. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.105.000	1.964.967	63,28
			II. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.050.000	524.984	50,00
			III. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.110.000	19.849.807	49,49
			IV. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.901.000	1.900.953	100,00
			V. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.820.000	2.819.922	100,00
			VI. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.030.000	1.029.980	100,00
			VII. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.750.000	4.894.961	72,52
			VIII. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.915.000	2.179.948	55,68
			IX. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.890.000	0	0,00
			X. Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.115.000	0	0,00
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			30.000.000	0	0,00
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		*30.000.000*	*0*	0,00
			I. Gelar Budaya Jogja	30.000.000	0	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			32.900.000	16.912.000	51,40
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		*32.900.000*	*16.912.000*	51,40
			I. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	32.900.000	16.912.000	51,40
TOTAL				1.968.735.546	1.003.973.933	51,00

Secara umum realisasi capaian program dan kegiatan Kapanewon Ngawen telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Realisasi Keuangan sebagian besar telah tercapai, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai nilai 100 persen dikarenakan pembeliaan menggunakan Mbiz yaitu pembelian belanja Modal seperti Meja, Kursi, Gorden dan LCD.
b. Realisasi Fisik telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

TABEL 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Kapanewon Ngawen

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024 (Tahun lalu/ n-2)					Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan/ n-1)		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,0	**100**	Persen	100	Persen	100
X.XX.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Indeks perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*8,29*	*Indeks*	*8,14*	*Indeks*	*8,14*	*Indeks*	*8,14*	*Indeks*	100,0	*8,29*	*Indeks*	8	*Indeks*	98
		Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100

		Jumlah Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	NA	*NA*	*Dokumen*	26	*Dokumen*	100
		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100,0	*100*	*Persen*	100	*Persen*	100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	100,0	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah dokumen Renja perubahan	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah dokumen draft Renstra	0	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	0	dokumen	0
		Jumlah dokumen Renstra	0	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	0	dokumen	0
		Jumlah hari terfasilitasinya Petugas Informasi Komputer (SMA)	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	247	hari	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	3	dokumen	150,0	3	dokumen	8	dokumen	80
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100

		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,0	1	Dokumen	3	Dokumen	75
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,0	1	dokumen	3	dokumen	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah dokumen ROPK	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,0	2	Dokumen	6	Dokumen	75
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100

		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,0	1	Dokumen	3	Dokumen	75
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	Laporan	13	Laporan	17	Laporan	13	Laporan	76,5	17	Laporan	43	Laporan	63
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah dokumen e monev	4	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	4	dokumen	100
		Jumlah Laporan Teppra	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	12	dokumen	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68	Laporan	23	Laporan	32	Laporan	21	Laporan	65,6	29	Laporan	73	Laporan	107
X.XX.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*84*	*Indeks*	*84*	*Indeks*	*84*	*Indeks*		*Indeks*	0,0	*84*	*Indeks*	84	*Indeks*	100
		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100

		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*4*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	4	*Layanan*	100
		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100,0	*100*	*Persen*	100	*Persen*	100
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	bulan	*NA*	NA	bulan	14	bulan	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	952	orang/bulan	210	orang/bulan	238	orang/bulan	158	orang/bulan	66,4	238	orang/bulan	606	orang/bulan	64
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,0	1	Laporan	3	Laporan	75
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*	NA	dokumen	12	dokumen	100
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*	NA	dokumen	1	dokumen	100

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	52	Laporan	10	Laporan	13	Laporan	10	Lapo ran	76,9	13	Lapo ran	33	Lapo ran	63
X.XX.01 .2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*24*	*Dokume n*	*6*	*Dokume n*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Doku men*	100, 0	*6*	*Doku men*	12	*Doku men*	50
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*pers en*	100, 0	*100*	*pers en*	100	*pers en*	100
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Laya nan*	*NA*	*NA*	*Laya nan*	1	*Laya nan*	100
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Pers en*	*NA*	*NA*	*Pers en*	100	*Pers en*	100
X.XX.01 .2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	17	orang	NA	orang	NA	orang	*NA*	oran g	*NA*	NA	oran g	17	oran g	100

		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100,0	6	Dokumen	18	Dokumen	75
X.XX.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*43,57*	*Indeks*	*43,71*	*Indeks*	*44,43*	*Indeks*		*Indeks*	0,0	*44,43*	*Indeks*	44	*Indeks*	102
		Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	*15*	*Jenis*	*NA*	*Jenis*	*NA*	*Jenis*	*NA*	*Jenis*	*NA*	*NA*	*Jenis*	15	*Jenis*	100
		Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	3	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	NA	Paket Belanja	3	Paket Belanja	100
		Jumlah Paket Komponen InstalasiJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	100,0	3	Paket	9	Paket	75

X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komputer yang terbeli	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah laptop yang terbeli	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah printer yang terbeli	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah Printer Warna A3 terbeli	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	20	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	NA	Paket Belanja	12	Paket Belanja	60
		Jumlah Mesin Ketik yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	0	unit	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	Paket	7	Paket	7	Paket	3	Paket	42,9	7	Paket	17	Paket	61
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	3	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	NA	Paket Belanja	3	Paket Belanja	100
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	15	Paket	15	Paket	3	Paket	20,0	15	Paket	33	Paket	55
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	4	Bendel	NA	Bendel	NA	Bendel	NA	Bendel	NA	NA	Bendel	80	Bendel	2.000
		Jumlah lembar penggandaan	7200	lembar	NA	lembar	NA	lembar	NA	lembar	NA	NA	lembar	7.200	lembar	100
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	100,0	2	Paket	6	Paket	75

X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	rekening	12	rekening	100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	998	Dokumen	149	Dokumen	248	Dokumen	181	Dokumen	73,0	248	Dokumen	578	Dokumen	58
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi minum dan sneck	250	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	100	orang	40
		Jumlah tamu yang terfasilitasi makan dan minum	40	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	40	orang	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Laporan	NA	Laporan	5	Laporan	3	Laporan	NA	5	Laporan	8	Laporan	40
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat yang terfasilitasi minum dan sneck	250	orang	5	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	5	orang	2
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	4	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	4	kali	100
		Jumlah peserta rapat yang terfasilitasi makan dan minum	100	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	100	orang	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Konsultasi SKPD	96	Laporan	18	Laporan	24	Laporan	9	Laporan	37,5	24	Laporan	51	Laporan	53

X.XX.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*150*	*Unit*	*49*	*Unit*	*17*	*Unit*		*Unit*	0,0	*2*	*Unit*	66	*Unit*	44
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*0*	*Jenis*	*0*	*Jenis*	*0*	*Jenis*	*0*	*Jenis*	0,0	*0*	*Jenis*	0	*Jenis*	0
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100,0	*100*	*Persen*	100	*Persen*	100
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi rapat yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah Meja Kayu Jati yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah Rak Buku yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah Meja Proyektor yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah kursi tunggu yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah rak arsip yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah Backdrop yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	131	Unit	25	Unit	7	Unit	0	Unit	0,0	10	Unit	35	Unit	27

X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah LCD Proyector yang terbeli	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Camera DSLR Canon yang terbeli	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah Tripod yang terbeli	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Memory Card yang terbeli	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Microphone Clip On Wireless yang terbeli	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Genset yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	0	unit	0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	5	Unit	5	Unit	1	Unit	20,0	2	Unit	8	Unit	89
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Atap gedung pelayanan terbangun	0	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	0	Paket	0
		Gedung kantor terbangun	0	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	0	Paket	0
		Tempat parkir terbangun	0	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	0	Paket	0
		Taman terbangun	0	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	0	Paket	0
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,0	1	Unit	3	Unit	75
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terbeli	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0

		Jumlah CCTV yang terbeli	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah Canopy yang terbeli	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	2	Unit	4	Unit	0	Unit	0,0	0	Unit	2	Unit	100
X.XX.01 .2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*240*	*Laporan*	*60*	*Laporan*	*60*	*Laporan*	*60*	*Laporan*	100,0	*60*	*Laporan*	120	*Laporan*	50
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	*0*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	0	*Layanan*	0
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	NA	*NA*	*persen*	100	*persen*	100
X.XX.01 .2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah hari terfasilitasinya pengadministrasian surat menyurat	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	247	hari	100
		Jumlah surat yang dikelola	800	surat	NA	surat	NA	surat	NA	surat	NA	NA	surat	800	surat	100

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	9	Laporan	12	Laporan	1	Lapo ran	8,3	3	Lapo ran	13	Lapo ran	27
X.XX.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar (2 rekening X 12 Bulan)	24	Rekenin g	NA	Rekenin g	NA	Rekening	NA	Reke ning	NA	NA	Reke ning	24	Reke ning	100
		Jumlah rekening telephone yang terbayar (1 rekening X 12 Bulan)	12	Rekenin g	NA	Rekenin g	NA	Rekening	NA	Reke ning	NA	NA	Reke ning	12	Reke ning	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	30	Laporan	36	Laporan	9	Lapo ran	25,0	36	Lapo ran	75	Lapo ran	52
X.XX.01 .2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah hari terfasilitasinya jasa kebersihan	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	247	hari	100
X.XX.01 .2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*820*	*Unit*	*205*	*Unit*	*205*	*Unit*		*Unit*	0,0	*4*	*Unit*	410	*Unit*	50
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*		*pers en*	0,0	*100*	*pers en*	100	*pers en*	100

		Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	*14*	*Layanan*	*0*	*Layanan*	*0*	*Layanan*		*Layanan*	0,0	*0*	*Layanan*	14	*Layanan*	100
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	100,0	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	1	unit	100
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	1	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	paket pemeliharaan	1	paket pemeliharaan	100
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	9	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	9	Unit	100
		Jumlah peket pemeliharaan motor dinas	9	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	paket pemeliharaan	9	paket pemeliharaan	100
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	672	Unit	148	Unit	168	Unit	78	Unit	46,4	155	Unit	381	Unit	57

X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pemeliharaan Mebel	0	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	28	Paket Pemeliharaan	0,0	0	Paket Pemeliharaan	28	Paket Pemeliharaan	100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	0,0	NA	unit	4	unit	100
		Jumlah LCD yang terfasilitasi pemeliharaannya	2	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	2	unit	100
		Jumlah Mesin Ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	4	unit	100
		Jumlah PC yang terfasilitasi pemeliharaannya	5	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	5	unit	100
		Jumlah Printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	8	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	8	unit	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108	Unit	27	Unit	27	Unit	16	Unit	100,0	17	Unit	60	Unit	56
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor (Pengecatan Gedung Kantor)	1	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	NA	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	100
		Jumlah hari keamanan gedung kantor yang terfasilitasi	365	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	365	hari	100

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,0	1	Unit	3	Unit	75
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	4	unit	100
		Jumlah Kipas Angin yang terfasilitasi pemeliharaannya	5	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	5	unit	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	Unit	3	Unit	9	Unit	0	Unit	0,0	3	Unit	6	Unit	17
X.XX.01.2.13	*Penataan Organisasi*	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik*	*8*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	NA	*NA*	*dokumen*	4	*dokumen*	50
		Nilai IKM	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	NA	*82,5*	*Indeks*	80,90	*Indeks*	100
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP/SPIP	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah dokumen SKM	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	2	dokumen	100
		Jumlah dokumen SOP	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,0	**100**	Persen	100	Persen	100
7.01.02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*10*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*3*	*Laporan*	*3*	*Laporan*	100,0	*2*	*Laporan*	5	*Laporan*	50
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah layanan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	1	*Layanan*	100
		Persentase layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah cabang olahraga yang dibina	6	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	NA	cabor	6	cabor	100
		Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan	3	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	kelompok	3	kelompok	100
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10	Laporan	2	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	33,3	2	Laporan	5	Laporan	50
7.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*84*	*Laporan*	*21*	*Laporan*	*21*	*Laporan*	*21*	*Laporan*	100,0	*21*	*Laporan*	63	*Laporan*	75

		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	2	*Layanan*	100
		Persentase Layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan forum kapanewon sehat	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100

		Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB	5	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	20
		Jumlah dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial	2	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah koordinasi pelaksanaan pengadaan bansos	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)	65	KK	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	66	KK	102
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PAH) (PIWK)	26	KK	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	26	KK	100
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan Septic Tank (PIWK)	49	KK	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	49	KK	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	32	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	4	Laporan	50,0	0	Laporan	12	Laporan	38
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	2112	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	2.122	Layanan	100

		Jumlah peserta sosialisasi pengurusan ijin UMK	60	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	60	Orang	100
		Jumlah peserta pembinaan /koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum	30	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	30	orang	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	1	Laporan	7,1	8	Laporan	23	Laporan	41
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,0	**100**	Persen	100	Persen	100
7.01.03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Indeks Koordinasi Pemberdayaan Desa*	*8*	*Indeks*	*8,5*	*Indeks*	*8*	*Indeks*	*8*	*Indeks*	100,0	*8*	*Indeks*	8	*Indeks*	100
		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	2	*Layanan*	100
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen usulan rencana kegiatan (DURP)	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMKal dan RKPKal	6	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	6	Kalurahan	100
		Jumlah Bimtek Perencanaan Pembangunan Kalurahan Terselenggara (PIWK)	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah hari terfasilitasinya Tenaga Pengadministrasian (SMA)	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	247	hari	100
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kesepakatan koordinasi dan monev PNPM MP dan program lanjutannya	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100

		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	8	Dokumen	88,9	10	Dokumen	27	Dokumen	73
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah profil kalurahan dan kapanewon tersusun	7	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	7	dokumen	100
		Jumlah perlombaan kalurahan tingkat kapanewon	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kabupaten	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,0	6	Laporan	24	Laporan	67
7.01.03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*2*	*Indeks*	*2*	*Indeks*	*2*	*Indeks*	*2*	*Indeks*	100,0	*2*	*Indeks*	4	*Indeks*	200

		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	2	*Layanan*	100
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon yang terfasilitasi	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	12	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	12	kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan	50,0	1	Lembaga Kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	50
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	30	Kelompok	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA	NA	Kelompok	30	Kelompok	100

		Pelaku industri kecil/rumah tangga yang meningkat pengetahuannya	56	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	56	Orang	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50,0	2	Laporan	5	Laporan	63
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,0	**100**	Persen	100	Persen	100
7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*10*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	100,0	*2*	*Laporan*	6	*Laporan*	60
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	1	*Layanan*	100
		Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100

7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat Kapanewon	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat kapanewon	40	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	40	orang	100
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,0	2	Laporan	6	Laporan	75
7.01.04.2.02	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*4*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	100,0	*1*	*Laporan*	2	*Laporan*	50
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	1	*Layanan*	100

		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100
		Jumlah Sosialisasi penyakit masyarakat yang terpetakan (PIWK)	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,0	1	Laporan	3	Laporan	75
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum yang terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen		Persen	0,0	**100**	Persen	100	Persen	100

7.01.05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*41,5*	*Indeks*	*41,5*	*Indeks*	*41,5*	*Indeks*	*41,5*	*Indeks*	100,0	*41,5*	*Indeks*	41,50	*Indeks*	100
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	1	*Layanan*	100
		Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*1*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	1	*Persen*	100

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan HUT yang terfasilitasi Pelaksanaannya	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	1	Kegiatan	100
		Jumlah paskib kapanewon yang dibentuk dan dilatih	62	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	62	orang	100

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	Orang	75	Orang	75	Orang	75	Orang	100,0	75	Orang	225	Orang	75
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kesepakatan Koordinasi FORKOMPIMKA	4	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	4	Kesepakatan	100
		Jumlah laporan hasil patroli bersama	4	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	4	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	3	Dokumen	37,5	4	Dokumen	15	Dokumen	47
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,0	**100**	Persen	100	Persen	100

7.01.06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*243*	*Dokumen*	*57*	*Dokumen*	*60*	*Dokumen*	*60*	*Dokumen*	100,0	*59*	*Dokumen*	119	*Dokumen*	49
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*10*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	10	*Layanan*	100
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	NA	*Persen*	NA
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peserta pembinaan penyusunan produk hukum desa	80	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	NA

		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16	Dokumen	2	Dokumen	4	Dokumen	0	Dokumen	0,0	4	Dokumen	6	Dokumen	38
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	2	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah monografi kalurahan tersusun	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah monografi kapanewon tersusun	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	56	Dokumen	14	Dokumen	14	Dokumen	0	Dokumen	0,0	4	Dokumen	18	Dokumen	32
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKal (Siklus Tahunan Kalurahan)	6	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	0
		Jumlah Kalurahan yang terfasilitasi pendampingan pemanfaatan tanah kas kalurahan	6	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	0
		Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset kalurahan yang terlaksana	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	NA	Kali	0

		Jumlah Bimtek Pengelolaan Keuangan Kalurahan Terselenggara (PIWK)	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya Tenaga Pengadministrasian (SMA)	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	NA	hari	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	128	dokumen	29	dokumen	32	dokumen	18	dokumen	56,3	16	dokumen	63	dokumen	49
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah koordinasi dengan Lurah dan Pamong lainnya	2	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	NA	Kali	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,0	1	dokumen	3	dokumen	75
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggarakan pemilihan lurah	0	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	0	Kalurahan	0
		Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6	dokumen	0	dokumen	3	dokumen	0	dokumen	0,0	0	dokumen	0	dokumen	0

7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Bamuskal yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	70	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	70	orang	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,0	1	Dokumen	3	Dokumen	75
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengisian pamong kalurahan dan atau staf pamong kalurahan	4	rekomendasi	NA	rekomendasi	NA	rekomendasi	NA	rekomendasi	NA	NA	rekomendasi	NA	rekomendasi	NA
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	0	dokumen	0,0	1	dokumen	3	dokumen	33
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	31	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	NA
		Jumlah satgas siaga bencana yang meningkat kemampuannya	60	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	NA

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50,0	2	Dokumen	5	Dokumen	63
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	80	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,0	1	Dokumen	3	Dokumen	75
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah koordinasi fasilitasi kerjasama antar desa (lintas daerah dan pihak ketiga)	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0,0	1	dokumen	2	dokumen	50

7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah kesepakatan koordinasi tataruang kalurahan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,0	0	Dokumen	1	Dokumen	25
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,0	**100**	Persen	300	Persen	300
2.22.08.2.09	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*7*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	100,0	*2*	*Laporan*	5	*Laporan*	71
		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	NA	*Layanan*	NA

		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	NA	*Persen*	NA
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan Hari Keistimewaan DIY	1	Even	NA	Even	NA	Even	NA	Even	NA	NA	Even	NA	Even	NA
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,0	1	Laporan	3	Laporan	75
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,0	**100**	persen	300	persen	300
4.01.04.5.01	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*8*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	100,0	*2*	*Dokumen*	6	*Dokumen*	75
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100

		Jumlah Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	2	*Layanan*	100
		Persentase Jumlah Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	150,0	3	Dokumen	8	Dokumen	100
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan	1	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	Laporan	1	Laporan	100
		Rencana Program Kegiatan Keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024	2	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	2	Dokumen	100

Secara garis besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Ngawen tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Semua realisasi/program kegiatan telah memenuhi yang telah ditargetkan.
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
   Kapanewon Ngawen pada tahun 2024 mengampu 8 program yaitu:
   - Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
   - Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan
   - Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
   - Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
   - Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
   - Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
   - Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
   - Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

   Dari 8 program tersebut telah terpenuhi target kinerja keluaran yang telah direncanakan. Pada tahun 2024 capaian fisik Kapanewon Ngawen mencapai 100%.
3. Tidak terdapat Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Realisasi program/ kegiatan yang ditargetkan telah terpenuhi.
4. Faktor penyebab menghambat tercapainya atau terpenuhinya target kinerja Kapanewon Ngawen adalah regulasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang selalu berubah- ubah dan keterbatasan kewenangan Kapanewon.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD adalah regulasi yang sering berubah sehingga menghambat tercapainya target capaian Renstra PD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakkor-faktor yang diperkirakan akan memengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2026 adalah :

- Mengikuti alur perencanaan dan penganggaran sesuai regulasi yang ditetapkan.
- Sinkronisasi pada semua Pihak yang terlibat dalam perencanaan.
- Mengoptimalkan koordinasi internal di Kapanewon Ngawen.
- Memberikan kewenangan Kapanewon Ngawen sesuai Tupoksi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Ngawen

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelayanan Kapanewon digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Ngawen serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan

evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Tugas Pokok dan Fungsi yang harus diemban oleh Pemerintah Kapanewon mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan bidang Sosial. Fungsi dari masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh jawatan melalui program/kegiatan dalam setiap tahun anggaran.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Ngawen berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Kualitas penyelenggaraaan pemerintahan kalurahan meningkat yang diharapkan pada akhir periode renstra mencapai 100%. Adapun formula indikator kinerja utama adalah:

- Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu
- Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu
- Persentase Kegiatan Sosial
- Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP). Indikator capaian kinerja pelayanan Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM),sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pengukuran capaian kienerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Ngawen dapat dilihat pada tabel 2.2.1 sebagi berikut :

TABEL 2.2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM,IKK)	Target Renstra Kapanewon Ngawen				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)										
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	84,66	85,66	97,40	97,44	85,88	86,88	97,40	97,44	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kapanewon Ngawen

Kinerja pelayanan di Kapanewon Ngawen mengacu pada tugas dan fungsi Kapanewon sebagaimana terdapat dalam Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
n. penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Ngawen dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Ngawen sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kapanewon Ngawen secara langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :

1. Terfasilitasinya pelayanan administrasi kependudukan
2. Terfasilitasinya pelayanan administrasi pemerintahan secara umum (Dispensasi Nikah, Penerbitan ijin UMK, Persetujuan SKTM, Surat Keterangan Domisili, surat keterangan ahli waris dll)
3. Terfasilitasinya kegiatan pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
4. Terfasilitasinya kegiatan monitoring Penyaluran BLT.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
6. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraanpemerintah kalurahan.
7. Terfasilitasinya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
8. Terfasilitasinya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan kalurahan.
10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal (lomba jatilan, karawitan, pedalangan dll)
12. Terfasilitasinya pembuatan buku profil desa, buku profil Kapanewon dan monografi Kalurahan

Adapun tingkat kinerja Kapanewon Ngawen yang tidak secara langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya kegiatan pelayanan antara lain :

1. Terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.
3. Terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti : LKj.IP, Laporan Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan keuangan bulanan.
4. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen dan Pengendalian internal PD.

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ngawen maka diperlukan tentang potret Kapanewon Ngawen saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ngawen adalah sebagai berikut :

2.3.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi
   1) Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan masyarakat
   2) Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
   3) Belum efektifnya pengawasan melekat
   4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat
   5) Kewenanagan Kapnewon yang terbatas
b. Permasalahan
   1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan
   2) Kualitas sumber daya manusia belum merata
   3) Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS
   4) Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai
   5) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

2.3.2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi
   1) Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
   2) Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
   3) Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradicional
   4) Belum optimalnya penanganan obyek wisata
   5) Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas
   6) Perdagangan / perniagaan kurang berkembang
   7) Potensi industri kecil terutama kerajinan genteng dan anyaman bambu (caping) dalam pemasaran kurang.
b. Permasalahan
   1) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok
   2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar PD maupun sumber dana
   3) Potensi wisata Gunung Gambar dan Hutan Wonosadi sudah mulai tergarap, namun belum secara optimal
   4) Belum adanya pusat penjualan (*show room*) bagi hasil industri Kapanewon Ngawen
   5) Kapanewon Ngawen secara geografis tidak berada pada simpul jalan sehingga tidak menguntungkan untuk perkembangan sektor perdagangan.

2.3.3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi Saat ini
   1) Beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan karena geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan besar sulit masuk
   2) Air sungai Oya belum dimanfaatkan secara optimal
   3) Masih banyaknya prosentase jalan yang kurang representatif dan jembatan yang belum memadai untuk jalur transportasi. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan bencana (tanah longsor)
b. Permasalahan
   1) Belum adanya prasarana pengolahan air Sungai Oya untuk air minum, atau pembuatan karamba untuk budidaya ikan
   2) Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai
   3) Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko bencana antar daerah perbatasan.

2.3.4. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini
   1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
   2) Masih banyaknya pengangguran

3) Terdapatnya potensi Seni Budaya yang belum difasilitasi dan dikembangkan
4) Terdapatnya potensi Atlet Olah Raga yang belum difasilitasi dan dikembangkan

b. Permasalahan
1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2) Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi
3) Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah
4) Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan
5) Kurangnya Peluang Kerja di Wilayah Kapanewon Ngawen

2.3.5. Bidang Kesehatan

a. Kondisi Saat Ini
1) Masih ada beberapa balita yang mengalami stunting
2) Minimnya fasilitas kebersihan seperti handsoap dan air bersih di tempat umum

b. Permasalahan
1) Banyak masyarakat yang belum tersosialisasi terkait Stunting
2) Minimnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3) Minimnya ketersediaan fasilitas kebersihan seperti *handsoap* dan air bersih di tempat umum.

2.3.6. Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional atau Internasional

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2029 adalah *"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban*". Pada tahapan lima tahun pertama ini pembangunan daerah dititikberatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, kebijakan ekonomi pro rakyat, kemandirian ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal, tata pemerintahan bebas korupsi sampai pelestarian budaya dan lingkungan.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2029 yang meliputi :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2025 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY sebagai berikut:

a. Isu strategis provinsi

- Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
- Pengembangan Wilayah Selatan DIY
- Perkembangan Teknologi Informasi
- Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif
- Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta-Prambanan
- Penguatan Ketahanan Pangan
- Pelestarian dan Pengelolaan Budaya
- Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan
- Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
- Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital

b. Isu strategis daerah
- Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
- Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
- Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
- Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
- Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2025 - 2029, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kapanewon Ngawen adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Peningkatan perekonomian masyarakat
6. Peningkatan kesejahteraan sosial
7. Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
8. Pemulihan Kehidupan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
9. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikan
10. Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana
11. Reformasi Birokrasi

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2025 - 2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Ngawen dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan

prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Ngawen sebagai birokrasi /aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Ngawen. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan ketrampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah "*Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"*
Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Sasaran pembangunan Kapanewon Ngawen berdasarkan prioritas pembangunan yaitu Terwujudnya system penyelenggara pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Ngawen, yang meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Ngawen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan penerangan jalan
2. Adanya potensi sumber daya air
3. Adanya potensi wisata di Gununggambar dan Wonosadi
4. Adanya potensi kerajinan (Batik, Caping, Genteng, Mebel, Wuwung Seng)
5. Adanya potensi Wisata yang belum terekspose
6. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, pertanian dan lain - lain
7. Meningkatnya jumlah alat transportasi
8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
9. Adanya Industri Olahan Makanan
10. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11. Peningkatan fasilitas kesehatan dan kebersihan bagi masyarakat
12. Pemberian bantuan stimulan bagi KK miskin
13. Pemberian edukasi penerapan PHBS bagi masyarakat
14. Pengembangan SDM masyarakat

Faktor Penghambat :

1. Banyaknya pertambahan pengangguran dan rumah tangga miskin karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK)
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian seperti, jagung, kedelai, kacang tanah dll
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
7. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor.

Adapun Prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Ngawen adalah Reformasi Birokrasi dengan sasaran daerah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.

Dari penjabaran visi dan misi, maka tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen adalah:

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon.
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kalurahan.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
6. Peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan.
7. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan.

2.3.7. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kapanewon Ngawen

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra Kapanewon Ngawen 2025-2029, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RT / RW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal.

a. Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Ngawen dengan memetakan

kekuatan dan *kelemahan* yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon.

1) Kondisi Fisik Dasar
   a) Secara topografis termasuk dalam Zona Utara atau Zona Batur Agung, sehingga wilayah Ngawen potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija dan tembakau), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak
   b) Secara geologi berada dekat dengan jalur patahan aktif sesar Opak-Oya yang sangat berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi
   c) Secara geomorfologi wilayah Ngawen 80 % berupa perbukitan dengan tingkat kemiringan antara 15 sampai 60 derajad terletak pada ketinggian antara 300 – 700 M pada permukaan laut, sehingga berpotensi sangat tinggi terhadap bencana erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan.

2) Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
   a) Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda, yaitu menggelembung pada kelompok usia 26-55 th
   b) Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi ke luar daerah
   c) Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani.

3) Kondisi Perekonomian
   a) Meningkatnya pengangguran karena dampak dari pandemi Covid-19 yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK)
   b) Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kapanewon Ngawen, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa
   c) Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil buah-buahan dan tembakau), dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi.

4) Kondisi Pemerintahan
   a) Aparat Kapanewon telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
   b) Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanakannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
   c) Penguatan kelembagaan Kapanewon dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiari.
   d) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kapanewon Ngawen sebagai berikut :

1. Kekuatan
   a) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

b) Jumlah aparatur pemerintah Kapanewon yang cukup memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas
c) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan
d) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan
e) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu yang cukup prospektif
f) Pemberian bantuan bagi KK miskin
g) Kesadaran pentingnya penerapan PHBS bagi masyarakat

2. Kelemahan
a) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, tanah longsor
b) Sebagai wilayah perbatasan, Kapanewon Ngawen kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat
c) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi
d) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi
e) Penguasaan teknologi masih rendah
f) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif
g) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur Kapanewon dan desa belum optimal

b. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kapanewon Ngawen dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tinjauan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Ngawen sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.

1. Peluang
a) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional
b) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
c) Adanya kerjasama antara kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten – kabupaten di sekitarnya
d) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat

2. Tantangan
a) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
b) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan
c) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif
d) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat
e) Membuka peluang kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran
f) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

2.3.8. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2025-2029 maka Kapanewon Ngawen merumuskan Program dan Kegiatan yang akan diselenggaran pada tahun 2025. Adapun Program yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
8) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 memberikan gambaran tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Berdasarkan tabel matrik Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk tahun anggaran 2026. Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat desa sampai ditingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi Penghitungan Anggaran Pemerintah Daerah. Secara umum pada rancangan awal semua kebutuhan yang ada di masyarakat pada sektor perekonomian dan kesehatan belum seluruhnya dapat diakomodir, namun dengan keterbatasan sumber daya yang ada di Kapanewon Ngawen, maka prioritas usulan sesuai kebutuhan adalah peningkatan SDM masyarakat sehingga mampu untuk mendukung terlaksananya peningkatan dan pemulihan perekonomian serta meningkatkan ketahanan pangan. Disamping itu juga prioritas kegiatan pada program pengentasan kemiskinan adalah Jambanisasi yang terakomodir melalui proses Musrenbang.

Adapun beberapa usulan di maksud akan mempengaruhi besaran pagu pada tahap analisis kebutuhan, hal ini yang membuat besaran dana yang lebih besar dari Rancangan Awal RKPD tahun 2026. Hal tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 2.4.1 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pagu, indikator kinerja, target capaian kinerja antara RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan pada Rancangan Renja Kapanewon Ngawen disebabkan karena perubahan kebijakan Tim Anggaran Perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat.

Tabel 2.4.1

Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

PERANGKAT DAERAH : KAPANEWON NGAWEN

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif 2026	Catatan penting
	KAPANEWON NGAWEN				**2.269.128.877,00**	**KAPANEWON NGAWEN**				**2.269.128.877,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.000.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.000.000,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100.000.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100.000.000,00**	
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		***Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		***Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**100 Persen**	**100.000.000,00**	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan*		100.000.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan*		100.000.000,00	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	1 Laporan	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	1 Laporan	100.000.000,00	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**40.000.000,00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**40.000.000,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.000.000,00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.000.000,00**	
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		***Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana***	**100 Persen**	**40.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		***Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana***	**100 Persen**	**40.000.000,00**	
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		*Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*		40.000.000,00	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		*Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*		40.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	3 Dokumen	40.000.000,00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	3 Dokumen	40.000.000,00	

7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.129.128.877,00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.129.128.877,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**2.129.128.877,00**	**KECAMATAN**				**2.129.128.877,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik***	**100 Persen**	**1.429.112.877,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik***	**100 Persen**	**1.429.112.877,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		50.782.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		50.782.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	35.755.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	35.755.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.800.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.800.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.420.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.420.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD*	2 Dokumen	2.095.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD*	2 Dokumen	2.095.000,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	2 Dokumen	1.630.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	2 Dokumen	1.630.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	17 Laporan	6.405.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	17 Laporan	6.405.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	1.677.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	1.677.000,00	

							Kel/Desa				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		1.169.823.877,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		1.169.823.877,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	238 Orang/bulan	1.160.178.877,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	238 Orang/bulan	1.160.178.877,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	2.085.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	2.085.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	13 Laporan	7.560.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	13 Laporan	7.560.000,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*		2.870.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*		2.870.000,00	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	24 Laporan	2.870.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	24 Laporan	2.870.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*		6.618.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*		6.618.000,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	6 Dokumen	6.618.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	6 Dokumen	6.618.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Umum*		59.755.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Umum*		59.755.900,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	1.922.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	1.922.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	27.368.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	27.368.000,00	

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	3.883.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	3.883.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	4.752.900,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	4.752.900,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	1.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	1.200.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	6 Laporan	2.100.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	6 Laporan	2.100.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	18.530.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	18.530.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		52.308.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		52.308.100,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	1.650.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	1.650.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	49 Laporan	20.659.100,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	49 Laporan	20.659.100,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	29.999.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	29.999.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		86.955.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		86.955.000,00	

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	155 Unit	43.900.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	155 Unit	43.900.000,00	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	20 Unit	1.600.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	20 Unit	1.600.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	23 Unit	7.800.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	23 Unit	7.800.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	31.855.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	31.855.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	1.800.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	1.800.000,00	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana***	**100 Persen**	**7.090.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana***	**100 Persen**	**7.090.000,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		7.090.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		7.090.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	7.090.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	7.090.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi***	**100 Persen**	**199.203.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi***	**100 Persen**	**199.203.000,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		79.540.500,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		79.540.500,00	
7.01.03.2.	Sinkronisasi Program Kerja dan	Kab.	*Jumlah Dokumen*	10	71.450.500,00	Sinkronisasi Program Kerja	Kab.	*Jumlah Dokumen*	10 Dokumen	71.450.500,00	

01.0002	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	Dokumen		dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	6 Laporan	8.090.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	6 Laporan	8.090.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Laporan	112.020.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Laporan	112.020.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	112.020.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	112.020.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan*		4.710.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan*		4.710.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	4.710.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	4.710.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*		2.932.500,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*		2.932.500,00	
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	20 Keluarga	2.932.500,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	20 Keluarga	2.932.500,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		***Persentase lembaga yang dibina***	**100 Persen**	**336.035.500,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		***Persentase lembaga yang dibina***	**100 Persen**	**336.035.500,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		336.035.500,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		336.035.500,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	8 Laporan	336.035.500,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	8 Laporan	336.035.500,00	

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		***Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100 Persen**	**111.716.500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		***Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100 Persen**	**111.716.500,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*		111.716.500,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*		111.716.500,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	75 Orang	99.566.500,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	75 Orang	99.566.500,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Dokumen	12.150.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Dokumen	12.150.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	**100 Persen**	**45.971.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	**100 Persen**	**45.971.000,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		45.971.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		45.971.000,00	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	12 Dokumen	3.675.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	12 Dokumen	3.675.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata*	14 Dokumen	1.630.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen,	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata*	14 Dokumen	1.630.000,00	

		Kel/Desa	*Pemerintahan Desa*				Semua Kel/Desa	*Pemerintahan Desa*		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	18 Dokumen	25.855.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	18 Dokumen	25.855.000,00
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*	1 Dokumen	2.401.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*	1 Dokumen	2.401.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	3 Dokumen	6.290.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	3 Dokumen	6.290.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	1 Dokumen	2.960.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	1 Dokumen	2.960.000,00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	2 Dokumen	1.120.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	2 Dokumen	1.120.000,00
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	1 Dokumen	2.040.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	1 Dokumen	2.040.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah ditingkat Kapanewon dengan kegiatan memproses keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah Kapanewon. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan, kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan dengan benar menyampaikan ide – ide maupun anggaran dasar forum musrenbang dan menilai bagaimana suatu program pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Kapanewon Ngawen 2025 - 2029, yang merupakan hasil analisis dari isu – isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk menganalisa isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal bertujuan untk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Ngawen dengan menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon. Kemudian dalam analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kapanewon Ngawen dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tujuan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Ngawen sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Klaten.

Hasil Musrenbang Kapanewon Ngawen untuk tahun 2025 telah sesuai dan dapat mengakomodir sasaran dan program prioritas yang menjadi isu strategis Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan sektor wisata, peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan mutu pendidikan. Adapun salah satu program prioritas pengentasan kemiskinan, melalui tahapan Musrenbang.

Tabel 2.5.1
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Harga	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6 x 8)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - Sosialisasi Calon Pengantin (Catin)	Kalurahan Tancep,Ngawen	2	Angkatan	3.150.000	6.300.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul	1	Kali	4.460.000	4.460.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Kalurahan Watusigar, Ngawen, Gunungkidul	1	Kali	4.460.000	4.460.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - (Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin)	Kalurahan Tancep,Ngawen	3	KK	4.850.000	14.550.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - (Bantuan Sosial PAH)	Kalurahan Tancep,Ngawen	2	KK	9.462.000	18.924.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - (Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin)	Jurangjero,Ngawen, Gunungkidul	5	KK	4.850.000	24.250.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - (Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin)	Watusigar, Ngawen, Gunungkidul	2	KK	7.734.500	15.469.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	(PIWK) - (Pelatihan Perencanaan Pembangunan di Desa)	Kampung Kidul, Kampung, Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Kali	18.600.000	18.600.000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Pada Tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam Isu Strategis yang dikaitkan dengan 8 (Delapan) Isu Strategis Nasional, 7 (tujuh) Isu Strategis Provinsi dan 6 (enam) Isu Strategis Daerah yang dikaitan dengan prioritas pembangunan masyarakat yang adil makmur, lestari dan beradap yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen pada Tahun 2026 belum menganggarkan kegiatan yang menunjang kebijakan tersebut.

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul yang terkait dengan tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen sesuai dengan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

A. Tugas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Panewu Ngawen adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarkat kalurahan.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;

l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
n. penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
p. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Ngawen

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dimana tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Dimana indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, indikasi tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah:

"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan Sasaran PD dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut

Tabel 3.2.1
Tujuan Kapanewon Ngawen

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030
1	2	3	4	5
	Tujuan :			
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,44	97,62

Tabel 3.2.2
Sasaran Kapanewon Ngawen

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2026
1	2	3	4
	Sasaran :		
1.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4.	Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,22

Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Ngawen Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Targrt Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4
Tujuan			
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,44
Sasaran			
1.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Targrt Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4
4.	Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,22

Tujuan dari pada penyusunan Renja Kapanewon Ngawen Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON NGAWEN

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a. Tema, Prioritas, dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Tema pembangunan Tahun 2026

Sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
Program Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
					2.22.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
					2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	
					2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	
					2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100.000.000,00	Kapanewon Ngawen
					4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN		
						PEMERINTAHAN		
					4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
					4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000,00	
Program Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000,00	

					4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000,00	Kapanewon Ngawen
					7	UNSUR KEWILAYAHAN		
					7.01	KECAMATAN		
					7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.429.112.877,00	
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.782.000,00	
					7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.755.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.420.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.095.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.630.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.405.000,00	Kapanewon Ngawen

					7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.677.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.169.823.877,00	
					7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.160.178.877,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.085.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.560.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.870.000,00	
					7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.870.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.618.000,00	
					7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.618.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.755.900,00	
					7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.922.000,00	Kapanewon Ngawen

					7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.368.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.883.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.752.900,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.530.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.308.100,00	
					7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.659.100,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.999.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.955.000,00	

					7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.900.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.600.000,00	
					7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.855.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000,00	Kapanewon Ngawen
Program Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Pelayanan umum yang berkualitas	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	100	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.090.000,00	
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.090.000,00	
					7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.090.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.203.000,00	
Program Pamong Nglayani	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran	Dokumen perencanaan yang	Persentase Penyusunan RKPKal	100	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.540.500,00	

dan Ngayomi	Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	berkualitas	Benar dan Tepat Waktu					
					7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	71.450.500,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.090.000,00	Kapanewon Ngawen
Program Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	112.020.000,00	
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112.020.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.710.000,00	
					7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.710.000,00	Kapanewon Ngawen
Program Alam Lestari	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif	*Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	100	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2.932.500,00	

					7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2.932.500,00	
					7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	336.035.500,00	
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	336.035.500,00	
					7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	336.035.500,00	
					7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.716.500,00	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.716.500,00	
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.566.500,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.150.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.971.000,00	

Program Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.971.000,00	
					7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.675.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.630.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.855.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.401.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.290.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.960.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.120.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan, Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.040.000,00	Kapanewon Ngawen
					JUMLAH		2.269.128.877,00	

Pemerintah Kapanewon Ngawen sebagai birokrasi/aparat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Ngawen Tahun 2025 mengacu pada RKPD Tahun 2025. Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kapanewon Ngawen didukung Aparatur Perangkat Daerah/Aparat Penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat diperlukan ketersediaan pembiayaan yang memadai. Adapun rencana Pembiayaan bagi Aparatur Perangkat Daerah Kapanewon Ngawen Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.160.178.877,00.

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Ngawen Tahun 2025 terdiri dari 8 program, 17 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Semua kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, dan Jawatan Umum sifat penyebaran lokasinya adalah menyeluruh ke semua kalurahan di wilayah Kapanewon Ngawen. Terkecuali program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, lokasi kegiatan ini di kantor Kapanewon yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kapanewon Ngawen.

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan di Kapanewon Ngawen Tahun 2025, total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah Rp2.269.128.877,00,- berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

4.3 Usulan Program dan Kegiatan pada Rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Ngawen Tahun 2025 sudah sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dari usulan program dan kegiatan Kapanewon berasumsi kebutuhan selama Tahun Anggaran untuk kebutuhan Kapanewon Ngawen, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 memberikan gambaran tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

4.4 Rencana program dan kegiatan Kapanewon Ngawen

Rencana program dan kegiatan Kapanewon Ngawen Tahun 2025 untuk keseluruhan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.4.1 berikut ini :

Tabel 4.4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

OPD : Kapanewon Ngawen

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KAPANEWON NGAWEN				**2.269.128.877,00**				**2.969.107.026,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.000.000,00**				**150.000.000,00**
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100.000.000,00**				**150.000.000,00**
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***		**100 Persen**	**100.000.000,00**			**-**	**150.000.000,00**
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan*			100.000.000,00			-	150.000.000,00
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			150.000.000,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**40.000.000,00**				**40.000.000,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.000.000,00**				**40.000.000,00**
4.01.04	**PROGRAM**	***Persentase Program***		**100 Persen**	**40.000.000,00**			**-**	**40.000.000,00**

	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	***Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana***							
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*			40.000.000,00			-	40.000.000,00
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			40.000.000,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.129.128.877,00**				**2.779.107.026,00**
7.01	**KECAMATAN**				**2.129.128.877,00**				**2.779.107.026,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik***		**100 Persen**	**1.429.112.877,00**			**-**	**2.543.417.026,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			50.782.000,00			-	47.140.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	35.755.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			28.720.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.250.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil*	Kab. Gunungkidul, Ngawen,	1 Dokumen	1.420.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			900.000,00

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kel/Desa						
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.095.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.800.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.630.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.170.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	17 Laporan	6.405.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.900.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.677.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.400.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			1.169.823.877,00			-	1.786.020.026,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	238 Orang/bulan	1.160.178.877,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.777.520.026,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.085.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000,00

7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	13 Laporan	7.560.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.500.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*			2.870.000,00			-	0,00
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	24 Laporan	2.870.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*			6.618.000,00			-	6.500.000,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6.618.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.500.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Umum*			59.755.900,00			-	139.095.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	3 Paket	1.922.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.500.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	4 Paket	27.368.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			83.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	3 Paket	3.883.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			28.895.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan*	Kab. Gunungkidul,	12 Paket	4.752.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11.500.000,00

	Penggandaan	*Penggandaan yang Disediakan*	Ngawen, Semua Kel/Desa						
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.600.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	6 Laporan	2.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.500.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	12 Laporan	18.530.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.100.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			52.308.100,00			-	74.385.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			26.630.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	49 Laporan	20.659.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			17.400.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Laporan	29.999.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.355.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*			86.955.000,00			-	125.210.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang*	Kab. Gunungkidul, Ngawen,	155 Unit	43.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			37.430.000,00

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Semua Kel/Desa						
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	20 Unit	1.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	23 Unit	7.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			21.150.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Unit	31.855.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			60.880.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	6 Unit	1.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.750.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana***		**100 Persen**	**7.090.000,00**			**-**	**14.300.000,00**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*			7.090.000,00			-	14.300.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	7.090.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			14.300.000,00

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi***		**100 Persen**	**199.203.000,00**			**-**	**55.310.000,00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*			79.540.500,00			-	46.710.000,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	71.450.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			38.010.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	6 Laporan	8.090.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.700.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan*			112.020.000,00			-	0,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Pokmas / Ormas	112.020.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan*			4.710.000,00			-	8.600.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.710.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.600.000,00

7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*			2.932.500,00			-	0,00
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	20 Keluarga	2.932.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase lembaga yang dibina***		**100 Persen**	**336.035.500,00**			**-**	**3.500.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*			336.035.500,00			-	3.500.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	8 Laporan	336.035.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***		**100 Persen**	**111.716.500,00**			**-**	**96.600.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*			111.716.500,00			-	96.600.000,00

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	75 Orang	99.566.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			91.500.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	12.150.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.100.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***		**100 Persen**	**45.971.000,00**			**-**	**65.980.000,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*			45.971.000,00			-	65.980.000,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.300.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	1.630.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.200.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam*	Kab. Gunungkidul,	18 Dokumen	25.855.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.880.000,00

	Pendayagunaan Aset Desa	*rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Ngawen, Semua Kel/Desa						
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.401.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.800.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	6.290.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.600.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.960.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.200.000,00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.120.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.900.000,00
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.040.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.100.000,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Ngawen Tahun 2026 disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan. Rencana Kerja Kapanewon Ngawen disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, Rencana Kerja Kapanewon Ngawen yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada bab penutup Rancangan Awal Rencana Kerja Kapanewon Ngawen Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting
   Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Adapun pelaksanaan rencana kerja akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan mempertimbangkan sekala prioritas. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing Jawatan. Dengan begitu kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatam dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengemdalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Ngawen sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Anggaran tahun 2026.

Wonosari,

KAPANEWON NGAWEN,

ttd

SUGITO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON NGAWEN
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam regulasi tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun ditingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD. Renja PD disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), artinya, Renja PD disusun berdasarkan pada RKPD.

Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota juga berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan. Program/kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi Kapanewon, yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam Renja PD mengandung strategi yang menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Keterkaitan antara Renja Kapanewon Ngawen 2026 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja Kapanewon Ngawen sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RKPD. Renja Kapanewon Ngawen 2026 memuat arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu satu tahunan. RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

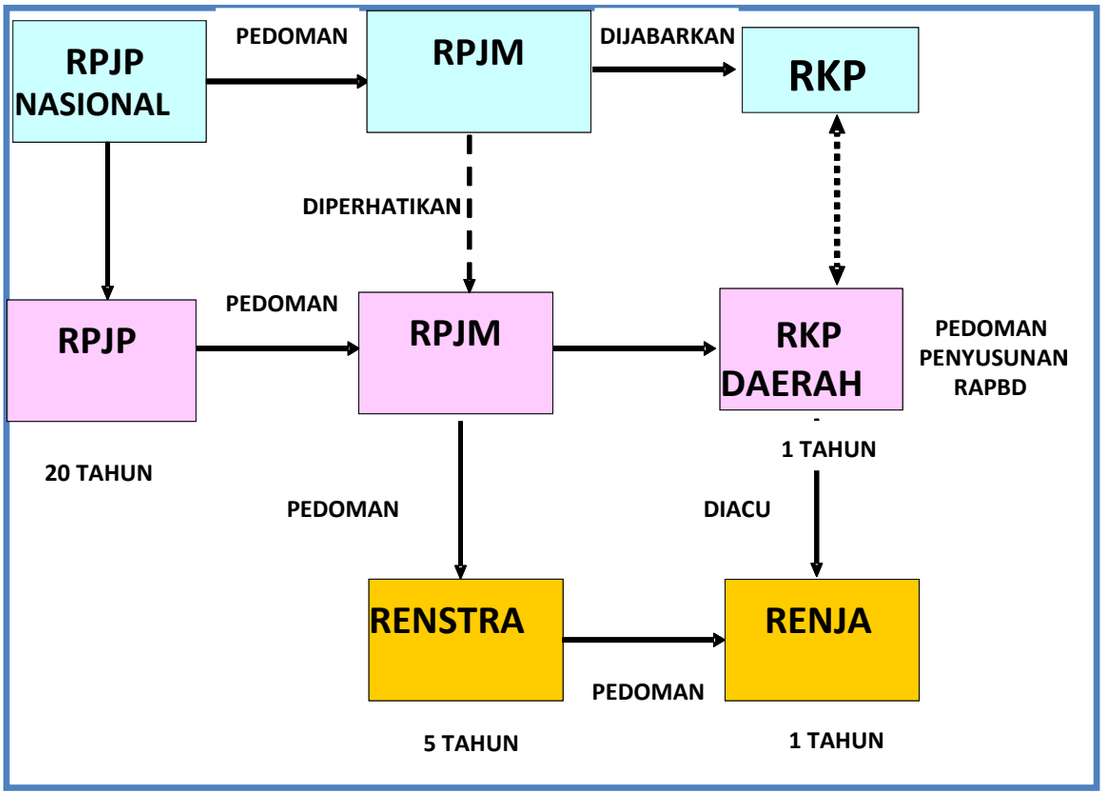

Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja SKPD serta dokumen perencanaan lainnya

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja pada tahun 2026 ini didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
   b. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kapanewon Ngawen.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen Tahun 2026 adalah:
   a. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kapanewon Ngawen baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
   b. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
   c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kapanewon Ngawen.
   d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
   e. Menjadi dasar Penyusunan RKA Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kapanewon Ngawen Tahun 2026 disusun dengan sistem penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON NGAWEN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Ngawen dan Capaian Renja Kapanewon Ngawen
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Ngawen
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Ngawen
2.4 Reviu terhadap Rancangan RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON NGAWEN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Ngawen

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON NGAWEN

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
4.2 Uraian garis besar rekapitulasi program kegiatan
4.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kapanewon Ngawen
4.4 Rencana program dan kegiatan Kapanewon Ngawen

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA KAPANEWON NGAWEN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Kapanewon Ngawen dan Capaian Rancangan Renja Kapanewon Ngawen

Evaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul lebih terarah, terfokus serta untuk mencapai target sasaran tahun 2026.

Realisasi program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Pada Perangkat Daerah Kapanewon Ngawen dalam pelaksanaan Renja 2025 program dan kegiatan pada semester I (Bulan Juni) sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Kapanewon Ngawen Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.642.277.946	877.038.884	53,40
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*48.677.000*	*24.751.858*	50,85
	I. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.610.000	14.374.954	44,08
	II. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.310.000	1.309.980	100,00
	III. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.210.000	0	0,00
	IV. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.095.000	2.094.960	100,00
	V. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.420.000	0	0,00
	VI. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.405.000	4.134.860	64,56
	VII. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.627.000	2.837.104	78,22
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*1.232.212.598*	*637.509.521*	51,74
	I. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.222.557.598	631.084.721	51,62
	II. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.085.000	2.084.980	100,00
	III. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.570.000	4.339.820	57,33
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*7.855.800*	*4.259.697*	54,22
	I. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.855.800	4.259.697	54,22
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*63.695.400*	*34.981.465*	54,92
	I. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.932.000	1.306.900	67,64

			II. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.268.000	12.391.896	67,83
			III. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.419.000	11.645.000	44,08
			IV. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.476.400	3.238.000	72,33
			V. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	600.000	50,00
			VI. Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000	1.049.895	50,00
			VII. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.300.000	4.749.774	51,07
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*74.838.000*	*73.726.755*	98,52
			I. Pengadaan Mebel	52.062.000	51.501.780	98,92
			II. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.776.000	22.224.975	97,58
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*46.594.100*	*20.494.215*	43,98
			I. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.035.000	11.354.965	40,50
			II. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.559.100	9.139.250	49,24
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*168.405.048*	*81.315.373*	48,29
			I. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.900.000	21.000.000	47,84
			II. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	3.600.000	52,17
			III. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.705.048	55.815.373	47,83
			IV. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000	900.000	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.245.000	3.399.961	23,87
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		*8.255.000*	*0*	0,00
			I. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.255.000	0	0,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		*5.990.000*	*3.399.961*	56,76
			I. Peningkatan Efektifitas	5.990.000	3.399.961	56,76

			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			78.485.100	51.852.710	66,07
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*67.453.000*	*47.928.000*	71,05
			I. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	59.363.000	39.838.000	67,11
			II. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.090.000	8.090.000	100,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*11.032.100*	*3.924.710*	35,58
			I. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.432.000	3.924.710	52,81
			II. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.600.100	0	0,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			13.480.000	13.479.961	100,00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*13.480.000*	*13.479.961*	100,00
			I. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.940.000	1.939.961	100,00
			II. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.540.000	11.540.000	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			93.661.500	6.124.895	6,54
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		*93.661.500*	*6.124.895*	6,54
			I. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	82.911.500	0	0,00
			II. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.750.000	6.124.895	56,98

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			63.686.000	35.165.522	55,22
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*63.686.000*	*35.165.522*	55,22
			I. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.105.000	1.964.967	63,28
			II. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.050.000	524.984	50,00
			III. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.110.000	19.849.807	49,49
			IV. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.901.000	1.900.953	100,00
			V. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.820.000	2.819.922	100,00
			VI. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.030.000	1.029.980	100,00
			VII. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.750.000	4.894.961	72,52
			VIII. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.915.000	2.179.948	55,68
			IX. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.890.000	0	0,00
			X. Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.115.000	0	0,00
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			30.000.000	0	0,00
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		*30.000.000*	*0*	0,00
			I. Gelar Budaya Jogja	30.000.000	0	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			32.900.000	16.912.000	51,40
		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		*32.900.000*	*16.912.000*	51,40
			I. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	32.900.000	16.912.000	51,40
TOTAL				1.968.735.546	1.003.973.933	51,00

Secara umum realisasi capaian program dan kegiatan Kapanewon Ngawen telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Realisasi Keuangan sebagian besar telah tercapai, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai nilai 100 persen dikarenakan pembeliaan menggunakan Mbiz yaitu pembelian belanja Modal seperti Meja, Kursi, Gorden dan LCD.
b. Realisasi Fisik telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

TABEL 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama PD : Kapanewon Ngawen

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024 (Tahun lalu/ n-2)					Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan/ n-1)		
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja PD Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi Capaian Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,0	**100**	Persen	100	Persen	100
X.XX.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Indeks perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*8,29*	*Indeks*	*8,14*	*Indeks*	*8,14*	*Indeks*	*8,14*	*Indeks*	100,0	*8,29*	*Indeks*	8	*Indeks*	98
		Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100

		Jumlah Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	*NA*	*Dokumen*	NA	*NA*	*Dokumen*	26	*Dokumen*	100
		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100,0	*100*	*Persen*	100	*Persen*	100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	100,0	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah dokumen Renja perubahan	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah dokumen draft Renstra	0	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	0	dokumen	0
		Jumlah dokumen Renstra	0	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	0	dokumen	0
		Jumlah hari terfasilitasinya Petugas Informasi Komputer (SMA)	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	247	hari	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	3	dokumen	150,0	3	dokumen	8	dokumen	80
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100

		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,0	1	Dokumen	3	Dokumen	75
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,0	1	dokumen	3	dokumen	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah dokumen ROPK	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,0	2	Dokumen	6	Dokumen	75
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100

		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,0	1	Dokumen	3	Dokumen	75
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	Laporan	13	Laporan	17	Laporan	13	Laporan	76,5	17	Laporan	43	Laporan	63
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah dokumen e monev	4	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	4	dokumen	100
		Jumlah Laporan Teppra	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	12	dokumen	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68	Laporan	23	Laporan	32	Laporan	21	Laporan	65,6	29	Laporan	73	Laporan	107
X.XX.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*84*	*Indeks*	*84*	*Indeks*	*84*	*Indeks*		*Indeks*	0,0	*84*	*Indeks*	84	*Indeks*	100
		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100

		Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*4*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	4	*Layanan*	100
		Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100,0	*100*	*Persen*	100	*Persen*	100
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	bulan	*NA*	NA	bulan	14	bulan	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	952	orang/bulan	210	orang/bulan	238	orang/bulan	158	orang/bulan	66,4	238	orang/bulan	606	orang/bulan	64
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,0	1	Laporan	3	Laporan	75
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*	NA	dokumen	12	dokumen	100
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	*NA*	NA	dokumen	1	dokumen	100

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	52	Laporan	10	Laporan	13	Laporan	10	Laporan	76,9	13	Laporan	33	Laporan	63
X.XX.01 .2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*24*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	*6*	*Dokumen*	100,0	*6*	*Dokumen*	12	*Dokumen*	50
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*NA*	*Layanan*	1	*Layanan*	100
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
X.XX.01 .2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	17	orang	NA	orang	NA	orang	*NA*	orang	*NA*	NA	orang	17	orang	100

		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100,0	6	Dokumen	18	Dokumen	75
X.XX.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*43,57*	*Indeks*	*43,71*	*Indeks*	*44,43*	*Indeks*		*Indeks*	0,0	*44,43*	*Indeks*	44	*Indeks*	102
		Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	*15*	*Jenis*	*NA*	*Jenis*	*NA*	*Jenis*	*NA*	*Jenis*	*NA*	*NA*	*Jenis*	15	*Jenis*	100
		Persentase Administrasi Umum kapanewon terfasilitasi	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	3	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	NA	Paket Belanja	3	Paket Belanja	100
		Jumlah Paket Komponen InstalasiJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	3	Paket	3	Paket	3	Paket	100,0	3	Paket	9	Paket	75

X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komputer yang terbeli	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah laptop yang terbeli	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah printer yang terbeli	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah Printer Warna A3 terbeli	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	20	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	NA	Paket Belanja	12	Paket Belanja	60
		Jumlah Mesin Ketik yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	0	unit	0
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	Paket	7	Paket	7	Paket	3	Paket	42,9	7	Paket	17	Paket	61
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli	3	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	Paket Belanja	NA	NA	Paket Belanja	3	Paket Belanja	100
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	15	Paket	15	Paket	3	Paket	20,0	15	Paket	33	Paket	55
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	4	Bendel	NA	Bendel	NA	Bendel	NA	Bendel	NA	NA	Bendel	80	Bendel	2.000
		Jumlah lembar penggandaan	7200	lembar	NA	lembar	NA	lembar	NA	lembar	NA	NA	lembar	7.200	lembar	100
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	100,0	2	Paket	6	Paket	75

X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	rekening	12	rekening	100
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	998	Dokumen	149	Dokumen	248	Dokumen	181	Dokumen	73,0	248	Dokumen	578	Dokumen	58
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi minum dan sneck	250	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	100	orang	40
		Jumlah tamu yang terfasilitasi makan dan minum	40	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	40	orang	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Laporan	NA	Laporan	5	Laporan	3	Laporan	NA	5	Laporan	8	Laporan	40
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat yang terfasilitasi minum dan sneck	250	orang	5	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	5	orang	2
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	4	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	4	kali	100
		Jumlah peserta rapat yang terfasilitasi makan dan minum	100	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	100	orang	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan Konsultasi SKPD	96	Laporan	18	Laporan	24	Laporan	9	Laporan	37,5	24	Laporan	51	Laporan	53

X.XX.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*150*	*Unit*	*49*	*Unit*	*17*	*Unit*		*Unit*	0,0	*2*	*Unit*	66	*Unit*	44
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*0*	*Jenis*	*0*	*Jenis*	*0*	*Jenis*	*0*	*Jenis*	0,0	*0*	*Jenis*	0	*Jenis*	0
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	*100*	*Persen*	100,0	*100*	*Persen*	100	*Persen*	100
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi rapat yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah Meja Kayu Jati yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah Rak Buku yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah Meja Proyektor yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah kursi tunggu yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah rak arsip yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah Backdrop yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	buah	0	buah	0
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	131	Unit	25	Unit	7	Unit	0	Unit	0,0	10	Unit	35	Unit	27

X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah LCD Proyector yang terbeli	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Camera DSLR Canon yang terbeli	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah Tripod yang terbeli	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Memory Card yang terbeli	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Microphone Clip On Wireless yang terbeli	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Genset yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	0	unit	0
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	5	Unit	5	Unit	1	Unit	20,0	2	Unit	8	Unit	89
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Atap gedung pelayanan terbangun	0	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	0	Paket	0
		Gedung kantor terbangun	0	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	0	Paket	0
		Tempat parkir terbangun	0	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	0	Paket	0
		Taman terbangun	0	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	0	Paket	0
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,0	1	Unit	3	Unit	75
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terbeli	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0

		Jumlah CCTV yang terbeli	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	1	Unit	100
		Jumlah Canopy yang terbeli	0	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	0	Unit	0
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	2	Unit	4	Unit	0	Unit	0,0	0	Unit	2	Unit	100
X.XX.01 .2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*240*	*Laporan*	*60*	*Laporan*	*60*	*Laporan*	*60*	*Laporan*	100,0	*60*	*Laporan*	120	*Laporan*	50
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	*0*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	0	*Layanan*	0
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	*NA*	*persen*	NA	*NA*	*persen*	100	*persen*	100
X.XX.01 .2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah hari terfasilitasinya pengadministrasian surat menyurat	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	247	hari	100
		Jumlah surat yang dikelola	800	surat	NA	surat	NA	surat	NA	surat	NA	NA	surat	800	surat	100

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	9	Laporan	12	Laporan	1	Laporan	8,3	3	Laporan	13	Laporan	27
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar (2 rekening X 12 Bulan)	24	Rekening	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	NA	Rekening	24	Rekening	100
		Jumlah rekening telephone yang terbayar (1 rekening X 12 Bulan)	12	Rekening	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	Rekening	NA	NA	Rekening	12	Rekening	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	30	Laporan	36	Laporan	9	Laporan	25,0	36	Laporan	75	Laporan	52
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah hari terfasilitasinya jasa kebersihan	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	247	hari	100
X.XX.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*820*	*Unit*	*205*	*Unit*	*205*	*Unit*		*Unit*	0,0	*4*	*Unit*	410	*Unit*	50
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*		*persen*	0,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100

		Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	*14*	*Layanan*	*0*	*Layanan*	*0*	*Layanan*		*Layanan*	0,0	*0*	*Layanan*	14	*Layanan*	100
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	100,0	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	1	unit	100
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	1	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	paket pemeliharaan	1	paket pemeliharaan	100
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	9	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	9	Unit	100
		Jumlah peket pemeliharaan motor dinas	9	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	paket pemeliharaan	9	paket pemeliharaan	100
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	672	Unit	148	Unit	168	Unit	78	Unit	46,4	155	Unit	381	Unit	57

X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pemeliharaan Mebel	0	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	0	Paket Pemeliharaan	28	Paket Pemeliharaan	0,0	0	Paket Pemeliharaan	28	Paket Pemeliharaan	100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	0,0	NA	unit	4	unit	100
		Jumlah LCD yang terfasilitasi pemeliharaannya	2	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	2	unit	100
		Jumlah Mesin Ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	4	unit	100
		Jumlah PC yang terfasilitasi pemeliharaannya	5	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	5	unit	100
		Jumlah Printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	8	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	8	unit	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108	Unit	27	Unit	27	Unit	16	Unit	100,0	17	Unit	60	Unit	56
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor (Pengecatan Gedung Kantor)	1	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	Paket Pemeliharaan	NA	NA	Paket Pemeliharaan	1	Paket Pemeliharaan	100
		Jumlah hari keamanan gedung kantor yang terfasilitasi	365	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	365	hari	100

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,0	1	Unit	3	Unit	75
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	4	unit	100
		Jumlah Kipas Angin yang terfasilitasi pemeliharaannya	5	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	unit	5	unit	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	Unit	3	Unit	9	Unit	0	Unit	0,0	3	Unit	6	Unit	17
X.XX.01.2.13	*Penataan Organisasi*	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik*	*8*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	*NA*	*dokumen*	NA	*NA*	*dokumen*	4	*dokumen*	50
		Nilai IKM	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	*NA*	*Indeks*	NA	*82,5*	*Indeks*	80,90	*Indeks*	100
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP/SPIP	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100
		Jumlah dokumen SKM	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	2	dokumen	100
		Jumlah dokumen SOP	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	1	dokumen	100

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,0	**100**	Persen	100	Persen	100
7.01.02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*10*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*3*	*Laporan*	*3*	*Laporan*	100,0	*2*	*Laporan*	5	*Laporan*	50
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah layanan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	1	*Layanan*	100
		Persentase layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100

7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah cabang olahraga yang dibina	6	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	NA	cabor	6	cabor	100
		Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan	3	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	kelompok	3	kelompok	100
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10	Laporan	2	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	33,3	2	Laporan	5	Laporan	50
7.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*84*	*Laporan*	*21*	*Laporan*	*21*	*Laporan*	*21*	*Laporan*	100,0	*21*	*Laporan*	63	*Laporan*	75

		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	2	*Layanan*	100
		Persentase Layanan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan forum kapanewon sehat	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100

		Jumlah kesepakatan penanganan PMKS	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB	5	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	20
		Jumlah dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial	2	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	2	Dokumen	100
		Jumlah koordinasi pelaksanaan pengadaan bansos	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)	65	KK	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	66	KK	102
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan Penampungan Air Hujan (PAH) (PIWK)	26	KK	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	26	KK	100
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan Septic Tank (PIWK)	49	KK	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	49	KK	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	32	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	4	Laporan	50,0	0	Laporan	12	Laporan	38
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	2112	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	2.122	Layanan	100

		Jumlah peserta sosialisasi pengurusan ijin UMK	60	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	60	Orang	100
		Jumlah peserta pembinaan /koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum	30	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	30	orang	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56	Laporan	14	Laporan	14	Laporan	1	Laporan	7,1	8	Laporan	23	Laporan	41
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,0	**100**	Persen	100	Persen	100
7.01.03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Indeks Koordinasi Pemberdayaan Desa*	*8*	*Indeks*	*8,5*	*Indeks*	*8*	*Indeks*	*8*	*Indeks*	100,0	*8*	*Indeks*	8	*Indeks*	100
		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	2	*Layanan*	100
		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen usulan rencana kegiatan (DURP)	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	1	Dokumen	100
		Jumlah Kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMKal dan RKPKal	6	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	6	Kalurahan	100
		Jumlah Bimtek Perencanaan Pembangunan Kalurahan Terselenggara (PIWK)	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah hari terfasilitasinya Tenaga Pengadministrasian (SMA)	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	247	hari	100
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kesepakatan koordinasi dan monev PNPM MP dan program lanjutannya	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	1	kesepakatan	100

		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	8	Dokumen	88,9	10	Dokumen	27	Dokumen	73
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah profil kalurahan dan kapanewon tersusun	7	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	7	dokumen	100
		Jumlah perlombaan kalurahan tingkat kapanewon	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kabupaten	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	100,0	6	Laporan	24	Laporan	67
7.01.03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*2*	*Indeks*	*2*	*Indeks*	*2*	*Indeks*	*2*	*Indeks*	100,0	*2*	*Indeks*	4	*Indeks*	200

		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	2	*Layanan*	100
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon yang terfasilitasi	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan rakor TP PKK	12	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	kesepakatan	12	kesepakatan	100
		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	1	Kesepakatan	100
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	2	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan	50,0	1	Lembaga Kemasyarakatan	4	Lembaga Kemasyarakatan	50
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan	30	Kelompok	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA	NA	Kelompok	30	Kelompok	100

		Pelaku industri kecil/rumah tangga yang meningkat pengetahuannya	56	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	56	Orang	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50,0	2	Laporan	5	Laporan	63
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,0	**100**	Persen	100	Persen	100
7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*10*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	100,0	*2*	*Laporan*	6	*Laporan*	60
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	1	*Layanan*	100
		Persentase Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terfasilitasi	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100

7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat Kapanewon	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	1	Kali	100
		Jumlah pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat kapanewon	40	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	40	orang	100
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,0	2	Laporan	6	Laporan	75
7.01.04.2.02	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*4*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	100,0	*1*	*Laporan*	2	*Laporan*	50
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	1	*Layanan*	100

		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100
		Jumlah Sosialisasi penyakit masyarakat yang terpetakan (PIWK)	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	1	kali	100
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,0	1	Laporan	3	Laporan	75
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum yang terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen		Persen	0,0	**100**	Persen	100	Persen	100

7.01.05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*41,5*	*Indeks*	*41,5*	*Indeks*	*41,5*	*Indeks*	*41,5*	*Indeks*	100,0	*41,5*	*Indeks*	41,50	*Indeks*	100
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	1	*Layanan*	100
		Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi	*1*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	1	*Persen*	100

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan HUT yang terfasilitasi Pelaksanaannya	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	1	Kegiatan	100
		Jumlah paskib kapanewon yang dibentuk dan dilatih	62	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	62	orang	100

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	Orang	75	Orang	75	Orang	75	Orang	100,0	75	Orang	225	Orang	75
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kesepakatan Koordinasi FORKOMPIMKA	4	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	4	Kesepakatan	100
		Jumlah laporan hasil patroli bersama	4	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	4	Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	3	Dokumen	37,5	4	Dokumen	15	Dokumen	47
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,0	**100**	Persen	100	Persen	100

7.01.06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*243*	*Dokumen*	*57*	*Dokumen*	*60*	*Dokumen*	*60*	*Dokumen*	100,0	*59*	*Dokumen*	119	*Dokumen*	49
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terfasilitasi	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*10*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	10	*Layanan*	100
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	NA	*Persen*	NA
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peserta pembinaan penyusunan produk hukum desa	80	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	NA

		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16	Dokumen	2	Dokumen	4	Dokumen	0	Dokumen	0,0	4	Dokumen	6	Dokumen	38
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	2	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah monografi kalurahan tersusun	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah monografi kapanewon tersusun	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	dokumen	NA	dokumen	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	56	Dokumen	14	Dokumen	14	Dokumen	0	Dokumen	0,0	4	Dokumen	18	Dokumen	32
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKal (Siklus Tahunan Kalurahan)	6	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	0
		Jumlah Kalurahan yang terfasilitasi pendampingan pemanfaatan tanah kas kalurahan	6	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	0
		Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset kalurahan yang terlaksana	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	NA	Kali	0

		Jumlah Bimtek Pengelolaan Keuangan Kalurahan Terselenggara (PIWK)	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	kali	NA	kali	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya Tenaga Pengadministrasian (SMA)	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	hari	NA	hari	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	128	dokumen	29	dokumen	32	dokumen	18	dokumen	56,3	16	dokumen	63	dokumen	49
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah koordinasi dengan Lurah dan Pamong lainnya	2	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	Kali	NA	Kali	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,0	1	dokumen	3	dokumen	75
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggarakan pemilihan lurah	0	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	0	Kalurahan	0
		Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6	dokumen	0	dokumen	3	dokumen	0	dokumen	0,0	0	dokumen	0	dokumen	0

7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Bamuskal yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	70	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	70	orang	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,0	1	Dokumen	3	Dokumen	75
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengisian pamong kalurahan dan atau staf pamong kalurahan	4	rekomendasi	NA	rekomendasi	NA	rekomendasi	NA	rekomendasi	NA	NA	rekomendasi	NA	rekomendasi	NA
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	0	dokumen	0,0	1	dokumen	3	dokumen	33
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	31	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	NA
		Jumlah satgas siaga bencana yang meningkat kemampuannya	60	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	NA

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50,0	2	Dokumen	5	Dokumen	63
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	80	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	orang	NA	orang	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,0	1	Dokumen	3	Dokumen	75
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah koordinasi fasilitasi kerjasama antar desa (lintas daerah dan pihak ketiga)	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0,0	1	dokumen	2	dokumen	50

7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah kesepakatan koordinasi tataruang kalurahan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,0	0	Dokumen	1	Dokumen	25
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,0	**100**	Persen	300	Persen	300
2.22.08.2.09	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*7*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	100,0	*2*	*Laporan*	5	*Laporan*	71
		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100
		Jumlah Layanan Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*1*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	NA	*Layanan*	NA

		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	NA	*Persen*	NA
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan Hari Keistimewaan DIY	1	Even	NA	Even	NA	Even	NA	Even	NA	NA	Even	NA	Even	NA
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,0	1	Laporan	3	Laporan	75
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100,0	**100**	persen	300	persen	300
4.01.04.5.01	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*8*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	*2*	*Dokumen*	100,0	*2*	*Dokumen*	6	*Dokumen*	75
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terlaksana	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	*100*	*persen*	100,0	*100*	*persen*	100	*persen*	100

		Jumlah Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*2*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	*NA*	*Layanan*	NA	*NA*	*Layanan*	2	*Layanan*	100
		Persentase Jumlah Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*100*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	*NA*	*Persen*	NA	*NA*	*Persen*	100	*Persen*	100
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	150,0	3	Dokumen	8	Dokumen	100
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan	1	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	Laporan	1	Laporan	100
		Rencana Program Kegiatan Keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024	2	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	2	Dokumen	100

Secara garis besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Ngawen tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Semua realisasi/program kegiatan telah memenuhi yang telah ditargetkan.
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
   Kapanewon Ngawen pada tahun 2024 mengampu 8 program yaitu:
   - Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
   - Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan
   - Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
   - Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
   - Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
   - Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
   - Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
   - Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

   Dari 8 program tersebut telah terpenuhi target kinerja keluaran yang telah direncanakan. Pada tahun 2024 capaian fisik Kapanewon Ngawen mencapai 100%.
3. Tidak terdapat Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Realisasi program/ kegiatan yang ditargetkan telah terpenuhi.
4. Faktor penyebab menghambat tercapainya atau terpenuhinya target kinerja Kapanewon Ngawen adalah regulasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang selalu berubah- ubah dan keterbatasan kewenangan Kapanewon.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD adalah regulasi yang sering berubah sehingga menghambat tercapainya target capaian Renstra PD
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakkor-faktor yang diperkirakan akan memengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2026 adalah :

- Mengikuti alur perencanaan dan penganggaran sesuai regulasi yang ditetapkan.
- Sinkronisasi pada semua Pihak yang terlibat dalam perencanaan.
- Mengoptimalkan koordinasi internal di Kapanewon Ngawen.
- Memberikan kewenangan Kapanewon Ngawen sesuai Tupoksi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Ngawen

Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelayanan Kapanewon digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Ngawen serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan

evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Tugas Pokok dan Fungsi yang harus diemban oleh Pemerintah Kapanewon mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kalurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan bidang Sosial. Fungsi dari masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh jawatan melalui program/kegiatan dalam setiap tahun anggaran.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Ngawen berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Kualitas penyelenggaraaan pemerintahan kalurahan meningkat yang diharapkan pada akhir periode renstra mencapai 100%. Adapun formula indikator kinerja utama adalah:

- Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu
- Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu
- Persentase Kegiatan Sosial
- Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP). Indikator capaian kinerja pelayanan Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM),sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pengukuran capaian kienerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Ngawen dapat dilihat pada tabel 2.2.1 sebagi berikut :

TABEL 2.2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KAPANEWON NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM,IKK)	Target Renstra Kapanewon Ngawen				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)										
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	84,66	85,66	97,40	97,44	85,88	86,88	97,40	97,44	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kapanewon Ngawen

Kinerja pelayanan di Kapanewon Ngawen mengacu pada tugas dan fungsi Kapanewon sebagaimana terdapat dalam Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
n. penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Ngawen dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Ngawen sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kapanewon Ngawen secara langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :

1. Terfasilitasinya pelayanan administrasi kependudukan
2. Terfasilitasinya pelayanan administrasi pemerintahan secara umum (Dispensasi Nikah, Penerbitan ijin UMK, Persetujuan SKTM, Surat Keterangan Domisili, surat keterangan ahli waris dll)
3. Terfasilitasinya kegiatan pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
4. Terfasilitasinya kegiatan monitoring Penyaluran BLT.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
6. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraanpemerintah kalurahan.
7. Terfasilitasinya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
8. Terfasilitasinya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan kalurahan.
10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal (lomba jatilan, karawitan, pedalangan dll)
12. Terfasilitasinya pembuatan buku profil desa, buku profil Kapanewon dan monografi Kalurahan

Adapun tingkat kinerja Kapanewon Ngawen yang tidak secara langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya kegiatan pelayanan antara lain :

1. Terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.
3. Terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti : LKj.IP, Laporan Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan keuangan bulanan.
4. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen dan Pengendalian internal PD.

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ngawen maka diperlukan tentang potret Kapanewon Ngawen saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Ngawen adalah sebagai berikut :

2.3.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi
1) Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan masyarakat
2) Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
3) Belum efektifnya pengawasan melekat
4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat
5) Kewenanagan Kapnewon yang terbatas

b. Permasalahan
1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan
2) Kualitas sumber daya manusia belum merata
3) Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS
4) Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai
5) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

2.3.2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi
1) Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
2) Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
3) Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradicional
4) Belum optimalnya penanganan obyek wisata
5) Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas
6) Perdagangan / perniagaan kurang berkembang
7) Potensi industri kecil terutama kerajinan genteng dan anyaman bambu (caping) dalam pemasaran kurang.

b. Permasalahan
1) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok
2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar PD maupun sumber dana
3) Potensi wisata Gunung Gambar dan Hutan Wonosadi sudah mulai tergarap, namun belum secara optimal
4) Belum adanya pusat penjualan (*show room*) bagi hasil industri Kapanewon Ngawen
5) Kapanewon Ngawen secara geografis tidak berada pada simpul jalan sehingga tidak menguntungkan untuk perkembangan sektor perdagangan.

2.3.3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi Saat ini
1) Beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan karena geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan besar sulit masuk
2) Air sungai Oya belum dimanfaatkan secara optimal
3) Masih banyaknya prosentase jalan yang kurang representatif dan jembatan yang belum memadai untuk jalur transportasi. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan bencana (tanah longsor)

b. Permasalahan
1) Belum adanya prasarana pengolahan air Sungai Oya untuk air minum, atau pembuatan karamba untuk budidaya ikan
2) Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai
3) Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko bencana antar daerah perbatasan.

2.3.4. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini
1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2) Masih banyaknya pengangguran

3) Terdapatnya potensi Seni Budaya yang belum difasilitasi dan dikembangkan
4) Terdapatnya potensi Atlet Olah Raga yang belum difasilitasi dan dikembangkan

b. Permasalahan
1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2) Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi
3) Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah
4) Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan
5) Kurangnya Peluang Kerja di Wilayah Kapanewon Ngawen

2.3.5. Bidang Kesehatan

a. Kondisi Saat Ini
1) Masih ada beberapa balita yang mengalami stunting
2) Minimnya fasilitas kebersihan seperti handsoap dan air bersih di tempat umum

b. Permasalahan
1) Banyak masyarakat yang belum tersosialisasi terkait Stunting
2) Minimnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3) Minimnya ketersediaan fasilitas kebersihan seperti *handsoap* dan air bersih di tempat umum.

2.3.6. Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional atau Internasional

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2029 adalah *"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban*". Pada tahapan lima tahun pertama ini pembangunan daerah dititikberatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, kebijakan ekonomi pro rakyat, kemandirian ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal, tata pemerintahan bebas korupsi sampai pelestarian budaya dan lingkungan.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2029 yang meliputi :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2025 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY sebagai berikut:

a. Isu strategis provinsi

- Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
- Pengembangan Wilayah Selatan DIY
- Perkembangan Teknologi Informasi
- Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif
- Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta-Prambanan
- Penguatan Ketahanan Pangan
- Pelestarian dan Pengelolaan Budaya
- Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan
- Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
- Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital

b. Isu strategis daerah
- Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
- Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
- Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
- Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
- Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2025 - 2029, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kapanewon Ngawen adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Peningkatan perekonomian masyarakat
6. Peningkatan kesejahteraan sosial
7. Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
8. Pemulihan Kehidupan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
9. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikan
10. Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana
11. Reformasi Birokrasi

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2025 - 2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Ngawen dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan

prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Ngawen sebagai birokrasi /aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Ngawen. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan ketrampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah "*Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"*

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Sasaran pembangunan Kapanewon Ngawen berdasarkan prioritas pembangunan yaitu Terwujudnya system penyelenggara pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Ngawen, yang meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Ngawen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan penerangan jalan
2. Adanya potensi sumber daya air
3. Adanya potensi wisata di Gununggambar dan Wonosadi
4. Adanya potensi kerajinan (Batik, Caping, Genteng, Mebel, Wuwung Seng)
5. Adanya potensi Wisata yang belum terekspose
6. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, pertanian dan lain - lain
7. Meningkatnya jumlah alat transportasi
8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
9. Adanya Industri Olahan Makanan
10. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11. Peningkatan fasilitas kesehatan dan kebersihan bagi masyarakat
12. Pemberian bantuan stimulan bagi KK miskin
13. Pemberian edukasi penerapan PHBS bagi masyarakat
14. Pengembangan SDM masyarakat

Faktor Penghambat :

1. Banyaknya pertambahan pengangguran dan rumah tangga miskin karena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK)
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian seperti, jagung, kedelai, kacang tanah dll
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
7. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor.

Adapun Prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Ngawen adalah Reformasi Birokrasi dengan sasaran daerah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.

Dari penjabaran visi dan misi, maka tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen adalah:

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon.
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kalurahan.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
6. Peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan.
7. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan.

2.3.7. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kapanewon Ngawen

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra Kapanewon Ngawen 2025-2029, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RT / RW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal.

a. Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Ngawen dengan memetakan

kekuatan dan *kelemahan* yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon.

1) Kondisi Fisik Dasar
   a) Secara topografis termasuk dalam Zona Utara atau Zona Batur Agung, sehingga wilayah Ngawen potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija dan tembakau), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak
   b) Secara geologi berada dekat dengan jalur patahan aktif sesar Opak-Oya yang sangat berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi
   c) Secara geomorfologi wilayah Ngawen 80 % berupa perbukitan dengan tingkat kemiringan antara 15 sampai 60 derajad terletak pada ketinggian antara 300 – 700 M pada permukaan laut, sehingga berpotensi sangat tinggi terhadap bencana erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan.

2) Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
   a) Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda, yaitu menggelembung pada kelompok usia 26-55 th
   b) Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi ke luar daerah
   c) Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani.

3) Kondisi Perekonomian
   a) Meningkatnya pengangguran karena dampak dari pandemi Covid-19 yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK)
   b) Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kapanewon Ngawen, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa
   c) Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil buah-buahan dan tembakau), dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi.

4) Kondisi Pemerintahan
   a) Aparat Kapanewon telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
   b) Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanakannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
   c) Penguatan kelembagaan Kapanewon dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiari.
   d) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kapanewon Ngawen sebagai berikut :

1. Kekuatan
   a) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

b) Jumlah aparatur pemerintah Kapanewon yang cukup memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas
c) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan
d) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan
e) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu yang cukup prospektif
f) Pemberian bantuan bagi KK miskin
g) Kesadaran pentingnya penerapan PHBS bagi masyarakat

2. Kelemahan
a) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, tanah longsor
b) Sebagai wilayah perbatasan, Kapanewon Ngawen kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat
c) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi
d) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi
e) Penguasaan teknologi masih rendah
f) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif
g) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur Kapanewon dan desa belum optimal

b. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kapanewon Ngawen dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tinjauan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Ngawen sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.

1. Peluang
a) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional
b) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
c) Adanya kerjasama antara kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten – kabupaten di sekitarnya
d) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat

2. Tantangan
a) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
b) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan
c) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif
d) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat
e) Membuka peluang kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran
f) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

2.3.8. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2025-2029 maka Kapanewon Ngawen merumuskan Program dan Kegiatan yang akan diselenggaran pada tahun 2025. Adapun Program yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
8) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 memberikan gambaran tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Berdasarkan tabel matrik Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk tahun anggaran 2026. Sedangkan didalam menentukan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat desa sampai ditingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi Penghitungan Anggaran Pemerintah Daerah. Secara umum pada rancangan awal semua kebutuhan yang ada di masyarakat pada sektor perekonomian dan kesehatan belum seluruhnya dapat diakomodir, namun dengan keterbatasan sumber daya yang ada di Kapanewon Ngawen, maka prioritas usulan sesuai kebutuhan adalah peningkatan SDM masyarakat sehingga mampu untuk mendukung terlaksananya peningkatan dan pemulihan perekonomian serta meningkatkan ketahanan pangan. Disamping itu juga prioritas kegiatan pada program pengentasan kemiskinan adalah Jambanisasi yang terakomodir melalui proses Musrenbang.

Adapun beberapa usulan di maksud akan mempengaruhi besaran pagu pada tahap analisis kebutuhan, hal ini yang membuat besaran dana yang lebih besar dari Rancangan Awal RKPD tahun 2026. Hal tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 2.4.1 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pagu, indikator kinerja, target capaian kinerja antara RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan pada Rancangan Renja Kapanewon Ngawen disebabkan karena perubahan kebijakan Tim Anggaran Perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat.

Tabel 2.4.1

Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

PERANGKAT DAERAH : KAPANEWON NGAWEN

Kode	Rencana Kerja Pemerintah Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif 2026	Catatan penting
	KAPANEWON NGAWEN				**2.269.128.877,00**	**KAPANEWON NGAWEN**				**2.269.128.877,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.000.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.000.000,00**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100.000.000,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100.000.000,00**	
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		***Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		***Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***	**100 Persen**	**100.000.000,00**	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan*		100.000.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan*		100.000.000,00	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	1 Laporan	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	1 Laporan	100.000.000,00	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**40.000.000,00**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**40.000.000,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.000.000,00**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.000.000,00**	
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		***Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana***	**100 Persen**	**40.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		***Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana***	**100 Persen**	**40.000.000,00**	
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		*Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*		40.000.000,00	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		*Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*		40.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	3 Dokumen	40.000.000,00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	3 Dokumen	40.000.000,00	

7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.129.128.877,00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.129.128.877,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**2.129.128.877,00**	**KECAMATAN**				**2.129.128.877,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik***	**100 Persen**	**1.429.112.877,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik***	**100 Persen**	**1.429.112.877,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		50.782.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		50.782.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	35.755.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	35.755.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.800.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.800.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.420.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.420.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD*	2 Dokumen	2.095.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenDPA-SKPD*	2 Dokumen	2.095.000,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	2 Dokumen	1.630.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	2 Dokumen	1.630.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	17 Laporan	6.405.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	17 Laporan	6.405.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	1.677.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	1.677.000,00	

							Kel/Desa				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		1.169.823.877,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		1.169.823.877,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	238 Orang/bulan	1.160.178.877,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	238 Orang/bulan	1.160.178.877,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	2.085.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	2.085.000,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	13 Laporan	7.560.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	13 Laporan	7.560.000,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*		2.870.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*		2.870.000,00	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	24 Laporan	2.870.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	24 Laporan	2.870.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*		6.618.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*		6.618.000,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	6 Dokumen	6.618.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	6 Dokumen	6.618.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Umum*		59.755.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Dokumen Administrasi Umum*		59.755.900,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	1.922.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	1.922.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	27.368.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	27.368.000,00	

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	3.883.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	3.883.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	4.752.900,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12 Paket	4.752.900,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	1.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 Dokumen	1.200.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	6 Laporan	2.100.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	6 Laporan	2.100.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	18.530.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	18.530.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		52.308.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		52.308.100,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	1.650.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4 Laporan	1.650.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	49 Laporan	20.659.100,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	49 Laporan	20.659.100,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	29.999.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	29.999.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		86.955.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		86.955.000,00	

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	155 Unit	43.900.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	155 Unit	43.900.000,00	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	20 Unit	1.600.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	20 Unit	1.600.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	23 Unit	7.800.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	23 Unit	7.800.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	31.855.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	31.855.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	1.800.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	6 Unit	1.800.000,00	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana***	**100 Persen**	**7.090.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana***	**100 Persen**	**7.090.000,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		7.090.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		7.090.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	7.090.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	7.090.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi***	**100 Persen**	**199.203.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi***	**100 Persen**	**199.203.000,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		79.540.500,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		79.540.500,00	
7.01.03.2.	Sinkronisasi Program Kerja dan	Kab.	*Jumlah Dokumen*	10	71.450.500,00	Sinkronisasi Program Kerja	Kab.	*Jumlah Dokumen*	10 Dokumen	71.450.500,00	

01.0002	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	Dokumen		dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	6 Laporan	8.090.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	6 Laporan	8.090.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Laporan	112.020.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan*	12 Laporan	112.020.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	112.020.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	112.020.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan*		4.710.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan*		4.710.000,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	4.710.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	4.710.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*		2.932.500,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*		2.932.500,00	
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	20 Keluarga	2.932.500,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	20 Keluarga	2.932.500,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		***Persentase lembaga yang dibina***	**100 Persen**	**336.035.500,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		***Persentase lembaga yang dibina***	**100 Persen**	**336.035.500,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		336.035.500,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		336.035.500,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	8 Laporan	336.035.500,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	8 Laporan	336.035.500,00	

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		***Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100 Persen**	**111.716.500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		***Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**100 Persen**	**111.716.500,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*		111.716.500,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*		111.716.500,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	75 Orang	99.566.500,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	75 Orang	99.566.500,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Dokumen	12.150.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	4 Dokumen	12.150.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	**100 Persen**	**45.971.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***	**100 Persen**	**45.971.000,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		45.971.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		45.971.000,00	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	12 Dokumen	3.675.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	12 Dokumen	3.675.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata*	14 Dokumen	1.630.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen,	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata*	14 Dokumen	1.630.000,00	

		Kel/Desa	*Pemerintahan Desa*				Semua Kel/Desa	*Pemerintahan Desa*		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	18 Dokumen	25.855.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	18 Dokumen	25.855.000,00
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*	1 Dokumen	2.401.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*	1 Dokumen	2.401.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	3 Dokumen	6.290.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	3 Dokumen	6.290.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	1 Dokumen	2.960.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	1 Dokumen	2.960.000,00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	2 Dokumen	1.120.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	2 Dokumen	1.120.000,00
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	1 Dokumen	2.040.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	1 Dokumen	2.040.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah ditingkat Kapanewon dengan kegiatan memproses keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah Kapanewon. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan, kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan dengan benar menyampaikan ide – ide maupun anggaran dasar forum musrenbang dan menilai bagaimana suatu program pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Kapanewon Ngawen 2025 - 2029, yang merupakan hasil analisis dari isu – isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk menganalisa isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal bertujuan untk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Ngawen dengan menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon. Kemudian dalam analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kapanewon Ngawen dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Tujuan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kapanewon Ngawen sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Klaten.

Hasil Musrenbang Kapanewon Ngawen untuk tahun 2025 telah sesuai dan dapat mengakomodir sasaran dan program prioritas yang menjadi isu strategis Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan sektor wisata, peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan mutu pendidikan. Adapun salah satu program prioritas pengentasan kemiskinan, melalui tahapan Musrenbang.

Tabel 2.5.1
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Usulan	Lokasi	Volume	Satuan	Harga	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6 x 8)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - Sosialisasi Calon Pengantin (Catin)	Kalurahan Tancep,Ngawen	2	Angkatan	3.150.000	6.300.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Jurangjero, Ngawen, Gunungkidul	1	Kali	4.460.000	4.460.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Kalurahan Watusigar, Ngawen, Gunungkidul	1	Kali	4.460.000	4.460.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - (Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin)	Kalurahan Tancep,Ngawen	3	KK	4.850.000	14.550.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - (Bantuan Sosial PAH)	Kalurahan Tancep,Ngawen	2	KK	9.462.000	18.924.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - (Pembangunan jamban sehat bagi KK miskin)	Jurangjero,Ngawen, Gunungkidul	5	KK	4.850.000	24.250.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	(PIWK) - (Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin)	Watusigar, Ngawen, Gunungkidul	2	KK	7.734.500	15.469.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	(PIWK) - (Pelatihan Perencanaan Pembangunan di Desa)	Kampung Kidul, Kampung, Ngawen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Kali	18.600.000	18.600.000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Pada Tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam Isu Strategis yang dikaitkan dengan 8 (Delapan) Isu Strategis Nasional, 7 (tujuh) Isu Strategis Provinsi dan 6 (enam) Isu Strategis Daerah yang dikaitan dengan prioritas pembangunan masyarakat yang adil makmur, lestari dan beradap yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen pada Tahun 2026 belum menganggarkan kegiatan yang menunjang kebijakan tersebut.

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul yang terkait dengan tugas dan fungsi Kapanewon Ngawen sesuai dengan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

A. Tugas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Panewu Ngawen adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarkat kalurahan.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;

l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
n. penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
p. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Ngawen

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dimana tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Dimana indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, indikasi tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah:

"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan Sasaran PD dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut

Tabel 3.2.1
Tujuan Kapanewon Ngawen

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030
1	2	3	4	5
	Tujuan :			
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,44	97,62

Tabel 3.2.2
Sasaran Kapanewon Ngawen

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2026
1	2	3	4
	Sasaran :		
1.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4.	Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,22

Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Ngawen Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Targrt Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4
Tujuan			
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,44
Sasaran			
1.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Targrt Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4
4.	Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,22

Tujuan dari pada penyusunan Renja Kapanewon Ngawen Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON NGAWEN

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a. Tema, Prioritas, dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Tema pembangunan Tahun 2026

Sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
Program Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
					2.22.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
					2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	
					2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	
					2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100.000.000,00	Kapanewon Ngawen
					4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN		
						PEMERINTAHAN		
					4.01	SEKRETARIAT DAERAH		
					4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000,00	
Program Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000,00	

					4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000,00	Kapanewon Ngawen
					7	UNSUR KEWILAYAHAN		
					7.01	KECAMATAN		
					7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.429.112.877,00	
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.782.000,00	
					7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.755.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.420.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.095.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.630.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.405.000,00	Kapanewon Ngawen

					7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.677.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.169.823.877,00	
					7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.160.178.877,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.085.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.560.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.870.000,00	
					7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.870.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.618.000,00	
					7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.618.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.755.900,00	
					7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.922.000,00	Kapanewon Ngawen

					7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.368.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.883.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.752.900,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.530.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.308.100,00	
					7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.659.100,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.999.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.955.000,00	

					7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.900.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	1.600.000,00	
					7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.855.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000,00	Kapanewon Ngawen
Program Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Pelayanan umum yang berkualitas	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	100	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.090.000,00	
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.090.000,00	
					7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.090.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.203.000,00	
Program Pamong Nglayani	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran	Dokumen perencanaan yang	Persentase Penyusunan RKPKal	100	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.540.500,00	

dan Ngayomi	Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	berkualitas	Benar dan Tepat Waktu					
					7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	71.450.500,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.090.000,00	Kapanewon Ngawen
Program Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	112.020.000,00	
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112.020.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.710.000,00	
					7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.710.000,00	Kapanewon Ngawen
Program Alam Lestari	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif	*Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	100	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2.932.500,00	

					7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2.932.500,00	
					7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	336.035.500,00	
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	336.035.500,00	
					7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	336.035.500,00	
					7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.716.500,00	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.716.500,00	
					7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.566.500,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.150.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.971.000,00	

Program Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya Sistem Penyelenggaran Pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.971.000,00	
					7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.675.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.630.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.855.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.401.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.290.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.960.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.120.000,00	Kapanewon Ngawen
					7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan, Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.040.000,00	Kapanewon Ngawen
					JUMLAH		2.269.128.877,00	

Pemerintah Kapanewon Ngawen sebagai birokrasi/aparat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Ngawen Tahun 2025 mengacu pada RKPD Tahun 2025. Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kapanewon Ngawen didukung Aparatur Perangkat Daerah/Aparat Penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat diperlukan ketersediaan pembiayaan yang memadai. Adapun rencana Pembiayaan bagi Aparatur Perangkat Daerah Kapanewon Ngawen Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.160.178.877,00.

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Ngawen Tahun 2025 terdiri dari 8 program, 17 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Semua kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Keamanan, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, dan Jawatan Umum sifat penyebaran lokasinya adalah menyeluruh ke semua kalurahan di wilayah Kapanewon Ngawen. Terkecuali program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, lokasi kegiatan ini di kantor Kapanewon yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kapanewon Ngawen.

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan di Kapanewon Ngawen Tahun 2025, total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah Rp2.269.128.877,00,- berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

4.3 Usulan Program dan Kegiatan pada Rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Ngawen Tahun 2025 sudah sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dari usulan program dan kegiatan Kapanewon berasumsi kebutuhan selama Tahun Anggaran untuk kebutuhan Kapanewon Ngawen, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 memberikan gambaran tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul.

4.4 Rencana program dan kegiatan Kapanewon Ngawen

Rencana program dan kegiatan Kapanewon Ngawen Tahun 2025 untuk keseluruhan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.4.1 berikut ini :

Tabel 4.4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

OPD : Kapanewon Ngawen

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KAPANEWON NGAWEN				**2.269.128.877,00**				**2.969.107.026,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.000.000,00**				**150.000.000,00**
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100.000.000,00**				**150.000.000,00**
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***		**100 Persen**	**100.000.000,00**			**-**	**150.000.000,00**
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya yang dilestarikan*			100.000.000,00			-	150.000.000,00
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			150.000.000,00
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**40.000.000,00**				**40.000.000,00**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.000.000,00**				**40.000.000,00**
4.01.04	**PROGRAM**	***Persentase Program***		**100 Persen**	**40.000.000,00**			**-**	**40.000.000,00**

	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	***Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana***							
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	*Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*			40.000.000,00			-	40.000.000,00
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			40.000.000,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.129.128.877,00**				**2.779.107.026,00**
7.01	**KECAMATAN**				**2.129.128.877,00**				**2.779.107.026,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik***		**100 Persen**	**1.429.112.877,00**			**-**	**2.543.417.026,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			50.782.000,00			-	47.140.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	35.755.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			28.720.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.250.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil*	Kab. Gunungkidul, Ngawen,	1 Dokumen	1.420.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			900.000,00

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kel/Desa						
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.095.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.800.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.630.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.170.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	17 Laporan	6.405.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.900.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.677.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.400.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*			1.169.823.877,00			-	1.786.020.026,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	238 Orang/bulan	1.160.178.877,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.777.520.026,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.085.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000,00

7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	13 Laporan	7.560.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.500.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*			2.870.000,00			-	0,00
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	24 Laporan	2.870.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Kepegawiaan*			6.618.000,00			-	6.500.000,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	6.618.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.500.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Umum*			59.755.900,00			-	139.095.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	3 Paket	1.922.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.500.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	4 Paket	27.368.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			83.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	3 Paket	3.883.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			28.895.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan*	Kab. Gunungkidul,	12 Paket	4.752.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11.500.000,00

	Penggandaan	*Penggandaan yang Disediakan*	Ngawen, Semua Kel/Desa						
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.600.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	6 Laporan	2.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.500.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	12 Laporan	18.530.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.100.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			52.308.100,00			-	74.385.000,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	4 Laporan	1.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			26.630.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	49 Laporan	20.659.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			17.400.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Laporan	29.999.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			30.355.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah*			86.955.000,00			-	125.210.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang*	Kab. Gunungkidul, Ngawen,	155 Unit	43.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			37.430.000,00

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Semua Kel/Desa						
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	20 Unit	1.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	23 Unit	7.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			21.150.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Unit	31.855.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			60.880.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	6 Unit	1.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.750.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana***		**100 Persen**	**7.090.000,00**			**-**	**14.300.000,00**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*			7.090.000,00			-	14.300.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	7.090.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			14.300.000,00

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi***		**100 Persen**	**199.203.000,00**			**-**	**55.310.000,00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*			79.540.500,00			-	46.710.000,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	71.450.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			38.010.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	6 Laporan	8.090.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.700.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan*			112.020.000,00			-	0,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Pokmas / Ormas	112.020.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan*			4.710.000,00			-	8.600.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.710.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.600.000,00

7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan*			2.932.500,00			-	0,00
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	20 Keluarga	2.932.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase lembaga yang dibina***		**100 Persen**	**336.035.500,00**			**-**	**3.500.000,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*			336.035.500,00			-	3.500.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	8 Laporan	336.035.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***		**100 Persen**	**111.716.500,00**			**-**	**96.600.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*			111.716.500,00			-	96.600.000,00

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	75 Orang	99.566.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			91.500.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	12.150.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.100.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa***		**100 Persen**	**45.971.000,00**			**-**	**65.980.000,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*			45.971.000,00			-	65.980.000,00
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.300.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	1.630.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.200.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam*	Kab. Gunungkidul,	18 Dokumen	25.855.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.880.000,00

	Pendayagunaan Aset Desa	*rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	Ngawen, Semua Kel/Desa						
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.401.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.800.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	6.290.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.600.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.960.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.200.000,00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.120.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.900.000,00
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*	Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.040.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.100.000,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Rencana Kerja Kapanewon Ngawen Tahun 2026 disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan. Rencana Kerja Kapanewon Ngawen disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, Rencana Kerja Kapanewon Ngawen yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada bab penutup Rancangan Awal Rencana Kerja Kapanewon Ngawen Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting
   Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Ngawen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Adapun pelaksanaan rencana kerja akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan mempertimbangkan sekala prioritas. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

b. Kaidah Pelaksanaan
   Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut
   Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing Jawatan. Dengan begitu kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan

program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Kapanewon Ngawen sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Anggaran Tahun 2026.

Wonosari, 1 Agustus 2025

KAPANEWON NGAWEN,

SUGITO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARINGSIH

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON SEMIN
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainya antara lain :

1. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya yang disesuaikan dengan Program Prioritas PD.
2. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, artinya Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan,

sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.

3. Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L (Kementerian/Lembaga) dan Perangkat Daerah Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja Perangkat Daerah juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan Perangkat Daerah Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

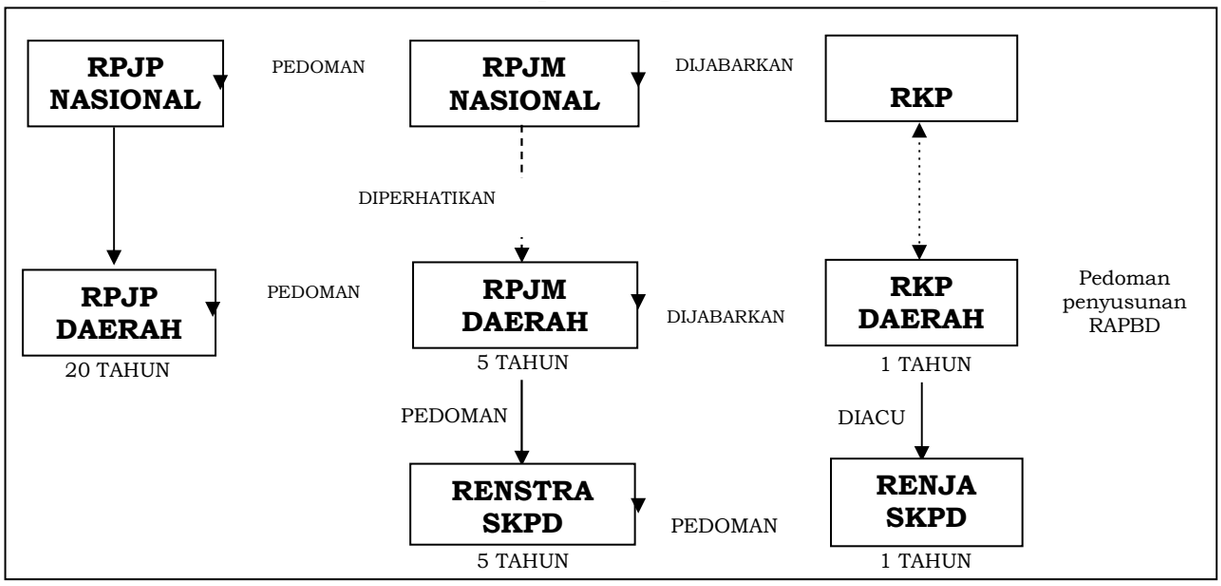

Bagan 1 : Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sehingga Renja PD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Semin tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 123 tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kapanewon Semin adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Kapanewon Semin sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON SEMIN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Semin dan Capaian Renstra Kapanewon Semin
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Semin
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Semin
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON SEMIN
3.1 Telaahan terhadap Kabijakan Nasional dan Propinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Semin

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KAPANEWON SEMIN
4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON SEMIN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Semin dan Capaian Renstra Kapanewon Semin

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Semin Tahun 2026 mengacu pada APBD Tahun 2026 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Semin berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan atau Tahun 2025.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Semin atau realisasi APBD untuk Kapanewon Semin yang disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2024 dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Pada Perangkat Daerah Kapanewon Semin dalam pelaksanaan Renja 2024 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, dengan kata lain target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan terpenuhi.
2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Pada Perangkat Daerah Kapanewon Semin dalam pelaksanaan Renja 2024 program dan kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
3. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang sudah memenuhi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;
   Realisasi program dan kegiatan Kapanewon Semin pada Tahun 2024 tidak ada yang target kinerja keluarannya melebihi dari target yang yang direncanakan dalam Renja Tahun 2024.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2024.
   a. Dalam rangka efisiesi waktu sebagian kegiatan Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain.
   b. Munculnya kebijakan/ regulasi setelah program/ kegiatan dan target ditetapkan.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian Tahun 2024;
   a. Adanya kesinkronan kegiatan yang dianggarkan perangkat daerah Kapanewon Semin dengan agenda kegiatan yang di selenggarakan perangkat daerah di tingkat Kabupaten.
   b. Adanya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
   c. Sumber Daya Manusia yang ada di perangkat daerah Kapanewon Semin yang kurang.
   d. Kenaikan harga BBM yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan lainnya.
   e. Rasionalisasi Anggaran tahun 2024 untuk memenuhi alokasi belanja wajib/mengikat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.
   a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala jawatan dan kepala sub bagian yang menangani kegiatan.
   b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait baik masalah pelaksanaan kegiatan maupun pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon.

c. Melaksanakan efisiensi anggaran tahun 2024 sesuai ketentuan/intruksi.

Dari uraian di atas rekapitulasi hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Semin dan pencapaian Renstra Kapanewon Semin s/d Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Semin dan Pencapaian Renstra Kapanewon Semin s/d Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Semin

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusun	26	Dokumen	26	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11,86	Indeks	NA	Indeks	12,06	Indeks	12,06	Indeks	12,06	11,86	Indeks	11,86	Indeks	100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen draft Renstra	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen Renstra	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya Tenaga Administrasi DIII	1235	Hari	247	Hari	NA	Hari	NA	Hari	NA	NA	Hari	NA	Hari	NA
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	NA	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	3	Dokumen	3	Dokumen	30
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	NA	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	25
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	NA	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	25
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	Dokumen	NA	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	3	Dokumen	3	Dokumen	25
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	Dokumen	NA	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	Dokumen	25
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	Laporan	NA	Laporan	17	Laporan	13	Laporan	76,47	17	Laporan	17	Laporan	25
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan TEPRA	12	Dokumen	12	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen Lkj. IP	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Laporan E- Monev	4	Laporan	4	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	Laporan	NA	Laporan	NA
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128	Laporan	NA	Laporan	32	Laporan	26	Laporan	81,25	32	Laporan	32	Laporan	25
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tersusun tepat waktu dan benar	14	Dokumen	14	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,26	Indeks	NA	Indeks	1,26	Indeks	1,26	Indeks	1,26	1,26	Indeks	1,26	Indeks	1,26
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasiitasi gaji & Tunjangan ASN	14	Bulan	14	Bulan	NA	Bulan	NA	Bulan	NA	NA	Bulan	NA	Bulan	NA
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	896	Orang/Bulan	NA	Orang/Bulan	203	Orang/Bulan	158	Orang/Bulan	77,83	224	Orang/Bulan	224	Orang/Bulan	25
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	NA	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	1	Laporan	1	Laporan	25
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ bulanan	12	Dokumen	12	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	52	Laporan	NA	Laporan	13	Laporan	10	Laporan	76,92	13	Laporan	13	Laporan	NA
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tertangani	1	Layanan	1	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24	Dokumen	NA	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	6	Dokumen	6	Dokumen	25
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani	15	Orang	15	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	NA	Orang	NA
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	Dokumen	NA	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100	6	Dokumen	6	Dokumen	25
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pengiriman peserta Pendidikan dan Pelatihan	NA	Peserta	NA	Peserta	NA	Peserta	NA	Peserta	NA	NA	Peserta	NA	Peserta	NA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	Orang	NA	Orang	0	Orang	0	Orang	0	2	Orang	2	Orang	25
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	7	Layanan	7	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	Indeks	NA	Indeks	0	Indeks	0	Indeks	0	0	Indeks	0	Indeks	0,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	4	Buah	4	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	NA	Paket	4	Paket	4	Paket	100	4	Paket	4	Paket	33,33
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12	Buah	12	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Komputer PC terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Laptop terbeli	1	Buah	1	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Printer terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Mesin Ketik terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54	Paket	NA	Paket	12	Paket	12	Paket	100,00	13	Paket	13	Paket	24,07
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dispenser terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah kompor gas terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli	4	Buah	4	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah tabung gas terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Perkakas terbeli (Piring, Gelas, Rak Piring)	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	NA	Paket	5	Paket	4	Paket	80	6	Paket	6	Paket	30
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	60	Buah	60	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah lembar fotocopy	5000	Lembar	5000	Lembar	NA	Lembar	NA	Lembar	NA	NA	Lembar	NA	Lembar	NA
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	NA	Paket	2	Paket	2	Paket	100	2	Paket	2	Paket	25
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dibayar (1 rekening X 12 Bulan)	12	Bulan	12	Bulan	NA	Bulan	NA	Bulan	NA	NA	Bulan	NA	Bulan	NA
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	992	Dokumen	NA	Dokumen	366	Dokumen	274	Dokumen	74,86	248	Dokumen	248	Dokumen	25

a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu terfasilitasi minum dan snack	40	Orang	40	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	NA	Orang	NA
		Jumlah tamu terfasilitasi makan dan minum	15	Orang	15	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	NA	Orang	NA
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	NA	Laporan	12	Laporan	9	Laporan	75	12	Laporan	12	Laporan	25
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat terfasilitasi minum dan snack	360	Orang	360	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	NA	Orang	NA
		Jumlah peserta rapat terfasilitasi makan dan minum	20	Orang	20	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	NA	Orang	NA
		Jumlah Frekuensi koordinasi luar daerah	2	Frekuensi	2	Frekuensi	NA	Frekuensi	NA	Frekuensi	NA	NA	Frekuensi	NA	Frekuensi	NA
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68	Laporan	NA	Laporan	12	Laporan	9	Laporan	75,00	17	Laporan	17	Laporan	25
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhi	4	Layanan	4	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67	Barang	NA	Barang	12	Barang	0	Barang	0	9	Barang	9	Barang	13,43
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Rapat terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Meja Rapat terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Meja 1/2 Biro terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Kursi Kerja (Kursi Putar) terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Meja Kursi Tamu Camat terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Kursi Petugas Pelayanan terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Meja Pelayanan terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Kursi Tunggu Pelayanan terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumah Rak Buku terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55	Paket	NA	Paket	NA	Paket	0	Paket	0	9	Paket	9	Paket	16,36
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah LCD terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah TV terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Sinso terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Genset terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	NA	Unit	0	Unit	0	Unit	0	NA	Unit	NA	Unit	NA
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Gudang	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	0	Paket	0	NA	Paket	NA	Paket	NA
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Ruang Laktasi	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	NA	Paket	NA
		Jumlah AC terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Kotak Pengaduan terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Kotak Surat terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Papan Pengumuman terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Pengadaan Tutup Selokan	30	Buah	30	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Gorden terbeli	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	Buah	NA	NA	Buah	NA	Buah	NA
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	NA	Unit	0	Unit	0,00	Unit	0	NA	Unit	NA	Unit	0,00
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	NA	Unit	1	Unit	1	Unit	100	NA	Unit	NA	Unit	NA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi	2	Layanan	2	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA
		Jumah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288	Laporan	NA	Laporan	72	Laporan	54	Laporan	75	72	Laporan	72	Laporan	25
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	1000	Surat	1000	Surat	NA	Surat	NA	Surat	NA	NA	Surat	NA	Surat	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya Jasa Surat Menyurat	494	Hari	494	Hari	NA	Hari	NA	Hari	NA	NA	Hari	NA	Hari	NA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	NA	Laporan	12	Laporan	9	Laporan	75	12	Laporan	12	Laporan	25
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sarana jasa air dibayar (2 rekening x12 bulan)	24	Bulan	24	Bulan	NA	Bulan	NA	Bulan	NA	NA	Bulan	NA	Bulan	NA
		Jumlah sarana jasa listrik dibayar (3 rekening x 12 bulan)	36	Bulan	36	Bulan	NA	Bulan	NA	Bulan	NA	NA	Bulan	NA	Bulan	NA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240	Laporan	NA	Laporan	72	Laporan	54	Laporan	75	60	Laporan	60	Laporan	25
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terfasilitasi	5	Layanan	5	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704	Unit	NA	Unit	155	Unit	0,00	Unit	0	183	Unit	183	Unit	25,99

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	9	Paket	9	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	NA	Paket	NA
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	1	Paket	1	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	NA	Paket	NA
		Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya	1	Unit	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	NA
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	9	Unit	9	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	NA
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	690	Unit	NA	Unit	143	Unit	NA	Unit	141	183	Unit	183	Unit	NA
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair yang terfasilitasi pemeliharaannya	10	Unit	10	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	NA
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	40	Unit	NA	Unit	30	Unit	30	Unit	100	10	Unit	10	Unit	NA
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	4	Unit	4	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	NA
		Jumlah LCD yang terfasilitasi pemeliharaannya	1	Unit	1	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	NA
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya	2	Unit	2	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	NA
		Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	3	Unit	3	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	NA
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	5	Unit	5	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	NA
		Jumlah BBM Genset yang tersedia	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	NA
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	NA	Unit	14	Unit	14	Unit	100,00	14	Unit	14	Unit	23,33
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah hari terfasilitasinya jasa keamanan kantor	365	Hari	365	Hari	NA	Hari	NA	Hari	NA	NA	Hari	NA	Hari	NA
		Jumlah Paket Pemeliharaan atap	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	NA	Paket	NA
		Jumlah Pemeliharaan Pengecatan gedung kantor	1	Pemeliharaan	1	Pemeliharaan	NA	Pemeliharaan	NA	Pemeliharaan	NA	NA	Pemeliharaan	NA	Pemeliharaan	NA
		Jumlah Pemeliharaan Pengecatan gedung rumah dinas	1	Pemeliharaan	1	Pemeliharaan	NA	Pemeliharaan	NA	Pemeliharaan	NA	NA	Pemeliharaan	NA	Pemeliharaan	NA
		Jumlah Paket Revitalisasi Jaringan Listrik	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	NA	Paket	NA
		Jumlah Paket Pemasangan Paving Blok Halaman	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	Paket	NA	NA	Paket	NA	Paket	NA
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	NA	Unit	2	Unit	2	Unit	100	2	Unit	2	Unit	25
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi	11	Unit	11	Unit	NA	Unit	NA	Unit	NA	NA	Unit	NA	Unit	NA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44	Unit	NA	Unit	12	Unit	12	Unit	100	11	Unit	11	Unit	25
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Layanan Penataan Organisasi tersusun dengan baik	1	Layanan	1	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
		Nilai IKM	82	Indeks	80	Indeks	NA	Indeks	NA	Indeks	NA	NA	Indeks	NA	Indeks	NA
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen dan Laporan Penyelenggraaan RTP/SPIP	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen SOP	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	2	Dokumen	2	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksana	1	Kegiatan	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Laporan	NA	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100	3	Laporan	3	Laporan	25
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Cabang olahraga yang dibina	5	Cabang	5	Cabang	NA	Cabang	NA	Cabang	NA	NA	Cabang	NA	Cabang	NA
		Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan dalam even budaya	2	Kelompok	2	Kelompok	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA
		Jumlah keikutsertaan peringatan Hari Jadi kabupaten Gunungkidul	1	Kegiatan	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9	Laporan	NA	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	3	Laporan	3	Laporan	33,33
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terlaksana	2	Kegiatan	2	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	76	Laporan	NA	Laporan	19	Laporan	19	Laporan	100	19	Laporan	19	Laporan	25
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kesepakatan Bidang Kesehatan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah Dokumen Hasil Monev Bidang Kesos	2	Dokumen	2	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah kesepakatan pelaksanaan Bimtek SID (1 Kesepakatan x 10 Desa)	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah Kesepakatan penanganan PMKS	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah Kesepakatan Rakor Penanggulangan Kemiskinan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)	20	KK	20	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	KK	NA	KK	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya Jasa Penanganan PMKS	247	Hari	247	Hari	NA	Hari	NA	Hari	NA	NA	Hari	NA	Hari	NA
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20	Laporan	NA	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	66,67	5	Laporan	5	Laporan	NA
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan IUMK	2	Desa	2	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	NA	Desa	NA	Desa	NA
		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Umum	1	Koordinasi	1	Koordinasi	NA	Koordinasi	NA	Koordinasi	NA	NA	Koordinasi	NA	Koordinasi	NA
		Jumlah layanan yang terselesaikan	4500	Layanan	4500	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya Jasa Tenaga Pelayanan Umum	247	Hari	247	Hari	NA	Hari	NA	Hari	NA	NA	Hari	NA	Hari	NA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56	Laporan	NA	Laporan	14	Laporan	11	Laporan	78,57	14	Laporan	14	Laporan	NA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	NA	Persen	100	100	Persen	100	Persen	NA
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Layanan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2	Layanan	2	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA
		Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	32	Koordinasi	NA	Koordinasi	8	Koordinasi	8	Koordinasi	8	8	Koordinasi	8	Koordinasi	NA
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen usulan rencana kegiatan (DURP)	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMKal dan RKPKal	10	Kalurahan	10	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA
		Jumlah Bimtek Perencanaan Pembangunan Kalurahan (PIWK)	1	Kegiatan	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	48	Dokumen	NA	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	12	Dokumen	25
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen Profil Kalurahan dan Kapanewon	11	Dokumen	11	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	0,00
		Jumlah desa yang dievaluasi dalam perlombaan Kalurahan	10	Desa	10	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	NA	Desa	NA	Desa	0,00
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba Kalurahan tingkat kabupaten	1	Orang	1	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	NA	Orang	NA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52	Laporan	NA	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	100	13	Laporan	13	Laporan	25
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon Terfasilitasi	2	Layanan	2	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	25	Indeks	NA	Indeks	25	Indeks	25	Indeks	25	25	Indeks	25	Indeks	100
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kesepakatan TP PKK	12	Kesepakatan	12	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan/pembinaan Karang Taruna	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8	Lembaga	NA	Lembaga	2	Lembaga	2	Lembaga	100	2	Lembaga	2	Lembaga	25
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran UKM	4	Kelompok	4	Kelompok	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA
		Jumlah kesepakatan koordinasi Bidang Pertanian dan Perkebunan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah rakor pendampingan UKM	1	Kegiatan	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
		Jumlah kesepakatan koordinasi Bidang Peternakan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah kesepakatan Koordinasi Kelompok Perikanan	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24	Laporan	NA	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100	6	Laporan	6	Laporan	NA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	NA	Persen	100	100	Persen	100	Persen	NA
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Layanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terfasilitasi	1	Layanan	1	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA
		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	28	Laporan	NA	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00	7	Laporan	7	Laporan	NA
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Frekuensi Pelaksanaan Safari Teraweh tingkat Kapanewon	1	Kegiatan	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
		Jumlah Kesepakatan Peningkatan FKUB	1	Kesepakatan	1	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	Laporan	NA	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	2	Laporan	2	Laporan	NA
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terlaksana	1	Layanan	1	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
		Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	Laporan	NA	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	5	Laporan	5	Laporan	NA
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Penyakit Masyarakat yang terpetakan	1	Penyakit	1	Penyakit	NA	Penyakit	NA	Penyakit	NA	NA	Penyakit	NA	Penyakit	NA
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20	Laporan	NA	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	5	Laporan	5	Laporan	NA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	NA
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksana	2	Layanan	2	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2,53	Indeks	NA	Indeks	2,53	Indeks	2,53	Indeks	2,53	2,53	Indeks	2,53	Indeks	100
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
		Jumlah anggota Paskibra kecamatan yang dibentuk dan dilatih	70	Orang	70	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	NA	Orang	NA
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300	Orang	NA	Orang	75	Orang	75	Orang	100	75	Orang	75	Orang	25
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kesepakatan koordinasi/patroli Terpadu Forkompimkap	4	Kesepakatan	4	Kesepakatan	0	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	0	0	Kesepakatan	0	Kesepakatan	NA
		Jumlah Laporan/ Dokumen hasil patroli terpadu Forkompimkap	4	Laporan	4	Laporan	0	Laporan	NA	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	NA
		Jumlah Laporan/ Dokumen hasil patroli terpadu Forkompimkap	12	Laporan	NA	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	75	4	Laporan	4	Laporan	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terfasilitasi	9	Layanan	9	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	Layanan	NA	Layanan	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16,36	Dokumen	NA	Dokumen	15,78	Dokumen	15,78	Dokumen	15,78	17,64	Dokumen	17,64	Dokumen	107,82
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kalurahan	2	Kegiatan	2	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	Dokumen	NA	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	Dokumen	25
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Monografi Kalurahan	20	Dokumen	20	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
		Jumlah Koordinasi Intensifikasi PBB	1	Kegiatan	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	92	Dokumen	NA	Dokumen	23	Dokumen	12	Dokumen	52,17	23	Dokumen	23	Dokumen	25
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Kalurahan yang didampingi dalam penyusunan dokumen Siklus Tahunan Kalurahan	10	Kalurahan	10	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA
		Jumlah Koordinasi Tanah Kas Kalurahan	1	Koordinasi	1	Koordinasi	NA	Koordinasi	NA	Koordinasi	NA	NA	Koordinasi	NA	Koordinasi	NA
		Bimtek Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PIWK)	1	Kegiatan	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	56	Dokumen	NA	Dokumen	51	Dokumen	31	Dokumen	60,78	14	Dokumen	14	Dokumen	25
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pamong Kalurahan yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	40	Orang	40	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	NA	Orang	NA
		Jumlah Koordinasi Kerjasama antar Kalurahan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Dokumen	NA	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	4	Dokumen	4	Dokumen	33,33
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pengisian Lurah yang terfasilitasi	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA	NA	Kalurahan	NA	Kalurahan	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	Dokumen	NA	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Kesepakatan Pamong Kalurahan/Bamuskal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA	NA	Kesepakatan	NA	Kesepakatan	NA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	Dokumen	NA	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	25
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Pengisian Pamong Kalurahan yang terfasilitasi	13	Rekomendasi	13	Rekomendasi	NA	Rekomendasi	NA	Rekomendasi	NA	NA	Rekomendasi	NA	Rekomendasi	NA
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	32	Dokumen	NA	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100	8	Dokumen	8	Dokumen	25
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas terbina	40	Orang	40	Orang	NA	Orang	NA	Orang	NA	NA	Orang	NA	Orang	NA
		Jumlah Koordinasi satgas siaga bencana (mitigasi dan Pencegahan bencana)	1	Koordinasi	1	Koordinasi	NA	Koordinasi	NA	Koordinasi	NA	NA	Koordinasi	NA	Koordinasi	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	Dokumen	NA	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	Dokumen	25
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah	1	Kegiatan	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	Dokumen	NA	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1	Dokumen	25
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Terlaksana	1	Kelompok	1	Kelompok	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA	NA	Kelompok	NA	Kelompok	NA
		Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4	Laporan	NA	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	25
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan Hari Keistimewaan DIY	2	Kegiatan	2	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	4	Laporan	NA	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	25
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Pelaksanaan kelembagaan Asli Terlaksana	1	Kegiatan	1	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kaluraha/Kelurahan yang Didamping	8	Dokumen	NA	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	25	2	Dokumen	2	Dokumen	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kapanewon Semin) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Kapanewon Semin Tahun 2024					Target program / kegiatan Renja Kapanewon Semin Tahun 2025		Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Kapanewon Semin sampai Tahun berjalan		
							Target Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Semin Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Perkiraan Realisasi capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan sampai Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100	9		10		11=(10/4)*100
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	8	Dokumen	NA	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen	25	2	Dokumen	2	Dokumen	25
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Rencana Program Kegiatan Keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024	2	Kegiatan	2	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	NA	NA	Kegiatan	NA	Kegiatan	0,00
		Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan di Kalurahan	1	Dokumen	1	Dokumen	NA	Dokumen	NA	Dokumen	NA	NA	Dokumen	NA	Dokumen	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Semin

Indikator capaian kinerja pelayanan Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM),sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pengukuran capaian kienerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Semin dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagi berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Semin
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Targat/Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Kapanewon Semin				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Persentase Desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan Benar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Semin

2.3.1 Tugas dan Fungsi Kapanewon Semin

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon bahwa Kapanewon Semin mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;

j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
n. Penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kapanewon Semin

Berdasarkan penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya di Kapanewon Semin masih menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kapanewon dan Kalurahan
3. Masih rendahnya sumber daya manusia Pamong Kalurahan
4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat dalam masalah peraturan perundangan.
5. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal
6. Angka kemiskinan masih perlu ditangani serius
7. Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan belum seluruhnya berjalan dengan efektif
8. Implementasi kerjasama antar daerah belum berjalan secara optimal

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Kapanewon Semin adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia Pamong Kalurahan belum merata.
2. Terbatasnya jumlah dan kemampuan personil yang ditempatkan di Kecamatan.
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang masih kurang karena keterbatasan anggaran.
4. Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai kompetensi dibidang Akuntansi
5. Harga kebutuhan pokok masyarakat semakin tinggi
6. Kurangnya SDM yang berkompeten
7. Terbatasnya anggaran dan SDM

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Dearah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Melenium Development Goals*).

Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Indikasi Visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
   "Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"
b. Indikasi Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
   1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
   2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
   3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
   4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
   5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
   6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis pemerintah pusat dan pemerintah D.I. Yogyakarta yang disampaikan oleh Bappeda D.I Yogyakarta dalam Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 sebagai berikut:

a. Isu strategis nasional
   - Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
   - Kemandirian melalui Swasembada Pangan, Air dan Energi;
   - Pengembangan Infrastruktur;
   - Memperkuat Daya Saing SDM;
   - Hilirisasi dan Pengembangan Industri berbasis SDA;
   - Membangun dari Desa;
   - Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata Kelola; dan
   - Kehidupan yang Harmonis dengan Alam, Lingkungan dan Budaya

b. Isu strategis D.I Yogyakarta
   - Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
   - Pengembangan Wilayah Selatan DIY
   - Perkembangan Teknologi Informasi
   - Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif
   - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

- Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta-Prambanan
- Penguatan Ketahanan Pangan
- Pelestarian dan Pengelolaan Budaya
- Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan
- Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
- Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital

c. Isu strategis daerah
- Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
- Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
- Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
- Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
- Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, indikasi tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah:

"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Adapun prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Semin adalah Pamong Nglayani dan Ngayomi meliputi meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan.

Tugas dan fungsi Kapanewon Semin terkait dengan visi dan misi daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Semin dapat mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur,

serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan publik.

Pemerintah Kapanewon Semin sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat agar tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat termasuk sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Semin. Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi beberapa faktor. Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kapanewon Sem dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Peluang (*Opportunities*)
   1) Regulasi yang jelas
   2) Perkembangan tehnologi informasi yang semakin cepat
   3) Semangat kerjasama dan gotong royong aparatur dan masyarakat Kalurahan cukup baik
   4) Situasi dan kondisi Kalurahan yang cukup kondusif, aman dan terkendali.
   5) Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat

b. Ancaman (*Threat*)
   1) Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan.
   2) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
   3) Kondisi sosial masyarakat dan Kalurahan yang cukup beragam
   4) Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah mengikuti mekanisme pasar.
   5) Perubahan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata yang meningkatkan potensi penyakit masyarakat, gesekan/konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta bahaya perdagangan orang.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Semin dalam lima tahun yang akan datang, yaitu :

a. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal
b. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
c. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi
d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif masih rendah dan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal
e. Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimal
f. Infrastruktur publik belum memadai dan belum merata

g. Pelestarian budaya masih rendah.
h. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan.

2.4 *Reviu* terhadap Rancangan Awal RKPD

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal demikian karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD setidaknya lebih dahulu telah dimusyawarahkan mulai dari tingkat Kelurahan, Kapanewon, dan Kabupaten. Atau dengan kata lain telah dimusyawarahkan dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran, yang mengakibatkan program kegiatan pada rancangan awal di Kapanewon Semin tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kapanewon Semin berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah plafon pendanaannya.

Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kapanewon Semin dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi serta pendanaan yang tersedia. Secara rinci hasil review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Semin

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-			100.000.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	-	-		100.000.000,00	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-		100.000.000,00	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-		100.000.000,00	
	Gelar Budaya Jogja					Gelar Budaya Jogja					
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-		40.000.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	-	-		40.000.000,00	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-		40.000.000,00	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-	-		40.000.000,00	
	Penerapan dan Pendampingan					Penerapan dan Pendampingan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000,00	
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	1.271.489.559,00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	1.422.410.163,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11.86 Indeks	15.167.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11.86 Indeks	49.164.500,00	
	Penyusunan Dokumen					Penyusunan Dokumen					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.757.500,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	38.954.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan					Koordinasi dan Penyusunan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	800.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan					Koordinasi dan Penyusunan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	800.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.100.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-					Koordinasi dan Penyusunan DPA-					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.800.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.800.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan					Koordinasi dan Penyusunan					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	800.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan					Koordinasi dan Penyusunan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	3.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	3.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.210.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.210.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.26 Indeks	1.095.886.659,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.26 Indeks	1.142.345.263,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan					Penyediaan Gaji dan Tunjangan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	1.087.326.659,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	1.136.785.263,00	
	Koordinasi dan Penyusunan					Koordinasi dan Penyusunan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.300.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.300.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan					Koordinasi dan Penyusunan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	7.260.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	4.260.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28 Laporan	1.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 Laporan	1.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.264.800,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.508.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan					Pendataan dan Pengolahan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	9.264.800,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	5.508.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Indeks	42.774.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Indeks	54.280.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi					Penyediaan Komponen Instalasi					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan					Penyediaan Peralatan dan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	26.564.200,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	31.520.000,00	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Penyediaan Peralatan Rumah					Penyediaan Peralatan Rumah					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	5.400.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	5.400.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.810.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.810.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	365 Dokumen	1.200.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.850.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Laporan	46.126.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Laporan	76.557.400,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	32.255.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	73 Laporan	43.626.400,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	73 Laporan	43.702.400,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197 Unit	62.270.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197 Unit	93.555.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143 Unit	42.100.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143 Unit	42.100.000,00	
	Pemeliharaan Mebel					Pemeliharaan Mebel					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	1.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	1.500.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	6.870.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	8.400.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	37.755.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	3.800.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	3.800.000,00	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	14.645.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	7.245.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Laporan	7.400.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Koordinasi/Sinergi Perencanaan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	7.400.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Laporan	7.245.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Laporan	7.245.000,00	
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.245.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7.245.000,00	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 Persen	51.067.000,00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 Persen	77.692.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	8 Indeks	32.082.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Indeks koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	8 Indeks	32.582.000,00	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	23.132.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	22.732.000,00	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	8.950.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	9.850.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Indeks Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Indeks Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	30.025.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas/Ormas	30.025.000,00	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8 Indeks	18.985.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8 Indeks	10.965.000,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Penyelenggaraan Lembaga					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	7.120.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	11.865.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	10.965.000,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Indeks Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	18.985.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Indeks Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	4.120.000,00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 Keluarga	2.060.000,00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	-		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	25 Keluarga	2.060.000,00	
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	10.600.000,00	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	551.618.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	7 Laporan	10.600.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	7 Laporan	551.618.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	551.618.000,00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	7.100.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	102.925.100,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	102.650.100,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.53 Indeks	102.925.100,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.53 Indeks	102.650.100,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	94.645.100,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	94.645.100,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	8.280.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	8.005.000,00	
8	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 Persen	36.600.000,00	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 Persen	25.630.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.36 Dokumen	36.600.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.36 Dokumen	25.630.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	1.800.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	1.800.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23 Dokumen	2.500.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23 Dokumen	2.500.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	51 Dokumen	7.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	51 Dokumen	9.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	4.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	2.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	5.030.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	2.100.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	2.100.000,00	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	1.200.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	1.200.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	9.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	7.000.000,00		Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	
	Jumlah				**1.627.326.659,00**	**Jumlah**				**2.327.245.263,00**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, KAPANEWON SEMIN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Kemudian Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Dari peraturan-peraturan yang ada tersebut, jelas bahwa Panewu atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai perangkat daerah kabupaten.

Kapanewon Semin sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Untuk memperjelas arah pembangunan daerah pada setiap tahun, tahapan perencanaan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 juga dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (road map) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Sebagai upaya untuk mewujudkan keterkaitan antara dokumen perencanaan, dilakukan dengan penyelarasan dengan tema dan prioritas nasional maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2026 Kapanewon Semin juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Kalurahan. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Semin

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerjaRenstra PD.

Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD sesuai Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Semin 2025-2029 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Pembangunan Kapanewon Semin

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	2	3	4
	Tujuan :		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,68

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Kapanewon Semin

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2026
1	2	3	4
	Sasaran :		
1.	Dokumen keuangan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
3.	Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
4.	Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,4

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Rancangan Akhir Renstra Kapanewon Semin 2025-2029, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Semin

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4
Tujuan			
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,68
Sasaran			
1.	Dokumen keuangan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
3.	Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
4.	Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,4

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan rancangan Renja Kapanewon Semin Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Semin meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kapanewon Semin dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan Kalurahan. Program dan kegiatan tersebut juga mengacu pada Renstra Kapanewon Semin tahun 2022-2026, yang juga disesuaikan dengan standar program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh SKPD Kapanewon sebagaimana disepakati dalam forum gabungan SKPD Kapanewon.

Renja Kapanewon Semin tahun 2026 terdiri dari 3 Urusan 8 Program 14 Kegiatan dan mencakup 47 Sub kegiatan. Dari program-program tersebut, merupakan program yang menyasar pada internal SKPD yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, dan program yang ditujukan bagi masyarakat dan Kalurahan di wilayah Kapanewon Semin.

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp2.327.245.263,00 dengan perkiraan maju pada tahun berikutnya sebesar Rp1.808.986.659,00. Seluruhnya bersumber pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul serta dari Dana Keistimewa Yogyakarta.

Jumlah Prioritas Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kapanewon Semin tahun 2026 dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pamong Nglayani & Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efiseien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40 (A)	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.422.410.163,00	
					7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.164.500,00	
					7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.954.500,00	
					7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.100.000,00	
					7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.100.000,00	
					7 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000,00	
					7 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00	
					7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	
					7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.210.000,00	
					7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.142.345.263,00	
					7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.136.785.263,00	
					7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000,00	
					7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.260.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000,00	
					7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	
					7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.508.000,00	
					7 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.508.000,00	
					7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.280.000,00	
					7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	
					7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.520.000,00	
					7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.400.000,00	
					7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.810.000,00	
					7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	
					7 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000,00	
					7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.850.000,00	
					7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.557.400,00	
					7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.255.000,00	
					7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.702.400,00	
					7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00	
					7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.555.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.100.000,00	
					7 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	
					7 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.400.000,00	
					7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.755.000,00	
					7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.800.000,00	
Reformasi Birokasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,68	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	7.245.000,00	
					7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.245.000,00	
					7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.245.000,00	
					7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	77.692.000,00	
					7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.582.000,00	
					7 01 03 2.01 0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	22.732.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.850.000,00	
					7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30.025.000,00	
					7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	30.025.000,00	
					7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.965.000,00	
					7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.965.000,00	
					7 01 03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4.120.000,00	
					7 01 03 2.06 0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2.060.000,00	
					7 01 03 2.06 0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	2.060.000,00	
					7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	551.618.000,00	
					7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	551.618.000,00	
					7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	551.618.000,00	
					7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	102.650.100,00	
					7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	102.650.100,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	94.645.100,00	
					7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.005.000,00	
					7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	25.630.000,00	
					7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.630.000,00	
					7 01 06 2.01 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.800.000,00	
					7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.500.000,00	
					7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.000.000,00	
					7 01 06 2.01 0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.000.000,00	
					7 01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.030.000,00	
					7 01 06 2.01 0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.100.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
					7 01 06 2.01 0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.200.000,00	
Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	7 Potensi Budaya	2 22 08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	100.000.000,00	
					2 22 08 5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	
					2 22 08 5.07 0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	
					4 01 04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	40.000.000,00	
					4 01 04 5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000,00	
					4 01 04 5.01 0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000,00	
	Jumlah						**2.327.245.263,00**	

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, di Kapanewon Semin dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		100.000.000,00
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00
1.1	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		40.000.000,00
2	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000,00
2.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.422.410.163,00
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.164.500,00
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.954.500,00
3.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.100.000,00
3.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.100.000,00
3.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000,00
3.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00
3.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00
3.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.210.000,00
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.142.345.263,00
4.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.136.785.263,00
4.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.300.000,00
4.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.260.000,00
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000,00
5.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.508.000,00
6.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.508.000,00
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.280.000,00
7.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00
7.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.520.000,00
7.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.400.000,00
7.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.810.000,00
7.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00
7.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000,00
7.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.850.000,00
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.557.400,00
8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.255.000,00
8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.702.400,00
8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.555.000,00
9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.100.000,00
9.2	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00
9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.400.000,00
9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.755.000,00
9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.800.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.245.000,00
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.245.000,00
10.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.245.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		77.692.000,00
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.582.000,00
11.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	22.732.000,00
11.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.850.000,00
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30.025.000,00
12.1	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	30.025.000,00
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.965.000,00

13.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.965.000,00
14	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4.120.000,00
14.1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2.060.000,00
14.2	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	2.060.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		551.618.000,00
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	551.618.000,00
15.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	551.618.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		102.650.100,00
16	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	102.650.100,00
16.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	94.645.100,00
16.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.005.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		25.630.000,00
17	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.630.000,00
17.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.800.000,00
17.2	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.500.000,00
17.3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.000.000,00
17.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000,00
17.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.030.000,00
17.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.100.000,00
17.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.200.000,00
17.8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25.630.000,00
J U M L A H		**2.327.245.263,00**

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp2.327.245.263,00. Seluruhnya bersumber pada APBD Kabupaten Gunungkidul.

Program dan kegiatan Kapanewon Semin yang direncanakan melalui Renja Kapanewon Semin Tahun 2026 dan rencana maju di tahun 2027 secara rinci dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah: Kapanewon Semin

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	6	4	5	7	8	9	10
					Kapanewon Semin				**2.327.245.263,00**				**1.808.986.659,00**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**100.000.000,00**				**150.000.000,00**
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**100.000.000,00**				**150.000.000,00**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**		**100 Persen**	**100.000.000,00**			**-**	**150.000.000,00**
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan			100.000.000,00		-	-	150.000.000,00
2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja								
						Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-		150.000.000,00
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**40.000.000,00**				**40.000.000,00**
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**40.000.000,00**				**40.000.000,00**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**		**100 Persen**	**40.000.000,00**			**-**	**40.000.000,00**
4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			40.000.000,00		-	-	40.000.000,00
4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan								
7						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-		40.000.000,00
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				**2.187.245.263,00**				**1.618.986.659,00**
7	**01**				**KECAMATAN**				**2.187.245.263,00**				**1.618.986.659,00**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik**		**100 Persen**	**1.422.410.163,00**			**-**	**1.338.631.659,00**
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49.164.500,00			-	38.340.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	6	4	5	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	38.954.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			29.940.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			800.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			400.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.200.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			400.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	17 Laporan	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2.210.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.100.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.142.345.263,00			-	1.094.126.659,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	210 Orang/bulan	1.136.785.263,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.087.326.659,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	6	4	5	7	8	9	10
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.500.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	13 Laporan	4.260.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.300.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			1.000.000,00			-	1.000.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	28 Laporan	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.508.000,00			-	3.500.000,00
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5.508.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah			54.280.000,00			-	45.375.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	2 Paket	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	6 Paket	31.520.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	2 Paket	5.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	6	4	5	7	8	9	10
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	8 Paket	2.810.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	365 Dokumen	1.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.200.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	12 Laporan	1.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			775.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	12 Laporan	8.850.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.400.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76.557.400,00			-	66.220.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	12 Laporan	32.255.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			47.960.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	73 Laporan	43.702.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			17.660.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	12 Laporan	600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			600.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah			93.555.000,00			-	90.070.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	143 Unit	42.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.500.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	30 Unit	1.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.500.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	18 Unit	8.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	6	4	5	7	8	9	10
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	1 Unit	37.755.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			36.670.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	12 Unit	3.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.400.000,00
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana**		**100 Persen**	**7.245.000,00**			**-**	**31.810.000,00**
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			7.245.000,00			-	31.810.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	12 Laporan	7.245.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			31.810.000,00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi**		**100 Persen**	**77.692.000,00**			**-**	**130.420.000,00**
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			32.582.000,00			-	40.690.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	22.732.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			27.840.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	13 Laporan	9.850.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.850.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan			30.025.000,00			-	78.210.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	6	4	5	7	8	9	10
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	10 Pokmas/Ormas	30.025.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			78.210.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			10.965.000,00			-	6.520.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	4 Laporan	10.965.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.520.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan			4.120.000,00			-	5.000.000,00
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								
						Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	25 Keluarga	2.060.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00
7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga								
						Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	25 Keluarga	2.060.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000,00
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase lembaga yang dibina**		**100 Persen**	**551.618.000,00**			**-**	**6.500.000,00**
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			551.618.000,00			-	6.500.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	12 Laporan	551.618.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.500.000,00
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**		**100 Persen**	**102.650.100,00**			**-**	**84.325.000,00**
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			102.650.100,00			-	84.325.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	6	4	5	7	8	9	10
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	75 Orang	94.645.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			71.825.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	8.005.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.500.000,00
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**		**100 Persen**	**25.630.000,00**			**-**	**27.300.000,00**
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			25.630.000,00			-	27.300.000,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan								
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	23 Dokumen	2.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	9.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			13.500.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa								
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	6	4	5	7	8	9	10
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.030.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa								
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			800.000,00
J U M L A H									**2.327.245.263,00**				**1.808.986.659,00**

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja 2026 berisi Rencana Kerja Kapanewon Semin Tahun 2026 yang memuat evaluasi Renja Kapanewon Semin tahun 2024, tujuan, sasaran,dan rencana kerja serta pendanaan Kapanewon Semin. Rencana Kerja Kapanewon Semin disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki serta menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di Renstra Perangkat Daerah. Rencana Kerja Kapanewon Semin juga merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan menyusun Rencana Kerja ini diharapkan bisa menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Kapanewon Semin Tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam Rencana Kerja Tahun 2026 dan penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

KAPANEWON SEMIN,

ttd

HARYANTO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XL
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA KAPANEWON PATUK
TAHUN 2026
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah membuat surat edaran untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan l Rencana Kerja Perangkat Daerah secara khusus diatur dalam pasal 131 sampai dengan pasal 143 Permendagri 86 Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut dan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kapanewon Patuk yang selanjutnya disingkat Renja Kapanewon Patuk adalah dokumen perencanaan Kapanewon Patuk untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Kapanewon Patuk dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif Renja Kapanewon Patuk disesuaikan dengan Program Prioritas RKPD. Rencana Kerja Kapanewon Patuk dengan Renstra Kapanewon Patuk, menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD Kabupaten Gunungkidul.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, maka Bupati terpilih harus menyusun RPJMD tahun 2025-2029. Sejalan terhadap penyusunan RPJMD maka perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2025-2029.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memuat visi dan misi Bupati terpilih, dan menjadi dasar penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2026.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan hasil evaluasi Renja tahun 2025 dimana hal tersebut dimaksud untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja dapat optimal pencapaian sasaran Renstra Perangkat daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 menyajikan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta rencana pendanaan tahun 2026 dan perkiraan maju yaitu tahun 2027.

Keterkaitan antara Renja Kapanewon Patuk 2026 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainya adalah:

1. Renja PD dengan RKPD
   RKPD menjadi acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif Renja PD disesuaikan dengan program prioritas
   PD.
2. Renja PD dengan Renstra PD
   Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja K/L (Kementerian/ Lembaga) dan PD Provinsi
   Renja PD memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD provinsi

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. PP Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjnag Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6).
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2026 menyesuaikan urusan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru, serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
5. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Kapanewon Patuk.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyajian Rencana Kerja Kapanewon Patuk disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON PATUK
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Patuk dan Capaian Renstra Kapanewon Patuk
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Patuk
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Patuk
- 2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Patuk

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON PATUK

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Patuk dan Capaian Rencana Strategis Kapanewon Patuk

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Patuk menjelaskan mengenai kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (n-2/ Tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/Tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2025). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Realisasi Renja Kapanewon Patuk mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Patuk danatau realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Tidak Ada Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Namun Ada Realisasi Keuangan yang tidak memenuhi target yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
   Kapanewon Patuk pada tahun 2024 mengampu 8 program yaitu:
   - Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
   - Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan
   - Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
   - Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
   - Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
   - Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
   - Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
   - Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

   Dari 8 program tersebut telah terpenuhi target kinerja keluaran yang telah direncanakan. Pada tahun 2024 capaian fisik Kapanewon Patuk mencapai 100%.
   Dari 8 program tersebut telah terpenuhi target kinerja keluaran
3. Pada tahun 2024 realisasi program dan kegiatan di Kapanewon Patuk tidak ada yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan.
4. Tidak Ada Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan tahun 2024. Dan Adapun Faktor penyebab tidak tercapaianya target keuangan karena ada dua PNS yang Purna tugas yaitu panewu dan kepala jawatan pelayanan umum. Namun pada perubahan DPA tidak dilakukan pergeseren maupun pengurangan anggaran sesuai dengan hasil desk TAPD;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD yaitu serapan keuangan belanja pegawai tidak maksimal;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
   a. Perhitungan gaji dan tunjangan ASN lebih cermat;
   b. memaksimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian target kinerja kegiatan.

Pada tahun anggaran 2024 Kapanewon Patuk melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.768.055.924,00 dengan terealisasi sebesar Rp1.708.513.879,00 (96,63%). Realisasi anggaran untuk program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian Keuangan	Capaian Fisik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.188.697.924,00	1.134.179.779,00	54.518.145,00	95,41	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.147.500,00	32.315.000,00	832.500,00	97,49	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.037.500,00	27.205.000,00	832.500,00	97,03	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	700.000,00	700.000,00	-	100,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	570.000,00	570.000,00	-	100,00	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	585.000,00	585.000,00	-	100,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	435.000,00	435.000,00	-	100,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.110.000,00	2.110.000,00	-	100,00	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	710.000,00	710.000,00	-	100,00	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	958.604.024,00	907.469.807,00	51.134.217,00	94,67	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	950.727.124,00	899.592.907,00	51.134.217,00	94,62	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.960.000,00	1.960.000,00	-	100,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.916.900,00	5.916.900,00	-	100,00	100
Adinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.391.900,00	4.175.715,00	216.185,00	95,08	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.391.900,00	4.175.715,00	216.185,00	95,08	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.822.000,00	65.522.000,00	300.000,00	99,54	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.595.000,00	5.595.000,00	-	100,00	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian Keuangan	Capaian Fisik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.727.000,00	48.427.000,00	300.000,00	99,38	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100,00	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.650.000,00	1.650.000,00	-	100,00	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.050.000,00	5.050.000,00	-	100,00	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.762.500,00	52.852.257,00	1.910.243,00	96,51	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.162.500,00	24.285.000,00	877.500,00	96,51	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	25.967.257,00	1.032.743,00	96,18	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	-	100,00	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.970.000,00	71.845.000,00	125.000,00	99,83	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.100.000,00	41.975.000,00	125.000,00	99,70	100
Pemeliharaan Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.370.000,00	4.370.000,00	-	100,00	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.600.000,00	23.600.000,00	-	100,00	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000,00	900.000,00	-	100,00	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	199.690.000,00	194.937.000,00	4.753.000,00	97,62	100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.740.000,00	14.740.000,00	-	100,00	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian Keuangan	Capaian Fisik
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.740.000,00	14.740.000,00	-	100,00	100
Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	184.950.000,00	180.197.000,00		97,43	100
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	176.750.000,00	171.997.000,00	4.753.000,00	97,31	100
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.200.000,00	8.200.000,00	-	100,00	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.980.000,00	39.980.000,00	-	100,00	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.290.000,00	31.290.000,00	-	100,00	100
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21.650.000,00	21.650.000,00	-	100,00	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.640.000,00	9.640.000,00	-	100,00	100
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8.690.000,00	8.690.000,00	-	100,00	100
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6.075.000,00	6.075.000,00	-	100,00	100
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.615.000,00	2.615.000,00	-	100,00	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.550.000,00	8.550.000,00	-	100,00	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.740.000,00	6.740.000,00	-	100,00	100
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.740.000,00	6.740.000,00	-	100,00	100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.810.000,00	1.810.000,00	-	100,00	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian Keuangan	Capaian Fisik
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.810.000,00	1.810.000,00	-	100,00	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	113.598.000,00	113.595.100,00	2.900,00	100,00	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	113.598.000,00	113.595.100,00	2.900,00	100,00	100
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	102.643.000,00	102.640.100,00	2.900,00	100,00	100
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.955.000,00	10.955.000,00	-	100,00	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.970.000,00	16.702.000,00	268.000,00	98,42	100
Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.970.000,00	16.702.000,00	268.000,00	98,42	100
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.050.000,00	2.050.000,00	-	100,00	100
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.595.000,00	2.487.000,00	108.000,00	95,84	100
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.140.000,00	2.980.000,00	160.000,00	94,90	100
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.190.000,00	3.190.000,00	-	100,00	100
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.220.000,00	1.220.000,00	-	100,00	100
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Capaian Keuangan	Capaian Fisik
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.545.000,00	1.545.000,00	-	100,00	100
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.830.000,00	1.830.000,00	-	100,00	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	100
Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	100.570.000,00	100.570.000,00	-	100,00	100
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	100.570.000,00	100.570.000,00	-	100,00	100
	1.768.055.924,00	1.708.513.879,00	59.542.045,00	96,63	100,00

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Kapanewon Patuk Tahun 2024, disajikan dalam tabel. 2.2. sebagai berikut:

Tabel. 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Patuk

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realiasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
X.XX.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Indeks perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana*		*4,143*	*100*	*100*	100	*100*			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat		2	2	2	100	2			
		Jumlah dokumen Renja, Jumlah dokumen Renja perubahan		2	2	2	100	2			
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	1	1	100	1			
		Jumlah Dokumen RKA		1	1	1	100	1			
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	1	1	100	1			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA		1	1	1	100	1			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		3	3	3	100	3			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD, Perjanjian Kinerja, ROPK		3	3	3	100	3			
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2	2	2	100	2			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA, Perubahan Perjanjian Kinerja		2	2	2	100	NA			
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat		2	2	2	100	2			
		Jumlah Dokumen LKJLP, Jumlah Laporan Monev, Jumlah Laporan Teppra		2	2	2	100	2			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
X.XX. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		17	17	17	100	17			
X.XX.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Indek Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*84*	*84*	*84*	100	*84*			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan		12	12	12	100	12			
		Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan AN		12	12	12	100	12			
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	1	100	1			
		Jumlah dokumen laporan akhir tahun		1	1	1	100	1			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		12,00	13,00	13,00	100	13			
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ SPJ		12	12	12	100	12			
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran		1	1	1	100	1			
X.XX.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*6*	*6*	*6*	100	*6*			
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan		16	16	16	100	6			
		Jumlah ASN tertangani		16	16	16	100	16			
X.XX.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Indek Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*51,571*	*51,571*	*51,571*	100	*51,571*			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4	100	4			
		Jumlah Komponen Kelistrikan yang Tersedia		4	4	4	100	4			
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									
		JumlahAlat Tulis Kantor yang Tersedia		2	2	2	100	2			
		Jumlah Papan Kegiatan/ Papan Pengumuman yang Terbeli		1	0	0	0	NA			
		Jumlah Printer yang terbeli		1	1	1	100	0			
		Jumlah Laptop yang terbeli		1	0	0	0	1			
		Jumlah CCTV yang terbeli		1	0	0	0	0			
		Jumlah Pendingin Ruangan (AC) yang terbeli		4	3	3	100	0			
		Jumlah PC All in One yang terbeli		2	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah mesin ketik elektrik yang terbeli		1	0	0	0	0			
		Jumlah Filling Kabinet yang terbeli		0	0	0	0	0			
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan									
				16,00	4	4	100	4			
		Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Yang Terbeli		4	4	4	100	4			
		Jumlah Hari Terfasilitasinya Pemerliharaan Kebersihan Kantor		12	0	0	0	NA			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan						4			
		Jumlah Barang Cetakan		30	4	4	100	4			
		Jumlah Lembar Penggandaan		6000	12	12	100	12			
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12,00	12,00	12,00	100	0			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah Tagihan Surat Kabar yang Terbayar		12,00	12,00	12,00	100	0			
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		200	100	100	100	100			
		Jumlah Tamu yang Terfasilitasi Minuman dan Snack		200	100	100	100	100			
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Peserta Rapat yang Terfasilitasi Makan Minum dan Snack		300	300	300	100	100			
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana		68	68	68	100	70			
X.XX.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana*		*100*	*100*	*100*	100	*100*			
		Persentase pengadaan BMD penunjang		*100*	*100*	*100*	100	*100*			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah lemari kayu yang terbeli		1	0	0	0	0			
		Jumlah lemari kaca yang terbeli		0	0	0	0	0			
		Jumlah kursi tamu yang terbeli		0	0	0	0	0			
		Jumlah kursi rapat yang terbeli		0	0	0	0	0			
		Jumlah kursi pejabat yang terbeli		0	0	0	0	0			
		Jumlah kursi tunggu yang terbeli		0	0	0	0	2			
		Jumlah meja rapat yang terbeli		0	0	0	0	0			
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah instalasi jaringan listrik yang terbeli		0	0	0	0	0			
X.XX.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*49*	*49*	*49*	100	*49*			
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12,00	12,00	12,00	100	12			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah Hari Terfasilitasinya Pengadministrasian Surat Menyurat		457	462	462	100	462			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36,00	36,00	36,00	100	36			
		Jumlah Rekening Jasa Tagihan Telepon yang Dibayar (1 rekening x 12 bulan)		12	12	12	100	12			
		Jumlah Rekening Jasa yang Diterima Atas Pemanfaatan Listrik (2 rekening x 12 bulan)		24	24	24	100	24			
X.XX.2.0.8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	1	1	100	1			
X.XX.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang*		*148*	*148*	*148*	100	*148*			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
		Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya		1	1	1	100	1			
		Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas		1	1	1	100	1			
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya		9	9	9	100	9			
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas		27	27	27	100	27			
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		1	1	1	100	1			
		Jumlah paket pemeliharaan mebelair		1	1	1	100	1			
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									
		Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya		7	7	7	100	7			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya		2	2	2	100	2			
		Jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya		6	6	6	100	6			
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya		7	7	7	100	7			
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									
		Jumlah paket Pemeliharaan Gedung kantor		1	1	1	100	1			
		Jumlah paket pemeliharaan Rutin Rumah Dinas		1	1	1	100	1			
		Jumlah Bulan terfasilitasi keamanan Gedung Kantor oleh Petugas Jaga Malam (tenaga Kontrak)		12	12	12	100	1			
		Jumlah Jasa Sewa Tanah Gedung Kantor		12	12	12	100	1			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									
		Jumlah pendingin ruangan (AC) yang terfasilitasi pemeliharaannya		4	4	4	100	4			
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen RTP/SPIP Jumlah dokumen SKM Jumlah dokumen SOP									
		Jumlah Dokumen RTP/SPIP Jumlah dokumen SKM Jumlah dokumen SOP		4	4	4	100	4			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana		100	100	100	100	100			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
7.01.02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon terlaksana dengan baik*		*2*	*2*	*2*	100	*2*			
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
		Jumlah kesepakatan partisipasi Peringatan Hari Jadi Gunungkidul		1	1	1	100	NA			
		Jumlah Kelompok Seni yang Dikirim dan Dipentaskan		1	1	1	100	NA			
7.01.02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*		*20*	*20*	*20*	100	*20*			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah kesepakatan forum desa siaga		1	1	1	100	1		
		Jumlah kesepakatan forum kecamatan sehat		1	1	1	100	1		
		Jumlah kesepakatan penanganan PMKS		1	1	1	100	1		
		Jumlah kesepakatan update data SID/SIKAB		1	1	1	100	1		
		Jumlah dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial		1	1	1	100	1		
		Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat		90	90	90	100	90		
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)		30	30	30	100	30		
		Jumlah KK yang menerima Penampungan AIr Hujan (PAH)-pokir		2	2	2	100	2		

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan		4500	4500	4500	100	4500			
		Jumlah peserta pembinaan /koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum		30	30	30	100	30			
		Jumlah peserta sosialisasi pengurusan ijin UMK		60	60	60	100	60			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi		100	100	100	100	100			
7.01.03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Indek Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		*23*	*23*	*23*	100	*23*			
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen usulan rencana kegiatan (DURKP)		1	1	1	100	1			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan/Bumkal		1	1	1	100	1			
		Jumlah penyelenggaraan bimtek perencanaan pembangunan kalurahan bagi pamong kalurahan (PIWK)		1	1	1	100	1			
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah perlombaan kalurahan tingkat kapanewon		1	1	1	100	1			
		Jumlah profil kalurahan dan kapanewon tersusun		12	12	12	100	12			
		Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kapanewon		4	4	4	100	4			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
X.XX.03.20.1.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		29	11	11	100	11			
7.01.03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Indek Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*		*8*	*8*	*8*	100	*8*			
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya									
		Jumlah kesepakatan rakor TP PKK		12	12	12	100	12			
		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna		1	1	1	100	1			
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat		1	1	1	100	1			
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang mengikuti pameran pembangunan		25	25	25	100	25			
		Jumlah kesepakatan koordinasi masa tanam, perbenihan, pemupukan, perkebunan, peternakan, dan budidaya perikanan		1	1	1	100	1			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi		100	100	100	100	100			
7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*		*11*	*11*	*11*	100	*11*			
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah Pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat kecamatan		1	1	1	100	1			
		Jumlah pelaksanaan safari tarawih tingkat kecamatan		10	10	10	100	10			
7.01.04.2.02	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*									
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1	1	1	100	1			
		Jumlah penyakit masyarakat yang terpetakan		1	1	1	100	1			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi		100	100	100	100	100			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
7.01.05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Indek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*		*38*	*38*	*38*	100	*38*			
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
		Jumlah Kegiatan HUT yang terfasilitasi Pelaksanaannya		1	1	1	100	1			
		Jumlah paskib kapanewon yang dibentuk dan dilatih		75	65	65	100	75			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
		Jumlah kesepakatan koordinasi FORKOMPIMKAP		1	1	1	100	1			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana		100	100	100	100	100			
7.01.06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kepala Desa*		*22*	*22*	*22*	100	*22*			
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan									
		Jumlah peserta pembinaan penyusunan produk hukum kalurahan		0	*80*	*80*	100	*80*			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
		Jumlah koordinasi bidang pemerintahan		0	4	4	100	4			
		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB		1	1	1	100	1			
		Jumlah monografi kalurahan dan kapanewon yang tersusun		24	24	24	100	24			
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
		Jumlah Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKal		12	12	12	100	12			
		Frekuensi monev pengelolaan keuangan kalurahan		0	11	11	100	11			
		Jumlah pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan desa		0	2	2	100	2			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa								
		Jumlah koordinasi dengan Lurah dan Pamong lainnya		0	4	4	100	4		
		Jumlah Pamong Kalurahan yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan		0	120	120	100	120		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggarakan pemilihan lurah		7	7	7	100	6		
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah BPKal/BPK yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan		120	120	120	100	120			
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa									
		Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan atau Staf Pamong Kalurahan		10	10	10	100	10			
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
		Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya		90	90	90	100	90			

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah satgas siaga bencana yang meningkat pengetahuannya		60	60	60	100	60			
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
		Jumlah kesepakatan koordinasi tataruang kalurahan		2	2	2	100	2			
		Frekuensi koordinasi administrasi pertanahan		2	2	2	100	2			
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan		100	100	100	100	100			
2.22.08.2.09	*Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*	*Jumlah laporan penyelenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan lembaga Budaya*		*2*	*2*	*2*	100	*2*			
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta									

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
		Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan Hari Keistimewaan DIY		2	2	2	100	2			
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penunjang Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100	100	100	100	100			
4.01.04.5.01	*Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan*	*Jumlah dokumen penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan*		*2*	*2*	*2*	100	*2*			
4.01.04.5.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan dan rencana program kegiatan keistimewaan									
		Jumlah Dokumen Hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan dan rencana program kegiatan keistimewaan		0	3	3	100	3			
4.01.04.501.06	Perencanaan dan Pengendalian Urusan kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan kelembagaan		2	2	2	100	2			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Patuk

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Patuk mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kapanewon Patuk sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, di samping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Patuk merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan setrategis Pemerintah. Adapun tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam pemerintahan Kapanewon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah Kapanewon Patuk. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui pelayananan satu pintu/pelayanan terpadu di Kapanewon, jenis layanan yg dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Legalisasi Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga (KK);
3. Pelayanan Dispensasi Nikah;
4. Pelayanan Surat Pindah Datang/Pergi Penduduk;
5. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. Pelayanan Legalisasi Akta Kelahiran;
7. Pelayanan akta kematian;
8. Pelayanan BPJS/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
9. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

Indikator kinerja utama kapanewon ditetapkan oleh Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021, salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kapanewon perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon tahun 2026. Kinerja pelayanan Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
											Capaian Target Renstra PD			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
A	IKU (Indikator Kinerja Utama)													
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat													
	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	80,27	80,31	96,57	97,35	97,50	80,27	96,32	97,15	99,64	96,15	100	

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pelayanan Kapanewon Patuk Tahun 2024 sebesar 97,15% meningkat sebesar 0,83% dari tahun sebelumnya yaitu 96,32% pada tahun 2023.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Patuk

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Kapanewon Patuk dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kapanewon Patuk

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Panewu Patuk adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarkat desa, maka dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. merumuskan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
7. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang ada di Kapanewon;
9. menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Patuk, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Patuk dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Patuk sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kapanewon Patuk hingga tahun 2024 secara langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :

1. Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan SKCK, Surat Keterangan Tindak Mampu, dll.

2. Terselesaikannya pendataan statistik (SIPEDET-CANTIK)
3. Terlaksanaya monitoring kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
4. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.
6. Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
7. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.
8. Terlaksananya kegiatan droping air bagi masyarakat miskin.
9. Terlaksananya bantuan sosial jamban sehat dan saptitank untuk Keluarga Miskin.
10. Terlaksanakannya kegiatan safari tarawih.
11. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan desa.
12. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
13. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal (lomba jatilan dll).
14. Terlaksananya pembuatan buku profil desa, buku profil Kapanewon dan buku monografi.
15. Terfasilitasinya proses dan mekanisme perizinan.

Adapun tingkat kinerja Kapanewon Patuk yang tidak secara langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya kegiatan pelayanan antara lain :

1. Terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.
3. Tefasilitasinya penyelenggaraan ketatalaksanaan kepegawaian.
4. Terfasilitasinya pengembangan kapasitas aparatur.
5. Terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti : LKjIP, laporan Pengendalian, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Laporan Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan keuangan bulanan.
6. Terselesaikannya Pelaporan Barang Milik Daerah yaitu Laporan Aset dan Persediaan Bulanan maupun Semesteran dan akhir tahun.
7. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon, Rencana Strategis Kapanewon, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kapanewon Patuk

Untuk mendapatkan potret gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Patuk, berikut dijabarkan secara rinci yang meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang fisik, dan bidang pemerintahan.

A. Bidang Sosial Budaya

Permasalahan

a. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
b. Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya.
c. Belum sinkronnya data-data keluarga miskin dan pengangguran yang ada.
d. Belum optimalnya penyajian event-event budaya di dalam pengembangan pariwisata

B. Bidang Ekonomi

Permasalahan

a. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun.
b. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.
c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan baik antar PD maupun sumber dana di bidang ekonomi.
d. Potensi wisata belum dikelola secara profesional oleh pelaku pariwisata.
e. Belum adanya pabrik pengolahan hasil tanaman keras, pabrik pengolahan coklat yang harganya terjangkau oleh petani.
f. Belum adanya pusat penjualan (show room) bagi hasil industri Kapanewon Patuk.
g. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
h. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
i. Belum optimalnya kunjungan wisatawan.
j. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.
k. Penjualan hasil tanaman keras belum optimal seperti, coklat, mete, sukun, dll
l. Kurangnya jiwa kewirausahaan/ penguasaan pasar untuk produk-produk UMKM

C. Bidang Fisik Prasarana

Permasalahan

a. Gedung Kapanewon Patuk menempati Tanah Kas Kalurahan, dan merupakan tanah labil sehingga rawan longsor. Serta keberadaan Gedung kapanewon yang di jalur cepat Jalan Yogya Wonosari yang rawan kecelakaan sehingga tidak aman untuk pelayanan masyarakat.
b. Diperlukan jalan dengan 4 jalur dan pembatas jalan untuk memperbaiki geometri jalan.
c. Belum adanya prasarana pengolahan air sungai Oya untuk air minum, atau pemuatan karamba untuk budidaya ikan.
d. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai.
e. Kurangnya koordinasi dengan Pemda Bantul untuk penataan kawasan hargodumilah agar tidak terkesan kumuh.

D. Bidang Pemerintahan

Permasalahan

a. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
b. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
c. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum maksimal
d. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai.
e. Ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah daerah yang berupa Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyelenggaraan desa
f. Masih minimnya data-data potensi wilayah rawan bencana secara lengkap, detail, valid, dan modern
g. Kurangnya penguasaan teknologi informasi di kalangan aparat.
h. Kurangnya kepedulian tanggap bencana

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan diatas berdampak pada pencapaian visi kepala daerah tahun 2025-2029 yaitu "Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

Dengan Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri;
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif;
4. Membangun kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban;
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dna toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa indonesia;

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2025 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY sebagai berikut:

a. Isu strategis nasional

- Demokrasi dan hak asasi manusia
- Kemandirian melalui swasembada pangan, air dan energi
- Pengembangan infrastruktur
- Memperkuat daya saing SDM
- Hilirisasi dan pengembangan industri berbasis SDA
- Membangun dari desa
- Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata kelola
- Kehidupan yang harmonis dengan alam, lingkungan dan budaya

b. Isu strategis Daerah Istimewa Yogyakarta

- Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
- Pengembangan wilayah selatan DIY
- Perkembangan teknologi informasi
- Pemenuhan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif
- Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- Penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik
- Penyelesaian destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta – Prambanan
- Penguatan ketahanan pangan
- Pelestarian dan pengelolaan budaya
- Penguatan resiliensi dan manajemen bencana, serta pembangunan berkelanjutan
- Penguatan kapasitas fiskal
- Pengembangan ekonomi kreatif termasuk ekonomi digital

c. Isu strategis daerah

- Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
- Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
- Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
- Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas,cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
- Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah "Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban". Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

TargetSDGs

Target utamanya mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau *social economic development* dan lingkungan yang besar atau environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGD) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan (2030)

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

Tujuan 5 - Kesetaraan gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak
Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau
Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim
Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
Tujuan 14 - Ekosistem laut
Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
Tujuan 15 - Ekosistem daratan
Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan
Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Adapun prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Patuk adalah Reformasi Birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat serta prioritas peningkatan ekonomi dengan sasaran daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat.

Mendasar tugas pokok, fungsi yang diemban oleh Kapanewon Patuk adalah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Tugas dan fungsi Kapanewon Patuk terkait dengan visi dan misi daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Patuk dapat mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM di kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang beradab dan pelayan publik.

Kapanewon Patuk sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Kapanewon Patuk

Dalam meningkatkan pelayanan Kapanewon Patuk, tantangan yang dihadapi meliputi :

1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, kekeringan dan angin puting beliung.
2. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan/Kapanewon Patuk kadangkala mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat, terutama dalam bidang infrastruktur dan perekonomian.
3. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi.
4. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi.
5. Penguasaan teknologi masih rendah.

6. Data pembangunan dan kemiskinan belum tersedia secara sistematis dan integratif.
7. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat.
8. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepetingan yang sering saling bertentangan.
9. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Sedangkan peluang yang dimiliki Kapanewon Patuk untuk peningkatan pelayanan meliputi :

1. Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.
2. Jumlah aparatur pemerintah Kapanewon dan desa yang cukup memadai baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.
3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan.
4. Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan dan peternakan.
5. Mempunyai potensi wisata dan kerajinan kayu yang cukup prospektif.
6. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional.
7. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
8. Adanya kerjasama antara Kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten-kabupaten yang berbatasan.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strateris untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

1. Peningkatan kinerja SDM aparatur Kapanewon, desa dan masyarakat baik hardware, software, dan brainware.
2. Pemantapan sistem manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga terjaminnya validasi data untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah untuk mendukung kebutuhan dalam dan luar daerah.
4. Peningkatan potensi wisata dan kerajinan.
5. Optimalisasi penggunaan APBD Kabupaten, Dana Keistimewaan dan APBN untuk kegiatan pembangunan dan untuk pencegahan/penanggulangan bencana.
6. Optimalisasi peran dan fungsi masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan dan proses pengembangan wilayah.
7. Peningkatan peran aparat dan masyarakat dalam pemanfaatan potensi wilayah.
8. Peningkatan penyebarluasan informasi tentang kesempatan kerja.
9. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam peningkatan pembangunan, ekonomi dan sosial.

2.4. Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan inspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD telah dilakukan melalui musyawarah mulai dari tingkat kalurahan, kapanewon dan kabupaten dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Dalam reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan terdapat point-point sebagai berikut:

1. Proses pertama yang dilakukan adalah membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Total pagu Kapanewon Patuk pada rancangan awal sebesar Rp2.660.938.116,00 Pada tahapan penyempurnaan awal renja ini pagu menjadi sebesar Rp1.500.380.013,00, yang terdiri dari anggaran DAU sebesar 400.000.000,00 dan anggaran PIWK sebesar Rp4.460.000,00 anggaran dropping air sebesar Rp40.000.000. Untuk pagu gaji ASN sebesar Rp 915.920.012,50 untuk penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan sebesar Rp100.000.000,00 dan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan sebesar Rp40.000.000,00. Untuk Gaji THL masih menungu ketetapan dari Pemerintah Daerah. Pagu ini sesuai dengan SE Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja PD TA 2026 No 13 Tahun 2025.
2. Alasan dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan adalah untuk mengetahui kebutuhan dari Kapanewon Patuk, salah satunya dengan menyesuaikan Program, Kegiatan, subkegiatan dan indikator subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan pagu anggaran.
3. Proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan menghasilkan adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Secara rinci hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Patuk

Recana Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				150.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAANKEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				150.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000	
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	150.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				86.565.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.480.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	5.480.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	7.920.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				81.085.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	69.385.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	11.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.485.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				41.776.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				28.511.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	29 Dokumen	15.756.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	23.730.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.755.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	12.510.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				13.265.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Patuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Lembaga Kemasyarakatan	6.370.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Patuk	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Lembaga Kemasyarakatan	7.590.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	6.895.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	10.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				17.560.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.960.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				-	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.540.000,00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11 Laporan	13.960.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	11.280.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah				3.600.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	3.600.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				117.722.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				117.722.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kapanewon Patuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	112.327.500	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kapanewon Patuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	30.050.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5.395.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				7.600.000	
		Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen			Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				53.544.294	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHANDESA					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				53.544.294	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen	5.504.294	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	2.420.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28 Dokumen	3.385.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28 Dokumen	3.980.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa	24 Dokumen	19.130.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa	24 Dokumen	11.760.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 Dokumen	7.380.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 Dokumen	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 Dokumen	3.300.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 Dokumen	1.200.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7 Dokumen	5.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	2.240.000	
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 Dokumen	45.770.000,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	5.815.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	4.960.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 Dokumen	4.030.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	2.720.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.193.770.322	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.319.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.950.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	462.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	322.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	570.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	675.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	655.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	435.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	575.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	4.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	3.475.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.913.421.322	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Patuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/bulan	1.904.986.322	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Patuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	915.920.013	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.640.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.795.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.500.000	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kapanewon Patuk				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.510.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	1.510.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	1.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				65.192.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Patuk	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	23.042.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Patuk	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	7.500.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Patuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	5.600.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Patuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	3.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Patuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	429 Laporan	10.750.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	429 Laporan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Patuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	58 Unit	70.500.000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Patuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	58 Unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54.442.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.012.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	30.430.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	40.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Patuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.600.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				79.385.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Patuk	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	114 Unit	34.865.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Patuk	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	114 Unit	45.000.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kapanewon Patuk	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	1.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kapanewon Patuk	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Patuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	7.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Patuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	7.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Patuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	32.720.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Patuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Patuk	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Patuk	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3.300.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Asosiasi-asosiasi, pergurunan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun hasil informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kalurahan maupun kapanewon. Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/lingkungan yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum musrenbangkal.
2. Di forum musrebangkal menghasilkan skala prioritas usulan tingkat kalurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari kalurahan untuk mengawal usulan tersebut di forum musrenbang tingkat Kapanewon.
3. Hasil musrenbang Kapanewon merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu isu penting dari masing masing SKPD yang ada. Kegiatan musrenbang kapanewon yang telah disepakati antara lain dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial berupa jamban dan septictank kepada keluarga miskin, dalam bidang ekonomi menyelenggarakan bimtek perencanaan pembangunan kalurahan dan bimtek pengelolaan keuangan kalurahan.
4. Kedepan kamus usulan sudah ada sehingga pada saat pelaksanaan musrenbangkal semua usulan program kegiatan yg ada di kalurahan bisa terakomodir sesuai kegiatan yang direncanakan, sehingga terjadi sinkronisasi data antara usulan pemerintah kalurahan, kapanewon dan kabupaten.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisine/ Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
1	PIWK-Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Kalurahan Patuk	Terlaksananya bimtek pengelolaan keuangan desa	1 kali	4.460.000,00	4.460.000,00	Diterima

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan PD dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.

Kebijakan nasional tentang kapanewon tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Sedangkan Kapanewon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

A. Tugas

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Panewu Patuk adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarkat desa.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang ada di Kapanewon;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Patuk

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kapanewon Patuk didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Patuk yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kapanewon Patuk.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	97,50

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Secara rinci sasaran perangkat daerah kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcame)
1	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP	1. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 2. . 3. Meningkatnya Akuntabilitas PD	1.Indeks pelayanan kapanewon 2.Nilai AKIP PD
2	Peningkatan Ekonomi	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan

Berdasarkan tugas dan fungsi Kapanewon, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021 pada tanggal 26 November 2021. Setelah disepakatinya Indikator Kinerja Utama, maka Perangkat Daerah berkewajiban untuk mengerahkan sumber daya yang ada dalam rangka pencapaian sasaran strategis tersebut. Capaian tujuan dan IKU PD pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Tujuan Tahun 2024

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target 2024	Realisasi Tahun 2024
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas pelayanan Kapanewon tahun 2026	96,57	97,35
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2	2

Tabel 3.3
Realisasi IKU Tahun 2024

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,57	97,15

Melihat capaian target-target tersebut di tahun 2024 maka dilakukan proyeksi terhadap target tujuan kinerja, dan target IKU PD tahun 2026 sebagaimana berikut:

Tabel 3.4
Tujuan Kapanewon Patuk

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026	Proyeksi Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks kualitas Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	97,50	97,50
2	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan	5	5

Tabel.3.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU PD Tahun 2025-2029	Proyeksi Target IKU PD Tahun 2026
1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,35	97,50

Capaian Sasaran Kapanewon Patuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Sasaran Kapanewon Patuk Tahun 2024

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2024	Realisasi Sasaran PD Tahun 2024
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,57	97,15
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	82	-
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	2	2

Melihat capaian target di tahun 2024 maka dilakukan proyeksi terhadap target Sasaran PD tersebut sebagaimana berikut:

Tabel.3.7
Sasaran Kapanewon Patuk Tahun 2026

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran PD dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Proyeksi Target Sasaran PD Tahun 2026
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Reformasi Birokrasi	97,35	97,50
2.	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100
3.	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	100	100
4.	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	80	80

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pembangunan yaitu reformasi birokrasi dengan sasaran daerah kapasitas kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat, serta prioritas peningkatan ekononomi dengan sasaran daerah pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat.
2. Pengurangan kemiskinan dengan mengembangkan kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat dengan meningkatkan ketrampilan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam menjadi produk bernilai tambah dan Peningkatan akses pemasaran melalui promosi produk.
3. Pencapaian IKU untuk tahun 2025-2029 dengan indikator kinerja utama "Indeks Pelayanan Kapanewon Meningkat" yang formulasi perhitungannya menggunakan lima komponen yaitu persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu, persentase KK miskin yang tertangani, persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum, dan nilai indeks kepuasan masyarakat.
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dengan penumbuhan BUMKalurahan yang dapat menumbuhkan iklim usaha kecil yang produktif.
5. Melakukan program kesehatan, masyarakat melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.
6. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanakan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,
7. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif.

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

a. Jumlah Program dan Kegiatan,
   Kapanewon Patuk pada tahun 2026 mengampu 8 program, 17 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan
b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu masyarakat Kapanewon Patuk dan Perangkat Kalurahan di Kapanewon Patuk
c. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.
   Kapanewon Patuk pada tahun 2026 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.660.938.116,00
d. Sumber Dana pagu indikatif Kapanewon Patuk Berasal dari PIS, PIWK, dan Dana Keistimewaan.

Program prioritas pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Patuk adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang dijabarkan dalam 8 (Delapan) Program dan 16 (tujuh belas) kegiatan. Rumusan Program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel 4.1
Sasaran dan Progam Pembangunan
Kapanewon Patuk Tahun 2026

NO	Sasaran	Nama Progam/ Kegiatan
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan a) Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya 2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan a) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

Selanjutnya dari enam prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, Kapanewon Patuk mendukung dua prioritas pembangunan yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan ekonomi. Selanjutnya rekapitulasi program dan kegiatan prioritas pembangunan yang lebih terperinci dijelaskan dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Selanjutnya rumusan program dan kegiata Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kapanewon Patuk				2.220.964.116,00				1.605.790.013,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100.000.000,00				100.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				100.000.000,00
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	100 Persen	100.000.000,00			-	100.000.000,00
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00			-	100.000.000,00
2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja								
						Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			100.000.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				40.000.000,00				40.000.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000,00				40.000.000,00
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100 Persen	40.000.000,00			-	40.000.000,00

4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		3 Dokumen	40.000.000,00			-	40.000.000,00
4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan								
						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY			40.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.080.964.116,00				1.465.790.013,00
7	01				KECAMATAN				2.080.964.116,00				1.465.790.013,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	82,50 Nilai	1.241.816.116,00			-	1.131.450.013,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	14.300.000,00			-	15.430.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.500.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.100.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	570.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			600.000,00	
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	655.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			655.000,00	
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen	575.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			575.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	20 Laporan	4.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Laporan	1.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa		977.097.116,00			-	927.420.013,00	

7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	13 Orang/bulan	965.597.116,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			915.920.013,00	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000,00	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	13 Laporan	9.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			9.500.000,00	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	28 Laporan	32.685.000,00			-	2.000.000,00	
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	28 Laporan	32.685.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000,00	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	2.010.000,00			-	1.200.000,00	
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									

						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	2.010.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.200.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	57.739.000,00			-	42.500.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	4 Paket	2.920.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Paket	22.324.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			18.000.000,00	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	4 Paket	11.010.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.500.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	7 Paket	6.915.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.000.000,00	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	6 Laporan	2.150.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.420.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.500.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	14 Laporan	28.377.000,00			-	20.000.000,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	3 Unit	22.410.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	3 Unit	5.967.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			20.000.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	30 Laporan	77.498.000,00			-	57.600.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	5 Laporan	32.040.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.000.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	12 Laporan	42.858.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			40.000.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	13 Laporan	2.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			14.600.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	12 Laporan	52.110.000,00			-	65.300.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	140 Unit	42.100.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			45.000.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	15 Unit	6.300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Unit	2.510.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	11 Unit	1.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.300.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana		100 Persen	10.516.000,00			-	11.700.000,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.516.000,00			-	11.700.000,00	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.516.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11.700.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan		100 Persen	119.067.500,00			-	158.830.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	4 laporan	35.060.000,00			-	36.240.000,00	

7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan									
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.750.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			23.730.000,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Laporan	14.310.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.510.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa		65.207.500,00			-	100.000.000,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	8 Laporan	65.207.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	13 Laporan	14.600.000,00			-	17.590.000,00	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	9.785.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.590.000,00	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									

						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	3 Laporan	4.815.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	1 laporan	4.200.000,00			-	5.000.000,00	
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam									
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	33 Keluarga	4.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	100 Persen	608.525.500,00			-	14.190.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 laporan	608.525.500,00			-	14.190.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	1 Laporan	608.525.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.910.000,00	
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									

						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			11.280.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 Persen	61.495.000,00			-	112.600.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Laporan	61.495.000,00			-	112.600.000,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	75 Orang	54.575.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			105.000.000,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	6.920.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.600.000,00	

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	100 Persen	39.544.000,00			-	37.020.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	30 Laporan	39.544.000,00			-	37.020.000,00	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa									
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3.185.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.810.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	4.730.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.980.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	14.986.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.500.000,00	
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa									
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.003.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.500.000,00	
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa									

						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.030.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa									
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.275.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.500.000,00	
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa									
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3.615.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.240.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.000.000,00	
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.240.000,00	
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									

						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3.720.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.250.000,00	
J U M L A H									**2.220.964.116,00**				**1.605.790.013,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kapanewon Patuk berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja ini dalam proses penyusunannya mendasarkan kesesuaian dan sinergisme dengan dokumen perencanaan lainnya baik RPJMD Kabupaten Gunungkidul maupun Renstra Kapanewon Patuk. Selain itu Rencana Kerja dapat digunakan sebagai input penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dengan demikian terdapat keterkaitan dan aliran pemikiran antar dokumen.

Untuk menjamin agar program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan, instrument pengendalian yang diperlukan adalah peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengedalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat dilihat kesesuaian rencana dan pelaksanaan program kegiatan maupun tingkat capaian kinerja,selanjutnya mampu menyajikan laporan secara obyektif dan tepat waktu. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan rencana, dapat diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif sebelum pelaksanaan program kegiatan tersebut menyimpang.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Renja Kapanewon Patuk telah dan akan selalu melibatkan peran *(stakeholder)* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *(stakeholder)* dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

5.2. Kaidah pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan *(stakeholders)*, tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Rencana Kerja Kapanewon Patuk tahun 2026 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kapanewon Patuk tahun 2026.
b. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kapanewon Patuk tahun 2026 merupakan salah satu input bagi penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) yang nantinya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kapanewon Patuk tahun 2026 setelah dibahas dan disahkan oleh eksekutif dan legislatif akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Patuk tahun 2026.
d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Patuk tahun 2026 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Kapanewon Patuk tahun 2026.
e. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian program kegiatan dengan menggunakan tata cara pengendalian sesuai aturan yang berlaku.
f. Dari hasil rencana kerja hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersebut dijadikan evaluasi target capaian kinerja Renstra Kapanewon Patuk Tahun 2025-2029.

KAPANEWON PATUK,

ttd

AGUS SUMARYONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON SAPTOSARI
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021- 2026 sehingga Renja PD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD, Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.1350 yang ada di aplikasi SIPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Penyempurnaan Rancangan AwalRenja Kapanewon Saptosari Tahun 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
   7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon;
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja adalah:

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.

2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

1.4. Sistematika Penulisan

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Kapanewon Saptosari Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON SAPTOSARI
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan/Kapanewon Saptosari
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Saptosari
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Saptosari
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON SAPTOSARI
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kapanewon Saptosari BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON SAPTOSARI BAB V

PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KAPANEWON SAPTOSARI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kapanewon Saptosari

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul disusun mendasar pada prioritas program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Disamping itu, juga memperhatikan hasil masukan dari para pemangku kepentingan *(stakeholders)* melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat kelurahan, Kapanewon maupun Kabupaten. Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten telah disepakati berbagai program dan kegiatan yang diikuti dengan pendanaan indikatif untuk selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Kapanewon Saptosari disusun dan ditetapkan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan selama ini lebih banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik dan keuangan. Semakin tinggi capaian persentase realisasi fisik dan keuangan, maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila program/kegiatan yang penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil dan tidak ada masalah. Oleh karena itu, ke depan perlu dilihat sejauh mana tingkat manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar seperti yang diharapkan.

Kapanewon Saptosari sebagai Perangkat Daerah mempunyai komitmen, berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Saptosari terkait evaluasi pencapaian target kinerja fisik dan keuangan Tahun 2024 sampai triwulan IV dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Di Kapanewon Saptosari tidak ada program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan target.
2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Program yang diampu Kapanewon Saptosari ada 8. Dari 8 program tersebut semua program dapat terlaksana memenuhi target tersebut adalah:
   a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
   c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
   d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan
   f. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   g. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   h. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan;
   Realisasi program dan kegiatan Kapanewon Saptosari pada Tahun 2024 tidak ada yang target kinerja keluarannya melebihi dari target yang yang direncanakan dalam Renja Tahun 2024.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2024.
   Semua Program kegiatan berjalan dan sesuai dengan target yang di tentukan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Saptosari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)* 100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Perse	80.85 Persen	80.85	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Perse	78.78 Persen	78.78	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Doku	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60
X.XX.01 .2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Doku	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)* 100
X.XX.01 .2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Doku	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60
X.XX.01 .2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Doku	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	60
X.XX.01 .2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 dokumen	2 dokumen	2 dokum	0 dokumen	0	2 dokumen	4 dokumen	40
X.XX.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85 Laporan	17 Laporan	17 Lapor	13 Laporan	76.47	17 Laporan	47 Laporan	55,294118
X.XX.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Doku	3 Dokumen	75	4 Dokumen	11 Dokumen	55
X.XX.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Perse	88.74 Persen	88.74	100 Persen	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)* 100
X.XX.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bula	252 Orang/bula	252 Orang	225 Orang/bula	89.29	252 Orang/bula	729 Orang/bu	57,857143
X.XX.01 .2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Lapor	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60
X.XX.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	65 laporan	13 laporan	13 lapora	10 laporan	76.92	13 laporan	36 laporan	55,384615
X.XX.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Perse	3,4813 Persen	83.33	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01 .2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Doku	5 Dokumen	83.33	6 Dokumen	17 Dokumen	56,666667
X.XX.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Perse	3,4299 Persen	82.19	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	3 paket	75	4 paket	11 paket	55

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 paket	13 paket	13 paket	10 paket	76.92	13 paket	36 paket	55,384615
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	12 Paket	60
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	9 Paket	75	12 Paket	33 Paket	55
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1240 8 Dokumen	248 8 Dokumen	248 8 Dok	244 8 Dokumen	98.39	248 8 Dokumen	740 8 Dokume	59,677419
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Lapor	9 Laporan	75	12 Laporan	33 Laporan	55
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	24 Laporan	24 Lapor	18 Laporan	75	24 Laporan	66 Laporan	55
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Perse	75 Persen	75	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Lapor	9 Laporan	75	12 Laporan	33 Laporan	55

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)* 100
X.XX.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	36 Laporan	36 Lapor	27 Laporan	75	36 Laporan	99 Laporan	55
X.XX.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Perse	77.78 Persen	77.78	100 Persen	100 Persen	100
X.XX.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	540 unit	108 unit	108 unit	81 unit	75	108 unit	297 unit	55
X.XX.01 .2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	30 Unit	30 Unit	25 Unit	83.33	30 Unit	85 Unit	56,666667
X.XX.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	4 Unit	4 Unit	3 Unit	75	4 Unit	11 Unit	55

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	100 Persen	100 Perse	0 Persen	0	100 Persen	100 Persen	100
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Perse	0 Persen	0	100 Persen	100 Persen	100
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	5 Laporan	1 Laporan	1 Lapor	0 Laporan	0	1 Laporan	2 Laporan	40
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 Persen	100 Persen	100 Perse	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan		100			100	100			0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)* 100
4.01.04. 2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	100 Dokumen	2 Dokumen	2 Doku	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	6
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Perse	3,4063 Persen	81.45	100 Persen	100 Persen	100
7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan berjalan dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Perse	66.67 Persen	66.67	100 Persen	100 Persen	100
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 Laporan	3 Laporan	3 Lapor	2 Laporan	66.67	3 Laporan	8 Laporan	53,333333

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)* 100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan berjalan dengan lancar	100 Persen	100 Persen	100 Perse	3,6986 Persen	88.46	100 Persen	100 Persen	100
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	2 Laporan	2 Lapor	2 Laporan	100	2 Laporan	6 Laporan	60
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65 Laporan	13 Laporan	13 Lapor	10 Laporan	76.92	13 Laporan	36 Laporan	55,384615
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	42 Laporan	42 Laporan	42 Lapor	42,00 Laporan	82.19	42 Laporan	126 Laporan	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	300 Laporan	73 Laporan	73 Lapor	60 Laporan	82.19	73 Laporan	206 Laporan	68,666667
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Perse	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Perse	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Doku	8 Dokumen	100	8 Dokumen	24 Dokumen	60
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 Laporan	8 Laporan	8 Lapor	8 Laporan	100	8 Laporan	24 Laporan	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Perse	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Lembaga	3 Lembaga	3 Lemb	3 Lembaga	100	3 Lembaga	9 Lembaga	60
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20 Laporan	4 Laporan	4 Lapor	4 Laporan	100	4 Laporan	12 Laporan	60
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Perse	50 Persen	50	100 Persen	100 Persen	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Perse	50 Persen	50	100 Persen	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)* 100
7.01.04. 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 laporan	1 laporan	1 lapora	0 laporan	0	1 laporan	2 laporan	40
7.01.04. 2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 Laporan	2 Laporan	2 Lapor	2 Laporan	100	2 Laporan	Laporan	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Perse	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
7.01.05. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Perse	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)* 100
7.01.05. 2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	375 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100	75 Orang	225 Orang	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)* 100
7.01.05. 2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	orang	33 orang	33 orang	33 orang	100	33 orang	orang	#DIV/0!
7.01.05. 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Doku	1 Dokumen	100	1 Dokumen	Dokumen	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Perse	90.97 Persen	90.97	100 Persen	100 Persen	100
7.01.06. 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Perse	90.97 Persen	90.97	100 Persen	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)* 100
7.01.06. 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Doku	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60
7.01.06. 2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80 Dokumen	16 Dokumen	16 Doku	12 Dokumen	75	16 Dokumen	44 Dokumen	55
7.01.06. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	55 Dokumen	11 Dokumen	11 Doku	9 Dokumen	81.82	11 Dokumen	31 Dokumen	56,363636
7.01.06. 2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Doku	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60
7.01.06. 2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Doku	8 Dokumen	80	10 Dokumen	28 Dokumen	56
7.01.06. 2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Doku	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output dan Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(7/6)*1	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)* 100
7.01.06. 2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Doku	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	60

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Saptosari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKU (Indikator kinerja Utama), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yaitu Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat.

Indikator kinerja dan sasaran yang tersebut menggambarkan pencapaian Rencana Kerja Kapanewon Saptosari Tahun 2024. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Saptosari, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Kapanewon Saptosari sudah mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga tidak perlu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

Hasil analisis dapat disajikan pada bagian ini dalam bentuk tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel : 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Saptosari
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU , SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks	78	78	96,15	96,6	81,25	81,52	96,15	96,6	

2.3 Isu-isu isu Penting Penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kapanewon Saptosari

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Saptosari maka diperlukan tentang potret Kapanewon Saptosari saat ini.

2.3.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Kapanewon Saptosari sudah mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga tidak perlu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan.

Indikator kinerja dan sasaran yang tersebut menggambarkan pencapaian Rencana Kerja Kapanewon Saptosari. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kapanewon Saptosari, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Saptosari adalah sebagai berikut :

2.3.2.1 Bidang Pemerintahan

a. Kondisi
   1) Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan masyarakat/publik
   2) Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
   3) Belum efektifnya pengawasan melekat
   4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat pada masalah hukum
b. Permasalahan
   1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
   2) Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata
   3) Belum cukup tertatanya sistem pembinaan ASN dan kinerja ASN
   4) Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai
   5) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

2.3.2.2 Bidang Ekonomi

a. Kondisi
   1) Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
   2) Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
   3) Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradicional
   4) Belum optimalnya penanganan obyek wisata
   5) Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya
   6) Perdagangan/perniagaan kurang berkembang
   7) Potensi industri kecil terutama kerajinan perak dan kerajinan bambu dalam pemasaran kurang.
b. Permasalahan
   1) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok
   2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan pertanian baik antar PD maupun sumber dana

2.3.2.3 Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi Saat ini
   1) Di beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan karena geometri jalan yang sulit sehingga kendaraan besar sulit masuk
   2) Masih banyaknya jalan yang kurang representatif dan jembatan yang belum memadai untuk jalur transportasi.
b. Permasalahan
   1) Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai
   2) Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengurangan bahaya bencana

2.3.2.4 Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini
   1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
   2) Masih banyaknya pengangguran
   3) Terdapatnya potensi Seni Budaya yang belum difasilitasi dan dikembangkan
   4) Terdapatnya potensi Atlet Olah Raga yang belum difasilitasi dan dikembangkan
b. Permasalahan
   1) Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
   2) Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya
   3) Terbatasnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar
   4) Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja
   5) Kurangnya Peluang Kerja di Wilayah Kapanewon Saptosari

2.3.3 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional atau Internasional

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah ” Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”. Pada tahapan lima tahun pertama ini pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang meliputi :

a. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis
b. Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kapanewon Saptosari adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

5. Peningkatan perekonomian masyarakat
6. Peningkatan kesejahteraan sosial

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Saptosari terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Saptosari dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan Desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Saptosari sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Saptosari. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kapanewon Saptosari, yang meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan Kapanewon Saptosari yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029.

Faktor Pendorong :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan penerangan jalan
2. Adanya potensi sumber daya air
3. Adanya potensi wisata pantai
4. Adanya potensi wisata yang belum terekspose
5. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, pertanian dan lain - lain
6. Meningkatnya jumlah alat transportasi
7. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
8. Adanya Industri Olahan Makanan
9. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Faktor Penghambat :

1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil pertanian seperti, jagung, kedelai, kacang tanah dll
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
7. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah longsor.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kapanewon Saptosari

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra Kapanewon Saptosari 2025-2029, merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal.

a. Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Saptosari dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon.

1) Kondisi Fisik Dasar
   a. Secara topografis berada pada 100 –400 m dpal pada Zona Karts Pegunungan Seribu Selatan atau disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0m–300m di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut *(Conical limestone)* dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah, sehingga wilayah Saptosari potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija dan tembakau) dan penggemukan ternak.
   b. Secara geologi dipengaruhi oleh keberadaan Karst Pegunungan Seribu, sekitar 74% wilayah berformasi kepek yang berbatuan dasar limestone (batuan gamping).
   c. Secara umum morfologi wilayah Saptosari berupa bukit-bukit kecil (dolina) dengan tingkat ketinggian berkisar 0–400m dan kelerengan 8->40%.
2) Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
   a. Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda, yaitu menggelembung pada kelompok usia 26-55 tahun
   b. Penduduk usia kerja akhir (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi ke luar daerah
   c. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani.
3) Kondisi Perekonomian
   a. Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kapanewon Saptosari, dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa
   b. Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil tembakau), dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi.
4) Kondisi Pemerintahan
   a. Aparat Kapanewon telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

b. Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanakannya perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
c. Penguatan kelembagaan Kapanewon dan desa dengan beberapa kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiari
d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.

Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kapanewon Saptosari sebagai berikut :

1. Kekuatan
   a) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
   b) Struktur organisasi dan formasi jabatan pada Kapanewon Saptosari telah diisi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi
   c) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan
   d) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya peternakan
   e) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu dan meubel bambu yang cukup prospektif
2. Kelemahan
   a) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, banjir
   b) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi
   c) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi
   d) Penguasaan teknologi masih rendah
   e) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan integratif
   f) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur Kapanewon dan desa belum optimal
   g) Jumlah ASN yang setiap tahun selalu berkurang karena memasuki purna tugas

b. Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Kapanewon Saptosari dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar akhir untuk meletakkan kerangka pembangunan kapanewon.

1. Peluang
   a) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional
   b) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
   c) Adanya kerjasama antara Kabupaten Gunungkidul dengan

kabupaten–kabupaten di sekitarnya

d) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat

2. Tantangan

a) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat
b) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan
c) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif
d) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Denga berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dasa mestinya desa semakin diperankan sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek pembangunan. Namun harus diakui bahwa amanah undang-undang tersebut belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. Konsep membangun desa dan desa membangun belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Pembahasan isu pembangunan desa dan kawasan perdesaan juga dikaitkan dengan dampak Pandemi COVID 19 terutama dalam upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks pemulihan sosial dan ekonomi, penerapan pendekatan Pengembangan Ekonomo Lokal (PEL) yang inklusif sangat dibutuhkan,

1. Desa merupakan subjek utama dalam pembangunan yang harus difasilitasi untuk mengoptimalkan kewenangannya.
2. Pemulihan sosial ekonomi harus memanfaatkan potensi lokal dan modal sosial yang mendorong lahirnya mata pencaharian alternatif yang tidak eksploitatif dan Pemulihan ekonomi harus membuka akses dan melibatkan kelompok marginal serta kelompok rentan di Desa. Pendekatan PEL tersebut juga dikerangkai oleh konsep Desa Membangun dan Membangun Desa
3. Pemerintah Desa harus difasilitasi untuk mengoptimalisasikan kewenangannya sebagai subjek pembangunan.
4. Mendorong pemerintah daerah agar menjadikan kawasan perdesaan sebagai “Pintu masuk” pembangunan yang inklsuif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperkuat kerjasama antar desa dan kawasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 memberikan gambaran tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, dan pendanaan dari masyarakat.

Berdasarkan tabel Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk tahun anggaran 2026. Sedangkan didalam menentukan prioritas

program dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai ditingkat Kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat, lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, dengan memastikan terakomodirnya belanja wajib meningkat, kebijakan belanja prioritas, memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakatai dalam proses Musrenbang seta pemulihan pasca covid-19.

Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi Penghitungan Anggaran Pemerintah Daerah. Secara umum pada rancangan akhir semua kebutuhan yang ada dimasyarakat di tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun dengan adanya pandemi covid 19 maka program dan kegiatan yang menjadi prioritas di rancangan akhir Renja 2026 terpaksa tidak bisa terakomodir antara lain pengadaan Tenaga Harian Lepas (THL) Pramu Bakti dan pengadaan sarana prasarana perkantoran, karena prioritas pembangunan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Sehingga prioritas program dan kegiatandi Kapanewon Saptosari adalah Program Peningkatan Pelayanan Kapanewon walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas.

Secara lengkap Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 2.3 sebagaiberikut:

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Saptosari

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp) indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 Persen	100.000.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 Persen	100.000.000,00	
2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	100 Persen	100.000.000,00	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	100 Persen	100.000.000,00	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000,00	
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Persentase Penunjang Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100 Persen	40.000.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Persentase Penunjang Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	100 Persen	40.000.000,00	
4.01.04.5.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terlaksana	100 Persen	40.000.000,00	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan terlaksana	100 Persen	40.000.000,00	

4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000,00	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000,00	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	36.890.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	10.050.000,00	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		Persentase layanan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 Persen	23.000.000,00						
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	23.000.000,00						

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp) indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan berjalan dengan lancar	100 Persen	13.890.000,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan berjalan dengan lancar	100 Persen	10.050.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	13.890.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	10.050.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 Persen	38.500.000,00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 Persen	187.634.700,00	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terlaksana	100 Persen	25.000.000,00	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terlaksana	100 Persen	177.097.200,00	

7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Dokumen	15.000.000,00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Dokumen	11.122.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	10.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	9.959.200,00	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	156.016.000,00	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terlaksana	100 Persen	13.500.000,00	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terlaksana	100 Persen	4.700.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	8.500.000,00						
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	5.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	4.700.000,00	
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				5.837.500,00	7.01.03.2.06

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp) indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kapanewon Saptosari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	3.025.000,00	7.01.03.2.06.0010
						Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kapanewon Saptosari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga	2.812.500,00	7.01.03.2.06.0011
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	12.000.000,00	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	388.216.000,00	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Persentase koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terlaksana	100 Persen	12.000.000,00	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Persentase koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terlaksana	100 Persen	388.216.000,00	

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	388.216.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10.000.000,00						
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	112.000.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	107.415.000,00	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		"Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksana"	100 Persen	112.000.000,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		"Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksana"	100 Persen	107.415.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp) indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Saptosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	100.000.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Saptosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	100.000.000,00	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kapanewon Saptosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	3.500.000,00						
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	8.500.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	7.415.000,00	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 Persen	152.966.000,00	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 Persen	36.122.500,00	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100 Persen	152.966.000,00	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100 Persen	36.122.500,00	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	3.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	3.000.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	11.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	8.295.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp) indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	2.500.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	5.225.000,00	
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	7.800.000,00	7.01.06.2.01.0006
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7 Dokumen	4.107.500,00	7.01.06.2.01.0007
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	3.695.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	127.466.000,00						
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	1.330.681.555,00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	1.490.375.906,00	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana dengan baik	100 Persen	28.700.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana dengan baik	100 Persen	32.695.000,00	
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.500.000,00	
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	
X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.500.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp) indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000,00	
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	7.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	11.695.000,00	
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.500.000,00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	1.168.371.555,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	1.248.564.206,00	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Saptosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/Bulan	1.155.571.555,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Saptosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/Bulan	1.205.524.206,00	
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	13 Laporan	9.800.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	13 Laporan	40.040.000,00	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.200.000,00	X.XX.01.2.03
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2.200.000,00	X.XX.01.2.03.000 6
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian terlaksana	100 Persen	7.060.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian terlaksana	100 Persen	5.650.000,00	
X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	7.060.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Saptosari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	5.650.000,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	45.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	60.485.700,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp) indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Saptosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Saptosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.495.700,00	
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Saptosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Saptosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.211.000,00	
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Saptosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Saptosari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.000.000,00	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3.474.000,00	
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.545.000,00	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	14.760.000,00	
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 Persen	18.750.000,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 Persen	49.176.060,00	
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon saptosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon saptosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	32.826.000,00	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	15.750.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	15.750.060,00	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Saptosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	X.XX.01.2.08.000 4
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	62.800.000,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100 Persen	91.604.940,00	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108 Unit	40.300.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Saptosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108 Unit	40.300.000,00	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	2.500.000,00	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	2.500.000,00	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Saptosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	8.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Saptosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	8.420.000,00	

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp) indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Saptosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	12.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Saptosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	38.384.940,00	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2.000.000,00	
					1.823.037.555,00					2.359.814.106,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah ditingkat kapanewon dengan kegiatan memproses keterpaduan program sektoral, regional dan program di wilayah Kapanewon. Usulan program kegiatan diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diperoleh dari prencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri dengan survey dan penelitian lapangan, kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu perencanaan dengan benar menyampaikan ide – ide maupun anggaran dasar forum musrenbang dan menilai bagaimana kebersihan suatu program pembangunan dalam 1 tahun dapat mewujudkan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka merumuskan visi dan misi Rencana Strategis Kapanewon Saptosari 2025-2029, merupakan hasil analisis dari isu – isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk menganalisa isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Kapanewon Saptosari dengan menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Kapanewon. Kemudian dalam analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kapanewon Saptosari dalam kurun waktu lima (5) tahun kedepan sebagai dasar akhir untuk meletakkan kerangka pembangunan Kapanewon. Dasar penyusunan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.4

Tabel 2.4

Usulan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/volume	HARGA SATUAN	Anggaran	Catatan
1	Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	Balai Kalurahan Monggol	1	Kali	4.460.000	4.460.000	
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Bantuan Sosial PAH)	Kalurahan Jetis	13	KK	9.462.000	123.006.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan nasional dan daerah, sehingga diharapkan program dan kegiatan PD dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional maupun provinsi. Telaahan kebijakan nasional dikaitkan dengan 7 prioritas nasional, sedangkan telaahan kebijakan provinsi dapat dikaitkan dengan prioritas pengembangan kawasan Wilayah Utara dan Geopark Gunung Sewu serta pendekatan tematik pembangunan DIY meliputi penurunan kemiskinan,ketimpangan wilayah, dan peningkatan Sosial Ekonomi PascaPandemi Covid-19.

Kapanewon Saptosari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul serta visi dan misi Kapanewon Saptosari. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Sehingga perlu memperhatikan kebijaksanaan nasional maupun kebijaka daerah/propinsi. Kebijakan nasional yang menjadi titik fokus terhadap pelaksanaan rencana kerja di Kapanewon Saptosari adalah Pemberdayaan potensi wisata terutama wisata pantai dimana di wilayah Kapanewon Saptosari 70% adalah wilayah pantai dengan beberapa titik pantai yang indah. Sedangkan kebijakan propinsi meliputi penanggulangan masalah kesehatan (stop phbs) dengan pemberian sarana untuk pembuatan jambanisasi.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan *(stakeholders).*

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Saptosari

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari adanya kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Kapanewon Saptosari tahun 2026 adalah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Kapanewon Saptosari Tahun 2026

NO	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2026
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,6

Tabel 3.2
Sasaran Kapanewon Saptosari Tahun 2026

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2026
1.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu	100
2.	Dokumen perencanaan yang berkualitas	persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu	100
3.	Kesejahteraan sosial meningkat	persentase kegiatan sosial terlaksana	100
4.	Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100
5.	Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,01

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan rancangan awal Renja Kapanewon Saptosari Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026;
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan;
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kapanewon Saptosari meliputi :

1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani;
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kecamatan/ kapanewon.

Disini, disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama PD

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,6

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja merupakan kumpulan Program dan kegitan, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kapanewon Saptosari dalam menyusun program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor yang memang harus direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, yaitu :
    a. Sebagai konsekuensi untuk merealisasi program/ kegiatan Kapanewon Saptosari dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
    b. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanaan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, baik di Pemerintahan Kelurahan maupun Kapanewon;
    c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif;
    d. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Adapun program dan kegiatan Pembangunan Kapanewon Saptosari Tahun 2026 seperti pada tabe 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul

Kapanewon Saptosari

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target SasaranPD	Urusan/Bidan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	7	8	9
5. Pamong nglayani dan ngayomi: Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASNberbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan.	4.1.1 Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	941.141.200,00	Kapanewon Saptosari
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	930.603.700,00	
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11.122.000,00	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.959.200,00	
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.700.000,00	
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.700.000,00	
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	5.837.500,00	
					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3.025.000,00	
					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	2.812.500,00	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**40.000.000,00**	
					Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**40.000.000,00**	
					Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000,00	
		Dokumen perencanaan yang berkualitas	persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu	100	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	192.138.500,00	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	192.138.500,00	
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.000.000,00	
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.295.000,00	
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.225.000,00	
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.800.000,00	
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.107.500,00	
					Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.695.000,00	
		Kesejahteraan sosial meningkat	persentase kegiatan sosial terlaksana	100	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**156.016.000,00**	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	156.016.000,00	
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	156.016.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target SasaranPD	Urusan/Bidan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	7	8	9
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**100.000.000,00**	
					Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**100.000.000,00**	
					Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	
		Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**388.216.000,00**	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**388.216.000,00**	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	388.216.000,00	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**107.415.000,00**	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**107.415.000,00**	
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000,00	
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.415.000,00	
		Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**10.050.000,00**	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**10.050.000,00**	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.050.000,00	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.490.375.906,00	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.695.000,00	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.695.000,00	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target SasaranPD	Urusan/Bidan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	7	8	9
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.248.564.206,00	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.205.524.206,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.040.000,00	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.200.000,00	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.200.000,00	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.650.000,00	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.650.000,00	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.485.700,00	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.495.700,00	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.211.000,00	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.474.000,00	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.545.000,00	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.760.000,00	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.176.060,00	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.826.000,00	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.750.060,00	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.604.940,00	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000,00	
					Pemeliharaan Mebel	2.500.000,00	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.420.000,00	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.384.940,00	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
									2.359.814.106,00				1.695.171.555,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100.000.000,00				100.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				100.000.000,00
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya pemanfaatan ragam budaya berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan pelestarian budaya dan kesejahteraan warga		100 Persen	100.000.000,00		-	100 Persen	100.000.000,00
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana			100.000.000,00		-		100.000.000,00
2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		1 Laporan	100.000.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				40.000.000,00				40.000.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000,00				40.000.000,00
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kapanewon Saptosari		100 Persen	40.000.000,00		-	100 Persen	40.000.000,00
4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		3 Dokumen	40.000.000,00		-	3 Dokumen	40.000.000,00
4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY		3 Dokumen	40.000.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.219.814.106,00				1.555.171.555,00
7	01				KECAMATAN				2.219.814.106,00				1.555.171.555,00

Selanjutnya rumusan rencana program dan kegiatan Kapanewon Saptosari Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027 adalah di tabel 4.2 sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Gunungkidul

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
									2.359.814.106,00				1.695.171.555,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		10 Persen	1.490.375.906,00		-	10 Persen	1.336.281.555,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.695.000,00		-		28.700.000,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	6.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	6.500.000,00
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	3.000.000,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	2.500.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	3.500.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Dokumen	3.000.000,00
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	17 Laporan	11.695.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17 Laporan	7.700.000,00
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	2.500.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.248.564.206,00		-		1.168.371.555,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
									2.359.814.106,00				1.695.171.555,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	196 Orang/bulan	1.205.524.206,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		196 Orang/bula n	1.155.571.555,00
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	13 Laporan	40.040.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Laporan	9.800.000,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			2.200.000,00		-		2.500.000,00
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	2 Laporan	2.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	2.500.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawiaan			5.650.000,00		-		7.060.000,00
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5.650.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6 Dokumen	7.060.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			60.485.700,00		-		45.000.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	4 Paket	2.495.700,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	2.500.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	12 Paket	35.211.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Paket	22.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
									2.359.814.106,00				1.695.171.555,00
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	4 Paket	2.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	2.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	4 Paket	3.474.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Paket	3.500.000,00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.545.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	5.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	12 Laporan	14.760.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	10.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.176.060,00		-		19.350.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	12 Laporan	32.826.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	3.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	24 Laporan	15.750.060,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		24 Laporan	15.750.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	12 Laporan	600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Laporan	600.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah			91.604.940,00		-		65.300.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	108 Unit	40.300.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		108 Unit	40.300.000,00
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	18 Unit	2.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Unit	2.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
									2.359.814.106,00				1.695.171.555,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	19 Unit	8.420.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		19 Unit	8.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	4 Unit	38.384.940,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Unit	12.000.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	8 Unit	2.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Unit	2.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		10 Persen	10.050.000,00		-	10 Persen	13.890.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			10.050.000,00		-		13.890.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	13 Laporan	10.050.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		13 Laporan	13.890.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		10 Persen	187.634.700,00		-	10 Persen	66.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan			21.081.200,00		-		25.000.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	11.122.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		8 Dokumen	15.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
									2.359.814.106,00				1.695.171.555,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	2 Laporan	9.959.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	10.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi			156.016.000,00		-		30.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	4 Pokmas / Ormas	156.016.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Pokmas / Ormas	30.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			4.700.000,00		-		5.000.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Laporan	5.000.000,00
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan			5.837.500,00		-		6.000.000,00
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	30 Keluarga	3.025.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Keluarga	3.000.000,00
7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	30 Keluarga	2.812.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30 Keluarga	3.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		10 Persen	388.216.000,00		-	10 Persen	2.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			388.216.000,00		-		2.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
									2.359.814.106,00				1.695.171.555,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	388.216.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Laporan	2.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		10 Persen	107.415.000,00		-	10 Persen	108.500.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			107.415.000,00		-		108.500.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	75 Orang	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		75 Orang	100.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	7.415.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	8.500.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		10 Persen	36.122.500,00		-	10 Persen	28.500.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			36.122.500,00		-		28.500.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
									2.359.814.106,00				1.695.171.555,00
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	4.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		16 Dokumen	3.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	8.295.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	11.000.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.225.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	2.500.000,00
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	7.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Dokumen	0,00
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	4.107.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Dokumen	3.000.000,00
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.695.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	5.000.000,00
									2.359.814.106,00				**1.695.171.555,00**

BAB V

PENUTUP

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja 2026 berisi Rencana Kerja Kapanewon Saptosari Tahun 2026 yang memuat evaluasi Renja Kapanewon Saptosari tahun 2025, tujuan, sasaran,dan rencana kerja serta pendanaan Kapanewon Saptosari . Rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Saptosari disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki serta menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di Renstra Perangkat Daerah. Rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Saptosari juga merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan menyusun rancangan awal Rencana Kerja ini diharapkan bisa menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Rancangan awal Rencana Kerja Kapanewon Saptosari Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam Rencana Kerja Tahun 2026 dan penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

KAPANEWON SAPTOSARI,

ttd

EKA PRAYITNO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON GEDANGSARI
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Gedangsari Tahun 2021-2026. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Gedangsari Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, Rancangan Awal Rencana Kerja Kapanewon Gedangsari tahun 2026 juga tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Kapanewon Gedangsari tahun 2025, sebagai bahan pertimbangan.

Perubahan Renstra Kapanewon Gedangsari yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas, maka perlu segera disusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 bagian ketujuh paragraf kedua pasal 126 sampai dengan pasal 130.

Penyusunan Renja PD dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja PD, tahap pelaksanaan forum PD, dan tahap penetapan renja PD. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainya antara lain :

1. Renja PD dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja PD, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya sesuai dengan Program Prioritas RKPD.
2. Renja PD dengan Renstra PD, artinya Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja K/L dan PD Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja PD juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

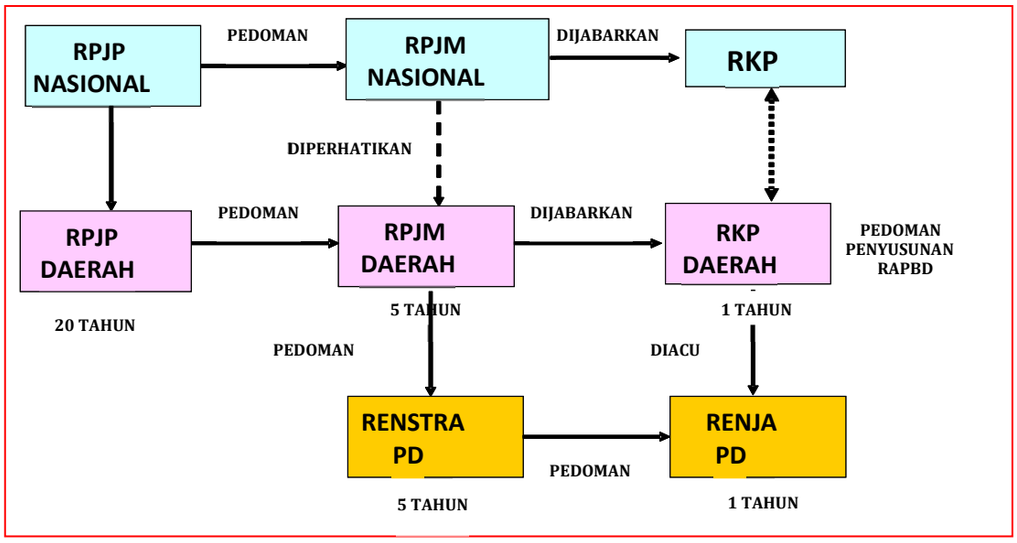

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja kapanewon Gedangsari tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2026 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
   b. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kapanewon Gedangsari.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Gedangsari Tahun 2026 adalah:
   a. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kapanewon Gedangsari baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
   b. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
   c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kapanewon Gedangsari.
   d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.
   e. Menjadi dasar Penyusunan RKA Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Awal Renja Kapanewon Gedangsari adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gedangsari dan capaian Renstra Kecamatan Gedangsari.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Gedangsari
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Gedangsari
- 2.4 Revieu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN / KAPANEWON GEDANGSARI
- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Gedangsari.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON GEDANGSARI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2025 dan Capaian Renstra 2026

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Gedangsari Tahun 2025 merupakan Renja tahun ketiga yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026.

Program dan Kegiatan yang termuat dalam Rancangan Renja Tahun 2025 telah dapat terakomodasi dalam DPA 2023, sehingga program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kapanewon Gedangsari Tahun 2025 sejumlah 8 program yang terbagi dalam 18 kegiatan dan 43 subkegiatan

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 dapat tercapai meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), hal tersebut terlihat dari SDM yang ada sampai dengan tahun ini belum mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. SDM yang ada di Kapanewon Gedangsari sangatlah terbatas dan telah diikutsertakan dalam berbagai diklat, namun setelah selesai ilmu yang diperoleh tidak dimanfaatkan secara optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya target kinerja antara lain karena keterbatasan kualitas SDM.

Dalam rangka memperbaiki kinerja PD Kapanewon, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan atau menjadi kewenangan kapanewon. Hal ini telah diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk PD Kapanewon. Kedepan perlu dirumuskan kembali kebijakan terkait dengan pelimpahan sebagaian tugas dan atau wewenang Bupati kepada Panewu, agar lebih jelas tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kapanewon sebagai PD, apalagi pada tahun 2015 mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka tugas yang diemban oleh Kapanewon akan semakin berat khususnya dalam hal pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Namun demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada PD Kapanewon.

Adapun pada TA 2024 sampai dengan Tri wulan ke-3, capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target Rp 1.456.083.624,00 realisasi senilai Rp 1.249.954.320,00 tingkat realisasi 85,84%. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dari target Rp 100.000.000,00, realisasi senilai Rp 100.000.000,00 tingkat realisasi 100%. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan, dari target Rp 79.835.000,00, realisasi senilai Rp 79.495.000,00, tingkat realisasi 90,86%. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dari target Rp 384.653.000,00 realisasi senilai Rp 377.213.000,00 tingkat realisasi 98,07%. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dari target Rp 40.297.500,00 realisasi senilai Rp 35.422.500,00 tingkat realisasi 87,9%. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dari target Rp 10.954.800,00 realisasi senilai Rp 10.954.800,00 tingkat realisasi 100%. Program Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum, dari target Rp 110.296.500,00 realisasi senilai Rp 110.296.500,00 tingkat realisasi 100%. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, dari target Rp 22.634.800,00 realisasi senilai Rp 18.562.300,00 tingkat realisasi 82,01%.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 Kapanewon Gedangsari dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Prangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah: Kapanewon Gedangsari

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Gedangsari tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	3	3	3	100	3	3	20
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5	1	1	1	100	1	1	20

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Gedangsari tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA SKPD	5	1	1	1	100	1	1	20
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	10	2	2	2	100	2	2	20
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	10	2	2	2	100	2	6	60
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	4	4	4	100	4	12	60
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian SKPD	Junlah Laporan Evaluasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85	17	17	17	100	17	51	60
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	1260	252	252	252	100	252	756	60
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Ahkir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100	1	5	100
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan	65	13	13	13	100	13	39	60

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Gedangsari tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran								
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselenggara dengan baik								
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30	6	6	6	100	6	18	60
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang terfasilitasi dan terselenggara dengan baik								
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yanh tersedia	10	2	2	2	100	2	6	60
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	2	2	2	100	2	6	60
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang sisediakan	20	4	4	4	100	4	12	60
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Ceakan dan Penggandaan yang disediakan	25	5	5	5	100	5	15	60
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanganyang disediakan	1240	248	248	248	100	248	744	60

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Gedangsari tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12	12	12	100	12	36	60
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	16	16	16	100	16	48	20
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah terlaksana								
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5	1	1	1	100	1	13	260
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang disediakan	10	2	2	2	100	2	6	60
7.01.01.2.07.0012	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	5	1	1	1	100	1	3	60
7.01.01.2.07.0013	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainya	Jumlah Unut sarana dan prasarana gedung kantor atau banguan lainya yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	180	36	36	36	100	36	108	60
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Gedangsari tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	425	85	85	85	100	85	255	60
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Pelarlatan dan Mesin lainya	50	10	10	10	100	10	30	60
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang dipelihaa/rehabilitasi	10	2	2	2	100	2	6	60
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainya yang dipelihara/rehabilitasi	25	5	5	5	100	5	15	60
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendudung Gedung Kantor atau Bangunan lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainya yang dipelihara/rehabilitasi	5	1	1	1	100	1	3	60
7.01.01.2.10.	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi berjalan dengan baik								
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Gedangsari tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.02.201	Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan terlaksana								
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	15	3	3	3	100	3	9	60
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65	13	13	13	13	100	39	60
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa berjalan dengan baik								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Gedangsari tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	80	16	16	16	16	100	48	60
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	3	3	3	3	100	9	60
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase layanan Pemberdayaan lembaga Kemasyarkatan tingkat kecamatan yang terfasilitasi								
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembags Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	10	2	2	2	100	2	6	60
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20	4	4	4	100	4	4	20
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Gedangsari tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berjalan dengan baik								
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmoisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakt	10	2	2	2	100	2	6	60
7.01.04.2.01	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peaturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peaturan Kepala Daerah yang terfasilitasi								
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	1	1	1	100	1	3	60
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah berjalan dengan baik								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Gedangsari tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	375	75	75	75	100	75	225	60
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10	2	2	2	100	2	6	60
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik								
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5	1	1	1	100	1	3	60
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka	40	8	8	8	100	8	24	60

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Gedangsari tahun 2024			Target program/ kegiatan (Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	85	17	17	17	100	17	51	60
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah koordinasi dengan lurah dan pamong lainya	35	7	7	7	100	7	21	60
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	1	1	1	100	1	3	60
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15	3	3	3	100	3	9	60
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15	3	3	3	100	3	6	40
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15	3	3	3	100	3	9	60
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	2	2	2	100	2	6	60

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Gedangsari

Capaian kinerja pelayanan Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2024 pada umumnya sudah dapat berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan Kapanewon Gedangsari sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Gedangsari
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU,SPM,IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	80,50	80,75	80,75	81,00	80,75	80,75	81,00	81,25	
2	Nilai AKIP	Nilai	80,05	80,06 (BB)	80,07 (A)	80,08 (A)	80,06	80,07	80,08 (A)	80,09 (A)	
3	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	2	2	2	2	2	2	2	2	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Gedangsari

Kinerja pelayanan di Kapanewon Gedangsari mengacu pada tugas dan fungsi Kapanewon sebagaimana terdapat dalam Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
n. penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Gedangsari, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Gedangsari dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Gedangsari sebagai birokrasi/aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.

Tingkat Kinerja Kapanewon Gedangsari secara langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :

1. Terfasilitasinya pelayanan administrasi kependudukan
2. Terfasilitasinya pelayanan administrasi pemerintahan secara umum (Dispensasi Nikah, Penerbitan ijin UMK, Persetujuan SKTM, Surat Keterangan Domisili, surat keterangan ahli waris dll)
3. Terfasilitasinya kegiatan pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
4. Terfasilitasinya kegiatan monitoring Penyaluran BLT.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
6. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraanpemerintah kalurahan.
7. Terfasilitasinya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
8. Terfasilitasinya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

9. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan kalurahan.
10. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
11. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal (lomba jatilan, karawitan, pedalangan dll)
12. Terfasilitasinya pembuatan buku profil desa, buku profil Kapanewon dan monografi Kalurahan

Adapun tingkat kinerja Kapanewon Gedangsari yang tidak secara langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya kegiatan pelayanan antara lain:

1. Terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.
3. Terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti: LKjIP, Laporan Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan keuangan bulanan.
4. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Gedangsari dan Pengendalian internal PD.

Pelayanan Kapanewon diselaraskan dengan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2029 adalah *"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban*". Pada tahapan lima tahun pertama ini pembangunan daerah dititikberatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, kebijakan ekonomi pro rakyat, kemandirian ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal, tata pemerintahan bebas korupsi sampai pelestarian budaya dan lingkungan.

Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 - 2029 yang meliputi :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2025 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY sebagai berikut:

a. Isu strategis provinsi
   - Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
   - Pengembangan Wilayah Selatan DIY
   - Perkembangan Teknologi Informasi

- Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif
- Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta-Prambanan
- Penguatan Ketahanan Pangan
- Pelestarian dan Pengelolaan Budaya
- Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan
- Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
- Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital

b. Isu strategis daerah
- Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
- Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
- Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
- Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
- Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Dari penjabaran Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2025 - 2029, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh Kapanewon Gedangsari adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. Peningkatan perekonomian masyarakat
6. Peningkatan kesejahteraan sosial
7. Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
8. Pemulihan Kehidupan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
9. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Pendidikan
10. Pemulihan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pengelolaan Bencana
11. Reformasi Birokrasi

Merujuk pada tugas dan fungsi Kapanewon Gedangsari terkait dengan visi dan Misi RPJMD Tahun 2025 - 2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Gedangsari dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Kapanewon Gedangsari sebagai birokrasi /aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah Kapanewon untuk tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Gedangsari. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat meningkatkan ketrampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 adalah "*Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban*"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Pembangunan Menurut Indikasi Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026

No	Prioritas
1	Program Bocah Pinter
2	Program Warga Sehat
3	Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4	Program Gunungkidul Berdikari
5	Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6	Program Warga Gayeng dan Guyub
7	Program Alam Lestari

Kapanewon Gedangsari sampai dengan tahun keempat pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 bisa dikatakan cukup baik. Target-target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Meski ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait dengan kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan kepada kapanewon. Meskipun demikian, justru ada beberapa kegiatan baru yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian target dimaksud. Hal ini dikarenakan adanya standarisasi program dan kegiatan yang dapat atau boleh dilaksanakan oleh PD Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi seperti di atas menjadikan bahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pelimpahan sebagian wewenang dan tugas Bupati kepada Panewu di kemudian hari. Hal ini akan menjadi peluang bagi PD Kapanewon untuk lebih kreatif menjalankan tugas pokok dan fungsinya di masa yang akan datang. Sejauh ini situasi dan kondisi yang demikian tidak terlalu berdampak pada pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada Kapanewon. Namun secara makro bisa jadi pencapaian visi dan misi Kabupaten Gunungkidul menjadi terganggu. Oleh karena itu perlu kebijakan strategis agar dapat mengoptimalkan kinerja PD Kapanewon pada masa yang akan datang.

2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 berpedoman pada program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Rancangan awal RKPD yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja PD termasuk Kapanewon Gedangsari disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (Musrenbangkal), dengan harapan akan mendapatkan berbagai masukan dari forum Musrenbang Kapanewon, Forum (gabungan) PD maupun Musrenbang Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/5889 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rancangan awal Renja 2025 Kapanewon Gedangsari telah dimutahirkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah: Kapanewon Gedangsari

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 Persen	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100 Persen	100.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		100.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		100.000.000	
	Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	Gelar Budaya Jogja	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100.000.000	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				40.000.000	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				40.000.000	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100 Persen	40.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100 Persen	40.000.000	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		40.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		40.000.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	40.000.000	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.214.975.986	UNSUR KEWILAYAHAN				2.214.975.986	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.45 Persen	1.462.879.986	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.45 Persen	1.462.879.986	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		14.791.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		14.791.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.330.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.330.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.040.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.040.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.010.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.010.000	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.150.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.150.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	970.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	970.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	2.939.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	17 Laporan	2.939.000	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.352.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.352.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan keuangan tersusun		1.264.036.936	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Laporan keuangan tersusun		1.264.036.936	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan	1.254.412.936	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan	1.254.412.936	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.204.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.204.000	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	8.420.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	8.420.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Aset		1.075.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Aset		1.075.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 Laporan	1.075.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 Laporan	1.075.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen kepegawaian yang tersusun		3.084.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Dokumen kepegawaian yang tersusun		3.084.800	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	3.084.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	3.084.800	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Layanan umum yang tersedia		61.339.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Layanan umum yang tersedia		61.339.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.932.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.932.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	42.439.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	42.439.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.668.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.668.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.900.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1.900.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	9.100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	9.100.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia		7.208.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia		7.208.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	7.208.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	7.208.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Layanan jasa penunjang yang tersedia		28.321.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Layanan jasa penunjang yang tersedia		28.321.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	961.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	961.000	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	26.760.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	26.760.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Layanan pemelihraan barang milik daerah yang tersedia		83.023.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Layanan pemelihraan barang milik daerah yang tersedia		83.023.750	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	35.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 Unit	35.900.000	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.950.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	38.373.750	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	38.373.750	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.800.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana	100 Persen	42.179.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana	100 Persen	42.179.800	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang		42.179.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang		42.179.800	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Ada di Kecamatan					Ada di Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	42.179.800	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	42.179.800	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	100 Persen	184.367.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	100 Persen	184.367.500	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		58.846.500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		58.846.500	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan	11 Dokumen	51.936.500	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	11 Dokumen	51.936.500	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	6.910.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	6.910.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	7 Laporan	116.436.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	7 Laporan	116.436.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	116.436.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	116.436.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		5.675.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		5.675.000	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	5.675.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	5.675.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan		3.410.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan		3.410.000	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 Keluarga	1.917.500	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 Keluarga	1.917.500	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	15 Keluarga	1.492.500	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	15 Keluarga	1.492.500	
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Meningkatnya Koordinasi Ketentraman	100 Persen	387.148.500	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Meningkatnya Koordinasi Ketentraman	100 Persen	387.148.500	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan Ketertiban Umum					dan Ketertiban Umum			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		"Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum"		387.148.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		"Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum"		387.148.500	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	387.148.500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	387.148.500	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	99.790.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 Persen	99.790.800	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		99.790.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		99.790.800	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	89.820.900	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	75 Orang	89.820.900	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Kesatuan Republik Indonesia			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	9.969.900	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	9.969.900	
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	38.609.400	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	38.609.400	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		38.609.400	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		38.609.400	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	1.849.900	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan	3 Dokumen	1.849.900	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Peraturan Kepala Desa			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	1.580.500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	1.580.500	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	23.314.500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 Dokumen	23.314.500	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	2.405.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	2.405.000	

No	Rancangan Rencana Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	6.290.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	6.290.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1.130.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	1.130.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	2.039.500	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	2.039.500	
					2.354.975.986					**2.354.975.986**	

2.5 Penelahaan Usulan dan Program Masyarakat.

Usulan Program dan kegiatan merupakan upaya untuk mencapai cita-cita dan gambaran warga masyarakat yang ingin membangun dan memajukan daerahnya. Usulan program meliputi pembangunan fisik maupun non fisik, pelaksanaan musrenbang Tingkat Kapanewon Gedangsari yang dilaksanakan tanggal 1 Februari 2025 ini forum untuk mempertemukan antara kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan Kapanewon Gedangsari dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2025.

Pada tahun 2025 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Kapanewon maupun OPD Kabupaten Tahun 2025 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut maka dilakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan OPD tahun 2025, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan usulan program kegiatan sesuai dengan program kegiatan OPD. Usulan pemangku kepentingan secara rinci pada Tabel 2.5:

Tabel 2.5
Usulan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No.	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisian/ Volume	Harga Satuan (Rp)	Anggaran (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Kap. Gedangsari	Terlaksananya bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	1 kali	4.460.000	4.460.000	PIWK
2	Pelatihan perencanaan pembangunan di desa	Kap. Gedangsari	Terlaksananya Pelatihan perencanaan pembangunan di desa	1 kali	18.600.000	18.600.000	PIWK

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON GEDANGSARI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang Kapanewon dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2019, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Kapanewon

Kapanewon Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensingkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan PD setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja PD. Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan *(stakeholders)*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Gedangsari

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dimana tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Dimana indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, indikasi tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah:

"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah dapat dilihat di tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Opini BPK	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu
			Dokumen keuangan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu
			Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial
			Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan yang akan dicapai Kapanewon Gedangsari dalam Renstra PD tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan Kapanewon Gedangsari

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks pelayanan kapanewon	96,60

Sasaran yang akan dicapai Kapanewon Gedangsari tahun 2026 dalam Renstra PD tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Kapanewon Gedangsari

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2026
1	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2	Dokumen keuangan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3	Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4	Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5	Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,45

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai Kapanewon Gedangsari tahun 2026 dalam Renstra PD tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Gedangsari Tahun 2026

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
Tujuan			
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,49
Sasaran			
1	Dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2	Dokumen keuangan yang berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3	Kesejahteraan sosial meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4	Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5	Pelayanan umum yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,45

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON GEDANGSARI

Program dan Kegiatan Kapanewon Gedangsari yang direncanakan melalui Rancangan Renja Kapanewon Gedangsari Tahun 2026 tidak jauh berbeda dari Renja 2025, hal tersebut disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan wajib yang harus tetap dilaksanakan oleh Kapanewon Gedangsari. Meskipun demikian ada beberapa kegiatan baru yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan anggaran yang tersedia dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Selain menampilkan rencana program dan kegiatan tahun 2025 juga dapat dilihat perkiraan maju tahun 2027 dengan harapan bahwa pada tahun 2027 sudah dapat diketahui gambaran perkiraan pagu anggaran untuk Kapanewon Gedangsari.

Rancangan Renja Kapanewon Gedangsari tahun 2025 terdiri dari 8 Program dan mencakup 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Dari program-program tersebut, 7 program di antaranya merupakan program yang menyasar pada internal PD yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, sebanyak 1 program merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan kalurahan di wilayah Kapanewon Gedangsari. Pagu anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp 2.354.975.986,00. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kapanewon Gedangsari untuk Tahun 2026 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan RKPD khususnya dalam pagu anggaran. Hal ini dikarenakan pada rancangan awalnya, program dan kegiatan serta pagu dana yang diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun sebelumnya/tahun berjalan. Namun dalam perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui berbagai forum yang ada dan RKPD Kabupaten Gunungkidul, rancangan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian. Harapannya penyesuaian tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-aturan yang berlaku.

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Gedangsari dapat dilihat di tabel 4.1 dan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
Kabupaten gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggara pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.45	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.462.879.986	
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.791.500	
					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.330.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.040.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.010.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.150.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	970.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.939.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.352.500	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.264.036.936	
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.254.412.936	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.204.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.420.000	KAPANEWON GEDANGSARI

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
					7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.075.000	
					7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.075.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.084.800	
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.084.800	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.339.000	
					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.932.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.439.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.668.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.900.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.100.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.208.000	
					7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.208.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.321.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	961.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.760.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.023.750	
					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.900.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.950.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.373.750	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.179.800	
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	42.179.800	
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.179.800	KAPANEWON GEDANGSARI
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000	
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
					4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	184.367.500	
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.846.500	
					7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	51.936.500	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.910.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.675.000	
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.675.000	KAPANEWON GEDANGSARI
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.609.400	
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.609.400	
					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.849.900	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.580.500	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23.314.500	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.405.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.290.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.130.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.039.500	KAPANEWON GEDANGSARI

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100.000.000	
					2.22.08.5.07.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
					7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	116.436.000	
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	116.436.000	KAPANEWON GEDANGSARI
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
					7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.410.000	
					7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1.917.500	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1.492.500	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	387.148.500	
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	387.148.500	
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	387.148.500	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	99.790.800	
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	99.790.800	

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggung Jawab
1	2	4	5	6	7	8	9	10
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	89.820.900	KAPANEWON GEDANGSARI
					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.969.900	KAPANEWON GEDANGSARI
							2.354.975.986	

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Gedangsari

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kapanewon Gedangsari				2.354.975.986				1.740.812.590
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100.000.000				100.000.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000				100.000.000
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100 Persen	100.000.000			-	100.000.000
2.22.08.5.07.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100.000.000			-	100.000.000
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000	DANA KEISTIMEWAAN DIY			100.000.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				40.000.000				40.000.000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000				40.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100 Persen	40.000.000			-	40.000.000
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			40.000.000			-	40.000.000
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.000.000	DANA KEISTIMEWAAN DIY			40.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.214.975.986				1.600.812.590
7.01	KECAMATAN				2.214.975.986				1.600.812.590
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		81.45 Persen	1.462.879.986			-	1.428.665.110
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			14.791.500			-	15.652.700
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	4.330.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.388.800
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.040.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.023.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.010.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.005.000
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.150.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.154.000
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	970.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			923.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	17 Laporan	2.939.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.899.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	4 Laporan	3.352.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.259.900
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tersusun			1.264.036.936			-	1.264.036.690
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	252 Orang/bulan	1.254.412.936	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.254.412.590

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.204.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.204.100
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	13 Laporan	8.420.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.420.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Aset			1.075.000			-	0
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	28 Laporan	1.075.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen kepegawaian yang tersusun			3.084.800			-	3.224.800
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	3.084.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.224.800
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan umum yang tersedia			61.339.000			-	57.202.000
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	2 Paket	1.932.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.272.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	6 Paket	42.439.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			42.396.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	4 Paket	2.668.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.700.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	4 Paket	1.900.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.274.000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.200.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.200.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.160.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	18 Laporan	9.100.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.200.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Layanan pengadaan barang milik daerah yang tersedia			7.208.000			-	7.300.000
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	8 Unit	7.208.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			7.300.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan jasa penunjang yang tersedia			28.321.000			-	25.945.920
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	4 Laporan	961.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	36 Laporan	26.760.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.345.920
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	1 Laporan	600.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			600.000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan pemelihraan barang milik daerah yang tersedia			83.023.750			-	55.303.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	106 Unit	35.900.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			35.900.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	10 Unit	6.950.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.743.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	2 Unit	38.373.750	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			8.860.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	4 Unit	1.800.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.800.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana		100 Persen	42.179.800			-	0
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			42.179.800			-	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	13 Laporan	42.179.800	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		100 Persen	184.367.500			-	48.629.780
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			58.846.500			-	42.954.780
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	51.936.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			35.994.780
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	9 Laporan	6.910.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.960.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan			116.436.000			-	0
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	9 Pokmas / Ormas	116.436.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			5.675.000			-	5.675.000
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	4 Laporan	5.675.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.675.000
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan			3.410.000			-	0
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	25 Keluarga	1.917.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	15 Keluarga	1.492.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 Persen	387.148.500			-	1.954.800
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	"Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum"			387.148.500			-	1.954.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	9 Laporan	387.148.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.954.800
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100 Persen	99.790.800			-	99.992.900
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			99.790.800			-	99.992.900
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	75 Orang	89.820.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			89.882.900
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	9.969.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.110.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100 Persen	38.609.400			-	21.570.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			38.609.400			-	21.570.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1.849.900	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.850.000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	1.580.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.580.000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	22 Dokumen	23.314.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.565.000
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.405.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.405.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	6.290.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.130.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.130.000
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	2.039.500	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.040.000
		J U M L A H			**2.354.975.986**				**1.740.812.590**

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, dan program kegiatan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Kapanewon Gedangsari Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu:

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini berdasarkan pada RPJMD serta Renstra PD.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders)*, tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Gedangsari sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,
KAPANEWON GEDANGSARI,

ttd

EKO KRISDIYANTO

.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON GIRISUBO
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainya antara lain :

1. Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya yang disesuaikan dengan Program Prioritas PD.

2. Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, artinya Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L (Kementerian/Lembaga) dan Perangkat Daerah Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja Perangkat Daerah juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan Perangkat Daerah Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :

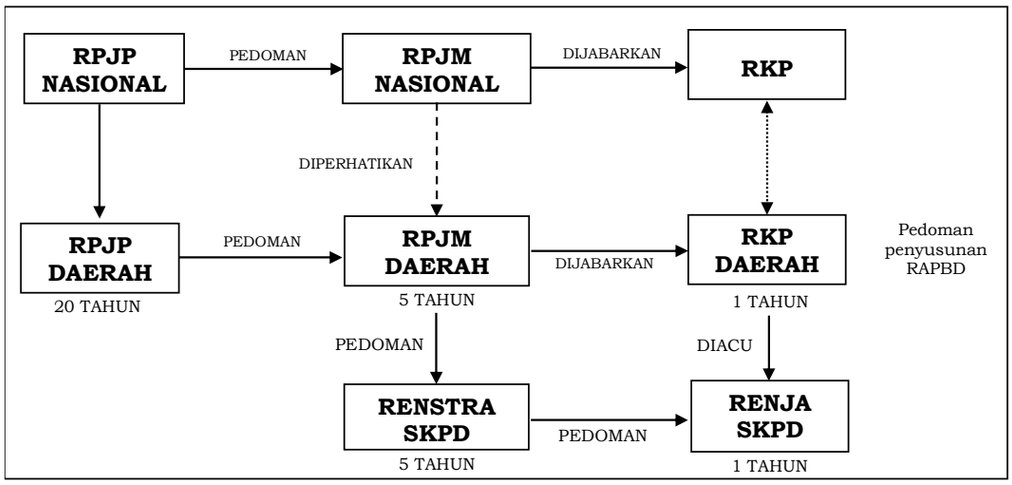

Bagan 1 : Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sehingga Renja PD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Girisubo tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Derah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Dearah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Girisubo adalah:

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026.
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kapanewon Girisubo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON GIRISUBO

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Girisubo dan Capaian Renstra Kapanewon Girisubo

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON GIRISUBO

- 3.1 Tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Girisubo

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON GIRISUBO

- 4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KAPANEWON GIRISUBO

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kapanewon Girisubo

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Girisubo Tahun 2026 mengacu pada APBD Tahun 2026 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Girisubo berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan atau Tahun 2025.

Kapanewon Girisubo sebagai Perangkat Daerah mempunyai komitmen, berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Girisubo terkait evaluasi pencapaian target kinerja fisik dan keuangan Tahun 2024 dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Di Kapanewon Girisubo pada Tahun Anggaran 2024 secara fisik semua target telah tercapai, namun secara anggaran tidak semua teralisasi. Seperti Belanja Pegawai pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tidak habis karena ada sisa anggaran pada pagu cadangan, Belanja Jasa Kantor pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tidak habis karena menyesuaikan tagihan, serta Belanja Kegiatan Porkab Barang pada sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tidak terlaksana karena kegiatan ditunda tahun berikutnya.

2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Program yang diampu Kapanewon Girisubo ada 8. Dari 8 program tersebut semua program dapat terlaksana memenuhi target sampai Tahun Anggaran 2024. Program tersebut adalah:
   a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
   b. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
   c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
   d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan
   f. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   g. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   h. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan;
   Realisasi program dan kegiatan Kapanewon Girisubo pada Tahun 2024 tidak ada yang target kinerja keluarannya melebihi dari target yang yang direncanakan dalam Renja Tahun 2024.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2024.
   a. Munculnya kebijakan/ regulasi setelah program/ kegiatan dan target ditetapkan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 disajikan dalam tabel 2.1. sebagai berikut

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Girisubo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	Persen	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	27 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	26 dokumen	100	26	26	dokumen	100
		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100		100		100
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2	2	dokumen	100
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	dokumen	100
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3	3	dokumen	100
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2	2	dokumen	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	100	17	17	dokumen	100
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4	4	dokumen	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80,6 indeks	80,6 indeks	80,6 indeks	80,6 indeks	100	80,6	80,6	indeks	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terselenggara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 orang/bulan	224 orang/bulan	224 orang/bulan	224 orang/bulan	100	224	224	orang/bulan	100
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	dokumen	100
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100	13	13	dokumen	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	dokumen	100
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6	6	dokumen	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 layanan	6 layanan	6 layanan	6 layanan	100	6	6	layanan	100
		persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan yang tersedia	4 paket belanja	6 paket belanja	4 paket belanja	4 paket belanja	100	4	4	paket belanja	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	18 paket belanja	18 paket belanja	18 paket belanja	18 paket belanja	100	18	18	paket belanja	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket belanja	7 paket belanja	10 paket belanja	10 paket belanja	100	10	10	paket belanja	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100	4	4	paket	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	248 dokumen	248 dokumen	248 dokumen	248 dokumen	100	248	248	dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12	12	laporan	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12	12	laporan	100
7.01.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100	1	1	layanan	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100
7.01.01.2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0 unit	5 unit	5 unit	100	0	0	unit	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	100	3	laporan	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	100 persen	0 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	100	48	48	Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Disediakan									
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	100	5	5	layanan	100
		Persentase pemeliharaan terlaksana dengan baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100
7.01.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	7	7	unit	100
7.01.01.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100	30	30	unit	100
7.01.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100	12	12	unit	100
7.01.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100	5	5	unit	100
7.01.01.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	6	6	unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	Persen	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1	1	laporan	100
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terselenggara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100
7.01.02.2.01 .01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	3 laporan	3 laporan	2 laporan	67	3	3	laporan	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	6	6	laporan	100
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100	n/a	n/a	laporan	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	Persen	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	100	2	2	layanan	100
		Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6	6	dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100	11	11	laporan	100
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Perbedayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang terfasilitasi	2 layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	100	2	2	layanan	100
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan terselenggara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 lembaga	16 lembaga	16 lembaga	16 lembaga	100	16	16	lembaga	100
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2	2	laporan	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	Persen	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah layanan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan	100	7	7	layanan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Persentase layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	7 laporan	2 laporan	2 laporan	100	7	7	layanan	100
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100	8	8	laporan	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	Persen	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 layanan	2 layanan	2 layanan	2 layanan	100	2	2	layanan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	100	75	75	orang	100
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	n/a	n/a	laporan	0
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2	2	dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	Persen	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43 dokumen	43 dokumen	43 dokumen	43 dokumen	100	43	43	dokumen	100
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	dokumen	100
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100	18	18	dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	34	34	dokumen	100
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2	2	dokumen	100
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8	8	dokumen	100
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2	2	dokumen	100
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen dalam rangka Fasilitasi Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	dokumen	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	Persen	100
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah layanan kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100	1	1	layanan	100
		Persentase Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya terlaksana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka HUT RI dan Hari Keistimewaan DIY	1 laporan	1 even	1 laporan	1 laporan	100	1	1	laporan	100
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100	100	Persen	100
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1	1	dokumen	100
		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100	100	persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dana Realisasi Kinerja Program dan Kelurahan Kegiatan PD Tahun Lalu 2024			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Ketatalaksanaan Yang Terlaksana									
4.01.04.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4	4	dokumen	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Girisubo

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan pelayanan di Kapanewon yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik ini dapat menjadi indikator kinerja Kapanewon.

Pelayanan yang diselenggarakan Kapanewon Girisubo sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diberikan meliputi: pelayanan legalisasi /pengantar pendaftaran penduduk (untuk pembuatan KTP dan KK), pelayanan proposal pembangunan fisik maupun kegiatan sosial kemasyarakatan, pelayanan rekomendasi Jamkesmas, rekomendasi keluarga miskin (gakin), rekomendasi perizinan, serta pelayanan pengesahan surat-surat.

Indikator capaian kinerja pelayanan Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja yang dikembangkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana telah disusun oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

Pengukuran capaian kienerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Girisubo dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagi berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Girisubo
Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Targat/Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Kapanewon Girisubo				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Persentase Desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan Benar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Girisubo

2.3.1. Tugas dan Fungsi Kapanewon Girisubo

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 91 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon, Panewu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
c. penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
h. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
j. penyusunan dan penerapan norma, standart, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggraaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kapanewon Girisubo

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021, tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kapanewon Girisubo antara lain :

- Sesuai dengan aturan perundang-undangan, Kapanewon adalah sebuah Perangkat Daerah, tetapi tugas dan fungsinya berbeda dengan Perangkat Daerah lainnya (badan, dinas, dan kantor). Perbedaan tersebut yaitu bahwa Perangkat Daerah lainnya melaksanakan tugas yang bersifat sektoral sedangkan Kapanewon melaksanakan tugas yang bersifat teritorial (kewilayahan). Ketugasan kewilayahan ini dicirikan oleh adanya kewajiban Kapanewon untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan.

- Sedangkan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala daerah terhadap capaian program Nasional/internasional antara lain : Perbedaan tersebut membawa konsekuensi format kewenangan yang berbeda antara Perangkat Daerah Kapanewon dengan Perangkat Daerah yang bukan Kapanewon. Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, idealnya diikuti dengan pemberian kewenangan kepada Panewu yang bersifat umum agar penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kapanewon berjalan secara efektif dan efisien.

  Keterbatasan kewenangan tersebut dan disisi lain tugas dan fungsi Kapanewon yang sangat luas karena mengemban tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sementara pada saat yang sama dukungan anggaran Kapanewon masih belum sebanding dengan beban tugasnya, setidaknya jika dibandingkan dengan Perangkat Daerah setingkat kantor, menjadikan capaian kinerja Kapanewon kurang maksimal sebagai ujung tombak pelayanan birokrasi pemerintah daerah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian untuk capaian yang ideal di masa-masa mendatang.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Dearah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Melenium Development Goals*)

Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Indikasi Visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
   “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”
b. Indikasi Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029:
   1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
   2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
   3. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
   4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
   5. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
   6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis pemerintah pusat dan pemerintah D.I. Yogyakarta yang disampaikan oleh Bappeda D.I Yogyakarta dalam Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 sebagai berikut:

a. Isu strategis nasional

- Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
- Kemandirian melalui Swasembada Pangan, Air dan Energi;
- Pengembangan Infrastruktur;
- Memperkuat Daya Saing SDM;
- Hilirisasi dan Pengembangan Industri berbasis SDA;
- Membangun dari Desa;
- Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata Kelola; dan
- Kehidupan yang Harmonis dengan Alam, Lingkungan dan Budaya

b. Isu strategis D.I Yogyakarta
- Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
- Pengembangan Wilayah Selatan DIY
- Perkembangan Teknologi Informasi
- Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif
- Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
- Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
- Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta-Prambanan
- Penguatan Ketahanan Pangan
- Pelestarian dan Pengelolaan Budaya
- Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan
- Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
- Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital

c. Isu strategis daerah
- Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
- Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
- Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
- Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
- Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, indikasi tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah:

"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

- Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Kapanewon Girisubo antara lain :
  Memperhatikan bahwa wilayah Kapanewon Girisubo dengan kondisi alam yang terletak di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul, dengan wilayahnya yang memiliki sumber daya alam berupa potensi alam yang terletak perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah tentunya banyak tantangan dan peluang yang perlu dihadapi agar mampu berkembang baik antara lain :

  1. Tantangan
     a. Letak wilayah yang dekat dengan pelabuhan memungkinkan adanya pengaruh negatif dari luar wilayah.
     b. Masih sering terjadinya bencana alam kekeringan akibat musim kemarau.
     c. Rendahnya nilai hasil jual pertanian dan peternakan.
     d. Masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia baik ditinjau dari tingkat pengetahuan maupun ketrampilan penduduk.
     e. Kurangnya jumlah Pegawai
     f. Belum optimalnya dalam penyusunan perencanaan
     g. Insfratruktur dan akses jalan yang kurang memadai
     h. Terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.
  2. Peluang.
     a. Tingkat partisipasi dan gotong royong masyarakat masih tinggi.
     b. Terbukanya akses informasi dan komunikasi.
     c. Sumber daya berupa pelabuhan yang merupakan sumber pendapatan.
     d. Telah dibukanya sebagian Jalur-jalur Lintas Selatan (JJLS) yang memperlancar arus transportasi antar wilayah/ daerah.
     e. Semakin meningkatnya dana dana yang masuk ke desa untuk dikelola desa (ADD, Dana Desa, bantuan Hibah, Sumber lain)

  Formulasi Isu-isu Strategis dan rekomendasi dan catatan yang bisa ditindak lanjuti antara lain :

  1. Reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha;
  2. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan berkeadilan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, percepatan penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, mitigasi dan pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya;
  3. Berlakunya perdagangan bebas pada wilayah ASEAN (kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN - MEA) yang diharapkan menumbuhkan tingkat konsumsi dan produksi pada wilayah DIY umumnya dan Kabupaten Gunungkidul pada khususnya yang mengedepankan pertumbuhan wisata dan budaya serta memantapkan perekonomian daerah melalui peningkatan daya

saing, peningkatan ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif;

4. Mempertahankan momentum pertumbuhan dan perkembangan pariwisata Gunungkidul agar dapat dikelola secara lebih profesional dan mampu bersaing menjadi daerah tujuan wisata terkemuka yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan *(length of stay)* di Gunungkidul. Masih banyak obyek dan daya tarik wisata potensial di Gunungkidul termasuk potensi Geopark untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis daerah melalui percepatan ketersediaan lahan pembangunan untuk kepentingan umum, meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah dengan pemerintah, serta pemerintah-swasta dan meningkatkan infrastruktur publik terutama di wilayah tertinggal dan perbatasan; perencanaan pembangunan tersebut antara lain diprioritaskan pada :
   - Pembangunan Kawasan Perkotaan Kapanewon Girisubo;
   - Normalisasi jalan Pantai Sadeng;
   - Normalisasi jalan Pantai Krokoh – Pantai Sadeng;
   - Normalisasi jalan Pantai Sedahan – Jepitu;
   - Normalisasi jalan ke Pantai Watulumbung (Gunung Batur), dan jalan-jalan lain yang menuju objek wisata Pantai Selatan;
   - Pembangunan *Rest Area* Jerukwudel;
   - Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi (UMKM dan IKM).
6. Mewujudkan orientasi pembangunan “Among Tani Dagang Layar” yaitu Menjadikan Laut sebagai Halaman Muka dan bidang pertanian sebagai tulang punggung *(back bone)* pembangunan sekaligus dalam rangka mengisi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan.

2.4 Revieu terhadap Renja PD

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal demikian karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD setidaknya lebih dahulu telah dimusyawarahkan mulai dari tingkat Kelurahan, Kapanewon, dan Kabupaten. Atau dengan kata lain telah dimusyawarahkan dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran, yang mengakibatkan program kegiatan pada rancangan awal di Kapanewon Girisubo tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kapanewon Girisubo berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah plafon pendanaannya.

Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kapanewon Girisubo dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi serta pendanaan yang tersedia. Secara rinci hasil review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Girisubo

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KAPANEWON GIRISUBO				1.668.513.006,00		KAPANEWON GIRISUBO				2.337.224.213,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100.000.000,00	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100.000.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan		100 persen	100.000.000,00	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100 persen	100.000.000,00	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Yang Terlaksana		1 event	100.000.000,00	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Yang Terlaksana		1 event	100.000.000,00	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja					
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				40.000.000,00	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				40.000.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000,00	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000,00	

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100 persen	40.000.000,00	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100 persen	40.000.000,00	
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		4 Dokumen	40.000.000,00	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		4 Dokumen	40.000.000,00	
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan					4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan					
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.000.000,00			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	40.000.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.528.513.006,00	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.197.224.213,00	
7.01	KECAMATAN				1.528.513.006,00	7.01	KECAMATAN				2.197.224.213,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik		100 persen	1.047.114.606,00	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		100 persen	1.214.689.313,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	10.507.000,00	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen	70.630.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3.270.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	64.920.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	750.000,00			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	550.000,00	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	750.000,00			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	550.000,00	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	830.000,00			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	670.000,00	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	830.000,00			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	670.000,00	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	17 Laporan	1.977.000,00			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	17 Laporan	1.820.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2.100.000,00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Laporan	1.450.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		140 Orang/bulan	878.137.006,00	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		140 Orang/bulan	978.718.673,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	140 Orang/bulan	872.633.006,00			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	140 Orang/bulan	971.550.303,00	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.480.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.397.500,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	13 Laporan	4.024.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	13 Laporan	5.770.870,00	
						7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		4 Laporan	2.735.000,00	
						7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	28 Laporan	2.735.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		6 Dokumen	7.908.800,00	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian		6 Dokumen	6.217.000,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	7.908.800,00			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	6.217.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	70.974.000,00	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum		4 Paket	59.842.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	4 Paket	2.830.000,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	4 Paket	3.322.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	14 Paket	36.350.000,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	13 Paket	30.766.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		-	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	-	15.924.000,00			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	4 Paket	3.860.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	6 Paket	3.700.000,00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	6 Paket	4.554.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.800.000,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.800.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	16 Laporan	9.370.000,00			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	14 Laporan	14.540.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		48 Laporan	27.106.800,00	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48 Laporan	43.966.640,00	

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Disediakan										
						7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2.270.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	36 Laporan	27.106.800,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	36 Laporan	29.696.640,00	
						7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		120 Unit	52.481.000,00	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		120 Unit	52.580.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	8 Unit	41.997.000,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	77 Unit	38.500.000,00	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	20 Unit	1.000.000,00			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	35 Unit	2.800.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	10 Unit	3.250.000,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	11 Unit	3.600.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Unit	5.034.000,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Unit	4.680.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	4 Unit	1.200.000,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	10 Unit	3.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentsae Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terlaksana		100 persen	19.040.000,00	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana		100 persen	10.490.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2 Laporan	8.700.000,00							
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Laporan	8.700.000,00							
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	10.340.000,00	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	10.340.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.340.000,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.490.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi		100 persen	47.883.400,00	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan ekonomi masyarakat		100 persen	372.765.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		6 Dokumen	31.748.400,00	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan		2 Laporan	32.625.000,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	21.678.400,00			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	22.700.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Laporan	10.070.000,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Laporan	9.925.000,00	
						7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi		1 Laporan	329.080.000,00	
						7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	12 Pokmas / Ormas	329.080.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		6 Dokumen	16.135.000,00	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		6 Dokumen	7.272.500,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan											

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	16 Lembaga Kemasyarakatan	7.835.000,00							
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	3 Laporan	8.300.000,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Laporan	7.272.500,00	
						7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan		30 KK	3.787.500,00	
						7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	30 Keluarga	3.787.500,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 persen	443.016.500,00	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 persen	443.016.500,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	10.960.000,00	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Laporan	443.016.500,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.500.000,00			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	10 Laporan	443.016.500,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Laporan	8.460.000,00							
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 persen	103.600.000,00	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 persen	96.283.400,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		75 Orang	103.600.000,00	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		2 Laporan	96.283.400,00	

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	75 Orang	94.500.000,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	75 Orang	88.058.400,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	9.100.000,00			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	8.225.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana		100 persen	299.915.000,00	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 persen	59.980.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		1 Dokumen	299.915.000,00	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dokumen	59.980.000,00	

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.050.000,00			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	1.675.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	3.150.000,00			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	32.030.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	34 Dokumen	12.725.000,00			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	35 Dokumen	20.400.000,00	
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.500.000,00			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.675.000,00	
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.240.000,00			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.525.000,00	

KODE	RENCANA RANCANGAN RKPD					KODE	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa											
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	269.380.000,00							
7.01.06.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	7.870.000,00			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.675.000,00	
J U M L A H					1.668.513.006,00	J U M L A H					2.337.224.213,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Girisubo disusun setelah pelaksanaan Musrenbang Kapanewon. Dalam perjalanannya usulan tersebut mengalami perubahan, terutama terkait dengan program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah disusun.

Proses usulan dari pemangku kepentingan terjadi sebagai berikut :

1. Pembahasan DURKP hasil usulan Musrenbangkal yang dilanjutkan di siding kelompok pada kegiatan Musrenbang Kapanewon yang disusun menurut skala prioritas;

2. Hasil dari siding masing-masing kelompok dilanjutkan pleno yang menghasilkan usulan yang disepakati dari masing-masing pemangku kepentingan yang diketahuiBappeda dan Instansi/OPD pelaksana Kegiaatan.

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan pada Pleno tersebut yang ditanda tangani perwakilan Kalurahan, BPD, LPMD dan Panewu.

Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan tersebut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026
dari Para Pemangku Kepentingan Kapanewon Girisubo

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	CATATAN
1	PIWK - Bantuan Sosial Penampungan Air Hujan (PAH) - KAPANEWON GIRISUBO	Kalurahan Pucung, Karangawen, Jepitu, Jerukwudel Kapanewon Girisubo Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15	KK	141.930.000	-
2	PIWK – Bantuan Soaial Pembangunan Jamban Sehat bagi KK Miskin-KAPANEWON GIRISUBO	Kalurahan Pucung, Karangawen, Jerukwudel Kapanewon Girisubo Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	KK	33.950.000	

Kegiatan yang menyasar langsung pada masyarakat, melalui Pagu Indikatif Sektoral (PIWK) yaitu Pelatihan perencanaan pembangunan di desa di Kalurahan Girisubo dengan anggaran sejumlah Rp 175.880.000,00.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON GIRISUBO

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Dari peraturan-peraturan yang ada tersebut, jelas bahwa Panewu atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai perangkat daerah kabupaten.

Kapanewon Girisubo sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Bupati Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja, Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan PD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Untuk memperjelas arah pembangunan daerah pada setiap tahun, tahapan perencanaan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 juga dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (road map) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Sebagai upaya untuk mewujudkan keterkaitan antara dokumen perencanaan, dilakukan dengan penyelarasan dengan tema dan prioritas nasional maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2026 Kapanewon Girisubo juga diberikan amanah untuk mengelola Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Kalurahan. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Girisubo

Perumusan tujuan dan sasaran Kapanewon Girisubo didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Girisubo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra Kapanewon Girisubo. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran PD dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Kapanewon Girisubo

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,5

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan Kapanewon

Tabel 3.2
Sasaran Kapanewon Girisubo

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2026
1	2	3	4
1.	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
		Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan Kapanewon

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Kapanewon Girisubo, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Girisubo

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4
Tujuan			
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,5
Sasaran			
1.	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
		Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tahun 2026
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan Kapanewon

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan rancangan Renja Kapanewon Girisubo Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Girisubo meliputi:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparasi dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja merupakan kumpulan Program dan kegitan, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kapanewon Girisubo dalam menyusun program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk merealisasi tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor yang memang harus direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, yaitu :
   a. Sebagai konsekuensi untuk merealisasi program/ kegiatan Kapanewon Girisubo dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
   b. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanaan dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, baik di Pemerintahan Kelurahan maupun Kapanewon;
   c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga suasana di masyarakat akan lebih kondusif;
   d. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

   Adapun program dan kegiatan Pembangunan Kapanewon Girisubo Tahun 2026 seperti pada tabel :

Tabel 4.1
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pamong Nglayani & Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5 Indeks	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.630.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.920.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	550.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	550.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	670.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	670.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.820.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.450.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	978.718.673,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	971.550.303,00	KAPANEWON GIRISUBO

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.397.500,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.770.870,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.735.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.735.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.217.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.217.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.842.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.322.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.766.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.860.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.554.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.800.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.540.000	KAPANEWON GIRISUBO

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.966.640,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.270.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.696.640,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.580.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.500.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.800.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.600.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.680.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.490.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.490.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		
					4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40.000.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40.000.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.625.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	22.700.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.925.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	7.272.500,00	KAPANEWON GIRISUBO

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Tingkat Kecamatan		
					7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.272.500,00	KAPANEWON GIRISUBO
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100 Persen	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
					7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.980.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.675.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32.030.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.400.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.675.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.525.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.675.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
		Meningkatnya Kesejahteraan	Persentase Kegiatan	100	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN		

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sosial	Sosial	Persen		KEBUDAYAAN		
					2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	100.000.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
					7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	329.080.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	329.080.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
					7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.787.500,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3.787.500,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
					7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	443.016.500,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	443.016.500,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN		

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						PEMERINTAHAN UMUM		
					7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	105.633.900,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	88.058.400,00	KAPANEWON GIRISUBO
					7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.225.000,00	KAPANEWON GIRISUBO
					J U M L A H		2.337.224.213,00	

Tabel rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KAPANEWON GIRISUBO				2.337.224.213,00				1.652.669.706,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100.000.000,00				100.000.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000,00				100.000.000,00
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100 persen	100.000.000,00			-	100.000.000,00
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Yang Terlaksana		1 event	100.000.000,00		Kelompok Masyarakat	-	100.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja								
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Kelompok Masyarakat		100.000.000,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				30.000.000,00				40.000.000,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				30.000.000,00				40.000.000,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100 persen	30.000.000,00			-	40.000.000,00
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		4 Dokumen	30.000.000,00		Kelompok Masyarakat	-	40.000.000,00
4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan								
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	30.000.000,00	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Kelompok Masyarakat		40.000.000,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.197.224.213,00				1.512.669.706,00
7.01	KECAMATAN				2.197.224.213,00				1.512.669.706,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		100 persen	1.214.689.313,00			-	1.092.474.806,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dokumen	70.630.000,00		Kelompok Masyarakat	-	65.640.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	64.920.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		53.500.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	550.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		800.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	550.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		1.000.000,00
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	670.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		1.100.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	670.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		1.100.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	17 Laporan	1.820.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		7.100.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Laporan	1.450.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		1.040.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		140 Orang/bulan	978.718.673,00		ASN	-	882.857.006,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	140 Orang/bulan	971.550.303,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		872.633.006,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.397.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		6.200.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	13 Laporan	5.770.870,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		4.024.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah		4 Laporan	2.735.000,00		ASN	-	1.060.000,00
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	28 Laporan	2.735.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		1.060.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian		6 Dokumen	6.217.000,00		ASN	-	4.200.000,00
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	6.217.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		4.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum		4 Paket	59.842.000,00		ASN	-	44.480.000,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	4 Paket	3.322.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		2.520.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	13 Paket	30.766.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		20.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	4 Paket	3.860.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		3.860.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	6 Paket	4.554.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		4.680.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		2.800.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	14 Laporan	14.540.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		10.620.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48 Laporan	43.966.640,00		ASN	-	41.106.800,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	4 Laporan	2.270.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		2.000.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	36 Laporan	29.696.640,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		27.106.800,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		12.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah		120 Unit	52.580.000,00		ASN	-	53.131.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	77 Unit	38.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		41.997.000,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	35 Unit	2.800.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		1.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	11 Unit	3.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		3.900.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Unit	4.680.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		5.034.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	10 Unit	3.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	ASN		1.200.000,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana		100 persen	10.490.000,00			-	10.340.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		12 Laporan	10.490.000,00		Kelompok Masyarakat	-	10.340.000,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	12 Laporan	10.490.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		10.340.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kalurahan yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan ekonomi masyarakat		100 persen	372.765.000,00			-	328.603.400,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan		2 Laporan	32.625.000,00		Kelompok Masyarakat	-	24.428.400,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	13 Dokumen	22.700.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		21.678.400,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Laporan	9.925.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		2.750.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi		1 Laporan	329.080.000,00		Kelompok Masyarakat	-	294.375.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	12 Pokmas / Ormas	329.080.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		294.375.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		6 Dokumen	7.272.500,00		Kelompok Masyarakat	-	7.300.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	2 Laporan	7.272.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		7.300.000,00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan		30 KK	3.787.500,00		Kelompok Masyarakat	-	2.500.000,00
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	30 Keluarga	3.787.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		2.500.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 persen	443.016.500,00			-	2.500.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Laporan	443.016.500,00		Kelompok Masyarakat	-	2.500.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	10 Laporan	443.016.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		2.500.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 persen	96.283.400,00			-	44.344.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		2 Laporan	96.283.400,00		Kelompok Masyarakat	-	44.344.000,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	75 Orang	88.058.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		37.844.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	8.225.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		6.500.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 persen	59.980.000,00			-	34.407.500,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		1 Dokumen	59.980.000,00		Kelompok Masyarakat	-	34.407.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa							
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	1.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		1.500.000,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	16 Dokumen	32.030.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		5.000.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	35 Dokumen	20.400.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		20.907.500,00
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		3.500.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa								
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.525.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		1.500.000,00
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.675.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kelompok Masyarakat		2.000.000,00
J U M L A H					2.337.224.213,00				1.652.669.706,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja 2026 berisi Rencana Kerja Kapanewon Girisubo Tahun 2026 yang memuat evaluasi Renja Kapanewon Girisubo tahun 2024, tujuan, sasaran, dan rencana kerja serta pendanaan Kapanewon Girisubo . Rencana Kerja Kapanewon Girisubo disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki serta menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di Renstra Perangkat Daerah. Rancangan akhir Rencana Kerja Kapanewon Girisubo juga merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan menyusun Rencana Kerja ini diharapkan bisa menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Kapanewon Girisubo Tahun 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam Rencana Kerja Tahun 2026 dan penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Wonosari,

KAPANEWON GIRISUBO,

ttd

EDY SEDONO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KAPANEWON TANJUNGSARI
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Tanjungsari Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari tahun 2026 juga tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari tahun 2025, sebagai bahan pertimbangan.

Penyusunan Renja PD dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penyusunan rancangan Renja PD, tahap pelaksanaan forum PD, dan tahap penetapan renja PD. Dokumen Renja menjadi dokumen yang sangat penting karena terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya antara lain :

1. Renja PD dengan RKPD, artinya bahwa dalam penyusunan Renja PD, harus mengacu pada dokumen RKPD, baik dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja maupun dalam penentuan besaran dana indikatifnya sesuai dengan Program Prioritas RKPD.
2. Renja PD dengan Renstra PD, artinya Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD.
3. Renja PD dengan Renja K/L dan PD Provinsi, artinya bahwa dalam menyusun Renja PD juga harus memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD Provinsi.

Keterkaitan tersebut seperti pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

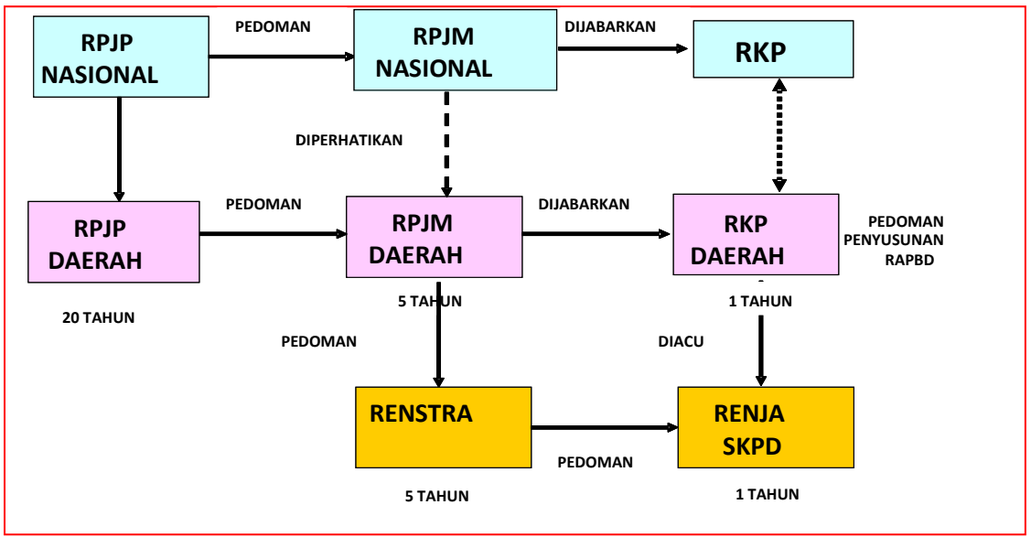

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di D.I Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2025 Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2026

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (*Good Governance*).

Maksud penyusunan Rancangan Renja Kapanewon Tanjungsari adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran serta mempunyai fungsi :

1. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kapanewon Tanjungsari tahun 2021-2026 dalam rencana program prioritas;
2. Mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegritaskan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Kapanewon Tanjungsari yang memuat arah kebijakan di Kapanewon Tanjungsari;
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan satu tahun ke depan;
5. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari disusun untuk menjadi dasar pijakan dan gambaran rencana pembangunan Kapanewon Tanjungsari dalam tahun 2026 yang akan dilaksanakan melalui unit-unit kerja di dalamnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan daerah

Kabupaten Gunungkidul No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul,sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan.

Agar pelaksanaan pembangunan Kapanewon Tanjungsari tahun 2026 lebih terarah dan fokus untuk mencapai prioritas dan sasaran sesuai dengan tema pembangunan tahun 2026 adalah :

"*Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban*".

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan Renja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2026 ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KAPANEWON TANJUNGSARI
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kapanewon Tanjungsari
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Tanjungsari
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Tanjungsari
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyaraka

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KAPANEWON TANJUNGSARI
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Tanjungsari

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KAPANEWON TANJUNGSARI

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KAPANEWON TANJUNGSARI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari dan Capaian Renstra Kapanewon Tanjungsari

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Tanjungsari Tahun 2026 merupakan Renja tahun pertama yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029.

Dalam rangka memperbaiki kinerja PD Kapanewon, diperlukan kesepahaman mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan atau menjadi kewenangan kapanewon. Hal ini telah diawali dengan membuat standarisasi program dan kegiatan untuk PD Kapanewon. Kedepan perlu dirumuskan kembali kebijakan terkait dengan pelimpahan sebagaian tugas dan atau wewenang Bupati kepada Panewu, agar lebih jelas tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kapanewon sebagai PD, pada tahun 2015 mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka tugas yang diemban oleh Kapanewon akan semakin berat khususnya dalam hal pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu mengurangi kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan. Namun demikian, tentunya perlu diperhatikan pula urgensi pencapaian target kinerja RPJMD yang dibebankan kepada PD Kapanewon.

Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Tanjungsari Tahun 2026 mengacu pada APBD Tahun 2026 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kapanewon Tanjungsari berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan atau Tahun 2025.

Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kapanewon Tanjungsari atau realisasi APBD untuk Kapanewon Tanjungsari yang disampaikan melalui E-Monev, terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD Tahun 2024 dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Pada Perangkat Daerah Kapanewon Tanjungsari dalam pelaksanaan Renja 2024 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, dengan kata lain target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan terpenuhi.
2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
   Pada Perangkat Daerah Kapanewon Tanjungsari dalam pelaksanaan Renja 2024 program dan kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
3. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang sudah memenuhi target kinerja keluaran dan yang direncanakan;
   Realisasi program dan kegiatan Kapanewon Tanjungsari pada Tahun 2024 tidak ada yang target kinerja keluarannya melebihi dari target yang yang direncanakan dalam Renja Tahun 2024.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan Tahun 2024.
   a. Dalam rangka efisiesi waktu sebagian kegiatan Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain.

b. Dalam rangka efisiensi anggaran sebagian kegiatan menggunakan anggaran dari Pemerintah Kalurahan.

5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian Tahun 2024;
   a. Adanya kesinkronan kegiatan yang dianggarkan perangkat daerah Kapanewon Tanjungsari dengan agenda kegiatan yang di selenggarakan perangkat daerah di tingkat Kabupaten.
   b. Adanya Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
   c. Sumber Daya Manusia yang ada di perangkat daerah Kapanewon Tanjungsari yang kurang.
   d. Kenaikan harga BBM yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan lainnya.
   e. Rasionalisasi Anggaran tahun 2024 untuk memenuhi alokasi belanja wajib/mengikat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.
   a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala jawatan dan kepala sub bagian yang menangani kegiatan.
   b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait baik masalah pelaksanaan kegiatan maupun pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kapanewon.
   c. Melaksanakan efisiensi anggaran tahun 2024 sesuai ketentuan/intruksi.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2025 Kapanewon Tanjungsari dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Tanjungsari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatann	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kapanewon Tanjungsari tahun 2023				Target program/kegiatan (Renja Kapanewon Tanjungsari tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
							Target Renja PD Tahun 2024		Realisasi Renja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah layanan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28	Indeks	7	Indeks	7	Indeks	7	Indeks	100	7	21	75.00%
		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen Renja Perubahan	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen renstra	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen draf renstra	0	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya tenaga administrasi perencanaan program	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	2	dokumen	3	dokumen	2	dokumen	66.67%	3	7	70.00%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA

		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	3	75.00%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	3	75.00%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen perjanjian kinerja	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen ROPK	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	6	50.00%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	6	75.00%
X.XX.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	100	17	51	75.00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah laporan e monev	4	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah laporan TEPRA	12	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	28	Laporan	28	Laporan	21	Laporan	75.00%	28	77	481.25%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	3	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9	Indeks	3	Indeks	3	Indeks	3	Indeks	100	3	9	100.00%
		Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	300	300.00%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasislitasi gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008	orang	229	orang	238	orang	214	orang	89.92%	252	695	68.95%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA

		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	3	75.00%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ SPJ	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya tenaga administrasi keuangan	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	10	Laporan	76.92%	13	36	69.23%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	3	75.00%
		Presentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terselesaikan	100	dokumen	100	dokumen	100	dokumen	100	dokumen	100	100	100	100.00%
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparatur sipil negara tertangani	18	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	5	dokumen	83.33%	6	17	70.83%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	6	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase administrasi umum kapanewon terfasilitasi	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	Indeks	6	Indeks	6	Indeks	6	Indeks	100	6	18	75.00%
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan tersedia	6	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	3	paket	3	paket	3	paket	100	3	9	75.00%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	12	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	NA	NA
		Jumlah komputer terbeli	2	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laptop Terbeli	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64	paket	13	paket	13	paket	9	paket	69.23%	19	41	64.06%

X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli	12	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dispenser yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	NA	NA
		Jumlah spring bed terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	49	paket	3	paket	3	paket	3	paket	100	3	9	18.37%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	6	bendel	NA	bendel	NA	bendel	NA	bendel	NA	NA	NA	NA
		Jumlah penggandaan/Fotocopy	9015	lembar	NA	lembar	NA	lembar	NA	lembar	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	paket	10	paket	10	paket	8	paket	80.00%	10	28	70.00%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	992	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0	0	0.00%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat yang diberikan makan, minum dan snack tersedia untuk rapat	240	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah konsultasi pada perangkat daerah kabupaten	26	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah monitoring pada pemerintah kalurahan	34	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	9	Laporan	75.00%	12	33	68.75%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Terlaksana	0	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13	unit	3	unit	3	unit	3	unit	100	3	9	69.23%
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	300	300.00%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi tamu yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah meja rapat yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kursi rapat yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah meja kerja yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah meja komputer terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kursi kerja yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kursi tamu pelayanan	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah mimbar yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA

		Jumlah rak arsip yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah backdrop yang terbeli (Ruang Rapa dan Pelayanan)	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah rak perpustakaan	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah almari yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	unit	NA	unit	0	unit	0	unit	0	8	NA	NA
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah soundsystem terbeli (sound system paket nouncement)	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah sound system ruang rapat (paket micropon meja convence asli system wiriless)	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah soundsystem pendopo (paket sound spiker toa zs-1030 plus ampli ppk 2201 USB)	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah printer terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah TV LCD terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlahscreen Proyektor digital/elektrik	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah screen Proyektor portable	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah LCD terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah braket LCD terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah alat antrian digital Pelayanan	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah printer dotmatrik	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Filing Cabinet	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	unit	8	unit	140	unit	140	unit	100	13	161	460.00%
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan / pembuatan tempat parkir	25	unit	NA	unit	0	unit	0	unit	0	0	NA	NA
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kerai Tirai yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Tralis terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pagar lipat gerbang masuk dan gerbang keluar	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Ac yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Ac Standing yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Silent Genset Diesel terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Alat Pemadam Kebakaran terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pengadaan CCTV Wireless	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA

		Jumlah tiang bendera terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	225	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	7	7	3.11%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	6	75.00%
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tefasilitasi	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	300	300.00%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar (2 rekening x 12 bulan)	24	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	NA	NA
		Jumlah rekening air yang terbayar (1 rekening x 12 bulan)	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	27	Laporan	75.00%	36	99	68.75%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100	8	8	25.00%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintan daerah	3	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	unit	3	unit	3	unit	3	unit	100	3	9	75.00%
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	300	300.00%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	1	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	8	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	8	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya tenaga pengemudi	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	228	unit	51	unit	10	unit	8	unit	80.00%	57	116	50.88%

X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah personal komputer terfasilitasi pemeliharaannya	5	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah laptop terfasilitasi pemeliharaannya	5	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah mesin ketik terfasilitasi pemeliharaannya	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah printer terfasilitasi pemeliharaanya	7	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah BBM Genset yang tersedia	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	unit	15	unit	10	unit	7	unit	70.00%	24	46	36.80%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah hari terfasilitasinya keamanan gedung kantor	365	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	NA	NA
		Jumlah sewa rumah/ gedung kantor	8	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pemeliharaan pagar kantor	0	m2	NA	m2	NA	m2	NA	m2	NA	NA	NA	NA
		Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	0	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	NA	NA
		Terlaksananya pemeliharaan pendopo Kapanewon	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Terlaksananya pemeliharaan mushola kapanewon	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	2	NA	NA
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	0	unit	1	unit	1	unit	100	1	2	50.00%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC yang terfasislitasi pemeliharaannya)	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangdipelihara/direhabiltasi	9	unit	NA	unit	0	unit	0	unit	100	2	NA	NA
X.XX.01.2.09.13	Penataan Organisasi	Jumlah layanan penataan organisasi	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Nilai IKM	83	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP/SPIP	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen SKM	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen SOP	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
7.01.02.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100.00%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase layanan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	100	persen	NA	persen	100	persen	100	persen	100	100	NA	NA

		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	3	NA
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah cabang olahraga yang terbina	0	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pengiriman kelompok cabang olahraga dalam kompetisi tingkat Kabupaten	0	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan pada event budaya	0	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan hari jadi Gunungkidul	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kesepakatan dan pelestarian pengembangan budaya	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	75.00%	4	11	61.11%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	72	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100	18	54	75.00%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%

7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan pelaksanaan update data SID/SIKAB	5	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK	5	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial	5	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah bantuan air bersih kepada masyarakat	285	tangki	NA	tangki	NA	tangki	NA	tangki	NA	NA	NA	NA
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)	47	KK	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	NA	NA
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan saptic tank (PIWK)	15	KK	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	Laporan	5	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	75.00%	NA	NA	NA
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pengurusan izin IUMK	30	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	2300	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah peserta pembinaan/koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum	30	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya tenaga pengelola data pelayanan umum	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64	Laporan	14	Laporan	13	Laporan	10	Laporan	100	13	37	57.81%
7:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8	Indeks	2	Indeks	2	Indeks	2	Indeks	100	2	6	75.00%
		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	300	300.00%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RKPKal	5	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMKal	1	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pengurus lembaga kemsyarakatan kalurahan yang meningkat kapasitasnya	5	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen usulan rencana kegiatan (DURP/Musrenbang)	6	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA

		Pembinaan perencanaan pembangunan kalurahan secara aplikasi	35	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah bimtek perencanaan pembangunan desa terselenggara (PIWK)	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	NA	NA
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	18	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	7	dokumen	87.50%	8	23	127.78%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kabupaten	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen profil kalurahan dan profil kecamatan tersusun	6	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32	laporan	6	laporan	6	laporan	1	laporan	16.67%	13	20	62.50%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah layanan pemberdayaan lembaga kemsyarakatan tingkat kecamatan	1	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase terfasilitasinya layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah layanan pemberdayaan lembaga kemsyarakatan tingkat kecamatan	1	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase layanan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kapanewon yang terfasilitasi	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	28	Indeks	7	Indeks	7	Indeks	7	Indeks	100	7	21	75.00%
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	persen	NA	persen	100	persen	100	persen	100	100	NA	NA
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peringatan hari ibu	0	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah peringatan hari kartini	0	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah rakor tim penggerak PKK	12	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kesepakatan penanganan pencegahan pernikahan usia anak	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna	0	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kesepakatan forum anak	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16	lembaga kemasyarakatan	5	lembaga kemasyarakatan	5	lembaga kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan	100	3	12	75.00%

7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan/pameran industri kecil/rumahan	1	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	NA	NA
		Jumlah rakor pendampingan UKM	5	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	4	33.33%
7.01.04.2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah layanan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase layanan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	6	75.00%
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat kecamatan	20	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah safari tarawih tingkat kecamatan	4	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	6	75.00%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah layanan koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		persentase kooordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang terfasilitasi	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	100	NA	NA	NA
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	persen	NA	persen	NA	persen	100	persen	100	NA	NA	NA
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Penyakit masyarakat yang terpetakan	3	pekat	NA	pekat	NA	pekat	NA	pekat	NA	NA	NA	NA

		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	100	NA	NA	NA
7.01.05.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terfasilitasi	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase layanan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8	Indeks	2	Indeks	2	Indeks	2	Indeks		2	6	75.00%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI yang terfasilitasi pelaksanaannya	2	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pasukan pengibar bendera yang terlatih	70	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe	300	orang	75	orang	75	orang	75	orang	100	75	225	75.00%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kesepakatan koordinasi Forkompimca	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah patroli terpadu bersama Forkompinca	5	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	6	75.00%
7.01.06.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA

		Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100	8	24	75.00%
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen monografi kalurahan dan dokumen monografi kapanewon yang tersusun	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah koordinasi bidang pemerintahan	5	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	5	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	52	dokumen	13	dokumen	13	dokumen	13	dokumen	100	13	39	75.00%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKal	5	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pelaksanaan fasiliitasi pengelolaan aset kalurahan yang terlaksana	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Frekuensi monev pengelolaan keuangan kalurahan	5	desa	NA	desa	NA	desa	NA	desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah bimtek pengelolaan keungan kalurahan terselenggara (PIWK)	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16	dokumen	3	dokumen	4	dokumen	3	dokumen	75.00%	4	10	62.50%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah koordinasi dengan lurah dan pamong lainnya	2	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pamong kalurahan yang meningkat pengetahuaanya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	60	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	6	75.00%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggarakan pemilihan lurah	0	desa	NA	desa	NA	desa	NA	desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	3	75.00%
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD/BPK yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	45	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA

		Fasilitasi pembentukan BPD/BPKal	0	desa	NA	desa	NA	desa	NA	desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	2	4	100.00%
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggarakan pengisian pamong kalurahan dan atau staf pamong kalurahan	5	desa	NA	desa	NA	desa	NA	desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	1	7	175.00%
7.01.06.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	50	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pelatihan satgas siaga bencana dalam penanggulangan bencana	50	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	0	dokumen	100	2	4	50.00%
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah koordinasi fasilitasi kerjasama antar Kalurahan	5	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	3	75.00%
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah kesepakatan koordinasi tata ruang kalurahan	5	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	1	2	50.00%
2:22:08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan budaya	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah layanan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	3	75.00%
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah gelar seni budaya dalam rangka peringatan hari keistimewaan DIY	1	event	1	event	NA	event	NA	event	NA	NA	NA	NA
		Jumlah gelar seni budaya dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI	1	event	NA	event	NA	event	NA	event	NA	NA	NA	NA

2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	8	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	NA	NA
4:01:04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelengaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	300	300.00%
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah layanan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	9	dokumen	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
4.01.04.2.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Rencana program kegiatan keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah layanan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28	Indeks	7	Indeks	7	Indeks	7	Indeks	100	7	21	75.00%
		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen Renja Perubahan	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen renstra	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen draf renstra	0	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya tenaga administrasi perencanaan program	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	NA	NA

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dokumen	2	dokumen	3	dokumen	2	dokumen	66.67%	3	7	70.00%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	5	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	3	75.00%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	3	75.00%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen perjanjian kinerja	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen ROPK	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	6	50.00%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen perubahan perjanjian kinerja	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	6	75.00%
X.XX.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	100	17	51	75.00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah laporan e monev	4	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah laporan TEPRA	12	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	28	Laporan	28	Laporan	21	Laporan	75.00%	28	77	481.25%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	3	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9	Indeks	3	Indeks	3	Indeks	3	Indeks	100	3	9	100.00%
		Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	300	300.00%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasislitasi gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	NA	NA	NA

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008	orang	229	orang	238	orang	214	orang	89.92%	252	695	68.95%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	3	75.00%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ SPJ	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya tenaga administrasi keuangan	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52	Laporan	13	Laporan	13	Laporan	10	Laporan	76.92%	13	36	69.23%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	3	75.00%
		Presentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terselesaikan	100	dokumen	100	dokumen	100	dokumen	100	dokumen	100	100	100	100.00%
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Aparatur sipil negara tertangani	18	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	5	dokumen	83.33%	6	17	70.83%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	6	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase administrasi umum kapanewon terfasilitasi	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	Indeks	6	Indeks	6	Indeks	6	Indeks	100	6	18	75.00%
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen kelistrikan tersedia	6	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	3	paket	3	paket	3	paket	100	3	9	75.00%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	12	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	NA	NA
		Jumlah komputer terbeli	2	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA

		Jumlah Laptop Terbeli	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64	paket	13	paket	13	paket	9	paket	69.23%	19	41	64.06%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli	12	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	paket belanja	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dispenser yang terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	NA	NA
		Jumlah spring bed terbeli	0	buah	NA	buah	NA	buah	NA	buah	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	49	paket	3	paket	3	paket	3	paket	100	3	9	18.37%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	6	bendel	NA	bendel	NA	bendel	NA	bendel	NA	NA	NA	NA
		Jumlah penggandaan/Fotocopy	9015	lembar	NA	lembar	NA	lembar	NA	lembar	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	paket	10	paket	10	paket	8	paket	80.00%	10	28	70.00%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar yang terbayar	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	992	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0	0	0.00%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat yang diberikan makan, minum dan snack tersedia untuk rapat	240	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah konsultasi pada perangkat daerah kabupaten	26	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah monitoring pada pemerintah kalurahan	34	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	9	Laporan	75.00%	12	33	68.75%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Terlaksana	0	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13	unit	3	unit	3	unit	3	unit	100	3	9	69.23%
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	300	300.00%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi tamu yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah meja rapat yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kursi rapat yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah meja kerja yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah meja komputer terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA

		Jumlah kursi kerja yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kursi tamu pelayanan	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah mimbar yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah rak arsip yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah backdrop yang terbeli (Ruang Rapa dan Pelayanan)	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah rak perpustakaan	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah almari yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	unit	NA	unit	0	unit	0	unit	0	8	NA	NA
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah soundsystem terbeli (sound system paket nouncement)	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah sound system ruang rapat (paket micropon meja convence asli system wiriless)	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah soundsystem pendopo (paket sound spiker toa zs-1030 plus ampli ppk 2201 USB)	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah printer terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah TV LCD terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlahscreen Proyektor digital/elektrik	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah screen Proyektor portable	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah LCD terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah braket LCD terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah alat antrian digital Pelayanan	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah printer dotmatrik	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Filing Cabinet	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	unit	8	unit	140	unit	140	unit	100	13	161	460.00%
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan / pembuatan tempat parkir	25	unit	NA	unit	0	unit	0	unit	0	0	NA	NA
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kerai Tirai yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Tralis terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pagar lipat gerbang masuk dan gerbang keluar	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Ac yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Ac Standing yang terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA

		Jumlah Silent Genset Diesel terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Alat Pemadam Kebakaran terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pengadaan CCTV Wireless	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah tiang bendera terbeli	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	225	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	7	7	3.11%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	6	75.00%
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tefasilitasi	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	300	300.00%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayar (2 rekening x 12 bulan)	24	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	NA	NA
		Jumlah rekening air yang terbayar (1 rekening x 12 bulan)	12	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	rekening	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	27	Laporan	75.00%	36	99	68.75%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	100	8	8	25.00%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintan daerah	3	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	unit	3	unit	3	unit	3	unit	100	3	9	75.00%
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	300	300.00%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket pemeliharaan mobil dinas	1	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah paket pemeliharaan motor dinas	8	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya	8	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA

		Jumlah hari terfasilitasinya tenaga pengemudi	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	NA	NA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	228	unit	51	unit	10	unit	8	unit	80.00%	57	116	50.88%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah personal komputer terfasilitasi pemeliharaannya	5	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah laptop terfasilitasi pemeliharaannya	5	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah mesin ketik terfasilitasi pemeliharaannya	1	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah printer terfasilitasi pemeliharaanya	7	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah BBM Genset yang tersedia	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	unit	15	unit	10	unit	7	unit	70.00%	24	46	36.80%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah hari terfasilitasinya keamanan gedung kantor	365	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	NA	NA
		Jumlah sewa rumah/ gedung kantor	8	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	bulan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pemeliharaan pagar kantor	0	m2	NA	m2	NA	m2	NA	m2	NA	NA	NA	NA
		Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	0	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	paket pemeliharaan	NA	NA	NA	NA
		Terlaksananya pemeliharaan pendopo Kapanewon	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Terlaksananya pemeliharaan mushola kapanewon	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	2	NA	NA
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	0	unit	1	unit	1	unit	100	1	2	50.00%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pendingin ruangan (AC yang terfasislitasi pemeliharaannya)	0	unit	NA	unit	NA	unit	NA	unit	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangdipelihara/direhabiltasi	9	unit	NA	unit	0	unit	0	unit	100	2	NA	NA
X.XX.01.2.09.13	Penataan Organisasi	Jumlah layanan penataan organisasi	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Nilai IKM	83	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	indeks	NA	NA	NA	NA
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP/SPIP	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen SKM	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen SOP	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
7.01.02.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	100	100.00%

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah layanan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase layanan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	100	persen	NA	persen	100	persen	100	persen	100	100	NA	NA
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	3	NA
		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah cabang olahraga yang terbina	0	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pengiriman kelompok cabang olahraga dalam kompetisi tingkat Kabupaten	0	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	cabor	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan pada event budaya	0	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kesepakatan partisipasi peringatan hari jadi Gunungkidul	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kesepakatan dan pelestarian pengembangan budaya	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	75.00%	4	11	61.11%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	72	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100	18	54	75.00%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kesepakatan pelaksanaan update data SID/SIKAB	5	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan TKPK	5	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Dokumen hasil monev bidang kesejahteraan sosial	5	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah bantuan air bersih kepada masyarakat	285	tangki	NA	tangki	NA	tangki	NA	tangki	NA	NA	NA	NA
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan jamban sehat (PIWK)	47	KK	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	NA	NA
		Jumlah KK yang memperoleh bantuan saptic tank (PIWK)	15	KK	NA	KK	NA	KK	NA	KK	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16	Laporan	5	Laporan	4	Laporan	3	Laporan	75.00%	NA	NA	NA
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi pengurusan izin IUMK	30	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah layanan kepada masyarakat yang terselesaikan	2300	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah peserta pembinaan/koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum	30	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah hari terfasilitasinya tenaga pengelola data pelayanan umum	247	hari	NA	hari	NA	hari	NA	hari	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64	Laporan	14	Laporan	13	Laporan	10	Laporan	100	13	37	57.81%
7:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Layanan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase kegiatan pemberdayaan desa terfasilitasi	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8	Indeks	2	Indeks	2	Indeks	2	Indeks	100	2	6	75.00%
		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	300	300.00%

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RKPKal	5	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Kalurahan yang terfasilitasi penyusunan RPJMKal	1	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pengurus lembaga kemsyarakatan kalurahan yang meningkat kapasitasnya	5	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	Desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah dokumen usulan rencana kegiatan (DURP/Musrenbang)	6	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Pembinaan perencanaan pembangunan kalurahan secara aplikasi	35	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah bimtek perencanaan pembangunan desa terselenggara (PIWK)	1	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	Kali	NA	NA	NA	NA
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	18	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	7	dokumen	87.50%	8	23	127.78%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba kalurahan tingkat kabupaten	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen profil kalurahan dan profil kecamatan tersusun	6	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32	laporan	6	laporan	6	laporan	1	laporan	16.67%	13	20	62.50%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah layanan pemberdayaan lembaga kemsyarakatan tingkat kecamatan	1	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase terfasilitasinya layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah layanan pemberdayaan lembaga kemsyarakatan tingkat kecamatan	1	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase layanan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kapanewon yang terfasilitasi	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	28	Indeks	7	Indeks	7	Indeks	7	Indeks	100	7	21	75.00%
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100	persen	NA	persen	100	persen	100	persen	100	100	NA	NA
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peringatan hari ibu	0	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah peringatan hari kartini	0	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah rakor tim penggerak PKK	12	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA

		Jumlah kesepakatan penanganan pencegahan pernikahan usia anak	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA
		Jumlah kesepakatan penanganan kepemudaan dan karang taruna	0	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA
		Jumlah kesepakatan forum anak	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16	lembaga kemasyarakatan	5	lembaga kemasyarakatan	5	lembaga kemasyarakatan	4	lembaga kemasyarakatan	100	3	12	75.00%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil monev bidang pemberdayaan masyarakat	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang dikirim pada pameran pembangunan/pameran industri kecil/rumahan	1	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	NA	NA
		Jumlah rakor pendampingan UKM	5	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	kelompok	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	4	33.33%
7.01.04.2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah layanan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase layanan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	6	75.00%
		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan dialog antar umat beragama tingkat kecamatan	20	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah safari tarawih tingkat kecamatan	4	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	6	75.00%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah layanan koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		persentase kooordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang terfasilitasi	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	4	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	100	NA	NA	NA

		Kepala Daerah											
		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	persen	NA	persen	NA	persen	100	persen	100	NA	NA	NA
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Penyakit masyarakat yang terpetakan	3	pekat	NA	pekat	NA	pekat	NA	pekat	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	100	NA	NA	NA
7.01.05.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terfasilitasi	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase layanan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang terfasilitasi	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8	Indeks	2	Indeks	2	Indeks	2	Indeks		2	6	75.00%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI yang terfasilitasi pelaksanaannya	2	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pasukan pengibar bendera yang terlatih	70	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe	300	orang	75	orang	75	orang	75	orang	100	75	225	75.00%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kesepakatan koordinasi Forkompimca	1	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA

		Jumlah patroli terpadu bersama Forkompinca	5	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	6	75.00%
7.01.06.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	Layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100	8	24	75.00%
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksana	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen monografi kalurahan dan dokumen monografi kapanewon yang tersusun	12	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah koordinasi bidang pemerintahan	5	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah koordinasi intensifikasi PBB	5	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	52	dokumen	13	dokumen	13	dokumen	13	dokumen	100	13	39	75.00%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Frekuensi fasilitasi penyusunan dan pengelolaan APBKal	5	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pelaksanaan fasiliitasi pengelolaan aset kalurahan yang terlaksana	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Frekuensi monev pengelolaan keuangan kalurahan	5	desa	NA	desa	NA	desa	NA	desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah bimtek pengelolaan keungan kalurahan terselenggara (PIWK)	1	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16	dokumen	3	dokumen	4	dokumen	3	dokumen	75.00%	4	10	62.50%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah koordinasi dengan lurah dan pamong lainnya	2	kali	NA	kali	NA	kali	NA	kali	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pamong kalurahan yang meningkat pengetahuaanya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	60	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA

		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	6	75.00%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggarakan pemilihan lurah	0	desa	NA	desa	NA	desa	NA	desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	3	75.00%
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD/BPK yang meningkat pengetahuannya dan pemahamannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	45	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Fasilitasi pembentukan BPD/BPKal	0	desa	NA	desa	NA	desa	NA	desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	2	4	100.00%
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah kalurahan yang menyelenggarakan pengisian pamong kalurahan dan atau staf pamong kalurahan	5	desa	NA	desa	NA	desa	NA	desa	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	1	7	175.00%
7.01.06.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang diharapkan meningkat pengetahuannya	50	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah pelatihan satgas siaga bencana dalam penanggulangan bencana	50	orang	NA	orang	NA	orang	NA	orang	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	0	dokumen	100	2	4	50.00%
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah koordinasi fasilitasi kerjasama antar Kalurahan	5	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	3	75.00%
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah kesepakatan koordinasi tata ruang kalurahan	5	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	kesepakatan	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	1	2	50.00%
2:22:08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan budaya	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah layanan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA

		Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	3	75.00%
		Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	100	100.00%
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah gelar seni budaya dalam rangka peringatan hari keistimewaan DIY	1	event	1	event	NA	event	NA	event	NA	NA	NA	NA
		Jumlah gelar seni budaya dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI	1	event	NA	event	NA	event	NA	event	NA	NA	NA	NA
2.22.08.2.09.16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	8	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	Laporan	NA	NA	NA	NA
4:01:04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelengaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	100	persen	100	persen	100	persen	100	persen	100	100	300	300.00%
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah layanan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	1	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	layanan	NA	NA	NA	NA
		Persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan terlaksana	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Persentase Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	100	persen	NA	persen	NA	persen	NA	persen	NA	NA	NA	NA
4.01.04.5.01.07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	9	dokumen	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
4.01.04.2.01.10	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kalurahan	1	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA
		Rencana program kegiatan keistimewaan pada Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024	2	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	dokumen	NA	NA	NA	NA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kapanewon Tanjungsari

Indikator capaian kinerja pelayanan Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan Indikator Kinerja Kunci, sebagaimana telah disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pengukuran capaian kienerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Capaian kinerja pelayanan Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunung dengan baik dan telah sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024.

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan Kapanewon Tanjungsari sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Tanjungsari
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU,SPM,IKK)	Satuan (IKU,SPM,IMM)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Indikator Kinerja Utama										
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat										
	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	82,5	83	96,91	96,98	96,81	96,87	96,91	96,98	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kapanewon Tanjungsari

2.3.1 Tugas dan Fungsi Kapanewon Tanjungsari

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon bahwa Kapanewon Tanjungsari mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon, maka untuk melaksanakan tugas tersebut kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
n. Penyusunan dan penerpan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kapanewon Tanjungsari

Berdasarkan penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya di Kapanewon Tanjungsari masih menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kapanewon dan Kalurahan
3. Masih rendahnya sumber daya manusia Pamong Kalurahan
4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat dalam masalah peraturan perundangan.
5. Akuntabilitas kinerja pemerintah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal
6. Angka kemiskinan masih perlu ditangani serius
7. Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan belum seluruhnya berjalan dengan efektif
8. Implementasi kerjasama antar daerah belum berjalan secara optimal

Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Kapanewon Tanjungsari adalah :

1. Kualitas sumber daya manusia Pamong Kalurahan belum merata.
2. Terbatasnya kemampuan SDM yang ditempatkan di Kecamatan.
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang masih kurang karena keterbatasan anggaran.
4. Harga kebutuhan pokok masyarakat semakin tinggi
5. Kurangnya SDM yang berkompeten
6. Terbatasnya anggaran dan SDM

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Dearah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Melenium Development Goals*).

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah

”Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 yang meliputi :

a. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
b. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
c. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung

kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.

d. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
e. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
f. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

a. Isu strategis provinsi
   - Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun pendapatan)
   - Pengembangan Wilayah Selatan DIY
   - Perkembangan Teknologi Informasi
   - Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkualitas dan Inklusif
   - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
   - Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik
   - Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borbudur Yogyakarta-Prambanan
   - Penguatan Ketahanan Pangan
   - Pelestarian dan Pengelolaan Budaya
   - Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan Berkelanjutan
   - Penguatan Kapasitas Fiskal; dan
   - Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital

b. Isu strategis daerah
   - Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
   - Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata
   - Belum Optimalnya pengembangan perekonomian dan peningkatan kesempatan berusaha
   - Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan mandiri masih terbatas
   - Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum
   - Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, indikasi tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2026 dengan merujuk pada indikasi visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah:

"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Program Bocah Pinter
2. Program Warga Sehat
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
4. Program Gunungkidul Berdikari
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
6. Program Warga Gayeng dan Guyub
7. Program Alam Lestari

Adapun prioritas dan sasaran daerah untuk Kapanewon Tanjungsari adalah Program Pamong Nglayani dan Ngayomi. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi yaitu Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum bagi warga melalui transformasi tata kelola pelayanan publik, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN, dan perluasan perlindungan dan bantuan hukum bagi warga. Penguatan reformasi birokrasi kalurahan.

Tugas dan fungsi Kapanewon Tanjungsari terkait dengan visi dan misi daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kapanewon Tanjungsari dapat mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis dengan cara meningkatkan kemampuan SDM aparat Kapanewon dan kalurahan, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan publik.

Pemerintah Kapanewon Tanjungsari sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat agar tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat termasuk sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah Tanjungsari. Pemanfaatan sumber daya yang ada maupun potensi lainnya harus secara lestari dan berkelanjutan diolah dan dikembangkan. Sedangkan pengelolaan SDM dilakukan dengan cara meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan kepedulian sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi beberapa faktor. Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kapanewon Tanjungsari dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Peluang (*Opportunities*)
   1) Regulasi yang jelas
   2) Perkembangan tehnologi informasi yang semakin cepat
   3) Semangat kerjasama dan gotong royong aparatur dan masyarakat Kalurahan cukup baik
   4) Situasi dan kondisi Kalurahan yang cukup kondusif, aman dan terkendali.

5) Ketersediaan anggaran yang cenderung meningkat

b. Ancaman (*Threat*)
1) Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling bertentangan.
2) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3) Kondisi sosial masyarakat dan Kalurahan yang cukup beragam
4) Harga pangan dan kebutuhan bahan pokok yang cepat berubah mengikuti mekanisme pasar.
5) Perubahan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata yang meningkatkan potensi penyakit masyarakat, gesekan/konflik sosial, munculnya masalah kesehatan baru, serta bahaya perdagangan orang.

Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kapanewon Tanjungsari dalam lima tahun yang akan datang, yaitu :

a. Pendayagunaan dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik belum optimal
b. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
c. Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi
d. Pengelolaan sumber daya alam pelestarian lingkungan hidup belum optimal
e. Infrastruktur publik belum memadai dan belum merata
f. Pelestarian budaya masih rendah.
g. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke Kecamatan.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 berpedoman pada program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. RKPD yang terdiri dari Rencana Kerja PD termasuk Kapanewon Tanjungsari disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan (Musrenbangkal), dengan harapan akan mendapatkan berbagai masukan dari forum Musrenbang Kapanewon, Forum (gabungan) PD maupun Musrenbang Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/5889 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Renja 2026 Kapanewon Tanjungsari telah dimutahirkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Kabupaten Gunungkidul

Perangkat Daerah : Kapanewon Tanjungsari

Rancangan Awal RENJA PD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100 Persen**	**100,000,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**100 Persen**	**100,000,000.00**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		**Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan**		**100,000,000.00**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan**		**100,000,000.00**	
	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100,000,000.00	Gelar Budaya Jogja	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100,000,000.00	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**	**100 persen**	**40,000,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**	**100 persen**	**40,000,000.00**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**40,000,000.00**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**40,000,000.00**	
	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 dokumen	40,000,000.00	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 dokumen	40,000,000.00	
	KECAMATAN					**KECAMATAN**					
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**81,95 indeks**	**1,687,530,175.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah**	**81,95 indeks**	**1,687,530,175.00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**12,603,000.00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**12,603,000.00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,170,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2,170,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,365,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,365,000.00	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,220,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,220,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,800,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1,800,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1,378,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1,378,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	3,130,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	3,130,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1,540,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1,540,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1,432,704,375.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1,432,704,375.00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang	1,392,130,075.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang	1,392,130,075.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,320,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,320,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	38,254,300.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	38,254,300.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**		**2,760,000.00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**		**2,760,000.00**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	2,760,000.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	2,760,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Dokumen Administrasi Kepegawiaan**		**4,560,000.00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Dokumen Administrasi Kepegawiaan**		**4,560,000.00**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	4,560,000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	4,560,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Dokumen Administrasi Umum**		**73,049,000.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Dokumen Administrasi Umum**		**73,049,000.00**	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3,630,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3,630,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	37,409,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	37,409,000.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	6,571,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	6,571,000.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	5,229,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	5,229,000.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3,000,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	17,210,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	17,210,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**46,793,800.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**46,793,800.00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2,200,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2,200,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44,593,800.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44,593,800.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**115,060,000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**115,060,000.00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	40,300,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	40,300,000.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	6,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	6,000,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32,355,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32,355,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	36,405,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	36,405,000.00	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana**	**100 Persen**	**34,104,600.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana**	**100 Persen**	**34,104,600.00**	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**34,104,600.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**34,104,600.00**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	34,104,600.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	34,104,600.00	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan**	**100 Persen**	**210,466,500.00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan**	**100 Persen**	**210,466,500.00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan**		**44,687,000.00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan**		**44,687,000.00**	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat Yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Tingkat kabupaten	8 Dokumen	36,437,600.00	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat Yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Tingkat kabupaten	8 Dokumen	36,437,600.00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	8,249,400.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	8,249,400.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi**		**161,286,500.00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi**		**161,286,500.00**	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26 Pokmas/Ormas	161,286,500.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26 Pokmas/Ormas	161,286,500.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**		**2,190,000.00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**		**2,190,000.00**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2,190,000.00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2,190,000.00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		**Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan**		**2,303,000.00**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan**		**2,303,000.00**	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 Keluarga	2,303,000.00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 Keluarga	2,303,000.00	
6	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**	280,287,500.00	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**	280,287,500.00	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		280,287,500.00	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		280,287,500.00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	280,287,500.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	280,287,500.00	
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 persen**	**107,185,800.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100 persen**	**107,185,800.00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**107,185,800.00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**107,185,800.00**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	98,135,800.00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	98,135,800.00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	9,050,000.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	9,050,000.00	
8	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 persen**	**27,718,000.00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 persen**	**27,718,000.00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**27,718,000.00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**27,718,000.00**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	2,485,000.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	2,485,000.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	9,420,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	9,420,000.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	3,210,000.00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	3,210,000.00	

	fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	1 Dokumen	5,905,000.00	fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa	1 Dokumen	5,905,000.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	5,143,000.00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	5,143,000.00	
	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	1,555,000.00	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Tanjungsari	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	1,555,000.00	
TOTAL					**2,487,292,575.00**					**2,487,292,575.00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan merupakan upaya untuk mencapai cita-cita dan gambaran warga masyarakat yang ingin membangun dan memajukan daerahnya. Usulan program meliputi pembangunan fisik maupun non fisik, pelaksanaan musrenbang Tingkat Kapanewon Tanjungsari yang dilaksanakan Tanggal 23 Januari 2025 ini forum untuk mempertemukan antara kebutuhan Masyarakat dan pemangku kepentingan Kapanewon Tanjungsari dengan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah pusat daerah pada tahun 2026.

Pada Tahun 2026 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Kapanewon maupun OPD Kabupaten Tahun 2026 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut maka dilakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan OPD Tahun 2026, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan usulan program kegiatan sesuai dengan program kegiatan OPD.

Usulan pemangku kepentingan secara rinci pada Tabel : 2.4

Tabel 2.4
Usulan dari Pemangku Kepentingan tahun 2026
Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator kInerja	Koefisien/ Volume	Harga satuan	Anggaran	Catatan
1	(PIWK) - Pelatihan perencanaan pembangunan di desa. - KAPANEWON TANJUNGSARI	Kapanewon Tanjungsari, Kab. Gunungkidul	Jumlah Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Terselenggara	1 Kali	18.600.000	18.600.000	
2	(PIWK) - Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa - KAPANEWON TANJUNGSARI	Kapanewon Tanjungsari, Kab. Gunungkidul	Jumlah Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Terselenggara	1 Kali	4.460.000	4.460.000	
3	(PIWK) - Pembangunan jamban dan Pembuangan akhir tinja sehat bagi KK miskin(PEKAT). - KAPANEWON TANJUNGSARI	Kapanewon Tanjungsari, Kab. Gunungkidul	Jumlah KK yang memperoleh bantuan sarana BABS	8 KK	7.734.500	61.876.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang Kapanewon dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2023, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Kapanewon

Kapanewon Tanjungsari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah, sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Penyusunan Rencana Kerja PD (Renja PD) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensingkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan PD setiap PD harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja PD. Renja PD yang disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir berbagai masukan dari para pemangku kepentingan *(stakeholders).*

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Tanjungsari

Kebijakan penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berikut ini disajikan hubungan antara tujuan PD dengan sasaran PD

Tabel 3.1
Tujuan Kapanewon Tanjungsari

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Akhir Tahun 2030
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	97.12

Sumber : Rancangan akhir Renstra 2025-2029

Tabel 3.2
Sasaran Kapanewon Tanjungsari

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD Tahun 2026
1.	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.90

Sumber : Rancangan akhir Renstra 2025-2029

Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan/Kapanewon Tanjungsari

No.	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
	Tujuan		
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks Pelayanan Kapanewon	96.98
	Sasaran		
1.	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100
2.	Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100
3.	Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100

4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.90

Sumber : Rancangan akhir Renstra 2025-2029

Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan Renja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Gunungkidul tahun 2026;
2. Dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan;
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
5. Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari meliputi :

1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani;
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi masalah wilayah kapanewon.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Kapanewon Tanjungsari yang direncanakan melalui Rancangan Renja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2026 tidak jauh berbeda dari Renja 2025, hal tersebut disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan wajib yang harus tetap dilaksanakan oleh Kapanewon Tanjungsari. Meskipun demikian ada beberapa kegiatan baru yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan anggaran yang tersedia dari APBD Kabupaten Gunungkidul. Selain menampilkan rencana program dan kegiatan tahun 2026 juga dapat dilihat perkiraan maju tahun 2027 dengan harapan bahwa pada tahun 2027 sudah dapat diketahui gambaran perkiraan pagu anggaran untuk Kapanewon Tanjungsari.

Rancangan Renja Kapanewon Tanjungsari tahun 2026 terdiri dari 8 Program dan mencakup 16 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Dari program-program tersebut, merupakan program yang menyasar pada internal PD yang dilaksanakan dalam rangka pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan selebihnya, merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat dan kalurahan di wilayah Kapanewon Tanjungsari. Pagu anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp 2.487.292.575,00 yang bersumber dari APBD dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kapanewon Tanjungsari untuk Tahun 2026 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan RKPD khususnya dalam pagu anggaran. Hal ini dikarenakan pada rancangan awalnya, program dan kegiatan serta pagu dana yang diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun sebelumnya/tahun berjalan. Namun dalam perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui berbagai forum yang ada dan RKPD Kabupaten Gunungkidul, rancangan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian. Harapannya penyesuaian tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-aturan yang berlaku.

Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Tanjungsari dapat dilihat di tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kabupaten Gunungkidul

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran-PD	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6					7	9	10
Pamong Nglayani dan Ngayomi	Terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel	Dokumen Perencanaan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46,877,000	
					7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44,687,000	
					7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	36,437,600	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8,249,400	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,190,000	
					7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2,190,000	Kapanewon Tanjungsari
					4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40,000,000	
					4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	40,000,000	

					4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	40,000,000	Kapanewon Tanjungsari
		Dokumen Keuangan yang Berkualitas	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27,718,000	
					7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27,718,000	
					7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,485,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,420,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,210,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5,905,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5,143,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1,555,000	Kapanewon Tanjungsari
		Kesejahteraan Sosial Meningkat	Persentase Kegiatan Sosial	100	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	161,286,500	
					7	01	03	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	161,286,500	
					7	01	03	2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	161,286,500	Kapanewon Tanjungsari
					2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100,000,000	

					2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100,000,000	
					2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja	100,000,000	Kapanewon Tanjungsari
		Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,303,000	
					7	01	03	2.1		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2,303,000	
					7	01	03	2	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2,303,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	280,287,500	
					7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	280,287,500	
					7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	280,287,500	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	107,185,800	
					7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	107,185,800	

					7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	98,135,800	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9,050,000	Kapanewon Tanjungsari
		Pelayanan Umum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.9	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34,104,600	
					7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	34,104,600	
					7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34,104,600	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,682,970,175	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,603,000.00	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,170,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,365,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,220,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,800,000	Kapanewon Tanjungsari

					7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,378,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,130,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,540,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,432,704,375	
					7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,392,130,075	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,320,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38,254,300	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,760,000	
					7	01	01	2	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,760,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,560,000	
					7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4,560,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	73,049,000	
					7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,630,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,409,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,571,000	Kapanewon Tanjungsari

					7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,229,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.06	0005	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,000,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17,210,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,793,800	
					7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,200,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,593,800	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115,060,000	
					7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,300,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,000,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32,355,000	Kapanewon Tanjungsari
					7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36,405,000	Kapanewon Tanjungsari

Pagu dana yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sejumlah Rp 2,487,292,575.00 dengan perkiraan maju pada tahun berikutnya sebesar Rp 2,496,755,911.00 Seluruhnya bersumber pada APBD Kabupaten Gunungkidul.

Program dan kegiatan Kapanewon Tanjungsari yang direncanakan melalui Renja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2026 dan rencana maju di tahun 2026 secara rinci dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Gunungkidul

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kapanewon Tanjungsari				2,487,292,575				2,496,755,911
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2,347,292,575				2,366,755,911
7	01				KECAMATAN				2,347,292,575				2,366,755,911
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		81.95 indeks	1,687,530,175			82	1,784,256,811
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12,603,000				15,200,000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Tanjungsari	2 dokumen	2,170,000	APBD		2 dokumen	2,500,000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	1 Dokumen	1,365,000	APBD		1 Dokumen	1,500,000
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	1 Dokumen	1,220,000	APBD		1 Dokumen	1,500,000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	2 Dokumen	1,800,000	APBD		2 Dokumen	2,000,000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kapanewon Tanjungsari	2 Dokumen	1,378,000	APBD		2 Dokumen	1,500,000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Tanjungsari	17 Laporan	3,130,000	APBD		17 Laporan	3,500,000

7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Tanjungsari	4 Laporan	1,540,000	APBD		4 Laporan	2,700,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,432,704,375				1,446,631,811
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Tanjungsari	294 Orang/bulan	1,392,130,075	APBD		294 Orang/bulan	1,405,556,811
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kapanewon Tanjungsari	1 Laporan	2,320,000	APBD		1 Laporan	2,320,000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Tanjungsari	13 Laporan	38,254,300	APBD		13 Laporan	38,755,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah			2,760,000				2,760,000
7	01	01	2.05	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kapanewon Tanjungsari	24 Laporan	2,760,000	APBD		24 Laporan	2,760,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawiaan			4,560,000				5,500,000
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kapanewon Tanjungsari	6 Dokumen	4,560,000	APBD		6 Dokumen	5,500,000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum			73,049,000				80,005,000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Tanjungsari	4 Paket	3,630,000	APBD		4 Paket	4,320,000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kapanewon Tanjungsari	14 paket	37,409,000	APBD		14 paket	41,809,500
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kapanewon Tanjungsari	4 Paket	6,571,000	APBD		4 Paket	6,770,500
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kapanewon Tanjungsari	10 Paket	5,229,000	APBD		10 Paket	6,395,000
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Tanjungsari	12 Laporan	3,000,000	APBD		12 Laporan	3,500,000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Tanjungsari	12 Laporan	17,210,000	APBD		12 Laporan	17,210,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46,793,800				59,000,000

7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Tanjungsari	4 Laporan	2,200,000	APBD		4 Laporan	3,000,000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kapanewon Tanjungsari	36 Laporan	44,593,800	APBD		36 Laporan	56,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah			115,060,000				175,160,000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kapanewon Tanjungsari	79 unit	40,300,000	APBD		79 unit	98,400,000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kapanewon Tanjungsari	13 Unit	6,000,000	APBD		13 Unit	6,000,000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kapanewon Tanjungsari	1 Unit	32,355,000	APBD		1 Unit	33,855,000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kapanewon Tanjungsari	11 Unit	36,405,000	APBD		12 Unit	36,905,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang terlaksana		100 persen	34,104,600			100 persen	34,604,600
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			34,104,600			18 Laporan	34,604,600
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	13 Laporan	34,104,600	APBD		13 Laporan	34,604,600
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		100 persen	210,466,500			100 persen	131,197,000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan			44,687,000				27,087,000
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	8 dokumen	36,437,600	APBD,PIWK		8 dokumen	18,337,600
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	7 laporan	8,249,400	APBD		7 laporan	8,749,400

7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi			161,286,500				97,825,000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kapanewon Tanjungsari	26 Pokmas/Ormas	161,286,500	APBD, PIWK		26 Pokmas/Ormas	97,825,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			2,190,000				3,190,000
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Tanjungsari	1 Laporan	2,190,000	APBD		1 Laporan	3,190,000
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan			2,303,000				3,095,000
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kapanewon Tanjungsari	25 Keluarga	2,303,000	APBD		25 Keluarga	3,095,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 persen	280,287,500			100 persen	280,287,500
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			280,287,500				280,287,500
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	7 laporan	280,287,500	APBD		7 laporan	280,287,500
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100 persen	107,185,800			100 persen	111,050,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			107,185,800				111,050,000

7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kapanewon Tanjungsari	75 orang	98,135,800	APBD		75 orang	102,000,000
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kapanewon Tanjungsari	4 dokumen	9,050,000	APBD		4 dokumen	9,050,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100 persen	27,718,000			100 persen	25,360,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			27,718,000				25,360,000
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kapanewon Tanjungsari	13 Dokumen	2,485,000	APBD		13 Dokumen	2,985,000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kapanewon Tanjungsari	9 dokumen	9,420,000	APBD,PIWK		9 dokumen	5,460,000
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kapanewon Tanjungsari	2 dokumen	3,210,000	APBD		2 dokumen	3,710,000
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kapanewon Tanjungsari	1 dokumen	5,905,000	APBD		1 dokumen	5,905,000
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kapanewon Tanjungsari	1 dokumen	5,143,000	APBD		1 dokumen	5,000,000
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kapanewon Tanjungsari	3 dokumen	1,555,000	APBD		3 dokumen	2,300,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100,000,000				100,000,000
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100,000,000				100,000,000

2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan		100 persen	100,000,000			100 persen	100,000,000
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan			100,000,000			1 Laporan	100,000,000
2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Kapanewon Tanjungsari	1 Laporan	100,000,000	DAIS		1 Laporan	100,000,000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				40,000,000				30,000,000
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				40,000,000				30,000,000
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelengaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan		100 persen	40,000,000			100 persen	30,000,000
4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			40,000,000				30,000,000
4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Kapanewon Tanjungsari	3 Dokumen	40,000,000	DAIS		3 Dokumen	30,000,000

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan PD satu tahun kedepan, oleh karena itu Penyempurnaan Renja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2026 disusun menurut Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Tanjungsari.

Renja Kapanewon Tanjungsari disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Renstra Kapanewon Tanjungsari Tahun 2025 – 2029. Renstra tersebut merupakan acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari Tahun 2026 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kapanewon.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan dalam proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders),* tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan

program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Kapanewon Tanjungsari sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap keberhasilan suatu program. Demikian Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun.

Wonosari,

KAPANEWON TANJUNGSARI,

ttd

SUBIYANTORO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH